PELINDO MULTI TERMINAL



Metamorphosis of Value: From **Operational Consolidation** to **Sustainable Growth Acceleration**

Metamorfosis Nilai: Dari Konsolidasi Operasional menuju Percepatan Pertumbuhan Berkelanjutan

PELINDO
MULTI TERMINAL



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan, hasil operasional, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Pelindo Multi Terminal, yang selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan" atau "PMT". Informasi tersebut mencakup pernyataan-pernyataan yang bersifat prospektif, yang bukan merupakan fakta historis dan disusun berdasarkan asumsi-asumsi terkini mengenai kondisi internal Perusahaan maupun lingkungan bisnis tempat Perusahaan beroperasi. Pernyataan-pernyataan ini disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Perusahaan telah menyusun dokumen ini dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan data yang diyakini akurat, Perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa seluruh pernyataan prospektif akan terbukti secara aktual di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor risiko dan ketidakpastian yang berada di luar kendali Perusahaan, yang dapat memengaruhi pencapaian kinerja sebagaimana direncanakan.

Dalam Laporan Tahunan ini, istilah "PMT" atau "Perusahaan" merujuk secara eksklusif kepada PT Pelindo Multi Terminal. Semua informasi keuangan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca, serta dicetak dengan kualitas yang baik untuk memastikan keterbacaan yang optimal.

This Annual Report contains information regarding the financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PT Pelindo Multi Terminal, hereinafter referred to as the "Company" or "PMT". Such information includes forward-looking statements, which are not historical facts and are prepared based on current assumptions regarding the Company's internal conditions as well as the business environment in which the Company operates. These statements are prepared in accordance with the prevailing laws and regulations.

Although the Company has prepared this document with due care and based on data believed to be accurate, the Company does not guarantee that all forward-looking statements will be realized in the future. This is due to the existence of risk factors and uncertainties beyond the Company's control, which may affect the achievement of performance as planned.

In this Annual Report, the terms "PMT" or the "Company" refer exclusively to PT Pelindo Multi Terminal. All financial information is presented in Indonesian Rupiah (Rp), the official currency of the Republic of Indonesia, and has been prepared in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English, using a readable font type and size, and is printed in high quality to ensure optimal readability.

Laporan Tahunan ini juga tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perusahaan di https://pelindomultiterminal.co.id/pages/annualrep.
this Annual Report is also available and can be accessed through the Company's official website at https://pelindomultiterminal.co.id/pages/annualrep.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan 2025 PMT, silahkan menghubungi:
For further information regarding the 2025 PMT Annual Report, please contact:

PT Pelindo Multi Terminal (PMT)

Grha Pelindo Gedung A
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1
Belawan, Medan 20411, Indonesia
Tel. (061) 41000055
Email : plmt@pelindomultiterminal.co.id
multi.terminal@pelindo.co.id

Tema Laporan Tahunan 2025
2025 Annual Report Theme

Metamorphosis of Value: From Operational Consolidation to Sustainable Growth Acceleration

Metamorfosis Nilai: Dari Konsolidasi Operasional menuju Percepatan Pertumbuhan Berkelanjutan



Tahun 2025 menjadi tonggak awal transformasi PMT dalam membangun fondasi yang lebih kokoh menuju pertumbuhan berkelanjutan. Berlandaskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025–2029, arahan strategis Pelindo sebagai *holding*, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, PMT mengawali fase metamorfosis nilai melalui penguatan konsolidasi operasional di seluruh lini bisnis nonpetikemas. Langkah ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk tidak hanya meningkatkan kinerja jangka pendek, tetapi juga membangun organisasi yang semakin adaptif, terintegrasi, dan siap menghadapi dinamika industri kepelabuhanan di masa depan.

Sepanjang tahun pelaporan, PMT memfokuskan upaya pada pembenahan fundamental bisnis sebagai landasan percepatan pertumbuhan. Berbagai inisiatif strategis dijalankan secara terpadu, mulai dari peningkatan cakupan dan kualitas layanan nonpetikemas, penataan struktur korporasi PMT Grup, hingga penyempurnaan model dan skema kerja sama bisnis yang lebih kompetitif. Di saat yang sama, PMT juga memperluas penetrasi pada *captive market* untuk memperkuat posisi pasar sekaligus mengoptimalkan potensi bisnis yang berkelanjutan.

Transformasi tersebut diperkuat melalui standardisasi proses operasional, integrasi data dan sistem informasi, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia sebagai pilar utama peningkatan daya saing. Perusahaan meyakini bahwa harmonisasi proses bisnis, didukung tata kelola yang semakin baik dan pemanfaatan teknologi, akan menghasilkan operasi yang lebih efisien, andal, dan mampu memberikan pengalaman layanan yang konsisten bagi seluruh pelanggan. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan organisasi yang lebih *agile* serta responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang berkembang, PMT menetapkan arah strategi yang tidak semata berorientasi pada pencapaian target keuangan dan operasional, tetapi juga pada penguatan ketahanan model bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta implementasi tata kelola perusahaan yang unggul. Melalui proses metamorfosis yang dimulai dari konsolidasi operasional hingga percepatan pertumbuhan, Perusahaan berkomitmen untuk terus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat perannya sebagai penyedia layanan terminal nonpetikemas yang terdepan di Indonesia.

The year 2025 is the initial milestone of PMT's transformation in building a stronger foundation toward sustainable growth. Guided by the 2025–2029 Company's Long-Term Plan (RJPP), Pelindo's strategic direction as the holding company, and the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP), PMT commenced its value metamorphosis phase by strengthening operational consolidation across all non-container lines of business. This step reflects the Company's commitment not only to improving short-term performance but also to building an organization that is increasingly adaptive, integrated, and prepared to face the dynamics of port industry in the future.

Throughout the reporting year, the Company focused its efforts on improving business fundamentals as the basis for accelerating growth. A variety of strategic initiatives were implemented in an integrated manner, ranging from expanding the coverage and quality of non-container services, restructuring the corporate structure of PMT Group, to refining more competitive business models and cooperation schemes. At the same time, PMT also expanded its penetration into the captive market to strengthen its market position while optimizing sustainable business potential.

The transformation was further reinforced through the standardization of operational processes, integration of data and information systems, and development of human capital capabilities as the main pillars of enhancing competitiveness. The Company believes that the harmonization of business processes, supported by improved governance and utilization of technology, will result in operations that are more efficient, reliable, and capable of delivering a consistent service experience for all customers. These efforts constitute an important foundation for creating a more agile organization that is responsive to changing market needs.

Taking into account the various evolving challenges and opportunities, PMT has established a strategic direction that is not solely oriented toward achieving financial and operational targets, but also toward strengthening the resilience of its business model, improving service quality, and implementing excellent corporate governance. Through the metamorphosis process, which begins with operational consolidation and progresses toward growth acceleration, the Company is committed to continuously creating long-term value for shareholders, customers, business partners, and all stakeholders, while strengthening its role as Indonesia's leading non-container terminal service provider.

Kesinambungan Tema
Continuity of Theme



2024

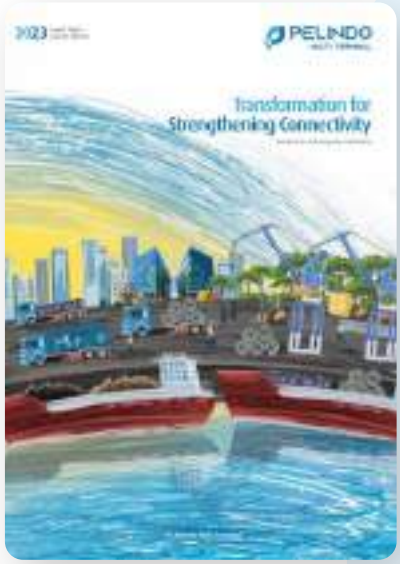
Enhancing Port Integration and Expansion
Meningkatkan Integrasi dan Ekspansi Pelabuhan

Sebagai Anak Usaha pengelola terminal nonpetikemas di lingkungan Pelindo Grup, PMT menjalankan peran strategis dalam memperkuat konektivitas logistik nasional melalui pendekatan integratif dan ekspansif. Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Perusahaan dalam melanjutkan agenda integrasi layanan pelabuhan dan memperluas cakupan operasional ke wilayah strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021–2025.

Dalam aspek integrasi, PMT terus mendorong standardisasi dan sistemisasi proses bisnis di seluruh terminal multipurpose yang dikelola. Melalui penerapan platform digital dan konsolidasi sistem operasi, Perusahaan memperkuat efisiensi dan konsistensi layanan, sehingga memungkinkan operasional pelabuhan yang terkoordinasi dan transparan. Langkah ini diperkuat dengan pengembangan *Single Terminal Operating System* (*Single* TOS) dan integrasi manajemen pelanggan secara terpusat, sejalan dengan pilar strategis standardisasi operasional dan peningkatan komersial yang diusung perusahaan.

As the non-container terminal subsidiary under Pelindo Group, PMT plays a strategic role in strengthening national logistics connectivity through an integrative and expansive approach. The year 2024 is an important momentum for the Company in continuing the port integration agenda while expanding operational coverage across key regions, as outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2021–2025.

in terms of integration, PMT continued to advance the standardization and systemization of business processes across all managed multipurpose terminals. By implementing digital platforms and consolidating operational systems, the Company enhanced service efficiency and consistency, enabling coordinated and transparent terminal operations. This effort is reinforced through the development of a Single Terminal Operating System (Single TOS) and centralized customer relationship management, in line with the Company's strategic pillar on operational standardization and commercial optimization.



2023

Transformation for Strengthening Connectivity
Transformasi untuk Penguatan Konektivitas

Tema ini sejalan dengan PT Pelindo Multi Terminal (PMT) yang terus melakukan transformasi pelayanan terminal multipurpose di Indonesia. Transformasi yang dilakukan ini merupakan Langkah upaya PMT dalam mengoptimalkan operasional, memperluas ekspansi bisnis, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi yang terbaik bagi Indonesia. Saat ini, PMT telah mengelola 32 Branch Pelabuhan yang sebagian dikelola oleh Anak Perusahaan, yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT), Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), dan PT Terminal Curah Utama (TCU). Dengan semakin luasnya konektivitas yang berhasil dibangun oleh PMT, akan membawa dampak yang positif bagi kemajuan Perusahaan.

This theme aligns with PT Pelindo Multi Terminal (PMT)'s ongoing transformation of multipurpose terminal services in Indonesia. This transformation is part of PMT's efforts to optimize operations, expand business expansion, and improve the quality of its Human Capital (HC) to become the best for Indonesia. Currently, PMT manages 32 port branches, some of which are managed by its subsidiaries, namely PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT), Tanjung Priok Port (PTP), and PT Terminal Curah Utama (TCU). The expanded connectivity successfully built by PMT will have a positive impact on the Company's progress.



2022

Business Optimization for Growth and Thriving
Optimalisasi Bisnis untuk Tumbuh dan Berkembang

Tema "Optimalisasi Bisnis untuk Tumbuh dan Berkembang" menjadi bagian penting dari fondasi pembentukan Perusahaan yang resmi berdiri pada 29 September 2021. Berdirinya PMT sebagai Anak Usaha Pelindo bidang pelayanan jasa terminal nonpetikemas. diharapkan mampu menjadi solusi utama layanan terminal *multipurpose* dan kargo di Indonesia, khususnya dalam mendukung suksesnya program Pemerintah Indonesia dalam percepatan pembangunan nasional dan mendukung kebijakan Pemerintah untuk memperkuat konektivitas nasional dan menciptakan biaya logistik nasional secara efisien dan efektif serta meningkatkan daya saing nasional.

The theme "Business Optimization for Growth and Thriving" is a key foundation for the Company's formation, which was officially established on September 29, 2021. PMT, as a subsidiary of Pelindo in the non-container terminal services sector, is expected to become the primary solution for multipurpose and cargo terminal services in Indonesia, particularly in supporting the success of the Indonesian Government's program to accelerate national development and support government policies to strengthen national connectivity, create efficient and effective national logistics costs, and enhance national competitiveness.

Daftar Isi
Table of Contents

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability	3
Tema Laporan Tahunan 2025 2025 Annual Report Theme	4
Kesinambungan Tema Continuity of Theme	6
Daftar Isi Table of Contents	8
Komitmen Keberlanjutan PMT PMT'S Sustainability Commitment	10
Pencapaian Tahun 2025 2025 Achievements	10
Penguatan Penerapan Tata Kelola dan Keberlanjutan Strengthening Corporate Governance and Sustainability Implementation	12
Strategi Pencapaian Target Target Achievement Strategy	16



01 Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights	20
Ikhtisar Operasi Operational Highlights	27
Ikhtisar Saham Share Highlights	28
Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Lainnya Information on Bonds, Sukuk, and/or Other Convertible Bonds	29
Kilas Peristiwa Penting 2025 Highlights of Significant Events in 2025	30



02 Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	42
Laporan Direksi Board of Directors' Report	54
Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025 Statement of Responsibility by The Board of Commissioners Regarding the 2025 Annual Report of PT Pelindo Multi Terminal	78
Pernyataan Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025 Statement of Responsibility by the Board of Directors Regarding the 2025 Annual Report of PT Pelindo Multi Terminal	70



03 Profil Perusahaan
Company Profile

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Company Identity	82
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	86
Jejak Langkah Milestones	88
Logo Perusahaan Company's Logo	90
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Values	91
Kegiatan Usaha Business Activities	102
Wilayah Operasional Operational Area	108
Keanggotaan dalam Asosiasi Association Membership	111
Struktur Organisasi Organizational Structure	112
Profil Direksi Board of Directors Profile	115
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	122
Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang terjadi Setelah Tahun Buku Berakhir Changes in the Composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners That Occurred After The end of The Fiscal Year	130
Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profile	131
Demografi Karyawan Employee Demographics	144
Komposisi Pemegang Saham Perusahaan The Company's Shareholders Composition	146
Komposisi Kepemilikan Langsung Maupun Tidak Langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas Saham Perusahaan Direct or Indirect Ownership of The Company's Shares by Board of Directors and Board of Commissioners	147
Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi Number of Shareholders and Ownership Percentage by Classification	148
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Sampai kepada Entitas Pemilik Akhir Information on Major and Controlling Shareholders up to Ultimate Owner Entity	149
Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama List of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures	151
Struktur Grup Perusahaan Group Structure	154
Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of The Issuance and/or Listing of Shares	155
Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Chronology of The Issuance of Other Securities	155
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant And Public Accounting Firm	155
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professionals	156
Penghargaan dan/atau Sertifikasi Awards and/or Certifications	157
Informasi *Website* Perusahaan Information on Corporate Website	164



04 Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management and Discussion Analysis

Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industry Overview	168
Strategi dan Inisiatif Strategis Tahun 2025 Strategies and Strategic Initiatives in 2025	170
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Overview by Business Segment	173
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	184
Tinjauan Keuangan Financial Overview	186
Kemampuan Perusahaan dalam Melaksanakan Operasi yang Efektif dan Efisiensi serta Menghasilkan Laba atau Keuntungan The Company's Ability to Conduct Effective and Efficient Operations and Generate Profit	206
Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debts	209

Tingkat Kolektibilitas Piutang 211
Receivables Collectability Rate

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal serta Dasar Penentuan Kebijakan 213
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure, including the Basis for Determining the Policy

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal 214
Material Commitments for Capital Investments

Realisasi Investasi Barang Modal 214
Realization of Capital Investments

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Kinerja Perusahaan 219
Impact of Price Changes on the Company's Revenue and Performance

Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing 219
Information on the Impact of Foreign Exchange Rates

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan 220
Information and Material Facts Occurring After the Date of The Auditor's Report

Perbandingan Antara Target/Proyeksi pada Awal Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi) 221
Comparison Between Targets/Projections at the Beginning of the Fiscal Year and Actual Results

Prospek Usaha 232
Business Outlook

Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2026 234
The Company's Performance Projection for 2026

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya 239
Dividend Policy and Distribution

Tata Kelola Pajak 240
Tax Governance

Informasi tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 241
Information on the Use of Proceeds from Public Offerings

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang Terjadi pada Tahun Buku 242
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Party Transactions, and Conflict of Interest Transactions That Occurred During The Fiscal Year

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi 245
Transactions with Affiliated/Related Parties

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi 249
Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Events

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan 249
Changes in Laws and Regulations That Have a Significant Impact on the Company

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan 250
Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

Tingkat Kesehatan Perusahaan 250
The Company's Soundness Level

Rencana Jangka Panjang Perusahaan 252
Long-Term Corporate Plan



05 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance

Pencapaian Terbaik Penerapan Prinsip-Prinsip Governansi Korporat 258
Best Achievements in the Implementation of Corporate Governance Principles

Pernyataan Penerapan Governansi Korporat Secara Konsisten dan Komprehensif 259
Statement on Consistent and Comprehensive Implementation of Corporate Governance

Struktur Governansi Korporat Perusahaan 275
Corporate Governance Structure

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 282
General Meeting of Shareholders (GMS)

Dewan Komisaris 327
Board of Commissioners

Direksi 352
Board of Directors

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi 393
Information Transparency on Board of Commissioners and Board of Directors

Organ Pendukung Dewan Komisaris 438
Supporting Organs of Board of Commissioners

Komite Audit 440
Audit Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi 458
Nominasi dan Remunerasi

Komite Pemantau Risiko 469
Risk Monitoring Committee

Sekretaris Dewan Komisaris 480
Secretary of Board of Commissioners

Organ Pendukung Direksi 482
Secretary of Board of Commissioners

Komite di Bawah Direksi 505
Committees under the Board of Director

Auditor Eksternal 516
External Auditor

Sistem Pengendalian Internal 520
Internal Control System

Manajemen Risiko 532
Risk Management

Perkara Hukum 559
Legal Proceedings

Tata Kelola Teknologi Informasi 562
Information Technology Governance

Kode Etik 568
Code of Conduct

Pengendalian Gratifikasi 573
Gratification Control

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik 575
Information on Political Contributions

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* 576
Trading Insider Trading Prevention Policy

Kebijakan Anti Korupsi 577
Anti-Corruption Policy

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 579
State Officials' Asset Report (LHKPN)

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 581
Procurement Policy

Whistleblowing System 582

Transparansi Praktik *Bad Governance* 592
Transparency of Bad Governance Practices

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 595
Implementation of the Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI)



06 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Governance

Kilas Kinerja ESG 680
ESG Performance Highlights



07 Laporan Keuangan
Financial Report

Laporan Keuangan 686
Financial Report

Komitmen Keberlanjutan PMT
PMT'S Sustainability Commitment

PMT memandang bahwa keberlanjutan merupakan fondasi dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya kuat dan kerja keras PMT tidak berhenti pada pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) semata, melainkan diwujudkan melalui pendekatan yang menyeluruh terhadap aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam strategi dan operasional bisnis perusahaan. PMT secara bertahap mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan, pengelolaan terminal, digitalisasi operasional, hingga pengembangan sumber daya manusia.

- Di bidang lingkungan, Perusahaan mendorong efisiensi energi, pengelolaan limbah ramah lingkungan, serta inisiatif dekarbonisasi sesuai target Pelindo Grup.
- Pada aspek sosial, PMT aktif membangun hubungan yang inklusif dengan masyarakat melalui program-program TJSL yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
- Di sisi tata kelola, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengendalian internal terus diperkuat untuk memastikan keberlangsungan dan integritas operasional perusahaan.

PMT views sustainability as the foundation for creating long-term value for the Company and all stakeholders. PMT's strong commitment and hard work do not cease at implementing Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) programs alone, but are realized through a comprehensive approach to Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in the Company's business strategy and operations. PMT gradually integrates sustainability principles into all business processes, from planning, terminal management, and operational digitalization to human resource development.

- In the environmental aspect, the Company promotes energy efficiency, environmentally friendly waste management, and decarbonization initiatives in line with Pelindo Group's targets.
- In the social aspect, PMT actively builds inclusive relationships with communities through sustainable CSR programs that deliver tangible impacts.
- In the governance aspect, the implementation of the principles of transparency, accountability, and the strengthening of internal controls continues to be reinforced to ensure the sustainability and integrity of the Company's operations.

Pencapaian Tahun 2025
2025 Achievements

Kinerja Keuangan | Financial Performance

Pendapatan Operasi
Operating Revenue

Pendapatan operasi yang berhasil dibukukan di tahun 2025 tercatat sebesar:
Managed to record pperating revenues in 2025 amounted to:

Rp5,67
triliun/trillion

Total Aset
Total Assets

Per 31 Desember 2025, jumlah aset tercatat sebesar:
As of December 31, 2025, total assets were recorded at:

Rp4,45
triliun/trillion

Total Ekuitas
Total Equity

Total Ekuitas di tahun 2025 tercatat sebesar:
Total Equity in 2025 was recorded at:

Rp2,26
triliun/trillion

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Di tahun 2025, Laba Tahun Berjalan yang berhasil dibukukan sebesar:
In 2025, successfully recorded Profit for the Year at:

Rp525,74
miliar/billion

Mandat Anak Usaha & Peran Nasional
Subsidiary Mandate and National Role

- PMT didirikan pada 29 September 2021 sebagai Anak Usaha Pelindo terminal non-petikemas, mengelola lebih dari 30 terminal di seluruh Indonesia.
- Berperan sebagai orkestrator layanan terminal *multipurpose* yang menyatukan keunggulan layanan dan ketangguhan operasional.
- PMT was established on September 29, 2021, as a Subsidiary of Pelindo's non-container terminals, managing more than 30 terminals throughout Indonesia.
- Assume the role as a multipurpose terminal service orchestrator, combining service excellence and operational resilience.

Arah Transformasi Jangka Panjang (RJPP)
Long-Term Transformation Direction (RJPP)

- Memiliki *roadmap* transformasi 2025–2029, dengan fokus utama pada pembenahan bisnis internal, peningkatan cakupan dan kualitas layanan nonpetikemas, penataan struktur korporasi PMT Grup, pembaruan model dan kesepakatan bisnis, perluasan pangsa pasar pada *captive market*, standardisasi operasional, penguatan integrasi data, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.
- RJPP menjadi panduan strategis menuju model layanan yang terstandar, efisien, terkoneksi, dan berorientasi masa depan.
- Has the 2025–2029 transformation roadmap, with a primary focus on internal business improvements, increasing the scope and quality of non-container services, restructuring the corporate structure of PMT Group, updating business models and agreements, expanding market share in captive markets, standardizing operations, strengthening data integration, and enhancing human capital capabilities.
- The RJPP serves as a strategic guide towards a standardized, efficient, connected, and future-oriented service model.

Investasi dan Pengembangan Usaha
Investment and Business Development

- Investasi sebesar Rp303.393 juta direalisasikan untuk penguatan peralatan, digitalisasi sistem, dan optimalisasi terminal.
- Penjajakan ekspansi layanan di wilayah timur (Makassar, Kalimantan Timur) dan diversifikasi seperti *livestock* dan TUKS.
- An investment of Rp303,393 million was realized for equipment strengthening, system digitalization, and terminal optimization.
- Exploring service expansion in the eastern region (Makassar, East Kalimantan) and diversification such as livestock and TUKS.

Kontribusi terhadap Negara & *Stakeholder*
Contribution to the State and Stakeholders

- Memberikan kontribusi sebesar Rp499.709 juta kepada negara dalam bentuk pajak dan kewajiban lainnya.
- Capaian KPI strategis 100,07%, mencerminkan ketepatan eksekusi dan akuntabilitas korporat.
- Contributing Rp499,709 million to the state in the form of taxes and other obligations.
- Strategic KPI achievement of 100.07%, reflecting the accuracy of execution and corporate accountability.

Digitalisasi Proses dan Sistem
Digitalization of Processes and Systems

- *Implementasi Single* Terminal *Operating System* (TOS), *Billing System*, dan CRM di berbagai cabang terminal.
- Digitalisasi memperkuat efisiensi layanan, transparansi pelaporan, dan kepuasan pelanggan.
- Implementation of a Single Terminal Operating System (TOS), Billing System, and CRM at various terminal branches.
- Digitalization strengthens service efficiency, reporting transparency and customer satisfaction.

Integrasi Governansi: ETAK & ESG
Governance Integration: ETAK & ESG

- Tata kelola berbasis prinsip ETAK (Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan).
- Sistem *whistleblowing* yang aktif, pelatihan etika karyawan, dan program CSR berdampak di bidang sosial dan lingkungan.
- Komitmen pada *Roadmap* ESG Pelindo 2025–2029 untuk bisnis berkelanjutan.
- Governance based on the ETAK (Ethical Behavior, Transparency, Accountability, Sustainability) principles.
- An active whistleblowing system, employee ethics training, and CSR programs with social and environmental impact.
- Commitment to Pelindo's 2025–2029 ESG Roadmap for sustainable business.

***Assessment* GCG berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun buku 2024**
GCG assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard in year book 2024

Self Assessment

96,47
Skor/Score

Penguatan Penerapan Tata Kelola dan Keberlanjutan

Strengthening Corporate Governance and Sustainability Implementation

Sepanjang tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal memfokuskan berbagai inisiatif pada penguatan tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi peningkatan kualitas pengelolaan Perusahaan. Upaya tersebut diiringi dengan penguatan budaya integritas, kepatuhan, dan keberlanjutan untuk mendukung kinerja yang tangguh, transparan, dan akuntabel.

Throughout 2025, PT Pelindo Multi Terminal focused a number of initiatives on strengthening the implementation of good corporate governance as the foundation for enhancing the quality of the Company's management. These efforts were accompanied by the reinforcement of a culture of integrity, compliance, and sustainability to support resilient, transparent, and accountable performance.

PROGRAM PENGUATAN PERANGKAT GCG

CORPORATE GOVERNANCE CAPACITY-BUILDING PROGRAM

Whistleblowing System

3 Sosialisasi *Whistleblowing System* pada Tahun 2025 yaitu:
Three Whistleblowing System socialization events in 2025 are:

Idul Fitri 1446H
Eid al-Fitr 1446 H



Jenis-jenis Pelaporan *Whistleblowing System*
Types of Whistleblowing System Reports



Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Christmas 2025 and New Year 2026



Terdapat 1 (satu) laporan/pengaduan yang disampaikan melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti secara tuntas oleh Tim Whistleblowing System tanggal 27 Juli 2025.
There was 1 (one) report/complaint submitted through the Whistleblowing System (WBS) channel within PT Pelindo Multi Terminal. The report was fully investigated and resolved by the Whistleblowing System Team on July 27, 2025.

Anti Suap, Pungli dan Gratifikasi | Anti-Bribery, Extortion, and Gratification

3 Sosialisasi *Whistleblowing System* pada Tahun 2025 yaitu:
Anti-Bribery, Extortion, and Gratification Control Program:

Webinar, 10 Sept 2025
Webinar, September 10, 2025



5 *Flyer* kampanye Anti Suap, Pungli, dan Gratifikasi
5 Anti-Bribery, Extortion, and Gratuity Campaign Flyers



2 Publikasi Video (Godaan Gratifikasi dan Larangan Penerimaan Suap, Pungli dan Gratifikasi)
2 Video Publications (The Temptation of Gratuities and the Prohibition of Accepting Bribery, Extortion, and Gratuities)



Pemasangan Spanduk, Poster, dan Banner Anti Suap, Pungli, dan Gratifikasi di Kantor Pusat dan *Branch*
Installation of Anti-Bribery, Extortion, and Gratuity Banners, Posters, and Banners at Head Offices and Branches



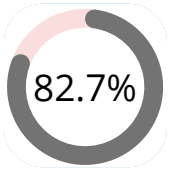
Tidak terdapat (NIHIL) laporan penerimaan, pemberian suap serta gratifikasi di Wilayah PT Pelindo Multi Terminal Grup sepanjang Tahun 2025
There were no (NIL) reports of bribery or gratification receipt or giving within PT Pelindo Multi Terminal Group throughout 2025.

Survei GCG dan SMAP
GCG and SMAP Survey

Survei dilaksanakan tanggal
16 s.d 19 Sept 2025
Responden:
Internal : 683 (82,7%)
Eksternal: 143 (17,3%)

Survey was conducted from
September 16 to 19, 2025
Respondents:
Internal: 683 (82.7%)
External: 143 (17.3%)





GCG

Flyer tentang "*Apa itu Good Corporate Governance*"
Flyer on "What is Good Corporate Governance"



ANTI FRAUD

Flyer tentang "*Kenali Fraud, Musuh Besar Interitas*"
Flyer on "Recognizing Fraud, the Greatest Enemy of Integrity"



Sosialisasi *Anti Fraud*
Anti-Fraud Socialization



SMAP

Lomba: Pemanfaatan Teknologi AI dalam Penerapan GCG
Competition: Utilizing AI Technology in GCG Implementation



Flyer tentang "Penerapan Budaya 5 No's"
Flyer on "Implementing the 5 Nos Culture"



Banturan Kepentingan
Conflict of Interest

Flyer tentang "*Benturan Kepentingan*"
Flyer on "Conflict of Interest"



Hakordia

Kuis Tebak Gambar Hakordia
HAKORDIA Picture Guessing Quiz



Flyer Hakordia "*Satu Aksi Basmi Korupsi*"
HAKORDIA Flyer: "One Action to Eradicate Corruption"



Duta Anti-Penyuapan
Anti-Bribery Ambassadors

Duta Anti Penyuapan adalah role model sekaligus agen perubahan dalam menularkan semangat anti penyuapan
Anti-Bribery Ambassadors are role models and agents of change in spreading the spirit of anti-bribery.



MATCHA - Time



MATCHA – *Meet and Talk Compliance, Honesty, Awareness* adalah program informal dimana tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan GCG secara rutin berinteraksi dengan karyawan di area santai
MATCHA - Meet and Talk Compliance, Honesty, Awareness is an informal program where the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and GCG teams regularly interact with employees in a casual area.

PROGRAM KINERJA BERKELANJUTAN BERBASIS ESG

ESG-BASED SUSTAINABLE PERFORMANCE PROGRAM

Sosialisasi
Socialization

Sosialisasi Pengisian Kertas Kerja Kinerja Berkelanjutan
Tanggal : 8 Agustus 2025
Metode : *Online*
Socialization of Sustainability Performance Working Paper Completion
Date : August 8, 2025
Method : Online Training



Pelatihan
Training

Pelatihan Penggunaan *Platform* Pelaporan Kinerja Keberlanjutan *Sustainability Data Management System* (SDMS) di 4 Wilayah
Use of the Sustainability Data Management System (SDMS) Sustainability Performance Reporting Platform in 4 Regions



Monitoring

Monitoring Pengisian Kertas Kerja Kinerja Berkelanjutan Link Pengisian : https://tinyurl.com/KinerjaBerkelanjutan2025
Monitoring of Sustainability Performance Working Paper Completion Link: https://tinyurl.com/KinerjaBerkelanjutan2025



Pelaporan
Reporting

Pelaporan Kertas Kerja Kinerja Berkelanjutan setiap tanggal 6 Bulan Berjalan
Sustainability Performance Working Paper Reporting every 6th of the Month



Forum ESG
ESG Forum

Workshop ESG X Senior Leader Forum
Tanggal: 5 s.d 6 Agustus 2025 di Ruang Selat Malaka Medan
ESG Workshop X Senior Leader Forum
Date: August 5-6, 2025, in the Malacca Strait Room Medan



Strategi Pencapaian Target
Target Achievement Strategy

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RJPP 2025–2029 dan menjadi fase awal yang penting bagi PMT dalam memperkuat fondasi bisnis nonpetikemas. Pada fase "*Enhancing Internal Business and Service Excellence*", fokus utama Perusahaan diarahkan pada pembenahan bisnis internal, peningkatan cakupan dan kualitas layanan nonpetikemas, penataan struktur korporasi PMT Grup, pembaruan model dan kesepakatan bisnis, perluasan pangsa pasar pada *captive market*, standardisasi operasional, penguatan integrasi data, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

Strategi pencapaian target PMT ditopang oleh kerangka *House of Strategy* yang menjadi landasan untuk memastikan keselarasan antara prioritas bisnis Perusahaan, kebutuhan pelanggan, dinamika industri kepelabuhanan, serta arah transformasi Pelindo Grup. Kerangka ini terdiri atas satu pilar korporasi dan tiga pilar strategis utama yang saling terintegrasi, yaitu:

The year 2025 marks the first year of the implementation of the 2025–2029 RJPP and serves as an important initial phase for PMT in strengthening the foundation of its non-container business. Under the "Enhancing Internal Business and Service Excellence" phase, the Company's primary focus is directed toward improving internal business, enhancing the coverage and quality of non-container services, restructuring the corporate structure of PMT Group, updating business models and agreements, expanding market share in the captive market, standardizing operations, strengthening data integration, and enhancing human capital capabilities.

PMT's target achievement strategy is supported by the House of Strategy framework, which serves as the foundation for ensuring alignment between the Company's business priorities, customer needs, the dynamics of the port industry, and the transformation direction of Pelindo Group. This framework consists of one corporate pillar and three main strategic pillars that are mutually integrated, namely:

Pilar Korporasi: Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis yang Fokus serta Efisien

Pilar ini diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan PMT Grup, menata model bisnis, mengoptimalkan hubungan bisnis antara induk dan anak perusahaan, serta memastikan kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi dan struktur industri kepelabuhanan. Dalam konteks ini, PMT juga mencermati perkembangan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran agar posisi bisnis, skema operasi, dan keberlanjutan layanan Perusahaan tetap terjaga.

Corporate Pillar: Focused and Efficient Corporate and Business Structure

This pillar is aimed at strengthening the institutional foundation of PMT Group, organizing business models, optimizing business relationships between the parent company and its subsidiaries, and ensuring the Company's readiness to respond to changes in regulations and the structure of the port industry. In this context, PMT also monitors the development of the Revision of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping to ensure that the Company's business position, operating scheme, and service sustainability remain safeguarded.

Pilar Strategis 1: *Services, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio*

Pilar ini difokuskan pada pengembangan portofolio bisnis berbasis layanan, kargo, komoditas, kemasan, serta kawasan industri. Kebijakan strategis yang dijalankan mencakup:

- Pengembangan perencanaan portofolio bisnis pada setiap cabang;
- Pengembangan terminal berbasis layanan, komoditas, kemasan, dan/atau kawasan industri;
- Pengembangan layanan kepelabuhanan untuk mendukung program prioritas pemerintah; dan
- Pengembangan layanan pelabuhan untuk mendukung kebutuhan logistik Ibu Kota Nusantara (IKN).

Strategic Pillar 1: Services, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio

This pillar focuses on developing a business portfolio based on services, cargo, commodities, packaging, and industrial areas. The strategic policies implemented include:

- Development of business portfolio planning at each branch;
- Development of terminals based on services, commodities, packaging, and/or industrial areas;
- Development of port services to support government priority programs; and
- Development of port services to support the logistics needs of the Nusantara Capital City (IKN).

Dengan pendekatan tersebut, PMT berupaya memperkuat posisi sebagai operator terminal multipurpose yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan rantai pasok nasional.

Through this approach, PMT seeks to strengthen its position as a multipurpose terminal operator that is adaptive to market needs and the development of national supply chain.

Pilar Strategis 2: *Business Partnership and Synergy*

Pilar ini diarahkan pada penguatan kemitraan bisnis, sinergi lintas entitas, dan perluasan layanan di dalam maupun di luar lingkungan Pelindo Grup. Kebijakan strategis yang dijalankan mencakup:

- Perubahan status menjadi dedicated terminal atau terminalisasi;
- Pengembangan layanan operasi di luar area Pelindo Grup;
- Pengembangan layanan bongkar muat *Ship to Ship* (STS); dan
- Pelaksanaan joint *marketing* layanan kepelabuhanan.

Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pertumbuhan, meningkatkan utilisasi aset, serta memperkuat konektivitas layanan PMT dalam ekosistem logistik nasional.

Strategic Pillar 2: Business Partnership and Synergy

This pillar is directed toward strengthening business partnerships, synergy across entities, and expanding services both within and outside Pelindo Group environment. The strategic policies implemented include:

- Altering status to dedicated terminals or terminalization;
- Developing operational services outside the Pelindo Group area;
- Developing Ship-to-Ship (STS) cargo handling services; and
- Conducting joint marketing for port services.

These policies constitute an important part of expanding growth sources, increasing asset utilization, and strengthening the connectivity of PMT's services within the national logistics ecosystem.

Pilar Strategis 3: *Operational and Commercial Excellence*

Pilar ini diarahkan pada standardisasi, sistemisasi, dan integrasi operasional nonpetikemas di seluruh wilayah operasi. Kebijakan strategis yang dijalankan mencakup:

- Standardisasi, sistemisasi, dan integrasi operasional nonpetikemas;
- Pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan;
- Optimalisasi aset;
- Implementasi ESG dengan Pengembangan *Sustainable Ports*;
- Standardisasi *Customer Relationship Management* (CRM) dan penerapan *Key Account Management* (KAM);
- Peningkatan *corporate branding* dan *marketing communication*; dan
- Optimalisasi skema komersial dengan mitra dan pelanggan.

Pilar ini menjadi dasar bagi PMT untuk meningkatkan konsistensi mutu layanan, memperkuat produktivitas, mempercepat proses bisnis, dan membangun pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Strategic Pillar 3: Operational and Commercial Excellence

This pillar is directed toward the standardization, systemization, and integration of non-container operations across all operational areas. The strategic policies implemented include:

- Standardization, systemization, and integration of non-container operations;
- Development of port infrastructure and equipment;
- Asset optimization;
- ESG Implementation through Sustainable Port Development;
- Standardization of Customer Relationship Management (CRM) and implementation of Key Account Management (KAM);
- Enhancement of corporate branding and marketing communication; and
- Optimization of commercial schemes with partners and customers.

This pillar serves as the foundation for PMT to improve service quality consistency, strengthen productivity, accelerate business processes, and build a better customer experience.

PELINDO
MULTI TERMINAL

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights



PMT menunjukkan ketangguhan operasional dengan pendapatan operasi Rp5,67 triliun atau tumbuh 6,93% meski di tengah tantangan. Inovasi digital dan peningkatan kualitas layanan terminal *multipurpose* memperkokoh posisi PMT sebagai salah satu motor penggerak konektivitas logistik nasional.
PMT demonstrated operational resilience with operating revenue of Rp5.67 trillion, representing 6.93% growth despite the challenges. Digital innovation and improvements in the quality of multipurpose terminal services have strengthened PMT's position as one of the driving forces behind national logistics connectivity.


01

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights



LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME(

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	**2025**	**2024**	**2023**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease) **2024-2025 (%)**	
Pendapatan Operasi Operating Revenues					
Pendapatan Terminal Non-Petikemas Non-Container Terminal Services	**4.395.601**	4.287.037	4.260.977	2,53%	↑
Pendapatan Pengusahaan Alat Equipment Services	**566.504**	347.645	286.216	62,95%	↑
Kerja Sama dan *Fee for Services* Cooperation and Fee for Services	**247.769**	246.045	159.482	0,70%	↑
Pendapatan Terminal Petikemas Container Terminal Services	**268.516**	256.891	148.047	4,53%	↑
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik Land, Building, Water and Electricity Services	**48.860**	55.608	92.372	-12,14%	↓
Pendapatan Pas Pelabuhan Port Pass	**126.755**	85.798	55.764	47,74%	↑
Lain-Lain Others	**15.653**	23.137	23.472	-32,35%	↓
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenues	**5.669.657**	**5.302.163**	**5.026.330**	**6,93%**	↑

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

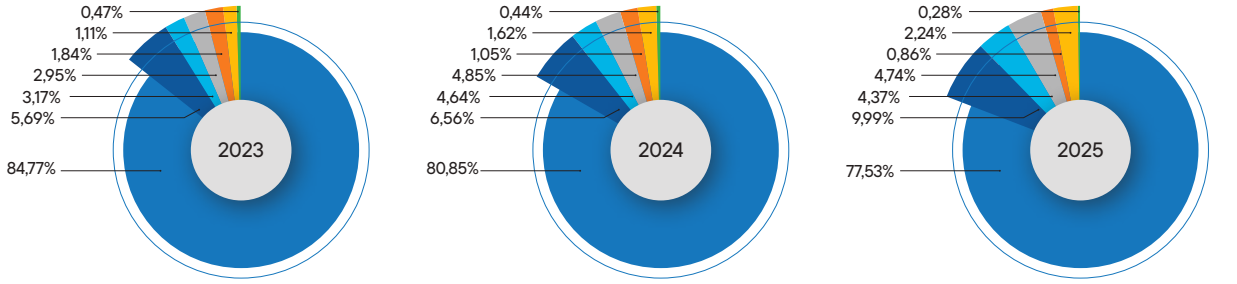
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)	
Beban Operasi Operating Expenses	(5.078.174)	(5.021.281)	(4.249.980)	1,13%	↑
Pendapatan Operasi Lainnya, Neto Other Operating Income, Net	47.651	31.565	5.014	50,96%	↑
Laba Usaha Income from Operations	639.133	312.446	781.364	104,56%	↑
Pendapatan Keuangan Finance Income	99.388	92.121	92.325	7,89%	↑
Beban Keuangan Finance Costs	(35.368)	(33.028)	(48.457)	7,09%	↑
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income before Final Tax and Corporate Income Tax	703.153	371.539	825.232	89,25%	↑
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(21.980)	(17.319)	(16.850)	26,91%	↑
Laba sebelum Pajak Penghasilan Badan Income before Corporate Income Tax	681.173	354.220	808.381	92,30%	↑
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax (Expense) Benefit					
Kini Current	(140.150)	(108.285)	(202.793)	29,43%	↑
Tangguhan Deferred	(15.278)	23.819	13.012	-164,14%	↓
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	525.745	269.754	618.600	94,90%	↑
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income					
Pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items That Will Not Be Reclassified to Income					
Perubahan Nilai Wajar pada Investasi Saham Changes in the Fair Value of Equity Investments	(395)	-	-	-100,00%	↓
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Current Year	525.350	269.754	618.600	94,75%	↑
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Income for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	445.878	207.139	560.218	115,26%	↑
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling Interests	79.867	62.616	58.382	27,55%	↑
Total	**525.745**	**269.755**	**618.600**	**94,90%**	↑
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Incomprehensive income for the year attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	445.487	207.139	560.218	115,26%	↑
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling Interests	79.863	62.616	58.382	27,55%	↑
Total	**525.350**	**269.755**	**618.600**	**94,90%**	↑
EBIT	591.507	281.043	776.322	66,99%	↑
EBITDA	750.484	456.492	1.011.243	64,40%	↑
Laba per Saham (Rupiah penuh)* Earnings per Share (Full Amount)*	301.207	139.930	378.448	115,26%	↑

*) Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham yang beredar.
*) Earnings per share is calculated by dividing the income for the year attributable to owners of parent entity by the number of shares outstanding.

Komposisi Pendapatan Operasi
Composition of Operating Revenues

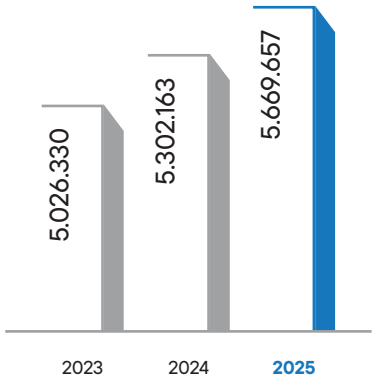
(Dalam %)



- Pendapatan Terminal Non-Petikemas — Non-Container Terminal Services
- Pendapatan Pengusahaan Alat — Equipment Services
- Kerja sama dan *Fee for Services* — Cooperation and Fee for Services
- Pendapatan Terminal Petikemas — Container Services
- Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik — Land, Building, Water and Electricity Services
- Pendapatan Pas Pelabuhan — Port Pass
- Lain-lain — Others

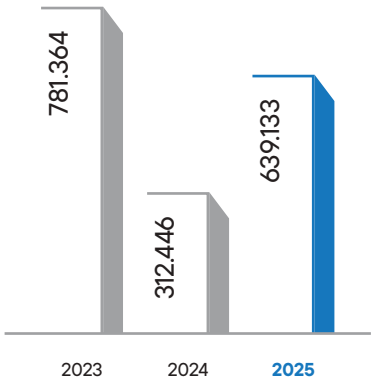
Jumlah Pendapatan Operasi
Total Operating Revenues

(Rp-million)(Rp-Juta)



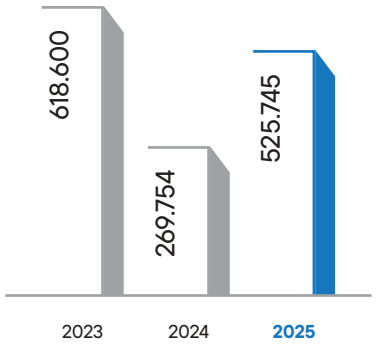
Laba Usaha
Income from Operations

(Rp-million)(Rp-Juta)



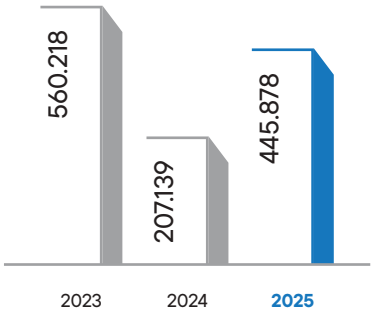
Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

(Rp-million)(Rp-Juta)



Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
Income for the Year Attributable to Owners of Parent Entity

(Rp-million)(Rp-Juta)



POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

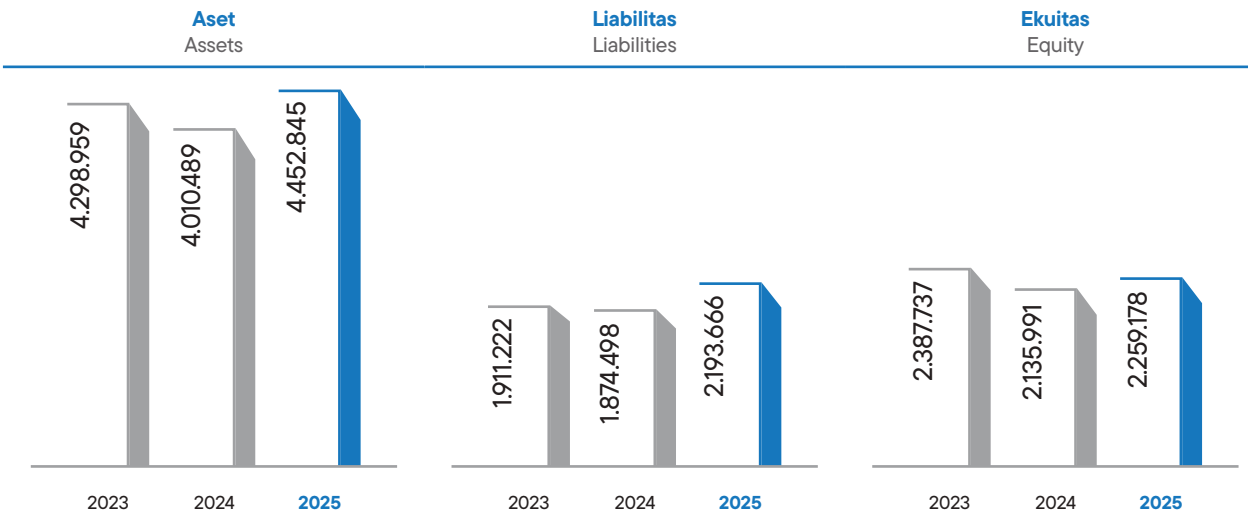
Tabel Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)	
Aset Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	2.002.452	1.677.403	2.187.644	19,38%	↑
Aset Tetap–Neto Fixed Assets–Net	1.025.180	714.794	651.101	43,42%	↑
Investasi Saham* Investment in Shares*	3.466	3.860	3.860	-10,22%	↓
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2.640.604	2.494.458	2.866.229	5,86%	↑
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.812.241	1.516.031	1.432.730	19,54%	↑
Jumlah Aset Total Assets	**4.452.845**	**4.010.489**	**4.298.959**	**11,03%**	↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.761.786	1.482.155	1.544.011	18,87%	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	431.880	392.343	367.211	10,08%	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**2.193.666**	**1.874.498**	**1.911.222**	**17,03%**	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	**2.259.178**	**2.135.991**	**2.387.737**	**5,77%**	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**4.452.845**	**4.010.489**	**4.298.959**	**11,03%**	↑

Grafik Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

(Rp-million)(Rp-Juta)



ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOW

Tabel Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Cash Flow

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash flows from operating activities	875.602	128.443	559.722	581,71%	↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash flows from investing activities	(135.707)	(77.457)	(55.725)	75,20%	↑
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash flows from financing activities	(414.846)	(561.226)	(655.766)	-26,08%	↓
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net increase in cash and cash equivalents	325.049	(510.240)	(151.769)	-163,71%	↓
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and cash equivalents at beginning of the year	1.677.403	2.187.644	2.339.413	-23,32%	↓
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and cash equivalents at end of the year	2.002.452	1.677.402	2.187.644	19,38%	↑

RASIO-RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

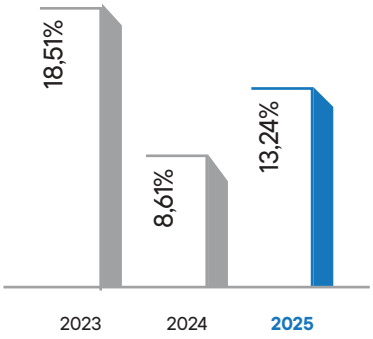
	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)	
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Rata-Rata Pelunasan Utang (APP) (hari) Average Payment Period (APP) (days)	24	37	34	-35,14%	↓
Rata-Rata Penagihan Piutang (ACP) (hari) Average Collection Period (ACP) (days)	22	27	20	-18,52%	↓
Penagihan Piutang (hari) Collection Period (days)	15	33	20	-54,55%	↓
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios					
Rasio Kas (kali) Cash Ratio (times)	1,14	1,13	1,43	0,88%	↑
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times)	1,56	1,73	1,86	-9,83%	↓
Rasio Cepat (kali) Quick Ratio (times)	1,27	1,44	1,64	-11,81%	↓
Kas Operasi terhadap Pendapatan (%) Operating Cash Flow to Sales (%)	16,03	3,73	13,08	329,76%	↑

	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)	
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity (%)	-	-	-	-	-
Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%) Debt to Asset (%)	-	-	-	-	-
Net Debt to EBITDA (kali) Net Debt to EBITDA (times)	-	-	-	-	-
Financial Leverage (kali) Financial Leverage (times)	1,93	1,83	1,99	5,46%	↑
Debt Service Coverage Ratio (kali) Debt Service Coverage Ratio (times)	16,39	8,51	16,02	92,60%	↑
EBITDA *to Debt Service* (kali) EBITDA to Debt Service (times)	20,79	13,82	19,20	50,43%	↑
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Rasio Operasi (%) Operating Ratio (%)	89,57	94,70	84,55	-5,42%%	↓
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	9,27	5,09	12,31	82,12%	↑
Margin EBITDA (%) EBITDA Margin (%)	13,24	8,61	18,51	53,77%	↑
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	133,98	127,83	116,23	4,81%	↑
Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%) Return on Equitiy (ROE) (%)	23,92	11,93	28,48	100,50%	↑
Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset (%) Return on Asset (ROA) (%)	12,42	6,50	14,30	91,08%	↑
Imbal Hasil atas Modal (%) Return on Invested Capital (ROIC) (%)	25,57	13,39	30,71	90,96%	↑
Rasio Pertumbuhan Growth Ratios					
Pendapatan Operasi (%) Operating Revenue (%)	6,93	5,49	23,72	26,23%	↑
Beban Operasi (%) Operating Expenses (%)	1,13	18,15	23,34	-93,77%	↓
Laba Usaha (%) Operating Profit (%)	110,58	(63,82)	25,83	273,27%	↑
Laba Tahun Berjalan (%) Profit for the Year (%)	94,90	(56,39)	34,08	268,29%	↑
EBITDA (%) EBITDA (%)	64,40	(50,95)	24,61	226,40%	↑
Aset (%) Assets (%)	11,03	(6,42)	(1,80)	271,81%	↑
Liabilitas (%) Liabilities (%)	17,03	93,22	(59,70)	-81,73%	↓
Ekuitas (%) Equity (%)	5,77	(10,55)	22,03	154,69%	↑

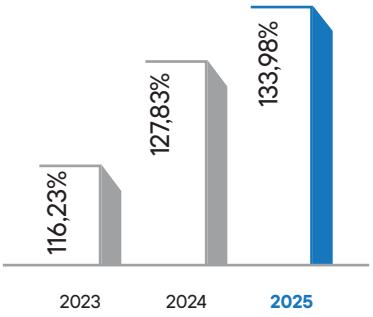
Grafik Rasio Keuangan
Financial Ratio

(dalam %)(in %)

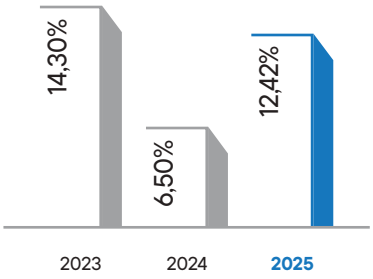
Margin EBITDA
EBITDA Margin



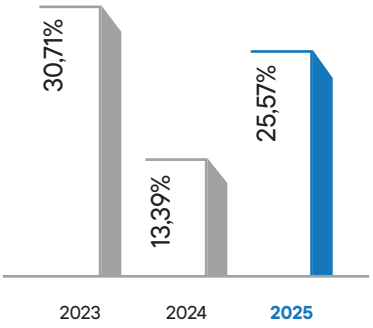
Perputaran Aset
Asset Turnover



Imbalan Aktiva
Return on Asset



Imbal Hasil atas Modal
Return on Invested Capital



Ikhtisar Operasi
Operational Highlights

IKHTISAR ARUS BARANG
CARGO THROUGHPUT HIGHLIGHTS

No.	Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
1	*General Cargo*	M3	5.044.400	5.381.767	-6,27% ↓
		Ton	17.049.252	19.513.435	-12,63% ↓
2	*Bag Cargo*	Ton	6.740.092	5.353.689	25,90% ↑
3	Curah Cair/Liquid Bulk	Ton	30.378.507	29.041.425	4,60% ↑
4	Curah Kering/Dry Bulk	Ton	59.049.728	59.078.912	-0,05% ↓
5	Gas Gas	Ton	-	-	- ↓
		MMBTU	15.943.575	13.971.183	14,12% ↑
6	Kendaraan Vehicles	Unit	2.286.724	1.840.789	24,23% ↑
7	Hewan Livestocks	Ekor Heads	684.151	606.423	12,82% ↑
8	Petikemas Containers	Box	451.727	407.359	10,89% ↑
		Teus	489.198	437.090	11,92% ↑
Jumlah Total		**Ton**	**113.217.580**	**112.987.462**	**0,20%** ↑
		M3	**5.044.400**	**5.381.767**	**-6,27%** ↓
		MMBTU	**15.943.575**	**13.971.783**	**14,12%** ↑
		Unit	**2.286.724**	**1.840.789**	**24,23%** ↑
		Ekor Heads	**684.151**	**606.423**	**12,82%** ↑
		Box	**451.727**	**407.359**	**10,89%** ↑
		Teus	**489.198**	**437.090**	**11,92%** ↑

IKHTISAR PRODUKSI
PRODUCTION HIGHLIGHTS

Uraian Description	2025	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2024-2025 (%)
Produksi Pelayanan Jasa Non Petikemas Non-Container Service Production				
Dermaga (Ton)/Dock (Ton)	99.034.088	96.587.558	90.943.936	2,53% ↑
Stevedoring (Ton)	53.186.493	57.501.888	58.075.926	-7,50% ↓
Kerja Sama Bongkar Muat/BM (Ton) Stevedoring Cooperation/BM (Ton)	55.320.578	48.217.444	36.223.246	14,73% ↑
RoRo (*Roll on-Roll off*) (Unit)	668.738	497.868	258.412	34,32% ↑
Produksi Pelayanan Jasa Petikemas Container Service Production				
Dermaga (Box)/(Box)	430.749	377.770	388.779	14,02% ↑
Stevedoring (Box)	322.507	312.842	313.812	3,09% ↑
Kerja Sama Bongkar Muat/BM (Box) Stevedoring Cooperation/BM (Box)	107.569	61.714	48.340	74,30% ↑
Lift on/lift off (Box)	359.497	356.381	452.568	0,87% ↑
Penumpukan Petikemas (Box/Hari) Container Stacking (Box/Day)	581.925	1.275.634	542.806	-54,38% ↓

Ikhtisar Saham
Share Highlights

INFORMASI SAHAM

Sepanjang tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal belum melakukan pencatatan saham di bursa saham. Oleh karena itu tidak terdapat informasi mengenai harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Adapun informasi mengenai modal saham dalam dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

INFORMATION ON SHARES

Throughout 2025, PT Pelindo Multi Terminal had not listed its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information available regarding share prices, market capitalization, or share trading volume. Information on the Company's share capital over the past two years is presented as follows:

(Dalam ribuan Rupiah) | (In thousands of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024
Modal Saham Share Capital	1.480.305.000	1.480.305.000

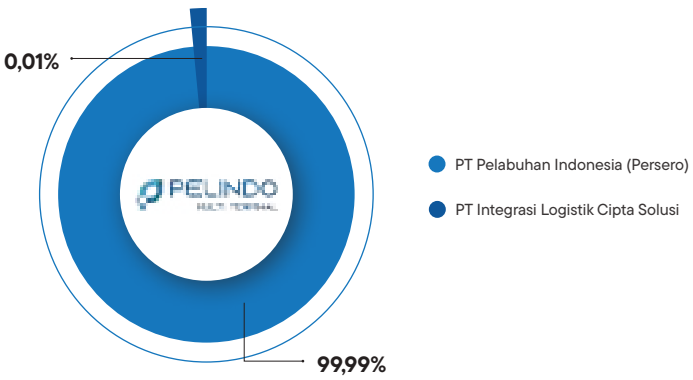
MODAL SAHAM

SHARE CAPITAL

Modal dasar Authorized capital	Modal ditempatkan dan disetor Issued and paid-up capital
5.921.220 saham/shares dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. with a nominal value of Rp1,000,000 (full value) per share.	1.480.305 saham/shares

Jumlah saham Perseroan pada tahun 2025 sebanyak 1.480.305 lembar saham. Dari jumlah tersebut, sebanyak sebanyak 1.480.131 lembar saham atau setara 99,99% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sementara 174 lembar saham atau 0,01% dimiliki oleh PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

As of 2025, the Company had a total of 1,480,305 issued shares. Of this amount, 1,480,131 shares, representing 99.99%, were owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), while 174 shares, or 0.01%, were owned by PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.



AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal tidak melaksanakan aksi korporasi yang berdampak terhadap perubahan jumlah saham beredar, seperti pemecahan saham (*stock split)*, penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Hingga akhir tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Oleh karena itu tidak terdapat Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

CORPORATE ACTIONS

Throughout 2025, PT Pelindo Multi Terminal did not undertake any corporate actions affecting the number of outstanding shares, such as a stock split, reverse stock split, stock dividend, bonus shares issuance, or changes in the nominal value of shares.

SUSPENSION AND/OR DELISTING OF SHARES

As of the end of 2025, PT Pelindo Multi Terminal had not listed its shares on any stock exchange. Accordingly, there were no actions related to the suspension of share trading and/or delisting of shares.

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Lainnya

Information on Bonds, Sukuk, and/or Other Convertible Bonds

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT Pelindo Multi Terminal tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak tersedia informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk, atau surat utang lainnya.

As of December 31, 2025, PT Pelindo Multi Terminal had not issued any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Consequently, there is no information available regarding the amount of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest or profit-sharing rates, maturity dates, bond/sukuk ratings, or other debt securities.



Kilas Peristiwa Penting 2025
Highlights of Significant Events in 2025

JANUARI | JANUARY

2 Januari 2025/January 2, 2025

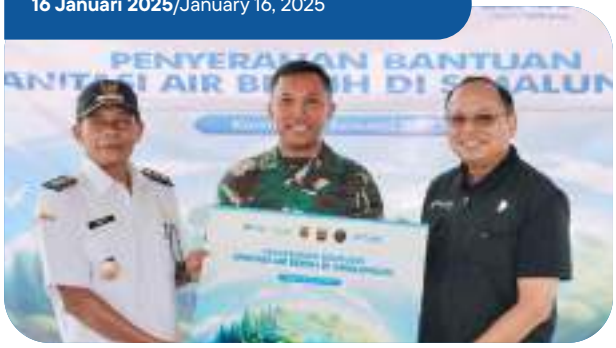


CFRO TALK 2025

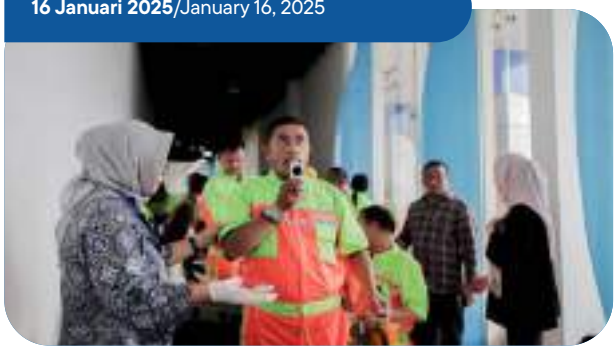
PT Pelindo Multi Terminal menggelar acara PMT CFRO Talk 2025 dengan tema "START STRONGER, ACHIEVE MORE IN 2025" yang dihadiri oleh Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PMT, Yoni Setiawan, serta seluruh insan PMT Group melalui format luring dan daring di Grha Pelindo, Medan. Melalui PMT CFRO Talk 2025, diharapkan dapat mendorong seluruh cabang dan insan PMT untuk memulai tahun dengan langkah yang kuat dan semangat kolaborasi yang tinggi.

PT Pelindo Multi Terminal organized the PMT CFRO Talk 2025 under the theme "START STRONGER, ACHIEVE MORE IN 2025", attended by PMT's Chief Finance and Risk Officer, Yoni Setiawan, as well as all members of PMT Group, both in person and virtually, from Grha Pelindo in Medan. Through the PMT CFRO Talk 2025, the Company aims to encourage all branches and PMT personnel to begin the year with a strong foundation and a high spirit of collaboration.

16 Januari 2025/January 16, 2025



16 Januari 2025/January 16, 2025



Tingkatkan Safety Awareness
Enhancing Safety Awareness

PT Pelindo Multi Terminal meningkatkan awareness keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka Bulan K3 Nasional di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, sebagai upaya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif, dengan cara menggandeng Balai K3 Medan untuk memberikan edukasi terkait Corporate Life Saving Rules (CLSR), pelatihan dasar K3, pemeriksaan kesehatan, serta penyaluran bantuan sembako kepada TKBM guna meningkatkan pemahaman, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di lingkungan pelabuhan.

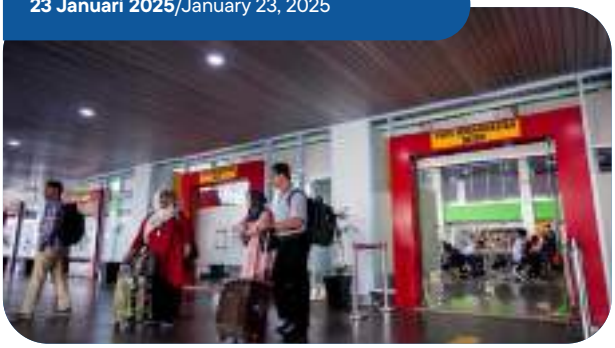
PT Pelindo Multi Terminal enhanced occupational health and safety (OHS) awareness among stevedoring workers through an awareness program held in commemoration of National OHS Month at Bandar Deli Belawan Passenger Terminal, aimed at fostering a safe and productive working environment by collaborating with the Medan Occupational Health and Safety Center to provide education on the Corporate Life Saving Rules (CLSR), basic OHS training, health examinations, and the distribution of basic food assistance packages to stevedoring workers in order to improve workers' understanding, safety, and well-being within the port environment.

Sediakan Sanitasi Air Bersih untuk 297 Keluarga
Providing Clean Water Sanitation for 297 Households

PT Pelindo Multi Terminal bersama TNI Angkatan Darat membangun fasilitas sanitasi air bersih berupa sumur bor di Desa Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, yang diresmikan untuk memenuhi kebutuhan 297 kepala keluarga. Program ini merupakan bagian dari TJSL Pelindo guna mendukung SDGs poin 6 tentang air bersih dan sanitasi layak, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari serta produktivitas pertanian, sekaligus menunjukkan sinergi antara perusahaan dan TNI dalam mengatasi permasalahan air bersih di wilayah tersebut.

PT Pelindo Multi Terminal, in collaboration with the Indonesian Army, constructed a clean water sanitation facility in the form of a drilled well in Kasindir Village, Jorlang Hataran District, Simalungun Regency, North Sumatra, inaugurated to serve the needs of 297 households. The program is part of Pelindo's CSR initiatives to support SDG 6: Clean Water and Sanitation, aims to improve the quality of life of local communities by providing access to clean water for daily household use and agricultural activities, while also demonstrating the synergy between the Company and the Indonesian Army in addressing clean water challenges in the area.

23 Januari 2025/January 23, 2025



Layani 630 Ribu Penumpang Nataru
Serving 630 Thousand Year-End Holiday Passengers

PT Pelindo Multi Terminal mencatat pelayanan 630.479 penumpang selama periode Nataru 2024/2025 pada 10 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 di seluruh terminal penumpang yang dikelolanya di Indonesia, dengan dukungan kesiapan layanan, personel, dan fasilitas serta sinergi berbagai pihak.

PT Pelindo Multi Terminal served a total of 630,479 passengers during the 2024/2025 Christmas and New Year holiday period, from December 10, 2024 to January 9, 2025, across all passenger terminals under its management in Indonesia, supported by the Company's preparedness in terms of services, personnel, and facilities, as well as sinergy with various stakeholders.

FEBRUARI | FEBRUARY

5 Februari 2025/February 5, 2025



Ajak Pekerja Berperilaku Hidup Sehat & Produktif
Encouraging Employees to Adopt a Healthy and Productive Lifestyle

Bertepatan Bulan K3 Nasional 2025, PT Pelindo Multi Terminal menghadirkan Ade Rai sebagai Narasumber pada BREATH (Balancing, Resilience, Energy, and Health) Session 16, mengusung tema : Hidup Sehat, Produktivitas Melesat yang digelar di Medan. Perusahaan mengimbau akan pentingnya kesadaran menjaga kesehatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, juga bagi keluarga, lingkungan kerja dan tentunya bagi Perusahaan.

In conjunction with National OHS Month 2025, PT Pelindo Multi Terminal invited Ade Rai as a speaker for the BREATH (Balancing, Resilience, Energy, and Health) Session 16, held in Medan under the theme "Healthy Living, Accelerated Productivity." The Company emphasized the importance of maintaining good health awareness, highlighting its benefits not only for individuals themselves, but also for their families, the workplace, and ultimately the Company as a whole.

19 Februari 2025/February 19, 2025



Buka Peluang Sinergi & Kolaborasi Modernisasi Pelabuhan
Exploring Synergies and Collaborations for Port Modernization

PT Pelindo Multi Terminal membuka peluang untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam modernisasi pelabuhan. Langkah ini merupakan komitmen PMT untuk meningkatkan daya saing logistik nasional. Hal ini disampaikan Direktur Utama Pelindo Multi Terminal, Ary Henryanto dalam acara Diskusi Nasional "Masa Depan Maritim Indonesia pada Era Pemerintahan Baru Seperti Apa?" yang digelar Ocean Week di Jakarta.

PT Pelindo Multi Terminal opened opportunities for synergies and collaborations with various stakeholders to support port modernization efforts. This initiative reflects PMT commitment to enhancing the competitiveness of Indonesia's national logistics sector. This commitment was conveyed by Ary Henryanto, President Director of Pelindo Multi Terminal, during the National Discussion titled "What Will the Future of Indonesia's Maritime Sector Look Like Under the New Administration?", held as part of Ocean Week in Jakarta.

MARET | MARCH

12 Maret 2025/March 12, 2025



CHRO Talk

PT Pelindo Multi Terminal menggelar kegiatan Chief Human Resources Officer (CHRO) TALK 2025 sebagai wadah diskusi strategis yang berlangsung di Grha Pelindo, Medan, serta secara hybrid. Sebagai hadir narasumber Direktur SDM Pelindo Multi Terminal, Edi Priyanto yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan.

PT Pelindo Multi Terminal organized the Chief Human Resources Officer (CHRO) Talk 2025 as a platform for strategic discussions, held at Grha Pelindo in Medan and conducted in a hybrid format. The session featured Edi Priyanto, Chief Human Resources Officer of Pelindo Multi Terminal, as the keynote speaker. He emphasized the importance of maintaining a balance between employee well-being and corporate productivity.

26 Maret 2025/March 26, 2025



Salurkan 13.800 Paket Ramadhan
Distributing 13,800 Ramadan Aid Packages

PT Pelindo Multi Terminal menyalurkan 13.800 paket bantuan selama Ramadhan 2025 di 20 wilayah kerja di Indonesia kepada masyarakat sekitar pelabuhan dan TKBM, bantuan berupa sembako, santunan anak yatim, dan takjil ini merupakan program TJSL untuk meringankan beban masyarakat dan memperkuat kepedulian sosial perusahaan.

PT Pelindo Multi Terminal distributed 13,800 aid packages during Ramadan 2025 across 20 operational areas in Indonesia to communities living around ports and stevedoring workers, consisted of basic food packages, donations for orphans, and iftar meals, as part of the Company's CSR program to help ease the burden on local communities and strengthen the Company's social commitment.

26 Maret 2025/March 26, 2025



Berangkatkan Ratusan Pemudik Gratis
Sending Hundreds of Travelers Home Through a Free Eid Homecoming Program

PT Pelindo Multi Terminal memberangkatkan 400 pemudik melalui program Mudik Gratis BUMN 2025 dari Medan dengan tiga rute utama menggunakan bus, yakni Medan–Banda Aceh, Medan–Pekanbaru, dan Medan–Padang. Program ini merupakan bagian dari TJSL Pelindo Group untuk mendukung mudik aman dan nyaman, dengan menyediakan fasilitas transportasi gratis, konsumsi, serta pemeriksaan kesehatan sopir guna mengurangi risiko kecelakaan dan membantu masyarakat merayakan Idulfitri di kampung halaman dengan selamat.

PT Pelindo Multi Terminal facilitated the departure of 400 travelers from Medan under the 2025 SOE Free Eid Homecoming Program (Mudik Gratis BUMN 2025). For three main bus routes: Medan–Banda Aceh, Medan–Pekanbaru, and Medan–Padang, as part of Pelindo Group's CSR program to support safe and comfortable Eid homecoming travel by providing free transportation, meals, and health checks for drivers to reduce the risk of accidents and help communities celebrate Eid al-Fitr safely with their families in their hometowns.

APRIL | APRIL

22 April 2025/April 22, 2025



Edukasi Transportasi Ramah Lingkungan
Promoting Environmentally Friendly Transportation Education

Dalam rangka memperingati Hari Bumi 2025, PT Pelindo Multi Terminal memberikan pengalaman unik kepada puluhan siswa SD Hang Tuah 1 Belawan naik kendaraan bus listrik mengelilingi kota Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program TJSL yang selalu mendorong keterlibatan aktif masyarakat sekitar pelabuhan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait lingkungan dan pendidikan.

In commemoration of Earth Day 2025, PT Pelindo Multi Terminal provided a unique learning experience for dozens of students from SD Hang Tuah 1 Belawan by taking them on a tour around Medan aboard an electric bus. The activity formed part of the Company's CSR program, which consistently encourages the active participation of communities surrounding port areas in initiatives aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to environmental sustainability and education.

25 April 2025/April 25, 2025



Layani 791 Ribu Penumpang Lebaran
Serving 791 Thousand Eid Holiday Passengers

PT Pelindo Multi Terminal melayani 791.516 penumpang selama Angkutan Lebaran 2025 pada 16 Maret–16 April 2025 di delapan cabang di Indonesia, meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung kesiapan SDM dan fasilitas guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik serta memberikan layanan transportasi laut yang aman dan nyaman.

PT Pelindo Multi Terminal served a total of 791,516 passengers during the 2025 Eid Transportation period from March 16 to April 16, 2025 across eight branches in Indonesia, representing a 6% increase compared to the previous year. This growth was supported by the readiness of human resources and facilities to ensure the smooth flow of outbound and return holiday travel, while providing safe, reliable, and comfortable sea transportation services for passengers.

MEI | MAY

15 Mei 2025/May 15, 2025



Hadirkan Akses Air Bersih
Providing Access to Clean Water

PT Pelindo Multi Terminal memberikan bantuan akses air bersih di TK-SD Tunas Sebernaman, Deli Serdang, melalui pembangunan sumur bor, tandon, toilet, dan tempat wudhu. Program TJSL ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan kenyamanan belajar siswa serta mendukung SDGs melalui kolaborasi dengan Baitulmaal Muamalat.

PT Pelindo Multi Terminal provided access to clean water at TK-SD Tunas Sebernaman in Deli Serdang through the construction of a drilled well, water storage tank, toilets, and ablution facilities. This CSR program aims to improve students' health and learning comfort while supporting the SDGs through collaboration with Baitulmaal Muamalat.

26 Mei 2025/May 26, 2025



Dorong Penguatan Change Agent Melalui Pembelajaran Inovatif
Strengthening Change Agents Through Innovative Learning

PT Pelindo Multi Terminal menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi organisasi dengan menyelenggarakan Change Catalyst Team Engagement, sebuah inisiatif pengembangan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan peran strategis change agent di lingkungan perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan ini menitikberatkan pada upaya menciptakan agen perubahan yang tidak hanya adaptif, namun juga mampu menjadi motor inovasi dalam menghadapi dinamika bisnis pelabuhan yang semakin kompleks.

PT Pelindo Multi Terminal demonstrated its commitment to driving organizational transformation by organizing the Change Catalyst Team Engagement, a development initiative designed to strengthen the capabilities and strategic role of change agents within the Company. This activity focused on fostering change agents who are not only adaptive but also capable of serving as catalysts for innovation in addressing the increasingly complex dynamics of the port business environment.

JUNI | JUNE

11 Juni 2025/June 11, 2025



Salurkan 90 Hewan Kurban di Sekitar Wilayah Pelabuhan
Distributing 90 Sacrificial Animals to Communities Around Port Areas

PT Pelindo Multi Terminal Grup menyalurkan 90 hewan kurban pada Iduladha 1446 H tahun 2025 di berbagai wilayah kerja di Indonesia melalui program TJSL Pelindo Berbagi Qurban. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat dan menumbuhkan kepedulian sosial melalui distribusi bantuan secara langsung.

PT Pelindo Multi Terminal Group distributed 90 sacrificial animals during Eid al-Adha 1446 H (2025) across various operational areas in Indonesia through Pelindo Berbagi Qurban CSR program. This initiative aimed to strengthen relationships with local communities and foster social awareness through the direct distribution of assistance.

23 Juni 2025/June 23, 2025



Layanan Livestock Kawal Ketahanan Pangan Nasional
Livestock Services Supporting National Food Security

PT Pelindo Multi Terminal mencatat bongkar muat 216.592 ekor hewan hingga Mei 2025 di berbagai pelabuhan yang dikelolanya di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari komitmen mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini dilakukan melalui transformasi layanan dan operasional yang mengedepankan standar K3 serta prinsip animal welfare, didukung kesiapan fasilitas, infrastruktur, dan koordinasi dengan stakeholder guna memastikan distribusi ternak berjalan aman dan efisien.

PT Pelindo Multi Terminal handled the loading and unloading of 216,592 head of livestock through May 2025 at various ports under its management across Indonesia, as part of its commitment to supporting national food security. These activities were carried out through service and operational transformation initiatives that prioritize OHS standards and animal welfare principles, supported by the readiness of facilities and infrastructure, as well as close coordination with stakeholders, to ensure the safe and efficient distribution of livestock.

JULI | JULY

1-3 Juli 2025/July 1-3, 2025



Pastikan Kesiapsiagaan Darurat di Pelabuhan
Ensuring Emergency Preparedness at Ports

PT Pelindo Multi Terminal menggelar pelatihan internal dan program sertifikasi resmi di bidang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Pemadam Kebakaran, bekerja sama langsung dengan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 1-3 Juli 2025 di Grha Pelindo Medan. Tujuannya agar tenaga kerja di area pelabuhan dan terminal terbekali keahlian praktis sekaligus diakui secara hukum sebagai personel tanggap darurat bersertifikat.

PT Pelindo Multi Terminal conducted internal training and official certification programs in First Aid (P3K) and Firefighting, in direct collaboration with the Occupational Safety and Health (OHS) Center of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, which were held over three days from July 1-3, 2025 at Grha Pelindo Medan. The objective was to equip workers in port and terminal areas with practical skills while also obtaining legal recognition as certified emergency response personnel.

4 Juli 2025/July 4, 2025



CTO Talk

PT Pelindo Multi Terminal menyelenggarakan kegiatan CTO Talk di Grha Pelindo Medan dan secara daring untuk seluruh pekerja, guna memperkuat semangat dan budaya kerja positif di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan melalui sesi bincang inspiratif bersama Direktur Teknik Yarham Harid yang mendorong profesionalisme, kolaborasi, dan kinerja unggul, sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja serta pencapaian target perusahaan secara berkelanjutan.

PT Pelindo Multi Terminal organized the CTO Talk at Grha Pelindo Medan and virtually for all employees to strengthen enthusiasm and a positive work culture within the Company. The activity was conducted through an inspirational talk session with Chief Technical Officer Yarham Harid, who encouraged professionalism, collaboration, and excellent performance, with the expectation of enhancing employee motivation and the sustainable achievement of the Company's targets.

AGUSTUS | AUGUST

5–6 Agustus 2025/August 5–6, 2025



Driving ESG Transformation

PT Pelindo Multi Terminal menyelenggarakan workshop ESG pada 5–6 Agustus 2025 di Grha Pelindo Medan secara hybrid bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sumatra Utara, sebagai upaya mendorong transformasi industri kepelabuhanan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan narasumber lintas sektor, diskusi, studi kasus, serta kunjungan lapangan guna memperkuat pemahaman dan implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor.

PT Pelindo Multi Terminal organized an ESG workshop on August 5-6, 2025 at Grha Pelindo Medan in a hybrid format in collaboration with the Indonesian Engineers Association (PII) of North Sumatra, as an effort to drive the transformation of the sustainable port industry. The activity was carried out through presentations by speakers from various sectors, discussions, case studies, and field visits to strengthen understanding and implementation of environmental, social, and governance (ESG) principles in enhancing competitiveness and investor confidence.

12 Agustus 2025/August 12, 2025



Perkuat Ketahanan Operasional Pelabuhan melalui BCMS
Strengthening Port Operational Resilience through BCMS

PT Pelindo Multi Terminal terus memperkuat ketahanan bisnis melalui pelaksanaan kegiatan Drill bersama Business Continuity Management System (BCMS) "Pelayanan Operasi Manual Akibat Gangguan Sistem" di Grha Pelindo, Medan. Melalui latihan BCMS yang berkesinambungan, perusahaan memastikan setiap tantangan operasional dapat dihadapi dengan sigap demi menjaga kelancaran pelayanan bagi seluruh pengguna jasa.

PT Pelindo Multi Terminal continues to strengthen business resilience through the implementation of a Drill in conjunction with the Business Continuity Management System (BCMS) entitled "Manual Operation Services Due to System Disruptions" at Grha Pelindo, Medan. Through continuous BCMS exercises, the Company ensures that every operational challenge can be addressed promptly in order to maintain smooth services for all service users.

19 Agustus 2025/August 19, 2025



Kembangkan Pemimpin Muda Inovatif
Developing Innovative Young Leaders

PT Pelindo Multi Terminal menyelenggarakan Program Pengembangan Leader Muda Multipurpose (PPLMM) 2025 di Jakarta secara hybrid, dengan melibatkan 30 talenta muda terpilih dari proses seleksi. Program ini bertujuan membentuk pemimpin muda yang inovatif dan adaptif melalui metode Project Action Learning berupa pelatihan kepemimpinan, manajemen proyek, dan pelaksanaan proyek nyata, guna memperkuat pipeline kepemimpinan dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

PT Pelindo Multi Terminal organized the 2025 Multipurpose Young Leaders Development Program (PPLMM) in Jakarta in a hybrid format, involving 30 young talents selected through a screening process. The program aimed to develop innovative and adaptive young leaders through the Project Action Learning method, consisting of leadership training, project management, and the implementation of real projects, in order to strengthen the leadership pipeline and support the Company's sustainable growth.

SEPTEMBER | SEPTEMBER

27 September 2025/September 27, 2025



Ajak Pengguna Jasa Bertumbuh
Encouraging Service Users to Grow Together

PT Pelindo Multi Terminal menggelar forum Customer Hearing pada pertengahan September 2025 di Bandung dengan melibatkan berbagai pengguna jasa sebagai upaya memperkuat transformasi layanan pelabuhan. Kegiatan ini bertujuan menghimpun aspirasi dan menyelaraskan strategi pengembangan layanan melalui dialog konstruktif dan kolaborasi, guna meningkatkan kualitas layanan, mendorong inovasi, serta mendukung pertumbuhan bisnis logistik yang berkelanjutan di Indonesia.

PT Pelindo Multi Terminal held a Customer Hearing forum in mid-September 2025 in Bandung involving various service users as an effort to strengthen port service transformation. The activity aimed to gather aspirations and align service development strategies through constructive dialogue and collaboration, in order to improve service quality, encourage innovation, and support sustainable growth in Indonesia's logistics business.

27 September 2025/September 27, 2025



Tanam 11.000 Mangrove di Medan
Planting 11,000 Mangroves in Medan

PT Pelindo Multi Terminal Group menanam 11.000 bibit mangrove di kawasan Danau Siombak, Medan, Sumatra Utara, sebagai bagian dari peringatan Hari Pelindo ke-4. Kegiatan ini bertujuan mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui rehabilitasi ekosistem pesisir, yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Yayasan Lentera Pertiwi Sumatra dan berbagai stakeholder guna memberikan manfaat berkelanjutan serta mendorong pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

PT Pelindo Multi Terminal Group planted 11,000 mangrove seedlings in Danau Siombak area, Medan, North Sumatra, as part of the commemoration of Pelindo's 4th Anniversary. The activity aimed to support environmental conservation and community welfare through coastal ecosystem rehabilitation, which was carried out in collaboration with Yayasan Lentera Pertiwi Sumatra and various stakeholders to provide sustainable benefits and promote community-based environmental management.

24–25 September 2025/September 24–25, 2025



Pelindo Mengajar Menginspirasi Generasi Muda
Pelindo Mengajar Inspires the Younger Generation

PT Pelindo Multi Terminal menyelenggarakan program Pelindo Mengajar di SMA Al Hikmah Medan dan MA YASPI untuk sekitar 300 siswa, sebagai upaya mengenalkan dunia kepelabuhanan dan maritim. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan motivasi kepada generasi muda melalui sesi interaktif bersama direksi serta pemberian bantuan fasilitas pendidikan, guna meningkatkan wawasan, semangat belajar, dan kesiapan siswa menghadapi masa depan.

PT Pelindo Multi Terminal organized Pelindo Mengajar program at SMA Al Hikmah Medan and MA YASPI for approximately 300 students, as an effort to introduce the port and maritime industries. The activity aimed to provide education and motivation to the younger generation through interactive sessions with the Board of Directors and the provision of educational facilities assistance, in order to enhance students' knowledge, learning enthusiasm, and preparedness for the future.

OKTOBER | OCTOBER

9 Oktober 2025/October 9, 2025



Terapkan CSMS Perkuat K3
Implementing CSMS to Strengthen OHS

PT Pelindo Multi Terminal menggelar Kick Off implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) di Kantor Pelindo Regional 3 dengan melibatkan PBM, TKBM, dan regulator, sebagai upaya memperkuat budaya keselamatan kerja di pelabuhan. Program ini bertujuan memastikan standar HSSE terpenuhi melalui sistem manajemen kontraktor, peningkatan kompetensi, sertifikasi, serta pembentukan safety committee, guna menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan operasional secara berkelanjutan.

PT Pelindo Multi Terminal held the kick-off for the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS) at Pelindo Regional 3 Office involving stevedoring companies (PBM), dockworkers (TKBM), and regulators, as an effort to strengthen the occupational safety culture at ports. The program aims to ensure compliance with HSSE standards through a contractor management system, competency enhancement, certification, and the establishment of a safety committee, in order to reduce accident risks and continuously improve operational safety.

NOVEMBER | NOVEMBER

5 November 2025/November 5, 2025

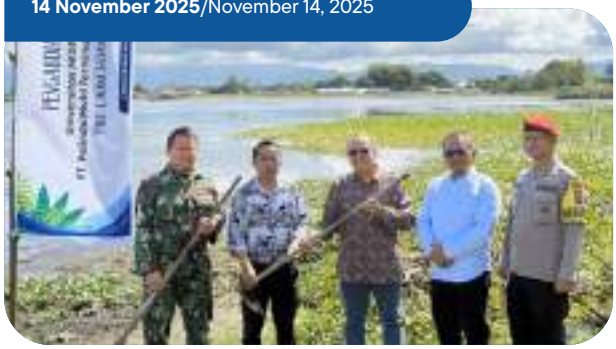


Terima Penghargaan *Excellence in Non-Container Terminal Operations* Receives the Excellence in Non-Container Terminal Operations Award

PT Pelindo Multi Terminal terima penghargaan kategori Excellence in Non-Container Terminal Operations dalam ajang Bisnis Indonesia Logistic Awards (BILA) 2025 yang digelar di Jakarta. Ajang penghargaan yang digagas oleh Bisnis Indonesia Group ini merupakan agenda tahunan rutin yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan sektor pendukungnya, yang memiliki kinerja andal dan efisien.

PT Pelindo Multi Terminal received the Excellence in Non-Container Terminal Operations award at the Bisnis Indonesia Logistic Awards (BILA) 2025 held in Jakarta. The award event, initiated by Bisnis Indonesia Group, is an annual agenda organized to recognize companies operating in the logistics sector and its supporting industries that demonstrate reliable and efficient performance.

14 November 2025/November 14, 2025



Upaya Pelestarian Lingkungan di Danau Toba Environmental Conservation Efforts in Lake Toba

PT Pelindo Multi Terminal berkolaborasi dengan Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHKBNP) melaksanakan kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Pantai Bul-Bul, Balige, Kabupaten Toba, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat, dengan cara melakukan aksi bersih lingkungan serta menggagas program berkelanjutan "Rumah Kelola Sampah" yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat guna mendukung pengelolaan sampah terpadu dan keberlanjutan ekosistem.

PT Pelindo Multi Terminal collaborated with Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHKBNP) to carry out water hyacinth removal activities in Lake Toba as part of its Social and Environmental Responsibility (CSR) program at Bul-Bul Beach, Balige, Toba Regency, as an effort to preserve the environment while raising public awareness, by conducting environmental clean-up activities and initiating the sustainable "Waste Management House" program involving local governments, academics, and communities to support integrated waste management and ecosystem sustainability.

DESEMBER | DECEMBER

2 Desember 2025/December 2, 2025



Pelabuhan Lhokseumawe Jadi Simpul Distribusi Bantuan Banjir di Aceh Lhokseumawe Port Becomes a Distribution Hub for Flood Relief Assistance in Aceh

PT Pelindo Multi Terminal Branch Lhokseumawe menjadikan Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai pusat distribusi bantuan logistik bagi wilayah terdampak banjir di Aceh, yang berlangsung sejak akhir November hingga awal Desember 2025 di Lhokseumawe, sebagai upaya mempercepat pemulihan pascabencana ketika akses darat terhambat, dengan cara melakukan koordinasi lintas instansi serta memastikan kesiapan operasional pelabuhan untuk melayani sandar kapal, bongkar muat logistik seperti sembako, obat-obatan, dan peralatan evakuasi, sehingga distribusi bantuan dapat berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak.

PT Pelindo Multi Terminal Branch Lhokseumawe designated Krueng Geukueh Port as a logistics distribution center for areas affected by floods in Aceh, from late November to early December 2025 in Lhokseumawe, as an effort to accelerate post-disaster recovery when land access was disrupted, by coordinating across agencies and ensuring the operational readiness of the port to serve vessel berthing and the loading and unloading of logistics such as food supplies, medicines, and evacuation equipment, so that aid distribution could be carried out safely, smoothly, and effectively to affected communities.

5 Desember 2025/December 5, 2025



Gerakkan Bantuan Kemanusiaan melalui Pelabuhan Sibolga
Mobilizing Humanitarian Assistance through Sibolga Port

PT Pelindo Multi Terminal menjadi pusat distribusi bantuan kemanusiaan pascabencana longsor dan banjir yang melanda di wilayah Sibolga. Dalam situasi darurat tersebut, Pelindo Multi Terminal Branch Sibolga berkoordinasi intens dengan sejumlah pihak untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan. Pelabuhan Sibolga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sibolga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Sibolga, Lanal Sibolga, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penyaluran bantuan yang diangkut melalui helikopter BNPB yang mendarat di wilayah pelabuhan.

PT Pelindo Multi Terminal became a distribution center for humanitarian assistance following landslides and floods that struck Sibolga area. In this emergency situation, Pelindo Multi Terminal Branch Sibolga coordinated intensively with several parties to support the acceleration of aid distribution. Sibolga Port collaborated with the Sibolga City Government, Class IV Sibolga Harbormaster and Port Authority Office (KSOP), Sibolga Naval Base (Lanal), and the National Disaster Management Agency (BNPB) to distribute assistance transported by BNPB helicopters landing within the port area.

29 Desember 2025/December 29, 2025



Perkuat Transformasi Pelabuhan Melalui Terminalisasi
Strengthening Port Transformation Through Terminalization

PT Pelindo Multi Terminal menegaskan komitmen dan konsistensi dalam melakukan standarisasi dan transformasi pelabuhan nonpetikemas yang dikelolanya, salah satunya melalui terminalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan operasional kepada para pengguna jasa. Pelindo Multi terminal menerima Surat Keputusan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum menjadi untuk melayani angkutan curah cair di Terminal Curah Cair 3 dan Terminal Curah Kering di Terminal MTP01 di Branch Bumiharjo Bagendang oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai serta Terminal Curah Kering Mooring Buoy Bosowa dan Mooring Buoy Indocement Branch Lembar oleh KSOP Kelas III Lembar pada November.

PT Pelindo Multi Terminal reaffirmed its commitment and consistency in standardizing and transforming the non-container ports under its management, one of which is through terminalization initiatives aimed at enhancing the quality of operational services for customers. Pelindo Multi Terminal obtained Port Facility Operation Decrees authorizing changes in the utilization of port facilities, from handling general cargo to serving liquid bulk cargo at Liquid Bulk Terminal 3 and dry bulk cargo at MTP01 Terminal, Branch Bumiharjo Bagendang, based on approvals issued by the Class IV Kumai Harbormaster and Port Authority Office (KSOP) as well as for Bosowa Mooring Buoy Dry Bulk Terminal and Indocement Mooring Buoy at Branch Lembar by the Class III Lembar Harbormaster and Port Authority Office (KSOP) in November.

PELINDO
MULTI TERMINAL

Laporan Manajemen

Management Report



Memasuki tahun 2025, PMT terus memperkuat kapabilitas bisnis internal sekaligus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan nonpetikemas di lingkungan Pelindo Grup. Di tengah berbagai tantangan, PMT berhasil mencatat pemulihan profitabilitas yang signifikan, dengan laba tahun berjalan yang hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

As we enter 2025, PMT continues to strengthen its internal business capabilities while expanding the scope and improving the quality of non-containerized services within the Pelindo Group. Despite various challenges, PMT has managed to achieve a significant recovery in profitability, with net income for the current year nearly doubling compared to the previous year.



02

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report



Darwanto
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pengelolaan PT Pelindo Multi Terminal (PMT) selama tahun buku 2025. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Dewan Komisaris dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2025 berlangsung dalam lanskap ekonomi global yang tetap resilien, namun masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta fluktuasi harga komoditas. Di dalam negeri, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan 5,11%, sementara sektor transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi mencapai 8,78%. Kombinasi tersebut membuka peluang bagi sektor logistik dan kepelabuhanan nonpetikemas, sekaligus menuntut kesiapan pelaku usaha dalam menjaga efisiensi, kualitas layanan, dan ketahanan operasional.

Dalam konteks tersebut, PMT mampu memperlihatkan ketangguhan bisnis yang tercermin dari pencapaian kinerja operasional, penguatan fondasi tata kelola, dan keberlanjutan usaha. Tahun 2025 juga menjadi momentum penting pemulihan profitabilitas Perusahaan, ditandai dengan pertumbuhan laba usaha dan laba bersih yang kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai Anak Perusahaan Pelindo yang mengemban mandat strategis dalam pengelolaan terminal nonpetikemas, PMT terus menjalankan perannya dengan konsisten, responsif terhadap dinamika eksternal, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Langkah-langkah yang ditempuh Direksi dinilai telah selaras dengan arah transformasi Pelindo Grup serta prinsip akuntabilitas PMT sebagai bagian dari ekosistem logistik nasional.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

With gratitude to God Almighty, the Board of Commissioners presents this report on the execution of its duties and responsibilities in overseeing the management of PT Pelindo Multi Terminal (PMT) during the 2025 financial year. This report reflects the Board of Commissioners' accountability in supporting the implementation of sound corporate governance, transparency, and long-term value creation for all stakeholders.

The year 2025 unfolded amid a global economic landscape that remained resilient, yet was still overshadowed by geopolitical uncertainty, trade fragmentation, and commodity price fluctuations. Domestically, Indonesia's economic fundamentals remained solid with growth of 5.11%, while the transportation and warehousing sector grew strongly at 8.78%. These conditions created opportunities for the non-container logistics and port sector, while also requiring business players to maintain efficiency, service quality, and operational resilience.

Against this backdrop, PMT demonstrated business resilience, as reflected in its operational performance, stronger governance foundation, and business sustainability. The year 2025 also marked an important momentum for the Company's profitability recovery, with operating profit and net profit recording strong growth compared with the previous year.

As a Pelindo Subsidiary carrying a strategic mandate in managing non-container terminals, PMT continued to perform its role consistently, respond to external dynamics, and focus on long-term value creation. The measures taken by the Board of Directors are considered aligned with the Pelindo Group's transformation direction and PMT's accountability as part of the national logistics ecosystem.

PANDANGAN ATAS PERKEMBANGAN PERUSAHAAN TAHUN 2025

Tahun 2025 menjadi periode penting bagi Perusahaan dalam memasuki fase awal implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, yakni fase "Enhancing Internal Business and Service Excellence". Di tengah dinamika perekonomian global, fragmentasi perdagangan, dan fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi aktivitas perdagangan serta logistik internasional, pertumbuhan ekonomi nasional dan tingginya aktivitas sektor transportasi dan pergudangan tetap memberikan dukungan positif bagi industri kepelabuhanan.

Berangkat dari kondisi tersebut, Perusahaan menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang baik. Selaras dengan arah kebijakan strategis induk usaha, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PMT memfokuskan agenda tahun 2025 pada penataan struktur korporasi, peningkatan kualitas layanan nonpetikemas, standardisasi operasional, serta penguatan kapabilitas organisasi.

Kinerja keuangan Perusahaan memperlihatkan pemulihan yang kuat. Pendapatan operasi konsolidasian tumbuh 6,93% menjadi Rp5,67 triliun, sementara laba bersih meningkat 94,90% menjadi Rp525,75 miliar, seiring dengan terkendalinya beban operasional. Capaian ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menangkap peluang pasar, memperbaiki kualitas pendapatan, dan menjaga disiplin biaya.

Atas perkembangan tersebut, Dewan Komisaris menilai PMT telah berada pada arah yang tepat dalam memperkuat fundamental bisnis, menjaga kesinambungan operasional, serta meningkatkan daya saing jangka panjang. Ke depan, perhatian tetap perlu diarahkan pada pencapaian target finansial RKAP, optimalisasi aset, percepatan integrasi data dan sistem, serta penguatan eksekusi program strategis lintas entitas PMT Grup.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN DASAR PENILAIANNYA

Penilaian atas kinerja Direksi tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian keuangan, operasional, strategis, dan tata kelola. Dasar penilaian mencakup laporan keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti & Surja, laporan realisasi kinerja berdasarkan Key Performance Indicators (KPI), serta hasil asesmen penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan kerangka ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

VIEWS ON THE COMPANY'S DEVELOPMENT IN 2025

The year 2025 was an important period for the Company as it entered the initial phase of implementing the 2025-2029 Long-Term Plan (RJPP), namely the "Enhancing Internal Business and Service Excellence" phase. Amid global economic dynamics, trade fragmentation, and commodity price fluctuations affecting international trade and logistics activity, Indonesia's economic growth and the strong performance of the transportation and warehousing sector continued to provide positive support for the port industry.

Against these conditions, the Company demonstrated sound resilience and adaptability. In line with the strategic policy direction of its parent company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PMT focused its 2025 agenda on corporate restructuring, improving non-container service quality, standardizing operations, and strengthening organizational capabilities.

The Company's financial performance showed a strong recovery. Consolidated operating revenue grew by 6.93% to Rp5.67 trillion, while net profit increased by 94.90% to Rp525.75 billion, alongside well-controlled operating expenses. These achievements demonstrate the Company's ability to capture market opportunities, improve revenue quality, and maintain cost discipline.

Based on these developments, the Board of Commissioners considers that PMT is moving in the right direction in strengthening its business fundamentals, maintaining operational continuity, and enhancing long-term competitiveness. Going forward, attention should remain focused on achieving RKAP financial targets, optimizing assets, accelerating data and system integration, and strengthening the execution of strategic programs across PMT Group entities.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN MANAGING THE COMPANY AND THE BASIS FOR THIS ASSESSMENT

The assessment of the Board of Directors' performance in 2025 was carried out by considering financial, operational, strategic, and governance achievements. The basis for this assessment included the 2025 financial statements audited by the public accounting firm Purwantono, Susanti & Surja, performance realization reports based on Key Performance Indicators (KPIs), and the results of corporate governance implementation assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) framework.

Pada aspek keuangan, Direksi berhasil meningkatkan pendapatan usaha konsolidasian sebesar 6,93% menjadi Rp5,67 triliun, terutama ditopang oleh kontribusi positif dari segmen pengelolaan terminal, pengusahaan alat, dan pengelolaan pas pelabuhan. Profitabilitas menunjukkan pemulihan yang sangat kuat: laba usaha meningkat 104,56% menjadi Rp639,13 miliar dan laba tahun berjalan tumbuh 94,90% menjadi Rp525,75 miliar, didukung oleh kenaikan beban operasi yang terkendali sebesar 1,13%.

Namun demikian, sejumlah indikator keuangan masih belum mencapai target RKAP 2025, antara lain pendapatan operasi sebesar 90,58%, EBITDA sebesar 64,61%, serta laba setelah pajak sebesar 78,82% dari target. Kondisi ini menjadi perhatian Dewan Komisaris agar Direksi terus memperkuat efisiensi biaya, mengoptimalkan struktur pendapatan bernilai tambah tinggi, serta meningkatkan utilisasi aset untuk mempersempit kesenjangan terhadap target pada periode mendatang.

Likuiditas dan struktur keuangan Perusahaan tetap terjaga dalam batas yang sehat. Kas dan setara kas akhir tahun meningkat 19,38% menjadi Rp2,00 triliun, sementara arus kas neto dari aktivitas operasi tumbuh sangat kuat menjadi Rp875,60 miliar. Struktur permodalan Perusahaan tetap ditopang sepenuhnya oleh ekuitas tanpa utang berbasis bunga, sehingga mencerminkan tingkat leverage yang rendah dan fleksibilitas keuangan yang baik. Total aset Perusahaan meningkat 11,03% menjadi Rp4,45 triliun.

Pada aspek operasional, Direksi mampu menjaga momentum di tengah dinamika permintaan komoditas. Trafik arus barang konsolidasi tercatat 113,22 juta ton, ditopang pertumbuhan pada segmen bag cargo, kendaraan/Ro-Ro, gas, hewan, petikemas, dan curah cair, yang mengimbangi penurunan general cargo dan stabilnya curah kering. Kapasitas alat produksi diperkuat menjadi 598 unit, sementara kualitas layanan ditingkatkan melalui standardisasi operasional serta penguatan Key Account Management.

Dari sisi kinerja nonkeuangan, capaian KPI Direksi tahun 2025 tercatat sebesar 100,07%, di atas target skor 100. Meskipun aspek Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, khususnya unsur finansial EBITDA, Pendapatan, dan BOPO, belum sepenuhnya tercapai, empat aspek lainnya, yaitu Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta, berhasil tercapai atau melampaui target. Capaian ini menunjukkan ketepatan prioritas Direksi dalam membangun model layanan multipurpose yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Kualitas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga menunjukkan perkembangan positif. Penerapan metode Social Return on Investment (SROI) pada program unggulan menghasilkan rasio 2,90 pada kolaborasi dengan FKS Grup, yang berarti setiap Rp1 investasi menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp2,90 bagi masyarakat,

On the financial side, the Board of Directors succeeded in increasing consolidated operating revenue by 6.93% to Rp5.67 trillion, mainly supported by positive contributions from the terminal management, equipment leasing, and port pass management segments. Profitability showed a very strong recovery: operating profit increased by 104.56% to Rp639.13 billion, and net profit for the year grew by 94.90% to Rp525.75 billion, supported by controlled growth in operating expenses of 1.13%.

Nevertheless, several financial indicators remained below the 2025 RKAP targets, including operating revenue achievement of 90.58%, EBITDA of 64.61%, and profit after tax of 78.82% of target. This condition remains a concern for the Board of Commissioners, which expects the Board of Directors to continue strengthening cost efficiency, optimizing high-value-added revenue streams, and increasing asset utilization to narrow the gap to target in future periods.

The Company's liquidity and financial structure remained within healthy limits. Cash and cash equivalents at year-end increased by 19.38% to Rp2.00 trillion, while net cash flow from operating activities grew strongly to Rp875.60 billion. The Company's capital structure remained fully supported by equity with no interest-bearing debt, reflecting low leverage and sound financial flexibility. Total assets increased by 11.03% to Rp4.45 trillion.

Operationally, the Board of Directors was able to maintain momentum amid fluctuating commodity demand. Consolidated cargo traffic was recorded at 113.22 million tons, supported by growth in the bag cargo, vehicle/Ro-Ro, gas, livestock, container, and liquid bulk segments, which offset the decline in general cargo and stable dry bulk traffic. Production equipment capacity was strengthened to 598 units, while service quality was improved through operational standardization and the strengthening of Key Account Management.

From a non-financial performance perspective, the Board of Directors' KPI achievement for 2025 was recorded at 100.07%, above the target score of 100. Although the Economic and Social Value for Indonesia aspect, particularly the financial elements of EBITDA, Revenue, and BOPO, was not yet fully achieved, the other four aspects, namely Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Growth, and Talent Development, were achieved or exceeded their targets. These achievements demonstrate the Board of Directors' sound prioritization in building a more integrated and technology-based multipurpose service model.

The quality of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program also showed positive development. The application of the Social Return on Investment (SROI) methodology to flagship programs resulted in a ratio of 2.90 for the collaboration with FKS Group, meaning that every Rp1 of investment generated Rp2.90 in

serta rasio 2,65 pada Program Air Bersih "Sebernaman". Capaian ini menegaskan transformasi TJSL Perusahaan dari kegiatan filantropis menjadi program pemberdayaan masyarakat yang dampaknya dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen Direksi dalam menanamkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga tercermin dari penguatan sistem pengendalian internal, pelaksanaan kode etik, serta pengelolaan risiko strategis berbasis prinsip kehati-hatian. Skor asesmen GCG berbasis ACGS sebesar 96,47 dengan predikat "Very Good", meningkat dari 86,03 pada penilaian sebelumnya, menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik terhadap praktik tata kelola perusahaan berstandar internasional.

Dengan mempertimbangkan seluruh indikator tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Direksi selama tahun 2025. Meski masih terdapat tantangan dalam pencapaian target finansial tertentu, Direksi telah menunjukkan kinerja yang solid dan kepemimpinan yang kredibel dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dukungan Dewan Komisaris tetap diarahkan pada percepatan transformasi digital dan penguatan sinergi dengan Grup Pelindo dalam optimalisasi layanan *multipurpose* pada tahun 2026.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perusahaan sepanjang tahun 2025 melalui mekanisme rapat berkala, evaluasi kinerja manajemen, serta pengawasan atas kesesuaian pelaksanaan program kerja dengan arah transformasi jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RJPP 2025–2029. Strategi yang disusun Direksi merujuk pada kerangka House of Strategy yang mencakup satu pilar korporasi dan tiga pilar strategis, yang menjadi fondasi bagi penguatan PMT sebagai anak usaha terminal nonpetikemas di lingkungan Pelindo.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025, Dewan Komisaris terlibat aktif dalam pembahasan dengan Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris. Fokus pengawasan diarahkan untuk memastikan keselarasan strategi tahunan dengan RJPP, kecermatan asumsi terhadap dinamika pasar logistik nasional, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.

Sejumlah prioritas strategis mendapat perhatian khusus, terutama penataan struktur korporasi dan antisipasi dampak Revisi UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Direksi telah menindaklanjuti agenda tersebut melalui perubahan status sejumlah terminal PMT Grup menjadi *dedicated terminal* (terminalisasi), disertai usulan penetapan tarif baru sebagai

social benefit for the community, as well as a ratio of 2.65 for the "Sebernaman" Clean Water Program. These achievements affirm the transformation of the Company's TJSL from philanthropic activities into community empowerment programs with accountable impacts.

The Board of Directors' commitment to embedding sound corporate governance principles was also reflected in the strengthening of the internal control system, the implementation of the code of ethics, and the management of strategic risks based on prudential principles. The ACGS-based GCG assessment score of 96.47, with a "Very Good" rating, an increase from 86.03 in the previous assessment, indicates a very good level of compliance with internationally benchmarked corporate governance practices.

Taking all these indicators into account, the Board of Commissioners commends the Board of Directors' performance during 2025. Although challenges remain in achieving certain financial targets, the Board of Directors demonstrated solid performance and credible leadership in creating sustainable value for all stakeholders. The Board of Commissioners' support remains directed toward accelerating digital transformation and strengthening synergy with the Pelindo Group in optimizing multipurpose services in 2026.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' OVERSIGHT OF THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGY

The Board of Commissioners actively carried out its oversight function over the formulation and implementation of the Company's strategy throughout 2025 through periodic meeting mechanisms, evaluations of management performance, and oversight of the alignment of work program implementation with the long-term transformation direction set out in the 2025–2029 RJPP. The strategy formulated by the Board of Directors refers to the House of Strategy framework, which comprises one corporate pillar and three strategic pillars, serving as the foundation for strengthening PMT as Pelindo's non-container terminal subsidiary.

In the process of preparing the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners was actively involved in discussions with the Board of Directors and the Committees under the Board of Commissioners. Oversight focused on ensuring the alignment of annual strategy with the RJPP, the soundness of assumptions regarding national logistics market dynamics, and the application of prudential principles in financial management and business development.

A number of strategic priorities received particular attention, especially corporate restructuring and anticipation of the impact of the revision to Shipping Law No. 17 of 2008. The Board of Directors followed up on this agenda through the reclassification of several PMT Group terminals into dedicated terminal status (terminalisasi), accompanied

bagian dari standardisasi komersial. Langkah ini merupakan respons strategis yang tidak hanya bersifat mitigatif terhadap perubahan regulasi, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi pasar dan pendapatan Perusahaan ke depan.

Perhatian pengawasan juga diberikan pada digitalisasi dan integrasi data layanan, optimalisasi aset terminal, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan layanan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Realisasi strategi dipantau melalui laporan berkala Direksi, baik laporan triwulanan, laporan kinerja bulanan, maupun paparan khusus atas proyek-proyek strategis.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebagian besar program kerja strategis tahun 2025 telah diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan tepat waktu. Hal ini tercermin dari capaian KPI Direksi sebesar 100,07%, realisasi investasi konsolidasian sebesar Rp303,39 miliar, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai terminal yang dikelola Perusahaan. Direksi dinilai mampu menerjemahkan strategi korporasi menjadi rencana aksi yang terukur dan responsif terhadap perubahan lingkungan usaha.

FREKUENSI DAN MEKANISME PEMBERIAN NASIHAT OLEH DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilaksanakan secara aktif, berkelanjutan, dan konstruktif. Mekanisme tersebut dilakukan dalam forum formal, seperti rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta dalam bentuk surat resmi, diskusi strategis, dan komunikasi lain yang relevan dengan kebutuhan pengawasan.

Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh 21 kali rapat internal Dewan Komisaris, 12 kali rapat gabungan dengan Direksi, serta partisipasi dalam 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Forum-forum tersebut digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja, membahas isu utama perusahaan, strategi dan profil risiko korporat, penataan organisasi cabang, serta memberikan arahan atas langkah-langkah strategis Direksi.

Mekanisme pemberian nasihat sepanjang tahun 2025 terlaksana efektif, tepat sasaran, dan mendukung kualitas pengambilan keputusan manajerial. Pola komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan saling mendukung menjadi landasan penting bagi sinergi kelembagaan, serta memperkuat kualitas tata kelola dan ketahanan Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

by proposed new tariff structures as part of commercial standardization. This measure is a strategic response that is not only mitigative against regulatory change, but also has the potential to strengthen the Company's market position and future revenue.

Oversight attention was also directed toward digitalization and service data integration, terminal asset optimization, operational efficiency improvement, and service development to support government priority programs. Strategy realization was monitored through periodic reports from the Board of Directors, including quarterly reports, monthly performance reports, and special presentations on strategic projects.

The results of this oversight show that most of the strategic work programs for 2025 were implemented consistently, effectively, and on schedule. This was reflected in the Board of Directors' KPI achievement of 100.07%, consolidated investment realization of Rp303.39 billion, and improved efficiency and productivity across the Company's terminals. The Board of Directors is considered capable of translating corporate strategy into measurable action plans while remaining responsive to changes in the business environment.

FREQUENCY AND MECHANISM OF ADVICE GIVEN BY THE BOARD OF COMMISSIONERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, the oversight and advisory functions toward the Board of Directors were carried out actively, continuously, and constructively. These mechanisms were implemented through formal forums, such as joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as official letters, strategic discussions, and other communications relevant to oversight needs.

The implementation of these functions was supported by 21 internal Board of Commissioners meetings, 12 joint meetings with the Board of Directors, and participation in 2 (two) Annual General Meetings of Shareholders (GMS). These forums were used to evaluate performance achievements, discuss key company issues, corporate strategy and risk profiles, branch organizational structuring, and provide direction on the Board of Directors' strategic initiatives.

The mechanism for providing advice throughout 2025 was implemented effectively, was well-targeted, and supported the quality of managerial decision-making. An open, constructive, and mutually supportive communication pattern became an important foundation for institutional synergy, while strengthening the quality of governance and the Company's resilience in facing various challenges.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Prospek usaha yang disusun Direksi telah dirumuskan secara cermat dan komprehensif dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keberlangsungan serta pertumbuhan usaha Perusahaan. Proyeksi tersebut tidak hanya mencerminkan strategi jangka pendek dan menengah, tetapi juga selaras dengan arah transformasi dalam RJPP 2025-2029.

Dari sisi eksternal, kebijakan pemerintah yang mendorong integrasi pelabuhan, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur nasional, serta pengembangan IKN memberikan peluang strategis bagi PMT untuk memperluas perannya sebagai operator terminal nonpetikemas yang andal dan terstandarisasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik pada kisaran 5,3%-5,6% pada tahun 2026 turut memperkuat optimisme terhadap peningkatan permintaan jasa terminal.

Dari sisi internal, rencana pengembangan terminal berbasis komoditas dan kawasan industri, perluasan layanan di luar wilayah Pelindo Grup, percepatan transformasi digital, serta optimalisasi peran anak usaha menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan. RKAP 2026 yang menargetkan pendapatan operasi sebesar Rp6,15 triliun dan laba bersih Rp575,50 miliar dinilai realistis namun tetap progresif, dengan mempertimbangkan kapasitas organisasi dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Perusahaan juga telah menunjukkan kapasitas untuk bersaing di segmen pengelolaan pelabuhan pihak ketiga, sebagaimana tercermin dari keberhasilan perikatan kerja sama Port Management System dengan TUKS Bumi Sarana Perbatasan (BSP) Nunukan yang telah efektif dioperasikan sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini menjadi landasan positif bagi perluasan peran PMT di luar wilayah Pelindo Grup.

Meski demikian, tahun 2026 tetap perlu dihadapi dengan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan pola distribusi barang, dinamika regulasi kepelabuhanan, kesiapan integrasi sistem dan data antarcabang, utilisasi aset dan alat produksi, meningkatnya persaingan layanan TUKS dan Ship-to-Ship (STS) dari operator lain, serta meningkatnya kebutuhan pemenuhan aspek ESG dan kesiapan pengungkapan keberlanjutan. Tantangan tersebut memerlukan penguatan eksekusi strategi, disiplin investasi, pengelolaan risiko yang lebih adaptif, serta koordinasi erat dengan Pelindo Grup, anak perusahaan, pelanggan, dan mitra strategis.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The business prospects prepared by the Board of Directors were formulated carefully and comprehensively by considering external and internal factors affecting the Company's business continuity and growth. These projections reflect not only short and medium-term strategy, but also alignment with the transformation direction set out in the 2025-2029 RJPP.

Externally, government policies promoting port integration, natural resource downstreaming, national infrastructure development, and the development of the IKN provide PMT with strategic opportunities to expand its role as a reliable and standardized non-container terminal operator. Projected domestic economic growth in the range of 5.3%-5.6% in 2026 further supports optimism regarding increased demand for terminal services.

Internally, plans to develop commodity and industrial estate-based terminals, expand services beyond the Pelindo Group area, accelerate digital transformation, and optimize the role of subsidiaries serve as important foundations for improving competitiveness and strengthening financial performance on a sustainable basis. The 2026 RKAP, which targets operating revenue of Rp6.15 trillion and net profit of Rp575.50 billion, is considered realistic yet progressive, taking into account organizational capacity and the readiness of supporting infrastructure.

The Company has also demonstrated its capacity to compete in the third-party port management segment, as reflected in the successful Port Management System partnership with TUKS Bumi Sarana Perbatasan (BSP) Nunukan, which was effectively operated throughout 2025. This achievement provides a positive foundation for expanding PMT's role beyond the Pelindo Group area.

Nevertheless, 2026 should still be approached with vigilance toward commodity price fluctuations, changes in goods distribution patterns, port regulatory dynamics, readiness of system and data integration between branches, asset and production equipment utilization, intensifying competition in TUKS and Ship-to-Ship (STS) services from other operators, and the growing need to meet ESG requirements and sustainability disclosure readiness. These challenges require strengthened strategy execution, investment discipline, more adaptive risk management, and close coordination with the Pelindo Group, subsidiaries, customers, and strategic partners.

Dengan pendekatan yang prudent dan berbasis asumsi yang wajar, proyeksi usaha Direksi dinilai mencerminkan strategi yang adaptif terhadap dinamika pasar dan risiko usaha. Dewan Komisaris menyetujui rencana dan prospek usaha tersebut, disertai arahan agar pelaksanaannya ditinjau secara berkala untuk menjaga relevansi dan ketepatan eksekusi.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SEPANJANG TAHUN 2025

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PMT sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif dan semakin selaras dengan arah penguatan tata kelola di Pelindo Grup. Prinsip TARIFT, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness, dan Trusted, menjadi kerangka dasar dalam membangun sistem tata kelola yang kredibel, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola berkelanjutan, Perusahaan juga menyelaraskan penerapan prinsip ETAK, yaitu Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan, khususnya dalam menjawab tuntutan transformasi digital dan agenda keberlanjutan. Komitmen tersebut tercermin dari peningkatan skor asesmen GCG berbasis ACGS menjadi 96,47 dengan predikat “Very Good”, naik dari 86,03 pada penilaian sebelumnya.

Direksi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas tata kelola melalui penyempurnaan dan ratifikasi pedoman perangkat GCG, penguatan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), penyempurnaan mekanisme Whistleblowing System (WBS), serta berbagai inovasi penerapan GCG, termasuk pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence dan program edukasi integritas.

Dari sisi keberlanjutan, integrasi ESG ke dalam tata kelola Perusahaan semakin diperkuat sejalan dengan arahan Pelindo selaku induk perusahaan. Integrasi tersebut tercermin melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan, pelaksanaan program TJSL yang mulai diukur dampaknya, penguatan sistem manajemen risiko yang memperhatikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta kesiapan terhadap pengungkapan keberlanjutan berbasis SPK 1 dan SPK 2. Dewan Komisaris mendorong agar integrasi ESG tidak berhenti pada pelaporan, tetapi terus diturunkan ke dalam strategi, RKM, pengelolaan risiko, sistem informasi, dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara berkala.

With a prudent approach based on reasonable assumptions, the Board of Directors’ business projections are considered to reflect a strategy that is adaptive to market dynamics and business risks. The Board of Commissioners approves the business plans and prospects, accompanied by direction that their implementation be reviewed periodically to maintain relevance and execution accuracy.

THE BOARD OF COMMISSIONERS’ VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF SOUND CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION THROUGHOUT 2025

The implementation of sound corporate governance within PMT throughout 2025 showed positive development and was increasingly aligned with the direction of governance strengthening across the Pelindo Group. The TARIFT principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trustworthiness, serve as the basic framework for building a governance system that is credible, measurable, and adaptive to business environment dynamics.

As part of strengthening sustainable governance, the Company also aligned its implementation of the ETAK principles, namely Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability, particularly in responding to the demands of digital transformation and the sustainability agenda. This commitment was reflected in the increase in the ACGS-based GCG assessment score to 96.47, with a “Very Good” rating, up from 86.03 in the previous assessment.

The Board of Directors demonstrated a strong commitment to maintaining governance quality through the refinement and ratification of GCG instrument guidelines, the strengthening of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP), the refinement of the Whistleblowing System (WBS) mechanism, and various GCG implementation innovations, including the use of artificial intelligence technology and integrity education programs.

From a sustainability perspective, ESG integration into the Company’s governance was further strengthened in line with the direction set by Pelindo as the parent company. This integration was reflected in the preparation of the Sustainability Report, the implementation of the TJSL program with impact measurement beginning to be applied, the strengthening of a risk management system that takes environmental, social, and governance issues into account, and readiness for sustainability disclosures based on SPK 1 and SPK 2. The Board of Commissioners encourages ESG integration to go beyond reporting and be further embedded into strategy, RKM, risk management, information systems, and performance indicators that can be evaluated periodically.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dijalankan Perusahaan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang baik dan mendukung tata kelola yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada mitigasi risiko. SPI diimplementasikan sebagai bagian integral dari proses bisnis dengan mengacu pada kerangka COSO 2013, sehingga setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Efektivitas pengendalian internal diperkuat melalui penerapan proses pengendalian pada 15 risiko strategis Perusahaan. Koordinasi antara Satuan Pengawasan Intern dan Komite Audit di bawah Dewan Komisaris juga terus ditingkatkan untuk memastikan proses evaluasi dan tindak lanjut atas temuan audit berjalan independen, tepat waktu, dan memberi nilai tambah bagi perbaikan proses bisnis.

Berdasarkan evaluasi atas laporan berkala, pemaparan hasil audit internal dan eksternal, serta forum komunikasi strategis, SPI PMT telah memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan perusahaan, perlindungan aset, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Penguatan sistem manajemen risiko menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan ketahanan operasional PMT di tengah kompleksitas tantangan eksternal. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan membangun kerangka pengelolaan risiko yang semakin terstruktur, terukur, dan adaptif dengan mengacu pada standar ISO 31000:2018 serta kerangka kerja yang ditetapkan Pelindo Grup.

Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah pemanfaatan aplikasi PRiMa sebagai platform digital untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas manajemen risiko secara real-time. Implementasi ini meningkatkan efektivitas pemantauan, transparansi, dan integrasi data risiko, sehingga proses pengambilan keputusan dapat didukung oleh informasi risiko yang lebih mutakhir.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System (SPI) implemented by the Company throughout 2025 demonstrated a good level of effectiveness and supported governance that is accountable, transparent, and oriented toward risk mitigation. The SPI is implemented as an integral part of business processes with reference to the COSO 2013 framework, ensuring that every operational activity is carried out in accordance with applicable provisions and aligned with sound corporate governance principles.

The effectiveness of internal control was strengthened through the implementation of control processes covering 15 strategic risks of the Company. Coordination between the Internal Audit Unit and the Audit Committee under the Board of Commissioners was also continuously enhanced to ensure that evaluation and follow-up processes for audit findings are carried out independently, on time, and provide added value for business process improvement.

Based on the evaluation of periodic reports, presentations of internal and external audit results, and strategic communication forums, PMT's SPI has provided reasonable assurance regarding the achievement of the Company's objectives, asset protection, the reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

sustainability and operational resilience amid the complexity of external challenges. Throughout 2025, the Company developed a risk management framework that is increasingly structured, measurable, and adaptive, with reference to the ISO 31000:2018 standard and the framework established by the Pelindo Group.

One prominent strategic step was the use of the PRiMa application as a digital platform for documenting all risk management activities on a real-time basis. This implementation improved the effectiveness of monitoring, transparency, and risk data integration, enabling decision-making processes to be supported by more current risk information.

Hasil penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) tahun 2025 tercatat sebesar 84,80 dengan predikat "Fair". Capaian ini menjadi dasar bagi peningkatan maturitas manajemen risiko pada periode berikutnya. Dewan Komisaris mendorong penguatan kebijakan, proses, dan budaya risiko, termasuk pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan predictive analytics, integrasi sistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) lintas entitas, serta peningkatan agility organisasi dalam merespons risiko yang bersifat disruptif.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DAN PERAN DEWAN KOMISARIS

Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/ WBS) merupakan salah satu pilar penguatan integritas dan transparansi dalam tata kelola Perusahaan. Implementasi WBS di lingkungan PMT sepanjang tahun 2025 menunjukkan arah yang positif, dengan struktur pelaporan yang terstandarisasi, alur yang jelas, serta komitmen terhadap perlindungan pelapor.

Komite Audit di bawah Dewan Komisaris turut memantau efektivitas sistem ini melalui evaluasi pelaksanaan dan pemberian masukan untuk penguatan lebih lanjut. Manajemen juga didorong untuk memperluas cakupan edukasi dan mengembangkan kanal pelaporan digital, sehingga WBS tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga instrumen pencegahan dini dalam membangun organisasi yang bersih dan berintegritas.

The Risk Management Implementation Quality (KPMR) assessment result for 2025 was recorded at 84.80, with a "Fair" rating. This achievement provides a basis for improving risk management maturity in the next period. The Board of Commissioners encourages the strengthening of risk policies, processes, and culture, including HR competency development, the use of predictive analytics, cross-entity integration of Governance, Risk, and Compliance (GRC) systems, and increased organizational agility in responding to disruptive risks.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) AND THE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The whistleblowing reporting system (Whistleblowing System/WBS) is one of the pillars for strengthening integrity and transparency in the Company's governance. The implementation of the WBS within PMT throughout 2025 showed a positive direction, with a standardized reporting structure, clear process flow, and commitment to reporter protection.

The Audit Committee under the Board of Commissioners also monitored the effectiveness of this system through implementation evaluations and input for further strengthening. Management was also encouraged to expand the scope of education and develop digital reporting channels, so that the WBS functions not only as a reporting channel, but also as an early prevention instrument in building a clean organization with integrity.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Seluruh komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi, telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, profesional, dan berintegritas sepanjang tahun 2025.

Komite Audit secara konsisten melakukan penelaahan atas laporan keuangan, pengendalian internal, serta efektivitas proses audit internal dan eksternal, dengan menyelenggarakan 33 kali rapat sepanjang tahun 2025. Komite Pemantau Risiko berperan aktif mengawal sistem manajemen risiko Perusahaan dan juga menyelenggarakan 33 kali rapat. Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan peran strategis dalam memastikan kebijakan dan sistem remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan jumlah rapat sebanyak 33 kali sepanjang tahun 2025. Dukungan ketiga komite tersebut memperkuat efektivitas pengawasan Dewan Komisaris, terutama dalam aspek akuntabilitas pelaporan, pengelolaan risiko, dan kebijakan remunerasi yang selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Sepanjang tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris melalui mekanisme Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan yang terjadi sepanjang tahun 2025 adalah pemberhentian dengan hormat Bapak Thanon Aria Dewangga sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2025.

Setelah berakhirnya tahun buku 2025 hingga tanggal penerbitan Laporan Tahunan ini, terdapat penyesuaian lebih lanjut, yaitu pemberhentian dengan hormat Bapak Ahmad Perwira Mulia Tarigan dari jabatannya sebagai Komisaris terhitung sejak 20 April 2026, pengangkatan Bapak Gugun Gumilar sebagai Komisaris, serta pengangkatan Ibu Elly Rosita Silaban sebagai Komisaris Independen. Dengan susunan tersebut, jumlah anggota Dewan Komisaris tercatat sebanyak 6 (enam) orang, dengan proporsi Komisaris Independen sebanyak 4 (empat) orang atau setara 66,67%, sehingga memenuhi ketentuan minimal 20%.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

All committees under the coordination of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, carried out their duties and responsibilities effectively, professionally, and with integrity throughout 2025.

The Audit Committee consistently reviewed the financial statements, internal controls, and the effectiveness of internal and external audit processes, holding 33 meetings throughout 2025. The Risk Oversight Committee played an active role in overseeing the Company's risk management system and also held 33 meetings. Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee carried out a strategic role in ensuring remuneration policies and systems for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, holding a total of 33 meetings throughout 2025. The support of these three committees strengthened the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight, particularly in the areas of reporting accountability, risk management, and remuneration policies aligned with sound corporate governance principles.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE REASONS THEREFOR

Throughout 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) adjusted the composition of its Board of Commissioners through a Circular Resolution of Shareholders in Lieu of a General Meeting of Shareholders. The change that took place during 2025 was the honorable discharge of Mr. Thanon Aria Dewangga from his position as Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal, effective August 27, 2025.

Following the end of the 2025 financial year and up to the date of issuance of this Annual Report, further adjustments were made, namely the honorable discharge of Mr. Ahmad Perwira Mulia Tarigan from his position as Commissioner, effective April 20, 2026; the appointment of Mr. Gugun Gumilar as Commissioner; and the appointment of Mrs. Elly Rosita Silaban as Independent Commissioner. With this composition, the number of members of the Board of Commissioners stands at 6 (six), with Independent Commissioners comprising 4 (four) members, or 66.67%, thereby satisfying the minimum requirement of 20%.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER TANGGAL PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AS OF THE DATE OF ISSUANCE OF THIS ANNUAL REPORT

Nama Name	Jabatan Position
Darwanto	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner
Arman Depari	Komisaris Commissioner
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Komisaris Independen Independent Commissioner
Gugun Gumilar	Komisaris Commissioner
Aan Rusdianto	Komisaris Independen Independent Commissioner
Elly Rosita Silaban	Komisaris Independen Independent Commissioner

PENUTUP

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh insan PT Pelindo Multi Terminal atas dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi yang konsisten sepanjang tahun 2025. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, intensitas persaingan industri, serta meningkatnya kompleksitas regulasi dan tuntutan pemangku kepentingan, Perusahaan tetap mampu menjaga kinerja operasional yang solid, membukukan pemulihan profitabilitas yang kuat, dan melanjutkan agenda transformasi secara terarah.

Sebagai mitra strategis, Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan konstruktif, dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan sinergi seluruh elemen perusahaan, PMT optimistis untuk terus menciptakan nilai tambah dan berkontribusi pada penguatan integrasi ekosistem logistik nasional secara berkelanjutan.

CLOSING

The Board of Commissioners extends its high appreciation to the Board of Directors and all personnel of PT Pelindo Multi Terminal for their dedication, hard work, and consistent collaboration throughout 2025. Amid global economic uncertainty, intensifying industry competition, and increasing regulatory complexity and stakeholder demands, the Company was able to maintain solid operational performance, record a strong recovery in profitability, and continue its transformation agenda in a focused manner.

As a strategic partner, the Board of Commissioners is committed to carrying out its oversight function professionally, independently, and constructively, while upholding integrity, transparency, and accountability. With the synergy of all elements of the Company, PMT is optimistic about continuing to create added value and contribute to strengthening the integration of the national logistics ecosystem on a sustainable basis.

Medan, 8 Mei 2026
Medan, May 8, 2026

Atas nama Dewan Komisaris
PT Pelindo Multi Terminal
On behalf of the Board of Commissioners
PT Pelindo Multi Terminal



Darwanto
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors' Report



Ary Henryanto
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Direksi PT Pelindo Multi Terminal (PMT), menyampaikan laporan atas kinerja Perusahaan selama tahun buku 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan serta bagian dari komitmen kami dalam menerapkan prinsip governansi korporat yang baik, berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2025 berlangsung di tengah perekonomian global yang menunjukkan ketahanan yang cukup baik. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,3%, sementara tekanan inflasi global berangsur mereda menjadi sekitar 4,2% seiring normalisasi harga energi dan membaiknya rantai pasok. Meskipun demikian, ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta fluktuasi harga komoditas masih menjadi faktor yang perlu dicermati oleh pelaku industri logistik.

Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan 5,11% sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan 5,03% pada tahun 2024. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 8,78%, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan mobilitas logistik nasional. Kondisi ini memperkuat peran terminal nonpetikemas sebagai simpul penting dalam rantai pasok nasional, sekaligus membuka peluang bagi PMT untuk memperkuat kinerja operasional dan memperluas pangsa pasar.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025–2029, yang menempatkan PMT pada fase "*Enhancing Internal Business and Service Excellence*". Pada fase ini, Perusahaan memfokuskan diri pada penguatan bisnis internal serta peningkatan cakupan dan kualitas layanan nonpetikemas di lingkungan Pelindo Grup. Di tengah berbagai tantangan, PMT berhasil membukukan pemulihan profitabilitas yang signifikan, dengan laba tahun berjalan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada fase tersebut, PMT juga memperkuat transformasi terminal nonpetikemas sebagai agenda strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan layanan. Melalui standardisasi operasi, sistemisasi proses, integrasi data, pengembangan layanan berbasis komoditas, serta perluasan kemitraan di dalam dan di luar lingkungan Pelindo Grup, PMT membangun model operasi terminal multipurpose yang lebih seragam, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan rantai pasok nasional. Pendekatan ini menjadi pembeda PMT

Esteemed Shareholders And Stakeholders,

With gratitude to God Almighty, we, the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal (PMT), present this report on the Company's performance during the 2025 financial year. This report has been prepared as a form of accountability for the execution of the Company's management functions and as part of our commitment to implementing sound corporate governance principles grounded in integrity, transparency, and accountability for the benefit of all stakeholders.

The year 2025 unfolded amid a global economy that demonstrated fairly solid resilience. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth of 3.3%, while global inflationary pressure gradually eased to around 4.2% in line with the normalization of energy prices and improving supply chains. Nevertheless, geopolitical uncertainty, trade fragmentation, and commodity price fluctuations remained factors that logistics industry players needed to monitor closely.

Amid these dynamics, Indonesia's economy remained solid, growing 5.11% throughout 2025, higher than the 5.03% recorded in 2024. The transportation and warehousing sector was among the fastest-growing sectors, reaching 8.78% growth, reflecting increased goods distribution activity and national logistics mobility. This condition reinforced the role of non-container terminals as a vital node in the national supply chain, while also opening opportunities for PMT to strengthen operational performance and expand market share.

The year 2025 marked the first year of implementation of the Company's Long-Term Corporate Plan (RJPP) 2025–2029, which positions PMT in the "Enhancing Internal Business and Service Excellence" phase. During this phase, the Company focuses on strengthening its internal business and enhancing the scope and quality of non-container services within Pelindo Group. Amid numerous challenges, PMT successfully achieved a significant recovery in profitability, with profit for the year increasing compared to the previous year.

In that phase, PMT also strengthened the transformation of non-container terminals as a strategic agenda to enhance competitiveness and service sustainability. Thru the standardization of operations, systematization of processes, data integration, development of commodity-based services, and expansion of partnerships within and outside the Pelindo Group environment, PMT built a more uniform, adaptive, and supply chain-oriented multipurpose terminal operation model. This approach distinguishes PMT as a subsidiary

sebagai Anak Usaha yang berperan mengorkestrasi ekosistem nonpetikemas, sekaligus memperkuat kontribusi Perusahaan terhadap efisiensi logistik dan konektivitas Indonesia.

Melalui laporan ini, Direksi juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra usaha, pelanggan, serta insan PMT yang telah berperan penting dalam menjaga kesinambungan operasional dan mendukung pencapaian target Perusahaan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, PMT menjalankan strategi dan kebijakan strategis dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025–2029, arahan strategis Pelindo sebagai *holding*, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RJPP 2025–2029 dan menjadi fase awal yang penting bagi PMT dalam memperkuat fondasi bisnis nonpetikemas. Pada fase "*Enhancing Internal Business and Service Excellence*", fokus utama Perusahaan diarahkan pada pembenahan bisnis internal, peningkatan cakupan dan kualitas layanan nonpetikemas, penataan struktur korporasi PMT Grup, pembaruan model dan kesepakatan bisnis, perluasan pangsa pasar pada *captive market*, standardisasi operasional, penguatan integrasi data, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

Penetapan strategi tahun 2025 juga mempertimbangkan sejumlah asumsi dan faktor utama yang menjadi dasar penyusunan RKAP, antara lain pertumbuhan trafik pada cabang eksisting sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi nasional dan daerah, beroperasinya secara penuh cabang hasil Serah Terima Operasi (STO) Tahap III, penyesuaian tarif pada sejumlah cabang, pengembangan kerja sama strategis di Pelabuhan Kijing, rencana pengembangan layanan energi dan komoditas, penguatan layanan *handling*, optimalisasi aset dan peralatan, serta pembebanan dan implementasi sistem teknologi informasi yang mendukung standardisasi layanan nonpetikemas.

Dengan mempertimbangkan asumsi tersebut, Direksi menetapkan arah strategi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target keuangan dan operasional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan model bisnis, kualitas layanan, tata kelola, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan agenda strategis PMT ditopang oleh kerangka *House of Strategy* yang menjadi landasan untuk memastikan keselarasan antara prioritas bisnis Perusahaan, kebutuhan pelanggan, dinamika industri kepelabuhanan, serta arah transformasi Pelindo Grup. Kerangka ini terdiri atas satu pilar korporasi dan tiga pilar strategis utama yang saling terintegrasi, yaitu:

that orchestrates the non-container ecosystem, while also strengthening the Company's contribution to Indonesia's logistics efficiency and connectivity.

Through this report, the Board of Directors would also like to extend highest appreciation and gratitude to the Shareholders, Board of Commissioners, business partners, customers, and the people of PMT for their important contributions in maintaining operational continuity and supporting the achievement of the Company's targets.

THE COMPANY'S STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

Throughout 2025, PMT carried out its strategy and strategic policies with reference to the Company's 2025–2029 Long-Term Plan (RJPP) and the strategic direction set by Pelindo as the holding company, which was then translated into the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP). 2025 was the first year of implementation of the 2025–2029 RJPP and marked an important initial phase for PMT in strengthening the foundation of its non-container business. In the "Enhancing Internal Business and Service Excellence" phase, the Company's main focus was directed at improving internal business, enhancing the scope and quality of non-container services, restructuring the PMT Group's corporate structure, renewing business models and agreements, expanding market share in the captive market, standardizing operations, strengthening data integration, and improving human resource capabilities.

The strategy set for 2025 also took into account a number of key assumptions and factors underlying the preparation of the RKAP, including traffic growth at existing branches in line with improving national and regional economic activity, the full operation of branches resulting from Phase III Operational Handover (STO), tariff adjustments at a number of branches, the development of strategic partnerships at Kijing Port, plans to develop energy and commodity services, strengthening of handling services, optimization of assets and equipment, and the implementation of an information technology system to support the standardization of non-container services.

Taking these assumptions into account, the Board of Directors set a strategic direction oriented not only toward achieving financial and operational targets, but also aimed at strengthening the resilience of the business model, service quality, governance, and the creation of long-term value for shareholders and stakeholders.

The implementation of PMT's strategic agenda is supported by the House of Strategy framework, which serves as the foundation for ensuring alignment among the Company's business priorities, customer needs, port industry dynamics, and the direction of the Pelindo Group's transformation. This framework consists of one corporate pillar and three integrated strategic pillars, namely:

1. **Pilar Korporasi: Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis yang Fokus serta Efisien**
   Pilar ini diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan PMT Grup, menata model bisnis, mengoptimalkan hubungan bisnis antara induk dan anak perusahaan, serta memastikan kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi dan struktur industri kepelabuhanan. Dalam konteks ini, PMT juga mencermati perkembangan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran agar posisi bisnis, skema operasi, dan keberlanjutan layanan Perusahaan tetap terjaga.

2. **Pilar Strategis 1: *Services, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio***
   Pilar ini difokuskan pada pengembangan portofolio bisnis berbasis layanan, kargo, komoditas, kemasan, serta kawasan industri. Kebijakan strategis yang dijalankan mencakup:
   a. Pengembangan perencanaan portofolio bisnis pada setiap cabang;
   b. Pengembangan terminal berbasis layanan, komoditas, kemasan, dan/atau kawasan industri;
   c. Pengembangan layanan kepelabuhanan untuk mendukung program prioritas pemerintah;
   d. Pengembangan layanan pelabuhan untuk mendukung kebutuhan logistik Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan pendekatan tersebut, PMT berupaya memperkuat posisi sebagai operator terminal *multipurpose* yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan rantai pasok nasional.

3. **Pilar Strategis 2: *Business Partnership and Synergy***
   Pilar ini diarahkan pada penguatan kemitraan bisnis, sinergi lintas entitas, dan perluasan layanan di dalam maupun di luar lingkungan Pelindo Grup. Kebijakan strategis yang dijalankan mencakup:
   a. Perubahan status menjadi *dedicated terminal* atau terminalisasi;
   b. Pengembangan layanan operasi di luar area Pelindo Grup;
   c. Pengembangan layanan bongkar muat *Ship to Ship* (STS);
   d. Pelaksanaan *joint marketing* layanan kepelabuhanan.

   Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pertumbuhan, meningkatkan utilisasi aset, serta memperkuat konektivitas layanan PMT dalam ekosistem logistik nasional.

4. **Pilar Strategis 3: *Operational and Commercial Excellence***
   Pilar ini diarahkan pada standardisasi, sistemisasi, dan integrasi operasional nonpetikemas di seluruh wilayah operasi. Kebijakan strategis yang dijalankan mencakup:

1. **Corporate Pillar: Restructuring the Corporation Toward a Focused and Efficient Business**
   This pillar is aimed at strengthening the institutional foundation of the PMT Group, restructuring the business model, optimizing the business relationship between the parent company and its subsidiaries, and ensuring the Company's readiness to face changes in port industry regulation and structure. In this context, PMT is also monitoring developments concerning the proposed revision of Law Number 17 of 2008 on Shipping, to safeguard the Company's business position, operating scheme, and service continuity.

2. **Strategic Pillar 1: Services, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio**
   This pillar focuses on developing a business portfolio based on services, cargo, commodities, packaging, and industrial estates. The strategic policies implemented include:
   a. Developing business portfolio plans for each branch;
   b. Developing terminals based on services, commodities, packaging, and/or industrial estates;
   c. Developing port services to support government priority programs;
   d. Developing port services to support the logistics needs of the Nusantara Capital City (IKN).

Through this approach, PMT seeks to strengthen its position as a multipurpose terminal operator that is responsive to market needs and developments in the national supply chain.

3. **Strategic Pillar 2: Business Partnership and Synergy**
   This pillar is aimed at strengthening business partnerships, cross-entity synergy, and the expansion of services both within and outside the Pelindo Group. The strategic policies implemented include:
   a. Converting status to a dedicated terminal or terminalization;
   b. Developing operational services outside the Pelindo Group's area;
   c. Developing Ship to Ship (STS) loading and unloading services;
   d. Implementing joint marketing for port services.

This policy is an important part of expanding sources of growth, increasing asset utilization, and strengthening the connectivity of PMT's services within the national logistics ecosystem.

4. **Strategic Pillar 3: Operational and Commercial Excellence**
   This pillar is aimed at the standardization, systemization, and integration of non-container operations across all areas of operation. The strategic policies implemented include:

a. Standardisasi, sistemisasi, dan integrasi operasional nonpetikemas;
b. Pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan;
c. Optimalisasi aset;
d. Implementasi ESG dengan pengembangan *sustainable ports*;
e. Standardisasi *Customer Relationship Management* (CRM) dan penerapan *Key Account Management* (KAM);
f. Peningkatan *corporate branding* dan *marketing communication*;
g. Optimalisasi skema komersial dengan mitra dan pelanggan.

Pilar ini menjadi dasar bagi PMT untuk meningkatkan konsistensi mutu layanan, memperkuat produktivitas, mempercepat proses bisnis, dan membangun pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh tiga *key enablers*, yaitu:
1. HR & *Organizational Development*, yang diarahkan untuk membangun kapabilitas insan PMT Grup yang selaras dengan kebutuhan bisnis nonpetikemas, termasuk peningkatan kompetensi inti, budaya kinerja, dan internalisasi nilai AKHLAK.
2. *Technology and Innovation*, yang diarahkan untuk memperkuat digitalisasi layanan terminal, integrasi sistem, pengelolaan data, pengembangan *smart ports*, serta pengambilan keputusan berbasis data.
3. *Strategic Financing*, yang diarahkan untuk menjaga kecukupan pendanaan, disiplin investasi, optimalisasi biaya pendanaan, serta penguatan struktur pembiayaan agar agenda pertumbuhan tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk memastikan strategi tersebut dapat diimplementasikan secara lebih operasional, PMT menurunkan arah strategis RJPP dan RKAP ke dalam 25 inisiatif strategis. Inisiatif tersebut mencakup optimalisasi kepatuhan dan tata kelola, pengembangan struktur korporasi, pengembangan portofolio bisnis cabang, pengembangan terminal berbasis layanan dan komoditas, terminalisasi, pengembangan layanan TUKS dan pelabuhan kementerian/lembaga, penguatan layanan STS, standardisasi dan digitalisasi operasional nonpetikemas, pengembangan infrastruktur dan peralatan, optimalisasi aset, Implementasi ESG dengan pengembangan *sustainable ports*, penguatan CRM dan KAM, penataan organisasi, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, *smart ports*, budaya inovasi, pengadaan bersama, serta optimalisasi pendanaan. Inisiatif tersebut menjadi instrumen manajemen untuk memastikan bahwa strategi Perusahaan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan ke dalam program kerja yang memiliki target, penanggung jawab, dan mekanisme pemantauan yang jelas.

a. Standardizing, systemizing, and integrating non-container operations;
b. Developing port infrastructure and equipment;
c. Optimizing assets;
d. ESG Implemetation with developing sustainable ports;
e. Standardizing Customer Relationship Management (CRM) and implementing Key Account Management (KAM);
f. Enhancing corporate branding and marketing communication;
g. Optimizing commercial schemes with partners and customers.

This pillar serves as the basis for PMT to improve consistency in service quality, strengthen productivity, accelerate business processes, and build a better customer experience.

The successful implementation of this strategy is supported by three key enablers, namely:
1. HR & Organizational Development, which is aimed at building the capabilities of PMT Group personnel in line with the needs of the non-container business, including strengthening core competencies, a performance culture, and the internalization of AKHLAK values.
2. Technology and Innovation, which is aimed at strengthening the digitalization of terminal services, system integration, data management, the development of smart ports, and data-driven decision-making.
3. Strategic Financing, which is aimed at maintaining adequate funding, investment discipline, optimizing the cost of funding, and strengthening the financing structure so that the growth agenda continues in accordance with prudential principles.

To ensure that this strategy can be implemented more operationally, PMT has translated the strategic direction of the RJPP and RKAP into 25 strategic initiatives. These initiatives include optimizing compliance and governance, developing the corporate structure, developing branch business portfolios, developing service and commodity based terminals, terminalization, developing TUKS and ministry/agency port services, strengthening STS services, standardizing and digitalizing non-container operations, developing infrastructure and equipment, optimizing assets, ESG implemetation with developing sustainable ports, strengthening CRM and KAM, organizational restructuring, improving HR competencies, developing information technology infrastructure, information technology, smart ports, an innovation culture, joint procurement, and optimizing funding. These initiatives serve as management instruments to ensure that the Company's strategy does not remain merely conceptual, but is translated into work programs with clear targets, persons in charge, and monitoring mechanisms.

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan strategi PMT menunjukkan progres yang positif. Realisasi Rencana Kerja Manajemen (RKM) Strategis secara konsolidasi mencapai 97,20% dari target, yang mencerminkan efektivitas pengawalan Direksi terhadap pelaksanaan agenda strategis lintas entitas PMT Grup. Sebagian besar inisiatif strategis berjalan sesuai rencana, terutama pada aspek standardisasi operasional, digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, pengembangan layanan STS, implementasi *joint marketing*, Implementasi ESG dengan pengembangan *sustainable ports,* penguatan CRM dan KAM, pengembangan *sustainable ports*, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta optimalisasi pendanaan.

Throughout 2025, the implementation of PMT's strategy showed positive progress. Realization of the consolidated Strategic Management Work Plan (RKM) reached 97.20% of target, reflecting the effectiveness of the Board of Directors' oversight of the implementation of the strategic agenda across PMT Group entities. Most strategic initiatives proceeded as planned, particularly in the areas of operational standardization, service digitalization, governance strengthening, STS service development, the implementation of joint marketing, ESG implemetation with developing sustainable ports, the strengthening of CRM and KAM, the development of sustainable ports, improving HR competencies, developing information technology infrastructure, and optimizing funding.

Dalam konteks tersebut, salah satu pencapaian strategis yang paling mencerminkan karakter bisnis PMT adalah penguatan model operasi nonpetikemas yang terstandardisasi, tersistemisasi, dan terintegrasi. PMT tidak hanya mengelola terminal sebagai titik layanan, tetapi juga membangun kerangka operasi yang mampu menyatukan keragaman jenis kargo, komoditas, kemasan, pola pelayanan, dan kebutuhan pelanggan dalam satu pendekatan layanan terminal multipurpose yang lebih konsisten. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas, penguatan kualitas layanan, akurasi pengendalian operasional, dan efisiensi rantai pasok.

In that context, one of the strategic achievements that most reflects the character of PMT's business is the strengthening of the standardized, systematized, and integrated non-containerized operation model. PMT not only manages terminals as service points but also builds an operational framework capable of uniting the diversity of cargo types, commodities, packaging, service patterns, and customer needs into a more consistent multipurpose terminal service approach. This transformation becomes an important foundation for increasing productivity, enhancing service quality, operational control accuracy, and supply chain efficiency.

Namun demikian, Direksi juga mencermati bahwa beberapa agenda strategis masih menghadapi tantangan dan memerlukan penyelesaian lanjutan pada tahun 2026. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan skema kerja sama, penyesuaian model bisnis kawasan industri, pembatalan atau penjadwalan ulang rencana kerja sama tertentu, serta pergeseran pelaksanaan inbreng peralatan. Terhadap kondisi tersebut, Direksi telah menetapkan langkah penyesuaian berupa evaluasi portofolio, penajaman prioritas investasi, penguatan koordinasi dengan Pelindo Grup dan mitra strategis, serta penyelarasan kembali program kerja agar tetap mendukung arah RJPP 2025–2029.

Nevertheless, the Board of Directors also noted that several strategic agenda items still face challenges and require further resolution in 2026. These challenges relate, among other things, to changes in partnership schemes, adjustments to the industrial estate business model, the cancellation or rescheduling of certain cooperation plans, and shifts in the implementation of equipment capital contributions (inbreng). In response to these conditions, the Board of Directors has established adjustment measures in the form of portfolio evaluation, sharpening investment priorities, strengthening coordination with the Pelindo Group and strategic partners, and realigning work programs to continue supporting the direction of the 2025–2029 RJPP.

Dengan strategi dan kebijakan strategis tersebut, PMT berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja jangka pendek dan penguatan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Direksi meyakini bahwa konsistensi pelaksanaan *House of Strategy*, penguatan tata kelola, pengembangan layanan berbasis kebutuhan pasar, transformasi digital, peningkatan kapabilitas SDM, serta disiplin investasi akan memperkuat posisi PMT sebagai operator terminal multipurpose yang berdaya saing, adaptif, dan mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, insan Perusahaan, masyarakat, dan negara.

Through this strategy and these strategic policies, PMT seeks to maintain a balance between achieving short-term performance and strengthening the foundation for long-term growth. The Board of Directors believes that consistent implementation of the House of Strategy, strengthened governance, the development of market-driven services, digital transformation, improved HR capabilities, and investment discipline will reinforce PMT's position as a competitive, adaptive multipurpose terminal operator capable of creating sustainable value for shareholders, customers, business partners, the Company's people, the community, and the nation.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi PMT memiliki peranan sentral dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan, dengan keterlibatan langsung dalam setiap tahapan penyusunan RJPP 2025–2029, penjabaran arah strategis ke dalam RKAP 2025, serta penyusunan RKM, dan inisiatif strategis tahunan. Peran tersebut dijalankan secara kolektif oleh seluruh anggota Direksi dengan tetap memperhatikan pembagian bidang tanggung jawab masing-masing, sehingga strategi yang dirumuskan mampu mengintegrasikan aspek bisnis, operasional, komersial, teknik, keuangan, risiko, sumber daya manusia, teknologi, tata kelola, dan keberlanjutan usaha.

Dalam proses tersebut, Direksi memimpin berbagai forum pembahasan, termasuk *focus* grup *discussion*, rapat strategis, koordinasi lintas unit, serta evaluasi kinerja bersama jajaran manajemen. Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan target yang ditetapkan mampu menjawab dinamika industri logistik dan kepelabuhanan nasional, mengakomodasi aspirasi Pemegang Saham, serta selaras dengan arah transformasi Pelindo Grup. Berbagai inisiatif strategis yang dihasilkan, seperti penataan struktur korporasi, standardisasi operasional, pengembangan terminal berbasis layanan dan komoditas, terminalisasi, pengembangan layanan *Ship to Ship* (STS), penguatan *Key Account Management* (KAM), serta integrasi data dan digitalisasi layanan, merupakan hasil kolaborasi Direksi dengan unit-unit strategis di dalam organisasi.

Peran masing-masing anggota Direksi diarahkan untuk memastikan strategi PMT dapat dirumuskan dan dijalankan secara menyeluruh. Direktur Utama memimpin penyelarasan arah strategis Perusahaan serta mengoordinasikan seluruh direktorat agar RJPP, RKAP, dan RKM berjalan selaras dengan visi PMT dan arah Pelindo Grup. Direktur Strategi dan Komersial berperan dalam pengembangan strategi korporasi, portofolio bisnis, kerja sama usaha, penguatan pelanggan, KAM, *Customer Relationship Management* (CRM), serta perluasan pasar dan kemitraan strategis. Direktur Operasi memastikan strategi diterjemahkan ke dalam standardisasi, sistemisasi, integrasi operasi terminal nonpetikemas, peningkatan produktivitas, dan konsistensi mutu layanan. Direktur Teknik berperan dalam penguatan infrastruktur, fasilitas, peralatan pelabuhan, kesiapan alat produksi, teknologi informasi, dan integrasi data. Direktur Sumber Daya Manusia memastikan strategi didukung oleh struktur organisasi yang adaptif, penguatan kompetensi, pengelolaan talenta, budaya AKHLAK, HSSE, Hukum, dan manajemen mutu. Adapun Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko memastikan strategi memiliki dukungan keuangan, pengendalian anggaran, pendanaan, investasi berbasis risiko, pengelolaan risiko, serta pengendalian internal yang memadai.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

The PMT Board of Directors plays a central role in formulating the Company's strategy and strategic policies, with direct involvement at every stage of preparing the 2025–2029 RJPP, translating the strategic direction into the 2025 RKAP, and preparing the RKM and annual strategic initiatives. This role is carried out collectively by all members of the Board of Directors, while taking into account the division of responsibilities among them, so that the formulated strategy is able to integrate business, operational, commercial, technical, financial, risk, human resource, technological, governance, and sustainability aspects.

In this process, the Board of Directors leads various discussion forums, including focus group discussions, strategic meetings, cross-unit coordination, and joint performance evaluations with management. These mechanisms are carried out to ensure that the policies and targets set are able to respond to the dynamics of the national logistics and port industry, accommodate the aspirations of the Shareholders, and remain aligned with the direction of the Pelindo Group's transformation. The various strategic initiatives produced, such as restructuring the corporate structure, standardizing operations, developing service- and commodity-based terminals, terminalization, developing Ship to Ship (STS) services, strengthening Key Account Management (KAM), and integrating data and digitalizing services, are the result of collaboration between the Board of Directors and strategic units within the organization.

The role of each member of the Board of Directors is directed at ensuring that PMT's strategy can be comprehensively formulated and implemented. The President Director leads the alignment of the Company's strategic direction and coordinates all directorates so that the RJPP, RKAP, and RKM are aligned with PMT's vision and the direction of the Pelindo Group. The Director of Strategy and Commercial is responsible for developing corporate strategy, business portfolio, business partnerships, customer engagement, KAM, Customer Relationship Management (CRM), and the expansion of markets and strategic partnerships. The Director of Operations ensures that the strategy is translated into the standardization, systemization, and integration of non-container terminal operations, increased productivity, and consistent service quality. The Director of Engineering is responsible for strengthening infrastructure, facilities, port equipment, production equipment readiness, information technology, and data integration. The Director of Human Resources ensures that the strategy is supported by an adaptive organizational structure, strengthened competencies, talent management, the AKHLAK culture, HSSE, legal matters, and quality management. Meanwhile, the Director of Finance and Risk Management ensures that the strategy is supported by adequate financial backing, budget control, funding, risk-based investment, risk management, and internal controls.

Dalam konteks tahunan, penyusunan RKAP yang dipimpin oleh Direksi melibatkan koordinasi lintas unit yang intensif. Direksi mendorong terwujudnya integrasi dan sinergi antarcabang serta anak perusahaan guna memastikan keselarasan antara sasaran operasional dan strategis PMT dengan visi besar Pelindo Grup. Direksi juga menjaga agar strategi yang diambil tetap adaptif terhadap perkembangan industri, termasuk dalam mencermati potensi dampak Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap model bisnis Perusahaan.

Peran Direksi dalam perumusan strategi tidak berhenti pada tahap penyusunan kebijakan, tetapi juga berlanjut pada pengawalan arah pelaksanaan strategi agar tetap selaras dengan sasaran RJPP 2025–2029 dan RKAP 2025. Melalui koordinasi lintas direktorat dan evaluasi berkala bersama jajaran manajemen, Direksi memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang relevan, adaptif terhadap perubahan asumsi, serta responsif terhadap dinamika operasional dan bisnis Perusahaan.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif dan terukur, Direksi PMT menerapkan mekanisme *monitoring* dan pengendalian yang sistematis, berjenjang, dan berbasis indikator kinerja. Mekanisme tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dalam RJPP 2025–2029 dan RKAP 2025 dapat diterjemahkan ke dalam program kerja, target kinerja, serta langkah operasional yang jelas di seluruh lini organisasi.

Sepanjang tahun 2025, Direksi melaksanakan *business review* melalui rapat internal Direksi yang dilaksanakan sebanyak 17 kali, rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, serta menghadiri 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Dalam forum tersebut, Direksi membahas realisasi capaian terhadap target RKAP, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, mengevaluasi hambatan implementasi, serta merumuskan langkah korektif yang diperlukan untuk menjaga konsistensi arah strategis Perusahaan.

Langkah selanjutnya adalah monitoring atas *Key Performance Indicator* (KPI), Rencana Kerja Manajemen (RKM), serta inisiatif strategis tahunan. KPI menjadi instrumen utama untuk mengukur pencapaian sasaran keuangan, operasional, sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta. Sementara itu, RKM dan inisiatif strategis menjadi perangkat manajemen untuk memastikan bahwa strategi Perusahaan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi diturunkan ke dalam program kerja yang memiliki target, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi.

In the annual context, the preparation of the RKAP, led by the Board of Directors, involves intensive cross-unit coordination. The Board of Directors fosters integration and synergy across branches and subsidiaries to ensure alignment between PMT's operational and strategic objectives and the broader vision of the Pelindo Group. The Board of Directors also ensures that the strategy adopted remains adaptive to industry developments, including by closely monitoring the potential impact on the Company's business model of Law No. 66 of 2024, the third amendment to Law No. 17 of 2008 on Shipping.

The role of the Board of Directors in formulating strategy does not end at the policy-drafting stage, but continues through overseeing the direction of strategy implementation to ensure it remains aligned with the targets of the 2025–2029 RJPP and the 2025 RKAP. Through cross-directorate coordination and periodic evaluation together with management, the Board of Directors ensures that the established strategy can be translated into relevant work programs that are adaptive to changes in assumptions and responsive to the Company's operational and business dynamics.

THE PROCESS UNDERTAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

To ensure that strategy implementation runs effectively and measurably, the PMT Board of Directors applies a systematic, tiered, and performance indicator-based monitoring and control mechanism. This mechanism is designed to ensure that the strategy set out in the 2025–2029 RJPP and the 2025 RKAP can be translated into clear work programs, performance targets, and operational steps across the organization.

Throughout 2025, the Board of Directors conducted business reviews through 17 internal Board of Directors meetings, 12 joint meetings with the Board of Commissioners, and attendance at 2 (two) Annual General Meetings of Shareholders (GMS). In these forums, the Board of Directors discussed performance realization against RKAP targets, identified factors affecting performance achievement, evaluated implementation obstacles, and formulated the corrective measures needed to maintain consistency in the Company's strategic direction.

The next step is monitoring of Key Performance Indicators (KPIs), the Management Work Plan (RKM), and annual strategic initiatives. KPIs serve as the main instrument for measuring the achievement of financial, operational, and social targets, business model innovation, technology leadership, investment growth, and talent development. Meanwhile, the RKM and strategic initiatives serve as management tools to ensure that the Company's strategy does not stop at the planning stage, but is translated into work programs with clear targets, persons in charge, implementation schedules, and evaluation mechanisms.

Terhadap RKM yang belum sepenuhnya mencapai target, Direksi melakukan evaluasi atas penyebab deviasi, termasuk perubahan skema kerja sama, penyesuaian model bisnis, pembatalan rencana kerja sama tertentu, serta pergeseran pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Direksi dalam menetapkan langkah mitigasi, melakukan penyesuaian prioritas, serta menentukan agenda lanjutan yang perlu dikawal pada tahun berikutnya.

Sistem pelaporan manajemen yang terpadu menjadi bagian penting dalam proses monitoring dan pengendalian implementasi strategi. Pelaporan kinerja dilakukan secara berkala, akurat, dan relevan agar Direksi memperoleh informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui mekanisme tersebut, Direksi dapat mengidentifikasi isu strategis secara lebih dini, menilai efektivitas pelaksanaan program kerja, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Implementasi strategi Perusahaan juga didukung oleh kebijakan strategis di bidang sumber daya manusia, digitalisasi, dan manajemen risiko. Pada aspek SDM, Direksi mendorong pengembangan kompetensi, pengelolaan talenta, dan internalisasi budaya AKHLAK untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menjalankan agenda transformasi. Pada aspek digitalisasi, Direksi memperkuat pemanfaatan sistem layanan terminal, integrasi data operasional, dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sementara itu, pada aspek manajemen risiko, Direksi memastikan bahwa pelaksanaan strategi disertai identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan.

Dengan proses tersebut, Direksi memastikan bahwa implementasi strategi PMT tahun 2025 berjalan secara terarah, adaptif, dan akuntabel. Setiap deviasi terhadap target tidak hanya dipandang sebagai capaian yang belum optimal, tetapi juga sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan untuk memperkuat efektivitas strategi, meningkatkan kualitas eksekusi, serta menjaga kesinambungan pencapaian sasaran RJPP 2025–2029.

TINJAUAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

Selama tahun 2025, PMT menunjukkan kinerja yang positif dan ketahanan yang solid di tengah berbagai tantangan industri dan ekonomi global. Pencapaian ini didukung oleh penerapan strategi yang tepat, efisiensi operasional yang berkelanjutan, serta sinergi yang erat di dalam Grup Pelindo.

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Dari sisi keuangan, Perusahaan mencatatkan pendapatan operasi sebesar Rp5,67 triliun, meningkat 6,93% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,30 triliun. Peningkatan ini terutama didukung oleh pertumbuhan signifikan pada beberapa segmen, antara lain pendapatan pengusahaan alat

For RKM items that have not yet fully achieved their targets, the Board of Directors evaluates the causes of the deviation, including changes in partnership schemes, business model adjustments, the cancellation of certain cooperation plans, and shifts in program implementation. The results of this evaluation form the basis for the Board of Directors in determining mitigation measures, adjusting priorities, and identifying follow-up agenda items to be pursued in the following year.

An integrated management reporting system is an important part of the process of monitoring and controlling strategy implementation. Performance reporting is conducted regularly, accurately, and relevantly so that the Board of Directors obtains adequate information as a basis for decision-making. Through this mechanism, the Board of Directors can identify strategic issues at an earlier stage, assess the effectiveness of work program implementation, and ensure that follow-up on evaluation recommendations is carried out by the relevant work units.

Implementation of the Company's strategy is also supported by strategic policies in the areas of human resources, digitalization, and risk management. On the HR side, the Board of Directors encourages competency development, talent management, and the internalization of the AKHLAK culture to ensure organizational readiness in carrying out the transformation agenda. On the digitalization side, the Board of Directors strengthens the use of terminal service systems, operational data integration, and information technology to support data-driven decision-making. Meanwhile, on the risk management side, the Board of Directors ensures that strategy implementation is accompanied by ongoing risk identification, measurement, mitigation, and monitoring.

Through this process, the Board of Directors ensures that the implementation of PMT's strategy in 2025 proceeded in a focused, adaptive, and accountable manner. Every deviation from target is viewed not only as an underachievement, but also as a basis for learning and improvement to strengthen the effectiveness of the strategy, improve the quality of execution, and maintain the continuity of progress toward the targets of the 2025–2029 RJPP.

REVIEW OF THE COMPANY'S 2025 PERFORMANCE

During 2025, PMT demonstrated positive performance and solid resilience amid various industry and global economic challenges. This achievement was supported by the implementation of an appropriate strategy, ongoing operational efficiency, and close synergy within the Pelindo Group.

Financial Performance Overview

On the financial side, the Company recorded operating revenue of Rp5.67 trillion, an increase of 6.93% compared to Rp5.30 trillion in the previous year. This increase was primarily driven by significant growth in several segments, including equipment leasing revenue, which rose 62.95%,

yang naik 62,95%, pendapatan pengelolaan pas pelabuhan yang naik 47,74%, serta pendapatan terminal petikemas yang tumbuh 4,52%. Segmen pengelolaan terminal tetap menjadi kontributor utama dengan nilai Rp4,40 triliun yang naik 2,53% atau 77,53% dari total pendapatan operasi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, profitabilitas Perusahaan mengalami pemulihan yang sangat kuat. Laba usaha tahun 2025 tercatat sebesar Rp639,13 miliar, meningkat 104,56% dibandingkan Rp312,45 miliar pada tahun 2024. Hal ini didukung oleh terkendalinya kenaikan beban operasi yang hanya naik tipis 1,13% menjadi Rp5,08 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan pendapatan.

Laba tahun berjalan yang dicatatkan pada tahun 2025 sebesar Rp525,75 miliar, meningkat 94,90% dibandingkan Rp269,76 miliar pada tahun sebelumnya. Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp445,88 miliar. EBITDA Perusahaan tercatat sebesar Rp750,48 miliar dengan EBITDA margin sebesar 13,24%. Total aset Perusahaan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp4,45 triliun, meningkat 11,03% dibandingkan Rp4,01 triliun pada tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 19,38% menjadi Rp2,00 triliun serta penguatan aset tetap.

Struktur permodalan Perusahaan tetap sehat dan ditopang sepenuhnya oleh ekuitas. Total ekuitas tercatat sebesar Rp2,26 triliun, sementara Perusahaan tidak memiliki utang berbasis bunga, sehingga mencerminkan tingkat *leverage* yang rendah dan fleksibilitas keuangan yang baik. Arus kas neto dari aktivitas operasi meningkat tajam sebesar 581,71% menjadi Rp875,60 miliar, yang mencerminkan kualitas perolehan kas dari kegiatan usaha yang semakin baik.

Kinerja Operasional

Secara operasional, PMT membukukan *throughput* arus barang sebesar 113,22 juta ton, meningkat tipis 0,20% dibandingkan 112,99 juta ton pada tahun 2024. Pertumbuhan ditopang oleh segmen *bag cargo* (naik 25,90%), kendaraan/Ro-Ro (naik 24,23%), gas (naik 14,12%), hewan (naik 12,82%), petikemas (naik 11,92% dalam TEUs), dan curah cair (naik 4,60%), yang mampu mengimbangi penurunan pada segmen *general cargo* serta stabilnya trafik curah kering.

Dari sisi kapasitas, jumlah alat produksi Perusahaan meningkat menjadi 598 unit pada akhir 2025, atau bertambah 39 unit (6,98%) dibandingkan 559 unit pada tahun sebelumnya. Penguatan kapasitas dilakukan terutama pada peralatan strategis seperti *Harbour Mobile Crane* & *Harbour Portal Crane*, *Gantry Jib Crane*, *Reach Stacker*, serta penambahan Jembatan Timbang, *Grab*, *Hopper*, dan *Rampdoor*. Langkah ini ditempuh untuk mendukung kelancaran proses bongkar muat dan peningkatan kualitas layanan di seluruh wilayah operasional.

Peningkatan layanan pelanggan diwujudkan melalui standardisasi operasional di terminal-terminal utama, pengembangan sistem digital, serta penguatan *Key Account Management* dan *Customer Relationship Management* melalui pembentukan tim *Key Account Officer*, pelaksanaan

port pass management revenue, which rose 47.74%, and container terminal revenue, which grew 4.52%. The terminal management segment remained the main contributor with a value of Rp4.40 trillion increace 2.53% or 77.53% of total operating revenue.

In contrast to the previous year, the Company's profitability underwent a very strong recovery. Operating profit for 2025 was recorded at Rp639.13 billion, an increase of 104.56% compared to Rp312.45 billion in 2024. This was supported by well-controlled growth in operating expenses, which rose only slightly by 1.13% to Rp5.08 trillion, far below the rate of revenue growth.

Net income for the year recorded in 2025 amounted to Rp525.75 billion, an increase of 94.90% compared to Rp269.76 billion in the previous year. Net income for the year attributable to owners of the parent entity was recorded at Rp445.88 billion. The Company's EBITDA was recorded at Rp750.48 billion, with an EBITDA margin of 13.24%. The Company's total assets at the end of 2025 were recorded at Rp4.45 trillion, an increase of 11.03% compared to Rp4.01 trillion in the previous year, primarily driven by a 19.38% increase in cash and cash equivalents to Rp2.00 trillion and the strengthening of fixed assets.

The Company's capital structure remained healthy and was fully supported by equity. Total equity was recorded at Rp2.26 trillion, while the Company carried no interest-bearing debt, reflecting a low level of leverage and strong financial flexibility. Net cash flow from operating activities increased sharply by 581.71% to Rp875.60 billion, reflecting an improvement in the quality of cash generated from business operations.

Operational Performance

Operationally, PMT recorded cargo throughput of 113.22 million tons, a slight increase of 0.20% compared to 112.99 million tons in 2024. This growth was supported by the bag cargo segment (up 25.90%), vehicles/Ro-Ro (up 24.23%), gas (up 14.12%), livestock (up 12.82%), containers (up 11.92% in TEUs), and liquid bulk (up 4.60%), which offset the decline in the general cargo segment and stable dry bulk traffic.

In terms of capacity, the Company's number of production equipment units increased to 598 units by the end of 2025, an addition of 39 units (6.98%) compared to 559 units in the previous year. Capacity strengthening was carried out particularly on strategic equipment such as the Harbour Mobile Crane and & Harbour Portal Crane, Gantry Jib Crane, Reach Stacker, as well as the addition of weighbridges, grabs, hoppers, and rampdoors. These measures were taken to support smooth loading and unloading operations and improve service quality across all operational areas.

Improvements in customer service were realized through operational standardization at major terminals, the development of digital systems, and the strengthening of Key Account Management and Customer Relationship Management through the establishment of a Key Account

Customer Hearing, Customer Visit, serta survei kepuasan pelanggan secara rutin. Langkah-langkah ini terbukti berhasil menjaga loyalitas pelanggan utama dan memperluas kerja sama dengan *floating market* serta mitra strategis.

Kinerja Program Strategis

Pelaksanaan program strategis tahun 2025 menunjukkan progres yang baik dalam memperkuat fondasi transformasi PMT Grup sebagai operator terminal multipurpose yang berfokus pada layanan nonpetikemas. Realisasi RKM Strategis PMT Grup secara konsolidasi mencapai 97,20% dari target 100,00%. Dari total 88 RKM, sebanyak 82 RKM berada dalam status *on progress*, sementara 3 RKM berstatus *delayed* dan 3 RKM berstatus *late*. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar agenda strategis Perusahaan berjalan sesuai arah RJPP 2025–2029 dan RKAP 2025.

Salah satu pencapaian strategis yang menjadi fondasi transformasi PMT pada tahun 2025 adalah penguatan standardisasi, sistemisasi, dan integrasi operasional terminal nonpetikemas. Agenda ini mencerminkan peran khas PMT dalam mengelola kompleksitas layanan terminal multipurpose yang mencakup berbagai jenis komoditas, kemasan, pola operasi, dan kebutuhan pelanggan. Sampai dengan tahun 2024, PMT telah melakukan standardisasi dan sistemisasi di 31 Terminal Nonpetikemas di lingkungan PMT Grup, yang memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas layanan, peningkatan akurasi pengendalian port stay dan cargo stay, serta kontribusi terhadap efisiensi biaya logistik.

Bagi PMT, pengendalian port stay dan cargo stay merupakan indikator penting dalam memperkuat efisiensi layanan kepelabuhanan, karena perbaikan waktu pelayanan kapal dan barang dapat mendukung kelancaran arus distribusi, meningkatkan utilisasi aset pelabuhan, serta mengurangi inefisiensi dalam rantai logistik. Dengan demikian, transformasi operasional yang dijalankan PMT tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan di terminal, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan konektivitas, daya saing logistik, dan ekosistem ekonomi nasional.

Pada tahun 2025, penguatan tersebut dilanjutkan dengan standardisasi layanan Terminal *Roll-on/Roll-off* (Ro-Ro) dan sistemisasi Pelindo Terminal Operating System-Ro-Ro (PTOS-R) pada tujuh terminal, sistemisasi Pelindo Terminal *Operating System-Multipurpose* (PTOS-M), Pelindo Terminal Operating System-Petikemas (PTOS-PK), Pelindo Terminal *Operating System-Car* Terminal (PTOS-C), implementasi *Integrated Planning & Control* (IPC), serta penataan pengelolaan operasional terminal nonpetikemas.

Penguatan program strategis diwujudkan melalui standardisasi operasional, optimalisasi aset, pengembangan portofolio layanan, serta digitalisasi proses internal dan layanan operasional. Pada proses internal, PMT mengimplementasikan PRiMa untuk pengelolaan risiko operasional, Secure untuk lelang/tender daring, Portaverse untuk pengelolaan kinerja, pelatihan, pembelajaran, dan pengetahuan, serta Cistle untuk

Officer team, the implementation of Customer Hearing and Customer Visit sessions, and regular customer satisfaction surveys. These measures have proven successful in maintaining the loyalty of key customers and expanding cooperation with the floating market and strategic partners.

Performance of Strategic Programs

Implementation of strategic programs in 2025 showed good progress in strengthening the foundation for the PMT Group's transformation into a multipurpose terminal operator focused on non-container services. Realization of the PMT Group's consolidated Strategic RKM reached 97.20% of the 100.00% target. Of a total of 88 RKM items, 82 were in on-progress status, while 3 RKM items were delayed and 3 RKM items were late. This achievement shows that most of the Company's strategic agenda is proceeding in line with the direction of the 2025–2029 RJPP and the 2025 RKAP.

One of the strategic achievements that forms the foundation of PMT's transformation in 2025 is the strengthening of standardization, systematization, and integration of non-container terminal operations. This agenda reflects PMT's distinctive role in managing the complexity of multipurpose terminal services, which encompass various types of commodities, packaging, operational patterns, and customer needs. Until 2024, PMT has standardized and systematized 31 Non-Container Terminals within the PMT Group, which has benefited the improvement of service productivity, increased accuracy in controlling port stay and cargo stay, as well as contributing to logistics cost efficiency.

For PMT, controlling port stay and cargo stay is an important indicator in strengthening the efficiency of port services, as improving the service time of ships and goods can support the smooth flow of distribution, increase the utilization of port assets, and reduce inefficiencies in the logistics chain. Thus, the operational transformation carried out by PMT not only impacts the improvement of service quality at the terminal but also contributes to strengthening connectivity, logistics competitiveness, and the national economic ecosystem.

In 2025, the strengthening continued with the standardization of Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) terminal services and the systematization of the Pelindo Terminal Operating System-Ro-Ro (PTOS-R) at seven terminals, the systematization of the Pelindo Terminal Operating System-Multipurpose (PTOS-M), Pelindo Terminal Operating System-Container (PTOS-C), Pelindo Terminal Operating System-Car Terminal (PTOS-C), the implementation of Integrated Planning & Control (IPC), and the restructuring of non-container terminal operational management.

The strengthening of strategic programs was realized through operational standardization, asset optimization, service portfolio development, and the digitalization of internal processes and operational services. For internal processes, PMT implemented PRiMa for operational risk management, Secure for online tenders/auctions, Portaverse for performance management, training, learning, and knowledge,

konsolidasi transaksi *intercompany* PMT Grup. Pada layanan operasional, Perusahaan memperkuat penerapan GenC dan PTOS-M yang terintegrasi dengan SAP dan aplikasi lainnya, Spinner untuk layanan baru petikemas, sistem gate timbangan, serta PTOS-PK untuk layanan petikemas. Berbagai inisiatif digital tersebut memperkuat integrasi data, efisiensi proses, standardisasi layanan, dan kualitas pengambilan keputusan.

Bagi PMT, transformasi ini bukan hanya agenda operasional dan teknologi, melainkan bagian dari keberlanjutan berbasis bisnis inti. Standardisasi dan digitalisasi layanan nonpetikemas memperkuat keandalan proses, konsistensi mutu layanan, efisiensi rantai pasok, pengambilan keputusan berbasis data, serta tata kelola operasional yang lebih terkendali. Dengan demikian, PMT tidak hanya memperkuat kinerja jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi penciptaan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra usaha, Pemegang Saham, pemangku kepentingan, dan negara.

Sinergi dengan Pelindo Grup diperkuat melalui kolaborasi pengelolaan terminal, kerja sama operasional di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) swasta dan BUMN, serta pengembangan layanan *Ship to Ship* (STS). Inisiatif ini selaras dengan agenda *Business Partnership and Synergy* dalam RJPP 2025–2029 dan RKM Strategis 2025, termasuk pengembangan layanan operasi di luar area Pelindo Grup, penyediaan *Port Management System* pada TUKS, perikatan kerja sama layanan STS, dan *joint marketing* layanan kepelabuhanan. Pada Oktober 2025, PMT juga memperluas jaringan melalui penambahan cabang Satelit Terminal IKT di Banjarmasin melalui PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), sehingga memperkuat portofolio layanan PMT Grup dalam ekosistem logistik nasional.

Dalam aspek investasi, PMT merealisasikan investasi konsolidasian sebesar Rp303,39 miliar, atau 80,10% dari RKAP 2025 sebesar Rp378,78 miliar. Dari sisi program, realisasi investasi mencapai 22 dari 23 program yang direncanakan, atau 95,65% terhadap anggaran program. Capaian ini menunjukkan bahwa investasi dijalankan secara selektif dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan operasional, kesiapan proyek, dan perubahan asumsi pelaksanaan program di tahun berjalan.

Beberapa program strategis belum sepenuhnya mencapai target karena dipengaruhi perubahan skema kerja sama, penyesuaian model bisnis kawasan industri, pembatalan rencana kerja sama tertentu, serta pergeseran pelaksanaan *inbreng* peralatan oleh Pelindo Grup ke tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi dasar evaluasi bagi Direksi dalam menetapkan langkah perbaikan dan prioritas lanjutan, agar pelaksanaan program strategis tetap mendukung sasaran RJPP 2025–2029.

and Cistle for the consolidation of intercompany transactions within the PMT Group. For operational services, the Company strengthened the implementation of GenC and PTOS-M, which are integrated with SAP and other applications, Spinner for new container services, the weighbridge gate system, and PTOS-PK for container services. These various digital initiatives strengthened data integration, process efficiency, service standardization, and decision-making quality.

For PMT, this transformation is not just an operational and technological agenda, but part of sustainability based on core business. Standardization and digitalization of non-container services strengthen process reliability, service quality consistency, supply chain efficiency, data-driven decision-making, and more controlled operational governance. Thus, PMT not only strengthens short-term performance but also builds a foundation for long-term value creation for customers, business partners, shareholders, stakeholders, and the nation.

Synergy with the Pelindo Group was strengthened through collaboration in terminal management, operational cooperation at private and state-owned Terminals for Own Use (TUKS), and the development of Ship to Ship (STS) services. This initiative is aligned with the Business Partnership and Synergy agenda in the 2025–2029 RJPP and the 2025 Strategic RKM, including the development of operational services outside the Pelindo Group's area, the provision of a Port Management System for TUKS, the conclusion of STS service cooperation agreements, and joint marketing of port services. In October 2025, PMT also expanded its network by adding the IKT Terminal Satellite branch in Banjarmasin through PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), thereby strengthening the PMT Group's service portfolio within the national logistics ecosystem.

In terms of investment, PMT realized consolidated investment of Rp303.39 billion, or 80.10% of the 2025 RKAP target of Rp378.78 billion. In terms of programs, investment realization reached 22 of the 23 planned programs, or 95.65% of the program budget. This achievement shows that investment was carried out selectively, taking into account operational priority needs, project readiness, and changes in program implementation assumptions during the year.

Several strategic programs did not fully achieve their targets due to changes in partnership schemes, adjustments to the industrial estate business model, the cancellation of certain cooperation plans, and shifts in the implementation of equipment capital contributions (inbreng) by the Pelindo Group to 2026. These conditions form the basis for the Board of Directors' evaluation in determining improvement measures and further priorities, so that the implementation of strategic programs continues to support the targets of the 2025–2029 RJPP.

PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN

Dalam upaya mencapai target strategis tahun 2025, PMT menghadapi tantangan dan dinamika operasional yang cukup kompleks. Berikut perbandingan antara target RKAP 2025 dengan realisasi yang dicapai sepanjang tahun 2025:

COMPARISON OF RESULTS ACHIEVED AGAINST TARGETS

In its efforts to achieve its strategic targets for 2025, PMT faced fairly complex challenges and operational dynamics. The following is a comparison between the 2025 RKAP targets and the realization achieved during 2025:

Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Target RKAP 2025 2025 RKAP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Capaian Achievement (%)
Pendapatan Operasi Operating Revenue	Rp juta Rp million	6.290.896	5.669.657	90,12%
Laba Usaha Operating Profit	Rp juta Rp million	853.559	639.133	70,93%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	Rp juta Rp million	869.096	681.173	78,38%
Laba Setelah Pajak Profit After Tax	Rp juta Rp million	667.004	525.745	78,82%
EBITDA	Rp juta Rp million	1.207.675	750.484	62,14%
Jumlah Aset Total Assets	Rp juta Rp million	6.265.910	4.452.845	71,06%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Rp juta Rp million	1.913.508	2.193.666	114,64%
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp juta Rp million	4.352.402	2.259.178	51,91%
Volume Arus Barang Cargo Volume	Ton Tons	125.037.420	113.217.579	90,55%

Pendapatan

Realisasi pendapatan operasi tahun 2025 mencapai 90,12% dari target RKAP. Capaian yang berada di bawah target terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja barang nonpetikemas di sejumlah cabang utama akibat melemahnya suplai dan harga komoditas (khususnya curah cair CPO), peralihan kemasan semen dari *bag cargo* ke curah kering maupun petikemas, serta hambatan distribusi tertentu. Sebagai langkah mitigasi, Perusahaan memperkuat diversifikasi layanan, melakukan penyesuaian tarif di sejumlah cabang, serta memperluas kerja sama dengan sektor domestik yang relatif stabil dan layanan *Ship to Ship* (STS).

Revenue

Operating revenue realization for 2025 reached 90.12% of the RKAP target. The below-target achievement was mainly affected by a decline in non-container cargo performance at a number of major branches due to weaker supply and prices of certain commodities (particularly liquid bulk CPO), the shift of cement packaging from bag cargo to dry bulk and containers, and certain distribution constraints. As a mitigation measure, the Company strengthened service diversification, adjusted tariffs at a number of branches, and expanded cooperation with the relatively stable domestic sector and Ship to Ship (STS) services.

EBITDA dan Laba

Meskipun EBITDA dan laba masih berada di bawah target RKAP, dengan capaian EBITDA 62,14%, laba usaha tercapai sebesar 70,93%, laba sebelum pajak 78,38%, dan laba setelah pajak 78,82%, kinerja profitabilitas tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan secara tahunan.

Laba usaha dan laba bersih masing-masing tumbuh lebih dari 100% dan 90% dibandingkan tahun 2024, yang mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam menjaga efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas pendapatan.

EBITDA and Profit

Although EBITDA and net income remain below the targets set in the Annual Business Plan, with EBITDA at 62.14%, operating income at 70.93%, income before taxes at 78.38%, and net income at 78.82%, profitability performance in 2025 shows a very significant year-over-year improvement.

Operating profit and net profit grew by more than 100% and 90%, respectively, compared to 2024, reflecting the Company's success in maintaining cost efficiency and improving revenue quality.

Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Total aset mencapai 71,06% dari target, sementara ekuitas tercatat 51,91% dari target, terutama dipengaruhi oleh realisasi laba yang belum sepenuhnya mencapai sasaran RKAP. Sebaliknya, liabilitas tercatat 114,64% dari target, sejalan

Assets, Liabilities, and Equity

Total assets reached 71.06% of target, while equity stood at 51.91% of target, mainly affected by profit realization that had not yet fully reached the RKAP target. Liabilities, on the other hand, stood at 114.64% of target, in line with increased

dengan meningkatnya kebutuhan operasional. Meskipun demikian, struktur permodalan Perusahaan tetap kuat dan didominasi oleh ekuitas.

Volume Arus Barang

Realisasi volume arus barang sebesar 113,22 juta ton atau 90,55% dari target RKAP 125,04 juta ton. Deviasi terutama disebabkan oleh ketidaktercapaian target pada kemasan *general* dan *bag cargo*, curah cair, serta curah kering di sejumlah cabang akibat pendangkalan alur pelayaran (Bengkulu), penurunan permintaan komoditas tertentu, serta peralihan komoditas antar-kemasan. Di sisi lain, segmen kendaraan, hewan, petikemas, dan gas berhasil melampaui target.

KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam menjalankan strategi dan mencapai target yang ditetapkan, PMT menghadapi berbagai kendala, baik eksternal maupun internal, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja dan efektivitas implementasi program strategis.

1. Kendala Eksternal
   a. Dinamika ekonomi dan perdagangan global, termasuk fragmentasi perdagangan dan fluktuasi harga komoditas, yang berdampak pada melemahnya suplai dan harga komoditas tertentu seperti curah cair CPO.
   b. Ketidakpastian geopolitik global yang menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok dan memengaruhi arus barang lintas negara.
   c. Hambatan distribusi dan operasional di tingkat daerah, antara lain pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Bengkulu, perubahan kebijakan perizinan dan diskresi terkait kegiatan di TUKS, serta peralihan komoditas antar-kemasan dan antar-terminal.
2. Kendala Internal
   a. Gangguan teknis pada sejumlah peralatan utama, khususnya *Harbour Mobile Crane* (HMC) dan *Harbour Portal Crane* (HPC) di *Branch* Jamrud dan Makassar, yang memengaruhi tingkat kesiapan alat. Manajemen menangani permasalahan ini melalui percepatan perbaikan, pengadaan suku cadang, proses klaim asuransi, hingga *retrofit/revamping* dan redistribusi alat antar terminal.

   b. Kebutuhan penyesuaian model bisnis dan tata kelola seiring proses penataan struktur korporasi PMT Grup serta antisipasi dampak Revisi UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

   c. Tantangan dalam interoperabilitas sistem dan integrasi data antarcabang seiring percepatan transformasi digital.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, PMT berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas internal, mengembangkan solusi digital yang terintegrasi, serta memperluas sinergi lintas entitas dalam Pelindo Grup guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan Perusahaan.

operational needs. Nevertheless, the Company's capital structure remained strong and was dominated by equity.

Cargo Volume

Realized cargo volume amounted to 113.22 million tons, or 90.55% of the RKAP target of 125.04 million tons. The deviation was mainly caused by the shortfall against targets in general and bag cargo packaging, liquid bulk, and dry bulk at a number of branches due to siltation of the shipping channel (Bengkulu), a decline in demand for certain commodities, and the shift of commodities between packaging types. On the other hand, the vehicle, livestock, container, and gas segments successfully exceeded their targets.

CHALLENGES FACED

In carrying out its strategy and achieving its set targets, PMT faced various challenges, both external and internal, that directly and indirectly affected performance and the effectiveness of strategic program implementation.

1. External Challenges
   a. Global economic and trade dynamics, including trade fragmentation and commodity price fluctuations, which affected the weakening supply and prices of certain commodities such as liquid bulk CPO.
   b. Global geopolitical uncertainty, which created uncertainty in supply chains and affected cross-border cargo flows.
   c. Distribution and operational constraints at the regional level, including the siltation of the shipping channel at Bengkulu Port, changes in licensing policies and discretion related to activities at TUKS, and the shift of commodities between packaging types and terminals.
2. Internal Challenges
   a. Technical disruptions to a number of key pieces of equipment, particularly the Harbour Mobile Crane (HMC) and Harbour Portal Crane (HPC) at the Branch offices in Jamrud and Makassar, which affected equipment readiness levels. Management addressed these issues through accelerated repairs, spare parts procurement, insurance claims processes, and retrofitting/revamping and redistribution of equipment between terminals.
   b. The need to adjust the business model and governance in line with the restructuring of the PMT Group's corporate structure and in anticipation of the impact of the proposed revision of Law No. 17/2008 on Shipping.
   c. Challenges in system interoperability and data integration between branches amid the acceleration of digital transformation.

In facing these various challenges, PMT is committed to continuing to strengthen its internal capacity, develop integrated digital solutions, and expand cross-entity synergy within the Pelindo Group to ensure the sustainability of the Company's growth.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Memasuki tahun 2026, PMT memandang prospek usaha sektor logistik dan kepelabuhanan nonpetikemas tetap positif dan penuh peluang, meskipun masih dibayangi ketidakpastian global. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4%–5,6% pada tahun 2026, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan pada kisaran 5,33%–5,40%, didukung oleh peningkatan investasi, konsumsi domestik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor industri nasional.

Prospek bisnis terminal nonpetikemas pada tahun 2026 diperkirakan tetap bertumbuh, didorong oleh pengembangan kawasan industri, program hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur nasional, serta kebutuhan logistik untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini menjadi peluang bagi PMT untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat perannya sebagai operator terminal multipurpose nasional.

Optimisme tersebut tercermin dalam RKAP 2026 yang menargetkan arus barang nonpetikemas sebesar 113,2 juta ton, didukung oleh mulai beroperasinya aktivitas curah cair di Terminal Kijing, optimalisasi kapasitas terminal, peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bengkulu pasca perbaikan alur pelayaran, serta pengembangan layanan dan terminal berbasis komoditas maupun kawasan industri.

Proyeksi Kinerja Tahun 2026

Mengacu pada RKAP 2026, Perusahaan menargetkan total pendapatan operasi sebesar Rp6,15 triliun atau meningkat sekitar 8,40% dibandingkan realisasi tahun 2025. Laba usaha diproyeksikan tumbuh menjadi Rp713,42 miliar (117,83% dari realisasi 2025), laba sebelum pajak Rp738,19 miliar, dan laba setelah pajak Rp575,50 miliar (109,46% dari realisasi 2025). EBITDA diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,17 triliun. Dari sisi operasional, volume arus barang nonpetikemas ditargetkan tetap terjaga pada level 113,22 juta ton.

Capaian tersebut akan ditopang oleh optimalisasi layanan di terminal eksisting, pemanfaatan cabang hasil Serah Terima Operasi, percepatan transformasi digital dan standardisasi proses bisnis, serta peningkatan kolaborasi strategis dengan entitas anak dan mitra dalam penyediaan layanan pelabuhan terintegrasi. Selain berfokus pada pertumbuhan bisnis, PMT juga memperkuat aspek keberlanjutan melalui implementasi program ESG, penguatan budaya keselamatan kerja, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi tata kelola perusahaan.

Ke depan, standardisasi dan digitalisasi terminal nonpetikemas akan tetap menjadi salah satu agenda utama dalam memperkuat daya saing PMT. Dengan karakter layanan yang sangat beragam, kemampuan untuk menyeragamkan proses, mengintegrasikan data, dan mengendalikan kualitas layanan menjadi prasyarat penting agar PMT dapat menjaga keandalan operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, memperkuat efisiensi rantai pasok, serta mendukung agenda keberlanjutan logistik nasional.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS

Entering 2026, PMT views the business prospects of the non-container logistics and port sector as remaining positive and full of opportunity, although still overshadowed by global uncertainty. The Government is targeting national economic growth of 5.4%–5.6% in 2026, while Bank Indonesia projects growth in the range of 5.33%–5.40%, supported by increased investment, domestic consumption, infrastructure development, and the strengthening of the national industrial sector.

The business prospects of non-container terminals in 2026 are expected to continue growing, driven by the development of industrial estates, natural resource downstreaming programs, national infrastructure development, and logistics needs supporting the development of the Nusantara Capital City (IKN). This condition presents an opportunity for PMT to expand its market share and strengthen its role as a national multipurpose terminal operator.

This optimism is reflected in the 2026 RKAP, which targets non-container cargo flow of 113.2 million tons, supported by the commencement of liquid bulk activity at Kijing Terminal, the optimization of terminal capacity, increased loading and unloading activity at Bengkulu Port following the improvement of the shipping channel, and the development of services and terminals based on commodities and industrial estates.

2026 Performance Projections

Based on the 2026 RKAP, the Company is targeting total operating revenue of Rp6.15 trillion, an increase of approximately 8.40% compared to 2025 realization. Operating profit is projected to grow to Rp713.42 billion (117.83% of 2025 realization), profit before tax to Rp738.19 billion, and profit after tax to Rp575.50 billion (109.46% of 2025 realization). EBITDA is projected to increase to Rp1.17 trillion. Operationally, non-container cargo volume is targeted to be maintained at a level of 113.22 million tons.

This achievement will be supported by the optimization of services at existing terminals, the utilization of branches resulting from Operational Handover, the acceleration of digital transformation and the standardization of business processes, and increased strategic collaboration with subsidiaries and partners in providing integrated port services. In addition to focusing on business growth, PMT is also strengthening sustainability aspects through the implementation of ESG programs, the strengthening of a safety culture, improving HR competencies, and optimizing corporate governance.

In the future, the standardization and digitalization of non-container terminals will remain one of the main agendas in strengthening the competitiveness of PMT. With the highly diverse nature of services, the ability to standardize processes, integrate data, and control service quality becomes an important prerequisite for PMT to maintain operational reliability, enhance customer experience, strengthen supply chain efficiency, and support the national logistics sustainability agenda.

PENERAPAN GOVERNANSI KORPORAT

Pada tahun 2025, PMT secara konsisten menempatkan governansi korporat sebagai landasan utama dalam mengelola Perusahaan secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan. PMT mengadopsi *Governance Framework* yang terdiri atas empat elemen yang saling terhubung, yakni prinsip, struktur, proses, dan hasil tata kelola. Prinsip governansi TARIFT (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, dan *Trusted*) diinternalisasi sebagai nilai etik yang diperkuat melalui budaya AKHLAK, selaras dengan nilai-nilai BUMN.

Untuk memastikan kualitas dan keselarasan praktik tata kelola dengan standar regional, PMT kembali melakukan penilaian penerapan GCG berdasarkan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Hasil *assessment* menunjukkan skor 96,47 poin dengan predikat "*Very Good*", meningkat signifikan dari 86,03 poin pada penilaian sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan komitmen PMT untuk melampaui kepatuhan minimum dan menjadikan governansi sebagai pilar strategis dalam pengelolaan perusahaan.

Sebagai bagian dari penguatan sistemik, sepanjang tahun 2025 PMT melaksanakan berbagai inisiatif, antara lain penyempurnaan dan ratifikasi pedoman perangkat GCG, penguatan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), penyempurnaan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) termasuk penetapan unit pengelolanya, serta berbagai program edukasi dan kampanye integritas seperti Program Duta Anti Penyuapan dan MATCHA (*Meet and Talk Compliance, Honesty, Awareness*). Direksi juga menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai penanggung jawab implementasi governansi korporat guna memastikan integrasi prinsip tata kelola ke dalam seluruh aktivitas bisnis.

GAMBARAN UMUM PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PMT terus memperkuat sistem pengendalian internal sebagai bagian integral dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sistem ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas proses bisnis, keandalan pelaporan, perlindungan aset, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengelolaan risiko yang mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Rancang bangun sistem pengendalian internal PMT mengacu pada kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013, yang mencakup lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Dalam pelaksanaannya, pengendalian internal PMT mencakup tiga aspek utama, yaitu pengendalian keuangan, pengendalian operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

In 2025, PMT consistently positioned corporate governance as a key foundation for managing the Company in a professional, ethical, and sustainable manner. PMT has adopted a Governance Framework consisting of four interconnected elements, namely principles, structure, process, and governance outcomes. The TARIFT governance principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trusted) have been internalized as ethical values reinforced through the AKHLAK culture, in line with the values of state-owned enterprises (BUMN).

To ensure the quality and alignment of governance practices with regional standards, PMT once again conducted a GCG implementation assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) methodology. The assessment results showed a score of 96.47 points with a "Very Good" rating, a significant increase from 86.03 points in the previous assessment. This improvement reflects PMT's commitment to going beyond minimum compliance and making governance a strategic pillar in the management of the Company.

As part of its systemic strengthening efforts, throughout 2025 PMT implemented various initiatives, including the refinement and ratification of GCG instrument guidelines, the strengthening of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP), the refinement of the whistleblowing reporting system (Whistleblowing System), including the designation of its managing unit, as well as various integrity education and campaign programs such as the Anti-Bribery Ambassador Program and MATCHA (Meet and Talk Compliance, Honesty, Awareness). The Board of Directors has also appointed one of its members as the officer responsible for the implementation of corporate governance to ensure the integration of governance principles into all business activities.

OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

PMT continues to strengthen its internal control system as an integral part of implementing sound corporate governance. This system is designed to provide reasonable assurance regarding the effectiveness of business processes, the reliability of reporting, the protection of assets, compliance with regulations, and risk management that supports the achievement of the Company's objectives. The design of PMT's internal control system refers to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 framework, which covers five main components: the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities. In its implementation, PMT's internal control covers three main aspects: financial control, operational control, and regulatory compliance.

Efektivitas pengendalian internal diperkuat dengan pendekatan *Three Lines Models* atau Model Tiga Lini. Lini pertama dijalankan oleh unit kerja pemilik proses, pemilik data, dan pemilik risiko yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas operasional, pengendalian awal, serta keandalan data pada masing-masing fungsi. Lini kedua dijalankan oleh fungsi manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, hukum, HSSE, teknologi informasi, dan fungsi pengendalian terkait yang berperan menyusun kebijakan, melakukan pemantauan, serta memastikan kesesuaian proses dengan ketentuan yang berlaku. Lini ketiga dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang memberikan *assurance* independen dan objektif atas kecukupan serta efektivitas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan tata kelola Perusahaan.

Dalam konteks pelaporan, sistem pengendalian internal menjadi fondasi bagi keandalan, konsistensi, dan kredibilitas laporan keuangan, Laporan Tahunan, serta pengungkapan keberlanjutan. Proses penyusunan laporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengumpulan data oleh unit pemilik informasi, verifikasi dan validasi lintas fungsi, konsolidasi data, *review* manajemen, hingga penelaahan oleh fungsi terkait sesuai lingkup kewenangannya. Mekanisme tersebut memastikan bahwa informasi keuangan, operasional, tata kelola, manajemen risiko, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, lingkungan, sosial, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun berdasarkan data yang konsisten, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme *assurance* internal dijalankan oleh SPI melalui audit internal berbasis risiko, audit khusus, pemberian rekomendasi perbaikan, serta pemantauan tindak lanjut temuan audit. Untuk menjaga independensi dan objektivitas fungsi tersebut, hasil audit, rekomendasi perbaikan, dan perkembangan tindak lanjut disampaikan kepada Direktur Utama serta dikoordinasikan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sesuai mekanisme tata kelola yang berlaku. Keandalan laporan keuangan juga diperkuat melalui audit oleh auditor eksternal independen yang ditetapkan melalui mekanisme RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan Komite Audit.

Sepanjang tahun 2025, PMT melaksanakan penguatan sistem pengendalian internal antara lain melalui audit berbasis risiko, integrasi pengendalian internal dengan fungsi kepatuhan antikorupsi dan sistem pelaporan pelanggaran, pemantauan tindak lanjut temuan audit, serta pelaksanaan *Internal Control Testing* (ICT) Semester II 2025. ICT dilakukan terhadap 128 sampel Standar Prosedur Operasional (SPO) dari populasi 182 SPO pada lingkup 15 risiko signifikan korporat untuk menilai kecukupan desain pengendalian dan efektivitas pelaksanaan pengendalian.

The effectiveness of internal control is strengthened through the Three Lines Models approach. The first line is carried out by the process owners, data owners, and risk owners responsible for carrying out operational activities, initial controls, and data reliability within their respective functions. The second line is carried out by the risk management, compliance, finance, legal, HSSE, and information technology functions, along with related control functions, which are responsible for developing policies, conducting monitoring, and ensuring that processes comply with applicable provisions. The third line is carried out by the Internal Audit Unit (SPI), which provides independent and objective assurance over the adequacy and effectiveness of internal control, the implementation of risk management, and the Company's governance.

In the context of reporting, the internal control system serves as the foundation for the reliability, consistency, and credibility of the financial statements, the Annual Report, and sustainability disclosures. The report preparation process is carried out in stages, starting from data collection by the information owner units, cross-functional verification and validation, data consolidation, management review, and finally examination by the relevant functions within the scope of their authority. This mechanism ensures that financial, operational, governance, risk management, employment, occupational safety, environmental, social, and corporate social and environmental responsibility information is prepared based on data that is consistent, relevant, and accountable.

The internal assurance mechanism is carried out by the SPI through risk-based internal audits, special audits, the provision of improvement recommendations, and monitoring of follow-up on audit findings. To maintain the independence and objectivity of this function, audit results, improvement recommendations, and follow-up developments are reported to the President Director and coordinated with the Board of Commissioners through the Audit Committee in accordance with applicable governance mechanisms. The reliability of the financial statements is further strengthened through audits conducted by an independent external auditor, appointed through the GMS mechanism based on the recommendation of the Board of Commissioners, taking into account the considerations of the Audit Committee.

Throughout 2025, PMT carried out the strengthening of its internal control system through, among other things, risk-based audits, the integration of internal control with the anti-corruption compliance function and whistleblowing reporting system, the monitoring of follow-up on audit findings, and the implementation of Internal Control Testing (ICT) for the second semester of 2025. The ICT was conducted on 128 samples of Standard Operating Procedures (SOPs) from a population of 182 SOPs, covering 15 significant corporate risks, to assess the adequacy of control design and the effectiveness of control implementation.

Berdasarkan hasil evaluasi, Direksi menilai bahwa sistem pengendalian internal PMT pada tahun 2025 telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, mengendalikan risiko, menjaga kepatuhan, serta memastikan terselenggaranya proses bisnis dan pelaporan yang tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antara Direksi, unit kerja pemilik data, fungsi pengendalian, SPI, auditor eksternal, Dewan Komisaris, dan Komite Audit mendukung tersedianya laporan keuangan, Laporan Tahunan, dan pengungkapan keberlanjutan yang andal, kredibel, transparan, dan akuntabel, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dalam penciptaan nilai jangka panjang.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PMT memandang manajemen risiko sebagai elemen fundamental dalam menjaga kesinambungan usaha dan pencapaian tujuan strategis. Sistem manajemen risiko diimplementasikan secara terstruktur dan menyeluruh dengan mengacu pada standar internasional ISO 31000:2018, yang mencakup tiga elemen utama: prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Seluruh entitas usaha, mencakup Kantor Pusat, seluruh Branch, dan Anak Perusahaan, telah mengimplementasikan sistem ini melalui pembaruan profil risiko secara berkala, penguatan pengendalian internal, serta penyusunan Rencana Kerja Manajemen Risiko (RKM).

Untuk mendukung digitalisasi pengelolaan risiko, PMT mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi PRiMa sebagai platform pengelolaan risiko terintegrasi, mulai dari penetapan konteks hingga pemantauan risiko di seluruh unit operasional. Sepanjang tahun 2025, implementasi manajemen risiko diarahkan pada penguatan analisis risiko berbasis kuantitatif, penyelarasan penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) berbasis teknologi, pengembangan sistem pelaporan yang responsif, pelibatan aktif seluruh unit kerja dalam penguatan budaya risiko, serta optimalisasi peran model tiga lini (*three lines models*).

Direksi menyatakan bahwa sistem manajemen risiko PMT sepanjang tahun 2025 telah berjalan secara memadai dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis, perlindungan aset, dan ketahanan usaha. Hasil penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) tahun 2025 tercatat sebesar 84,80 dengan predikat "*Fair*". Penilaian ini menjadi acuan bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kapabilitas manajemen risiko, antara lain melalui pemanfaatan *predictive analytics*, integrasi sistem GRC lintas entitas, dan penguatan kapasitas manajemen risiko di seluruh lapisan organisasi.

Based on the evaluation results, the Board of Directors assesses that PMT's internal control system in 2025 operated quite effectively in supporting the achievement of the Company's objectives, controlling risk, maintaining compliance, and ensuring that business processes and reporting were conducted in an orderly, consistent, and accountable manner. Synergy among the Board of Directors, data owner units, control functions, the SPI, external auditors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee supports the availability of reliable, credible, transparent, and accountable financial statements, Annual Report, and sustainability disclosures, thereby strengthening stakeholder confidence in the creation of long-term value.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

PMT views risk management as a fundamental element in maintaining business continuity and achieving strategic objectives. The risk management system is implemented in a structured and comprehensive manner with reference to the international standard ISO 31000:2018, which covers three main elements: principles, framework, and risk management process. All business entities, including Head Office, all Branches, and Subsidiaries, have implemented this system through periodic risk profile updates, the strengthening of internal controls, and the preparation of Risk Management Work Plans (RKM).

To support the digitalization of risk management, PMT has developed and implemented the PRiMa application as an integrated risk management platform, covering everything from context setting to risk monitoring across all operational units. Throughout 2025, risk management implementation was directed at strengthening quantitative risk analysis, aligning the implementation of technology-based Governance, Risk, and Compliance (GRC), developing a more responsive reporting system, actively engaging all work units in strengthening risk culture, and optimizing the role of the three lines models.

The Board of Directors states that PMT's risk management system operated adequately and effectively throughout 2025 in supporting the achievement of strategic objectives, asset protection, and business resilience. The Risk Management Implementation Quality (KPMR) assessment result for 2025 was recorded at 84.80, with a "Fair" rating. This assessment serves as a benchmark for the Company to continue improving its risk management capabilities, including through the use of predictive analytics, the cross-entity integration of GRC systems, and the strengthening of risk management capacity throughout the organization.

KODE ETIK, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

PMT secara konsisten mengembangkan dan menegakkan budaya etika yang tinggi melalui pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, penandatanganan pakta integritas, pengendalian gratifikasi, serta penguatan budaya anti korupsi di seluruh lini organisasi. Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, dan mencakup prinsip kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, pencegahan konflik kepentingan, perlakuan adil dan nondiskriminatif, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta larangan penyalahgunaan wewenang dan praktik tidak etis.

Sebagai bentuk pencegahan korupsi yang lebih spesifik, PMT menjalankan program pengendalian gratifikasi yang mengacu pada kebijakan Grup Pelindo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mekanisme pelaporan yang terintegrasi dan menjamin kerahasiaan pelapor. Sepanjang tahun 2025, PMT aktif menyelenggarakan program sosialisasi antikorupsi kepada seluruh karyawan di Kantor Pusat, *Branch Office*, dan Anak Perusahaan, melalui seminar, pelatihan, webinar, kampanye integritas, hingga pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* dalam penguatan penerapan GCG.

Sebagai bentuk penguatan komitmen, Direksi dan seluruh manajemen terlibat langsung dalam kampanye antikorupsi serta menjadi *role model* dalam penerapan nilai integritas. Upaya ini sejalan dengan kebijakan Pelindo Grup dalam mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001.

ARAH STRATEGIS BERKELANJUTAN, INTEGRASI PRINSIP ETAK, DAN KESIAPAN PENGUNGKAPAN SPK

Integrasi Keberlanjutan dalam Strategi Jangka Panjang

PMT menempatkan integritas dan keberlanjutan sebagai bagian dari arah strategis Perusahaan, sejalan dengan arahan Pelindo selaku induk perusahaan dalam memperkuat integrasi ESG di lingkungan Pelindo Grup. Direksi menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam RJPP 2025–2029, RKAP 2025, RKM Strategis, serta program kerja lintas fungsi. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar arah strategis Perusahaan tetap selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko, keberlanjutan, serta penciptaan nilai jangka panjang.

CODE OF ETHICS, GRATUITY CONTROL, AND ANTI-CORRUPTION CULTURE

PMT consistently develops and upholds a high standard of ethical culture through the enforcement of its Code of Ethics and Code of Conduct, the signing of integrity pacts, gratuity control, and the strengthening of an anti-corruption culture across all parts of the organization. The Code of Ethics applies to all of the Company's people, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, and covers principles of compliance with laws and regulations, the prevention of conflicts of interest, fair and non-discriminatory treatment, social and environmental responsibility, and the prohibition of abuse of authority and unethical practices.

As a more specific form of corruption prevention, PMT runs a gratuity control program based on Pelindo Group policy and applicable laws and regulations, with an integrated reporting mechanism that guarantees the confidentiality of reporters. Throughout 2025, PMT actively organized anti-corruption awareness programs for all employees at Head Office, Branch Offices, and Subsidiaries, through seminars, training, webinars, integrity campaigns, and the use of artificial intelligence technology to strengthen GCG implementation.

As a further demonstration of its commitment, the Board of Directors and the entire management team are directly involved in anti-corruption campaigns and serve as role models in upholding the value of integrity. This effort is in line with Pelindo Group policy in supporting the implementation of an Anti-Bribery Management System (SMAP) based on ISO 37001.

SUSTAINABLE STRATEGIC DIRECTION, INTEGRATION OF ETAK PRINCIPLES, AND SPK DISCLOSURE READINESS

Integration of Sustainability into Long-Term Strategy

PMT positions integrity and sustainability as part of the Company's strategic direction, in line with the direction set by Pelindo as the parent company in strengthening ESG integration across the Pelindo Group. The Board of Directors has followed up on this direction by integrating sustainability principles into the 2025–2029 RJPP, the 2025 RKAP, the Strategic RKM, and cross-functional work programs. In its implementation, the Board of Commissioners carries out an oversight and advisory function to ensure that the Company's strategic direction remains aligned with sound corporate governance principles, risk management, sustainability, and the creation of long-term value.

Dalam strategi jangka panjang, prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam *House of Strategy* PMT melalui penguatan portofolio bisnis, sinergi dan kemitraan strategis, keunggulan operasional dan komersial, serta dukungan *key enablers* yang mencakup sumber daya manusia, teknologi dan inovasi, serta pembiayaan strategis. Integrasi tersebut diperkuat dengan RKM Strategis yang memuat agenda keberlanjutan, antara lain pengembangan *sustainable ports*, implementasi ESG dengan praktik pengungkapan kinerja keberlanjutan, pengembangan dan integrasi fungsi *corporate sustainability* berbasis ESG, pelaksanaan program K3, implementasi TJSL, standardisasi dan digitalisasi layanan nonpetikemas, serta pengembangan peralatan dan infrastruktur pelabuhan yang mendukung peningkatan kualitas layanan.

In the long-term strategy, sustainability principles are integrated into PMT's House of Strategy through the strengthening of the business portfolio, strategic synergy and partnerships, operational and commercial excellence, and support from key enablers covering human resources, technology and innovation, and strategic financing. This integration is further reinforced by the Strategic RKM, which includes sustainability agenda items such as the development of sustainable ports, the implementation of ESG through sustainability performance disclosure practices, the development and integration of a corporate sustainability function based on ESG, the implementation of occupational health and safety (K3) programs, the implementation of TJSL, the standardization and digitalization of non-container services, and the development of port equipment and infrastructure that support improved service quality.

Dengan demikian, keberlanjutan PMT tidak hanya tercermin pada program sosial dan lingkungan, tetapi juga melekat pada cara Perusahaan menjalankan bisnis inti. Standardisasi, sistemisasi, dan digitalisasi terminal nonpetikemas menjadi bagian dari strategi keberlanjutan operasional karena mendukung peningkatan produktivitas, keandalan layanan, efisiensi rantai pasok, kualitas data, serta tata kelola pengambilan keputusan. Pendekatan ini memperkuat kontribusi PMT terhadap keberlanjutan logistik nasional tanpa melepaskan fokus pada keselamatan, kualitas layanan, dan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.

Thus, PMT's sustainability is not only reflected in social and environmental programs but is also inherent in the way the Company conducts its core business. Standardization, systematization, and digitalization of non-container terminals are part of the operational sustainability strategy because they support the improvement of productivity, service reliability, supply chain efficiency, data quality, and decision-making governance. This approach strengthens PMT's contribution to national logistics sustainability without losing focus on safety, service quality, and the creation of long-term economic value.

Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan tidak diposisikan sebagai program tambahan, melainkan menjadi bagian dari tata kelola, perencanaan strategis, pengelolaan risiko, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan operasional PMT. Hal ini memperkuat ketahanan usaha Perusahaan dalam menghadapi dinamika industri kepelabuhanan dan logistik, perubahan regulasi, tuntutan pelanggan, serta meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

With this approach, sustainability is not positioned as an additional program, but rather as part of PMT's governance, strategic planning, risk management, decision-making, and operations. This strengthens the Company's business resilience in facing the dynamics of the port and logistics industry, regulatory changes, customer demands, and growing stakeholder expectations regarding responsible business practices.

Integrasi Prinsip ETAK dalam Tata Kelola dan Budaya Integritas

PMT memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengintegrasikan prinsip ETAK, yaitu Perilaku Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan, yang selaras dengan prinsip TARIFT (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Integritas, *Fairness* (Kewajaran), dan *Trusted* (Tepercaya), serta nilai budaya AKHLAK. Integrasi ETAK diarahkan agar nilai integritas dan keberlanjutan tidak hanya tercantum dalam kebijakan, tetapi juga tercermin dalam proses bisnis, perilaku organisasi, pengambilan keputusan, serta hubungan Perusahaan dengan pelanggan, mitra kerja, regulator, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Integration of ETAK Principles into Governance and an Integrity Culture

PMT strengthens the implementation of sound corporate governance by integrating the ETAK principles, namely Ethical Conduct, Transparency, Accountability, and Sustainability, which are aligned with the TARIFT principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Integrity, Fairness, and Trustworthiness) as well as the AKHLAK cultural values. The integration of ETAK is intended to ensure that the values of integrity and sustainability are not merely stated in policy, but are also reflected in business processes, organizational behavior, decision-making, and the Company's relationships with customers, business partners, regulators, the community, and other stakeholders.

Perlaku Beretika diperkuat melalui penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Budaya Integritas, Pengendalian Gratifikasi, Pencegahan Benturan Kepentingan, serta Sistem Pelaporan Pelanggaran. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan pelaporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Akuntabilitas dijalankan melalui pembagian peran yang jelas antarorgan Perusahaan, sistem evaluasi kinerja, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Adapun keberlanjutan diintegrasikan ke dalam perencanaan, operasional, investasi, pengelolaan dampak lingkungan, kontribusi sosial, dan program TJSL.

Direksi berperan memastikan nilai ETAK dan AKHLAK diterjemahkan ke dalam kebijakan, program kerja, target kinerja, dan praktik operasional harian di Kantor Pusat, *Branch*, dan Anak Perusahaan. Sementara itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kegiatan operasional, budaya integritas dan keberlanjutan tecermin melalui kepatuhan terhadap prosedur, pelayanan yang andal dan bertanggung jawab, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja, efisiensi energi, pengelolaan dampak lingkungan, serta hubungan yang konstruktif dengan pelanggan dan mitra kerja.

Implementasi Keberlanjutan dan Pengukuran Dampak

Pada aspek sosial dan lingkungan, PMT menjalankan program TJSL yang diarahkan untuk mendukung prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), termasuk pendidikan, lingkungan, ekonomi dan UMK, serta bantuan sosial. Program TJSL tidak hanya diarahkan pada realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga pada relevansi program, manfaat bagi penerima, serta kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Penguatan efektivitas program TJSL dilakukan melalui pengukuran dampak berbasis *Social Return on Investment* (SROI) pada program unggulan. Pada tahun 2025, kolaborasi dengan FKS Grup menghasilkan rasio SROI 2,90, yang berarti setiap Rp1,00 investasi sosial menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp2,90. Selain itu, program Air Bersih "Sebernaman" mencatat rasio SROI 2,65. Pengukuran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL PMT mulai diarahkan pada pendekatan berbasis dampak, sehingga manfaat sosial yang dihasilkan dapat dievaluasi secara lebih baik dan menjadi dasar perbaikan kualitas program pada periode berikutnya.

Ethical conduct is strengthened through the implementation of the Code of Ethics and Code of Conduct, an Integrity Culture, Gratuity Control, Conflict-of-Interest Prevention, and the Whistleblowing Reporting System. Transparency is realized through the disclosure of relevant, accurate, and timely information and reporting. Accountability is carried out through a clear division of roles among the Company's organs, a performance evaluation system, internal control, and risk management. Sustainability, meanwhile, is integrated into planning, operations, investment, environmental impact management, social contribution, and the TJSL program.

The Board of Directors is responsible for ensuring that the ETAK and AKHLAK values are translated into policies, work programs, performance targets, and daily operational practices at Head Office, Branches, and Subsidiaries. The Board of Commissioners, meanwhile, carries out its oversight and advisory function to maintain consistent implementation of sound corporate governance principles. In operational activities, the culture of integrity and sustainability is reflected through compliance with procedures, reliable and responsible service, the strengthening of occupational health and safety, energy efficiency, environmental impact management, and constructive relationships with customers and business partners.

Sustainability Implementation and Impact Measurement

On the social and environmental front, PMT runs a TJSL program directed at supporting Sustainable Development Goals (SDG) priorities, including education, the environment, the economy and micro and small enterprises (UMK), and social assistance. The TJSL program is directed not only at the realization of activities and budget absorption, but also at the relevance of the program, the benefits for recipients, and its contribution to the needs of communities surrounding the operational areas.

The effectiveness of the TJSL program is strengthened through impact measurement based on Social Return on Investment (SROI) for flagship programs. In 2025, the collaboration with FKS Group produced an SROI ratio of 2.90, meaning that every Rp1.00 of social investment generated Rp2.90 in social benefit. In addition, the "Sebernaman" Clean Water program recorded an SROI ratio of 2.65. These measurements show that PMT's TJSL implementation is beginning to move toward an impact-based approach, allowing the resulting social benefits to be better evaluated and used as a basis for improving program quality in subsequent periods.

Pendekatan berbasis dampak tersebut memperkuat kualitas implementasi keberlanjutan PMT karena program sosial tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan atau realisasi biaya, tetapi juga dari nilai manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan cara ini, TJSL menjadi bagian dari penciptaan nilai berkelanjutan yang mendukung hubungan harmonis dengan masyarakat, memperkuat reputasi Perusahaan, dan meningkatkan kontribusi PMT terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kesiapan Pengungkapan Kinerja Keberlanjutan Berbasis SPK 1 dan 2

Sejalan dengan perkembangan standar pelaporan keberlanjutan, Direksi mendorong peningkatan kesiapan PMT dalam memahami dan mengantisipasi penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), khususnya SPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan dan SPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim. Kesiapan tersebut dilakukan melalui penguatan pemahaman lintas fungsi, penyelarasan prosedur pengumpulan data, penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas koordinasi antarunit pemilik data, serta penyusunan laporan keberlanjutan secara berkala kepada pemangku kepentingan.

Kesiapan PMT terhadap SPK diperkuat melalui pemetaan dan penyelarasan bertahap Laporan Keberlanjutan 2025 dengan kerangka pengungkapan iklim berbasis IFRS S2, khususnya pada aspek *Risk Management* serta *Metrics and Targets*. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat keterhubungan antara strategi, program kerja, anggaran, risiko iklim, indikator keberlanjutan, dan proses pengambilan keputusan Perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan keberlanjutan PMT diarahkan agar semakin berbasis data, relevan, dapat ditelusuri, dan selaras dengan perkembangan standar pelaporan keberlanjutan.

Integrasi kesiapan pelaporan tersebut dibangun dengan memperhatikan empat pilar utama, yaitu *Governance*, *Strategy*, *Risk Management*, serta *Metrics and Targets*. Pada pilar *Governance*, PMT memperkuat peran Direksi, Dewan Komisaris, fungsi manajemen risiko, fungsi keuangan, Sekretaris Perusahaan, serta unit pemilik data dalam pengelolaan dan pelaporan informasi keberlanjutan. Pada pilar *Strategy*, isu keberlanjutan diintegrasikan ke dalam RJPP, RKAP, RKM Strategis, program ESG, dan agenda pengembangan *sustainable ports*. Pada pilar *Risk Management*, risiko ESG dan risiko terkait iklim dikelola dalam kerangka manajemen risiko Perusahaan. Sementara itu, pada pilar *Metrics and Targets*, PMT memperkuat pengukuran dan pelaporan indikator keberlanjutan, termasuk K3, TJSL, efisiensi energi, emisi, pengelolaan lingkungan, capaian program ESG, serta dampak sosial yang diukur melalui SROI.

This impact-based approach strengthens the quality of PMT's sustainability implementation, as social programs are assessed not only by the number of activities or cost realization, but also by the value of the benefits generated for the community. In this way, TJSL becomes part of the creation of sustainable value that supports harmonious relationships with the community, strengthens the Company's reputation, and increases PMT's contribution to sustainable development.

Readiness for Sustainability Performance Disclosure Based on SPK 1 and 2

In line with developments in sustainability reporting standards, the Board of Directors is driving improvements in PMT's readiness to understand and anticipate the implementation of the Sustainability Disclosure Standards (SPK), particularly SPK 1 on General Requirements for Sustainability-Related Financial Information Disclosures and SPK 2 on Climate-Related Disclosures. This readiness is being pursued through strengthening cross-functional understanding, aligning data collection procedures, strengthening information systems, improving the quality of coordination among data-owning units, and the periodic preparation of sustainability reports for stakeholders.

PMT's readiness for SPK is being strengthened through the gradual mapping and alignment of the 2025 Sustainability Report with the IFRS S2 climate disclosure framework, particularly in the areas of Risk Management and Metrics and Targets. This mapping serves as an initial step toward strengthening the linkage between strategy, work programs, budgets, climate risk, sustainability indicators, and the Company's decision-making process. As a result, PMT's sustainability disclosures are increasingly being directed toward becoming more data-driven, relevant, traceable, and aligned with developments in sustainability reporting standards.

This reporting readiness integration is built around four main pillars, namely Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics and Targets. Under the Governance pillar, PMT strengthens the roles of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the risk management function, the finance function, the Corporate Secretary, and data-owning units in managing and reporting sustainability information. Under the Strategy pillar, sustainability issues are integrated into the RJPP, RKAP, Strategic RKM, ESG programs, and the agenda for developing sustainable ports. Under the Risk Management pillar, ESG risks and climate-related risks are managed within the Company's risk management framework. Meanwhile, under the Metrics and Targets pillar, PMT strengthens the measurement and reporting of sustainability indicators, including occupational health and safety (K3), TJSL, energy efficiency, emissions, environmental management, ESG program achievements, and social impact as measured through SROI.

Dengan penguatan tata kelola perusahaan yang baik, integrasi ETAK, pelaksanaan ESG dalam RKM Strategis, pengukuran dampak TJSL berbasis SROI, pemetaan awal IFRS S2 dalam Laporan Keberlanjutan, pengelolaan risiko keberlanjutan, serta peningkatan kesiapan terhadap SPK 1 dan SPK 2, PMT berupaya memastikan bahwa prinsip integritas dan keberlanjutan menjadi bagian substantif dari strategi dan proses bisnis Perusahaan. Pendekatan ini memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mendukung pelaporan yang lebih andal dan akuntabel, serta memperkuat kemampuan PMT dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.

With the strengthening of sound corporate governance, the integration of ETAK, the implementation of ESG within the Strategic RKM, SROI-based measurement of TJSL impact, the initial mapping of IFRS S2 within the Sustainability Report, the management of sustainability-related risks, and improved readiness for SPK 1 and SPK 2, PMT is working to ensure that the principles of integrity and sustainability become a substantive part of the Company's strategy and business processes. This approach strengthens business resilience, improves the quality of decision-making, supports more reliable and accountable reporting, and strengthens PMT's ability to create sustainable value for its stakeholders.

KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi dan susunan Direksi PMT. Susunan Direksi tetap sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS sebelumnya. Dengan demikian, komposisi dan susunan Direksi PMT per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, there were no changes to the composition and structure of the PMT Board of Directors. The composition of the Board of Directors remained as established through the previous Circular Resolution of Shareholders in Lieu of a General Meeting of Shareholders. Accordingly, the composition and structure of the PMT Board of Directors as of December 31, 2025 were as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Ary Henryanto	Direktur Utama President Director	1 Maret 2024 s.d RUPS 2029 March 1, 2024 to the 2029 GMS
Yarham Harid	Direktur Teknik Director of Engineering	1 Maret 2024 s.d RUPS 2029 March 1, 2024 to the 2029 GMS
Rizki Kurniawan	Direktur Strategi dan Komersial Director of Strategy and Commercial	7 November 2023 s.d RUPS 2028 November 7, 2023 to the 2028 GMS
Arif Rusman Yulianto	Direktur Operasi Director of Operations	1 Maret 2023 s.d RUPS 2028 March 1, 2023 to the 2028 GMS
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	1 Maret 2023 s.d RUPS 2028 March 1, 2023 to the 2028 GMS
Yoni Setiawan	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	1 Maret 2023 s.d RUPS 2028 March 1, 2023 to the 2028 GMS

PENUTUP

Menutup Laporan Direksi ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, pelanggan, mitra kerja, insan PMT, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, dan kepercayaan yang telah diberikan selama tahun 2025.

Di tengah tantangan eksternal yang kompleks dan transformasi internal yang berkelanjutan, PMT mampu menjaga stabilitas kinerja dan membukukan pemulihan profitabilitas yang signifikan dalam mewujudkan visi sebagai Pemimpin dalam Konektivitas Barang di Indonesia. Capaian ini tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam menjalankan prinsip governansi korporat yang bertanggung jawab serta mendorong inovasi dan sinergi di setiap lini usaha.

Lebih dari itu, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi PMT dalam mempertegas peran strategisnya sebagai pengelola ekosistem terminal nonpetikemas yang terstandardisasi, terdigitalisasi, dan terintegrasi. Fondasi tersebut memperkuat kemampuan PMT untuk menjaga keandalan layanan, mendukung efisiensi rantai pasok, memperluas kemitraan, serta menghubungkan agenda transformasi operasional dengan penciptaan nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.

Kami percaya bahwa fondasi yang telah dibangun sepanjang tahun 2025 akan menjadi pijakan kuat dalam menghadapi dinamika tahun 2026 dan seterusnya. Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan orientasi pada nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, PMT akan terus memperkuat peran strategisnya dalam ekosistem logistik nasional serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

CLOSING

In closing this Board of Directors' Report, we extend our highest appreciation and gratitude to all shareholders, the Board of Commissioners, customers, business partners, the PMT workforce, and all stakeholders for the support, cooperation, and trust extended to us throughout 2025.

Amid complex external challenges and ongoing internal transformation, PMT has succeeded in maintaining stable performance and achieving a significant recovery in profitability in pursuit of its vision of becoming the Leader in Goods Connectivity in Indonesia. This achievement is a direct result of the commitment of the entire management team and employees in upholding the principles of responsible corporate governance while driving innovation and synergy across every line of business.

Moreover, the year 2025 will be a crucial moment for PMT to reinforce its strategic role as the manager of a standardized, digitized, and integrated non-container terminal ecosystem. This foundation strengthens PMT's ability to maintain service reliability, support supply chain efficiency, expand partnerships, and connect the operational transformation agenda with the creation of sustainable value for stakeholders.

We believe that the foundation built throughout 2025 will serve as a strong platform for facing the dynamics of 2026 and beyond. With a spirit of collaboration, integrity, and a focus on creating added value for all stakeholders, PMT will continue to strengthen its strategic role within the national logistics ecosystem and contribute to sustainable economic growth.

Medan, 8 Mei 2026
Medan, May 8, 2026

Atas nama Direksi
PT Pelindo Multi Terminal
On behalf of the Board of Directors
PT Pelindo Multi Terminal



Ary Henryanto
Direktur Utama
President Director

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025

Statement of Responsibility by The Board of Commissioners Regarding the 2025 Annual Report of PT Pelindo Multi Terminal

Dengan ini, kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal (PMT) Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap. Kami juga bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 8 Mei 2026

We hereby declare that all information presented in the 2025 Annual Report of PT Pelindo Multi Terminal (PMT) has been fully disclosed. We also assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made in good faith.

Medan, May 8, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Darwanto
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

Arman Depari
Komisaris
Commissioner

Gugun Gumilar
Komisaris
Commissioner

Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Aan Rusdianto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Elly Rosita Silaban
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025

Statement of Responsibility by the Board of Directors Regarding the 2025 Annual Report of PT Pelindo Multi Terminal

Dengan ini, kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal (PMT) Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap. Kami juga bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 8 Mei 2026

We hereby declare that all information presented in the 2025 Annual Report of PT Pelindo Multi Terminal (PMT) has been fully disclosed. We also assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made in good faith.

Medan, May 8, 2026

Direksi
Board of Directors



Ary Henryanto
Direktur Utama
President Director



Yarham Harid
Direktur Teknik
Director of Engineering



Rizki Kurniawan
Direktur Strategi dan Komersial
Director of Strategy and Commercial



Arif Rusman Yulianto
Direktur Operasi
Director of Operations



Edi Priyanto
Direktur Sumber Daya Manusia
Director of Human Resources



Yoni Setiawan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

PELINDO
MULTI TERMINAL

Profil Perusahaan

Company Profile



PMT berkomitmen untuk menjadi penyedia solusi utama dalam layanan terminal *multipurpose* yang terintegrasi, dan berkelanjutan. Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, memperkuat konektivitas maritim antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global.
PMT is committed to being the leading provider of integrated and sustainable multipurpose terminal solutions. The company plays a vital role in supporting the national development agenda, strengthening interregional maritime connectivity, reducing logistics costs, and enhancing Indonesia's competitiveness in the global supply chain.



03

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
General Information and Company Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT Pelindo Multi Terminal

Nama Singkat
Nickname

PMT

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

29 September 2021.
September 29, 2021

Informasi Perubahan Nama pada Tahun Buku
Information on Name Changes for the Fiscal Year

Tidak terdapat perubahan nama Perusahaan pada tahun buku 2025. Informasi terperinci terkait perubahan nama sejak awal berdiri, disampaikan pada pembahasan Riwayat Singkat Perusahaan, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.
There were no changes in the Companys name in the 2025 fiscal year. Detailed information regarding name changes since its inception is presented in the Company's Brief History discussion, Company Profile Chapter, this Annual Report.



Dasar Hukum Pendirian
Legal Status of Establishment

Akta Pendirian No. 19 tanggal 29 September 2021 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0061301. AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal.
Deed of Establishment No. 19 dated September 29, 2021 from Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0061301. AH.01.01 of 2021 dated September 30, 2021 concerning the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT Pelindo Multi Terminal.

Status Hukum Perusahaan
Legal Basis of Establishment

Perseroan Terbatas; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Limited Liability Company; Domestic Investment.

Bidang Usaha
Line of Business

Pengusahaan di Pelabuhan
Business at the port

Modal Dasar
Authorized capital

Rp5.921.220.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and fully paid capital

Rp1.480.305.000.000,-

Kepemilikan Saham
Share Ownership

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (99,99%)
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (0,01%)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (99.99%)
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (0.01%)



Jumlah Karyawan per 31 Desember 2025
Number of employees as of December 31, 2025

669 orang (organik)
employees (organic)

Data Jaringan Kantor
Office Network Data

- **1** Kantor Pusat / Head Office
- **1** Kantor Perwakilan / Representative Office
- **32** Branch Pelabuhan / Port Branches
- **5** Satelit / Satellite
- **3** Entitas Anak Usaha / Subsidiaries



AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN

INFORMATION ACCESS OF THE COMPANY

KANTOR PUSAT : HEAD OFFICE :
Grha Pelindo Gedung A
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1
Belawan, Medan 20411, Indonesia
Grha Pelindo, Building A
Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1
Belawan, Medan 20411, Indonesia

KANTOR PERWAKILAN : REPRESENTATIVE OFFICE :
Pelindo Tower Lt. 24
Jl. Yos Sudarso No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Pelindo Tower, 24th Floor
Jl. Yos Sudarso No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta

Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address
Kontak Perusahaan Contact	Tel. (061) 41000055 Email : plmt@pelindomultiterminal.co.id multi.terminal@pelindo.co.id Situs Web: www.pelindomultiterminal.co.id
Hubungan Antar Lembaga dan Investor Relations with Institutions and Investors	**Lestari Utami** VP Tata Kelola, Hubungan dan Investor VP of Corporate Governance, External Relations, and Investor Relations Email : lestari.utami@pelindo.co.id Phone : +62 85297469996 Address : Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan, Medan - Sumatera Utara
Media Sosial Social Media	Instagram : @pelindomultiterminal Facebook : Pelindo Multi Terminal X : @Pelindo_SPMT Youtube: Pelindo Multi Terminal LinkedIn: Pelindo Multi Terminal
Whistleblowing System	https://pelindobersih.pelindo.co.id/



Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address
Kantor Branch Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Branch Office	Jl. Teluk Air No. 12 Tanjung Balai Karimun Email : tbkarimun@pelindo.co.id Jl. Teluk Air No. 12 Tanjung Balai Karimun Email: pt karimun@pelindo.co.id
Kantor Branch Tanjung Pinang Tanjung Pinang Branch Office	Jln. Sri Bayintan No. 1 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, RT.001 RW. 006 Email : tanjungpinang@pelindo.co.id tpi-pemasaran@pelindo1.co.id Jln. Sri Bayintan No. 1 Kijang Kota Subdistrict, East Bintan District Bintan Regency, RT.001 RW. 006 Email : tanjungpinang@pelindo.co.id tpi-pemasaran@pelindo1.co.id
Kantor Branch Belawan Belawan Branch Office	Jl. Sumatera No. 1, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara 20411 Email : belawan@pelindomultiterminal.co.id No. Telp : (061) 6941265 Jl. Sumatera No. 1, Medan Belawan, Medan, North Sumatra 20411 Email : belawan@pelindomultiterminal.co.id Tel. No.: (061) 6941265
Kantor Branch Jamrud Nilam Mirah Jamrud Nilam Mirah Branch Office	Gate Terminal Jamrud & Mirah Lt. 2, Jl. Tanjung Perak Timur No. 620, Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur 60165 Email : jamrud@pelindomultiterminal.co.id Telp : 081262871651 Gate Terminal Jamrud & Mirah Lt. 2, Jl. East Tanjung Perak No. 620, Pabean Cantikan, Surabaya, East Java 60165 Email: jamrud@pelindomultiterminal.co.id Telp: 081262871651
Kantor Branch Makassar Makassar Branch Office	Jl. Soekarno no. 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90173 Email : makassar@pelindomultiterminal.co.id Telp : (0411) 6941265 Jl. Soekarno no. 1, Makassar City, South Sulawesi 90173 Email: makassar@pelindomultiterminal.co.id Tel: (0411) 6941265
Kantor Branch Dumai Dumai Branch Office	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 01, Dumai Timur, Dumai, Riau 28813 Email : dumai@pelindomultiterminal.co.id Telp : (0765) 31649 / 085186161999 Jl. Sultan Syarif Kasim No. 01, East Dumai, Dumai, Riau 28813 Email: dumai@pelindomultiterminal.co.id Tel: (0765) 31649 / 085186161999

Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address
Kantor Branch Trisakti Mekar Putih Trisakti Mekar Putih Branch Office	Jl. Barito Hilir No. 6, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70118 Email : trisakti@pelindomultiterminal.co.id Telp :(0511) 3353670 Jl. Barito Hilir No. 6, West Banjarmasin, Banjarmasin, South Kalimantan 70118 Email: trisakti@pelindomultiterminal.co.id Tel: (0511) 3353670
Kantor Branch Bumiharjo Bagendang Bumiharjo Bagendang Branch Office	Jl. Pelabuhan CPOTanjung Kalaf RT. 18, Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74181 Jl. H.M. Arsyad Km. 24, Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74361 Email : bumiharjo@pelindomultiterminal.co.id, bagendang@pelindomultiterminal.co.id Telp : 081253559291 (operasi & komersial) Jl. Pelabuhan CPOTanjung Kalaf RT. 18, Kumai, West Kotawaringin, Central Kalimantan 74181 Jl. H.M. Arsyad Km. 24, North Mentaya Hilir, East Kotawaringin, Central Kalimantan 74361 Email: bumiharjo@pelindomultiterminal.co.id, bagendang@pelindomultiterminal.co.id Tel: 081253559291 (operations & commercial)
Kantor Branch Balikpapan Balikpapan Branch Office	Jl. Yos Sudarso No. 30, Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur 76111 Email : balikpapan@pelindomultiterminal.co.id Telp : (0542) 737457 Jl. Yos Sudarso No. 30, Balikpapan City, Balikpapan, East Kalimantan 76111 Email: balikpapan@pelindomultiterminal.co.id Tel: (0542) 737457
Kantor Branch Tanjung Wangi Tanjung Wangi Branch Office	Jl. Laut Jawa No. 1, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53213 Email : tanjungintan@pelindomultiterminal.co.id Telp : (0282) 534651 Jl. Laut Jawa No. 1, South Cilacap, Cilacap, Central Java 53213 Email: tanjungintan@pelindomultiterminal.co.id Tel: (0282) 534651
Kantor Branch Tanjung Intan Tanjung Intan Branch Office	Jl. Raya Situbondo Ketapang , Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur 68455 Email : tanjungwangi@pelindomultiterminal.co.id Telp : (0333) 510636 Jl. Raya Situbondo Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi, East Java 68455 Email: tanjungwangi@pelindomultiterminal.co.id Tel: (0333) 510636
Kantor Branch Tanjung Emas Tanjung Emas Branch Office	Jl. Coaster No. 10 Semarang Email : Tanjungemas@pelindo.co.id Telp : (024) 3545721 Jl. Coaster No. 10 Semarang Email: Tanjungemas@pelindo.co.id Tel: (024) 3545721

Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address
Kantor Branch Bima Badas Bima Badas Branch Office	Jl. RE Martadinata no.1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima NTB 84118 Email : Bima@pelindo.co.id Jl. RE Martadinata no.1 Tanjung Village Rasanae Barat District, Bima City, NTB 84118 Email: Bima@pelindo.co.id
Branch Lembar Lembar Branch	Jln Raya Pelabuhan no.5 Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Email : lembar@pelindo.co.id Telp : (0370) 681260 Jln Raya Pelabuhan No.5 Lembar, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Email: Lembar@pelindo.co.id Tel: (0370) 681260
Kantor Branch Gresik Gresik Branch Office	JL. Yos Sudarso No. 1, Gresik, Jawa Timur Email : gresik@pelindo.co.id Telp : (031) 3981941 / 3974542 JL. Yos Sudarso No. 1, Gresik, East Java Email: gresik@pelindo.co.id Tel: (031) 3981941 / 3974542
Kantor Branch Malahayati Malahayati Branch Office	Jl. Laksamana Malahayati KM.32.5, Desa Lamreh, Kec. Mesjid Raya, Aceh Besar – 23381 Email : malahayati@pelindo1.co.id No. Telp : (0651) 23166 Jl. Laksamana Malahayati KM.32.5, Lamreh Village, Mesjid Raya District, Aceh Besar – 23381 Email: malahayati@pelindo1.co.id Tel. No.: (0651) 23166
Kantor Branch Sibolga Sibolga Branch Office	Alamat : Jl. Horas Pelabuhan Baru, Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Kota Sibolga, Sumatera Utara 22532 Email : Sibolga@pelindo1.co.id Telp : (0631) 3270417 Address: Jl. Horas Pelabuhan Baru, Pancuran Dewa Village, Sibolga District Sibolga City, North Sumatra 22532 Email: Sibolga@pelindo1.co.id Tel: (0631) 3270417
Kantor Branch Lhokseumawe Lhokseumawe Branch Office	Jl. Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, Lhokseumawe 24354 , Aceh Utara Email : lhokseumawe@pelindo1.co.id Telp : (0645) 56816 Jl. Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, Lhokseumawe 24354, North Aceh Email: lhokseumawe@pelindo1.co.id Tel: (0645) 56816
Kantor Branch Pare-Pare Garongkong Pare-Pare Garongkong Branch Office	Jl. Tarakan No. 1, Cappa Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91114 Email : parepare@pelindomultiterminal.co.id Jl. Tarakan No. 1, Cappa Ujung Parepare City, South Sulawesi 91114 Email: parepare@pelindomultiterminal.co.id
Kantor Branch Benoa Benoa Branch Office	Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Dermaga Selatan, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222 Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Dermaga Selatan, Pesanggaran, South Denpasar, Denpasar, Bali 80222

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARIES

Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address
Kepemilikan Langsung Direct Ownership	
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR")	Gedung Pelindo Tower Lt. 16 Jl. Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara 14230 Hotline : +62 811 933 2345 Email : ptpnonpetikemas@ptp.co.id Situs Web: https://ptp.co.id/ Pelindo Tower Building, 16th Floor Jl. Yos Sudarso No. 9, North Jakarta 14230 Hotline: +62 811 933 2345 Email: ptpnonpetikemas@ptp.co.id Website: https://ptp.co.id/
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT")	Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing Jakarta Utara 14110, Indonesia Telp: +62 21 4393 2251 Customer Care: +62 811933 9930 Email: corsec@indonesiacarterminal.co.id; info@indonesiacarterminal.co.id Situs Web: www.indonesiacarterminal.co.id Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing North Jakarta 14110, Indonesia Tel: +62 21 4393 2251 Customer Care: +62 811933 9930 Email: corsec@indonesiacarterminal.co.id; info@indonesiacarterminal.co.id Website: www.indonesiacarterminal.co.id
PT Terminal Curah Utama ("TCU")	Gedung Pelindo Tower Lt. 24 Jl. Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara 14230 Pelindo Tower Building, 24th Floor Jl. Yos Sudarso No. 9 North Jakarta 14230
Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership	
PT Pelindo3 Terminal Petikemas ("P3TPK")	Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya 60165 – Indonesia Email: info@pelindotpk.co.id Telp. (031) 99210456 Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya 60165 – Indonesia Email: info@pelindotpk.co.id Tel. (031) 99210456

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company



PT Pelindo Multi Terminal, selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "PMT", merupakan entitas anak dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang didirikan sebagai bagian dari inisiatif strategis restrukturisasi BUMN kepelabuhanan nasional. Pembentukan PMT secara resmi disahkan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-744/MBU/09/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Persetujuan Pendirian dan Penyertaan Modal Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PMT dibentuk dengan tujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan terminal multipurpose di seluruh Indonesia secara lebih efisien, terstandar, dan modern. Peran ini ditetapkan dalam kerangka transformasi Pelindo yang diimplementasikan sejak 1 Oktober 2021, melalui penggabungan empat entitas pelabuhan BUMN menjadi satu korporasi nasional yang terintegrasi. Dalam struktur Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cluster Non Petikemas, PMT memegang mandat khusus untuk mengelola terminal curah cair, curah kering, kargo umum, dan jenis muatan nonpetikemas lainnya.

PT Pelindo Multi Terminal, hereinafter referred to as the "Company" or "PMT," is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo, established as part of a strategic initiative to restructure the national state-owned port enterprises. The establishment of PMT was officially approved through a letter from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-744/MBU/09/2021 dated September 28, 2021, concerning the Approval for the Establishment and Capital Participation in Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PMT was formed with the goal of integrating the management of multipurpose terminals throughout Indonesia in a more efficient, standardized, and modern manner. This role is defined within the framework of Pelindo's transformation, implemented since October 1, 2021, through the merger of four state-owned port entities into one integrated national corporation. Within Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Non-Container Cluster structure, PMT is entrusted with a special mandate to manage liquid bulk, dry bulk, general cargo, and other non-container cargo terminals.

Sejak berdiri, PMT terus memperkuat kapasitasnya sebagai operator terminal *multipurpose* yang andal dan kompetitif. Hingga akhir tahun 2025, PMT mengelola 37 cabang pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia, termasuk melalui anak perusahaan yang memiliki keahlian khusus, yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), dan PT Terminal Curah Utama (TCU). Kolaborasi antara entitas-induk dan anak perusahaan ini membentuk rantai nilai yang kuat dalam ekosistem logistik nasional.

Sementara itu, selaras dengan arah transformasi berkelanjutan, PMT secara konsisten menjalankan program standardisasi dan digitalisasi operasional di seluruh pelabuhan yang dikelolanya. Upaya ini mencakup peningkatan perencanaan dan pengendalian operasional, optimalisasi alur lalu lintas barang, serta efisiensi proses bongkar muat. Sejak pendiriannya, PMT telah berhasil melakukan transformasi terhadap lebih dari 25 pelabuhan, dengan dampak positif terhadap produktivitas dan kualitas layanan terminal *multipurpose*.

Mengusung semangat sebagai *Indonesia's Connectivity Champion*, PMT berkomitmen untuk menjadi penyedia solusi utama dalam layanan terminal *multipurpose* yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, memperkuat konektivitas maritim antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global.

Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan dan memperkuat konektivitas logistik nasional, PMT melalui anak usahanya, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), resmi mengembangkan layanan operasional di Terminal Satelit Banjarmasin yang berlokasi di Pelabuhan Trisakti pada awal Oktober 2025. Pengembangan ini menandai perluasan peran terminal yang tidak hanya melayani aktivitas bongkar muat kendaraan, tetapi juga mendukung layanan kapal *Roll-on/Roll-off* (RoRo) serta angkutan penumpang. Kehadiran layanan yang lebih terintegrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi arus distribusi kendaraan dan mobilitas masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen PMT Grup dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset pelabuhan, memperkuat jaringan layanan multimoda, serta mendukung pertumbuhan ekosistem logistik dan transportasi nasional yang semakin andal, terhubung, dan berdaya saing.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN STATUS HUKUM PADA TAHUN BUKU

Sejak pertama kali berdiri pada tanggal 29 September 2021 hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama dan status badan hukum.

Since its inception, PMT has continued to strengthen its capacity as a reliable and competitive multipurpose terminal operator. By the end of 2025, PMT managed 37 port branches spread across various strategic regions of Indonesia, including through subsidiaries with specialized expertise, namely PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), and PT Terminal Curah Utama (TCU). The collaboration between the parent company and its subsidiaries forms a strong value chain within the national logistics ecosystem.

Meanwhile, in line with the direction of ongoing transformation, PMT consistently carries out standardization and digitalization programs across all ports being managed. These efforts include improving operational planning and control, optimizing the flow of goods, and enhancing efficiency in loading and unloading processes. Since its establishment, PMT has successfully transformed more than 25 ports, resulting in positive impacts on the productivity and service quality of multipurpose terminals.

With the spirit of Indonesia's Connectivity Champion, PMT is committed to becoming the leading provider of efficient, integrated, and sustainable multipurpose terminal services. The Company plays an essential role in supporting the national development agenda, enhancing maritime connectivity between regions, reducing logistics costs, and increasing Indonesia's competitiveness in the global supply chain.

As part of the efforts to expand service coverage and strengthen national logistics connectivity, PMT, through its subsidiary, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), officially developed operational services at Banjarmasin Satellite Terminal located at Trisakti Port in early October 2025. This development marks the expansion of the terminal's role, which not only serves vehicle loading and unloading activities, but also supports Roll-on/Roll-off (RoRo) vessel services and passenger transportation. The presence of these more integrated services is expected to improve the efficiency of vehicle distribution flows and community mobility in South Kalimantan and its surrounding areas. This strategic initiative forms part of PMT Group's commitment to optimizing the utilization of port assets, strengthening multimodal service networks, and supporting the growth of a national logistics and transportation ecosystem that is increasingly reliable, connected, and competitive.

INFORMATION ON CHANGES IN NAME AND LEGAL STATUS DURING THE FISCAL YEAR

Since its inception on September 29, 2021, until the publication of this annual report, the Company has never changed its name or legal entity status.

Jejak Langkah
Milestones

2020

Kajian sinergi dan integrasi BUMN Pelabuhan, yang kemudian menghasilkan rekomendasi penggabungan.
Study on the synergy and integration of SOE Port, which then resulted in recommendation for merger.

2021



- 28 September 2021, Surat Menteri BUMN No. S-744/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Pendirian dan Penyertaan Modal Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- 1 Oktober 2021, merger Pelabuhan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Entitas ini berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat "Pelindo";
- 29 September 2021, PMT sebagai salah satu anak usaha Pelindo resmi berdiri.

- September 28, 2021, Letter of Minister of SOE No. S-744/MBU/09/2021 concerning Approval for the Establishment and Equity Participation of Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- October 1, 2021, merger of Pelabuhan Indonesia through Government Regulation No. 101 of 2021 concerning the Merger of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, and Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. This entity changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or abbreviated as "Pelindo".
- September 29, 2021, PMT as one of Pelindo's subsidiary was officially established.

2022

- 1 Januari 2022, PMT resmi menjalankan layanan operasional kepelabuhanan di *Branch* Dumai;
- 3 Januari 2022, Pelindo melakukan pengalihan saham (inbreng saham) pada Anak Perusahaan klaster nonpetikemas kepada PMT;
- 4 Januari 2022, PMT melakukan penandatanganan kontrak perjanjian serah operasi dan *maintenance* dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP);
- 1 Februari 2022, *Go Live* Operasional PMT di Branch Belawan dan Tanjung Intan;
- 11 Februari 2022, PMT bersinergi dengan afiliasi PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam *Subholding* Gas PT PGN Tbk, dan PT Pertamina Gas yaitu PT Perta Daya Gas (PDG) serta PT Bali Infra Gas dalam bentuk konsorsium "Midstream LNG Bali";
- 1 Maret 2022, Go Live Operasional PMT di Branch Bumiharjo, Bagendang, dan Tanjung Wangi;
- 29 Maret 2022, *Groundbreaking* Terminal LNG Bali *Project* di Benoa;
- 1 April 2022, *Go Live* Operasional PMT di *Branch* Jamrud Nilam Mirah, Trisakti, Balikpapan, dan Makassar;
- 1 Juli 2022, PMT menerima penyerahan Surat Keputusan tentang Penetapan Terminal Curah Cair dan Terminal Curah Kering di Pelabuhan Belawan;
- 1 November 2022, Kementerian Perhubungan tetapkan terminalisasi Terminal Curah Cair di *Branch* Bagendang;
- 3 November 2022, Kementerian Perhubungan tetapkan terminalisasi Terminal Curah Cair dan Terminal Curah Kering di *Branch* Dumai;
- 5 Desember 2022, PMT resmi mengakuisisi PT Terminal Curah Semarang (TCS).

- January 1, 2022, PMT officially runs port operational services at the Dumai Branch.
- January 3, 2022, Pelindo transferred shares (inbreng shares) in the non- container cluster subsidiaries to PMT.
- January 4, 2022, PMT signed an operation and maintenance handover agreement contract with PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP).
- February 1, 2022, Go live operation of PMT in Belawan and Tanjung Intan Branches.
- February 11, 2022, PMT synergized with PT Pertamina (Persero) affiliates who are members of PT PGN Tbk Gas Subholding, and PT Pertamina Gas, namely PT Perta Daya Gas (PDG) and PT Bali Infra Gas in the form of a consortium "Midstream LNG Bali".
- March 1, 2022, Go Live Operation of PMT in Bumiharjo, Bagendang, and Tanjung Wangi Branches.
- March 29, 2022, Groundbreaking of Bali Project LNG Terminal in Benoa.
- April 1, 2022, Go Live Operation of PMT in Jamrud Nilam Mirah, Trisakti, Balikpapan, and Makassar Branches .
- July 1, 2022, PMT received the submission of the Decree on Determination of Liquid Bulk Terminal and Dry Bulk Terminal at Belawan Port.
- November 1, 2022, the Ministry of Transportation determines the terminalization of the Liquid Bulk Terminal at Bagendang Branch.
- November 3, 2022, Ministry of Transportation determines the terminalization of Liquid Bulk Terminal and Dry Bulk Terminal at Dumai Branch .
- December 5, 2022, PMT officially acquired PT Terminal Curah Semarang (TCS).

2025

- 10 Februari 2025 : Go Live Transformasi Standarisasi & Sistemisasi Terminal Kendaraan di IKT International
- 30 April 2025 : Go Live Transformasi Standarisasi & Sistemisasi Terminal Roro dan/atau Penumpang di Branch Tanjung Wangi
- 16 Mei 2025 : Go Live Transformasi Standarisasi & Sistemisasi Terminal LNG Benoa dan Terminal Roro dan/atau Penumpang di Branch Lembar dan Terminal Gilimas
- 1 Juni 2025 : Pengoperasian Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)
- 04 Juli 2025 : Go Live Transformasi Standarisasi & Sistemisasi Terminal Penumpang di Branch Gresik
- 8 September 2025 : Go Live IMS (Integrated Management System) di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.
- 13 Oktober 2025 : PT Pelindo Multi Terminal resmi melaksanakan kegiatan perdana bongkar muat komoditas pasir silika di Pelabuhan Batang, yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah
- 08 November 2025 : Go Live Transformasi Standarisasi & Sistemisasi Terminal Roro dan/atau Penumpang di Branch Pare-pare

- February 10, 2025: Go-Live of the Standardization and Systematization Transformation of the Vehicle Terminal at IKT International
- April 30, 2025: Go-Live of the Standardization and Systematization Transformation of the Ro-Ro and/or Passenger Terminal at the Tanjung Wangi Branch
- May 16, 2025: Go-Live of the Standardization and Systematization Transformation of the Benoa LNG Terminal and the Ro-Ro and/or Passenger Terminals at the Lembar Branch and Gilimas Terminal
- June 1, 2025: Operation of the Trisakti Banjarmasin Port Passenger Terminal by PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)
- July 4, 2025: Go-Live of the Standardization and Systematization Transformation of the Passenger Terminal at the Gresik Branch
- September 8, 2025: Go-Live of the IMS (Integrated Management System) within PT Pelindo Multi Terminal.
- October 13, 2025: PT Pelindo Multi Terminal officially conducts its first loading and unloading operations for silica sand at Batang Port, located in the Batang Integrated Industrial Zone (KITB), Central Java
- November 8, 2025: Go-Live of the Standardization and Systematization Transformation of the Ro-Ro and/or Passenger Terminals at the Pare-pare Branch



2024

- 29 Juni 2024, *Go Live* Transformasi *Branch* Malahayati;
- 1 Juli 2024, STO 4 (empat) terminal, yaitu Sibolga, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, dan Bima;
- 6 Juli 2024, *Go Live* Transformasi Lhokseumawe;
- 30 Agustus 2024, *Go Live* Transformasi *Branch* Lembar;
- 1 Oktober 2024, Pengoperasian Terminal RoRo dan Kendaraan di Pelabuhan Trisakti
- 6 November 2024, *Go Live* Transformasi Sibolga.
- June 29, 2024, Go Live of Malahayati Branch;
- July 1, 2024, STO for 4 (four) terminals: Sibolga, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, and Bima;
- July 6, 2024, Go Live of Lhokseumawe Transformation;
- August 30, 2024, Go Live of Lembar Branch Transformation;
- October 1, 2024: Operation of the Ro-Ro and Vehicle Terminal at Trisakti Port
- November 6, 2024, Go Live of Sibolga Transformation.

2023

- 26 Mei 2023, PMT Operasikan Terminal LNG Benoa;
- 1 Mei 2023, *Go Live* sistem PTOS-M di Terminal Jamrud Nilam Mirah, Surabaya;
- 18 Juli 2023, Kementerian Perhubungan tetapkan terminalisasi Terminal Curah Cair di *Branch* Bumiharjo;
- 1 Agustus 2023, *Go Live* Serah Terima Operasi PMT Branch Gresik, Lembar Badas, Lhokseumawe, Malahayati, Parepare Garongkong, dan Tanjung Emas;
- 29 September 2023, *Go Live* Transformasi Operasional PMT *Branch* Dumai, Bumiharjo, dan Trisakti;
- 2 November 2023, *Go Live* Aplikasi *Audit Management* System (AMS);
- 1 Desember 2023, *Go Live* Transformasi dan Standardisasi Operasi PMT *Branch* Belawan;
- 15 Desember 2023, *Go Live* Standarisasi dan Sistemisasi Operasi PMT *Branch* Gresik;
- 22 Desember 2023, *Go Live* sistem PTOS-M di *Branch* Tanjung Emas.

- May 26, 2023, PMT Operates Benoa LNG Terminal.
- May 1, 2023, Go Live of PTOS-M system at Jamrud Nilam Mirah Terminal, Surabaya.
- July 18, 2023, Ministry of Transportation determined the terminalization of Liquid Bulk Terminal at Bumiharjo Branch.
- August 1, 2023, Go Live Handover Operation of PMT Gresik, Lembar Badas, Lhokseumawe, Malahayati, Parepare Garongkong, and Tanjung Emas Branches.
- September 29, 2023, Go Live Operational Transformation of PMT Dumai, Bumiharjo, and Trisakti Branches.
- November 2, 2023, Go Live of Audit Management System (AMS) Application.
- December 1, 2023, Go Live of Transformation and Standardization of Operations of PMT Belawan Branch
- December 15, 2023, Go Live of Standardization and Systemization of Operations of PMT Gresik Branch
- December 22, 2023, Go Live PTOS-M system at Tanjung Emas Branch.

Logo Perusahaan
Company Logo

PELINDO
MULTI TERMINAL



Penerapan *branding* yang benar merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita Pelindo menjadi Pemimpin ekosistem Maritim Terintegrasi dan berkelas dunia.
The proper implementation of branding constitutes the most important part of the process of achieving Pelindo's aspiration to become a world-class Integrated Maritime Ecosystem Leader.



Mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut – sebagai urat nadi perekonomian nasional – sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.
Inspired by the form of busy, dense, and intersecting routes or pathways, which depict Pelindo as an integrated port and logistics service provider that is always active and plays a major role in sea transportation—as the lifeblood of the national economy—while also supporting the realization of Indonesia's sea toll program.

Mengambil huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.
Inspired by the letter P, which serves as the initial of Pelindo and simultaneously resembles a fish, symbolizing the habitat of marine life that is important to Indonesia as a maritime country. Also symbolizes Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuing to contribute to supporting the sustainability of marine ecosystems within its operational areas. laut di wilayah operasinya.



Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.
The color blue is the color of Indonesia's seas, which are closely associated with Pelindo. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism, and dedication. This color also symbolizes Pelindo's efforts, as part of a State-Owned Enterprise, to consistently provide the best for all stakeholders.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Values



VISI

"Menjadi Pemimpin dalam Konektivitas Barang di Indonesia"
(*"Indonesian Connectivity Champion"*)

Penjelasan Visi
Visi PMT mencerminkan komitmen PMT untuk memperkuat ketahanan konektivitas logistik nasional melalui layanan terminal *multipurpose* yang terintegrasi, andal, dan bernilai tambah. PMT menempatkan diri sebagai katalisator dalam membangun sistem transportasi barang yang efisien, terstandardisasi, dan mendukung daya saing Indonesia di tingkat global.

Vision Explanation
PMT's vision reflects its commitment to strengthening the resilience of national logistics connectivity through integrated, reliable, and value-added multipurpose terminal services. PMT positions itself as a catalyst in building an efficient, standardized freight transportation system that supports Indonesia's competitiveness at the global level.

MISI

"Sebagai Operator Terminal *Multipurpose* dengan Menciptakan Ekosistem yang Memberikan Nilai Tambah bagi Pemangku Kepentingan dan Negara"

"As a Multipurpose Terminal Operator by Creating an Ecosystem that Generates Added Value to the Stakeholders and the Country"



Penjelasan Misi
Misi PMT menjadi dasar pengelolaan dan pengembangan bisnis PMT di seluruh wilayah operasional. PMT berkomitmen untuk membangun ekosistem pelabuhan yang menciptakan manfaat berkelanjutan bagi pelanggan, mitra kerja, masyarakat, dan negara, sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Mission Explanation
PMT's mission is the foundation for its business management and development in all operational areas. PMT is committed to building a port ecosystem that creates sustainable benefits for customers, partners, the community, and the country, in line with the national development agenda.

REVIU VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN

Visi dan Misi Perusahaan senantiasa ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan. Dalam penentuan Visi dan misi, Perusahaan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) berdasarkan arahan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku *Holding* yang tertulis dalam Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor PR.03/27/6/1/PRST/STRG/PLND-24 tanggal 27 Juni 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cluster Non Petikemas tahun 2025-2029.

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Sebagai langkah upaya dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, PMT telah menetapkan arah pengembangannya ke dalam 1 (satu) pilar korporasi dan 3 (tiga) pilar strategis utama, yaitu:

1. Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis yang Fokus dan Efisien, yang bertujuan untuk mewujudkan struktur korporasi dan bisnis yang selaras melalui implementasi rencana pemurnian bisnis Pelindo dan pengawalan terhadap penyusunan peraturan turunan terkait revisi UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

2. *Service, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio*, yang bertujuan untuk mengembangkan portofolio bisnis PMT sebagai *market player* pada industri pelabuhan non-petikemas.
3. *Business Partnership and Synergy*, yang bertujuan untuk mewujudkan pengembangan bisnis melalui kerja sama dan sinergi dengan mitra atau Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cluster Non Petikemas lainnya.
4. *Operational and Comercial Excellence*, yang bertujuan untuk meningkatkan performa operasional dan komersial bisnis serta melakukan standardisasi dalam lingkup bisnis PMT.

Ketiga pilar strategis ini didukung oleh tiga *key enablers*, yaitu HR & *Organizational Development* untuk meningkatakan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam rangka mendorong kinerja bisnis, *Technology and Innovation* untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam *data-driven decision making*, dan *Strategic Financing* untuk memastikan kecukupan pendanaan.

REVIEW OF VISION AND MISSION BY MANAGEMENT

The Company's Vision and Mission are regularly reviewed with the involvement of Board of Directors, Board of Commissioners, and other management members to ensure their relevance to the Company's evolving business environment. In determining its Vision and Mission, the Company refers to the Company's Long-Term Plan (RJPP) based on direction from PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the Holding Company, as outlined in the Letter of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number PR.03/27/6/1/PRST/STRG/PLND-24 dated June 27, 2024, concerning the Preparation and Submission of the Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Non-Container Cluster Long-Term Plan for 2025-2029.

STRATEGY FOR ACHIEVING THE COMPANY'S VISION AND MISSION

As an effort to realize this vision and mission, PMT has established its development direction into 1 (one) corporate pillar and 3 (three) main strategic pillars, namely:

1. Focused and Efficient Corporate and Business Structure Arrangement, which aims to establish a harmonious corporate and business structure through the implementation of Pelindo's business purification plan and oversight of the formulation of implementing regulations related to the revision of Law No. 17/2008 concerning Shipping.
2. Service, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio, which aims to develop PMT business portfolio as a market player in the non-container port industry.

3. Business Partnership and Synergy, which aims to realize business development through cooperation and synergy with partners or other Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Non-Container Cluster.
4. Operational and Commercial Excellence, which aims to improve operational and commercial business performance and carry out standardization within the scope of PMT business.

These three strategic pillars are supported by three key enablers, namely HR & Organizational Development to enhance human resource capacity and capability in order to drive business performance, Technology and Innovation to increase the utilization of technology and information in data-driven decision making, and Strategic Financing to ensure adequate funding.

Rumah Strategi PMT
PMT Strategy House

Visi I Vision
Menjadi Pemimpin dalam Konektivitas Barang di Indonesia
Indonesia's Connectivity Champion

Misi I Mission
Sebagai Operator Terminal *Multipurpose* dengan Menciptakan Ekosistem yang Memberikan Nilai Tambah bagi Pemangku Kepentingan dan Bangsa
As a Multipurpose Terminal Operator, We Aim to Create an Ecosystem That Delivers Added Value to Stakeholders and the Nation

Pilar Korporasi I Corporate Pillars
Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis yang Fokus serta Efisien
Focused and Efficient Corporate and Business Structure

- **Optimalisasi Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan untuk Keberlanjutan Bisnis**
  Optimizing Compliance and Corporate Governance for Business Sustainability
- **Penataan dan Optimalisasi Model Bisnis (Struktur Korporasi)**
  Structuring and Optimizing the Business Model (Corporate Structure)

Services, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio

- **Pengembangan Perencanaan Portofolio Bisnis pada setiap Cabang**
  Development of Business Portfolio Planning at Each Branch
- **Pengembangan Terminal Berbasis Layanan, Komoditas, Kemasan, dan/atau Kawasan Industri**
  Development of Terminals Based on Services, Commodities, Packaging, and/or Industrial Zones
- **Pengembangan Layanan Kepelabuhanan untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah**
  Development of Port Services to Support Government Priority Programs
- **Pengembangan Layanan Pelabuhan untuk Mendukung IKN**
  Development of Port Services to Support the National Capital City (IKN)

Business Partnership & Synergy

- **Perubahan Status menjadi *Dedicated* Terminal atau Terminalisasi**
  Status Change to Dedicated Terminal or Terminalization
- **Pengembangan Layanan Operasi di Luar Area Pelindo Grup**
  Development of Operational Services Outside the Pelindo Group Area
- **Pengembangan Layanan Bongkar Muat *Ship To Ship Handling***
  Development of Ship-to-Ship Handling Services
- **Joint Marketing Layanan Kepelabuhanan**
  Joint Marketing of Port Services

Operational & Commercial Excellence

- **Standardisasi, Sistemisasi, dan Integrasi Operasional Non-Petikemas**
  Standardization, Systematization, and Integration of Non-Container Operations
- **Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan**
  Development of Port Infrastructure and Equipment
- **Optimalisasi Aset**
  Asset Optimization
- **Implementasi ESG dengan Pengembangan *Sustainable Ports***
  ESG Implementation with Development of Sustainable Ports
- **Standardisasi CRM Dan Penerapan KAM *(Key Account Management)***
  Standardization of CRM and Implementation of KAM (Key Account Management)
- **Peningkatan *Corporate Branding* & *Marketing Communication***
  Enhancement of Corporate Branding & Marketing Communication
- **Optimalisasi Skema Komersial dengan Mitra dan Pelanggan**
  Optimization of Commercial Schemes with Partners and Customers

Key Enablers

HR & Organizational Development
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta penyusunan tata kelola SDM yang *agile*
Enhancing human resources capacity and capabilities, and establishing agile HR governance

IT Adoption & Development
Pengembangan data *integration and analytics* serta sistem informasi yang terintegrasi untuk mendorong data *driven decisions*
Developing data integration and analytics, as well as integrated information systems, to drive data-driven decisions

Strategic Financing
Strategi pendanaan yang optimal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis
Optimal and sustainable financing strategies to support business growth

Inisiatif Strategis Baru
New Strategic Initiatives

***Collaborative Strategic Initiatives*, yang membutuhkan kerja sama dengan *Holding* dan/atau Anak Usaha lain.**
Collaborative Strategic Initiatives, which require cooperation with the Holding Company and/or other Subsidiaries

Berdasarkan arah pengembangan tersebut, PMT juga telah menyusun 25 (dua puluh lima) inisiatif strategis sebagai turunan dari ketiga *strategic pillars* dan *key enablers* dengan *timeline* perencanaan dan pelaksanaan masing-masing inisiatif strategis.

Based on this development direction, PMT has also formulated 25 (twenty-five) strategic initiatives derived from the three strategic pillars and key enablers, complete with planning and implementation timelines for each strategic initiative.

Inisiatif Strategis PMT
PMT Strategic Initiatives

Pilar Strategis Strategic Pillars	Inisiatif Strategis	Strategic Initiatives	2025	2026	2027	2028	2029
Strategi Korporasi Corporate Strategy	1. Optimalisasi Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan untuk Keberlanjutan Bisnis	1. Optimizing Compliance and Corporate Governance for Business Sustainability					
	2. Penataan dan Optimalisasi Model Bisnis (Struktur Korporasi)	2. Restructuring and Optimizing the Business Model (Corporate Structure)					
Services, Cargo and Commodity Focused Business Portfolio	3. Pengembangan Perencanaan Portofolio Bisnis pada setiap Cabang	3. Development of Business Portfolio Planning at Each Branch					
	4. Pengembangan Terminal Berbasis Layanan, Komoditas, Kemasan, dan/atau Kawasan Industri	4. Development of Terminals Based on Services, Commodities, Packaging, and/or Industrial Zones					
	5. Pengembangan Layanan Kepelabuhanan untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah	5. Development of Port Services to Support Government Priority Programs					
	6. Pengembangan Layanan Pelabuhan untuk Mendukung IKN	6. Development of Port Services to Support the National Capital City (IKN)					
Business Partnership & Synergy	7. Perubahan Status Menjadi *Dedicated* Terminal atau Terminalisasi	7. Change in Status to a Dedicated Terminal or Terminalization					
	8. Pengembangan Layanan Operasi di Luar Area Pelindo Grup	8. Expansion of Operational Services Outside the Pelindo Group Area					
	9. Pengembangan Layanan Bongkar Muat *Ship to Ship Handling*	9. Expansion of Ship-to-Ship Handling Services					
	10. *Joint Marketing* Layanan Kepelabuhanan	10. Joint Marketing of Port Services					
Operational & Commercial Excellence	11. Standardisasi, Sistemisasi, dan Integrasi Operasional Non-Petikemas	11. Standardization, Systematization, and Integration of Non-Container Operations					
	12. Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan	12. Development of Port Infrastructure and Equipment					
	13. Optimalisasi Aset	13. Asset Optimization					
	14. Implementasi ESG dengan Pengembangan *Sustainable Ports*	14. ESG Implementation with Development of Sustainable Ports					
	15. Standardisasi CRM dan Penerapan KAM (*Key Account Manager*)	15. CRM Standardization and KAM Implementation (Key Account Manager)					
	16. Peningkatan *Corporate Branding* & *Marketing Communication*	16. Enhancement of Corporate Branding & Marketing Communication					
	17. Optimalisasi Skema Komersial Kerja Sama dengan Mitra dan Pelanggan	17. Optimization of Commercial Cooperation Schemes with Partners and Customers					
Enablers	18. Penataan Struktur dan Tata Kelola Organisasi	18. Organizational Structure and Governance					
	19. Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM	19. Enhancing Human Resource Competencies and Capabilities					
	20. Optimalisasi Fungsi *Enterprise Architecture* dan IT *Governance*	20. Optimizing Enterprise Architecture and IT Governance Functions					
	21. Pengembangan Infrastruktur IT dan Implementasi *Security System*	21. IT Infrastructure Development and Security System Implementation					
	22. Pengembangan *Smart Ports* melalui *Master Data Management* dan *Data Analytics*	22. Smart Port Development through Master Data Management and Data Analytics					
	23. Program Budaya Inovasi Berkelanjutan	23. Sustainable Innovation Culture Program					
	24. Pengadaan Terpusat	24. Centralized Procurement					
	25. Optimalisasi Pendanaan dan *Financing Cost*	25. Optimization of Funding and Financing Costs					

Untuk memastikan ketercapaian sasaran sesuai dengan visi dan inisiatif strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2029, PT Pelindo Multi Terminal menyusun *roadmap* perusahaan yang terbagi menjadi tiga fase, yaitu fase pertama (tahun 2025-2026) PT Pelindo Multi Terminal berfokus untuk meningkatkan bisnis internal dan meningkatkan performa layanan, fase kedua (tahun 2027-2028) PT Pelindo Multi Terminal melakukan perluasan ekosistem dan layanan untuk memperkuat posisi sebagai pelaku bisnis non-petikemas nasional, dan fase ketiga (tahun 2029) PT Pelindo Multi Terminal berfokus untuk mempertahankan posisi dalam pengembangan bisnis non-petikemas yang berkelanjutan.

To ensure the achievement of targets in accordance with the vision and strategic initiatives established for 2029, PT Pelindo Multi Terminal has developed a corporate roadmap divided into three phases, namely the first phase (2025–2026), during which PT Pelindo Multi Terminal focuses on enhancing its internal business and improving service performance; the second phase (2027–2028), during which PT Pelindo Multi Terminal expands its ecosystem and services to strengthen its position as a national non-container business player; and the third phase (2029), during which PT Pelindo Multi Terminal focuses on maintaining its position in the development of a sustainable non-container business.

***Roadmap* Perusahaan**
corporate roadmap

2025 - 2026

Enhancing Internal Business and Service Excellence

Pembenahan tata kelola internal untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan NPK di Pelindo Grup
Improving internal governance to expand the scope and enhance the quality of NPK services within the Pelindo Group

- Melakukan penataan struktur korporasi PMT Grup
  Restructuring the PMT Group's corporate structure
- Melakukan pembaruan model dan kesepakatan bisnis NPK agar terciptanya stabilitas bisnis
  Updating NPK's business models and agreements to ensure business stability
- Implementasi strategi perluasan *market share* di *captive market* (*dedicated terminal*)
  Implementing a strategy to expand market share in captive markets (dedicated terminals)
- Standardisasi operasional dan layanan NPK di seluruh wilayah
  Standardizing NPK operations and services across all regions
- Melakukan perbaikan *data integration* guna menunjang performa bisnis
  Improving data integration to support business performance
- Meningkatkan kapabilitas SDM PMT Grup
  Enhancing the capabilities of PMT Group's human resources

Pre-requisites:

Dukungan *stakeholder* dari internal Pelindo Grup (*Holding* dan Anak Usaha Regional):
Stakeholder support from within the Pelindo Group (Holding and Regional Subsidiary):

- **Untuk menghadapi revisi UU Pelayaran**
  To address revisions to the Shipping Law
- **Penguatan layanan PMT**
  Strengthening PMT services
- **Penyelesaian isu-isu korporasi di PMT**
  Resolving corporate issues at PMT

2027 - 2028

Breakthrough Business Expansion & Commercialization

Perluasan ekosistem dan layanan untuk memperkuat posisi PMT sebagai pelaku bisnis non-petikemas nasional
Expanding the ecosystem and services to strengthen PMT position as a national non-container business operator

- Melakukan perbaikan model bisnis dan perbaikan *portfolio profile*
  Improving the business model and portfolio profile
- Pengembangan layanan NPK yang terintegrasi dalam *value chain* ekosistem maritim
  Developing NPK services integrated into the maritime ecosystem value chain
- Optimalisasi skema *bundling* layanan NPK dengan bisnis kepelabuhanan lainnya
  Optimizing NPK service bundling schemes with other port-related businesses
- Ekspansi layanan NPK ke pasar eksternal Pelindo (TUKS/Tersus/KL)
  Expanding NPK services to markets outside Pelindo (TUKS/Tersus/KL)
- Mengimplementasikan strategi optimalisasi biaya operasional
  Implementing a strategy to optimize operating costs

Pre-requisites:

- **Dukungan *stakeholder* dari internal Pelindo Grup untuk pengembangan SDM dan IT dengan kapabilitas yang kompetitif**
  Stakeholder support from within the Pelindo Group for the development of human resources and IT with competitive capabilities
- **Dukungan pendanaan untuk meningkatkan daya saing layanan NPK PMT**
  Funding support to enhance the competitiveness of PMT NPK services

2029

Business Sustainability

Mempertahankan posisi PMT dalam pengembangan bisnis NPK yang berkelanjutan
Maintaining PMT position in the sustainable development of the NPK business

- Mengintegrasikan prinsip *Green Ports* dan ESG dalam operasi NPK untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi, dan tanggung jawab sosial Perusahaan
  Integrating Green Ports and ESG principles into NPK operations to improve sustainability, efficiency, and the Company's social responsibility
- Penguatan layanan NPK yang termasuk dalam *value chain* ekosistem maritim di pasar domestik
  Strengthening NPK services that are part of the maritime ecosystem's value chain in the domestic market

Pre-requisites:

- **Stabilitas pendapatan dan laba PMT**
  Stability of PMT revenue and profit
- **Dukungan stakeholder atas penerapan kebijakan yang mendukung *Green Ports***
  Stakeholder support for the implementation of policies that support Green Ports

BUDAYA PERUSAHAAN

PMT sebagai anak usaha dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang memegang peran strategis dalam pengelolaan terminal multipurpose nasional, telah mengadopsi nilai-nilai utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terangkum dalam akronim AKHLAK, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi identitas budaya perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola, mendorong transformasi berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing organisasi di tengah dinamika industri kepelabuhanan nasional. Dengan adanya pemahaman yang sama di antara manajemen dan pegawai, diharapkan akan membentuk budaya kerja Perusahaan yang kondusif dan inovatif serta dapat mendongkrak kinerja Perusahaan.

CORPORATE CULTURE

PMT, as a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that plays a strategic role in the management of national multipurpose terminals, has adopted the core values of State-Owned Enterprises (SOEs) encapsulated in the acronym AKHLAK, namely Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. These values not only serve as the Company's cultural identity, but also function as strategic instruments to strengthen governance, drive sustainable transformation, and enhance organizational competitiveness amid the dynamics of the national port industry. With a shared understanding among management and employees, these values are expected to foster a conducive and innovative corporate work culture and improve the Company's performance.

AKHLAK

Amanah Trust	Kompeten Competent	Harmonis Harmonious	Loyal	Adaptif Adaptive	Kolaboratif Collaborative
Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan Uphold the Trust Given	**Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas** Continuously Learn and Develop Capabilities	**Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan** Care for Each Other, Respect Differences	**Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara** Dedicated and Prioritize the Interests of the Nation	**Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan** Continuously Innovate in Driving or Facing Changes	**Membangun Kerja Sama yang Sinergis** Build Synergistic Cooperation

"Panduan Perilaku "AKHLAK

Code of Conduct "AKHLAK"

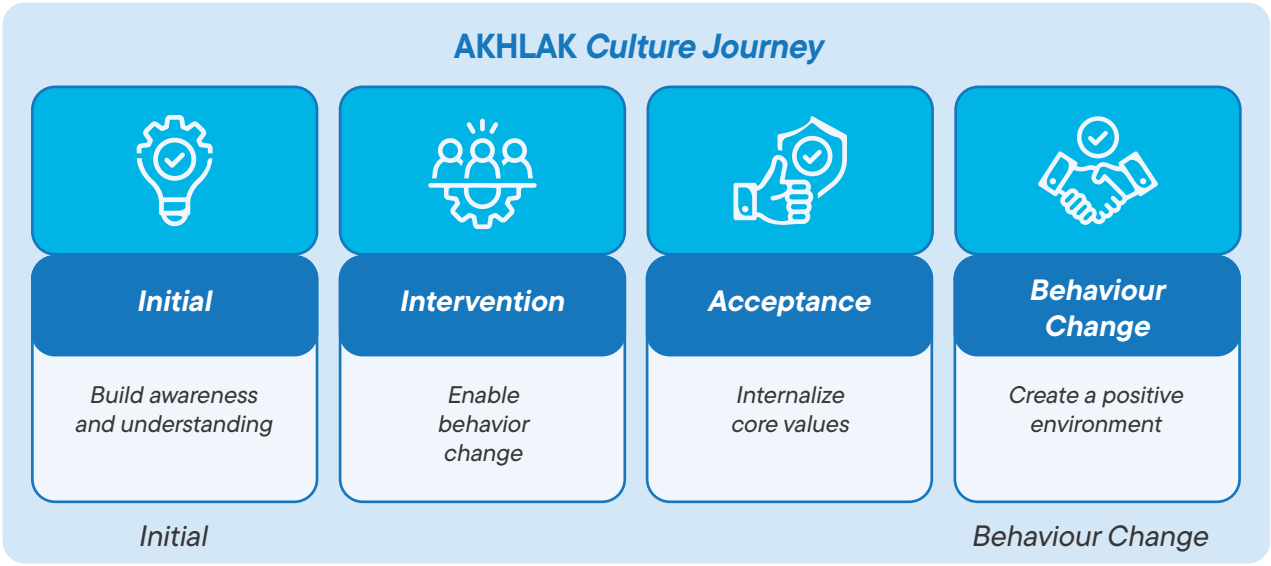
Nilai Inti Core Values	Panduan Perilaku	Code of Conduct
Amanah Trust	1. Menepati janji dan komitmen yang telah disampaikan; 2. Bertanggung jawab atas setiap tugas, keputusan, dan tindakan yang diambil; 3. Menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas.	1. Keeping promises and commitments that have been conveyed; 2. Responsible for every task, decision, and action taken; 3. Uphold moral and ethical values in every activity.
Kompeten Competent	1. Aktif meningkatkan kompetensi untuk menghadapi tantangan yang terus berubah; 2. Mendukung dan membantu proses pembelajaran bagi rekan kerja; 3. Menyelesaikan tugas secara profesional dengan kualitas terbaik.	1. Actively improving competency to face ever-changing challenges; 2. 2. Supporting and assisting the learning process for co-workers; 3. 3. Completing tasks professionally with the best quality.
Harmonis Harmonius	1. Menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakangnya; 2. Senantiasa bersikap peduli dan membantu sesama; 3. Membangun hubungan kerja yang sehat dan lingkungan yang kondusif.	1. Respecting every individual regardless of their background; 2. Always caring and helping others; 3. Building healthy working relationships and a conducive environment.
Loyal	1. Menjaga nama baik rekan kerja, pimpinan, perusahaan, dan negara; 2. Siap berkontribusi dan berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; 3. Patuh pada arahan pimpinan selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika.	1. Maintaining the good name of co-workers, leaders, company, and the country; 2. Ready to contribute and make sacrifices to achieve greater goals; 3. Complying with the leadership's direction as long as it does not conflict with the law and ethics.
Adaptif Adaptive	1. Cepat beradaptasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik; 2. Secara aktif melakukan perbaikan yang sejalan dengan perkembangan teknologi; 3. Bersikap proaktif dalam menyikapi perubahan dan tantangan.	1. Quickly adapt to become a better person; 2. Actively make improvements in line with technological developments; 3. Be proactive in responding to changes and challenges.
Kolaboratif Collaborative	1. Memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak untuk berkontribusi; 2. Terbuka terhadap kerja sama untuk menciptakan nilai tambah; 3. Mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk kepentingan bersama.	1. Provide participation space for all parties to contribute; 2. Be open to cooperation to create added value; 3. Encourage optimal utilization of resources for the common good.

Tahapan Implementasi Nilai-nilai Utama

Untuk memastikan nilai-nilai AKHLAK terimplementasi secara menyeluruh di seluruh lini organisasi, PMT mengadopsi pendekatan "AKHLAK *Culture Journey*" yang terdiri dari empat tahap utama: *Initial, Intervention, Acceptance*, dan *Behaviour Change*. Tahapan ini dijalankan secara berkelanjutan, terukur, dan disesuaikan dengan dinamika organisasi.

Stages of Core Values Implementation

To ensure that AKHLAK values are implemented comprehensively across all lines of the organization, PMT adopts the "AKHLAK Culture Journey" approach which consists of four main stages: Initial, Intervention, Acceptance, and Behavior Change. These stages are carried out sustainably, measurably, and adjusted to the dynamics of the organization.



1. Tahap Awal (*Initial*)
   Tahap ini berfokus pada pembangunan kesadaran dan pemahaman awal insan PMT terhadap makna dan pentingnya nilai-nilai AKHLAK. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
   a. Komunikasi pimpinan, di mana para manajer dan direksi menjadi *role model* melalui perilaku dan komunikasi yang mencerminkan nilai AKHLAK.
   b. Pembentukan Agen Perubahan (*Agent of Change*) di setiap unit kerja, yang bertugas mempercepat internalisasi nilai di berbagai tingkatan organisasi.
   c. Kegiatan pengenalan budaya, seperti pelatihan daring/luring dan sosialisasi nilai AKHLAK secara masif.

   Evaluasi tahap ini dilakukan melalui survei kepada SDM PMT Grup.

2. Tahap Intervensi (*Intervention*)
   Pada tahap ini, PMT berupaya mewujudkan perubahan perilaku yang terstruktur melalui tiga pendekatan utama:
   a. *Leadership*: Komitmen aktif dari seluruh pimpinan dan Agen Perubahan dalam menghidupkan nilai-nilai budaya.
   b. *System*: Penyelarasan nilai AKHLAK dengan sistem manajemen perusahaan, termasuk sistem penilaian kinerja, pengembangan SDM, dan *reward system*.
   c. *Symbol*: Penguatan visual dan lingkungan kerja yang mencerminkan identitas budaya, seperti tata letak kantor, citra perusahaan, dan kebiasaan kolektif.

   Keberhasilan tahap ini diukur melalui evaluasi program dan tingkat aktivasi budaya di setiap unit.

1. Initial Stage
   This stage focuses on building awareness and initial understanding among PMT personnel regarding the meaning and importance of AKHLAK values. Activities include:
   a. Leadership communication, where managers and directors act as role models through behavior and communication that reflect AKHLAK values.
   b. Formation of Agent of Change in each work unit, tasked with accelerating value internalization at various organizational levels.
   c. Cultural introduction activities, such as online/offline training and massive dissemination of AKHLAK values.

   This stage is evaluated through surveys to PMT Group personnel.

2. Intervention Stage
   In this stage, PMT strives to realize structured behavioral change through three main approaches:
   a. Leadership: Active commitment from all leaders and Agents of Change in promoting cultural values.
   b. System: Alignment of AKHLAK values with the Company's management systems, including performance appraisal, HC development, and reward systems.
   c. Symbol: Reinforcement of visuals and work environments that reflect cultural identity, such as office layouts, corporate image, and collective habits.

   The success of this stage is measured through program evaluations and the level of cultural activation in each unit.

3. Tahap Penerimaan (*Acceptance*)
   Tahap ini menandai bahwa SDM PMT mulai menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai AKHLAK dalam keseharian. Indikator keberhasilannya meliputi:
   a. *Knowing*: Pemahaman terhadap nilai-nilai inti.
   b. *Receiving*: Penerimaan dan pengakuan atas pentingnya nilai AKHLAK.
   c. *Influencing*: Kemampuan untuk menjadi panutan dan memengaruhi rekan kerja untuk mengimplementasikan nilai tersebut.

   Metode pengukuran dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terarah (FGD), atau wawancara internal.

4. Tahap Perubahan Perilaku (*Behaviour Change*)
   Tahap akhir dari *Culture Journey* ditandai dengan terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif, di mana seluruh insan PMT secara sadar menerapkan nilai AKHLAK dalam setiap aspek kerja. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas dan budaya organisasi yang mendorong kinerja unggul dan perilaku positif berkelanjutan. Evaluasi dilakukan melalui *multi-rater survey* dan observasi langsung terhadap perilaku organisasi.

   Dengan penerapan AKHLAK *Culture Journey* secara konsisten, PMT berupaya menciptakan budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mencerminkan nilai luhur, etika, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepelabuhanan yang andal dan berkelas dunia.

Hasil dan Dampak

1. Hasil dan Dampak merupakan gambaran implementasi Nilai-Nilai Utama SDM PT Pelindo Multi Terminal yang mendorong perubahan budaya organisasi PMT Grup secara keseluruhan dan tecermin dalam peningkatan kinerja PMT Grup.
2. Hasil dari penerapan Nilai-Nilai Utama SDM PT Pelindo Multi Terminal yang diharapkan adalah perubahan perilaku yang didapatkan dari Tahapan Awal (*Initial*). Intervensi (*intervention*), dan Penerimaan (*Acceptance*), yang mendorong terciptanya lingkungan kerja kondusif untuk berkinerja tinggi dan selalu berperilaku positif.
3. Dampak dari penerapan Nilai-Nilai Utama SDM PT Pelindo Multi Terminal yang diharapkan adalah perubahan budaya organisasi yang tercermin pada peningkatan kinerja PMT Grup.
4. PMT wajib melakukan pengukuran hasil dan dampak implementasi Nilai-Nilai Utama SDM PT Pelindo Multi Terminal terhadap budaya dan kinerja perusahaan dengan menggunakan penilaian kinerja/observasi dan/atau wawancara.

3. Acceptance Stage
   This stage marks the point where PMT personnel begin to internalize and practice AKHLAK values in daily activities. Success indicators include:
   a. Knowing: Understanding the core values.
   b. Receiving: Acceptance and acknowledgment of the importance of AKHLAK values.
   c. Influencing: The ability to be a role model and influence coworkers to implement these values.

   The measurement methods include surveys, focus group discussions (FGDs), or internal interviews.

4. Behavior Change Stage
   The final stage of the Culture Journey is characterized by a conducive work environment, where all PMT personnel consciously apply AKHLAK values in every aspect of their work. These values become part of the organization's identity and culture, encouraging high performance and sustainable positive behavior. Evaluation is carried out through multi-rater surveys and direct observation of organizational behavior.

   By consistently implementing the AKHLAK Culture Journey, PMT aims to create a work culture that is not only results-oriented but also reflects noble values, ethics, and professionalism in delivering world-class port services.

Results And Impact

1. Results and impact illustrate the implementation of the Core Values of PT Pelindo Multi Terminal's human capital, which drive organizational cultural change across the entire PMT Group and are reflected in improved performance.
2. Expected results from implementing the Core Values include behavioral change obtained through the Initial, Intervention, and Acceptance stages, fostering a conducive, high-performance, and consistently positive work environment.
3. Expected impact includes organizational cultural change reflected in improved PMT Group performance.
4. PMT is required to measure the results and impact of implementing these Core Values on corporate culture and performance using performance assessments, observations, and/or interviews.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA NILAI PERUSAHAAN

PMT secara aktif menjalankan program internalisasi budaya di seluruh tingkatan organisasi. Tujuan utama dari kegiatan internalisasi ini adalah untuk membentuk budaya kerja yang selaras dengan tata nilai AKHLAK serta mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan.

Internalisasi budaya juga dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan persepsi, sikap, dan tindakan di antara seluruh insan PMT, sehingga setiap individu memiliki arah yang sama dalam bekerja, berkontribusi, dan melayani pemangku kepentingan dengan baik. Dengan internalisasi yang kuat, diharapkan nilai-nilai AKHLAK tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan secara konsisten dalam setiap proses kerja, pengambilan keputusan, serta hubungan kerja lintas unit dan lintas fungsi.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan berbagai program penguatan budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai AKHLAK dan transformasi budaya Pelindo Grup. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kesejahteraan karyawan, meningkatkan kolaborasi lintas unit, serta membangun budaya organisasi yang adaptif dan berkelanjutan. Beberapa program yang dijalankan sepanjang 2025, di antaranya:

1. BREATH (*Balancing Resilience, Energy, and Health*) Session
   Merupakan kegiatan internalisasi budaya, khususnya pada nilai Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka implementasi *employee well-being* dan sebagai upaya dalam mewujudkan dan menjaga kesehatan yang optimal bagi pekerja PMT. Kesehatan dalam hal ini meliputi keadaan fisik,mental, finansial, dan sosial dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan
2. *Community of Practice* (CoP)
   Community of Practice (CoP) merupakan komunitas pekerja dari lintas unit yang berbeda, bergabung dalam suatu forum atau grup yang memiliki minat yang sama untuk berbagi pengetahuan, mengatasi persoalan yang spesifik, menciptakan inovasi, atau untuk meningkatkan keterampilan pekerja terkait pekerjaan. Program ini berkaitan dengan nilai Kompeten dan Kolaboratif.
3. HC (*Human Capital) Insight*
   Kegiatan yang menjadi wadah diskusi dan *knowledge sharing* mengenai *human capital*, baik dari segi praktik maupun teori. Ilmu yang diperoleh dari *Human Capital Forum* juga dibahas dalam kegiatan ini. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai Amanah dan Harmonis.
4. *Change Agent Engagement*
   Membangun keharmonisan dan ruang kolaborasi bagi para *Change Catalyst Team* (CCT) serta membuat mereka tetap aktif dan bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Dengan ini, adopsi perubahan dalam perusahaan diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Program ini berkaitan dengan nilai Harmonis dan Kolaboratif.

CULTURE INTERNALIZATION ACTIVITIES WITHIN THE COMPANY

PMT actively organizes cultural internalization programs across all organizational levels. The main goal is to shape a work culture aligned with AKHLAK values and to sustainably support the company's vision and mission.

The cultural internalization also aims to create shared understanding, attitudes, and actions among all PMT personnel so that everyone moves in the same direction when working, contributing, and serving stakeholders properly. With strong internalization, AKHLAK values are expected to not only be understood conceptually but consistently manifested in work processes, decision-making, and cross-unit collaboration.

Throughout 2025, the Company has carried out a variety of work culture strengthening programs aligned with the AKHLAK values and Pelindo Group's cultural transformation. These activities were designed to strengthen employee well-being, enhance cross-unit collaboration, and build an adaptive and sustainable organizational culture. Some of the programs carried out throughout 2025 include:

1. BREATH (Balancing Resilience, Energy, and Health) Session
   A cultural internalization activity, specifically focusing on the values of Harmony, Loyalty, Adaptability, and Collaboration. This activity is also carried out to implement employee well-being and as an effort to achieve and maintain optimal health for PMT workers. Health in this context encompasses physical, mental, financial, and social well-being in facing the challenges and demands of change.
2. Community of Practice (CoP)
   A Community of Practice (CoP) is a community of workers from different units who join together in a forum or group with similar interests to share knowledge, address specific issues, create innovations, or improve work-related skills. This program is related to the values of Competent and Collaborative.
3. HC (Human Capital) Insight
   This activity provides a forum for discussion and knowledge sharing regarding human capital, both in practice and theory. Knowledge gained from the Human Capital Forum is also discussed in this activity. This activity relates to the values of Trustworthy and Harmonious.
4. Change Agent Engagement (CCT)
   This program builds harmony and collaboration for the Change Catalyst Team (CCT) and keeps them active and enthusiastic in carrying out their assigned tasks. This is expected to smoother the adoption of change within the company. This program is related to the values of Harmony and Collaboration.

5. BOD *Talk*
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepemimpinan dengan edukasi, akses ke ahli, dan wawasan tentang komunikasi efektif. Peserta belajar berkembang dari individu biasa menjadi pemimpin berpengaruh, serta memahami adaptasi, keterlibatan, dan dampak positif dalam tim dan organisasi.
6. Donor Darah
   Donor Darah dilaksanakan dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional 2025 donor darah untuk kemanusiaan.
7. *Development Dialogue*
   Memberikan wawasan dan inspirasi terkait pengembangan diri dan profesionalisme bagi karyawan Pelindo Grup. Peserta dapat berdiskusi langsung dengan *coach* untuk mendapatkan perspektif baru dalam pengembangan karier dan keterampilan.
8. Sosialisasi *Effective Meeting*
   Sosialisasi *Effective Meeting* bertujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi rapat di lingkungan kerja. Kegiatan ini membahas cakupan rapat, persiapan, agenda, serta peran peserta untuk memastikan akuntabilitas.
9. *Break The Silo* (BTS)
   Sebuah program internal perusahaan yang bertujuan untuk memecah sekat atau jarak komunikasi antar level jabatan di lingkungan kerja. Program ini dirancang untuk menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif, terbuka, dan kolaboratif antara pekerja tingkat atas (manajemen, supervisor, pimpinan) dan pekerja tingkat bawah (staf, operator, *frontliner*).
10. *Workshop* KMAP *Branch* PMT & *Workshop* KMAP Kantor Pusat PMT
    Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menambah langkah penting untuk menuju pengelolahan pengetahuan yang lebih rapi, efesien, dan berdampak nyata bagi kinerja bersama.
11. *Senior Leader Forum*
    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan deteksi risiko dalam pengambilan keputusan strategis, dengan mengupas tuntas indikator risiko sebagai alat deteksi dini tingkat kemungkinan terjadinya risiko, guna menentukan keputusan yang tepat.
12. *Workshop Innovation Experience*
    Kegiatan yang menjadi wadah yang diikuti oleh para profesional dan inovator korporat, dengan materi mencakup pelatihan inovasi, *coaching*, serta kunjungan ke ITDRI *Innovation Center*. *Workshop* menghadirkan narasumber dari Metranet dan SCALA, serta menghasilkan *output* berupa sertifikat digital dan rencana aksi inovasi
13. Program *Leader* Muda *Multipurpose* (PPLMM)
    Workshop Pengembangan *Leader* Muda *Multipurpose* (PPLMM) bertujuan membekali generasi pemimpin baru dengan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan strategi bisnis. Melalui presentasi, diskusi, studi kasus, serta simulasi proyek, peserta diharapkan mampu mengembangkan profil kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

5. BOD Talk
   This program aims to increase leadership awareness through education, access to experts, and insights into effective communication. Participants learn to develop from ordinary individuals into influential leaders, as well as understand adaptation, engagement, and positive impact within teams and organizations.
6. Blood Donation
   The blood donation was held to commemorate National Occupational Health and Safety Month 2025, a blood donation for humanity.
7. Development Dialogue
   This program provides insight and inspiration regarding self-development and professionalism for Pelindo Group employees. Participants can discuss directly with coaches to gain new perspectives on career and skills development.
8. Effective Meeting Socialization
   The Effective Meeting Socialization aims to improve the quality and efficiency of meetings in the workplace. This activity discusses meeting scope, preparation, agenda, and the role of participants in ensuring accountability.
9. Break the Silos (BTS)
   An internal company program that aims to break down barriers or communication gaps between job levels in the workplace. This program is designed to create a more inclusive, open, and collaborative work environment between upper-level employees (management, supervisors, leaders) and lower-level employees (staff, operators, frontliners).
10. PMT Branch KMAP Workshop & PMT Head Office KMAP Workshop
    This activity is held to add important steps towards more organized, efficient knowledge management that has a real impact on collective performance.
11. Senior Leader Forum
    This activity aims to improve risk detection capabilities in strategic decision-making by thoroughly examining risk indicators as a tool for early detection of the likelihood of risk occurrence, allowing for informed decisions.
12. Innovation Experience Workshop
    This activity provides a platform for professionals and corporate innovators, offering training on innovation, coaching, and a visit to the ITDRI Innovation Center. The workshop features speakers from Metranet and SCALA, and produces a digital certificate and innovation action plan.
13. Multipurpose Young Leader Program (PPLMM)
    The Multipurpose Young Leader Development Workshop (PPLMM) aims to equip the next generation of leaders with leadership, management, and business strategy skills. Through presentations, discussions, case studies, and project simulations, participants are expected to develop adaptive, collaborative, and results-oriented leadership profiles.

14. *Community of Interest* (COI)
    Bertujuan dalam memberikan inspirasi dan wawasan kepada peserta mengenai praktik nyata dalam mengelola bisnis pasca-pensiun. Melalui sesi berbagi pengalaman bersama narasumber berkompeten, kegiatan ini mengulas perjalanan bisnis yang telah dijalankan sebelumnya sebagai pembelajaran berharga. Diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman tentang strategi, tantangan, serta peluang usaha yang dapat diterapkan untuk membangun masa pensiun yang produktif, sejahtera, dan berkelanjutan.
15. *Felt Leadership*
    Felt Leadership melalui *Skip Level Meeting* bertujuan memperkuat kedekatan dan kepekaan pemimpin terhadap realitas kerja tim di lapangan. Melalui pertemuan langsung dengan karyawan yang berada satu level di bawah atasan langsung, pendekatan ini membantu pemimpin memahami kebutuhan, tantangan, dan aspirasi pegawai secara lebih autentik. *Skip Level Meeting* juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa dihargai, meningkatkan *engagement*, serta memastikan pesan kepemimpinan tersampaikan secara jelas dan bermakna.
16. Survei Keterikatan Kerja, Kepuasan Pekerja dan Budaya Tahun 2025
    Survei Keterikatan Kerja, Kepuasan Pekerja, dan Budaya Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat pemahaman organisasi terhadap pengalaman kerja karyawan secara menyeluruh. Melalui pengukuran langsung terhadap aspek keterikatan, kepuasan, serta persepsi terhadap budaya perusahaan, survei ini membantu organisasi memperoleh gambaran yang lebih autentik mengenai kebutuhan, tantangan, dan aspirasi pegawai. Survei ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa dihargai, meningkatkan kualitas hubungan kerja, serta memastikan nilai dan arah organisasi tersampaikan dan dirasakan secara jelas, konsisten, dan bermakna oleh seluruh karyawan.

14. Community of Interest (COI)
    This activity aims to provide participants with inspiration and insight into the real-world practices of managing a post-retirement business. Through experience-sharing sessions with competent speakers, this activity reviews previous business journeys as valuable learning experiences. Participants are expected to gain an understanding of strategies, challenges, and business opportunities that can be implemented to build a productive, prosperous, and sustainable retirement.

15. Felt Leadership
    Felt Leadership through Skip-Level Meeting is to strengthen leaders' engagement and sensitivity to the realities of teamwork on the ground. Through direct meetings with employees one level below their direct supervisor, this approach helps leaders understand their employees' needs, challenges, and aspirations more authentically. The Skip-Level Meeting also serves as a means to foster a sense of appreciation, increase engagement, and ensure leadership messages are conveyed clearly and meaningfully.
16. 2025 Job Engagement, Employee Satisfaction, and Culture Survey
    The 2025 Job Engagement, Employee Satisfaction, and Culture Survey aims to strengthen the organization's understanding of the employee's overall work experience. By directly measuring aspects of engagement, satisfaction, and perceptions of company culture, this survey helps organizations gain a more authentic picture of employee needs, challenges, and aspirations. The survey also serves as a means to foster a sense of appreciation, improve the quality of work relationships, and ensure the organization's values and direction are communicated and perceived clearly, consistently, and meaningfully by all employees.

Kegiatan Usaha
Business Activities



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar terakhir Perusahaan yang tercantum pada Akta No. 14 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perusahaan ialah melakukan usaha pelayanan jasa Terminal Non Petikemas, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas, yang terbagi atas:

1. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun;
2. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan;
3. Konstruksi Bangunan Sipil;
4. Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa.

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with article 3 of the Company's latest Articles of Association as stated in Deed No. 14 dated October 12, 2022 drawn up before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the purposes and objectives of the Company are to carry out the Non-Container Terminal service business, as well as optimizing the utilization of resources owned to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to gain/pursue profit in order to increase corporate value by applying the principles of limited liability company, which are divided into:

1. Financial Services Activities, Other than Insurance and Pension Funds;
2. Warehousing and Transportation Support Activities;
3. Civil Building Construction;
4. Land Transportation and Transportation Via Pipelines.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

In order to achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may conduct the following main business activities:

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities based on Articles of Association	Sudah/Belum Dijalankan Has Been/Has Not Been Conducted	Bentuk Kegiatan yang Dijalankan Form of Activities
A.	**Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) I** Holding Company's Activities		
	Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies),* yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. This group includes the activities of holding company, namely company that controls the assets of a group of subsidiaries and whose main activity is ownership of the group. "Holding company" is not involved in the business activities of its subsidiary. The activities include services provided by counsellors and negotiators in designing corporate mergers and acquisitions.	√	PMT memiki 3 (tiga) anak perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk dan PT Terminal Curah Utama yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan PMT PMT has 3 (three) subsidiaries, namely PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Indonesia Vehicle Terminal, Tbk and PT Terminal Curah Utama whose financial statements are consolidated with PMT
B.	**Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI 52240) I** Cargo Handling (Loading and Unloading of Goods)		
	Kelompok ini mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. This group includes the business of handling loading and unloading of cargo from land transportation, road transportation, water transportation and transportation on a fee or contract basis. The activities include loading and unloading cargo regardless of the type of transportation used, cargo terminal activities and their supporting facilities, loading and unloading activities for ships, and loading and unloading of vehicles using freight trains.	√	PMT melaksanakan pelayananan bongkar muat barang non petikemas PMT carries out loading and unloading services for non-container goods
C.	**Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut (KBLI 52221) I** Sea Port Service Activities		
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau petikemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. This group includes sea port service business activities related to water transportation for passengers, animals or goods, namely the operation of terminal facilities such as ports and wharves, navigation, inspection of cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances and ionizing radiation generators), shipping and berthing activities, mooring services, pilotage and tug services.	√	PMT melaksanakan pelayanan kepelabuhanan laut yang meliputi pelayanan petikemas, pelayanan barang non petikemas, pelayanan konsolidasi dan distribusi barang, pengusahaan alat, pengusahaan properti, pelayananan rupa-rupa usaha, pelayananan *forwarding* dan pelayananan di TUKS PMT carries out sea port services which include container services, non-container goods services, goods consolidation and distribution services, equipment operations, property operations, miscellaneous services, forwarding services and services at TUKS
D.	**Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (KBLI 52222) I** River and Lake Port Service Activities		
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaran pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (jasa radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa–penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. This group includes river and lake port business activities. Including activities related to water transportation for passengers, animals or goods, namely the operation of terminal facilities such as ports and wharves, navigation, inspection of cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive services and ionizing radiation generators), shipping and berthing activities, mooring services, pilotage and tug services.	√	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lainlain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan. This group includes business activities related to the operation of river and lake ports. It also includes activities associated with water transportation for passengers/ livestock, or goods, such as the operation of terminal facilities including ports and wharves, waterway lock operations, navigation, shipping and berthing activities, mooring services, and pilotage services.

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities based on Articles of Association	Sudah/Belum Dijalankan Has Been/Has Not Been Conducted	Bentuk Kegiatan yang Dijalankan Form of Activities
E.	**Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101) I** Warehousing and Storage		
	Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial. This group includes businesses of temporary storing goods before the goods are sent to their final destination, for commercial purposes.	x	Belum dilakukan Has not been conducted
F.	**Aktivitas *Cold Storage* (KBLI 52102) I** Cold Storage Activity		
	Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*). This group includes the business of storing goods that require cooling within a certain preservation period on a fee or contract basis, before the goods are sent to their final destination. Also included in this group is blast freezing warehouses.	x	Belum dilakukan Has not been conducted
G.	**Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915) I** Oil and Gas Civil Building Construction		
	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/ atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas This group includes the construction, maintenance and/or rebuilding of civil buildings in upstream and downstream oil and gas business activities.	x	Belum dilakukan Has not been conducted
H.	**Angkutan Melalui Saluran Pipa (KBLI 49300) I** Transportation Through Pipelines		
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuat (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa. This group includes the business of transporting oil and natural gas (petroleum, fuel oil, refined products and natural gas), liquids, water, sludge and other commodities from the place of manufacture (producer) to the place of user (consumer) through pipelines on a remuneration (fee) or contract basis. Including the operation of pumping station.	√	PMT melaksanakan kegiatan pengangkutan LNG di Pelabuhan Benoa Bali bekerja sama dengan Konsorsium Midstream LNG Bali PMT carries out LNG transportation activities at Bali Benoa Port in collaboration with Bali Midstream LNG Consortium
I.	**Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi (KBLI 52104)**		
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan-pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/ atau permukaan air untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas. This group includes storage business activities covering receiving, collecting, storing and releasing petroleum, fuel oil, gas fuel, and/or processed products at locations above and/or below the ground surface and/or water table for commercial purposes, including storage in free trade zones.	√	PMT melaksanakan kegiatan penyimpanan LNG di Pelabuhan Benoa Bali dengan bekerja sama dengan Konsorsium Midstream LNG Bali PMT carries out LNG transportation activities at Bali Benoa Port in collaboration with Bali Midstream LNG Consortium

Keterangan : X = belum dijalankan v = sudah dijalankan
Information: X = has not been conducted v = has been conducted

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN SAAT INI

Sebagai Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cluster Non Petikemas, PMT memiliki mandat untuk mengintegrasikan dan mengelola layanan terminal *multipurpose* secara nasional. Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, PMT menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kepelabuhanan, dengan fokus utama pada pengelolaan terminal *multipurpose* nonpetikemas di seluruh Indonesia yang mencakup bongkar muat barang curah cair, curah kering, kargo umum, kendaraan, dan layanan pendukung logistik lainnya.

CURRENT BUSINESS ACTIVITIES

As a Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Non-Container Cluster, PMT has a mandate to integrate and manage multipurpose terminal services nationally. Referring to the Company's Articles of Association, PMT carries out business activities in the field of port services, with a primary focus on managing non-container multipurpose terminals throughout Indonesia which include loading and unloading of liquid bulk goods, dry bulk, general cargo, vehicles, and other logistics support services.

Kegiatan operasional PMT terdiri atas dua pilar utama, yaitu cabang operasional (*branch*) dan entitas anak perusahaan. Hingga akhir tahun 2025, PMT mengelola 20 cabang. Cabang-cabang ini secara langsung dikelola oleh PMT dengan menangani beragam layanan, seperti *stevedoring, cargodoring, stripping/stuffing*, penumpukan, bongkar muat *Ro-Ro, ship-toship transfer*, dan layanan terminal terapung.

Selain itu, PMT memiliki tiga entitas anak yang menjalankan kegiatan usaha secara lebih spesifik, yaitu:
1. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), yang berfokus pada layanan *general cargo*, curah kering, dan terminal *Ro-Ro*. PTP mengelola 11 Cabang, yaitu Tanjung Priok, Banten, Cirebon, Pangkal Baram, Tanjung Pandan, Palembang, Teluk Bayur, Panjang, Bengkulu, Jambi, dan Pontianak;
2. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), sebagai pengelola terminal kendaraan berstandar internasional. IPCC melakukan kegiatan usaha di 1 cabang dan 5 satelit, yaitu Jakarta, Belawan, Pontianak, Balikpapan, Makasar, dan Banjarmasin; dan
3. PT Terminal Curah Utama (TCU), yang mengelola layanan curah cair dan gas secara khusus.

Secara total, PMT Grup mengelola 32 Cabang terminal *multipurpose* dan 5 Satelit yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui struktur usaha ini, PMT memastikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan terminal dengan karakteristik yang beragam, sekaligus memperkuat daya saing layanan kepelabuhanan nasional.

PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN

PMT menghadirkan rangkaian layanan kepelabuhanan yang komprehensif dan bernilai tambah tinggi. Seluruh jasa yang ditawarkan dirancang untuk menjawab kebutuhan berbagai jenis muatan, mulai dari kargo umum, curah, peti kemas, hingga kendaraan, dengan standar operasional yang efisien, aman, dan berbasis teknologi.

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, meliputi:
1. Jasa Kepelabuhanan umum di Terminal Serbaguna (*Multipurpose Terminal*) terdiri atas:
   a. Kegiatan jasa dermaga
   b. *Stevedoring*
   c. *Cargodoring*
   d. Penumpukan
   e. *Monitoring /supervise*
   f. *Stripping/stuffing*
   g. *Receiving/delivery*
   h. *Cleaning/trimming/sweeping*
   i. Jasa pelayanan tambahan (administrasi nota, inter terminal transfer, *stack* awal, administrasi sistem IT, *haulage*, penanganan limbah kapal dan alat bantu mekanis maupun non mekanis);

2. Jasa peti kemas di Terminal Peti kemas terdiri atas:
   a. Kegiatan operasi kapal (jasa dermaga, *stevedoring, haulage, shifting*, buka/tutup palka)
   b. Kegiatan operasi lapangan (penumpukan, *lift on/lift off*, gerakan ekstra, relokasi angsur)

PMT's operational activities consist of two main pillars, namely operational branches and subsidiaries. Until the end of 2025, PMT managed 20 branches. These branches are directly managed by PMT by handling various services, such as stevedoring, cargodoring, stripping/stuffing, stacking, Ro-Ro loading and unloading, ship-to-ship transfer, and floating terminal services.

In addition, PMT has three subsidiaries that carry out more specific business activities:
1. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), which focuses on general cargo, dry bulk, and Ro-Ro terminal services. PTP manages 11 branches, namely Tanjung Priok, Banten, Cirebon, Pangkal Baram, Tanjung Pandan, Palembang, Teluk Bayur, Panjang, Bengkulu, Jambi, and Pontianak;
2. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), as a manager of international standard vehicle terminals. IPCC carries out business activities in 1 branch and 5 satellite locations, namely Jakarta, Belawan, Pontianak, Balikpapan, Makassar, and Banjarmasin; and
3. PT Terminal Curah Utama (TCU), which specifically manages liquid bulk and gas services.

In total, PMT Group manages 32 multipurpose terminal branches and 5 Satellites spread throughout Indonesia. Through this business structure, PMT ensures flexibility and efficiency in managing terminals with diverse characteristics, while strengthening the competitiveness of national port services.

PRODUCTS AND SERVICES

PMT offers a comprehensive range of port services with high added value. All services are designed to meet the needs of various types of cargo, from general cargo, bulk, containers, to vehicles, with efficient, safe, and technology-based operational standards.

Port Services, including:
1. Public port services at Multipurpose Terminal consist of:
   a. Wharf service activities
   b. Stevedoring
   c. Cargodoring
   d. Stacking
   e. Monitoring/supervise
   f. Stripping/stuffing
   g. Receiving/delivery
   h. Cleaning/trimming/sweeping
   i. Additional services (administration of notes, inter terminal transfer, initial stack, administration of IT systems, haulage, handling of ship waste and mechanical and non-mechanical aids);

2. Container services at Container Terminal, consist of:
   a. Ship operation activities (wharf services, stevedoring, haulage, shifting, open/close hatches)
   b. Yard operation activities (stacking, lift on/lift off, extra movement, installment relocation)

c. Operasi peti kemas *freight station* (*stripping/stuffing*, penumpukan, *receiving/delivery*)
d. Penanganan limbah kapal dan pelayanan jasa tambahan lainnya termasuk jasa alat bantu mekanis maupun non mekanis;

3. Jasa Kepelabuhanan curah cair/gas di Terminal Curah Cair/gas yang terdiri atas:
   a. Kegiatan operasional kapal (jasa dermaga, *stevedoring, plugging/unplugging* (*flexible hose*)
   b. Pipa
   c. Pompa
   d. Pemanas
   e. *Monitoring*/supervisi, *cleaning, trucking*)
   f. Operasional lapangan (penumpukan/ tangki, pengisian dari tangki ke truk tangki pembongkaran dari truk tangki, dan pemanasan)
   g. Penanganan limbah kapal dan pelayanan jasa tambahan lainnya termasuk jasa alat bantu mekanis maupun non mekanis;

4. Jasa Kepelabuhanan curah kering di Terminal Curah Kering yang terdiri atas:
   a. Kegiatan operasi kapal (jasa dermaga, *stevedoring*, *conveyor*/pipa/*excavator*/grab, *plugging/unplugging*, *monitoring*/ supervisi, pompa, *ramp door/moveable bridge*, *trimming, cleaning*)
   b. Operasi lapangan (penumpukan/*stock pile*, *bagging/ unbagging, hopper, trimming*, bongkar/ muat dari/ ke truk)
   c. Penanganan limbah kapal dan pelayanan jasa tambahan lainnya termasuk jasa alat bantu mekanis maupun non mekanis;

5. Jasa kendaraan di Terminal Kendaraan (*Car Terminal*) yang terdiri atas:
   a. Jasa dermaga
   b. Penumpukan
   c. *Flat bed on tire*
   d. *Stevedoring*
   e. Perencanaan lapangan
   f. *Monitoring*/supervisi
   g. *Cleaning*
   h. *Car wash*
   i. *Minnor repair*
   j. IT
   k. *Glosing*
   l. *Receiving/delivery*
   m. Pas tiket masuk cargo
   n. *Painting*
   o. *Tug master*
   p. *Labelling*
   q. Penanganan limbah kapal dan pelayanan jasa tambahan lainnya termasuk jasa alat bantu mekanis maupun non mekanis;

c. Freight station container operations (stripping/ stuffing, stacking, receiving/delivery)
d. Ship waste handling and other additional services including mechanical and non-mechanical auxiliary services;

3. Liquid/gas bulk Port Services at Liquid/gas Bulk Terminals, consist of:
   a. Ship operational activities (wharf services, stevedoring, plugging/unplugging (flexible hose)
   b. Pipe
   c. Pump
   d. Heating
   e. Monitoring/supervision, cleaning, trucking)
   f. Yard operations (stacking/tanking, filling from tanks to tank trucks unloading from tank trucks, and heating)
   g. Ship waste handling and other additional services including mechanical and non-mechanical auxiliary services;

4. Dry bulk Port Services at Dry Bulk Terminal, consist of:
   a. Ship operation activities (wharf services, stevedoring, conveyor/pipe/excavator/grab, plugging/unplugging, monitoring/supervision, pumps, ramp door/movable bridge, trimming, cleaning)
   b. Yard operations (stacking/stock pile, bagging/ unbagging, hopper, trimming, loading/unloading from/to trucks)
   c. Ship waste handling and other additional services including mechanical and non-mechanical auxiliary services;

5. Vehicle services at Vehicle Terminal (Car Terminal), consist of:
   a. Wharf services
   b. Stacking
   c. Flat bed on tire
   d. Stevedoring
   e. Yard planning
   f. Monitoring/supervision
   g. Cleaning
   h. Car wash
   i. Minor repair
   j. IT
   k. Glossing
   l. Receiving/delivery
   m. Pass cargo entry ticket
   n. Painting
   o. Tugmaster
   p. Labeling
   q. Ship waste handling and other additional services including mechanical and non-mechanical auxiliary services;

6. Jasa bongkar muat di Terminal Terapung terdiri dari:
   a. Kegiatan jasa bongkar muat
   b. *Mooring master*
   c. Persewaan *fender*
   d. *Hose*
   e. *Oil spill response*
   f. *Surveyor*
   g. *Incident oil spill response*
   h. *Ship chandler*
   i. Penanganan limbah kapal
   j. *Service boat*, dan *blending* muatan;

7. Jasa bongkar muat kendaraan dan barang secara *Roll on-Roll Off* (Ro-Ro) di Terminal Ro-Ro terdiri dari:
   a. Kegiatan jasa dermaga
   b. Naik/turun kendaraan
   c. Penumpukan/penyimpanan di lapangan
   d. *Stevedoring*
   e. Perencanaan lapangan
   f. *Monitoring*/supervisi
   g. Timbangan
   h. Pelayanan jasa tambahan lainnya;

8. Jasa bongkar muat Kapal ke Kapal/*Ship to Ship Transfer*/*Double Bangking Operation* terdiri dari:
   a. Kegiatan bongkar muat barang Curah kering/curah gas/curah cair/barang lainnya dari 1 kapal ke 1 kapal dan atau beberapa kapal lainnya di lokasi Perairan yang telah disetujui otoritas berwenang.
   b. Jasa Terkait Kepelabuhanan, meliputi:
      i) Penyediaan Depo Peti Kemas;
      ii) Penyediaan *Cargo Consolidation Center/Cargo Distribution Center* (CCC/CDC);
      iii) Penyediaan Pergudangan;
      iv) Pelayanan jasa alat;
      v) *Inter terminal transfer*;
      vi) *Trucking*;
      vii) Penumpukan plus gerakan ekstra (*stack* awal);
      viii) Pindah lokasi penumpukan (PLP); dan/atau
      ix) Jasa Penimbangan;
      x) Jasa *Cleaning*;
      xi) Jasa *Monitoring Cargo* (*Draft Survey*).

6. Loading and unloading services at Floating Terminal, consist of:
   a. Loading and unloading service activities
   b. Mooring master
   c. Fender rental
   d. Hose
   e. Oil spill response
   f. Surveyors
   g. Incident oil spill response
   h. Ship chandler
   i. Ship waste handling
   j. Service boat, and cargo blending;

7. Roll on-Roll Off (Ro-Ro) loading and unloading services for vehicles and goods at Ro-Ro Terminal, consist of:
   a. Wharf service activities
   b. Getting on/off the vehicle
   c. Stacking/storage in the yard
   d. Stevedoring
   e. Field planning
   f. Monitoring/supervision
   g. Scales
   h. Other additional services;

8. Ship to Ship/Ship to Ship Transfer/Double Banking Operation loading and unloading services, consist of:
   a. Loading and unloading activities for dry bulk/gas/liquid bulk/other goods from 1 ship to 1 ship and/or several other ships at water locations that have been approved by the competent authority.
   b. Port-Related Services, including:
      i) Provision of Container Depots;
      ii) Provision of Cargo Consolidation Center/Cargo Distribution Center (CCC/CDC);
      iii) Provision of Warehousing;
      iv) Tool services;
      v) Inter-terminal transfers;
      vi) Trucking;
      vii) Stacking plus extra moves (starting stack);
      viii) Move the stacking location (PLP); and/or
      ix) Weighing Services;
      x) Cleaning Services;
      xi) Cargo Monitoring Services (Draft Survey).

Wilayah Operasional
Operational Area

Hingga akhir 2025, PMT mengelola 32 cabang pelabuhan dan 5 satelite yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, baik secara langsung maupun melalui entitas anak. Masing-masing cabang memiliki spesifikasi terminal dan layanan berbeda sesuai dengan kebutuhan muatan dan karakteristik wilayah.

Berikut adalah peta cabang dan entitas usaha PMT beserta jenis layanan yang disediakan.



20 Branch PMT I Branches of PMT

Belawan	Lembar
Benoa	Malahayati
Gresik	Tanjung Emas
Dumai	Tanjung Intan
Trisaksi	Lhokseumawe
Parepare	Jamrud Nilam Mirah
Makassar	Bumiharjo Bagendang
Balikpapan	Tanjung Wangi
Sibolga	Tanjung Pinang
Bima Badas	Tanjung Balai Karimun

11 Branch PTP I Branches of PTP

Tanjung Priok	Teluk Bayur
Banten	Panjang
Cirebon	Bengkulu
Pangkal Balam	Jambi
Tanjung Pandan	Pontianak
Palembang	

By the end of 2025, PMT manages 32 port branches and 5 satellites spread from Sumatra to Papua, both directly and through subsidiaries. Each branch has different terminal and service specifications according to cargo needs and regional characteristics.

The following is a map of PMT branches and business entities along with the types of services provided.



1 Cabang IKT I IKT Branch

- **Jakarta**

5 Terminal Satelit IKT I IKT Satellite Terminal

- **Belawan**
- **Pontianak**
- **Balikpapan**
- **Makasar**
- **Banjarmasin**

- Pelindo Multi Terminal
- PTP Nonpetikemas
- IPCC Kendaraan Terminal

No	Nama Cabang Branch Name	Provinsi/Wilayah Province/Region	Jenis Terminal Terminal Type	Jasa Layanan Utama Main Services	Pengelola Managed by
1	Belawan	Sumatera Utara North Sumatra	*Multipurpose*	Bongkar muat curah dan *general cargo* Bulk and general cargo loading and unloading	PMT, IPCC
2	Benoa	Bali	*Multipurpose*	Jasa kapal dan barang Shipping and goods services	PMT
3	Gresik	Jawa Timur East Java	*Multipurpose*	*General cargo* dan curah Kering General cargo and dry bulk	PMT
4	Dumai	Riau	Curah Cair Liquid bulk	Curah cair (BBM, CPO) Liquid bulk (fuel, CPO)	PMT
5	Trisaksi	Kalimantan Selatan South Kalimantan	*Multipurpose*	*General cargo*	PMT
6	Parepare	Sulawesi Selatan South Sulawesi	*Multipurpose*	*General cargo*	PMT
7	Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	*Multipurpose*	*General cargo* dan Kendaraan General cargo and vehicles	PMT, IPCC
8	Balikpapan	Kalimantan Timur East Kalimantan	Curah Cair Liquid bulk	Curah cair dan BBM Liquid bulk and fuel	PMT, IPCC
9	Sibolga	Sumatera Utara North Sumatra	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT
10	Bima Badas	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT
11	Lembar	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	*Multipurpose*	*General cargo*	PMT
12	Malahayati	Aceh	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT
13	Tanjung Emas	Jawa Tengah Central Java	*Multipurpose*	Curah kering dan *general cargo* Liquid bulk and general cargo	PMT
14	Tanjung Intan	Jawa Tengah Central Java	*Multipurpose*	Curah kering Liquid bulk	PMT
15	Lhokseumawe	Aceh	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT
16	Jamrud Nilam Mirah	Jawa Timur East Java	*Multipurpose*	Peti kemas, curah, dan *general cargo* Containers, bulk and general cargo	PMT
17	Bumiharjo Bagendang	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	*Multipurpose*	*General cargo* dan curah General cargo and bulk	PMT
18	Tanjung Wangi	Jawa Timur East Java	*Multipurpose*	Curah dan *general cargo* Bulk and general cargo	PMT
19	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau Riau Islands	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT
20	Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau Riau Islands	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT
21	Tanjung Priok	DKI Jakarta	Peti Kemas & Kendaraan Containers & Vehicles	Peti kemas dan kendaraan Containers and vehicles	IPCC, PTP
22	Banten	Banten	*Multipurpose*	*General cargo*	PMT, PTP
23	Cirebon	Jawa Barat West Java	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT, PTP
24	Pangkal Balam	Bangka Belitung	*Multipurpose*	Curah dan peti kemas Bulk and containers	PMT, PTP
25	Tanjung Pandan	Bangka Belitung	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT, PTP
26	Palembang	Sumatera Selatan South Sumatra	*Multipurpose*	*General cargo* dan curah kering General cargo and dry bulk	PMT, PTP
27	Teluk Bayur	Sumatera Barat West Sumatra	*Multipurpose*	Curah kering dan peti kemas Liquid bulk and containers	PMT, PTP
28	Panjang	Lampung	*Multipurpose*	Barang umum General goods	PMT, PTP
29	Bengkulu	Bengkulu	*Multipurpose*	Curah dan peti kemas Bulk and containers	PMT, PTP
30	Jambi	Jambi	*Multipurpose*	Curah dan general cargo Bulk and general cargo	PMT, PTP
31	Pontianak	Kalimantan Barat West Kalimantan	*Multipurpose*	*General cargo*	PMT, IPCC, PTP
32	Jakarta	DKI Jakarta	*Car Terminal*	Kendaraan Vehicles	IPCC

Keanggotaan dalam Asosiasi
Association Membership

Hingga akhir tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) belum tercatat sebagai anggota resmi dalam asosiasi atau organisasi industri tertentu, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun demikian, PMT secara aktif mengikuti perkembangan sektor jasa kepelabuhanan dan logistik melalui forum-forum diskusi yang diselenggarakan oleh induk usaha, regulator, maupun mitra strategis. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk tetap selaras dengan dinamika industri serta kebijakan pemerintah yang relevan dengan pengelolaan terminal *multipurpose* di Indonesia.

Ke depan, PMT membuka peluang untuk bergabung dalam asosiasi atau forum industri yang sejalan dengan lini usaha dan misi Perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memperluas jejaring kerja sama, memperkuat kapabilitas organisasi, serta mendorong kontribusi aktif PMT dalam pembentukan kebijakan dan pengembangan industri kepelabuhanan nasional.

As of the end of 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) has not been registered as an official member of any specific industry association or organization, either at the national or international level.

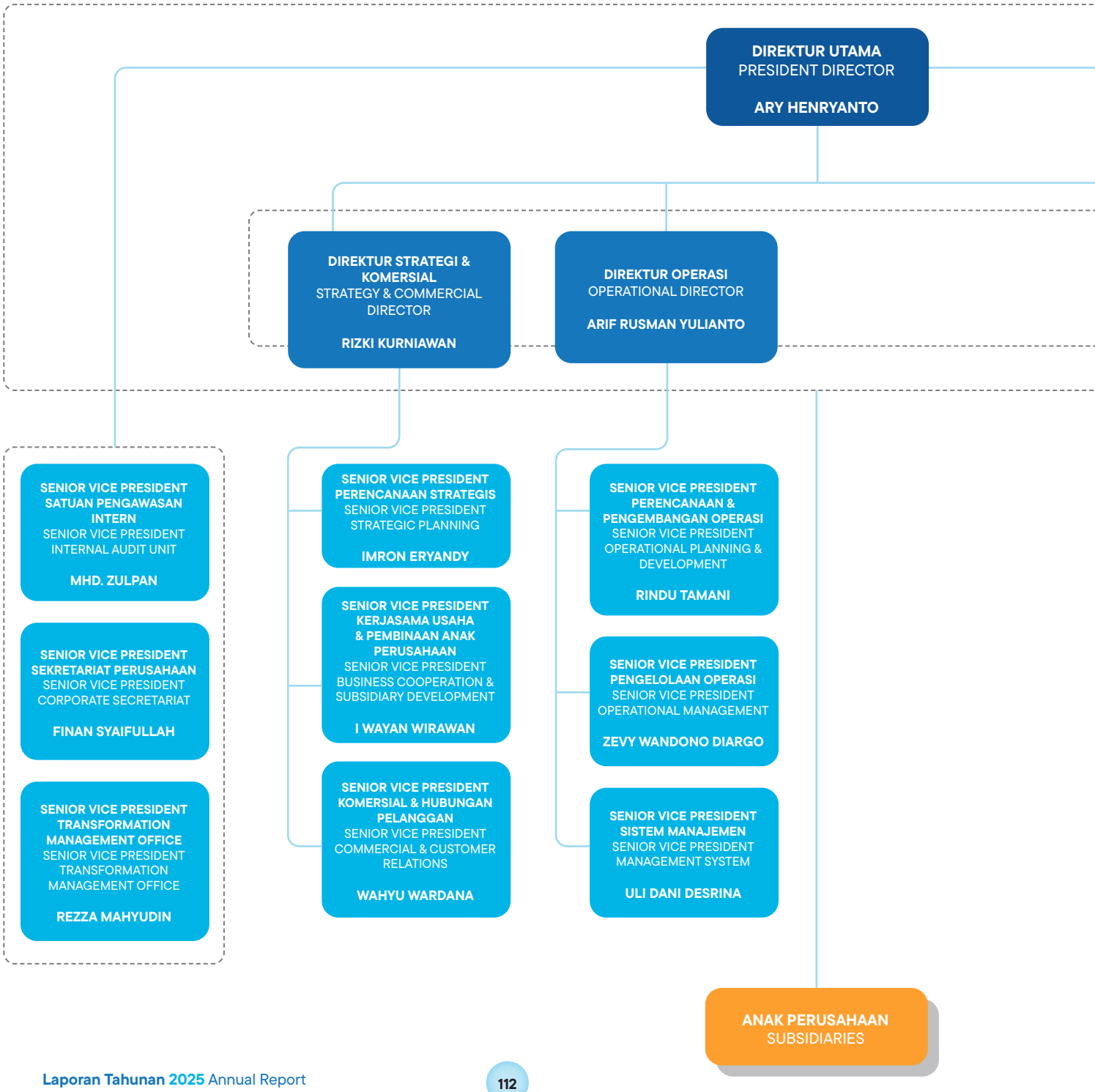
Nevertheless, PMT actively follows developments in the port services and logistics sector through discussion forums organized by its parent company, regulators, and strategic partners. This involvement reflects the Company's commitment to staying in step with industry dynamics and government policies relevant to the management of multipurpose terminals in Indonesia.

Moving forward, PMT is open to joining industry associations or forums that align with the Company's business lines and mission. This is expected to expand its network of partnerships, strengthen organizational capabilities, and encourage PMT's active contribution to policy formulation and the development of the national port industry.

Struktur Organisasi
Organizational Structure

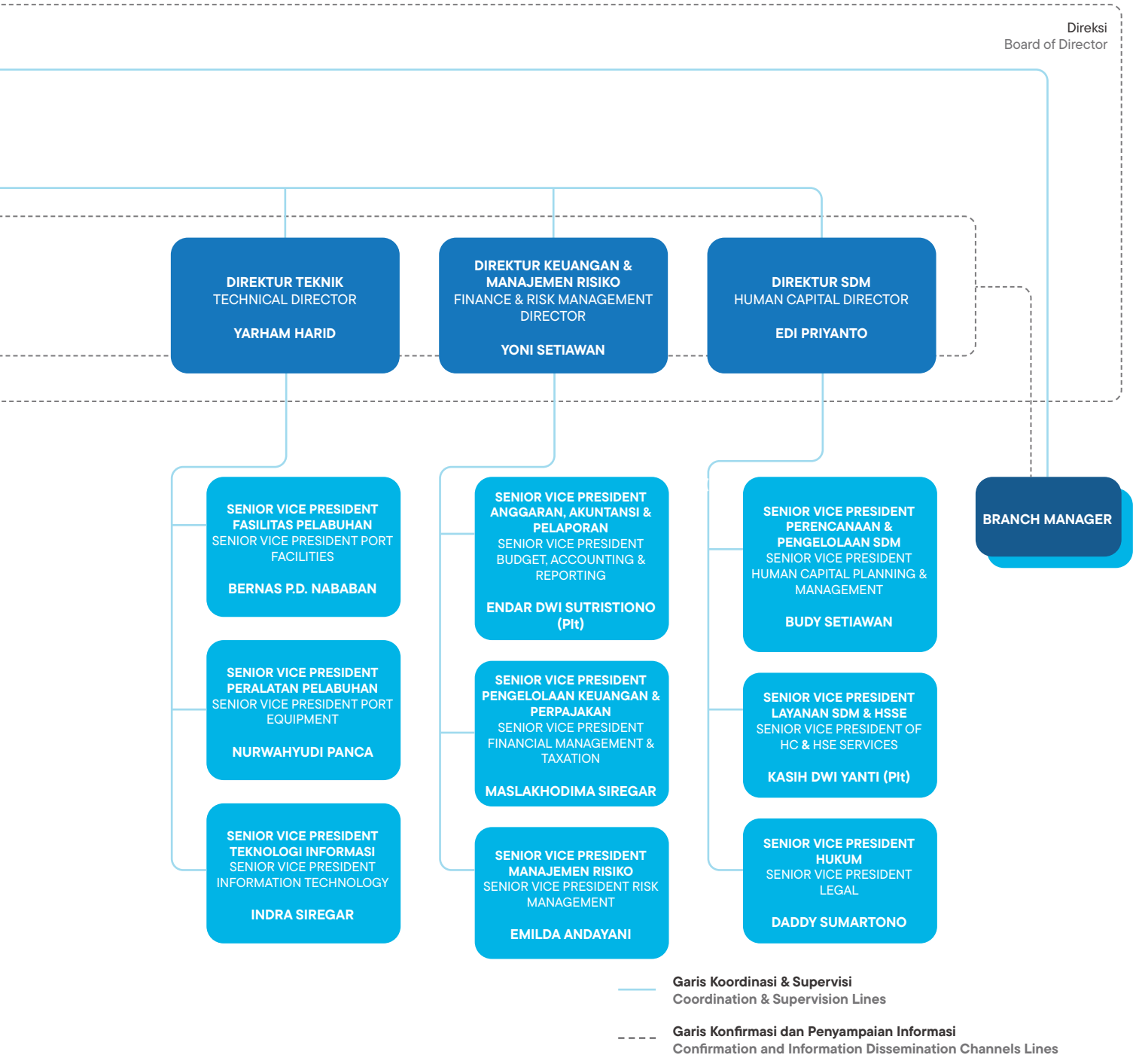
Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2025, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. OT.01.03/20/7/1/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 20 Juli 2023 tentang Struktur Organisasi PT Pelindo Multi Terminal, sebagaimana terlampir di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PT PELINDO MULTI TERMINAL PER 31 DESEMBER 2025



The Company's organizational structure as of December 31, 2025, has been established through Board of Directors Decree No. OT.01.03/20/7/1/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated July 20, 2023, concerning the Organizational Structure of PT Pelindo Multi Terminal, as attached below.

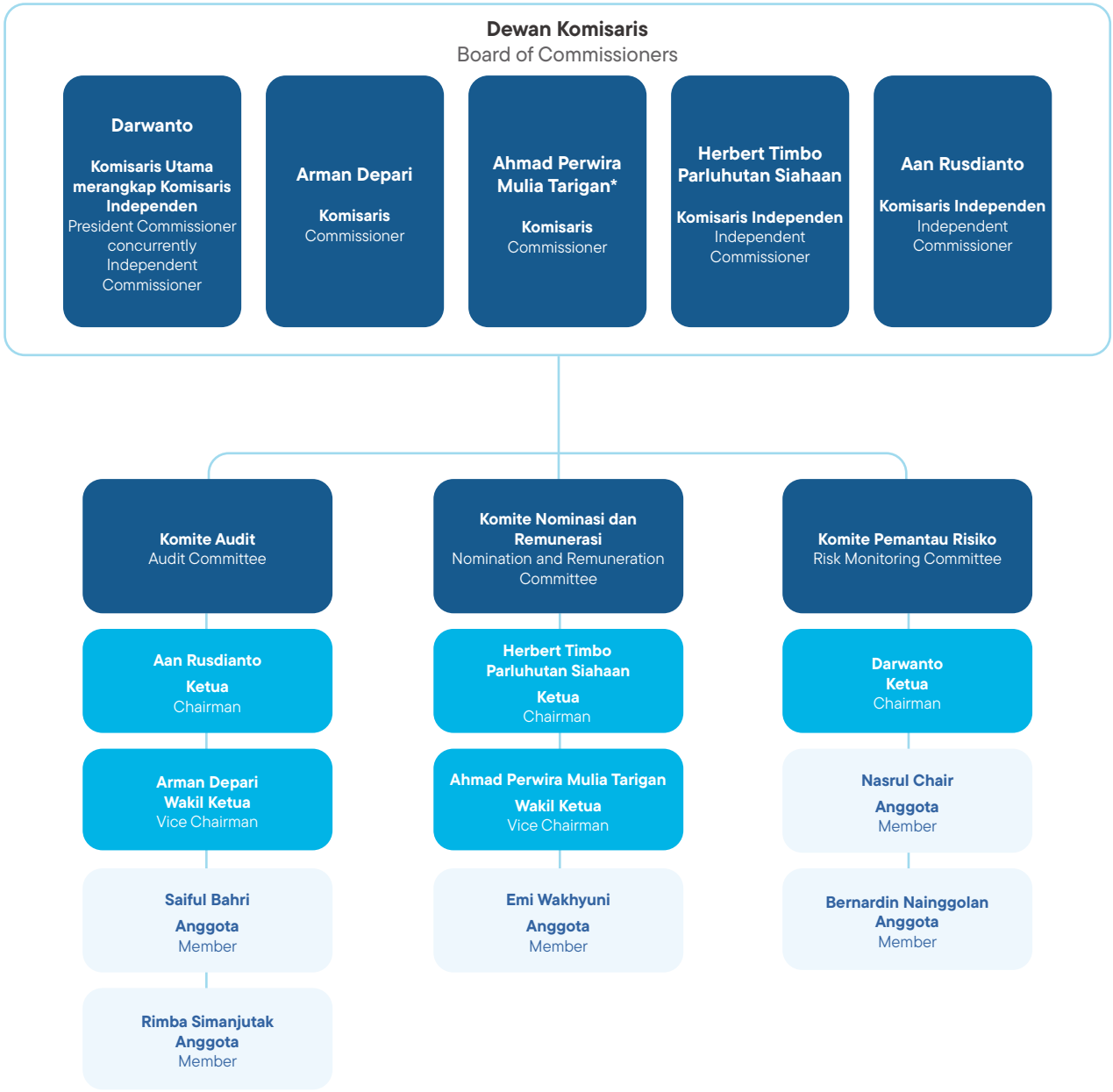
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PT PELINDO MULTI TERMINAL AS OF DECEMBER 31, 2025



STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS DAN ORGAN PENDUKUNGNYA

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND ITS SUPPORTING ORGANS

Struktur Organisasi Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya per 31 Desember 2025
Organizational Structure of Board of Commissioners and its Supporting Organs as of December 31, 2025



*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris per 20 April 2026
*) No longer in office as Commissioner as of April 20, 2026

Profil Direksi
Board of Directors Profile



ARY HENRYANTO

Direktur Utama
President Director

Periode Menjabat: 1 Maret 2024-RUPS 2029, Periode ke-1
Term of Office: March 1, 2024 - 2029 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 58 tahun per 31 Desember 2025 I Age 58 as of December 31, 2025
Kelahiran Magelang, 16 Februari 1967 I Born in Magelang, February 16, 1967

Domisili Domicile		Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 1 Maret 2024, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan. Appointed as President Director based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 dated March 1, 2024, for a term of office until the GMS to be held in 2029. Previously, had never served on the Company's Board of Directors.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister (S2) Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta (1997); dan • Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991). • Master Degree in Management from Pancasila University, Jakarta (1997); and • Bachelor Degree in Economics and Accounting from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1991).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi / CRGP, dari LSPMR Integrated Risk Governance Expert / CRGP, from LSPMR
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Direktur Keuangan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2020 – 2024); • Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020); • Direktur Komersial IPC TPK (2019 – 2020); • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017 – 2020). • Finance Director of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2020–2024); • President Director of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020); • Commercial Director of IPC TPK (2019–2020); • Commercial and Business Development Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2017–2020).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Tidak ada Within the Company None **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Tidak ada Outside the Company/At Other Institutions None
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's Shareholders and controlling entities.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



EDI PRIYANTO

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Periode Menjabat: 2023-RUPS 2028, Periode ke-1
Term of Office: 2023 - 2028 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 49 tahun per 31 Desember 2025 I Age 49 as of December 31, 2025
Kelahiran Klaten, 23 Oktober 1976 I Born in Klaten, October 23, 1976

Domisili Domicile		Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia Sidoarjo, East Java, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No.KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.. Appointed as Human Capital Director based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023, for a term of office until the GMS to be held in 2028. Previously, had never served on the Company's Board of Directors.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister (S2) Manajemen SDM dari STIE Bank BPD Jawa Tengah (2006); • Sarjana (S1) Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga Surabaya (2002); dan • Diploma (D3) Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (1998). • Master Degree in Human Resources Management from STIE Bank BPD Jawa Tengah (2006); • Bachelor Degree in Public Health from Airlangga University Surabaya (2002); and • Diploma Degree in Corporate Hygiene, Occupational Health & Safety from Sebelas Maret University, Surakarta (1998).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) • BNSP Kualifikasi Direktur SDM, dari Forum Human Capital Indonesia • Qualified Risk Governance Professional (QRGP), from the National Professional Certification Agency (BNSP). • BNSP HR Director Qualification, from the Indonesian Human Capital Forum.
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas (2021-2023); • Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020-2021); • Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2019-2020); dan • Senior Vice President Human Capital Services & HSSE PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2019); Senior Vice President Human Capital System & Strategy PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016-2017). • HC Director of PT Pelindo Terminal Petikemas (2021-2023); • HC Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020-2021); • Senior Manager of HC Strategy and Systems at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2019-2020); and • Senior Vice President of Human Capital Services & HSSE at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2019); Senior Vice President of Human Capital Systems & Strategy at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016-2017).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Tidak ada Within the Company None **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Komisaris PT Jasamarga Bali Tol Outside the Company/At Other Institutions Commissioner of PT Jasamarga Bali Tol
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as with the Company's Shareholders and controlling entities.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



ARIF RUSMAN YULIANTO

Direktur Operasi
Operations Director

Periode Menjabat: 1 Maret 2023-RUPS 2028, Periode ke-1
Term of Office: March 1, 2023 - 2028 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 50 tahun per 31 Desember 2025 I Age 50 as of December 31, 202
Kelahiran Sumenep, 4 Juli 1975 I Born in Sumenep, July 4, 1975

Domisili Domicile		Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Direktur Operasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan. Appointed as Operations Director based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023, for a term of office until the GMS to be held in 2028. Previously, had never served on the Company's Board of Directors.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister (S2) Logistics & Leadership dari Kuehne Logistic University (KLU) Hamburg, Jerman (2014); • Sarjana (S1) Teknik Elektro dari Universitas Krisna Dwipayana Jakarta (2002); dan • Diploma (D3) Teknik Elektro dari Politeknik Universitas Brawijaya Malang (1997). • Master Degree in Logistics & Leadership from Kuehne Logistic University (KLU) Hamburg, Germany (2014); • Bachelor Degree in Electrical Engineering from Krisna Dwipayana University Jakarta (2002); and • Diploma Degree in Electrical Engineering from the Brawijaya University Polytechnic, Malang (1997.
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) • Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Industri Migas, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) • Qualified Risk Governance Professional (QRGP), from the National Professional Certification Agency (BNSP). • Occupational Health and Safety (K3) Supervisor for the Oil and Gas Industry, from the National Professional Certification Agency (BNSP).
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Group Head Pelayanan Terminal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023); • Senior Vice President Pemasaran PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020); • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT IPC Terminal Petikemas (2017- 2020); dan • Vice President Hubungan Pelanggan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017). • Group Head of Terminal Services at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023); • Senior Vice President of Marketing at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020); • Director of Commercial and Business Development at PT IPC Terminal Petikemas (2017-2020); and • Vice President of Customer Relations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Tidak ada Within the Company None **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** • Komisaris Utama PT Prima Indonesia Logistik (PIL) (2023 – Sekarang) • Komisaris PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) (2024-Sekarang) Outside the Company/At Other Institutions • President Commissioner of PT Prima Indonesia Logistik (PIL) (2023 – Present) • Commissioner of PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) (2024 – Present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as with the Company's Shareholders and controlling entities.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



YONI SETIAWAN

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Periode Menjabat: 1 Maret 2023-RUPS 2028, Periode ke-1
Term of Office: March 1, 2023 - 2028 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 48 tahun per 31 Desember 2025 I Age 48 as of December 31, 2025
Kelahiran Semarang, 18 Juni 1977 I Born in Semarang, June 18, 1977

Domisili Domicile		Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia Sidoarjo, East Java, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan. Appointed as Finance and Risk Management Director based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023, for a term of office until the GMS to be held in 2028. Previously, had never served on the Company's Board of Directors.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Surabaya (2004); dan • Diploma (D3) Perpajakan dari Universitas Airlangga Surabaya (1996). • Bachelor Degree in Accounting from Bhayangkara University, Surabaya (2004); and • Diploma Degree in Taxation from Airlangga University, Surabaya (1996).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), dari LSPM Qualified Risk Governance Professional (QRGP), from LSPMR
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Group Head Layanan Keuangan dan Perpajakan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2023); • Senior Manager Keuangan Korporat, Treasuri dan Perpajakan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2021); • Asisten Senior Manager Perpajakan dan Manajemen Aset PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2012-2017). • Group Head of Financial and Tax Services, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2023); • Senior Manager of Corporate Finance, Treasury, and Taxation, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2021); • Assistant Senior Manager of Taxation and Asset Management, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2012-2017).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Tidak ada Within the Company None **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Komisaris Utama PT Equiport Inti Indonesia (2022-sekarang) Outside the Company/At Other Institutions President Commissioner of PT Equiport Inti Indonesia (2022-present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's Shareholders and controlling entitiess.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



YARHAM HARID

Direktur Teknik
Technical Director

Periode Menjabat: 1 Maret 2024-RUPS 2029, Periode ke-1
Term of Office: March 1, 2024 - 2029 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 56 tahun per 31 Desember 2025 I Age 56 as of December 31, 2025
Kelahiran Medan, 4 November 1969 I Born in Medan, November 4, 1969

Domisili Domicile		Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Direktur Teknik berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.10.05/1/3/8/ RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 1 Maret 2024, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan. Appointed as Technical Director based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 dated March 1, 2024, for a term of office until the GMS to be held in 2029. Previously, had never served on the Company's Board of Directors.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2003); dan • Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara, Medan (1995). • Master Degree in Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta, (2003); and • Bachelor Degree in Civil Engineering from the University of North Sumatra, Medan (1995).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), dari CRMS Indonesia (Center for Risk Management & Sustainability) • *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO), dari CRMS Indonesia (Center for Risk Management & Sustainability) • Qualified Risk Governance Professional (QRGP), from CRMS Indonesia (Center for Risk Management & Sustainability) • Qualified Chief Risk Officer (QCRO), from CRMS Indonesia (Center for Risk Management & Sustainability)
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Regional Head 1 Pelindo (2022 – 2024); GM Terminal Petikemas Belawan (2021 – 2022); • GM Pelindo 1 Cabang Belawan (2016 – 2021). • Regional Head 1 Pelindo (2022–2024); • General Manager of Belawan Container Terminal (2021–2022); General Manager of Pelindo 1 Belawan Branch (2016–2021.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Tidak ada Within the Company None **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Komisaris PT Terminal Curah Utama (2022-sekarang). Outside the Company/At Other Institutions Commissioner of PT Terminal Curah Utama (2022–present).
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan.. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's Shareholders and controlling entities .
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



RIZKI KURNIAWAN

Direktur Strategi dan Komersial
Strategy and Commercial Director

Periode Menjabat: 7 November 2023-RUPS 2028, Periode ke-1
Term of Office: November 7, 2023 - 2028 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 46 tahun per 31 Desember 2025 I Age 46 as of December 31, 2025
Kelahiran Jakarta, 10 September 1979 I Born in Jakarta, September 10, 1979

Domisili Domicile		Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia Sidoarjo, East Java, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Direktur Strategi dan Komersial berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/7/11/7/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/7/11/8/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 7 November 2023, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan. Appointed as Director of Strategy and Commercial Affairs based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/7/11/7/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/7/11/8/HKP/DRU/PSD-23 dated November 7, 2023, for a term of office until the GMS to be held in 2028. Previously, had never served on the Company's Board of Directors.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro, Semarang, (2004). Bachelor degree in Mechanical Engineering from Diponegoro University, Semarang (2004).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), dari CRMS Indonesia (*Center for Risk Management & Sustainability*) Qualified Risk Governance Professional (QRGP), from CRMS Indonesia (Center for Risk Management & Sustainability).
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Group Head Manajemen Pelanggan Pelindo (2023); • Group Head Komersial Pelindo (2022 – 2023). • Group Head of Customer Management, Pelindo (2023); • Group Head of Commercial, Pelindo (2022-2023).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Tidak ada Within the Company None **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas (2023 – sekarang) Outside the Company/At Other Institutions President Commissioner of PT Prima Terminal Petikemas (2023-present)
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Shareholders and controlling entities of the Company.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun pelaporan, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Anggota Direksi PT Pelindo Multi Terminal. Adapun susunan dan komposisi Direksi Perusahaan per 31 Desember 2025 terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama, 1 (satu) orang sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, 1 (satu) orang sebagai Direktur Operasi, 1 (satu) orang sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, 1 (satu) orang sebagai Direktur Teknik, dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Strategi dan Komersial. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

During the reporting year, there were no changes to the structure and composition of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal. The structure and composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2025, consisted of 6 (six) members: 1 (one) President Director, 1 (one) Human Capital Director, 1 (one) Operations Director, 1 (one) Finance and Risk Management Director, 1 (one) Technical Director, and 1 (one) Strategy and Commercial Director. The composition and basis for appointment of the Board of Directors are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Per 31 Desember 2025
Composition and Basis for Appointment of Board of Directors As of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Ary Henryanto	Direktur Utama President Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 1 Maret 2024 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 dated March 1, 2024	1 Maret 2024-RUPS 2029, Periode ke-1 March 1, 2024 - 2029 GMS, 1st Period
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023 Circular Resolution of Shareholders Outside the GMS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023	1 Maret 2023-RUPS 2028, Periode ke-1 March 1, 2023 - 2028 GMS, 1st Period
Arif Rusman Yulianto	Direktur Operasi Operations Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023 Circular Resolution of Shareholders Outside the GMS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023	1 Maret 2023-RUPS 2028, Periode ke-1 March 1, 2023 - 2028 GMS, 1st Period
Yoni Setiawan	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023 Circular Resolution of Shareholders Outside the GMS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023	1 Maret 2023-RUPS 2028, Periode ke-1 March 1, 2023-2028 GMS, 1st Period
Yarham Harid	Direktur Teknik Tehcnical Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 1 Maret 2024 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 dated March 1, 2024	1 Maret 2024-RUPS 2029, Periode ke-1 March 1, 2024 - 2029 GMS, 1st Period
Rizki Kurniawan	Direktur Strategi dan Komersial Strategy and Commercial Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/7/11/7/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/7/11/8/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 7 November 2023 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/7/11/7/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/7/11/8/HKP/DRU/PSD-23 dated November 7, 2023	7 November 2023-RUPS 2028, Periode ke-1 November 7, 2023 - 2028 GMS, 1st Period

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



DARWANTO

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Periode Menjabat: 1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1
Term of Office: October 1, 2021 - 2026 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 64 tahun per 31 Desember 2025 I Age 64 as of December 31, 2025
Kelahiran Rangkasbitung, Banten, 13 September 1961 I Born in Rangkasbitung, Banten, September 13, 1961

Domisili Domicile		DKI Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris. First appointed as President Commissioner and Independent Commissioner based on Circular Decision of Shareholders in lieu the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021, for a term of office until the GMS to be held in 2026. Previously, had never served on the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Pendidikan AAL (1984); Pendidikan Pendidikan Lanjutan Perwira II/Komando Umum (1991/1992); • SESKOAL Angkatan 35 (1997/1998); • SESKO TNI (2007); dan Lemhannas Singkat RI PPSA XIX (2013). • AAL (1984); Advanced Education: Officer II/General Command (1991/1992); • Naval Academy Class 35 (1997/1998); Indonesian National Defense Institute (SESKO TNI) (2007); and • the Indonesian National Resilience Institute (Lemhannas) PPSA XIX (2013)..
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI, dari LSP Manajemen Risiko XI National Risk Management Professional Conference, from the Risk Management LSP
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Asisten Perwira Divisi Senjata KRI Ratulangi-400 (1985), • Kepala Seksi Operasi & Latihan Satuan Kapal Selam (1995), • Komandan KRI Arung Samudra (1996), • Komandan KRI Teluk Peleng-535 (1998), • Komandan KRI Dewaruci (1998), • Komandan KRI Cakra-401 (2001), • Komandan Panglan Angkatan Laut Ternate (2007), • Kepala Staf Komando Armada Timur (2012), • Panglima Armada Kawasan Timur (2015), • Staf Khusus Kasal (2018), dan • Kepala Bidang Perencanaan KKIP (2020). • Assistant Officer of the Weapons Division of KRI Ratulangi-400 (1985), • Head of the Operations & Training Section of Submarine Unit (1995), • Commander of KRI Arung Samudra (1996), • Commander of KRI Teluk Peleng-535 (1998), • Commander of KRI Dewaruci (1998), • Commander of KRI Cakra-401 (2001), • Commander of the Ternate Naval Base (2007), • Chief of Staff of the Eastern Fleet Command (2012), • Commander of the Eastern Fleet (2015), • Special Staff to the Chief of Naval Staff (2018), and • Head of the Planning Division of KKIP (2020).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Ketua Komite Pemantau Risiko (2025) Within the Company Chairman of the Risk Monitoring Committee (2025) **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Tidak ada Outside the Company/At Other Institutions None
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as with the Company's Shareholders and controlling entities.
Pernyataan Independensi Komisaris Independen Independence Statement of Independent	:	Belum menjabat lebih dari dua periode sebagai Komisaris Independen. Has not served more than two terms as an Independent Commissioner.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



ARMAN DEPARI

Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat: 1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1
Term of Office: October 1, 2021 - 2026 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 63 tahun per 31 Desember 2025 I Age 63 as of December 31, 2025
Kelahiran Berastagi, 1 Agustus 1962 I Born in Berastagi, August 1, 1962

Domisili Domicile		DKI Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris. Appointed as Commissioner based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021, for a term of office until the GMS to be held in 2026. Previously, had never served on the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Pendidikan AKPOL (1985); Pendidikan PTIK (1996); • Pendidikan SESPIMPOL (2000); dan • Pendidikan SESPATI (2009). • AKPOL Education (1985); PTIK Education (1996); • SESPIMPOL Education (2000); and • SESPATI Education (2009).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	*Expansive Leadership Program for* BOD & BOC, dari Center for Leadership Development & Innovation Expansive Leadership Program for BOD & BOC, from the Center for Leadership Development & Innovation
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Danton Shabara Dit Samapta Polda Metrojaya, Kapolres Langkat Polda Sumatera Utara (2002), • Kanit V Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri (2006), • Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri (2009), • Kapolda Kepulauan Riau (2014), dan • Deputi Pemberantasan BNN (2016). • Danton Shabara, Directorate of Samapta, Polda Metro Jaya, Chief of Langkat Police, North Sumatra Police (2002), • Head of Unit V, Directorate IV/Crime of Narcotics and Crime, Bareskrim Polri (2006), • Director of Drug Crimes, Bareskrim Polri (2009), • Chief of Riau Islands Police (2014), and • Deputy for Eradication, BNN (National Narcotics Agency) (2016).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Wakil Ketua Komite Audit (2021-sekarang) Within the Company Deputy Chairman of Audit Committee (2021-present) **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Tidak ada Outside the Company/At Other Institutions None
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's shareholders and controlling entities.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



HERBERT TIMBO PARLUHUTAN SIAHAAN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Menjabat: 1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1
Term of Office: October 1, 2021 - 2026 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 66 tahun per 31 Desember 2025 I Age 66 as of December 31, 2025
Kelahiran Medan, 18 November 1959 I Born in Medan, November 18, 1959

Domisili Domicile		DKI Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris. Appointed as an Independent Commissioner based on Circular Resolutions of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021, for a term of office until the GMS to be held in 2026. Previously, had never served on the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	Sarjana (S1) Hukum di Universitas Indonesia (1979). Bachelor Degree in Law from the University of Indonesia (1979).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	*Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management*, dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management, from the Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Redaktur Pelaksana Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (2002) • Direktur Utama Majalah Pilar (2003) • Managing Partner Kantor Hukum Timbo Siahaan & Associates (2010-sekarang) • Pemimpin Redaksi Jak TV (2005) • Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Citilink Indonesia (2015) • Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk (2018) • Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020). • Managing Editor of Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (2002) • President Director of Pilar Magazine (2003) • Managing Partner of Timbo Siahaan & Associates Law Firm (2010-present) • Editor-in-Chief of Jak TV (2005) • Appointed Commissioner of PT Citilink Indonesia (2015) • Independent Commissioner of PT Garuda Indonesia Tbk (2018) • Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2025 - sekarang) Within the Company Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (2025–present) **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Tidak ada Outside the Company/At Other Institutions None
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's Shareholders and controlling entities.
Pernyataan Independensi Komisaris Independen Pernyataan Independensi Komisaris Independen	:	Belum menjabat lebih dari dua periode sebagai Komisaris Independen. Has not served more than two terms as an Independent Commissioner.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any Company shares, either directly or indirectly.



GUGUN GUMILAR

Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat: 20 April 2026 – RUPS 2031, Periode ke-1
Term of Office: April 20, 2026 – 2031 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 36 tahun per 31 Desember 2025 I Age 36 as of December 31, 2025
Kelahiran Purwakarta, 20 April 1989 I Born in Purwakarta, April 20, 1989

Domisili Domicile		DKI Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 dan No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 tanggal 20 April 2026, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2031. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris. First appointed as Commissioner based on Circular Resolution of Shareholders Outside the GMS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 and No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 dated April 20, 2026, for a term of office until the GMS to be held in 2031. Previously, had never served on the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Doktoral Bidang Filsafat, Politik, Agama (Ph.D), Dublin City University, Irlandia (2022); • Magister Bidang Studi Agama (MA), Harford International University, Amerika Serikat (2015); • Sarjana Bidang Pendidikan Bahasa Inggris (S.Pd), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011). • Doctorate in Philosophy, Politics, and Religion (Ph.D.), Dublin City University, Ireland (2022); • Master of Religious Studies (MA), Harford International University, United States (2015); • Bachelor of English Education (S.Pd), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Tidak ada None
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Staf Khusus Menteri Agama RI (2025 - sekarang); • Direktur Voice of Istiqlal jakarta (2023 - sekarang); • Dosen Studi Islam dan Agama, Dublin City University, Irlandia (2020 - sekarang); • Staf Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (2015 - 2023); • Staf Ahli Bupati Purwakarta (2015 - 2018); • Staf Ahli Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (2015 - 2017). • Special Staff to the Indonesian Minister of Religious Affairs (2025 - present); • Director of Voice of Istiqlal Jakarta (2023 - present); • Lecturer in Islamic and Religious Studies, Dublin City University, Ireland (2020 - present); • Expert Staff to the Leadership of the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia (2015 - 2023); • Expert Staff to the Regent of Purwakarta (2015 - 2018); • Expert Staff to the Deputy for Youth Empowerment, Ministry of Youth and Sports (2015 - 2017).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2026 - sekarang) Within the Company Vice Chair of the Nomination and Remuneration Committee (2026–present) **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Staf Khusus Menteri Agama RI Outside the Company/At Other Institutions Special Staff to the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as with the Company's shareholders and controlling entities.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



AAN RUSDIANTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Menjabat: 9 Desember 2024-RUPS 2029, Periode ke-1
Term of Office: December 9, 2024 - 2029 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 51 tahun per 31 Desember 2025 I Age 51 as of December 31, 2025
Kelahiran Ciamis, 13 April 1974 I Born in Ciamis, April 13, 1974

Domisili Domicile		DKI Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen PMT berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/9/12/2/HKPD/UTMA/PSD-24 tanggal 9 Desember 2024. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris. First appointed as an Independent Commissioner of PMT based on Circular Resolutions of Shareholders in lieu of of the GMS No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/9/12/2/HKPD/UTMA/PSD-24 dated December 9, 2024. Previously, had never served on the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	Sarjana Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang (1997). Bachelor Degree in Cultural Sciences, Diponegoro University, Semarang (1997).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Pelatihan ke-16 Komisaris Profesional : Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggungjawab, dari Intipesan Conference • *Executive Program for Commisioners*, dari Pelindo Pembelajaran & Konsultans • 16th Professional Commissioner Training: Becoming a Competent and Responsible Commissioner, from Intipesan Conference • Executive Program for Commissioners, from Pelindo Learning & Consulting
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal (2024-saat ini) • Komisaris PT Angkasa Multi Dimensi (2019) • Staf PT Citra Prima Komunika (2008) • Staf Bawaslu RI (2006) • Tim Asistensi Kasus Mei di Komnas HAM RI (2004) • People's Empowerment Consortium (PEC) (2000). • Independent Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal (2024-present) • Commissioner of PT Angkasa Multi Dimensi (2019) • Staff of PT Citra Prima Komunika (2008) • Staff of Bawaslu RI (2006) • Assistance Team for the May Case at Komnas HAM RI (2004) • People's Empowerment Consortium (PEC) (2000)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Ketua Komite Audit (2025 - sekarang) Within the Company Chairman the Audit Committee (2025–present)
		Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain Tidak ada Outside the Company/At Other Institutions None
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's Shareholders and controlling entitiess.
Pernyataan Independensi Komisaris Independen Pernyataan Independensi Komisaris Independen	:	Belum menjabat lebih dari dua periode sebagai Komisaris Independen. Has not served more than two terms as an Independent Commissioner.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



ELLY ROSITA SILABAN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Menjabat: 20 April 2026 – RUPS 2031, Periode ke-1
Term of Office: April 20, 2026 – 2031 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 56 tahun per 31 Desember 2025 I Age 56 as of December 31, 2025
Kelahiran Tapanulli, 03 Agustus 1969 I Birthday in Tapanulli, August 3, 1969

Domisili Domicile		DKI Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 dan No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 tanggal 20 April 2026, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2031 Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris. First appointed as an Independent Commissioner based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 and No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 dated April 20, 2026, for a term of office until the GMS to be held in 2031. Previously, had never served on the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, ISTEK WIDURI (2025) • Sarjana Manajemen, STIE ADHYNIAGA (2007) • Master Degree of Social Science, ISTEK WIDURI (2025) • Bachelor of Management, STIE ADHYNIAGA (2007)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Tidak ada None
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Ketua, Buruh 20 (2022); • Anggota Tituler, Dewan Umum ITUC (2019–2027); • Dewan Tenaga Kerja Badan Energi Internasional/International Energy Agency (2022–sekarang) • Anggota, Koalisi Sosial untuk Keadilan Sosial (2024–sekarang); • Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran/Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (2024–sekarang); • Anggota TUAC (Komite Penasihat Serikat Pekerja) untuk OECD. • Chair, Labour 20 (2022); • Titular member ITUC General Council (2019-2027); • International Energy Agency Labor Council (2022-present); • Member of Social Coalition for Social Justice (2024 – present); • Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (2024present); • TUAC for OECD member.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Ketua Komite Pemantau Risiko (2026- sekarang) Within the Company Chairman of the Risk Monitoring Committee (2026–present) **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Outside the Company/At Other Institutions President of the All-Indonesian Trade Union Confederation
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as with the Company's Shareholders and controlling entities.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.



AHMAD PERWIRA MULIA TARIGAN*

Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat: 1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1
Term of Office: October 1, 2021 - 2026 GMS, 1st Term

Warga Negara Indonesia I Indonesian Citizen
Usia 59 tahun per 31 Desember 2025 I Age 59 as of December 31, 2025
Kelahiran Medan, 17 April 1966 I Born in Medan, April 17, 1966

Domisili Domicile		Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis for First Appointment	:	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021, untuk masa jabatan hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris. Appointed as Commissioner based on Circular Resolution of Shareholders Outside of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021, for a term of office until the GMS to be held in 2026. Previously, had never served on the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir Legal Basis for Most Recent Appointment	:	-
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Doktor (S3) Coastal Engineering dari Universiti Teknologi Malaysia (2002); • Master (S2) Coastal Egineering dari University of Florida, Amerika Serikat (1996); dan • Sarjana (S1) Teknik Geodesi dari Institut Teknologi Bandung (1990). • Doctorate Degree in Coastal Engineering from Universiti Teknologi Malaysia (2002); • Master Degree in Coastal Engineering from the University of Florida, United States (1996); and • Bachelor Degree in Geodetic Engineering from the Bandung Institute of Technology (1990).
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Pelatihan ke-16 Komisaris Profesional : Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggungjawab, dari Intipesan Conference • Konfrensi Nasional Proffesional Manajemen Risiko XI, dari LSP Manajemen Risiko • 16th Professional Commissioner Training: Becoming a Competent and Responsible Commissioner, from Intipesan Conference • 11th National Professional Risk Management Conference, from LSP Risk Management
Riwayat Pekerjaan Employment History	:	• Ketua Program Studi S2/S3 Universitas Sumatera Utara (USU) (2017-sekarang) • Wakil Dekan III Universitas Sumatera Utara (USU) (2010) • Kepala Laboratorium Ilmu Ukur Tanah & Geospasial Universitas Sumatera Utara (USU) (2009) • Sekretaris Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (USU) (2005) • Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (USU) (1992). • Head of the Master's/Doctoral Program, University of North Sumatra (USU) (2017-present) • Vice Dean III, University of North Sumatra (USU) (2010) • Head of the Land Surveying & Geospatial Science Laboratory, University of North Sumatra (USU) (2009) • Secretary of the Civil Engineering Department, University of North Sumatra (USU) (2005) • Lecturer, Department of Civil Engineering, University of North Sumatra (USU) (1992).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	**Di Perusahaan** Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2025 - 2026) Within the Company Vice Chair of the Nomination and Remuneration Committee (2025–2026) **Di Luar Perusahaan/Lembaga Lain** Tidak ada Outside the Company/At Other Institutions None
Hubungan Afiliasi Affiliations	:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham dan entitas pengendali Perusahaan. Has no affiliations with other members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's Shareholders and controlling entitiess.
Kepemilikan Saham PMT PMT Share Ownership	:	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own any shares in the Company, either directly or indirectly.

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris per 20 April 2026
*) No longer in office as Commissioner as of April 20, 2026

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun pelaporan, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris PMT berdasarkan Akta No. 09 tanggal 23 September 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, perihal Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KP.03/27/8/2/RKTK/UTMA/PLND-25 dan No. SK.03/27/8/5/HKPD/UTMA/PSD-25 tanggal 27 Agustus 2025, tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal, di mana Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Thanon Aria Dewangga sebagai Komisaris.

Selain itu, terdapat juga perubahan susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 01 tanggal 5 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan, perihal Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 dan No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 tanggal 20 April 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal, di mana Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Ahmad Perwira Mulia Tarigan sebagai Komisaris, serta mengangkat Gugun Gumilar sebagai Komisaris, dan Elly Rosita Silaban sebagai Komisaris Independen yang baru.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

In the reporting year, there were changes to the composition of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal based on Deed No. 09 dated September 23, 2025, drawn up before Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., Notary in Jakarta, regarding the Statement of Circular Resolutions of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders No. KP.03/27/8/2/RKTK/UTMA/PLND-25 and No. SK.03/27/8/5/HKPD/UTMA/PSD-25 dated August 27, 2025, concerning the Dismissal of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal, in which the Shareholders honorably dismissed Thanon Aria Dewangga as a Commissioner.

In addition, there were also changes to the composition of Board of Commissioners based on Deed No. 01 dated May 5, 2026, made before Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, Notary in South Jakarta, concerning the Statement of Circular Resolutions of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 and No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 dated April 20, 2026, concerning the Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal. In this Decree, the Shareholders honorably dismissed Ahmad Perwira Mulia Tarigan as Commissioner, appointed Gugun Gumilar as Commissioner, and appointed Elly Rosita Silaban as new Independent Commissioner.

Kronologi Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris di sepanjang 2025
Chronology of Changes in the Composition of Board of Commissioners throughout 2025

1 Januari 2025 – 27 Agustus 2025 January 1, 2025 – August 27, 2025	**27 Agustus 2025 – 31 Desember 2025** August 27, 2025 – December 31, 2025	**Alasan Perubahan/ Pergantian** Reason for Change/ Substitution
Darwanto (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Darwanto (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Tidak ada Perubahan No changes
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	Tidak ada Perubahan No changes
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Komisaris Independen)	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak ada Perubahan No changes
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	Tidak ada Perubahan No changes
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak ada Perubahan No changes
Thanon Aria Dewangga (Komisaris) (Commissioner)		Sebagai bagian dari kebijakan Pemegang Saham dalam rangka evaluasi berkala terhadap susunan organ Perusahaan. As part of the Shareholders' policy regarding the periodic evaluation of the Company's organizational structure

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang terjadi Setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in The Composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners That Occurred After The end of The Fiscal Year

Setelah berakhirnya tahun buku 2025 hingga tanggal penerbitan Laporan Tahunan ini, terdapat penyesuaian lebih lanjut, yaitu pemberhentian dengan hormat Bapak Ahmad Perwira Mulia Tarigan dari jabatannya sebagai Komisaris terhitung sejak 20 April 2026, pengangkatan Bapak Gugun Gumilar sebagai Komisaris, serta pengangkatan Ibu Elly Rosita Silaban sebagai Komisaris Independen.

Following the end of the 2025 financial year and up to the date of issuance of this Annual Report, further adjustments were made, namely the honorable discharge of Mr. Ahmad Perwira Mulia Tarigan from his position as Commissioner, effective April 20, 2026; the appointment of Mr. Gugun Gumilar as Commissioner; and the appointment of Mrs. Elly Rosita Silaban as Independent Commissioner.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris sampai dengan Tahun Pelaporan
Composition and Basis for Appointment of Board of Commissioners up to the reporting year

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Darwanto	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021	1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1 October 1, 2021-GMS 2026, 1st Period
Arman Depari	Komisaris Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021	1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1 October 1, 2021-GMS 2026, 1st Period
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021	1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1 October 1, 2021-GMS 2026, 1st Period
Gugun Gumilar	Komisaris Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 dan No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 tanggal 20 April 2026 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 and No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 dated April 20, 2026	20 April 2026 – RUPS 2031 Periode ke-1 April 20, 2026 – 2031 GMS, 1st Period
Ahmad Perwira Mulia Tarigan*	Komisaris Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021	1 Oktober 2021-RUPS 2026, Periode ke-1 October 1, 2021-GMS 2026, 1st Period
Aan Rusdianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/9/12/2/HKPD/UTMA/PSD-24 tanggal 9 Desember 2024 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/9/12/2/HKPD/UTMA/PSD-24 dated December 9, 2024	9 Desember 2024-RUPS 2029, Periode ke-1 December 9, 2024 - 2029 GMS, 1st Period
Elly Rosita Silaban	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 dan No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 tanggal 20 April 2026 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/20/4/3/RKTK/UTMA/PLND-26 and No. SK.03/20/4/4/SKPR/UTMA/PSD-26 dated April 20, 2026	20 April 2026 – RUPS 2031 Periode ke-1 April 20, 2026 – 2031 GMS, 1st Period

*) tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 20 April 2026
*) no longer in office as Commissioner since April 20, 2026

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officers Profile

Direktorat Utama

MHD. ZULPAN

Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern
Senior Vice President of Internal Audit

Menjabat sejak 2024-saat ini
In office since 2024-present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	55 tahun I 55 years old
Domisili I Domicile	:	Medan, Sumatera Utara, Indonesia I Medan, North Sumatra, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tri Karya (2005) • Sarjana Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2001) • Bachelor of Civil Engineering, Tri Karya University (2005) • Bachelor of Management, Gadjah Mada University (2001)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Sertifikat Ahli Kepelabuhanan / On Line (2020) Port Expert Certificate / Online (2020)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal (2023-2024) • Regional Division Head Teknik Regional 1 (2023) • Project Manager Fasilitas Regional 1, Head Office (2019-2021) • Senior Vice President of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal (2023-2024) • Regional Division Head of Engineering, Regional 1 (2023) • Project Manager of Facilities, Regional 1, Head Office (2019-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum Nomor. KP.10.02/5/8/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 5 Agustus 2024. Took office as Senior Vice President of Internal Audit Unit based on Decision Letter of the Director of Human Resources and General Affairs No. KP.10.02/5/8/1/RKTK/SDMA/PLND-24, dated August 5, 2024.

FINAN SYAIFULLAH

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan
Senior Vice President of Corporate Secretary

Menjabat sejak 2024-saat ini
In office since 2024-present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	44 tahun I 44 years old
Domisili I Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia I Bogor, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Port and Shipping Management Internasional Transport and Logistic, Shanghai Maritime University (2014) • Magister Manajemen, Universitas Trisakti (2009) • Diploma 4 Tata Laksana Angkutan Laut & Kepelabuhan Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (1999-2003) • Master of Port and Shipping Management, International Transport and Logistics, Shanghai Maritime University (2014) • Master of Management, Trisakti University (2009) • Diploma 4 in Maritime Transportation & Port Management, Maritime College (STIP) (1999-2003)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) BOD-2 • Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Global Exposure Apprenticeship • Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Consultancy Skills Program 2023
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Manager Sekretaris Perusahaan, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2023-2024) • Senior Manager Pengembangan Usaha, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2023) • Vice President Pengembangan Usaha, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020-2021) • Senior Manager of Corporate Secretary, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2023-2024) • Senior Manager of Business Development, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021-2023) • Vice President of Business Development, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Sekretariat Perusahaan berdasarkan Surat KeputusanDirektur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 1 Agustus 2024. Took office as Senior Vice President Company Secretariat based on Decision Letter of the Director of Human Resources and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24, dated August 1, 2024.

REZZA MAHYUDIN

Senior Vice President Transformation Management Office
Senior Vice President Transformation Management Office

Menjabat sejak 2025 – saat ini
In office since 2025 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	38 tahun | 38 years old
Domisili I Domicile	:	Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia East Jakarta, Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Manajemen Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung (2017) • Sarjana Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (2009) • Master of Business Administration Management, Bandung Institute of Technology (2017) • Bachelor of Informatics Engineering, Bandung Institute of Technology (2009)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) BOD-2 • Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Global Exposure Apprenticeship • Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Consultancy Skills Program 2023 • Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Global Exposure Immersion (BOD-2) • Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Leading Business For Port Industry (BOD-2) 1. Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) BOD-2 2. Alpi Global Exposure Apprenticeship 3. Alpi Consultancy Skills Program 2023 4. Alpi Global Exposure Immersion (BOD-2) 5. Alpi Leading Business for Port Industry (BOD-2)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Departemen Head Perencanaan Inisiatif Strategi (2023 - 2024) • Departemen Head Strategi Integrasi (2021 - 2023) • DVP Penyusunan Standar Prosedur Operasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020 - 2021) • Department Head of Strategic Initiative Planning (2023-2024) • Department Head of Integration Strategy (2021-2023) • DVP of Standard Operating Procedure Development for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Headquarters (2020-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Transformation Management Office berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP 10.02/5/10/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Oktober 2023 Served as Senior Vice President of Transformation Management Office based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP 10.02/5/10/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated October 1, 2023

Direktorat Strategi & Komersial

Strategy & Commercial Director

IMRON ERYANDY

Senior Vice President Perencanaan Strategis
Senior Vice President of Strategic Planning

Menjabat sejak 2025 – saat ini
In office since 2025 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	51 tahun I 51 years old
Domisili I Domicile	:	Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• S1 Akuntansi, Universitas Sumatera Utara (2003) • Diploma Akuntansi, Universitas Sumatera Utara (1996) • Bachelor's degree in Accounting, University of North Sumatra (2003) • Diploma in Accounting, University of North Sumatra (1996)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Sertifikasi Recall Kepelabuhanan Tipe A, Jakarta, 2026 • Sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO), Jakarta, 2024 • Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan, Jakarta, 2021 • Sertifikasi *Trainer Modern Port Management Programme*, UNCTAD, Ireland, 2012 • Sertifikasi HR *Professional*, Jakarta, 2012 • Sertifikasi *Talent Management Professional*, Jakarta, 2012 • Sertifikasi Ahli K3 Umum, Jakarta, 2010 • Port Recall Certification Type A, Jakarta, 2026 • Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Certification, Jakarta, 2024 • Port Expert Certification, Ministry of Transportation, Jakarta, 2021 • Modern Port Management Program Trainer Certification, UNCTAD, Ireland, 2012 • HR Professional Certification, Jakarta, 2012 • Talent Management Professional Certification, Jakarta, 2012 • General OHS Expert Certification, Jakarta, 2010
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Vice President Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan (2023 - 2025) • Direktur Utama PT Prima Husada Cipta Medan (2021 - 2022) • SVP Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020 - 2021) • Senior Vice President of Business Cooperation and Subsidiary Development (2023-2025) • President Director of PT Prima Husada Cipta Medan (2021 - 2022) • Senior Vice President of Corporate Secretariat, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020 - 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Perencanaan Strategis berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP .10.02/10/6/2/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 10 Juni 2025. Served as Senior Vice President of Strategic Planning based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP .10.02/10/6/2/RKTK/SDMA/PLND-25 dated June, 2025

I WAYAN WIRAWAN

Senior Vice President Kerjasama Usaha & Pembinaan Anak Perusahaan
Senior Vice President of Business Cooperation & Subsidiary Development

Menjabat sejak 2025 – saat ini
In office since 2025 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	55 tahun | 55 years old
Domisili I Domicile	:	Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Studi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara (2011) • Sarjana Manajemen, Universitas HKBP Nommensen (2007) • Diploma Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Pendidikan Latihan Ahli Pelayaran (1994) • Master of Development Studies, University of North Sumatra (2011) • Bachelor of Management, HKBP Nommensen University (2007) • Diploma in Maritime Transportation and Port Management, Maritime Expert Training (1994)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• *Risk Awareness and Financial* (BOD - 1) • *Leadership Forum* • *Change Leadership Training*
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Project Manager PT Pelindo Multi Terminal (2025) • Staff Madya 1 Regional 1 (2023 - 2025) • Senior Vice President Komersial dan Hubungan Pelanggan (2022 - 2023) • Project Manager PT Pelindo Multi Terminal (2025) • Staff Madya 1 Regional 1 (2023 - 2025) • Senior Vice President of Commercial and Customer Relations (2022 - 2023) 10.02/10/6/2/RKTK/SDMA/PLND-25 dated June 10, 2025.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Kerjasama Usaha & Pembinaan Anak Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP .10.02/10/6/2/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 10 Juni 2025. Served as Senior Vice President of Business Cooperation & Subsidiary Development based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP .10.02/10/6/2/RKTK/SDMA/PLND-25 dated June 10, 2025.

WAHYU WARDANA

Senior Vice President Komersial & Hubungan Pelanggan
Senior Vice President Commercial & Customer Relations

Menjabat sejak 2023 – saat ini
In office since 2023 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	42 tahun | 42 years old
Domisili I Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Logistik dan Ekonomi Maritim, Universiteit Of Rotterdam (2014) • Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Sumatera Utara (2009) • Diploma Manajemen Transportasi Laut, Universitas Negeri Jakarta (2004) • Master's Degree in Logistics and Maritime Economics, University of Rotterdam (2014) • Bachelor's Degree in Economic Management, University of North Sumatra (2009) • Diploma in Marine Transportation Management, Jakarta State University (2004)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• *Reinforcement Performance Champion Batch* 2
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Vice President Kinerja Perusahaan (2022 - 2023) • Manager Komersial Cabang Pelabuhan Panjang (2021 - 2022) • Assistant DGM Komersial Cabang Pelabuhan Panjang (2020 - 2021) • Vice President of Corporate Performance (2022-2023) • Commercial Manager, Panjang Port Branch (2021-2022) • Assistant Director General of Commercial, Panjang Port Branch (2020-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Komersial & Hubungan Pelanggan berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/6/12/5/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Desember 2023. Served as Senior Vice President of Commercial & Customer Relations based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/6/12/5/RKTK/SDMA/PLND-23 dated December 1, 2023.

Direktorat Operasi | Operational Directorate

RINDU TAMANI

Senior Vice President Perencanaan & Pengembangan Operasi
Senior Vice President of Operations Planning & Development

Menjabat sejak 2023 – saat ini
In office since 2023 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	43 tahun | 43 years old
Domisili I Domicile	:	Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia East Jakarta, Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Sarjana Manajemen, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (2013) • Diploma Maritim, Universitas Negeri Jakarta (2004) • Bachelor of Management, Maritime Education and Training Center (2013) • Diploma in Maritime Affairs, Jakarta State University (2004)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• MDP II - Seri *Building Business Partnership Batch* III • *Business Feasibility Study Batch* II • Ahli Kepelabuhan Tahun 2019 • MDP II - Building Business Partnership Series Batch III • Business Feasibility Study Batch II • Port Expert 2019
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Department Head Terminal Multipurpose, PT Pelabuhan Indonesia (2022 - 2023) • Deputy General Manager Komersial (2018 - 2022) • Project Specialist Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017) • Department Head of Multipurpose Terminal, PT Pelabuhan Indonesia (2022-2023) • Deputy General Manager of Commercial (2018-2022) • Project Specialist, Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Perencanaan & Pengembangan Operasi berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 1 Agustus 2023. Served as Senior Vice President of Operations Planning & Development based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-23 dated August 1, 2023.

ZEVY WANDONO DIARGO

Senior Vice President Pengelolaan Operasi
Senior Vice President of Operations Management

Menjabat sejak 2022 – saat ini
In office since 2022 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	43 tahun | 43 years old
Domisili I Domicile	:	Kudus, Jawa Tengah, Indonesia Kudus, Central Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Sarjana Administrasi Bisnis, STIAMAK Barunawati (2014) • Diploma Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhan, Universitas Maritim Amni Semarang (2004) • Bachelor of Business Administration, STIAMAK Barunawati (2014) • Diploma in Merchant Shipping & Port Management, Amni Maritime University Semarang (2004)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Pendidikan dan Pelatihan Ahli Pelabuhan Indonesia Education and Training of Indonesian Port Experts
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• General Manager Gresik (2021 - 2022) • ASM Pelayanan Non Petikemas (2019 - 2020) • Vice President Non Container Service (2018) • General Manager of Gresik (2021-2022) • ASM Non-Container Services (2019-2020) • Vice President Non-Container Services (2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Pengelolaan Operasi berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/7/1/RKTK/UTMA/PLND - 22 tanggal 1 Juli 2022. Served as Senior Vice President of Operations Management based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/7/1/RKTK/UTMA/PLND-22 dated July 1, 2022.

ULI DANI DESRINA

Senior Vice President Sistem Manajemen
Senior Vice President of Management Systems

Menjabat sejak 2023 – saat ini
Menjabat sejak 2023 – saat ini

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	37 tahun | 37 years old
Domisili I Domicile	:	Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara (2016) • Sarjana Manajemen, Universitas Sumatera Utara (2010) • Master of Management, University of North Sumatra (2016) • Bachelor of Management, University of North Sumatra (2010)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	*Project Management and Change Management in Post Merger Integration Batch* 3
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Vice President Perencanaan & Pengembangan Operasi (2021 - 2023) • SVP Bisnis Terminal dan Log, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019 - 2021) • Kadiv Bisnis Properti PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018 - 2019) • Senior Vice President of Operations Planning & Development (2021-2023) • Senior Vice President of Terminal and Logistics Business, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2021) • Head of Property Business Division, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Sistem Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/8/4/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 01 Agustus 2023. Served as Senior Vice President of Management Systems based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/8/4/RKTK/SDMA/PLND-23 dated August 1, 2023.

Direktorat Teknik

Technical Directorate

BERNAS P.D. NABABAN

Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan
Senior Vice President of Port Facilities

Menjabat sejak 2024 – saat ini
In office since 2024 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	49 tahun | 49 years old
Domisili I Domicile	:	Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Teknik Arsitektur, Universitas Sumatera Utara (2011) • Sarjana Teknik Sipil, Universitas Katolik (2002) • Master of Architecture, University of North Sumatra (2011) • Bachelor of Civil Engineering, Catholic University (2002)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Tidak ada None
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Manager Teknik Belawan (20217 - 2024) • Manager Teknik Dumai (2013 - 2017) • PJ. Asisten Manager Fasilitas Belawan (2010 - 2013) • Belawan Engineering Manager (2021-2024) • Dumai Engineering Manager (2013-2017) • Acting Assistant Manager of Belawan Facilities (2010-2013)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/2/8/2/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 2 Agustus 2024. Served as Senior Vice President of Port Facilities based on Decree of the Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/2/8/2/RKTK/SDMA/PLND-24 dated August 2, 2024.

NURWAHYUDI PANCA

Senior Vice President Peralatan Pelabuhan
Senior Vice President of Port Equipment

Menjabat sejak 2023 – saat ini
In office since 2023 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	51 tahun | 51 years old
Domisili I Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Sarjana Elektronika, Universitas Indonesia (2002) • Diploma Teknik Telekomunikasi, Universitas Brawijaya (1996) • Bachelor of Electronics, University of Indonesia (2002) • Diploma in Telecommunication Engineering, Brawijaya University (1996)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• *Executive Presence* (BOD - 2) *Batch* I • MDP II - Seri *Building Business Partnership Batch* 2 • *Risk Assessment Technique Batch* IV • Executive Presence (BOD - 2) Batch I • MDP II - Building Business Partnership Series Batch 2 • Risk Assessment Technique Batch IV
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Manager Teknik (2021 - 2023) • Vice President Teknik PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 - 2021) • DVP Teknik Mesin dan Listrik Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2020) • Senior Manager of Engineering (2021 - 2023) • Vice President of Engineering, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020 - 2021) • DVP of Mechanical and Electrical Engineering, Head Office, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2020)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Peralatan Pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP. 10.02/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND - 23 tanggal 1 Agustus 2023. Served as Senior Vice President of Port Equipment based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP. 10.02/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-23 dated August 1, 2023.

INDRA SIREGAR

Senior Vice President Teknologi Informasi
Senior Vice President of Information Technology

Menjabat sejak 2023 – saat ini
Served since 2023–present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	43 tahun | 43 years old
Domisili I Domicile	:	Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung (2020) • Sarjana Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (2010) • Diploma III Teknik Informatika, Institut Teknologi Del (2005) • Master of Business Administration, Bandung Institute of Technology (2020) • Bachelor of Informatics Engineering, Bandung Institute of Technology (2010) • Diploma III in Informatics Engineering, Del Institute of Technology (2005)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Sertifikasi Nasional Manajemen Risiko Berkualifikasi (2024) National Qualified Risk Management Certification (2024)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Plt. Vice President Pengembangan Teknologi Informasi PT Pelindo Multi Terminal (2022 -2023) • Manager Transaksi dan Proses Data, Unit Pendukung Transaksi dan Proses Data - Regional 2 (2021-2022) • Manager Transaksi dan Proses Data, Unit Pendukung Transaksi dan Proses Data, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2021) • Acting Vice President of Information Technology Development, PT Pelindo Multi Terminal (2022-2023) • Transaction and Data Process Manager, Transaction and Data Process Support Unit - Regional 2 (2021-2022) • Transaction and Data Process Manager, Transaction and Data Process Support Unit, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office (2016-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/8/9/1/RKTK/SDMA/PLND-23. tanggal 01 September 2023. Served as Senior Vice President of Information Technology based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/8/9/1/RKTK/SDMA/PLND-23. dated September 1, 2023.

Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko — Finance & Risk Management Directorate

ENDAR DWI SUTRISTIONO

Plt. Senior Vice President Anggaran Akuntansi & Pelaporan
Act. Senior Vice President of Budget, Accounting & Reporting

Menjabat sejak 2025 – saat ini
In office since 2025 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	50 tahun I 50 years old
Domisili I Domicile	:	Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Cilacap, Central Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	Sarjana Ekonomi – Manajemen, Universitas Muhammadiyah Kupang Bachelor of Economics – Management, Muhammadiyah University of Kupang
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Tidak ada None
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Plt. Senior Vice President Anggaran, Akuntansi & Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal (2025–sekarang) • Senior Manager Pelaporan Keuangan Regional 3 (2023–2025) • Department Head Pelaporan Keuangan Regional 3 (2021–2023) • Acting Senior Vice President of Budget, Accounting & Reporting, PT Pelindo Multi Terminal (2025–present) • Senior Manager of Financial Reporting, Regional 3 (2023–2025) • Department Head of Financial Reporting, Regional 3 (2021–2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Anggaran Akuntansi & Pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/8/3/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 08 Maret 2025. Served as Senior Vice President of Budget, Accounting & Reporting based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/8/3/1/RKTK/SDMA/PLND-25 dated March 8, 2025.

MASLAKHODIMA SIREGAR

Senior Vice President Pengelolaan Keuangan & Perpajakan
Senior Vice President Pengelolaan Keuangan & Perpajakan

Menjabat sejak 2021 – saat ini
Menjabat sejak 2021 – saat ini

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	54 tahun I 54 years old
Domisili I Domicile	:	Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	Sarjana Manajemen, Universitas Dharmawangsa Medan (2001) Bachelor of Management, Dharmawangsa University, Medan (2001)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Sertifikasi Nasional Komputer Tingkat *dBase* III Plus Dasar (1992) • Sertifikasi Nasional Komputer Tingkat *WordStar* 5.0 (1992) • National Computer Certification dBase III Plus Basic (1992) • National Computer Certification WordStar 5.0 (1992)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Vice President Pengelolaan Keuangan & Perpajakan PT Pelindo Multi Terminal (2022–sekarang) • Senior Vice President Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan PT Pelindo Multi Terminal Regional 1 (2021–2022) • Senior Vice President Pajak PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020–2021) • Senior Vice President of Financial Management & Taxation, PT Pelindo Multi Terminal (2022–present) • Senior Vice President of Financial Management and Taxation, PT Pelindo Multi Terminal Regional 1 (2021–2022) • Senior Vice President of Taxation, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020–2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Pengelolaan Keuangan & Perpajakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021. Served as Senior Vice President of Financial Management & Taxation based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021.

EMILDA ANDAYANI

Senior Vice President Manajamen Risiko
Senior Vice President of Risk Management

Menjabat sejak 2021 – saat ini
In office since 2021 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	53 tahun I 53 years old
Domisili I Domicile	:	Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2003) • Sarjana Manajemen, Universitas Sumatera Utara (1995) • Master of Management, Gadjah Mada University (2003) • Bachelor of Management, University of North Sumatra (1995)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Sertifikasi *Qualified Risk Governance* (QRGP) • *Training of Trainer Risk Management* • Sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) • Qualified Risk Governance (QRGP) Certification • Risk Management Training of Trainers • Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Certification
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• General Manager Cabang Belawan (2021) • SVP Satuan Pengawas Intern Regional 1, Head Office (2019-2021) • Kepala Divisi Manajemen Risiko Regional 1, Head Office (2016-2019) • General Manager of Belawan Branch (2021) • Senior Vice President of Internal Audit Unit, Regional 1, Head Office (2019-2021) • Head of Risk Management Division, Regional 1, Head Office (2016-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/7/1/RKTK/UTMA/PLND-22 tanggal 01 Juli 2022. Served as Senior Vice President of Risk Management based on Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/1/7/1/RKTK/UTMA/PLND-22 dated July 01, 2022.

Direktorat SDM

Human Capital Directorate

BUDY SETIAWAN

Senior Vice President Perencanaan & Pengelolaan SDM
Senior Vice President of Human Capital Planning and Management

Menjabat sejak 2025 – saat ini
In office since 2025 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	54 tahun I 54 years old
Domisili I Domicile	:	Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Sarjana Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Tulang Bawang (2008) • Diploma III Manajemen dan Operasional Pelabuhan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhanan Barunawati (2001) • Bachelor of Business Administration, Tulang Bawang University (2008) • Diploma III in Port Management and Operations, Barunawati College of Port Administration and Management (2001)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Sertifikasi BNSP Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) skema General Manager SDM (2026) • CMC (*Coaching, Mentoring & Counceling*) (2025) • Pelatihan Berbasis Kompetensi Manager Hubungan Industrial (BNSP) (2023) • *Learning Technologist Certification* (2018) • *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) (2018) • Proje*ct Development Program* (2015). • BNSP Certification in Human Resource Management (HRM) with a General Manager HR scheme (2026) • CMC (Coaching, Mentoring & Counseling) (2025) • Industrial Relations Manager Competency-Based Training (BNSP) (2023) • Learning Technologist Certification (2018) • Qualified Risk Management Analyst (QRMA) (2018) • Project Development Program (2015)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Vice President Perencanaan & Pengelolaan SDM PT Pelindo Multi Terminal (2025–sekarang) • Vice President SDM & Umum PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020–2025) • Deputy Vice President Umum & Rumah Tangga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Deputy Vice President Budaya Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018-20219) • Jr. Deputy GM Umum & Logistik Cabang Pelabuhan Panjang (2017-2018) • Senior Vice President of Planning & Human Resources Management, PT Pelindo Multi Terminal (2025–present) • Vice President of Human Resources & General Affairs, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020–2025) • Deputy Vice President of General Affairs & Household Affairs, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • Deputy Vice President of Corporate Culture, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Perencanaan & Pengelolaan SDM berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero). No. KP.10.02/10/2/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 10 Februari 2025 tanggal 10 Februari 2025. Served as Senior Vice President of Human Capital Planning & Management based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/10/2/1/RKTK/SDMA/PLND-25 dated February 10, 2025.

KASIH DWI YANTI

Plt. Senior Vice President Layanan SDM & HSSE
Act. Senior Vice President of Human Capital and HSSE Services

Menjabat sejak 2025 – saat ini
In office since 2025 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	54 tahun I 54 years old
Domisili I Domicile	:	Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Pembangunan Panca Budi (2025) • Sarjana Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Dharmawangsa (2004) • Diploma 3 Administrasi Perkantoran, Politeknik Kesekretariatan dan Administrasi Niaga (1993) • Master of Human Resource Management, Panca Budi Development University (2025) • Bachelor of Business Administration, Dharmawangsa University (2004) • Diploma 3 in Office Administration, Polytechnic of Secretariat and Business Administration (1993)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Sertifikasi Kompetensi General Sumber Daya Manusia (2025) • Sertifikat Kompetensi Administratif Profesional (2025) • Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi (2024) • Diklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan *Batch* XIII (2022) • Sertifikasi *Training for Trainer* (TFT) *Batch* 2 (2022) • General Human Resources Competency Certification (2025) • Professional Administrative Competency Certificate (2025) • Competency Assessor Competency Certificate (2024) • Port Expert Certification Training Batch XIII (2022) • Training for Trainers (TFT) Certification Batch 2 (2022)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Vice President Layanan SDM & HSSE PT Pelindo Multi Terminal (2025–sekarang) • Regional Division Head Pelayanan SDM & Umum Regional 1 (2023–2025) • Division Head Pelayanan SDM & Umum Regional 1 (2022–2023) • Senior Vice President of HC & HSSE Services, PT Pelindo Multi Terminal (2025–present) • Regional Division Head of HC & General Services, Region 1 (2023–2025) • Division Head of HC & General Services, Regional 1 (2022–2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Layanan SDM & HSSE berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.KP.10.02/10/2/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 10 Februari 2025. Served as Senior Vice President of HC & HSSE Services based on the Decree of Director of HC and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/10/2/1/RKTK/SDMA/PLND-25 dated February 10, 2025.

DADDY SUMARTONO

Senior Vice President Hukum
Senior Vice President of Legal Affairs

Menjabat sejak 2023 – saat ini
In office since 2023 – present

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia
Usia I Age	:	42 tahun I 42 years old
Domisili I Domicile	:	Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Surabaya, East Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational History	:	• Magister Shipping and Transport, Netherlands Maritime University (2015) • Master/Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga (2011) • Sarjana Hukum Bisnis, Universitas Airlangga (2006) • Master of Shipping and Transport, Netherlands Maritime University (2015) • Master of Law, Airlangga University (2011) • Bachelor of Business Law, Airlangga University (2006)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Sertifikasi BNSP Manajemen Risiko (2023) • Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa (2016) • Sertifikasi Kepelabuhan (2016) • Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa (2013) • BNSP Risk Management Certification (2023) • Goods & Services Procurement Certification (2016) • Port Certification (2016) • Goods & Services Procurement Certification (2013)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Senior Vice President Hukum PT Pelindo Multi Terminal (2023–sekarang) • Vice President Pemeriksaan Kepatuhan PT Pelindo Terminal Petikemas (2023) • Vice President Pemeriksa Kepatuhan Regional 3 PT Pelindo Terminal Petikemas (2021-2022) • Senior Vice President of Legal Affairs, PT Pelindo Multi Terminal (2023–present) • Vice President of Compliance Audit, PT Pelindo Terminal Petikemas (2023) • Vice President of Compliance Audit, Regional 3, PT Pelindo Terminal Petikemas (2021-2022)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President Hukum berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/16/10/1/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 01 November 2023. Served as Senior Vice President of Legal Affairs based on the Decree of Director of Human Capital and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.10.02/16/10/1/RKTK/SDMA/PLND-23 dated November 1, 2023.



Demografi Karyawan
Employee Demographics

Hingga akhir tahun 2025, jumlah karyawan PMT *stand alone* sebanyak 669 orang (organik), menurun 1,76% dibandingkan jumlah karyawan Perusahaan di tahun 2024 yang mencapai 681 orang (organik). Penurunan jumlah karyawan tersebut merupakan dampak normal dari dinamika SDM seperti pensiun, PHK, meninggal, serta mobilitas talenta di PMT.

As of the end of 2025, PMT stand alone had a total of 669 employees (organic), a decrease of 1.76% compared to the number of the Company's employees in 2024, which reached 681 employees (organic). The decrease in the number of employees was a normal impact of human capital dynamics such as retirement, termination of employment, death, and talent mobility within PMT.

Di bawah ini disajikan jumlah dan komposisi karyawan tahun 2025 dan perbandingannya dengan tahun 2024.

Presented below are the number and composition of employees in 2025 and their comparison with 2024.

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan (Orang)
Number and Composition of Employees Based on Organizational/Job Level (persons)

Level Organisasi Organizational Level	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	I	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	L	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	Selisih Diference	%	
BOD-1	34	4	38	5,68%	33	4	37	5,43%	1	2,70%	↑
BOD-2	84	22	106	15,84%	83	24	107	15,71%	(1)	-0,93%	↓
BOD-3	2	2	4	0,60%	2	2	4	0,59%	0	0,00%	-
Non Struktural	385	136	521	77,88%	394	139	533	78,27%	(12)	-2,25%	↓
Jumlah I Total	**505**	**164**	**669**	**100,00%**	**512**	**169**	**681**	**100,00%**	**(12)**	**-1,76%**	↓

L=Laki-laki; P=Perempuan I M = Male / F = Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)
Number and Composition of Employees Based on Ecucational Level (persons)

Tingkat Pendidikan Educational Level	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	L	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	Selisih Diference	%	
Doktor I Doctorate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasca Sarjana I Post Graduate	36	18	54	8,07%	33	20	53	7,78%	1	1,89%	↑
Sarjana/ Diploma IV I Bachelor/Diploma IV	276	94	370	55,31%	284	97	381	55,95%	(11)	-2,89%	↓
Diploma III I	52	30	82	12,26%	48	30	78	11,45%	4	5,13%	↑
SLTA I Senior High School	139	22	161	24,07%	145	22	167	24,52%	(6)	-3,59%	↓
SLTP I Junior High School	2	0	2	0,30%	2	-	2	0,29%	0	0,00%	-
Jumlah I Total	**505**	**164**	**669**	**100,00%**	**512**	**169**	**681**	**100,00%**	**(12)**	**-1,76%**	↓

L=Laki-laki; P=Perempuan I M = Male / F = Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan (Orang)
Number and Composition of Employees Based on Employment Status (person)

Status Ketenagakerjaan Employment Status	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	L	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	Selisih Diference	%	
Organik I Organic	505	164	669	27,01%	512	169	681	38,13%	(12)	-1,76%	↓
Non Organik I Non-Organic	1.671	137	1808	72,99%	1.028	77	1.105	61,87%	703	63,62%	↑
Jumlah I Total	**2.176**	**301**	**2.477**	**100,00%**	**1.540**	**246**	**1.786**	**100,00%**	**691**	**38,69%**	↑

L=Laki-laki; P=Perempuan I M = Male / F = Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (Orang)
Number and Composition of Employees Based on Age (persons)

Usia Age	2025				2024				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	L	P	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	Selisih Diference	%	
< 26 tahun I years old	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 ≤ - < 36 tahun I years old	77	44	121	18,09%	106	59	165	24,23%	(44)	-26,67%	↓
36 ≤ - < 46 tahun I years old	235	79	314	46,94%	230	69	299	43,91%	15	5,02%	↑
46 ≤ - < 51 tahun I years old	101	21	122	18,24%	94	21	115	16,89%	7	6,09%	↑
51 ≤ - < 55 tahun I years old	76	19	95	14,20%	71	18	89	13,07%	6	6,74%	↑
≥ 55 tahun I years old	16	1	17	2,54%	11	2	13	1,91%	4	30,77%	↑
Jumlah I Total	**505**	**164**	**669**	**100,00%**	**512**	**169**	**681**	**100,00%**	**(12)**	**-1,76%**	↓

L=Laki-laki; P=Perempuan I M = Male / F = Female

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin/*Gender* (Orang)
Number and Composition of Employees Based on Gender (persons)

Jenis Kelamin Gender	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Amount (persons)	Komposisi Composition (%)	Selisih Diference	%	
Laki-laki I Male	505	75,49%	512	75,18%	(7)	-1,37%	↓
Perempuan I Female	164	24,51%	169	24,82%	(5)	-2,96%	↓
Jumlah I Total	**669**	**100,00%**	**681**	**100,00%**	**(12)**	**-1,76%**	↓

"Tentang pengembangan SDM dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dapat dilihat pada Laporan Berkelanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini."
"Regarding human capital development and fulfillment of employment rights can be found in the Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report."

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan
The Company's Shareholders Composition

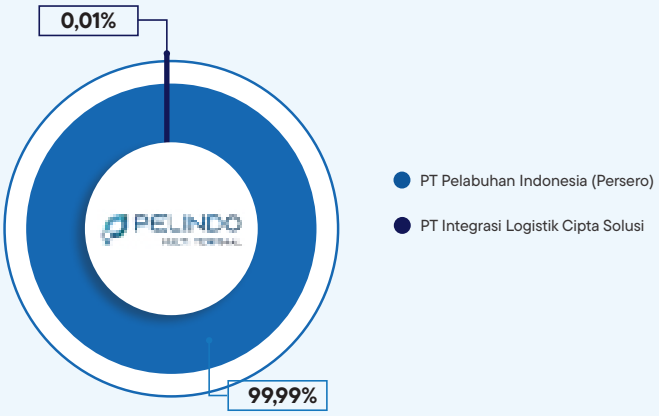
Berdasarkan data kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku 2025, struktur pemegang saham PT Pelindo Multi Terminal (PMT) tidak mengalami perubahan. Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh dua pemegang saham utama, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, dengan rincian sebagai berikut:

Based on ownership data at the beginning and end of the 2025 fiscal year, the shareholder structure of PT Pelindo Multi Terminal (PMT) did not undergo any changes. All of the Company's shares are owned by two major shareholders, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, with the following details:

Kepemilikan Saham PMT di awal dan akhir tahun 2025
PMT Share Ownership at the Beginning and End of 2025.

Pemegang Saham Shareholders	Per 1 Januari 2025 I As of January 1, 2025			Per 31 Desember 2025 I As of December 31, 2025		
	Total saham ditempatkan dan disetor penuh (lembar) Total issued and fully paid shares (shares)	Total nilai nominal Total nominal value (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of ownership (%)	Total saham ditempatkan dan disetor penuh (lembar) Total issued and fully paid shares (shares)	Total nilai nominal Total nominal value (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of ownership (%)
Kepemilikan di atas 5% I Ownership above 5%						
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.480.131	1.480.131.000.000	99,99%	1.480.131	1.480.131.000.000	99,99%
Kepemilikan di Bawah 5% I Ownership Under 5%						
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	174	174.000.000	0,01%	174	174.000.000	0,01%
Jumlah I Total	1.480.305	1.480.305.000.000	100,00%	1.480.305	1.480.305.000.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham PMT Per 31 Desember 2025
Composition of PMT Share Ownership as of December 31, 2025



Pada tabel dan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pemegang saham yang memiliki saham diatas 5% Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% saham Perusahaan adalah PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

The table and chart above show that shareholders who own more than 5% of the Company's shares is PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the shareholder who owns less than 5% of the Company's shares is PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

Perusahaan juga tidak memiliki kelompok pemegang saham masyarakat, karena seluruh saham dimiliki oleh entitas badan usaha yang merupakan bagian dari struktur korporasi Pelindo Grup.

The Company does not have public shareholders, because all shares are owned by a business entity that is part of Pelindo Group corporate structure.

Komposisi Kepemilikan Langsung Maupun Tidak Langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas Saham Perusahaan

Direct or Indirect Ownership of The Company's Shares by Board of Directors and Board of Commissioners

Perusahaan tidak menyelenggarakan opsi kepemilikan saham, baik untuk manajemen (MSOP) maupun untuk karyawan (ESOP). Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepemilikan langsung maupun tidak langsung atas saham PMT. Dengan demikian, Perusahaan menyatakan bahwa seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan langsung maupun tidak langsung atas saham Perseroan, baik atas nama pribadi maupun melalui entitas lain yang terdaftar dalam daftar pemegang saham PMT.

The Company does not hold stock option plan, either for management (MSOP) or for employees (ESOP). Throughout the 2025 fiscal year, there were no members of Board of Directors or Board of Commissioners who had direct or indirect ownership of PMT shares. Thus, the Company concludes that all members of Board of Directors and Board of Commissioners do not have direct or indirect ownership of the Company's shares, either in their personal names or through other entities registered in PMT shareholder list.

Nama Name	**Kepemilikan Saham PMT Secara Langsung** Direct Ownership of PMT Shares		**Kepemilikan Saham PMT Secara Tidak Langsung** Indirect Ownership of PMT Shares	
	1 Januari 2025 January 1, 2025	**31 Desember 2025** December 31, 2025	**1 Januari 2025** January 1, 2025	**31 Desember 2025** December 31, 2025
Direksi Board of Directors				
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	-	-	-	-
Edi Priyanto (Direktur Sumber Daya Manusia) (Human Capital Director)	-	-	-	-
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	-	-	-	-
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	-	-	-	-
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	-	-	-	-
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	-	-	-	-

Nama Name	Kepemilikan Saham PMT Secara Langsung Direct Ownership of PMT Shares		Kepemilikan Saham PMT Secara Tidak Langsung Indirect Ownership of PMT Shares	
	1 Januari 2025 January 1, 2025	31 Desember 2025 December 31, 2025	1 Januari 2025 January 1, 2025	31 Desember 2025 December 31, 2025
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Darwanto (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	-	-	-	-
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-	-	-	-
Gugun Gumilar (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-	-	-	-
Elly Rosita Silaban (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-	-	-	-

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Ownership Percentage by Classification

Hingga akhir tahun 2025, struktur kepemilikan saham PMT terdiri atas dua entitas institusi lokal, tanpa adanya kepemilikan oleh individu atau institusi asing. Adapun klasifikasi jumlah pemegang saham dan persentasenya adalah sebagai berikut:

By the end of 2025, PMT's share ownership structure consisted of two local institutional entities, with no ownership by foreign individuals or institutions. The classification of the number of shareholders and their percentages is as follows:

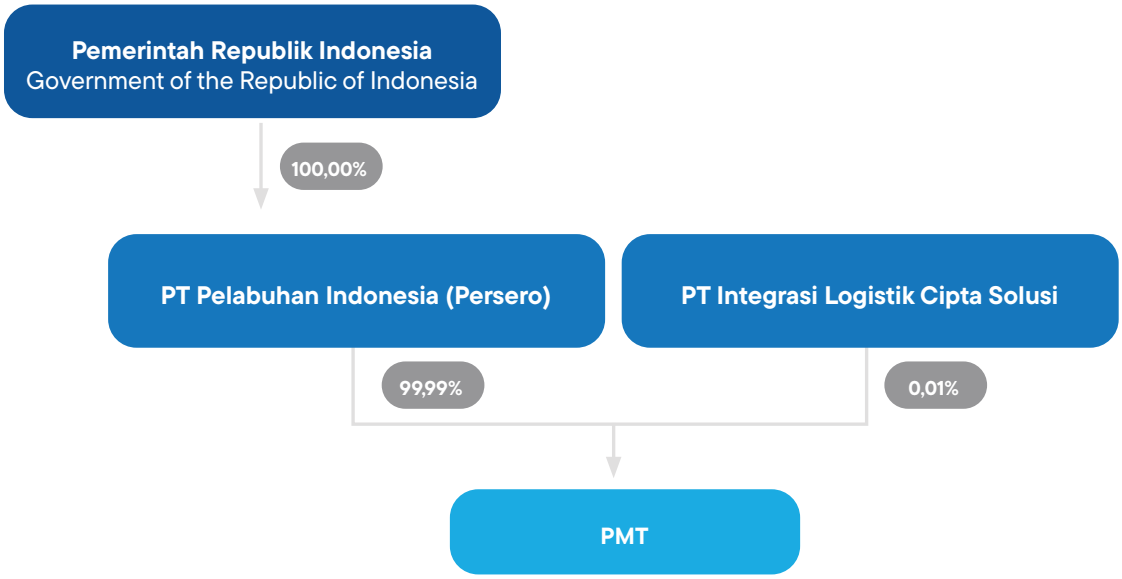
Klasifikasi Pemegang Saham Classification of Shareholders	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownershi
Institusi Lokal I Local Institution	2	100,00%
Institusi Asing I Foreign Institution	-	-
Individu Lokal I Local Individual	-	-
Individu Asing I Foreign Individual	-	-
Jumlah I Total	**2**	**100,00%**

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh entitas badan usaha yang merupakan bagian dari grup korporasi Pelindo.

All of the Company's shares are owned by business entities that are part of Pelindo corporate group.

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Sampai Kepada Entitas Pemilik Akhir

Information on Major and Controlling Shareholders up to Ultimate Owner Entity



PEMEGANG SAHAM PENGENDALI LANGSUNG: PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan. Pelindo terbentuk pada 1 Oktober 2021 melalui penggabungan empat entitas sebelumnya, yaitu Pelindo I, II, III, dan IV, sebagai langkah strategis pemerintah dalam menciptakan ekosistem pelabuhan nasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan kompetitif.

Pelindo merupakan pemegang saham mayoritas PMT, dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Selain itu, Pelindo juga memiliki 99,00% saham PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) yang turut memiliki 0,01% saham PMT.

Sebagai pengendali langsung, Pelindo berperan penting dalam mendorong transformasi dan standardisasi layanan terminal multipurpose yang dijalankan oleh PMT di berbagai wilayah operasional di Indonesia.

DIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER: PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo is a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the management and concession of port services. Pelindo was established on October 1, 2021 through the merger of four previous entities, namely Pelindo I, II, III, and IV, as a strategic measure made by the government in creating more integrated, efficient, and competitive national port ecosystem.

Pelindo is the major shareholder of PMT, with ownership of 99.99%. In addition, Pelindo owns 99.00% of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) shares which also owns 0.01% of PMT shares.

As a direct controller, Pelindo plays an important role in driving the transformation and standardization of multipurpose terminal services run by PMT in various operational areas in Indonesia.

PEMILIK SAHAM AKHIR *(ULTIMATE SHAREHOLDER)*: NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pelindo sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Negara Republik Indonesia merupakan pemilik akhir (*ultimate shareholder*) dari PMT. Kepemilikan ini menggambarkan peran strategis pemerintah dalam membangun sistem logistik nasional yang terintegrasi dan berdaya saing.

ULTIMATE SHAREHOLDER: THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pelindo is fully owned by the Republic of Indonesia, thereby the Republic of Indonesia is the ultimate shareholder of PMT. This ownership illustrates the strategic role of the government in building an integrated and competitive national logistics system.

Sekilas tentang PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

A glimpse of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Induk / *Holding* BUMN Pelabuhan
Major/Controlling Shareholder and Parenty Entity/Port SOE Holding

Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	5 Februari 1960 February 5, 1960
Status Badan Hukum Legal Entity Status	:	Perseroan Terbatas (PT); Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT); Domestic Investment (PMDN); State-Owned Enterprises (SOE)
Kepemilikan Saham Shareholding	:	Pemerintah Republik Indonesia: 100,00% The Government of the Republic of Indonesia: 100,00%
Bidang Usaha Business fields	:	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan Government of the Republic of Indonesia: 100.00%
Alamat Addres	:	Kantor Pusat Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9, Jakarta Utara 14230, Indonesia Head Office Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9, North Jakarta 14230, Indonesia
Telp Telp	:	+6221 4301080
Situs Web Website	:	www.pelindo.co.id
Surel Email	:	info@pelindo.co.id
Skala Usaha Business Scale	:	Aset : Rp126.054.805.719 Assets: Rp126,054,805,719
		Liabilitas : Rp75.697.201.953 Liabilities: Rp75,697,201,953
		Ekuitas : Rp50.357.603.766 Equity: Rp50,357,603,766
		Pendapatan : Rp35.483.466.435 Revenue: Rp35,483,466,435
		Laba bersih : Rp4.363.305.773 Net Income: Rp4,363,305,773
		Jumlah karyawan : 6.515 orang (Pekerja Organik) Number of Employees: 6,515 (Organic Workers)

Sebagai entitas hasil integrasi Pelindo I, II, III, dan IV, Pelindo bertugas membangun ekosistem pelabuhan nasional yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing global. Pelindo membentuk anak usaha sesuai lini bisnis, termasuk PT Pelindo Multi Terminal (PMT) untuk segmen terminal *multipurpose*.

As an entity resulting from the integration of Pelindo I, II, III, and IV, Pelindo is tasked with building an integrated, efficient, and globally competitive national port ecosystem. Pelindo forms subsidiary according to line of business, including PT Pelindo Multi Terminal (PMT) for multipurpose terminal segment.

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures

Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyertaan Modal oleh PMT Grup Year of Capital Investment by PMT Group	Kepemilikan Saham PMT (%) PMT Share Ownership		Jumlah Aset (sebelum eliminasi) (Rp-juta) Total Assets (before elimination) (Rp-million)		Status Operasi Operating Status
						2025	2024	2025	2024	
Entitas anak Kepemilikan Langsung Direct subsidiary										
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR")	Terminal petikemas dan konvensional Container and conventional terminal	Jakarta	2013	2013	2022	99,00	99,00	989.834	933.872	Beroperasi Operating
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT")	Terminal kendaraan Vehicle terminal	Jakarta	2012	2012	2022	71,28	71,28	2.058.232	1.850.738	Beroperasi Operating
PT Terminal Curah Utama ("TCU")	Jasa pelayanan curah cair dan gas Liquid and gas bulk services	Jakarta	2015	2015	2022	51,00	51,00	20.859	16.420	Beroperasi Operating
Entitas anak Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Subsidiary										
PT Pelindo3 Terminal Petikemas ("P3TPK")	Jasa layanan bongkar muat barang Goods loading and unloading services	Surabaya	2016	2016	2023	-	100,00	-	683	Beroperasi Operating
Operasi bersama, dimiliki melalui PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Joint operation, owned through PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk										
Manajemen Kerja Sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI")	Terminal kendaraan Vehicle terminal.	Gresik	2015	2015	2015	45,00	45,00	3.264	3.234	Beroperasi Operating

INFORMASI SINGKAT ENTITAS ANAK

BRIEF INFORMATION ON SUBSIDIARIES



PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR") didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013. PTPR bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR") was established based on Deed No. 27 dated July 10, 2013 made before Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013. PTPR is engaged in container terminal services, dry bulk, liquid bulk, bunkering, and warehousing and field services.



PT Terminal Curah Utama



PT Terminal Curah Semarang ("TCS") didirikan berdasarkan Akta No. 189 tanggal 15 Desember 2015, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016. TCS bergerak di bidang pengelolaan terminal curah. Berdasarkan Akta No 9 tanggal 21 Maret 2023 oleh Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024425.AH.01.02. tanggal 3 Mei 2023. TCS telah melakukan perubahan nama menjadi PT Terminal Curah Utama ("TCU").

PT Terminal Curah Semarang ("TCS") was established based on Deed No. 189 dated December 15, 2015, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016. TCS is engaged in the management of bulk terminals. Based on Deed No. 9 dated March 21, 2023 by Notary Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notary in North Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-0024425.AH.01.02. May 3, 2023. TCS has changed its name to PT Terminal Curah Utama ("TCU").



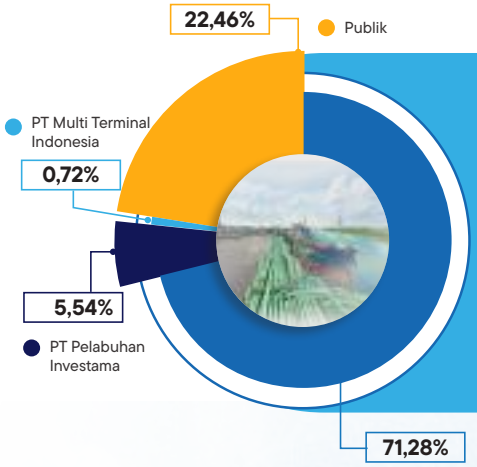
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012. IKT bergerak di bidang pengelolaan terminal kendaraan dan menjalankan usaha-usaha di bidang bongkar muat barang yang meliputi pelaksanaan *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*, pelayanan penumpukan serta pelayanan logistik dan nilai tambah lainnya sebagai *one stop services*.

Pada 9 Juli 2018, IKT melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) sebanyak 509.147.700 lembar saham biasa atas nama, atau sebesar 28% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100/lembar saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.640/lembar saham. Atas aksi korporasi tersebut, IKT memperoleh dana sebesar Rp835 miliar di mana seluruh dana tersebut sudah digunakan sebagai modal kerja.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") was established based on Deed No. 10 dated November 5, 2012 by Yulianti Irawati, SH., substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012. IKT is engaged in the management of vehicle terminal and runs businesses in loading and unloading of goods which include stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stacking services as well as logistics services and other added value as one stop services.

On July 9, 2018, IKT performed an Initial Public Offering (IPO) of 509,147,700 ordinary shares on behalf of, or 28% of the total issued and fully paid up capital with a nominal value of Rp100/share, and offered to public with an Offering Price of Rp1,640/share. For this corporate action, IKT received funds amounted to Rp835 billion, all of which were used as working capital.



PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing
Jakarta Utara 14110, Indonesia

Telp: +62 21 4393 2251
Customer Care: +62 811933 9930
Surel: corsec@indonesiacarterminal.co.id; info@indonesiacarterminal.co.id
Situs Web: www.indonesiacarterminal.co.id

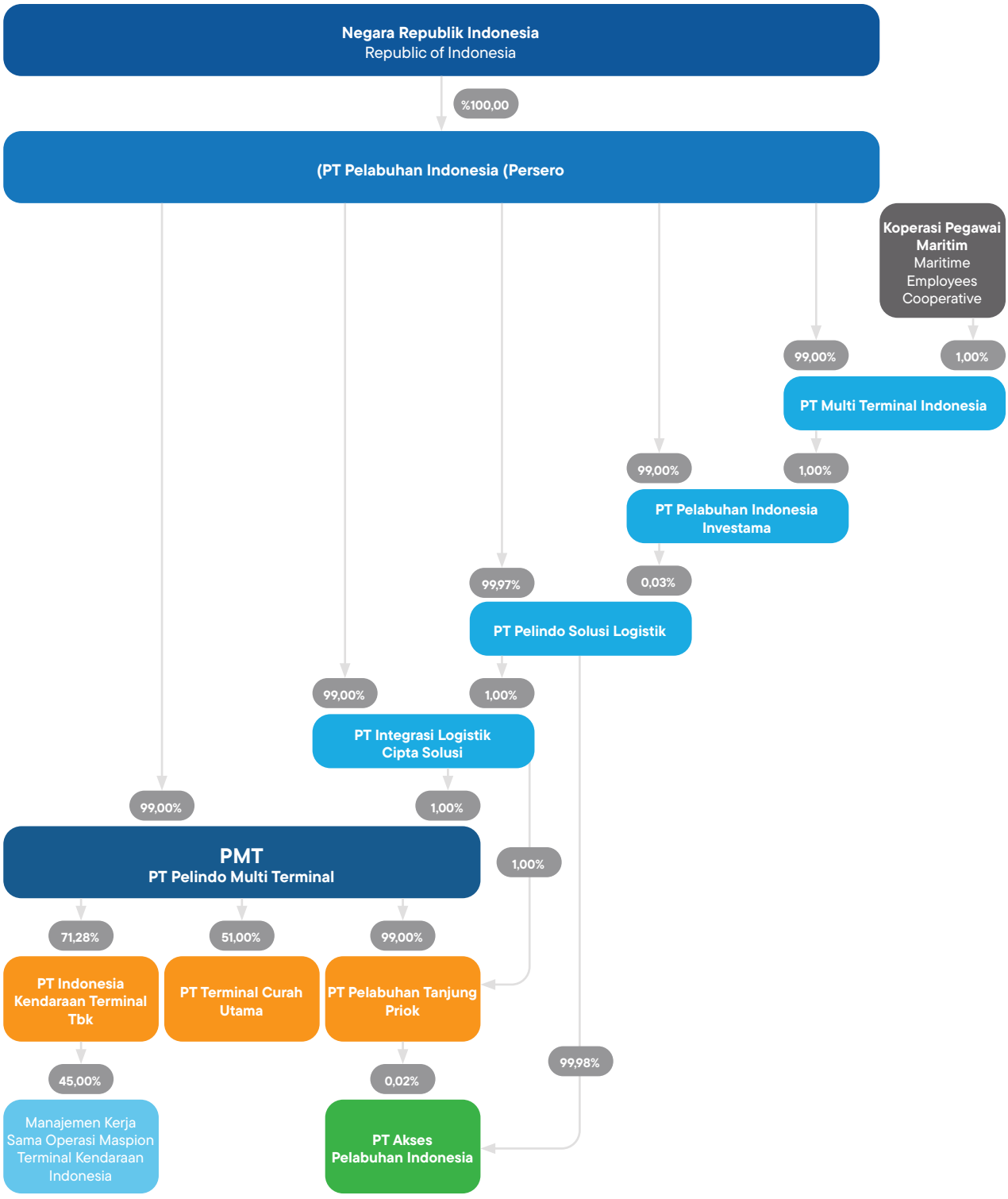
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing
Jakarta Utara 14110, Indonesia

Telp: +62 21 4393 2251
Customer Care: +62 811933 9930
Surel: corsec@indonesiacarterminal.co.id; info@indonesiacarterminal.co.id
Situs Web: www.indonesiacarterminal.co.id



Struktur Grup Perusahaan
Group Structure



Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of The Issuance and/or Listing of Shares

PMT tidak melakukan penawaran saham kepada publik ataupun memperdagangkan sahamnya melalui bursa saham manapun. Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), maupun nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

PMT has not conducted a public offering of shares or traded its shares on any stock exchange. Accordingly, the Company does not have information regarding the year of share issuance, the number of shares, the nominal value of shares, the offering price of shares for each corporate action, the number of shares listed following each corporate action, or the name of the stock exchange where the Company's shares are listed.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Chronology of The Issuance of Other Securities

PMT tidak menerbitkan saham kepada publik dan tidak mencatat/memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun. Perusahaan juga tidak melakukan penerbitan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; maupun peringkat efek.

PMT has not issued shares to the public and does not list/trade its shares on any stock exchange. The Company has also not issued any other securities in any form. Accordingly, the Company does not have information regarding the name of other securities, the year of issuance of other securities, the interest rate/return on other securities, and the maturity date of other securities, the offering value of other securities, the name of the exchange where other securities are listed, or the securities rating.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant and Public Accounting Firm

Akuntan Publik (AP) Public Accountant (PA)	**Damestar Hutagalung** Registrasi: AP.1609 Registration: AP.1609
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (PAF)	KAP Purwanto Susanti dan Surja
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta selatan, DKI Jakarta Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta
Jasa Audit yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit: Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Desember 2025 Jasa Non-Audit: Tidak ada Audit Services: Audit of Consolidated Financial Statements for the Period of December 31, 2025 Non-Audit Services: None
Periode Penugasan Assignment Period	21 Oktober 2025 - 30 April 2026 October 21, 2025 - April 30, 2026
Biaya Jasa (Fee) Fee	Jasa Audit: Rp3.815.000.000 tidak termasuk PPN Jasa Non-Audit: Tidak ada Audit Services: Rp3,815,000,000 excluding VAT Non-Audit Services: None

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professionals

NOTARIS

NOTARY

Nama Name	**Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.**
Alamat Address	Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. DR.Soepomo, SH No. 178 A, Jakarta Selatan 12870 Royal Palace Block C/16, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 178 A, South Jakarta 12870
Jasa dan Bentuk Jasa yang Diberikan Services and Type of Services Provided	1. Pembuatan RUPS Sirkuler terkait Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal 2. Pembuatan RUPS Sirkuler terkait Persetujuan Rencana Kerjasama Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Curah Kering Belawan Tahap 2 3. Pembuatan RUPS Sirkuler terkait Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Investasi Tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal 1. Circular GMS Resolution regarding the Dismissal of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal 2. Circular GMS Resolution regarding the Approval of the Phase 2 Cooperation Plan for the Operation and Development of Belawan Dry Bulk Terminal 3. Circular GMS Resolution regarding the Approval of Changes to the 2025 Corporate Work Plan and Budget of Investment of PT Pelindo Multi Terminal
Periode Penugasan Assignment Period	1. 27 Agustus 2025 2. 17 September 2025 3. 18 September 2025 1. August 27, 2025 2. September 17, 2025 3. September 18, 2025

KONSULTAN HUKUM

KONSULTAN HUKUM

Nama Name	**FIRMA ALCHEMIST LAW OFFICE**
Alamat Address	Ashta District 8, treasury Tower, SCBD, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, 12190
Jasa dan Bentuk Jasa yang Diberikan Services and Type of Services Provided	Jasa Konsultan Hukum Retainer PT Pelindo Multi Terminal Legal Consultant Services for PT Pelindo Multi Terminal Retainer
Periode Penugasan Assignment Period	6 bulan (Juli s.d Desember 2025) 6 months (July to December 2025)

Penghargaan dan/atau Sertifikasi
Awards and/or Certifications

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PERUSAHAAN DI TAHUN 2025

AWARDS RECEIVED BY THE COMPANY IN 2025



24 Februari 2025
February 24, 2025

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Periode 2023 -2024 Peringkat BIRU
Corporate Performance Rating Program for Environmental Management (PROPER) for the 2023 –2024 Period: BLUE Rating

Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Minister of the Environment / Head of the Environmental Management Agency of the Republic of Indonesia



26 Februari 2025
February 26, 2025

PR Indonesia Awards (PRIA) 2025 dengan predikat Silver Winner Kategori Program PR –Sub Kategori Corporate PR
PR Indonesia Awards (PRIA) 2025, Silver Winner in the PR Program Category – Corporate PR Subcategory

PR Indonesia



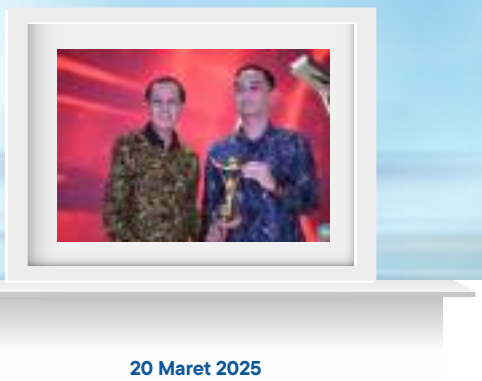
26 Februari 2025
February 26, 2025

Indonesia Sustainability Award 2025, dengan kategori:
Indonesia Sustainability Award 2025, in the following categories:

- The Best Company for Effective Non-Hazardous Waste Reduction and Utilization Initiatives #Star 3
- The Best Company for The Community Empowerment Programme#Star 3
- The Best Leadership commited to ESG Implementation Programme

- The Best Company for Effective Non-Hazardous Waste Reduction and Utilization Initiatives #Star 3
- The Best Company for the Community Empowerment Program #Star 3
- The Best Leadership Committed to ESG Implementation Program

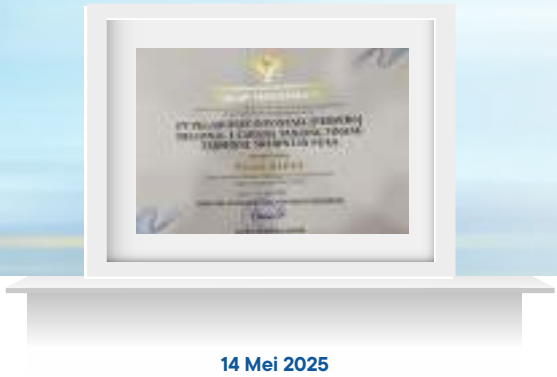
First Indonesia Magazine



20 Maret 2025
March 20, 2025

Anugerah BUMN 2025 kategori Pengembangan Talenta & SDM Unggul Perusahaan Terbaik
BUMN Award 2025, Talent Development & Superior Human Resources for Best Company

BUMN Track



14 Mei 2025
May 14, 2025

Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024 kategori "Prima Madya" untuk Terminal Sri Bintan Pura
2024 Public Service Provider Unit Award for Transportation Sector in the "Prima Madya" category for Sri Bintan Pura Terminal

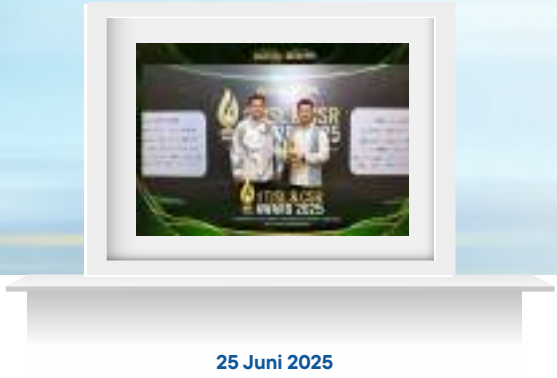
Kementerian Perhubungan RI
Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia



23 Mei 2025
May 23, 2025

Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2025 dengan predikat Silver Winner kategori The Best Corporate Social Media
Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2025, Silver Winner in the Best Corporate Social Media category

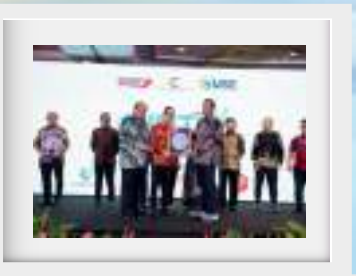
Serikat Pers Perusahaan (SPS)
Corporate Press Union (SPS)



25 Juni 2025
June 25, 2025

TJSL & CSR Award 2025 kategori Anak Perusahaan BUMN pada pilar Lingkungan dengan predikat Gold #4 Stars
TJSL & CSR Award 2025, Gold #4 Stars in the Environment pillar, SOE Subsidiary category

BUMN Track





30 Juli 2025
July 30, 2025

Indonesia Digital Technology & Innovation (IDTI) Awards 2025 dengan kategori:
Indonesia Digital Technology & Innovation (IDTI) Awards 2025 with categories:

- Best Cyber security Initiative of The Year 2025 National Champion, predikat Diamond
- Best Digital Process Optimization of The Year 2025 National Champion, predikat Platinum
- Best Cyber security Initiative of the Year 2025 National Champion, Diamond predicate
- Best Digital Process Optimization of the Year 2025 National Champion, Platinum predicate

Business Update



28 Agustus 2025
August 28, 2025

OSH (*Occupational Safety and Health*) Asia's Summit 2025 First Indonesia Magazine dengan kategori:
- The Best Continuous Improvement of an OSH Management Performance
- Excellence Company for Safety Management Fast Learning
- The Best Leadership on OSH Culture

OSH (Occupational Safety and Health) Asia's Summit 2025 First Indonesia Magazine with categories:
- The Best Continuous Improvement of an OSH Management Performance
- Excellence Company for Safety Management Fast Learning
- The Best Leadership on OSH Culture

First Indonesia Magazine



20 Oktober 2025
October 20, 2025

Media Relations Awards 2025 dengan kategori Program Media Relations
Media Relations Awards 2025 in the Media Relations Program category

Serikat Pers Perusahaan (SPS)
Corporate Press Union (SPS)



5 November 2025
November 5, 2025

Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2025 dengan kategori Excellence in Non-Container Terminal Operations.
Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2025 in the Excellence in Non-Container Terminal Operations category.

Bisnis Indonesia



13 November 2025
November 13, 2025

CSR Award 2025

Pemerintah Kabupaten Gresik
Gresik Regency Government

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2025

VALID CERTIFICATIONS IN 2025

No.	Unit Kerja Work Unit	Badan atau Lembaga yang Memberikan Certification Body	Mulai Berlaku Effective Date	Selesai Berlaku Expiry Date
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu I Quality Management System				
1.	Kantor Pusat Head Office	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
2.	Branch Belawan Belawan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
3.	Branch Dumai Dumai Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
4.	Branch Tanjung Intan Tanjung Intan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
5.	Branch Jamrud Nilam Mirah Jamrud Nilam Mirah Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
6.	Branch Tanjung Wangi Tanjung Wangi Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
7.	Branch Bumiharjo Bagendang Bumiharjo Bagendang Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
8.	Branch Trisakti Trisakti Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
9.	Branch Makassar Makassar Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
10.	Branch Balikpapan Balikpapan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
11.	Branch Gresik Gresik Branch	Global Certification Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	13 Maret 2027 March 13, 2027
12.	Branch Tanjung Emas Tanjung Emas Branch	Global Certification Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	13 Maret 2027 March 13, 2027
13.	Branch Lembar Lembar Branch	Global Certification Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	13 Maret 2027 March 13, 2027
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan I Environmental Management System				
1.	Kantor Pusat Head Office	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
2.	Branch Belawan Belawan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
3.	Branch Dumai Dumai Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
4.	Branch Tanjung Intan Tanjung Intan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
5.	Branch Jamrud Nilam Mirah Jamrud Nilam Mirah Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
6.	Branch Tanjung Wangi Tanjung Wangi Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
7.	Branch Bumiharjo Bagendang Bumiharjo Bagendang Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
8.	Branch Trisakti Trisakti Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
9.	Branch Makassar Makassar Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
10.	Branch Balikpapan Balikpapan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
11.	Branch Gresik Gresik Branch	Global Certification Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	13 Maret 2027 March 13, 2027

No.	Unit Kerja Work Unit	Badan atau Lembaga yang Memberikan Certification Body	Mulai Berlaku Effective Date	Selesai Berlaku Expiry Date
12.	Branch Tanjung Emas Tanjung Emas Branch	Global Certification Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	13 Maret 2027 March 13, 2027
13.	Branch Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Branch	TUV NORD Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
14.	Branch Tanjung Pinang Tanjung Pinang Branch	TUV NORD Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
15.	Branch Sibolga Sibolga Branch	TUV NORD Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 I OHS Management System				
1.	Kantor Pusat Head Office	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
2.	Branch Belawan Belawan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
3.	Branch Dumai Dumai Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
4.	Branch Tanjung Intan Tanjung Intan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
5.	Branch Jamrud Nilam Mirah Jamrud Nilam Mirah Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
6.	Branch Tanjung Wangi Tanjung Wangi Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
7.	Branch Bumiharjo Bagendang Bumiharjo Bagendang Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
8.	Branch Makassar Makassar Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
9.	Branch Trisakti Trisakti Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
10.	Branch Balikpapan Balikpapan Branch	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 I Government Regulation No. 50 of 2012 OHS Management System				
1.	Kantor Pusat Head Office	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower		
2.	Branch Belawan Belawan Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
3.	Branch Dumai Dumai Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
4.	Branch Tanjung Intan Tanjung Intan Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
5.	Branch Jamrud Nilam Mirah Jamrud Nilam Mirah Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
6.	Branch Tanjung Wangi Tanjung Wangi Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	9 Juni 2023 June 9, 2023	8 Juni 2026 June 8, 2026
7.	Branch Bumiharjo Branch Bumiharjo	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
8.	Branch Bagendang Bagendang Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	13 Mei 2022 May 13, 2022	12 Mei 2025 May 12, 2025
9.	Branch Balikpapan Balikpapan Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
10.	Branch Lhokseumawe Lhokseumawe Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	9 Juni 2023 June 9, 2023	8 Juni 2026 June 8, 2026
11.	Branch Malahayati Malahayati Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	9 Juni 2023 June 9, 2023	8 Juni 2026 June 8, 2026
12.	Branch Gresik Gresik Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	13 Mei 2022 May 13, 2022	12 Mei 2025 May 12, 2025

No.	Unit Kerja Work Unit	Badan atau Lembaga yang Memberikan Certification Body	Mulai Berlaku Effective Date	Selesai Berlaku Expiry Date
13.	Branch Tanjung Emas Tanjung Emas Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	9 Juni 2023 June 9, 2023	8 Juni 2026 June 8, 2026
14.	Branch Lembar Lembar Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	9 Juni 2023 June 9, 2023	8 Juni 2026 June 8, 2026
15.	Branch Tanjung Pinang Tanjung Pinang Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	9 Juni 2023 June 9, 2023	8 Juni 2026 June 8, 2026
16.	Branch Bima Badas Bima Badas Branch	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan I Anti-Bribery Management System				
1.	Kantor Pusat Head Office	TUV NORD Indonesia	26 Mei 2023 May 26, 2023	25 Mei 2026 May 25, 2026
ISPS CODE Sistem Manajemen Keamanan Pelabuhan I Port Security Management System				
1.	Branch Belawan Belawan Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	26 Maret 2025 March 26, 2025	13 Januari 2030 January 13, 2030
2.	Branch Dumai Dumai Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	18 Maret 2021 March 18, 2021	18 Januari 2026 January 18, 2026
3.	Branch Lhokseumawe Lhokseumawe Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	21 Oktober 2021 October 21, 2021	5 September 2026 September 5, 2026
4.	Branch Malahayati Malahayati Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	6 Oktober 2021 October 6, 2021	6 September 2026 September 6, 2026
5.	Branch Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	20 September 2021 September 20, 2021	25 Agustus 2026 August 25, 2026
6.	Branch Tanjung Pinang (Sei Kolak Kijang) Tanjung Pinang Branch (Sei Kolak Kijang)	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	14 Juni 2024 June 14, 2024	21 April 2029 April 21, 2029
7.	Branch Jamrud Nilam Mirah Jamrud Nilam Mirah Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	19 November 2024 November 19, 2024	26 November 2029 November 26, 2029
8.	Branch Tanjung Intan Tanjung Intan Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	19 November 2021 November 19, 2024	11 August 2026 August 11, 2026
9.	Branch Gresik Gresik Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	5 Februari 2024 February 5, 2024	2 Februari 2029 February 2, 2029
10.	Branch Tanjung Emas Tanjung Emas Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	21 June 2022 June 21, 2022	23 Agustus 2026 August 23, 2026
11.	Branch Trisakti Trisakti Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	23 Januari 2025 January 23, 2025	30 Desember 2029 December 30, 2029
12.	Branch Bagendang Bagendang Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	26 Februari 2024 February 26, 2024	14 November 2028 November 14, 2028
13.	Branch Tanjung Wangi Tanjung Wangi Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	14 Maret 2024 March 14, 2024	19 Maret 2028 March 19, 2028
14.	Branch Makassar Makassar Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	9 Desember 2025 December 9, 2025	9 November 2030 November 9, 2030
15.	Branch Balikpapan Balikpapan Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	27 Maret 2024 March 27, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027
16.	Branch Pare-Pare Pare-Pare Branch	DIRJENHUBLA - Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai DIRJENHUBLA - Directorate of Maritime and Coast Guard	15 Agustus 2022 August 15, 2022	30 Januari 2027 January 30, 2027

Informasi Website Perusahaan
Information on Corporate Website



Perusahaan memiliki situs web resmi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan terhadap publik yang menyajikan informasi secara komunikatif dan terkini mengenai Perusahaan, melalui situs web resmi Perusahaan dengan alamat www.pelindomultiterminal.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi Perusahaan yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, dengan mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Perusahaan kepada khalayak luas, sesuai dengan Prinsip Keterbukaan sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

The Company has an official website as one of the means to fulfill public disclosure by providing communicative and up-to-date information about the Company through the Company's official website at www.pelindomultiterminal.co.id. This website serves as the Company's official portal, which can be accessed openly, anytime and anywhere, easily and conveniently, with the objective of providing comprehensive, accurate, and current information about the Company to the general public, in accordance with the Principle of Disclosure as mandated by applicable laws and regulations, as well as to enhance the implementation of Good Corporate Governance, particularly for shareholders, customers, the public, the government, and other stakeholders.

Uraian mengenai informasi-informasi yang tersedia pada situs web Perusahaan adalah sebagai berikut:

Descriptions of the information available on the Company's website are as follows:

Nama Kanal Channel Name	Konten Content	
Profil Profile	• Tentang Kami • Anggaran Dasar • Manajemen • Struktur Manajemen • Etika Bisnis	• About Us • Articles of Association • Management • Management Structure • Business Ethics
Layanan Services	• Jenis Layanan • Area Operasional	• Types of Services • Operational Areas
Branch Branches	• PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk. » Balikpapan Car Terminal » Tanjung Priok Car Terminal » Pontianak Car Terminal » Belawan Car Terminal » Makassar Car Terminal • PT Pelabuhan Tanjung Priok » Panjang » Tanjung Pandan » Tanjung Priok » Pangkal Balam » Ciwandan » Cirebon » Palembang » Bengkulu » Jambi » Teluk Bayur » Pontianak	• PT Pelindo Multi Terminal » Tanjung Balai Karimun » Tanjung Pinang » Trisakti » Tanjung Wangi » Malahayati » Parepare » Belawan » Jamrud Nilam Mirah » Makassar » Gresik » Benoa » Lhokseumawe » Lembar Badas » Tanjung Emas » Tanjung Intan » Balikpapan » Bumiharjo Bagendang » Dumai » Bima Badas » Sibolga
Tata Kelola Governance	• Pedoman Tata Kelola Perusahaan • Kode Etik Bisnis • *Whistleblowing System* • Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu • RUPS	• Code of Corporate Governance • Code of Conduct • Whistleblowing System • Integrated Management System Policy • General Meeting of Shareholders
TJSL CSR	Program TJSL	CSR Program
Media	• Siaran Pers • Pemberitaan Media • Laporan	• Press Releases • Media Coverage • Reports
PPID	• Profil • Regulasi • Maklumat • Informasi Berkala • Informasi Serta Merta • Informasi Setiap Saat • Prosedur Permohonan » Pengajuan Permohonan	• Profile • Regulations • Public Notice • Periodic Information • Immediate Information • Information Available at Any Time • Request Procedures » Submitting an Application
E-Proc	Go To Tender	

Situs Web Perusahaan juga telah memiliki *checklist* ketersediaan yang ditetapkan dalam *Annual Report Award*, yaitu:

The Company's Website also has an availability checklist as stipulated in the Annual Report Award, namely:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Remarks
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Information on shareholders until the individual ultimate owner	x	Saat ini belum tersedia, akan segera ditindaklanjuti Currently not available, will be followed up soon
Isi Kode Etik Contents of the Code of Conduct	√	https://pelindomultiterminal.co.id/pages/kode-etik
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) should include at least the agenda items discussed at the GMS, summary of the GMS minutes, and information on important dates, including the GMS announcement date, the GMS notice date, the GMS date, and the announcement date of the summary of GMS minutes.	√	https://pelindomultiterminal.co.id/pages/rups
Laporan keuangan tahunan (3 tahun terakhir) Annual Financial Statements (last 3 years)	√	https://pelindomultiterminal.co.id/pages/annualrep
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of Board of Commissioners and Board of Directors	√	https://pelindomultiterminal.co.id/team
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	√	https://pelindomultiterminal.co.id/pages/pedoman

Keterangan : X = tidak tersedia v = tersedia pada situs web Perusahaan
Note: X = not available v = available on the Company website

PELINDO
MULTI TERMINAL

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management and Discussion Analysis



PMT mencatat pertumbuhan pada kargo curah cair sebesar 4,60%, kendaraan 24,23%, dan hewan 12,82%. Pengelolaan usaha difokuskan pada efisiensi operasional, pengelolaan modal yang *prudent*, serta ekspansi ke kawasan timur Indonesia untuk memperkuat peran dalam konektivitas logistik nasional.
PMT recorded growth of 4.60% in liquid bulk cargo, 24.23% in vehicles, and 12.82% in livestock. Business management is focused on operational efficiency, prudent capital management, and expansion into eastern Indonesia to strengthen the company's role in national logistics connectivity.



04

Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Overview



Perkembangan ekonomi global pada tahun 2025 memperlihatkan ketahanan yang cukup baik di tengah berbagai tantangan eksternal yang masih berlangsung. Meredanya tekanan inflasi di banyak negara, membaiknya rantai pasok global, serta tetap terjaganya aktivitas konsumsi menjadi faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Namun demikian, ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan arah kebijakan ekonomi di berbagai negara masih menjadi faktor yang perlu dicermati oleh pelaku usaha dan industri logistik global.

Dalam *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2025, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada tahun 2025, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih berada di bawah rata-rata historis sebesar 3,7% pada periode 2000–2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan, namun masih dibayangi perlambatan di sejumlah negara utama serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan global. Di sisi lain, IMF memperkirakan inflasi global terus menurun menjadi sekitar 4,2% pada tahun 2025, seiring dengan normalisasi harga energi dan berkurangnya tekanan pada rantai pasok global.

Pada sektor perdagangan internasional, aktivitas perdagangan barang dunia menunjukkan tren pemulihan yang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi perdagangan dan meningkatnya kecenderungan proteksionisme di beberapa

Global economic developments in 2025 demonstrated fairly strong resilience amid various ongoing external challenges. Easing inflationary pressures in many countries, improvements in global supply chains, and sustained consumption activities were factors supporting global economic growth. Nevertheless, geopolitical uncertainty, trade fragmentation, and the direction of economic policies in various countries remain factors that need to be monitored by global business players and the logistics industry.

In the January 2025 edition of the World Economic Outlook Update, the International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth of 3.3% in 2025, relatively stable compared to the previous year, although still below the historical average of 3.7% during the 2000–2019 period. This growth was driven by stronger-than-expected economic performance in the United States, but was still overshadowed by slowdowns in several major economies and increasing uncertainty in global policy. On the other hand, the IMF estimated that global inflation would continue to decline to around 4.2% in 2025, in line with the normalization of energy prices and reduced pressure on global supply chains.

In the international trade sector, global merchandise trade activity showed a more stable recovery trend compared to previous years. Although still facing challenges in the form of trade fragmentation and increasing protectionist tendencies in several countries, global demand for commodities

negara, permintaan global terhadap komoditas dan produk manufaktur tetap tumbuh sehingga menopang aktivitas logistik dan transportasi internasional. Kondisi tersebut turut mendukung peningkatan aktivitas pelabuhan dan distribusi barang di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% sepanjang tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,03%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan mobilitas logistik nasional.

Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang kuat memberikan dampak positif terhadap industri kepelabuhanan dan logistik nasional. Meningkatnya kebutuhan distribusi barang, pengembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur strategis, serta aktivitas ekspor dan impor yang terus berkembang menciptakan peluang bagi operator pelabuhan untuk meningkatkan volume layanan dan memperluas cakupan bisnis. Kondisi tersebut juga memperkuat peran terminal nonpetikemas sebagai simpul penting dalam rantai pasok nasional, khususnya untuk komoditas curah kering, curah cair, barang umum, dan muatan proyek.

Bagi PMT, perkembangan ekonomi global dan nasional sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan asumsi bisnis dan strategi perusahaan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya aktivitas sektor logistik dan pergudangan, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan kawasan industri memberikan peluang bagi Perseroan untuk memperkuat kinerja operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas pangsa pasar pada segmen terminal nonpetikemas. Di sisi lain, Perseroan tetap mencermati berbagai risiko eksternal, termasuk dinamika perdagangan global, fluktuasi harga komoditas, dan perkembangan kondisi geopolitik yang berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan dan logistik di masa mendatang.

Rujukan:

1. IMF – *World Economic Outlook Update: Global Growth: Divergent and Uncertain*, Januari 2025.
2. BPS – Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen

and manufactured products continued to grow, thereby supporting international logistics and transportation activities. These conditions also contributed to increased port activities and cargo distribution in various regions, including Southeast Asia.

Amid these global dynamics, the Indonesian economy demonstrated relatively solid performance. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew by 5.11% throughout 2025, higher than the 5.03% growth recorded in 2024. This growth was supported by sustained household consumption, increased investment, and growth in exports of goods and services. From an industry perspective, the transportation and warehousing sector was among the fastest-growing sectors, reflecting increasing cargo distribution activities and national logistics mobility.

Strong growth in the transportation and warehousing sector had a positive impact on the national port and logistics industry. Increasing demand for cargo distribution, industrial estate development, strategic infrastructure construction, and continuously growing export and import activities created opportunities for port operators to increase service volumes and expand business coverage. These conditions also reinforced the role of non-container terminals as important nodes in the national supply chain, particularly for dry bulk, liquid bulk, general cargo, and project cargo commodities.

For PMT, global and national economic developments throughout 2025 served as one of the bases for formulating the Company's business assumptions and strategies. The stability of national economic growth, high levels of logistics and warehousing sector activities, and the continuation of infrastructure and industrial estate development provide opportunities for the Company to strengthen operational performance, improve service quality, and expand market share in the non-container terminal segment. On the other hand, the Company continues to monitor various external risks, including global trade dynamics, commodity price fluctuations, and geopolitical developments that may affect trade and logistics activities in the future.

References:

1. IMF – World Economic Outlook Update: Global Growth: Divergent and Uncertain, January 2025.
2. BPS – Indonesia's Economy Grew by 5.11 Percent in 2025

Strategi dan Inisiatif Strategis Tahun 2025
Strategies and Strategic Initiatives in 2025

Pada tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) memasuki tahap krusial dalam implementasi roadmap strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, yaitu fase *Enhancing Internal Business and Service Excellent*. Tahap ini menandai fokus Perseroan dalam meningkatkan bisnis internal dan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan non-petikemas di Pelindo Grup. Rincian strategi yang dilakukan pada tahun 2025-2026, yaitu melakukan penataan struktur korporasi PMT Grup, melakukan pembaruan model dan kesepakatan bisnis, implementasi strategi perluasan market share di captive market, standardisasi operasional dan layanan NPK di seluruh wilayah, melakukan perbaikan data integration guna menunjang performa bisnis, dan meningkatkan kapabilitas SDM PMT Grup. Dukungan *stakeholder* dari Internal Pelindo Grup (*Holding*, Anak Usaha, dan Regional) dibutuhkan utamanya pada pelaksanaan strategi menghadapi dampak dari revisi UU Pelayaran, penguatan layanan PMT, dan penyelesaian isu-isu korporasi di PMT, terutama terkait dengan pemurnian bisnis.

Pelaksanaan agenda strategis tersebut didukung oleh penerapan kerangka *House of Strategy* sebagai landasan dalam memastikan keselarasan antara prioritas bisnis Perseroan dan arah strategis Pelindo Grup. Kerangka ini mencakup pilar korporasi, tiga *strategic pillars* utama, meliputi:

1. Pilar Korporasi – Penataan Struktur Korporasi dan Bisnis yang Fokus serta Efisien, mencakup: Pengawalan Penyusunan Peraturan Turunan terkait Revisi UU No. 17/2008 tentang Pelayaran untuk mempertahankan Positioningdan Business Sustainability Perusahaan; Penataan dan Optimalisasi Model Bisnis (Struktur Korporasi).
2. Pilar Strategis 1 - *Services, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio*, mencakup: Pengembangan Perencanaan Portofolio Bisnis pada Setiap Cabang; Pengembangan Terminal berbasis Layanan, Komoditas, Kemasan, dan/atau Kawasan Industri; Pengembangan Layanan Kepelabuhanan untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah; Pengembangan Layanan Pelabuhan untuk mendukung IKN.
3. Pilar Strategis 2 - *Business Partnership and Synergy*, mencakup: Perubahan Status menjadi Dedicated Terminal atau Terminalisasi; Pengembangan Layanan Operasi di Luar Area Pelindo Grup; Pengembangan Layanan Bongkar Muat *Ship to Ship Handling*; *Joint Marketing* Layanan Kepelabuhanan.
4. Pilar Strategis 3 - *Operational and Commercial Excellence*, mencakup: Standardisasi, Sistemasi, dan Integrasi Operasional Non-Petikemas; Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan; Optimalisasi Aset; Pengembangan *Sustainable Ports*; Standardisasi CRM dan Penerapan KAM (*Key Account Manager*); Peningkatan

In 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) entered a crucial stage in the implementation of its five-year strategic roadmap as outlined in the 2025–2029 Long-Term Corporate Plan (RJPP), namely the Enhancing Internal Business and Service Excellent phase. This stage marks the Company's focus on strengthening its internal business and improving the coverage and quality of non-container services within the Pelindo Group. The detailed strategies implemented during 2025–2026 include restructuring the PMT Group's corporate structure, updating business models and agreements, implementing strategies to expand market share in captive markets, standardizing non-container operations and services across all regions, improving data integration to support business performance, and enhancing the capabilities of PMT Group's human resources. Stakeholder support from within the Pelindo Group (Holding, Subsidiary, and Regional) is needed, particularly in implementing strategies to address the impacts of revisions to the Shipping Law, strengthening PMT services, and resolving corporate issues within PMT, especially those related to business purification.

The implementation of this strategic agenda is supported by the application of the House of Strategy framework as a foundation for ensuring alignment between the Company's business priorities and the strategic direction of the Pelindo Group. This framework includes a corporate pillar and three main strategic pillars, comprising:

1. Corporate Pillar – Focused and Efficient Corporate and Business Structure Arrangement, including: Oversight of the Formulation of Implementing Regulations Related to the Revision of Law No. 17/2008 concerning Shipping to maintain the Company's Positioning and Business Sustainability; Business Model Arrangement and Optimization (Corporate Structure).
2. Strategic Pillar 1 – Services, Cargo, and Commodity Focused Business Portfolio, including: Development of Business Portfolio Planning at Each Branch; Development of Terminals Based on Services, Commodities, Packaging, and/or Industrial Estates; Development of Port Services to Support Government Priority Programs; Development of Port Services to Support IKN.
3. Strategic Pillar 2 – Business Partnership and Synergy, including: Change of Status to Dedicated Terminal or Terminalization; Development of Operational Services Outside the Pelindo Group Area; Development of Ship-to-Ship Handling Loading and Unloading Services; Joint Marketing of Port Services.
4. Strategic Pillar 3 – Operational and Commercial Excellence, including: Standardization, Systemization, and Integration of Non-Container Operations; Development of Port Infrastructure and Equipment; Asset Optimization; Development of Sustainable Ports; CRM Standardization and Implementation of KAM (Key Account Manager);

Corporate Branding & Market Communication; Optimalisasi Skeme Komersial dengan Mitra dan Pelanggan.

Enhancement of Corporate Branding and Market Communication; Optimization of Commercial Schemes with Partners and Customers.



Keberhasilan pelaksanaan ketiga pilar strategis PMT ditopang oleh *key enablers.* Pilar ini mencakup tiga aspek utama, yaitu HR & *Organizational Development* untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam rangka mendorong kinerja bisnis, *Technology and Innovation* untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam *data-driven decision making*, dan *Strategic Financing* untuk memastikan kecukupan pendanaan. Adapun inisiatif strategisnya, mencakup:

The successful implementation of PMT three strategic pillars is supported by key enablers. This pillar encompasses three main aspects, namely HR & Organizational Development to enhance human resource capacity and capability in order to drive business performance, Technology and Innovation to increase the utilization of technology and information in data-driven decision making, and Strategic Financing to ensure adequate funding. The strategic initiatives include:

1. Penataan Struktur dan Tata Kelola Organisasi;
2. Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM;
3. Optimalisasi Fungsi *Enterprise Architecture* dan IT *Governance*;
4. Pengembangan Infrastruktur IT dan Implementasi *Security System*;
5. Pengembangan *Smart Ports* melalui Master Data Management dan *Data Analytics*;
6. Program Budaya Inovasi Berkelanjutan;
7. Pengadaan Terpusat; dan
8. Optimalisasi Pendanaan dan *Financing Cost*.

Melalui implementasi *House of Strategy* yang terintegrasi, didukung oleh pelaksanaan tiga pilar strategis dan penguatan *key enablers*, PMT berupaya membangun fondasi yang lebih kokoh untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berbagai inisiatif strategis yang dijalankan pada tahun 2025 tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja operasional dan komersial, tetapi juga memperkuat daya saing Perseroan dalam menghadapi dinamika industri yang terus berkembang. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta sinergi yang kuat di lingkungan Pelindo Grup, PMT optimis dapat mewujudkan transformasi bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan non-petikemas, serta menciptakan nilai tambah yang optimal bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan.

1. Organizational Structure and Governance Arrangement;
2. Enhancement of Human Resource Competencies and Capabilities;
3. Optimization of Enterprise Architecture and IT Governance Functions;
4. Development of IT Infrastructure and Implementation of Security Systems;
5. Development of Smart Ports through Master Data Management and Data Analytics;
6. Sustainable Innovation Culture Program;
7. Centralized Procurement; and
8. Optimization of Funding and Financing Costs.

Through the implementation of an integrated House of Strategy, supported by the execution of the three strategic pillars and the strengthening of key enablers, PMT strives to build a stronger foundation for achieving sustainable business growth. The various strategic initiatives undertaken in 2025 are not only aimed at improving operational and commercial performance, but also at strengthening the Company's competitiveness in responding to continuously evolving industry dynamics. With the support of all stakeholders and strong synergies within the Pelindo Group, PMT is optimistic that it can realize sustainable business transformation, improve the quality of non-container services, and create optimal added value for customers, shareholders, and all stakeholders.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview by Business Segment

PMT sebagai salah satu Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cluster Non Petikemas bergerak di bidang Pelayanan Jasa Terminal Non Petikemas serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Hal ini juga tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 19 Tanggal 29 September 2021. Cakupan layanan PMT adalah layanan barang non-petikemas, seperti curah kering, curah cair, hewan, dan sebagainya.

PMT, as one of the Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Non-Container Cluster, operates in the field of Non-Container Terminal Services and the utilization of owned resources. This is also stipulated in the Deed of Establishment of PT Pelindo Multi Terminal Limited Liability Company Number 19 dated September 29, 2021. PMT's service scope covers non-container cargo services, such as dry bulk, liquid bulk, livestock, and others.

PERKEMBANGAN KAPASITAS PRODUKSI

Kinerja Arus Barang Terminal Non Petikemas

Kinerja trafik merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat aktivitas operasional serta kontribusi PMT dalam mendukung kelancaran rantai pasok logistik nasional. Pergerakan trafik, baik dari sisi arus barang maupun kunjungan kapal menggambarkan volume jasa yang diberikan kepada pelanggan, serta menjadi barometer kinerja, efisiensi, dan daya saing terminal yang dikelola Perusahaan. Dengan demikian, perkembangan trafik menjadi landasan penting dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan arah pengembangan bisnis Perusahaan.

PRODUCTION CAPACITY DEVELOPMENT

Non-Container Terminal Cargo Throughput Performance

Traffic performance is a key indicator reflecting the level of operational activities and PMT contribution to supporting the smooth flow of the national logistics supply chain. Traffic movements, both in terms of cargo throughput and vessel calls, illustrate the volume of services provided to customers and serve as a barometer of the performance, efficiency, and competitiveness of the terminals managed by the Company. Accordingly, traffic developments constitute an important basis for evaluating performance and determining the direction of the Company's business development.

Kinerja Arus Barang/Trafik Terminal Non-Petikemas 2024-2025
Cargo Flow/Traffic Performance of Non-Container Terminals 2024–2025

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)	
General Cargo	m^3	**5.044.400**	5.381.767	-6,27%	↓
	Ton	**17.049.252**	19.513.435	-12,63%	↓
Bag Cargo	Ton	**6.740.092**	5.353.689	25,90%	↑
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	**30.378.507**	29.041.429	4,60%	↑
Curah Kering Dry Bulk	Ton	**59.049.728**	59.078.912	-0,05%	↓
Gas	Ton	**-**	-	-	-
	MMBTU	**15.943.575**	13.971.183	14,12%	↑
Kendaraan Vehicles	Unit	**2.286.724**	1.840.789	24,23%	↑
Hewan Livestock	Ekor Animals	**684.151**	606.423	12,82%	↑
Petikemas Containers	Box	**451.727**	407.359	10,89%	↑
	TEUS	**489.198**	437.090	11,92%	↑

Kinerja Arus Barang/Trafik Terminal Non-Petikemas 2024-2025
Cargo Flow/Traffic Performance of Non-Container Terminals 2024–2025

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)	
Total	Ton	113.217.579	112.987.465	0,20%	↑
	m^3	5.044.400	5.381.767	-6,27%	↓
	MMBTU	15.943.575	13.971.183	14,12%	↑
	Unit	2.286.724	1.840.789	24,23%	↑
	Ekor Animals	684.151	606.423	12,82%	↑
	Box	451.727	407.359	10,89%	↑
	TEUS	489.198	437.090	11,92%	↑

Peningkatan volume arus barang yang tercatat sepanjang tahun 2025 mencerminkan tumbuhnya permintaan terhadap jasa terminal non-petikemas sekaligus menguatnya peran ekonomi Perusahaan dalam mendukung rantai pasok logistik nasional.

General Cargo
Trafik *general cargo* mengalami penurunan pada tahun 2025. Volume dalam satuan meter kubik (m^3) tercatat sebesar 5.044.400 m^3 atau turun 6,27% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5.381.767 m^3. Sementara itu, volume berdasarkan tonase mencapai 17.049.252 ton atau menurun 12,63% dari 19.513.435 ton pada tahun sebelumnya.

Bag Cargo
Bag cargo mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan volume mencapai 6.740.092 ton, meningkat 25,90% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5.353.689 ton.

Curah Cair
Volume curah cair pada tahun 2025 mencapai 30.378.507 ton, meningkat 4,60% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 29.041.429 ton.

Curah Kering
Trafik curah kering relatif stabil dengan volume sebesar 59.049.728 ton dibandingkan 59.078.912 ton pada tahun sebelumnya, atau mengalami penurunan tipis sebesar 0,05%.

Gas
Volume komoditas gas yang diukur dalam satuan energi mencapai 15.943.575 MMBTU, meningkat 14,12% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 13.971.183 MMBTU.

Kendaraan (Ro-Ro)
Jumlah kendaraan yang dilayani Perusahaan mencapai 2.286.724 unit pada tahun 2025, meningkat 24,23% dibandingkan 1.840.789 unit pada tahun sebelumnya.

Hewan
Trafik pengangkutan hewan mencapai 684.151 ekor atau meningkat 12,82% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 606.423 ekor.

The increase in cargo flow volume recorded throughout 2025 reflects the growing demand for non-container terminal services and the Company's strengthening economic role in supporting the national logistics supply chain.

General Cargo
General cargo traffic experienced a decrease in 2025. Volume in cubic meters (m^3) was recorded at 5,044,400 m^3, a 6.27% decrease compared to 5,381,767 m^3 in 2024. Meanwhile, volume by tonnage reached 17,049,252 tons, a 12.63% decrease from 19,513,435 tons in the previous year.

Bag Cargo
Bag cargo recorded positive growth, reaching 6,740,092 tons, a 25.90% increase compared to 5,353,689 tons in 2024.

Liquid Bulk
Liquid bulk volume in 2025 reached 30,378,507 tons, a 4.60% increase compared to 29,041,429 tons in 2024.

Dry Bulk
Dry bulk traffic remained relatively stable at 59,049,728 tons compared to 59,078,912 tons the previous year, a slight decrease of 0.05%.

Gas
Gas commodity volume, measured in energy units, reached 15,943,575 MMBTU, increased by 14.12% compared to 13,971,183 MMBTU in 2024.

Vehicles (Ro-Ro)
The number of vehicles served by the Company reached 2,286,724 units in 2025, a 24.23% increase compared to 1,840,789 units the previous year.

Livestock
Livestock transport traffic reached 684,151 animals, an increase of 12.82% compared to 606,423 animals in 2024.

Petikemas

Meskipun bukan merupakan fokus utama bisnis Perusahaan, trafik petikemas tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Volume petikemas tercatat sebesar 451.727 box atau meningkat 10,89% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 407.359 box. Sementara itu, dalam satuan TEUs, volume mencapai 489.198 TEUs atau tumbuh 11,92% dibandingkan 437.090 TEUs pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, volume arus barang yang ditangani Perseroan pada tahun 2025 mencapai 113.217.579 ton, meningkat 0,20% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 112.987.465 ton atau mencapai 90,55% dari RKAP 2025 yang ditetapkan sebesar 125.037.419 tom. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada segmen *bag cargo*, curah cair, gas, kendaraan, hewan, dan petikemas, yang mampu mengimbangi penurunan pada segmen *general cargo* serta stabilnya trafik curah kering.

Produksi Layanan Terminal Non-Petikemas

Produksi jasa layanan terminal non-petikemas merupakan salah satu indikator utama yang menggambarkan tingkat aktivitas operasional Perusahaan. Capaian produksi ini berasal dari pemanfaatan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan untuk mendukung kelancaran arus barang dan kapal, sehingga menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas operasional, produktivitas aset, serta kontribusi Perusahaan terhadap kelancaran sistem logistik nasional. Secara umum, komponen kinerja produksi jasa PMT terdiri atas:

1. Dermaga, yaitu pemanfaatan fasilitas sandar kapal yang dihitung berdasarkan waktu tambat dan dimensi kapal;
2. Gudang Penumpukan Diusahakan, yakni jasa penyimpanan sementara barang di dalam gudang yang dikelola Perusahaan;
3. Lapangan Penumpukan Diusahakan, yang mencakup penggunaan area terbuka untuk penumpukan kargo di luar gudang;
4. Bongkar Muat, yang mencakup lima jenis layanan utama:
    a. *Stevedoring*, penanganan barang dari kapal ke dermaga (dan sebaliknya);
    b. *Cargodoring*, pemindahan barang dari dermaga ke tempat penumpukan atau gudang;
    c. *Receiving/Delivery*, pengiriman atau penerimaan barang dari dan ke pengguna jasa;
    d. Kerja Sama Pelayanan Bongkar Muat, yaitu kolaborasi operasional dengan mitra kerja dalam aktivitas B/M; dan
    e. Ro-Ro, penanganan kargo kendaraan yang menggunakan sistem *roll-on/roll-off*.

Kontribusi masing-masing komponen produksi jasa memberikan gambaran mengenai tingkat utilisasi fasilitas serta efektivitas operasional terminal yang dikelola Perusahaan. Melalui pemantauan kinerja secara berkala pada setiap komponen, PMT dapat mengidentifikasi peluang perbaikan, menyusun langkah-langkah peningkatan layanan, serta memastikan tersedianya layanan terminal yang andal, efisien, dan berdaya saing. Kinerja produksi yang optimal juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha Perusahaan.

Containers

Although it is not the Company's primary business focus, container traffic continued to show positive growth. Container volume reached 451,727 boxes, a 10.89% increase compared to 407,359 boxes in 2024. Meanwhile, in terms of TEUs, the volume reached 489,198 TEUs, an 11.92% increase compared to 437,090 TEUs in the previous year.

Overall, the volume of cargo handled by the Company in 2025 reached 113,217,579 tons, an increase of 0.20% compared to the 2024 realization of 112,987,465 tons or reaching 90.55% of the 2025 RKAP set at 125,037,419 tons. This increase was driven by growth in the bag cargo, liquid bulk, gas, vehicle, livestock, and container segments, which were able to offset the decline in the general cargo segment and stable dry bulk traffic.

Non-Container Terminal Service Production

The production of non-container terminal services is one of the key indicators reflecting the level of the Company's operational activities. This production performance results from the utilization of various facilities and services provided to support the smooth flow of cargo and vessels, thereby serving as an important parameter in assessing operational effectiveness, asset productivity, and the Company's contribution to the smooth functioning of the national logistics system. In general, PMT's production performance components consist of:

1. Wharf, namely the utilization of vessel berthing facilities, measured based on berthing time and vessel dimensions.
2. Managed Warehouse Storage, namely temporary storage services for goods within warehouses managed by the Company.
3. Managed Yard Storage, namely the use of open areas for cargo stacking outside the warehouse.
4. Loading and Unloading, consisting of five main service types:
    a. Stevedoring, handling of goods from ship to dock and vice versa;
    b. Cargodoring, moving goods from dock to storage or warehouse;
    c. Receiving/Delivery, delivery or receipt of goods from/to customers;
    d. Joint Cargo Handling Services, operational collaboration with partners in cargo handling; and
    e. Ro-Ro, handling vehicle cargo using roll-on/roll-off systems.

Each component directly contributes to total service output and reflects the level of facility utilization and terminal operational effectiveness. By periodically monitoring performance achievements in each component, PMT can identify improvement areas, develop service enhancement strategies, and ensure reliable and competitive terminal service delivery. Solid production performance also serves as a crucial foundation for revenue growth and long-term business sustainability.

Kinerja Produksi Layanan Jasa Terminal Non-Petikemas (Konsolidasi)
Production Performance of Non-Container Terminal Services (Consolidated)

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
				Nominal Nominal	Persentase % Percentage %	
Dermaga Wharf	Ton	99.034.088	96.587.558	2.446.530	2,53%	↑
	m^3	5.067.591	5.177.018	(109.427)	-2,11%	↓
	Unit	1.368.029	1.216.491	151.538	12,46%	↑
Gudang Penumpukan Diusahakan Managed Warehouse Storage	Ton/Hari Ton/Day	3.104.480	3.147.845	(43.365)	-1,38%	↓
	m^3/Hari m^3/Day	366.710	205.645	161.066	78,32%	↑
Lapangan Penumpukan Diusahakan Managed Yard Storage	Ton/Hari Ton/Day	6.479.686	7.600.044	(1.120.358)	-14,74%	↓
	m^3/Hari m^3/Day	4.960.562	4.824.631	135.931	2,82%	↑
	Unit/Hari Unit/Day	14.385	7.606	6.779	89,13%	↑
Bongkar Muat Loading and Unloading						
Stevedoring	Ton	53.186.493	57.501.888	(4.315.395)	-7,50%	↓
	m^3	1.214.988	1.436.536	(221.548)	-15,42%	↓
	Unit	160.251	83.599	76.652	91,69%	↑
Cargodoring	Ton	5.943.425	2.495.240	3.448.185	138,19%	↑
	m^3	88.801	226.467	(137.666)	-60,79%	↓
	Unit	382.691	338.934	43.757	12,91%	↑
Receiving/Delivery	Ton	55.740	68.022	(12.282)	-18,06%	↓
	m^3	92.499	227.215	(12.282)	-59,29%	↓
	Unit	420.669	373.070	47.599	12,76%	↑
Kerja Sama Pelayanan B/M Joint Cargo Handling Services	Ton	55.320.578	48.217.444	7.103.134	14,73%	↑
	m^3	3.262.713	2.610.102	652.611	25,00%	↑
Ro-Ro	Unit	668.738	497.868	170.870	34,32%	↑

Pada tahun 2025, kinerja produksi jasa layanan terminal non-petikemas menunjukkan hasil yang beragam di berbagai lini layanan. Sejumlah indikator mencatat pertumbuhan yang positif, sementara beberapa lainnya mengalami penurunan seiring dengan perubahan karakteristik kargo dan dinamika aktivitas logistik. Berikut penjabaran kinerja berdasarkan masing-masing komponen:

Dermaga

Pemanfaatan jasa dermaga menunjukkan kinerja yang relatif positif. Volume barang yang melalui dermaga mencapai 99,03 juta ton, meningkat 2,53% dibandingkan tahun 2024 sebesar 96,59 juta ton. Jumlah unit yang dilayani juga meningkat 12,46% menjadi 1.368.029 unit. Volume berdasarkan meter kubik (m^3) mengalami penurunan 2,11% menjadi 5.067.591 m^3, yang mengindikasikan adanya perubahan komposisi kargo yang ditangani menuju barang dengan densitas yang lebih rendah.

In 2025, the production performance of non-container terminal services showed mixed results across various lines of service. Several indicators recorded positive growth, while others were declining in line with changes in cargo characteristics and the dynamics of logistics activities. The following is a breakdown of performance by each component:

Wharf

The utilization of port services showed relatively positive performance. The volume of goods passing through the port reached 99.03 million metric tons, an increase of 2.53% compared to 99.59 million metric tons in 2024. The number of units served also increased by 12.46% to 1,368,029 units. Volume measured in cubic meters (m^3) decreased by 2.11% to 5,067,591 m^3, indicating a shift in the composition of handled cargo toward goods with lower density.

Gudang Penumpukan Diusahakan

Kinerja gudang penumpukan menunjukkan tren yang bervariasi. Volume dalam satuan ton per hari tercatat sebesar 3,10 juta ton/hari atau menurun 1,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, volume dalam satuan m^3 per hari meningkat signifikan sebesar 78,32% menjadi 366.710 m^3/hari. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya aktivitas penyimpanan barang yang membutuhkan kapasitas ruang lebih besar meskipun tonasenya relatif stabil.

Lapangan Penumpukan Diusahakan

Pemanfaatan lapangan penumpukan mengalami penurunan dalam satuan ton per hari sebesar 14,74% menjadi 6,48 juta ton/hari. Namun, volume dalam satuan m^3 per hari meningkat 2,82% menjadi 4,96 juta m^3/hari, sementara jumlah unit per hari melonjak 89,13% menjadi 14.385 unit/hari. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas penumpukan barang satuan atau kendaraan yang memerlukan ruang lebih luas meskipun tonase keseluruhan menurun.

Bongkar Muat

1. *Stevedoring*
   Kinerja *stevedoring* mengalami penurunan dari sisi tonase dan volume. Volume bongkar muat tercatat sebesar 53,19 juta ton atau turun 7,50% dibandingkan tahun 2024. Volume dalam satuan m^3 mengalami peningkatan 15,42% menjadi 1.214.988 m^3. Di sisi lain, jumlah unit yang ditangani meningkat signifikan sebesar 91,69% menjadi 160.251 unit, yang menunjukkan meningkatnya penanganan barang dalam bentuk unit atau kendaraan.
2. *Cargodoring*
   Layanan *cargodoring* mencatat pertumbuhan yang sangat kuat. Volume tonase meningkat 138,19% menjadi 5,94 juta ton, sedangkan jumlah unit meningkat 12,91% menjadi 382.691 unit. Sebaliknya, volume dalam satuan m^3 mengalami penurunan 60,79% menjadi 88.801 m^3. Hal ini mengindikasikan peningkatan penanganan barang dengan densitas tinggi yang menghasilkan tonase lebih besar meskipun volume ruang yang digunakan lebih rendah.
3. *Receiving/Delivery*
   Aktivitas *receiving/delivery* mengalami penurunan pada sebagian besar indikator. Volume tonase turun 18,06% menjadi 55.740 ton dan volume m^3 turun 59,29% menjadi 92.499 m^3. Meskipun demikian, jumlah unit yang dilayani meningkat 12,76% menjadi 420.669 unit.
4. Kerja Sama Pelayanan Bongkar Muat
   Kerja sama pelayanan bongkar muat menunjukkan pertumbuhan yang positif pada seluruh indikator utama. Volume tonase meningkat 14,73% menjadi 55,32 juta ton, sedangkan volume m^3 tumbuh 25,00% menjadi 3.262.713 m^3. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kolaborasi dengan mitra kerja dalam mendukung produktivitas layanan bongkar muat.
5. Ro-Ro
   Layanan Ro-Ro mencatat pertumbuhan yang kuat dengan jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 668.738 unit atau meningkat 34,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas distribusi kendaraan dan semakin pentingnya peran layanan Ro-Ro dalam mendukung mobilitas logistik nasional.

Managed Warehouse Storage

The performance of warehouse storage showed a mixed trend. Daily volume in tons was recorded at 3.10 million tons/day, a 1.38% decrease compared to the previous year. Conversely, daily volume in cubic meters increased significantly by 78.32% to 366,710 cubic meters/day. This increase indicates increased storage activity requiring larger storage space, despite relatively stable tonnage.

Managed Yard Storage

The utilization of yard storage decreased by 14.74% to 6.48 million tons/day. However, daily volume in cubic meters increased by 2.82% to 4.96 million cubic meters/day, while the number of units per day increased sharply by 89.13% to 14,385 units/day. This situation indicates increased storage activity for individual goods or vehicles, requiring more space, despite a decrease in overall tonnage.

Loading and Unloading

1. Stevedoring
   Stevedoring performance decreased in terms of tonnage and volume. The volume of loading and unloading was recorded at 53.19 million tons, a decrease of 7.50% compared to 2024. The volume in m^3 units decreased by 15.42% to 1,214,988 m^3. Meanwhile, the number of units handled increased significantly by 91.69% to 160,251 units, indicating an increase in the handling of goods in the form of units or vehicles.
2. Cargodoring
   Cargodoring services recorded very strong growth. Tonnage volume increased 138.19% to 5.94 million tons, while the number of units increased 12.91% to 382,691 units. Conversely, volume in cubic meters decreased by 60.79% to 88,801 cubic meters. This indicates an increase in the handling of high-density goods, resulting in greater tonnage despite the reduced space used.
3. Receiving/Delivery
   Receiving/delivery activities decreased across most indicators. Tonnage volume decreased 18.06% to 55,740 tons, and cubic meter volume decreased 59.29% to 92,499 cubic meters. However, the number of units served increased 12.76% to 420,669 units.
4. Joint Cargo Handling Services
   Collaboration in loading and unloading services showed positive growth across all key indicators. Tonnage volume increased 14.73% to 55.32 million tons, while cubic meter volume grew 25.00% to 3,262,713 cubic meters. This increase reflects the effectiveness of collaboration with partners in supporting the productivity of loading and unloading services.
5. Ro-Ro
   Ro-Ro services recorded strong growth, with the number of vehicles served reaching 668,738 units, a 34.32% increase compared to the previous year. This increase demonstrates the high level of vehicle distribution activity and the increasingly important role of Ro-Ro services in supporting national logistics mobility.

Secara keseluruhan, kinerja produksi jasa PMT pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan operasional yang baik di tengah dinamika industri. Pertumbuhan pada layanan dermaga, cargodoring, kerja sama pelayanan bongkar muat, dan Ro-Ro berhasil memperkuat kinerja operasional Perseroan. Sementara itu, penurunan pada beberapa indikator tertentu menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan efektivitas layanan, optimalisasi fasilitas, dan penyesuaian terhadap kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Kinerja tersebut mencerminkan komitmen PMT dalam menjaga kualitas layanan serta memperkuat perannya sebagai operator terminal non-petikemas yang andal dan berdaya saing.

Overall, PMT's service production performance in 2025 demonstrated strong operational resilience amidst industry dynamics. Growth in wharf services, cargodoring, joint cargo handling services, and Ro-Ro services successfully strengthened the Company's operational performance. Meanwhile, declines in certain indicators serve as a basis for evaluation to continuously improve service effectiveness, optimize facilities, and adapt to evolving customer needs. This performance reflects PMT's commitment to maintaining the quality of its services and strengthening its role as a reliable and competitive non-container terminal operator.

Kekuatan Alat Produksi

Keberhasilan operasional terminal non-petikemas sangat bergantung pada kesiapan dan keandalan peralatan yang digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan. Beragam alat bongkar muat, seperti *crane, forklift, reach stacker, conveyor* curah, dan trailer kendaraan memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran arus barang dan kapal di area terminal. Ketersediaan peralatan yang memadai tidak hanya mendukung produktivitas operasional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan, percepatan waktu penanganan kargo, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan.

Production Equipment Capacity

The successful operation of non-container terminals is highly dependent on the readiness and reliability of the equipment used to support service activities. Various cargo handling equipment, such as cranes, forklifts, reach stackers, bulk conveyors, and vehicle trailers, play an important role in supporting the smooth flow of cargo and vessels within terminal areas. The availability of adequate equipment not only supports operational productivity, but also contributes to improving service quality, accelerating cargo handling times, and optimizing the utilization of port facilities.

Di tengah dinamika volume trafik dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, pengelolaan alat produksi menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga efektivitas operasional. Oleh karena itu, PMT secara konsisten menjalankan program pemeliharaan, modernisasi, standarisasi teknis, serta optimalisasi utilisasi peralatan guna memastikan seluruh aset operasional berada dalam kondisi yang andal, aman, dan siap mendukung kebutuhan layanan.

Amid the dynamics of traffic volumes and continuously evolving customer needs, the management of production equipment has become one of the key factors in maintaining operational effectiveness. Therefore, PMT consistently implements maintenance, modernization, technical standardization, and equipment utilization optimization programs to ensure that all operational assets remain reliable, safe, and ready to support service requirements.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat daya saing usaha, Perseroan terus melakukan pengadaan dan pengembangan alat produksi secara terencana dan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan kapasitas operasional dalam mendukung pertumbuhan bisnis terminal non-petikemas serta memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh wilayah operasional Perseroan.

In line with its commitment to improving service quality and strengthening business competitiveness, the Company continues to procure and develop production equipment in a planned and sustainable manner. This initiative is undertaken to ensure the readiness of operational capacity in supporting the growth of the non-container terminal business and meeting customer needs across all of the Company's operational areas.

Tabel Kekuatan Alat Produksi 2024-2025
Production Equipment Capacity 2024–2025

No	Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
					Nominal Nominal	Persentase % Percentage %	
1	*Harbour Mobile Crane & Harbour Portal Crane*	Unit	14	13	1	7,69%	↑
2	*Container Crane*	Unit	1	1	-	0,00%	-
3	*Fixed Crane*		2	2	-	0,00%	-
4	*FIxed Jib Crane*	Unit	7	7	-	0,00%	-
5	*Gantry Luffing Crane*	Unit	22	22	-	0,00%	-
6	*Gantry Jib Crane*	Unit	11	8	3	37,50%	↑

Tabel Kekuatan Alat Produksi 2024-2025
Production Equipment Capacity 2024–2025

No	Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
					Nominal Nominal	Persentase % Percentage %	
7	*Mobile Crane*	Unit	35	34	1	2,94%	↑
8	*Rubber Tyred Gantry Crane*	Unit	9	9	-	0,00%	-
9	*Conveyor*	Unit	6	5	1	20,00%	↑
10	Pompa CPO CPO Pump	Unit	5	5	-	0,00%	-
11	*Grain Pump*	Unit	2	2	-	0,00%	-
12	*Forklift*	Unit	69	81	(12)	-14,81%	↓
13	*Wheel Loader*	Unit	33	32	1	3,13%	↑
14	*Reach Stacker*	Unit	17	13	4	30,77%	↑
15	*Excavator*	Unit	30	31	(1)	-3,23%	↓
16	*Mini Dozer*	Unit	2	2	-	0,00%	-
17	*Buldozer*	Unit	3	3	-	0,00%	-
18	*Top Loader*	Unit	1	1	-	0,00%	-
19	*Side Loader*	Unit	3	3	-	0,00%	-
20	*Overhead Crane*	Unit	12	12	-	0,00%	-
21	*Dump Truck*	Unit	29	29	-	0,00%	-
22	*Head Truck*	Unit	42	39	3	7,69%	↑
23	*Grab*	Unit	68	61	7	11,48%	↑
24	*Hopper*	Unit	67	61	6	9,84%	↑
25	*Bucket*	Unit	14	14	-	0,00%	-
26	*Rampdoor*	Unit	24	18	6	33,33%	↑
27	Jembatan Timbang Weighbridge	Unit	70	51	19	37,25%	↑
Total		**Unit**	**598**	**559**	**39**	**6,98%**	↑

Sepanjang tahun 2025, jumlah alat produksi yang dimiliki Perseroan tercatat sebanyak 598 unit, meningkat 39 unit atau 6,98% dari 559 unit pada tahun 2024. Penambahan tersebut mencerminkan upaya Perseroan dalam memperkuat kapasitas operasional untuk mendukung pertumbuhan aktivitas terminal non-petikemas serta menjaga keandalan layanan di seluruh wilayah kerja.

Throughout 2025, the number of production equipment owned by the Company reached 598 units, an increase of 39 units or 6.98% from 559 units in 2024. This addition reflects the Company's efforts to strengthen operational capacity in supporting the growth of non-container terminal activities and maintaining service reliability across all operational areas.

Penguatan kapasitas terutama dilakukan pada sejumlah peralatan strategis. Jumlah Harbour Mobile Crane & Harbour Portal Crane meningkat menjadi 14 unit, Gantry Jib Crane bertambah menjadi 11 unit, dan Reach Stacker meningkat menjadi 17 unit. Perseroan juga menambah Conveyor, Wheel Loader, Mobile Crane, Head Truck, Grab, Hopper, Rampdoor, dan Jembatan Timbang guna mendukung kelancaran proses bongkar muat, penanganan kargo, serta aktivitas logistik di terminal.

Capacity enhancement was primarily carried out through the addition of several strategic types of equipment. The number of Harbour Mobile Cranes and Harbour Portal Cranes increased to 14 units, Gantry Jib Cranes rose to 11 units, and Reach Stackers increased to 17 units. The Company also added Conveyors, Wheel Loaders, Mobile Cranes, Head Trucks, Grabs, Hoppers, Rampdoors, and Weighbridges to support the smooth execution of loading and unloading processes, cargo handling, and logistics activities at terminals.

Penambahan yang cukup signifikan terjadi pada Jembatan Timbang yang mencapai 70 unit pada akhir tahun 2025, dibandingkan 51 unit pada tahun sebelumnya. Kenaikan juga terlihat pada Rampdoor yang menjadi 24 unit dari

A significant increase occurred in the number of Weighbridges, which reached 70 units by the end of 2025, compared to 51 units in the previous year. Increases were also recorded in Rampdoors, which rose to 24 units from 18 units, as well as

sebelumnya 18 unit, serta Grab dan Hopper yang masing-masing bertambah menjadi 68 unit dan 67 unit. Penguatan pada kelompok alat tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan efisiensi operasional di berbagai terminal yang dikelola Perseroan.

Grabs and Hoppers, which increased to 68 units and 67 units, respectively. Strengthening these equipment groups was undertaken to enhance service capacity and operational efficiency at various terminals managed by the Company.

Di sisi lain, Perseroan melakukan penyesuaian pada beberapa jenis alat sesuai kebutuhan operasional dan tingkat utilisasinya. Jumlah Forklift tercatat menjadi 69 unit dari sebelumnya 81 unit, sementara Excavator menjadi 30 unit dari 31 unit pada tahun sebelumnya. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi komposisi alat produksi agar lebih selaras dengan kebutuhan operasional di lapangan.

On the other hand, the Company adjusted several types of equipment in accordance with operational needs and utilization levels. The number of Forklifts decreased to 69 units from 81 units, while Excavators declined to 30 units from 31 units in the previous year. These adjustments form part of efforts to optimize the composition of production equipment so that it is more aligned with operational requirements in the field.

Sementara itu, sejumlah alat lainnya dipertahankan pada jumlah yang sama, antara lain *Container Crane, Fixed Crane, Fixed Jib Crane, Gantry Luffing Crane, Rubber Tyred Gantry Crane*, Pompa CPO, *Grain Pump, Mini Dozer, Buldozer, Top Loader, Side Loader, Overhead Crane, Dump Truck*, dan *Bucket*. Stabilnya jumlah peralatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas yang tersedia masih memadai untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Meanwhile, several other types of equipment remained at the same level, including Container Cranes, Fixed Cranes, Fixed Jib Cranes, Gantry Luffing Cranes, Rubber Tyred Gantry Cranes, CPO Pumps, Grain Pumps, Mini Dozers, Bulldozers, Top Loaders, Side Loaders, Overhead Cranes, Dump Trucks, and Buckets. The stable number of these types of equipment indicates that the available capacity remains adequate to support the Company's operational activities.

Melalui pengelolaan dan pengembangan alat produksi yang terencana, Perseroan terus menjaga keseimbangan antara peningkatan kapasitas operasional dan optimalisasi pemanfaatan aset. Langkah ini dilakukan untuk mendukung produktivitas layanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta memperkuat daya saing bisnis terminal non-petikemas secara berkelanjutan.

Through the planned management and development of production equipment, the Company continues to maintain a balance between increasing operational capacity and optimizing asset utilization. This initiative is undertaken to support service productivity, improve customer service quality, and sustainably strengthen the competitiveness of the non-container terminal business.

Kinerja Kesiapan dan Utilisasi Alat Produksi

Keandalan operasional terminal sangat ditentukan oleh tingkat ketersediaan dan pemanfaatan peralatan produksi yang digunakan dalam mendukung aktivitas pelayanan. Oleh karena itu, kesiapan dan utilisasi alat menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan aset, produktivitas operasional, serta kemampuan Perseroan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pengguna jasa.

Kesiapan alat menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memastikan peralatan berada dalam kondisi layak operasi dan siap digunakan saat dibutuhkan. Sementara itu, tingkat utilisasi memberikan gambaran mengenai sejauh mana peralatan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional, sehingga dapat mencerminkan efisiensi penggunaan aset serta kesesuaian kapasitas alat dengan kebutuhan layanan di lapangan.

Untuk menjaga kinerja peralatan tetap optimal, PMT menerapkan program pemeliharaan yang terstruktur, didukung oleh pemantauan kondisi alat secara berkala dan pengelolaan berbasis data. Pendekatan tersebut memungkinkan Perseroan menjaga tingkat kesiapan alat pada level yang memadai sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai kebutuhan operasional di masing-masing terminal. Berikut realisasi tingkat kesiapan dan utilisasi alat produksi selama tahun berjalan.

Production Equipment Readiness and Utilization Performance

The operational reliability of terminals is largely determined by the availability and utilization levels of production equipment used to support service activities. Therefore, equipment readiness and utilization serve as important indicators for assessing the effectiveness of asset management, operational productivity, and the Company's ability to provide optimal services to service users.

Equipment readiness reflects the Company's ability to ensure that equipment is in operable condition and ready for use when needed. Meanwhile, the utilization rate provides an overview of the extent to which such equipment is used to support operational activities, thereby reflecting the efficiency of asset use and the alignment of equipment capacity with service requirements in the field.

To maintain optimal equipment performance, PMT implements a structured maintenance program supported by periodic equipment condition monitoring and data-based management. This approach enables the Company to maintain equipment readiness at an adequate level while optimizing its utilization according to the operational requirements of each terminal. The following table presents the realization of production equipment readiness and utilization levels during the reporting year.

Tabel Kesiapan dan Utilisasi Alat Produksi PMT 2024-2025
PMT Production Equipment Readiness and Utilization 2024–2025

No	Uraian Description	2025	2024	Capaian Achievement
1	*Harbour Mobile Crane & Harbour Portal Crane*	**48,69%**	80,45%	60,52%
2	*Container Crane*	**0,00%**	0,00%	0,00%
3	*FIxed Jib Crane/Fixed Crane*	**96,73%**	90,44%	106,95%
4	*Gantry Luffing Crane*	**97,42%**	96,15%	101,32%
5	*Gantry Jib Crane*	**87,10%**	86,15%	101,10%
6	*Mobile Crane*	**85,57%**	88,88%	96,28%
7	*Rubber Tyred Gantry Crane*	**0,00%**	0,00%	0,00%
8	*Conveyor*	**77,62%**	93,34%	83,16%
9	Pompa CPO CPO Pump	**97,92%**	98,91%	99,00%
10	*Grain Pump*	**97,92%**	99,29%	98,62%
Rata-Rata Average		**86,38%**	91,7%	

Pada tahun 2025, terdapat sejumlah peralatan dengan tingkat kesiapan di bawah target akibat kerusakan yang memerlukan perbaikan dan penanganan lanjutan. Pada *Harbour Mobile Crane* (HMC) *& Harbour Portal Crane* (HPC), empat unit mengalami gangguan, yaitu HMC #01 serta HPC #02 dan HPC #12 di *Branch* Jamrud, dan HMC #001 di *Branch* Makassar. Penanganan yang dilakukan meliputi perbaikan, pengadaan suku cadang, proses klaim asuransi, hingga perbaikan menyeluruh melalui *retrofit/revamping*.

Selain itu, kerusakan berat juga terjadi pada di PTP *Branch* Bengkulu akibat korsleting listrik dan saat ini sedang menjalani proses revitalisasi. Selain itu, beberapa unit *Container Crane* (CC) dan *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) mengalami kerusakan berat dan masih menunggu proses penghapusan aset. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kesiapan peralatan selama tahun 2025.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan belum menyajikan informasi keuangan berdasarkan segmen operasi sesuai dengan ketentuan PSAK mengenai Segmen Operasi. Oleh karena itu, informasi mengenai kinerja laba masing-masing segmen usaha belum dapat diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, Perseroan tetap memberikan gambaran mengenai sumber-sumber pendapatan usaha berdasarkan kelompok layanan utama yang dijalankan sebagai wujud keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Pendapatan usaha PMT berasal dari berbagai layanan terminal non-petikemas yang dikelola Perseroan, meliputi yang meliputi pengelolaan terminal, pengusahaan alat, kerja sama dan *fee for services*, pendapatan terminal petikemas, pengusahaan properti (tanah dan bangunan), air dan listrik,

In 2025, several equipment recorded readiness levels below target due to damage requiring repairs and further handling. For Harbour Mobile Cranes (HMC) and Harbour Portal Cranes (HPC), four units experienced disruptions, namely HMC #01 and HPC #02 and HPC #12 at Jamrud Branch, as well as HMC #001 at Makassar Branch. Measures undertaken included repairs, spare parts procurement, insurance claim processes, and comprehensive improvements through retrofit/revamping.

In addition, severe damage also occurred at PTP Bengkulu Branch due to an electrical short circuit, and the equipment is currently undergoing a revitalization process. Furthermore, several units of Container Cranes (CC) and Rubber Tyred Gantry Cranes (RTGC) suffered major damage and are still awaiting the asset disposal process. Overall, these conditions were the main factors affecting equipment readiness levels during 2025.

SEGMENT REVENUE AND PROFITABILITY

As of the end of 2025, the Company has not presented financial information by operating segment in accordance with the provisions of PSAK regarding Operating Segments. Therefore, information regarding the profit performance of each business segment cannot yet be disclosed separately in the financial statements. Nevertheless, the Company continues to provide an overview of operating revenue sources based on the main services managed, as a form of information transparency to stakeholders.

PMT's operating revenue is derived from various non-container terminal services managed by the Company, including terminal management, equipment operations, partnerships and fee-for-services, container terminal revenue, property services (land and buildings), water and electricity

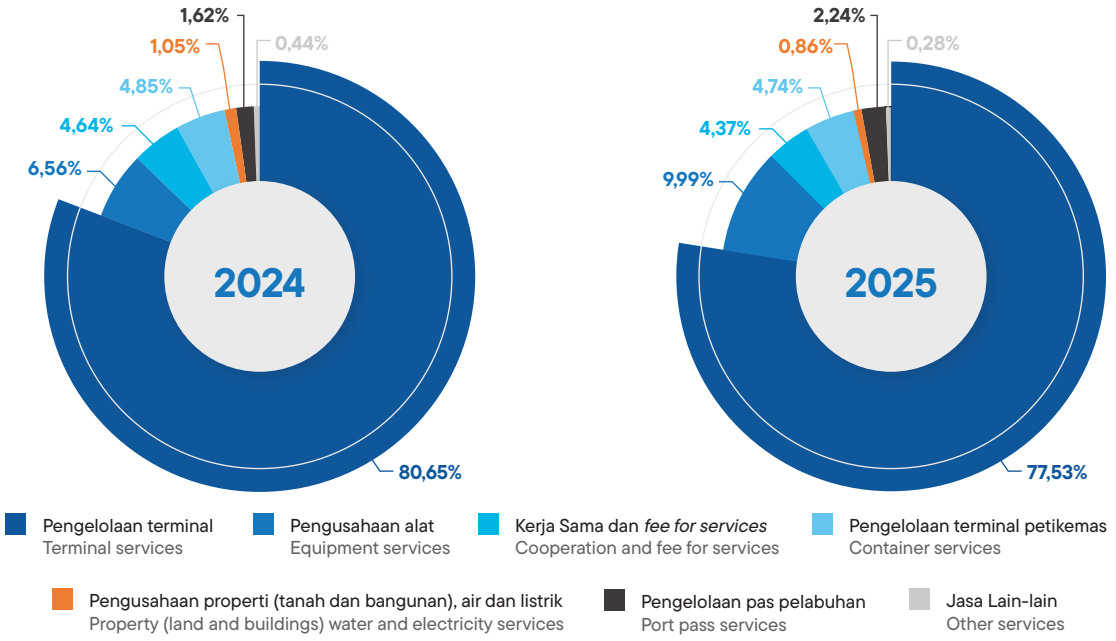
pengelolaan pas pelabuhan, dan jasa lain-lain. Adapun komposisi pendapatan tersebut mencerminkan diversifikasi kegiatan usaha Perseroan sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi masing-masing lini layanan terhadap pembentukan pendapatan usaha secara keseluruhan.

services, port pass management, and other services. The composition of such revenue reflects the diversification of the Company's business activities while also providing an overview of the contribution of each line of service to the formation of total operating revenue.

Pendapatan dan Kontribusi per Jasa Layanan terhadap Pendapatan Operasi
Revenue and Contribution by Service Type to Operating Revenue

Segmen Segment	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Pengelolaan terminal Terminal services	4.395.601	77,53%	4.287.037	80,85%	108.564	2,53%	↑
Pengusahaan alat Equipment services	566.504	9,99%	347.646	6,56%	218.858	62,95%	↑
Kerja Sama dan *fee for services* Cooperation and fee for services	247.769	4,37%	246.045	4,64%	1.724	0,70%	↑
Pendapatan terminal petikemas Container services	268.516	4,74%	256.891	4,85%	11.625	4,53%	↑
Pengusahaan properti (tanah dan bangunan), air dan listrik Property (land and buildings), water and electricity services	48.860	0,86%	55.608	1,05%	(6.748)	-12,13%	↓
Pengelolaan pas pelabuhan Port pass services	126.755	2,24%	85.798	1,62%	40.957	47,74%	↑
Jasa Lain-lain Other services	15.653	0,28%	23.137	0,44%	(7.484)	-32,35%	↓
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenue	5.669.657	100,00%	5.302.163	100,00%	367.494	6,93%	↑

Kontribusi per Segmen Usaha terhadap Pendapatan Operasi (%)
Contribution per Business Segment to Operating Revenue



Secara konsolidasi, pendapatan operasi Perusahaan pada tahun 2025 mencapai Rp5,67 triliun, meningkat sebesar Rp367,49 miliar dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp5,30 triliun. Berikut analisis kontribusi masing-masing jenis layanan terhadap pendapatan operasi Perusahaan.

Pengelolaan Terminal

Pengelolaan terminal tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan operasi Perusahaan dengan nilai mencapai Rp4,40 triliun atau 77,53% dari total pendapatan operasi. Dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,29 triliun, pendapatan dari segmen ini meningkat sebesar Rp108,56 miliar. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa layanan pengelolaan terminal masih menjadi fondasi utama bisnis Perseroan dalam mendukung aktivitas kepelabuhanan non-petikemas.

Pengusahaan Alat

Pendapatan dari jasa pengusahaan alat mencapai Rp566,50 miliar, meningkat dari Rp347,65 miliar pada tahun sebelumnya. Kontribusinya terhadap total pendapatan operasi juga meningkat menjadi 9,99%. Pertumbuhan ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan alat produksi serta meningkatnya kebutuhan layanan peralatan pendukung operasional di berbagai terminal.

Kerja Sama dan *Fee for Services*

Pendapatan dari kerja sama dan fee for services tercatat sebesar Rp247,77 miliar, meningkat dibandingkan Rp246,05 miliar pada tahun 2024. Segmen ini memberikan kontribusi sebesar 4,37% terhadap total pendapatan operasi. Kinerja tersebut menunjukkan keberlanjutan kolaborasi usaha dan kerja sama operasional yang dijalankan Perusahaan bersama berbagai mitra bisnis.

Pendapatan Terminal Petikemas

Pendapatan terminal petikemas mencapai Rp268,52 miliar, meningkat dari Rp256,89 miliar pada tahun sebelumnya. Segmen ini berkontribusi sebesar 4,74% terhadap total pendapatan operasi. Peningkatan tersebut menunjukkan tetap terjaganya kinerja layanan petikemas yang dikelola Perusahaan dan entitas anak, meskipun fokus utama usaha berada pada layanan non-petikemas.

Pengusahaan Properti, Air, dan Listrik

Pendapatan dari pengusahaan properti, air, dan listrik tercatat sebesar Rp48,86 miliar, menurun dibandingkan Rp55,61 miliar pada tahun 2024. Kontribusinya terhadap total pendapatan operasi menjadi 0,86%. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian pada pemanfaatan aset properti dan layanan utilitas yang dikelola Perseroan selama tahun berjalan.

Pengelolaan Pas Pelabuhan

Pendapatan dari pengelolaan pas pelabuhan meningkat menjadi Rp126,76 miliar dari Rp85,80 miliar pada tahun sebelumnya. Kontribusi segmen ini naik menjadi 2,24% terhadap total pendapatan operasi. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas pengguna jasa pelabuhan yang memanfaatkan layanan akses dan fasilitas pendukung yang dikelola Perusahaan.

On a consolidated basis, the Company's operating revenue in 2025 reached Rp5.67 trillion, an increase of Rp367.49 billion compared to Rp5.30 trillion in 2024. The following is an analysis of the contribution of each type of service to the Company's operating revenue.

Terminal Services

Terminal services remained the largest contributor to the Company's operating revenue, amounting to Rp4.40 trillion or 77.53% of total operating revenue. Compared to Rp4.29 trillion in 2024, revenue from this segment increased by Rp108.56 billion. This performance demonstrates that terminal services continue to serve as the main foundation of the Company's business in supporting non-container port activities.

Equipment Services

Revenue from equipment services reached Rp566.50 billion, increasing from Rp347.65 billion in the previous year. Its contribution to total operating revenue also increased to 9.99%. This growth reflects the optimization of production equipment utilization and the increasing demand for operational support equipment services at various terminals.

Cooperation and Fee-for-Services

Revenue from cooperation and fee-for-services amounted to Rp247.77 billion, increasing compared to Rp246.05 billion in 2024. This segment contributed 4.37% to total operating revenue. This performance demonstrates the continuity of business collaborations and operational partnerships undertaken by the Company with various business partners.

Container Services

Container services revenue reached Rp268.52 billion, increasing from Rp256.89 billion in the previous year. This segment contributed 4.74% to total operating revenue. The increase indicates the sustained performance of container services managed by the Company and its subsidiaries, despite the Company's primary business focus being on non-container services.

Property, Water, and Electricity Services

Revenue from property, water, and electricity services amounted to Rp48.86 billion, decreasing compared to Rp55.61 billion in 2024. Its contribution to total operating revenue declined to 0.86%. This decrease indicates adjustments in the utilization of property assets and utility services managed by the Company during the reporting year.

Port Pass Services

Revenue from port pass services increased to Rp126.76 billion from Rp85.80 billion in the previous year. The contribution of this segment rose to 2.24% of total operating revenue. This growth reflects the increasing activities of port service users utilizing access services and supporting facilities managed by the Company.

Jasa Lain-lain

Pendapatan jasa lain-lain tercatat sebesar Rp15,65 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp23,14 miliar pada tahun 2024. Meskipun kontribusinya relatif kecil, segmen ini tetap memberikan tambahan pendapatan dari berbagai layanan pendukung di luar kelompok usaha utama Perusahaan.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan operasi tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan terminal tetap menjadi penggerak utama kinerja usaha Perusahaan. Di saat yang sama, pertumbuhan yang kuat pada segmen pengusahaan alat dan pengelolaan pas pelabuhan turut memperkuat diversifikasi sumber pendapatan. Kondisi ini mencerminkan upaya Perusahaan dalam mengoptimalkan berbagai lini bisnis untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Other Services

Revenue from other services amounted to Rp15.65 billion, lower than Rp23.14 billion in 2024. Although its contribution is relatively small, this segment continued to provide additional revenue from various supporting services outside the Company's main business groups.

Overall, the operating revenue structure in 2025 indicates that terminal services remained the primary driver of the Company's business performance. At the same time, strong growth in the equipment services and port pass services segments further strengthened the diversification of revenue sources. These conditions reflect the Company's efforts to optimize a variety of lines of business to support sustainable growth.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran sesuai arahan RUPS yaitu melakukan optimalisasi komersial secara masif agar tercipta peningkatan market share Perseroan:

1. Integrasi *Key Account Management* (KAM) untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas customer prime dan floating market dalam melakukan kegiatan bongkar muat di lingkungan PMT:
   a. Telah dibentuknya tim *Key Account Officer* (KAO) di *Branch* PMT;
   b. Pelaksanaan *Customer Hearing* untuk mendengarkan keluhan dan masukkan dari *Customer*;
   c. Pelaksanaan Awarding bagi *Customer*;
   d. Pelaksanaan *Customer* Visit;
   e. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan secara rutin.
2. Program Retensi Pelanggan agar dapat mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi pelanggan dalam pelaksanaan pelayanan bongkar muat sehingga pelanggan dapat terus melakukan kerja sama bongkar muat dengan PMT:
   a. Penerapan aplikasi P-Connect dari HO ke PMT untuk pencatatan keluhan;
   b. Pemberian *Term Of Payment* kepada *Customer*;
   c. Pelaksanaan *Customer Hearing* secara rutin untuk mendengarkan keluhan dan masukkan dari *customer*;
3. *Customer relationship management*, menghubungkan perusahaan dengan *customer*/pemilik barang dengan pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan hubungan bisnis yang erat dengan *customer*/pemilik barang sehingga dapat meningkatkan *market share* B/M melalui:
   a. Penerapan aplikasi P-Connect yang dibangun dan dikembangkan oleh HO sebatas untuk pencatatan dan penyelesaian keluhan pelanggan;

MARKETING STRATEGY

The marketing strategy according to the GMS directives are to carry out massive commercial optimization in order to create an increase in the Company's market share:

1. Integration of Key Account Management (KAM) to increase the satisfaction and loyalty of prime and floating market customers in carrying out loading and unloading activities in PMT environment:
   a. A Key Account Officer (KAO) team has been formed at PMT Branch;
   b. Holding customer hearings to listen to complaints and input from customers;
   c. Organizing awarding for customers;
   d. Customer visits;
   e. Conducting egular customer satisfaction surveys.
2. Customer Retention Program in order to identify problems and obstacles faced by customers in loading and unloading services so that customers can continue to cooperate with PMT for loading and unloading:
   a. Implementation of P-Connect application from HO to PMT for recording complaints;
   b. Providing Terms of Payment to Customers;
   c. Holding regular Customer Hearings to listen to complaints and input from customers.
3. Customer relationship management, connecting companies with customers/goods owners by utilizing technology that can improve close business relationships with customers/goods owners in order to increase the B/M market share through:
   a. Implementation of P-Connect application built and developed by HO limited to recording and resolving customer complaints;

b. Penerapan penggunaan aplikasi IBS, MDM, dan sebagianya untuk pendaftaran pelanggan baru dan pengajuan kegiatan;

4. Kerja sama dengan *Cargo Owner* (*floating market*), peningkatan pangsa pasar PMT atas kegiatan B/M eksisting atau kerjasama baru PT Pacific Bio Industry, PT Agro Makmur Raya, PT Bromo Transindo, PT Semen Baturaja Tbk, PT Riya Pasifik Nabati, PT Aneka Tambang, Kimia Yasa, Khatulistiwa Raya Cakrawala, Energi Oleo Persada, Mikie Oleo Nabati Indonesia, dan KCC Glass Batang.
5. Kerja sama Operasional TUKS Swasta dan BUMN, meningkatkan *market Share* bongkar muat melalui kerjasama pelayanan kegiatan B/M di TUKS Swasta/BUMN:
   a. Pelayanan *Ship to Ship*, pelayanan kegiatan B/M barang non petikemas melalui pola kerja sama *ship to ship* pada area *hinterland* potensial dan efisiensi logistik pemilik barang dalam kegiatan ekspor/impor STS PT Borneo Indobara dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

PANGSA PASAR DAN POSISI PERSAINGAN

Industri terminal nonpetikemas di Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang positif seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, industri, energi, pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur nasional. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kebutuhan layanan kepelabuhanan yang andal untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan rantai pasok di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) membukukan pangsa pasar konsolidasi sebesar 52%, yang terdiri atas 14% pada segmen *general cargo*, 52% pada segmen curah kering, dan 86% pada segmen curah cair. Secara entitas, PMT *Stand Alone* mencatat pangsa pasar sebesar 59% untuk komoditas nonpetikemas dengan dominasi pada segmen curah cair sebesar 90% dan curah kering sebesar 57%, sementara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) membukukan pangsa pasar sebesar 42% dengan kontribusi utama pada segmen curah cair sebesar 78% dan curah kering sebesar 46%. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya posisi PMT Grup dalam pengelolaan terminal nonpetikemas nasional.

Perusahaan menghadapi persaingan baik dari operator pelabuhan lainnya maupun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang banyak digunakan oleh pelaku industri pada sektor batu bara, minyak dan gas, semen, pupuk, dan perkebunan. Untuk mempertahankan daya saing, PT Pelindo Multi Terminal terus meningkatkan produktivitas terminal, memperkuat standardisasi operasional, mengembangkan layanan berbasis digital, serta mengoptimalkan sinergi dalam ekosistem Pelindo Grup guna memberikan layanan yang lebih efisien dan bernilai tambah bagi pelanggan.

b. Implementation of the use of IBS, MDM applications, and others for new customer registration and activity submission;

4. Cooperation with cargo owners (floating market), increasing PMT market share for existing B/M activities or new cooperation with PT. Pacific Bio Industry, PT Agro Makmur Raya, PT Bromo Transindo, PT Semen Baturaja Tbk, PT Riya Pasifik Nabati, PT Aneka Tambang, Kimia Yasa, Khatulistiwa Raya Cakrawala, Energi Oleo Persada, Mikie Oleo Nabati Indonesia, and KCC Glass Batang.
5. Operational cooperation between private and state-owned TUKS, increasing the loading and unloading market share through cooperation in B/M activity services at private TUKS/state-owned TUKS:
   a. Ship to ship services, non-container goods B/M activity services through ship to ship cooperation patterns in potential hinterland areas and logistics efficiency of goods owners in STS PT Borneo Indobara's export/import activities with PT Pelabuhan Tanjung Priok.

MARKET SHARE AND COMPETITIVE POSITION

The non-container terminal industry in Indonesia continues to have positive growth outlook in line with increasing activities in trade, industry, energy, mining, plantations, and national infrastructure development. These conditions have driven greater demand for reliable port services to support the smooth distribution of goods and supply chains across various regions of Indonesia.

In 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) recorded a consolidated market share of 52%, consisting of 14% in the general cargo segment, 52% in the dry bulk segment, and 86% in the liquid bulk segment. On an entity basis, PMT Stand Alone recorded a market share of 59% for non-container commodities, with dominance in the liquid bulk segment at 90% and the dry bulk segment at 57%, while PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) recorded a market share of 42%, with the main contribution coming from the liquid bulk segment at 78% and the dry bulk segment at 46%. These achievements demonstrate the strong position of PMT Group in the management of national non-container terminals.

The Company deals with competition from both other port operators and Dedicated Terminals (TUKS), which are widely used by industry players in the coal, oil and gas, cement, fertilizer, and plantation sectors. To maintain its competitiveness, PT Pelindo Multi Terminal continues to improve terminal productivity, strengthen operational standardization, develop digital-based services, and optimize synergies within Pelindo Group ecosystem to provide more efficient and value-added services for customers.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Pembahasan kinerja keuangan Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja guna memastikan kewajaran penyajian informasi keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), termasuk Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, serta mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi pasar modal yang berlaku.

The discussion of the Company's financial performance in this Annual Report is based on the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2025, and December 31, 2024. These statements have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti & Surja to ensure the fair presentation of financial information in accordance with applicable standards.

The preparation and presentation of the Company's Consolidated Financial Statements are conducted in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, specifically the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants, and in compliance with all applicable capital market provisions and regulations.

KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Total Aset

Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets

Tabel Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Total Aset Tahun 2024-2025
Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets for 2024-2025

Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Total Aset Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Lancar Current Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	2.002.452	1.677.403	325.049	19,38%	↑
Piutang Usaha-Neto Trade Receivables-Net					
Pihak Berelasi Related Parties	116.820	243.869	(127.049)	-52,10%	↓
Pihak Ketiga Third Parties	227.616	414.648	(187.032)	-45,11%	↓
Aset Kontrak-Pihak Berelasi Contract Assets–Related Parties	239.223	104.294	134.930	129,38%	↑
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advance Payments and Prepaid Expenses	21.170	20.866	305	1,46%	↑
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	20.618	28.800	(8.182)	-28,41%	↓
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	12.704	4.579	8.125	177,42%	↑
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2.640.604	2.494.458	146.145	5,86%	↑

Tabel Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Total Aset Tahun 2024-2025
Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets for 2024-2025

Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Total Aset Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)	
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets					
Aset Tetap-Neto Fixed Assets-Net	**1.025.180**	714.794	310.386	43,42%	↑
Aset Hak-Guna - Neto Right-of-Use Assets - Net	**519.925**	549.027	(29.101)	-5,30%	↓
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	**125.147**	140.426	(15.278)	-10,88%	↓
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan Estimated Claim for Tax Refund	**106.727**	67.675	39.052	57,71%	↑
Investasi Saham Investment in Shares	**3.466**	3.860	(395)	-10,22%	↓
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	**31.796**	40.250	(8.454)	-21,00%	↓
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**1.812.241**	**1.516.031**	**296.210**	**19,54%**	↑
Jumlah Aset Total Assets	**4.452.845**	**4.010.489**	**442.355**	**11,03**	↑

Jumlah aset Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp4.452,85 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 11,03%, setara dengan Rp442,36 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4.010,49 miliar.

Adapun penjelasan dan analisis mengenai aset Perusahaan pada tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Aset Lancar
Jumlah aset lancar Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.640,60 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 5,86%, setara dengan Rp146,15 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.494,46 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh naiknya penerimaan kas dari pelanggan dan penempatan deposito.

Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas Perusahaan terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang pasti serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Per 31 Desember 2025, kas dan setara kas Perusahaan tercatat sebesar Rp2.002,45 miliar, mengalami peningkatan sebesar 19,38%, atau setara dengan Rp325,05 miliar, dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yang sebesar Rp1.677,40 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sejalan dengan pencapaian target pencairan piutang yang dipengaruhi oleh penerapan metode pembayaran *autocollection* dan *billing payment* dan Kenaikan penerimaan kas atas optimalisasi penempatan dana perusahaan.

The Company's total assets in 2025 were recorded at Rp4,452.85 billion, an increase of 11.03%, or Rp442.36 billion, compared to Rp4,010.49 billion in 2024.

The following is an explanation and analysis of the Company's assets in 2025 compared to 2024.

Current Assets
The Company's asset composition in 2025 was influenced by changes in current and non-current assets, which affected total assets as a whole. In 2025, current assets accounted for 59.30% of total assets, while non-current assets accounted for 40.70%.

Cash and Cash Equivalents
The Company's cash and cash equivalents consist of cash on hand, bank accounts, and short-term deposits with maturities of three months or less that can be readily converted to cash in known amounts and are subject to insignificant risk of changes in value.

As of December 31, 2025, the Company's cash and cash equivalents were recorded at Rp2,002.45 billion, an increase of 19.38%, or equivalent to Rp325.05 billion, compared to Rp1,677.40 billion as of December 31, 2024. This increase was primarily driven by an increase in cash receipts from customers in line with the achievement of receivables disbursement targets influenced by the implementation of autocollection and billing payment methods and an increase in cash receipts due to the optimization of the company's fund placement.

Piutang Usaha – Neto

Piutang usaha – neto merupakan tagihan kepada pelanggan atas produk dan/atau jasa yang telah diserahkan oleh Perusahaan dalam transaksi usaha sesuai ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dan perubahannya, setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

Hingga akhir tahun 2025, piutang usaha – neto tercatat sebesar Rp344,44 miliar, mengalami penurunan sebesar 47,70% atau setara dengan Rp314,08 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp658,52 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penerapan metode Pembayaran *Autocollection* pada Pelindo Multi Terminal, Penerapan *Locking System* secara konsisten di Pelindo Multi Terminal Grup, pelunasan piutang yang cukup signifikan oleh beberapa pengguna jasa di tahun 2025, sebagai contoh Piutang Indonesia Power di Pelindo Multi Terminal *Branch* Benoa pada tahun 2024 sebesar Rp140.077.478.081 dan di akhir 2025 telah lunas dan Penagihan piutang secara berkesinambungan di Pelindo Multi Terminal Grup sehingga pembayaran dari Pengguna Jasa lebih tepat waktu.

Aset Kontrak - Pihak Berelasi

Aset kontrak - pihak berelasi meningkat menjadi Rp239,22 miliar pada tahun 2025, atau naik sebesar 129,38% setara dengan Rp134,93 miliar bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp104,29 miliar. Peningkatan ini terutama terjadi karena adanya penambahan pengakuan pendapatan yang masih akan diterima (PYMAD) atas kerja sama jasa fasilitas midstream LNG Benoa terkait jasa pengurusan pengapalan LNG, dan jasa terminal LNG, dan regasifikasi LNG dengan PT PLN Indonesia Power maupun Energi Primer Indonesia yang tarifnya masih sedang reviu BPKP sehingga pengakuan aset kontrak masih tetap berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Uang muka dan beban dibayar di muka Perusahaan tercatat sebesar Rp21,17 miliar, meningkat sebesar 1,46% atau setara dengan Rp0,31 miliar apabila dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp20,87 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh biaya dibayar dimuka atas pengadaan bahan bakar alat fasilitas pelabuhan di PT Pelindo Multi Terminal dari afiliasi PT Lamong Energi serta adanya biaya pemeliharaan atas perbaikan dermaga PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp20,62 miliar, menurun sebesar 28,41% atau setara dengan Rp8,18 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28,80 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ke Vendor per Desember 2025, dimana saldo PPN Masukan Dikreditkan mengalami penurunan, tahun 2025 sebesar Rp17.180.725.651,- dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp22.236.256.273,-. Penurunan juga terjadi pada PPh Pasal 21 Tahun 2025 sebesar Rp2.006.962.293,- dan tahun 2024 sebesar Rp6.500.811.280,- hal ini dikarenakan implikasi dari penerapan Coretax di tahun 2025.

Trade Receivables – Net

Trade receivables – net represent the amounts billed to customers for products and/or services delivered by the company in the course of its business activities, in accordance with the company's articles of association, net of allowance for doubtful accounts.

By the end of 2025, trade receivables – net were recorded at Rp344.44 billion, a 47.70% decrease, equivalent to Rp314.08 billion, compared to Rp658.52 billion in 2024. This decrease was mainly influenced by the implementation of the Autocollection Payment method at Pelindo Multi Terminal, the consistent implementation of the Locking System at Pelindo Multi Terminal Group, the significant settlement of receivables by several service users in 2025, for example Indonesia Power's receivables at Pelindo Multi Terminal Benoa Branch in 2024 amounted to Rp140,077,478,081 and at the end of 2025 had been paid off and continuous collection of receivables at Pelindo Multi Terminal Group so that payments from Service Users were more timely.

Contract Assets - Related Parties

Contract assets related parties increased to Rp239.22 billion in 2025, a rise of 129.38%, equivalent to Rp134.93 billion, compared to the previous year's figure of Rp104.29 billion. This increase was primarily due to the addition of revenue recognized as still to be received (PYMAD) from the Benoa LNG midstream facility partnership related to LNG shipping management services, LNG terminal services, and LNG regasification services with PT PLN Indonesia Power and Energi Primer Indonesia, whose rates are still under review by the BPKP; therefore, the recognition of contract assets remains consistent with the previous year.

Advance Payments and Prepaid Expenses

The Company's advance payments and prepaid expenses totaled Rp21.17 billion, an increase of 1.46% or the equivalent of Rp0.31 billion compared to 2024, when they totaled Rp20.87 billion. This increase was primarily due to prepaid expenses for the procurement of fuel for port facility equipment at PT Pelindo Multi Terminal from its affiliate PT Lamong Energi, as well as maintenance costs for repairs to the pier at PT Pelabuhan Tanjung Priok's Jambi Branch.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes in 2025 totaled Rp20.62 billion, a decrease of 28.41% or the equivalent of Rp8.18 billion compared to the previous year's figure of Rp28.80 billion. This decrease was influenced by payments to vendors as of December 2025, during which the balance of of credited input VAT decreased in 2025 to Rp17,180,725,651,- compared to 2024 at Rp22,236,256,273,-. A decrease also occurred in Income Tax Article 21 in 2025 by Rp2,006,962,293,- and in 2024 by Rp6,500,811,280,- this was due to the implications of the implementation of Coretax in 2025.

Aset Lancar Lainnya
Aset lancar lainnya tercatat sebesar Rp12,70 miliar, meningkat sebesar 177,42% atau setara dengan Rp8,13 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4,58 miliar. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan saldo dan bunga atas rekening deposito PT Pelindo Multi Terminal di tahun 2025.

Other Current Assets
Other current assets were recorded at Rp12.70 billion, an increase of 177.42% or Rp8.13 billion compared to the 2024 figure of Rp4.58 billion. This increase was due to an increase in the balance and interest on PT Pelindo Multi Terminal's deposit accounts in 2025.

Aset Tidak Lancar
Sepanjang tahun 2025, Perusahaan mencatatkan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp1,81 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 19,54% yang setara dengan Rp296,21 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1,52 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan pada saldo Aset Tetap yang bersumber dari investasi.

Non-Current Assets
Throughout 2025, the Company recorded non-current assets totaling Rp1.81 trillion, representing an increase of 19.54% or Rp296.21 billion compared to Rp1.52 trillion in 2024. This increase mainly came from an increase in the Fixed Asset balance originating from investments.

Aset Tetap - Neto
Aset tetap – neto merupakan aset yang diakui sebesar biaya perolehan, termasuk harga beli dan biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan. Aset tetap disajikan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan cadangan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan.

Fixed Assets – Net
Fixed assets – net are recognized at acquisition cost, including the purchase price and other directly attributable costs to bring the asset to its location and condition ready for use. Fixed assets are presented net of accumulated depreciation and impairment losses. Land is not depreciated.

Adapun aset tetap – neto pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,03 triliun, meningkat sebesar 43,42% atau setara dengan Rp310,39 miliar apabila dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp714,79 miliar. Kenaikan ini mencerminkan adanya penambahan aset tetap alat maupun instalasi fasilitas pelabuhan atas kegiatan investasi tahun 2025 untuk mendukung kegiatan operasional PT Pelindo Multi Terminal serta penambahan aset operasi bersama di PT Indonesia Kendaraan Terminal yang diserahkan untuk dikelola oleh PT Masaji Kargo Operasional Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKO MTKI).

Net fixed assets in 2025 were recorded at Rp1.03 trillion, an increase of 43.42% or the equivalent of Rp310.39 billion compared to 2024, when they stood at Rp714.79 billion. This increase reflects the addition of fixed assets, including equipment and port facility installations, resulting from investment activities in 2025 to support the operational activities of PT Pelindo Multi Terminal as well as the addition of jointly operated assets at PT Indonesia Kendaraan Terminal, which were transferred to be managed by PT Masaji Kargo Operasional Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKO MTKI).

Aset Hak Guna - Neto
Aset hak guna - neto adalah diakui pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Right of Use Assets – Net
Right-of-use assets – net are recognized at the lease commencement date (i.e., the date the underlying asset is available for use). They are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment, and adjusted for remeasurements of lease liabilities. The cost includes the amount of lease liabilities recognized, any initial direct costs incurred, and lease payments made before or at the commencement date, less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

Adapun aset hak guna – neto pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp519,93 miliar, yaitu menurun sebesar 5,30% atau setara dengan Rp29,10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp549,03 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pengakuan biaya penyusutan aset hak guna setiap bulannya hingga selesai masa sewa.

In 2025, right of use assets – net amounted to Rp519.93 billion, representing a decrease of 5.30% or Rp29.10 billion compared to Rp549.03 billion in the previous year. This decrease is due to the monthly recognition of depreciation expense for right of use assets until the end of the lease term.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Pada tahun 2025, aset pajak tangguhan tercatat sebesar Rp125,15 miliar, yaitu mengalami penurunan sebesar 10,88% atau setara dengan Rp15,28 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp140,43 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh realisasi pembayaran Imbalan Pasca Kerja Tahun Tahun 2023 s.d. 2024.

Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan adalah estimasi pengembalian dari Negara terkait kelebihan pembayaran pajak oleh Perusahaan. Per 31 Desember 2025, taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan tercatat sebesar Rp106,73 miliar, yaitu meningkat sebesar 57,71% atau setara dengan Rp39,05 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp67,68 miliar. Kenaikan ini mencerminkan bahwa proses restitusi pajak penghasilan di Tahun 2024 masih berproses dan masih terdapat kelebihan pembayaran pajak di tahun 2025.

Investasi Saham
Investasi saham adalah penyertaan saham PTPR pada PT Akses Pelabuhan Indonesia (API). Pada tahun 2025, investasi saham Perusahaan tercatat sebesar Rp3,47 miliar, menurun sebesar 10,22% atau setara dengan Rp0,40 miliar apabila dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp3,86 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya kajian yang dilakukan PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk menilai investasi saham Perusahaan dan menghasilkan kesimpulan adanya penurunan nilai yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Aset Tidak Lancar Lainnya
Aset tidak lancar lainnya terdiri dari beban ditangguhkan dan uang jaminan. Beban ditangguhkan merupakan beban atas kegiatan relokasi aset tetap yang diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Uang jaminan merupakan uang jaminan pelayanan listrik, lapangan penumpukan dan pelayanan kesehatan. Aset tidak lancar lainnya tercatat sebesar Rp31,80 miliar, menurun sebesar 21,00% atau setara dengan Rp8,45 miliar apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40,25 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pengakuan amortisasi biaya tangguhan atas sertifikasi dan konsultan di PT Pelindo Multi Terminal dan biaya pemeliharaan aset yang diamortisir setiap bulannya sesuai dengan masa manfaatnya.

Deferred Tax Assets
Deferred tax assets are recognized using the liability method for future tax consequences attributable to differences between the recorded amounts of assets and liabilities in the financial statements and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax loss carryforwards, to the extent that it is probable that the deductible temporary differences and tax loss carryforwards will be available against which taxable income can be reduced in the future.

In 2025, deferred tax assets amounted to Rp125.15 billion, representing a decrease of 10.88% or Rp15.28 billion compared to Rp140.43 billion in 2024. This decrease was influenced by the payment of post-employment benefits for the years 2023 through 2024.

Estimated Claim for Tax Refund
Estimated claim for tax refund is the estimated reimbursement from the state for overpaid taxes by the company. As of December 31, 2025, estimated claims for tax refunds amounted to Rp106.73 billion, representing an increase of 57.71% or Rp39.05 billion compared to Rp67.68 billion in the previous year. This increase reflects the fact that the income tax refund process for 2024 is still ongoing and that there are still overpayments of taxes in 2025.

Investment in Shares
Investment in shares represents PTPR's equity investment in PT Akses Pelabuhan Indonesia (API). In 2025, the Company's investment in shares amounted to Rp3.47 billion, representing a decrease of 10.22% or Rp0.40 billion compared to Rp3.86 billion in 2024. This decrease was due to a study conducted by PT Pelabuhan Tanjung Priok to assess the company's equity investments and concluded that there had been a decline in value, which was recorded as other comprehensive income.

Other Non-Current Assets
Other non-current assets consist of deferred charges and security deposits. Deferred charges relate to expenditures on fixed asset relocation, amortized over their useful lives. Security deposits are payments for electricity services, container yard space, and healthcare services. Other non-current assets amounted to Rp31.80 billion, representing a decrease of 21.00% or Rp8.45 billion compared to Rp40.25 billion in the previous year. This decrease was primarily due to the recognition of amortization of deferred costs related to certification and consulting services at PT Pelindo Multi Terminal, as well as maintenance costs for assets that are amortized monthly in accordance with their useful lives.

Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang, dan Total Liabilitas

Current Liabilities, Non-Current Liabilities, and Total Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang, dan Total Liabilitas Tahun 2024-2025
Current Liabilities, Non-Current Liabilities, and Total Liabilities for 2024–2025

Liabilitas Liabilities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities					
Utang Usaha Trade Payables					
Pihak Berelasi Related Parties	**200.659**	239.805	(39.145)	-16,32%	↓
Pihak Ketiga Third Parties	**55.811**	41.971	13.840	32,98%	↑
Utang Lain-Lain Other Payables					
Pihak Berelasi Related Parties	**114.301**	171.482	(57.181)	-33,34%	↓
Pihak Ketiga Third Parties	**1.307**	1.450	(144)	-9,90%	↓
Beban Akrual Accrued Expenses	**1.198.770**	891.919	306.852	34,40%	↑
Utang Pajak Taxes Payable	**56.662**	28.567	28.095	98,35%	↑
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	**34.109**	22.413	11.696	52,18%	↑
Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang Current Portion of Long-Term Liabilities					
Liabilitas Kontrak Contract Liabilities	**23.357**	40.850	(17.493)	-42,82%	↓
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	**76.810**	43.699	33.111	75,77%	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**1.761.786**	**1.482.155**	**279.631**	**18,87%**	↑
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities					
Liabilitas kontrak Contract Liabilities	**-**	518	-	-	-
Liabilitas sewa Lease Liabilities	**431.880**	391.825	40.055	10,22%	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**431.880**	**392.343**	**39.537**	**10,08%**	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**2.193.666**	**1.874.498**	**319.168**	**17,03%**	↑

Jumlah liabilitas Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.193,67 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 17,03%, setara dengan Rp319,17 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.874,50 miliar.

Berikut adalah penjelasan dan analisis mengenai liabilitas konsolidasian pada tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun 2024.

The Company's total liabilities in 2025 were recorded at Rp2,193.67 billion, an increase of 17.03%, or Rp319.17 billion, compared to Rp1,874.50 billion in 2024.

The following shows an explanation and analysis of the decrease in consolidated liabilities in 2025 compared to 2024.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2025, liabilitas jangka pendek Perusahaan tercatat sebesar Rp1.761,79 miliar, meningkat sebesar 18,87% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp1.482,16 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha pihak afiliasi atas transaksi Pelindo Grup, peningkatan saldo Utang Pajak, Peningkatan Imbalan Kerja Jangka Pendek.

Utang Usaha

Utang usaha merupakan akun yang digunakan untuk mencatat utang usaha yang merupakan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati antara entitas dan pihak lain (*contractual based*) dengan pemasok (*supplier*) dalam rangka kegiatan normal entitas, di mana risiko material atas pengelolaan barang dan jasa telah berpindah kepada entitas.

Perusahaan mencatatkan utang usaha sebesar Rp256,47 miliar pada tahun 2025, yaitu mengalami penurunan sebesar 8,98% atau setara dengan Rp25,31 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp281,78 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh:

1. Utang usaha kepada pihak ketiga menurun karena adanya penyelesaian pembayaran tagihan kepada mitra penyedia barang dan jasa secara tepat waktu sesuai termin kontrak.
2. Utang usaha kepada pihak berelasi menurun karena proses rekonsiliasi dan penyelesaian kewajiban antar entitas grup menjadi lebih lancar sehingga mempercepat pembayaran tagihan.

Utang Lain-Lain

Utang lain-lain merupakan akun yang digunakan untuk membukukan atau mencatat akun piutang yang sudah ditagihkan atas penjualan produk atau jasa di luar usaha utama perusahaan, yang mana penjualan ini dilakukan kepada pihak ketiga.

Perusahaan mencatatkan utang lain-lain sebesar Rp115,61 miliar pada tahun 2025, yaitu mengalami penurunan sebesar 33,15%, setara dengan Rp57,32 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp172,93 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga yang jatuh tempo selama tahun berjalan, berkurangnya saldo kewajiban operasional yang bersifat sementara, serta meningkatnya efektivitas pengelolaan dan rekonsiliasi kewajiban. Kondisi tersebut mencerminkan upaya Perusahaan dalam menjaga disiplin pembayaran, mengoptimalkan pengelolaan modal kerja, serta memperkuat pengendalian terhadap kewajiban jangka pendek.

Beban Akrual

Beban akrual merupakan akun yang digunakan untuk mencatat beban biaya yang telah jatuh tempo atau yang telah diterima manfaatnya oleh entitas, tetapi belum dibayar. Perusahaan mencatatkan beban akrual Perusahaan pada tahun 2025 sebesar Rp1.198,77 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 34,40%, yaitu setara dengan Rp306,85 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp891,92 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kewajiban atas

Current Liabilities

In 2025, the Company's current liabilities amounted to Rp1,761.79 billion, representing an increase of 18.87% compared to Rp1,482.16 billion in 2024. This increase was due to an increase in trade payables from affiliates related to Pelindo Group transactions, an increase in the balance of tax liabilities, and an increase in short-term employee benefits.

Trade Payables

Trade payables are accounts used to record liabilities for goods or services that have been received or supplied and have been invoiced or formally agreed upon between the entity and another party (contractual-based) with the supplier, as part of the entity's normal activities, where the material risk related to the management of goods and services has transferred to the entity.

The Company recorded trade payables of Rp256.47 billion in 2025, representing a decrease of 8.98% or Rp25.31 billion compared to Rp281.78 billion in 2024. This decrease was primarily influenced by:

1. Trade payables to third parties decreased due to timely settlement of invoices to goods and services providers in accordance with contractual terms.
2. Trade payables to related parties decreased due to smoother reconciliation and settlement processes between group entities, accelerating bill payments.

Other Payables

Other payables are accounts used to record receivables that have already been invoiced from the sale of products or services outside the Company's main business operations, where the sales were made to third parties.

The Company recorded other payables of Rp115.61 billion in 2025, representing a decrease of 33.15%, or Rp57.32 billion, compared to Rp172.93 billion in 2024. This decrease was primarily due to the settlement of third-party liabilities due during the year, a reduction in temporary operational liabilities, and increased effectiveness in the management and reconciliation of liabilities. This reflects the Company's efforts to maintain payment discipline, optimize working capital management, and strengthen control over current liabilities.

Accrued Expenses

Accrued expenses are accounts used to record costs that are due or for which the entity has already received the benefits but has not yet made payment. The Company recorded accrued expenses of Rp1,198.77 billion in 2025, representing an increase of 34.40%, or Rp306.85 billion, compared to Rp891.92 billion in 2024. This increase was driven by increased liabilities for goods and services that had been received during the current year but were still in the process of being billed, verified, or administratively

barang dan jasa yang telah diterima manfaatnya pada tahun berjalan, namun masih dalam proses penagihan, verifikasi, atau penyelesaian administrasi pada akhir periode pelaporan. Selain itu, peningkatan aktivitas operasional dan kerja sama usaha selama tahun 2025 turut mendorong bertambahnya beban yang masih harus dibayar pada akhir tahun.

settled at the end of the reporting period. Furthermore, increased operational activity and business partnerships during 2025 contributed to the increase in accrued expenses at year-end.

Utang Pajak

Utang pajak merupakan akun yang digunakan untuk mencatat liabilitas pajak kini yang meliputi, tetapi tidak terbatas kepada: Pajak Penghasilan (PPh) kini dan periode tahun sebelumnya yang belum dibayarkan, misalnya PPh Pasal 4 (2), 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 29; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran; Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak terutang lainnya.

Perusahaan mencatatkan utang pajak pada tahun 2025 sebesar Rp56,66 miliar, yaitu mengalami kenaikan sebesar 98,35% atau setara dengan Rp28,10 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp28,57 miliar. Kenaikan ini terutama pada utang PPh Pasal 29 Tahun 2025 sebesar Rp29.755.407.296,- dan Tahun 2024 sebesar Rp13.124.379.987,- hal ini mencerminkan peningkatan kinerja laba usaha khususnya pada PT Pelabuhan Tanjung Priok di Tahun 2025.

Taxes Payable

Taxes payable are accounts used to record current tax liabilities, which include but are not limited to: current and prior-year Income Taxes (PPh) that have not yet been paid, such as PPh Articles 4 (2), 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, and 29; Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) for income tax; Output Value-Added Tax (VAT); Land and Building Tax; and other payable taxes.

The Company recorded taxes payable of Rp56.66 billion in 2025, representing an increase of 98.35%, or Rp28.10 billion, compared to Rp28.57 billion in 2024. This increase is primarily due to income tax liabilities under Article 29 for 2025 amounting to Rp29,755,407,296,- and for 2024 amounting to Rp13,124,379,987,- this reflects an improvement in operating profit, particularly at PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2025.

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka pendek lainnya terdiri dari uang titipan dari pelanggan (Pihak ketiga swasta dan berelasi), dan liabilitas jangka pendek lainnya (utang dividen, utang pegawai).

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa *multipurpose* terminal, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan - pihak berelasi terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran Jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Perusahaan mencatatkan liabilitas jangka pendek lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp34,11 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 52,18% yang setara dengan Rp11,70 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp22,41 miliar. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan uang titipan yang merupakan sisa dana pengguna jasa yang belum dikembalikan kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan layanan berikutnya, termasuk uang titipan dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi, dan koperasi pegawai.

Other Current Liabilities

Other current liabilities consist of deposits from customers (private third parties and related parties), and other short-term liabilities (dividend payables, employee payables).

Deposits from private parties mainly refer to the remaining funds from users of multipurpose terminal services, container services, and logistics services that have not yet been refunded to customers or will be offset against future services.

Deposits from related parties mainly refer to withheld portions of employees' monthly salaries for Jamsostek (social security), insurance, and employee cooperative contributions.

The Company recorded other current liabilities of Rp34.11 billion in 2025, representing an increase of 52.18%, or Rp11.70 billion, compared to Rp22.41 billion in 2024. This increase was primarily driven by a decrease in escrow funds, which are funds remaining from service users that have not yet been refunded to customers or will be applied toward future services, including escrow funds from employees' monthly salaries for social security contributions, insurance, and the employee cooperative.

Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang

Bagian lancar liabilitas jangka panjang terdiri dari pendapatan diterima di muka dan liabilitas sewa.

1. Pendapatan Diterima di Muka
   Pendapatan diterima di muka merupakan akun yang digunakan untuk mencatat bagian dari pendapatan diterima di muka/deposit/uang jaminan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan uang pertanggungan dari pelanggan. Uang pertanggungan adalah Uang untuk

Current Portion of Long-Term Liabilities

The current portion of long-term liabilities consists of unearned revenue and lease liabilities.

1. Unearned Revenue
   Unearned revenue is an account used to record portions of deposits, advance payments, or guarantees that will mature within one year or less than twelve months after the reporting period, including security deposits from customers. Security deposits are advance payments received from customers who will receive terminal

diperhitungkan dan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan terminal, pelayanan jasa petikemas, dan jasa logistik dari Grup.

Pada tahun 2025, pendapatan diterima di muka tercatat sebesar Rp23,36 miliar, mengalami penurunan sebesar 42,82%, setara dengan Rp17,49 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp40,85 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya amortisasi pengakuan pendapatan di tahun 2025 atas penerimaan pendapatan diterima dimuka dari pelanggan yang memperoleh pelayanan jasa non-petikemas, pelayanan jasa petikemas, dan jasa logistik.

2. Liabilitas Sewa
   Liabilitas sewa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan kurang dari dua belas bulan.

   Pada tahun 2025, liabilitas sewa tercatat sebesar Rp76,81 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 75,77%, setara dengan Rp33,11 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp43,70 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi adanya pengakuan kewajiban tahun 2025 atas sewa aset untuk mendukung kegiatan operasional PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp431,88 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 10,08% yang setara dengan Rp39,54 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp392,34 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa selama tahun berjalan, sementara liabilitas kontrak jangka panjang tercatat tidak mengalami penambahan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Lancar

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar terdiri dari pendapatan diterima di muka dan liabilitas sewa.

1. Pendapatan Diterima di Muka
   Pendapatan Diterima Dimuka adalah uang untuk diperhitungkan dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan terminal, pelayanan jasa petikemas, dan jasa logistik dari Perusahaan. Pada tahun 2025, pendapatan diterima di muka tercatat nihil. Sementara tahun 2024, tercatat sebesar Rp518 juta. Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi pencatatan pendapatan diterima dimuka jangka panjang menjadi jangka pendek di PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Liabilitas Sewa
   Pada tahun 2025, liabilitas sewa tercatat sebesar Rp431,88 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 10,22%, setara dengan Rp40,06 miliar, dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp391,83 miliar. Peningkatan ini disebabkan adanya reklasifikasi kewajiban jangka pendek atas perjanjian pelayanan dan penanganan *cargo passenger car* (CBU), alat berat, truk/bus, *spare parts* di Terminal Internasional IKT, dan perjanjian kerjasama jasa pelayanan kepelabuhanan, pelayanan bongkar muat dan penyediaan lahan di area IKT, serta perjanjian kerja sama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan.

services, container services, and logistics services from the Group.

In 2025, unearned revenue amounted to Rp23.36 billion, representing a decrease of 42.82%, or Rp17.49 billion, compared to Rp40.85 billion in 2024. This decrease is due to the amortization of revenue recognized in 2025 from revenue received in advance from customers receiving non-containerized services, containerized services, and logistics services.

2. Lease Liabilities
   Lease liabilities are accounts used to record lease obligations that are due within one year and less than twelve months.

   In 2025, lease liabilities amounted to Rp76.81 billion, representing an increase of 75.77%, or Rp33.11 billion, compared to Rp43.70 billion in 2024. This increase was influenced by the recognition of a 2025 liability related to asset leases to support the operations of PT Pelindo Multi Terminal and PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Non-Current Liabilities

The Company's non-current liabilities amounted to Rp431.88 billion in 2025, representing an increase of 10.08%, or Rp39.54 billion, compared to Rp392.34 billion in 2024. This increase was primarily attributable to the growth in lease liabilities during the year, while non-current contract liabilities remained unchanged as of the end of the reporting period.

Long-Term Liabilities – Net of Current Maturities

Long-term liabilities - net of current maturities consist of unearned revenue and lease liabilities.

1. Unearned Revenue
   Unearned revenue is money receivable from customers who will obtain terminal services, container services, and logistics services from the Company. In 2025, unearned revenue was recorded as zero. Meanwhile, in 2024, it was recorded at Rp518 million. This was due to the reclassification of unearned revenue from long-term to short-term at PT Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Lease Liabilities
   In 2025, lease liabilities were recorded at Rp431.88 billion, representing a 10.22% increase, equivalent to Rp40.06 billion, compared to Rp391.83 billion in 2024. This increase was due to the reclassification of short-term liabilities related to service agreements for the handling of passenger cars (CBU), heavy equipment, trucks/buses, and spare parts at the IKT International Terminal, as well as cooperation agreements for port services, loading and unloading services, and land provision in the IKT area, and cooperation agreements for the Construction and Operation of the Vehicle Terminal.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2024-2025
Equity for 2024-2025

Ekuitas Equity	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of Parent Entity					
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per Saham Share Capital - par Value of Rp1,000,000 (full amount)					
Modal Dasar - 5.921.220 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.480.305 Saham Authorized Capital – 5,921,220 Shares Issued and Fully Paid - 1,480,305 Shares	**1.480.305**	1.480.305	0	0,00%	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	**(225.709)**	(225.708)	(1)	0,00%	-
Saldo Laba Retained earnings					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	**59.029**	48.672	10.357	21,28%	↑
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	**543.148**	458.018	85.130	18,59%	↑
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Total Equity Attributable to Owners of Entity					
Induk – Neto Parent - Net	**1.856.773**	1.761.287	95.486	5,42%	↑
Kepentingan Nonpengendali Non controlling interests	**402.405**	374.704	27.701	7,39%	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	**2.259.178**	**2.135.991**	**123.187**	**5,77%**	↑

Jumlah ekuitas Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.259,18 miliar, yaitu mengalami kenaikan sebesar 5,77% atau Rp123,19 miliar apabila dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp2.135,99 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan kenaikan pada saldo Cadangan Umum dan cadangan modal serta adanya kenaikan Saldo Laba (Rugi) Belum dicadangkan Tahun Berjalan.

Berikut penjelasan dan analisis mengenai Ekuitas Perusahaan pada tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun 2024.

Modal Saham
Modal saham adalah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penyetoran atas modal saham perusahaan. Pada tahun 2025, modal saham Perusahaan tercatat sebesar Rp1,48 triliun, yaitu sama dengan tahun 2024.

Tambahan Modal Disetor
Tambahan modal disetor merupakan akun yang digunakan untuk mencatat selisih lebih jumlah setoran modal yang diterima entitas dari nilai par (nominal) saham pada saat penerbitan saham. Nilai par adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham.

The Company's equity in 2025 was recorded at Rp2,259.18 billion, representing an increase of 5.77% or Rp123.19 billion compared to the 2024 figure of Rp2,135.99 billion. This growth reflects an increase in the General Reserve and capital reserve balances, as well as an increase in the balance of unappropriated retained earnings (or losses) for the current year.

The following is an explanation and analysis of the company's equity in 2025 compared to 2024.

Share Capital
Share capital is an account used to record the payment of a company's share capital. In 2025, the Company's share capital amounted to Rp1.48 trillion, unchanged from 2024.

Additional Paid-in Capital
Additional paid-in capital is an account used to record the excess amount of capital contributions received by the entity over the par value (nominal value) of shares at the time of issuance. The par value is the value stated on the share certificate.

Adapun saldo tambahan modal disetor tercatat sebesar defisit Rp225,71 miliar, yaitu mengalami perubahan sebesar Rp1 juta bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp225.708 juta.

Saldo Laba

Saldo Laba terdiri dari saldo laba yang ditentukan penggunaannya, serta saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

1. Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya
   Saldo laba yang ditentukan penggunaannya merupakan bagian dari laba bersih yang telah dialokasikan sebagai cadangan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun saldo laba yang ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp59,03 miliar pada tahun 2025, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp10,36 milliar atau 21,28% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp48,67 miliar.
2. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya
   Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya adalah saldo laba yang bersumber dari laba bersih dari kegiatan operasional di tahun berjalan. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan mencatatkan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp543,15 miliar. Nilai ini mengalami pertumbuhan sebesar 18,59% atau meningkat sebesar Rp85,13 miliar dibandingkan posisi tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp458,02 miliar.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Induk

Pada tahun 2025, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada induk tercatat sebesar Rp1,86 triliun, yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,42% atau setara dengan Rp95,49 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1,76 triliun.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian dari total ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian yang dimiliki oleh pemilik entitas anak selain induk Perusahaan. Komponen ini timbul sebagai akibat dari kepemilikan saham pihak ketiga pada entitas anak yang dikonsolidasikan.

Adapun ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali tercatat sebesar Rp402,41 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,39%, atau setara dengan Rp27,70 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp374,70 miliar. Perubahan pada tahun 2025 ini secara umum dipengaruhi oleh adanya pembayaran dividen oleh anak Perusahaan kepada pihak ataupun perusahaan non pengendali.

The balance of additional paid-in capital recorded a deficit of Rp225.71 billion, representing a change of Rp1 million compared to the 2024 deficit balance of Rp225,708 million.

Retained Earnings

Retained earnings consist of appropriated and unappropriated retained earnings.

1. Appropriated Retained Earnings
   Appropriated retained earnings is part of the net income that has been allocated as reserves through a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS). In 2025, appropriated retained earnings amounted to Rp59.03 billion, representing an increase of Rp10.36 billion or 21.28% compared to Rp48.67 billion in 2024.
2. Unappropriated Retained Earnings
   Unappropriated retained earnings are retained earnings derived from net income from operating activities in the current year. Throughout 2025, the Company recorded unappropriated retained earnings of Rp543.15 billion. This amount increased by 18.59%, or Rp85.13 billion, compared to Rp458.02 billion in 2024.

Equity Attributable to Owners of the Parent

In 2025, equity attributable to owners of the parent amounted to Rp1.86 trillion, representing an increase of 5.42%, or Rp95.49 billion, compared to Rp1.76 trillion in 2024.

Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests reflects the portion of total equity in the consolidated financial statements owned by owners of subsidiaries other than the parent company. This component arises as a result of third-party ownership of shares in consolidated subsidiaries.

In 2025, equity attributable to non-controlling interests amounted to Rp402.41 billion. This represents an increase of 7.39%, or Rp27.70 billion, compared to Rp374.70 billion in 2024. The changes in 2025 are generally influenced by dividend payments made by subsidiaries to non-controlling parties or companies.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)	
Pendapatan Operasi Operating revenues	**5.669.657**	5.302.163	367.494	6,93%	↑
Beban Operasi Operating expenses	**(5.078.174)**	(5.021.281)	(56.893)	1,13%	↑
Pendapatan Operasi Lainnya Other operating income	**47.651**	31.565	16.086	50,96%	↑
Laba Usaha Income from operations	**639.133**	312.446	326.687	104,56%	↑
Pendapatan Keuangan Finance income	**99.388**	92.121	7.267	7,89%	↑
Beban Keuangan Finance expenses	**(35.368)**	(33.028)	(2.340)	7,09%	↑
Laba sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income before final tax and corporate income tax	**703.153**	371.539	331.613	89,25%	↑
Beban Pajak Final Final tax expenses	**(21.980)**	(17.319)	(4.661)	26,91%	↑
Laba sebelum Pajak Penghasilan Badan Income before corporate income tax	**681.173**	354.220	326.952	92,30%	↑
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax benefits/(expenses)					
Kini Current	**(140.150)**	(108.285)	(31.865)	29,43%	↑
Tangguhan Deferred	**(15.278)**	23.819	(39.097)	-164,14%	-
Laba tahun berjalan Income for the year	**525.745**	269.755	255.990	94,90%	↑
Penghasilan Komprehensif Lain Other comprehensive income					
Pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items That Will Not Be Reclassified to Income					
Perubahan Nilai Wajar pada Investasi Saham Changes in the Fair Value of Equity Investments	**(395)**	-	(395)	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**525.350**	269.755	255.595	94,75%	↑
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Income for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	**445.878**	207.139	238.739	115,26%	↑
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	**79.867**	62.616	17.251	27,55%	↑
Jumlah Total	**525.745**	**269.755**	**255.990**	**94,90%**	↑

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Income for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	**445.487**	207.139	238.348	115,07%	↑
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	**79.863**	62.616	17.247	27,54%	↑
Jumlah Total	**525.350**	**269.755**	**255.595**	**94,75%**	↑
Laba per Saham (Rupiah Penuh) Earnings per Share (full Rupiah Amount)	**301.207**	139.930	161.277	115,26%	↑

Pendapatan Operasi

Sebagaimana diuraikan dalam bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, pendapatan operasi Perusahaan berasal dari 7 (tujuh) segmen usaha berdasarkan jenis bisnis, yaitu segmen pengelolaan terminal, pengusahaan alat, kerja sama dan *fee for services*, pengelolaan terminal petikemas, pengusahaan properti (tanah dan bangunan), air dan listrik, pengelolaan pas pelabuhan, serta jasa lain-lain.

Operating Revenues

As described in the discussion on Operational Overview per Business Segment, the Company's operating revenues are obtained from 7 (seven) segments based on the type of business, namely terminal services, equipment services, cooperation and fee for services, container services, property (land and buildings), water and electricity services, port pass services, and miscellaneous services segment.

Tabel Pendapatan Operasi Tahun 2024-2025
Operating Revenues for 2024-2025

Pendapatan Operasi Operating Revenues	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pengelolaan Non-Petikemas Non-Container Services	**4.395.601**	4.287.037	108.563	2,53%	↑
Pengusahaan Alat Equipment Services	**566.504**	347.646	218.858	62,95%	↑
Pendapatan Terminal Petikemas Container Services	**268.516**	256.891	11.624	4,53%	↑
Kerja sama dan *Fee for Services* Cooperation and Fee for Services	**247.769**	246.045	1.723	0,70%	↑
Pendapatan Pas Pelabuhan Port pass Services	**126.755**	85.798	40.957	47,74%	↑
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Buildings, Water and Electricity Services	**48.860**	55.608	(6.748)	-12,13%	↓
Lain-Lain Miscellaneous Services	**15.653**	23.137	(7.484)	-32,35%	↓
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenues	**5.669.657**	**5.302.163**	**367.494**	**6,93%**	↑

Jumlah pendapatan operasi Perusahaan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp5,67 triliun, yaitu mengalami peningkatan sebesar 6,93% atau senilai Rp367,49 miliar bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5,30 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan STO *Branch* PMT Tahap 3 yang dimulai Bulan Juli Tahun 2024, adanya

The Company's operating revenues as of December 31, 2025, were recorded at Rp5.67 trillion, representing a 6.93% increase or Rp367.49 billion, compared to Rp5.30 trillion as of December 31, 2024. This increase was due to to the addition of the STO Branch PMT Phase 3, which will begin in July 2024; an adjustment to increase the TCK Food & Feed TMT rates;

penyesuaian kenaikan tarif TCK Food & Feed TMT, adanya penyesuaian kenaikan tarif Curah Cair Pipanisasi adanya Penyesuaian kenaikan Tarif BM IKD 2 & 3, adanya Penyesuaian kenaikan Tarif TOF pada *Branch* Belawan, terdapat kegiatan pelayanan baru kegiatan curah kering *Green Coke* di *Branch* Dumai, adanya peningkatan volume bongkar muat komoditas baja melalui kerja sama pelayanan *general cargo* dan curah kering *steel billet*, *steel slabs*, dan *steel coils*, adanya kegiatan sewa tanki dari PT KIAS pada layanan penyimpanan curah cair di *Branch* Janirah. Adanya kenaikan Pendapatan Pengusahaan Alat dikarenakan adanya peningkatan pendapatan *Dump Truck* sebagai turunan pendapatan atas pelayanan baru kegiatan *Green Coke* di *Branch* Dumai, adanya peningkatan volume bongkar muat produk baja peningkatan kegiatan *impor raw* sugar di *Branch* Janirah, kenaikan kegiatan FRU di *Branch* Benoa yang dan peningkatan kegiatan Alumina dan Bauksit di *Branch* Kijing.

an adjustment to increase the piped liquid bulk rates; an adjustment to increase the BM IKD 2 & 3 rates; an increase in TOF rates at the Belawan Branch; the launch of a new dry bulk service for Green Coke at the Dumai Branch; an increase in the volume of steel commodity loading and unloading through a collaborative service for general cargo and dry bulk steel billets, steel slabs, and steel coils; and tank leasing from PT KIAS for liquid bulk storage services at the Janirah Branch. There was an increase in Equipment Operating Revenue due to higher dump truck revenue resulting from the new Green Coke operations at the Dumai Branch; increased loading and unloading volumes of steel products; increased raw sugar import activities at the Janirah Branch; increased FRU activities at the Benoa Branch; and increased alumina and bauxite activities at the Kijing Branch.

Beban Operasi

Rincian beban operasi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Operating Expenses

Details of the Company's operating expenses can be seen in the table below.

Tabel Beban Operasi Tahun 2024-2025
Operating Expenses for 2024-2025

Beban Operasi Operating Expenses	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kerja Sama Mitra Usaha Partnership	3.218.073	3.267.263	(49.190)	-1,51%	↓
Pegawai Employees	717.239	694.177	23.063	3,32%	↑
Umum General	496.166	476.506	19.660	4,13%	↑
Pemeliharaan Maintenance	257.317	233.649	23.668	10,13%	↑
Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai Fuel and Supplies	184.926	142.155	42.771	30,09%	↑
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization	156.668	175.449	(18.782)	-10,70%	↓
Asuransi Insurance	35.126	20.564	14.562	70,81%	↑
Administrasi Kantor Office Administration	12.659	11.519	1.140	9,90%	↑
Jumlah Beban Operasi Total Operating Expenses	**5.078.174**	**5.021.281**	**56.893**	**1,13%**	↑

Jumlah beban operasi tahun 2025 tercatat sebesar Rp5,08 triliun. Angka ini meningkat sebesar 1,13% atau Rp56,89 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp5,02 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian Beban Imbalan Pasca Kerja sesuai perhitungan dari aktuaris pada Tahun 2025 berdampak pada penambahan beban sebesar 24 Miliar, selain itu adanya tambahan STO Tahap 3 per Juli 2024 sebagaimana berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan yang sudah dijelaskan di atas dan berdampak juga atas kenaikan beban usaha, kenaikan Beban Bahan dikarenakan adanya tambahan investasi 2 unit *Excavator*

Total operating expenses for 2025 were recorded at Rp5.08 trillion. This figure represents an increase of 1.13%, or Rp56.89 billion, compared to 2024's figure of Rp5.02 trillion. This was due to an adjustment to the Post-Employment Benefits Expense, as calculated by the actuary in 2025, resulting in an additional expense of Rp24 billion. Furthermore, the additional STO Phase 3 in July 2024, which also impacted the revenue increase described above and also resulted in an increase in operating expenses. The increase in Materials Expenses was due to the additional investment in two excavators and three forklifts to support smooth loading and unloading activities at

& 3 Unit *Forklift* untuk kegiatan mendukung kegiatan kelancaran kegiatan bongkar muat di *Branch* Belawan, adanya penggunaan bahan bakar B40 yang memiliki harga lebih tinggi sesuai kebijakan pemerintah pada *Branch* Janirah, kenaikan Beban Pemeliharaan dikarenakan meningkatnya kegiatan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan IT dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan transformasi pelabuhan di *Branch-Branch* dan kenaikan Beban Umum dikarenakan adanya tambahan beban PNBP 1% atas kegiatan bongkar muat yang mulai diberlakukan per Juli Tahun 2025.

Belawan Branch; the use of B40 fuel, which has a higher price in accordance with government policy, at Janirah Branch; the increase in Maintenance Expenses due to increased maintenance of port facilities and IT to improve service quality and port transformation at the Branches; and the increase in General Expenses due to the additional 1% Non-Tax State Revenue (PNBP) burden on loading and unloading activities, which took effect in July 2025.

Laba Usaha

Perusahaan mencatatkan laba usaha tahun 2025 sebesar Rp639,13 miliar. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 104,56% atau senilai Rp326,69 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp312,45 miliar. Peningkatan ini didorong oleh adanya peningkatan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Income from Operations

The Company recorded income from opreations amounted to Ro639.13 billion in 2025. This figure represents an increase of 104.56%, or Rp326.69 billion, compared to Rp312.45 billion in 2024. This increase was driven by the increase in revenue as explained above.

Pendapatan Keuangan

Finance Income

Tabel Pendapatan Keuangan Tahun 2024-2025
Finance Income for 2024-2025

Pendapatan Keuangan	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Bunga Deposito Interest Income from Deposits	87.583	78.333	9.251	11,81%	↑
Pendapatan Jasa Giro Interest Income on Current Account	11.804	13.788	(1.984)	-14,39%	↓
Jumlah Pendapatan Keuangan Total Finance Income	**99.388**	**92.121**	**7.267**	**7,89%**	↑

Per 31 Desember 2025, Perusahaan mencatatkan jumlah pendapatan keuangan sebesar Rp99,39 miliar, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp7,27 miliar atau 7,89% apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp92,12 miliar. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi penempatan dana *idle* dalam bentuk deposito/giro yang menghasilkan pendapatan dengan suku bunga yang paling menguntungkan.

As of December 31, 2025, the Company recorded finance income of Rp99.39 billion, representing an increase of Rp7.27 billion, or 7.89%, compared to Rp92.12 billion as of December 31, 2024. This was due to the optimization of the placement of idle funds in the form of deposits/current accounts which generate income with the most profitable interest rates.

Beban Keuangan

Pada tahun 2025, beban keuangan perusahaan yaitu beban bunga sewa tercatat sebesar Rp35,37 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp2,34 miliar atau 7,09% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp33,03 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo Beban Bunga Sewa Guna Usaha dari Tahun sebelumnya.

Finance Expenses

In 2025, the Company's finance expenses, consisting of lease interest expense, amounted to Rp35.37 billion. This represents an increase of Rp2.34 billion, or 7.09%, compared to Rp33.03 billion in 2024. This was due to an increase in the balance of finance lease interest expense from the previous year.

Laba sebelum Pajak Penghasilan Badan

Laba sebelum pajak penghasilan badan merupakan hasil dari laba usaha yang disesuaikan dengan pendapatan dan beban lain-lain di luar aktivitas utama operasional Perusahaan.

Income Before Corporate Income Tax

Income before corporate income tax represents the income from operations adjusted for other income and expenses outside the Company's core operational activities. This

Komponen ini mencerminkan kinerja operasional yang diperluas, termasuk pengaruh dari aktivitas keuangan, investasi, dan pos nonoperasional lainnya.

Adapun laba sebelum pajak penghasilan badan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp681,17 miliar, yaitu mengalami peningkatan sebesar 92,30% atau Rp326,95 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat senilai Rp354,22 miliar. Hal ini disebabkan peningkatan pertumbuhan pendapatan yang melebihi pertumbuhan beban usaha sebagaimana dijelaskan pada bagian pendapatan dan beban di atas sehingga berdampak pada peningkatan laba usaha dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban Pajak Penghasilan Badan

Perusahaan mencatatkan beban pajak penghasilan badan pada tahun 2025 sebesar Rp155,43 miliar, yaitu mengalami peningkatan sebesar 84,01% atau Rp70,96 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp84,47 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja laba usaha jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, peningkatan beban pajak penghasilan sejalan dengan peningkatan laba usaha.

Laba Tahun Berjalan

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp525,74 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 94,90% atau senilai Rp255,99 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp269,76 miliar. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan yang melebihi pertumbuhan beban usaha sebagaimana dijelaskan pada bagian pendapatan dan beban di atas sehingga berdampak pada peningkatan laba usaha dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba per Saham (Rupiah Penuh)

Perusahaan menyajikan laba per saham dasar dalam rangka memberikan gambaran tentang perkembangan imbal hasil yang dapat diberikan kepada pemegang saham.

component reflects expanded operational performance, including the effects of financial activities, investments, and other non-operating items.

In 2025, income before corporate income tax amounted to Rp681.17 billion, representing an increase of 92.30%, or Rp326.95 billion, compared to Rp354.22 billion in 2024. This was due to revenue growth that exceeded the growth in operating expenses, as explained in the section on revenue and expenses above, resulting in an increase in operating profit compared to the previous year.

Corporate Income Tax Expenses

The company recorded corporate income tax expenses of Rp155.43 billion in 2025, representing an increase of 84.01% or Rp70.96 billion compared to the Rp84.47 billion recorded in 2024. This was driven by an increase in operating profit compared to the previous year; the rise in income tax expenses was in line with the increase in operating profit.

Income for the Year

In 2025, the Company recorded income for the year of Rp525.74 billion. This represents an increase of 94.90%, or Rp255.99 billion, compared to Rp269.76 billion in 2024. This was driven by revenue growth that outpaced the growth in operating expenses, as explained in the section on revenue and expenses above, resulting in an increase in operating profit compared to the previous year.

Earnings per Share (Full Rupiah)

The Company presents basic earnings per share in order to provide an overview of the development of returns that can be given to shareholders.

Tabel Laba per Saham Tahun 2024-2025
Earnings per Share for 2024-2025

Laba per Saham Dasar Earnings per Share	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp-juta) Income for the Year Attributable to Owners of Parent Entity (Rp-million)	445.878	207.139	238.739	115,26%	↑
Jumlah Saham (Lembar Saham) Number of Shares (Shares)	1.480.305	1.480.305	-	-	-
Laba per Saham (Rp) Earnings per Share (Rp)	301.207	139.930	161.277	115,26%	↑

Perusahaan menyajikan laba per saham dasar untuk memberikan gambaran kepada pemegang saham atas imbal hasil yang dihasilkan dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

The Company presents basic earnings per share to provide shareholders with an overview of the returns generated from net income for the year attributable to owners of the parent entity.

Perusahaan membukukan laba per saham dasar sebesar Rp301.207,- per lembar saham, yaitu meningkat sebesar 115,26% bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp139.930,- per lembar saham.

The company reported basic earnings per share of Rp301,207,- per share, an increase of 115.26% compared to 2024, when earnings per share were Rp139,930,-.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flow

Tabel Laporan Arus Kas Tahun 2024-2025
Statement of Cash Flow for 2024-2025

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	**875.602**	128.443	747.160	581,71%	↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**(135.707)**	(77.457)	58.249	75,20%	↑
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**(414.846)**	(561.226)	146.380	-26,08%	↓
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**325.049**	(510.241)	835.290	-163,71%	↓
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**1.677.403**	2.187.644	(510.241)	-23,32%	↓
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	**2.002.452**	1.677.403	325.049	19,38%	↑

Perusahaan mencatatkan kas dan setara kas Perusahaan sebesar Rp2,00 triliun pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp325,05 miliar atau 19,38% dari tahun 2024 yang sebesar Rp1,68 triliun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas perusahaan yang bersumber dari penerimaan kas dari kegiatan operasional perusahaan, peningkatan pembayaran investasi dan adanya penurunan atas kegiatan pendanaan Perusahaan.

The Company recorded cash and cash equivalents amounted to Rp2.00 trillion in 2025. This figure represents an increase of Rp325.05 billion, or 19.38%, from Rp1.68 trillion in 2024. This was caused by an increase in the company's cash receipts sourced from cash receipts from the company's operational activities, an increase in investment payments and a decrease in the Company's financing activities.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024-2025
Cash Flow from Operating Activities for 2024-2025

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan dari Pelanggan Receipt from Customers	**5.852.976**	5.095.305	757.670	14,87%	↑
Penerimaan Pendapatan Bunga Receipt from Interest Income	**99.388**	92.121	7.267	7,89%	↑
Pembayaran kepada Pemasok Payment to Suppliers	**(4.122.246)**	(4.274.592)	152.347	-3,56%	↓
Pembayaran kepada Karyawan Payment to Employees	**(760.624)**	(629.716)	130.908	20,79%	↑
Pembayaran Pajak Penghasilan Income tax Payment	**(159.415)**	(146.763)	(12.652)	8,62%	↑
Pembayaran Aktivitas Operasi Lainnya Payment to Other Operating Activities	**(34.476)**	(7.912)	26.564	335,73%	↑
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**875.602**	**128.443**	**747.160**	**581,71%**	↑

Perusahaan mencatatkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp875,60 miliar di tahun 2025, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp747,16 miliar atau 581,71% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp128,44 miliar. Hal ini didorong oleh peningkatan penerimaan kas dari pendapatan Perusahaan dan optimalisasi penempatan dana serta efisiensi dalam hal pembayaran beban Perusahaan.

The Company recorded net cash provided by operating activities of Rp875.60 billion in 2025, representing an increase of Rp747.16 billion, or 581.71%, compared to Rp128.44 billion in 2024. This was driven by an increase in cash receipts from the Company's revenue, the optimization of fund allocation, and efficiency in the payment of the company's expenses.

Penerimaan dari Pelanggan
Penerimaan dari pelanggan merupakan penerimaan kas Perusahaan yang diterima dari pelanggan atau konsumen.

Penerimaan dari pelanggan tercatat sebesar Rp5,85 triliun pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 14,87% yaitu setara dengan Rp757,67 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp5,10 triliun. Peningkatan ini mencerminkan pencapaian target pencairan piutang usaha atas optimalisasi penagihan dan juga dipengaruhi oleh penerapan metode pembayaran *autocollection* dan *billing payment* yang memudahkan pengguna jasa untuk melakukan pembayaran jasa kepelabuhanan.

Receipt from Customers
Receipt from customers refer to cash inflows received by the Company from customers or clients.

Receipt from customers amounted to Rp5.85 trillion in 2025, representing an increase of 14.87%, or Rp757.67 billion, compared to Rp5.10 trillion in 2024. This increase reflects the achievement of the trade receivables disbursement target through optimized collection efforts and was also influenced by the implementation of auto-collection and billing payment methods, which facilitate port service users' payments.

Penerimaan Pendapatan Bunga
Penerimaan pendapatan bunga merupakan dana yang diterima dari penempatan dana Perusahaan dalam instrumen keuangan yang menghasilkan imbal hasil bunga.

Penerimaan pendapatan bunga tercatat sebesar Rp99,39 miliar pada tahun 2025, meningkat sebesar 7,89% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp92,12 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh optimalisasi penempatan dana *idle* dalam bentuk deposito atau giro yang menghasilkan pendapatan dengan suku bunga yang paling menguntungkan.

Receipt from Interest Income
Receipt from interest income represents funds earned from the Company's placement of funds in interest-bearing financial instruments.

Receipt from interest income amounted to Rp99.39 billion in 2025, representing an increase of 7.89% compared to Rp92.12 billion in 2024. This increase was driven by the optimization of idle funds in the form of deposits or current accounts, which generate income at the most favorable interest rates.

Pembayaran kepada Pemasok
Pembayaran kepada pemasok merupakan arus kas keluar atas kewajiban kepada pihak ketiga untuk pengadaan barang, jasa, dan investasi operasional.

Pembayaran kepada pemasok tercatat sebesar Rp4,12 triliun pada tahun 2025, mengalami penurunan sebesar 3,56% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4,27 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan dalam hal pembayaran yang terjadwal sesuai dengan periode tagihannya sementara tahun sebelumnya terdapat tagihan periode yang lalu yang dibayar pada periode berikutnya akibat keterlambatan proses penagihan.

Payment to Suppliers
Payment to suppliers represent cash outflows to third parties for procurement of goods, services, and operational investments.

Payment to suppliers amounted to Rp4.12 trillion in 2025, representing a decrease of 3.56% compared to Rp4.27 trillion in 2024. This was influenced by improvements in scheduled payments according to the billing period. In the previous year, some bills from previous periods were paid in the following period due to delays in the billing process.

Pembayaran kepada Karyawan
Pembayaran kepada karyawan mencakup seluruh kompensasi yang dibayarkan oleh Perusahaan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya.

Pembayaran kepada karyawan tercatat sebesar Rp760,62 miliar pada tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp130,91 milliar atau 20,79% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp629,72 miliar. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan karyawan yang berasal dari Regional PT Pelabuhan Indonesia (Persero) disebabkan adanya penambahan cabang yang diserahoperasikan ke PT Pelindo Multi Terminal.

Payment to Employees
Payment to employees includes all compensation paid by the Company, such as base salaries, allowances, bonuses, and other benefits.

Payments to employees totaled Rp760.62 billion in 2025, an increase of 20.79% compared to 2024, when they totaled Rp629.72 billion. This increase was primarily driven by an increase in the number of employees from PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s regional divisions due to the addition of branches transferred to PT Pelindo Multi Terminal.

Pembayaran Pajak Penghasilan
Pembayaran pajak merupakan pengeluaran kas untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul dari aktivitas usaha Perusahaan.

Pembayaran pajak pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp159,42 miliar, meningkat sebesar Rp12,65 miliar atau 8,62% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp146,76 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan Perusahaan yang mengakibatkan peningkatan jumlah pembayaran PPN, dan peningkatan jumlah karyawan yang juga meningkatkan jumlah PPh pasal 21 atas penghasilan peningkatan jumlah karyawan.

Pembayaran Aktivitas Operasi Lainnya
Pembayaran aktivitas operasi lainnya mencakup pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam kategori utama namun tetap berkaitan dengan kegiatan operasional Perusahaan.

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatatkan pembayaran aktivitas operasi lainnya sebesar Rp34,48 miliar, atau meningkat sebesar 335,73% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp7,91 miliar.

Income Tax Payment
Income tax payment represents cash outflows to meet tax obligations arising from the Company's business activities.

Income tax payment amounted to Rp159.42 billion in 2025, representing an increase of Rp12.65 billon or 8.62% compared to Rp146.76 billion in 2024. This increase was driven by increased revenue, which resulted in increased VAT payments, and an increase in the number of employees, which also increased Article 21 Income Tax on the income of the increased number of employees.

Payment to Other Operating Activities
Payment to other operating activities includes cash expenditures not categorized under the main activities but still related to the Company's operations.

In 2025, the Company recorded payment to other operating activities of Rp34.48 billion, representing an increase of 335.73% compared to Rp7.91 billion in 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024-2025
Cash Flows from Investing Activities for 2024–2025

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)	
Perolehan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Tidak Lancar Lainnya Acquisitions of Fixed Assets and Other Non-Current Assets	**(150.933)**	(77.457)	(73.476)	94,86%	↑
Hasil Pelepasan Aset Tetap Proceeds from Disposals of Fixed Assets	**14.542**	-	-	-	-
Penerimaan dari Penjualan Entitas Anak Proceed on Sales of Subsidiaries	**684**	-	-	-	-
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	**(135.707)**	**(77.457)**	**(58.249)**	**75,20%**	↑

Perusahaan mencatatkan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp135,71 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp58,25 miliar atau 75,20% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp77,46 miliar. Hal lini disebabkan oleh sebagian investasi tahun 2024 baru terealisasi pembayarannya di tahun 2025 dan terdapat penjualan aset tetap oleh anak Perusahaan di PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Indonesia Kendaraan Terminal.

The company recorded net cash used in investing activities amounted to Rp135.71 billion in 2025. This figure represents an increase of Rp58.25 billion, or 75.20%, compared to Rp77.46 billion in 2024. This was due to the fact that part of the 2024 investments were only realized for payment in 2025, and there were sales of fixed assets by the subsidiaries at PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT Indonesia Kendaraan Terminal.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024-2025
Cash Flow from Financing Activities for 2024-2025

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**2025 (Rp-juta)** (Rp-million)	**2024 (Rp-juta)** (Rp-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Obligations	**(26.348)**	(28.393)	(2.046)	-7,20% ↓
Pembayaran Dividen dari Entitas Anak kepada Kepentingan Nonpengendali Payment of Dividend from Subsidiary to Non-Controlling Interests	**(38.499)**	(57.833)	(19.334)	-33,43% ↓
Pembayaran Dividen Payment of Dividend	**(350.000)**	(475.000)	(125.000)	-26,32% ↓
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used in Financing Activities	**(414.846)**	(561.226)	(146.380)	-26,08% ↓

Pada tahun 2025, kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp414,85 miliar, yaitu menurun sebesar 26,08% atau senilai Rp146,38 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp561,23 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan pembayaran dividen PMT ke pemegang saham disebabkan penetapan perhitungan dividen berdasarkan perhitungan target laba tahun 2024 yang belum mencapai target sesuai RKAP tahun 2024 dan adanya kenaikan pembayaran liabilitas sewa jangka Panjang ke Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

In 2025, net cash used in financing activities amounted to Rp414.85 billion, representing a decrease of 26.08%, or Rp146.38 billion, compared to Rp561.23 billion in 2024. This was due to a decrease in dividend payments by PMT to shareholders as a result of the determination of dividend calculations based on the 2024 profit target, which did not achieve the target set out in the 2024 RKAP, as well as an increase in long-term lease liability payments to Regional 2 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Kemampuan Perusahaan dalam Melaksanakan Operasi yang Efektif dan Efisiensi Serta Menghasilkan Laba atau Keuntungan

The Company's Ability to Conduct Effective and Efficient Operations and Generate Profit

Sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas operasional dan optimalisasi profitabilitas, Perusahaan secara berkala mengevaluasi kinerjanya melalui sejumlah indikator keuangan utama, yang meliputi Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pertumbuhan. Analisis terhadap rasio-rasio tersebut memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kemampuan Perusahaan dalam menjalankan operasional secara efisien serta menciptakan kinerja keuangan yang berkelanjutan selama periode pelaporan.

As part of its efforts to maintain operational effectiveness and optimize profitability, the Company periodically evaluates its performance using several key financial indicators, including Activity Ratios, Profitability Ratios, and Growth Ratios. The analysis of these ratios provides a comprehensive overview of the Company's ability to conduct its operations efficiently and generate sustainable financial performance throughout the reporting period.

Akun Account	**2025**	**2024**	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
Rasio Aktivitas Activity Ratio				
Rata-Rata Pelunasan Utang (hari) Average Debt Repayment (days)	**24**	37	-35,14%	↓
Rata-Rata Penagihan Piutang (hari) Average Receivables Collectability (days)	**22**	27	-18,52%	↓
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio				
Rasio Operasi (%) Operating Ratio (%)	**89,57**	94,70	-5,42%	↓
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)				
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**9,27**	5,09	82,12%	↑
Margin EBITDA (%) EBITDA Margin (%)	**13,24**	8,61	53,77%	↑
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	**133,98**	127,83	4,81%	↑
Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%) Return on Equitiy (ROE) (%)	**25,57**	13,39	90,96%	↑
Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset (%) Return on Asset (ROA) (%)	**12,42**	6,50	91,08%	↑
Imbal Hasil atas Modal (%) Return on Invested Capital (ROIC) (%)	**23,92**	11,93	100,50%	↑
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio				
Pendapatan Operasi (%) Operating Revenues (%)	**6,93**	5,49	26,23	↑
Beban Operasi (%) Operating Expenses (%)	**1,13**	18,15	-93,77	↓
Laba Usaha (%) Income from Operations (%)	**110,58**	(63,82)	273,27%	↑

Akun Account	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
Laba Tahun Berjalan (%) Income for the Year (%)	94,90	(56,39)	268,29%	↑
EBITDA (%)	64,40	(50,95)	226,40%	↑
Aset (%) Assets (%)	11,03	(6,42)	271,81%	↑
Liabilitas (%) Liabilities (%)	17,03	93,22	-81,73%	↓
Ekuitas (%) Equity (%)	5,77	(10,55)	154,69%	↑

RASIO AKTIVITAS

1. Rata-rata pelunasan utang menurun dari 37 hari pada tahun 2024 menjadi 24 hari pada tahun 2025 atau turun sebesar 35,14%. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemasok sehingga mendukung pengelolaan modal kerja yang lebih baik.
2. Rata-rata penagihan piutang juga menurun dari 27 hari menjadi 22 hari atau turun sebesar 18,52%, yang mencerminkan semakin efektifnya proses penagihan piutang dan percepatan penerimaan kas dari pelanggan.

RASIO PROFITABILITAS

1. Rasio operasi menurun menjadi 89,57% dari 94,70%, yang menunjukkan proporsi beban operasional terhadap pendapatan semakin rendah sehingga efisiensi operasional Perusahaan mengalami perbaikan.
2. Margin laba bersih meningkat dari 5,09% menjadi 9,27%, sedangkan margin EBITDA naik dari 8,61% menjadi 13,24%, yang menunjukkan peningkatan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba dan arus kas operasional.
3. Perputaran aset meningkat dari 127,83% menjadi 133,98%, mengindikasikan bahwa aset Perusahaan dimanfaatkan secara semakin efisien untuk menghasilkan pendapatan.
4. Laba (Rugi) terhadap Ekuitas meningkat dari 11,93% menjadi 23,92%, Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset meningkat dari 6,50% menjadi 12,42%, serta Imbal Hasil atas Modal meningkat dari 13,39% menjadi 25,57. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin optimalnya kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan pengembalian bagi pemegang saham maupun atas aset dan modal yang dikelola.

RASIO PERTUMBUHAN

1. Pertumbuhan pendapatan operasi meningkat dari 5,49% menjadi 6,93%, menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Pertumbuhan beban operasi menurun signifikan dari 18,15% menjadi 1,13%, mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam mengendalikan peningkatan beban operasional sehingga lebih selaras dengan pertumbuhan usaha.

ACTIVITY RATIOS

1. The average trade payables settlement period decreased from 37 days in 2024 to 24 days in 2025, representing a decline of 35.14%. This indicates an improvement in the Company's efficiency in meeting its obligations to suppliers, thereby supporting better working capital management.
2. The average trade receivables collection period also decreased from 27 days to 22 days, or by 18.52%, reflecting the increasing effectiveness of the Company's receivables collection process and faster cash receipts from customers.

PROFITABILITY RATIOS

1. The operating ratio decreased to 89.57% from 94.70%, indicating that the proportion of operating expenses to revenue has declined, resulting in improved operational efficiency.
2. The net profit margin increased from 5.09% to 9.27%, while the EBITDA margin rose from 8.61% to 13.24%, demonstrating the Company's improved ability to generate profits and operating cash flows.
3. Asset turnover increased from 127.83% to 133.98%, indicating that the Company's assets were utilized more efficiently to generate revenue.
4. Return on Equity increased from 11.93% to 23.92%, Return on Assets (ROA) increased from 6.50% to 12.42%, and Return on Invested Capital (ROIC) increased from 13.39% to 25.57. These increases reflect the Company's increasingly optimal ability to generate returns for shareholders as well as on the assets and capital it manages.

GROWTH RATIOS

1. Operating revenue growth increased from 5.49% to 6.93%, indicating stronger revenue growth compared to the previous year.

2. Operating expense growth declined significantly from 18.15% to 1.13%, reflecting the Company's success in controlling the increase in operating expenses, making them more aligned with business growth.

3. Laba usaha, laba tahun berjalan, dan EBITDA kembali mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 110,58%, 94,90%, dan 64,40%, setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Kondisi ini menunjukkan pemulihan yang kuat pada kinerja operasional dan profitabilitas Perusahaan.
4. Total aset, liabilitas, dan ekuitas masing-masing tumbuh sebesar 11,03%, 17,03%, dan 5,77%, yang mencerminkan ekspansi usaha yang diikuti dengan penguatan struktur keuangan Perusahaan.

Secara keseluruhan, tahun 2025 menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan efisiensi pengelolaan modal kerja tercermin dari semakin singkatnya periode pelunasan utang dan penagihan piutang. Di sisi profitabilitas, Perusahaan berhasil meningkatkan margin usaha, margin laba bersih, margin EBITDA, serta pengembalian atas aset, modal, dan ekuitas. Selain itu, pertumbuhan pendapatan yang disertai pengendalian beban operasional berhasil mendorong pemulihan laba usaha, laba tahun berjalan, dan EBITDA. Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas juga menunjukkan bahwa Perusahaan mampu menjaga ekspansi usaha dengan tetap mempertahankan struktur keuangan yang sehat. Ke depan, Perusahaan akan terus memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas aset, mengoptimalkan pengelolaan modal kerja, serta memperluas peluang bisnis untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Income from operations, income for the year, and EBITDA returned to positive growth, recording increases of 110.58%, 94.90%, and 64.40%, respectively, after experiencing contraction in the previous year. This condition demonstrates a strong recovery in the Company's operational performance and profitability.
4. Total assets, liabilities, and equity grew by 11.03%, 17.03%, and 5.77%, respectively, reflecting business expansion accompanied by the strengthening of the Company's financial structure.

Overall, 2025 marked a significant improvement in performance compared to the previous year. Enhanced efficiency in working capital management was reflected in the shorter trade payables settlement and trade receivables collection period. In terms of profitability, the Company successfully improved its operating margin, net profit margin, EBITDA margin, and returns on assets, capital, and equity. In addition, revenue growth, accompanied by effective control of operating expenses, drove the recovery of income from operations, income for the year, and EBITDA. The growth in assets, liabilities, and equity also indicates that the Company was able to sustain business expansion while maintaining a sound financial structure. Going forward, the Company will continue to strengthen operational efficiency, enhance asset productivity, optimize working capital management, and expand business opportunities to support sustainable growth and create added value for all stakeholders.

Kemampuan Membayar Utang
Ability to Pay Debts

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dievaluasi melalui rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

The Company's ability to meet its financial obligations is evaluated through its solvency and liquidity ratios. The solvency ratio is used to measure the Company's ability to meet all of its obligations, both short-term and long-term. Meanwhile, the liquidity ratio is used to measure the Company's ability to meet its short-term obligations.

RASIO LIKUIDITAS: KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tercermin melalui rasio likuiditas sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

LIQUIDITY RATIO: ABILITY TO PAY SHORT-TERM DEBTS

The Company's ability to meet its short-term obligations is reflected in its liquidity ratios, as presented in the following table.

Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	2025	2024	Selisih/Kenaikan (Penurunan) (%) Difference/Increase (Decrease) (%)	
Rasio Kas (kali) Cash Ratio (times)	1,14	1,13	0,88%	↑
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times)	1,56	1,73	-9,83%	↓
Rasio Cepat (kali) Quick Ratio (times)	1,27	1,44	-11,81%	↓
Kas Operasi terhadap Pendapatan (%) Operating Cash to Revenues (%)	16,03	3,73	329,76%	↑

Meskipun rasio lancar dan rasio cepat masing-masing menurun menjadi 1,56 kali dan 1,27 kali pada tahun 2025, tingkat likuiditas Perusahaan tetap berada pada level yang memadai karena kedua rasio tersebut masih berada di atas angka 1. Selain itu, rasio kas meningkat menjadi 1,14 kali, disertai peningkatan yang signifikan pada rasio kas operasi terhadap pendapatan menjadi 16,03% dari 3,73% pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional semakin kuat, sehingga mendukung pemenuhan kewajiban jangka pendek serta meningkatkan fleksibilitas keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Although the current ratio and quick ratio declined to 1.56 times and 1.27 times, respectively, in 2025, the Company's liquidity remained at an adequate level, as both ratios were still above 1. In addition, the cash ratio increased to 1.14 times, accompanied by a significant increase in the operating cash flow to revenue ratio to 16.03% from 3.73% in the previous year. This condition indicates that the Company's ability to generate cash flow from operating activities has become stronger, thereby supporting the fulfillment of short-term obligations and enhancing financial flexibility in carrying out its business activities.

RASIO SOLVABILITAS: KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

SOLVENCY RATIO: ABILITY TO PAY SHORT-TERM AND LONG -TERM DEBTS

Rasio Solvabilitas Solvency Ratio	2025	2024	Selisih/Kenaikan (Penurunan) Difference/Increase (Decrease)	
Liabilitas terhadap ekuitas (%) Debt to Equity (%)	-	-	-	-
Liabilitas terhadap Aset (%) Debt to Assets (%)	-	-	-	-
Net Debt to EBITDA (kali) Net Debt to EBITDA (times)	-	-	-	-
Financial Leverage (kali) Financial Leverage (times)	1,93	1,83	5,46%	↑
Debt Service Coverage Ratio (kali) Debt Service Coverage Ratio (times)	16,39	8,51	92,60%	↑
EBITDA *to Debt Service* (kali) EBITDA to Debt Service (times)	20,79	13,82	50,43%	↑

Pada tahun 2025, indikator solvabilitas menunjukkan kondisi keuangan Perusahaan yang tetap kuat. *Financial Leverage* meningkat dari 1,83 kali menjadi 1,93 kali. Di sisi lain, *Debt Service Coverage Ratio* mengalami peningkatan signifikan menjadi 16,39 kali dari 8,51 kali, yang mencerminkan semakin kuatnya kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang melalui arus kas operasional. Hal tersebut didukung oleh peningkatan EBITDA to *Debt Service* menjadi 20,79 kali dari 13,82 kali, yang menunjukkan bahwa EBITDA Perusahaan semakin memadai untuk menutup kewajiban debt service dan menjaga keberlanjutan struktur permodalan.

In 2025, the Company's solvency indicators continued to reflect a strong financial position. Financial Leverage increased from 1.83 times to 1.93 times. On the other hand, the Debt Service Coverage Ratio increased significantly from 8.51 times to 16.39 times, reflecting the Company's stronger ability to meet its debt service obligations through operating cash flows. This was supported by an increase in EBITDA to Debt Service from 13.82 times to 20.79 times, indicating that the Company's EBITDA was increasingly sufficient to cover debt service obligations and maintain the sustainability of its capital structure.

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectability Rate

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diukur melalui nilai *Collection Period*. Semakin rendah nilai *Collection Period*, semakin cepat pula Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dari pelanggan.

The Company's ability to collect receivables can be determined by calculating the Collection Period value. Lower Collection Period value indicates faster ability to to collect receivables.

	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal Nominal	(%)	
Rata-Rata Penagihan Piutang (hari) Average Receivables Collectability (days)	22	27	5	-18,52%	↓
Penagihan Piutang (hari) Receivables Collectability (days)	15	33	18	-54,55%	↓

Pada tahun 2025, rata-rata waktu penagihan piutang tercatat sebesar 22 hari, menurun sebesar 5 hari atau 18,52% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 27 hari. Sementara itu, realisasi waktu penagihan piutang tercatat sebesar 15 hari, menurun dibandingkan 33 hari pada tahun sebelumnya, atau turun sebesar 54,55%. Hal ini disebabkan semakin baik metode penagihan piutang dan penggunaan metode pembayaran nota jasa kepelabuhan melalui billing payment dan *autocollection system.*

In 2025, the average accounts receivable collection period was 22 days, a decrease of 5 days, or 18.52%, compared to 27 days in 2024. Meanwhile, the actual accounts receivable collection period was 15 days, down from 33 days in the previous year a decrease of 54.55%. This was due to improved accounts receivable collection methods and the use of billing payment and auto-collection systems for port service invoices.

Untuk memberikan gambaran mengenai piutang usaha jangka pendek dan jangka panjang, berikut disajikan piutang usaha berdasarkan umur piutang.

To provide an overview of the Company's short-term and long-term trade receivables, the following table presents trade receivables by aging category.

Piutang Usaha Berdasarkan Umur Piutang
Trade Receivables by Aging Category

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Belum Jatuh Tempo Current	136.559	525.009	(388.450)	-73,99%	↓
Lewat Jatuh Tempo: Overdue:					
1 sampai 90 hari 1 until 90 days	200.145	115.636	84.509	73,08%	↑
91 sampai 180 hari 91 until 180 days	26.519	14.747	11.772	79,82%	↑
Lebih dari 180 hari More than 180 days	124.399	162.834	(38.435)	-23,60%	↓
Sub Jumlah Sub Total	**487.622**	**818.226**	**(330.604)**	**-40,40%**	↓
Penyisihan Penurunan Nilai Allowance for Impairment	(143.186)	(159.709)	16.522	-10,35%	↓
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Total Trade Receivables - Net	**344.436**	**658.518**	**(314.081)**	**-47,70%**	↓

Total piutang usaha bruto Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp487,62 miliar, menurun sebesar Rp330,60 miliar dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp818,23 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya piutang yang belum jatuh tempo, yang turun dari Rp525,01 miliar menjadi Rp136,56 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan saldo tagihan yang masih berada dalam periode pembayaran normal pada akhir tahun.

Di sisi lain, piutang yang telah jatuh tempo dalam kategori 1–90 hari meningkat menjadi Rp200,15 miliar dari Rp115,64 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada kelompok piutang berumur 91–180 hari yang mencapai Rp26,52 miliar dibandingkan Rp14,75 miliar pada tahun 2024. Peningkatan pada kedua kelompok umur piutang tersebut mencerminkan adanya pergeseran sebagian saldo piutang ke kategori jatuh tempo dalam jangka pendek hingga menengah.

Sementara itu, piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 180 hari menurun menjadi Rp124,40 miliar dari Rp162,83 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang berumur panjang yang memiliki risiko penagihan lebih tinggi.

Sejalan dengan penurunan piutang usaha bruto, penyisihan penurunan nilai juga berkurang menjadi Rp143,19 miliar dibandingkan Rp159,71 miliar pada tahun 2024. Adapun setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai, jumlah piutang usaha bersih pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp344,44 miliar, lebih rendah 47,70% apabila dibandingkan dengan Rp658,52 miliar pada tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Perseroan terus melakukan pengelolaan piutang secara aktif melalui pemantauan kualitas piutang, penguatan proses penagihan, serta penerapan langkah-langkah mitigasi risiko kredit untuk menjaga kualitas aset dan mendukung kesehatan keuangan Perseroan.

The Company's gross trade receivables amounted to Rp487.62 billion in 2025, representing a decrease of Rp330.60 billion compared to Rp818.23 billion in 2024. This decline was primarily attributable to a reduction in receivables that were not yet due, which decreased from Rp525.01 billion to Rp136.56 billion. This condition indicates a lower outstanding balance of receivables that remained within the normal payment period at year-end.

On the other hand, receivables past due by 1–90 days increased to Rp200.15 billion from Rp115.64 billion in the previous year. An increase was also recorded in the 91–180 days aging category, which reached Rp26.52 billion compared to Rp14.75 billion in 2024. The increase in these two aging categories reflects a shift in a portion of receivables into the short- to medium-term past-due categories.

Meanwhile, receivables that were more than 180 days past due declined to Rp124.40 billion from Rp162.83 billion in the previous year. This decrease indicates an improvement in the management and settlement of long-overdue receivables, which generally carry a higher collection risk.

In line with the decline in gross trade receivables, the allowance for impairment also decreased to Rp143.19 billion from Rp159.71 billion in 2024. After deducting the allowance for impairment, net trade receivables amounted to Rp344.44 billion in 2025, representing a decrease of 47.70% compared to Rp658.52 billion in the previous year. This development demonstrates that the Company continues to actively manage its receivables through ongoing monitoring of receivables quality, strengthening collection processes, and implementing credit risk mitigation measures to maintain asset quality and support the Company's financial soundness.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal serta Dasar Penentuan Kebijakan

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure, Including the Basis for Determining the Policy

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The primary objective of capital management is to maintain a sound capital ratio in order to support the business and maximize returns to shareholders. The Company manages its capital structure and makes adjustments, where necessary, in response to changes in economic conditions. To maintain and adjust its capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares, or obtain financing through borrowings.

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Struktur permodalan Perseroan pada tahun 2025 tetap ditopang sepenuhnya oleh ekuitas atau modal sendiri. Perseroan juga tidak memiliki utang berbasis bunga, sehingga struktur pendanaan yang dimiliki mencerminkan tingkat leverage yang rendah, fleksibilitas keuangan yang baik, serta kemampuan yang kuat dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

THE COMPANY'S CAPITAL STRUCTURE

The Company's capital structure in 2025 continued to be fully supported by equity. The Company also had no interest-bearing debt, resulting in a financing structure that reflects a low level of leverage, strong financial flexibility, and a solid ability to maintain long-term financial stability.

	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Total Ekuitas Total Equity	2.259.178	2.135.991	123.187	5,77%
Total Modal Total Capital	**2.259.178**	**2.135.991**	**123.187**	**5,77%**

Total ekuitas dan total modal Perseroan masing-masing tercatat sebesar Rp2,26 triliun pada tahun 2025, meningkat Rp123,19 miliar dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp2,14 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan penguatan basis permodalan Perseroan yang mendukung keberlangsungan operasional dan pengembangan usaha. Dengan struktur pendanaan yang konservatif dan didukung modal sendiri, Perseroan tetap memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Total equity and total capital of the Company each amounted to Rp2.26 trillion in 2025, representing an increase of Rp123.19 billion compared to Rp2.14 trillion in 2024. This increase reflects the strengthening of the Company's capital base, supporting operational sustainability and business development. With a conservative financing structure supported by equity, the Company continues to maintain a strong ability to preserve financial stability and support sustainable business growth.

DASAR PEMILIHAN STRUKTUR MODAL

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam tujuan, kebijakan, maupun proses pengelolaan modal Perusahaan. Keputusan untuk mempertahankan struktur permodalan yang didominasi oleh ekuitas dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor utama sebagai berikut:

1. Minimnya kebutuhan pembiayaan eksternal, karena kegiatan operasional dan belanja modal masih dapat didukung dari kas internal.
2. Stabilitas arus kas operasi, yang memungkinkan Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan tanpa perlu pembiayaan eksternal.
3. Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang konservatif, guna menjaga rasio solvabilitas tetap sehat dan meminimalkan risiko *leverage*.
4. Ketentuan pemegang saham dan grup usaha Pelindo, yang mengarahkan agar pembiayaan dilakukan secara prudent dan efisien.

Struktur modal berbasis ekuitas yang kuat memberikan fleksibilitas bagi PMT dalam merespons dinamika usaha, mendukung ekspansi secara terukur, serta memperkuat kepercayaan investor dan para pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

BASIS FOR DETERMINING THE CAPITAL STRUCTURE

Throughout 2025, there were no changes to the Company's capital management objectives, policies, or processes. The decision to maintain a capital structure predominantly financed by equity was based on the following key considerations:

1. Minimal need for external financing, as operating activities and capital expenditures could still be funded through internally generated cash.
2. Stable operating cash flows, enabling the Company to meet its financial obligations without requiring external financing.
3. Commitment to conservative financial management, in order to maintain a healthy solvency ratio and minimize leverage risk.
4. Policies of the shareholders and the Pelindo Group, which encourage prudent and efficient financing practices.

A strong equity-based capital structure provides PMT with the flexibility to respond to business dynamics, support measured expansion, and strengthen the confidence of investors and other stakeholders in the long-term sustainability of the Company's business.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Investments

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal yang dimiliki oleh Perusahaan.

As of the end of 2025, the Company had no material commitments for capital investments.

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Investments

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Investasi Barang Modal merupakan pengeluaran dana Perusahaan untuk perolehan, pembangunan, dan/atau pengembangan aset tetap yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan mesin. Investasi Barang Modal bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan keandalan operasional serta memperkuat daya saing Perusahaan secara berkelanjutan. Realisasi Investasi Barang Modal Perusahaan pada tahun 2025, baik secara konsolidasian, Perusahaan Induk, maupun Entitas Anak, disajikan pada tabel berikut:

PURPOSE OF CAPITAL EXPENDITURE

Capital Expenditure represents the Company's expenditure for the acquisition, construction, and/or development of fixed assets that provide economic benefits beyond one accounting period, such as land, buildings, equipment, and machinery. Capital Expenditure is aimed at supporting the enhancement of operational capacity and reliability and strengthening the Company's sustainable competitiveness. The realization of the Company's Capital Expenditure in 2025, on a consolidated basis as well as at the Parent Company and Subsidiary levels, is presented in the following table:

NILAI DAN JENIS INVESTASI BARANG MODAL

VALUE AND TYPES OF CAPITAL EXPENDITURE

Investasi PMT Tahun 2025 (Konsolidasi)
PMT Investments in 2025 (Consolidated)

Jenis Investasi Investment Type	Nilai Investasi Investment Value				Program Investasi Investment Program			
	Realisasi Tahun 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	RKAP Tahun 2025 (Rp-juta) 2025 RKAP (Rp-million)	Penyerapan Anggaran Tahun 2025 (%) 2025 Budget Absorption (%)		Realisasi Tahun 2025 (Program) 2025 Realization (Program)	RKAP Tahun 2025 (Program) 2025 RKAP (Program)	Pencapaian Program (%) Program Achievement (%)	
	(1)	(2)	(1/2)		(3)	(4)	(3/4)	
Investasi Fisik Physical Investment								
1. Bangunan Fasilitas Facility Building	16.701	20.580	81,15%	↑	3	4	75,00%	↑
2. Alat-Alat Fasilitas Facility Equipment	46.614	42.900	108,66%	↑	4	4	100,00%	↑
3. Instalasi Fasilitas Facility Installation	236.833	311.600	76,01%	↑	14	14	100,00%	↑
4. Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Peralatan dan Perlengkapan Tools and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Emplasemen Emplacement	3.245	3.700	87,70%	↑	1	1	100,00%	↑
Jumlah Investasi Fisik Total Physical Investment	**303.393**	**378.780**	**80,10%**	↑	**22**	**23**	**95,65%**	↑
Investasi Non Fisik Non-Physical Investment	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Equity investment	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Total Investment	**303.393**	**378.780**	**80,10%**	↑	**22**	**23**	**95,65%**	↑

Pada tahun 2025, realisasi investasi barang modal secara konsolidasi mencapai Rp303,39 miliar atau 80,10% dari RKAP yang ditetapkan sebesar Rp378,78 miliar. Dari sisi pelaksanaan, 22 dari 23 program investasi berhasil direalisasikan atau setara dengan 95,65%. Capaian ini menunjukkan tingkat pelaksanaan program yang sangat baik meskipun masih terdapat beberapa program yang belum terserap secara optimal dari sisi anggaran. Secara umum, realisasi investasi tahun 2025 difokuskan pada pengembangan fasilitas dan peralatan pelabuhan guna mendukung peningkatan kapasitas layanan serta efisiensi operasional Perusahaan.

In 2025, the consolidated realization of capital investments reached Rp303.39 billion, or 80.10% of the approved RKAP budget of Rp378.78 billion. In terms of implementation, 22 out of 23 investment programs were completed, equivalent to an achievement rate of 95.65%. This reflects a very high level of program execution, although several programs did not fully utilize their allocated budgets. Overall, the 2025 capital investments were focused on the development of port facilities and equipment to support enhanced service capacity and operational efficiency.

Berikut rincian realisasi investasi barang modal tahun 2025:

1. Bangunan fasilitas mencatat realisasi investasi sebesar Rp16,70 miliar atau 81,15% dari RKAP sebesar Rp20,58 miliar. Dari sisi pelaksanaan program, 3 dari 4 program investasi berhasil direalisasikan atau setara dengan 75,00%, sehingga masih terdapat satu program yang belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
2. Alat-alat fasilitas membukukan realisasi sebesar Rp46,61 miliar atau 108,66% dari RKAP sebesar Rp42,90 miliar. Seluruh 4 program investasi yang direncanakan berhasil direalisasikan dengan tingkat pencapaian program 100%. Realisasi yang melampaui anggaran menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan investasi untuk mendukung operasional Perusahaan.
3. Instalasi fasilitas menjadi kontributor terbesar investasi barang modal PMT dengan realisasi sebesar Rp236,84 miliar atau 76,01% dari RKAP sebesar Rp311,60 miliar. Seluruh 14 program investasi yang direncanakan berhasil dilaksanakan dengan tingkat pencapaian program 100%, meskipun beberapa program masih menunjukkan penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan rencana awal.
4. Emplasemen mencatat realisasi investasi sebesar Rp3,25 miliar atau 87,70% dari RKAP sebesar Rp3,70 miliar. Program investasi pada kategori ini berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 1 dari 1 program atau 100%.

Sementara itu, pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi investasi pada kategori jalan, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, investasi nonfisik, maupun penyertaan modal.

Secara keseluruhan, realisasi investasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dibandingkan target yang ditetapkan, tercermin dari tingkat penyelesaian program yang mencapai 95,65%, dengan sebagian besar program investasi strategis berhasil direalisasikan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan operasional PT Pelindo Multi Terminal.

The details of the 2025 capital investment realization are as follows:

1. Facility Buildings recorded capital investment realization of Rp16.70 billion, or 81.15% of the RKAP budget of Rp20.58 billion. In terms of program implementation, 3 out of 4 investment programs were completed, representing an achievement rate of 75.00%, while one program remained unfinished during the year.
2. Facility Equipment recorded investment realization of Rp46.61 billion, or 108.66% of the RKAP budget of Rp42.90 billion. All four planned investment programs were successfully completed, achieving a 100% program completion rate. The realization exceeding the budget reflects adjustments to investment requirements in support of the Company's operations.
3. Facility Installations represented the largest component of PMT's capital investments, with realization amounting to Rp236.84 billion, or 76.01% of the RKAP budget of Rp311.60 billion. All 14 planned investment programs were completed, achieving a 100% program completion rate, although several programs recorded lower budget absorption than originally planned.
4. Yards recorded capital investment realization of Rp3.25 billion, or 87.70% of the RKAP budget of Rp3.70 billion. The investment program in this category was fully completed, with 1 out of 1 program successfully implemented, representing a 100% achievement rate.

Meanwhile, in 2025 there was no investment realization in the categories of roads, buildings, infrastructure and utilities, equipment and supplies, non-physical investments, or equity investments.

Overall, the 2025 investment realization reflects improved effectiveness in program implementation compared to the established targets, as demonstrated by a program completion rate of 95.65%, with the majority of strategic investment programs successfully implemented to support the infrastructure development and operational activities of PT Pelindo Multi Terminal.

Investasi PMT Tahun 2025 (Induk)
PMT Investments in 2025 (Parent Company)

Jenis Investasi Investment Type	**Nilai Investasi** Investment Value				**Program Investasi** Investment Program			
	Realisasi Tahun 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	**RKAP Tahun 2025 (Rp-juta)** 2025 RKAP (Rp-million)	**Penyerapan Anggaran Tahun 2025 (%)** 2025 Budget Absorption (%)		**Realisasi Tahun 2025 (Program)** 2025 Realization (Program)	**RKAP Tahun 2025 (Program)** 2025 RKAP (Program)	**Pencapaian Program (%)** Program Achievement (%)	
	(1)	(2)	(1/2)		(3)	(4)	(3/4)	
Investasi Fisik Physical Investment								
1. Bangunan Fasilitas Facility Building	16.701	20.480	81,55%	↑	3	3	100,00%	↑
2. Alat-Alat Fasilitas Facility Equipment	40.065	41.400	96,78%	↑	3	3	100,00%	↑

Investasi PMT Tahun 2025 (Induk)
PMT Investments in 2025 (Parent Company)

Jenis Investasi Investment Type	Nilai Investasi Investment Value				Program Investasi Investment Program			
	Realisasi Tahun 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	RKAP Tahun 2025 (Rp-juta) 2025 RKAP (Rp-million)	Penyerapan Anggaran Tahun 2025 (%) 2025 Budget Absorption (%)		Realisasi Tahun 2025 (Program) 2025 Realization (Program)	RKAP Tahun 2025 (Program) 2025 RKAP (Program)	Pencapaian Program (%) Program Achievement (%)	
	(1)	(2)	(1/2)		(3)	(4)	(3/4)	
3. Instalasi Fasilitas Facility Installation	225.311	293.700	76,71%	↑	11	11	100,00%	↑
4. Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Peralatan dan Perlengkapan Tools and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Emplasemen Emplacement	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Fisik Total Physical Investment	**282.077**	**355.580**	**79,33%**	↑	**17**	**17**	**100,00%**	↑
Investasi Non Fisik Non-Physical Investment	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Equity investment	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Total Investment	**282.077**	**355.580**	**79,33%**	↑	**17**	**17**	**100,00%**	↑

Realisasi investasi Entitas Induk PMT pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp282,08 miliar atau 79,33% dari RKAP sebesar Rp355,58 miliar. Dari sisi pelaksanaan program, seluruh 17 program investasi yang direncanakan berhasil direalisasikan sehingga tingkat pencapaian program mencapai 100%.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengeksekusi seluruh program investasi yang telah direncanakan, meskipun penyerapan anggaran masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya efisiensi pelaksanaan proyek, penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, maupun optimalisasi biaya investasi tanpa mengurangi pencapaian target program.

Penyerapan investasi terbesar berasal dari kategori alat-alat fasilitas yang mencatat realisasi sebesar Rp40,07 miliar atau 96,78% dari RKAP sebesar Rp41,40 miliar, dengan seluruh 3 program investasi berhasil direalisasikan. Selanjutnya, kategori bangunan fasilitas membukukan realisasi sebesar Rp16,70 miliar atau 81,55% dari RKAP sebesar Rp20,48 miliar, dengan tingkat penyelesaian program mencapai 100% atau sebanyak 3 program.

Sementara itu, kategori instalasi fasilitas menjadi kontributor terbesar terhadap total nilai investasi dengan realisasi sebesar Rp225,31 miliar atau 76,71% dari RKAP sebesar Rp293,70 miliar. Meskipun tingkat penyerapan anggarannya lebih rendah dibandingkan kategori lainnya, seluruh 11 program investasi yang direncanakan pada kategori ini berhasil dilaksanakan sesuai target.

The Parent Company of PMT recorded capital investment realization of Rp282.08 billion in 2025, or 79.33% of the RKAP budget of Rp355.58 billion. In terms of program implementation, all 17 planned investment programs were successfully completed, resulting in a program achievement rate of 100%.

Overall, this achievement demonstrates the Company's success in executing all planned investment programs, although budget utilization remained below the established target. This condition indicates greater efficiency in project implementation, adjustments to the scope of work, and optimization of investment costs without compromising the achievement of program objectives.

The largest investment realization was recorded under the Facility Equipment category, which amounted to Rp40.07 billion, or 96.78% of the RKAP budget of Rp41.40 billion, with all three planned investment programs successfully completed. This was followed by the Facility Buildings category, which recorded investment realization of Rp16.70 billion, or 81.55% of the RKAP budget of Rp20.48 billion, with all three planned programs completed, representing a 100% completion rate.

Meanwhile, the Facility Installations category represented the largest contributor to the total investment value, with realization amounting to Rp225.31 billion, or 76.71% of the RKAP budget of Rp293.70 billion. Although its budget absorption was lower than that of the other categories, all 11 planned investment programs under this category were successfully implemented as targeted.

Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi investasi pada kategori jalan, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, emplasemen, investasi nonfisik, maupun penyertaan modal.

Dengan capaian realisasi program sebesar 100%, kinerja investasi Entitas Induk PMT pada tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan program strategis perusahaan. Meskipun tingkat penyerapan anggaran mencapai 79,33%, seluruh program yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai target sehingga investasi yang dilaksanakan tetap mampu mendukung pengembangan fasilitas, peningkatan kapasitas operasional, dan pencapaian sasaran strategis perusahaan.

In 2025, there was no investment realization in the categories of roads, buildings, infrastructure and utilities, equipment and supplies, yards, non-physical investments, or equity investments.

With a program realization rate of 100%, the Parent Company of PMT demonstrated a high level of effectiveness in implementing its strategic investment programs during 2025. Although budget absorption reached 79.33%, all planned programs were completed as targeted, enabling the investments to support facility development, enhance operational capacity, and achieve the Company's strategic objectives.

Investasi PMT Tahun 2025 (Anak Perusahaan)
PMT Investments in 2025 (Subsidiaries)

Jenis Investasi Investment Type	Nilai Investasi Investment Value				Program Investasi Investment Program			
	Realisasi Tahun 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	RKAP Tahun 2025 (Rp-juta) 2025 RKAP (Rp-million)	Penyerapan Anggaran Tahun 2025 (%) 2025 Budget Absorption (%)		Realisasi Tahun 2025 (Program) 2025 Realization (Program)	RKAP Tahun 2025 (Program) 2025 RKAP (Program)	Pencapaian Program (%) Program Achievement (%)	
	(1)	(2)	(1/2)		(3)	(4)	(3/4)	
Investasi fisik Physical Investment								
1. Bangunan Fasilitas Facility Building	-	100	-	-	-	1	-	-
2. Alat-Alat Fasilitas Facility Equipment	6.549	1.500	436,60%	↑	1	1	100,00%	↑
3. Instalasi Fasilitas Facility Installation	11.522	17.900	64,37%	↓	3	3	100,00%	↑
4. Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Peralatan dan Perlengkapan Tools and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Emplasemen Emplacement	3.245	3.700	87,70%	↑	1	1	100,00%	↑
Jumlah Investasi Fisik Total Physical Investment	**21.316**	**23.200**	**91,88%**	↓	**5**	**6**	**83,33%**	↓
Investasi Non Fisik Non-Physical Investment	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Equity investment	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Total Investment	**21.316**	**23.200**	**91,88%**	↓	**5**	**6**	**83,33%**	↓

Total realisasi investasi anak perusahaan pada tahun 2025 mencapai Rp21,32 miliar atau 91,88% dari RKAP sebesar Rp23,20 miliar. Dari sisi pelaksanaan program, 5 dari 6 program investasi yang direncanakan berhasil direalisasikan, sehingga tingkat pencapaian program mencapai 83,33%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, meskipun masih terdapat satu program yang belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

Total investment realization of the Company's subsidiaries in 2025 reached Rp21.32 billion, or 91.88% of the RKAP target of Rp23.20 billion. In terms of program implementation, 5 out of the 6 planned investment programs were successfully realized, resulting in a program achievement rate of 83.33%. This achievement reflects a high level of budget absorption, although one program had not yet been realized by the end of the year.

Capaian investasi berdasarkan jenis investasi adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat fasilitas mencatat realisasi sebesar Rp6,55 miliar atau 436,60% dari RKAP sebesar Rp1,50 miliar, dengan tingkat pencapaian program mencapai 100%. Realisasi yang jauh melampaui target menunjukkan adanya kebutuhan investasi tambahan untuk mendukung operasional dan peningkatan kapasitas layanan.
2. Instalasi fasilitas menjadi kontributor terbesar investasi anak perusahaan dengan realisasi sebesar Rp11,52 miliar atau 64,37% dari RKAP sebesar Rp17,90 miliar. Seluruh 3 program investasi pada kategori ini berhasil direalisasikan dengan tingkat pencapaian program 100%, meskipun penyerapan anggaran masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Emplasemen mencatat realisasi sebesar Rp3,25 miliar atau 87,70% dari RKAP sebesar Rp3,70 miliar. Program investasi pada kategori ini berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100% atau 1 dari 1 program yang direncanakan.
4. Pada kategori bangunan fasilitas, telah dianggarkan sebesar Rp0,10 miliar, namun program yang direncanakan belum direalisasikan hingga akhir tahun sehingga belum terdapat penyerapan anggaran maupun capaian program.
5. Tidak terdapat realisasi investasi pada kategori jalan, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, investasi nonfisik, maupun penyertaan modal.

Secara keseluruhan, kinerja investasi anak perusahaan pada tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 91,88%. Meskipun pencapaian program belum mencapai target penuh karena masih terdapat satu program yang belum terealisasi, sebagian besar investasi strategis berhasil dilaksanakan dan memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas operasional serta pengembangan bisnis anak perusahaan.

The investment realization by investment category is as follows:

1. Facility Equipment recorded an investment realization of Rp6.55 billion, or 436.60% of the RKAP target of Rp1.50 billion, with a program achievement rate of 100%. The realization, which significantly exceeded the target, indicates additional investment requirements to support operations and increase service capacity.
2. Facility Installations became the largest contributor to the subsidiaries' investments, with a realization of Rp11.52 billion, or 64.37% of the RKAP target of Rp17.90 billion. All three investment programs under this category were successfully implemented, achieving a 100% program completion rate, although budget absorption remained below the established target.
3. Rail Yard (Emplasement) recorded an investment realization of Rp3.25 billion, or 87.70% of the RKAP target of Rp3.70 billion. The investment program under this category was fully realized, achieving a 100% completion rate, or 1 out of the 1 planned program.
4. Under the Facility Buildings category, a budget of Rp0.10 billion had been allocated. However, the planned program had not been realized by year-end; therefore, no budget absorption or program achievement was recorded.
5. No investment realization was recorded under the categories of roads, buildings, facilities and infrastructure, equipment and supplies, non-physical investments, or equity participation.

Overall, the investment performance of the Company's subsidiaries in 2025 demonstrated a fairly high level of effectiveness, with budget absorption reaching 91.88%. Although the program achievement did not reach the full target due to one unrealized program, the majority of strategic investments were successfully implemented and supported the enhancement of operational capacity as well as the business development of the subsidiaries.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Kinerja Perusahaan

Impact of Price Changes on the Company's Revenue and Performance

Tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan kinerja Perusahaan di tahun 2025.

There was no impact of price changes on the Company's revenue and performance in 2025.

Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Information on the Impact of Foreign Exchange Rates

Di tahun 2025, tidak terdapat dampak nilai tukar mata uang asing dalam operasi dan keuangan Perusahaan.

In 2025, there was no impact of foreign exchange rate fluctuations on the Company's operations and financial performance.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Information and Material Facts Occurring After the Date of the Auditor's Report

PERKEMBANGAN GEOPOLITIK DI TIMUR TENGAH

Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul tindakan militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan dan energi global.

Grup menilai potensi dampak terhadap operasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan Grup yang dapat timbul melalui beberapa faktor, termasuk:
1. Volatilitas harga komoditas dan energi global.
2. Gangguan pada rantai pasokan dan logistik global.
3. Ketidakpastian makroekonomi yang lebih luas yang memengaruhi permintaan pelanggan.
4. Volatilitas di pasar valuta asing dan pasar keuangan.

Saat ini Grup tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak ekonomi yang lebih luas akibat situasi geopolitik tersebut dapat memengaruhi operasi dan kinerja keuangan Grup secara tidak langsung.

Pada tanggal otorisasi atas laporan keuangan ini, tidak memungkinkan untuk mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul akibat potensi eskalasi lebih lanjut dari konflik tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Manajemen akan terus memonitor perkembangan terkait konflik ini dan menilai potensi dampaknya pada periode pelaporan berikutnya.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Akta No. 22 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 27 Februari 2026 tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0076611 tanggal 12 Maret 2026.

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 27 Februari 2026, para pemegang saham sepakat untuk menetapkan perubahan masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang semula 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan, menjadi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-10.

GEOPOLITICAL DEVELOPMENTS IN THE MIDDLE EAST

Subsequent to the reporting date, geopolitical tensions in the Middle East escalated following military in the region at the end of February 2026. These developments have resulted in heightened geopolitical uncertainty and increased volatility in the global financial and energy markets.

The Group has assessed the potential impact on its operations, financial position, and financial performance that may arise through several factors, including:
1. Volatility in global commodity and energy prices.
2. Disruptions to global supply chains and logistics.
3. Broader macroeconomic uncertainty affecting customer demand.
4. Volatility in the foreign exchange and financial markets.

At present, the Group does not have significant direct operations in the countries directly involved in the conflict. However, the broader economic impact arising from the geopolitical situation may indirectly affect the Group's operations and financial performance.

As of the date of authorization of these financial statements, it is not practicable to reliably estimate the financial impact that may arise from any further escalation of the conflict on the Group's consolidated financial statements.

Management will continue to monitor developments relating to the conflict and assess their potential impact in future reporting periods.

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Notarial Deed No. 22 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated February 27, 2026 concerning amendments to the Company's Articles of Association. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.03-0076611 dated March 12, 2026.

Based on Deed No. 22 dated February 27, 2026, the shareholders agreed to amend the term of office of the members of Board of Directors and Board of Commissioners, which was previously five (5) years and renewable for one (1) additional term, to a term commencing from the closing of the General Meeting of Shareholders (GMS) or such date as determined by the GMS appointing them, and renewable with a cumulative term of office not exceeding the closing of the 10th Annual General Meeting of Shareholders.

PERUBAHAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan RUPS Perusahaan tanggal 20 April 2025, para pemegang saham menyetujui pemberhentian Ahmad Perwira Mulia Tarigan dari jabatannya sebagai Komisaris serta pengangkatan Gugun Gumilar sebagai Komisaris dan Elly Rosita Silaba sebagai Komisaris Independen. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini akta notaris atas keputusan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

CHANGES TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the resolution of the Company's GMS dated April 20, 2025, the shareholders approved the dismissal of Ahmad Perwira Mulia Tarigan from the position as Commissioner and the appointment of Gugun Gumilar as Commissioner and Elly Rosita Silaba as Independent Commissioner. As of the completion date of these financial statements, the notarial deed reflecting the resolution was still in the process of completion.

Perbandingan Antara Target/Proyeksi pada Awal Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi)

Comparison Between Targets/Projections at the Beginning of the Fiscal Year and Actual Results

PENYUSUNAN TARGET

Dalam menyusun target kinerja tahun 2025, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025–2029, arahan strategis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku induk usaha, serta Agenda Prioritas BUMN. Tahun 2025 menjadi fase *Enhancing Internal Business and Service Excellence*, yang difokuskan pada pembenahan tata kelola internal, peningkatan kualitas layanan nonpetikemas, perluasan cakupan layanan, standardisasi operasional, integrasi data, serta penguatan kapabilitas organisasi guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sejalan dengan arah strategis tersebut, penyusunan RKAP 2025 dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, perkembangan sektor logistik dan kepelabuhanan, serta potensi pertumbuhan trafik dan produksi di terminal yang dikelola Perseroan. Selain itu, penyusunan target juga memperhatikan berbagai inisiatif strategis yang akan dijalankan pada tahun 2025, termasuk implementasi program Serah Terima Operasi (STO), pengembangan layanan dan terminal baru, penyesuaian tarif pada sejumlah cabang, serta rencana investasi untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan.

Atas dasar berbagai asumsi dan proyeksi tersebut, Perseroan menetapkan target kinerja yang selaras dengan lima perspektif Agenda Prioritas BUMN, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Target tersebut diterjemahkan ke dalam indikator kinerja utama perusahaan yang mencakup aspek keuangan, operasional, sosial, teknologi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis perusahaan.

PREPARATION OF TARGETS

In preparing its 2025 performance targets, PT Pelindo Multi Terminal (PMT) referred to the Company's 2025–2029 Long-Term Corporate Plan (RJPP), the strategic direction of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the parent company, and the State-Owned Enterprises (SOEs) Priority Agenda. The year 2025 marked the Enhancing Internal Business and Service Excellence phase, focusing on strengthening internal governance, improving the quality of non-container services, expanding service coverage, standardizing operations, integrating data, and enhancing organizational capabilities to support sustainable business growth.

In line with this strategic direction, the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) was prepared comprehensively by taking into account the previous year's performance achievements, projections for national and regional economic growth, developments in the logistics and port sectors, as well as the potential growth in traffic and throughput at the terminals managed by the Company. In addition, the target-setting process also considered various strategic initiatives to be implemented in 2025, including the implementation of the Operations Handover (STO) program, the development of new services and terminals, tariff adjustments at several branches, and investment plans to support increased capacity and service quality.

Based on these assumptions and projections, the Company established performance targets aligned with the five perspectives of the SOEs Priority Agenda, namely Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Enhancement, and Talent Development. These targets were translated into the Company's key performance indicators covering financial, operational, social, technological, investment, and human capital development aspects as measures of the achievement of the Company's strategic objectives.

Untuk memastikan target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal, proses perumusannya melibatkan koordinasi lintas fungsi dan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, seperti optimalisasi aset, transformasi digital, pengembangan layanan kepelabuhanan, efisiensi operasional, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Dengan demikian, RKAP 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Perseroan dalam meningkatkan daya saing bisnis nonpetikemas, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta menjaga pertumbuhan usaha yang sehat, berkelanjutan, dan akuntabel.

To ensure that the established targets could be achieved optimally, the formulation process involved cross-functional coordination and considered various strategic factors, including asset optimization, digital transformation, port service development, operational efficiency, and the strengthening of governance and risk management. Accordingly, the 2025 RKAP is expected to serve as a guideline for the Company in enhancing the competitiveness of its non-container business, creating added value for stakeholders, and maintaining healthy, sustainable, and accountable business growth.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

COMPARISON BETWEEN REVENUE TARGETS AND ACTUAL RESULTS

Pencapaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target
2025 Performance Achievement Against Target

	Realisasi 2025 (Rp-juta) Realization (Rp-million)	RKAP 2025 (Rp-juta) 2025 RKAP (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025 (%) Realization Achievement Against 2025 Target (%)	
	1	2	(1:2)	
Pendapatan Konsolidasian (Rp-juta) Consolidated Revenue (Rp-million)				
Pelayanan Petikemas Container Services	270.905	248.112	109,19%	↑
Pendapatan Barang Non Petikemas Non-Container Revenue	4.315.631	4.952.613	87,14%	↓
Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang Consolidation and Distribution Services	7.813	5.738	136,16%	↑
Pelayanan Pelra Pelra Services	3.941	2.735	144,10%	↑
Pendapatan Pengusahaan Alat Equipment Services Revenue	566.361	487.108	116,27%	↑
Pendapatan Pengusahaan Properti Property Services Revenue	45.130	59.322	76,08%	↓
Pendapatan Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Services Revenue	3.730	430	867,44%	↑
Pelayanan Rupa-Rupa Usaha Miscellaneous Services	398.383	392.517	101,49%	↑
Pendapatan Pelayanan Forwarding Forwarding Service Revenue	12.667	25.349	49,97%	↑
Pendapatan Pelayanan TUKS UKS Revenue	45.094	48.467	93,04%	↑
Pendapatan Marine Marine Revenue	-	65.632	-	-
Total Pendapatan Operasi Total Operating Revenues	**5.669.657**	**6.288.023**	**90,17%**	↑

Realisasi pendapatan usaha tahun 2025 sebesar Rp5.669.657 juta dibandingkan dengan RKAP tahun 2025 sebesar Rp6.288.023 juta atau tercapai sebesar 90,17%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Barang Petikemas
   Realisasi Pendapatan Barang Petikemas tahun 2025 mencapai Rp270.905 juta atau 109,19% dari RKAP 2025 sebesar Rp248.111.733.954,-. Pencapaian tersebut didukung oleh kinerja beberapa cabang. Kontributor utama berasal

Operating revenue for 2025 amounted to Rp5,669,657 million, compared to the 2025 Budget Plan of Rp6,288,023 million, representing 90.17% of the target. This can be explained as follows:

1. Container Services Revenue
   The realization of Container Services Revenue in 2025 reached Rp270,905 million or 109.19% of the 2025 RKAP target of Rp248,111,733,954,-. This achievement was supported by the performance of several branches. The

dari *Branch* Dumai yang mencatat kenaikan sebesar Rp12.099.169.752,- seiring meningkatnya penggunaan petikemas untuk pengiriman semen dan bertambahnya pelanggan pelayaran. Selain itu, *Branch* Jamrud Nilam Mirah mencatat peningkatan sebesar Rp5.309.972.470,- yang didorong oleh kenaikan aktivitas haulage dan layanan *Lift On–Lift Off*. Kinerja positif juga didukung oleh *Branch* Lembar sebesar Rp1.983.858.587,- *Branch* Makassar sebesar Rp1.034.862.921,- *Branch* Badas Bima sebesar Rp758.793.467,- dan *Branch* Tanjung Pinang sebesar Rp129.777.545,- yang ditopang oleh pertumbuhan volume petikemas, peningkatan aktivitas bongkar muat komoditas, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas operasional.

2. Pendapatan Barang Non Petikemas
   Pendapatan Barang Non Petikemas Tahun 2025 tercapai sebesar Rp4.315.631 juta dibandingkan dengan RKAP Tahun 2025 sebesar Rp4.955.485.374.278,- atau tercapai 87,14%. Realisasi yang berada di bawah target terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja di beberapa cabang utama.

   Penurunan terbesar terjadi di *Branch* Belawan sebesar Rp54.977.003.351, yang disebabkan oleh menurunnya volume curah kering *feed & food*, curah cair CPO dan turunannya, serta peralihan pengiriman semen dari *bag cargo* ke curah kering dengan tarif yang lebih rendah. Selain itu, *Branch* Dumai mencatat penurunan sebesar Rp25.958.816.438 akibat berkurangnya throughput curah cair CPO, *general cargo*, dan curah kering, yang dipengaruhi oleh berkembangnya TUKS, kebijakan impor dan ekspor, peralihan kemasan semen ke petikemas, serta dampak pengerukan dermaga dan faktor cuaca.

   Di sisi lain, sejumlah cabang berhasil melampaui target yang ditetapkan. *Branch* Jamrud Nilam Mirah mencatat peningkatan terbesar sebesar Rp13.044.620.484, didorong oleh meningkatnya volume bongkar muat steel billet, *steel slabs*, dan *steel coils* juga CPO serta penerapan Terminal *Operating Fee* (TOF). Kinerja positif juga ditunjukkan oleh *Branch* Tanjung Wangi dengan kenaikan sebesar Rp8.893.488.267 yang didukung penyesuaian tarif Ro-Ro dan optimalisasi layanan, serta Branch Lembar sebesar Rp7.282.228.183 yang didorong peningkatan produksi semen curah dan kenaikan tarif Ro-Ro. Sementara itu, *Branch* Sibolga meningkat sebesar Rp2.063.670.531,- berkat bertambahnya aktivitas kapal Ro-Ro, sementara *Branch* Badas Bima dan *Branch* Tanjung Balai Karimun turut mencatat peningkatan pendapatan seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat dan kebutuhan logistik di wilayah operasional masing-masing.

3. Pendapatan Pengusahaan Alat
   Pendapatan Pengusahaan Alat Tahun 2025 tercapai sebesar Rp566.361.411.946,- dibandingkan dengan RKAP Tahun 2025 sebesar Rp487.108.374.240,- atau tercapai sebesar 116,27%. Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan utilisasi peralatan operasional, bertambahnya kegiatan bongkar muat, serta optimalisasi aset di berbagai cabang.

main contributor was Dumal Branch, which recorded an increase of Rp12,099,169,752,- in line with the growing use of containers for cement shipments and the addition of new shipping customers. In addition, Jamrud Nilam Mirah Branch recorded an increase of Rp5,309,972,470,- driven by higher haulage activities and Lift On–Lift Off services. Positive performance was also supported by Lembar Branch with an increase of Rp1,983,858,587,- Makassar Branch of Rp1,034,862,921,- Badas Bima Branch of Rp758,793,467,- and Tanjung Pinang Branch of Rp129,777,545,- supported by growth in container volume, increased cargo handling activities, and optimized utilization of operational facilities.

2. Non-Container Services Revenue
   Non-Container Services Revenue in 2025 reached Rp4,315,631 million compared with the 2025 RKAP target of Rp4,955,485,374,278,- representing an achievement of 87.14%. The realization below target was primarily attributable to weaker performance at several major branches.

   The largest decline occurred at Belawan Branch, amounting to Rp54,977,003,351, due to lower throughput of dry bulk feed and food, liquid bulk CPO and its derivatives, as well as the shift of cement shipments from bag cargo to dry bulk with lower tariffs. In addition, Dumai Branch recorded a decrease of Rp25,958,816,438 due to lower throughput of liquid bulk CPO, general cargo, and dry bulk, influenced by the expansion of TUKS, import and export policies, the shift of cement packaging to containers, as well as the impact of berth dredging and weather conditions.

   On the other hand, several branches exceeded their established targets. Jamrud Nilam Mirah Branch recorded the highest increase of Rp13,044,620,484, driven by higher cargo handling volumes of steel billets, steel slabs, steel coils, and CPO, as well as the implementation of the Terminal Operating Fee (TOF). Positive performance was also recorded by Tanjung Wangi Branch with an increase of Rp8,893,488,267, supported by Ro-Ro tariff adjustments and service optimization, as well as Lembar Branch with an increase of Rp7,282,228,183, driven by higher bulk cement production and increased Ro-Ro tariffs. Meanwhile, Sibolga Branch increased by Rp2,063,670,531,- due to higher Ro-Ro vessel activity, while Badas Bima Branch and Tanjung Balai Karimun Branch also recorded revenue growth in line with increasing cargo handling activities and logistics demand within their respective operational areas.

3. Equipment Services Revenue
   Equipment Services Revenue in 2025 reached Rp566,361,411,946,- compared with the 2025 RKAP target of Rp487,108,374,240,- representing an achievement of 116.27%. This performance was driven by higher utilization of operational equipment, increased cargo handling activities, and asset optimization across various branches.

Kontributor utama berasal dari *Branch* Benoa dengan tambahan pendapatan sebesar Rp125.105.807.960,- yang dipengaruhi oleh perubahan pencatatan kegiatan FRU di LNG Benoa dari pendapatan non-petikemas menjadi pendapatan pengusahaan alat. Selain itu, *Branch* Dumai mencatat peningkatan sebesar Rp8.647.517.629,- yang didukung oleh layanan baru penanganan *Green Coke* dan kegiatan *handling* biomassa.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Branch Jamrud Nilam Mirah dengan kenaikan sebesar Rp6.705.856.895, seiring meningkatnya volume bongkar muat komoditas baja, *raw sugar*, pupuk, dan jagung. Selanjutnya, *Branch* Teluk Lamong meningkat sebesar Rp833.266.906 dan *Branch* Tanjung Intan sebesar Rp830.640.437, di dorong oleh tingginya aktivitas bongkar muat batu bara dan optimalisasi pemanfaatan alat.

Sementara itu, *Branch* Bumiharjo Bagendang mencatat kenaikan sebesar Rp510.427.522 berkat beroperasinya jembatan timbang baru dan relokasi fasilitas yang meningkatkan kapasitas layanan, sedangkan *Branch* Badas Bima meningkat sebesar Rp297.007.448 sejalan dengan meningkatnya aktivitas bongkar muat komoditas jagung di wilayah tersebut.

4. Pendapatan Rupa-Rupa Usaha

Pendapatan Rupa-Rupa Usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp398,38 miliar, melampaui RKAP 2025 sebesar Rp392.517.203.718,- atau mencapai 101,49% dari target. Capaian tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dari kerja sama operasional, layanan pas pelabuhan, *revenue sharing*, serta berbagai layanan pendukung lainnya di sejumlah cabang.

Kontributor terbesar berasal dari Branch Tanjung Emas yang mencatat kenaikan sebesar Rp68.058.401.072,- terutama didorong oleh pendapatan *revenue sharing* dengan Sub Regional Jawa. Kinerja positif juga ditunjukkan oleh *Branch* Belawan dengan kenaikan sebesar Rp11.418.026.030,- yang berasal dari peningkatan pendapatan kerja sama alat dan pas pelabuhan.

Selain itu, *Branch* Trisakti Mekar Putih mencatat peningkatan sebesar Rp4.179.884.686,- berkat bertambahnya aktivitas *sharing* alat dan pendapatan pas penumpang. *Branch* Bumiharjo Bagendang meningkat sebesar Rp3.272.110.724,- seiring naiknya pendapatan layanan Oil Boom, sementara *Branch* Tanjung Pinang dan Branch Tanjung Intan masing-masing mencatat kenaikan sebesar Rp1.963.291.400,- dan Rp1.131.698.281,- yang didukung oleh meningkatnya aktivitas penumpang, penyewaan fasilitas, dan layanan pendukung operasional.

Kenaikan pendapatan juga tercatat di *Branch* Makassar sebesar Rp1.353.361.263,- *Branch* Badas-Bima sebesar Rp947.650.451,- Branch Tanjung Balai Karimun sebesar Rp830.348.102,- *Branch* Gresik sebesar Rp413.987.597, serta *Branch* Parepare Garongkong sebesar Rp158.243.516,- yang didorong oleh peningkatan aktivitas penumpang, kerja sama usaha, dan optimalisasi layanan pelabuhan di masing-masing wilayah.

The main contributor was Benoa Branch, which generated additional revenue of Rp125,105,807,960,- influenced by the reclassification of FRU activities at LNG Benoa from non-container revenue to equipment utilization revenue. In addition, Dumai Branch recorded an increase of Rp8,647,517,629,- supported by the introduction of Green Coke handling services and biomass handling activities.

Positive performance was also demonstrated by Jamrud Nilam Mirah Branch, which recorded an increase of Rp6,705,856,895, in line with higher cargo handling volumes of steel commodities, raw sugar, fertilizer, and corn. Furthermore, Teluk Lamong Branch increased by Rp833,266,906 and Tanjung Intan Branch by Rp830,640,437, driven by high coal handling activities and optimized equipment utilization.

Meanwhile, Bumiharjo Bagendang Branch recorded an increase of Rp510,427,522 following the operation of a new weighbridge and the relocation of facilities that enhanced service capacity, while Badas Bima Branch increased by Rp297,007,448 in line with higher cargo handling activities for corn commodities in the area.

4. Miscellaneous Services Revenue

Miscellaneous Services Revenue in 2025 was realized at Rp398.38 billion exceeding the 2025 RKAP target of Rp392,517,203,718,- or achieving 101.49% of the target. This achievement was driven by increased revenue from operational cooperation, port pass services, revenue sharing, and various other supporting services across several branches.

The largest contributor was Tanjung Emas Branch, which recorded an increase of Rp68,058,401,072,- primarily driven by revenue sharing with the Java Sub Regional. Positive performance was also recorded by Belawan Branch with an increase of Rp11,418,026,030,- resulting from higher revenue from equipment cooperation and port pass services.

In addition, Trisakti Mekar Putih Branch recorded an increase of Rp4,179,884,686,- due to higher equipment sharing activities and passenger pass revenue. Bumiharjo Branch Bagendang increased by Rp3,272,110,724,- following higher revenue from Oil Boom services, while Tanjung Pinang Branch and Tanjung Intan Branch recorded increases of Rp1,963,291,400,- and Rp1,131,698,281,- respectively, supported by higher passenger activity, facility leasing, and operational support services.

Revenue growth was also recorded by Makassar Branch at Rp1,353,361,263,- Badas-Bima Branch at Rp947,650,451,- Tanjung Balai Karimun Branch at Rp830,348,102, Gresik Branch at Rp413,987,597,- and Parepare Garongkong a Branch at Rp158,243,516,- driven by increased passenger activity, business cooperation, and optimization of port services within their respective operational areas.

5. Pendapatan TUKS
   Pendapatan TUKS tahun 2025 terealisasi sebesar Rp45.093.578.346,- atau mencapai 93,04% dari RKAP 2025 sebesar Rp48.467.414.056,-. Realisasi yang berada di bawah target terutama dipengaruhi oleh penurunan aktivitas di beberapa cabang utama.

   Penurunan terbesar terjadi di *Branch* Balikpapan sebesar Rp1.766.503.137,- yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait tidak diberikannya izin diskresi untuk kegiatan di TUKS KTT sejak Januari 2025 sehingga aktivitas dialihkan ke TUKS lain yang mendukung pembangunan IKN. Selain itu, *Branch* Gresik mencatat penurunan sebesar Rp1.013.424.364,- akibat berpindahnya komoditas semen ke TUKS SIG Tuban.

   Sementara itu, Branch Jamrud Nilam Mirah mengalami penurunan sebesar Rp884.041.919,- yang dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi bongkar gandum di Dermaga TUKS Bogasari dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKAP.

5. TUKS Revenue
   TUKS Revenue in 2025 was realized at Rp45,093,578,346,- representing 93.04% of the 2025 RKAP target of Rp48,467,414,056,-. The realization below target was mainly attributable to lower activity at several key branches.

The largest decline occurred at Balikpapan Branch, amounting to Rp1,766,503,137,- due to the Government's policy of not granting discretionary permits for activities at TUKS KTT starting in January 2025, resulting in activities being shifted to other TUKS supporting the development of the National Capital City (IKN). In addition, Gresik Branch recorded a decrease of Rp1,013,424,364,- due to the transfer of cement commodities to TUKS SIG Tuban.

Meanwhile, Jamrud Nilam Mirah Branch recorded a decrease of Rp884,041,919,- due to the lower-than-target realization of wheat unloading activities at the Bogasari TUKS Wharf compared with the target established in the RKAP.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI LABA (RUGI)

COMPARISON BETWEEN TARGET AND ACTUAL PROFIT (LOSS)

Pencapaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target
2025 Performance Achievement Against Target

	Realisasi 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	RKAP 2025 (Rp-juta) 2025 RKAP (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025 (%) Realization Achievement Against 2025 Target (%)	
	1	2	(1:2)	
Laba (Rugi) Konsolidasian (Rp-juta) Consolidated Profit (Loss) (Rp-million)				
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operations	639.133	853.559	74,88%	↓
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	681.173	869.096	78,38%	↓
Laba (Rugi) Setelah Pajak Profit (Loss) After Tax	525.745	667.004	78,82%	↓
EBITDA	750.484	1.207.675	62,14%	↓
EBITDA Margin (%)	13,24%	19,21%	68,92%	↓

Pencapaian kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam RKAP. Laba usaha tercatat sebesar Rp639,13 miliar atau mencapai 74,88% dari target sebesar Rp853,56 miliar. Capaian ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga profitabilitas di tengah berbagai tantangan operasional dan dinamika bisnis yang dihadapi sepanjang tahun.

Laba sebelum pajak terealisasi sebesar Rp681,17 miliar atau 78,38% dari target Rp869,10 miliar, sedangkan laba setelah pajak mencapai Rp525,75 miliar atau 78,82% dari target Rp667,00 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa

Achievement of the Company's financial performance in 2025 showed fairly good results, although it remained below the target set in the RKAP. Profit from operations amounted to Rp639.13 billion, or 74.88% of the target of Rp853.56 billion. This achievement reflects the Company's ability to maintain profitability amid various operational challenges and business dynamics encountered throughout the year.

Profit before tax was realized at Rp681.17 billion, or 78.38% of the target of Rp869.10 billion, while profit after tax reached Rp525.75 billion, or 78.82% of the target of Rp667.00 billion. This achievement indicates that the Company was able to

Perseroan tetap mampu menghasilkan kinerja keuangan yang positif dan menjaga tingkat profitabilitas yang sehat sepanjang tahun berjalan.

EBITDA tahun 2025 tercatat sebesar Rp750,49 miliar atau mencapai 62,14% dari target Rp1,21 triliun. Sementara itu, EBITDA Margin tercatat sebesar 13,24%, lebih rendah dibandingkan target RKAP sebesar 19,21%, dengan tingkat pencapaian sebesar 68,92%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan optimalisasi struktur biaya guna memperkuat margin usaha.

Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada peningkatan produktivitas operasional, pengendalian biaya secara lebih efektif, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perseroan optimistis dapat memperkuat kinerja keuangan, meningkatkan profitabilitas, serta mendorong pencapaian target usaha secara lebih optimal pada periode mendatang.

continue generating positive financial performance and maintain a healthy level of profitability throughout the year.

EBITDA in 2025 was recorded at Rp750.49 billion, or 62.14% of the target of Rp1.21 trillion. Meanwhile, the EBITDA Margin was recorded at 13.24%, lower than the RKAP target of 19.21%, representing an achievement rate of 68.92%. This condition indicates that there remains room to improve operational efficiency and optimize the cost structure in order to strengthen operating margins.

Going forward, the Company will continue to focus on enhancing operational productivity, implementing more effective cost control, and optimizing higher value-added revenue sources. Through these initiatives, the Company remains optimistic in its ability to strengthen financial performance, improve profitability, and achieve its business targets more optimally in the coming periods.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI POSISI KEUANGAN

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION OF FINANCIAL POSITION

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target
2025 Performance Achievement Against Target

	Realisasi 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	**RKAP 2025 (Rp-juta)** 2025 RKAP (Rp-million)	**Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025 (%)** Realization Achievement Against 2025 Target (%)	
	1	**2**	**(1:2)**	
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-juta) Consolidated Financial Position (Rp-million)				
Jumlah Aset Total Assets	4.452.845	6.265.910	71,06%	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.193.666	1.913.508	114,64%	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.259.178	4.352.402	51,91%	↓

Posisi keuangan konsolidasian Perusahaan pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam RKAP. Total aset tercatat sebesar Rp4,45 triliun, atau mencapai 71,06% dari target sebesar Rp6,27 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset belum sepenuhnya sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan, sehingga Perusahaan perlu terus mengoptimalkan pengelolaan aset untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dari sisi liabilitas, total kewajiban Perusahaan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,19 triliun, lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp1,91 triliun, atau mencapai 114,64% dari RKAP. Peningkatan liabilitas tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pendanaan dan kewajiban operasional yang lebih besar dibandingkan asumsi awal, seiring dengan dinamika kegiatan usaha yang berlangsung selama tahun berjalan.

The Company's consolidated financial position at the end of 2025 showed that actual performance remained below the target set in the RKAP. Total assets were recorded at Rp4.45 trillion, or 71.06% of the target of Rp6.27 trillion. This achievement indicates that asset growth has not yet fully aligned with the projected target, and therefore the Company needs to continue optimizing asset management to support sustainable business growth.

In terms of liabilities, the Company's total liabilities at the end of 2025 amounted to Rp2.19 trillion, exceeding the target of Rp1.91 trillion, or reaching 114.64% of the RKAP. The increase in liabilities reflects greater financing requirements and operational obligations than initially projected, in line with the dynamics of business activities throughout the year.

Sementara itu, total ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp2,26 triliun, atau mencapai 51,91% dari target sebesar Rp4,35 triliun. Capaian yang berada di bawah target ini terutama dipengaruhi oleh realisasi laba yang belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RKAP, sehingga pertumbuhan ekuitas tidak setinggi yang direncanakan. Meskipun demikian, struktur permodalan Perseroan tetap didominasi oleh ekuitas yang memberikan fondasi keuangan yang kuat dalam mendukung keberlangsungan operasional dan pengembangan bisnis.

Perusahaan akan terus mengedepankan pengelolaan aset dan liabilitas secara *prudent*, meningkatkan efektivitas penggunaan modal, serta mengoptimalkan kinerja operasional dan profitabilitas. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan Perseroan dan mendukung pencapaian target pertumbuhan yang lebih optimal pada periode mendatang.

Meanwhile, the Company's total equity was recorded at Rp2.26 trillion, or 51.91% of the target of Rp4.35 trillion. This below-target achievement was primarily influenced by net profit realization that did not fully meet the target set in the RKAP, resulting in equity growth that was lower than planned. Nevertheless, the Company's capital structure continued to be predominantly supported by equity, providing a strong financial foundation to sustain operational continuity and business development.

The Company will continue to prioritize prudent asset and liability management, enhance the effectiveness of capital utilization, and optimize operational performance and profitability. These measures are expected to strengthen the Company's financial structure and support the achievement of more optimal growth targets in the coming periods.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION OF CAPITAL STRUCTURE

Pencapaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target
2025 Performance Achievement Against Target

	Realisasi 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	RKAP 2025 (Rp-juta) 2025 RKAP (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025 (%) Realization Achievement Against 2025 Target (%)	
	1	2	(1:2)	
Struktur Modal Konsolidasian (Rp-juta) Consolidated Capital Structure (Rp-million)				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.761.786	1.396.057	126,20%	↑
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	431.880	517.451	83,46%	↓
Total Liabilitas Total Liabilities	**2.193.666**	**1.913.508**	**114,64%**	↑
Ekuitas Equity	**2.259.178**	**4.352.402**	**51,91%**	↓

Pada tahun 2025, total liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp2,19 triliun atau 114,64% dari target yang ditetapkan dalam RKAP. Komposisi liabilitas tersebut terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp1,76 triliun, atau 126,20% dari target, serta liabilitas jangka panjang sebesar Rp431,88 miliar, atau 83,46% dari target.

Realisasi liabilitas jangka pendek yang melampaui target mencerminkan meningkatnya kebutuhan operasional dan kewajiban usaha yang timbul seiring dengan aktivitas bisnis sepanjang tahun. Sementara itu, liabilitas jangka panjang berada di bawah target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan jangka panjang tidak sebesar yang diproyeksikan dalam RKAP.

In 2025, the Company's total liabilities were recorded at Rp2.19 trillion, or 114.64% of the target set in the RKAP. The liability composition consisted of current liabilities amounting to Rp1.76 trillion, or 126.20% of the target, and non-current liabilities amounting to Rp431.88 billion, or 83.46% of the target.

The realization of current liabilities exceeding the target reflects increased operational requirements and business obligations arising from business activities throughout the year. Meanwhile, non-current liabilities remained below the established target, indicating that long-term financing requirements were lower than those projected in the RKAP.

Di sisi lain, total ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp2,26 triliun atau 51,91% dari target sebesar Rp4,35 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekuitas belum mencapai tingkat yang direncanakan, sejalan dengan realisasi kinerja keuangan yang masih berada di bawah target. Meskipun demikian, ekuitas tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur permodalan Perusahaan dan berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Struktur permodalan yang didominasi oleh ekuitas memberikan landasan yang kuat bagi Perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, Perusahaan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan, kemampuan memenuhi kewajiban, dan upaya memperkuat kapasitas permodalan guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

On the other hand, the Company's total equity was recorded at Rp2.26 trillion, or 51.91% of the target of Rp4.35 trillion. This achievement indicates that equity growth has not yet reached the planned level, in line with the realization of financial performance, which remained below target. Nevertheless, equity continued to be the largest component of the Company's capital structure and played an important role in maintaining the Company's financial stability.

A capital structure predominantly supported by equity provides a strong foundation for the Company to support its operational activities and business development. By continuing to apply prudent financial management principles, the Company maintains a balance between financing requirements, its ability to meet obligations, and efforts to strengthen its capital capacity in support of sustainable business growth.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PRODUKSI

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION OF PRODUCTION PERFORMANCE

Kinerja Arus Barang/Trafik Terminal Non-Petikemas 2024-2025 (Konsolidasi)

2024–2025 Non-Container Terminal Cargo Flow/Traffic Performance (Consolidated)

Pencapaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target
2025 Performance Achievement Against Target

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2025 2025 RKAP	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025 (%) Realization Achievements Against 2025 Targets (%)	
		1	2	(1:2)	
General Cargo	m^3	5.044.400	5.734.786	87,96%	↓
	Ton	17.049.252	18.348.666	92,92%	↓
Bag Cargo	Ton	6.740.092	7.043.012	95,70%	↓
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	30.378.507	33.081.243	91,83%	↓
Curah Kering Dry Bulk	Ton	59.049.728	66.385.458	88,95%	↓
Gas	Ton	-	179.041	-	-
	MMBTU	15.943.575	13.459.575	118,46%	↑
Kendaraan Vehicles	Unit	2.286.724	2.166.865	105,53%	↑
Hewan LIvestock	Ekor Animals	684.724	594.543	115,17%	↑
Petikemas Containers	Box	451.727	375.092	120,43%	↑
	TEUS	489.198	395.582	123,67%	↑
Total	**Ton**	**113.217.579**	**125.037.420**	**90,55%**	↓
	m^3	**5.044.400**	**5.734.786**	**87,96%**	↓
	MMBTU	**15.943.575**	**13.459.575**	**118,46%**	↑
	Unit	**2.286.724**	**2.166.865**	**105,53%**	↑
	Ekor Animals	**684.151**	**594.543**	**115,07%**	↑
	Box	**451.727**	**375.092**	**120,43%**	↑
	TEUS	**489.198**	**395.582**	**123,67%**	↑

Secara keseluruhan trafik Tahun 2025 terealisasi sebesar 118,261,980 Ton/m³ atau tercapai 90,43%% dari RKAP Tahun 2025 sebesar 130,772,206 Ton/m³.

Overall, realized traffic in 2025 reached 118,261,980 tons/m³, or 90.43% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of 130,772,206 tons/m³.

1. Untuk kemasan *General* dan Bag Cargo (Ton/m³) Tahun 2025 terealisasi sebesar 28.833.745 Ton/m³, tercapai 92.63% atau di bawah target. Hal ini disebabkan ketidaktercapaian target pada beberapa *Branch*, di antaranya:

1. For general and bag cargo, realized traffic (tons/m³) in 2025 reached 28,833,745 tons/m³, 92.63% below target. This was due to the failure to achieve targets at several branches, including:

Makassar	57,10%
Dumai	61,18%
Belawan	49,05%
PTP Banten	26,91%
Gresik	16,58%

Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak adanya kegiatan handling komoditas proyek di Makassar, berkurangnya kegiatan bongkar muat di Dumai, peralihan komoditas pupuk bag dan semen bag ke curah kering serta nihilnya trafik beras dan garam di Belawan, menurunnya muatan semen jumbo bag di PTP Banten akibat lemahnya permintaan pasar, serta berkurangnya barang proyek di Gresik sebagai dampak program efisiensi pembangunan pemerintah.

This situation was influenced by the absence of project commodity handling activities in Makassar, reduced loading and unloading activities in Dumai, the shift from bagged fertilizer and bagged cement to dry bulk, and the absence of rice and salt traffic in Belawan. The decline in jumbo bag cement loads at PTP Banten due to weak market demand, as well as a reduction in project goods in Gresik as a result of the government's development efficiency program.

2. Untuk kemasan Curah Cair Tahun 2025 terealisasi sebesar 30.378.507 Ton, tercapai 91,83% atau di bawah target. Hal ini disebabkan ketidaktercapaian target pada beberapa *Branch*, di antaranya:

2. Liquid Bulk realization for 2025 reached 30,378,507 tons, 91.83% below target. This was due to the failure to achieve targets at several branches, including:

Dumai	29,32%
PTP Pontianak	33,51%
Belawan	8,45%
PTP Banten	37,84%
Trisakti	38,67%

Penurunan trafik curah cair secara signifikan disebabkan oleh menurunnya suplai CPO dan berkurangnya kegiatan pengapalan di Dumai, belum dimulainya kegiatan bongkar muat curah cair oleh pelanggan utama di PTP Pontianak, rendahnya aktivitas curah cair ekspor serta kendala perizinan di Belawan, tidak adanya peningkatan kegiatan bongkar muat cargo asphalt di PTP Banten, serta melambatnya aktivitas pertambangan batu bara yang berdampak pada penurunan permintaan BBM industri di Trisakti.

The significant decline in liquid bulk traffic was due to a decrease in CPO supply and reduced shipping activity in Dumai, the non-commencement of liquid bulk loading and unloading by major customers at PTP Pontianak, low liquid bulk export activity and licensing constraints in Belawan, no increase in asphalt cargo loading and unloading at PTP Banten, and slowing coal mining activity, which has impacted the decline in industrial fuel demand at Trisakti.

3. Untuk kemasan Curah Kering Tahun 2025 terealisasi sebesar 59.049.728 Ton, tercapai 88,95% atau di bawah target. Hal ini disebabkan ketidaktercapaian target pada beberapa Branch, di antaranya:

3. Dry bulk production for 2025 reached 59,049,728 tons, 88.95% below target. This was due to the failure to achieve targets at several branches, including:

PTP Bengkulu	42,65%
Belawan	16,34%
PTP Panjang	20,17%
PTP Banten	28,96%
PTP Jambi	91,88%

Penurunan trafik curah kering secara signifikan disebabkan oleh pendangkalan alur pelayaran di PTP Bengkulu yang membatasi kegiatan dan muatan kapal, rendahnya impor komoditas *food* & *feed* serta menurunnya bongkar muat batu bara di Belawan, berkurangnya permintaan sejumlah komoditas utama di PTP Panjang, menurunnya kegiatan bongkar kargo *nickel ore* dan semen curah di PTP Banten, serta tidak adanya kegiatan curah kering muatan batu split di PTP Jambi.

The significant decline in dry bulk traffic was due to shallowing of the shipping channel at PTP Bengkulu, which restricted ship activities and cargo, low imports of food and feed commodities, decreased coal loading and unloading at Belawan, reduced demand for several key commodities at PTP Panjang, decreased nickel ore and bulk cement cargo unloading at PTP Banten, and the absence of dry bulk split stone cargo at PTP Jambi.

Kinerja Produksi Layanan Jasa Non-Petikemas (Konsolidasi)

Non-Container Service Production Performance (Consolidated)

Kinerja Produksi Layanan Jasa Terminal Non-Petikemas (Konsolidasi)
Non-Container Terminal Service Production Performance (Consolidated)

Uraian Description	**Satuan** Unit	**Realisasi 2025** 2025 Realization	**RKAP 2025** 2025 RKAP	**Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025** Realization Achievements Against 2025 Targets	
Dermaga Wharf	Ton	99.034.088	110.899.554	89,30%	↓
	m^3	5.067.591	5.734.786	88,37%	↓
	Unit	1.368.029	1.858.688	73,60%	↓
Gudang Penumpukan Diusahakan Managed Warehouse Storage	Ton/Hari Ton/Day	3.104.480	2.777.551	111,77%	↑
	m^3/Hari m^3/Day	366.710	339.766	107,93%	↑
Lapangan Penumpukan Diusahakan Managed Yard Storage	Ton/Hari Ton/Day	6.479.686	14.188.387	45,67%	↓
	m^3/Hari m^3/Day	4.960.562	3.325.143	149,18%	↑
	Unit/Hari Unit/Day	14.385	2.044.837	0,70%	↓
Bongkar Muat Loading and Unloading					
Stevedoring	Ton	53.186.493	63.281.629	84,05%	↓
	m^3	1.214.988	1.484.153	81,86%	↓
	Unit	160.251	1.365.463	11,74%	↓
Cargodoring	Ton	5.943.425	6.344.054	93,68%	↑
	m^3	88.801	3.300	2.690,94%	↑
	Unit	382.691	2.107.960	18,15%	↓
Receiving/Delivery	Ton	55.740	230.322	24,20%	↓
	m^3	92.499	-	-	-
	Unit	420.669	-	-	-
Kerja Sama Pelayanan B/M Joint Cargo Handling Services	Ton	55.320.578	55.813.196	99,12%	↓
	m^3	3.262.713	3.888.913	83,90%	↓
Ro-Ro	Unit	668.738	743.279	89,97%	↓

Realisasi kinerja produksi jasa terminal non-petikemas sampai dengan tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi. Beberapa indikator berhasil melampaui target RKAP 2025,

The actual production performance of non-container terminal services through 2025 shows varying levels of achievement. Several indicators exceeded the 2025 Work Plan and Budget

sementara sebagian lainnya masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika arus barang, jenis komoditas yang dilayani, serta pola aktivitas operasional di terminal.

Beberapa indikator yang mencatatkan kinerja positif antara lain:

1. Gudang Penumpukan Diusahakan (ton/hari) mencapai 111,77% dari target, menunjukkan optimalisasi pemanfaatan fasilitas gudang.
2. Gudang Penumpukan Diusahakan (m^3/hari) mencapai 107,93%, mencerminkan peningkatan aktivitas penyimpanan barang berdasarkan volume.
3. Lapangan Penumpukan Diusahakan (m^3/hari) mencatat capaian 149,18%, menunjukkan tingginya utilisasi lapangan untuk barang berbasis volume.
4. *Cargodoring* (ton) dan *Cargodoring* (m^3) masing-masing tercapai sebesar 100,00% dan 2.690,94% dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, beberapa indikator masih berada di bawah target dan memerlukan perhatian lebih lanjut, antara lain:

1. Layanan Dermaga pada seluruh satuan pengukuran, yaitu ton (89,30%), m^3 (88,37%), dan unit (73,60%).
2. Lapangan Penumpukan Diusahakan untuk satuan ton/hari dan unit/hari masing-masing hanya mencapai 45,67% dan 0,70%.
3. *Stevedoring* mencatat capaian 84,05% (ton), 81,86% (m^3), dan 11,74% (unit).
4. *Receiving/Delivery* mencapai 24,20% untuk satuan ton, sedangkan Kerja Sama Pelayanan Bongkar Muat mencapai 99,12% (ton), 83,90% (m^3), dan Ro-Ro mencapai 89,97% (unit).

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mempertahankan capaian positif pada beberapa layanan utama, khususnya pada pemanfaatan fasilitas gudang dan lapangan penumpukan berbasis volume. Ke depan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan produktivitas layanan bongkar muat, serta penguatan kolaborasi dengan pengguna jasa untuk mendorong pertumbuhan trafik dan peningkatan kinerja operasional secara berkelanjutan.

(RKAP) targets, while others fell short of the established targets. This was influenced by the dynamics of cargo flow, the types of commodities served, and operational activity patterns at the terminal.

Several indicators that recorded positive performance include:

1. Managed Warehouse Storage (tons/day) reached 111.77% of the target, indicating optimal utilization of warehouse facilities.
2. Managed Warehouse Storage (m^3/day) reached 107.93%, reflecting increased volume-based storage activity.
3. Managed Warehouse Storage (m^3/day) reached 149.18%, indicating high utilization of the yard for volume-based goods.
4. Cargodoring (tons) and Cargodoring (m^3) achieved 100.00% and 2,690.94% of the set targets, respectively.

Meanwhile, several indicators remained below target and required further attention, including:

1. Wharf Services for all units of measurement: tons (89.30%), m^3 (88.37%), and units (73.60%).
2. Managed Yard Storage for tons/day and units/day only achieved 45.67% and 0.70%, respectively.
3. Stevedoring achieved 84.05%(tons), 81.86% (m^3), and 11.74% (units).
4. Receiving/Delivery reached 24.20% for tons, while Joint Cargo Handling Services reached 99.12% (tons), 83.90% (m^3), and Ro-Ro reached 89.97% (units).

Overall, the 2025 performance shows that the Company was able to maintain positive performance in several key services, particularly in the utilization of warehouse and stacking yard facilities based on cargo volume. Moving forward, it is necessary to optimize asset utilization, increase the productivity of loading and unloading services, and strengthen collaboration with service users to drive traffic growth and improve operational performance sustainably.

Prospek Usaha
Business Outlook

Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode yang penuh peluang bagi PMT seiring berlanjutnya pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatnya kebutuhan layanan logistik yang andal dan terintegrasi. Di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, perubahan pola perdagangan internasional, serta fluktuasi harga komoditas, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,6% pada tahun 2026, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,33%–5,40%, didukung oleh peningkatan investasi, konsumsi domestik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor industri nasional.

Ketahanan ekonomi tersebut memberikan fondasi yang positif bagi sektor transportasi, logistik, dan kepelabuhanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025, yakni mencapai 8,78%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi barang, mobilitas logistik, serta kebutuhan terhadap infrastruktur pelabuhan yang semakin efisien dan terintegrasi.

Sejalan dengan tren tersebut, prospek bisnis terminal nonpetikemas pada tahun 2026 diperkirakan tetap bertumbuh. Pengembangan kawasan industri, program hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur nasional, serta kebutuhan logistik untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan terus mendorong permintaan layanan bongkar muat curah kering, curah cair, *general cargo*, *project cargo*, maupun layanan kepelabuhanan terintegrasi. Kondisi ini menjadi peluang bagi PMT untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat perannya sebagai operator terminal *multipurpose* nasional.

Optimisme tersebut tercermin dalam RKAP 2026 Perseroan yang menargetkan arus barang nonpetikemas sebesar 113,2 juta ton. Pertumbuhan tersebut didukung oleh mulai beroperasinya aktivitas curah cair di Terminal Kijing, optimalisasi kapasitas terminal di sejumlah wilayah, peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bengkulu pasca perbaikan alur pelayaran, serta pengembangan berbagai layanan dan terminal berbasis komoditas maupun kawasan industri.

The year 2026 is expected to be a period offering significant opportunities for PMT, in line with continued national economic growth and increasing demand for reliable and integrated logistics services. Amid persistent global uncertainty driven by geopolitical dynamics, changes in international trade patterns, and commodity price fluctuations, Indonesia's economy continues to demonstrate strong resilience. The Government targets economic growth of 5.4%–5.6% in 2026, while Bank Indonesia projects economic growth in the range of 5.33%–5.40%, supported by increased investment, domestic consumption, infrastructure development, and the strengthening of the national industrial sector.

This economic resilience provides a positive foundation for the transportation, logistics, and port sectors. Data from Central Bureau of Statistics (BPS) show that the transportation and warehousing sector was one of the fastest-growing sectors in 2025, recording growth of 8.78%, far above the national economic growth rate. This performance reflects increasing goods distribution activities, logistics mobility, and demand for more efficient and integrated port infrastructure.

In line with this trend, the business outlook for non-container terminals in 2026 is expected to remain positive. The development of industrial estates, downstream natural resource processing programs, national infrastructure development, and logistics requirements supporting the development of the Nusantara Capital City (IKN) are projected to continue driving demand for dry bulk, liquid bulk, general cargo, project cargo, and integrated port services. These conditions present opportunities for PMT to expand its market share while strengthening its role as a national multipurpose terminal operator.

This optimism is reflected in the Company's 2026 RKAP, which targets non-container cargo traffic of 113.2 million tons. This growth is supported by the commencement of liquid bulk operations at Kijing Terminal, optimization of terminal capacity across several regions, increased cargo handling activities at Bengkulu Port following improvements to the navigation channel, and the development of various commodity-based and industrial area-based services and terminals.

Untuk menangkap peluang pertumbuhan tersebut, PMT pada tahun 2026 melanjutkan implementasi roadmap RJPP 2025–2029 melalui fase *Enhancing Internal Business and Service Excellence*. Fokus perusahaan diarahkan pada penguatan tata kelola internal, pengembangan terminal berbasis layanan dan komoditas, pengembangan layanan untuk mendukung program prioritas pemerintah, perluasan layanan di luar wilayah Pelindo Grup, serta peningkatan kualitas layanan pelanggan melalui pendekatan *Key Account Management* dan *Customer Relationship Management*.

Di sisi operasional, Perusahaan terus mempercepat transformasi digital dan standardisasi proses bisnis melalui integrasi sistem layanan terminal, pengembangan *Integrated Planning & Control*, integrasi data operasional, pengembangan *smart port*, serta transformasi digital di terminal nonpetikemas. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat layanan, meningkatkan transparansi operasional, dan menghasilkan efisiensi biaya yang berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, investasi pada infrastruktur dan peralatan pelabuhan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan keandalan layanan.

Selain berfokus pada pertumbuhan bisnis, PMT juga memperkuat aspek keberlanjutan melalui implementasi program ESG, penguatan budaya keselamatan kerja, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi, serta optimalisasi tata kelola Perusahaan. Berbagai inisiatif tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing perusahaan sekaligus mendukung pencapaian target kinerja yang berkelanjutan.

Dengan dukungan kondisi ekonomi domestik yang tetap solid, pertumbuhan sektor logistik yang tinggi, serta implementasi berbagai inisiatif strategis perusahaan, prospek usaha PMT pada tahun 2026 dipandang tetap positif. Melalui penguatan layanan, ekspansi bisnis, transformasi digital, dan optimalisasi aset, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan serta memperkuat perannya sebagai operator terminal nonpetikemas terdepan di Indonesia.

To capture these growth opportunities, PMT will continue implementing the 2025–2029 RJPP roadmap in 2026 through the Enhancing Internal Business and Service Excellence phase. The Company's focus is directed toward strengthening internal governance, developing service- and commodity-based terminals, developing services to support government priority programs, expanding services beyond Pelindo Group network, and improving customer service quality through the Key Account Management and Customer Relationship Management approaches.

In terms of operations, the Company continues to accelerate digital transformation and business process standardization through the integration of terminal service systems, the development of Integrated Planning & Control, operational data integration, smart port development, and digital transformation across non-container terminals. These initiatives are expected to enhance productivity, accelerate service delivery, improve operational transparency, and generate sustainable cost efficiencies. At the same time, investments in port infrastructure and equipment continue to support increased service capacity and reliability.

In addition to focusing on business growth, PMT is also strengthening its sustainability initiatives through the implementation of ESG programs, the reinforcement of occupational safety culture, enhancement of human capital competencies, promotion of innovation, and optimization of corporate governance. These initiatives provide an important foundation for maintaining the Company's competitiveness while supporting the achievement of sustainable performance targets.

Supported by solid domestic economic conditions, strong growth in the logistics sector, and the implementation of various strategic initiatives, PMT's business outlook for 2026 remains positive. Through service enhancement, business expansion, digital transformation, and asset optimization, the Company is well positioned to improve both operational and financial performance while strengthening its role as Indonesia's leading non-container terminal operator.

Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2026
The Company's Performance Projection for 2026

Penyusunan target kinerja Perusahaan tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang diperkirakan memengaruhi pencapaian kinerja usaha selama tahun berjalan. Target-target tersebut dituangkan dalam RKAP Tahun 2026 yang disusun secara terintegrasi melalui keterlibatan seluruh fungsi bisnis dan operasional, serta diselaraskan dengan arah strategis yang ditetapkan dalam RJPP PMT Tahun 2025–2029.

The preparation of the Company's 2026 performance targets considered a variety of internal and external factors expected to influence business performance throughout the year. These targets are incorporated into the 2026 RKAP, which was prepared through an integrated process involving all business and operational functions and aligned with the strategic direction set out in PMT's 2025–2029 RJPP.

Sebagai dasar penyusunan proyeksi, Perusahaan melakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja tahun sebelumnya dan prognosis tahun berjalan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai potensi pertumbuhan maupun tantangan yang akan dihadapi. Selain mempertimbangkan perkembangan trafik dan utilisasi terminal eksisting, penyusunan target juga memperhitungkan kontribusi berbagai program strategis yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2026, termasuk penguatan layanan kepelabuhanan, pengembangan kerja sama operasional, peningkatan efektivitas pemasaran, penyesuaian tarif pada sejumlah cabang, serta optimalisasi aset dan fasilitas operasional yang telah tersedia.

As the basis for preparing the projections, the Company evaluated the realization of the previous year's performance and the current year's prognosis to obtain a comprehensive understanding of both growth potential and future challenges. In addition to considering traffic growth and utilization of existing terminals, the target-setting process also takes into account the contributions of various strategic programs to be implemented throughout 2026, including strengthening port services, expanding operational partnerships, enhancing marketing effectiveness, adjusting tariffs at selected branches, and optimizing existing operational assets and facilities.

Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi pertumbuhan kinerja Perusahaan. Oleh karena itu, fokus manajemen pada tahun 2026 diarahkan pada peningkatan produktivitas operasional, penguatan kualitas layanan, efisiensi biaya, serta optimalisasi potensi bisnis di seluruh wilayah kerja. Upaya tersebut juga didukung oleh implementasi program integrasi sistem layanan terminal, penguatan fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, pengembangan tata kelola perusahaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kinerja perusahaan.

These initiatives are expected to strengthen the foundation for the Company's performance growth. Accordingly, management's focus in 2026 is directed toward improving operational productivity, strengthening service quality, enhancing cost efficiency, and optimizing business potential across all operating regions. These efforts are further supported by the implementation of integrated terminal service systems, strengthening operational planning and control functions, enhancing corporate governance, and improving human capital competencies, all of which are important factors in maintaining consistent corporate performance.

Dengan mempertimbangkan berbagai asumsi operasional dan inisiatif strategis tersebut, Perusahaan optimistis target kinerja tahun 2026 dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan. Seluruh target yang ditetapkan dalam RKAP 2026 dirancang untuk mendukung peningkatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan, sekaligus memperkuat posisi PMT sebagai pengelola terminal nonpetikemas yang kompetitif, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Adapun proyeksi kinerja PMT pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Taking into account these operational assumptions and strategic initiatives, the Company remains optimistic that its 2026 performance targets can be achieved in a measurable and sustainable manner. All targets established in the 2026 RKAP are designed to support improvements in the Company's operational and financial performance while strengthening PMT's position as a competitive, adaptive, and value-driven non-container terminal operator committed to creating long-term value for its stakeholders. The Company's 2026 performance projections are as follows:

PROYEKSI PENDAPATAN

REVENUE PROJECTION

Proyeksi Pendapatan 2026
2026 Revenue Projection

	Realisasi 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	RKAP 2026 (Rp-juta) 2026 RKAP (Rp-million)	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
Pendapatan Konsolidasian (Rp-juta) Consolidated Revenue (Rp-million)				
Pelayanan Petikemas Container Services	270.905	296.087	109,30%	↑
Pendapatan Barang Non Petikemas Non-Container Revenue	4.315.631	4.551.617	105,67%	↑
Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang Consolidation and Distribution Services	7.813	5.403	69,15%	↓
Pelayanan Pelra Pelra Services	3.941	2.950	74,85%	↓
Pendapatan Pengusahaan Alat Equipment Services Revenue	566.361	597.557	105,51%	↑
Pendapatan Pengusahaan Properti Property Services Revenue	45.130	43.366	96,09%	↓
Pendapatan Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Services Revenue	3.730	1.800	48,26%	↓
Pelayanan Rupa-Rupa Usaha Miscellaneous Services	398.383	453.610	113,68%	↑
Pendapatan Pelayanan *Forwarding* Forwarding Service Revenue	12.667	18.352	144,88%	↑
Pendapatan Pelayanan TUKS UKS Revenue	45.094	33.311	73,87%	↓
Pendapatan *Marine* Marine Revenue	-	84.548	-	-
Total Pendapatan Operasi Total Operating Revenues	**5.669.657**	**6.088.602**	**107,39%**	↑

PROYEKSI LABA (RUGI)

PROFIT (LOSS) PROJECTION

Proyeksi Laba (Rugi) 2026
2026 Profit (Loss) Projection

	Realisasi 2025 (Rp-juta) Realization (Rp-million)	RKAP 2026 (Rp-juta) 2026 RKAP (Rp-million)	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
		1	(1:2)	
Laba (Rugi) Konsolidasian (Rp-juta) Consolidated Profit (Loss) (Rp-million)				
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operations	639.133	713.420	111,62%	↑
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	681.173	738.186	108,37%	↑
Laba (Rugi) Setelah Pajak Profit (Loss) After Tax	525.745	575.499	109,46%	↑
EBITDA	750.484	1.167.658	155,59%	↑
EBITDA *Margin* (%)	13,24	19,18	144,86%	↑

PROYEKSI POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION PROJECTION

Proyeksi Posisi Keuangan 2025
2026 Financial Position Projection

	Realisasi 2025 (Rp-juta) Realization (Rp-million)	RKAP 2026 (Rp-juta) 2026 RKAP (Rp-million)	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
		1	(1:2)	
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-juta) Consolidated Financial Position (Rp-million)				
Jumlah Aset Total assets	4.452.845	6.281.682	141,07%	↑
Jumlah Liabilitas Total liabilities	2.193.666	1.993.683	90,88%	↓
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.259.178	4.287.999	189,80%	↑

PROYEKSI KEBIJAKAN DIVIDEN 2026

Kebijakan dividen PMT tahun buku 2025 disusun dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mempertimbangkan arahan pemegang saham utama, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pembagian dividen hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Sebagai bagian dari grup usaha BUMN yang strategis, PMT senantiasa menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham dengan kebutuhan pendanaan untuk investasi jangka menengah. Dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026, target laba bersih konsolidasian ditetapkan sebesar Rp575.499.225.998,- sedangkan alokasi target dividen sebesar Rp551.946.958.360,-. Berdasarkan hal tersebut, proyeksi *dividend payout ratio* tahun 2026 mencapai 95,91%.

Tingginya rasio ini mencerminkan kontribusi PMT kepada pemegang saham, sekaligus mengindikasikan keyakinan atas kinerja operasional dan posisi keuangan yang sehat sepanjang tahun berjalan. Meski demikian, realisasi pembagian dividen tetap akan memperhatikan hasil audit laporan keuangan, kondisi likuiditas, dan pemenuhan kebutuhan belanja modal prioritas, termasuk modernisasi alat bongkar muat, penguatan sistem digitalisasi, dan pengembangan infrastruktur terminal *multipurpose*.

2026 DIVIDEND POLICY PROJECTION

PMT's dividend policy for the 2025 fiscal year has been prepared with reference to the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, while also taking into consideration the direction of its principal shareholder, PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dividend distribution may only be made based on a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) after allocating the mandatory reserve as stipulated in Article 70 of the Limited Liability Company Law, amounting to at least 20% of the issued and paid-up capital.

As part of a strategic SOE group, PMT consistently maintains a balance between providing reasonable returns to shareholders and meeting funding requirements for medium-term investments. Based on the Company's 2026 Work Plan and Budget (RKAP), the consolidated net profit target has been set at Rp575,499,225,998,- while the targeted dividend allocation amounts to Rp551,946,958,360,-. Based on this, the projected dividend payout ratio for 2026 is 95.91%.

This high ratio reflects PMT's contribution to its shareholders while also indicating confidence in the Company's operational performance and sound financial position throughout the year. Nevertheless, the actual dividend distribution will continue to take into account the audited financial statements, liquidity conditions, and the fulfillment of priority capital expenditure requirements, including the modernization of cargo handling equipment, strengthening digital systems, and development of multipurpose terminal infrastructure.

Sesuai Anggaran Dasar, opsi pembagian dividen interim tetap terbuka, namun akan diusulkan hanya apabila arus kas operasional semester pertama menunjukkan kapasitas yang memadai dan tidak mengganggu keberlangsungan operasional maupun rencana investasi.

In accordance with the Company's Articles of Association, the option to distribute interim dividends remains available. However, such a proposal will only be submitted if operating cash flows in the first half of the year demonstrate adequate capacity and do not disrupt operational continuity or planned investments.

PROYEKSI STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE PROJECTION

Proyeksi Struktur Modal 2025
2026 Capital Structure Projection

	Realisasi 2025 (Rp-juta) 2025 Realization (Rp-million)	RKAP 2026 (Rp-juta) 2026 RKAP (Rp-million)	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
Struktur Modal (Rp-juta) Capital Structure (Rp-million)				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.761.786	1.549.448	87,95%	↓
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	431.880	444.234	102,86%	↑
Total Liabilitas Total Liabilities	2.193.666	1.993.683	90,88%	↓
Ekuitas Equity	2.259.178	4.287.999	189,80%	↑

PROYEKSI PRODUKSI 2026

2026 PRODUCTION PROJECTION

Proyeksi Kinerja Arus Barang/Trafik Terminal Non-Petikemas (Konsolidasi)

Non-Container Terminal Cargo Flow/Traffic Performance Projection (Consolidation)

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2026 2026 RKAP	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
General Cargo	m^3	5.044.400	4.654.267	92,27%	↓
	Ton	17.049.252	16.707.299	97,99%	↓
Bag Cargo	Ton	6.740.092	6.696.837	99,36%	↓
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	30.378.507	30.275.981	99,66%	↓
Curah Kering Dry Bulk	Ton	59.049.728	59.536.932	100,83%	↑
Gas	Ton	-	-	-	-
	MMBTU	15.943.575	15.844.549	99,38%	↓
Kendaraan Vehicles	Unit	2.286.724	2.142.742	93,70%	↓

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2026 2026 RKAP	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
Hewan Livestock	Ekor	684.151	521.165	76,11%	↓
Petikemas Containers	Box	451.727	467.430	103,48%	↑
	TEUS	489.198	501.374	102,49%	↑
Penumpang Passengers	Orang Persons	6.368.250	6.673.149	104,79%	↑
Total	**Ton**	**113.217.579**	**113.217.048**	**100,00%**	↑
	m^3	**5.044.400**	**4.654.267**	**92,27%**	↓
	MMBTU	**15.943.575**	**15.844.549**	**99,38%**	↓
	Unit	**2.286.724**	**2.142.742**	**93,70%**	↓
	Ekor Animals	**684.151**	**521.165**	**76,18%**	↓
	Box	**451.727**	**467.430**	**103,48%**	↑
	TEUS	**489.198**	**501.374**	**102,49%**	↑
	Orang Persons	**6.368.250**	**6.673.149**	**104,79%**	↑

Proyeksi Kinerja Produksi Layanan Jasa Terminal Non-Petikemas (Konsolidasi)

Non-Container Terminal Services Production Performance Projection (Consolidated)

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2026 2026 RKAP	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
		1	2	(1:2)	
Dermaga Wharf	Ton	99.034.088	97.965.485	98,92%	↓
	m^3	5.067.591	4.654.259	91,84%	↓
	Unit	1.368.029	1.303.732	95,30%	↓
Gudang Penumpukan Diusahakan Managed Warehouse Storage	Ton/Hari Ton/Day	3.104.480	2.993.192	96,42%	↓
	m^3/Hari m^3/Day	366.710	262.248	71,51%	↓
Lapangan Penumpukan Diusahakan Managed Yard Storage	Ton/Hari Ton/Day	6.479.686	9.524.737	146,99%	↑
	m^3/Hari m^3/Day	4.960.562	3.409.719	68,74%	↓
	Unit/Hari Unit/Day	14.385	14.743	102,49%	↑
Bongkar Muat Loading and Unloading					
Stevedoring	Ton	53.186.493	53.706.873	100,98%	↑
	m^3	1.187.818	771.363	64,94%	↓
	Unit	160.251	141.807	88,49%	↓

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2026 2026 RKAP	Proyeksi Tahun 2026 terhadap Realisasi Tahun 2025 (%) 2026 Projection to 2025 Realization (%)	
		1	2	(1:2)	
Cargodoring	Ton	5.943.425	5.918.173	99,58%	↓
	m^3	88.801	27.276	30,72%	↓
	Unit	382.691	350.387	91,56%	↓
Receiving/Delivery	Ton	55.740	59.400	106,57%	↑
	m^3	92.499	63.643	68,80%	↓
	Unit	420.669	407.395	96,84%	↓
Kerja Sama Pelayanan B/M Joint Handling Services	Ton	55.318.997	51.386.793	92,89%	↓
	m^3	3.188.029	3.307.798	103,76%	↑
Ro-Ro	Unit	667.293	626.497	93,89%	↓

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya
Dividend Policy and Distribution

KEBIJAKAN DASAR TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN

Perusahaan telah mengatur kebijakan dividen sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud di atas dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
4. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir dengan memerhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perusahaan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perusahaan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perusahaan.

BASIC POLICY ON DIVIDEND DISTRIBUTION

The Company has regulated the dividend policy as stated in the Company's Articles of Association, with the following provisions:

1. The use of net income including the amount of provision for allowance for losses is decided by the GMS.
2. The entire net income after deducting the provision for allowance as referred to above is distributed to Shareholders as dividends, unless otherwise determined by the GMS.
3. Dividends may only be distributed if the Company has a positive income balance.
4. The Company may distribute interim dividends before the Company's fiscal year ends by taking into account the Company's income projection and financial capability. The distribution of interim dividend is determined based on the decision of Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. Distribution of interim dividends may not disrupt or cause the Company to be unable to fulfill its obligations to creditors or interfere with the Company's activities. In the event that after the end of the fiscal year it turns out that the Company suffers a loss, the Shareholders must return the interim dividends that have been distributed to the Company.

PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2024 DAN 2025, DAN KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIVIDEN

DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2024 AND 2025, AND DIVIDEND DISTRIBUTION CHRONOLOGY

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen 2024-2025
Announcement and Payment of Dividends in 2024-2025

Uraian Description	Tahun Buku 2025 2025 Fiscal Year	Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year
Laba Bersih (Rp) Net Income (Rp)	**207.138.829.208**	560.218.582.073
Jumlah Dividen Tunai (Rp) Cash Dividend Amount (Rp)	**196.000.000.000**	475.000.000.000
Cadangan Umum dari Laba Bersih General Reserve from Net Income	**11.138.829.208**	28.010.929.000
Payout Rasio (%) Payout Ratio (%)	**94,62%**	84,77%
Jumlah saham (lembar) Number of Shares (shares)	**1.480.305**	1.480.305
Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	**132.405**	320.880
Tanggal Pengumuman Dividen Dividend Announcement Date	**19 Juni 2025** June 19, 2025	12 Juni 2024 June 12, 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	**30 Juni 2025 dan 3 Oktober 2025** June 30, 2025 and October 3, 2025	1 dan 8 Juli 2024 July 1 and 8, 2024

Tata Kelola Pajak
Tax Governance

Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk kontribusi PMT kepada negara sekaligus cerminan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan terus berkomitmen untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Fulfilling tax obligations is one way PMT contributes to the state and reflects the Company's compliance with applicable regulations. The Company remains committed to fulfilling its tax obligations in an orderly and timely manner, in accordance with applicable regulations, as part of its implementation of good corporate governance.

Kontribusi pajak Perusahaan secara konsolidasian pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp499.708.610.818,- menurun sebesar 6,88% bandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp536.649.540.295,-. Hal ini didorong oleh menurunya setoran PPh Pasal 25, dikarenakan kinerja tahun 2024 sebagai acuan besaran setoran PPh Pasal 25.

The Company's consolidated tax contribution in 2025 amounted to Rp499,708,610,818, a decrease of 6.88% compared to the previous year's figure of Rp536,649,540,295. This was driven by a decline in Article 25 income tax payments, due to the Company's performance in 2024 serving as the basis for determining the amount of Article 25 income tax payments.

Berikut disajikan tabel kontribusi pajak Perusahaan untuk tahun 2024 dan 2025 sebagaimana terlampir di bawah ini.

The following table presents the Company's tax contributions for 2024 and 2025, as attached below.

Jenis Type	2025 (Rp-juta) (Rp-million)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Pajak Tax				
PPh 21 Income Tax 21	115.137	159.199	(44.062)	-27,68% ↓
PPh 23 Income Tax 23	56.678	49.968	6.710	13,43% ↑
PPh 4 Ayat 2 Income Tax Article 4 Paragraph 2	6.815	4.792	2.023	42,22% ↑
PPh 25/29 Income Tax 25/29	93.096	164.166	(71.070)	-43,29% ↓
PPh 15 Income Tax 15	349	628	(279)	-44,43% ↓
PPh 26 Income Tax 26	1.311	771	540	70,04% ↑
PPN Vat	154.082	106.651	47.431	44,47% ↑
Bea Materai Stamp Duty	443	423	20	4,73% ↑
PBB	38.383	24.538	13.845	56,42% ↑
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Tax Government Revenue				
Konsesi Concession	30.339	25.507	4.832	18,94% ↑
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (PPh) Tax Underpayment Assessment Letter (Income Tax)	61	-	-	- -
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (PPN) Tax Underpayment Assessment Letter (Value Added Tax)	3.004	-	-	- -
Surat Tagihan Pajak (PPh) Tax Bill (PPh)	9	5	4	80,00% ↑
Surat Tagihan Pajak (PPN) Tax Bill (PPN)	-	1	-	- -
Jumlah Kontribusi kepada Negara Berupa Pajak Total Tax Contributions to the State	**499.708**	**536.650**	**(36.942)**	**-6,88%** ↓

Informasi tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Information on the Use of Proceeds from Public Offerings

Sejak berdirinya hingga akhir tahun 2025 Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun.

Since its establishment through the end of 2025, the Company has not conducted any Public Offering of Shares on any stock exchange.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang Terjadi pada Tahun Buku

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Party Transactions, and Conflict of Interest Transactions that Occurred During the Fiscal Year

Sepanjang tahun buku 2025, Perusahaan tidak melaksanakan aksi korporasi berupa investasi, ekspansi, penggabungan usaha atau peleburan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang atau modal.

Namun demikian, Perusahaan melalui anak usaha melakukan aksi korporasi berupa divestasi. Seluruh transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prinsip kewajaran sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (*arm's-length principle*). Adapun rincian transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Throughout the 2025 fiscal year, the Company did not undertake any corporate actions in the form of investment, expansion, mergers or consolidations, acquisitions, or debt or capital restructuring.

Nevertheless, the Company, through its subsidiary, carried out a divestment. All transactions conducted have complied with the principles of prudence, adherence to prevailing laws and regulations, and fairness in accordance with generally accepted business practices (arm's-length principle). Details of the transactions in question are as follows:

INFORMASI MATERIAL MENGENAI DIVESTASI

Pada tahun 2025, Perusahaan melalui PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTPR) telah menjual seluruh kepemilikan saham PT Pelindo3 Terminal Petikemas (P3TPK) kepada PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) dengan harga jual senilai Rp684.441 ribu. Divestasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti minat akuisisi yang disampaikan PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) atas kepemilikan saham P3TPK, sebagai bagian dari penataan portofolio kepemilikan saham antar entitas sepengendali dalam Grup Pelindo.

MATERIAL INFORMATION ON DIVESTMENT

In 2025, the Company, through PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTPR), sold its entire share ownership in PT Pelindo3 Terminal Petikemas (P3TPK) to PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) for a selling price of Rp684,441 thousand. This divestment was carried out to follow up on the acquisition interest submitted by PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) regarding the ownership of P3TPK shares, as part of the restructuring of share ownership portfolios among entities under common control within the Pelindo Group.

Uraian Description	Penjelasan Explaination
Tanggal Transaksi/Perjanjian Transaction/Agreement Date	30 April 2025 April 30, 2025
Dasar Transaksi Basis of Transaction	Transaksi Perjanjian Jual Beli Saham No. KU.02.04/30/4/3/PSTP/DIRU/PTP-25 tanggal 30 April 2025 antara PTPR dan PT Pengerukan Indonesia (Rukindo); dikuatkan dengan Akta Pemindahan Hak atas Saham No. 02 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 2 Mei 2025, dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SK No. AHU-AH.01.09-0218979 tanggal 2 Mei 2025 Share Sale and Purchase Agreement Transaction No. KU.02.04/30/4/3/PSTP/DIRU/PTP-25 dated April 30, 2025, between PTPR and PT Pengerukan Indonesia (Rukindo); reinforced by the Deed of Transfer of Rights to Shares No. 02 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated May 2, 2025, and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.09-0218979 dated May 2, 2025
Pihak yang Terlibat Parties Involved	PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTPR) dan PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTPR) and PT Pengerukan Indonesia (Rukindo)

Uraian Description	Penjelasan Explaination
Objek Transaksi Object of Transaction	Seluruh 500 lembar saham (100% kepemilikan) PT Pelindo3 Terminal Petikemas (P3TPK) The entire 500 shares (100% ownership) of PT Pelindo3 Terminal Petikemas (P3TPK)
Nilai Transaksi Transaction Value	Rp684.441 ribu (500 lembar saham, nilai nominal Rp1.368.882 per saham/nilai penuh) Rp684,441 thousand (500 shares, par value of Rp1,368,882 per share/full amount)
Sifat Hubungan Afiliasi/Berelasi Nature of Affiliated/Related Relationship	Entitas sepengendali Entity under common control
Rujukan Laporan Keuangan Financial Statement Reference	Catatan 1 atas Laporan Keuangan Tahunan Audit 2025 Note 1 to the 2025 Audited Annual Financial Statements

Perusahaan menilai transaksi tersebut wajar karena nilai jual sebesar Rp684.441 ribu ditetapkan berdasarkan hasil valuasi independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk PT Pelindo Jasa Maritim, yaitu nilai pasar wajar 100% ekuitas P3TPK sebesar Rp678.882.065,- nilai transaksi yang disepakati bahkan melampaui hasil valuasi tersebut, sehingga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Karena transaksi dilakukan dengan pihak berelasi yakni entitas sepengendali, pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen, namun tetap diungkapkan sebagai informasi material. Dari sisi akuntansi, transaksi diklasifikasikan sebagai transaksi pihak berelasi sesuai PSAK 224.

PERNYATAAN DIREKSI ATAS TRANSAKSI AFILIASI/BERELASI

Direksi menyatakan bahwa seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan selama tahun 2025 telah melalui prosedur internal yang memadai, termasuk evaluasi atas dasar kewajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui proses tersebut, Perusahaan memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan secara objektif, wajar, dan setara, sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya (*arm's length principle*).

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT ATAS TRANSAKSI AFILIASI/BERELASI

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penelaahan atas rencana maupun pelaksanaan transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan. Berdasarkan hasil penelaahan, Komite Audit menilai bahwa seluruh transaksi telah memenuhi prinsip kewajaran (*arm's length principle*) serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Selain itu, Komite Audit memastikan bahwa setiap transaksi mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan dengan tetap menjaga independensi, akuntabilitas, serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

The Company considers the transaction to be fair, as the selling price of Rp684,441 thousand was determined based on an independent valuation by a Public Appraisal Office (Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP) appointed by PT Pelindo Jasa Maritim, which assessed the fair market value of 100% equity of P3TPK at Rp678,882,065. The agreed transaction value even exceeded the result of the independent valuation, thereby providing added value to the Company.

As the transaction was conducted with a related party, namely an entity under common control, its implementation is subject to the provisions of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. The transaction does not involve a conflict of interest and therefore does not require the approval of independent shareholders, but is nonetheless disclosed as material information. From an accounting perspective, the transaction is classified as a related party transaction in accordance with PSAK 224.

ON AFFILIATED/RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Board of Directors stated that all affiliated-party transactions conducted during 2025 had undergone adequate internal procedures, including an assessment of fairness and compliance with the applicable regulations. Through this process, the Company ensured that each transaction was carried out objectively, fairly, and on an equal basis, in accordance with generally accepted business practices (the arm's length principle).

ROLE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND AUDIT COMMITTEE IN AFFILIATED/ RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has carried out its oversight and review functions over both the proposed and executed affiliated-party transactions undertaken by the Company. Based on the review, the Audit Committee concluded that all transactions complied with the arm's length principle and were conducted in accordance with the applicable laws and regulations as well as internal policies. In addition, the Audit Committee ensured that each transaction supported the achievement of the Company's strategic objectives while maintaining independence, accountability, and protecting the interests of all stakeholders.

TRANSAKSI AFILIASI YANG BERSIFAT RUTIN DAN BERKELANJUTAN

Transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan, termasuk pengelolaan terminal, penyediaan jasa TI, dan aliran transaksi operasional lainnya, merupakan bagian dari kegiatan usaha utama yang dijalankan secara rutin, berulang, dan berkelanjutan. Transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional, menjaga kesinambungan kegiatan usaha, serta menopang keberlanjutan pendapatan Perusahaan.

RUJUKAN LAPORAN KEUANGAN

Seluruh informasi terkait transaksi afiliasi dan transaksi material yang disebutkan di atas telah diungkapkan secara lengkap dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2025, khususnya pada:

1. Catatan 10: Aset Tetap;
2. Catatan 26: Transaksi dan Saldo yang Signifikan dengan Pihak Berelasi;
3. Catatan 27: Perjanjian Signifikan; dan
4. Catatan 32: Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan melalui RUPS khusus pemegang saham independen.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Perusahaan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun buku 2025.

ROUTINE AND RECURRING AFFILIATED PARTY TRANSACTIONS

The affiliated-party transactions undertaken by the Company, including terminal management, IT service provision, and other operational transaction flows, constitute part of the Company's core business activities and are conducted on a routine, recurring, and ongoing basis. These transactions are carried out to support smooth operations, maintain business continuity, and sustain the Company's revenue.

REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

All information relating to the affiliated party transactions and material transactions referred to above has been fully disclosed in the 2025 Consolidated Financial Statements, particularly in:

1. Note 10: Property and Equipment;
2. Note 26: Significant Transactions and Balances with Related Parties;
3. Note 27: Significant Agreements; and
4. Note 32: Events After the Reporting Date.

APPROVAL BY INDEPENDENT SHAREHOLDERS

Throughout 2025, there were no affiliated party transactions or conflict of interest transactions requiring approval through a special General Meeting of Shareholders of independent shareholders.

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

The Company did not engage in any conflict of interest transactions during the 2025 fiscal year.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Transactions with Affiliated/Related Parties

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan.
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan.
   c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.
2. Suatu entitas berelasi entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan Perusahaan anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   e. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i. memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau perusahaan dari entitas).
   h. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

POLICY ON RELATED PARTIES

Related parties are persons or entities related to the Company as follows:

1. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
   a. Has control or joint control over the Company.
   b. Has significant influence over the Company.
   c. Is a member of the key management personnel of the Company or of the parent entity of the Company.
2. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
   a. The entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is also a member).
   c. Both entities are joint ventures of the same third party.
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company. If the Company is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the Company.
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (a).
   g. A person identified in point (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
   h. A person identified in point (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of the parent entity of the entity).

NAMA PIHAK BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Berdasarkan ketentuan di atas, sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

NAMES OF COUNTERPARTIES AND NATURE OF AFFILIATED RELATIONSHIP

Based on the above provisions, the nature and types of material transactions with related parties within the Company are as follows:

Tabel Pengungkapan Pihak Berelasi
Related Party Disclosure

Sifat Hubungan Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transactions
Entitas induk PT Pelindo Multi Terminal Parent entity PT Pelindo Multi Terminal	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Imbalan kerja, konsesi dan *sharing revenue* Employee benefits, concessions and revenue sharing
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Layanan teknologi informasi Information technology services
Entitas sepengendalian Pelindo Entity under Pelindo's control	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Penyedia listrik Electricity provider
	PT Pelindo Energi Logistik	Penjualan jasa, kegiatan operasional Sales of services, operational activities
	PT Pelindo Marine Service	Penyedia kapal Vessel supplier
	PT IPC Terminal Petikemas	Kerjasama mitra usaha Business partner cooperation
	PT Terminal Teluk Lamong	Kerjasama mitra usaha Business partner cooperation
	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Pelindo Daya Sejahtera	Penyedia tenaga alih daya Outsourcing provider
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking service
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking service
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking service
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking service
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan Banking service
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales of services
	PT Pertamina Patra Niaga	Kerjasama mitra usaha Business partner cooperation
	PT PLN Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT BNI Life Insurance	Jasa Pensiun Pension services
	PT BGR Logistik Indonesia	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Borneo Alumina Indonesia	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT PLN Energi Primer Indonesia	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Aneka Tambang Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales of services and operational activities

Tabel Pengungkapan Pihak Berelasi
Related Party Disclosure

Sifat Hubungan Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transactions
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Sewa Rent
	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Jasa asuransi Insurance services

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Sejalan dengan transaksi yang dilakukan bersama pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis Perusahaan, serta dilandasi oleh prinsip hubungan usaha yang saling mendukung dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

REASON FOR THE TRANSACTION

Similar with transactions with third parties, the Company's transactions with Related Parties are carried out in line with the Company's operational and business development needs, as well as the principle of mutual need between the Company and Related Parties.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak Berelasi/Berafiliasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Seluruh transaksi material dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang setara maupun yang berbeda dengan transaksi bersama pihak ketiga, telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

EXPLANATION ON THE TRANSACTION FAIRNESS

The fairness of all transactions carried out by the Company with Related/Affiliated Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK 7 standards regarding "Related Party Disclosures". All significant transactions with related parties, whether carried out under the same terms and conditions as or not with third parties, have been disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

REALISASI SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut:

REALIZATION OF BALANCES AND TRANSACTIONS OF RELATED PARTIES

Realization of balances and transactions of Related Parties to the Company's financial performance can be presented as follows:

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Related Party Balance in Assets	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents							
Bank	448.504	10,07%	256.511	6,40%	191.993	74,85%	↑
Deposito Berjangka Time Deposit	1.449.862	32,56%	1.334.000	33,26%	115.862	8,69%	↑
Piutang Usaha Trade Receivables	116.820	2,62%	243.869	6,08%	(127.049)	-52,10%	↓
Piutang Lain-Lain Other Receivables	114.301	2,57%	171.482	4,28%	(57.181)	-33,35%	↓

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Related Party Balance in Assets	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Pendapatan Masih Akan Diterima Accrued Revenues	239.223	5,37%	104.294	2,60%	134.929	129,37%	↑
Total Aset dari Pihak-Pihak Berelasi Total Assets from Related Parties	2.368.710	53,20%	2.110.156	52,62%	258.554	12,25%	↑
Total Aset Total Assets	**4.452.845**		**4.010.489**		**442.356**	**11,03%**	↑

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Related Party Balance in Liabilities	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Liabilitas (%) Percentage of Total Liabilities (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Liabilitas (%) Percentage of Total Liabilities (%)	Nominal (Rp-juta)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Utang Usaha Trade Payables	200.659	9,15%	239.805	12,79%	(39.146)	-16,32%	↓
Utang Lain-Lain Other Payables	114.301	5,21%	171.482	9,15%	(57.181)	-33,35%	↓
Utang Titipan Pelanggan Deposit from Customers	14.476	0,66%	15.046	0,80%	(570)	-3,79%	↓
Uang untuk Diperhitungkan Money to Account for	3.954	0,18%	2.635	0,14%	1.319	50,06%	↑
Total Liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities from Related Parties	333.390	15,20%	428.968	22,88%	(95.578)	-22,28%	↓
Total Liabilitas Total liabilities	**2.193.666**		**1.874.498**		**319.168**	**17,03%**	↑

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI SERTA KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIU ATAS TRANSAKSI SERTA PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan merupakan bagian dari kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Selama tahun pelaporan, tidak terdapat transaksi afiliasi yang bersifat luar biasa.

EXPLANATION ON THE TRANSACTIONS FAIRNESS AND COMPANY POLICIES ON REVIEW MECHANISM OF TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH RELATED RULES AND PROVISIONS

All affiliated-party transactions undertaken by the Company are part of its business activities to generate operating revenue and are conducted on a routine, recurring, and/or ongoing basis. During the reporting year, there were no extraordinary affiliated-party transactions.

Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap transaksi afiliasi telah melalui prosedur internal yang memadai untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, termasuk pemenuhan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Selain itu, transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau melibatkan pihak afiliasi maupun pihak berelasi ditelaah melalui mekanisme audit oleh Komite Audit. Hasil penelaahan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

The Board of Directors and Board of Commissioners ensure that each affiliated-party transaction has undergone adequate internal procedures to ensure that it is conducted in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the arm's length principle. In addition, material transactions involving conflicts of interest and/or affiliated or related parties are reviewed through the Audit Committee's audit mechanism. The results of such reviews are subsequently reported to the Board of Commissioners as part of its oversight function.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIU ATAS TRANSAKSI

Proses reviu atas transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi dilakukan Perusahaan melalui mekanisme audit, termasuk audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. Mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" guna memastikan transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak berelasi.

COMPANY POLICY ON THE TRANSACTION REVIEW MECHANISM

The review process for transactions with Related Parties is carried out by the Company through an audit mechanism, including audits conducted by public accountants and disclosed to stakeholders. The mechanism refers to PSAK 224, "Related Party Disclosures," to ensure transparency and compliance in the execution of related party transactions.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Events

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di tahun 2025.

There was no financial information containing extraordinary and infrequent events during 2025.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations that Have a Significant Impact on the Company

Pada tahun buku 2025, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

During the 2025 fiscal year, there were no changes in laws and regulations that had a significant impact on the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

PMT menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amendemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain). Perusahaan tidak melakukan penerapan dini atas standar, interpretasi, atau amendemen lain yang telah diterbitkan namun belum efektif.

PMT adopted, for the first time, several standards and certain amendments that became effective for annual periods beginning on or after January 1, 2025 (unless otherwise stated). The Company did not early adopt any other standards, interpretations, or amendments that had been issued but were not yet effective.

Amendemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran	**Amendments to PSAK 221: Lack of Exchangeability**
Amendemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran *(exchangeability)* tidak tersedia. Amendemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.	These amendments establish how an entity should assess whether a currency is convertible and how it should determine the spot rate when exchangeability is unavailable. The amendments also require disclosure of information that enables users of financial statements to understand how the currency's inability to convert to another currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position, and cash flows.
Amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian.	These amendments have no impact on the consolidated financial statements.
PSAK 117: Kontrak Asuransi	**PSAK 117: Insurance Contracts**
PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.	PSAK 117 is a new, comprehensive accounting standard covering the recognition and measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts. PSAK 117 replaces PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (namely, life, non-life, direct insurance, and reinsurance), regardless of the type of entity issuing them, and also applies to certain types of guarantees and financial instruments with discretionary participation features.
Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan: • Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*). • Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek.	The primary objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurance entities, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model supplemented by: • Specific adjustments for contracts with direct participation features (variable fee approach). • A simplified approach (premium allocation approach) that primarily applies to short-duration contracts.
Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian	The new standard has no impact on the consolidated financial statements.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

The Company's Soundness Level

PMT yang merupakan bagian dari kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PMT, as part of the State-Owned Enterprise (SOE) Group, has conducted an assessment of the Company's soundness level in accordance with applicable laws and regulations, particularly the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Penilaian dilakukan mengacu pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/3/6/2/AGPL/UTMA/PLND-25 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berdasarkan data dan informasi Perusahaan serta Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 (audited), peringkat akhir yang diukur secara internal berdasarkan pemeringkatan internasional atas PT Pelindo Multi Terminal untuk tahun buku 2025 adalah **BB-**.

Berdasarkan peringkat akhir tersebut, Tingkat Kesehatan PT Pelindo Multi Terminal untuk tahun buku 2025 diklasifikasikan **AA (Sehat)**, sebagaimana disampaikan secara resmi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Surat No. KU.01.08/22/6/12/AGPL/KEUG/PLND-26 tanggal 22 Juni 2026 perihal Penyampaian Informasi Tingkat Kesehatan PT Pelindo Multi Terminal tahun buku 2025. Uraiannya seperti berikut ini:

The assessment was conducted in reference to the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/3/6/2/AGPL/UTMA/PLND-25 dated June 3, 2025, concerning the Assessment of the Company's Soundness Level within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Based on the Company's data and information as well as the Audited Financial Statements as of December 31, 2025, the final rating measured internally based on international rating benchmarks for PT Pelindo Multi Terminal for the 2025 fiscal year is **BB-**.

Based on the final rating above, the Soundness Level of PT Pelindo Multi Terminal for the 2025 fiscal year is classified as **AA (Healthy)**, as officially conveyed by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) through Letter No. KU.01.08/22/6/12/AGPL/KEUG/PLND-26 dated June 22, 2026, regarding the Submission of Information on the Soundness Level of PT Pelindo Multi Terminal for the 2025 fiscal year. The description is as follows:

	Weight	*Measure*	*Risk Score*	*Weighted Average*
Scale				
Revenue (USD Billion)	33%	0,34	18,1	6,0
Demand Characteristics				
Demand Characteristics	25%		9,0	2,3
Competitive Profile				
Competitive Profile	8%		9,0	0,8
Profitability				
EBITA *Margin*	17%	9%	16,9	2,8
Leverage and Coverage				
Debt/EBITDA	0%	0,7	2,6	-
EBITA/*Interest*	0%	15,4	4,4	-
RCF/*Net debt*	0%	100%	0,5	-
Financial Policy				
Financial Policy	17%		9,0	1,5
Weighted Average Risk Score				**13,3**
Scorecard Indicated Outcome - Standalone credit profile				**BB-**
Average annual EBITDA				48
Nature of Operations				Core
Max Rating				BB+
Minimum Rating				B
Final Rating Assigned				**BB-**
Tingkat Kesehatan Soundness Level				**AA (Sehat)** (Healthy)

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PADA TAHUN 2024

Berdasarkan data dan informasi Perusahaan per 31 Desember 2024, peringkat akhir yang diukur secara internal berdasarkan pemeringkatan internasional atas PT Pelindo Multi Terminal untuk tahun buku 2024 adalah **BB-,** sehingga Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun buku 2024 diklasifikasikan **AA (Sehat).**

THE COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL IN 2024

Based on the Company's data and information as of December 31, 2024, the final rating measured internally based on international ratings for PT Pelindo Multi Terminal for the 2024 fiscal year is **BB-,** and therefore the Company's Soundness Level for the 2024 fiscal year is classified as **AA (Healthy).**

Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Long-Term Corporate Plan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan dokumen strategis yang memuat sasaran, tujuan, dan arah pengembangan perusahaan dalam jangka waktu lima tahun. PMT telah menyusun RJPP Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG), yang juga disusun dengan mempertimbangkan referensi lainnya seperti:

1. Arahan kebijakan BUMN pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
2. RJPP PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2025-2029.
3. RJPP PMT 2021-2025.

Sebagai Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Cluster* Non Petikemas, PMT memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan layanan terminal non-petikemas yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, perusahaan menetapkan visi "Menjadi Pemimpin dalam Konektivitas Barang di Indonesia (*Indonesia's Connectivity Champion*)" dengan misi "Sebagai Operator Terminal Multipurpose dengan Menciptakan Ekosistem yang Memberikan Nilai Tambah bagi Stakeholders dan Negara." Visi dan misi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat konektivitas logistik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui layanan kepelabuhanan yang andal, efisien, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PMT menetapkan arah pengembangan bisnis yang berfokus pada penguatan dan pengembangan tiga klaster bisnis utama, yaitu bisnis curah kering, curah cair, dan terminal kendaraan. Ketiga klaster tersebut menjadi fondasi utama pertumbuhan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri kepelabuhanan dan logistik nasional, sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Pengembangan klaster bisnis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan potensi pasar, kebutuhan pelanggan, perkembangan kawasan industri, serta peluang sinergi dalam ekosistem Pelindo Grup.

Dalam pelaksanaannya, RJPP 2025–2029 diterjemahkan ke dalam roadmap transformasi perusahaan yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2026, PMT memasuki fase *Enhancement* & *Expansion* dengan fokus pada penguatan kapabilitas internal dan peningkatan keunggulan layanan (*Enhancing Internal Business and Service Excellence*). Fase ini diarahkan untuk memperkuat fondasi operasional dan komersial perusahaan melalui peningkatan kualitas layanan, standardisasi proses bisnis, integrasi sistem operasional, serta pengembangan peluang usaha baru yang dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

The Long-Term Corporate Plan (RJPP) is a strategic document that sets out the Company's objectives, targets, and development direction over a five-year period. PMT has prepared the 2025–2029 RJPP by incorporating environmental, social, and governance (ESG) sustainability aspects and by taking into consideration the following references:

1. SOE policy directions under the 2025–2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN).
2. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2025–2029 RJPP.
3. PMT 2021–2025 RJPP.

As Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Non-Container Cluster, PMT plays a strategic role in managing and developing integrated non-container terminal services throughout Indonesia. In carrying out this role, the Company has established the vision of "To Become Indonesia's Connectivity Champion" with the mission "To Be a Multipurpose Terminal Operator by Creating an Ecosystem that Delivers Added Value to Stakeholders and the Nation." This vision and mission reflect the Company's commitment to strengthening national logistics connectivity while supporting Indonesia's economic growth through reliable, efficient, and competitive port services.

To realize this vision, PMT has established a business development direction focused on strengthening and developing three main business clusters, namely dry bulk, liquid bulk, and vehicle terminal businesses. These three clusters serve as the primary foundation for the Company's growth in responding to the dynamics of the national port and logistics industry while creating greater value for customers, shareholders, and the community. The development of these business clusters is carried out in an integrated manner by considering market potential, customer needs, industrial estate development, and synergy opportunities within the Pelindo Group ecosystem.

In its implementation, the 2025–2029 RJPP is translated into a phased corporate transformation roadmap. In 2026, PMT enters the Enhancement & Expansion phase, focusing on strengthening internal capabilities and enhancing service excellence (Enhancing Internal Business and Service Excellence). This phase is directed toward reinforcing the Company's operational and commercial foundations through service quality improvement, business process standardization, operational system integration, and the development of new business opportunities to support the Company's sustainable growth.

Roadmap PMT 2025-2029
PMT Roadmap 2025–2029

2025 - 2026
Enhancing Internal Business and Service Excellence

Pembenahan tata kelola internal untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan NPK di Pelindo Group
Improving internal governance to expand the scope and enhance the quality of NPK services within the Pelindo Group

- Melakukan penataan struktur korporasi (perusahaan dan organisasi) PMT Group
- Melakukan pembaruan model dan kesepakatan bisnis NPK agar terciptanya stabilitas bisnis
- Implementasi strategi perluasan market share di captive market (*dedicated terminal*)
- Standarisasi operasional dan layanan NPK di seluruh wilayah
- Melakukan perbaikan data integration guna menunjang performa bisnis
- Meningkatkan kapabilitas SDM PMT Grup
- Restructuring the corporate structure (company and organization) of the PMT Group
- Updating NPK's business models and agreements to ensure business stability
- Implementing a strategy to expand market share in the captive market (dedicated terminals)
- Standardizing NPK operations and services across all regions
- Improving data integration to support business performance
- Enhancing the capabilities of PMT Group's human resources

Pre-requisites:
Dukungan *stakeholder* dari Internal Pelindo Group (Holding, dan Sub-Holding, Regional):
Stakeholder support from within the Pelindo Group (Holding, Sub-Holding, and Regional):
- **Untuk menghadapi revisi UU Pelayaran**
- **Penguatan layanan PMT**
- **Penyelesaian isu-isu korporasi di PMT**
- To address revisions to the Shipping Law
- Strengthening PMT services
- Resolving corporate issues at PMT
- 2027–2028

2027-2028
Breakthrough Business Expansion & Commercialization

Perluasan ekosistem dan layanan untuk memperkuat posisi PMT sebagai pelaku bisnis non-petikemas nasional
Expanding the ecosystem and services to strengthen PMT position as a national non-container business operator

- Melakukan perbaikan model bisnis dan perbaikan *portfolio profile*
- Pengembangan layanan NPK yang terintegrasi dalam *value chain* ekosistem maritim
- Optimalisasi skema bundling layanan NPK dengan bisnis kepelabuhan lainnya
- Ekspansi layanan NPK ke pasar eksternal Pelindo (TUKS/Tersus/KL)
- Mengimplementasikan strategi optimalisasi biaya operasional
- Improving the business model and portfolio profile
- Developing NPK services integrated into the maritime ecosystem value chain
- Optimizing NPK service bundling schemes with other port-related businesses
- Expanding NPK services to markets outside Pelindo (TUKS/Tersus/KL)
- Implementing a strategy to optimize operating costs

Pre-requisites:
- **Dukungan *stakeholder* dari Internal Pelindo Group untuk pengembangan SDM dan IT dengan kapabilitas yang kompetitif**
- **Dukungan pendanaan untuk meningkatkan daya saing layanan NPK PMT**
- Stakeholder support from within the Pelindo Group for the development of human resources and IT with competitive capabilities
- Funding support to enhance the competitiveness of PMT NPK services

2029
Business Sustainability

Mempertahankan posisi PMT dalam pengembangan bisnis NPK yang berkelanjutan
Maintaining PMT position in the sustainable development of the NPK business

- Mengintegrasikan prinsip Green Ports dan ESG dalam operasi NPK untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi, dan tanggung jawab sosial Perusahaan
- Penguatan layanan NPK yang termasuk dalam *value chain* ekosistem maritim di pasar domestik
- Integrating Green Ports and ESG principles into NPK operations to improve sustainability, efficiency, and the Company's social responsibility
- Strengthening NPK services that are part of the maritime ecosystem's value chain in the domestic market

Pre-requisites:
- **Stabilitas pendapatan dan laba PMT**
- **Dukungan *stakeholder* atas penerapan kebijakan yang mendukung *Green Ports***
- Stability of PMT revenue and profit
- Stakeholder support for the implementation of policies that support Green Ports

Sejalan dengan roadmap tersebut, PMT berfokus untuk meningkatkan bisnis internal dan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan non-petikemas di Pelindo Grup. Rincian strategi yang dilakukan pada tahun 2025-2026, yaitu melakukan penataan struktur korporasi PMT Grup, melakukan pembaruan model dan kesepakatan bisnis, implementasi strategi perluasan market share di *captive market*, standardisasi operasional dan layanan NPK di seluruh wilayah, melakukan perbaikan data integration guna menunjang performa bisnis, dan meningkatkan kapabilitas SDM PMT Grup. Dukungan *stakeholder* dari Internal Pelindo Grup (*Holding,* Anak Usaha, dan Regional) dibutuhkan utamanya pada pelaksanaan strategi menghadapi dampak dari revisi UU Pelayaran, penguatan layanan PMT, dan penyelesaian isu-isu korporasi di PMT, terutama terkait dengan pemurnian bisnis.

In line with the roadmap, PMT focuses on strengthening its internal business and enhancing the scope and quality of non-container services within Pelindo Group. The strategies implemented during 2025–2026 include reorganizing PMT Group's corporate structure, updating business models and agreements, implementing market share expansion strategies in captive markets, standardizing non-container operations and services across all regions, improving data integration to support business performance, and enhancing the capabilities of PMT Group's human resources. Support from stakeholders within Pelindo Group (Holding, Subsidiary, and Regional) is particularly required in implementing strategies to address the impact of the revision to the Shipping Law, strengthen PMT's services, and resolve corporate issues within PMT, particularly those related to business streamlining.

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan secara terukur dan terarah, PMT menetapkan 25 Inisiatif Strategis yang diterjemahkan ke dalam 51 Rencana Kerja Manajemen (RKM) Strategis Tahun 2026. Inisiatif tersebut mencakup pengembangan terminal berbasis komoditas dan kawasan industri, standardisasi dan integrasi operasional non-petikemas, pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan, optimalisasi aset, penguatan hubungan pelanggan melalui penerapan *Customer Relationship Management* (CRM) dan *Key Account Management* (KAM), transformasi digital, pengembangan kompetensi SDM, penguatan budaya perusahaan, hingga optimalisasi struktur pendanaan dan tata kelola perusahaan.

Melalui implementasi RJPP 2025–2029 yang didukung oleh berbagai inisiatif strategis tersebut, PMT berupaya memperkuat posisinya sebagai operator terminal multipurpose nasional yang unggul dan terintegrasi. Dengan mengedepankan inovasi, digitalisasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, PMT optimistis dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan secara berkesinambungan, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pelindo Grup, pelanggan, pemegang saham, dan pembangunan ekonomi nasional.

To ensure that the implementation of these strategies is measurable and well-directed, PMT has established 25 Strategic Initiatives, which are translated into 51 Strategic Management Work Plans (RKM) for 2026. These initiatives include the development of commodity- and industrial estate-based terminals, the standardization and integration of non-container operations, the development of port infrastructure and equipment, asset optimization, strengthening customer relationships through the implementation of Customer Relationship Management (CRM) and Key Account Management (KAM), digital transformation, human capital competency development, strengthening corporate culture, and optimizing the Company's funding structure and corporate governance.

Through the implementation of the 2025–2029 RJPP, supported by these strategic initiatives, PMT seeks to strengthen its position as a leading and integrated national multipurpose terminal operator. By emphasizing innovation, digitalization, collaboration, and sustainability, PMT is optimistic that it will continue to improve its operational and financial performance in a sustainable manner, while delivering greater contributions to Pelindo Group, customers, shareholders, and Indonesia's national economic development.



PELINDO
MULTI TERMINAL

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance



PMT senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta menerapkan nilai-nilai terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika bisnis yang berlaku. Penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap dunia usaha dan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang sehat.
PMT consistently upholds the principles of Good Corporate Governance (GCG) and adheres to the highest standards in accordance with applicable laws and regulations as well as prevailing business ethics. The implementation of good corporate governance is a key factor in building trust in the business community and supporting the creation of a healthy economic system.



05

Pencapaian Terbaik Penerapan Prinsip-Prinsip Governansi Korporat

Best Achievements in the Implementation of Corporate Governance Principles



Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan secara berkesinambungan telah memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2025. Konsistensi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian yang berhasil diraih, antara lain:

1. Peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal, yang ditunjukkan melalui penerapan proses pengendalian pada 15 risiko strategis. Adapun skor penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah 84,80 artinya memiliki kualitas penerapan manajemen risiko *Fair*.
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara objektif melalui metode *self-assessment* berbasis indikator kinerja individu dan kolektif. Penilaian ini memperkuat peran pengawasan dan pengambilan keputusan strategis berbasis tata kelola.
3. Pelaksanaan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) menggunakan parameter ACGS, dengan hasil skor 96,47 atau sama dengan "*Very Good*", meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh skor 86,03.
4. Penguatan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) melalui penyempurnaan kebijakan, penetapan Unit Pengelola *Whistleblowing System*, serta penyusunan SOP dan alur pelaporan, yang mendukung budaya perusahaan berintegritas tinggi.
5. Integrasi prinsip-prinsip ETAK dan nilai TARIFT dalam setiap aspek kebijakan, struktur, proses, dan hasil tata kelola, yang menunjukkan komitmen PMT untuk terus meningkatkan kualitas governansi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

The sustainable implementation of Good Corporate Governance principles has positively impacted the Company's performance throughout 2025. Consistency in maintaining transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness has served as the primary foundation for achieving the various performance indicators that have been set. The achievements attained include, among others:

1. Improving the effectiveness of internal control systems, shown through the implementation of control processes for 15 strategic risks. The Risk Management Implementation Quality (KPMR) score is 84.80, indicating a "Fair" level of risk management implementation quality.
2. The performance of Board of Commissioners and Board of Directors is objectively assessed through a self-assessment method based on individual and collective performance indicators. This assessment strengthens the supervisory role and strategic decisionmaking based on governance.
3. An assessment of Good Corporate Governance (GCG) was conducted using ACGS parameters, resulting in a score of 96.47—equivalent to "Very Good"—an improvement from the previous year's score of 86.03.
4. Strengthening the whistleblowing system through policy refinements, the establishment of a Whistleblowing System Management Unit, and the development of SOPs and reporting flows, which support a corporate culture of high integrity.
5. Integration of ETAK principles and TARIFT values in every aspect of governance policies, structures, processes, and outcomes, which demonstrates PMT's commitment to continuously improve the quality of governance and provide added value for all stakeholders.

Pernyataan Penerapan Governansi Korporat Secara Konsisten dan Komprehensif

Statement on Consistent and Comprehensive Implementation of Corporate Governance

Perusahaan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai landasan utama dalam menjalankan proses pengelolaan usaha yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika bisnis yang berlaku. Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perusahaan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap dunia usaha dan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang sehat.

Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip governansi korporat secara konsisten dan menyeluruh di setiap kegiatan usaha. Komitmen ini diarahkan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham serta memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pengguna jasa, regulator, mitra usaha, dan masyarakat luas, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.

DEKLARASI KOMITMEN PENERAPAN GOVERNANSI KORPORAT PIMPINAN TERTINGGI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris bersama Direksi telah merumuskan dan menetapkan Deklarasi Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas usaha. Deklarasi tersebut menjadi landasan dalam memastikan setiap proses pengelolaan Perusahaan serta pengambilan keputusan strategis dilakukan secara terarah, transparan, dan selaras di seluruh jenjang organisasi, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

The Company implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the primary foundation for conducting business management processes that are responsible, transparent, and in accordance with applicable laws and regulations as well as prevailing business ethics. The implementation of good corporate governance not only serves as a corporate control mechanism but also plays a crucial role in building trust in the business community and supporting the creation of a healthy economic system.

In line with this, the Company is committed to consistently and comprehensively applying corporate governance principles in all business activities. This commitment is aimed at creating sustainable value for shareholders and providing optimal benefits to all stakeholders—including employees, service users, regulators, business partners, and the broader community—for both short-term and long-term interests.

DECLARATION OF COMMITMENT TO CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION BY THE COMPANY'S TOP MANAGEMENT

Board of Commissioners and Board of Directors have formulated and established a Declaration of Commitment to Good Corporate Governance as a guideline for conducting business activities. This declaration serves as the foundation for ensuring that all Company management processes and strategic decision-making are carried out in a focused, transparent, and consistent manner across all levels of the organization, thereby supporting the creation of effective and sustainable corporate governance.



DEKLARASI KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT PELINDO MULTI TERMINAL

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal berkomitmen menjadikan:

a. Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelindo Multi Terminal;
b. Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
c. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Pelindo Multi Terminal;
d. Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelindo Multi Terminal;
e. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelindo Multi Terminal;
f. Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelindo Multi Terminal; dan
g. Pedoman Benturan Kepentingan Pelindo Multi Terminal.

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan *Good Corporate Governance* sehingga dapat menjadi panduan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten agar tercipta tatanan pengelolaan Perseroan yang berdasarkan *Good Corporate Governance*.

Medan, 28 Februari 2024

Dewan Komisaris
1. Darwanto — Komisaris Utama
2. Armen Dayat — Komisaris
3. Ahmad Pawira Mulia Tarigan — Komisaris
4. Herbert Timbo Parlindungan Siahaan — Komisaris Independen
5. Thamrin Arta Dewangga — Komisaris

Direksi
1. Yon Irawan — Direktur Utama
2. Rizki Kurniawan — Direktur Strategi dan Komersial
3. Arif Rusman Yulianto — Direktur Operasi
4. Zohri Ingenyah — Direktur Teknik
5. Edi Priyanto — Direktur SDM
6. Yoni Sebayang — Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

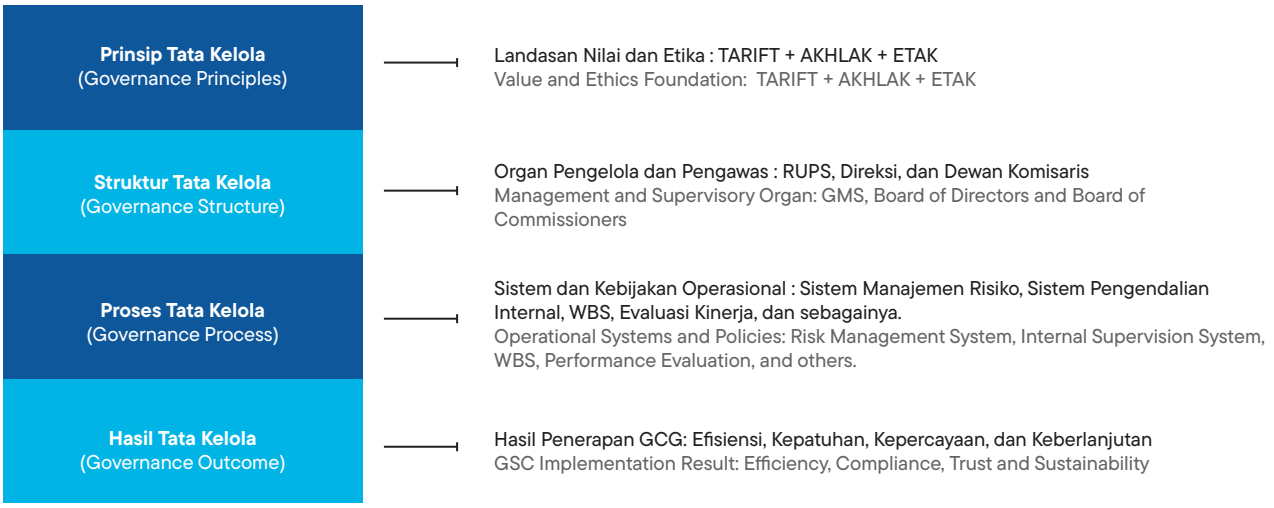
SVP SKTR | SVP HUKM

KERANGKA KERJA TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan mengimplementasikan kerangka kerja governansi (*governance framework*) untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang terarah dan terintegrasi. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menyatukan berbagai aspek tata kelola, mulai dari prinsip, struktur organisasi, proses bisnis, hingga pencapaian hasil, sehingga seluruh elemen berjalan selaras dan mendukung efektivitas pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh.

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

The Company has implemented a governance framework to ensure the application of a focused and integrated approach to corporate governance. This framework serves as a guide for integrating various aspects of governance, from principles and organizational structure to business processes and the achievement of results, so that all elements operate in harmony and support the overall effectiveness of the Company's management.



Kerangka tata kelola yang diterapkan oleh Perusahaan disusun atas 4 (empat) komponen yang terintegrasi satu sama lain, yang meliputi:

1. Prinsip Tata Kelola (*Governance Principles*)
   Merupakan landasan etis dan normatif yang mendasari seluruh aktivitas tata kelola. Perusahaan menjunjung tinggi prinsip TARIFT (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, dan *Trust*), selaras dengan arah kebijakan *holding* dan prinsip dasar GCG. Prinsip ini diperkuat melalui internalisasi nilai budaya AKHLAK yang membentuk perilaku Insan Perusahaan di seluruh lini. Nilai dasar TARIFT ini kemudian mengalami transformasi menjadi 4 pilar yaitu ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan).

2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
   Mencakup organ-organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara profesional, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris beserta komite-komitenya, dan Direksi yang didukung oleh unit-unit strategis seperti SPI, Fungsi Kepatuhan, dan Sekretaris Perusahaan.
3. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
   Berupa sistem, kebijakan, dan mekanisme operasional yang mendukung pelaksanaan tata kelola secara konsisten dan terukur. Proses ini meliputi pengelolaan risiko, pelaporan keuangan, mekanisme *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, hingga evaluasi kinerja organ GCG.
4. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
   Merupakan hasil nyata dari efektivitas penerapan tata kelola, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Cakupan hasil ini meliputi peningkatan efisiensi, kepatuhan, reputasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan, serta kontribusi terhadap keberlanjutan Perusahaan.

Berlandaskan kerangka tersebut, Perusahaan menegaskan bahwa prinsip tata kelola tidak berhenti pada tataran kebijakan dan prosedur semata, melainkan diimplementasikan secara nyata dalam budaya kerja, perilaku, serta capaian kinerja yang terukur. Kerangka tata kelola tersebut juga berperan sebagai jembatan yang menyelaraskan arah strategis Perusahaan

The Company's governance framework consists of 4 (four) interconnected components, which include:

1. Governance Principles
   Is ethical and normative foundation for all governance activities. The Company upholds the TARIFT principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trust), which are aligned with the holding Company's policy direction and the basic principles of GCG. These principles are strengthened through the internalization of AKHLAK cultural values, shaping the behavior of Company personnel across all levels. The Company's core values, formerly known as TARIFT, have since been transformed into four fundamental pillars, namely ETAK (Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability).
2. Governance Structure
   This includes corporate organs that carry out supervision and management functions professionally, namely General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and its committees, and Board of Directors supported by strategic units such as Internal Audit Unit (SPI), Compliance Function, and Corporate Secretary.
3. Governance Process
   This refers to the systems, policies, and operational mechanisms that support consistent and measurable implementation of governance. These processes include risk management, financial reporting, whistleblowing mechanisms, internal control systems, and performance evaluations of GCG organs.
4. Governance Outcome
   is the tangible results of effective governance implementation, both quantitatively and qualitatively. These outcomes encompass improvements in efficiency, compliance, reputation, stakeholder trust, and the Company's contribution to sustainability.

Based on this framework, the Company emphasizes that governance principles do not stop at the level of policies and procedures alone, but are tangibly implemented in the work culture, behavior, and measurable performance outcomes. This governance framework also serves as a bridge that aligns the Company's strategic direction with

dengan harapan para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat landasan dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berlandaskan integritas dan keberlanjutan.

Seluruh komponen dalam *Governance Framework* yang diterapkan oleh Perusahaan pada dasarnya telah selaras dengan nilai-nilai fundamental governansi modern yang menitikberatkan pada Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan (ETAK). Nilai-nilai tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sebagai lembaga independen di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang memiliki peran dalam mendorong penguatan praktik tata kelola di Indonesia.

Implementasi nilai-nilai ETAK Perusahaan tecermin dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi prinsip etika, penyampaian informasi yang terbuka, pelaksanaan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, serta penerapan aspek keberlanjutan dalam kegiatan usaha. Pendekatan ini memastikan bahwa Tata Kelola yang Baik menjadi bagian yang melekat dalam praktik operasional sehari-hari.

the expectations of its stakeholders, while strengthening the foundation for achieving business growth grounded in integrity and sustainability.

All components of the Governance Framework implemented by the Company are fundamentally aligned with the core values of modern governance, which emphasize Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability (ETAK). These values are a concept developed by the National Governance Policy Committee (KNKG), an independent institution under the coordination of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, which plays a role in promoting the strengthening of governance practices in Indonesia.

The implementation of the Company's ETAK values is reflected in every decision-making process that upholds ethical principles, ensures open communication of information, fulfills responsibilities to all stakeholders, and incorporates sustainability aspects into business operations. This approach ensures that Good Corporate Governance is an integral part of daily operational practices.

Keselarasan Prinsip TARIFT dengan ETAK
Alignment of TARIFT Principles with ETAK

TARIFT	ETAK
Transparansi Transparency	Transparansi Transparency
Akuntabilitas Accountability	Akuntabilitas Accountability
Responsibilitas Responsibility	Etika dan Keberlanjutan Ethics and Sustainability
Independensi Independency	Etika dan Keberlanjutan Ethics and Sustainability
Fairness (Kewajaran) Fairness	Akuntabilitas Accountability
Trusted (Tepercaya) Trusted	Etika dan Keberlanjutan Ethics and Sustainability

GOVERNANSI KORPORAT SEBAGAI *ENABLER* PENERAPAN ESG DAN DUKUNGAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Perusahaan memandang bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan usaha adalah kualitas penerapan tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan jangka panjang. Dalam hal ini, governansi korporat menjadi elemen kunci yang memengaruhi tingkat kepercayaan dan daya saing. Oleh karena itu, Perusahaan menempatkan nilai-nilai tata kelola sebagai penghubung antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perspektif tersebut, Perusahaan senantiasa mengintegrasikan pendekatan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG) ke dalam

CORPORATE GOVERNANCE AS AN ENABLER FOR ESG IMPLEMENTATION AND SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTS GOALS (SDG's)

The Company believes one of the factors supporting business success is the quality of governance practices that ensure long-term sustainability. In this regard, corporate governance is a key element that influences levels of trust and competitiveness. Therefore, the Company positions governance values as a bridge between business interests and broader responsibilities toward stakeholders.

In line with this perspective, the Company consistently integrates the Environmental, Social, and Governance (ESG) approach into all operational activities. Every policy, control

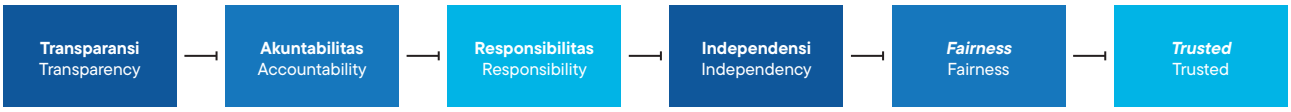
seluruh aktivitas operasional. Setiap kebijakan, mekanisme pengendalian, serta proses pengambilan keputusan dirancang untuk mencerminkan prinsip keberlanjutan dan mendukung pencapaian TPB sebagai bagian dari komitmen global. Pendekatan tersebut memastikan bahwa pertumbuhan usaha berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, penerapan nilai TARIFT yang dipadukan dengan budaya AKHLAK menjadi landasan dalam memperkuat kontribusi Perusahaan terhadap berbagai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diantaranya termasuk TPB 9 tentang pembangunan infrastruktur yang berketahanan, TPB 8 tentang peningkatan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta TPB 17 tentang kemitraan strategis yang inklusif. Dengan tata kelola yang kokoh, Perusahaan berharap dapat membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berdaya tahan. Informasi terperinci terkait penerapan keberlanjutan yang selaras dengan TPB disampaikan di Laporan Keberlanjutan PMT 2025 yang menjadi dokumen tak terpisahkan dengan Laporan Tahunan ini.

PRINSIP TARIFT SEBAGAI KOMPAS ETIKA DAN TATA KELOLA

Sebagai entitas yang berada dalam lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Perusahaan mengemban mandat untuk mengimplementasikan tata kelola mencerminkan standar praktik terbaik dalam governansi korporat. Perusahaan menerapkan prinsip TARIFT dengan merujuk pada pedoman tata kelola yang ditetapkan oleh induk usaha. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membentuk sistem, kebijakan, serta perilaku organisasi, sehingga seluruh aktivitas Perusahaan dapat berjalan secara konsisten, terarah, dan selaras dengan harapan pemangku kepentingan.

Prinsip Governansi Korporat TARIFT
TARIFT Corporate Governance Principles



Prinsip TARIFT yang diterapkan oleh Perusahaan pada dasarnya merupakan pengembangan dari 5 (lima) prinsip utama yang telah diakui secara luas di tingkat internasional, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pengembangan tersebut dilakukan dengan menambahkan unsur "*Trusted*" atau Tepercaya sebagai nilai yang memperkuat keseluruhan kerangka governansi. Penambahan aspek kepercayaan ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk membangun reputasi yang kredibel di mata pemangku kepentingan.

Perusahaan menerapkan aspek "*Trusted*" melalui konsistensi kinerja, penerapan etika dalam setiap pengambilan keputusan, serta keterbukaan dalam proses pelaporan dan fungsi pengawasan. Seluruh prinsip TARIFT telah diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem tata kelola Perusahaan,

mechanism, and decision-making process is designed to reflect sustainability principles and support the achievement of SDG's as part of a global commitment. This approach ensures that business growth goes hand in hand with environmental conservation and improved social well-being.

Furthermore, the implementation of the TARIFT values, integrated with the AKHLAK corporate culture, serves as the foundation for strengthening the Company's contribution to several Sustainable Development Goals (SDGs), including SDG 9 on building resilient infrastructure, SDG 8 on promoting decent work and economic growth, and SDG 17 on fostering inclusive strategic partnerships. Through strong corporate governance, the Company aims to establish a resilient foundation for creating long-term value. Further information regarding the Company's sustainability initiatives aligned with the SDGs is presented in the PMT 2025 Sustainability Report, which forms an integral part of this Annual Report.

TARIFT PRINCIPLES AS A COMPASS FOR ETHICS AND GOVERNANCE

As an entity within the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) group, the Company is mandated to implement governance practices that reflect best practices in corporate governance. The Company applies the TARIFT principles in accordance with the governance guidelines established by its parent Company. These principles serve as the foundation for shaping the Company's systems, policies, and organizational behavior, ensuring that all of its activities are conducted consistently, purposefully, and in alignment with stakeholder expectations.

The TARIFT principles implemented by the Company are essentially an expansion of five (5) key principles that are widely recognized internationally, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. This development was achieved by adding the element of "Trusted" as a value that strengthens the overall governance framework. The inclusion of this aspect of trust reflects the Company's commitment to building a credible reputation in the eyes of its stakeholders.

The Company implements the "Trusted" aspect through consistent performance, ethical decision-making, and transparency in reporting processes and supervisory functions. All TARIFT principles have been fully integrated into the Company's governance system, through policies,

baik melalui kebijakan, struktur, maupun mekanisme pengendalian yang terukur. Penguatan peran organ tata kelola seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan pelaksanaan evaluasi kinerja, pengelolaan risiko yang komprehensif, serta pengoperasian sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif dan dapat diandalkan.

structures, and measurable control mechanisms. The roles of governance organs such as GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors are continuously strengthened, accompanied by performance evaluations, comprehensive risk management, and the operation of an effective and reliable whistleblowing system.

Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut beserta penerapannya di lingkungan Perusahaan disampaikan sebagai berikut:

Further details regarding these principles and their implementation within the Company are provided as follows:

Prinsip Dasar Basic Principles	**Penjelasan Sesuai Pedoman GCG Perusahaan** Explanation According to the Company's GCG Guidelines	**Penerapan di Lingkup Perusahaan** Implementation Within the Company
Keterbukaan Transparency	1. Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. 2. Perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat materil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. 3. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan memengaruhi pengambilan keputusan cara Pemangku Kepentingan sesuai dengan klasifikasi Informasi Perusahaan. 1. The Company guarantees transparency and objectivity in carrying out the decision-making process to conduct its business activities. 2. The Company must provide material and relevant information about the Company in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders. 3. Company must take the initiative to disclose not only information required by the Articles of Association and applicable laws and regulations but also other important matters that may influence stakeholders' decision-making, in accordance with the Company's information classification.	1. Perusahaan secara aktif menyediakan informasi penting dan relevan melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web resmi, laporan tahunan, dan media internal. 2. Pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan tepat waktu, sementara pengambilan keputusan strategis disertai dokumentasi yang terbuka dan dapat ditelusuri. 3. Keterbukaan juga diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaporan kinerja. 1. The Company actively provides important and relevant information through various communication channels such as the official website, annual reports, and internal media. 2. Financial reporting is conducted transparently and in a timely manner, while strategic decision-making is accompanied by open and traceable documentation. 3. Transparency is also applied in the implementation of procurement of goods/ services and performance reporting.
Akuntabilitas Accountability	Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku Bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* guna mencapai kinerja Perusahaan secara berkesinambungan. The Company works with high accountability and is responsible for all its actions in a transparent and fair manner for the interests of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, business ethics, and corporate culture, while still paying attention to the interests of stakeholders in order to achieve sustainable Company performance.	1. Struktur tata kelola Perusahaan telah disusun secara jelas, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung. 2. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dan transparan, termasuk evaluasi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI). 1. The Company's governance structure has been clearly established, with a well-defined division of duties and responsibilities among the GMS, Board of Commissioners, Board of Directors, and supporting organs. 2. Performance assessments are conducted regularly and transparently, including evaluations of Board of Directors and Board of Commissioners based on Key Performance Indicators (KPIs).

Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Sesuai Pedoman GCG Perusahaan Explanation According to the Company's GCG Guidelines	Penerapan di Lingkup Perusahaan Implementation Within the Company
Pertanggungjawaban Responsibility	Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perusahaan. The Company adheres firmly to the principle of prudence and ensures compliance with corporate regulations, Articles of Association, and applicable laws and regulations. It also fulfills its social responsibilities, including concern for the community and environmental sustainability, particularly in areas surrounding the Company, by implementing proper planning and execution to maintain the continuity of the Company's business operations.	1. Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi dengan pembentukan unit kepatuhan dan pelaksanaan audit internal secara rutin. 2. Perusahaan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pelabuhan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan UMKM sekitar wilayah operasional. 1. The Company ensures compliance with all regulations through the establishment of a compliance unit and the routine implementation of internal audits. 2. The Company carries out Social and Environmental Responsibility (CSR) programs focused on empowering port communities, preserving the environment, and developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) around its operational areas.
Kemandirian Independency	Perusahaan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company is managed professionally, avoiding conflicts of interest and any influence or pressure from external parties that are not in accordance with applicable laws and regulations or sound corporate principles.	1. Perusahaan menjamin independensi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme kebijakan pengelolaan benturan kepentingan, yang diterapkan di semua lini organisasi. 2. Direksi dan Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya tanpa intervensi pihak luar dan didukung oleh komite independen yang memberikan pandangan objektif. 1. The Company ensures independence in decisionmaking through a conflict of interest management policy that is implemented across all levels of the organization. 2. Board of Directors and Board of Commissioners carry out their duties without external interference and are supported by independent committees that provide objective insights.
Kewajaran Fairness	Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. In carrying out its activities, the Company consistently upholds the principles of fairness and equality.	1. Perusahaan menjunjung tinggi asas kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, mitra kerja, dan masyarakat. 2. Proses rekrutmen, pengadaan, serta pelayanan kepada pengguna jasa dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. 1. The Company upholds the principle of equality by treating all stakeholders fairly, including employees, business partners, and the community. 2. Recruitment, procurement, and service delivery to customers are conducted objectively and without discrimination.
Tepercaya Trusted	Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan. The Company has earned full trust and support from all stakeholders.	Melalui konsistensi dalam layanan dan tata kelola, Perusahaan berhasil membangun kepercayaan dari pelanggan, regulator, dan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan kepuasan pelanggan, dukungan dari mitra usaha, serta kolaborasi strategis dalam mendukung konektivitas logistik nasional. Through consistent service and governance practices, the Company has successfully built trust with customers, regulators, and the public, as reflected in increased customer satisfaction, strong support from business partners, and strategic collaborations in advancing national logistics connectivity.

INTEGRASI PILAR ETAK

Sejalan dengan penerapan prinsip TARIFT yang menjadi acuan dalam lingkungan Pelindo Grup, Perusahaan turut memperkuat praktik tata kelola melalui pengintegrasian pilar ETAK yang mencakup Perilaku Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan ke dalam seluruh aspek pengelolaan usaha. Integrasi ini dilakukan secara konsisten agar setiap proses bisnis dapat berorientasi pada kinerja, sekaligus mencerminkan nilai-nilai tata kelola yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

INTEGRATION OF ETAK PILLARS

In line with the implementation of TARIFT principles, which serve as a benchmark within Pelindo Group, the Company is strengthening its governance practices by integrating the ETAK pillars that encompass Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability into all aspects of business management. This integration is carried out consistently so that every business process is performance-oriented while reflecting the values of responsible and sustainable governance.

Sejalan dengan penetapan ETAK sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi, Perusahaan berupaya menegaskan komitmennya sebagai entitas yang senantiasa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seraya bersikap responsif terhadap perkembangan praktik governansi yang semakin menekankan keterbukaan, keadilan, serta penciptaan nilai jangka panjang. Adapun penerapan masing-masing pilar ETAK di lingkungan Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

1. Etika
   Perusahaan menanamkan prinsip etika dalam setiap aspek operasional melalui penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan, penguatan budaya perusahaan berbasis nilai AKHLAK, serta pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dikelola secara independen untuk menjaga integritas dan mencegah benturan kepentingan.
2. Transparansi
   Perusahaan menjunjung keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, baik kepada pemegang saham, mitra kerja, maupun masyarakat. Praktik ini diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, laporan tahunan, serta penyediaan kanal komunikasi yang mudah diakses publik. Selain itu, proses pengadaan, evaluasi kinerja, dan kebijakan strategis dilaksanakan secara terbuka dan dapat ditelusuri.
3. Akuntabilitas
   Akuntabilitas dijaga melalui pembagian peran yang jelas antara organ tata kelola, pengawasan internal yang aktif, serta sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur (KPI). Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, termasuk terhadap Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai bentuk akuntabilitas korporat yang terukur.

4. Keberlanjutan
   Perusahaan menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari perencanaan dan operasional bisnisnya. Seluruh program kerja dan investasi strategis mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), efisiensi energi, pengurangan emisi, serta upaya pelestarian ekosistem pelabuhan. Komitmen ini tidak hanya menciptakan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga memperkuat kontribusi Perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

TUJUAN PENERAPAN GOVERNANSI KORPORAT

Berdasarkan Pedoman GCG Perusahaan, tujuan dari penerapan governansi korporat adalah:

1. Memaksimalkan Tata Kelola Perusahaan dengan baik, kinerja dan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum

In line with the establishment of ETAK as the foundation for decision-making and organizational management, the Company strives to reaffirm its commitment as an entity that consistently complies with legal and regulatory requirements, while remaining responsive to evolving governance practices that increasingly emphasize openness, fairness, and the creation of long-term value. The implementation of each ETAK pillar within the Company is outlined as follows:

1. Ethics
   The Company instills ethical principles in every operational aspect through the implementation of Code of Conduct that apply to all Company personnel, strengthening the Company culture based on AKHLAK values, and implementing a reporting system for violations (Whistleblowing System) that is managed independently to maintain integrity and prevent conflicts of interest.

2. Transparency
   The Company upholds the openness of relevant, accurate, and timely information, both to shareholders, business partners, and the public. This practice is realized through the publication of financial reports, annual reports, and the provision of communication channels that are easily accessible to the public. In addition, procurement process, performance evaluation, and strategic policies are carried out openly and can be traced.
3. Accountability
   Accountability is maintained through a clear division of roles between governance organs, active internal supervision, and a performance evaluation system based on measurable indicators (KPIs). Performance evaluations are carried out periodically, including for Board of Directors and Board of Commissioners, as a form of measurable corporate accountability.
4. Sustainability
   The Company makes sustainability the core of its business planning and operations. All work programs and strategic investments consider economic, social, and environmental impacts, including through the implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR) program, energy efficiency, emission reduction, and efforts to preserve the port ecosystem. This commitment not only creates value for shareholders, but also strengthens The Company's contribution to national sustainable development goals.

OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE

Based on the Company's GCG Code, objectives of implementing corporate governance are:

1. Maximizing Good Corporate Governance, performance and corporate value for shareholders through the implementation of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness principles in order for the Company to have high competitiveness;
2. Improve the management of the Company in a professional, transparent, efficient manner, and encourage the empowerment of functions and independence

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GOVERNANSI KORPORAT

Penerapan governansi korporat di Perusahaan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku sebagai dasar dalam memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Adapun landasan hukum yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-1/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-3/MBU/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Akta Pendirian PT Pelindo Multi Terminal Nomor 19 tanggal 29 September 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 Tanggal 12 Oktober 2022;

of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors;
3. Encourage the Company's organs in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with the provisions of laws and regulations, as well as awareness of social responsibility to stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increase the Company's contribution to the national economy; and
5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

LEGAL BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The implementation of corporate governance at the Company is guided by various applicable laws and regulations, which serve as the foundation for ensuring good and sustainable governance. The legal basis used includes:

1. Law Number 40 of 2007 dated August 16, 2007, concerning Limited Liability Companies;
2. Law Number 17 of 2008 concerning Shipping;
3. Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law;
4. Law Number 14 of 2008 dated April 30, 2008, concerning Public Information Disclosure;
5. Law Number 19 of 2016 dated November 25, 2016, concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 dated April 21, 2008, on Electronic Information and Transactions;
6. Government Regulation Number 61 of 2009 concerning Ports, as amended by Government Regulation Number 64 of 2015 on the Amendment to Government Regulation Number 61 of 2009 on Ports;
7. Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Administration of Shipping Sector;
8. The Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia Number: PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises;
9. The Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia Number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
10. The Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia Number: PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organization and Human Capital of State-Owned Enterprises;
11. Deed of Establishment of PT Pelindo Multi Terminal Number 19 dated September 29, 2021, as amended several times, most recently by the Deed of Statement of Shareholders' Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Number 14 dated October 12, 2022;

12. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 12 Tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Multi Terminal jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 13 Tanggal 20 Maret 2023 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 06 Tanggal 16 November 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Multi Terminal; dan
13. Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor OT.01.03/2OL/1/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 20 Juli 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelindo Multi Terminal.

ROADMAP GOVERNANSI KORPORAT PERUSAHAAN

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan belum menyusun dokumen peta jalan (*roadmap*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara khusus. Meskipun demikian, arah dan strategi penguatan tata kelola telah dirumuskan secara terintegrasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut memuat berbagai target strategis jangka menengah yang dirancang untuk mendukung pengembangan bisnis nonpetikemas secara terstandar, terpadu, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penyusunan RJPP PMT Tahun 2025-2029 mengacu pada Buku Putih Kajian Penggabungan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta sejumlah kebijakan internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Pelindo Multi Terminal terkait pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, yang dilengkapi dengan rangkaian wawancara dan diskusi bersama jajaran Direksi dan Manajemen Anak Usaha Pelindo Multi Terminal. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip GCG diintegrasikan ke dalam berbagai program kerja, termasuk penguatan struktur organisasi, penyempurnaan kebijakan internal, penerapan sistem manajemen kinerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi proses bisnis guna mendukung efektivitas operasional Perusahaan.

Untuk memastikan ketercapaian sasaran sesuai dengan visi dan inisiatif strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2029, Perusahaan menyusun *roadmap* yang terbagi ke dalam tiga fase, yaitu fase pertama (tahun 2025-2026) Perusahaan berfokus untuk meningkatkan bisnis internal dan meningkatkan performa layanan, fase kedua (tahun 2027-2028) Perusahaan melakukan perluasan ekosistem dan layanan untuk memperkuat posisi sebagai pelaku bisnis nonpetikemas nasional, dan fase ketiga (tahun 2029)

12. Deed of Circular Shareholders' Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Number 12 dated October 6, 2021, concerning Acceptance of Notification of Corporate Data Amendment of PT Pelindo Multi Terminal, in conjunction with Deed of Circular Shareholders' Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Number 13 dated March 20, 2023, in conjunction with Deed of Circular Shareholders' Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Number 06 dated November 16, 2023, concerning Acceptance of Notification of Corporate Data Amendment of PT Pelindo Multi Terminal;and
13. Board of Directors Regulation of PT Pelindo Multi Terminal Number OT.01.03/2OL/1/PSOS/DIRU/PLMT23 dated July 20, 2023, concerning the Organizational Structure and Governance of PT Pelindo Multi Terminal.

CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

As of the end of 2025, the Company has not yet prepared a specific roadmap document for Good Corporate Governance (GCG). However, the direction and strategy for strengthening governance have been integrated into the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2025-2029. This document contains various medium-term strategic targets designed to support the development of non-container business in a standardized, integrated, and sustainability-oriented manner.

The preparation of the PMT 2025–2029 RJPP is based on the 2021 White Paper on the Study of the Merger of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as a number of internal policies of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pelindo Multi Terminal regarding guidelines for the preparation of the Company's Long-Term Plan, supplemented by a series of interviews and discussions with the Board of Directors and management of Pelindo Multi Terminal's subsidiaries. In its implementation, GCG principles are integrated into various work programs, including strengthening the organizational structure, refining internal policies, implementing a performance management system, and enhancing human capital capacity and the digitization of business processes to support the Company's operational effectiveness.

To ensure the achievement of its objectives in line with the Company's vision and strategic initiatives for 2029, the Company has established a roadmap comprising three phases. During the first phase (2025–2026), the Company will focus on strengthening its internal business capabilities and enhancing service performance. In the second phase (2027–2028), the Company will expand its business ecosystem and service offerings to reinforce its position as a leading national non-container business player. In the third phase

Perusahaan berfokus untuk mempertahankan posisi dalam pengembangan bisnis nonpetikemas yang berkelanjutan.

(2029), the Company will focus on sustaining its leadership in the development of a sustainable non-container business.



Pada tahun 2025, Perusahaan memasuki fase pertama *roadmap* RJPP, yaitu *Enhancing Internal Business and Service Excellence*, sebagai fondasi awal penguatan tata kelola Perusahaan sebelum memasuki fase ekspansi ekosistem bisnis pada periode berikutnya. Pelaksanaan fase ini turut didukung oleh *stakeholder* internal Pelindo Grup, baik *Holding* maupun Anak Usaha, Regional, khususnya dalam pengkajian revisi UU Pelayaran, penguatan layanan, dan penyelesaian isu-isu korporasi PMT.

In 2025, the Company entered the first phase of its Long-Term Corporate Plan (RJPP) roadmap, Enhancing Internal Business and Service Excellence, which serves as the initial foundation for strengthening corporate governance before advancing to the business ecosystem expansion phase in the subsequent period. The implementation of this phase was supported by internal stakeholders across the Pelindo Group, including the Holding Company, Subsidiaries, and Regional offices, particularly in the review of revisions to the Shipping Law, the enhancement of service quality, and the resolution of PMT's corporate issues.

Meskipun Perusahaan belum memiliki dokumen *Roadmap* GCG yang tersusun secara terpisah, arah pengembangan tata kelola telah menjadi bagian yang melekat dalam *roadmap*

Although the Company does not yet have a separate, formal GCG Roadmap document, direction for governance development has become an integral part of the RJPP

RJPP 2025-2029 yang dijalankan. Ke depan, Perusahaan merencanakan penyusunan *roadmap* GCG secara formal sebagai tindak lanjut dari proses tersebut, sehingga implementasi prinsip-prinsip governansi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terukur, dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian visi Perusahaan sebagai *Indonesia's Connectivity Champion*.

EVALUASI DAN/ATAU PENILAIAN PENERAPAN GOVERNANSI KORPORAT

Perusahaan secara konsisten melaksanakan penilaian atas penerapan governansi korporat setiap tahun sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola. Proses evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa praktik yang dijalankan telah selaras dengan ketentuan yang berlaku serta mengikuti perkembangan standar terbaik di industri.

Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai landasan dalam menyusun langkah-langkah penyempurnaan secara berkesinambungan, baik dari aspek kebijakan, sistem, maupun mekanisme pengawasan. Melalui pendekatan ini, Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi, sekaligus mendukung terciptanya nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PMT, Perusahaan melaksanakan penilaian atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan;
3. Sebelum pelaksanaan penilaian, didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan;
4. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang di Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya;
5. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di Bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung;
6. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri (*self-assessment*), yang pelaksanaannya dapat

2025–2029 Roadmap being implemented. Moving forward, the Company plans to formally develop a GCG roadmap as a follow-up to this process, so that the implementation of governance principles can be carried out in a more structured, measurable, and sustainable manner to support the achievement of the Company's vision as Indonesia's Connectivity Champion.

EVALUATION AND/OR ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company consistently conducts an annual assessment of its corporate governance implementation as part of its efforts to strengthen governance. This evaluation process is carried out to ensure that the practices in place are in line with applicable regulations and align with the latest industry best practices.

The evaluation results serve as a basis for developing continuous improvement measures, covering policies, systems, and supervisory mechanisms. Through this approach, the Company strives to enhance accountability and transparency while supporting the creation of added value for all stakeholders.

POLICY

In accordance with the provisions of PMT's Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, the Company conducts assessments of the implementation of good corporate governance in the following forms:

1. Assessment, which is a program to identify the implementation of Good Corporate Governance in the Company by measuring implementation and application of Good Corporate Governance which is carried out regularly every two (2) years;
2. Evaluation (Review), which is a program to describe the follow-up actions on GCG implementation and application in the Company, conducted in the year following the assessmen, includes reviewing the assessment results and the follow-up on improvement recommendations;
3. Prior to the assessment, there is a socialization effort to promote good corporate governance within the Company;
4. The assessment is principally conducted by an independent assessor appointed by Board of Commissioners/Supervisory Board through a process aligned with the Company's procurement of good policies, and if necessary, can ask for assistance from Board of Directors in the appointment process;
5. If deemed more effective and efficient, the assessment can be carried out by a qualified Government agency in the field of Good Corporate Governance, appointed directly by Board of Directors;
6. The evaluation is principally conducted as a selfassessment, which may involve discussions or

didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di Bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
7. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN/Pemegang Saham;
8. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di Bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya;
9. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menandatangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksi yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan; dan
10. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.

Pada tahun 2025, Perusahaan melaksanakan *assessment* governansi korporat dengan mengacu pada metode ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Meskipun metode tersebut pada umumnya diterapkan pada perusahaan terbuka, Perusahaan mengadopsinya sebagai upaya untuk membangun praktik tata kelola yang sejalan dengan standar regional dan praktik terbaik internasional. Penerapan ACGS mencerminkan komitmen Perusahaan untuk tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga menjadikan tata kelola sebagai elemen strategis dalam mendukung penguatan peran Perusahaan di lingkungan Pelindo Grup.

Implementasi metode tersebut juga selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 yang mendorong peningkatan kualitas governansi korporat pada seluruh BUMN beserta entitas anak usahanya melalui proses evaluasi yang terukur dan berkesinambungan. Berlandaskan pendekatan tersebut, Perusahaan terus memperkuat budaya tata kelola yang mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan integritas guna mendukung pencapaian Visi Perusahaan sebagai Anak Usaha strategis dalam ekosistem PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PENILAIAN BERDASARKAN ACGS

ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan standar internasional pada perusahaan-perusahaan terbuka di kawasan ASEAN. Metode ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD Principles, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam praktik governansi korporat global.

Seiring dengan perkembangan praktik tata kelola dan dinamika regulasi di kawasan regional, prinsip-prinsip dalam

assistance from independent assessors or use the services of competent Government agency in the field of Good Corporate Governance;

7. Implementation of assessments and evaluations are carried out using indicators/parameters determined by the Ministry of SOEs or Shareholders;
8. In the event that the evaluation is conducted with assistance of an independent assessor or using services of a competent Government agency in Good Corporate Governance, the Independent Assessor or Government agency conducting evaluation may not perform the assessment the following year;
9. Before conducting the assessment, the assessors referred to in items (4) and (5) must sign a contract/agreement with Board of Directors, outlining the rights and obligations of both parties, including timelines and fees; and
10. The results of assessment and evaluation must be reported to the GMS alongside submission of the annual report.

In 2025, the Company conducted a corporate governance assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) methodology. Although this methodology is generally applied to publicly listed companies, the Company adopted it as part of its efforts to establish governance practices aligned with regional standards and international best practices. The implementation of ACGS reflects the Company's commitment not only to meeting compliance requirements but also to making corporate governance a strategic element in strengthening the Company's role within Pelindo Group.

The implementation of this methodology is also in line with the provisions of Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, which encourages the improvement of corporate governance quality across all SOEs and their subsidiaries through a measurable and continuous evaluation process. Based on this approach, the Company continues to strengthen a governance culture that prioritizes transparency, professionalism, and integrity to support the achievement of the Company's Vision as a strategic Subsidiary within the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ecosystem.

ASSESSMENT BASED ON ASEAN CG SCORECARD

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) is an assessment tool used to measure the level of corporate governance implementation based on international standards among public companies in the ASEAN region. This methodology was developed in accordance with the corporate governance principles established by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), which serve as one of the primary references in global corporate governance practices.

In line with the evolution of governance practices and regulatory dynamics in the region, these principles continue

ACGS terus mengalami penyempurnaan. Perubahan terbaru dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam 39th ACMF Chairs Meeting 2023 untuk harmonisasi dan peningkatan kualitas standar tata kelola perusahaan di negara-negara ASEAN, melalui:

1. Hak-hak dan Perlakuan yang Setara Terhadap Pemegang Saham (*Rights and Equitable treatment of Shareholders*);
2. Keberlanjutan dan Ketahanan (*Sustainability and Resilience*);
3. Keterbukaan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*);
4. Tanggung Jawab Direksi & Dewan Komisaris (*Responsibility of the Board*).

Meskipun Perusahaan tidak berstatus sebagai perusahaan publik atau perusahaan terbuka, Perusahaan tetap mengadopsi standar ACGS sebagai acuan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Adapun penggunaan standar tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk membangun kepercayaan yang kuat di antara para pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi Perusahaan.
2. Praktik tata kelola Perusahaan yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Dengan memiliki struktur yang baik, manajemen yang efisien, dan pengawasan yang ketat, Perusahaan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.
3. Meskipun tidak ada kewajiban secara regulasi untuk mematuhi standar tertentu, menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang berstandar kepada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dapat membantu Perusahaan untuk memastikan kepatuhan mereka setidaknya terhadap *best practices* yang berlaku di tingkat nasional dan regional.
4. Perusahaan yang menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik cenderung lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Dengan memiliki struktur yang kuat dan proses yang transparan, Perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.

to be refined. The most recent changes were made based on an agreement reached at the 39th ACMF Chairs Meeting in 2023 to harmonize and improve the quality of corporate governance standards across ASEAN countries through:

1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders
2. Sustainability and Resilience
3. Disclosure and Transparency
4. Responsibility of the Board.

Although the Company is not a public Company or a publicly traded Company, it has adopted the ACGS standards as a guideline for the implementation of corporate governance. The use of these standards is based on the following considerations:

1. To build strong stakeholder trust and create longterm value for the Company;
2. Effective corporate governance practices contribute to overall business performance. With a good structure, efficient management, and strict supervision, the Company can reduce risks and enhance operational efficiency;
3. Although there is no regulatory obligation to adhere with certain standards, implementing corporate governance practices that are standardized to the ASEAN CG Scorecard can help Companies ensure their compliance with at least the best practices that apply at the national and regional levels.
4. Companies that implement good corporate governance practices tend to be more able to survive in the long term. By having a strong structure and transparent processes, companies can reduce the risk of failure and increase their ability to adapt to changes in the business environment.

ASSESSMENT PENERAPAN GCG 2025, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

GCG ASSESSMENT IN 2025, RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024
GCG Assessment for 2024 Fiscal Year

Jenis Penilaian Assessment Type	*Self Assessment*
Assessor/Penilai Assessor	*Self Assessment* (oleh Perusahaan) | (by the Company)
Tahun Ukur Measurement Year	2025
Periode Penerapan Implementation Period	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 January 1, 2024 until December 31, 2024
Tempat Place	Kantor Pusat PMT PMT Head Office
Waktu Pengukuran Measurement Time	14 Agustus 2025 August 14, 2025

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Details of the Company's GCG assessment results for 2024 fiscal year are as follows

Ringkasan Hasil Penilaian *Asessment* atas Penerapan Good Corprate Governance ACGS Tahun Buku 2024
Summary of Good Corporate Governance ACGS Assessment Results for 2024 fiscal Year

Part	Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year						Tahun Buku 2023 2023 Fiscal Year					
	Jumlah Pertanyaan Number of Questions			Bobot Weighted (%)	Jumlah Kepatuhan Number of Comply	Skor Score	Jumlah Pertanyaan Number of Questions			Bobot Weighted (%)	Jumlah Kepatuhan Number of Comply	Skor Score
	(*Included* N/A)	(N/A)	Total				(*Included* N/A)	(N/A)	Total			
Level 1												
A: *Rights and Equitable Treatment of Shareholders*	30	4	26	20	12	9,23	30	4	26	20	8	6,15
B: *Sustainability and Resilience*	22	0	22	15	21	14,32	22	0	22	15	20	13,64
C: *Disclosure and Transparency*	34	2	32	25	30	23,44	34	2	32	25	24	18,75
D: *Responsibilities of The Board*	63	1	62	40	55	35,48	63	0	63	40	51	32,38
Subtotal	149	7	142	100	118	82,47	149	6	143	100	103	72,03
Level 2												
Bonus	18	-	-	-	-	14	18	-	-	-	-	14,00
Penalty	26	-	-	-	-	0	26	-	-	-	-	0,00
Subtotal	44	-	-	-	-	14	44	-	-	-	-	14,00
Total Level 1 + Level 2	193	-	-	-	-	96,47	193	-	-	-	-	86,03

Pendampingan *Self Assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk tahun buku 2024 dilaksanakan oleh PT Kharisma Integrasi Manajemen dengan hasil penilaian sebesar 96,47 poin, meningkat dibanding tahun buku 2023 sebesar 86,03. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam memperkuat penerapan GCG dengan menjalankan prinsip-prinsip yang transparan, dan akuntabel.

Assistance with the self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance for the 2024 fiscal year is provided by PT Kharisma Integrasi Manajemen with a score of 96.47 points—an increase from the 86.03 points recorded in 2023 fiscal year. This improvement reflects the Company's commitment to strengthening its implementation of GCG by applying the principles of transparency and accountability.

Dalam pelaksanaan *assessment* tersebut, terdapat sejumlah faktor penilaian yang tidak dapat diterapkan (*not applicable*/ N/A) karena menyesuaikan dengan status Perusahaan sebagai non-Tbk. Faktor-faktor tersebut meliputi 4 indikator pada Part A, 2 indikator pada Part C, dan 1 indikator pada Part D, sehingga total faktor uji yang dinilai menjadi 186 indikator dari keseluruhan 193 indikator yang tersedia dalam metode ACGS.

In conducting the assessment, there were a number of assessment factors that were not applicable (N/A) due to the Company's status as a non-publicly listed Company. These factors included 4 indicators in Section A, 2 indicators in Section C, and 1 indicator in Section D, bringing the total number of assessed indicators to 186 out of 193 indicators available in the ACGS methodology.

Perolehan hasil tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh organ Perusahaan, baik pihak pengelola maupun pengawas, dalam membangun praktik governansi korporat yang selaras dengan standar regional. Dengan penguatan tata kelola yang dilakukan secara berkelanjutan, Perusahaan optimistis dapat terus meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga mampu bersaing dan memenuhi ekspektasi praktik governansi korporat di tingkat nasional maupun internasional.

These results reflect the strong commitment of all Company organs, including both management and supervisory organs, to establishing corporate governance practices that align with regional standards. Through continuous efforts to strengthen corporate governance, the Company is optimistic that it can continue to improve the quality of its GCG implementation, thereby enabling it to compete and meet expectations for corporate governance practices at both the national and international levels.

REKOMENDASI *ASSESSMENT* PENERAPAN GCG TAHUN BUKU 2024

Meskipun hasil penerapan ACGS pada tahun buku 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik, Perusahaan tetap berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan guna menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas tata kelola di masa mendatang. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah perbaikan dan penguatan pada aspek-aspek yang masih dapat dioptimalkan, yang meliputi:

1. Rekomendasi Umum
   a. Metodologi pengukuran ASEAN CG *Scorecard* adalah berdasarkan kepada informasi publik, sehingga Perusahaan tetap perlu meningkatkan keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik.
   b. Memanfaatkan *website* semaksimal mungkin sebagai salah satu sarana publikasi yang murah, mudah, cepat, tepat dan efisien.
   c. Dilakukan pemantauan *Website* secara berkala sehingga materi yang dipublikasikan merupakan informasi publik yang valid/terkini dan setiap folder harus bersesuaian dengan materi.
   d. Informasi dan materi yang diunggah di *website* tetap dilakukan 2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
   e. Sejauh tidak bertentangan dengan peraturan lain yang melarang sebaliknya, maka seluruh faktor uji ASEAN CG *Scorecard* upayakan tetap dipublikasikan.
2. Rekomendasi Khusus
   a. Pelaksanaan RUPS baik RUPS Tahunan (laporan kinerja) maupun RUPS Luar Biasa, sebaiknya diungkap pada *website* perusahaan sebagai informasi bagi *stakeholder* berisi sekurang-kurangnya:
      i) Tata Tertib RUPS.
      ii) CV calon Direksi/Dewan Komisaris yang akan diangkat/diangkat kembali dalam RUPS.
      iii) Penjelasan masing-masing agenda RUPS.
      iv) Ketersediaan Surat Kuasa Pemegang Saham.
      v) Risalah keputusan RUPS (publikasi di *website* disarankan 1 hari kerja setelah RUPS).
      vi) Bukti/catatan risalah RUPS yang menunjukan adanya proses pengangkatan Direksi dan/atau Komisaris secara individual.
   b. Seluruh Ketua Komite Dewan Komisaris disarankan Komisaris Independen.
   c. Disarankan menyusun jadwal dan agenda Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris sebelum tahun buku dimulai dan dipublikasikan pada *website*.
   d. Hal-hal lain dapat merujuk kepada hasil *assessment* yang belum terpenuhi (NO).

GCG ASSESSMENT RECOMMENDATIONS FOR 2024 FISCAL YEAR

Although the results of ACGS implementation in 2024 fiscal year show excellent performance, the Company remains committed to continuous improvement to maintain consistency and enhance the quality of corporate governance in the future. These improvement efforts are carried out through various measures to refine and strengthen areas that can still be optimized, including:

1. General Recommendations
   a. ASEAN CG Scorecard assessment methodology is based on public information; therefore, the Company must continue to improve the transparency of information accessible to the public.
   b. Maximize the use of the Company Website as an affordable, accessible, fast, accurate, and efficient publication platform.
   c. Conduct regular monitoring of the Website to ensure that published content is valid, up-to-date public information and that each folder corresponds appropriately to its content.
   d. Information and materials uploaded to the Website must remain bilingual (Indonesian and English).
   e. As long as not prohibited by other applicable regulations, all ASEAN CG Scorecard assessment factors should be disclosed publicly.
2. Specific Recommendations
   a. The holding of GMS, both Annual GMS (performance report) and Extraordinary GMS, should be disclosed on the Company website as information for stakeholders containing at least:
      i) GMS Rules of Procedures;
      ii) CVs of candidates for Board of Directors/Board of Commissioners who will be appointed/reappointed in the GMS;
      iii) Explanations for each GMS agenda item;
      iv) Availability of Shareholder Power of Attorney;
      v) Minutes of GMS Resolutions (publication on the website is recommended 1 working day after the GMS)
      vi) Evidence/notes of the GMS minutes showing the process of appointing Director and/or Commissioner individually.
   b. All Chairman of Board of Commissioners Committee are recommended to be Independent Commissioners.
   c. It is recommended to prepare the schedule and agenda for Board of Directors and Board of Commissioners meetings prior to the start of fiscal year and publish it on the Company Website.
   d. Other matters may refer to other assessment results that have not been met (NO).

Struktur Governansi Korporat Perusahaan
Corporate Governance Structure



Struktur governansi Perusahaan terdiri atas berbagai organ dan perangkat tata kelola yang dibentuk untuk mendukung efektivitas pengelolaan. Pembentukan struktur tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan internal Perusahaan dalam memperkuat implementasi governansi korporat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organisasi Perseroan Terbatas di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai representasi kepentingan pemegang saham, Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan, serta Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan. Sistem tata kelola tersebut menerapkan model *two tier system* yang memisahkan fungsi pengelolaan dan pengawasan secara jelas sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

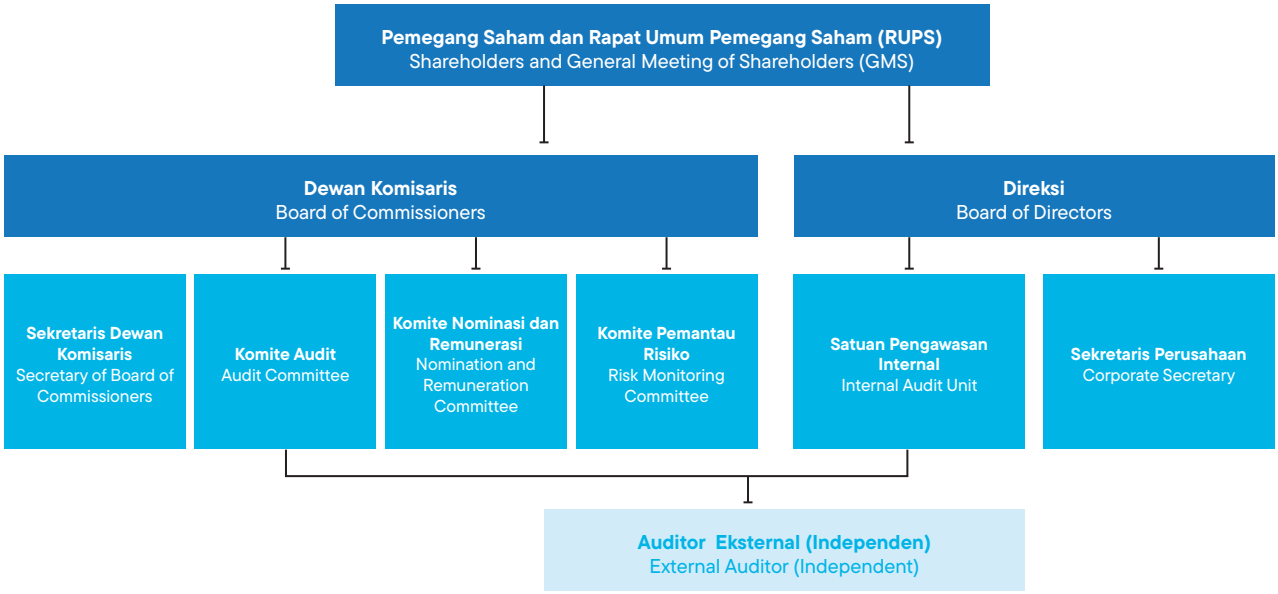
Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan usaha serta memastikan pertumbuhan Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keselarasan pandangan terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi masing-masing organ tata kelola.

The Company's governance structure consists of various organs and governance mechanisms established to support effective management. The establishment of this structure is not only based on the provisions of applicable laws and regulations but also takes into account the Company's internal needs to strengthen the comprehensive and sustainable implementation of corporate governance.

Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, organizational structure of a limited liability Company in Indonesia consists of 3 (three) main organs, namely General Meeting of Shareholders (GMS) as the representative of shareholders' interests, Board of Directors as the organ responsible for the management and administration of the Company, and Board of Commissioners which performs the supervisory function. This governance system adopts a two-tier model that clearly separates management and supervisory functions in accordance with their respective authorities as stipulated in applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

The Company has established these three main governing organs as part of its implementation of Good Corporate Governance. In carrying out their roles, Board of Commissioners and Board of Directors share the responsibility to ensure business continuity and the Company's long-term growth. Therefore, alignment on the Company's vision, mission, and values is a critical aspect in supporting the effective execution of each governing organ's function.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PMT
PMT's Corporate Governance



Dalam mendukung efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, struktur governansi Perusahaan turut dilengkapi dengan berbagai organ pendukung yang memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, serta koordinasi pengelolaan perusahaan. Organ pendukung Direksi terdiri atas Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan, yang berperan dalam memperkuat fungsi pengendalian internal, kepatuhan, serta komunikasi korporasi. Sementara itu, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko yang membantu pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen dan objektif.

To support the effective implementation of corporate governance, the Company's governance structure is complemented by various supporting organs that perform supervisory, control, and coordination functions in the management of the Company. The supporting organs of Board of Directors consist of Internal Audit Unit and Corporate Secretary, which play a role in strengthening internal control, compliance, and corporate communications. Meanwhile, Board of Commissioners is supported by Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, as well as Risk Monitoring Committee, which assist in carrying out supervisory functions independently and objectively.

Sebagai upaya memastikan seluruh struktur tata kelola tersebut dapat berjalan secara efektif dan memiliki pembagian peran yang jelas, Perusahaan menerapkan mekanisme tata kelola yang didukung oleh berbagai ketentuan internal maupun eksternal. Mekanisme tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur tetap, piagam kerja, kebijakan internal, hingga ketentuan yang mengatur hubungan dan koordinasi antarorgan Perusahaan. Keberadaan mekanisme tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tertata, akuntabel, dan mampu mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan baik.

To ensure that the entire corporate governance structure operates effectively and has a clear division of roles, the Company implements governance mechanisms supported by various internal and external regulations. These mechanisms include applicable laws and regulations, standard operating procedures, charters, internal policies, and provisions governing relationships and coordination among the Company's organizational units. These mechanisms are intended to foster a well-organized and accountable work environment that supports sound corporate governance.

SOFT STRUCURE GOVERNANSI KORPORAT PERUSAHAAN

Dalam rangka memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan secara berkelanjutan melakukan evaluasi serta penyempurnaan terhadap berbagai pedoman dan kebijakan internal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dan mekanisme tata kelola yang diterapkan tetap relevan dan selaras dengan perkembangan lingkungan bisnis maupun praktik terbaik di industri.

CORPORATE GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

To strengthen the implementation of Good Corporate Governance, the Company continuously evaluates and refines its various internal guidelines and policies. This is done to ensure that the governance systems and mechanisms in place remain relevant and aligned with developments in the business environment and industry best practices.

Perusahaan juga melaksanakan kajian secara berkala atas seluruh pedoman dan kebijakan yang berlaku guna menyesuaikan kebutuhan organisasi serta dinamika regulasi dan operasional yang terus berkembang. Secara keseluruhan, proses penyelarasan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas penerapan governansi korporat agar dapat mendukung pengelolaan usaha yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

The Company also conducts periodic reviews of all applicable guidelines and policies to adapt them to the organization's needs as well as the ever-evolving regulatory and operational dynamics. Overall, this alignment process is carried out to maintain the quality of corporate governance implementation so that it can support more adaptive, measurable, and sustainable business management.

Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	**Penetapan** Stipulation
Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association	Terakhir diubah berdasarkan Akta No. 14 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Last amended based on Deed No. 14 dated October 12, 2022 made before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.
Pedoman Penerapan Praktik GCG Code of GCG	Peraturan Direksi No. SK.01.01/28/2/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/28/2/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated February 28, 2024 concerning Guidelines for Good Corporate Governance in PT Pelindo Multi Terminal.
Pedoman Kode Etik Bisnis Code of Conduct	Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 04 Maret 2024 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024 concerning Guidelines for Code of Conduct of PT Pelindo Multi Terminal.
Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors	Peraturan Direksi No. SK.01.01/28/2/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/28/2/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated February 28, 2024 concerning Guidelines for Work Procedures for Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) of PT Pelindo Multi Terminal.
Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris Governance Guidelines for Supporting Organs of Board of Commissioners	Peraturan Direksi No. HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 dated October 30, 2023 concerning Guidelines for Governance of Supporting Organs of Board of Commissioners within PT Pelindo Multi Terminal.
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Surat Penetapan Dewan Komisaris No. KA-01/DK/PLMT/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Piagam Komite Audit pada PT Pelindo Multi Terminal. Board of Commissioners Stipulation Letter No. KA-01/DK/PLMT/X/2021 dated October 1, 2021 concerning the Audit Committee Charter at PT Pelindo Multi Terminal.
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Surat Penetapan Dewan Komisaris No. KNR-01/DK/PLMT/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Piagam Komite Nominasi Remunerasi pada PT Pelindo Multi Terminal. Board of Commissioners Appointment Letter No. KNR-01/DK/PLMT/III/2023 dated March 20, 2023 concerning the Charter Nomination and Remuneration Committee of PT Pelindo Multi Terminal.
Piagam Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter	Surat Penetapan Dewan Komisaris No. KPR-01/DK/PLMT/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT Pelindo Multi Terminal. Board of Commissioners Appointment Letter No. KPR-01/DK/PLMT/V/2024 dated May 7, 2024, concerning the Risk Monitoring Committee Charter of PT Pelindo Multi Terminal.
Piagam Satuan Pengawas Intern Internal Audit Unit Charter	Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25 tanggal 08 Mei 2025 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25, dated May 8, 2025, concerning the Charter of the Internal Audit Unit of PT Pelindo Multi Terminal.
Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy	Peraturan Direksi No PW.05.02/24/10/1/RINO/DIRU/PLMT-24 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. PW.05.02/24/10/1/RINO/DIRU/PLMT-24 dated October 24, 2024 concerning Implementation of Risk Management in PT Pelindo Multi Terminal.
Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Internal Control System Guidelines	Peraturan Direksi No. HK.01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. HK.01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21 dated December 27, 2021 concerning Guidelines for Internal Control Systems in PT Pelindo Multi Terminal.
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Procedures	Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal No. HK.01/7/6/2/PGDN/DIRU/PLMT-24 tanggal 07 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation PT Pelindo Multi Terminal No. HK.01/7/6/2/PGDN/DIRU/PLMT24 dated June 7, 2024 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services in PT Pelindo Multi Terminal

Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Penetapan Stipulation
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	Peraturan Direksi No. SK.01.01/29/2/2/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/29/2/2/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated February 29, 2024 concerning Guidelines for Gratification Control of PT Pelindo Multi Terminal
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistleblowing System Guidelines	Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 04 Maret 2024 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024 concerning Guidelines for Whistleblowing System of PT Pelindo Multi Terminal.
Pedoman Pelaporan LHKPN Guidelines for LHKPN Reporting	Peraturan Direksi No. HK.01/15/5/2/ALSD/DIRU/PLMT-25 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. HK.01/15/5/2/ALSD/DIRU/PLMT-25 dated May 15, 2025 concerning Guidelines for Reporting Assets for Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officials within PT Pelindo Multi Terminal.
Pedoman Tata Kelola Bidang Teknologi Informasi Information Technology Governance Guidelines	Peraturan Direksi No. PER.0004/HK.01.06/PLMT-2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Bidang Teknologi Informasi di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Directors Regulation No. PER.0004/HK.01.06/PLMT-2021 dated December 1, 2021 concerning Guidelines for Governance in Information Technology Sector within PT Pelindo Multi Terminal.

Seluruh kebijakan dan pedoman di atas telah diterbitkan dalam situs *website* Perusahaan dengan alamat www.pelindomultiterminal.co.id.

All of the above policies and guidelines have been published on the Company's website at www.pelindomultiterminal.co.id.

PENANGGUNG JAWAB SERTA *MONITORING* PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Direksi Nomor SK.01.01/27/3/1/HLTK/DIRU/PLMT-23 tanggal 27 Maret 2023, Direksi telah menunjuk Direktur SDM Perusahaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan governansi korporat di seluruh lingkup organisasi. Adapun tugas dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan governansi korporat di lingkungan Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memantau penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.

Di sisi lain, Dewan Komisaris beserta komite-komite yang berada di bawah koordinasinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan governansi korporat di lingkungan Perusahaan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar etika bisnis, serta praktik terbaik yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan.

UNIT IN CHARGE AND MONITORING OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Pursuant to the Minutes of Board of Directors' Agreement No. SK.01.01/27/3/1/HLTK/DIRU/PLMT-23 dated March 27, 2023, Board of Directors has appointed the Company's Human Capital Director, to coordinate the implementation of corporate governance throughout the entire organization. The duties and responsibilities of unit in charge of corporate governance implementation within the Company include the following:

1. Monitor the preparation and implementation of work plans related to the Implementation of Good Corporate Governance;
2. Monitor and maintain that the Company's business activities do not deviate from applicable regulations;
3. Monitor and maintain the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties.

On the other hand, Board of Commissioners and the committees under its coordination perform an supervisory function regarding the implementation of corporate governance within the Company. This supervision is carried out to ensure that the application of corporate governance principles is in accordance with applicable laws and regulations, business ethics standards, and best practices in corporate management.

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GOVERNANSI KORPORAT DI TAHUN 2025

Sebagai bagian dari komitmen untuk terus memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sepanjang tahun 2025 Perusahaan melaksanakan berbagai inisiatif strategis guna meningkatkan efektivitas penerapan governansi korporat. Adapun inisiatif yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Ratifikasi dan penyusunan Peraturan Direksi tentang Pedoman Perangkat GCG yang terdiri dari:
   a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
   b. Pedoman Kode Etik Bisnis;
   c. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)*;
   d. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
   e. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
   f. Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi;
   g. Pedoman *Anti-Fraud;*
   h. Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
   i. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
   j. Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
2. Inovasi Penerapan GCG yang terdiri dari:
   a. Klausul Anti Penyuapan:
      Terdapat klausul Anti Penyuapan pada setiap perjanjian Kerjasama maupun perjanjian pengadaan barang dan jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.
   b. Pakta Integritas Mitra:
      Penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan/Komitmen sebagai Mitra Kerja di Wilayah Perusahaan untuk melaksanakan Pakta Integritas dalam rangka menciptakan Pelabuhan Bersih (Tanpa Tindakan Curang/*Fraud*, KKN) serta menerapkan GCG.
   c. Pemanfaatan Teknologi AI dalam Penerapan GCG:

      Sebagai upaya memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan menyelenggarakan Lomba 5 No's Creative Prompt AI yang mendorong kreativitas serta pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) oleh para pegawai. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga merupakan inovasi dalam memperluas pemahaman dan penerapan nilai-nilai GCG dan Anti Penyuapan dengan pendekatan digital dan relevan dengan perkembangan zaman.
   d. Program "Duta Anti-Penyuapan":
      Program Duta Anti Penyuapan merupakan inisiatif Perusahaan dalam rangka memperkuat budaya integritas dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Individu yang terpilih menjadi Duta Anti Penyuapan adalah para pemenang dari Lomba Prompt AI 5 No's Competition. Mereka akan berperan sebagai *role model* sekaligus agen perubahan dalam menularkan semangat anti penyuapan kepada rekan kerja maupun mitra eksternal.

EFFORTS TO IMPROVE CORPORATE GOVERNANCE QUALITY IN 2025

As part of its commitment to continuously strengthen the implementation of Good Corporate Governance, throughout 2025 the Company carried out various strategic initiatives to enhance the effectiveness of corporate governance practices. These initiatives are outlined as follows:

1. Ratification and drafting of Board of Directors Regulations on GCG Guidelines, consisting of:
   a. Good Corporate Governance Guidelines;
   b. Code of Conduct Guidelines;
   c. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors;
   d. Gratification Control Guidelines;
   e. Whistleblowing System Guidelines;
   f. Integrated Conflict of Interest Guidelines;
   g. Anti-Fraud Guidelines;
   h. Anti-Bribery Management System Guidelines;
   i. Integrated Governance Guidelines;
   j. Establishment of an Anti-Bribery Compliance Team;
2. Innovations in the GCG Implementation, consisting of:
   a. Anti-Bribery Clauses:
      Anti-bribery clauses are included in every cooperation agreement and every procurement agreement for goods and services within PT Pelindo Multi Terminal.
   b. Partner Integrity Pact:
      The signing of an Integrity Pact and a Statement/Commitment Letter as a Business Partner within the Company's operational area to implement the Integrity Pact in order to create a Clean Port (free from fraud and corruption) and to apply GCG.
   c. Utilization of AI Technology in the Implementation of GCG:
      As an effort to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Company organized the "5 No's Creative Prompt AI" Competition, which encourages creativity and the use of Artificial Intelligence (AI) technology by employees. This activity is not only a competition but also an innovation in broadening the understanding and application of GCG and anti-bribery values through a digital approach that is relevant to current trends.
   d. "Anti-Bribery Ambassador" Program:
      The Anti-Bribery Ambassador Program is a Company initiative aimed at strengthening a culture of integrity and the implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) within PT Pelindo Multi Terminal. Individuals selected as Anti-Bribery Ambassadors are the winners of the "5 No's Creative Prompt AI" Competition. They will serve as role models and agents of change in spreading the anti-bribery spirit to coworkers and external partners.

e. Program "MATCHA":
Program MATCHA – *Meet and Talk Compliance, Honesty, Awareness* adalah program informal di mana tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan GCG secara rutin berinteraksi dengan karyawan di area santai seperti kantin atau ruang istirahat.

3. Sosialisasi Pedoman Perangkat GCG:
   a. Webinar Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi;
   b. Penyampaian Pedoman Perangkat GCG Tahun 2025 kepada Dewan Komisaris;
   c. Penyampaian Peraturan Direksi tentang Benturan Kepentingan Terintegrasi dan Pedoman *Anti-Fraud* kepada Seluruh Pegawai;
   d. Sosialisasi Larangan Permintaan, Pengiriman dan Penerimaan Suap serta Gratifikasi jelang Idul Fitri 2025 di Lingkungan PMT;
   e. Publikasi *Flyer* tentang "Gratifikasi? Seberapa mahal harganya?";
   f. Publikasi *Flyer* tentang "Cara Menolak Saat diberi Gratifikasi";
   g. Publikasi *Flyer* tentang "Dilarang Memberi dan Menerima Suap, Pungli dan Gratifikasi";
   h. Pemasangan *Banner*, Poster atau Spanduk tentang Anti Suap, Pungli dan Gratifikasi di Lokasi Kantor, *Branch* maupun terminal yang dikelola oleh PMT;
   i. Publikasi Video tentang "Larangan Tindakan Memberi, Menerima Suap, Pungli dan Gratifikasi di Area Lingkungan Kerja PMT";
   j. Publikasi Video tentang "Saluran *Whistleblowing System* di PMT";
   k. Publikasi Flyer tentang "Apa itu *Good Corporate Governance*";
   l. Publikasi Video tentang Godaan Gratifikasi Lewat 'Tanda Terima Kasih';
   m. Publikasi *Flyer* tentang "Kenali *Fraud*, Musuh Besar Integritas";
   n. Publikasi *Flyer* tentang "Benturan Kepentingan";
   o. Publikasi *Flyer* tentang "Larangan Korupsi";
   p. Publikasi *Flyer* tentang "Pedoman Kode Etik";
   q. Publikasi *Flyer* tentang "Apa Itu *Board Manual*?";
   r. Publikasi Flyer tentang "Larangan Suap, Pungli dan Gratifikasi";
   s. Surat Edaran tentang "Larangan Suap, Pungli dan Gratifikasi";
   t. Penyampaian Surat/Nota Dinas kepada *Branch* dan Anak Perusahaan:
      i) Nomor: SK.01.01/13/3/1/HLTK/SKTR-25 tanggal 13 Maret 2025 tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Suap, Gratifikasi serta Pungutan Liar pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025;
      ii) Nomor: SK.01.01/29/4/1/HLTK/SKTR/PLMT-25 tanggal 29 April 2025 tentang *Monitoring* Perangkat Penerapan Tata Kelola PT Pelindo Multi Terminal;
      iii) Nomor: SK.01.01/26/5/1/HLTK/SKTR-25 tanggal 26 Mei 2025 tentang Pemasangan Informasi terkait Larangan Pemberian dan Penerimaan Suap, Pungli dan Gratifikasi di Lingkungan Kerja PT Pelindo Multi Terminal;

e. The "MATCHA" Program:
The MATCHA program—Meet and Talk Compliance, Honesty, Awareness—is an informal program in which the Anti-Bribery Compliance (FKAP) and GCG teams regularly interact with employees in casual settings such as the cafeteria or break room.

3. Socialization of GCG Guidelines:
   a. Webinar on Anti-Bribery Management Systems and Gratification Control;
   b. Presentation of 2025 GCG Guidelines to Board of Commissioners;
   c. Presentation of Board of Directors Regulations on Integrated Conflict of Interest and Anti-Fraud Guidelines to All Employees;
   d. Socialization of Prohibitions on Soliciting, Offering, and Accepting Bribes and Gratuities Ahead of Eid al-Fitr 2025 within PMT;
   e. Publication of a Flyer titled "Gratuities? How Much Do They Cost?";
   f. Publication of a flyer titled "How to Refuse When Offered a Gratuity";
   g. Publication of a flyer titled "Prohibition on Giving and Receiving Bribes, Illegal Fees, and Gratuities";
   h. Display of banners, posters, or signs regarding the prohibition of bribes, illegal fees, and gratuities at PMT-managed offices, branches, and terminals;
   i. Release a video titled "Prohibition on Giving or Receiving Bribes, Illegal Fees, and Gratuities in PMT's Workplace";
   j. Release a video titled "PMT's Whistleblowing System";
   k. Release a flyer titled "What Is Good Corporate Governance?";
   l. Video on the Temptation of Gratification Through "Tokens of Appreciation";
   m. Flyer on "Recognizing Fraud, the Great Enemy of Integrity";
   n. Flyer on "Conflicts of Interest";
   o. Flyer on "Prohibition of Corruption";
   p. Publication of a flyer on "Code of Conduct Guidelines"
   q. Publication of a flyer on "What Is a Board Manual?"
   r. Publication of a flyer on "Prohibition of Bribery, Extortion, and Gratification"
   s. Circular Letter on "Prohibition of Bribery, Extortion, and Gratification"
   t. Issuance of Official Letters/Memoranda to Branches and Subsidiaries:
      i) No: SK.01.01/13/3/1/HLTK/SKTR-25 dated March 13, 2025, regarding Prohibition on Giving and Receiving Bribes, Gratuities, and Illegal Fees during the Eid al-Fitr 1446H/2025;
      ii) No: SK.01.01/29/4/1/HLTK/SKTR/PLMT-25 dated April 29, 2025, regarding Monitoring of PT Pelindo Multi Terminal's Governance Implementation Mechanisms;
      iii) No: SK.01.01/26/5/1/HLTK/SKTR-25 dated May 26, 2025, regarding Posting of Information on the Prohibition of Giving and Receiving Bribes, Illegal Fees, and Gratuities within the Workplace of PT Pelindo Multi Terminal;

iv) Nomor: SK.01.01/11/8/1/HLTK/SKTR/PLMT-25 tanggal 11 Agustus 2025 Pelaksanaan Program Bulan GCG tahun 2025 di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
v) Nomor: SK.01.01/20/8/1/HLTK/SKTR-25 Medan, 20 Agustus 2025 tentang Partisipasi Lomba 5 No's Creative Prompt Competition

u. Pengisian Survei *Awareness* GCG dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Seluruh Pegawai dan *Stakeholders.*

4. Penerapan Budaya SMAP:
   a. Publikasi *Flyer* tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Kantor Pusat dan *Branch* PMT;
   b. *Audit Surveillance* 2 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Kantor Pusat PMT oleh PT TUV Nord Indonesia;
   c. *Monitoring* Realisasi Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2025;
   d. Identifikasi Risiko Anti Penyuapan;
   e. Publikasi *Flyer* tentang "Penerapan Budaya 5 No's";
   f. Pelaksanaan Lomba Budaya Anti Penyuapan "Comptetion 5 No's Creative Prompt";
   g. Sosialisasi Pengendalian *Fraud* di Korporasi.
5. Pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025.
   a. *Flyer* Satu Aksi, Basmi Korupsi;
   b. *Quiz Time*, Hari Anti Korupsi Sedunia 2025.

iv) No: SK.01.01/11/8/1/HLTK/SKTR/PLMT-25 dated August 11, 2025, on Implementation of the 2025 GCG Month Program Within PT Pelindo Multi Terminal;
v) No: SK.01.01/20/8/1/HLTK/SKTR-25 Medan, August 20, 2025, regarding Participation in the "5 No's Creative Prompt Competition";

u. Completion of the GCG Awareness and Anti-Bribery Management System Survey by All Employees and Stakeholders.

4. Implementation of SMAP Culture:
   a. Distribution of flyers regarding Anti-Bribery Management System policies at PMT's Head Office and branches;
   b. Surveillance audit of Anti-Bribery Management System at PMT's Head Office conducted by PT TUV Nord Indonesia;
   c. Monitoring of the achievement of 2025 Anti-Bribery Management System targets;
   d. Identification of Anti-Bribery Risks;
   e. Distribution of Flyers on the "Implementation of 5 No's Culture";
   f. Organization of the "5 No's Creative Prompt" Anti-Bribery Culture Contest;
   g. Corporate Fraud Control Socialization
5. Celebration of 2025 World Anti-Corruption Day (HAKORDIA).
   a. One Action to Eradicate Corruption Flyer
   b. Quiz Time, International Anti-Corruption Day 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, yang memiliki kepemilikan saham secara sah dalam Perusahaan. Sebagai pemilik modal, pemegang saham memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Struktur kepemilikan saham Perusahaan dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Informasi lebih lanjut mengenai komposisi kepemilikan saham, pemegang saham utama maupun pengendali, hingga entitas pemilik akhir Perusahaan disajikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Hak Pemegang Saham

Perusahaan senantiasa menghormati serta menjamin pemenuhan hak-hak pemegang saham atau pemilik modal sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan. Perusahaan juga menyediakan mekanisme dan fasilitas yang mendukung agar setiap pemegang saham dapat menjalankan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di antaranya:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perusahaan, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
5. Hak untuk mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan, khusus bagi pemilik modal Perusahaan;
6. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
7. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
8. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas; dan
9. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pemegang Saham melalui RUPS

1. Pemegang saham melalui RUPS harus memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

SHAREHOLDERS

Shareholders are parties—whether individuals or legal entities—who legally hold shares in the Company. As owners of capital, shareholders have rights, obligations, and responsibilities, which are exercised in accordance with applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association.

The Company's shareholding structure consists of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Further information regarding the composition of share ownership, major and controlling shareholders, and the Company's ultimate owners is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Shareholder Rights

The Company consistently respects and ensures the fulfillment of the rights of shareholders or capital owners as recorded in the Company's shareholder registry. The Company also provides mechanisms and facilities to support each shareholder in exercising their rights in accordance with applicable regulations, including:

1. The right to request the holding of GMS;
2. The right to request information regarding the agenda of the GMS;
3. The right to submit proposals to be discussed in the GMS agenda;
4. The right to attend and vote at the GMS, specifically for Company shareholders, with the provision that 1 (one) share entitles its holder to cast one vote;
5. The right to make the highest-level decisions in the Company, specifically for capital owners;
6. The right to obtain material information about the Company in a timely, measurable, and orderly manner;
7. The right to receive a share of the SOE profits allocated to shareholders/capital owners in the form of dividends and the remaining assets from liquidation, proportional to the number of shares/capital owned;
8. The right to fair treatment among shareholders, including minority shareholders; and
9. Other rights based on the articles of association and applicable laws and regulations.

Authority of Shareholders through the GMS

1. Shareholders through the GMS must ensure that the Company is run based on Good Corporate Governance;

2. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemegang Saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi;
3. Tindakan-tindakan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang nilai transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak:
   a. Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan.

Akuntabllitas Pemegang Saham

1. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
3. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan Perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS menjadi sarana bagi para pemegang saham untuk menjalankan haknya dalam menetapkan arah kebijakan strategis Perusahaan serta mengambil keputusan atas berbagai hal yang tidak menjadi kewenangan Direksi maupun Dewan Komisaris.

RUPS juga menjadi forum pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan Perusahaan. Berbagai agenda strategis dibahas dalam RUPS, antara lain terkait kinerja operasional dan keuangan, penetapan strategi dan kebijakan Perusahaan, persetujuan anggaran, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta agenda lain yang diajukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan hak-hak pemegang saham secara optimal, Perusahaan berkomitmen menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan akurat terkait penyelenggaraan RUPS sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

2. Based on applicable laws and regulations, Shareholders through the GMS hold all authority not delegated to Board of Commissioners or Board of Directors;
3. The following actions require GMS approval if the transaction value is more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related to each other or not:
   a. Transferring Company assets; or
   b. Making Company assets a guarantee for debt.

Shareholder Accountability

1. Shareholders do not interfere in the Company's operational activities, which are the responsibility of Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;
2. Good Corporate Governance is implemented by Shareholders in line with their authorities and responsibilities;
3. Shareholders are responsible for monitoring the implementation of Good Corporate Governance principles in the Company's management processes.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's governing organ with the highest authority within the corporate governance structure, in accordance with the provisions of Articles of Association and applicable laws and regulations. The GMS serves as a forum for shareholders to exercise their rights in determining the Company's strategic direction and making decisions on various matters that fall outside the authority of Board of Directors or Board of Commissioners.

The GMS also serves as a forum for Board of Directors and Board of Commissioners to report to shareholders on the performance of their duties in managing and supervising the Company. Various strategic agenda items are discussed at the GMS, including those related to operational and financial performance, determination of the Company's strategies and policies, budget approval, changes to the composition of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as other agenda items proposed in accordance with the respective authorities of each party as stipulated in the Company's Articles of Association.

Pursuant to the Articles of Association, there are two types of GMS: Annual GMS and Other GMS. To support the optimal exercise of shareholders' rights, the Company is committed to providing complete, clear, and accurate information regarding the conduct of GMS so that the decision-making process can proceed in a transparent and accountable manner.

Jenis-jenis RUPS
Types of GMS

RUPS Tahunan Annual GMS	RUPS Lainnya Other GMS
Wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Must be held no later than 6 (six) months after the fiscal year ends.	Dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. May be held at any time as needed for the Company's purposes.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
   a. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan dan dalam RUPS ini Direksi menyampaikan:
      i) Laporan Tahunan Perseroan;
      ii) Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan;
      iii) Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS.
   b. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RAKP) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam pelaksanaan RUPS ini, Direksi menyampaikan:
      i) Rancangan RAKP yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris untuk disahkan oleh RUPS;
      ii) Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
   a. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik;
   b. RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
   c. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham;
   d. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberi tahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
   e. Sementara itu, pengaturan tentang prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS akan diatur lebih lanjut dalam dengan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal.

1. Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)
   a. The Annual GMS to approve the Annual Report must be held no later than June after the closing of the relevant fiscal year and in this GMS, Board of Directors presents:
      i) The Company's Annual Report;
      ii) Proposal for Use of the Company's Net Profit;
      iii) Other matters that require the GMS approval.
   b. The Annual GMS to ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP AGMS) must be held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year. In this GMS, Board of Directors presents:
      i) The draft of RKAP that has been agreed upon and signed jointly with Board of Commissioners to be ratified by the GMS;
      ii) Other matters that require the GMS approval.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
   a. Shareholders may make decisions outside the GMS, provided that all voting shareholders give written approval by signing the resolution, which holds the same legal force as a resolution made in a physical GMS;
   b. The EGMS may be held at any time as needed in the Company's interest upon the request of Board of Commissioners and/or Shareholders;
   c. Board of Directors is required to hold an EGMS at the written request of Board of Commissioners or Shareholders;
   d. Shareholders may also make valid resolutions without holding a physical General Meeting of Shareholders, provided that all Shareholders have been notified in writing and signed the agreement.
   e. Meanwhile, provisions regarding procedures to facilitate shareholders' effective participation and voting at the GMS shall be further regulated in the Board of Directors' Regulations of PT Pelindo Multi Terminal.

3. RUPS Sirkuler
   Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan pengambilan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni pengambilan keputusan di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Ketentuan tentang Keputusan Sirkuler diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pada Pasal 91 diatur bahwa Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik, dengan syarat seluruh Pemegang Saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis atas usul RUPS yang akan diputuskan.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS. Selain melalui forum RUPS, pemegang saham juga menetapkan sejumlah keputusan melalui mekanisme sirkuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan pengambilan keputusan Perusahaan. Adapun rincian penyelenggaraan RUPS dan keputusan sirkuler pemegang saham selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 24 Januari 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025;
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 Juni 2025 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal;
3. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) PT Pelindo Multi Terminal tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal tanggal 27 Agustus 2025;
4. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) PT Pelindo Multi Terminal tentang Persetujuan Rencana Kerjasama Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Curah Kering Belawan Tahap 2 tanggal 17 September 2025;
5. Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) PT Pelindo Multi Terminal tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Investasi Tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal tanggal 18 September 2025.

3. Circular GMS
   Shareholders may also hold a Circular Resolution (Circular GMS), namely decision-making outside the GMS (without physical presence). The provisions regarding Circular Resolutions are regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 91, which stipulates that shareholders may make binding resolutions outside of a GMS and have the same legal force as GMS resolutions carried out physically, on the condition that all Shareholders with voting rights provide written approval for the GMS proposal to be decided.

2025 GMS HOLDING

Throughout 2025, the Company held 2 (two) GMS. In addition to the GMS forum, shareholders also established a number of resolutions through the circular resolution mechanism in accordance with applicable regulations and the Company's decision-making needs. The details of holding the GMS and Circular GMS during 2025 are as follows:

1. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on January 24, 2025, regarding the Approval of the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP);
2. Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on June 19, 2025, regarding the Approval of Annual Reports and Ratification of Financial Statements for 2024 Fiscal Year of PT Pelindo Multi Terminal Limited;
3. Resolution of Shareholders in lieu of GMS (Circular GMS Resolution) of PT Pelindo Multi Terminal regarding Dismissal of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal dated August 27, 2025;
4. Resolution of Shareholders in lieu of GMS (Circular GMS Resolution) of PT Pelindo Multi Terminal regarding Approval of Cooperation Plan for Operation and Development of Belawan Dry Bulk Terminal Phase 2 dated September 17, 2025;
5. Resolution of Shareholders in lieu of GMS (Circular GMS Resolution) of PT Pelindo Multi Terminal regarding Approval of Amendments to to the 2025 Investment Work Plan and Budget of PT Pelindo Multi Terminal, dated September 18, 2025.

RUPS Tahunan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025

Annual GMS on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2025

Hari/Tanggal Day/Date	Jumat, 24 Januari 2025 Friday, January 24, 2025
Waktu Time	10.10 s.d 11.10 WIB 10:10 AM to 11:10 AM
Tempat Place	Ruang 101 -102, Gedung Learning & Innovation Center, PMLI Rooms 101–102, Learning & Innovation Center Building, PMLI
Kehadiran Attendance	1. Pemegang Saham: a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): i) Wakil Direktur Utama : Hambra b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: i) Direktur Utama : Natal Iman Ginting 2. Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal: a. Komisaris Utama : Darwanto b. Komisaris : Arman Depari c. Komisaris : Thanon Aria Dewangga d. Komisaris : Ahmad Perwira Mulia Tarigan e. Komisaris : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan f. Komisaris : Aan Rusdianto 3. Direksi PT Pelindo Multi Terminal: a. Direktur Utama : Ary Henryanto b. Direktur Operasi : Arif Rusman Yulianto c. Direktur Teknik : Yarham Harid d. Direktur Sumber Daya Manusia : Edi Priyanto e. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Yoni Setiawan f. Direktur Strategi dan Komersia l: Rizki Kurniawan 4. Lain-lain: Peserta rapat yang lain sebagaimana daftar hadir terlampir. 1. Shareholders: a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): i) Vice President Director : Hambra b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: i) President Director : Natal Iman Ginting 2. Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal: a. President Commissioner : Darwanto b. Commissioner : Arman Depari c. Commissioner : Thanon Aria Dewangga d. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan e. Commissioner : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan f. Commissioner : Aan Rusdianto 3. Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal: a. President Director : Ary Henryanto b. Operations Director : Arif Rusman Yulianto c. Technical Director : Yarham Harid d. Human Capital Director : Edi Priyanto e. Finance and Risk Management Director : Yoni Setiawan f. Strategy and Commercial Director : Rizki Kurniawan 4. Others: Other meeting participants as listed in the attached attendance sheet.

Keputusan RUPST Pengesahan RKAP Tahun 2025

Setelah melakukan pembahasan dan tanya jawab serta mendengarkan arahan dan saran dari Kuasa Pemegang Saham serta peserta RUPST PT Pelindo Multi Terminal, maka Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

AGMS Resolution on the 2025 RKAP Ratification

After conducting discussions and a question-and-answer session, and after hearing guidance and suggestions from the Shareholders' Representatives and participants in the AGMS of PT Pelindo Multi Terminal, Annual General Meeting of Shareholders resolved the following:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara:
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025.

Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Perusahaan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
   a. Laba (Rugi) Konsolidasian Perusahaan setelah pajak dianggarkan sebesar Rp667.003.600.011 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tiga juta enam ratus ribu sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Agenda:
Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2025

Resolution:
1. Approve and ratify the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP), with the following main points:
   a. The Company's consolidated profit (loss) after taxes is budgeted at Rp667,003,600,011 (six hundred sixty-seven billion three million six hundred thousand eleven rupiah), with the following breakdown:

No	Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025 (Rp)
1	Pendapatan Usaha Operating Revenue	6.288.023.015.049
2	Laba Usaha Income from Operations	853.559.151.498
3	Laba Bersih Net Income	667.003.600.011
4	Laba Bersih (Atribusi Induk) Net Income (Parent Atribution)	667.003.600.011
5	EBITDA	1.207.674.685.902

   b. Posisi Keuangan (Neraca) Perusahaan per 31 Desember 2025 dianggarkan sebagai berikut:
   b. The Company's financial position (balance sheet) as of December 31, 2025, is budgeted as follows:

No	Uraian Description	RKAP 2025 RKAP 2025 (Rp)
1	Total Aset Total Assets	6.265.910.028.711
2	Total Liabilitas Total Liabilities	1.913.507.720.605
3	Ekuitas Equity	4.352.402.308.106

c. Posisi *Net Operating Cash Flow* Perusahaan di akhir periode dianggarkan sebesar Rp585.071.686.141 (lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah).
d. Investasi Perusahaan dengan nilai Rp317.701.000.000 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. The Company's net operating cash flow at the end of the period is budgeted at Rp585,071,686,141 (five hundred eighty-five billion seventy-one million six hundred eighty-six thousand one hundred forty-one rupiah).
b. The Company's investment amounts to Rp317,701,000,000 (three hundred seventeen billion seven hundred one million rupiah), with the following breakdown:

No	Program Program	RKAP 2025 RKAP 2025 (Rp)
1	Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Facility Buildings, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Capitalized Interest	20.580.000.000
2	Alat-Alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapal dan Kendaraan Facility Tools, Facility Installations, Equipment and Fixtures, Vessels and Vehicles	293.421.000.000
3	Tanah dan Hak atas Tanah, dan Emplasemen Land and Land Rights, and Emplacements	3.700.000.000
4	Investasi Non Fisik Non-Physical Investments	-
5	Penyertaan Modal Equity Participation	-
Total Investasi Total Investments		**317.701.000.000**

e. Operasional Tahun 2025 Perusahaan:
e. The Company's Operational for 2025:

No	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2025 RKAP 2025
1	B/M Barang B/M Goods		
	Dermaga Umum Public Docks	Ton	120.014.104
		M3	5.731.971
		Unit	2.166.865
		MMBTU	13.459.575
		Ekor | Animals	594.544
	Non Dermaga Umum Non-Public Docks	Ton	5.023.315
		M3	2.815
		Unit	-
		MMBTU	-
		Ekor | Animals	-
	Total Total	**Ton**	**125.037.419**
		M3	**5.734.786**
		Unit	**2.166.865**
		MMBTU	**13.459.575**
		Ekor I Animals	**594.544**
2	B/M Petikemas B/M Container		
	Internasional Internasional	Box	9.444
		Teu's	10.167
	Domestik Domestic	Box	365.648
		Teu's	385.415
	Total **Total**	**Box**	**375.092**
		Teu's	**395.582**

f. Produksi Tahun 2025 Perusahaan:
f. The Company's Production in 2025:

No	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2025 2025 RKAP
1	Pelayanan Terminal Peti Kemas Container Terminal Services		
	Terminal Petikemas International Stevedoring International Stevedoring Container Terminal	Box	9.444
	Terminal Petikemas Domestik Stevedoring Domestic Stevedoring Container Terminal	Box	250.116
	Jumlah Total	**Box**	**259.560**
2	Pelayanan Barang Non Peti Kemas Non-Container Cargo Services		
	Dermaga Docks	Ton	110.899.554
		M3	5.734.786
	Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	Ton Hari I Days	2.777.551
		M3 Hari I Days	339.766
	Lapangan Penumpukan Stacking Field	Ton Hari I Days	14.188.387
		M3 Hari I Days	3.325.143
	Stevedoring	Ton	63.281.629
	Cargodoring	MMBTU	-
		Ton	6.344.054
		M3	3.300

g. Sumber Daya Manusia Tahun 2025 Perusahaan dianggarkan sebanyak 3.497 orang dengan rincian sebagai berikut:
g. The Company's Human Capital budget for 2025 is set at 3,497 persons, with the following breakdown:

No	Uraian Description	Satuan Unit	Jumlah Total
1	BOD Pelindo (Penugasan) Pelindo BOD (Assignment)	Orang Person	10
2	BOD Non Pelindo Non Pelindo BOD		4
3	Organik Pelindo (Penugasan) Pelindo Organic (Assignment)		1.063
4	Organik Anak Perusahaan Subsidiary Organic		16
5	PKWT		15
6	Tenaga Alih Daya Subsidiary Outsourcing		2.389
7	Pekerja Pemegang Saham Lainnya Other Shareholder Workers		-
Jumlah Total			**3.497**

h. Rencana Kerja Manajemen Tahun 2025 Perusahaan:
h. The Company's 2025 Management Work Plan:

No	Inisiatif Strategi/Aksi Korporasi Strategic Initiatives/Corporate Actions	Jumlah Program Number of Programs
1	Optimalisasi Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan untuk Keberlanjutan Bisnis Optimization of Compliance and Corporate Governance for Business Sustainability	2
2	Pengembangan struktur korporasi induk dan anak perusahaan Development of corporate structure for parent and subsidiary companies	2
3	Pengembangan Perencanaan Portofolio Bisnis pada setiap cabang Development of Business Portfolio Planning for each branch	1
4	Pengembangan Terminal berbasis Layanan, Komoditas, Kemasan, dan/atau Kawasan Industri Development of Terminals Based on Services, Commodities, Packaging, and/or Industrial Zones	7
5	Pengembangan Layanan Kepelabuhanan untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Development of Port Services to Support Government Priority Programs	1
6	Pengembangan Layanan Pelabuhan untuk mendukung IKN Development of Port Services to Support the National Capital City (IKN)	1
7	Perubahan status menjadi dedicated terminal atau terminalisasi Change of status to a dedicated terminal or terminalization	2
8	Pengembangan layanan operasi di luar area Pelindo Grup Development of operational services outside Pelindo Group area	2
9	Pengembangan layanan bongkar muat ship to ship handling Development of ship-to-ship cargo handling services	1
10	*Joint Marketing* Layanan Kepelabuhanan Port Services Joint Marketing	1
11	Standardisasi, sistemisasi, dan integrasi operasional nonpetikemas Standardization, systematization, and integration of non-containerized operations	6
12	Optimalisasi aset Asset Optimization	8
13	Implementasi ESG dengan Pengembangan Sustainable Ports ESG Implementation through Sustainable Port Development	3
14	Standardisasi CRM dan penerapan KAM (*Key Account Management*) CRM Standardization and Implementation of Key Account Management (KAM)	2
15	Peningkatan *Corporate Branding & Marketing Communication* *Enhancement of Corporate Branding & Marketing Communication*	3
16	Peningkatan *Corporate Branding & Marketing Communication* *Enhancement of Corporate Branding & Marketing Communication*	2
17	Optimalisasi Skema Komersial dengan Mitra dan Pelanggan Optimization of Commercial Schemes with Partners and Customers	1
18	Penataan struktur dan tata kelola organisasi Restructuring and Governance of the Organization	3
19	Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SOM Enhancement of SOM Competencies and Capabilities	5
20	Optimalisasi Fungsi Enterprise Architecture dan IT Governance Optimization of Enterprise Architecture and IT Governance Functions	0
21	Pengembangan Infrastruktur IT dan Jmplementasi *Security System* *IT Infrastructure Development and Security System Implementation*	3
22	Pengembangan *Smart Ports* melalui Master Data Management dan 1 Data *Analytics* *Smart Port Development through Master Data Management and Data Analytics*	1
23	Program Budaya Inovasi Berkelanjutan Sustainable Innovation Culture Program	1
24	Pengadaan Bersama Terpusat Centralized Joint Procurement	1
25	Optimalisasi Pendanaan dan *Financing Cost* *Optimization of Funding and Financing Costs*	2
Total Total		**61**

i. Menyetujui dan mengesahkan anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025 sebesar Rp8.567.250.000 (delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
j. Menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2025 yang memuat Target *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara kolegial Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

i. Approve and ratify the 2025 budget for PT Pelindo Multi Terminal's Social and Environmental Responsibility (CSR) program in the amount of Rp8,567,250,000 (eight billion five hundred sixty-seven million two hundred fifty thousand rupiah).
j. Establish the 2025 Management Contract, which sets forth the Board of Directors' Collegial Key Performance Indicator (KPI) targets for 2025, as attached, which constitutes an integral part of this resolution, with the following main points:

No	KPI	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
A.	**Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** Economic and Social Value for Indonesia		**55**	
1	EBITDA	Miliar Rupiah | Billion Rupiah	8	1.207,67
2	Pendapatan Revenues	Miliar Rupiah | Billion Rupiah	7	6.288,02
3	BOPO	%	7	86,43
4	Capaian *Non Container Throughput* Non-Container Throughput Performance	%	5	100
5	Capaian T/S/D Curah Cair Liquid Bulk T/S/D Performance	%	3	100
6	Capaian T/S/D Curah Kering Dry Bulk T/S/D Performance	%	3	100
7	*Market Share* Bongkar Muat Curah Cair Market Share for Liquid Bulk Loading and Unloading	%	3	78
8	*Market Share* Bongkar Muat Curah Kering Market Share for Dry Bulk Loading and Unloading	%	3	76
9	Implementasi Program TJSL SER Program Implementation	%	4	100
10	Implementasi HSSE/Tingkat *Fatality* HSSE Implementation/Fatality Rate	%	5	100
B.	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation		**15**	
1	Penyelesaian pemurnian bisnis Business Refinement	%	3	100
2	Pengembangan operasional TUKS bekerja sama dengan BUMN Operational Development of TUKS in Collaboration with SOEs	%	4	100
3	Layanan non-kontainer tambahan & ekspansi bisnis Additional Non-Container Services & Business Expansion	%	4	100
4	Pengembangan operasi Pelabuhan K/L Operational Development of K/L Ports	%	4	100
C.	**Kepemimpinan Teknologi** Technology Leadership		**7**	
1	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	4	100
2	Integrasi antara pelabuhan non-kontainer untuk meningkatkan konektivitas Integration of non-container ports to improve connectivity	%	3	100
D.	**Peningkatan Investasi** Investment Growth		**6**	
1	Implementasi Program Investasi Investment Program Implementation	%	3	100
2	*Value Creation* Optimalisasi Aset Value Creation Optimization of Assets	Miliar Rupiah | Billion Rupiah	3	9,68

E.	**Pengembangan Talenta** Talent Development		**12**	
1	Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Improvement Roadmap Implementation	%	3	100
2	Pengelolaan *Talent* Pelindo (*Talent* Perempuan/Milenial, Organ Pengelola Risiko & Budaya) Perindo Talent Management (Women/ Millennials, Risk Management Organ and Culture)	%	3	100
3	Implementasi Ide Inovasi Innovation Idea Implementation	%	3	100
4	Implementasi Hubungan Industrial Industrial Relations Implementation	%	3	100
Total			**100**	

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Melaksanakan program kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran tahun 2025 dan melaksanakan program yang menghasilkan capaian pendapatan sesuai asumsi RKAP tahun 2025.
Follow-Up on the Resolution:
Implement programs and activities based on the availability of the 2025 budget and carry out programs that generate revenue in line with the assumptions in the 2025 RKAP.

Arahan RUPST Pengesahan RKAP Tahun 2025

RUPST memberikan arahan kepada Direksi, yang didukung dengan pengawasan Dewan Komisaris agar:

1. Menggunakan RKAP Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi dan upaya kontrol atas biaya-biaya operasional yang berada dalam kendali manajemen, termasuk di antaranya Beban SDPK, dengan standardisasi digitalisasi dan sistemasi layanan operasional pelabuhan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi waktu, dan biaya;
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perusahaan;
4. Menjaga tingkat kesehatan Perusahaan dan melakukan strategi inovatif untuk menjaga pertumbuhan Perusahaan;
5. Anggaran pendapatan merupakan target minimal dan anggaran biaya merupakan target maksimal yang boleh diserap oleh Perusahaan yang harus dicapai oleh Perusahaan;
6. Menjaga pertumbuhan beban usaha tidak lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan serta menjalankan Perusahaan secara efisien dan efektif;
7. Optimalisasi model bisnis pasca pemurniaan bisnis;
8. Melaksanakan transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi yang menjadi pedoman Perusahaan;
9. Melaksanakan percepatan aksi korporasi pemurnian bisnis;
10. Menjalankan *parenting model* dan peta peran Induk dan Anak Perusahaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan melalui penyesuaian-penyesuaian pada segala aspek yang terdampak;

Directions from the AGMS Approval of the 2025 RKAP

The AGMS provides directions to the Board of Directors, supported by the supervision of Board of Commissioners, to ensure that:

1. Use the 2025 RKAP as a guideline in managing and supervising the Company;
2. Conduct evaluations and implement controls over operational costs within management's control, including SDPK expenses, through the standardization, digitization, and systematization of port operational services to improve service quality, time efficiency, and cost management;
3. Implement the principles of Good Corporate Governance in managing and supervising the Company;
4. Maintain the Company's financial health and implement innovative strategies to sustain the Company's growth;
5. The revenue budget represents the minimum target, and the expense budget represents the maximum amount the Company may incur—both of which must be achieved by the Company;
6. Ensure that the growth in operating expenses does not exceed revenue growth and manage the Company efficiently and effectively;
7. Optimize the business model following business restructuring;
8. Conduct financial transactions in accordance with the accounting standards that serve as the Company's guidelines;
9. Accelerate corporate actions to streamline the business;
10. Implement the parent-subsidiary model and role map that have been formulated and established by making adjustments to all affected aspects;

11. Melaksanakan investasi secara efektif untuk menghasilkan dampak nyata dan terukur bagi peningkatan kinerja dan pertumbuhan Perusahaan;
12. Melaksanakan investasi secara efektif untuk menghasilkan dampak nyata dan terukur bagi peningkatan kinerja dan pertumbuhan Perusahaan melalui proses *monitoring* realisasi imbal hasil atas aset investasi yang telah selesai dilaksanakan;
13. Meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di lingkungan kerja grup Perusahaan;
14. Meningkatkan daya saing Perusahaan melalui peningkatan kualitas SDM sesuai dengan bidang bisnis Perusahaan;
15. Meningkatkan dan memprioritaskan sinergi antarentitas perusahaan di lingkungan Pelindo Grup untuk menciptakan nilai tambah/*value creation* bagi Pelindo Grup;
16. Mendorong budaya inovasi dan digitalisasi untuk mendukung proses bisnis yang efisien serta pengembangan talenta SDM dalam rangka ekspansi dan akselerasi transformasi bisnis Perusahaan;
17. Melaksanakan semua arahan Pemegang Saham dan saran nasihat Dewan Komisaris, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini;
18. Memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Induk Pelabuhan;
19. Mengimplementasikan tata kelola terintegrasi;
20. Menyelesaikan ratifikasi Peraturan Direksi tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan implementasi *roadmap*-nya, optimalisasi penggunaan *e-Procurement*, dan melaksanakan pengadaan barang melalui PADI UMKM serta fokus penyelesaian *overdue* transaksi pembayaran pada PADI UMKM;
21. Memastikan target *value creation* pada setiap inisiatif strategis dapat dicapai;
22. Agar melaksanakan program efisiensi biaya secara terstruktur dan berkelanjutan tanpa mengganggu kegiatan operasional Perusahaan, antara lain melalui implementasi akuntasi biaya, meningkatkan efisiensi beban sumber daya pihak ketiga melalui upaya optimalisasi utilisasi aset milik, evaluasi kontrak kerja sama secara *proper* maupun upaya-upaya lainnya;
23. Mengoptimalkan *idle asset* dan evaluasi tarif pelayanan secara berkala untuk mendukung pertumbuhan pendapatan;
24. Memastikan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2025 memberikan dampak riil bagi Perusahaan baik yang bersifat menghasilkan pendapatan maupun efisiensi biaya;
25. Melakukan evaluasi penerapan tarif terhadap beban biaya operasional. Dalam hal terdapat tarif yang memerlukan penyesuaian agar menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian tarif;
26. Mempersiapkan Implementasi *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR);
27. Menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan Audit baik dari Internal (SPI) maupun Eksternal (KAP, BPK) secara tepat waktu;

11. Effectively execute investments to generate tangible and measurable impacts on the Company's performance improvement and growth;
12. Effectively execute investments to generate tangible and measurable impacts on the Company's performance improvement and growth through the monitoring of returns on completed investment assets;
13. Enhance the effectiveness of implementing the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) within the Company's group work environment;
14. Enhance the Company's competitiveness by improving the quality of human capital in line with the Company's business fields;
15. Enhance and prioritize synergies among corporate entities within Pelindo Group to create added value for Pelindo Group;
16. Foster a culture of innovation and digitalization to support efficient business processes and the development of human capital talent in support of the Company's business expansion and accelerated transformation;
17. Implement all directives from the Shareholders and recommendations from Board of Commissioners, as an integral part of this Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Resolution;
18. Provide input during the process of drafting the Port Master Plan;
19. Implement integrated governance;
20. Finalize the ratification of the Board of Directors' Regulation on Guidelines for Using Domestic Production and implement its roadmap; optimize the use of e-Procurement; and conduct procurement of goods through the PADI UMKM platform, while focusing on resolving overdue payment transactions on the PADI UMKM platform;
21. Ensure that value creation targets for each strategic initiative are achieved;
22. To implement a structured and sustainable cost-efficiency program without disrupting the Company's operational activities, including through the implementation of cost accounting, improving the efficiency of third-party resource costs by optimizing the utilization of owned assets, properly evaluating cooperation contracts, and other efforts;
23. To optimize idle assets and periodically evaluate service rates to support revenue growth;
24. Ensure that the 2025 Management Work Plan (RKM) delivers tangible benefits to the Company, both in terms of revenue generation and cost efficiency;
25. Evaluate the application of rates in relation to operating costs. If any rates require adjustment, prepare the necessary steps for rate adjustments;
26. Prepare for implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR);
27. Complete follow-up on audit findings—both internal (SPI) and external (KAP, BPK)—in a timely manner;

28. Melakukan Inventarisasi Aset Tetap secara berkala untuk mengetahui kondisi dan kesesuaian fisik aset di lapangan dan di pencatatan keuangan;
29. Menjaga ketepatan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan di masing-masing Entitas serta akurasi dan kesesuaian saldo tiap COA yang ada di laporan keuangan masing-masing Entitas;
30. Melakukan *interco* secara tepat waktu, tepat angka, dan tepat akun;
31. Melakukan standardisasi struktur organisasi untuk anak perusahaan yang memiliki kegiatan operasional di cabang-cabang pelabuhan, guna memastikan keselarasan dengan strategi korporasi, efisiensi operasional, dan penguatan fungsi-fungsi utama di seluruh wilayah operasional;
32. Menyiapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing entitas terkait dengan kebijakan pendelegasian wewenang, *workforce planning*, dan remunerasi;
33. Melakukan ratifikasi Peraturan Direksi turunan dari Implementasi PKB dengan target minimal 5 (lima) buah Perdir;
34. Penyusunan HC *Roadmap* 2025-2029 pada masing-masing entitas;
35. Mengembangkan dan menerapkan *metrics* bidang SOM sebagai sarana *monitoring* dan pertimbangan pengambilan keputusan;
36. Melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi atas meningkatnya persaingan lini bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) seperti keberadaan TUKS yang beralih menjadi Terminal Umum Sementara.

28. Conduct periodic fixed asset inventories to verify the condition and physical consistency of assets on-site and in financial records;
29. Ensure the timely completion of financial statements for each entity, as well as the accuracy and consistency of the balances for each account in the Chart of Accounts (COA) in each entity's financial statements;
30. Conduct interco transactions in a timely manner, with correct figures, and posted to the correct accounts;
31. Standardize the organizational structure for subsidiaries with operational activities at port branches to ensure alignment with corporate strategy, operational efficiency, and the strengthening of core functions across all operational regions;
32. Develop policies applicable to each entity regarding the delegation of authority, workforce planning, and compensation;
33. Ratify Board of Directors Regulations derived from the implementation of the Collective Bargaining Agreement (CBA), with a target of at least 5 (five) such regulations;
34. Develop the 2025–2029 Human Capital (HC) Roadmap for each entity;
35. Develop and implement SOM metrics as a tool for monitoring and informing decision-making;
36. Implementing anticipatory and mitigating measures in response to increasing competition in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s business lines, such as the transition of TUKS into Temporary Public Terminals.

Tindak Lanjut Arahan RUPST Pengesahan RKAP Tahun 2025

Berdasarkan arahan RUPST, berikut rencana aksi maupun tindak lanjutnya oleh Perusahaan:

Follow-Up on Directions from the AGMS on Approval of the 2025 RKAP

Based on the AGMS directions, below are the Company's action plans and follow-up measures:

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Rencana Aksi/Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
1	Menggunakan RKAP Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perusahaan; Use the 2025 RKAP as a guideline in managing and supervising the Company	Melaksanakan program kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran tahun 2025 dan melaksanakan program yang menghasilkan raihan pendapatan sesuai asumsi RKAP tahun 2025. Implement programs and activities based on the availability of the 2025 budget and carry out programs that generate revenue in line with the assumptions in the 2025 RKAP.
2	Melakukan evaluasi dan upaya kontrol atas biaya-biaya operasional yang berada dalam kendali manajemen, termasuk di antaranya Beban SDPK, dengan standardisasi digitalisasi dan sistemasi layanan operasional pelabuhan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi waktu dan biaya; Conduct evaluations and implement controls over operational costs within management's control, including SDPK expenses, through the standardization, digitization, and systematization of port operational services to improve service quality, time efficiency, and cost management;	Menyusun program efisiensi tematik yang terdiri dari biaya-biaya variabel seperti BBM, KSMU Pesewaan Alat, KSMU *Sharing* Operasi dan KSMU Tenaga *Outsourcing*. Develop thematic efficiency programs consisting of variable costs such as fuel, Equipment Rental KSMU, Operational Sharing KSMU, and Outsourced Workers KSMU.
3	Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perusahaan; Implement the principles of Good Corporate Governance in managing and supervising the Company;	PT Pelindo Multi Terminal dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berpedoman pada prinsip-prisnip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG). In conducting its business, PT Pelindo Multi Terminal consistently adheres to the Good Corporate Governance (GCG) principles.

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Rencana Aksi/Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
4	Menjaga tingkat kesehatan Perusahaan dan melakukan strategi inovatif untuk menjaga pertumbuhan Perusahaan; Maintain the Company's financial health and implement innovative strategies to sustain the Company's growth;	Melakukan implementasi strategis sesuai RJPP 2025-2029 dengan monitoring setiap program kerja Perusahaan dan memastikan program kerja dapat dapat menstimulus pertumbuhan pendapatan secara langsung. Program Kerja untuk tahun 2025 telah disusun dengan mempertimbangkan potensi-potensi pertumbuhan pendapatan dan effisiensi. Carry out strategic implementation in accordance with the 2025–2029 RJPP by monitoring each of the Company's work programs and ensuring that these programs can directly stimulate revenue growth. The 2025 Work Program has been formulated with consideration of potential revenue growth and efficiency.
5	Anggaran pendapatan merupakan target minimal dan anggaran biaya merupakan target maksimal yang boleh diserap oleh Perusahaan yang harus dicapai oleh Perusahaan; The revenue budget represents the minimum target, and the expense budget represents the maximum amount the Company may incur—both of which must be achieved by the Company;	Melakukan rilis anggaran sebesar 50% untuk biaya SPPD, Rumah Tangga, Konsultan, ATK, Jamuan rapat dan 70% untuk biaya lainnya. Allocate 50% of the budget for travel expenses, general administrative expenses, consulting fees, office supplies, and meeting refreshments, and 70% for other expenses.
6	Menjaga pertumbuhan beban usaha tidak lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan serta menjalankan Perusahaan secara efisien dan efektif; Ensure that the growth in operating expenses does not exceed revenue growth and manage the Company efficiently and effectively;	Locking anggaran setahun dengan mekanisme rilis 70% dan 50% untuk biaya biaya SPPD, Rumah Tangga, Konsultan, ATK, Jamuan rapat. Locking the annual budget with 70% and 50% release mechanisms for travel expenses, general and administrative expenses, consulting fees, office supplies, and meeting refreshments.
7	Optimalisasi model bisnis pasca pemurniaan bisnis; Optimize the business model following business restructuring;	Penyusunan kajian peta peran transfer operatorship terminal NPK untuk mendukun pemurnian bisnis di PMT Grup. Preparing a study on the operatorship transfer role map for the NPK terminal to support business streamlining within PMT Group.
8	Melaksanakan transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi yang menjadi pedoman Perusahaan; Conduct financial transactions in accordance with the accounting standards that serve as the Company's guidelines;	Melakukan verifikasi dokumen pendukung usulan jurnal serta melakukan evaluasi dan posting jurnal sesuai kebijakan akuntansi Perusahaan. Verify supporting documents for journal entries and evaluate and post journal entries in accordance with the Company's accounting policies.
9	Melaksanakan percepatan aksi korporasi pemurnian bisnis; Accelerate corporate actions to streamline the business;	1. Penyusunan kajian peta peran transfer operatorship terminal NPK untuk mendukung pemurnian bisnis di PMT Grup. 2. Restrukturisasi organisasi untuk mendukung fungsi anak perusahaan dan induk pascaperalihan operatorship. 1. Prepare a role mapping study for the transfer of NPK terminal operatorship to support business streamlining within PMT Group. 2. Restructure the organization to support the functions of subsidiaries and parent companies following the transfer of operatorship.
10	Menjalankan parenting model dan peta peran Induk dan Anak Perusahaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan melalui penyesuaian-penyesuaian pada segala aspek yang terdampak; Implement the parent-subsidiary model and role map that have been formulated and established by making adjustments to all affected aspects;	Parenting Model bidang SDM sudah ditetapkan dalam Peraturan Direksi dan RUPS. Parenting Model for Human Capital has been established in the Board of Directors' Regulations and GMS.
11	Melaksanakan investasi secara efektif untuk menghasilkan dampak nyata dan terukur bagi peningkatan kinerja dan pertumbuhan Perusahaan; Implement the parent-subsidiary model and role map that have been formulated and established by making adjustments to all affected aspects;	Proses pengusulan investasi berdasarkan Perdir Investasi di lingkungan PMT Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: HK. 01/17/1/1/PRPR/DIRU/PLMT-25 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pedoman Investasi di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. The investment proposal process is based on the Investment Regulation within PT Pelindo Multi Terminal, specifically PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation No. HK. 01/17/1/1/PRPR/DIRU/PLMT-25 dated January 17, 2025, regarding Investment Guidelines within PT Pelindo Multi Terminal.
12	Melaksanakan investasi secara efektif untuk menghasilkan dampak nyata dan terukur bagi peningkatan kinerja dan pertumbuhan Perusahaan melalui proses monitoring realisasi imbal hasil atas aset investasi yang telah selesai dilaksanakan; Effectively execute investments to generate tangible and measurable impacts on the Company's performance improvement and growth through the monitoring of returns on completed investment assets;	Melakukan proses monitoring rutin secara berkala (tiap bulan) untuk memantau perkembangan progres pelaksanaan investasi dengan BPO dan mencari jalan keluar bersama/best practice atas kendala yang mungkin terjadi didokumentasikan dalam Berita Acara Rapat. Conduct routine monitoring on a regular basis (monthly) to track the progress of investment implementation with the BPO and jointly identify solutions or best practices for any obstacles that may arise, which are documented in the Meeting Minutes.

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Rencana Aksi/Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
13	Meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di lingkungan kerja grup Perusahaan; Enhance the effectiveness of implementing the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) within the Company's group work environment;	1. Melakukan kegiatan awareness, safety patrol, safety briefing, drill keselamatan dan pengamanan, management walkthrough secara konsisten. 2. Pemenuhan minimum sarana dan prasarana K3 secara bertahap. 3. peningkatan sterilisasi terminal. 1. Consistently conduct safety and security activities such as awareness campaigns, safety patrols, safety briefings, drills, and management walkthroughs. 2. Gradually meet the minimum requirements for occupational health and safety (OHS) facilities and infrastructure. 3. Improve terminal sterilization.
14	Meningkatkan daya saing Perusahaan melalui peningkatan kualitas SDM sesuai dengan bidang bisnis Perusahaan; Enhance the Company's competitiveness by improving the quality of human capital in line with the Company's business fields;	1. Pelatihan dan sertifikasi pekerja sesuai bidang bisnis Perusahaan. 2. Desain Struktur organisasi yang mendukung implementasi transformasi dan standardisasi berbasis *planning and control*. 3. Penugasan Pekerja dalam projek strategis/ transformasi, contoh: sebagai Deputy *Project Leader* (DPL) dalam proses Serah Operasi *branch*. 4. Program pengembangan kapabilitas kepemimpinan bagi pekerja muda (*Millenial Development Program*). 5. Optimalisasi peran SME (*Subject Matter Expert*) sebagai *buddy* dan pendamping dalam proses transformasi dan standardisasi *branch*. 1. Training and certification of employees in line with the Company's business areas. 2. Design of an organizational structure that supports the implementation of transformation and standardization based on planning and control. 3. Assigning employees to strategic/transformation projects, for example: as a Deputy Project Leader (DPL) in the branch handover process. 4. Leadership development program for young employees (Millennial Development Program). 5. Optimizing the role of SMEs (Subject Matter Experts) as buddies and mentors in the branch transformation and standardization process.
15	Meningkatkan dan memprioritaskan sinergi antarentitas perusahaan di lingkungan Pelindo Grup untuk menciptakan nilai tambah/*value creation* bagi Pelindo Grup; Enhance and prioritize synergies among corporate entities within Pelindo Group to create added value for Pelindo Group;	Peningkatan sinergi antar anak usaha pada pengembangan bisnis baru maupun peningkatan layanan di *branch* PMT seperti peningkatan layanan curah cair di terminal Kijing dengan menggandeng SPSL, dsb. Enhancing synergy among subholdings in the development of new businesses and the improvement of services at PMT branches, such as enhancing liquid bulk services at the Kijing terminal in partnership with SPSL, etc.
16	Mendorong budaya inovasi dan digitalisasi untuk mendukung proses bisnis yang efisien serta pengembangan talenta SDM dalam rangka ekspansi dan akselerasi transformasi bisnis Perusahaan; Foster a culture of innovation and digitalization to support efficient business processes and the development of human capital talent in support of the Company's business expansion and accelerated transformation;	1. Pelaksanaan program engagement dan edukasi inovasi secara berkelanjutan (sosialisasi/*campaign*, webinar, kompetisi, gamifikasi, pemberian *reward*, dll); 2. Pelatihan dan *workshop* terkait inovasi bagi para inovator dan pengelola inovasi; 3. Berpartisipasi aktif dalam kompetisi inovasi di lingkungan Pelindo Grup (Pelindo *Innovation Award*) secara berkelanjutan; 4. Penguatan peran Komite Inovasi yang terdiri dari Para *Senior Leader*, sebagai pengarah dan pendamping dalam seleksi ide sampai dengan proses inkubasi projek inovasi; 5. Pelaksanaan proses inkubasi dan implementasi projek atas ide-ide inovasi yang telah disetujui oleh Direksi. 1. Implementation of sustainability programs focused on engagement and innovation education (outreach/campaigns, webinars, competitions, gamification, rewards, etc.); 2. Training and workshops on innovation for innovators and innovation managers; 3. Active and ongoing participation in innovation competitions within Pelindo Group (Pelindo Innovation Award); 4. Strengthening the role of Innovation Committee, consisting of Senior Leaders, as advisors and mentors from the idea selection stage through the innovation project incubation process; 5. Conducting the incubation and implementation of innovation projects based on ideas approved by Board of Directors.
17	Melaksanakan semua arahan Pemegang Saham dan saran nasihat Dewan Komisaris, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini; Implement all directives from the Shareholders and recommendations from Board of Commissioners, as an integral part of this Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Resolution;	Telah melaporkan tindak lanjut terhadap arahan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris secara periodik baik dalam Laporan Manajemen maupun pada saat pelaksanaan Rapat Gabungan Komisaris Direksi. Has periodically reported on the follow-up of the Shareholders' and Board of Commissioners' directions, both in the Management Report and during Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.
18	Memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Induk Pelabuhan; Provide input during process of drafting the Port Master Plan;	Berperan serta dalam proses penyusunan RIP yang dilaksanakan oleh Tim Pelindo berdasarkan kondisi PMT selaku *business owner*; Participated in the process of drafting the RIP carried out by Pelindo Team based on PMT's position as the business owner;

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Rencana Aksi/Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
19	Mengimplementasikan tata kelola terintegrasi; Implement integrated governance;	Telah meratifikasi peraturan Direksi tentang Tata Kelola Terintegrasi dan menyusun laporan implementasi tata kelola terintegrasi setiap semester. Has ratified the Board of Directors' regulations on Integrated Governance and prepared a report on the implementation of integrated governance every semester.
20	Menyelesaikan ratifikasi Peraturan Direksi tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan implementasi *roadmap*-nya, optimalisasi penggunaan *eProcurement* dan melaksanakan pengadaan barang melalui PADI UMKM serta fokus penyelesaian overdue transaksi pembayaran pada PADI UMKM; Finalize the ratification of the Board of Directors' Regulation on Guidelines for Using Domestic Production and implement its roadmap; optimize the use of e-Procurement; and conduct procurement of goods through the PADI UMKM platform, while focusing on resolving overdue payment transactions on the PADI UMKM platform;	Ratifikasi Perdir P3DN di Lingkungan PMT Grup telah selesai dilaksanakan, implementasi besaran nilai TKDN sudah dijalankan sesuai *roadmap* yang ada pada Perdir P3DN. Optimalisasi Penggunaan *e-proc* untuk proses pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan diseluruh entitas PMT Grup, Pengadaan Barang melalui Platform PaDi UMKM telah dilaksanakan untuk Pengadaan Barang dengan nilai s.d. Rp500 juta sesuai Perdir Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PMT, terkait dengan penyelesaian *overdue* terus di-*monitoring* dan dievaluasi atas keterlambatan pembayaran transaksi PaDi UMKM di Lingkungan PMT Grup. The ratification of the P3DN BoD's Regulation within PMT Group has been completed, and the implementation of TKDN requirements has been carried out in accordance with the roadmap outlined in the P3DN BoD's Regulation. The optimization of e-proc usage for goods and services procurement processes has been implemented across all PMT Group entities. Goods procurement through the PaDi UMKM platform has been carried out for goods with a value of up to Rp500 million in accordance with the BoD's Regulation on Goods and Services Procurement applicable within PMT Group. Regarding the resolution of overdue payments, delays in PaDi UMKM transactions within PMT Group are continuously monitored and evaluated.
21	Memastikan target *value creation* pada setiap inisiatif strategis dapat dicapai; Ensure that value creation targets for each strategic initiative are achieved;	Melakukan proses *monitoring* rutin secara berkala (tiap bulan) dan perhitungan realisasi *Value Creation* untuk memantau perkembangan progres program kerja dengan BPO. Conduct routine monitoring on a regular basis (monthly) and calculate Value Creation results to track the progress of the work program with the BPO.
22	Agar melaksanakan program efisiensi biaya secara terstruktur dan berkelanjutan dengan tanpa mengganggu kegiatan operasional Perusahaan, antara lain melalui implementasi akuntasi biaya, meningkatkan efisiensi beban sumber daya pihak ketiga melalui upaya optimalisasi utilisasi aset milik, evaluasi kontrak kerja sama secara proper maupun upaya-upaya lainnya; To implement a structured and sustainable cost-efficiency program without disrupting the Company's operational activities, including through the implementation of cost accounting, improving the efficiency of third-party resource costs by optimizing the utilization of owned assets, properly evaluating cooperation contracts, and other efforts;	Penyusunan program efisiensi tahun 2025 dan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penerapan program dan mitigasi atas penyelesaian program sesuai dengan targetnya. Develop the 2025 efficiency program and conduct monitoring and evaluation of the program's implementation, as well as mitigation measures to ensure the program is completed in accordance with its targets.
23	Mengoptimalkan *idle asset* dan evaluasi tarif pelayanan secara berkala untuk mendukung pertumbuhan pendapatan; To optimize idle assets and periodically evaluate service rates to support revenue growth;	1. Melakukan relokasi terhadap *idle asset* untuk dioptimalisasi pada *Branch* yang membutuhkan (*Quick Win* Relokasi HMC Dumai, *Grab Hopper* Belawan ke Pelabuhan Kijing). 2. Melakukan perbaikan peralatan yang *idle* karena mengalami kerusakan (HPC B12 Jamrud, *Fixed Crane* Sibolga, *Reachstacker* Tanjung Pinang). 1. Relocate idle assets to optimize operations at branches that need them (Quick Win: Relocation of HMC Dumai and Grab Hopper Belawan to Kijing Port). 2. Repair idle equipment due to damage (HPC B12 Jamrud, Fixed Crane Sibolga, Reachstacker Tanjung Pinang).
24	Memastikan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2025 memberikan dampak riil bagi Perusahaan baik yang bersifat menghasilkan pendapatan maupun efisiensi biaya; Ensure that the 2025 Management Work Plan (RKM) delivers tangible benefits to the Company, both in terms of revenue generation and cost efficiency;	Telah dilakukan pengelompokan RKM sesuai dengan klasifikasi RKM Pendapatan dan/atau RKM Efisiensi, dan telah dilakukan *mapping* potensi pendapatan dan effisiensi. Untuk selanjutnya akan dilakukan *monitoring* secara berkala, dan memastikan RKM tersebut terlaksana sesuai rencana potensi pendapatan/effisiensi. RKM projects have been grouped according to the Revenue and/or Efficiency RKM classifications, and the revenue and efficiency potential has been mapped. Going forward, periodic monitoring will be conducted to ensure that these RKM projects are implemented in accordance with the planned revenue and efficiency potential.

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Rencana Aksi/Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
25	Melakukan evaluasi penerapan tarif terhadap beban biaya operasional. Dalam hal terdapat tarif yang memerlukan penyesuaian agar menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian tarif; Evaluate the application of rates in relation to operating costs. If any rates require adjustment, prepare the necessary steps for rate adjustments;	1. Terhadap kerja sama *handling* bongkar muat (b2b), dalam setiap pelaksanaan kerja sama terlebih dahulu dilakukan evaluasi HPP untuk menentukan tarif kerja sama sesuai dengan mengikuti ketentuan margin dalam perdir jasa kepelabuhanan. 2. Dalam penyesuaian tarif jasa barang di mana tarif tersebut melekat pada BUP, PMT telah melakukan koordinasi dengan regional selaku BUP dalam penyusunan penyesuaian tarif, di mana PMT menyampaikan dukungan berupa perhitungan HPP kepada Regional. Dari hasil perhitungan HPP, regional menyampaikan usulan untuk tarif jasa barang yang selanjutnya akan dilakukan kesepakatan antara BUP dan asosiasi terkait serta dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. 1. Regarding B2B cargo handling cooperation, prior to each implementation of such cooperation, a cost of goods sold (COGS) evaluation is conducted to determine the cooperation rate in accordance with the margin provisions set forth in the port services regulation. 2. Regarding adjustments to cargo service rates—which are tied to the Port Operating Unit (BUP)—PMT has coordinated with the regional office, acting as the BUP, in formulating these rate adjustments. PMT provided support in the form of COGS calculations to regional offices. Based on these COGS calculations, regional offices submitted proposals for cargo service rates, which were subsequently agreed upon between the BUP and relevant associations, and recommendations were sought from the Ministry of Transportation.
26	Mempersiapkan Implementasi *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR); Prepare for implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR);	Menetapkan PIC ICOFR setiap departemen untuk menyusun & berkoordinasi terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung terealisasinya ICOFR Perusahaan. Appoint an ICOFR PIC for each department to develop and coordinate the necessary measures to support the implementation of the Company's ICOFR.
27	Menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan Audit baik dari Internal (SPI) maupun Eksternal (KAP, BPK) secara tepat waktu; Complete follow-up on audit findings—both internal (SPI) and external (KAP, BPK)—in a timely manner;	Melakukan *monitoring* tindak lanjut temuan Audit Internal (SPI) Tahun 2024 dan temuan Audit Eksternal secara periodik sesuai *action plan* pada Laporan Hasil Audit. Periodically monitor the follow-up on the 2024 Internal Audit (SPI) and External Audit findings in accordance with the action plan outlined in the Audit Report.
28	Melakukan Inventarisasi Aset Tetap secara Berkala untuk mengetahui kondisi dan kesesuaian fisik aset di lapangan dan di pencatatan keuangan; Conduct periodic fixed asset inventories to verify the condition and physical consistency of assets on-site and in financial records;	*Supporting data* aset tetap untuk diinventarisasi bersama tim teknik. Support the collection of fixed asset data for inventory purposes in collaboration with the technical team.
29	Menjaga ketepatan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan di masing-masing Entitas serta akurasi dan kesesuaian saldo tiap COA yang ada di laporan keuangan masing-masing Entitas; Ensure the timely completion of financial statements for each entity, as well as the accuracy and consistency of the balances for each account in the chart of accounts (COA) in each entity's financial statements;	Evaluasi laporan keuangan, verifikasi jurnal-jurnal usulan cabang (akrual/ *reverse*/reklas), *monitoring* kesesuaian transaksi yang terbukukan di Laporan keuangan. Evaluate financial statements, verify branch-submitted journal entries (accrual/ reverse/reclassification), and monitor the accuracy of transactions recorded in the financial statements.
30	Melakukan *interco* secara tepat waktu, tepat angka dan tepat akun; Conduct interco transactions in a timely manner, with correct figures, and posted to the correct accounts;	Evaluasi & *monitoring* GL akun maupun saldo BA rekonsiliasi transaksi *interCompany* dengan saldo di Laporan keuangan SAP untuk di *entry* di BPC HO tepat waktu. Evaluate and monitor general ledger accounts and bank account balances; reconcile interco transactions with the balances in the SAP financial statements for timely entry in the BPC HO system.
31	Melakukan standardisasi struktur organisasi untuk anak perusahaan yang memiliki kegiatan operasional di cabang-cabang pelabuhan, guna memastikan keselarasan dengan strategi korporasi, efisiensi operasional, dan penguatan fungsi-fungsi utama di seluruh wilayah operasional; Standardize the organizational structure for subsidiaries with operational activities at port branches to ensure alignment with corporate strategy, operational efficiency, and the strengthening of core functions across all operational regions;	Evaluasi struktur organisasi di PMT dan PTPr sesuai dengan peta peran. Evaluate the organizational structure at PMT and PTPr in accordance with the role map.

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Rencana Aksi/Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
32	Menyiapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing entitas terkait dengan kebijakan pendelegasian wewenang, *workforce planning* dan remunerasi; Develop policies applicable to each entity regarding the delegation of authority, workforce planning, and compensation;	Kebijakan-kebijakan SDM akan diratifikasi setelah adanya pedoman kebijakan dari *Holding* sesuai dengan kewenangan Anak Usaha dan untuk kebijakan yang akan diturunkan oleh *Holding* secara bertahap ke Anak Usaha akan diimplementasikan setelah adanya pendelegasian kewenangan. HC policies shall be ratified following the issuance of policy guidelines from the Holding in accordance with the Subholding's authority; policies to be gradually rolled out by the Holding to the Subholding shall be implemented after the delegation of authority.
33	Melakukan ratifikasi Peraturan Direksi turunan dari Implementasi PKB dengan target minimal 5 (lima) buah Perdir; Ratify Board of Directors Regulations derived from the implementation of the Collective Bargaining Agreement (CBA), with a target of at least 5 (five) such regulations;	Telah diratifikasi 6 (enam) Perdir dari *Holding* terkait dengan Implementasi PKB. 6 (six) BoD's Regulations of the Holding Company related to the implementation of PKB have been ratified.
34	Penyusunan HC *Roadmap* 2025-2029 pada masing-masing entitas; Develop the 2025–2029 Human Capital (HC) Roadmap for each entity;	Sudah dimasukkan ke dalam RKM bidang SDM di PMT dan Anak Perusahaan. HC *Roadmap* PMT sedang dalam proses penyusunan, Anak Perusahaan akan paralel berjalan dengan penyusunan di PMT. It has been incorporated into the HR RKM at PMT and its Subsidiaries. PMT HC Roadmap is currently being developed; Subsidiaries shall proceed in parallel with the development at PMT.
35	Mengembangkan dan menerapkan metrics bidang SDM sebagai sarana *monitoring* dan pertimbangan pengambilan keputusan; Develop and implement SOM metrics as a tool for monitoring and informing decision-making;	*Metrics* bidang SDM akan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. HC Metrics will be used as a factor in decision-making.
36	Melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi atas meningkatnya persaingan lini bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) seperti keberadaan TUKS yang beralih menjadi Terminal Umum Sementara. Implementing anticipatory and mitigating measures in response to increasing competition in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s business lines, such as the transition of TUKS into Temporary Public Terminals.	1. Meningkatkan kinerja pelayanan operasional melalui program standarisasi dan transformasi cabang di seluruh *Branch* yang dikelola oleh PMT. 2. Aktif melakukan *customer engagement* dengan pengguna jasa di Cabang maupun di Kantor Pusat. 3. Meningkatkan koordinasi dengan KSOP setempat agar pengurusan izin peningkatan status TUKS menjadi Terminal Umum Sementara/Terminal Umum (Terum) dengan mempertimbangkan kapasitas Terum eksisting yang dioperasikan oleh PT Pelindo Grup sebagaimana ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan ekspansi bisnis pengelolaan TUKS melalui skema kerja sama dengan Pemilik TUKS yang tidak berada di wilayah kerja PT Pelindo grup atau yang tidak melakukan kegiatan BM Cargo yang telah di-*handle* oleh terminal milik PT Pelindo grup guna menambah portofolio kerjasama bisnis serta bagian dari upaya ekspansi yang dilakukan oleh PT Pelindo Grup. 1. Improve operational service performance through standardization and branch transformation programs across all Branches managed by PMT. 2. Actively engage in customer engagement with service users at both branches and Head Offices. 3. Enhance coordination with the local KSOP to facilitate the processing of permits to upgrade the status of TUKS to Temporary Public Terminal/Public Terminal (Terum), taking into account the capacity of existing Terum operated by the PT Pelindo Group in accordance with applicable regulations. 4. Expand the TUKS management business through cooperation schemes with TUKS owners who are not located within the PT Pelindo Group's operational area or who do not conduct BM Cargo activities already handled by terminals owned by the PT Pelindo Group, in order to expand the business partnership portfolio and as part of the expansion efforts undertaken by PT Pelindo Group.

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024

Annual GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2024 Fiscal Year

Hari/Tanggal Day/Date	Kamis, 19 Juni 2025 Thursday, June 19, 2025
Waktu Time	09.40 sd 10.40 WIB 9:40 AM to 10:40 AM
Tempat Place	Ruang Rapat Amanah Lantai 3 Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9, RW. 13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 Amanah Meeting Room, 3rd Floor, Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No. 9, RW 13, Rawabadak Utara, Koja Subdistrict, North Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14230
Agenda Agenda	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Pengesahan Laporan Keuangan (Konsolidasian) Perusahaan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); 2. Penetapan penggunaan laba bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perusahaan Tahun Buku 2024; 3. Penetapan tantiem tahun buku 2024, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan Jainnya untuk tahun 2025; 4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan (konsolidasian) Perusahaan untuk tahun buku 2025; 5. Penarikan Dividen dari cadangan lainnya (saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya). 1. Approval of the Company's Annual Report for 2024 (two thousand twenty-four) Fiscal Year, and Ratification of the Company's (Consolidated) Financial Statements for 2024 (two thousand twenty-four) Fiscal Year; 2. Determination of the use of net income attributable to owners of parent entity for 2024 Fiscal Year; 3. Determination of tantiems for 2024 fiscal year, salaries for Board of Directors members, and honoraria for Board of Commissioners, as well as other benefits and allowances for 2025; 4. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's (consolidated) financial statements for 2025 fiscal year; 5. Distribution of dividends from other reserves (retained earnings not yet allocated).
Kehadiran Attendance	1. Pemegang Saham: a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): i) Wakil Direktur Utama : Hambra ii) Group Head Manajemen Portofolio Anak Perusahaan : Cucu Kuswoyo b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: i) Direktur Utama : Natal Iman Ginting 2. Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal: a. Komisaris Utama : Darwanto b. Komisaris : Arman Depari c. Komisaris : Thanon Aria Dewangga d. Komisaris : Ahmad Perwira Mulia Tarigan e. Komisaris Independen : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan f. Komisaris Independen : Aan Rusdianto 3. Direksi PT Pelindo Multi Terminal: a. Direktur Utama : Ary Henryanto b. Direktur Operasi : Arif Rusman Yulianto c. Direktur Teknik : Yarham Harid d. Direktur Sumber Daya Manusia : Edi Priyanto e. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Yoni Setiawan f. Direktur Strategi dan Komersial : Rizki Kurniawan 4. Lain-lain: Peserta rapat yang lain sebagaimana daftar hadir terlampir. 1. Shareholders: a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): i) Vice President Director : Hambra ii) Group Head of Subsidiary Portfolio Management : Cucu Kuswoyo b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: i) President Director : Natal Iman Ginting 2. Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal: a. President Commissioner : Darwanto b. Commissioner : Arman Depari c. Commissioner : Thanon Aria Dewangga d. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan e. Independent Commissioner : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan f. Independent Commissioner : Aan Rusdianto 3. Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal: a. President Director : Ary Henryanto b. Operations Director : Arif Rusman Yulianto c. Technical Director : Yarham Harid d. Human Capital Director : Edi Priyanto e. Finance and Risk Management Director : Yoni Setiawan f. Strategy and Commercial Director : Rizki Kurniawan 4. Others: Other meeting participants as listed in the attached attendance sheet.

Keputusan RUPST Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024

Berdasarkan pembahasan sepanjang rapat, maka Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan:

Resolution of Annual GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2024 Fiscal Year

Based on the discussions held during the meeting, shareholders unanimously approved and resolved:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara 1:
Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Pengesahan Laporan Keuangan (Konsolidasian) Perusahaan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 (termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris) serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of Ernst and Young Global) sesuai laporannya nomor: 01163/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/IV/2025 tanggal 30 April 2025 dengan opini "Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berflaku, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. NILAI ASET sebesar Rp4.010.489.341.211,00 (empat triliun sepuluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sebelas Rupiah);
2. NILAI LIABILITAS sebesar Rp1.874.498.376.445,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima Rupiah);
3. NILAI EKUITAS sebesar Rp2.135.990.964.766,00 (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah);
4. EBITDA sebesar Rp456.492.184.031,00 (empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu Rupiah);
5. NILAI LABA KONSOLIDASIAN SETELAH PAJAK sebesar Rp269.754.677.629,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan Rupiah).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Persetujuan pemegang saham atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 telah dilembagakan dalam dokumen risalah RUPS Tahunan.

Agenda 1:
Approval of the Company's Annual Report for 2024 (two thousand twenty-four) Fiscal Year, and Ratification of the Company's (Consolidated) Financial Statements for 2024 (two thousand twenty-four) Fiscal Year;

Resolution:
Approved the Annual Report for 2024 Fiscal Year (including the Board of Commissioners' Supervisory Report) and ratified the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, which were audited by the public accounting firm Purwantono, Sungkoro and Surja (a member firm of Ernst & Young Global), as per their report No. 01163/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/IV/2025 dated April 30, 2025, with "unqualified" opinion, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during 2024 Fiscal Year provided that such actions do not constitute criminal acts or do not violate applicable legal provisions and procedures and are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements, with the following points:

1. ASSET VALUE of Rp4,010,489,341,211 (four trillion ten billion four hundred eighty-nine million three hundred forty-one thousand two hundred eleven Rupiah);
2. LIABILITIES VALUE of Rp1,874,498,376,445 (one trillion eight hundred seventy-four billion four hundred ninety-eight million three hundred seventy-six thousand four hundred forty-five Rupiah);
3. EQUITY VALUE of Rp1,135,990,964,766 (two trillion one hundred thirty-five billion nine hundred ninety million nine hundred sixty-four thousand seven hundred sixty-six Rupiah);
4. EBITDA of Rp456,492,184,031.00 (four hundred fifty-six billion four hundred ninety-two million one hundred eighty-four thousand thirty-one Rupiah);
5. CONSOLIDATED NET INCOME AFTER TAX of Rp269,754,677,629 (two hundred sixty-nine billion seven hundred fifty-four million six hundred seventy-seven thousand six hundred twenty-nine Rupiah).

Follow-up on the Resolution:
Shareholder approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements for 2024 fiscal year have been recorded in the Annual GMS minutes.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara 2:
Penetapan penggunaan laba bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perusahaan Tahun Buku 2024;

Keputusan Rapat:
Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2024 sebesar Rp207.138.829.208,00 (dua ratus tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan Rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp196.000.000.000 (seratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) atau sebesar 94,62% (sembilan puluh empat koma enam dua persen) sebagai dividen;
2. Sebesar Rp10.356.941.460 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh Rupiah) atau sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) sebagai cadangan wajib;
3. Sebesar Rp781.887.748 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) atau sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen) sebagai cadangan lainnya.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Perusahaan telah membayar lunas dividen untuk hasil usaha tahun 2024, yakni pada tanggal 30 Juni dan 3 Oktober 2025.

Agenda 2:
Determination of the use of net income attributable to owners of parent entity for 2024 Fiscal Year;

Resolution:
The Use of net income after tax attributable to the owners of parent entity for 2024 fiscal year, amounting to Rp207,138,829,208 (two hundred seven billion one hundred thirty-eight million eight hundred twenty-nine thousand two hundred eight Rupiah), shall be distributed as follows:
1. Rp196,000,000,000 (one hundred ninety-six billion Rupiah), or 94.62% (ninety-four point six two percent), as dividends;
2. Rp10,356,941,460 (ten billion three hundred fifty-six million nine hundred forty-one thousand four hundred sixty Rupiah), or 5.00% (five point zero zero percent), as a mandatory reserve;
3. Rp781,887,748 (seven hundred eighty-one million eight hundred eighty-seven thousand seven hundred forty-eight Rupiah), or 0.38% (zero point three eight percent), as other reserves.

Follow-up on the Resolution:
The Company has paid dividends in full for 2024, operating results on June 30 and October 3, 2025.

Agenda Mata Acara 3:
Penetapan tantiem tahun buku 2024, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2025;

Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 serta remunerasi (termasuk fasilitas dan tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 diputuskan dalam RUPS tersendiri/terpisah.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal.

Agenda 3:
Determination of Tantiem for 2024 Fiscal Year, salaries for Board of Directors, and honoraria for Board of Commissioners, along with other benefits and allowances for 2025;

Resolution:
Approved the determination of tantiems for Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 Fiscal Year, and the remuneration (including benefits and allowances) for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2025, to be determined in a separate GMS.

Follow-up on the Resolution:
Shareholders' Circular Resolution No. SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 dated September 30, 2024, regarding the Determination of Adjustments to Income Levels for 2024 and the Granting of Bonuses for Fiscal Year 2023 to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara 4:
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan (konsolidasian) Perusahaan untuk tahun buku 2025;

Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yaitu KAP Purwantono, Sungkoro dan Surya (*Member of* Ernst and Young Global) dan diberlakukan pula terhadap Anak Perusahaan, di mana Perusahaan adalah pemegang saham mayoritas dan/atau pengendali.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Perusahaan telah menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro dan Surya (Member of Ernst and Young Global) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 melalui surat penunjukan Surat No. PW.02.03/22/10/1/AKTS/AKPJ/PLND-25.

Agenda 4:
Approval of the Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's 2025 Financial Statements.

Resolution:
Approve the appointment of Public Accountant Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surya (Member of Ernst & Young Global) to audit the Financial Statements for 2025 (two thousand twenty-five) Fiscal Year, and extend this appointment to Subsidiaries in which the Company is the majority and/or controlling shareholder.

Follow-up on the Resolution:
The Company has appointed KAP Purwanto, Sungkoro and Surya (Member of Ernst and Young Global) to audit the Financial Statements for 2025 Fiscal Year through appointment letter No. PW.02.03/22/10/1/AKTS/AKPJ/PLND-25.

Agenda Mata Acara 5:
Penarikan Dividen dari cadangan lainnya (saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya).

Keputusan Rapat:
Penarikan Dividen dari Cadangan Lainnya (Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya) sebesar Rp154.000.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar Rupiah).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah dibayarkan lunas pada tanggal 30 Juni dan 3 Oktober 2025.

Agenda 5:
Dividend Distribution from Other Reserves (Retained Earnings Not Yet Allocated).

Resolution:
Distribution of dividends from other reserves (retained earnings not yet allocated) in the amount of Rp154,000,000,000.00 (one hundred fifty-four billion Rupiah).

Follow-up on the Resolution:
It was paid in full on June 30 and October 3, 2025.

Arahan RUPST Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024

Selanjutnya, Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia yang diwakili Bapak Cucu Kuswoyo menyampaikan arahan-arahan, sebagai berikut:

1. Agar Perusahaan berkolaborasi dan berkoordinasi intensif dalam menjalankan Program Strategis Perusahaan, di antaranya dalam pengembangan ekosistem Kalibaru, ekosistem Kijing, ekosistem Batang, dan ekosistem Kuala Tanjung serta program pengembangan lainnya;
2. Perusahaan diminta untuk secara aktif melakukan evaluasi atas capaian target perusahaan yang mengacu pada Buku Putih Penggabungan dan RJPP, guna memastikan pemenuhan target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham;
3. Agar Perusahaan menindaklanjuti arahan dan *action plan* atas pelaksanaan Program Strategis Perusahaan serta melakukan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

Directions from Annual GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2024 Fiscal Year

Furthermore, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) shareholders, represented by Cucu Kuswoyo, issued the following directions:

1. The Company is to collaborate and coordinate intensively in implementing the Company's Strategic Programs, including the development of Kalibaru ecosystem, Kijing ecosystem, Batang ecosystem, and Kuala Tanjung ecosystem, as well as other development programs;
2. The Company is requested to actively evaluate the achievement of corporate targets in accordance with the Merger White Paper and the RJPP, to ensure fulfillment of targets set by Shareholders;
3. The Company should follow up on directions and action plans regarding the implementation of the Company's Strategic Programs and accelerate the implementation of these programs while maintaining the principle of prudence;

4. Agar Perusahaan melakukan upaya yang terbaik untuk menyelesaikan skema komersialisasi pada produk terminal Kalibaru atau New Priok yang ditargetkan selesai pada tahun 2025, serta secara konsisten melakukan upaya ekspansi bisnis dan peningkatan pangsa pasar;
5. Perusahaan diharapkan mulai mempelajari dan memahami Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financing Reporting Standards*/IFRS) S1 dan S2 sebagai standar pelaporan keberlanjutan meliputi risiko-peluang terkait keberlanjutan dan perubahan iklim sebelum nantinya IFRS ini akan diadopsi formal menjadi PSAK oleh OJK dan IAI serta menjalankan upaya keberlanjutan dan disiplin dalam pencatatannya dan pelaporannya;
6. Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk peningkatan likuiditas, efektivitas proses bisnis, dan menciptakan *value creation*;
7. Agar Perusahaan melakukan *monitoring* dan sinkronisasi secara berkala setiap 1 bulan terhadap pelaksanaan program investasi yang saling bersinggungan antara Anak Usaha dan Regional;
8. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan untuk meratifikasi Peraturan Direksi Organisasi Unit Pengelola Proyek di entitas masing-masing;
9. Menyusun dan melaksanakan *action plan* percepatan realisasi investasi hingga akhir tahun berjalan serta melakukan inventarisasi dan penyelesaian seluruh *pending matter* terkait proyek investasi yang masih tertunda, antara lain legalitas lahan, perizinan, hasil lelang belum ditindaklanjuti, serta kontrak yang belum ditandatangani;
10. Agar Perusahaan menyiapkan Perencanaan Manajemen Risiko Tahun Buku 2026 untuk mendukung Penyusunan RKAP Tahun 2026 Berbasis Risiko serta berpartisipasi dalam Pelaksanaan GRC *Award* Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan Budaya Sadar Risiko dan Kepatuhan;
11. Agar Perusahaan menerapkan tata kelola terintegrasi dan melakukan *Internal Control Testing* (ICT) secara berkala serta menyiapkan laporan pelaksanaannya. Selain itu, Perusahaan juga diminta untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengelolaan benturan kepentingan secara terintegrasi, dan pengendalian gratifikasi secara menyeluruh serta mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) dan menyusun prosedur penanganan atas potensi gangguan layanan bisnis di masing-masing entitas;
12. Perusahaan diminta memberikan upaya terbaik untuk peningkatan Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan serta melakukan *cost effectiveness*, di mana pengendaliannya sejalan dengan implementasi *Budget Control System*;
13. Agar Perusahaan memperhatikan pencapaian target kinerja keuangan seperti *Net Profit & Net Profit Margin*, EBITDA & EBITDA *Margin*, serta rasio keuangan agar meningkat secara *year on year*;
14. Agar Perusahaan memastikan seluruh pekerjaan investasi yang tidak terselesaikan pada tahun 2025 untuk diusulkan kembali dalam perencanaan tahun 2026. Selain itu, setiap kegiatan investasi yang telah selesai agar segera

4. The Company is to make its best efforts to finalize the commercialization plan for the Kalibaru or New Priok terminal project, targeted for completion in 2025, and to consistently pursue business expansion and market share growth;
5. The Company is expected to begin studying and understanding International Financial Reporting Standards (IFRS) for 1st Semester and 2nd Semester as sustainability reporting standards—covering risks and opportunities related to sustainability and climate change—before these IFRS are formally adopted as PSAK by the OJK and IAI, and to implement sustainability initiatives with discipline in their recording and reporting;
6. Optimize financial management in accordance with Good Corporate Governance to improve liquidity, enhance the effectiveness of business processes, and drive value creation;
7. Ensure that the Company conducts monitoring and synchronization on a monthly basis regarding the implementation of overlapping investment programs between the Subsidiary and Regional units;
8. Conduct an evaluation of the need to ratify the Board of Directors' Regulation on the Project Management Unit Organization within each respective entity;
9. Develop and implement an action plan to accelerate the realization of investments by the end of the current fiscal year, and conduct an inventory and resolution of all pending matters related to delayed investment projects, including land legality, permits, auction results that have not been followed up on, and unsigned contracts;
10. The Company shall prepare the Risk Management Plan for 2026 Fiscal Year to support the development of the 2026 Risk-Based RKAP and participate in the 2025 GRC Award as part of efforts to enhance a culture of risk awareness and compliance;
11. The Company is directed to implement integrated governance and conduct Internal Control Testing (ICT) on a regular basis, as well as prepare reports on its implementation. In addition, the Company is also required to implement an Anti-Bribery Management System (SMAP), integrated management of conflicts of interest, and comprehensive control of gratuities, as well as to implement Business Continuity Management (BCM) and develop procedures for handling potential disruptions to business services at each entity;
12. The Company is requested to make its best efforts to improve the Corporate Health Score and ensure cost effectiveness, with controls aligned with the implementation of Budget Control System;
13. The Company is to ensure that financial performance targets such as Net Profit & Net Profit Margin, EBITDA & EBITDA Margin, and financial ratios improve year-on-year;
14. The Company must ensure that all investment projects not completed by 2025 are resubmitted in the 2026 planning. Additionally, for every completed investment activity, project closing procedures, asset recording, and the

dilakukan proses *project closing*, pencatatan aset, serta pengurusan perizinan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

15. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pengelolaan Perusahaan agar Manajemen melakukan sinergi program pengawasan dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melakukan *performance*/kepatuhan audit pada Perusahaan dan Anak Perusahaannya yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh SPI PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

processing of operational permits must be carried out immediately in accordance with applicable laws and regulations;

15. In order to enhance the Company's management control and supervisory functions, Management shall coordinate its supervision program with the Internal Audit Unit (SPI) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to conduct performance and compliance audits of the Company and its Subsidiaries, which shall be carried out by the SPI of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Tindak Lanjut Arahan RUPST Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024

Berdasarkan arahan RUPST, berikut rencana aksi maupun tindak lanjutnya oleh Perusahaan:

Follow-Up on the Direction from Annual GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2024 Fiscal Year

Based on the AGM's directions, below are the Company's action plans and follow-up measures:

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
1	Agar Perusahaan berkolaborasi dan berkoordinasi intensif dalam menjalankan Program Strategis Perusahaan, di antaranya dalam pengembangan ekosistem Kalibaru, ekosistem Kijing, ekosistem Batang dan ekosistem Kuala Tanjung serta program pengembangan lainnya; The Company is to collaborate and coordinate intensively in implementing the Company's Strategic Programs, including the development of Kalibaru ecosystem, Kijing ecosystem, Batang ecosystem, and Kuala Tanjung ecosystem, as well as other development programs;	PMT selalu berkoordinasi dengan Pelindo HO dan Regional untuk pengembangan ekosistem Kalibaru, Kijing, Batang dan Kuala Tanjung dengan rincian sebagai berikut: 1. Terminal Batang, PMT telah bersurat kepada Pelindo HO untuk meminta rencana tindak lanjut penyediaan infrastruktur dasar: jetty curah cair dan lahan reklamasi. 2. Terminal Kalibaru, PMT telah melakukan diskusi mengenai zonasi serta peruntukan lahan reklamasi untuk peruntukan industri *refinery biofuel*. 3. Terminal Kijing, PMT telah bersurat kepada Pelindo HO memohon adanya penyiapan jetty curah cair untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan tambatan curah cair. PMT consistently coordinates with Pelindo Head Office and Regional Offices regarding the development of Kalibaru, Kijing, Batang, and Kuala Tanjung, with the following details: 1. Batang Terminal: PMT has written to Pelindo Head Office requesting a follow-up plan for the provision of basic infrastructure: a liquid bulk jetty and reclaimed land. 2. Kalibaru Terminal: PMT has held discussions regarding zoning and the allocation of reclaimed land for a biofuel refinery. 3. Kijing Terminal: PMT has written to Pelindo Head Office requesting the preparation of a liquid bulk jetty to anticipate increased demand for liquid bulk berthing.
2	Perusahaan diminta untuk secara aktif melakukan evaluasi atas capaian target perusahaan yang mengacu pada Buku Putih Penggabungan dan RJPP, guna memastikan pemenuhan target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. The Company is requested to actively evaluate the achievement of corporate targets in accordance with the Merger White Paper and the RJPP, to ensure fulfillment of targets set by Shareholders;	Telah *dilakukan Review* Kesesuaian proyeksi atas dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelindo Multi Terminal tahun 2021 - 2025 dengan data realisasi tahun 2021-2024 dan disampaikan ke Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan surat Direktur Strategi dan Komersial PMT Nomor: PR.03/20/5/1/PRPR/DISK/PLMT-25 tanggal 20 Mei 2025 perihal Penyampaian Laporan *Review* Dokumen RJP PMT Tahun 2021-2025. Akan dilakukan *Review* Kesesuaian proyeksi atas dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelindo Multi Terminal dengan data realisasi s.d September 2025. A review of the alignment of projections in PT Pelindo Multi Terminal's 2021–2025 Long-Term Corporate Plan (RJPP) with actual results for 2021–2024 has been conducted and submitted to Director of Strategy at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pursuant to a letter from Strategy and Commercial Director at PMT, No. PR. 03/20/5/1/PRPR/DISK/PLMT-25 dated May 20, 2025, regarding Submission of Review Report on the 2021–2025 PMT Long-Term Plan (RJP) Document. A review conducted to assess the alignment of projections in PT Pelindo Multi Terminal's Long-Term Corporate Plan (RJPP) with actual data through September 2025.

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
3	Agar Perusahaan menindaklanjuti arahan dan *action plan* atas pelaksanaan Program Strategis Perusahaan serta melakukan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; The Company should follow up on directions and action plans regarding the implementation of the Company's Strategic Programs and accelerate the implementation of these programs while maintaining the principle of prudence;	Program Strategis Perusahaan dikontrol sesuai dengan RKM tahun berjalan yang rutin secara berkala dipantau perkembangannya untuk mencapai tujuan. The Company's Strategic Programs are managed in accordance with the current year's RKM, and their progress is regularly monitored to ensure the achievement of objectives.
4	Agar Perusahaan melakukan upaya yang terbaik untuk menyelesaikan skema Komersialisasi pada produk terminal Kalibaru atau New Priok yang ditargetkan selesai pada tahun 2025, serta secara konsisten melakukan upaya ekspansi bisnis dan peningkatan pangsa pasar; The Company is to make its best efforts to finalize the commercialization plan for the Kalibaru or New Priok terminal project, targeted for completion in 2025, and to consistently pursue business expansion and market share growth;	PMT telah memasarkan area Product Terminal 1 di Kalibaru kepada ESSA, Exxon, Pertamina Internasional Shipping dan juga beberapa *potential tenant* untuk bisa memanfaatkan lahan Kalibaru. PMT juga aktif berkoordinasi dengan Pelindo HO terkait strategi *pricing* di Kalibaru yang dapat ditawarkan ke *tenant.* PMT has marketed the Terminal 1 product area in Kalibaru to ESSA, Exxon, Pertamina International Shipping, and several potential tenants so they can utilize the Kalibaru site. PMT is also actively coordinating with Pelindo Head Office regarding pricing strategies in Kalibaru that can be offered to tenants.
5	Perusahaan diharapkan mulai mempelajari dan memahami Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financing Reporting Standards*/IFRS) S1 dan S2 sebagai standar pelaporan keberlanjutan meliputi risiko-peluang terkait keberlanjutan dan perubahan iklim sebelum nantinya IFRS ini akan diadopsi formal menjadi PSAK oleh OJK dan IAI serta menjalankan upaya keberlanjutan dan disiplin dalam pencatatannya dan pelaporannya; The Company is expected to begin studying and understanding International Financial Reporting Standards (IFRS) for 1st Semester and 2nd Semester as sustainability reporting standards—covering risks and opportunities related to sustainability and climate change—before these IFRS are formally adopted as PSAK by the OJK and IAI, and to implement sustainability initiatives with discipline in their recording and reporting;	Laporan Keberlanjutan (*sustainability report)* PT Pelindo Multi Terminal disusun setiap tahun dan di-*upload* pada *website* Perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Melalui laporan ini, PMT menyampaikan kinerja serta komitmen keberlanjutan yang terintegrasi dalam strategi dan operasional Perusahaan, meliputi penciptaan nilai ekonomi, pengelolaan dampak lingkungan, serta kontribusi sosial bagi masyarakat, dalam kerangka tata kelola yang menjunjung tinggi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Sejalan dengan hal tersebut telah dilaksanakan juga pengelolaan terhadap risiko ESG (sebagai salah satu risiko utama korporat) pada tahun 2025. PT Pelindo Multi Terminal's sustainability report is prepared annually and uploaded to the Company's website as a demonstration of accountability and transparency regarding sustainable business management. Through this report, PMT presents its performance and sustainability commitments, which are integrated into the Company's strategy and operations, including the creation of economic value, management of environmental impacts, and social contributions to the community, within a governance framework that upholds the principles of Environmental, Social, and Governance (ESG). In line with this, the Company has also implemented ESG risk management (as one of its key corporate risks) for 2025.
6	Melakukan optimasi pengelolaan keuangan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk peningkatan likuiditas, efektivitas proses bisnis, dan menciptakan *value creation*; Optimize financial management in accordance with Good Corporate Governance to improve liquidity, enhance the effectiveness of business processes, and drive value creation;	Optimasi pengelolaan keuangan dalam bidang akuntansi, PMT sudah memberlakukan proses pencatatan akrual terpusat dan melakukan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk peningkatan akurasi laporan keuangan. To optimize financial management in the field of accounting, PMT has implemented a centralized accrual-based recording process and conducts periodic (weekly) evaluations to improve the accuracy of financial reports.
7	Agar Perusahaan melakukan *monitoring* dan sinkronisasi secara berkala setiap 1 bulan terhadap pelaksanaan program investasi yang saling bersinggungan antara Anak Usaha dan Regional; Ensure that the Company conducts monitoring and synchronization on a monthly basis regarding the implementation of overlapping investment programs between the Subsidiary and Regional units;	Proses *monitoring* program investasi dilakukan setiap awal bulan berjalan, atas realisasi progres bulan sebelumnya melalui rapat yang melibatkan divisi terkait dalam Berita Acara Rapat dan penyampaian kepada Direksi PMT. Hasil *monitoring progress* juga disampaikan ke GH Manajemen Investasi HO melalui surat keluar setiap bulannya. The monitoring of investment programs is conducted at the beginning of each current month to assess the progress made in the previous month through meetings involving the relevant divisions, as documented in the meeting minutes, and the results are reported to PMT Board of Directors. The progress monitoring results are also submitted to GH Investment Management at Head Office via a monthly outgoing letter.
8	Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan untuk meratifikasi Peraturan Direksi Organisasi Unit Pengelola Proyek di entitas masing-masing; Conduct an evaluation of the need to ratify the Board of Directors' Regulation on the Project Management Unit Organization within each respective entity;	Sudah dilakukan ratifikasi atas peraturan direksi terkait Manajemen Pengelolaan Proyek. The Board of Directors' regulations regarding project management have been ratified.

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
9	Menyusun dan melaksanakan *action plan* percepatan realisasi investasi hingga akhir tahun berjalan serta melakukan investasi dan penyelesaian seluruh *pending matter* terkait proyek investasi yang masih tertunda antara lain legalitas lahan, perizinan, hasil lelang belum ditindaklanjuti serta kontrak yang belum ditandatangani; Develop and implement an action plan to accelerate the realization of investments by the end of the current fiscal year, and conduct an inventory and resolution of all pending matters related to delayed investment projects, including land legality, permits, auction results that have not been followed up on, and unsigned contracts;	Pengelola proyek tetap berkoordinasi aktif dengan vendor untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan investasi, terutama proyek yang memiliki kontribusi besar dalam penyerapan anggaran. Pengelola proyek tetap berkoordinasi aktif dengan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan terkait penetapan RUPS Revisi Investasi. Pengelola proyek tetap berkoordinasi aktif dengan Divisi Pengadaan untuk percepatan proses pengadaan proyek yang akan berjalan. Project managers continue to actively coordinate with vendors to accelerate the completion of investment projects, particularly those that contribute significantly to budget absorption. Project managers continue to actively coordinate with the Company's Strategic Planning Division regarding adoption of the Revised Investment Plan at the GMS. Project managers continue to actively coordinate with the Procurement Division to accelerate the procurement process for upcoming projects.
10	Agar Perusahaan menyiapkan Perencanaan Manajemen Risiko Tahun Buku 2026 untuk mendukung Penyusunan RKAP 2026 (dua ribu dua puluh enam) Berbasis Risiko serta berpartisipasi dalam Pelaksanaan GRC *Award* Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai upaya meningkatkan Budaya Sadar Risiko dan Kepatuhan; The Company shall prepare the Risk Management Plan for 2026 Fiscal Year to support the development of the 2026 Risk-Based RKAP and participate in the 2025 GRC Award as part of efforts to enhance a culture of risk awareness and compliance;	Perencanaan Manajemen Risiko telah dilakukan dan saat ini dalam proses finalisasi seiring dengan penyusunan RKAP Tahun 2026 serta penyesuaian dengan format RKAP berbasis risiko dari Danantara Asset Management. PT Pelindo Multi Terminal beserta Anak Perusahaan (PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT Pelabuhan Tanjung Priok, dan PT Terminal Curah Utama) telah merampungkan partisipasinya dalam Pelindo GRC Award 2025. Partisipasi mencakup kategori individu (VIRAL, RIVAL dan BRAVE) yang diikuti oleh 27 peserta sebagaimana tercatat dalam Berita Acara No. PW.05.02/20/8/1/RINO/DKMR/PLMT-25 tanggal 20 Agustus 2025, serta kategori kelompok (RACE) yang diikuti oleh Unit Manajemen Risiko. Dokumen untuk kategori RACE dapat diakses melalui tautan berikut: 1. Link Dokumen Berita Acara (VIRAL, RIVAL dan BRAVE): https://drive.google.com/drive/folders/1eqtCuk7Vk49YOYhrLp5c_8IDUml-ygkY?usp=sharing 2. Link Dokumen RACE: bit.ly/RACE-SPMT2025 Risk Management Planning has been carried out and is currently being finalized in conjunction with the preparation of the 2026 RKAP and adjustments to align with the risk-based RKAP format from Danantara Asset Management. PT Pelindo Multi Terminal and its subsidiaries (PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT Pelabuhan Tanjung Priok, and PT Terminal Curah Utama) have completed their participation in the 2025 PELINDO GRC Award. Participation included the individual categories (VIRAL, RIVAL, and BRAVE), in which 27 participants took part, as recorded in the Minutes No. PW.05.02/20/8/1/RINO/DKMR/PLMT-25 dated August 20, 2025, as well as the group category (RACE), in which the Risk Management Unit participated. Documents for the RACE category can be accessed via the following links: 1. Link to the Meeting Minutes (VIRAL, RIVAL, and BRAVE): https://drive.google.com/drive/folders/ 1eqtCuk7Vk49YOYhrLp5c_8IDUml-ygkY?usp=sharing 2. RACE Document Link: bit.ly/RACE-SPMT2025

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
11	Agar Perusahaan menerapkan tata kelola terintegrasi dan melakukan *Internal Control Testing* (ICT) secara berkala serta menyiapkan laporan pelaksanaan. Selain itu, Perusahaan juga diminta untuk mengimplementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengelolaan benturan kepentingan secara terintegrasi, dan pengendalian gratifikasi secara menyeluruh serta mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) dan menyusun prosedur penanganan atas potensi gangguan layanan bisnis di masing-masing entitas; The Company is directed to implement integrated governance and conduct Internal Control Testing (ICT) on a regular basis, as well as prepare reports on its implementation. In addition, the Company is also required to implement an Anti-Bribery Management System (SMAP), integrated management of conflicts of interest, and comprehensive control of gratuities, as well as to implement Business Continuity Management (BCM) and develop procedures for handling potential disruptions to business services at each entity;	Telah diimplementasikan dan diterapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Benturan Kepentingan, dan pengendalian gratifikasi di PMT Grup sampai ke entitas anak Perusahaan telah kami sampaikan kepada Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pelindo bersamaan dengan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Program Bulan GCG 2025 PT Pelindo Multi Terminal pada tanggal 17 September 2025 yang dapat diakses pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1WW2k6SIgFPcYN5ioXqsRERPjopHB-D86?usp=sharing. Divisi Manajemen Risiko: Telah diterbitkan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: PW.05.02/7/11/2/RINO/DIRU/PLMT-23 tanggal 7 November 2023 tentang Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) PT Pelindo Multi Terminal., Penyusunan BIA, BCP, DRP dan telah dilakukan Drill yang dapat diakses pada Link: https://drive.google.com/drive/folders/1YqDgRiY8q5Hsi2ehD5qkKjsAMwU7m2jH?usp=sharing. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan pelaksanaan *Internal Control Testing* dan pembahasan laporan Internal Control Testing (ICT) semester I Tahun 2025 pada tanggal 04 Juli 2025. Laporan ICT tergabung dalam Buku LMPT Semester I tahun 2025 (Hal.354). Dokumen ICT dapat diakses pada Link: https://drive.google.com/drive/folders/12ToFlbFRO_CcbSpAB53rDnFzmnv4qHAa?usp=sharing. Has been implemented and applied of the Anti-Bribery Management System, Conflicts of Interest, and Control of Gratuities at PMT Group, including its subsidiaries, has been submitted to the Group Head of Risk Management, Corporate Governance, and Compliance at PT Pelindo, along with the Submission of Implementation Report for the 2025 GCG Month Program at PT Pelindo Multi Terminal on September 17, 2025, which can be accessed at the following link: https://drive.google.com/drive/folders/1WW2k6SIgFPcYN5ioXqsRERPjopHB-D86?usp=sharing. Risk Management Division: PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation No. PW.05.02/7/11/2/RINO/DIRU/PLMT-23, dated November 7, 2023, regarding Business Continuity Management (BCM) Guidelines for PT Pelindo Multi Terminal, has been issued. The Business Impact Analysis (BIA), Business Continuity Plan (BCP), and Disaster Recovery Plan (DRP) have been prepared, and drills have been conducted. These documents can be accessed via the following link: https://drive.google.com/drive/folders/1YqDgRiY8q5Hsi2ehD5qkKjsAMwU7m2jH?usp=sharing. The Risk Management Division conducted Internal Control Testing and discussed the Internal Control Testing (ICT) report for the first semester of 2025 on July 4, 2025. The ICT report is included in the LMPT Report for the First Semester of 2025 (p. 354). The ICT document can be accessed via the following link: https://drive.google.com/drive/folders/12ToFlbFRO_CcbSpAB53rDnFzmnv4qHAa?usp=sharing.
12	Perusahaan diminta memberikan upaya terbaik untuk peningkatan Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan serta melakukan *cost effectiveness*, dimana pengendaliannya sejalan dengan implementasi *Budget Control System*; The Company is requested to make its best efforts to improve the Corporate Health Score and ensure cost effectiveness, with controls aligned with the implementation of Budget Control System;	Sudah melaksanakan pengendalian anggaran, sesuai dengan: 1. Arahan strategis Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor: PW.05.02/3/3/1/RINO/DKMR-25 dan Nomor: PW.05.02/3/3/2/RINO/DKMR/PLMT-25 tanggal 03 Maret 2025 ke anak perusahaan dan ke *Branch* tentang pengendalian anggaran berupa pembatasan rilis anggaran, evaluasi dan *monitoring* realisasi anggaran. 2. Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor: PW.05.02/14/3/1/RINO/DKMR/PLMT-25 dan Nomor: PW.05.02/14/3/2/RINO/DKMR/PLMT-25 tanggal 14 Maret 2025 tentang penyampaian program efisiensi biaya tahun 2025 *Branch* dan Anak Perusahaan. 3. Surat SVP Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Nomor: KU.01.04/25/9/1/PAIN/AKUL-25 tanggal 25 Sept 2025 tentang Pengendalian Anggaran untuk pencapaian kinerja keuangan. 4. Link surat: https://1drv.ms/f/c/70a70e52074139bb/EioV3z0ZZZ5Gs0mIU0UUlsIBwE8aEioybL74llYSeZV_Zw?e=Fe2jbm. Has implemented budget control in accordance with: 1. Strategic Directives from Finance and Risk Management Director No. PW.05.02/3/3/1/RINO/DKMR-25 and No. PW.05.02/3/3/2/RINO/DKMR/PLMT -25 dated March 3, 2025, to subsidiaries and branches regarding budget control in the form of restrictions on budget releases, evaluation, and monitoring of budget execution. 2. Letters from Finance and Risk Management Director No. PW.05.02/14/3/1/RINO/DKMR/PLMT-25 and No. PW.05.02/14/3/2/RINO/DKMR/PLMT -25 dated March 14, 2025, regarding submission of the 2025 cost efficiency program for Branches and Subsidiaries. 3. Letter from SVP Budget, Accounting, and Reporting No. KU.01.04/25/9/1/PAIN/AKUL-25 dated September 25, 2025, regarding Budget Control for achieving financial performance. Letter link: https://1drv.ms/f/c/70a70e52074139bb/EioV3z0ZZZ5Gs0mIU0UUlsIBwE8aEioybL74llYSeZV_Zw ?e=Fe2jbm.

No	Arahan RUPS AGMS Direction	Tindak Lanjut Action Plan/Follow-up
13	Agar Perusahaan memperhatikan pencapaian target kinerja keuangan seperti *net Profit Margin*, EBITDA & EBITDA *Margin*, serta rasio Keuangan agar meningkat secara *year on year*; The Company is to ensure that financial performance targets such as Net Profit & Net Profit Margin, EBITDA & EBITDA Margin, and financial ratios improve year-on-year;	Dalam hal pengendalian biaya sudah dilakukan upaya pengendalian anggaran dengan melakukan pembatasan rilis untuk biaya operasional sebesar 70% dan biaya non operasional sebesar 50% pada awal tahun 2025 dan penambahan rilis baru dapat dilakukan pada bulan Agustus 2025 dan biaya terkait konsultan, SPPD, rumah tangga pada bulan September 2025 sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu *Branch* dan anak perusahaan sudah diminta untuk membuat program efisiensi sesuai surat Nomor: PW.05.02/14/3/1/RINO/DKMR/PLMT-25 dan Nomor: PW.05.02/14/3/2/RINO/DKMR/PLMT-25 tanggal 14 Maret 2025 dan di-*monitoring* realisasinya setiap bulannya. In terms of cost control, budget control measures have been implemented by limiting budget releases to 70% for operational expenses and 50% for non-operational expenses at the beginning of 2025; new budget releases may be made in August 2025, and releases for expenses related to consultants, travel allowances, and general administrative costs may be made in September 2025 as needed. In addition, Branch and subsidiaries have been instructed to develop efficiency programs in accordance with letters No. PW.05.02/14/3/1/RINO/DKMR/PLMT-25 and No. PW.05.02/14/3/2/RINO/DKMR/PLMT-25 dated March 14, 2025, and their implementation is monitored on a monthly basis.
14	Agar Perusahaan memastikan seluruh pekerjaan investasi yang tidak terselesaikan pada tahun 2025 untuk diusulkan kembali dalam perencanaan tahun 2026. Selain itu, setiap kegiatan investasi yang telah selesai agar segera dilakukan proses *project closing*, pencatatan aset, serta pengurusan perizinan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. The Company must ensure that all investment projects not completed by 2025 are resubmitted in the 2026 planning. Additionally, for every completed investment activity, project closing procedures, asset recording, and the processing of operational permits must be carried out immediately in accordance with applicable laws and regulations;	*Project Closing* dan Penyampaian dokumen *project* ke Divisi AKUL telah dilakukan untuk pekerjaan yang telah selesai. PT Pelindo Multi Terminal telah menyampaikan usulan investasi Tahun 2026 untuk program *carry over*/*multy years* telah disampaikan ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Project Closing and the submission of project documents to the AKUL Division have been completed for the work that has been finished. PT Pelindo Multi Terminal has submitted its 2026 investment proposal for the carryover/multi-year program to PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
15	Dalam rangka meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pengelolaan Perusahaan agar Manajemen melakukan sinergi program pengawasan dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melakukan *performance*/kepatuhan Audit pada Perseroan dan Anak Perusahaan yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh SPI PT Pelabuhan Indonesia (Persero). In order to enhance the Company's management control and supervisory functions, Management shall coordinate its supervision program with the Internal Audit Unit (SPI) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to conduct performance and compliance audits of the Company and its Subsidiaries, which shall be carried out by the SPI of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Sedang dilakukan penyusunan dan pembahasan *draft* Perjanjian Kerjasama Sinergi Bidang Pengawasan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Satuan Pengawasan Intern *Holding* sebagai dasar pelaksanaan sinergi bidang pengawasan. A draft Cooperation Agreement on Synergy in the Area of Monitoring within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Holding Company's Internal Audit Unit is currently being prepared and discussed as the basis for implementing synergy in the area of monitoring.

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham

Keputusan RUPS Sirkuler Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tanggal 27 Agustus 2025

Pera Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan dengan Hormat Sdr. Thanon Aria Dewangga sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2025, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KP.03/13/2/1/RKTK/UTMA/PLND dan SK.03/13/2/1/HKD/DRU/PSD-23 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Circular Resolution of Shareholders

Circular GMS Resolution of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Dismissal of Members of Board of Commissioners dated August 27, 2025

Shareholders decided to honorably dismiss Thanon Aria Dewangga as a Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal effective as of August 27, 2025, who was appointed based on the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders No. KP. 03/13/2/1/RKTK/UTMA/PLND and SK.03/13/2/1/HKD/DRU/PSD-23 dated February 13, 2023, regarding Appointment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal, with gratitude for all contributions of energy and thoughts while holding the position.

Dengan adanya Keputusan ini, maka susunan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal adalah sebagai berikut:
1. Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen: Darwanto
2. Komisaris: Arman Depari
3. Komisaris: Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Komisaris Independen: Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
5. Komisaris Independen: Aan Rusdianto

Kemudian, Para Pemegang Saham memberi kuasa kepada Direksi PT Pelindo Multi Terminal dengan hak substitusi untuk menyatakan apa yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perusahaan di mana masing-masing merupakan dokumen asli. Keseluruhan keputusan ini yang ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perseroan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pursuant to this Resolution, the composition of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal is as follows:
1. President Commissioner, concurrently serving as Independent Commissioner: Darwanto
2. Commissioner: Arman Depari
3. Commissioner: Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Independent Commissioner: Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
5. Independent Commissioner: Aan Rusdianto

Furthermore, Shareholders have authorized the Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal, with the right of substitution, to formalize the decisions contained in this Resolution in an authentic form before a notary or authorized official.

This Resolution can be signed separately by the Company's Shareholders, with each signature constituting an original document. The entirety of this Resolution, as signed separately by the Company's Shareholders, constitutes a single, indivisible whole.

Keputusan RUPS Sirkuler Tentang Persetujuan Rencana Kerja Sama Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Curah Kering Belawan Tahap 2 Tanggal 17 September 2025

Para Pemegang Saham yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dengan ini menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pelaksanakan Kerjasama Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Curah Kering Belawan Tahap 2 dengan PT FKS Selusi Logistik, dengan jangka waktu kerjasama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama, dengan detail sebagai berikut:

Circular GMS Resolution Regarding Approval of Cooperation Plan for Operation and Development of the Belawan Dry Bulk Terminal Phase 2, dated September 17, 2025

The Shareholders represented by authorized officials in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association hereby declare and resolve the following:

1. To approve the implementation of Cooperation Agreement for Operation and Development of the Belawan Dry Bulk Terminal Phase 2 with PT FKS Selusi Logistik, with a cooperation term of 20 (twenty) years effective from the signing of cooperation agreement, with the following details:

Mitra Terpilih Selected Partners	PT FKS Solusi Logistik	
Objek Kerja Sama Scope of Cooperation	Terminal Curah Kering Belawan Tahap 2 Belawan Curah Kering Terminal, Phase 2	
Bentuk Kerja Sama Forms of Cooperation	• *Build-Transfer-Operate* (BTO) kepada PMT untuk peralatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan Bongkar di Terminal (*Stevedoring Equipment*). • *Build-Operate-Transfer* (BOT) kepada PMT untuk peralatan pendukung.	• Build-Transfer-Operate (BTO) to PMT for equipment directly related to stevedoring activities at the terminal (stevedoring equipment). • Build-Operate-Transfer (BOT) to PMT for supporting equipment.
Jangka Waktu Kerja Sama Term of the Cooperation Agreement	20 (dua puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama. 20 (twenty) years since the signing of the cooperation agreement.	
Skema Kerja Sama Cooperation Framework	*Revenue Sharing* PMT minimal 56,5% dan FKS maksimal 43,5%. Revenue sharing: PMT at a minimum of 56.5% and FKS at a maximum of 43.5%	

2. Agar Perusahaan melakukan upaya untuk lebih mengoptimalkan manfaat yang diterima dari pelaksanaan kerja sama;

2. The Company shall make efforts to further optimize the benefits derived from the implementation of this cooperation;

3. Agar didalam pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* dan sesuai dengan kentenuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan PT FKS Solusi Logistik dengan peraturan substansi Perjanjian terkait Serah Terima Aset BOT pada akhir jangka waktu kerja sama dilaksanakan dengan penandatanganan berita Acara Serah Terima Aset BOT.
4. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam RUPS Sirkuler ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan RUPS Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pemegang Saham dan Para Pemegang Saham Perusahaan menyatakan bahwa Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari keputusan-keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS Perusahaan.

3. The implementation of this Cooperation shall be carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance and in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to the drafting of a Cooperation Agreement between the Company and PT FKS Solusi Logistik, as well as the substantive provisions of Agreements related to the handover of BOT assets at the end of cooperation period, to be carried out through the signing of a BOT Asset Handover Minutes.
4. In the event that any errors are discovered in the future regarding the matters set forth in this Circular GMS, changes will be made as appropriate.

Thus, this Circular GMS Resolution is hereby made and signed by each Shareholder, and the Company's Shareholders declare that this Resolution has the same legal force as resolutions validly adopted at the Company's GMS.

Keputusan RUPS Sirkuler Tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Investasi Tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal Tanggal 18 September 2025

Para Pemegang Saham yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dengan ini mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Investasi Perusahaan Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Circular GMS Resolution Regarding Approval of Amendments to the 2025 Work Plan and Budget For Investment of PT Pelindo Multi Terminal, dated September 18, 2025

The Shareholders, represented by authorized officials in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, hereby resolve as follows:

1. To approve and adopt the Amendments to the Company's 2025 Investment Work Plan and Budget ("RKAP"), with the following main points:

No	Program investasi Investment Program	RKAP Tahun 2025 (dalam Rp) 2025 RKAP (in Rp)		Perubahan RKAP Tahun 2025 (dalam Rp) 2025 RKAP Amendment (in Rp)	
		Kebutuhan Dana Funding Requirements	RKAP	Kebutuhan Dana Funding Requirements	RKAP
1	Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Facility Buildings, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Capitalized Interest	150.921.858.341	20.580.000.000	150.921.858.000	20.580.000.000
2	Alat-Alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapal dan Kendaraan Facility Tools, Facility Installations, Equipment and Supplies, Vessels and Vehicles	533.458.351.000	293.421.000.000	672.806.351.000	354.500.000.000

No	Program investasi Investment Program	RKAP Tahun 2025 (dalam Rp) 2025 RKAP (in Rp)		Perubahan RKAP Tahun 2025 (dalam Rp) 2025 RKAP Amendment (in Rp)	
		Kebutuhan Dana Funding Requirements	RKAP	Kebutuhan Dana Funding Requirements	RKAP
3	Tanah dan Hak atas Tanah, dan Emplasement Land and Land Rights, and Emplasement	9.200.000.000	3.700.000.00	9.200.000.000	3.700.000.000
4	Investasi Non Fisik Non-Physical Investments	-	-	-	-
5	Penyertaan Modal Equity Participation	-	-	-	-
Total Investasi Total Investment		**693.580.209.341**	**317.701.000.000**	**832.928.209.000**	**378.780.000.000**

2. Agar Perubahan RKAP Investasi Perusahaan Tahun 2025 yang telah disahkan dijadikan pedoman oleh Perusahaan dalam melaksanakan anggaran investasi Perusahaan ke arah pencapaian hasil serta peningkatan pertumbuhan dan produktivitas Perusahaan dalam jangka panjang;
3. Terhadap *item* investasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Perusahaan Tahun 2025 yang telah disahkan sebelumnya yang tidak mengalami perubahan sesuai RUPS Sirkuler ini, dinyatakan tetap berlaku;
4. Pelaksanaan terhadap Keputusan RUPS Sirkuler ini agar dilaksanakan mengikuti ketentuan, prosedur, dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan apa yang telah diputuskan dalam Keputusan RUPS Sirkuler ini dalam bentuk Akta di hadapan Notaris, termasuk melaporkan dan/atau meminta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan RUPS Sirkuler ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perusahaan, di mana masing-masing merupakan dokumen asli. Keseluruhan Keputusan RUPS Sirkuler ini yang ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. That the approved amendments to the Company's 2025 RKAP Investment Plan serve as a guideline for the Company in implementing its investment budget to achieve results and enhance the Company's long-term growth and productivity;
3. Investment items in the Company's 2025 Work Plan and Budget ("RKAP") that were previously approved and have not been amended pursuant to this Circular GMS shall remain in effect;
4. The implementation of this Circular GMS Resolution shall be carried out in accordance with the provisions, procedures, and principles of Good Corporate Governance (GCG) and applicable laws and regulations;
5. The Company's Board of Directors is hereby authorized, with the right of substitution, to formalize the resolutions of this Circular GMS in the form of a Deed before a Notary Public, including reporting to and/or seeking approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable laws and regulations;
6. This Circular GMS Resolution may be signed separately by the Company's Shareholders, with each signature constituting an original document. The entirety of this Circular GMS Resolution, as signed separately by the Company's Shareholders, constitutes a single, indivisible whole;

7. Keputusan RUPS Sirkuler ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari perlu dilakukan perubahan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
8. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam RUPS Sirkuler ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2024

Di sepanjang tahun 2024 Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS. Selain itu, pemegang saham juga mengeluarkan beberapa keputusan sirkuler. Rincian RUPS dan keputusan sirkuler pemegang saham di sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. RUPS tanggal 25 Januari 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024;
2. RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022;
3. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris tanggal 9 Januari 2024;
4. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2024;
5. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 1 Maret 2024;
6. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris tanggal 26 November 2024;
7. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 9 Desember 2024.

RUPS Tahunan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024

Hari/Tanggal Day/Date	Kamis, 25 Januari 2024 Thursday, January 25, 2024
Waktu Time	09.40 sd 10.10 WIB 09.40 until 11.10 a.m
Tempat Place	Ruang Amanah, Lantai 3, Pelindo Tower, Jakarta Amanah Room, 3rd Floor, Pelindo Tower, Jakarta

7. This Circular GMS Resolution is effective as of the date of signing, provided that if, at a later date, it becomes necessary to make changes to the matters set forth in this resolution, the necessary adjustments shall be made;
8. In the event that, at a later date, there are errors regarding the matters set forth in this Circular GMS Resolution, necessary changes shall be made.

2024 GMS HOLDING

Throughout 2024, the Company held 2 (two) GMS. In addition, the shareholders also issued several circular resolutions. Details of GMS and circular resolutions of shareholders throughout 2024 are as follows:

1. GMS on January 25, 2024 regarding Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024.
2. Annual GMS on June 16, 2023 regarding Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2022 Fiscal Year.
3. Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Dismissal of Members of Board of Commissioners dated January 9, 2024;
4. Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Appointment of Members of Board of Commissioners dated March 1, 2024;
5. Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors dated March 1, 2024;
6. Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Dismissal of Members of Board of Commissioners dated November 26, 2024;
7. Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Appointment of Members of Board of Commissioners dated December 9, 2024;

Annual GMS on Determination of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024

Kehadiran
Attendance

1. Pemegang Saham:
   a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero):
      i) Wakil Direktur Utama : Hambra
   b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi:
      i) Direktur Utama : Natal Iman Ginting
2. Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal:
   a. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Darwanto
   b. Komisaris : Muhammad Yusuf Purnama
   c. Komisaris : Arman Depari
   d. Komisaris : Thanon Aria Dewangga
   e. Komisaris : Ahmad Perwira Mulia Tarigan
   f. Komisaris Independen : Herbert Timbo P. Siahaan
3. Direksi PT Pelindo Multi Terminal:
   a. Direktur Utama : Yon Irawan
   b. Direktur Operasi : Arif Rusman Yulianto
   c. Direktur Teknik : Zuhri Iryansyah
   d. Direktur Sumber Daya Manusia : Edi Priyanto
   e. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Yoni Setiawan
   f. Direktur Strategi dan Komersial : Rizki Kurniawan
4. Pihak Independen:
   PMT bukan merupakan perusahaan terbuka, tidak menunjuk pihak independen untuk melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi pada RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 ini.

1. Shareholders
   a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
      i) Vice President Director : Hambra
   b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
      i) President Director : Natal Iman Ginting
2. Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
   a. President Commissioner concurrently serves as Independent Commissioner : Darwanto
   b. Commissioner : Muhammad Yusuf Purnama
   c. Commissioner : Arman Depari
   d. Commissioner : Thanon Aria Dewangga
   e. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan
   f. Independent Commissioner : Herbert Timbo P. Siahaan
3. Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal
   a. President Director : Yon Irawan
   b. Operations Director : Arif Rusman Yulianto
   c. Technical Director : Zuhri Iryansyah
   d. Human Capital Director : Edi Priyanto
   e. Finance and Risk Management Director : Yoni Setiawan
   f. Strategy and Commercial Director : Rizki Kurniawan
4. Independent Party
   PMT is not a publicly listed Company, it did not appoint an independent party to conduct vote counting and/or validation during the GMS for the Ratification of 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

Keputusan RUPST Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024

Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Annual GMS Resolution on Determination of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024

The GMS resolutions along with their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2024 are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara:
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025.

Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo Multi Terminal Tahun Buku 2024, termasuk didalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Pelindo Multi Terminal pada kuadran netral, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
   a. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo Multi Terminal Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Pelindo Multi Terminal pada kuadran netral, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Agenda:
Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024.

Resolution:
1. Approve and ratify PT Pelindo Multi Terminal's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 Fiscal Year, including the determination of PT Pelindo Multi Terminal's risk classification in the neutral quadrant, with the following points:
   a. Income after tax is budgeted at Rp656,637,934,857, with the following details:

No	Uraian Description	RKAP 2024 2024 RKAP
1	Pendapatan Usaha Operating Revenue	Rp6.043.492.005.355
2	Laba Usaha Income from Operations	Rp889.894.853.103
3	Laba Bersih Net Income	Rp656.637.934.857
4	Laba Bersih (Atribusi Induk) Net Income (Parent Atribution)	Rp656.637.834.857
5	EBITDA	Rp1.079.936.694.539

   b. Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian dianggarkan sebesar Rp4.682.412.048.915 dengan rincian sebagai berikut:
   b. Consolidated Financial Position (Balance Sheet) is budgeted at Rp4,682,412,048,915, with the following details:

No	Uraian Description	RKAP 2024 2024 RKAP
1	Total Aset Total Assets	Rp4.682.412.048.915
2	Ekuitas Equity	Rp2.774.562.535.386

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

c. Posisi *Net Operating Cash Flow* di akhir periode dianggarkan sebesar Rp548.511.302.783.
d. *Capital Expenditure* dengan nilai Rp351.492.989.526 dengan rincian sebagai berikut:
c. Net Operating Cash Flow position at the end of the period is budgeted at Rp548,511,302,783.
d. Capital Expenditure with a value of Rp351,492,989,526, with the following details:

No	Uraian Description	RKAP 2024 2024 RKAP
1	Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Facility Buildings, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Capitalized Interest	Rp78.610.989.526
2	Alat-Alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapal dan Kendaraan Facility Tools, Facility Installations, Equipment and Fixtures, Vessels and Vehicles	Rp266.002.000.000
3	Tanah dan Hak atas Tanah, dan Emplasemen Land and Land Rights, and Emplacements	Rp6.880.000.000
4	Investasi Non Fisik Non Physical Investment	-
5	Penyertaan Modal Equity Participation	-
Jumlah Capital Expenditure Total Capital Expenditure		**Rp351.492.989.526**

e. Arus Barang:
e. Flow of Goods:

No	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 RKAP
1	B/M Barang B/M Goods		
	Ekspor	Ton/M³	24.872.234
	Impor	Ton/M³	30.593.630
	AP Muat AP Loading	Ton/M³	23.018.595
	AP Bongkar AP Unloading	Ton/M³	47.297.462
		MMBTU	12.760.000
Jumlah Total		**Ton/M³** **MMBTU**	**125.781.921** **12.760.000**
2	B/M Petikemas B/M Container		
	Internasional	Box	12.091
		Teu's	12.228
	Domestik Domestic	Box	371.785
		Teu's	390.752
Jumlah Total		**Box** **Teu's**	**383.876** **402.980**

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

f. Produksi:
f. Production:

No	Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024
1	Pelayanan Terminal Petikemas Container Terminal Services		
	Terminal Petikemas International *Stevedoring* International Stevedoring Container Terminal	Box	11.675
	Terminal Petikemas Domestic *Stevedoring* Domestic Stevedoring Container Terminal	Box	353.849
Jumlah Total		**Box**	**365.524**
2	Pelayanan Terminal Petikemas Container Terminal Services		
	Dermaga Dock	Ton/M^3	116.016.506
	Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	(Ton/M^3).Hari | Days	10.854.040
	Lapangan Penumpukan Stacking Field	(Ton/M^3).Hari | Days	18.981.902
	Stevedoring	(Ton/M^3)	59.045.636
	Cargodoring	Ton/M^3	4.165.352
		MMBTU	-

g. Sumber Daya Manusia sebagai 3.372 orang dengan rincian sebagai berikut:
g. Human Capital as 3,372 persons with following details:

No	Uraian Description	Satuan Unit	Jumlah Total
1	BOD Pelindo (Penugasan) Pelindo BOD (Assignment)	Orang Person	8
2	BOD Non Pelindo Non Pelindo BOD		6
3	Organik Pelindo (Penugasan) Pelindo Organic (Assignment)		965
4	Organik Anak Perusahaan Subsidiary Organic		2
5	PKWT Anak Perusahaan Subsidiary PKWT		10
6	Alih Daya Anak Perusahaan Subsidiary Outsourcing		2.381
7	Pekerja Pemegang Saham Lainnya Other Shareholder Workers		-
Jumlah Total			**3.372**

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

h. Rencana Kerja Manajemen:
h. Management Work Plan:

No	Inisiatif Strategi/Aksi Korporasi Strategic Initiatives/Corporate Actions	Jumlah Program Number of Programs
1	Standardisasi Operasi Pelabuhan Standardization of Port Operations	3
2	Digitalisasi dan Sistemasi Operasi Kepelabuhanan Digitalization and Systemization of Port Operations	1
3	Pengembangan infrastruktur dan peralatan Pelabuhan Development of Port infrastructure and equipment	2
4	*Key Account Management* yang Terintegrasi Integrated Key Account Management	1
5	Pengembangan Layanan Operasi TUKS dengan bekerja sama dengan BUMN dan Swasta Development of TUKS Operation Services in cooperation with SOEs and Private Sectors	1
6	Pengembangan layanan operasi Pelabuhan milik Kementerian/Lembaga Development of Port operation services owned by Ministries/Institutions	1
7	Kerja sama antar Pelabuhan untuk optimalisasi konseb hub and spoke dengan integrasi data Cooperation between Ports to optimize hub and Spoke concept with data integration	1
8	Alokasi Modal Terintegrasi Integrated Capital Allocation	1
9	Pengadaan bersama/terpusat Joint/centralized procurement	3
10	Pengembangan *supply chain financing* Development of supply chain financing	1
11	Optimalisasi Aset Asset Optimization	2
12	Pembukaan Klaster dan Model Bisnis Cluster and Business Model Opening	4
13	Restrukturisasi Organisasi dan tata Kelola Organization and Governance Restructuring	7
14	Penguatan *Corporate Branding* dan *Marketing Communication* Strengthening Corporate Branding and Marketing Communication	4
15	Program L&D Terintegrasi untuk standardisasi dan peningkatan kualitas SDM Integrated L&D Program to standardize and improve the quality of human capital	1
16	Sentralisasi *knowledge* management kepelabuhanan Centralization of port knowledge management	1
17	KPI terintegrasi untuk mengukur kinerja Integrated KPIs to measure performance	4
18	Internalisasi Budaya Culture Internalization	2
19	Implementasi *Enterprise Architect* dan IT *Masterplan* Implementation of Enterprise Architect and IT Masterplan	2
Total		**42**

2. Menyetujui dan mengesahkan anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2024 sebesar Rp7.613.750.000.
3. Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara kolegial Tahun 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
2. Approve and ratify the 2024 Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) program budget of PT Pelindo Multi Terminal in the amount of Rp7,613,750,000.
3. Establish the Annual Management Contract containing the 2024 collegial Key Performance Indicator (KPI) targets for Board of Directors as attached, which forms an integral part of this decision, with the main points as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

No	KPI	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
A.	**Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** Economic and Social Value for Indonesia		**46**	
1	EBITDA	Rp	5	1.079.936.694.539
2	Pendapatan Revenues	Rp	4	6.043.492.005.355
3	ROIC	%	3	20,02
4	BOPO	%	3	85,83
5	*Market Share* Bongkar Muat Curah Market Share of Bulk Loading and Unloading	%	5	53
6	*Non Container Throughput*	Juta Ton Million Ton	5	111,99
7	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering Dry Bulk Loading and Unloading Productivity	T/S/D	4	4.933,33
	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair Liquid Bulk Unloading Productivity	T/S/D	4	2.911,28
	Produktivitas Bongkar Muat Terminal Kendaraan Terminal Vehicle Unloading Productivity	T/S/D	2	950
	Tingkat Efektivitas Tambahan Non Petikemas (ET/BT) Non-Container Additional Effectiveness Rate (ET/BT)	%	3	73,76
8	Tingkat Maturitas Risiko Risk Maturity Leve	Skala Likert Likert Scale	4	3
9	Implementasi Program TJSL SER Program Implementation	%	4	100
B.	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation		**16**	
1	Kerja Sama dengan TUKS Cooperation with TUKS	Juta Ton Million Ton	3	7,77
		Jumlah Amount	3	2
2	Pengoperasian Pelabuhan K/L Operation of K/L Port	Jumlah Amount	3	1
3	Layanan non-petikemas tambahan & ekspansi bisnis Additional non-container services & business expansion	Rp Miliar Rp Billion	3	3,6
4	Tingkat *Compliance* Perusahaan Company Compliance Level	%	4	100

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

C.	**Kepemimpinan Teknologi** Technology Leadership		**14**	
1	Integrasi antara Pelabuhan nonkontainer untuk meningkatkan model konektivitas dengan konsolidasi data Integration between non-container Ports to improve connectivity model with data consolidation	%	4	100
2	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	5	100
3	Implementasi HSSE HSSE Implementation	%	5	100
D.	**Peningkatan Investasi** Increased Investment		**10**	
1	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment Investments	%	5	100
2	*Value Creation* Optimalisasi Aset Operasi non-kontainer Value Creation Optimization of non-container Operational Assets	Rp Miliar Rp Billion	5	9,1
E.	**Pengembangan Talenta** Talent Development		**14**	
1	Implementasi PKB Implementation of CLA	%	5	100
2	Rasio *High Potential* dan *Promotable Talent* di Lingkungan Anak Usaha Ratio of High Potential and Promotable Talent in Subsidiary Environment	%	4	5
3	Jumlah Implementasi Ide Inovasi Number of Implementation of Innovation Ideas	Jumlah Amount	5	1
Total			**100**	

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan atas RKAP ini digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Perusahaan.
Follow-up on Resolution:
The resolution on RKAP is used as a benchmark for the Company's performance achievement.

RUPS Tahunan 2024 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

2024 Annual GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2023 Fiscal Year

Hari/Tanggal Day/Date	Rabu, 12 Juni 2024 Wednesday, June 12, 2024
Waktu Time	10.40 sd 11.34 WIB 10:40 AM until 11:34 AM
Tempat Place	Gedung Learning & Innovation Center R.A 103 - 104 PMLI, Ciawi – Bogor Learning & Innovation Center Building R.A 103 - 104 PMLI, Ciawi - Bogor

Agenda Agenda	1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2023; 3. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024; 4. Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024. 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for 2023 Fiscal Year; 2. Determination of the Use of the Company's Net Income for 2023 Fiscal Year; 3. Determination of Tantiem for 2023 Fiscal Year and Determination of Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 Fiscal Year; 4. Approval of the Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2024 Fiscal Year.
Kehadiran Attendance	1. Pemegang Saham: a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): i) Wakil Direktur Utama : Hambra ii) Direktur Keuangan : Mega Satria b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: i) Direktur Utama : Natal Iman Ginting 2. Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal: a. Komisaris Utama : Darwanto b. Komisaris : Arman Depari c. Komisaris : Ahmad Perwira Mulia Tarigan d. Komisaris : Thanon Aria Dewangga e. Komisaris : Nicodemus Sitanggang f. Komisaris Independen : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan* *) Tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Arman Depari selaku Komisaris 3. Direksi PT Pelindo Multi Terminal: a. Direktur Utama : Ary Henryanto b. Direktur Strategi dan Komersial : Rizki Kurniawan c. Direktur Operasi : Arif Rusman Yulianto d. Direktur Teknik : Yarham Harid e. Direktur Sumber Daya Manusia : Edi Priyanto f. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Yoni Setiawan 4. Pihak Independen: PMT bukan merupakan perusahaan terbuka, tidak menunjuk pihak independen untuk melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi pada RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 ini. 1. Shareholders a. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) i) Vice President : Hambra ii) Director of Finance : Mega Satria b. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi i) President Director : Natal Iman Ginting 2. Board of Commissioner PT Pelindo Multi Terminal a. President Commissioner : Darwanto b. Commissioner : Arman Depari c. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan d. Commissioner : Thanon Aria Dewangga e. Commissioner : Nicodemus Sitanggang f. Independent Commissioner : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan* *) Not present and giving power of attorney to Arman Depari as Commissioner 3. Board of DIrector PT Pelindo Multi Terminal a. President DIrector : Ary Henryanto b. Strategy and Commercial Director : Rizki Kurniawan c. Operations Director : Arief Rusman Yulianto d. Technical Director : Yarham Harid e. Human Capital Director : Edi Priyanto f. Finance and Risk Management Director : Yoni Setiawan 4. Independent Party PMT is not a publicly listed Company, it did not appoint an independent party to conduct vote counting and/or validation during the GMS on the Approval of Annual Report and the Ratification of Financial Statements for 2023 Fiscal Year.

Keputusan RUPST Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Annual GMS Resolution on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2023 Fiscal Year

The GMS resolutions and their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2024 are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara 1:
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;

Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 (termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris) serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor: 00845/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan opini "Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua hal Yang Material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian:

Agenda 1:
Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for 2023 Fiscal Year;

Resolution:
To approve the Annual Report for 2023 Fiscal Year (includes Board of Commissioners' Supervisory Report) and ratify the Financial Statements for Fiscal Year ended December 31, 2023, as audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro and Surja in accordance with its report No. 00845/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2024 dated April 25, 2024 with "unqualified" opinion, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during the 2023 Fiscal Year provided that such actions do not constitute criminal acts or do not violate applicable legal provisions and procedures and are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements, with the following points:
1. Consolidated Statement of Financial Position:

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Uraian Description	**Tahun 2023** Tahun 2023	**Tahun 2022** Tahun 2022
Aset Lancar Current Assets	Rp2.866.229.117.655	Rp2.937.695.948.964
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	Rp1.432.730.210.416	Rp1.426.119.405.815
Total Aset Total Assets	**Rp4.298.959.328.071**	**Rp4.363.815.354.779**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	Rp1.544.011.359.321	Rp1.995.331.297.730
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	Rp367.211.136.206	Rp411.672.346.354
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**Rp1.911.222.495.527**	**Rp2.407.003.644.084**
Ekuitas Equity	Rp2.387.736.832.543	Rp1.956.811.710.695
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**Rp4.298.959.328.070**	**Rp4.363.815.354.779**

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian:
2. Consolidated Statement of Comprehensive Income

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Uraian Description	Tahun 2023 Tahun 2023	Tahun 2022 Tahun 2022
Pendapatan Revenue	Rp5.026.329.538.896	Rp4.062.735.282.340
Beban Usaha Operating Expenses	Rp(4.249.980.002.892)	Rp(3.445.732 412 015)
Pendapatan (beban) Operasi Lainnya – neto Other Operating Income – netto	Rp5 014 283 589	Rp7 817 911 123
Laba Usaha Income from Operations	Rp781 363 819 593	Rp624 820 781 448
Pendapatan Keuangan Financial Income	Rp92 324 957 625	Rp53.100.563.082
Beban Keuangan Financial Expense	Rp(48.457.052.874)	Rp(59.346.324.873)
Laba Sebelum Pajak Final & Pajak Penghasilan Badan Profit Before Final Tax and Goods Income Tax	Rp825.231.724.344	Rp618.575.019.657
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	Rp(16.850.439.308)	Rp(10.775.492.057)
	Rp808.381.285.036	Rp607.799.527.600
	Rp(202.792.946.166)	Rp(179.269.688.585)
	Rp13.011.927.987	Rp32.823.073.289
Laba Periode Berjalan Income for the Period	Rp618.600.266.858	Rp461.352.912.305

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Persetujuan pemegang saham atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 telah dilembagakan dalam dokumen risalah RUPS Tahunan.
Follow-up on the Resolution:
Shareholders' approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements for 2022 Fiscal Year has been institutionalized in the minutes document of Annual GMS.

Agenda Mata Acara 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2023;

Keputusan Rapat:
Penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 sebesar Rp269.754.677.629 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) atau sebesar 129,75% (Seratus Dua Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Lima Persen) sebagai dividen;
2. Sebesar Rp 11.138.829.208 (Sebelas miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan Rupiah) atau sebesar 5,38% (Lima koma tiga delapan persen) dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perusahaan sebagai cadangan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Perusahaan telah membayar lunas dividen untuk hasil usaha tahun 2024, yakni pada tanggal 30 Juni 2025.

Agenda 2:
Determination of the Use of the Company's Net Income for 2023 Fiscal Year;

Resolution:
Determination of the use of net income after tax attributable to owners of parent entity for 2024 Fiscal Year amounting to Rp269,754,677,629 (Two Hundred Sixty Nine Billion Seven Hundred Fifty Four Million Six Hundred Seventy Seven Thousand Six Hundred Twenty Nine Rupiah) with the following arrangements:
1. Rp350,000,000,000 (three hundred fifty billion rupiah) or 129.75% (One Hundred Twenty Nine point Seventy Five Percent) as dividends;
2. Rp11,138,829,208 (Eleven billion one hundred thirty eight million eight hundred twenty nine thousand two hundred eight Rupiah) or 5.38% (Five point three eight percent) of the Net Income Attributable to Owners of the Company's Parent Entity as reserves.

Follow-up on the Resolution:
The Company has paid dividends in full for 2024, operating results on June 30, 2025.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda, Resolutions, and Follow Up on Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara 3:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2024;

Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2023, serta remunerasi (termasuk fasilitas dan tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 ditetapkan dalam keputusan tersendiri/secara terpisah.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal.

Agenda 3:
Determination of Tantiem for 2023 Fiscal Year and Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners for 2024;

Resolution:
Approved the provision of bonuses/performance incentives for Board of Directors and Board of Commissioners for 2023 fiscal year, and the remuneration (including facilities and allowances) for Board of Directors and Board of Commissioners for 2024, to be determined in a separate resolution.

Follow-up on the Resolution:
The remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 fiscal year was determined through Shareholder Circular Resolution No. SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 dated September 30, 2024, concerning the Determination of Adjustments to the Amount of Income for 2024 and the Provision of Bonuses for 2023 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal.

Agenda Mata Acara 4:
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024.

Keputusan Rapat:
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 adalah KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja – dan diberlakukan pula terhadap Anak Perusahaan, di mana Perusahaan adalah Pemegang Saham mayoritas dan/atau pengendali.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Perusahaan telah menunjuk KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 melalui surat penunjukan Surat No. KP.20.01/26/11/2/PGDN/SDMU/PLMT-24.

Agenda 4:
Approval of the Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's 2024 Financial Statements.

Resolution:
To approve the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for 2024 Fiscal Year, namely KAP Purwanto, Sungkoro and Surja - and also applies to the Company's subsidiaries, where the Company is the Major and/or Controlling Shareholder.

Follow-up on the Resolution:
The Company has appointed KAP Purwanto, Sungkoro and Surja to audit the Financial Statements for 2024 Fiscal Year through appointment letter No. KP.20.01/26/11/2/PGDN/SDMU/PLMT-24.

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Tanggal 9 Januari 2024

Pemegang Saham melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal No. KP.10.05/9/1/4/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/9/1/2/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Heri Purnomo selaku Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: KP.03/24/2/3/RKTK/UTMA/PLND-23 dan SK.03/24/2/6/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisars PT Pelindo Multi Terminal, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. Keputusan ini mulai berlaku sejak 9 Januari 2024.

Circular Resolution of Shareholders

Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Dismissal of Members of Board of Commissioners dated January 9, 2024

Shareholders through Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.10.05/9/1/4/RKTK/ UTMA/PLND-24 and No. SK.03/9/1/2/HKP/DRU/PSD-24 dated January 9, 2024 concerning the Dismissal of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal decided to honorably dismiss Heri Purnomo as a Member of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal who was appointed based on the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders Number: KP.03/24/2/3/RKTK/UTMA/PLND23 and SK.03/24/2/6/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal, with gratitude for all contributions of energy and thoughts while holding the position. This resolution shall come into effect on January 9, 2024.

Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal adalah sebagai berikut:
1. Komisaris Utama: Darwanto
2. Komisaris: Arman Depari
3. Komisaris: Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Komisaris: Thanon Aria Dewangga
5. Komisaris Independen: Herbert Timbo Parluhutan Siahaan

With this Resolution, the composition of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal is as follows:
1. President Commissioner : Darwanto
2. Commissioner : Arman Depari
3. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Commissioner : Thanon Aria Dewangga
5. Independent Commissioner : Herbet Timbo Parluhutan Siahaan

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Tanggal 1 Maret 2024

Pemegang Saham melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal No. KP.10.05/1/3/10/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/1/3/10/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan untuk Mengangkat Nicodemus Sitanggang sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal. Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2024.

Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal adalah sebagai berikut:
1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Darwanto
2. Komisaris: Arman Depari
3. Komisaris: Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Komisaris: Thanon Aria Dewangga
5. Komisaris Independen: Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
6. Komisaris: Nicodemus Sitanggang

Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Appointment of Members of Board of Commissioners dated March 1, 2024

Shareholders through the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.10.05/1/3/10/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/1/3/10/HKP/DRU/PSD-24 dated March 1, 2024 concerning the Appointment of Members of Board of Commissioners, decided to Appoint Nicodemus Sitanggang as Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal. This Resolution shall come into effect on March 1, 2024.

With this Resolution, the composition of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal is as follows:
1. President Commissioner and Independent Commissioner : Darwanto
2. Commissioner : Arman Depari
3. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Commissioner : Thanon Aria Dewangga
5. Independent Commissioner : Herbet Timbo Parluhutan Siahaan
6. Commissioner : Nicodemus Sitanggang

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Tanggal 1 Maret 2024

Pemegang Saham melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal No. KP.10.05/1 /3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK. 03/1 /3/9/H KP /DRU/PSD-24 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Multi Terminal, memutuskan untuk:
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Pelindo Multi Terminal:
   a. Yon Irawan: Direktur Utama
   b. Zuhri Iryansyah: Direktur Teknik

   Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Sa ham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Multi Terminal, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Pelindo Multi Terminal:
   a. Ary Henryanto: Direktur Utama
   b. Yarham Harid: Direktur Teknik

Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors dated March 1, 2024

Shareholders through the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK. 03/1/3/9/H KP /DRU/PSD24 dated March 1, 2024 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal, decided to:
1. Honorably dismiss the names below as members of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal:
   a. President Director : Yon Irawan
   b. Technical Director : Zuhri Iryansyah

Who were each appointed based on the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders No: KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal, with gratitude for all their contributions of energy and thoughts while holding the position.
2. Appoint the names below as members of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal:
   a. Ary Henryanto : President Director
   b. Yarham Harid : Technical Director

Keputusan ini berlaku sejak 1 Maret 2024. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Anggota Direksi PT Pelindo Multi Terminal adalah sebagai berikut:

a. Direktur Utama: Ary Henryanto
b. Direktur Strategi dan Komersial: Rizki Kurniawan
c. Direktur Operasi: Arif Rusman Yulianto
d. Direktur Teknik: Yarham Harid
e. Direktur SDM: Edi Priyanto
f. Direktur Keuangan dan Manajamen Risiko: Yoni Setiawan

This Resolution is effective since March 1, 2024. With this Resolution, the composition of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal is as follows:

a. President Director : Ary Henryanto
b. Strategy and Commercial Director : Rizki Kurniawan
c. Operations Director : Arif Rusman Yulianto :
d. Technical Director : Yarham Harid
e. Human Resource Director: Edi Priyanto
f. Finance and Risk Management Director: Yoni Setiawan

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Tanggal 26 November 2024

Pemegang Saham melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal No. SK.03/26/11/4/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/26/11/3/HKPD/UTMA/PSD-24 tanggal 26 November 2024 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Nicodemus Sitanggang sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KP. 1 0.05/1 /3/1 0/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/1 /3/1 0/H KP/D RU/PSD-24tanggal 1Maret 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal, dengan ucapan terima kasih atas segala sum bangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. Keputusan ini berlaku sejak 26 November 2024. Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Darwanto
2. Komisaris: Arman Depari
3. Komisaris: Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Komisaris: Thanon Aria Dewangga
5. Komisaris Independen: Herbert Timbo Parluhutan Siahaan

Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Dismissal of Members of Board of Commissioners dated November 26, 2024

Shareholders through the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal No. SK.03/26/11/4/RKTK/ UTMA/PLND-24 and No. SK.03/26/11/3/HKPD/UTMA/PSD24 dated November 26, 2024 concerning Dismissal of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal, decided to honorably dismiss Nicodemus Sitanggang as Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal who was appointed based on the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders No. KP. 10.05/1/3/10/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/1/3/10/HKP/DRU/PSD-24 dated March 1, 2024 Concerning the Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal, with gratitude for all contributions of energy and thoughts during tenure. This decree is effective from November 26, 2024. With this Decree, the composition Board of Commissioners of PT Pelindo MultiTerminal is as follows:

1. President Commissioner and Independent Commissioner : Darwanto
2. Commissioner : Arman Depari
3. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Commissioner : Thanon Aria Dewangga
5. Independent Commissioner : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Tanggal 9 Desember 2024

Pemegang Saham melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/9/12/2/HKPD/ UTMA/PSD-24 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan untuk mengangkat Aan Rusdianto sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal. Keputusan ini berlaku sejak 9 Desember 2024.

Dengan adanya keputusan ini, maka susunan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Darwanto
2. Komisaris: Arman Depari
3. Komisaris: Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Komisaris: Thanon Aria Dewangga
5. Komisaris Independen: Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
6. Komisaris Independen: Aan Rusdianto

Circular Resolution of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal Regarding Appointment of Members of Board of Commissioners dated December 9, 2024

Shareholders through the Circular Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/9/12/2/HKPD/UTMA/PSD-24 dated December 9, 2024 concerning the Appointment of Members of Board of Commissioners, decided to appoint Aan Rusdianto as Independent Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal.

This Resolution is effective since December 9, 2024. With this Resolution, the composition of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal is as follows:

1. President Commissioner and Independent Commissioner : Darwanto
2. Commissioner : Arman Depari
3. Commissioner : Ahmad Perwira Mulia Tarigan
4. Commissioner : Thanon Aria Dewangga
5. Independent Commissioner : Herbet Timbo Parluhutan Siahaan
6. Independent Commissioner : Aan Rusdianto

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki peran dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan jalannya kegiatan usaha Perusahaan, serta memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, pelaksanaan strategi, serta pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris turut memberikan pandangan dan rekomendasi strategis guna mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.

Sebagai upaya memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan hubungan kerja dengan Direksi berjalan secara efektif, Dewan Komisaris berpedoman pada *Board Manual* yang mengatur mekanisme kerja serta tata hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan dimungkinkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Penetapan maupun pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan disertai alasan yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun masa jabatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatan berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Board of Commissioners is a corporate organ that plays a role in exercising supervisory functions over the management and conduct of the Company's business activities, as well as providing guidance and advice to Board of Directors. The performance of these functions is governed by the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, including Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

In carrying out its duties, Board of Commissioners supervises management policies, implementation of strategies, and management of the Company as carried out by Board of Directors. Furthermore, Board of Commissioners provides strategic insights and recommendations to support the achievement of the Company's objectives and performance.

To ensure that its supervisory functions and working relationship with Board of Directors operate effectively, Board of Commissioners adheres to the Board Manual, which sets out the working mechanisms and framework governing the relationship between Board of Commissioners and Board of Directors. In the performance of its duties and decision-making, Board of Commissioners consistently upholds the Good Corporate Governance principles as the foundation for carrying out its supervisory functions in a professional, independent and responsible manner.

BOARD OF COMMISSIONERS' TENURE

Members of Board of Commissioners are appointed for a term of 5 (five) years in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and may be reappointed for a further 1 (one) term. The appointment and reappointment of members of Board of Commissioners are made by resolution of the GMS, taking into account the Company's needs and interests.

Furthermore, members of Board of Commissioners may also be dismissed at any time by resolution of the GMS with clear grounds in accordance with applicable regulations. The tenure of a member of Board of Commissioners shall be deemed to have ended if any of the following conditions arise:

1. Passed away;
2. The tenure ends;
3. Dismissed based on GMS; and/or
4. No longer fulfill the requirements as a member of Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan Umum

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah individu yang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, seseorang tidak dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah mengalami kondisi sebagai berikut:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

Persyaratan Lainnya

Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Kebijakan

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) anggota atau lebih;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
5. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan pengangkatannya.

CRITERIA AND/OR REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

General Requirements

A person who may be appointed as a member of Board of Commissioners is an individual who possesses the legal capacity to perform legal acts in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. However, a person may not be appointed as a member of Board of Commissioners if, within a period of 5 (five) years prior to their appointment, they have been in any of the following circumstances:

1. Been declared bankrupt;
2. Served as a member of Board of Directors, Board of Commissioners, or Supervisory Board who was found guilty of causing a Company or Public Company to be declared bankrupt; or
3. Been convicted of a criminal offense that caused financial loss to the state and/or was related to the financial sector.

Compliance with these requirements must be proven with a declaration letter signed by the prospective member of Board of Commissioners, and the letter shall be retained by the Company.

Other Requirements

In addition to meeting the general requirements, the appointment of Board of Commissioners' members must also take into account the requirements stipulated in the prevailing laws and regulations.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

Policy

1. Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more;
2. In the event that Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one of the members of Board of Commissioners is appointed as President Commissioner;
3. The appointment of Board of Commissioners' members does not coincide with the appointment of Board of Directors' members;
4. Members of Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS;
5. In the composition of Board of Commissioners, at least 20% (twenty percent) members of Board of Commissioners are independent whose appointment is determined.

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

The composition and structure of Board of Commissioners as of December 31, 2025, are as follows:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025
Composition and Structure of Board of Commissioners as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Service	Periode Jabatan Service Periode
Darwanto	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 dan No. 156/HKO/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. KP.03/1/10/4/MTAK/UTMA/PLND-21 and No. 156/HKO/D0003/2021 dated October 1, 2021	1 Oktober 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026. October 1, 2021 until the GMS to be held in 2026.	Ke-1 1st
Arman Depari	Komisaris Commissioner			
Ahmad Perwira Mulia Tarigan	Komisaris Commissioner			
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Komisaris Independen Independent Commissioner			
Aan Rusdianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/9/12/2/HKPD/UTMA/PSD-24 tanggal 9 Desember 2024 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS No. SK.03/9/12/2/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/9/12/2/HKPD/UTMA/PSD-24 dated December 9, 2024.	9 Desember 2024 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029. December 9, 2024 until the GMS to be held in 2029.	

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Profiles of all members of Board of Commissioners can be seen in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Board Manual: Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris

Perusahaan telah menetapkan *Board Manual* atau Pedoman Tata Laksana Kerja sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta menjalankan hubungan kerja dengan Direksi dan organ perusahaan lainnya. Pedoman tersebut diberlakukan melalui Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/1/12/1/HLTK/DIRU/PLMT-21 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) pada PT Pelindo Multi Terminal.

Board Manual disusun untuk memberikan panduan kerja yang terstruktur dan sistematis sehingga pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam menciptakan hubungan kerja yang profesional dan seimbang antara Dewan Komisaris dan Direksi. Secara umum, *Board Manual* memuat berbagai ketentuan penting yang berkaitan dengan fungsi, tugas, kewenangan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Komisaris.

Selain itu, pedoman tersebut juga mengatur aspek etika jabatan, mekanisme pengambilan keputusan, program pengenalan dan pengembangan kompetensi, peran organ

Board Manual: Board of Commissioners Work Procedure Guidelines

The Company has established a Board Manual or Guidelines on Working Procedures to serve as a reference for Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions and managing working relationships with Board of Directors and other corporate organs. These guidelines were enacted through Board of Directors Regulation No. SK.01.01/1/12/1/HLTK/DIRU/PLMT-21 dated December 1, 2021, concerning Guidelines for Working Procedures Governing Relations between Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) at PT Pelindo Multi Terminal.

This Board Manual has been drawn up to provide structured and systematic operational guidance so that the Board of Commissioners can carry out its duties effectively and in line with the principles of Good Corporate Governance. This document also serves as the foundation for establishing a professional and balanced working relationship between Board of Commissioners and the Board of Directors. In general, Board Manual contains various important provisions relating to the functions, duties, powers, rights, obligations and responsibilities of Board of Commissioners.

Furthermore, these guidelines also cover aspects of professional ethics, decision-making mechanisms, induction and competency development programmes, roles of the Board

pendukung Dewan Komisaris, sistem penilaian kinerja, tata hubungan kerja dengan Direksi, hingga pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari penguatan mekanisme governansi di lingkungan Perusahaan.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Board Manual yang dimiliki Perusahaan telah mengatur secara jelas mengenai peran pengawasan atas kebijakan dan proses pengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, baik yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Selain fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi guna memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan dan tujuan usaha yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas tersebut mencakup pengawasan terhadap implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Dewan Komisaris berperan dalam memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara akuntabel, *prudent*, dan selaras dengan tujuan strategis Perusahaan.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Wewenang yang dimiliki Dewan Komisaris untuk menunjang tugasnya antara lain meliputi:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen Perusahaan, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
8. Membentuk Komite Audit, dan jika dianggap perlu, membentuk komite-komite lain dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan yang merupakan kewenangan dan kewajiban Direksi dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

of Commissioners' support organs, performance appraisal systems, working relationships with Board of Directors, and the conduct of meetings of Board of Commissioners and Board of Directors as part of strengthening governance mechanisms within the Company.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

The Company's Board Manual clearly sets out the supervisory role regarding the Company's policies and management processes carried out by Board of Directors, both in relation to business activities and the overall management of the Company. In addition to its supervisory function, Board of Commissioners also provides guidance and advice to Board of Directors to ensure that the Company is managed in accordance with its established business interests and objectives.

The performance of these duties includes supervising the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association, Resolutions of the GMS, and compliance with applicable laws and regulations. Thus, Board of Commissioners plays a role in ensuring that all activities relating to the management of the Company are carried out in an accountable and prudent manner, and in line with the Company's strategic objectives.

BOARD OF COMMISSIONERS' AUTHORITIES

The authorities held by the Board of Commissioners to support its duties include, amongst others:

1. Examine the Company's books, letters, and documents, check cash for verification purposes and others, check securities and assets of the Company;
2. Entering the grounds, buildings, and offices used by the Company;
3. Request explanations from Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting Board of Directors and/or other officials under Board of Directors under the Board of Directors' consent to attend Board of Commissioners meetings;
6. Appoint the Secretary of Board of Commissioners;
7. Temporarily suspend members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
8. Establish an Audit Committee, and if deemed necessary, establish other committees with due regard to the Company's capabilities;
9. Utilize experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Perform actions that constitute the authority and obligation of Board of Directors in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the Articles of Association;

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sejalan dengan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewajiban, yaitu:
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang ditetapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan atau kejadian penting lain yang perlu diketahui oleh RUPS;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit bila dipandang perlu dan atas persetujuan RUPS;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; dan
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai *Board Manual* adalah:
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed; and
12. Carry out other supervisory authority as long as does not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

In line with its responsibilities, Board of Commissioners has the following duties:
1. Provide advice to Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Examining, reviewing and signing the RJPP and RKAP established by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association;
3. Provide opinions and suggestions to the GMS on the RJPP and RKAP regarding the reasons for Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP;
4. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
5. Report immediately to the GMS if there are symptoms of the Company performance declining or other important events that need to be known by the GMS;
6. Examining and reviewing periodic reports and annual reports prepared by Board of Directors and signing the annual report;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested;
8. Prepare the annual work program and include it in the RKAP;
9. Establish an Audit Committee if deemed necessary and with the GMS approval;
10. Propose Public Accountant to the GMS;
11. Making Minutes of Board of Commissioners Meetings and keeping copies thereof;
12. Reporting to the Company regarding his/her and/or his/her family's share ownership in the Company and other companies;
13. Submit a report on supervisory duties that have been carried out during the past fiscal year to the GMS; and
14. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as do not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

BOARD OF COMMISSIONERS' RESPONSIBILITIES

Board of Commissioners' responsibilities according to the Board Manual are:
1. In carrying out its duties, Board of Commissioners is responsible to the GMS;
2. In performing their duties, each member of Board of Commissioners must comply with the Company's Articles of Association, laws and regulations, as well as

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas;
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness;
3. Each member of Board of Commissioners shall act in good faith, prudently, and responsibly in carrying out his/her supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
4. Each member of Board of Commissioners shall be personally liable for the Company's losses if he/she is guilty or negligent in performing his/her duties as referred to above;
5. In the event that Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of Board of Commissioners, the responsibility as referred to above shall apply jointly and severally to each member of Board of Commissioners.

HAK DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berhak memperoleh honorarium beserta tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan. Penetapan jenis maupun besaran remunerasi tersebut dilakukan melalui keputusan RUPS dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain honorarium dan fasilitas penunjang jabatan, anggota Dewan Komisaris juga dapat memperoleh santunan purna jabatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

BOARD OF COMMISSIONERS' RIGHTS

Board of Commissioners members are entitled to receive honoraria, along with allowances and other benefits, in accordance with the provisions laid down by the Company. The type and amount of such remuneration are determined by a resolution of the GMS, whilst taking into account the provisions of applicable laws and regulations. In addition to honoraria and benefits related to their positions, members of Board of Commissioners may also receive post-retirement benefits in accordance with established policy.

PEMBAGIAN TUGAS ANTAR DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menetapkan pembagian tugas di antara para anggotanya sesuai dengan bidang dan ruang lingkup pengawasan masing-masing. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KP 03 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal.

Adapun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris berdasarkan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES AMONG MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners has established a division of duties among its members in accordance with their respective areas and scopes of supervision. This arrangement is set forth in Board of Commissioners Resolution No. KP 03 of 2025, dated September 26, 2025, regarding Division of Duties of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal.

The division of duties among members of Board of Commissioners based on this decree is as follows:

Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	
Melakukan pengawasan pada bidang Operasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, Permasalahan Strategis, dan Hubungan Antar Lembaga, serta bertugas sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.	Performing supervision on the Operations, Risk Management, Corporate Governance, Strategic Issues and Inter-institutional Relations, and serving as Chairman of Risk Monitoring Committee.
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	
Melakukan pengawasan pada bidang Strategi dan Komersial, bidang Pengadaan, serta bertugas sebagai Wakil Ketua Komite Audit.	Performing supervision on the Strategy and Commercial, Procurement, and serving as Vice Chairman of Audit Committee.
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	
Melakukan pengawasan pada bidang Sumber Daya Manusia dan Teknik, serta bertugas sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.	Performing supervision on the Human Capital and Technical, and serving as Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee.

Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Commissioner)	
Melakukan pengawasan pada bidang Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Perusahaan serta bertugas sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.	Performing supervision on the Human Capital and Corporate Secretary functions, and serving as Chairman of Nomination and Remuneration Committee.
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	
Melakukan pengawasan pada bidang Keuangan dan Satuan Pengawasan Internal, serta bertugas sebagai Ketua Komite Audit.	Performing supervision on the Finance and Internal Audit functions, and serving as Chairman of Audit Committee.

RINCIAN TUGAS KOMISARIS UTAMA

Komisaris Utama memegang peranan strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris agar berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan Perusahaan. Selain itu, Komisaris Utama juga berperan dalam menjaga efektivitas proses pengambilan keputusan di lingkup Dewan Komisaris serta mendorong terciptanya koordinasi yang baik antaranggota. Adapun tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memimpin Dewan Komisaris, termasuk mengatur agenda, memimpin rapat Dewan Komisaris secara berkala, serta memastikan rapat berjalan tertib, produktif, dan menghasilkan keputusan strategis yang sesuai dengan tujuan Perusahaan.
2. Mengoordinasikan tugas dan pembagian peran antaranggota Dewan Komisaris, agar pengawasan terhadap aspek strategis, keuangan, operasional, risiko, kepatuhan, dan keberlanjutan dapat dilakukan secara terarah dan menyeluruh.
3. Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan sesuai prinsip GCG, termasuk mengawal penerapan nilai-nilai etika, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan di lingkungan Perusahaan.
4. Menjembatani komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, guna membangun sinergi yang konstruktif tanpa mengurangi independensi masing-masing organ.
5. Mengarahkan dan mengawasi kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko, serta memastikan bahwa seluruh rekomendasinya ditindaklanjuti secara tepat.
6. Memberikan evaluasi dan masukan strategis kepada Direksi, baik secara langsung maupun melalui mekanisme rapat bersama, dalam hal perencanaan bisnis, realisasi kinerja, mitigasi risiko, serta kebijakan strategis perusahaan.
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan pengawasan tahunan Dewan Komisaris, termasuk melakukan *review* terhadap implementasi kebijakan strategis Perusahaan dan pelaksanaan GCG oleh Direksi.
8. Menjalin komunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan utama, terutama dalam menyampaikan pandangan Dewan Komisaris atas prospek usaha dan keberlangsungan Perusahaan di masa depan.

DETAILS OF PRESIDENT COMMISSIONER'S DUTIES

President Commissioner plays a strategic role in coordinating the supervisory functions of Board of Commissioners to ensure they are carried out effectively and in line with the Company's objectives. Furthermore, President Commissioner is also responsible for ensuring the effectiveness of decision-making processes within the Board of Commissioners and for fostering good coordination amongst its members. The duties and responsibilities of President Commissioner in the implementation of corporate governance include the following:

1. Leading the Board of Commissioners, including organizing agendas, chairing regular Board meetings, and ensuring that meetings are orderly, productive, and result in strategic decisions aligned with the Company's objectives.
2. Coordinating the tasks and division of roles among the members of Board of Commissioners to ensure comprehensive and focused supervision over strategic, financial, operational, risk, compliance, and sustainability aspects.
3. Ensuring that the supervisory function is implemented in accordance with GCG (Good Corporate Governance) principles, including upholding ethical values, integrity, transparency, accountability, and sustainability within the Company.
4. Acting as a liaison between Board of Commissioners and Board of Directors to foster constructive synergy without compromising the independence of either organ.
5. Directing and supervising the performance of committees under Board of Commissioners, including Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee, as well as ensuring that all their recommendations are properly followed up.
6. Providing evaluations and strategic input to Board of Directors, either directly or through joint meetings, regarding business planning, performance realization, risk mitigation, and strategic Company policies.
7. Coordinating the preparation of annual supervisory report of Board of Commissioners, including reviewing the implementation of strategic policies and the application of GCG by Board of Directors.
8. Maintaining communication with shareholders and key stakeholders, particularly in conveying the Board of Commissioners' views on business prospects and the future sustainability of the Company.

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas sejumlah keputusan strategis yang diambil oleh Direksi dan berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha, arah kebijakan, maupun struktur Perusahaan. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* fungsi antara Direksi sebagai organ pengelola dan Dewan Komisaris sebagai organ pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta kebijakan internal Perusahaan.

Pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis telah melalui proses kajian yang memadai dan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang. Adapun beberapa keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta revisinya, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.
2. Rencana pengeluaran modal (*capital expenditure*) untuk proyek strategis atau investasi baru yang melebihi batas kewenangan Direksi, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan internal atau persetujuan RUPS.
3. Kerja sama strategis, akuisisi, pelepasan aset, dan investasi jangka panjang, baik berupa pembentukan anak perusahaan, *joint venture*, maupun penyertaan modal di entitas lain.
4. Pengalihan atau pembebanan aset tetap Perusahaan, terutama aset yang bernilai material dan/atau bersifat strategis.
5. Penetapan struktur organisasi pada level tertentu, termasuk pengangkatan atau pemberhentian pejabat satu level di bawah Direksi, bila diatur demikian dalam kebijakan internal.
6. Usulan perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan modal, susunan organ Perusahaan, dan maksud serta tujuan Perusahaan, sebelum disampaikan ke RUPS.
7. Rencana pinjaman jangka panjang, penerbitan surat utang, atau penjaminan utang yang melebihi batasan tertentu yang ditetapkan oleh RUPS atau kebijakan internal Perusahaan.
8. Penetapan dan evaluasi kebijakan remunerasi dan tunjangan bagi Direksi dan organ pendukung Dewan Komisaris, dalam rangka mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
9. Penerapan kebijakan tata kelola Perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal, termasuk pedoman etika dan integritas, bila berdampak pada struktur dan budaya organisasi.
10. Keputusan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS disyaratkan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

TYPES OF DECISIONS THAT REQUIRE THE APPROVAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners has the authority to approve a number of strategic decisions taken by the Board of Directors which may affect the Company's business continuity, policy direction or structure. This authority forms part of the checks and balances mechanism between Board of Directors, as the managing organ, and Board of Commissioners, as the supervisory organ, in accordance with the provisions of legislation, Articles of Association and the Company's internal policies.

Approval by the Board of Commissioners is granted to ensure that every strategic decision has undergone an adequate review process and takes into account the Company's long-term interests. Some of the decisions made by the Board of Directors that require prior approval from Board of Commissioners include:

1. Determination of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and its revisions, before being submitted to Shareholders for approval.
2. Capital expenditure plans for strategic projects or new investments that exceed the authority of Board of Directors, as stipulated in internal provisions or approval from the GMS.
3. Strategic cooperation, acquisitions, asset disposals, and long-term investments, either in the form of establishing subsidiaries, joint ventures, or equity participation in other entities.
4. Transfer or encumbrance of the Company's fixed assets, especially assets that have material value and/or are strategic.
5. Determination of organizational structure at a certain level, including the appointment or dismissal of officials one level below the Board of Directors, if regulated as such in internal policies.
6. Proposals for changes to the articles of association, including changes to capital, composition of the Company's organs, and the Company's intent and purpose, before being submitted to the GMS.
7. Plans for long-term loans, issuance of debt securities, or debt guarantees that exceed certain limits set by the GMS or internal Company policies.
8. Determination and evaluation of remuneration and allowance policies for Board of Directors and supporting organs of Board of Commissioners, in order to support the principles of transparency and accountability.
9. Implementation of corporate governance policies, risk management, and internal control, including ethical and integrity guidelines, if they have an impact on the structure and culture of organization.
10. Other decisions based on laws and regulations, Articles of Association, or resolutions of the GMS are required to obtain approval from Board of Commissioners.

Persetujuan terhadap keputusan-keputusan strategis tersebut diberikan oleh Dewan Komisaris melalui forum rapat yang dilaksanakan secara berkala maupun melalui mekanisme keputusan sirkuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan agar setiap keputusan penting yang diambil Direksi memperoleh pertimbangan dan pengawasan yang memadai.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan koordinasi. Pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui sarana komunikasi elektronik seperti telekonferensi atau video konferensi, sepanjang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling berinteraksi, melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam pembahasan rapat. Adapun ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris, atau apabila terdapat lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
2. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. Peserta rapat yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Approval of these strategic decisions is granted by the Board of Commissioners through meetings held at regular intervals or via a circular resolution mechanism, in accordance with the Company's applicable regulations. This process forms part of the exercise of supervisory functions to ensure that every important decision taken by the Board of Directors is subject to adequate consideration and supervision.

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING

Policy

In accordance with the provisions set out in the Board Manual, Board of Commissioners is required to hold regular meetings at least 1 (one) time per month as part of the performance of its supervisory and coordination functions. Meetings can be held in person or via electronic means of communication such as teleconferencing or videoconferencing, provided that all participants are able to interact with one another, see and hear each other, and participate directly in the meeting's discussions. The provisions regarding the conduct of Board of Commissioners' meetings are as follows:

1. All Board of Commissioners meetings are chaired by President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unavailable, the meeting shall be chaired by another member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner. If President Commissioner does not make such an appointment, then the member of Board of Commissioners who has served the longest shall act as the chair of meeting. If there is more than one member with the same length of service, then the oldest by age shall act as the chair of meeting.
2. Board of Commissioners meeting are valid and entitled to make binding decisions if attended or represented by more than half (1/2) of the total members of Board of Commissioners. All decisions in Board of Commissioners' meetings shall be made based on deliberation to reach consensus. If consensus cannot be reached through deliberation, decisions shall be made by a simple majority vote. Any meeting participant not present during the decision-making process must be contacted to immediately rejoin the meeting. If they cannot be reached, they are deemed to have approved the decision made in the meeting.
3. Each member of Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for the member of Board of Commissioners he/she represents. If the number of votes for and against is equal, the meeting decision shall be the same as the meeting chairman's opinion, with due observance of the provisions regarding accountability as stipulated in the Company's Articles of Association, except regarding the person, the meeting decision is made by closed election. A blank vote (abstain) shall be deemed to approve the resolutions of the meeting. Invalid votes are considered to be absent and are not counted in determining the number of votes cast in the meeting.

4. Dalam hal terdapat usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu alternatif memperoleh suara lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
5. Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat. Risalah rapat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
6. Khusus terhadap agenda lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut.

Sementara itu, tentang perbedaan pendapat diatur sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.
2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat (sesuai dengan konsep *fiduciary duties*).
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat di Tahun 2025

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan dan menghadiri berbagai rapat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Rapat yang diselenggarakan meliputi rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 21 kali, rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 12 kali, serta keikutsertaan dalam 2 (dua) kali RUPS Tahunan. Adapun informasi mengenai agenda dan risalah rapat, tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris, serta rekapitulasi kehadiran dalam rapat selama tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

4. In the event that there are more than 2 (two) alternative proposals and the voting results have not obtained one alternative with more than 1/2 of the total votes cast, then re-election will be held on the 2 (two) alternatives that received the most votes so that one of the alternatives received more than 1/2 of the total votes cast.
5. The meeting decisions are compiled in the meeting decision sheet as an integral part of the minutes of meeting. The minutes of meeting must be signed by the meeting chairman and all members of Board of Commissioners present at the meeting.
6. Specifically on other agendas, Board of Commissioners meetings are not entitled to make decisions unless all members of Board of Commissioners or their authorized representatives are present and agree to the addition to meeting agenda.

Meanwhile, Dissenting opinions are regulated as follows:

1. Dissenting opinions that occur must be recorded in the meeting minutes, and members of Board of Commissioners who hold a dissenting opinion must state the reasons for their disagreement with the decision;
2. Dissenting opinion does not give the member of Board of Commissioners concerned the right not to implement the meeting's decision. Although there are differences of opinion, all members of Board of Commissioners are still obliged to follow and implement the meeting decisions (in accordance with the concept of fiduciary duties);
3. Each member of Board of Commissioners shall be personally liable for the Company's losses if he/she is guilty or negligent in performing his/her duties for the interest and business of the Company.

Minutes of each Board of Commissioners meeting must be prepared. The minutes of meeting shall be signed by the Meeting Chairman and by all members of Board of Commissioners present at the meeting.

Frequency and Attendance Rate of Board of Commissioners in Meetings in 2025

Throughout 2025, Board of Commissioners actively conducted and attended various meetings as part of its supervisory function over the Company's management. The meetings held included 21 internal meetings of the Board of Commissioners, 12 joint meetings with Board of Directors, and participation in 2 (two) Annual General Shareholders' Meetings. Information regarding the meetings' agenda and minutes, attendance rates for each member of Board of Commissioners, and attendance recapitulation in meetings during 2025 is presented as follows:

Rapat Internal Dewan Komisaris

Board of Commissioners Internal Meeting

Risalah dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Minutes and Attendance at Board of Commissioners' Meetings

No	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Kamis, 23 Januari 2025 Thursday, January 23, 2025	16.00 s.d 17.00 4:00 PM to 5:00 PM	Pembahasan Persiapan RUPS RKAP 2025 PT Pelindo Multi Terminal. Discussion on preparations for the 2025 GMS RKAP of PT Pelindo Multi Terminal.
2	Kamis, 30 Januari 2025 Thursday, January 30, 2025	09.00 s.d 12.00 9:00 AM to 12:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d Desember 2024. Discussion on Performance until December 2024.
3	Kamis, 20 Februari 2025 Thursday, February 20, 2025	10.00 s.d 12.00 10:00 AM to 12:00 PM	Pembahasan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025 -2029. Discussion on PT Pelindo Multi Terminal's Long-Term Plan (RJP) for 2025–2029.
4	Senin, 24 Februari 2025 Monday, February 24, 2025	09.00 s.d 10.30 9:00 AM to 10:30 AM	Pembahasan Kinerja s.d Januari 2025. Discussion on Performance until January 2025.
5	Senin, 3 Maret 2025 Monday, March 3, 2025	10.00 s.d 13.00 10:00 AM to 1:00 PM	Pembahasan Hasil Audit PT Pelindo Multi Terminal Konsolidasian Tahun Buku 2024. Discussion on Audit Results of PT Pelindo Multi Terminal's Consolidated Financial Statements for 2024 Fiscal Year.
6	Senin, 10 Maret 2025 Monday, March 10, 2025	13.00 s.d 15.30 1:00 PM to 3:30 PM	1. Pembahasan usulan pengangkatan Organ Dewan Komisaris; 2. Pembahasan Tanggapan Kurang Lokasi *Branch* Belawan. 1. Discussion on the proposed appointment of members of Board of Commissioners; 2. Discussion on the response regarding the lack of space at the Belawan Branch.
7	Selasa, 18 Maret 2025 Tuesday, March 18, 2025	13.00 s.d 16.00 1:00 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Februari 2025. Discussion on PMT's performance until February 2025.
8	Selasa, 25 Maret 2025 Tuesday, March 25, 2025	13.00 s.d 15.00 1:00 PM to 3:00 PM	Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2024 PT Pelindo Multi Terminal (*Unaudited*). Discussion on PT Pelindo Multi Terminal's 2024 Management Report (Unaudited).
9	Selasa, 15 April 2025 Tuesday, April 15, 2025	13.30 s.d 15.30 1:20 PM to 3:30 PM	1. Pembahasan surat-surat Direksi PMT perihal: 2. Strategi Risiko dan Profil Risiko Korporat PMT Tahun 2025; 3. Laporan Hasil Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan; 4. Tanggapan somasi. 1. Discussion on PMT's Board of Directors' letters regarding: 2. PMT's Risk Strategy and Corporate Risk Profile for 2025; 3. Report on the Results of Anti-Bribery Compliance Function Review; 4. Response to the formal notice.
10	Selasa, 29 April 2025 Tuesday, April 29, 2025	13.30 s.d 16.00 1:30 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d Maret 2025. Discussion on Performance until March 2025.
11	Senin, 26 Mei 2025 Monday, May 26, 2025	14.00 s.d 17.00 2:00 PM to 5:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d April 2025. Discussion on Performance until April 2025.
12	Senin, 23 Juni 2025 Monday, June 23, 2025	14.00 s.d 17.00 2:00 PM to 5:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d Mei 2025. Discussion on Performance until May 2025.
13	Selasa, 8 Juli 2025 Tuesday, July 8, 2025	13.30 s.d 15.30 1:30 PM to 3:30 PM	1. Pembahasan surat Direktur Utama PMT perihal Laporan Hasil Audit (LHA) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024; 2. Pembahasan surat Direktur Utama PMT perihal Permohonan Persetujuan atas Mekanisme Pelaksanaan *Assessment* GCG Tahun Buku 2024; 3. Pembahasan surat Direktur Utama PMT perihal Laporan Strategi Risiko dan Penambahan Profil Risiko Baru Tahun 2025; 4. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT President Director's letter regarding the 2024 Audit Report (LHA) of PT Pelabuhan Tanjung Priok; 2. Discussion on PMT President Director's letter regarding Request for Approval of the GCG Assessment Mechanism for 2024 Fiscal Year; 3. Discussion on PMT President Director's letter regarding Risk Strategy Report and Addition of New Risk Profiles for 2025; 4. Other matters as may arise.
14	Senin, 28 Juli 2025 Monday, July 28, 2025	14.00 s.d 16.00 2:00 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d Juni 2025. Discussion on Performance until June 2025.

Risalah dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Minutes and Attendance at Board of Commissioners' Meetings

No	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
15	Senin, 4 Agustus 2025 Monday, August 4, 2025	13.00 s.d 15.00 1:00 PM to 3:00 PM	1. Pembahasan surat Direktur Utama PMT perihal Permohonan Persetujuan atas Usulan Revisi Rencana RKAP Investasi Tahun 2025; 2. Pembahasan surat Direktur Utama PMT perihal Penyesuaian Nama Jabatan Senior Vice President terkait Pemurnian Bisnis. 1. Discussion on PMT President Director's letter regarding Request for Approval of Proposed Revision of the 2025 RKAP Investment Plan; 2. Discussion on PMT President Director's letter regarding Adjustment of Senior Vice President Job Titles in Connection with Business Refinement.
16	Rabu, 27 Agustus 2025 Wednesday, August 27, 2025	14.00 s.d 16.00 2:00 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d Juli 2025. Discussion on Performance until July 2025.
17	Kamis, 25 September 2025 Thursday, September 25, 2025	14.00 s.d 16.00 2:00 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2025. Discussion on Performance until August 2025.
18	Senin, 27 Oktober 2025 Monday, October 27, 2025	14.00 s.d 16.00 2:00 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d September 2025. Discussion on Performance until September 2025.
19	Kamis, 6 November 2025 Thursday, November 6, 2025	13.00 s.d 15.00 1:00 PM to 3:00 PM	1. Pendapat dan Saran atas Laporan Manajemen Perusahaan s.d Triwulan III 2025; 2. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2026; 3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal. 1. Opinions and Recommendations on the Company's Management Report until Third Quarter of 2025; 2. Work Plan and Budget of Board of Commissioners for 2026; 3. Division of Duties of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal.
20	Senin, 24 November 2025 Monday, November 24, 2025	13.00 s.d 15.00 1:00 PM to 3:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d Oktober 2025. Discussion on Performance until October 2025.
21	Kamis, 18 Desember 2025 Thursday, December 18, 2025	13.00 s.d 15.00 1:00 PM to 3:00 PM	Pembahasan Kinerja s.d November 2025. Discussion on Performance until November 2025.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Minutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

No	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Jumat, 31 Januari 2025 Friday, January 31, 2025	09.00 s.d 12.00 9:00 AM to 12:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Desember 2024. Discussion on PMT Performance until December 2024.
2	Senin, 24 Februari 2025 Monday, February 24, 2025	13.00 s.d 17.00 1:00 PM to 5:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Januari 2025. Discussion on PMT Performance until January 2025.
3	Rabu, 19 Maret 2025 Wednesday, March 19, 2025	13.00 s.d 17.30 1:00 PM to 5:30 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Februari 2025. Discussion on PMT Performance until February 2025.
4	Rabu, 30 April 2025 Wednesday, April 30, 2025	08.30 s.d 12.00 8:30 AM to 12:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Maret 2025. Discussion on PMT Performance until March 2025.
5	Selasa, 27 Mei 2025 Tuesday, May 27, 2025	13.30 s.d 17.00 1:30 PM to 5:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d April 2025. Discussion on PMT Performance until April 2025.
6	Senin, 23 Juni 2025 Monday, June 23, 2025	14.00 s.d 17.00 2:00 PM to 5:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Mei 2025. Discussion on PMT Performance until May 2025.
7	Selasa, 29 Juli 2025 Tuesday, July 29, 2025	14.00 s.d 16.00 2:00 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Juni 2025. Discussion on PMT Performance until June 2025.
8	Kamis, 28 Agustus 2025 Thursday, August 28, 2025	14.00 s.d 17.00 2:00 PM to 5:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Juli 2025. Discussion on PMT Performance until July 2025.
9	Kamis, 26 September 2025 Thursday, September 26, 2025	14.00 s.d 16.00 2:00 PM to 4:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Agustus 2025. Discussion on PMT Performance until August 2025.
10	Selasa, 28 Oktober 2025 Tuesday, October 28, 2025	14.00 s.d 17.00 2:00 PM to 5:00 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d September 2025. Discussion on PMT Performance until September 2025.
11	Selasa, 25 November 2025 Tuesday, November 25, 2025	13.30 s.d 15.45 1:30 PM to 3:45 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d Oktober 2025. Discussion on PMT Performance until October 2025.
12	Jumat, 19 Desember 2025 Friday, December 19, 2025	14.00 s.d 16.30 2:00 PM to 4:30 PM	Pembahasan Kinerja PMT s.d November 2025. Discussion on PMT Performance until November 2025.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Termasuk RUPS

Frequency of Board of Commissioners Meetings and Attendance Level of Board of Commissioners Members in Meetings Including GMS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Gabungan Joint Meeting			RUPS GMS		
	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attendance (%)	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attendance (%)	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attendance (%)
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	21	21	100,00	12	12	100,00	2	2	100,00
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	21	19	90,48	12	12	100,00	2	2	100,00
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	21	20	95,24	12	12	100,00	2	2	100,00
Thanon Aria Dewangga* (Komisaris) (Commissioner)	16	13	81,25	7	7	100,00	2	2	100,00
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	21	15	71,43	12	10	83,33	2	2	100,00
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	21	21	100,00	12	11	91,67	2	2	100,00

*) Berhenti menjabat sejak 27 Agustus 2025.
*) Stopped Serves since August 27, 2025.

PROGRAM PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KAPABILITAS

Kebijakan

Program peningkatan kompetensi merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, terutama dalam menghadapi perkembangan bisnis, dinamika industri, serta perubahan regulasi yang terus berkembang. Dibekali dengan program pengembangan kapabilitas, Dewan Komisaris diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan, wawasan strategis, dan kemampuan pengawasan guna mendukung pengelolaan Perusahaan yang lebih optimal.

TRAINING AND/OR CAPABILITY ENHANCEMENT PROGRAMS

Policy

Competency enhancement programs play a vital role in supporting effective performance of the Board of Commissioners' duties, particularly in light of evolving business developments, industry dynamics, and regulatory changes. Through these capability enhancement programs, Board of Commissioners is expected to continuously improve its knowledge, strategic insight, and supervisory capabilities to support more optimal management of the Company.

Sepanjang tahun 2025, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, seminar, dan program pengembangan kompetensi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan. Keikutsertaan dalam program tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik terbaik di bidang governansi korporat, kepemimpinan strategis, manajemen risiko, serta perkembangan industri yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Adapun daftar program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, members of Board of Commissioners participated in various training sessions, seminars, and other competency development programs relevant to the performance of their supervisory and corporate governance functions. Participation in these programs was intended to strengthen their understanding of best practices in corporate governance, strategic leadership, risk management, and industry developments related to the Company's business activities. The list of training and competency enhancement programs attended by the Boards of Commissioners during 2025 is as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Material of Education and Training	**Tempat/Tanggal** Place/Date
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko National Conference of Risk Management Professionals	Manajemen Risiko Risk Management	Luring, 27-28 November 2025 Offline, November 27–28, 2025
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	Pelatihan *Leadership* Forum BOD & BOC BOD & BOC Leadership Forum Training	*Expansive Leadership Program* for BOD & BOC Expansive Leadership Program for BOD & BOC	Luring, 27-28 November 2025 Offline, November 27–28, 2025
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	Pelatihan Komisaris Profesional Professional Commissioner Training	Pelatihan ke-16 Komisaris Profesional: Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab 16th Professional Commissioner Training: Becoming a Competent and Responsible Commissioner	Luring, 11-12 Juni 2025 Offline, June 11–12, 2025
	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko Professional Commissioner Training	Manajemen Risiko Risk Management	Daring, 27-28 November 2025 Online, November 27–28, 2025
Thanon Aria Dewangga* (Komisaris) (Commissioner)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	*Risk Beyond International Conference* National Conference of Risk Management Professionals	*Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management*	Daring, 4-5 Desember 2025 Online, December 4–5, 2025
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pelatihan Komisaris Profesional Professional Commissioner Training	Pelatihan ke-16 Komisaris Profesional: Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab 16th Professional Commissioner Training: Becoming a Competent and Responsible Commissioner	Luring, 11-12 Juni 2025 Offline, June 11–12, 2025
	Executive Program for Commisioners	Pelindo Pembelajaran & Konsultansi Pelindo Learning & Consulting	Luring, 30-31 Oktober 2025 Offline, October 30–31, 2025

*) Berhenti menjabat sejak 27 Agustus 2025.
*) Stop served on August 27, 2025.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI KOMISARIS BARU

Program pengenalan Perusahaan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diselenggarakan untuk membantu memahami profil, kondisi, serta karakteristik usaha Perusahaan secara menyeluruh, sehingga anggota Dewan Komisaris memperoleh pemahaman yang memadai

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's orientation program for newly appointed members of Board of Commissioners is designed to help them gain a comprehensive understanding of the Company's profile, condition, and business characteristics, so that members of Board of Commissioners acquire sufficient

mengenai aspek organisasi, operasional, strategi bisnis, hingga penerapan tata kelola perusahaan sebagai bekal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Adapun ketentuan mengenai program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
   b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk serta Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
5. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
6. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak mengangkat Anggota Dewan Komisaris baru. Oleh karena itu, tidak terdapat Program Pengenalan Perusahaan yang dilakukan.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Dewan Komisaris turut menyampaikan laporan dan bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham melalui berbagai mekanisme.

Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi atas Pengawasan dan Evaluasi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan Tahun 2025 (*Audited*):
   a. Evaluasi Kinerja Tahun 2025
      Secara umum capaian laba Perusahaan tahun 2025 masih cukup jauh di bawah RKAP 2025, di mana Perusahaan hanya mampu mencapai laba setelah pajak (*audited*) sebesar Rp525,74 miliar atau hanya

knowledge regarding organizational aspects, operations, business strategies, and the implementation of corporate governance—all of which serve as a foundation for effectively carrying out their supervisory functions. The provisions regarding the orientation program for members of Board of Commissioners are as follows:

1. To members of Board of Commissioners who are appointed for the first time, must be given an orientation program about the Company;
2. The responsibility for conducting the program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function as Corporate Secretary;
3. The orientation program as referred to in Letter a shall include:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company with regard to its purpose, nature, and scope of activities, financial and operating performance, strategy, shortterm and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors and other matters that are not allowed.
5. The Company's orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company, and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company;
6. The Company's orientation program is carried out no later than 90 calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Commissioners.

Throughout 2025, the Company did not appoint any new members of Board of Commissioners. Therefore, no Company Orientation Program was conducted.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IMPLEMENTATION IN 2025

Throughout 2025, Board of Commissioners has carried out its supervisory and control functions regarding the Company's management by Board of Directors. In performing these functions, Board of Commissioners has also submitted reports and provided accountability to Shareholders through various mechanisms.

Supervisory Activities

Supervisory activities carried out by Board of Commissioners include the following:

1. Realization of Supervision and Evaluation of the Company's Annual Management Report for 2025 (Audited):
   a. 2025 Performance Evaluation
      Overall, the Company's 2025 profit figures fell significantly short of the 2025 RKAP, as the Company was only able to achieve an (audited) of Rp525.74 billion—representing just 78.82% of the 2025 RKAP

tercapai 78,82% terhadap RKAP tahun 2025 sebesar Rp667,00 miliar walaupun mengalami kenaikan signifikan sebesar 94,90% atau naik sebesar Rp255,99 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp269,76 miliar. Ketidaktercapaian laba yang signifikan terhadap RKAP pada tahun 2025 disebabkan oleh ketidaktercapaian pada Pendapatan Usaha dengan realisasi sebesar Rp5,67 triliun yang hanya tercapai sebesar 90,17% dari RKAP atau Rp6,29 triliun. Ketidaktercapaian pendapatan usaha didominasi oleh pendapatan barang non petikemas yang hanya terealisasi Rp4,34 triliun atau 87,64% dari RKAP sebesar 4,96 triliun.

b. Laporan Auditor Independen.
c. Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2025.
d. Hasil Telaahan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2025.
   i) Trafik
   Realisasi trafik tahun 2025 secara umum masih di bawah RKAP tahun 2025 sebesar 118,26 juta ton/M3 atau hanya tercapai 90,43% dari RKAP tahun 2025 sebesar 130,77 juta ton/M3. Hal ini disebabkan tidak tercapainya realisasi pada komoditas utama seperti curah kering (defisit 7,34 juta ton), curah cair (defisit 2,70 juta ton), dan general & bag cargo (defisit 2,29 juta ton/m3).

   ii) Neraca
   Realisasi total aset tahun 2025 sebesar Rp 4,45 triliun atau sebesar 71,06% terhadap RKAP tahun 2025 sebesar Rp 6,27 triliun. Tidak tercapainya target total aset sesuai RKAP Tahun 2025 dikarenakan proses imbreng aset yang belum terealisasi.
   iii) Laba/Rugi
   - Realisasi pendapatan t ahun 2025 tercapai sebesar Rp5,67 triliun atau 90,17% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp6,29 triliun. Hal ini disebabkan tidak tercapaianya pendapatan barang non petikemas yang hanya tercapai 87,64% atau defisit sebesar Rp612,28 miliar.
   - Realisasi beban usaha tahun 2025 sebesar Rp5,06 triliun atau 93,19% dari RKAP tahun 2025 yaitu sebesar Rp5,43 triliun. Masih terdapat beban yang lebih tinggi dari RKAP seperti beban bahan (103%). Jika dibandingkan dengan *audited* 2024 yang terealisasi sebesar Rp5,02 triliun, capaiannnya sebesar 100,85%.
   - Realisasi laba setelah pajak tahun 2025 sebesar Rp525,75 miliar atau hanya tercapai 78,82% terhadap RKAP tahun 2025 sebesar Rp667,00 miliar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pencapaian pendapatan usaha yaitu sebesar 90,17% dan juga realisasi beban usaha

   iv) Investasi
   Realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp303,39 miliar atau 81,10% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp378,78 miliar dengan realisasi program tahun 2025 sebesar 22 program dari RKAP tahun 2025

target of Rp667.00 billion—despite a significant increase of 94.90% (or Rp255.99 billion) compared to the 2024 realized profit of Rp269.76 billion. The significant shortfall in profit relative to the 2025 RKAP was due to a shortfall in operating revenue, with actual revenue of Rp5.67 trillion—representing only 90.17% of the RKAP target of Rp6.29 trillion. The shortfall in operating revenue was primarily driven by revenue from non-containerized cargo, which amounted to only Rp4.34 trillion—or 87.64% of the RKAP target of Rp4.96 trillion.

b. Independent Auditor's Report.
c. Performance Evaluation for 2025 Fiscal Year .
d. Results of the Board of Commissioners' Review on 2025 Fiscal Year Performance.
   i) Traffic
   Actual traffic for 2025 generally remained below the 2025 RKAP of 118.26 million metric tons/cubic meters, achieving only 90.43% of the 2025 RKAP target of 130.77 million metric tons/cubic meters. This was due to the failure to meet targets for key commodities such as dry bulk (a shortfall of 7.34 million metric tons), liquid bulk (a shortfall of 2.70 million metric tons), and general and bagged cargo (a shortfall of 2.29 million metric tons/m3).
   ii) Balance Sheet
   Total assets realized in 2025 amounted to Rp 4.45 trillion, or 71.06% of the 2025 RKAP target of Rp 6.27 trillion. The failure to meet the total asset target set in the 2025 RKAP was due to the asset contribution process not yet being finalized.

   iii) Profit/Loss
   - Revenue for 2025 was realized at Rp5.67 trillion, or 90.17% of the 2025 RKAP of Rp6.29 trillion. This was due to the failure to meet revenue targets for non-containerized goods, which were achieved at only 87.64%, resulting in a shortfall of Rp612.28 billion.
   - Operating expenses for 2025 amounted to Rp5.06 trillion, or 93.19% of the 2025 RKAP of Rp5.43 trillion. Certain expenses remained higher than the RKAP, such as material costs (103%). Compared to the audited 2024 figure of Rp5.02 trillion, the achievement was 100.85%.

   - Net income for 2025 amounted to Rp525.75 billion, representing only 78.82% of the 2025 RKAP target of Rp667.00 billion. This was due to low operating revenue achievement—at 90.17%—as well as operating expenses.

   iv) Investments
   Actual investment for 2025 amounted to Rp303.39 billion, or 81.10% of the 2025 RKAP of Rp378.78 billion, with 22 programs implemented out of the 23 programs in the 2025 RKAP. The shortfall in

sebesar 23 program. Ketidaktercapaian pada investasi disebabkan oleh rendahnya pencapaian pada instalasi fasilitas yang hanya terealisasi sebesar 76,01% atau defisit Rp74,77 miliar dan bangunan fasilitas hanya terealisasi sebesar 81,15% atau defisit Rp3,88 miliar.

v) Sumber Daya Manusia (SDM)
Realisasi SDM tahun 2025 adalah sebanyak 4.465 orang atau 99,27% dari RKAP tahun 2025 sebanyak 4.498 orang. Jumlah realisasi SDM tahun 2025 tidak mencapai angka RKAP disebabkan berkurangnya jumlah TAD sebanyak 15 orang dan organik Pelindo sebanyak 17 karena mutasi, meninggal dan pensiun.

vi) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Realisasi Program TJSL tahun 2025 adalah sebesar Rp6,10 miliar atau sebesar 103,10 % dari target alokasi dana yang sudah ditetapkan sebesar Rp5,92 miliar. Realisasi program ini ditopang oleh beberapa kegiatan besar yaitu Pelindo berbagi Ramadhan Tahun 2025 sebesar Rp1,49 miliar, Program Pelindo Berbagi Qurban tahun 2025 PMT dan Branch sebesar Rp788,48 juta dan Mudik Bersama BUMN Pelindo Group sebesar Rp499,93 juta.

vii) Realisasi *Key Performance Indicator* (KPI)
Capaian realisasi KPI Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar 100,07% atau di atas target skor tahun 2025 sebesar 100%. Meskipun pada aspek nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia mengalami ketidaktercapaian utamanya dari unsur finansial (EBITDA, Pendapatan, dan BOPO), ke empat aspek lainnya tercapai atau melampaui dari target tahun 2025.

2. Kunjungan Kerja ke Cabang/Unit Usaha:
Dalam menjalankan fungsi *monitoring* dan *controlling*, serta pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam bentuk:
   a. Kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Cabang Panjang pada tanggal 6 - 8 Mei 2025.
   b. Kunjungan kerja ke PTP Cabang Pangkal Balam pada tanggal 14 - 15 Oktober 2025.
   c. Kunjungan kerja ke Cabang Jamrud Nilam Mirah pada tanggal 4 - 6 Desember 2025.
   d. Kunjungan kerja ke Anak Perusahaan (PT PTP) pada tanggal 12 Desember 2025.
   e. Kunjungan kerja ke PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) pada tanggal 12 Desember 2025.
   f. Kunjungan kerja ke Cabang Lhokseumawe pada tanggal 1 7- 18 Desember 2025.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris:
   a. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir).

investment was due to low achievement in facility installations, which were only realized at 76.01%—a deficit of Rp74.77 billion—and facility construction, which was only realized at 81.15%—a deficit of Rp3.88 billion.

v) Human Capital (HC)
The 2025 HC realization totaled 4,465 persons, or 99.27% of the 2025 RKAP target of 4,498 persons. The 2025 HC realization fell short of the RKAP target due to a reduction of 15 TAD personnel and 17 Pelindo organic staff resulting from transfers, passed away, and retirements.

vi) Social and Environmental Responsibility Program (CSR)
The 2025 CSR program realization amounted to Rp6.10 billion, or 103.10% of the established budget allocation target of Rp5.92 billion.
The program's implementation was supported by several major initiatives, including the 2025 Pelindo Ramadan Sharing Program totaling Rp1.49 billion, 2025 Pelindo Qurban Sharing Program for PMT and Branch units totaling Rp788.48 million, and Pelindo Group SOEs Joint Homecoming Program totaling Rp499.93 million.

vii) Key Performance Indicator (KPI) Realization
The Company's KPI achievement in 2025 was 100.07%, exceeding the 2025 target of 100%. Although the Company fell short of its 2025 targets in the economic and social value for Indonesia—primarily in financial metrics (EBITDA, Revenue, and BOPO)—the other four aspects met or exceeded the 2025 targets.

2. Work Visits to Branches/Business Units
In carrying out its monitoring and controlling functions, as well as providing advice to Board of Directors, Board of Commissioners reports and is accountable in the following ways:
   a. Work visit to PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Panjang Branch on May 6–8, 2025.
   b. Work visit to PT PTP Pangkal Balam Branch on October 14–15, 2025.
   c. Work visit to Jamrud Nilam Mirah Branch on December 4–6, 2025.
   d. Work visit to Subsidiary (PT PTP) on December 12, 2025.
   e. Work visit to PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) on December 12, 2025.
   f. Work visit to Lhokseumawe Branch on December 17–18, 2025.
3. Board of Commissioners' Reporting and Accountability
   a. Minutes of Board of Commissioners' Internal Meeting and Board of Commissioners and Board of Directors Meeting (Board Joint Meeting).

b. Laporan Realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*/KPI) Dewan Komisaris Tahun 2025. Realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2025 mencapai total skor sebesar 100% sebagaimana rincian terlampir dalam lampiran Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025.
c. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025, yang di dalamnya tercantum realisasi Program Kerja Komite PT Pelindo Multi Terminal.

4. Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris:
Dewan Komisaris telah menyusun Pendapat dan Saran sebagaimana disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat Dewan Komisaris sebagai berikut:
a. Nomor KU.01.02/007/DK/PLMT/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2025.
b. Nomor KU.01.08/050/DK/PLMT/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2025.
c. Nomor KU.01.08/053/DK/PLMT/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 (*Audited*).
d. Nomor KU.01.08/073/DK/PLMT/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2025.
e. Nomor KU.01.08/109/DK/PLMT/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2025.

b. Report on Realization of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2025. The realization of Board of Commissioners' KPI in 2025 reached a total score of 100% as detailed in the attachment to the 2025 Board of Commissioners Supervisory Report of PT Pelindo Multi Terminal.
c. The 2024 Board of Commissioners Supervisory Report of PT Pelindo Multi Terminal, which includes the realization of PT Pelindo Multi Terminal Committee Work Program.

4. Board of Commissioners' Opinions and Suggestions:
Board of Commissioners has prepared Opinions and Suggestions as submitted to Shareholders via following Board of Commissioners' letters:
a. No. KU.01.02/007/DK/PLMT/I/2025 dated January 23, 2025, regarding Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on the 2025 RKAP.
b. No. KU.01.08/050/DK/PLMT/V/2025 dated May 28, 2025, regarding Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on the First Quarter 2025 Management Report.
c. No. KU.01.08/053/DK/PLMT/VI/2025 dated June 16, 2025, regarding Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2024 Fiscal Year (Audited).
d. No. KU.01.08/073/DK/PLMT/VII/2025 dated July 31, 2025, regarding Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on the Second Quarter 2025 Management Report.
e. No. KU.01.08/109/DK/PLMT/X/2025 dated October 31, 2025, regarding Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on the Third Quarter 2025 Management Report.

Rekomendasi dan Persetujuan atas Usulan Direksi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris juga telah memberikan keputusan strategis serta Surat Tanggapan dan Arahan atas usulan Direksi yang membutuhkan rekomendasi dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, yakni sebagaimana terlampir berikut ini:

Recommendations and Approval on Board of Directors' Proposals

Throughout 2025, Board of Commissioners has also provided strategic decisions as well as Response Letters and Directions on Board of Directors' proposals that require recommendations and/or approval from the Board of Commissioners, as attached below:

No	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letter	Surat Direksi Board of Directors' Letter	Keterangan Description
1	Nomor PW.02.03/012/DK/ PLMT/ II/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Persetujuan atas Pengendali Mutu Independen untuk Melaksanakan Kaji Ulang Terhadap Kinerja SPI (*Quality Assurance Review*). No. PW.02.03/012/DK/PLMT/II/2025 dated February 5, 2025, regarding Approval of an Independent Quality Controller to Conduct a Review of the SPI's Performance (Quality Assurance Review).	Nomor PW.02.03/24/1/1/MPPI/DIRU/ PLMT-25 tanggal 24 Januari 2025 perihal Usulan Pengendali Mutu Independen untuk Melaksanakan Kaji Ulang Terhadap Kinerja SPI (*Quality Assurance Review*). No. PW.02.03/24/1/1/MPPI/DIRU/PLMT-25 dated January 24, 2025, regarding Proposal for an Independent Quality Controller to Conduct a Review of SPI Performance (Quality Assurance Review).	Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat cq BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengendali Mutu Independen untuk melaksanakan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*Quality Assurance Review*). Board of Commissioners approved the appointment of the Central Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), specifically the North Sumatra Provincial BPKP, as the Independent Quality Controller to conduct a review of the SPI's performance (Quality Assurance Review).

No	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letter	Surat Direksi Board of Directors' Letter	Keterangan Description
2	Nomor KS.01/022/DK/PLMT/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Usulan *Addendum* Kurang Lokasi *Branch* Belawan. No. KS.01/022/DK/PLMT/III/2025 dated March 12, 2025, regarding Board of Commissioners' Response to the Proposed Addendum Concerning the Shortfall in Belawan Branch.	Nomor KS.01/4/3/1/KUSH/DIRU/PLMT-25 tanggal 4 Maret 2025 perihal Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Rencana Usulan *Addendum* Kurang Lokasi *Branch* Belawan dari Perjanjian Serah Operasi Eksisting dan Penyusunan Perjanjian Serah Operasi Baru Khusus *Branch* Belawan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Multi Terminal. No. KS.01/4/3/1/KUSH/DIRU/PLMT -25 dated March 4, 2025, regarding Request for a Written Response from Board of Commissioners on the Proposed Addendum to Exclude the Belawan Branch from the Existing Operation Transfer Agreement and the Drafting of a New Operation Transfer Agreement Specifically for Belawan Branch between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pelindo Multi Terminal.	Dewan Komisaris mendukung rencana usulan addendum kurang lokasi atas Perjanjian Serah Operasi Eksisting untuk mengeluarkan Branch Belawan dari Perjanjian Serah Operasi Eksisting dan selanjutnya disusun Perjanjian Serah Operasi Baru Khusus *Branch* Belawan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Multi Terminal. Board of Commissioners supports the proposed plan for an addendum to the Existing Operation Transfer Agreement to exclude the Belawan Branch from the Existing Operation Transfer Agreement and subsequently draft a New Operation Transfer Agreement specifically for Belawan Branch between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pelindo Multi Terminal.
3	Nomor PW.05.01/035/DK/ PLMT/IV/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Strategi Risiko dan Profil Risiko Korporat PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025. No. PW.05.01/035/DK/PLMT/IV/2025, dated April 17, 2025, regarding Board of Commissioners' Response to PT Pelindo Multi Terminal's 2025 Risk Strategy and Corporate Risk Profile.	Nomor PW.05.01/27/3/1/RIOP/DIRU/PLMT-25 tanggal 27 Maret 2025 perihal Strategi Risiko dan Profil Risiko Korporat PMT Tahun 2025. No. PW.05.01/27/3/1/RIOP/DIRU/PLMT-25 dated March 27, 2025, regarding PMT's 2025 Risk Strategy and Corporate Risk Profile.	Dewan Komisaris berpendapat seharusnya kajian strategi risiko beserta profil risiko signifikan PMT ditetapkan sebelum (atau paling tidak bersamaan dengan) penetapan RKAP PMT Tahun 2025, bukan sesudahnya karena sudah tidak berdampak terhadap angka-angka pada RKAP PMT Tahun 2025 yang telah disahkan pemegang saham. Hal ini agar menjadi perhatian Direksi dalam penyusunan RKAP berbasis risiko pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Board of Commissioners' opinion is that the review of PMT's risk strategy and significant risk profile should have been finalized prior to (or at the very least concurrently with) the finalization of PMT's 2025 RKAP, rather than afterward, as it no longer impacts the figures in the 2025 RKAP, which has already been approved by shareholders. This should be taken into consideration by Board of Directors when preparing risk-based RKAP in subsequent fiscal years.
4	Nomor KS.01/052/DK/PLMT/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Program Pembelian 1 (Satu) Unit HMC milik PT Prima Indonesia Logistik/SPSL Group. No. KS.01/052/DK/PLMT/VI/2025 dated June 5, 2025, regarding Board of Commissioners' Response to Purchase Program for 1 (One) HMC Unit owned by PT Prima Indonesia Logistik/SPSL Group.	Nomor KS.01/26/5/1/KKPT/DIRU/PLMT-25 tanggal 26 Mei 2025 perihal Permohonan Persetujuan Program Pembelian 1 (Satu) Unit HMC milik PT Prima Indonesia Logistik/SPSL Group. No. KS.01/26/5/1/KKPT/DIRU/PLMT-25 dated May 26, 2025, regarding Request for Approval of Purchase Program for 1 (One) HMC Unit owned by PT Prima Indonesia Logistik/SPSL Group.	Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi melanjutkan program ini dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada RUPS. Board of Commissioners recommends that Board of Directors proceed with this program by submitting a request for approval to the GMS.
5	Nomor PW.05.01/063/DK/PLMT/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Persetujuan atas Laporan Strategi Risiko dan Penambahan Profil Risiko Baru Tahun 2025. No. PW.05.01/063/DK/PLMT/VII/2025 dated July 3, 2025, regarding Approval of the 2025 Risk Strategy Report and Addition of New Risk Profiles.	Nomor PW.05.01/20/6/1/RIOP/DIRU/PLMT-25 tanggal 20 Juni 2025 perihal Laporan Strategi Risiko dan Penambahan Profil Risiko Baru Tahun 2025. No. PW.05.01/20/6/1/RIOP/DIRU/PLMT-25 dated June 20, 2025, regarding the 2025 Risk Strategy Report and Addition of New Risk Profiles.	Dewan Komisaris menyetujui Laporan Strategi Risiko dan Penambahan Profil Risiko Baru Tahun 2025. Board of Commissioners approved the 2025 Risk Strategy Report and Addition of New Risk Profiles.

No	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letter	Surat Direksi Board of Directors' Letter	Keterangan Description
6	Nomor SK.01.02/066 /DK/PLMT/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Mekanisme Pelaksanaan *Assessment* GCG Tahun Buku 2024 PT Pelindo Multi Terminal. No. SK.01.02/066/DK/PLMT/VII/2025 dated July 14, 2025, regarding Board of Commissioners' Response to the GCG Assessment Mechanism for 2024 Fiscal Year of PT Pelindo Multi Terminal.	Nomor SK.01.02/30/6/1/HLTK/DIRU/PLMT-25 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Persetujuan atas Mekanisme Pelaksanaan *Assessment* GCG Tahun Buku 2024 PT Pelindo Multi Terminal. No. SK.01.02/30/6/1/HLTK/DIRU/PLMT-25 dated June 30, 2025, regarding Request for Approval of the GCG Assessment Mechanism for 2024 Fiscal Year of PT Pelindo Multi Terminal.	Dewan Komisaris merekomendasikan agar tahun buku 2024, PMT melakukan evaluasi (*review*) yaitu berupa evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan penerapan Tata Kelola Perusahaan tahun 2023 sesuai PER-2/MBU/03/2023 pasal 44 (1) huruf b tersebut di atas. Apabila diperlukan, PMT dapat melakukan penilaian secara *self-assessment* untuk penilaian GCG tahun buku 2024. Board of Commissioners recommends that for 2024 fiscal year, PMT conduct a review of assessment results and follow up on recommendations for improvements to the implementation of Corporate Governance in 2023 in accordance with PER-2/MBU/03/2023, Article 44(1)(b) mentioned above. If necessary, PMT may conduct a self-assessment for the 2024 fiscal year's GCG assessment.
7	Nomor OT.01.03/076/DK/PLMT/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 perihal Persetujuan Penyesuaian Nama Jabatan Senior Vice President Terkait Pemurnian Bisnis. No. OT.01.03/076/DK/PLMT/VIII/2025, dated August 6, 2025, regarding Approval of Title Change for Senior Vice President Position in Connection with Business Refinement.	Nomor OT.01.03/30/7/1/PSOS/DIRU/PLMT-25 tanggal 30 Juli 2025 perihal Penyesuaian Nama Jabatan Senior Vice President terkait Pemurnian Bisnis. No. OT.01.03/30/7/1/PSOS/DIRU/PLMT-25 dated July 30, 2025, regarding Title Adjustment for Senior Vice President Position in Connection with Business Refinement.	Dewan Komisaris menyetujui penyesuaian organisasi sebagai upaya penguatan fungsi komersial pada Kantor Pusat PMT untuk mendukung peran *Business Owner* (*Operational* Anak Usaha). Board of Commissioners approved the organizational adjustments as part of efforts to strengthen commercial functions at PMT Head Office to support the role of Business Owner (Operational Subsidiary).
8	Nomor KU.01.05/090/DK/PLMT/IX/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Investasi Tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal. No. KU.01.05/090/DK/PLMT/IX/2025 dated September 8, 2025, regarding Response to Proposed Revision of the 2025 RKAP Investment of PT Pelindo Multi Terminal.	Nomor KU.01.05/28/7/1/PRPR/DIRU/PLMT-25 tanggal 28 Juli 2025 perihal Permohonan Persetujuan atas Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Investasi Tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal. No. KU.01.05/28/7/1/PRPR/DIRU/PLMT-25 dated July 28, 2025, regarding the Request for Approval of Proposed Revision of the 2025 RKAP Investment of PT Pelindo Multi Terminal.	Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi untuk diusulkan kepada Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan atas usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Investasi Tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal. Board of Commissioners may issue a recommendation to be submitted to the Shareholders to seek approval of proposed revision to the 2025 2025 RKAP Investment of PT Pelindo Multi Terminal.
9	Nomor KS.01/132/DK/PLMT/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 perihal Tanggapan atas Rencana Inbreng Aset Alat Bongkar Muat dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada PT Pelindo Multi Terminal. No. KS.01/132/DK/PLMT/XII/2025 dated December 16, 2025, regarding Response to the Plan to Contribute Loading and Unloading Equipment Assets from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Pelindo Multi Terminal.	Nomor KS.01/13/6/1/KUSH/DIRU/PLMT-25 tanggal 13 Juni 2025 perihal Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal atas Rencana Inbreng Aset Alat Bongkar Muat dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero). No. KS.01/13/6/1/KUSH/DIRU/PLMT-25 dated June 13, 2025, regarding Request for a Written Response from Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal on the Plan to Contribute Loading and Unloading Equipment Assets from PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Dewan Komisaris pada prinsipnya memahami dan menyetujui rencana pengalihan kepemilikan sebagian aset alat bongkar muat milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada PT Pelindo Multi Terminal melalui mekanisme penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng), sebagai bagian dari strategi optimalisasi aset dan penguatan peran PT Pelindo Multi Terminal sebagai anak usaha terminal non-petikemas. Board of Commissioners, in principle, understood and approved the plan to transfer ownership of a portion of the cargo handling equipment assets owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Pelindo Multi Terminal through the mechanism of capital contribution in another form (inbreng), as part of the strategy to optimize assets and strengthen the role of PT Pelindo Multi Terminal as a non-container terminal subsidiary Company.
10	Nomor KS.01/141/DK/PLMT/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi Cabang Kalimas. No. KS.01/141/DK/PLMT/XII/2025, dated December 31, 2025, regarding Approval of the Organizational Structure of Kalimas Branch.	Nomor KS.01/29/12/1/KUSH/DIRU/PLMT-25 tanggal 29 Desember 2025 perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Serah Operasi dan Permohonan Persetujuan Struktur Organisasi *Branch* Kalimas. No. KS.01/29/12/1/KUSH/DIRU/PLMT-25 dated December 29, 2025, regarding Submission of the Plan for Handing Over Operations and Request for Approval of the Organizational Structure of Kalimas Branch.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui Pelaksanaan Serah Operasi dan Penetapan Struktur Organisasi Cabang Kalimas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026, dengan tetap memperhatikan dan memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. In principle, Board of Commissioners approved the handover of operations and the establishment of Kalimas Branch's organizational structure effective January 1, 2026, while continuing to observe and comply with all applicable regulations.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DAN ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perusahaan didukung oleh sejumlah organ pendukung yang terdiri atas Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan kajian, pemantauan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pengelolaan Perusahaan.

Sebagai upaya menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi masing-masing organ pendukung tersebut, Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan penilaian kinerja terhadap seluruh anggota komite. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap komite mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta memperkuat implementasi governansi korporat di seluruh lini organisasi Perusahaan.

Prosedur Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melaksanakan evaluasi terhadap kinerja seluruh anggota komite secara berkala pada akhir tahun buku. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan laporan aktivitas tahunan masing-masing komite serta hasil pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama periode berjalan.

Proses evaluasi dilaksanakan secara internal oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan dalam risalah rapat. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut turut disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS sebagai bagian dari laporan pengawasan tahunan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan.

Kriteria Penilaian Kinerja

Penilaian terhadap masing-masing komite didasarkan pada indikator berikut:

1. Capaian rencana kerja tahunan, termasuk jumlah dan substansi rapat yang diselenggarakan.
2. Kualitas rekomendasi dan masukan strategis kepada Dewan Komisaris serta efektivitas tindak lanjut.
3. Kehadiran dan partisipasi aktif anggota komite dalam rapat dan kegiatan pengawasan.
4. Kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, Pedoman Kerja Komite, dan nilai-nilai GCG.
5. Kompetensi dan pemahaman atas tugas pengawasan, termasuk independensi dan profesionalisme.

Hasil Penilaian

Evaluasi terhadap seluruh organ pendukung Dewan Komisaris menjadi bagian dari laporan pengawasan tahunan yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui forum RUPS. Evaluasi ini diharapkan menjadi acuan bagi organ pendukung Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di masa mendatang.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES AND SUPPORTING ORGANS UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's Board of Commissioners is supported by a number of supporting organs, consisting of Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee, to assist the Board of Commissioners in reviewing, monitoring, and evaluating various aspects of the Company's management.

To ensure the effectiveness of each supporting organ's functions, Board of Commissioners periodically conducts performance assessments of all committee members. These evaluations are conducted to ensure that each committee is able to carry out its duties and responsibilities optimally in supporting the Board of Commissioners' supervisory functions and strengthening the implementation of corporate governance across all levels of the Company's organization.

Performance Assessment Procedure

Board of Commissioners conducts periodic performance assessments of all committee members at the end of the fiscal year. These assessments are based on each committee's annual activity reports and the results of supervisory activities carried out during the current period.

The evaluation process is carried out internally by Board of Commissioners and documented in the meeting minutes. Furthermore, these assessment results are presented to Shareholders at the GMS as part of the Board of Commissioners' annual supervisory report on the Company's management.

Performance Assessment Criteria

The performance of each committee is based on the following indicators:

1. Achievement of the annual work plan, including the number and substance of meetings held;
2. Quality of recommendations and strategic input to Board of Commissioners, as well as the effectiveness of follow-up actions;
3. Attendance and active participation of committee members in meetings and supervisory activities;
4. Compliance with laws and regulations, Committee Work Guidelines, and GCG values;
5. Competence and understanding of supervisory duties, including independence and professionalism.

Assessment Results

The evaluation of all supporting organs of Board of Commissioners is included in the annual supervisory report submitted by Board of Commissioners to Shareholders through the GMS. This evaluation is intended to serve as a guideline for supporting organs of Board of Commissioners in improving the effectiveness of their duties in the future.

Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit secara konsisten mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi kualitas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit, serta kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Selama periode tersebut, Komite Audit telah menyelenggarakan 33 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata mencapai 100%. Melalui forum rapat tersebut, Komite Audit secara aktif merumuskan rekomendasi strategis bagi Direksi, dan berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Komite Audit dinilai efektif serta memberikan kontribusi yang optimal dalam penguatan fungsi pengawasan, khususnya dalam mendorong budaya kepatuhan, menjaga integritas pelaporan keuangan, dan meningkatkan mutu sistem pengendalian internal Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi mendukung Dewan Komisaris dalam merumuskan kebijakan nominasi, sistem remunerasi, serta pengembangan kompetensi jajaran pimpinan Perusahaan. Selama periode tersebut, Komite telah menyelenggarakan 33 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata mencapai 100%. Melalui rapat tersebut, Komite secara aktif berkontribusi dalam evaluasi kinerja Direksi dan penyusunan kebijakan sumber daya manusia yang strategis, dan berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dinilai efektif serta memberikan kontribusi yang optimal dalam penguatan fungsi nominasi dan remunerasi, khususnya dalam mendukung objektivitas proses suksesi kepemimpinan, kesesuaian sistem remunerasi dengan kinerja Perusahaan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di tingkat manajerial.

Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko secara konsisten mendukung Dewan Komisaris dalam memantau efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta pengelolaan risiko korporat, termasuk menelaah laporan manajemen risiko dan memastikan kesesuaian penerapan kebijakan manajemen risiko antara Perusahaan induk dan anak perusahaan. Selama periode tersebut, Komite telah menyelenggarakan 33 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata mencapai 100%. Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Komite Pemantau Risiko dinilai progresif dan adaptif serta memberikan kontribusi yang optimal dalam penguatan pengawasan tata kelola, khususnya dalam meningkatkan kesadaran risiko di seluruh lini organisasi, memperkuat rekomendasi kebijakan manajemen risiko yang efektif, serta mendorong penerapan praktik tata kelola yang berlandaskan prinsip ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan).

Audit Committee

Throughout 2025, the Audit Committee consistently supported the Board of Commissioners in overseeing the quality of financial reports, the effectiveness of internal control systems, the conduct of audits, and the Company's compliance with applicable regulations. During this period, the Audit Committee held 33 meetings with an average attendance rate of 100%. Through these meetings, the Audit Committee actively formulated strategic recommendations for the Board of Directors. Based on the evaluation results, the Audit Committee's performance was deemed effective and made an optimal contribution to strengthening oversight functions—particularly in fostering a culture of compliance, maintaining the integrity of financial reporting, and improving the quality of the Company's internal control system.

Nomination and Remuneration Committee

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee supported the Board of Commissioners in formulating nomination policies, remuneration systems, and competency development for the Company's leadership. During that period, the Committee held 33 meetings with an average attendance rate of 100%. Through these meetings, the Committee actively contributed to the evaluation of the Board of Directors' performance and the formulation of strategic human resources policies. Based on the evaluation results, the Nomination and Remuneration Committee's performance was deemed effective and made an optimal contribution to strengthening the nomination and remuneration functions, particularly in supporting the objectivity of the leadership succession process, ensuring the alignment of the remuneration system with the Company's performance, and developing the competencies of human resources at the managerial level.

Risk Monitoring Committee

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee consistently supported the Board of Commissioners in monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance principles and corporate risk management, including reviewing risk management reports and ensuring consistency in the implementation of risk management policies between the parent company and its subsidiaries. During this period, the Committee held 33 meetings with an average attendance rate of 100%. Based on the evaluation results, the Risk Monitoring Committee's performance was deemed progressive and adaptive, making an optimal contribution to strengthening governance oversight—particularly in raising risk awareness across all levels of the organization, reinforcing effective risk management policy recommendations, and promoting governance practices grounded in the ETAK principles (Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability).

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris berperan sebagai penghubung informasi antara Dewan Komisaris dengan organ Perusahaan lainnya maupun pemangku kepentingan, guna mendukung kelancaran komunikasi dan tata kelola yang transparan. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris memfasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, penyusunan notulen, pemutakhiran dokumentasi tata kelola, serta penyampaian laporan pengawasan kepada Pemegang Saham. Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Sekdekom dinilai sangat baik dan profesional, dengan layanan yang responsif dan sistematis, sehingga memberikan kontribusi yang optimal dalam menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

KOMITE LAINNYA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat komite lainnya di bawah Dewan Komisaris.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang menjalankan tugas pengawasan secara independen dan bebas dari hubungan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Dalam pelaksanaan fungsinya, Komisaris Independen tidak memiliki keterkaitan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk memperkuat efektivitas fungsi pengawasan serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih transparan, objektif, dan profesional. Selain melakukan pemantauan terhadap pengelolaan Perusahaan, Komisaris Independen juga berperan dalam menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak berkepentingan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip governansi korporat yang baik.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, komposisi Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan mengenai keberadaan Komisaris Independen. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa paling sedikit 20% dari jumlah anggota Dewan Komisaris harus berasal dari Komisaris Independen yang penetapannya dicantumkan dalam keputusan pengangkatan. Komposisi Komisaris Independen PMT per 31 Desember 2025

Secretary of Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners serves as a liaison between the Board of Commissioners and other Company bodies as well as stakeholders, to support smooth communication and transparent governance. Throughout 2025, the Secretary to the Board of Commissioners facilitated the conduct of Board of Commissioners meetings, the preparation of meeting minutes, the updating of governance documentation, and the submission of oversight reports to Shareholders. Based on the evaluation results, the Secretary of the Board of Commissioners' performance was rated as excellent and professional, with responsive and systematic service, thereby making an optimal contribution to supporting the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight functions.

OTHER COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

As of the end of 2025, there are no other committees under Board of Commissioners.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners are members of Board of Commissioners who perform supervisory duties independently and free from any relationships that could potentially give rise to conflicts of interest. In carrying out their functions, Independent Commissioners have no financial, managerial, or shareholding ties, nor any family relationships with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders that could affect their objectivity in decision-making.

The presence of Independent Commissioners aims to strengthen the effectiveness of supervisory functions and support the creation of corporate governance that is more transparent, objective, and professional. In addition to monitoring the Company's management, Independent Commissioners also play a role in maintaining a balance of interests among all stakeholders, including ensuring the protection of the interests of minority shareholders and other interested parties in accordance with the principles of good corporate governance.

Composition and Membership of Independent Commissioners in the Company's Board of Commissioners

Pursuant to Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the composition of Board of Commissioners must comply with the provisions regarding the presence of Independent Commissioners. The regulation stipulates that at least 20% of the members of Board of Commissioners must be Independent Commissioners, whose designation must be specified in the appointment decision.

Komposisi Komisaris Independen PMT per 31 Desember 2025
Composition of PMT Independent Commissioners as of December 31, 2025

Nama Name	Periode Jabatan dan Pertama Kali Diangkat Period of Office and First Appointment	Masa Jabatan Term of Service
Darwanto	Periode ke-1, sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perusahaan 1st period, previously never served as the Company's Board of Commissioners	1 Oktober 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 October 1, 2021 until the GMS to be held in 2026
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan		
Aan Rusdianto		9 Januari 2024 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 January 9, 2024, until the GMS to be held in 2029

Komposisi Komisaris Independen Perusahaan terhadap jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 sebesar 60,00% dan telah memenuhi Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengenai komposisi Komisaris Independen yakni paling kurang 20% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris.

The composition of the Company's Independent Commissioners to the total number of members of Board of Commissioners as of December 31, 2025 is 60% and has fulfilled the Regulation of Minister of StateOwned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 regarding composition of Independent Commissioners which is at least 20% of the total number of Board of Commissioners.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen di lingkungan Perusahaan berperan penting dalam mendukung terciptanya sistem pengawasan yang objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penetapan Komisaris Independen yang dilakukan oleh Perusahaan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 yang mengatur persyaratan independensi anggota Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi kemampuan dalam bertindak secara independen. Adapun kriteria Komisaris Independen di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi terkait hubungan keuangan dengan Perusahaan.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi terkait kepengurusan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan.

Criteria for Determining Independent Commissioners

Independent Commissioners within the Company play a vital role in supporting the establishment of an objective supervisory system that is in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The Company's appointment of Independent Commissioners is based on the provisions of Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011, which governs the independence requirements for members of Board of Commissioners. These provisions aim to ensure that Independent Commissioners do not have any specific relationships or interests that could affect their ability to act independently. The criteria for Independent Commissioners within the Company are as follows:

1. Has no affiliation related to financial relationship with the Company.
2. Has no affiliation related to the management of the Company.
3. Does not own shares of the Company either directly or indirectly.
4. Has no family relationship with other members of Board of Commissioners/Supervisory Board, members of Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with the SOE concerned.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Darwanto	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Aan Rusdianto
Memiliki hubungan afiliasi terkait hubungan keuangan dengan Perusahaan Has an affiliation related to financial relationships with the Company	x	x	x
Memiliki hubungan afiliasi terkait kepengurusan Perusahaan Has an affiliation related to the management of the Company	x	x	x

Kriteria Independensi Independence Criteria	Darwanto	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Aan Rusdianto
Memiliki saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung Own shares of the Company either directly or indirectly	x	x	x
Memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham utama/ pengendali Perusahaan Has an affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors and major shareholders/ controllers of the Company	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

Surat Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen
Independence Statement Letter of Each Independent Commissioner

Darwanto	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Aan Rusdianto
		

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan pengurusan Perusahaan, selaras dengan tujuan, strategi usaha, serta prinsip keberlanjutan untuk menjaga kesinambungan operasional dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Setiap anggota Direksi menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas, Direksi juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan kepada RUPS.

Board of Directors is the Company's governing organ that has the authority and responsibility to manage the Company in accordance with its objectives, business strategies, and sustainability principles to ensure operational continuity and long-term business growth. Each member of Board of Directors performs duties and makes decisions in accordance with the division of functions, responsibilities, and authorities as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. As a form of accountability, Board of Directors is also obligated to submit a report on the management of the Company to the GMS.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya. Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir sementara RUPS belum menetapkan penggantinya, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mekanisme pengisian sementara posisi anggota Direksi. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan Perusahaan tetap dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Adapun jabatan anggota Direksi dinyatakan berakhir apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BOARD OF DIRECTORS' TENURE

Members of Board of Directors are appointed for a tenure of 5 (five) years in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and may be reappointed for one (1) additional term. If a member of Board of Directors' tenure ends while the GMS has not yet appointed a successor, then the duties and responsibilities of the vacant position shall be carried out in accordance with the provisions governing the mechanism for temporarily filling Board of Directors positions. Thus, the Company's management activities can continue to run optimally and continuously.

A member of Board of Directors' tenure is deemed to have ended if any of the following conditions occur:
1. He/she passed away;
2. His/her tenure ends;
3. Dismissed based on the GMS resolution; and
4. No longer fulfill the requirements as a member of Board of Directors based on the Articles of Association and laws and regulations.

KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Persyaratan Materiil

Syarat materiil bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan antara lain:
1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

CRITERIA AND/OR REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Material Requirements

The material requirements for a person to be appointed to the Company's Board of Directors include:
1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honesty;
6. Good conduct; and
7. High dedication to advancing and developing the Company.

Persyaratan Formal

Syarat formal bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan antara lain:

1. Orang perseorangan.
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Perusahaan, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Formal Requirements

The formal requirements for a person to be appointed to the Company's Board of Directors include:

1. An individual person;
2. Legally competent to perform legal acts;
3. Has not been declared bankrupt within the 5 (five) years prior to the appointment;
4. Never having been a member of Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing a Company, subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt within the 5 (five) years prior to the appointment; and
5. Never been convicted of a criminal offense causing financial loss to the State, the Company, its subsidiaries, other business entities, and/or involving the financial sector within the 5 (five) years prior to the appointment.

Persyaratan Lainnya

Selain syarat materiil dan formal, terdapat persyaratan lainnya yang harus dipenuhi Calon Anggota Direksi, yaitu:

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah; dan
3. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perusahaan atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode.

Other Requirements

In addition to the material and formal requirements, there are other requirements that candidates for members of Board of Directors must meet, which are:

1. Not a political party official, a candidate for legislative office, and/or a member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial House of Representatives, or Regency/City House of Representatives.
2. Not a candidate for regional head or deputy regional head and/or a regional head or deputy regional head, including acting regional heads or deputy regional heads; and
3. Has not served as a member of Board of Directors of the relevant Company or Subsidiary for 2 (two) terms.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2025

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2025
Composition and Structure of Board of Directors as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Service	Periode Jabatan Service Periode
Ary Henryanto	Direktur Utama President Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 dan No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 1 Maret 2024. Circular Resolution of Shareholders in lieu of GMS KP.10.05/1/3/8/RKTK/UTMA/PLND-24 and No. SK.03/1/3/9/HKP/DRU/PSD-24 dated March 1, 2024.	1 Maret 2024 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 March 1, 2024, through the Annual General Meeting to be held in 2029	Ke-1 1st
Yarham Harid	Direktur Teknik Technical Director			
Rizki Kurniawan	Direktur Strategi dan Komersial Strategy and Commercial Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/7/11/7/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No.SK.03/7/11/8/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 07 November 2023 Circular Resolution of Shareholders in lieu of GMS No. KP.03/7/11/7/RKTK/UTMA/PLND-23 and No.SK.03/7/11/8/HKP/DRU/PSD-23 dated November 7, 2023	7 November 2023 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 November 7, 2023, until the GMS to be held in 2028	

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2025
Composition and Structure of Board of Directors as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Service	Periode Jabatan Service Periode
Arif Rusman Yulianto	Direktur Operasi Operations Director	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar RUPS No. KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 dan No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023 Circular Resolution of Shareholders in lieu of GMS KP.03/24/2/2/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. SK.03/24/2/HKP/DRU/PSD-23 dated February 24, 2023	1 Maret 2023 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 March 1, 2023 until the GMS to be held in 2028	Ke-1 1st
Edi Priyanto	Direktur SDM HC Director			
Yoni Setiawan	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director			

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

BOARD MANUAL: PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI

Perusahaan telah menetapkan *Board Manual* atau Pedoman Tata Laksana Kerja sebagai acuan bagi Direksi dalam melaksanakan fungsi kepengurusan Perusahaan, termasuk dalam menjalankan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris maupun organ perusahaan lainnya. Pedoman tersebut diberlakukan melalui Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/1/12/1/HLTK/DIRU/PLMT-21 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) pada PT Pelindo Multi Terminal.

Secara umum, *Board Manual* memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan fungsi dan keanggotaan Direksi, prinsip independensi, etika jabatan, tugas dan kewenangan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Selain itu, pedoman tersebut juga mengatur prinsip pengambilan keputusan, program pengenalan dan peningkatan kompetensi, pembagian tugas antaranggota Direksi, peran organ pendukung Direksi, mekanisme penilaian dan evaluasi kinerja, hubungan Perusahaan dengan anak perusahaan, hingga tata pelaksanaan rapat bersama Dewan Komisaris sebagai bagian dari penguatan governansi korporat di lingkungan Perusahaan.

TUGAS DIREKSI

Board Manual Perusahaan telah mengatur secara jelas mengenai tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hak Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan Perusahaan. Secara umum, Direksi bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan seluruh kegiatan usaha Perusahaan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar. Selain itu, Direksi juga memiliki kewenangan untuk mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam berbagai tindakan hukum

The profiles of all Board of Directors can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

BOARD MANUAL: BOARD OF DIRECTORS' WORK PROCEDURES GUIDELINES

The Company has established a Board Manual, or Work Procedures, as a reference for Board of Directors in carrying out their management functions, including in maintaining working relationships with the Board of Commissioners and other corporate bodies. These guidelines were enacted through Board of Directors Regulation No. SK.01.01/1/12/1/HLTK/DIRU/PLMT-21 dated December 1, 2021, regarding Guidelines for Work Procedures Governing Relations Between Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) at PT Pelindo Multi Terminal.

In general, the Board Manual contains various provisions related to the functions and membership of Board of Directors, principles of independence, professional ethics, duties and authorities, rights and obligations, as well as the Board of Directors' responsibilities in managing the Company. In addition, these guidelines also regulate decision-making principles, orientation and competency development programs, division of duties among Board members, roles of the Board's supporting organs, performance assessment and evaluation mechanisms, the Company's relationship with its subsidiaries, and procedures for joint meetings with Board of Commissioners—all as part of strengthening corporate governance within the Company.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES

The Company's Board Manual clearly sets forth the duties, authorities, responsibilities, and rights of Board of Directors in carrying out its management functions. In general, Board of Directors is responsible for managing and conducting all of the Company's business activities in the best interests of the Company and to achieve its objectives in accordance with the Articles of Association. In addition, Board of Directors also has the authority to represent the Company, both in and out of court, in various legal actions and business activities,

dan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib memberikan dedikasi, perhatian, serta komitmen penuh terhadap pengelolaan Perusahaan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Setiap anggota Direksi juga dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain tanggung jawab tersebut, Direksi juga memiliki tugas lain yang mendukung efektivitas pengelolaan dan keberlangsungan usaha Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan;
3. Memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan lainnya.

WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; dan
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

while adhering to the limitations set forth in applicable laws and regulations, Articles of Association, and GMS resolutions.

In carrying out its duties, Board of Directors is required to demonstrate dedication, attention, and full commitment to the management of the Company and the achievement of established targets. Each member of Board of Directors is also required to perform their duties professionally by upholding the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in accordance with applicable regulations.

In addition to these responsibilities, Board of Directors also has other duties that support the effectiveness of management and the sustainability of the Company's business, including the following:

1. Prepare the Register of Shareholders, Special Register, minutes of GMS and minutes of Board of Directors meetings;
2. Preparing the annual report and financial documents of the Company;
3. Maintain the entire Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of GMS Meetings, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company Financial Documents as well as other Company Documents.

BOARD OF DIRECTORS' AUTHORITIES

In carrying out its duties, Board of Directors is authorized to:

1. Establish the Company's management policy;
2. Arrange the transfer of power of Board of Directors to one or several members of Board of Directors to make decisions on behalf of Board of Directors or represent the Company inside and outside the Court;
3. Regulate the transfer of power of Board of Directors to represent the Company inside and outside the Court to a person specifically appointed for that purpose or to a person or several employees of the Company either individually or jointly;
4. Regulate the provisions concerning the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old age pensions and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and the GMS resolution;
5. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment regulations and prevailing laws and regulations;
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary; and
7. Perform all actions and other deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, as well as representing the Company inside and outside the Court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or the GMS Resolution.

Pembagian tugas dan kewenangan masing-masing anggota Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Perusahaan. Apabila pembagian tugas tersebut belum ditentukan dalam RUPS, maka pengaturannya dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi guna memastikan pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan tetap berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan, Direksi wajib melaksanakan arahan dan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

Selain itu, RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan, menambah, maupun mengurangi batasan terhadap tindakan tertentu yang dapat dilakukan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. RUPS juga dapat menetapkan pembatasan lain sesuai kebutuhan dan kepentingan Perusahaan guna memastikan setiap keputusan strategis dilaksanakan secara *prudent* dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tugas dan kewenangan Direksi dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
   a. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
   b. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
   c. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (a) di atas, hanya membicarakan masalah yang berkaitan sesuai dengan alasan permintaan penyelenggaraan RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
2. Terkait dengan strategi dan rencana kerja:
   a. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
      Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RJPP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan tertulis, dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
      i) Susunan Materi RJPP
         RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan RJPP dari Kementerian Negara BUMN.
      ii) Tata laksana penyampaian RJPP kepada RUPS diatur sebagai berikut:
         - Rancangan RJPP yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
         - Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya Rancangan RJPP dalam RUPS;

The division of duties and authorities among members of Board of Directors is determined by a resolution of the GMS in accordance with the Company's management needs. If such division of duties has not been determined at the GMS, it shall be regulated by Board of Directors Regulations to ensure that the Company's management functions continue to be carried out effectively and in a coordinated manner.

In managing the Company, Board of Directors are required to implement the directives and resolutions set forth by the GMS as long as they do not conflict with applicable laws and regulations or the Company's Articles of Association.

In addition, the GMS has the authority to establish, add, or reduce limitations on certain actions that may be taken by the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association. The GMS may also establish other restrictions as needed and in the Company's best interests to ensure that every strategic decision is implemented prudently and in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Detailed explanation of duties and authorities of Board of Directors is as follows:

1. Related to the General Meeting of Shareholders (GMS):
   a. Board of Directors shall organize the Annual GMS and Extraordinary GMS preceded by an invitation to the GMS in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association and laws and regulations;
   b. Board of Directors shall make an invitation to the GMS within a period of no later than 15 days from the date on which the request for the GMS is received;
   c. The GMS held by Board of Directors based on the GMS invitation as referred to in point (a) above, shall only discuss related issues in accordance with the reason for the request to hold the GMS and other meeting agenda items deemed necessary by the Board of Directors;
2. Related to strategy and work plan:
   a. Preparation and Submission of the Company's Long Term Plan (RJPP).
      Board of Directors is obliged to prepare in due time the RJPP and its amendments and submit it to Board of Commissioners to obtain written responses, and Shareholders to obtain GMS ratification.
      i) Composition of RJPP Material
         RJPP is a strategic plan that contains the Company's goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. The RJPP format refers to the provisions of RJPP preparation from the Ministry of State-Owned Enterprises.
      ii) The procedure for submitting the RJPP to the GMS is regulated as follows:
         - The RJPP draft that has been signed with Board of Commissioners is submitted to the GMS for ratification;
         - Ratification of RJPP shall be stipulated no later than 60 days after receipt of the RJPP Draft in the GMS;

- Jika dalam waktu 60 hari belum disahkan, maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan;
- Sebelum waktu 60 hari sebelum berakhirnya RJPP, Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya.

iii) Perubahan RJPP
Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi;
- Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20%;
- Perubahan RJPP harus ditandatangani Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku. Tata laksana penyampaian RKAP diatur sebagai berikut:
i) Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
ii) Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud poin (i) di atas, disampaikan oleh Direksi kepada para Pemegang Saham paling lambat 60 hari sebelum dimulainya tahun buku pertama RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
iii) Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan);
iv) Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada poin (iii) di atas, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan;
v) Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada poin (ii) di atas harus disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS, persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.

c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan
Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
i) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan

- If within 60 days it has not been ratified, the RJPP Draft shall be deemed to have been approved;
- Prior to 60 days before the expiration of RJPP, Board of Directors must submit the RJPP draft for the following period.

iii) Amendment of RJPP.
In the event that amendments of RJPP need to be made, the following provisions apply:
- Amendments of RJPP can only be made if there are material changes that are beyond Board of Directors control;
- Such material changes are changes that result in a deviation in achievement of more than 20%;
- Amendments of RJPP must be signed by Board of Commissioners and Board of Directors and then submitted to the GMS for ratification.

b. Preparation of the Company's Work Plan and Budget.
Board of Directors must prepare the Company's Work Plan and Budget for each fiscal year. The procedure for submitting the RKAP is regulated as follows:
i) The RKAP draft that has been signed by all members of Board of Directors shall be submitted to Board of Commissioners to be reviewed and signed before being submitted to Shareholders;
ii) The RKAP draft which has been signed by all members of Board of Directors and all members of Board of Commissioners as referred to in letter (i) above, shall be submitted by Board of Directors to Shareholders at latest 60 days prior to the commencement of the first fiscal year of RKAP concerned to obtain the GMS ratification with due observance of the prevailing provisions;
iii) The RKAP draft shall be approved by the GMS no later than 30 days after the current fiscal year (the fiscal year of the RKAP concerned);
iv) In the event that the RKAP draft has not been submitted by Board of Directors and/or the RKAP has not been approved within the period as referred to in letter c above, the previous year's RKAP shall apply;
v) The RKAP draft as referred to in letter (ii) above shall be made available at the Company's office from the date of the invitation until the date of the GMS, the approval of which shall be for the benefit of Shareholders.

c. Preparation and Submission of Annual Report.
Board of Directors must prepare an Annual Report which contains at least:
i) A financial report consisting of at least the balance sheet at the end of the last fiscal year in comparison with the previous fiscal year, a profit and loss statement for the fiscal year concerned, a cash flow statement, and a statement of changes in equity, as well as a report on the Company's

mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
ii) Laporan mengenai kegiatan Perusahaan;
iii) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, jika ada;
iv) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan;
v) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
vi) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
vii) Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku yang baru lampau.

Tata laksana penyampaian Laporan Tahunan disampaikan sebagai berikut:
i) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
ii) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada poin (i) di atas ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris;
iii) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris, disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
iv) Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud, harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan;
v) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada poin (iii) di atas dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan;
vi) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud poin (iii) di atas, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah Tahun Buku berakhir;
vii) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pengesahan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut dinyatakan dalam

rights that are not recorded in the books, among others, as a result of the write-off of receivables;

ii) Report on the Company's activities;
iii) Report on the implementation of social and environmental responsibilities, if any;
iv) Details of problems arising during the fiscal year that affect the Company's business activities;
v) A report on the supervisory duties performed by Board of Commissioners during the past fiscal year;
vi) Names of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners;
vii) Salary and allowances/facilities for members of Board of Directors and honorarium and allowances/facilities for members of Board of Commissioners of the Company for the previous fiscal year.

The procedure for submitting the Annual Report is as follows:
i) The Annual Report draft including the financial statements audited by public accountant, which has been signed by all members of Board of Directors, shall be submitted to Board of Commissioners to be reviewed and signed before being submitted to the Shareholders.
ii) The Public Accountant as referred to in letter (i) above shall be appointed by the GMS on the proposal of Board of Commissioners.
iii) The Annual Report which has been signed by all members of Board of Directors and all members of Board of Commissioners, shall be submitted by Board of Directors to the Shareholders no later than 5 (five) months after the end of the Fiscal Year with due observance of the prevailing regulations.
iv) In the event that any member of Board of Directors and Board of Commissioners does not sign the Annual Report, the reasons must be stated in writing or the reasons must be stated by Board of Directors in a separate letter attached to the Annual Report.
v) In the event that there are members of Board of Directors or members of Board of Commissioners who do not sign the Annual Report as referred to in letter (iii) above and do not give reasons in writing, the person concerned shall be deemed to have approved the contents of Annual Report.
vi) Approval of the Annual Report including ratification of Financial Statements as referred to in letter (iii) above, shall be made by the GMS no later than the end of the sixth month after the Fiscal Year ends.
vii) Approval of the Annual Report including ratification of the Financial Statements by the GMS, also means the granting of ratification and release to the members of Board of Directors and members of Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the past Fiscal Year, to the

Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

viii) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin (iii) di atas harus disediakan di Kantor Perusahaan, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS, persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham;

ix) Dalam hal laporan keuangan yang diselesaikan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen
Direksi wajib menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Laporan berkala tersebut adalah Laporan Manajemen Perusahaan yang memuat pelaksanaan RKAP meliputi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan, Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan, dan Laporan Tahunan atau *Annual Report*. Format Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan merujuk pada ketentuan penyusunan laporan manajemen dari Kementerian BUMN.

i) Laporan Manajemen Triwulanan
Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. Khusus untuk Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan IV, digabungkan menjadi Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan.

ii) Laporan Manajemen Tahunan
Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham. Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham.

Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dengan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal, maka Direksi harus melakukan revisi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh RUPS.

extent that such actions are stated in the Annual Report including the Financial Statements and in accordance with the applicable provisions.

viii) The Annual Report including the Financial Statements as referred to in point (iii) above must be made available at the Company's Office, from the date of the invitation until the date of the GMS, the approval of which is for the benefit of Shareholders.

ix) In the event that the completed financial statements are found to be untrue and/or misleading, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be jointly and severally liable to the party harmed, unless it is proven that the situation is not due to their fault.

d. Preparation and Submission of Management Report.
Board of Directors shall submit periodic reports according to the procedure and time in accordance with applicable regulations and other reports whenever requested by Board of Commissioners and/or Shareholders. The periodic report is the Company Management Report, which contains the implementation of RKAP including Quarterly Management Report, Annual Management Report and Annual Report. The format of Quarterly Management Report and Annual Management Report refers to the provisions for the preparation of management reports from the Ministry of SOEs.

i) Quarterly Management Report
Board of Directors must submit the Quarterly Management Report that has been signed by President Director and President Commissioner no later than 1 (one) month after the end of the relevant quarter. Specifically for the 4th Quarter Management Report, it is combined into the Annual Management Report.

ii) Annual Management Report
Board of Directors must submit the Annual Management Report that has been signed by all members of Board of Directors and Board of Commissioners no later than 2 (two) months after the end of the fiscal year to the Shareholders. Board of Directors shall submit the Annual Calculation that has been examined by Auditor no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year to the Shareholders.

If there is a difference between the Annual Management Report that has been submitted to the Shareholders and the Annual Calculation that has been examined by External Auditor, Board of Directors must revise the Annual Management Report to obtain approval and ratification by the GMS.

Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa Auditor Eksternal dilakukan oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

3. Terkait Manajemen Risiko:
   a. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
   b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
   c. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi, atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
   d. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.
4. Terkait Tata Kelola Teknologi Informasi:
   a. Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
   b. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.
   c. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perusahaan.
5. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM):
   a. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan uraian tugasnya.
   b. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan SDM yang meliputi sistem perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan Pekerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, promosi dan demosi serta mutasi.
   c. Memastikan penempatan Pekerja sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan.
   d. Meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
   e. Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan.
   f. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Pekerja sesuai dengan kompetensi jabatan.
   g. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara objektif dan transparan.
   h. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.
   i. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terkait dengan Etika Bisnis dan Anti Korupsi:
   a. Mengembangkan dan memimpin penerapan Pedoman GCG;

The Annual Calculation that has been examined by External Auditor is carried out by the GMS no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.

3. Related to Risk Management:
   a. Board of Directors, in every decision/action, must consider business risks.
   b. Board of Directors must develop and implement an integrated corporate risk management program that is part of GCG program implementation.
   c. The implementation of risk management program can be done by establishing a separate working unit under Board of Directors, or assigning an existing and relevant working unit to carry out the risk management function.
   d. Board of Directors must submit a report on the risk management profile and its handling together with the Company's periodic report.
4. Related to Information Technology Governance:
   a. Board of Directors may establish effective information technology governance.
   b. Board of Directors shall submit a report on the implementation of information technology governance periodically to Board of Commissioners.
   c. Board of Directors shall maintain and evaluate the quality of the information technology governance function in the Company.
5. Related to Human Capital (HC):
   a. Prepare the Company's organizational structure that is completed with job descriptions.
   b. Prepare and implement HC management guidelines covering the HC planning system, recruitment, selection, placement of Workers and positions in the Company's organizational structure, promotion and demotion and mutation.
   c. Ensuring the placement of Employees in accordance with the criteria for positions in the Company's organizational structure.
   d. Request approval from the Board of Commissioners to determine the organizational structure up to 1 (one) level below Board of Directors.
   e. Request approval from Board of Commissioners regarding the appointment of Head of Internal Audit Unit and Corporate Secretary.
   f. Ensuring the implementation of education and training for employees in accordance with job competencies.
   g. Carry out performance measurement and assessment for work units and positions in the organization objectively and transparently.
   h. Regulate the provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old age pensions and other income for employees based on applicable laws and regulations and GMS resolutions.
   i. Appoint and dismiss employees based on the Company's employment regulations and prevailing laws and regulations.
6. Related to Business Ethics and Anti-Corruption:
   a. Develop and lead the implementation of GCG Guidelines;

b. Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) pada Perusahaan;
c. Tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari Pejabat Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan;
d. Memastikan seluruh kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga Pemerintah yang berwenang dipatuhi oleh semua wajib lapor yang ditetapkan sesuai Peraturan Direksi dalam lingkungan Perusahaan.

7. Terkait Sistem Pengawasan Intern:
Direksi harus menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Lingkungan pengawasan intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
i) Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan;
ii) Filosofi dan gaya manajemen;
iii) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
iv) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
v) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan;
e. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

8. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi:
a. Mengungkapkan penerapan GCG di Perusahaan dan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif;

b. Develop provisions governing the reporting mechanism for alleged irregularities (Whistleblowing System) in the Company;
c. Not giving or offering or receiving directly or indirectly anything of value to and/or from Government Officials and/or other parties to influence or in return for what they have done and other actions in accordance with laws and regulations and the Company's Gratification Control Guidelines;
d. Ensure that all obligations to submit the State Official Wealth Report (LHKPN) to the authorized Government agency are complied with by all mandatory reporters determined in accordance with Board of Directors Regulation within the Company.

7. Related to Internal Control System:
Board of Directors shall establish a policy on effective internal control system to secure the Company's investments and assets, including, among others, investments the following:
a. Disciplined and structured internal control environment within the Company, consisting of:
i) Integrity, ethical values and competence of employees;
ii) Management philosophy and style;
iii) The manner in which management exercises its authority and responsibility;
iv) Organization and development of human capital; and
v) Attention and direction given by Board of Directors.
b. Assessment of business risk management (risk assessment), which is a process to identify, analyze and assess relevant risk management;
c. Control activities, namely actions carried out in a process of controlling the Company's activities at every level and unit in the Company's organizational structure, including regarding authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of work performance, division of duties, and security of the Company's assets;
d. Information and communication system, which is a process of presenting reports on operational, financial, and compliance with laws and regulations by the Company;
e. Monitoring, which is the process of assessing the quality of internal control system, including the internal audit function at each level and unit in the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally.

8. Related to the Disclosure and Confidentiality of Information:
a. Disclose the implementation of GCG in the Company and important information in the Annual Report and Financial Statements and other information to other parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner;

b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu dan kelompok.

9. Terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG):
   a. Melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
      i) Penilaian (*assessment*) GCG di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
      ii) Evaluasi (*review*) dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (i), yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan (*self-assessment*).
   b. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.
   c. Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan melalui mekanisme rapat Direksi.
   d. Terkait dengan pengawasan kepatuhan Perusahaan, dijalankan secara bersama oleh fungsi-fungsi terkait di dalam Perusahaan.
10. Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan:
    Direksi mengembangkan hubungan dengan stakeholders Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip:
    a. Menghormati hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan *stakeholders*.
    b. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan adalah melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
    d. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Pekerja, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
    e. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.

b. Confidential information obtained while serving as a member of the Company's Board of Directors must remain confidential in accordance with applicable laws and regulations.
c. In terms of maintaining the confidentiality of the Company's information, Board of Directors are required to prioritize the interests of the Company over individual and group interests.

9. Related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG):
   a. Measuring the implementation of GCG in the form of:
      i) GCG assessment in the Company through measurement of the implementation and application of GCG in the Company, which is carried out periodically every 2 (two) years;
      ii) Evaluation (review) and implementation of GCG in the Company carried out in the following year after the assessment as referred to in point (i), which includes evaluation of the assessment results and follow-up on recommendations for improvement (self assessment).
   b. The assessment and evaluation results shall be reported to the GMS together with the submission of annual report.
   c. Appointing a member of Board of Directors as the person in charge of GCG implementation and monitoring in the Company through the mechanism of Board of Directors meeting.
   d. Related to the supervision of the Company's compliance, carried out jointly by the relevant functions within the Company.
10. Relationship with stakeholders:
    Board of Directors develops relationships with the Company's Stakeholders based on the principles of:
    a. Respect the rights of Stakeholders arising under the prevailing laws and regulations and/or agreements made by the Company with Stakeholders.
    b. Ensuring that the Company carries out its social responsibility. One of the implementation of the Company's social responsibility is through Social and Environmental Responsibility Program in accordance with applicable laws and regulations.
    c. Ensure that the Company's assets, business locations and other facilities comply with the prevailing laws and regulations regarding environmental preservation, occupational health and safety.
    d. In hiring, determining the amount of salary, providing training, establishing career paths, and determining other employment requirements for Workers, the Company does not discriminate because of a person's ethnic background, religion, gender, age, disability or other special circumstances protected by laws and regulations.
    e. Provide a work environment that is free from all forms of pressure.

11. Terkait sistem akuntansi dan pembukuan:
    a. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
    b. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
    c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisis keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
12. Terkait respons terhadap peluang bisnis dan perubahan lingkungan bisnis:
    a. Mekanisme untuk merespons peluang bisnis dan merespons isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis melalui langkah:
        i) Usulan peluang bisnis dapat berasal dari Manajemen di bawah Direksi/Anggota Direksi/ Dewan Komisaris.
        ii) Direksi mengidentifikasi peluang bisnis dan atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar pada Perusahaan secara intensif, termasuk di dalamnya analisis risiko atas peluang dan atau perubahan kondisi tersebut.
        iii) Direksi mengambil keputusan atas usulan tersebut.
        iv) Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.
    b. Pembahasan isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan dimaksudkan untuk menangkap peluang bisnis atau yang berakibat menjadi permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perusahaan.
    c. Direksi harus segera merespons informasi yang diterima pada setiap terjadinya perubahan lingkungan yang berpengaruh signifikan pada kinerja Perusahaan dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris.
13. Terkait dengan tugas dan kewajiban lain:
    Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Direksi secara khusus diatur sebagai berikut:
1. Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya
   Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak berwenang bertindak

11. Related accounting and bookkeeping systems:
    a. Develop an accounting system based on the principles of internal control, especially the separation of management, recording, storage and supervision functions.
    b. Prepare financial statements based on financial accounting standards and submit to the Public Accountant for audit.
    c. Organize and maintain the Company's books and administration to produce orderly bookkeeping, adequate working capital at an efficient cost, a good and solid balance sheet structure, timely and accurate presentation of financial reports and analysis and other principles in accordance with the prevalence applicable to a Company.
12. Related to responses to business opportunities and changes in the business environment:
    a. Mechanisms to respond to business opportunities and respond to current issues from external sources regarding changes in the business environment through:
        i) Proposed business opportunities may originate from Management under the Board of Directors, Members of Board of Directors and Board of Commissioners.
        ii) Board of Directors identifies business opportunities and or changes in the business environment that have a major impact on the Company intensively, including risk analysis of these opportunities and or changes in conditions.
        iii) Board of Directors makes a decision on the proposal.
        iv) For proposed business opportunities that are approved and included in the authority of Board of Commissioners and/or GMS, Board of Directors submits to the Board of Commissioners the proposed opportunity accompanied by a feasibility study and discusses with Board of Commissioners
    b. Discussion of current issues regarding changes in the business environment and problems that have a major impact on the Company's business and performance is intended to capture business opportunities or that result in problems that have a significant impact on the Company's business and performance.
    c. Board of Directors must immediately respond to information received on any environmental changes that have a significant impact on the Company's performance and immediately report to the Board of Commissioners.
13. Related to other duties and obligations:
    Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association or those stipulated by the GMS and laws and regulations.

Board of Directors authority is specifically regulated as follows:
1. President Director's authority and its Delegation
   In order to carry out the Company's management policy, President Director is authorized to act for and on behalf

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
d. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
e. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

2. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perusahaan

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila:

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, yang ditunjuk melalui rapat Direksi; atau
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan dan tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris, maka Perusahaan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

of the Board of Directors and represent the Company provided that all actions of the President Director have been approved by Board of Directors Meeting.

In the absence or inability of President Director for any reason, which need not be proven to a third party, the following provisions shall apply:

a. A member of Board of Directors appointed in writing by President Director is authorized to act for and on behalf of Board of Directors, and to perform the duties of President Director.
b. In the event that President Director does not make an appointment, the longest serving member of Board of Directors shall be authorized to act for and on behalf of Board of Directors and perform the duties of President Director.
c. In the event that there are more than 1 (one) member of Board of Directors who is the longest in office, member of Board of Directors who is the longest in office and the oldest in age is authorized to act for and on behalf of Board of Directors and carry out the duties of President Director.
d. In the event that one of the members of Board of Directors other than President Director is absent for any reason, which need not be proven to a third party, the other members of Board of Directors shall appoint one of members of Board of Directors to perform the duties of the absent member of Board of Directors
e. Board of Directors, for certain actions on its own responsibility, is also entitled to appoint one or more persons as its representative or proxy, by giving him/her or them the power for such certain actions as stipulated in the power of attorney.

2. Members of Board of Directors who are not authorized to represent the Company

Members of Board of Directors are not authorized to represent the Company both inside and outside the court if:

a. There is a case before the Court between the Company and member of Board of Directors concerned; or
b. The member of Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company.

In the event that there are circumstances as mentioned above, those entitled to represent the Company are:

c. Other members of Board of Directors who do not have conflict of interest with the Company, appointed through Board of Directors meeting; or
d. Board of Commissioners in the event that all members of Board of Directors have conflict of interest with the Company; or
e. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of Board of Directors or Board of Commissioners have conflict of interest with the Company.

In the event that all members of Board of Directors have conflict of interest with the Company and none of the members of Board of Commissioners, the Company shall be represented by another party appointed by GMS.

3. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi

   Apabila tidak diatur lain oleh Direksi, dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (bila ada) berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

   Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

4. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu
   Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
5. Pendelegasian Wewenang dalam Penyampaian Informasi
   a. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada Pemohon Informasi Publik dilakukan atas persetujuan Direktur Utama atas nama Direksi.
   b. Pengungkapan Informasi Terbatas kepada Pemohon Informasi Publik dilakukan atas persetujuan pejabat setingkat di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
   c. Informasi yang belum terklasifikasi, tidak dapat diungkap kepada Pemohon Informasi Publik sebelum informasinya ditetapkan klasifikasinya oleh Direksi.
   d. Pemberi Informasi Perusahaan merupakan Juru Bicara Perusahaan sesuai dengan kewenangannya, dengan ketentuan Pemberi Informasi Perusahaan adalah Direksi, SVP Sekretariat Perusahaan atau spoke person lain yang ditunjuk dapat menyesuaikan.
6. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perusahaan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak Lain dengan Perusahaan

   a. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
      i) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
      ii) Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), kerja sama pemeliharaan, kerja sama penyediaan tenaga kerja, Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO), dan perjanjian kerja sama lainnya dengan nilai dan/atau jangka waktu tertentu;

3. Delegation of Authority Among Members of Board of Directors
   If not otherwise stipulated by Board of Directors, in the event that one of members of Board of Directors other than President Director and Vice President Director (if any) is absent for any reason, which need not be proven to a third party, the other members of Board of Directors shall appoint one of the members of Board of Directors to carry out the duties of absent member of Board of Directors.

   The division of duties and authority of each member of Board of Directors shall be determined by the GMS. In the event that the GMS does not stipulate the division of duties and authority, the division of duties and authority among Board of Directors shall be determined by Board of Directors' decision.

4. Authorization for Certain Actions
   Board of Directors, for certain actions on its own responsibility, is also entitled to appoint one or more persons as its representative or proxy, by granting to him/her or to them the power for such certain actions as stipulated in the power of attorney.

5. Delegation of Authority in the Delivery of Information
   a. Disclosure of Confidential Information to the Applicant of Public Information shall be made with President Director approval on behalf of Board of Directors.
   b. Disclosure of Restricted Information to the Applicant of Public Information shall be made with approval of an officer at the level below Board of Directors or other officer appointed by President Director.
   c. Unclassified information cannot be disclosed to the Applicant of Public Information before the information is classified by Board of Directors.
   d. The Company's Information Provider is the Company's Spokesperson in accordance with his/her authority, provided that the Company's Information Provider is Board of Directors, SVP of Corporate Secretariat or other designated spoke person can adjust.
6. Authority to Perform Actions
   Regarding Management and Ownership and Bind the Company with Other Parties and/or Other Parties with the Company
   a. Implementation of Board of Directors' Authority which must obtain written approval from Board of Commissioners:
      i) Pledging fixed assets for short-term credit;

      ii) Entering into cooperation with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (JO), maintenance cooperation, labor supply cooperation, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation agreements with a certain value and/or period of time;

iii) Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
iv) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
v) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
vi) Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
i) Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

ii) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

b. Pelaksanaan wewenang Direksi yang dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:

i) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
ii) Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
iii) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
iv) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
v) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
vi) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
vii) Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), kerja sama pemeliharaan, kerja sama penyediaan tenaga kerja, Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO), dan perjanjian kerja sama lainnya dengan nilai dan/atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf (a) di atas;
viii) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

iii) Receive or provide short/medium/long term loans, except loans (payables or receivables) arising from business transactions, and loans provided to the Company's subsidiaries reported to Board of Commissioners;

iv) Writing off bad debts and dead inventory;
v) To dispose of movable fixed assets with an economic life commonly applicable in the industry in general of up to 5 (five) years;
vi) Establishing an organizational structure of up to 1 (one) level below the Board of Directors.

Written approval from Board of Commissioners is given with the following conditions:
i) If within 30 days from the receipt of application or complete explanation/additional data from Board of Directors, Board of Commissioners does not make a decision, Board of Commissioners shall be deemed to have approved the proposal of Board of Directors.
ii) If within 30 (thirty) days from the receipt of application or explanation/additional data from Board of Directors, Board of Commissioners does not provide a written response, General Meeting of Shareholders may make a decision without any written response from Board of Commissioners.

b. Implementation of the Board of Directors' authority that can be carried out after obtaining a written response from Board of Commissioners and approval from the GMS to:
i) Pledging fixed assets for medium/long term credit;

ii) Make capital investments in other companies;

iii) Establish subsidiaries and/or joint venture companies;
iv) Release capital participation in subsidiaries and/or joint ventures;
v) Conducting merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
vi) Binding the Company as a guarantor (borg or avalist);
vii) Entering into cooperation with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (JO), maintenance cooperation, labor supply cooperation, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation agreements with a value and/or period exceeding the stipulation of the GMS as referred to in point 6 letter (a) above;

viii) Not collecting bad debts that have been written off;

ix) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
x) Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;

xi) Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;

c. Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, baik tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun tindakan-tindakan lainnya:
i) Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
ii) Pembebanan biaya Perusahaan untuk kegiatan yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang bersifat tetap;
iii) Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan;

d. Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS:
i) Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau
ii) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

ix) Releasing and writing off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with an economic life commonly applicable in the industry in general of up to 5 (five) years;
x) Determine the blueprint of the Company's organization;
xi) Establish and change the Company's logo;

c. Perform actions that have not been stipulated in the RKAP, both actions that require the approval of Board of Commissioners and other actions;

i) Establish foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company that have an impact on the Company;
ii) Charging the Company's expenses for the activities of foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company that are permanent in nature;
iii) Proposing Company representatives to become candidates for members of Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries or joint ventures.

d. Implementation of Board of Directors' authority that must obtain approval from the GMS:
i) Transferring the Company's assets; or
ii) Pledging the Company's assets as debt collateral; which constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not.

KEWAJIBAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

BOARD OF DIRECTORS' OBLIGATIONS

In carrying out its duties, Board of Directors is obliged to:
1. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities;
2. Prepare in due time the Company's Long Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, and any amendments thereto and submit them to Board of Commissioners and Shareholders for ratification by the GMS;

3. Provide an explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
4. Prepare the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders and Minutes of Board of Directors Meeting;
5. Preparing the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the law on Company Documents;
6. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accountant for auditing;
7. Submitting the Annual Report including the Financial Statements to the GMS for approval and ratification;
8. Provide an explanation to the GMS regarding the Annual Report;

9. Menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan, dan Dokumen Perusahaan lainnya;
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan lainnya;
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

9. Submitting the Financial Statements that have been ratified by the GMS to the Minister in charge for Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations;
10. Submitting reports on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister in charge for Law and Human Rights;
11. Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meeting and Minutes of Board of Directors Meeting, Annual Report and Company Financial Documents as referred to in point 3 letter d and e above, and other Company Documents;
12. Keeping at the domicile of the Company: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meeting and Minutes of Board of Directors Meeting, Annual Report and Company Financial Documents and other Company Documents;
13. Prepare an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision;
14. Provide periodic reports in accordance with the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;
15. Prepare the Company's organizational structure complete with details of duties;
16. Provide an explanation of all matters asked or requested by Board of Commissioners and the Shareholders;
17. Prepare and determine the blue print of the Company's organization;
18. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the GMS based on laws and regulations.

BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES

The responsibilities of Board of Directors are as follows:
1. In performing its duties, Board of Directors is responsible to the GMS.
2. Each member of Board of Directors shall in good faith and with full responsibility perform his/her duties for the interest and business of the Company with due observance of the prevailing laws and regulations.
3. Each member of Board of Directors shall be personally liable if he/she is guilty or negligent in performing his/her duties for the interest and business of the Company, unless the member of Board of Directors concerned can prove that:
   a. The loss is not due to his/her fault or negligence;
   b. He/she has conducted the management in good faith and prudence for the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

HAK DIREKSI

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, Direksi memiliki hak sebagai berikut:

1. Memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan puma jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerjanya dalam hal Perusahaan mencapai tingkat keuntungan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
3. Menggunakan sarana dan fasilitas Perusahaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
4. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi menjalankan tugas pengurusan Perusahaan secara kolektif sebagai satu kesatuan organ Perusahaan. Namun demikian, untuk mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dilakukan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan di antara masing-masing anggota Direksi sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

Meskipun terdapat pembagian tugas tersebut, setiap anggota Direksi tetap memiliki tanggung jawab bersama atas pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Direksi secara kolektif tetap berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang telah dipercayakan kepada masing-masing anggota Direksi guna memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan pembagian tugas dan kewenangan Direksi dilakukan melalui keputusan RUPS. Dalam hal RUPS belum menetapkan pembagian dimaksud, pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Direksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan pembagian tugas Direksi melalui Peraturan Direksi Nomor OT.01.03/1/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Susunan Uraian Tugas Jabatan Organisasi PT Pelindo Multi Terminal. Berdasarkan peraturan tersebut, pembagian tugas Direksi diatur sebagaimana terlampir di bawah ini:

c. Has no conflict of interest either directly or indirectly over the management actions that resulted in the loss; and
d. Have taken measures to prevent the incidence or continuation of such losses.

4. Actions taken by members of Board of Directors other than those decided by the Board of Directors Meeting shall be their personal responsibility until such actions are approved by Board of Directors Meeting.

BOARD OF DIRECTORS' RIGHTS

In carrying out its roles and duties, Board of Directors has the following rights:

1. To receive salary and allowances/facilities, including compensation for retirement, the type and amount of which shall be determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations;
2. Receive tantiem as a reward for their work performance in the event that the Company achieves a profit level, the amount of which is determined by the GMS;
3. Use the Company's facilities for activities related to the interests of the Company in accordance with the laws and regulations and Company policies;
4. Obtaining leave in accordance with applicable regulations.

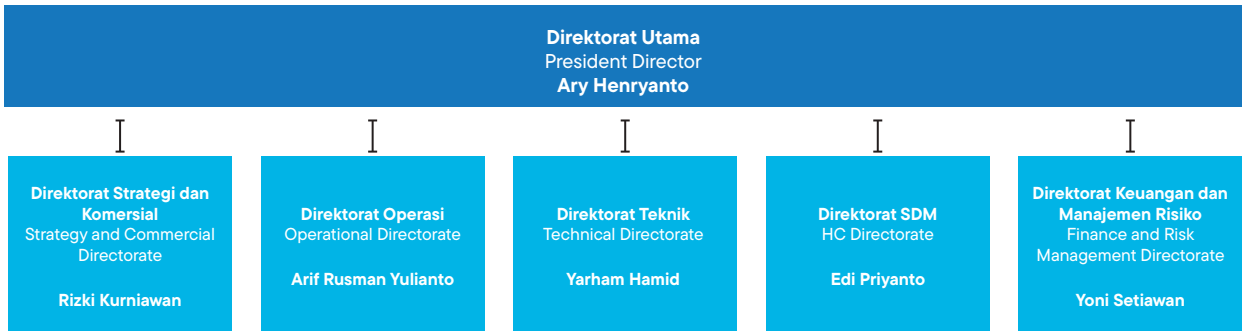
SCOPE OF BOARD OF DIRECTORS' DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Board of Directors collectively manages the Company as a single corporate organ. However, to ensure the effective and smooth execution of duties, functions, tasks, and authorities are divided among the individual members of Board of Directors in accordance with their respective areas of responsibility.

Despite this division of duties, each member of Board of Directors retains joint responsibility for the overall management of the Company. Therefore, Board of Directors collectively remains obligated to supervise the duties entrusted to each member of Board of Directors to ensure that the Company is managed in accordance with established policies and objectives.

The division of duties and authorities of Board of Directors is determined by a resolution of the GMS. In the event the GMS has not yet established such a division, the arrangement is set forth in Board of Directors Regulations as guidelines for performing the Company's management duties.

In this regard, the Company has established the division of duties among the Board of Directors through Board of Directors Regulation No. OT.01.03/1/8/2/PSOS/DIRU/PLMT-23 dated August 1, 2023, concerning the Organizational Structure and Job Descriptions of PT Pelindo Multi Terminal. Based on this regulation, the division of duties among the Board of Directors is set forth as attached below:



Berikut disampaikan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi.

The following is a description of duties and responsibilities of each Board of Directors.

Ary Henryanto
Direktur Utama
President Director

1. Sebagai pimpinan Perusahaan:
   a. Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun RJPP, dan melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RKAP dan RKM;
   b. Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi, dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP;
   c. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada (i) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP, RKAP, dan RKM, (ii) kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan budaya korporasi, citra positif Perusahaan, dan tata kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi misi Perusahaan;
   d. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern;
   e. Menandatangani seluruh persetujuan-persetujuan yang diputuskan di dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan, kecuali atas kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait;
   f. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan;
   g. Memimpin rapat Direksi dan rapat korporasi lainnya serta mengoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/RUPS; dan
   h. Memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang Perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Sebagai Pimpinan Direktorat Utama:
   a. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern;
   b. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan (*corporate secretary*);
   c. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern (internal audit) berupa audit operasional dan audit/reviu dengan tujuan tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit/reviu untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern, manajemen risiko, dan tata kelola Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan;
   d. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan Sekretariat Perusahaan dan pengawasan internal; dan
   e. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di seluruh korporasi sesuai kebijakan/pedoman di bidang SDM.

1. As the leader of the Company:
   a. Act as the leader of Board of Directors members to prepare RJPP, and implement the Company's business activities that have been determined in the RKAP and RKM;
   b. Directing and controlling the implementation of the Company's policies, vision, mission and strategies set forth in the RJPP;
   c. Direct and control all activities of the Company including but not limited to (i) planning, implementation, control and evaluation of the achievement of RJPP, RKAP and RKM, (ii) activities to improve corporate culture, positive image of the Company and good corporate governance in order to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;
   d. Lead and coordinate the preparation of strategies as an elaboration of the RJPP, RKAP and RKM in the activities of Corporate Secretariat and Internal Audit Unit;
   e. Signing all approvals decided in the Board of Directors meeting or outside the Board of Directors meeting in accordance with the provisions in the Company's articles of association, except for the authority that has been delegated based on related policies and Standard Operating Procedures (SOP);
   f. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company in accordance with the authority stipulated in the Company's articles of association;
   g. Chairing Board of Directors meetings and other corporate meetings and coordinating the Board of Directors for conducting of Board of Commissioners meetings/GMS; and
   h. Provide information related to everything about the Company to stakeholders.
2. As the Leader of Main Directorate:
   a. Lead and establish strategies as an elaboration of RJPP, RKAP and RKM in the activities of Corporate Secretariat and Internal Audit Unit;
   b. Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of corporate secretary activities;
   c. Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of internal audit activities in the form of operational audits and audits/reviews with specific objectives carried out effectively, as well as monitoring follow-up on recommendations from audits/reviews to assist Board of Directors in assessing the effectiveness of implementation of internal control, risk management and good corporate governance towards achieving the Company's objectives;
   d. Coordinate and evaluate the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SOP) related to the activities of Corporate Secretariat and internal control; and
   e. Ensure that employee development programs are implemented throughout the corporation in accordance with HC policies and guidelines.

Rizki Kurniawan
Direktur Strategi dan Komersial
Strategy and Commercial Director

1. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait perencanaan strategis seperti penetapan visi, misi, dan nilai perusahaan, formulasi rencana strategis Perusahaan, pengelolaan kinerja Perusahaan, *monitoring* dan *control* implementasi strategis serta manajemen strategi di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
2. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait kerjasama usaha dan pembinaan anak perusahaan seperti pengelolaan portofolio strategis Perusahaan, pengembangan bisnis inti dan di luar bisnis kepelabuhanan, serta mengarahkan dan mengimplementasikan tata kelola dan perencanaan strategis di anak perusahaan di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal; dan
3. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait komersial dan hubungan pelanggan seperti pemasaran, pengelolaan penjualan, hubungan pelanggan serta pengelolaan aset komersial di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

1. Direct and develop the implementation of strategies related to strategic planning such as the establishment of vision, mission and corporate values, formulation of the Company's strategic plan, management of Company performance, monitoring and control of strategic implementation and strategic management within PT Pelindo Multi Terminal;
2. Directing and developing the implementation of strategies related to business cooperation and fostering subsidiaries such as managing the Company's strategic portfolio, developing core business and outside the port business, as well as directing and implementing governance and strategic planning in subsidiaries within PT Pelindo Multi Terminal; and
3. Direct and develop the implementation of strategies related to commercial and customer relations such as marketing, sales management, customer relations and commercial asset management within PT Pelindo Multi Terminal.

Arif Rusman Yulianto
Direktur Operasi
Operations Director

1. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait perencanaan dan pengembangan operasi, seperti perencanaan, *pilot project*, serta implementasi standardisasi dan sistemasi operasi di lingkungan PT Pelindo Multi Teminal; dan
2. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait pengeloaan operasi, seperti pelayanan non-petikemas, *cargo*, dan pengelolaan fasilitas terminal penumpang di lingkungan PT Pelindo Multi Teminal.

1. Direct and develop the implementation of strategies related to operations planning and development, such as planning, pilot projects, and implementation of standardization and systemization of operations within PT Pelindo Multi Terminal; and
2. Directing and developing the implementation of strategies related to managing operations, such as non-container services, cargo, and management of passenger terminal facilities within PT Pelindo Multi Terminal.

Yarham Hamid
Direktur Teknik
Technical Director

1. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait fasilitas pelabuhan seperti perencanaan, *monitoring & controling* investasi infrastruktur, pembangunan & pemeliharaan fasilitas pelabuhan (Teknik sipil), pengelolaan proyek strategis, penghapusan aset fasilitas pelabuhan di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
2. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait pengelolaan peralatan pelabuhan seperti perencanaan, *monitoring & controling* investasi peralatan pelabuhan, implementasi & pemeliharaan peralatan pelabuhan, serta pengelolaan proyek strategis di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal; dan
3. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait teknologi informasi seperti strategi & perencanaan teknologi informasi, pengembangan teknologi informasi, operasi IT, dan *data management* di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

1. Direct and develop the implementation of strategies related to port facilities such as planning, monitoring & controlling infrastructure investment, construction & maintenance of port facilities (civil engineering), strategic project management, asset write-off of port facilities within PT Pelindo Multi Terminal;
2. Directing and developing the implementation of strategies related to port equipment management such as planning, monitoring & controling port equipment investment, port equipment implementation & maintenance, and strategic project management within PT Pelindo Multi Terminal; and
3. Directing and developing the implementation of strategies related to information technology such as information technology strategy & planning, information technology development, IT operations, and data management within PT Pelindo Multi Terminal.

Edi Priyanto
Direktur SDM
HC Director

1. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
2. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait Layanan SDM dan HSSE di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
3. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait pengelolaan hukum di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal; dan
4. Mengarahkan dan mengembangkan implementasi strategi terkait pengeloaan operasi, seperti kegiatan HSSE dan manajemen mutu di lingkungan PT Pelindo Multi Teminal.

1. Direct and develop the implementation of strategies related to the planning and management of Human Capital within PT Pelindo Multi Terminal;
2. Directing and developing the implementation of strategies related to HC and HSSE Services within PT Pelindo Multi Terminal;
3. Directing and developing the implementation of strategies related to legal management within PT Pelindo Multi Terminal; and
4. Directing and developing the implementation of strategies related to operations management, such as HSSE and quality management activities within PT Pelindo Multi Terminal.

Yoni Setiawan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan pengelolaan keuangan korporat, akuntansi, anggaran dan perpajakan, dan manajemen risiko;
2. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan Perusahaan, penggunaan anggaran Perusahaan, perencaanaan investasi Perusahaan berbasis risiko;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengelolaan sesuai standar PSAK, kegiatan *funding* dan *hedging*, kebijakan strategi Perusahaan berbasis manajemen risiko;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan perpajakan secara baik, akurat, aman dan tepat waktu baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perusahaan;
5. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang keuangan dan manajemen risiko sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
6. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan pengimplementasi risiko di Perusahaan;
7. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan dan bidang manajemen risiko atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait; dan
8. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.

1. Lead and set strategies as an elaboration of RJPP, RKAP and RKM in corporate financial management, accounting, budgeting and taxation, and risk management activities;
2. Coordinate, control and evaluate the implementation of the Company's financial planning activities, the use of the Company's budget, risk-based investment planning;
3. Coordinating, controlling and evaluating management activities in accordance with PSAK standards, funding and hedging activities, risk management- based Company strategy policies;
4. Coordinate the implementation, evaluate and approve the recording, administration and documentation activities as well as the preparation of tax reports in a good, accurate, safe and timely manner for both internal and external purposes of the Company;
5. Provide approval or business decisions in the field of finance and risk management in accordance with the delegation of authority from the Board of Directors;
6. Coordinate and evaluate the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SOP) related to risk implementation activities in the Company;
7. Signing agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, especially in the field of finance and risk management or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SOP; and
8. Coordinate and evaluate policies and activities in the areas under the Directorate of Finance and Risk Management.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan

Rapat Direksi merupakan forum yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membahas berbagai agenda pengelolaan Perusahaan, pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan Rapat Direksi dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui sarana komunikasi elektronik, seperti telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat dapat saling berkomunikasi, melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam proses rapat. Adapun ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka rapat Direksi dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Utama/Direksi yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama menjabat dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Anggota Direksi yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Policy

Board of Directors meetings are forums organized by Board of Directors to discuss various matters related to the Company's management, make strategic decisions, evaluate performance, and coordinate the implementation of business activities. Board of Directors meetings may be held in person or via electronic communication means, such as teleconferences, video conferences, or other electronic media that allow all meeting participants to communicate with one another, see and hear each other, and participate directly in the meeting process. The provisions regarding the conduct of Board of Directors meetings are as follows:

1. All Board of Directors meetings are chaired by President Director. In the event that President Director is absent or unable to attend, Board of Directors meeting shall be chaired by the Acting President Director/Director appointed or authorized by the President Director. In the event that the President Director does not make an appointment, one of the longest serving Directors as a member of Board of Directors shall chair the Board of Directors Meeting. In the event that the longest serving Director is more than 1 (one) person, the longest serving Director and the oldest in age shall act as chairman of Board of Directors Meeting.
2. Board of Directors Meeting is valid and entitled to make binding decisions, if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of members of Board of Directors or their representatives. Members of Board of Directors who are absent at the time of decision making must be contacted to immediately return to the meeting process. If they cannot be contacted, then the meeting participants are deemed to approve the meeting decisions taken.

3. Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa, dengan ketentuan:
   a. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya;
   b. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi;
   c. Apabila terdapat usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu alternatif memperoleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
   d. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat;
   e. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
   f. Hasil keputusan rapat mengikat seluruh Direktur, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh Direktur telah diberikan cukup kesempatan untuk mengetahui hasil rapat;
   g. Tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari; dan
   h. Direksi mengomunikasikan keputusan yang telah disahkan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengesahan.

Apabila terdapat perbedaan pendapat di dalam Rapat Direksi, maka:
1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan Anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;
2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat (sesuai dengan konsep *fiduciary duties*).
3. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

3. Board of Directors meeting decisions are determined by deliberation to reach a consensus, if no agreement is reached then the decision is determined by an ordinary majority vote, with the following provisions:
   a. Each member of Board of Directors is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for the member of Board of Directors he/ she represents;
   b. If there are equal number of votes in favor and against, then the meeting decision shall be in accordance with the meeting chairman's opinion with due observance of the provisions on accountability as a member of Board of Directors;
   c. If there are more than 2 (two) alternative proposals and the voting results have not obtained one alternative with more than 1/2 of the total votes cast, then re-election will be held on the 2 (two) alternatives that receive the most votes so that one alternative receives more than 1/2 of the total votes cast;
   d. A blank vote (abstain) shall be deemed to approve the proposal put forward in the meeting and shall be responsible for the meeting's decision;
   e. Invalid votes are considered to be absent and are not counted in determining the number of votes cast in the meeting;
   f. The meeting resolutions shall be binding on all Directors, whether present at the meeting or absent from the meeting, on the basis of consideration that the Board of Directors is collegial and all Directors have been given sufficient opportunity to know the meeting results.
   g. The level of immediacy of the Board of Directors' decision-making is determined no later than 7 (seven) days.
   h. Board of Directors shall communicate the ratified decision to the organizational level belowBoard of Directors related to the decision no later than 7 (seven) days after ratification.

If there is a dissenting opinions during a Board of Directors meeting, then:
1. Dissenting opinions must be included in the Minutes of Meeting and dissenting member of Board of Directors must disclose the reason for the dissenting opinion on the decision;
2. Dissent does not give the relevant member of Board of Directors the right not to implement the meeting's decision. Although there are differences of opinion, all members of Board of Directors are still obliged to follow and implement the meeting decisions (in accordance with the concept of fiduciary duties).
3. Actions taken by members of Board of Directors other than those decided by the Board of Directors meeting shall be their personal responsibility until such actions are approved by the Board of Directors meeting.

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Decisions can also be made outside Board of Directors meeting as long as all members of Board of Directors agree on the method and material decided.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi pada Rapat di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi menyelenggarakan rapat internal Direksi sebanyak 17 kali, rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebanyak 2 (dua) kali. Adapun informasi mengenai agenda rapat, risalah rapat, tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi, serta rekapitulasi kehadiran Direksi selama tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Board of Directors at 2025 Meetings

Throughout 2025, Board of Directors held 17 internal Board of Directors meetings, 12 joint meetings with Board of Commissioners, and 2 (two) Annual General Meetings of Shareholders (AGMs). Information regarding the meeting agendas, meeting minutes, attendance rates of each Board of Directors member, and a recapitulation of Board of Directors attendance throughout 2025 is presented as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

No	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Rabu, 15 Januari 2025 Wednesday, January 15, 2025	14.00 - 16.45 WIB 2:00 PM - 4:45 PM	1. Tindak Lanjut Rencana Pembelian 2 Unit HMC PT PIL; 2. Tindak Lanjut Penyediaan Pipa *Bypass* Terminal LNG Benoa. 1. Follow-up on the Plan to Purchase 2 HMC Units from PT PIL; 2. Follow-up on the Supply of Bypass Pipes for Benoa LNG Terminal.
2	Kamis, 16 Januari 2025 Thursday, January 16, 2025	11.00 - 18.30 WIB 11:00 AM - 6:30 PM	1. Rencana Kerjasama Penyediaan Fasilitas Pipa *Caustic Soda Liquid* di Terminal Kijing; 2. Pembahasan RKAP 2025. 1. Plan for Cooperation on Provision of Liquid Caustic Soda Pipeline Facilities at Kijing Terminal; 2. Discussion on the 2025 RKAP.
3	Selasa, 04 Maret 2025 Tuesday, March 4, 2025	13.50 - 15.00 WIB 1:50 PM - 3:00 PM	1. Rencana Pengalihan Aset HMC Milik PT PIL; 2. Penyusunan Jawaban kepada Konsultan EY terkait Somasi PT Bali Infra Gas. 1. Plan for Transfer of HMC Assets Owned by PT PIL; 2. Drafting of a Response to EY Consultant Regarding the Cease-and-Desist Letter from PT Bali Infra Gas.
4	Rabu, 19 Maret 2025 Wednesday, March 19, 2025	11.00 - 13.15 WIB 11:00 AM - 1:15 PM	1. Penyampaian Hasil Laporan Kajian Pengembangan Bisnis Terminal Non Petikemas Pelabuhan Bengkulu; 2. Pembahasan Pembelian Aset PIL untuk Relokasi ke Kijing (Rencana pembelian HMC. 1. Presentation of the Results of Business Development Review Report on Non-Container Terminals at Bengkulu Port; 2. Discussion on the Purchase of PIL Assets for Relocation to Kijing (Plan to purchase HMC).
5	Jumat, 25 April 2025 Friday, April 25, 2025	10.00 - 11.30 WIB 10:00 AM - 11:30 AM	Pembekalan Materi *Closing Audit* KAP. Briefing on Closing Audit Materials from the Public Accounting Firm.
6	Senin, 26 Mei 2025 Monday, May 26, 2025	13.00 – 18.00 WIB 1:00 PM - 6:00 PM	1. Persiapan Rakomdir Kinerja sd April 2025 2. Rencana Pengoperasian Ropang Trisakti 3. Optimalisasi TCK di Teluk Lamong 4. Pembahasan Jasa Pemborongan SDM 5. Pengembangan TCK *Branch* Dumai 1. Preparation for the Performance Coordination Meeting through April 2025 2. Operational Plan for Ropang Trisakti 3. Optimization of TCK in Lamong Bay 4. Discussion on Human Resources Contracting Services 5. Development of the TCK Dumai Branch
7	Senin, 16 Juni 2025 Monday, June 16, 2025	11.00 - 14.00 WIB 11:00 AM - 2:00 PM	1. Pembahasan Bahan Paparan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelindo Multi Terminal; 2. Tindak Lanjut Penerapan Manajemen Risiko. 1. Discussion on the GMS presentation materials regarding approval of annual reports and ratification of financial statements of PT Pelindo Multi Terminal for 2024 Fiscal Year; 2. Follow-up on the implementation of risk management.
8	Senin, 23 Juni 2025 Monday, June 23, 2025	10.00 - 12.00 WIB 10:00 AM - 12:00 PM	Pembahasan Bahan Paparan Rakomdir Kinerja Perusahaan sd Mei 2025. Discussion on the Rakomdir Presentation Materials: Company Performance until May 2025.

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

No	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
9	Rabu, 16 Juli 2025 Wednesday, July 16, 2025	14.00 - 17.00 WIB 2:00 PM - 5:00 PM	Pembahasan Struktur Organisasi (terbatas). Discussion on the Organizational Structure (restricted).
10	Kamis, 17 Juli 2025 Thursday, July 17, 2025	11.00 - 15.30 WIB 11:00 AM - 3:30 PM	1. Profil Risiko dan Nilai PKR Trw II 2025; 2. Pembahasan Prognosa 2025 dan Usulan 2026; 3. *Progress* RKM *Shadow.* 1. Risk Profile and PKR Values for the Second Quarter of 2025; 2. Discussion on the 2025 Forecast and 2026 Proposals; 3. Progress on the Shadow RKM.
11	Senin, 21 Juli 2025 Monday, July 21, 2025	17.00 - 17.40 WIB 5:00 PM - 5:40 PM	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi (terbatas). Discussion on the Proposed Organizational Structure (restricted).
12	Rabu, 23 Juli 2025 Wednesday, July 23, 2025	14.00 - 15.00 WIB 2:00 PM - 3:00 PM	Evaluasi Kinerja sd. Juni 2025 (*Rehearsal* Paparan Rakomdir). Performance Evaluation until June 2025 (Rakomdir Presentation Rehearsal).
13	Kamis, 28 Agustus 2025 Thursday, August 28, 2025	11.30 - 13.15 WIB 11:30 AM - 1:15 PM	1. *Rehearsal* Bahan Rakomdir Kinerja s.d Juli 2025; 2. Tindak Lanjut Pembahasan Usulan RKAP 2026 PMT dan Prognosa 2025. 1. Rakomdir Presentation Rehearsal on Performance until July 2025; 2. Follow-up on the Discussion of the Proposed 2026 PMT RKAP and 2025 Forecast.
14	Jumat, 26 September 2025 Friday, September 26, 2025	10.00 - 12.00 WIB 10:00 AM - 12:00 PM	1. *Update* Persiapan Acara Pelindo Day; 2. Pembahasan Bahan Paparan Panel Presentasi Anak Usaha untuk Pelindo Forum. 1. Update on Preparations for Pelindo Day; 2. Discussion on Presentation Materials for Subsidiary Panel Presentations at Pelindo Forum.
15	Selasa, 28 Oktober 2025 Tuesday, October 28, 2025	09.30 - 13.30 WIB 9:30 AM - 1:30 PM	1. Persiapan Pelaksanaan Acara Operasional dan Manajemen Forum PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025; 2. Persiapan Pelaksanaan Acara *Workshop* Rencana Strategis 2026-2030; 3. Usulan Investasi Tahun 2026; 4. Serah Operasi Terminal Kalimas, GSN, Kalianget dan Tanjung Tembaga. 1. Preparations for the 2025 PT Pelindo Multi Terminal Operational and Management Forum; 2. Preparations for the 2026–2030 Strategic Plan Workshop; 3. Proposed Investments for 2026; 4. Handover of Operations for Kalimas, GSN, Kalianget, and Tanjung Tembaga Terminals.
16	Selasa, 25 November 2025 Tuesday, November 25, 2025	09.30 - 11.30 WIB 9:30 AM - 11:30 AM	1. Progress Penyiapan Fasilitas Pemindahan Terminal LNG ke AP-2 BMTH; 2. Implementasi Restrukturisasi Organisasi & Penataan Komersial (*Switching Invoice*) dalam Mendukung Pemurnian Bisnis; 3. Rencana Spinoff Operasional Terminal Curah Kering *Food & Feed* Teluk Lamong ke PMT; 4. *Update Progress* Pengembangan TCK Bengkulu. 1. Progress on Preparing the LNG Terminal Transfer Facilities to AP-2 BMTH; 2. Implementation of Organizational Restructuring & Commercial Reorganization (Invoice Switching) to Support Business Refinement; 3. Plan for Operational Spinoff of Teluk Lamong Food & Feed Dry Bulk Terminal to PMT; 4. Progress Update on Development of TCK Bengkulu.
17	Jumat, 19 Desember 2025 Friday, December 19, 2025	09.30 - 12.00 WIB 9:30 AM- 12:00 PM	1. Rencana Implementasi Pembebanan PNBP 1% Kegiatan Bongkar Muat; 2. *Update Progress* Serah Operasi Teluk Lamong; 3. *Update Progress Switching Invoice* PTP; 4. *Update Progress* Kalimas; 5. *Update Progress* Pembahasan Pengembangan TCK Belawan Tahap 2; 6. *Update Progress* Pembahasan Pengembangan TCK Bengkulu. 1. Implementation Plan for the 1% PNBP Levy on Loading and Unloading Activities; 2. Progress Update on the Handover of Operations at Teluk Lamong; 3. Progress Update on the PTP Invoice Switching; 4. Progress Update on Kalimas; 5. Progress Update on Discussions Regarding Development of Phase 2 of TCK Belawan; 6. Progress Update on Discussions Regarding Development of TCK Bengkulu.

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Joint Meeting with Board of Directors and Board of Commissioners

Risalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris
Minutes of Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioner

No	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Agenda Rapat Meeeting Agenda
1	Jumat, 31 Januari 2025 Friday, January 31, 2025	13:00 - 16:00 WIB 1:00 PM - 4:00 PM	Laporan Kinerja PMT sd. Desember 2024. Discussion on PMT Performance until December 2024
2	Senin, 24 Februari 2025 Monday, February 24, 2025	13:00 - 16:00 WIB 1:00 PM - 4:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Januari 2025; 2. Hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until January 2025; 2. Other emerging issues.
3	Rabu, 19 Maret 2025 Wednesday, March 19, 2025	13:00 - 16:00 WIB 1:00 PM - 4:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Februari 2025; 2. Hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until February 2025; 2. Other emerging issues.
4	Rabu, 30 April 2025 Wednesday, April 30, 2025	13:00 - 16:00 WIB 1:00 PM - 4:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Maret 2025; 2. Hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until March 2025; 2. Other emerging issues.
5	Selasa, 27 Mei 2025 Tuesday, May 27, 2025	13.30 - 18.00 WIB 1:30 PM - 6:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d April 2025; 2. Hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until April 2025; 2. Other emerging issues.
6	Senin, 23 Juni 2025 Monday, June 23, 2025	13:30 - 17:00 WIB 1:30 PM - 5:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Mei 2025; 2. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until May 2025; 2. Other emerging issues.
7	Selasa, 29 Juli 2025 Tuesday, July 29, 2025	14.00 - 17.00 WIB 2:00 PM - 5:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Juni 2025; 2. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until June 2025; 2. Other emerging issues.
8	Kamis, 28 Agustus 2025 Thursday, August 28, 2025	14.00 - 17.00 WIB 2:00 PM - 5:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Juli 2025; 2. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until July 2025; 2. Other emerging issues.
9	Kamis, 26 September 2025 Thursday, September 26, 2025	14.00 - 17.00 WIB 2:00 PM - 5:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Agustus 2025; 2. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until August 2025; 2. Other emerging issues.
10	Selasa, 28 Oktober 2025 Tuesday, October 28, 2025	14.00 - 17.00 WIB 2:00 PM - 5:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d September 2025; 2. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until September 2025; 2. Other emerging issues.
11	Selasa, 25 November 2025 Tuesday, November 25, 2025	13.30 - 17.00 WIB 1:30 PM - 5:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Okt 2025; 2. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until October 2025; 2. Other emerging issues.
12	Jumat, 19 Desember 2025 Friday, December 19, 2025	13.30 - 17.00 WIB 1:30 PM - 5:00 PM	1. Pembahasan Kinerja PMT s.d Nov 2025; 2. Hal-hal lain yang berkembang. 1. Discussion on PMT Performance until November 2025; 2. Other emerging issues.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Termasuk RUPS

Frequency of Board of Directors Meetings and Attendance Level of Board of Directors' Members in Meetings Including GMS

Direksi Board of Directors	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Gabungan Joint Meeting			RUPS GMS		
	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	17	16	94	12	11	92	2	2	100
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	17	17	100	12	12	100	2	2	100
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	17	16	94	12	11	92	2	2	100
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	17	17	100	12	12	100	2	2	100
Edi Priyanto (Direktur SDM) (HC Director)	17	15	88	12	10	83	2	2	100
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	17	17	100	12	12	100	2	2	100

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Kebijakan

Program peningkatan kompetensi bagi Direksi merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan perkembangan industri jasa kepelabuhanan serta dinamika bisnis yang terus berubah, sehingga Direksi diharapkan mampu merespons tantangan usaha, menangkap peluang strategis, dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan Perusahaan.

Pelaksanaan program tersebut juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, pemahaman terhadap perkembangan regulasi, tata kelola perusahaan, transformasi bisnis, serta isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Adapun ketentuan mengenai program peningkatan kompetensi bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY ENHANCEMENT FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Policy

The competency enhancement program for Board of Directors members is one of the Company's efforts to ensure that each member of Board of Directors possesses the knowledge and skills relevant to developments in the port services industry and the ever-changing dynamics of business, so that the Board of Directors is expected to be able to respond to business challenges, seize strategic opportunities, and support the Company's sustainable growth.

The implementation of this program also aims to strengthen leadership capacity, understanding of regulatory developments, corporate governance, business transformation, and other strategic issues related to the Company's business activities. The provisions regarding the competency enhancement program for members of Board of Directors are as follows:

1. Program peningkatan kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kompetensi seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*);
4. Anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, selambatnya 30 hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

1. The competency enhancement program is carried out to improve the effectiveness of Board of Directors' work;
2. Plans to implement the competency enhancement program must be included in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
3. Each member of Board of Directors who participates in a competency enhancement program, such as seminars and/or training, is required to present to other members of Board in order to share information and knowledge (knowledge sharing);
4. The respective member of Board of Directors must be responsible for preparing a report on the implementation of the capability enhancement program. The report must be submitted to Board of Directors no later than 30 days after the date of the program's implementation.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Berikut uraian pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang dilakukan Direksi sepanjang tahun 2025:

Training and Competency Enhancement of Board of Directors

The following is a description of training and/or competency enhancement conducted by Board of Directors throughout 2025:

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	**Pelatihan/Sertifikasi** Training/Certification	**Penyelenggara** Organizer	**Tanggal** Date
Ary Henryanto **(Direktur Utama)** (President Director)			
K3 Survivor Menjadi Atlet Paralympic: *From Zero To Hero* OHS Survivor Becomes a Paralympic Athlete: From Zero to Hero	Pelatihan Training	PMT	21 Januari 2025 January 21, 2025
Hidup Sehat, Produktivitas Melesat! Bersama ADE RAI Live Healthy, Boost Productivity! With ADE RAI	Pelatihan Training	PMT	05 Februari 2025 February 5, 2025
Ngobras Perpajakan: Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 Tax Chat: How to File an Individual Annual Tax Return for 2024 Tax Year	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	13 Februari 2025 February 13, 2025
RWP & EWP "*Creating Workplaces That Support Growth and Innovation*"	Pelatihan Training	PMLI	08 Juli 2025 July 8, 2025
J-Well "*Mindful Eating* : Makan dengan Kesadaran untuk Kesehatan yang Lebih Baik" J-Well "Mindful Eating: Eating Mindfully for Better Health"	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	08 Juli 2025 July 8, 2025
Internalisasi Keberlanjutan dan Pelaporan Keberlanjutan Internalization of Sustainability and Sustainability Reporting	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	08 Juli 2025 July 8, 2025
Legal Coaching Clinic | Konsepsi Pengelolaan BUMN dan Kunci Sukses Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pasca Merger Legal Coaching Clinic | The Concept of SOE Management and Keys to Success in the Transformation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Post-Merger	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	08 Juli 2025 July 8, 2025
BERLABUH : *Investing for Tomorrow* "Mengatur Keuangan dan Investasi untuk Masa Depan yang Stabil" BERLABUH: Investing for Tomorrow "Managing Finances and Investments for a Stable Future"	Pelatihan Training	PMLI	08 Juli 2025 July 8, 2025
BERLABUH "Satu Tanah, Seribu Cerita : Perjalanan Menemukan Keindahan Indonesia" BERLABUH "One Land, a Thousand Stories: A Journey to Discover the Beauty of Indonesia"	Pelatihan Training	PMLI	08 Juli 2025 July 8, 2025
BERLABUH "*Is It a Disaster If My Office Mate Identified as* NPD"	Pelatihan Training	PMLI	08 Juli 2025 July 8, 2025
P-Active *Talk Dealing with Fatherlessness*	Pelatihan Training	PMLI	08 Juli 2025 July 8, 2025
P-Active Talk "*Healthy Eating & Diet*" | *Online Self Learning*	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	08 Juli 2025 July 8, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
BERLABUH : *Unlocking Value – Navigating Opportunities and Challenges in Pelindo's Global Growth*	Pelatihan Training	PMLI	11 Juli 2025 July 11, 2025
BERLABUH : *Ask the CEO*	Pelatihan Training	PMLI	11 Juli 2025 July 11, 2025
P-Active Talk : *Financial Wellbeing* : *Doing Well with Money*	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	11 Juli 2025 July 11, 2025
Legal Coaching Clinic | Deteksi Dini dan Pencegahan Permasalahan Hukum di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Legal Coaching Clinic | Early Detection and Prevention of Legal Issues at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	11 Juli 2025 July 11, 2025
BREATH *Session Series* 21 "*Well-Connected, Well-Being*: Menguatkan Kesejahteraan Sosial di Tempat Kerja" BREATH Session Series 21 "Well-Connected, Well-Being: Strengthening Social Well-Being in the Workplace"	Pelatihan Training	PMT	16 Juli 2025 July 16, 2025
Smart Saving, Happy Living	Pelatihan Training	PMLI	18 Juli 2025 July 18, 2025
Breaking Stress, Building Resilience	Pelatihan Training	PMLI	18 Juli 2025 July 18, 2025
ALPI's *Global Immersion*: Inspirasi Membangun *Learning Agility* dari Negeri ALPI's Global Immersion: Inspiration for Building Learning Agility from Country	Pelatihan Training	PMLI	18 Juli 2025 July 18, 2025
ALPI Global Aprrenticeship: Berlabuh di Negeri Johor, Mengintip Warna Rumput Negara Tetangga ALPI Global Apprenticeship: Anchoring in Johor, Getting a Glimpse of Our Neighboring Country's Grass	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	18 Juli 2025 July 18, 2025
BERLABUH "Pelindo Muda *Story*: Yang Muda Yang Berprestasi" BERLABUH "Pelindo Muda Story: The Young and Accomplished"	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	18 Juli 2025 July 18, 2025
BERLABUH : "*Open Innovation* : *How SOE Encourage Innovation With Startup Ecosystem*"	Pelatihan Training	PMLI	24 Juli 2025 July 24, 2025
Health Talk "Bahaya Hipertensi" Health Talk: "The Dangers of Hypertension"	Pelatihan Training	SPJM	24 Juli 2025 July 24, 2025
Berlabuh "Muda Berkarya : Dari Inspirasi Menuju Aksi" Berlabuh: "Youth in Action: From Inspiration to Action"	Pelatihan Training	PMLI	25 Juli 2025 July 25, 2025
Peningkatan Kesadaran Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Keamanan Siber Raising Awareness of Information Security Management Systems and Cybersecurity	Pelatihan Training	PMLI	25 Juli 2025 July 25, 2025
BERLABUH Spesial Hari Buruh Sedunia "Konstruksi Hukum Ketenagakerjaan dalam Kerangka Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis dan Berkeadilan" BERLABUH International Workers' Day Special: "The Legal Framework of Labor Relations within the Context of Harmonious and Just Industrial Relations Based on Pancasila"	Pelatihan Training	PMLI	28 Juli 2025 July 28, 2025
JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) J-Well "*Work Life Synergy - Bekerja Optimal Mengasuh Maksimal*" JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) J-Well: "Work-Life Synergy—Work Optimally, Parent Effectively"	Pelatihan Training	PMLI	28 Juli 2025 July 28, 2025
Materi Penggunaan Pelindo *Employe Self Service* (P-ESS) Guide to Using Pelindo Employee Self-Service (P-ESS)	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	29 Juli 2025 July 29, 2025
BERLABUH : *Money Talk, No Drama*: Gaji Aman, Hidup Nyaman BERLABUH: Money Talk, No Drama: Secure Pay, Comfortable Living	Pelatihan Training	PMLI	31 Juli 2025 July 31, 2025
KPI Mastery for Leaders	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	31 Juli 2025 July 31, 2025
BERLABUH : *Road to* Relawan Bakti BUMN *Batch* VIII : Inspirasi, Persiapan dan Kontribusi Nyata untuk Indonesia BERLABUH: Road to State-Owned Enterprise Volunteer Program, Batch VIII: Inspiration, Preparation, and Tangible Contributions for Indonesia	Pelatihan Training	PMLI	04 Agustus 2025 August 4, 2025
Talk forward: *Ask the CEO, Raise the Voice of Generation*	Pelatihan Training	PMLI	04 Agustus 2025 August 4, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Akhlak *Talk Sharing Session* 12: Strategi Negosiasi Bisnis Kepelabuhanan Akhlak Talk Sharing Session 12: Business Negotiation Strategies in the Port Industry	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	05 Agustus 2025 August 5, 2025
BERLABUH : *Unlocking Value – Navigating Opportunities and Challenges in Pelindo's Global Growth*	Pelatihan Training	PMLI	05 Agustus 2025 August 5, 2025
BERLABUH : *Let's Talk* KPI : Karena Kerja Gak Cuma Ngegas BERLABUH: Let's Talk KPIs: Because Work Isn't Just About Going Full Throttle	Pelatihan Training	PMLI	08 Agustus 2025 August 8, 2025
BREATH Session Series 22 "Gizi Seimbang untuk Meningkatkan Produktivitas Pekerja" BREATH Session Series 22: "Balanced Nutrition to Boost Worker Productivity"	Pelatihan Training	PMT	12 Agustus 2025 August 12, 2025
Workshop dan Sosialisasi Standarisasi Pendaftaran Pelanggan dan Penanganan Keluhan Pelanggan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Workshop and Socialization on Standardization of Customer Registration and Customer Complaint Handling at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	13 Agustus 2025 August 13, 2025
NGOPI Vol.5 *Collaboration for Successful IMS Implementation*	Pelatihan Training	PT Pelindo Solusi Logistik	21 Agustus 2025 August 21, 2025
BERLABUH : "Kinerja Merdeka : Bukan Sekedar Jam Kerja, Tapi Semangat Membawa Perubahan" BERLABUH: "Independent Performance: Not Just About Working Hours, But the Drive to Bring About Change"	Pelatihan Training	PMLI	21 Agustus 2025 August 21, 2025
Impactful Identity: Membangun *Personal Branding* yang Kuat untuk Pertumbuhan Karier & Perusahaan Impactful Identity: Building a Strong Personal Brand for Career and Company Growth	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	21 Agustus 2025 August 21, 2025
WEBINAR Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) X COP Hukum. *Port Without Fraud:* "*Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness*" WEBINAR: Anti-Bribery Management System by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) X COP Law. Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness"	Pelatihan Training	PMT	25 Agustus 2025 August 25, 2025
Golden Age, Golden Focus! – Jurus Jitu Anti Kendor! Golden Age, Golden Focus! – Surefire Strategies to Stay on Track!	Pelatihan Training	SPTP	10 September 2025 September 10, 2025
BREATH Session Series 24 "Ergonomi dan Postur Kerja Ideal – Kunci Sehat Saat Bekerja di Depan Layar dan Lapangan" BREATH Session Series 24 "Ergonomics and Ideal Work Posture – The Key to Staying Healthy While Working in Front of a Screen and in the Field"	Pelatihan Training	PMT	16 Oktober 2025 October 16, 2025
"Continuous Learning" Transformasi Keselamatan dengan Human *Organizational Performance* (HOP) "Continuous Learning": Safety Transformation Through Human Organizational Performance (HOP)	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	16 Oktober 2025 October 16, 2025
BERLABUH : Integritas dan Kolaborasi : Pondasi Pertumbuhan Bisnis Pelabuhan BERLABUH: Integrity and Collaboration: The Foundation of Port Business Growth	Pelatihan Training	PMLI	16 Oktober 2025 October 16, 2025
Materi Panduan Penggunaan P-Travel di Lingkungan Pelindo Grup Materials for Guiding the Use of P-Travel within Pelindo Group	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	21 Oktober 2025 October 21, 2025
Legal Coaching Clinic: Dari Regulasi ke Implementasi Dampak Perubahan UU BUMN di Perusahaan Legal Coaching Clinic: From Regulation to Implementation—The Impact of Changes to the SOE's Law on Companies	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	21 Oktober 2025 October 21, 2025
Pelindo ETalks Vol.8	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	23 Oktober 2025 October 23, 2025
Leadership Forum Vol. 9 "*Fit to Lead* : *Healthy Leaders, High Performance*"	Pelatihan Training	PMLI	27 Oktober 2025 October 27, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)			
Ruang Kolaborasi Pasca Integrasi Post-Integration Collaboration Space	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	10 Januari 2025 January 10, 2025
Strategi Pengembangan Organisasi Pelindo Paska Integrasi PELINDO's Post-Integration Organizational Development Strategy	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	18 November 2025 November 18, 2025
Legal Coaching Clinic | Aspek Hukum dalam Penerapan K3: Tanggung Jawab Perusahaan dan Perlindungan Pekerja Legal Coaching Clinic | Legal Aspects of OHS Implementation: Corporate Responsibility and Worker Protection	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	30 Januari 2025 January 30, 2025
BREATH Session series 16 "Hidup Sehat, Produktivitas Melesat!" Bersama Ade Rai BREATH Session Series 16: "Live Healthy, Boost Productivity!" with Ade Rai	Pelatihan Training	Pelindo Multi Terminal	05 Februari 2025 February 5, 2025
Dasar-Dasar Operasi Terminal Petikemas Basics of Container Terminal Operations	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	07 Oktober 2025 October 7, 2025
History and Heritage: "*Celebrating Women in Leading Change* - Hari Kartini & HUT ke-3 Mutiara Pelindo History and Heritage: "Celebrating Women Leading Change - Kartini Day & Mutiara Pelindo 3rd Anniversary	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	28 April 2025 April 28, 2025
BREATH Session series 18 "Ngatur Duit, Ngatur Diri: Menuju *Financial Zen* BREATH Session Series 18 "Managing Money, Managing Yourself: Toward Financial Zen	Pelatihan Training	Pelindo Multi Terminal	28 April 2025 April 28, 2025
Podcast Leadership Forum Vol 7 "Connected Ports, Connected People : Membangun Kunci Komunikasi dan Negosiasi Efektif di Pelindo" Leadership Forum Podcast Vol. 7 "Connected Ports, Connected People: Building the Keys to Effective Communication and Negotiation at Pelindo"	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	08 Mei 2025 May 8, 2025
P-Active Talk Dealing with Fatherlessness	Pelatihan Training	PMLI	08 Juli 2025 July 8, 2025
BERLABUH : *Unlocking Value – Navigating Opportunities and Challenges in Pelindo's Global Growth*	Pelatihan Training	PMLI	11 Juli 2025 July 11, 2025
BERLABUH : *Ask the CEO*	Pelatihan Training	PMLI	11 Juli 2025 July 11, 2025
Peningkatan Kesadaran Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Keamanan Siber Raising Awareness of Information Security Management Systems and Cybersecurity	Pelatihan Training	PMLI	21 Juli 2025 July 21, 2025
P-*Active Talk* : *Financial Wellbeing : Doing Well with Money*	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	22 Juli 2025 July 22, 2025
Health Talk "Bahaya Hipertensi" Health Talk: "The Dangers of Hypertension"	Pelatihan Training	PMLI	23 Juli 2025 July 23, 2025
Spirituality at Work ; Rahasia Sukses Membangun SDM Berakhlak Produktif Berkinerja Superior Spirituality at Work: The Secret to Success in Developing Productive, Ethical Human Capital with Superior Performance	Pelatihan Training	PMLI	23 Juli 2025 July 23, 2025
Berlabuh "Muda Berkarya : Dari Inspirasi Menuju Aksi" Berlabuh: "Youth in Action: From Inspiration to Action"	Pelatihan Training	PMLI	08 Oktober 2025 October 8, 2025
BERLABUH : "*Open Innovation* : *How SOE Encourage Innovation With Startup Ecosystem*"	Pelatihan Training	PMLI	25 Juli 2025 July 25, 2025
J-Well "*Mindful Eating* : Makan dengan Kesadaran untuk Kesehatan yang Lebih Baik" J-Well "Mindful Eating: Eating Mindfully for Better Health"	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	24 Juli 2025 July 24, 2025
JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) J-Well "*Work Life Synergy* - Bekerja Optimal Mengasuh Maksimal" JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) J-Well "Work-Life Synergy: Work Optimally, Parent Effectively"	Pelatihan Training	PMLI	29 Juli 2025 July 29, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Materi Penggunaan Pelindo *Employee Self Service* (P-ESS) Materials For Using Pelindo Employee Self-Service (P-ESS)	Pelatihan Training	PMLI	30 Juli 2025 July 30, 2025
BERLABUH Spesial Hari Buruh Sedunia "Konstruksi Hukum Ketenagakerjaan dalam Kerangka Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis dan Berkeadilan" BERLABUH: International Workers' Day Special: "The Legal Framework of Labor Law within the Context of Harmonious and Just Industrial Relations Based on Pancasila"	Pelatihan Training	PMLI	04 Agustus 2025 August 4, 2025
Talk forward: Ask the CEO, Raise the Voice of Generation	Pelatihan Training	PMLI	06 Agustus 2025 August 6, 2025
BREATH Session Series 22 "Gizi Seimbang untuk Meningkatkan Produktivitas Pekerja" BREATH Session Series 22: "Balanced Nutrition to Boost Worker Productivity"	Pelatihan Training	Pelindo Multi Terminal	13 Agustus 2025 August 13, 2025
Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) *Cycle 2 – Graduation & Awarding*	Pelatihan Training	PMLI	19 Agustus 2025 August 19, 2025
Webinar Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) X COP Hukum. *Port Without Fraud*: "*Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness*" WEBINAR: Anti-Bribery Management System by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) X COP Law. Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness"	Pelatihan Training	Pelindo Multi Terminal	10 September 2025 September 10, 2025
Talk forward : Ask the CEO, Raise the Voice of Generation	Pelatihan Training	PMLI	18 September 2025 September 18, 2025
BREATH Session Series 23 "*Felt Leadership: When Leadership is Felt*"	Pelatihan Training	Pelindo Multi Terminal	22 September 2025 September 22, 2025
Leadership Forum Volume VIII : *Decision Making & Legal Risk* : Antara Strategi, Regulasi dan Reputasi Leadership Forum Volume VIII: Decision Making & Legal Risk: Between Strategy, Regulation, and Reputation	Pelatihan Training	PMLI	26 September 2025 September 26, 2025
BERLABUH : *Investing for Tomorrow* "Mengatur Keuangan dan Investasi untuk Masa Depan yang Stabil" BERLABUH: Investing for Tomorrow "Managing Finances and Investments for a Stable Future"	Pelatihan Training	PMLI	07 Oktober 2025 October 7, 2025
Kompas Kemudi "*Leading with Sustainability, Building a Brighter Future Together*"	Pelatihan Training	Corpu Pelindo	08 Oktober 2025 October 8, 2025
MABEL (*Mind in Action, Body in Balance*) Tema "Manifestasi Pikiran terhadap Kesehatan Fisik" MABEL (Mind in Action, Body in Balance) Theme: "The Manifestation of Mind on Physical Health"	Pelatihan Training	Pelindo Multi Terminal	15 Oktober 2025 October 15, 2025
BREATH Session Series 24 "Ergonomi dan Postur Kerja Ideal – Kunci Sehat Saat Bekerja di Depan Layar dan Lapangan" BREATH Session Series 24: "Ergonomics and Ideal Work Posture—The Key to Staying Healthy While Working at a Screen and in the Field"	Pelatihan Training	Pelindo Multi Terminal	15 Oktober 2025 October 15, 2025
Leadership Forum Vol. 9 "Fit to Lead : Healthy Leaders, High Performance"	Pelatihan Training	PMLI	24 Oktober 2025 October 24, 2025
BERLABUH : Cerita di balik kompas Asia Pasifik Maritim Pilot Forum 2025 : Dari Forum ke Aksi BERLABUH: The Story Behind the Asia-Pacific Maritime Pilot Forum 2025: From Forum to Action	Pelatihan Training	PMLI	07 November 2025 November 7, 2025
BERLABUH : *Let's Talk KPI* : Karena Kerja Gak Cuma Ngegas BERLABUH: Let's Talk KPIs: Because Work Isn't Just About Going Full Throttle	Pelatihan Training	PMLI	17 November 2025 November 17, 2025
BERLABUH : *Money Talk, No Drama*: Gaji Aman, Hidup Nyaman BERLABUH: Money Talk, No Drama: Secure Salary, Comfortable Living	Pelatihan Training	PMLI	17 November 2025 November 17, 2025
SAPAMERGER (Sosialisasi Pasca Merger) "Berlayar Menuju Energi Bersih: Penggalan Kisah di Era Transisi" SAPAMERGER (Post-Merger Socialization) "Sailing Toward Clean Energy: A Glimpse into Transition Era"	Pelatihan Training	PMLI	18 November 2025 November 18, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Rizki Kurniawan **(Direktur Strategi dan Komersial)** (Strategy and Commercial Director)			
RWP & EWP "*Creating Workplaces That Support Growth and Innovation*"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	08 Juli 2025 July 8, 2025
Legal Coaching Clinic | Konsepsi Pengelolaan BUMN dan Kunci Sukses Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pasca Merger Legal Coaching Clinic | The Concept of SOE Management and Keys to Success in the Transformation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Post-Merger	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	10 Juli 2025 July 10, 2025
J-Well "*Mindful Eating* : Makan dengan Kesadaran untuk Kesehatan yang Lebih Baik" J-Well "Mindful Eating: Eating Mindfully for Better Health"	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
Internalisasi Keberlanjutan dan Pelaporan Keberlanjutan Internalizing Sustainability and Sustainability Reporting	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
BERLABUH : *Investing for Tomorrow* "Mengatur Keuangan dan Investasi untuk Masa Depan yang Stabil" BERLABUH: Investing for Tomorrow "Managing Finances and Investments for a Stable Future"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	08 Juli 2025 July 8, 2025
Engagement Program: *Safety Culture Safe Behavior* Ahli K3 dalam *Safety Culture* Engagement Program: Safety Culture, Safe Behavior, and OHS Experts in Safety Culture	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
BERLABUH : *Unlocking Value – Navigating Opportunities and Challenges in Pelindo's Global Growth*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	11 Juli 2025 July 11, 2025
BREATH Session Series 21 "*Well-Connected, Well-Being*: Menguatkan Kesejahteraan Sosial di Tempat Kerja BREATH Session Series 21 "Well-Connected, Well-Being: Strengthening Social Well-Being in the Workplace"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	17 Juli 2025 July 17, 2025
BERLABUH : "*Open Innovation* : *How SOE Encourage Innovation With Startup Ecosystem*"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	25 Juli 2025 July 25, 2025
JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) J-Well "*Work Life Synergy* - Bekerja Optimal Mengasuh Maksimal" JANGKAR (JAI Invites You to Talk) J-Well "Work-Life Synergy—Optimal Work, Maximum Parenting"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	29 Juli 2025 July 29, 2025
Talk forward: Ask the CEO, Raise the Voice of Generation	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	06 Agustus 2025 August 6, 2025
Akhlak *Talk Sharing Session* 12: Strategi Negosiasi Bisnis Kepelabuhanan Akhlak Talk Sharing Session 12: Business Negotiation Strategies in the Port Industry	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	07 Agustus 2025 August 7, 2025
KPI Mastery for Leaders	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	22 Agustus 2025 August 22, 2025
BREATH Session Series 22 "Gizi Seimbang untuk Meningkatkan Produktivitas Pekerja" BREATH Session Series 22: "Balanced Nutrition to Boost Worker Productivity"	Pelatihan Training	PT Pelindo Multi Terminal	13 Agustus 2025 August 13, 2025
Continous Learning Pengelolaan Klinik K3 di Lingkungan PT Pelindo (Persero) Continuous Learning on OHS Clinic Management at PT Pelindo (Persero)	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	15 Agustus 2025 August 15, 2025
Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia *(ALPI) Cycle 2 – Graduation & Awarding*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	19 Agustus 2025 August 19, 2025
PINTER (PJM *Talk and Interactive Session*) "*Loyal at Heart, True to Purpose*"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Akhlak *Talk Sharing Session* 13: *Why Digital Leadership* Penting dalam Menghadapi Tantangan Bisnis? Akhlak Talk Sharing Session 13: Why Is Digital Leadership Important in Addressing Business Challenges?	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	22 Agustus 2025 August 22, 2025
BERLABUH Spesial Hari Buruh Sedunia "Konstruksi Hukum Ketenagakerjaan dalam Kerangka Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis dan Berkeadilan" BERLABUH: International Workers' Day Special "The Legal Framework of Labor Law within the Context of Harmonious and Just Industrial Relations Based on Pancasila"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
NGOPI Vol.5 *Collaboration for Successful IMS Implementation*	Pelatihan Training	PT Pelindo Solusi Logistik	22 Agustus 2025 August 22, 2025
BERLABUH : *Unlocking Value – Navigating Opportunities and Challenges in* Pelindo's *Global Growth*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
BERLABUH : "Kinerja Merdeka : Bukan Sekedar Jam Kerja, Tapi Semangat Membawa Perubahan" BERLABUH: "Independent Performance: It's Not Just About Working Hours, But the Drive to Bring About Change"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
Talk forward : *Ask the CEO, Raise the Voice of Generation*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
BERLABUH : "*Open Innovation* : *How SOE Encourage Innovation With Startup Ecosystem*"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
BERLABUH : *Let's Talk* KPI : Karena Kerja Gak Cuma Ngegas BERLABUH: Let's Talk KPIs: Because Work Isn't Just About Working Hard	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
BERLABUH : *Money Talk, No Drama*: Gaji Aman, Hidup Nyaman BERLABUH: Money Talk, No Drama: Secure Salary, Comfortable Living	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	24 Agustus 2025 August 24, 2025
BERLABUH "*How to Create An Effective Digital Transformation in Corporate*"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
Berlabuh "Muda Berkarya : Dari Inspirasi Menuju Aksi" Berlabuh "Young and Creative: From Inspiration to Action"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
Impactful Identity: Membangun *Personal Branding* yang Kuat untuk Pertumbuhan Karier & Perusahaan Impactful Identity: Building a Strong Personal Brand for Career and Company Growth	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	25 Agustus 2025 August 25, 2025
P-*Active Talk* : *Financial Wellbeing : Doing Well with Money*	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	25 Agustus 2025 August 25, 2025
Legal Coaching Clinic: Data Terlindungi, Reputasi Terjaga: Pelindungan Data Pribadi Dalam Korporasi Legal Coaching Clinic: Protected Data, Preserved Reputation: Personal Data Protection in Corporations	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	28 Agustus 2025 August 28, 2025
WEBINAR Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) X COP Hukum. *Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness*" WEBINAR: Anti-Bribery Management System by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) X COP Law. Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness"	Pelatihan Training	PT Pelindo Multi Terminal	10 September 2025 September 10, 2025
BERLABUH : *Money Talk, No Drama* : Cerdas Kelola Finansial di Era *Society* 5.0 BERLABUH: Money Talk, No Drama: Smart Financial Management in the Society 5.0 Era	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	26 September 2025 September 26, 2025
Live Virtual : Re-Energizing Coaching Awareness : Maximizing Potential, Elevating Performance	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	26 September 2025 September 26, 2025
Akhlak *Talk Sharing Session* 15 : *Management Stakeholder* Layanan Jasa Kepelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Akhlak Talk Sharing Session 15: Stakeholder Management For Port Services at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	26 September 2025 September 26, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
HEALTH TALK - Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Penyakit Kanker HEALTH TALK - Disease Prevention and Early Detection of Cancer	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)			
BERLABUH Edisi Spesial : *Ask the* CEO BERLABUH Special Edition: Ask the CEO	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	16 April 2025 April 16, 2025
Unleash Your Potentials	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
PELINDO *Empowering Talks* (E-Talks) Vol.6: *Navigating The Merger Landscape : Lesson For The Future*	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
Ruang Kolaborasi Pasca Integrasi Post-Integration Collaboration Space	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
BERLABUH 14 April 2023 "Dunia pelabuhan tanpa perempuan ?" BERLABUH April 14, 2023 “A port industry without women?”	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
Transformasi SDM Paska *merger Be Ready !* Post-Merger HC Transformation: Be Ready!	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	08 Juli 2025 July 8, 2025
Reinvent Better Future of HR: Transform Together!	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	08 Juli 2025 July 8, 2025
Transfomasi *Human Capital* Mulai dari Mana? Where to Start with Human Capital Transformation?	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	11 Juli 2025 July 11, 2025
BERLABUH 21 Maret 2023 "*How to Develop a safety culture*" BERLABUH March 21, 2023 “How to Develop a Safety Culture”	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	21 Juli 2025 July 21, 2025
Berlabuh 23 Februari 2024 "Kanker? *Be Healthy, Less Worry*!" Berlabuh February 23, 2024 “Cancer? Be Healthy, Worry Less!”	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	21 Juli 2025 July 21, 2025
BERLABUH "Pelindo Muda Story: Yang Muda Yang Berprestasi" BERLABUH “Pelindo Muda Story: Young and Accomplished”	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	21 Juli 2025 July 21, 2025
Health Talk "Bahaya Hipertensi" Health Talk “The Dangers of Hypertension”	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	23 Juli 2025 July 23, 2025
Spirituality at Work ; Rahasia Sukses Membangun SDM Berakhlak Produktif Berkinerja Superior Spirituality at Work: The Secret to Success in Developing Human Capital With Moral Integrity, Productivity, and Superior Performance	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	23 Juli 2025 July 23, 2025
BERLABUH : *Ask the* CEO	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	23 Juli 2025 July 23, 2025
J-Well "*Mindful Ea*ting : Makan dengan Kesadaran untuk Kesehatan yang Lebih Baik" J-Well “Mindful Eating: Eating Mindfully for Better Health”	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	23 Juli 2025 July 23, 2025
Internalisasi Keberlanjutan dan Pelaporan Keberlanjutan Internalization of Sustainability and Sustainability Reporting	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	23 Juli 2025 July 23, 2025
BERLABUH : "*Open Innovation* : *How SOE Encourage Innovation With Startup Ecosystem*"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	25 Juli 2025 July 25, 2025
BERLABUH 24 November 2023 "*Breaking Stress, Building Resilience*" BERLABUH November 24, 2023 “Breaking Stress, Building Resilience”	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	04 Agustus 2025 August 4, 2025
P-*Active Talk Online Self Learning*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	04 Agustus 2025 August 4, 2025
BERLABUH 16 Juni 2023 "*Smart Saving, Happy Living*" BERLABUH June 16, 2023 “Smart Saving, Happy Living”	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	04 Agustus 2025 August 4, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Talk forward: Ask the CEO, Raise the Voice of Generation	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	06 Agustus 2025 August 6, 2025
BERLABUH 20 Oktober 2023 "*Safety Culture in Maritime Industry*" BERLABUH October 20, 2023 "Safety Culture in the Maritime Industry"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	06 Agustus 2025 August 6, 2025
BERLABUH 21 November 2023 "*Worker or Lecturer: How to Balance*" BERLABUH November 21, 2023 "Worker or Lecturer: How to Balance"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	06 Agustus 2025 August 6, 2025
Safety Awareness in Port Operations	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	06 Agustus 2025 August 6, 2025
Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia *(ALPI) Cycle 2 – Graduation & Awarding*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	19 Agustus 2025 August 19, 2025
NGOPI Vol.5 *Collaboration for Successful IMS Implementation*	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	22 Agustus 2025 August 22, 2025
Talk forward : Ask the CEO, Raise the Voice of Generation	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	22 Agustus 2025 August 22, 2025
KPI Mastery for Leaders	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	22 Agustus 2025 August 22, 2025
Webinar Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) X COP Hukum. *Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness"* WEBINAR: Anti-Bribery Management System by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) X COP Law. Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness"	Pelatihan Training	PT Pelindo Multi Terminal	10 September 2025 September 10, 2025
BREATH Session Series 23 "Felt Leadership: When Leadership is Felt"	Pelatihan Training	PT Pelindo Multi Terminal	22 September 2025 September 22, 2025
Leading with Sustainability, Building a Brighter Future Together	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	22 September 2025 September 22, 2025
Materi Penggunaan Pelindo *Employe Self Service* (P-ESS) Materials for Using Pelindo Employee Self-Service (P-ESS)	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	22 September 2025 September 22, 2025
Leadership Forum Volume VIII : *Decision Making* & *Legal Risk* : Antara Strategi, Regulasi dan Reputasi Leadership Forum Volume VIII: Decision Making & Legal Risk: Between Strategy, Regulation, and Reputation	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	24 September 2025 September 24, 2025
BERLABUH 26 Juni 2023 "*Eco-Lifestyle*: Membangun Gaya Hidup Ramah Lingkungan" BERLABUH June 26, 2023 "Eco-Lifestyle: Building an Environmentally Friendly Lifestyle"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	09 Oktober 2025 October 9, 2025
BERLABUH 14 Juli 2023 "Pinjaman *Online*: Menggali Fakta, Mengelola Risiko" BERLABUH, July 14, 2023: "Online Loans: Uncovering the Facts, Managing Risks"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	09 Oktober 2025 October 9, 2025
Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi A Joint Commitment by the Port Community to Eradicate Corruption	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	09 Oktober 2025 October 9, 2025
BERLABUH : Integritas dan Kolaborasi : Pondasi Pertumbuhan Bisnis Pelabuhan BERLABUH: Integrity and Collaboration—The Foundation of Port Business Growth	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	13 Oktober 2025 October 13, 2025
MABEL (*Mind in Action, Body in Balance*) Tema "Manifestasi pikiran terhadap kesehatan fisik" MABEL (Mind in Action, Body in Balance) Theme: "The Manifestation of Mind on Physical Health"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	13 Oktober 2025 October 13, 2025
Engagement Program: *Safety Culture Safe Behavior* Ahli K3 Dalam *Safety Culture* Engagement Program: Safety Culture, Safe Behavior, and OHS Experts in Safety Culture	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	13 Oktober 2025 October 13, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
BERLABUH : *Investing for Tomorrow* "Mengatur Keuangan dan Investasi untuk Masa Depan yang Stabil" BERLABUH: Investing for Tomorrow "Managing Finances and Investments for a Stable Future"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	13 Oktober 2025 October 13, 2025
Why Digitalizing & Occupational Safety Should be Important	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	13 Oktober 2025 October 13, 2025
PT PSL *To be Integrated Logistics Ecosystem Player*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	13 Oktober 2025 October 13, 2025
PODCAST "*Back to the SEA* : *Back to the Sustainable Economic Actions'*	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	13 Oktober 2025 October 13, 2025
Diversity for Innovation and Business Creativity	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	13 Oktober 2025 October 13, 2025
BERLABUH 12 Januari 2024 "ALPI *Apprenticeship Diaries* : *Work, Learn & Explore from Melbourne"* BERLABUH January 12, 2024 "ALPI Apprenticeship Diaries: Work, Learn & Explore from Melbourne"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
BERLABUH 15 September 2023 "*Working Overseas: Unlocking Your Potential, Expanding Your Network"* BERLABUH September 15, 2023 "Working Overseas: Unlocking Your Potential, Expanding Your Network"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
Berlabuh "*New Skill Unlock*: Membangun Interaksi yang Percaya Diri" (*Online Self Learning*) Berlabuh "New Skill Unlock: Building Confident Interactions" (Online Self-Learning)	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
Proyeksi Tantangan Resesi Global Bagi Pelindo Projected Challenges from the Global Recession for Pelindo	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
Legal Coaching Clinic | Penyalahgunaan Wewenang atau Perbuatan Melampaui Wewenang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Legal Coaching Clinic | Abuse of Authority or Acts Exceeding Authority under the Limited Liability Companies Act	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
BERLABUH 25 Agustus 2023 "*How to Develop Innovation Product*" BERLABUH, August 25, 2023 "How to Develop Innovative Products"	Pelatihan Training	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	14 Oktober 2025 October 14, 2025
Continuous Learning Transformasi Keselamatan dengan *Human Organizational Performance* (HOP) Continuous Learning: Safety Transformation Through Human Organizational Performance (HOP)	Pelatihan Training	Pelindo Corpu University	16 Oktober 2025 October 16, 2025
Star Track Executive Development - Financial Management	Pelatihan Training	Cornell University	30 September s.d 25 November 2025 September 30 to November 25, 2025
Edi Priyanto **(Direktur SDM)** (HC Director)			
BREATH Session series 16 "Hidup Sehat, Produktivitas Melesat!" Bersama ADE RAI BREATH Session Series 16: "Live Healthy, Boost Productivity! With ADE RAI	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	04 Februari 2025 February 4, 2025
BREATH Session series 17 "Keuangan Sehat, Hidup Berkah: Stop Judi Online" BREATH Session Series 17: "Healthy Finances, a Blessed Life: Stop Online Gambling"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	12 Maret 2025 March 12, 2025
BERLABUH "Satu Tanah, Seribu Cerita : Perjalanan Menemukan Keindahan Indonesia" BERLABUH: "One Land, a Thousand Stories: A Journey to Discover the Beauty of Indonesia"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	17 Maret 2025 March 17, 2025
Sharing Session Effective Meeting PMT Grup	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	18 Maret 2025 March 18, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Podcast Leadership Forum Vol 7 "*Connected Ports, Connected People* : Membangun Kunci Komunikasi dan Negosiasi Efektif di Pelindo" Leadership Forum Podcast Vol. 7: "Connected Ports, Connected People: Building the Keys to Effective Communication and Negotiation at Pelindo"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	07 Mei 2025 May 7, 2025
Legal Coaching Clinic | Konsepsi Pengelolaan BUMN dan Kunci Sukses Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pasca Merger Legal Coaching Clinic | The Concept of SOE Management and Keys to Success in the Transformation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Post-Merger	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	26 Mei 2025 May 26, 2025
Internalisasi Keberlanjutan dan Pelaporan Keberlanjutan Internalizing Sustainability and Sustainability Reporting	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	26 Mei 2025 May 26, 2025
J-Well "*Mindful Eating* : Makan dengan Kesadaran untuk Kesehatan yang Lebih Baik" J-Well "Mindful Eating: Eating Mindfully for Better Health"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	26 Mei 2025 May 26, 2025
BREATH: Balancing, Resilience, Energy and Health	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	18 Juni 2025 June 18, 2025
Workshop Cultural Change in Action "Menjadi Penggerak Transformasi Budaya" Cultural Change in Action Workshop: "Becoming a Driver of Cultural Transformation"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	20 Juni 2025 June 20, 2025
RWP & EWP *"Creating Workplaces That Support Growth and Innovation"*	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	02 Juli 2025 July 2, 2025
BERLABUH : *Ask the* CEO	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	02 Juli 2025 July 2, 2025
PMT CTO Talk 2025 : "*Ignite Work Spirit, Achieve Excellence"*	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	03 Juli 2025 July 3, 2025
Workshop Penguatan Peran Strategis SDM dalam Mendukung Arah Bisnis Pelindo Workshop on Strengthening the Strategic Role of Human Capital in Supporting Pelindo's Business Direction	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	04 Juli 2025 July 4, 2025
Urgensi Resiliensi Pada Unit Bisnis Melalui Pembangunan *Busniness Continuity Management* (BCM) Urgency of Resilience in Business Units Through the Development of Business Continuity Management (BCM)	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	07 Juli 2025 July 7, 2025
BERLABUH : *Unlocking Value – Navigating Opportunities and Challenges in Pelindo's Global Growth*	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	10 Juli 2025 July 11, 2025
BREATH Session Series 21 "*Well-Connected, Well-Being*: Menguatkan Kesejahteraan Sosial di Tempat Kerja" BREATH Session Series 21 "Well-Connected, Well-Being: Strengthening Social Well-Being in the Workplace"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	16 Juli 2025 July 16, 2025
Spirituality at Work ; Rahasia Sukses Membangun SDM BerAKHLAK Produktif Berkinerja Superior Spirituality at Work: The Secret to Success in Developing Human Capital with Moral Integrity, Productivity, and Superior Performance	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	22 Juli 2025 July 22, 2025
BERLABUH : "*Open Innovation : How SOE Encourage Innovation With Startup Ecosystem"*	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	24 Juli 2025 July 24, 2025
JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) J-Well "*Work Life Synergy* - Bekerja Optimal Mengasuh Maksimal" (JAI Ngajak Bicara) J-Well "Work-Life Synergy—Optimal Work, Maximum Parenting"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	28 Juli 2025 July 28, 2025
Talk forward: Ask the CEO, Raise the Voice of Generation	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	05 Agustus 2025 August 5, 2025
Workshop Lean Six Sigma Simulation	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	07 Agustus 2025 August 7, 2025
BREATH Session Series 22 "Gizi Seimbang untuk Meningkatkan Produktivitas Pekerja" BREATH Session Series 22 "Balanced Nutrition to Boost Employee Productivity"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	12 Agustus 2025 August 12, 2025
Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Cycle 2 – Graduation & Awarding	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	18 Agustus 2025 August 12, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Impactful Identity: Membangun *Personal Branding* yang Kuat untuk Pertumbuhan Karier & Perusahaan Impactful Identity: Building a Strong Personal Brand for Career and Company Growth	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	24 Agustus 2025 August 24, 2025
WEBINAR Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) X COP Hukum. *Port Without Fraud*: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness" WEBINAR: Anti-Bribery Management System by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) in Collaboration with COP Law. Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	09 September 2025 September 9, 2025
BREATH Session Series 23 "Felt Leadership: When Leadership is Felt"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	21 September 2025 September 21, 2025
Leadership Forum Volume VIII : *Decision Making & Legal Risk* : Antara Strategi, Regulasi dan Reputasi Leadership Forum Volume VIII: Decision Making & Legal Risk: Between Strategy, Regulation, and Reputation	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	23 September 2025 September 23, 2025
"Continuous Learning" Transformasi Keselamatan dengan *Human Organizational Performance* (HOP) "Continuous Learning": Safety Transformation Through Human Organizational Performance (HOP)	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	15 Oktober 2025 October 15, 2025
Leadership Forum Vol. 10 : Beyond Survival : Leadership Resilience for Sustainable Growth	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	11 November 2025 November 11, 2025
Workshop Cultural Change in Action "Menjadi Penggerak Transformasi Budaya" Cultural Change in Action Workshop: "Becoming a Driver of Cultural Transformation"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	20 Juni 2025 June 20, 2025
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)			
BERLABUH Edisi Spesial : *Ask the* CEO BERLABUH Special Edition: Ask the CEO	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	15 April 2025 April 15, 2025
BERLABUH Spesial Hari Buruh Sedunia "Konstruksi Hukum Ketenagakerjaan dalam Kerangka Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis dan Berkeadilan" BERLABUH International Workers' Day Special: "The Legal Framework of Labor Law within the Context of Harmonious and Just Industrial Relations Based on Pancasila"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	01 Mei 2025 May 1, 2025
CRO *School* Tahun 2025 CRO School 2025	Pelatihan Training	BUMN School of Excellence/Insead	01 Mei 2025 May 1, 2025
Pelindo *Innovation Award* 2024-2025	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	05 Mei 2025 May 5, 2025
Podcast *Leadership Forum Vol 7 "Connected Ports, Connected People* : Membangun Kunci Komunikasi dan Negosiasi Efektif di Pelindo" Leadership Forum Podcast Vol. 7: "Connected Ports, Connected People: Building the Keys to Effective Communication and Negotiation at Pelindo"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	07 Mei 2025 May 7, 2025
Legal Coaching Clinic | Konsepsi Pengelolaan BUMN dan Kunci Sukses Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pasca Merger Legal Coaching Clinic | The Concept of SOE Management and Keys to Success in the Transformation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Post-Merger	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	26 Mei 2025 May 26, 2025
Internalisasi Keberlanjutan dan Pelaporan Keberlanjutan Internalizing Sustainability and Sustainability Reporting	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	26 Mei 2025 May 26, 2025
J-Well "*Mindful Eating* : Makan dengan Kesadaran untuk Kesehatan yang Lebih Baik" J-Well "Mindful Eating: Eating Mindfully for Better Health"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	26 Mei 2025 May 26, 2025
RWP & EWP "*Creating Workplaces That Support Growth and Innovation"*	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	02 Juli 2025 July 2, 2025
BERLABUH : *Ask the* CEO	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	02 Juli 2025 July 2, 2025

Judul Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
BERLABUH Spesial Hari Buruh Sedunia "Konstruksi Hukum Ketenagakerjaan dalam Kerangka Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis dan Berkeadilan" BERLABUH International Workers' Day Special: "The Legal Framework of Labor Law within the Context of Harmonious and Just Industrial Relations Based on Pancasila"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	02 Juli 2025 July 2, 2025
BERLABUH : *Money Talk, No Drama*: Gaji Aman, Hidup Nyaman BERLABUH: Money Talk, No Drama: Secure Salary, Comfortable Living	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	02 Juli 2025 July 2, 2025
Spirituality at *Work* ; Rahasia Sukses Membangun SDM BerAKHLAK Produktif Berkinerja Superior Spirituality at WORK: The Secret to Success in Developing Human Capital with Strong Moral Character, Productivity, and Superior Performance	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	22 Juli 2025 July 22, 2025
JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) J-Well "*Work Life Synergy* - Bekerja Optimal Mengasuh Maksimal" JANGKAR (JAI Invites You to Talk) J-Well "Work-Life Synergy—Work Optimal, Parent Maximum"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	28 Juli 2025 July 28, 2025
KPI Mastery for Leaders	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	30 Juli 2025 July 30, 2025
Talk forward: Ask the CEO, Raise the Voice of Generation	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	05 Agustus 2025 August 5, 2025
Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) *Cycle 2 – Graduation & Awarding*	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	18 Agustus 2025 August 18, 2025
Live Virtual : Re-Energizing Coaching Awareness : Maximizing Potential, Elevating Performance	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	24 September 2025 September 24, 2025
Leadership Forum Volume VIII : *Decision Making & Legal Risk* : antara Strategi, Regulasi dan Reputasi Leadership Forum Volume VIII: Decision Making & Legal Risk: Between Strategy, Regulation, and Reputation	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	23 September 2025 September 25, 2025
Akhlak Talk Sharing Session 15 : *Management Stakeholder* Layanan Jasa Kepelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Akhlak Talk Sharing Session 15: Port Services Stakeholder Management at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region 4	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	24 September 2025 September 24, 2025
BERLABUH : *Money Talk, No Drama* : Cerdas Kelola Finansial di Era Society 5.0 BERLABUH: Money Talk, No Drama: Smart Financial Management in the Society 5.0 Era	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	25 September 2025 September 25, 2025
Re-Energizing Coaching Awareness: Maximizing Potential, Elevating Performance	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	16 Oktober 2025 October 16, 2025
Leadership Forum Vol. 9 "Fit to Lead : Healthy Leaders, High Performance"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	23 Oktober 2025 October 23, 2025
Pelindo *ETalks Vol.8*	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	20 November 2025 November 20, 2025
Forum Anak Perusahaan Pelindo Grup 2025 Tema: "*Reinvent. Realign. Rise! The Power of Corporate Restructuring*" Pelindo Group Subsidiaries Forum 2025 Theme: "Reinvent. Realign. Rise! The Power of Corporate Restructuring"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	08 Desember 2025 December 8, 2025
Leadership Forum Vol. 11 : The Power of Influence "Leading Through Communication"	Pelatihan Training	PT PMLI (Pelindo)	11 Desember 2025 December 11, 2025

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DIREKSI BARU

Program pengenalan Perusahaan diberikan kepada anggota Direksi yang baru diangkat sebagai bagian dari proses orientasi awal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai Perusahaan sehingga anggota Direksi dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan dinamika bisnis Perusahaan.

Anggota Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang profesional diharapkan dapat membangun pemahaman yang selaras mengenai visi, misi, nilai-nilai, serta tata kelola Perusahaan. Dengan demikian, koordinasi dan pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Adapun ketentuan mengenai program pengenalan bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perusahaan;
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan;
3. Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi, antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
   b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
   e. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke Perusahaan serta program lainnya.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak mengangkat Anggota Direksi baru. Oleh karena itu, tidak terdapat Program Pengenalan Perusahaan yang dilakukan.

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Dalam rangka memperkuat kualitas pengendalian dan keandalan proses pengambilan keputusan, Perseroan membentuk dua komite di bawah Direksi, yaitu Komite Keberlanjutan (ESG) dan Komite GRC, sebagai organ pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Kinerja kedua komite tersebut dinilai oleh Direksi secara berkala untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas, ketepatan rekomendasi yang dihasilkan, dan tanggung jawab pelaksanaannya telah berjalan sejalan dengan arah strategi dan prioritas Perseroan selama tahun buku berjalan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

The Company's orientation program is provided to newly appointed members of Board of Directors as part of the initial orientation process to help them carry out their duties and responsibilities. This program aims to provide a comprehensive understanding of the Company so that members of Board of Directors can adapt more quickly to the work environment and the Company's business dynamics.

Members of Board of Directors who come from diverse professional backgrounds are expected to develop a shared understanding of the Company's vision, mission, values, and governance. Consequently, the coordination and execution of the Company's management functions can proceed more effectively and in an integrated manner. The provisions regarding the orientation program for members of Board of Directors are as follows:

1. Members of Board of Directors who are appointed for the first time must be given an orientation program about the Company;
2. The responsibility for conducting the orientation program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function of Corporate Secretary;
3. The orientation program given to the members of Board of Directors, among others, will include the following matters:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company with regard to its purpose, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
   c. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies and audit committee;
   d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Directors and prohibited matters;
   e. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to the Company and other programs.

Throughout 2025, the Company did not appoint any new members of Board of Directors. Therefore, no Company Orientation Program was conducted.

THE BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES SUPPORTING THE BOARD'S DUTIES

To strengthen the quality of controls and the reliability of the decision-making process, the Company has established two committees under the Board of Directors—ESG Committee and the GRC Committee—to serve as supporting bodies in the execution of the Board's duties and responsibilities. The Board of Directors periodically evaluates the performance of these two committees to assess the extent to which their duties have been carried out, the accuracy of the recommendations they have produced, and whether their implementation has been in line with the Company's strategic direction and priorities during the current fiscal year.

PROSEDUR PENILAIAN

Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja Komite ESG dan Komite GRC melalui penelaahan atas pelaksanaan tugas, laporan kegiatan, hasil koordinasi dengan unit terkait, kualitas telaah dan rekomendasi, serta tindak lanjut atas arahan Direksi. Penilaian juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing komite terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang relevan dengan ruang lingkup tugasnya.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Kriteria penilaian Komite ESG mencakup efektivitas dukungan terhadap implementasi program keberlanjutan, koordinasi lintas fungsi, pemantauan capaian ESG, serta kontribusi terhadap pencapaian sasaran keberlanjutan Perusahaan.

Kriteria penilaian Komite GRC mencakup efektivitas pelaksanaan fungsi telaah dan rekomendasi kepada Direksi, dukungan terhadap penguatan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, pengawasan investasi, serta keselarasan pelaksanaan program strategis dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

HASIL PENILAIAN

Komite Keberlanjutan (ESG)

Direksi menilai Komite Keberlanjutan telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam mendukung implementasi agenda keberlanjutan Perusahaan. Penilaian tersebut didasarkan pada kontribusi Komite dalam koordinasi, pemantauan, dan penguatan program ESG. Pada tahun 2025, efektivitas fungsi Komite tercermin dari pencapaian *Key Performance Indicator* Direksi pada indikator Implementasi ESG yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Komite *Governance, Risk, and Compliance* (GRC)

Direksi menilai Komite GRC telah memberikan dukungan yang efektif dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengelolaan investasi. Penilaian tersebut didasarkan pada kualitas telaah dan rekomendasi Komite kepada Direksi, serta kontribusinya dalam memastikan program strategis berjalan sesuai prioritas Perusahaan. Pada tahun 2025, realisasi Implementasi Program Investasi mencapai 80,10% dibandingkan target 70,00%, atau setara dengan pencapaian 114,43%.

ASSESSMENT PROCEDURE

The Board of Directors assesses the performance of the ESG Committee and the GRC Committee by reviewing the implementation of duties, activity reports, coordination outcomes with relevant units, the quality of reviews and recommendations, as well as follow-up actions on the Board of Directors' directives. The assessment also considers each committee's contribution to the achievement of strategic objectives and performance indicators relevant to its respective scope of duties.

ASSESSMENT CRITERIA

The assessment criteria for the ESG Committee include the effectiveness of its support for the implementation of sustainability programs, cross-functional coordination, monitoring of ESG achievements, and contribution to the achievement of the Company's sustainability objectives.

The assessment criteria for the GRC Committee include the effectiveness of its review and recommendation functions to the Board of Directors, support for strengthening governance, risk management, compliance, and investment oversight, as well as the alignment of strategic program implementation with the principles of prudence and sustainability.

ASSESSMENT RESULT

ESG Committee

The Board of Directors assessed that the Sustainability Committee had properly carried out its function in supporting the implementation of the Company's sustainability agenda. The assessment was based on the Committee's contribution to the coordination, monitoring, and strengthening of ESG programs. In 2025, the effectiveness of the Committee's function was reflected in the achievement of the Board of Directors' Key Performance Indicator for ESG Implementation, which reached 100% of the target set.

Governance, Risk, and Compliance (GRC) Committe

The Board of Directors assessed that the GRC Committee had provided effective support in strengthening governance, risk management, compliance, and investment management. The assessment was based on the quality of the Committee's reviews and recommendations to the Board of Directors, as well as its contribution to ensuring that strategic programs were carried out in accordance with the Company's priorities. In 2025, the realization of the Investment Program Implementation reached 80.10% compared with the target of 70.00%, equivalent to an achievement level of 114.43%.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Information Transparency on Board of Commissioners and Board of Directors

KESELARASAN HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan yang profesional dengan tetap memperhatikan fungsi, tugas, serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan. Adapun beberapa aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar dan Asas Hubungan Kerja
   Hubungan kerja Organ di dalam Perusahaan harus berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga didasarkan pada prinsip dasar hubungan yang GCG. Kelima prinsip GCG ini menjadi dasar hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Oleh karena itu, dengan landasan GCG ini maka dalam pelaksanaannya terdapat pola hubungan kerja di antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam memberikan nilai tambah bagi kepentingan Perusahaan.

   Adapun asas dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
   a. Asas Keterbukaan, artinya hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi tidak didasarkan kepentingan pribadi dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (*no vested interest*);
   b. Asas Formal, yaitu hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi didasarkan tugas/tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku;
   c. Asas Kelembagaan, yaitu dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris dan Direksi mewakili kelembagaannya sebagai kolegial;
   d. Asas Harmonis, yaitu sedapat mungkin mengeliminir perpecahan yang dapat merugikan Perusahaan;
   e. Asas Saling Menghormati, yaitu dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, kewajiban, kewenangan masing-masing, tidak mencampuri yang bukan kewenangannya;
   f. Asas Kemitraan, yaitu hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan partner kerja sama yang memiliki komitmen yang sama untuk kepentingan Perusahaan.
2. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
   Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan

ALIGNMENT OF WORKING RELATIONSHIP BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is conducted based on the principle of professional partnership, while taking into account the functions, duties, and authorities of each of the Company's governing organs. The following are several aspects related to the working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors:

1. Basic Principles and Working Relationship Principles
   The working relationship between organs within the Company must be based on the Law and Government Regulations, and also based on the basic principles of GCG relationship. Five principles of GCG form the basis of working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors. Therefore, with this GCG foundation, in its implementation there is a pattern of working relationships between Board of Commissioners and Board of Directors in providing added value for the Company's interests.

   The principles in working relationship between Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:
   a. Openness principle, meaning that the working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is not based on personal interests and there is nothing to hide (no vested interest);
   b. Formal principle, i.e. the relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is based on their respective duties/responsibilities and is carried out through applicable procedures;
   c. Institutional Principle, i.e. in every implementation of its duties and functions, Board of Commissioners and Board of Directors represent their institutions as collegial,
   d. Harmonious principle, which is to minimize divisions that can harm the Company as much as possible;
   e. Mutual Respect Principle, i.e. in every action taken in accordance with their respective duties, obligations, authorities, not interfering with those that are not their authority;
   f. Partnership Principle, i.e. the relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is a working partner who has the same commitment to the Company's interests.
2. Working Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors
   The creation of a good working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is one of the most important things so that each organ of the

efektif dan efisien. Untuk itu Perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar;
b. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan;
c. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut;
d. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
f. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan antar Organ Perusahaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang anggota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

3. Permintaan dan Penyampaian Informasi
Dalam proses permintaan dan penyampaian informasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat ketentuan sebagai berikut:
a. Informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan kepentingan Perusahaan;
b. Direksi wajib memberikan tanggapan, informasi, alasan atau jawaban dalam kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris terkait dengan kepentingan Perusahaan;
c. Setiap Anggota Dewan Komisaris maupun Dewan Komisaris berwenang memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan antara lain dengan:
   i) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
   ii) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
   iii) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

Company can work according to its function effectively and efficiently. Therefore, in maintaining a good working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors, the Company applies the following principles:
a. Board of Commissioners respects the functions and roles of Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations and Articles of Association;
b. Board of Directors respects the function and role of Board of Commissioners to supervise and advise on the Company's management policy;

c. Correspondence between Board of Commissioners and Board of Directors using a letter format that contains an explanation of the purpose and objectives of its letter;
d. Every working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is a formal relationship, meaning that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for;
e. Any informal working relationship can be carried out by each member of Board of Commissioners and Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through a mechanism or correspondence that can be accounted for;

f. Every working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is a relationship between Company Organs in the sense that Board of Commissioners and Board of Directors as a collective position that represents all of its members so that every working relationship between a member of Board of Commissioners and a member of Board of Directors must be known by other members of Board of Commissioners and Board of Directors.

3. Request and Submission of Information
In the process of requesting and submitting information between Board of Commissioners and Board of Directors, there are the following provisions:
a. Information requested by Board of Commissioners from Board of Directors is only related to the Company's interests;
b. Board of Directors shall provide responses, information, reasons or answers at the first opportunity to Board of Commissioners related to the Company's interests;

c. Each member of Board of Commissioners and Board of Commissioners is authorized to obtain access to information related to the management of the Company, among others by:
   i) Seeing books, letters, and other documents, checking cash for verification purposes and checking the Company's assets;
   ii) Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
   iii) Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the management of the Company;

iv) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
v) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan, dalam hal Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk mengikuti Rapat Direksi atau Dewan Komisaris mengajukan permintaan kehadiran dalam Rapat Direksi.

d. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
e. Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris dan/atau RUPS;
f. Dewan Komisaris wajib memberikan jawaban dan tanggapan atas setiap usulan Direksi yang memerlukan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi;
g. Dewan Komisaris dan Direksi dalam setiap pengambilan keputusan berpegang pada prinsip GCG dan peraturan yang berlaku;
h. Organ pendukung Dewan Komisaris dapat pula melakukan pertemuan/mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Perusahaan yang bersifat Hubungan Kerja Informal:
   i) Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan permintaan Direksi yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
   ii) Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan hal-hal operasional Perusahaan yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

4. Aturan Peralihan
   Dewan Komisaris menghargai fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang belum diatur oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman GCG serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan dilandasi prinsip-prinsip GCG.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan memandang keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing organ Perusahaan. Keberagaman tersebut diharapkan mampu menghadirkan berbagai perspektif, pengalaman, dan kompetensi yang berbeda sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif, menyeluruh, dan responsif terhadap dinamika bisnis.

iv) Requesting the Board of Directors and/or other officials with the knowledge of Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings;
v) Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed, in the event that Board of Directors invites Board of Commissioners to attend Board of Directors Meeting or Board of Commissioners submits a request for attendance at Board of Directors Meeting.

d. Board of Directors is responsible for ensuring that information about the Company is provided to Board of Commissioners in a timely and complete manner as needed by the Board of Commissioners in carrying out its duties;
e. Board of Directors may also provide special reports to Board of Commissioners and/or the GMS at any time;
f. Board of Commissioners must provide answers and responses to each proposal of Board of Directors that requires approval or recommendation of Board of Commissioners within a maximum period of 30 days from the receipt of requests or explanations and complete documents from the Board of Directors;
g. Board of Commissioners and Board of Directors in every decision-making adhere to the principles of GCG and applicable regulations;
h. Supporting organs of Board of Commissioners may also conduct meetings/submit requests for information to Company Officials in the nature of Informal Working Relationships:
   i) Clarification of information and documents related to requests from the Board of Directors that require approval or written responses from Board of Commissioners;
   ii) Clarification of information and documents related to the Company's operational matters that are of concern to the Board of Commissioners.

4. Transitional Rules
   Board of Commissioners appreciates the function and role of Board of Directors in managing the Company as stipulated in the Company's Articles of Association. Various matters concerning the day-to-day working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors that have not been regulated by the provisions/legislation, the Company's Articles of Association, GCG Guidelines and this document will be further regulated in accordance with the agreement between Board of Commissioners and Board of Directors based on GCG principles.

DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The Company views diversity in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors as one of the factors that can support the effective performance of each of the Company's governing organs. This diversity is expected to bring a variety of perspectives, experiences, and competencies, thereby enabling the decision-making process to be conducted more objectively, comprehensively, and responsively to business dynamics.

Hingga saat ini, Perusahaan belum memiliki kebijakan tertulis secara khusus mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, Perusahaan tetap memperhatikan kesesuaian susunan Dewan Komisaris dan Direksi dengan kompleksitas kegiatan usaha dan struktur organisasi Perusahaan guna memastikan efektivitas, ketepatan, dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Informasi lebih lanjut mengenai profil keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan disajikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan

Ketentuan mengenai evaluasi kinerja Dewan Komisaris diatur lebih lanjut melalui Keputusan Dewan Komisaris yang dievaluasi secara berkala. Adapun ketentuan terkait evaluasi kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris menetapkan indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun;
3. Dewan Komisaris atau organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris;
4. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*/KPI) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN;
5. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self-assessment*;
6. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/bukti pendukung;
7. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan KPI yang ditetapkan sebagaimana poin 4 di atas;
8. Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan data yang diperlukan sebagai dasar *input* data capaian kinerja Dewan Komisaris dan melaporkan hasilnya sebagaimana poin 6 di atas serta Komite Nominasi dan Remunerasi membantu melakukan evaluasi bersama Komite lainnya berupa masukan jika diperlukan untuk pembaharuan KPI Dewan Komisaris yang diusulkan kepada Dewan Komisaris dalam rapat internal.

To date, the Company does not have a specific written policy regarding the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition. However, the Company continues to ensure that the Board of Commissioners and Board of Directors composition is aligned with the complexity of the Company's business activities and organizational structure to ensure effectiveness, accuracy, and speed in the decision-making process in support of achieving the Company's objectives. Further information regarding the diversity profile of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is presented in the Company Profile section in this Annual Report.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

Board of Commissioners Performance Appraisal

Policy

Provisions regarding the Board of Commissioners' performance appraisal are further regulated by a Board of Commissioners' Decree, which is reviewed periodically. The provisions regarding the Board of Commissioners' performance appraisal are as follows:

1. Board of Commissioners has a policy regarding the measurement and appraisal of Board of Commissioners' performance;
2. Board of Commissioners sets Performance Achievement indicators that are approved by the GMS every year;
3. Board of Commissioners or Board of Commissioners organ conducts Board of Commissioners performance assessment, states the results in the Minutes of Board of Commissioners Meeting and includes it in the Board of Commissioners Duties Implementation Report;
4. The GMS shall determine the Key Performance Indicators (KPIs) of Board of Commissioners as a measure of assessment of the success of Board of Commissioners' duties and responsibilities implementation based on proposal from Board of Commissioners, and submit quarterly reports on the progress of its realization to the Shareholders/Minister of SOEs;
5. Board of Commissioners performance appraisal is carried out with a self-assessment system,
6. Board of Commissioners performance appraisal results will be included in the annual report and informed to the GMS with supporting data/evidence;
7. Board of Commissioners' performance appraisal is determined based on the KPI as stipulated in point 4 above;
8. Secretariat of Board of Commissioners is responsible for preparing the necessary data as the basis for inputting data on the performance achievements of Board of Commissioners and reporting the results as point 6 above and Nomination and Remuneration Committee assists in the evaluation jointly with other Committees in the form of input if needed to update the KPIs of Board of Commissioners proposed to Board of Commissioners in an internal meeting.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Kriteria yang Digunakan

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* yang dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun buku, di mana hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Adapun beberapa kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas pengawasan dan pemberian nasihat strategis kepada Direksi;
2. Kontribusi terhadap penguatan tata kelola dan kepatuhan;
3. Kehadiran dan partisipasi aktif dalam rapat Dewan dan komite;
4. Integritas dan penerapan nilai AKHLAK dalam menjalankan tugas.

Pihak yang Melakukan Penilaian dan Hasil Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara internal melalui mekanisme *self-assessment* yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai satu kesatuan organ pengawasan Perusahaan. Hasil evaluasi kinerja tersebut selanjutnya menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam pelaporan tahunan Perusahaan.

KPI Kolegial Dewan Komisaris Tahun 2025

Performance Assessment Procedure and Criteria Used

The performance of Board of Commissioners is evaluated through a self-assessment mechanism conducted periodically at the end of each fiscal year, and the results of this assessment serve as one of the bases for making improvements and enhancing the quality of Board of Commissioners' performance. The criteria used in this assessment include the following:

1. Effectiveness in supervising and providing strategic advice to Board of Directors;
2. Contribution to strengthening governance and compliance;
3. Attendance and active participation in Board and committee meetings;
4. Integrity and implementation of AKHLAK values in carrying out duties.

Evaluating Party and Assessment Results

The performance assessment of Board of Commissioners is conducted internally through a self-assessment mechanism carried out by each member of Board of Commissioners, both individually and collectively as a single supervisory organ of the Company. The results of this performance assessment are then included in the Board of Commissioners' performance report, which is submitted to the Shareholders in the Company's annual report.

Board of Commissioners' Collegial KPIs for 2025

KPI Kolegial Dewan Komisaris Tahun 2025
2025 Board of Commissioners Collegial KPI

No.	Indikator Indicator	Output Output	Target Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	(%)
A.	**Aspek Perencanaan** Planning Aspect			**10**		**10**
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta KPI Dewan Komisaris 2026 Preparation of the 2026 Annual Work Plan and Budget, as well as the Board of Commissioners' KPIs	Tersusunnya Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2026 Completion of the 2026 Board of Commissioners Work Plan	Selambat-lambatnya Oktober 2025 No later than October 2025	10	Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2026 Nomor KU.01/112/DK/PLMT/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 2026 Board of Commissioners Work Plan Number KU.01/112/DK/PLMT/X/2025 dated October 31, 2025	10
B.	**Aspek Pengawasan & Pemberian Nasihat** Supervisory and Advisory Aspect			**70**		**70**
1	Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas RKAP Tahun 20 26 Submission of the Board of Commissioners' Opinions and Recommendations to Shareholders on the 2026 Work Plan and Budget	Tersusunnya Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 20 26 Completion of the Board of Commissioners' Opinions and Recommendations on the 2026 RKAP.	Selambat - lambatnya Januari 2026 No later than January 2026	7	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 20 26 Nomor KU.01.02/002/ DK/PLMT/I/202 6 tanggal 8 Januari 2026 Opinions and Recommendations of the Board of Commissioners on the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) Number KU.01.02/002/DK/PLMT/I/2026 dated January 8, 2026	7

KPI Kolegial Dewan Komisaris Tahun 2025
2025 Board of Commissioners Collegial KPI

No.	Indikator Indicator	Output Output	Target Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	(%)
2	Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Laporan Triwulanan Submission of the Board of Commissioners' Opinions and Recommendations to Shareholders on the Quarterly Report	Tersusunnya Pendapat dan Saran atas Laporan Triwulan I, II dan III Completion of the Opinions and Recommendations on the First, Second, and Third Quarter Reports.	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris sebanyak 3 dokumen Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners in 3 documents	8	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Opinions and Recommendations of the Board of Commissioners on the 2025 Quarterly Reports for the First, Second, and Third Quarters	8
3	Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Tahun 2024 Submission of the Board of Commissioners' Opinions and Recommendations to Shareholders on the 2024 Annual Report	Tersusunnya Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Completion of the Board of Commissioners' Opinions and Recommendations on the Annual Report	Selambat-lambatnya 30 Juni 2025 No later than June 30, 2025	7	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 (Audited) Nomor KU.01.08/053/DK/PLMT/VI/20 25 tanggal 16 Juni 2025 Opinions and Recommendations of the Board of Commissioners on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year (Audited) Number KU.01.08/053/DK/PLMT/VI/2025 dated June 16, 2025	7
4	Rapat Dewan Komisaris Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan Meetings of Board of Commissioners at Least Once a Month	Jumlah Risalah Rapat Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan Number of Meeting Minutes Prepared at Least Once a Month.	Minimal 12 dokumen Minimum 12 documents	10	Terdapat 21 Risalah Rapat There are 21 Minutes of Meeting	10
5	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors at Least Once a Month	Jumlah Risalah Rapat Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan Number of Meeting Minutes Prepared at Least Once a Month.	Minimal 12 dokumen Minimum 12 documents	10	Terdapat 12 Risalah Rapat There are 12 Minutes of Meeting	10
6	Pemberian persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Granting written approval from the Board of Commissioners for the actions of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association	Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Diberikan Tepat Waktu Written Approval by the Board of Commissioners for the Directors' Actions Issued in a Timely Manner.	Surat mengenai Persetujuan/Penolakan Tertulis diterbitkan paling lambat 14 hari kalender sejak dokumen lengkap diterima oleh Dewan Komisaris Written Approval/ Rejection Letter must be issued no later than 14 calendar days after the complete documents are received by the Board of Commissioners.	8	4 Surat Persetujuan Dewan Komisaris atas 4 Surat Permohonan Direksi terbit tepat waktu 4 Letters of Approval from the Board of Commissioners to 4 Letters of Request from the Board of Directors were issued on time.	8
7	Pemberian tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan - perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Granting written responses from the Board of Commissioners for the actions of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association	Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Diberikan Tepat Waktu Written Responses of the Board of Commissioners to the Directors' Actions Provided in a Timely Manner.	Surat mengenai Tanggapan Tertulis diterbitkan paling lambat 14 hari kalender sejak dokumen lengkap diterima oleh Dewan Komisaris Letter regarding Written Response must be issued no later than 14 calendar days after the complete documents are received by the Board of Commissioners.	8	6 Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas 6 Surat Permohonan Direksi terbit tepat waktu 6 Letters of Response from the Board of Commissioners to 6 Letters of Request from the Board of Directors were issued on time.	8

KPI Kolegial Dewan Komisaris Tahun 2025
2025 Board of Commissioners Collegial KPI

No.	Indikator Indicator	Output Output	Target Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	(%)
8	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang - Cabang/Anak Perusahaan minimal 6 kali Board of Commissioners' work visits to branches/ subsidiaries at least 6 times	Laporan Kunjungan Kerja/Surat Work Visit Reports/ Letters.	Minimal 6 Laporan/Surat Minimum 6 Reports/ Letters	12	6 Laporan 6 Reports	12
C.	**Aspek Pelaporan** Reporting Aspect			**10**		**10**
1	Penyampaian laporan tahunan tentang Tugas Pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Submission of the annual report on the Board of Commissioners' Supervisory Duties and the Realization of the Board of Commissioners' KPI Implementation	Laporan tugas pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Board of Commissioners' Supervisory Duties and the Realization of the Board of Commissioners' KPI Implementation	1 Laporan 1 Report	10	Laporan tugas pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Board of Commissioners' Supervisory Duties and the Realization of the Board of Commissioners' KPI Implementation	10
D.	**Aspek Dinamis/Lain** Dynamic/Other Aspect			**10**		**10**
1	Peningkatan kompetensi melalui kegiatan Seminar/Workshop / Pertemuan Ilmiah/studi banding Competency improvement through seminars, workshops, scientific meetings, and comparative studies.	Terlaksananya Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris Implementation of competency improvement for the Board of Commissioners.	Paling sedikit berjumlah 20 jam pelatihan dalam satu tahun. At least 20 hours of training per year.	10	Terlaksana Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris sebanyak 20 jam Implementation of 20 hours of competency improvement for the Board of Commissioners.	10
	Total Bobot Total Weight			**100**		**100**

Ket : Sangat Baik (>95-100), Baik (>80-95), Cukup (>65 sd 80), Kurang (>50-65), Sangat Kurang (≤50)
Note: Very Good (>95-100), Good (>80-95), Sufficient (>65 to 80), Poor (>50-65), Very Poor (≤50)

KPI Individual Dewan Komisaris Tahun 2025

Board of Commissioners' Individual KPIs for 2025

Penilaian Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025
2025 Assessment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
(Darwanto)

	Aspek Penilaian Assessment Aspects		Bobot Weight	Nilai Score
1	Integritas Integrity	Memiliki komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan pedoman perilaku (*code of conduct*). Tidak pernah terlibat dalam tindakan fraud, pelanggaran hukum, rekayasa atau perbuatan menyimpang (tidak jujur) yang merugikan kepentingan perusahaan. Demonstrates a commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct. Has never been involved in fraud, legal violations, manipulation, or other misconduct (dishonest acts) that could harm the interests of the Company.	20%	99
2	*Leadership*	Mampu memberikan semangat dan motivasi kepada Direksi dan Organ Dewan Komisaris untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Able to inspire and motivate the Board of Directors and the Board of Commissioners to perform their duties effectively in order to achieve the Company's objectives.	17%	99
3	Dedikasi Dedication	Memiliki kemauan yang kuat, antusias dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Possesses strong commitment, enthusiasm, and dedication to advancing and developing the Company	17%	99

Penilaian Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025
2025 Assessment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
(Darwanto)

	Aspek Penilaian Assessment Aspects		Bobot Weight	Nilai Score
4	Kerjasama Tim Teamwork	Mampu mengkomunikasikan ide-ide dan tujuan strategis perusahaan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Able to communicate the Company's ideas and strategic objectives effectively to various stakeholders in order to foster synergy in achieving the established goals.	16%	98
5	Efektivitas Kinerja Performance Effectiveness	Mampu memberikan arahan, saran dan pendapat dalam pembahasan program-program strategis perusahaan, pencapaian kinerja keuangan, laporan auditor independen, penyusunan RJPP/RKAP dan hal-hal penting lainnya. Able to provide direction, recommendations, and opinions in discussions on the Company's strategic programs, financial performance achievements, independent auditor's reports, the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP), as well as other significant matters.	15%	98
6	Keahlian Expertise	Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan. Memiliki pemahaman terhadap fungsi manajemen, tata kelola perusahaan serta tugas-tugas Dewan Komisaris. Possesses adequate knowledge of the Company's business sector. Has a sound understanding of management functions, corporate governance, and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	15%	99
	Total Nilai Total Score		**100%**	**98,7**

Ket : Sangat Baik (>95-100), Baik (>80-95), Cukup (>65 sd 80), Kurang (>50-65), Sangat Kurang (≤50)
Note: Very Good (>95-100), Good (>80-95), Sufficient (>65 to 80), Poor (>50-65), Very Poor (≤50)

Penilaian Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025
2025 Assessment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
(Arman Depari)

	Aspek Penilaian Assessment Aspects		Bobot Weight	Nilai Score
1	Integritas Integrity	Memiliki komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan pedoman perilaku (*code of conduct*). Tidak pernah terlibat dalam tindakan fraud, pelanggaran hukum, rekayasa atau perbuatan menyimpang (tidak jujur) yang merugikan kepentingan perusahaan. Demonstrates a commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct. Has never been involved in fraud, legal violations, manipulation, or other misconduct (dishonest acts) that could harm the interests of the Company.	20%	99
2	*Leadership*	Mampu memberikan semangat dan motivasi kepada Direksi dan Organ Dewan Komisaris untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Able to inspire and motivate the Board of Directors and the Board of Commissioners to perform their duties effectively in order to achieve the Company's objectives.	17%	99
3	Dedikasi Dedication	Memiliki kemauan yang kuat, antusias dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Possesses strong commitment, enthusiasm, and dedication to advancing and developing the Company	17%	98
4	Kerjasama Tim Teamwork	Mampu mengkomunikasikan ide-ide dan tujuan strategis perusahaan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Able to communicate the Company's ideas and strategic objectives effectively to various stakeholders in order to foster synergy in achieving the established goals.	16%	99
5	Efektivitas Kinerja Performance Effectiveness	Mampu memberikan arahan, saran dan pendapat dalam pembahasan program-program strategis perusahaan, pencapaian kinerja keuangan, laporan auditor independen, penyusunan RJPP/RKAP dan hal-hal penting lainnya. Able to provide direction, recommendations, and opinions in discussions on the Company's strategic programs, financial performance achievements, independent auditor's reports, the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP), as well as other significant matters.	15%	98
6	Keahlian Expertise	Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan. Memiliki pemahaman terhadap fungsi manajemen, tata kelola perusahaan serta tugas-tugas Dewan Komisaris. Possesses adequate knowledge of the Company's business sector. Has a sound understanding of management functions, corporate governance, and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	15%	99
	Total Nilai Total Score		**100%**	**98,7**

Ket : Sangat Baik (>95-100), Baik (>80-95), Cukup (>65 sd 80), Kurang (>50-65), Sangat Kurang (≤50)
Note: Very Good (>95-100), Good (>80-95), Sufficient (>65 to 80), Poor (>50-65), Very Poor (≤50)

Penilaian Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025
2025 Assessment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
(Ahmad Perwira Mulia Tarigan)

	Aspek Penilaian Assessment Aspects		**Bobot** Weight	**Nilai** Score
1	Integritas Integrity	Memiliki komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan pedoman perilaku (*code of conduct*). Tidak pernah terlibat dalam tindakan fraud, pelanggaran hukum, rekayasa atau perbuatan menyimpang (tidak jujur) yang merugikan kepentingan perusahaan. Demonstrates a commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct. Has never been involved in fraud, legal violations, manipulation, or other misconduct (dishonest acts) that could harm the interests of the Company.	20%	98
2	*Leadership*	Mampu memberikan semangat dan motivasi kepada Direksi dan Organ Dewan Komisaris untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Able to inspire and motivate the Board of Directors and the Board of Commissioners to perform their duties effectively in order to achieve the Company's objectives.	17%	98
3	Dedikasi Dedication	Memiliki kemauan yang kuat, antusias dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Possesses strong commitment, enthusiasm, and dedication to advancing and developing the Company	17%	98
4	Kerjasama Tim Teamwork	Mampu mengkomunikasikan ide-ide dan tujuan strategis perusahaan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Able to communicate the Company's ideas and strategic objectives effectively to various stakeholders in order to foster synergy in achieving the established goals.	16%	97
5	Efektivitas Kinerja Performance Effectiveness	Mampu memberikan arahan, saran dan pendapat dalam pembahasan program-program strategis perusahaan, pencapaian kinerja keuangan, laporan auditor independen, penyusunan RJPP/RKAP dan hal-hal penting lainnya. Able to provide direction, recommendations, and opinions in discussions on the Company's strategic programs, financial performance achievements, independent auditor's reports, the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP), as well as other significant matters.	15%	99
6	Keahlian Expertise	Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan. Memiliki pemahaman terhadap fungsi manajemen, tata kelola perusahaan serta tugas-tugas Dewan Komisaris. Possesses adequate knowledge of the Company's business sector. Has a sound understanding of management functions, corporate governance, and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	15%	99
	Total Nilai Total Score		**100%**	**98,1**

Ket : Sangat Baik (>95-100), Baik (>80-95), Cukup (>65 sd 80), Kurang (>50-65), Sangat Kurang (≤50)
Note: Very Good (>95-100), Good (>80-95), Sufficient (>65 to 80), Poor (>50-65), Very Poor (≤50)

Penilaian Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025
2025 Assessment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
(Herbert Timbo Parluhutan Siahaan)

	Aspek Penilaian Assessment Aspects		**Bobot**	**Nilai**
1	Integritas Integrity	Memiliki komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan pedoman perilaku (*code of conduct*). Tidak pernah terlibat dalam tindakan fraud, pelanggaran hukum, rekayasa atau perbuatan menyimpang (tidak jujur) yang merugikan kepentingan perusahaan. Demonstrates a commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct. Has never been involved in fraud, legal violations, manipulation, or other misconduct (dishonest acts) that could harm the interests of the Company.	20%	98
2	*Leadership*	Mampu memberikan semangat dan motivasi kepada Direksi dan Organ Dewan Komisaris untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Able to inspire and motivate the Board of Directors and the Board of Commissioners to perform their duties effectively in order to achieve the Company's objectives.	17%	99
3	Dedikasi Dedication	Memiliki kemauan yang kuat, antusias dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Possesses strong commitment, enthusiasm, and dedication to advancing and developing the Company	17%	99
4	Kerjasama Tim Teamwork	Mampu mengkomunikasikan ide-ide dan tujuan strategis perusahaan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Able to communicate the Company's ideas and strategic objectives effectively to various stakeholders in order to foster synergy in achieving the established goals.	16%	99

Penilaian Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025
2025 Assessment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
(Herbert Timbo Parluhutan Siahaan)

	Aspek Penilaian Assessment Aspects		Bobot	Nilai
5	Efektivitas Kinerja Performance Effectiveness	Mampu memberikan arahan, saran dan pendapat dalam pembahasan program-program strategis perusahaan, pencapaian kinerja keuangan, laporan auditor independen, penyusunan RJPP/RKAP dan hal-hal penting lainnya. Able to provide direction, recommendations, and opinions in discussions on the Company's strategic programs, financial performance achievements, independent auditor's reports, the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP), as well as other significant matters.	15%	98
6	Keahlian Expertise	Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan. Memiliki pemahaman terhadap fungsi manajemen, tata kelola perusahaan serta tugas-tugas Dewan Komisaris. Possesses adequate knowledge of the Company's business sector. Has a sound understanding of management functions, corporate governance, and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	15%	99
	Total Nilai Total Score		**100%**	**98,7**

Ket : Sangat Baik (>95-100), Baik (>80-95), Cukup (>65 sd 80), Kurang (>50-65), Sangat Kurang (≤50)
Note: Very Good (>95-100), Good (>80-95), Sufficient (>65 to 80), Poor (>50-65), Very Poor (≤50)

Penilaian Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025
2025 Assessment of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal
(Aan Rusdianto)

	Aspek Penilaian Assessment Aspects		Bobot Weight	Nilai Score
1	Integritas Integrity	Memiliki komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan pedoman perilaku (*code of conduct*). Tidak pernah terlibat dalam tindakan *fraud*, pelanggaran hukum, rekayasa atau perbuatan menyimpang (tidak jujur) yang merugikan kepentingan perusahaan. Demonstrates a commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct. Has never been involved in fraud, legal violations, manipulation, or other misconduct (dishonest acts) that could harm the interests of the Company.	20%	99
2	*Leadership*	Mampu memberikan semangat dan motivasi kepada Direksi dan Organ Dewan Komisaris untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Able to inspire and motivate the Board of Directors and the Board of Commissioners to perform their duties effectively in order to achieve the Company's objectives.	17%	99
3	Dedikasi Dedication	Memiliki kemauan yang kuat, antusias dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Possesses strong commitment, enthusiasm, and dedication to advancing and developing the Company	17%	98
4	Kerjasama Tim Teamwork	Mampu mengkomunikasikan ide-ide dan tujuan strategis perusahaan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Able to communicate the Company's ideas and strategic objectives effectively to various stakeholders in order to foster synergy in achieving the established goals.	16%	98
5	Efektivitas Kinerja Performance Effectiveness	Mampu memberikan arahan, saran dan pendapat dalam pembahasan program-program strategis perusahaan, pencapaian kinerja keuangan, laporan auditor independen, penyusunan RJPP/RKAP dan hal-hal penting lainnya. Able to provide direction, recommendations, and opinions in discussions on the Company's strategic programs, financial performance achievements, independent auditor's reports, the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP), as well as other significant matters.	15%	98
6	Keahlian Expertise	Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan. Memiliki pemahaman terhadap fungsi manajemen, tata kelola perusahaan serta tugas-tugas Dewan Komisaris. Possesses adequate knowledge of the Company's business sector. Has a sound understanding of management functions, corporate governance, and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.	15%	99
	Total Nilai Total Nilai		**100%**	**98,7**

Penilaian Kinerja Direksi

Kebijakan Umum

1. Pemegang Saham/RUPS mengesahkan dan menetapkan indikator penilaian kinerja Direksi, yaitu *Key Performance Indicator* Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang memuat indikator kinerja utama, target, bobot, dan pedoman kamus penilaiannya;

2. Dewan Komisaris mengevaluasi capaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS;
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

Kebijakan Penilaian Direksi Perusahaan

Kebijakan Penilaian Direksi Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor PW.06.02/21/6/1/KJPR/DIRU/PLMT-24 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Perusahaan di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Berdasarkan pedoman tersebut, Perusahaan menetapkan kebijakan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, aspirasi Pemegang Saham, RJPP, RKAP, serta capaian KPI Perusahaan pada tahun sebelumnya.

Penetapan KPI Direksi dilakukan melalui proses penyusunan oleh Divisi Perencanaan Strategis Kantor Pusat bersama unit penanggung jawab KPI, kemudian dibahas bersama Direksi dan Komite Audit Dewan Komisaris. Selanjutnya, usulan KPI disampaikan kepada perwakilan Pemegang Saham untuk memperoleh masukan sebelum ditetapkan dalam RUPS dan dituangkan dalam Kontrak Manajemen Tahunan Direksi.

Penyesuaian KPI Direksi dapat dilakukan apabila terdapat perubahan pada RJPP, RKAP, maupun arahan lainnya dari Pemegang Saham. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui usulan kepada Pemegang Saham dan memperoleh persetujuan RUPS atau ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam Kontrak Manajemen.

Penilaian KPI Direksi diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data, yang dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja pengukuran KPI oleh Divisi Perencanaan Strategis Kantor Pusat. Unit pemilik data menyampaikan realisasi KPI beserta justifikasi dan dokumen pendukung apabila terdapat indikator yang belum mencapai target. Hasil pengukuran capaian KPI selanjutnya dilaporkan secara berkala sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Manajemen.

Laporan capaian KPI Direksi yang menjadi bagian dari Laporan Manajemen dievaluasi oleh Komite Audit, kemudian Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan kepada Direksi atas hasil

Board of Directors Performance Appraisal

General Policy

1. The Shareholders/GMS authorizes and determines the performance appraisal indicators, namely the Key Performance Indicators (KPI) of Board of Directors as stated in the Management Contract which contains key performance indicators, targets, weights and dictionary guidelines for assessment
2. Board of Commissioners evaluates the performance achievements of Board of Directors (collegial and individual) to be submitted to the GMS.
3. The evaluation results regarding the overall performance of Board of Directors and individual performance of each member of Board of Directors are an integral part of the compensation and incentive scheme for members of Board of Directors.

Company Board of Directors Assessment Policy

The Company Board of Directors Assessment Policy is based on PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation No. PW.06.02/21/6/1/KJPR/DIRU/PLMT-24 dated June 21, 2024, regarding Guidelines for Corporate Performance Management at PT Pelindo Multi Terminal. Based on these guidelines, the Company establishes a policy for the performance evaluation of the Board of Directors on a collegial and individual basis, taking into account applicable regulations, shareholder aspirations, the RJPP, the RKAP, and the Company's KPI achievements from the previous year.

The Board of Directors' KPIs are established through a process led by the Strategic Planning Division at Head Office in collaboration with the units responsible for the KPIs, followed by discussions with the Board of Directors and the Audit Committee of the Board of Commissioners. Subsequently, the proposed KPIs are submitted to shareholder representatives for input before being finalized at the General Meeting of Shareholders (GMS) and incorporated into the Board of Directors' Annual Management Contract.

Adjustments to the Board of Directors' KPIs may be made if there are changes to the RJPP, RKAP, or other directives from Shareholders. Such adjustments are made through a proposal to the Shareholders and require approval by the GMS or are stipulated by the Shareholders in the Management Contract.

The evaluation of the Board of Directors' KPIs begins with mapping data sources and data-owning units, followed by the preparation of KPI measurement working papers by the Strategic Planning Division at Head Office. Data-owning units submit their KPI results along with justifications and supporting documents if any indicators have not met their targets. The results of the KPI achievement measurements are then reported periodically as an integral part of the Management Report.

The report on the Board of Directors' KPI performance, which forms part of the Management Report, is evaluated by the Audit Committee; subsequently, the Board of Commissioners

capaian KPI tersebut. Penilaian KPI Direksi secara tahunan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran yang mengacu pada hasil audit Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Perusahaan pada tahun yang bersangkutan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Kriteria yang Digunakan

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku *Holding*. Proses evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disusun dan ditetapkan pada awal tahun buku. Adapun kriteria evaluasi kinerja Direksi yang diajukan oleh Direksi dan ditetapkan dalam RUPS sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi Model Bisnis;
3. Kepemimpinan Tekonologi;
4. Peningkatan Investasi;
5. Pengembangan Talenta.

Pihak yang Melakukan Penilaian dan Hasil Penilaian

Proses evaluasi dan penilaian kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham untuk menjadi bahan pertimbangan RUPS dalam penyusunan berbagai rekomendasi strategis yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, kebijakan remunerasi, serta pertimbangan terkait penugasan atau kelanjutan masa jabatan Direksi.

provides feedback to the Board of Directors regarding these KPI results. The annual assessment of the Board of Directors' KPIs is conducted based on measurement results that reference the findings of the External Auditor's audit of the Company's Financial Statements for the relevant year.

Assessment Procedure and Criteria Used

The performance assessment of Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners in accordance with the evaluation mechanism determined by the Shareholders through PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the holding Company. The evaluation process is based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) that have been formulated and established at the beginning of the fiscal year. The criteria for evaluating the Board of Directors' performance, which are proposed by the Board of Directors and established at the GMS, include at least the following:

1. Economic and Social Value for Indonesia;
2. Business Model Innovation;
3. Technology Leadership;
4. Investment Enhancement;
5. Talent Development.

Evaluating Party and Assessment Results

Board of Directors' performance evaluation and assessment are conducted by the Board of Commissioners and subsequently submitted to the Shareholders for consideration by the GMS in formulating various strategic recommendations related to human capital development, remuneration policy, and considerations regarding the assignment or continuation of Board of Directors' tenure.

KPI Kolegial Direksi Tahun 2025
Board of Directors' Collegial KPIs for 2025

No	KPI	Satuan Unit	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
A.	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia			58			
Finansial							
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	1.207,67	9	759,17	62,86	5,66
2	Pendapatan Revenue	Rp Miliar Rp Billion	6.288,02	8	5.669,65	90,17	7,21
3	BOPO	%	86,43	8	89,32	96,76	7,74
Operasional Operational							
1	Capaian *Non-Container Throughput* *Non-Container Throughput Performance*	%	100	11	105,00	105,00	11,55
2	Capaian Produktivitas (T/S/D Curah Cair dan Curah Cair) Productivity Performance (T/S/D Liquid Bulk and Liquid Bulk)	%	100	11	116,04	110,00	12,10

KPI Kolegial Direksi Tahun 2025
Board of Directors' Collegial KPIs for 2025

No	KPI	Satuan Unit	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
3	Implementasi Program Kerja K3 OHS Work Program Implementation	%	100	6	110,00	110,00	6,60
Sosial Social							
1	Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Program Implementation	%	100	5	112,50	110,00	5,50
B.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation			15			
1	Penyelesaian Pemurnian Bisnis Completion of business refinement	%	100	5	97,82	97,82	4,89
2	Pengembangan Pengelolaan TUKS dan Pelabuhan K/L Development of TUKS and K/L Port Management	%	100	5	100,00	100,00	5,00
3	*Market Share* Bongkar Muat (Curah Cair & Curah Kering) Market Share of Loading and Unloading (Liquid Bulk & Dry Bulk)	%	59	5	65	110,00	5,50
C.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership			10			
1	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of NonContainer Services	Jumlah	7	5	8	110,00	5,50
2	Implementasi Program Investasi Investment Program Implementation	%	70	5	80,10	110,00	5,50
D.	Peningkatan Investasi Investment Growth			12			
1	Pengembangan Layanan Bongkar Muat *Ship to Ship Handling* *Development of Ship-to-Ship Handling Services*	%	100	6	100,00	100,00	6,00
2	Penambahan Layanan Oil & Gas Terminal Addition of Oil & Gas Terminal Services	%	100	6	100,00	100,00	6,00
E.	Pengembangan Talenta Talent Development			5			
1	Pengelolaan Talent Pelindo Pelindo Talent Management	%	100	5	106,40	106,40	5,32
Total				**100**			**100,07**

Keterangan:

Capaian KPI > 100% | / KPI Achievement > 100%
Capaian KPI > 100% | / KPI Achievement > 100%

KPI INDIVIDUAL DIREKSI TAHUN 2025

BOARD OF DIRECTORS' INDIVIDUAL KPIS FOR 2025

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur Utama
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI President Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia A. Economic and Social Value for Indonesia								**58**			
1	EBITDA	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	1207,67	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	9		759,17	62,86	5,66
2	Pendapatan	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	6288,02	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	8		5669,65	90,17	7,21
3	BOPO	%	86,43	C	Triwulanan Quarterly	Negatif Negative	8		89,32	96,76	7,74
4	Capaian *Non Container Throughput* Non-Container Throughput Achievement	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	11		105,00	105,00	11,55
5	Capaian Produktivitas (T/S/D Curah Cair dan Curah Kering) Productivity Achievement (Liquid Bulk and Dry Bulk T/S/D)	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	11		116,04	110,00	12,10
6	Implementasi Program Kerja K3 OHS Work Program Implementation	%	100	S	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		110,00	110,00	6,60
7	Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Program Implementation	%	100	S	Tahunan Annually	Positif Positive	5		112,5	110	5,5
B. Inovasi Model Bisnis B. Business Model Innovation								**15**			
8	Penyelesaian pemurnian bisnis Completion of business refinement	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		97,82	97,82	4,89
9	Pengembangan Pengelolaan TUKS dan Pelabuhan K/L Development of TUKS and K/L Port Management	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		100,00	100,00	5,00
10	*Market Share* Bongkar Muat (Curah Cair & Curah Kering) Market Share of Loading and Unloading (Liquid Bulk & Dry Bulk)	%	59	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		65,00	110,00	5,50
C. Kepemimpinan Teknologi C. Technology Leadership								**10**			
11	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	Jumlah Amount	7	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		8	110,00	5,50
12	Implementasi Program Investasi Investment Program Implementation	%	70	E	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		80,10	110,00	5,50

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur Utama
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI President Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
D. Peningkatan Investasi D. Increased Investment								12			
13	Pengembangan Layanan Bongkar Muat Development of Ship-to-Ship Handling Services	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		100,00	100,00	6,00
14	Penambahan Layanan Oil & Gas Terminal Addition of Oil & Gas Terminal Services	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		100,00	100,00	6,00
E. Pengembangan Talenta E. Talent Development								5			
15	Pengelolaan *Talent* Pelindo Pelindo Talent Management	%	100	S	Semesteran Semiannually	Positif Positive	5		106,4	106,40	5,32
								100			100,07

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur SDM
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI HC Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
A. KPI Bersama Direksi A. Board of Directors Joint KPI								40			
1	EBITDA	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	1207,67	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	8		759,17	63	5,03
2	Pendapatan Revenue	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	6288,02	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		5669,65	90	5,41
3	BOPO	%	86,43	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	8		89,32	97	7,74
4	Capaian *Non Container Throughput* Non-Container Throughput Achievement	%	100,00	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		105,00	105	5,25
5	Implementasi Program Kerja K3 OHS Work Program Implementation	%	100,00	S	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	7		110,00	110	7,70
6	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	7	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		8	110	6,60
B. KPI *Shared* & Individual Direksi B. Shared & Individual KPIs of Directors								60			
7	Pengelolaan *Talent* Pelindo Pelindo Talent Management	%	100	S	Tahunan Annually	Positif Positive	10		106,4	106	10,64

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur SDM
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI HC Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
8	Pengelolaan Kinerja Individu Individual	%	100	S	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100	10,00
9	Jumlah Pengadaan Bersama Number of Joint Procurements	Jumlah Amount	1	C	Tahunan Annually	Positif Positive	10		4	110	11,00
10	Implementasi Program Inovasi Implementation of Innovation Programs	%	100	S	Tahunan Annually	Positif Positive	10		100	100	10,00
11	Ketersediaan dokumen legal perusahaan Availability of Company Legal Documents	%	100	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100	10,00
12	Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Implementation of Social and Environmental Responsibility Programs	%	100	S	Tahunan Annually	Positif Positive	10		112,5	110	11,00
TOTAL								**100**			**100,37**

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur Operasi
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI Operations Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
A. KPI Bersama Direksi A. Board of Directors Joint KPI								**40**			
1	EBITDA	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	1207,67	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	8		759,17	62,86	5,03
2	Pendapatan Revenue	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	6288,02	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		5669,65	90,17	5,41
3	BOPO	%	86,43	C	Triwulanan Quarterly	Negatif Negative	8		89,32	96,76	7,74
4	Capaian *Non Container Throughput* Non-Container Throughput Achievement	%	100,00	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		105,00	105,00	5,25
5	Implementasi Program Kerja K3 OHS Work Program Implementation	%	100,00	S	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		110,00	110,00	6,60

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur Operasi
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI Operations Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
6	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	7	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	7		8	110,00	7,70
B. KPI Shared & Individual Direksi B. Shared & Individual KPIs of Directors								60			
7	Capaian Produktivitas (T/S/D Curah Cair dan Curah Kering) Productivity Achievements (Liquid Bulk and Dry Bulk T/S/D)	%	100,00	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	12		116,04	110,00	13,20
8	Produktivitas Bongkar Muat Terminal Kendaraan Vehicle Terminal Loading and Unloading Productivity	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		298,00	110,00	11,00
9	Terminalisasi Pelabuhan Port Terminalization	Jumlah Amount	12	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	12		12,00	100,00	12,00
10	Evaluasi Pasca Standarisasi dan Digitalisasi Pelabuhan Evaluation on Post-Standardization and Digitalization of the Port	%	100	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100,00	10,00
11	Pengelolaan Sistem Manajemen Terpadu (Audit Sisman Mutu, Lingkungan, K3 dan Anti Penyuapan) Integrated Management System Management (Quality, Environmental, OHS, and Anti-Bribery System Audits)	%	100	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100,00	10,00
12	*Value Creation* Optimalisasi Aset Value Creation and Asset Optimization	Rupiah Milyar	10,3	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		17,25	110,00	6,60
TOTAL								**100**			**100,53**

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI Finance and Risk Management Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
A. KPI Bersama Direksi A. Board of Directors Joint KPI								40			
1	EBITDA	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	1207,67	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	9		759,17	62,86	5,66
2	Pendapatan Revenue	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	6288,02	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		5669,65	90,17	5,41
3	BOPO	%	86,43	C	Triwulanan	Negatif Negative	9		89,32	96,76	8,71
4	Capaian *Non Container Throughput* Non-Container Throughput Achievement	%	100,00	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		105,00	105,00	5,25
5	Implementasi Program Kerja K3 OHS Work Program Implementation	%	100,00	S	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		110,00	110,00	5,50
6	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	7	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		8	110	6,6
B. KPI Shared & Individual Direksi B. Shared & Individual KPIs of Directors								60			
7	Profil Risiko Korporat Corporate Risk Profile	%	100	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100,00	10,00
8	Pemenuhan Kompetensi Organ Pengelola Risiko Fulfillment of Risk Management Organ Competencies	%	90	G	Tahunan Annually	Positif Positive	8		97	107,78	8,62
9	Hasil Opini KAP KAP Opinion Results	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100,00	10,00
10	*Current Ratio*	Kali Times	2,03	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		1,54	75,86	7,59
11	Tingkat Pencairan Piutang Receivables Disbursement Rate	%	85	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	12		99,05	110,00	13,20
12	Implementasi *Autocollection & Supply Chain Financing* pada *Branch* Implementation of Autocollection & Supply Chain Financing at Branches	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100,00	10,00
TOTAL								100			96,53

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur Teknik
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI Technical Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
A. KPI Bersama Direksi A. Board of Directors Joint KPI								40			
1	EBITDA	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	1207,67	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	8		759,17	62,86	5,03
2	Pendapatan Revenue	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	6288,02	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		5.669,65	90,17	5,41
3	BOPO	%	86,43	C	Triwulanan Quarterly	Negatif Negative	8		89,32	96,76	7,74
4	Capaian *Non Container Throughput* Non-Container Throughput Achievement	%	100,00	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		105,00	105,00	5,25
5	Implementasi Program Kerja K3 OHS Work Program Implementation	%	100,00	S	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	7		110,00	110,00	7,70
6	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	7	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		8	110,00	6,60
B. KPI Shared & Individual Direksi B. Shared & Individual KPIs of Directors								60			
7	Kesiapan Fasilitas Facility Readiness	%	85	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		91,8	108,00	10,80
8	Kesiapan Peralatan Equipment Readiness	%	86	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		91,26	106,12	10,61
9	*Value Creation* Optimalisasi Aset Value Creation and Asset Optimization	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	10,3	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		17,25	110,00	11,00
10	Implementasi Program Investasi Investment Program Implementation	%	70	E	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		80,10	110,00	11,00
11	Penyediaan Sistem dan Infrastruktur IT Pada *Branch* Serah Operasi PMT Provision of IT Systems and Infrastructure at SPMT Operational Handover Branch	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100,00	10,00
12	Capaian Produktivitas (T/S/D Curah Cair dan Curah Kering) Productivity Achievement (Liquid Bulk and Dry Bulk T/S/D)	%	100,00	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		116,04	110,00	11,00
TOTAL								**100**			**102,14**

Realisasi KPI Individu Direksi Tahun 2025 Direktur Strategi dan Komersial
Realization of 2025 Board of Directors Individual KPI Strategy and Commercial Director

NO.	INDIKATOR INDICATOR	SATUAN UNIT	TARGET 2025 TARGET 2025	ESG/C	PERIODE PENGUKURAN MEASUREMENT PERIOD	POLARITAS POLARITY	BOBOT WEIGHT		S.D. TRW IV 2025 UNTIL Q4 2025		
							SUB	TOTAL	REALISASI REALIZATION	CAPAIAN ACHIEVEMENT	SKOR SCORE
A. KPI Bersama Direksi A. Board of Directors Joint KPI								40			
1	EBITDA	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	1207,67	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	8		759,17	62,86	5,03
2	Pendapatan Revenue	Rupiah Milyar Billions of Rupiah	6288,02	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	7		5.669,65	90,17	6,31
3	BOPO	%	86,43	C	Triwulanan Quarterly	Negatif Negative	8		89,32	96,76	7,74
4	Capaian Non Container Throughput Non-Container Throughput Achievement	%	100,00	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		105,00	105,00	6,30
5	Implementasi Program Kerja K3 OHS Work Program Implementation	%	100,00	S	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	5		110,00	110,00	5,50
6	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas Standardization and Digitalization of Non-Container Services	%	7	G	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	6		8	110,00	6,60
B. KPI Shared & Individual Direksi B. Shared & Individual KPIs of Directors								60			
7	Penyelesaian pemurnian bisnis Completion of Business Refinement	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		97,82	97,82	9,78
8	Pengembangan Pengelolaan TUKS dan Pelabuhan K/L Development of UKS and K/L Port Management	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100,00	100,00	10,00
9	*Market Share* Bongkar Muat (Curah Cair & Curah Kering) Market Share for Loading and Unloading (Liquid Bulk & Dry Bulk)	%	59	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		65,00	110,00	11,00
10	Pengembangan Layanan Bongkar Muat *Ship to Ship Handling* Development of Ship-to-Ship Handling Services	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100,00	100,00	10,00
11	Penambahan Layanan Oil & Gas Terminal Addition of Oil & Gas Terminal Services	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100,00	100,00	10,00
12	Penyusunan RJPP 2025-2029 Preparation of the 2025-2029 RJPP	%	100	C	Triwulanan Quarterly	Positif Positive	10		100	100,00	10,00
TOTAL								**100**			**98,26**

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas di bawah Dewan Komisaris. Keberadaan komite ini berperan penting dalam membantu Dewan Komisaris melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terkait kebutuhan kepemimpinan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa menjaga kesinambungan proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan guna mendukung stabilitas kinerja serta pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan demikian, proses suksesi kepemimpinan dijalani secara terukus dan selaras dengan kebutuhan strategis Perusahaan.

Persyaratan untuk Menjadi Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris harus merupakan individu yang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum serta memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, seseorang tidak dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah mengalami kondisi atau peristiwa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dibuktikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris, dan akan disimpan sebagai arsip resmi Perusahaan. Selain persyaratan administratif, calon anggota Dewan Komisaris juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan material sebagai berikut:

1. Integritas dan moral dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
    a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
    b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
    c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATIONS

Nominations for Board of Commissioners and Board of Directors are carried out by the Nomination and Remuneration Committee, which operates under the Board of Commissioners. This committee plays a vital role in assisting the Board of Commissioners in conducting reviews and providing recommendations regarding the Company's leadership needs.

The Company consistently maintains a continuous process of leadership renewal and succession planning to support performance stability and the achievement of long-term goals. Thus, the leadership succession process is carried out systematically and in alignment with the Company's strategic needs.

Board of Commissioners Requirements

Prospective members of Board of Commissioners must be individuals who possess the legal capacity to perform legal acts and meet the requirements of integrity, competence, and good reputation in accordance with applicable laws and regulations.

However, a person cannot be appointed as a member of Board of Commissioners if, within a period of 5 (five) years prior to their appointment, they have experienced certain conditions or events as stipulated in applicable regulations, including the following:

1. Declared bankrupt;
2. Being a member of Board of Directors or a member of Board of Commissioners or a member of Supervisory Board who is found guilty of causing a Company or Public Corporation to be declared bankrupt; or
3. Convicted of a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.

Compliance with the requirements for appointment of members of Board of Commissioners is evidenced by a written statement signed by the prospective member of Board of Commissioners, which will be kept as an official record of the Company. In addition to administrative requirements, prospective members of Board of Commissioners must also meet the following material requirements:

1. Integrity and morality in the sense that the person concerned has never been involved in:
    a. Engineering actions and deviant practices, in the management of SOEs/Subsidiaries/Companies/ Institutions where he/she worked prior to nomination (dishonest behavior);
    b. Acts of breach of promise that can be categorized as not fulfilling the commitments agreed upon with the SOEs/Subsidiaries/Companies/Institutions where the person concerned worked before the nomination (misbehaving);
    c. Actions that can be categorized as providing unlawful benefits to the person concerned and/or other parties before the nomination (misbehavior);

d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik).
2. Dedikasi;
3. Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan di mana yang bersangkutan dicalonkan;
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan di mana yang bersangkutan dicalonkan.

Persyaratan lainnya bagi Dewan Komisaris adalah:
1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
6. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Persyaratan khusus bagi Dewan Komisaris adalah:
1. Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Actions that can be categorized as violations of provisions relating to the principles of sound corporate management (bad behavior).

2. Dedication;
3. Understanding Company management issues related to one of the management functions;
4. Having adequate knowledge in the business field of the Company in which the person concerned is nominated;
5. Can provide sufficient time to carry out their duties;
6. Have a strong will (enthusiasm) to advance and develop the Company where the person concerned is nominated.

Other requirements for Board of Commissioners are:
1. Not an administrator of a political party and/or legislative member, and/or not currently running as a candidate for legislative member;
2. Not a head/deputy regional head and/or not currently running as a candidate for head/deputy regional head;
3. Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the Company concerned unless signing a statement letter willing to resign from the position if elected as a member of Board of Commissioners;
4. Not currently holding a position that is prohibited by law to be concurrent with the position of a member of Board of Commissioners, unless signing a statement letter willing to resign from such position if elected as a member of Board of Commissioners;
5. Not serving as a member of Board of Commissioners in the Company concerned for 2 (two) consecutive periods;
6. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of Board of Commissioners as evidenced by a health certificate from a government hospital.

Specific requirements for Board of Commissioners are:
1. In addition to fulfilling the general requirements, the appointment of members of Board of Commissioners must also fulfill other requirements stipulated by technical agencies based on the provisions of the prevailing laws and regulations.
2. Appointment of members of Board of Commissioners is made by considering integrity, dedication, understanding of Company management issues related to one of the management functions, having adequate knowledge in the Company's business field, and being able to provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on the provisions of the prevailing laws and regulations.

Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan disertai alasan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum keputusan tersebut ditetapkan, Pemegang Saham terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana pemberhentian kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis.

Pemberhentian dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris dinilai tidak lagi memenuhi ketentuan, tanggung jawab, atau persyaratan jabatan berdasarkan kondisi dan pertimbangan tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
7. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau keuangan Negara;
8. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan;
9. Mengundurkan diri.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 5 dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, keputusan pemberhentian terkait alasan sebagaimana tercantum pada poin 1,2,3,4,6, dan 7 dapat dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri. Proses tersebut dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pada saat forum RUPS, apabila rencana pemberhentian tersebut dilakukan dalam forum RUPS; atau
2. Secara tertulis, apabila rencana pemberhentian tersebut dilakukan di luar forum RUPS, dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham, anggota Dewan

Board of Commissioners Dismissal and Resignation

Members of Board of Commissioners can be dismissed at any time by resolution of the GMS, accompanied by the grounds for dismissal in accordance with applicable regulations. Before such a resolution is adopted, the Shareholders must first provide notice of the planned dismissal to the relevant member of Board of Commissioners, either verbally or in writing.

Dismissal shall occur if a member of Board of Commissioners is deemed to no longer meet the provisions, responsibilities, or requirements of the position based on certain conditions and considerations, including the following:

1. Unable to carry out his/her duties properly;
2. Does not implement the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Articles of Association;
3. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
4. Conducting actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of Board of Commissioners;
5. Declared guilty by a Court verdict that has permanent legal force;
6. Has a family relationship up to the third degree, either in a direct or collateral line, including relationships arising from marriage, between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
7. Has been designated as a suspect or defendant by the competent authorities in an act detrimental to the Company and/or state finances;
8. Based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company;
9. Resigned.

The dismissal of member of Board of Commissioners based on the grounds referred to in points 3 and 5 is classified as a dismissal without honor in accordance with applicable regulations.

However, a decision to dismiss a member based on the grounds listed in points 1,2,3,4,6, dan 7 may be made only after the member of Board of Commissioners concerned has been given the opportunity to present a defense. This process is carried out through the following mechanisms:

1. During the GMS forum, if the dismissal plan is carried out in the GMS forum; or
2. In writing, if the dismissal plan is carried out outside the GMS forum, within 14 days from the date of notification.

While the planned dismissal is still pending, the relevant member of Board of Commissioners is required to continue performing their duties as usual.

Furthermore, members of Board of Commissioners have the right to resign subject to the following conditions:

1. Notify in writing of his/her intention to the Shareholders, other members of Board of Commissioners and Board

Komisaris lainnya, dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
3. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat kurang dari 30 hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri dan secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan RUPS hanya menetapkan atau meratifikasi pengunduran diri tersebut telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pencalonan Hingga Pengangkatan Dewan Komisaris

Sebagai entitas yang berada dalam Holding BUMN Kepelabuhanan, proses nominasi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham. Proses pencalonan, pengusulan, hingga penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Pelindo. Penetapan dan pengesahan anggota Dewan Komisaris selanjutnya dilaksanakan melalui RUPS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Perusahaan.

Persyaratan untuk Menjadi Direksi

Direksi harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal
   Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan Materiil
   Persyaratan materiil terhadap Calon Direksi, yaitu meliputi:

   a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.

of Directors at the latest 30 days prior to the date of his/her resignation. If the resignation letter states an effective date of less than 30 days from the date the letter is received, it shall be deemed not to state the effective date of resignation.

2. If until the date requested by the member of Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received in the case of no mention of the effective date of resignation, the member of Board of Commissioners shall automatically resign on the date requested above or with the lapse of 30 days from the date the letter of resignation is received without requiring the GMS approval.
3. The resignation of a member of Board of Commissioners may be less than 30 days, if the laws and regulations do not allow him/her to hold concurrent positions.
4. In the event that a member of Board of Commissioners does not resign and the laws and regulations do not allow him/her to hold concurrent positions, member of Board of Commissioners shall be deemed to have resigned and the GMS shall only determine or ratify the resignation as having become effective based on the laws and regulations.

Procedures for Board of Commissioners Nomination and Appointment

As an entity within the State-Owned Port Holding Company, the nomination process for members of the Company's Board of Commissioners is conducted in accordance with the policies and regulations in effect at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the shareholder. The process of nominating, proposing, and appointing members of Board of Commissioners is carried out in accordance with the mechanisms established by Pelindo. The determination and ratification of members of Board of Commissioners are subsequently carried out through the GMS as the Company's highest decision-making forum.

Board of Directors Requirements

Board of Directors must fulfill the requirements to be appointed as a member of Board of Directors as follows:

1. Formal Requirements
   A person who can be appointed as a member of Board of Directors is an individual who is capable of performing legal acts, unless within 5 (five) years prior to his/her appointment has:
   a. Declared bankrupt;
   b. Being a member of Board of Directors or Board of Commissioners who is found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or
   c. Convicted of a criminal offense that is detrimental to the State's finances and/or related to the financial sector.
2. Material Requirements
   Material requirements for candidates for Board of Directors, which include:
   a. Experience, in the sense that the person concerned has a track record that shows success in the management of SOEs/Subsidiaries/Companies/Institutions where he/she worked before nomination.

b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan:
   i) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan yang bersangkutan;
   ii) Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
   iii) Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan.
c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
   i) Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
   ii) Perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
   iii) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
   iv) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
   i) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan;
   ii) Mengarahkan pejabat dan pekerja Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan;
   iii) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan pekerja Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.
e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

3. Persyaratan Lain
   a. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
   b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
   c. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
   d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali

b. Expertise, in the sense that the person concerned:
   i) Has adequate knowledge in the business field of the Company concerned;
   ii) Has an understanding of management and corporate governance;
   iii) Having the ability to formulate and implement strategic policies in the context of Company development.
c. Integrity, in the sense that the person concerned has never been involved in:
   i) Engineering actions and deviant practices at the place of work before the nomination (dishonest behavior)
   ii) Actions that can be categorized as not fulfilling the commitments that have been agreed upon where the person concerned worked before the nomination (bad behavior);
   iii) Actions that can be categorized as providing unlawful benefits to the person concerned and/or other parties before the nomination (misbehaving);
   iv) Actions that can be categorized as violations of provisions relating to the principles of sound corporate management (misbehavior).
d. Leadership, in the sense that the person concerned has the ability to:
   i) Formulate and articulate the Company's vision;
   ii) Directing the Company's officials and workers to be able to do something to realize the Company's goals;
   iii) Raise the spirit (give new energy) and provide motivation to the Company's officials and workers to be able to realize the Company's goals.
e. Having a strong will (enthusiasm) and high dedication to advance and develop the Company.

3. Other Requirements
   a. Not a political party administrator and/or legislative member, and/or not currently running as a candidate for legislative member;
   b. Not a head/deputy head of the region and/or not currently running as a candidate for head/deputy head of the region;
   c. Not exceeding 58 years old when serving on Board of Directors;
   d. Not currently serving as an official at an institution, member of Board of Commissioners/Supervisory Board at SOE, member of Board of Directors at SOE, Subsidiary and/or Company, unless signing a statement letter willing to resign from such position if elected as a member of Board of Directors of Subsidiary;
   e. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrent with the position of member of Board of Directors, unless

menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;

f. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
g. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
h. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Persyaratan Khusus
Persyaratan khusus merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi Anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Tim Evaluasi untuk diajukan kepada RUPS agar disahkan.

Pemberhentian dan Pengunduran Diri Direksi

Pemberhentian Direksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   c. Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
   e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
   f. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
   g. Mengundurkan diri;
   h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.
2. Rencana pemberhentian Direksi sebelum masa jabatannya berakhir wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi yang bersangkutan baik secara lisan atau tertulis.
3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada bagian 1, 2, 3, 4, dan 8, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Anggota Direksi dapat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Saham dan ditembuskan kepada

signing a statement letter willing to resign from the position if elected as a member of Board of Directors;

f. Not serving as a member of Board of Directors in the Company concerned for 2 (two) consecutive periods;
g. Have dedication and provide sufficient time to perform his/her duties as stated in the relevant statement letter;
h. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of Board of Directors) as evidenced by a health certificate from a government hospital;
i. Has a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has carried out the obligation to pay taxes for the last two years as evidenced by the Individual Taxpayer Income Tax Return.

4. Special Requirements
Special requirements are details of competencies and other matters required for Members of Board of Directors according to the Company's needs. Special requirements are one of the substances of the nomination and selection system and procedures developed by the Evaluation Team to be submitted to the GMS for ratification.

Board of Directors Dismissal and Resignation

Board of Directors dismissal must fulfill the following provisions:

1. The GMS may dismiss a member of Board of Directors at any time before his/her tenure ends by stating the reasons. The reason for the dismissal of a member of Board of Directors is carried out if based on reality, the member of Board of Directors concerned, among others:
   a. Unable to fulfill his/her obligations that have been agreed upon in the management contract;
   b. Unable to perform his/her duties properly;
   c. Not implementing laws and regulations and/or provisions of Articles of Association;
   d. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
   e. Declared guilty by a Court verdict that has permanent legal force; or
   f. Conducting actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as Board of Directors;
   g. Resign;
   h. Other reasons deemed appropriate by the Board of Directors;
2. The plan to dismiss Board of Directors before the end of his/her tenure must be notified in advance to the Board of Directors concerned either orally or in writing;
3. The decision to dismiss as referred to in sections 1, 2, 3, 4 and 8, shall be taken after the person concerned has been given an opportunity to defend himself.

A member of Board of Directors may resign from his/her position by submitting written notice to the Shareholders, with a copy to the Board of Commissioners, no later than 30 days

Dewan Komisaris paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Perusahaan dalam menyiapkan proses transisi kepemimpinan dan keberlanjutan pengelolaan usaha.

Dalam hal surat pengunduran diri mencantumkan tanggal efektif kurang dari 30 hari sejak surat diterima, maka tanggal efektif tersebut dianggap tidak dicantumkan. Apabila hingga tanggal yang diajukan atau dalam waktu 30 hari sejak surat diterima tidak terdapat keputusan RUPS, maka pengunduran diri tetap berlaku secara otomatis pada tanggal yang dimaksud atau setelah lewat 30 hari tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari RUPS.

Namun demikian, pengunduran diri dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 30 hari apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang anggota Direksi merangkap jabatan.

Kebijakan Suksesi Direksi: Prosedur Pencalonan Hingga Pengangkatan Direksi

Sebagai bagian dari *Holding* BUMN Kepelabuhanan, pelaksanaan kebijakan suksesi Direksi Perusahaan mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pengelolaan Perusahaan tetap berjalan sesuai arah strategis grup.

Perusahaan juga menerapkan kebijakan perencanaan suksesi (*succession planning*) bagi anggota Direksi sebagai bagian dari pengelolaan talenta dan keberlanjutan organisasi. Kebijakan ini bertujuan memastikan tersedianya calon-calon pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan kesiapan untuk mengisi posisi strategis apabila terjadi pergantian kepemimpinan, baik karena berakhirnya masa jabatan, kebutuhan organisasi, maupun kondisi lainnya.

Selama proses pengusulan dan pencalonan Direksi, Pelindo juga dapat mempertimbangkan sumber daya internal Perusahaan melalui *talent pool* yang dimiliki. Dalam hal ini, pejabat setingkat Senior Vice President atau BOD-1 berpeluang untuk diusulkan sebagai calon anggota Direksi sesuai kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kompetensi.

Perencanaan suksesi tersebut didukung melalui proses identifikasi dan pengembangan talenta, evaluasi kinerja dan kompetensi secara berkala, serta penyusunan *talent pool* yang menjadi dasar dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin pada level Direksi maupun manajemen kunci. Dengan demikian, proses regenerasi kepemimpinan dapat berlangsung secara terencana, objektif, dan selaras dengan kebutuhan bisnis serta strategi jangka panjang Perusahaan.

Adapun penetapan dan pengesahan anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Perusahaan.

prior to the effective date of the resignation. This provision is intended to allow the Company sufficient time to prepare for the leadership transition and ensure the continuity of business management.

If the resignation letter specifies an effective date less than 30 days from the date the letter is received, such effective date shall be deemed not to have been specified. If, by the proposed date or within 30 days of the letter's receipt, no resolution has been passed by the GMS, the resignation shall automatically take effect on the specified date or after 30 days have elapsed, without requiring further approval from the GMS.

However, resignation may take effect in less than 30 days if there are statutory provisions prohibiting members of Board of Directors from holding concurrent positions.

Board of Directors Succession Policy: Procedures for Nomination and Appointment of Directors

As part of the Port SOE Holding, implementation of the Company's Board of Directors succession policy is based on the provisions and mechanisms in effect at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the shareholder. This process is conducted to ensure continuity in the Company's leadership and management, keeping them aligned with the Group's strategic direction.

The Company also implements a succession planning policy for members of Board of Directors as part of talent management and organizational sustainability. This policy aims to ensure the availability of prospective leaders with the competence, integrity, experience, and readiness to fill strategic positions in the event of a leadership change, whether due to the end of a term, organizational needs, or other circumstances.

During the process of proposing and nominating Members of Board of Directors, Pelindo may also consider the Company's internal resources through its talent pool. In this regard, executives at the Senior Vice President or BOD-1 level have the opportunity to be nominated as prospective Members of Board of Directors based on organizational needs and the results of competency evaluations.

This succession planning is supported by a talent identification and development process, regular performance and competency evaluations, and the development of a talent pool that serves as the basis for preparing prospective leaders at Board of Directors and key management levels. This ensures that the leadership regeneration process can proceed in a planned, objective manner, and align with the Company's business needs and long-term strategy.

The determination and ratification of Members of Board of Directors are carried out through the GMS as the Company's highest decision-making forum.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Pemegang Saham sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Penetapan tersebut dilakukan melalui proses internal *holding* dengan mempertimbangkan ketentuan, struktur organisasi, serta kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di grup usaha. Besaran dan bentuk remunerasi yang telah ditetapkan selanjutnya disahkan melalui RUPS sesuai kewenangan Pemegang Saham di lingkungan Perusahaan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal (RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 dan Nomor SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 tentang Penetapan Penyesuaian Besaran Penghasilan Tahun 2024 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri atas beberapa komponen remunerasi sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

Procedures for Proposing and Determining the Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration policy for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the Shareholders in accordance with the mechanisms in effect at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This determination is made through an internal holding Company process, taking into account the applicable regulations, organizational structure, and human capital management policies within the business group. The amount and form of the remuneration that has been determined are subsequently approved by the GMS in accordance with the Shareholders' authority within the Company.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

The remuneration structure of Board of Commissioners and Board of Directors refers to Shareholders Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of PT Pelindo Multi Terminal (Circular GMS) Number: SK.03/30/9/10/SPAP/UTMA/PLND-24 and Number: SK.03/30/9/10/HKP/DRU/PSD-24 concerning the Determination of Adjustments to the Amount of Income in 2024 and the Provision of Tantiem for 2023 Fiscal Year for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal. Based on these regulations, the components of income for Board of Directors and Board of Commissioners consist of:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
1	Honorarium	1. Komisaris Utama: Rp 107.550.000,- 2. Komisaris: Rp 96.795.000,- 1. President Commissioner: Rp107,550,000 2. Commissioner: Rp96,795,000	1. Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama per bulan. 2. Komisaris: 90% dari honorarium Komisaris Utama per bulan. 1. President Commissioner: 45% of the President Director's salary per month. 2. Commissioner: 90% of the President Commissioner's honorarium per month.
2	Tunjangan Allowance		
	1. Tunjangan Hari Raya 1. Holiday Allowance	1. Sebesar 1 (satu) bulan Honorarium, per tahun. 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Amounting to 1 (one) month Honorarium, per year. 2. Paid after payment of the Company's Workers' Holiday Allowance or no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday. 3. Not given to the Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/ Employees.	Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa kerja aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. The calculation of the THR amount is carried out proportionally according to the active work period since the THR payment in the previous year.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	2. Tunjangan Transportasi 2. Transportation Allowance	1. Tunjangan Transportasi ditetapkan sebesar 20% dari honorarium masing-masing Dewan Komisaris, yaitu: a. Komisaris Utama: Rp21.510.000,- b. Komisaris: Rp19.359.000,- 2. Bagi Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas kendaraan tidak diberikan tunjangan transportasi. 3. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Transportation allowance is set at 20% of the honorarium of each Board of Commissioners, namely: a. President Commissioner: Rp21,510,000 b. Commissioner: Rp19,359,000 2. For Board of Commissioners who receive vehicle facilities, transportation allowance is not given. 3. Not given to Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/ Employees.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Subholding, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group
	3. Asuransi Purna Jabatan 3. Post-Employment Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan. 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Dewan Komisaris. 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang kesemuanya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, di mana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/Pekerja. 1. Given during the term of office (from the time of appointment until termination) with a monthly premium. 2. The insurance premium is a maximum of 25% of the salary in one year. 3. The program selection for Post-Employment Insurance is determined by each Director. 4. Includes Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Ketenagakerjaan where the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions is part of the relevant PostEmployment Insurance. 5. Post-Employment Insurance is not given to Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/Employees.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
3	Fasilitas Facilities		
	1. Kesehatan 1. Health	1. Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat jalan dan obat; c. Rawat inap dan obat setara dengan kelas VIP; dan d. *Medical check up*. 4. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Dewan Komisaris/ Pekerja. 1. Health Facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost). 2. For the person concerned and 1 (one) wife/husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years (have never been married or have never worked). 3. Health Facilities are provided in the form of: a. Health insurance program organized by the Social Security Administering Agency (BPJS); b. Outpatient and Medication; c. Inpatient and Medication equivalent to VIP class; and 4. Medical Check Up. 5. Not given to Board of Commissioners from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, who are still active as Directors/Board of Commissioners/ Employees.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group
	2. Bantuan Hukum 2. Legal Aid	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 2. Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka, dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perusahaan tidak menanggung biaya Pengacara/Konsultan Hukum dalam hal Dewan Komisaris Perusahaan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah). 1. Given in the event of an action/deed for and on behalf of his/ her position related to the purposes, objectives and business activities of the Company. 2. Board of Directors who will use the Legal Aid Facility, must make a statement on sufficiently stamped paper explaining the position of the person concerned in a particular case not as an individual and is willing to return the Legal Aid Facility to the Company if it is proven that the position of the person concerned in the case is as an individual. 3. Given in the form of financing for Lawyer/Legal Consultant Office Services which includes the examination process as a Witness, Suspect and Defendant in the Judicial Institution. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/Legal Consultants in the event that Board of Directors of the Company becomes a Witness, Suspect, or Defendant due to a Criminal process reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/ SPAP/UTMA/PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
4	Biaya Operasional Operational Costs		
	1. Pakaian Seragam 1. Uniforms	1. Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/Pekerja. 1. In accordance with expenses (at cost) in kind, in accordance with the budget in the RKAP, with a maximum limit determined through the approval of the Company's Board of Commissioners. 2. Not given to members of Board of Commissioners representing shareholders who are still active as members of Board of Directors/Board of Commissioners/Employees.	Hanya diberikan bagi Perusahaan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. This allowance is provided only to companies that require employees to wear uniforms, taking into account the Company's conditions and financial capacity.
	2. Keanggotaan Perkumpulan Profesi 2. Professional Association Membership	1. Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. 2. Tidak diberikan kepada Dewan Komisaris yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Dewan Komisaris/Pekerja. 1. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners. 2. Not given to members of Board of Commissioners representing shareholders who are still active as members of Board of Directors/Board of Commissioners/Employees.	

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
1	Gaji Salary	1. Direktur Utama: Rp239.000.000,- 2. Direktur lain: Rp203.150.000,- 1. President Director: Rp239,000,000 2. Other Directors: Rp203,150,000	1. Direktur Utama: 100%, per bulan; 2. Direktur lain: 85% dari Gaji Direktur Utama, per bulan. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. President Director: 100%, per month; 2. Other Directors: 85% of the President Director's Salary, per month. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group.

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
2	Tunjangan Allowance		
	1. Tunjangan Hari Raya 1. Holiday Allowance	1. Sebesar 1 (satu) bulan Gaji, per tahun. 2. Dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. 1. Amounting to 1 (one) month's salary, per year. 2. Paid after payment of the Company's Employee Holiday Allowance or no later than 1 (one) week before the relevant Religious Holiday.	1. Perhitungan besaran THR dilakukan secara proporsional sesuai dengan masa kerja aktif sejak pembayaran THR tahun sebelumnya. 2. Bagi Direksi yang bukan berasal dari Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), THR secara proporsional dimaksud di atas tidak diberikan bagi Direksi yang tidak lagi menjabat sebagai Direksi pada Grup Bisnis Perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari raya keagamaan. 1. The calculation of the THR amount is carried out proportionally according to the active work period since the payment of THR in the previous year. 2. For Directors who are not from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Employees, the proportional THR referred to above is not given to Directors who are no longer serving as Directors in the Company's Business Group within a period of more than 30 (thirty) calendar days before the religious holiday.
	2. Tunjangan Perumahan 2. Housing Allowance	1. Direktur Utama: Rp20.000.000,- 2. Direktur lain: Rp20.000.000,- 1. President Director: Rp20,000,000 2. Other Directors: Rp20,000,000	1. 40% dari Gaji dengan maksimal besaran Rp 20.000.000,-. 2. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. 40% of Salary with a maximum amount of Rp20,000,000 2. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	3. Asuransi Purna Jabatan 3. Post-Employment Insurance	1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) dengan premi bulanan. 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk Asuransi Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing Direksi. 4. Sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang kesemuanya didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan di mana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan bagian dari Asuransi Purna Jabatan yang bersangkutan. 5. Asuransi Purna Jabatan tidak diberikan bagi Direksi yang berasal dari Unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Pekerja, namun terhadap Direksi yang merupakan Pekerja Penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan didasarkan pada Gaji yang diterima sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 1. Given during the term of office (from the time of appointment until termination) with a monthly premium. 2. The insurance premium is a maximum of 25% of the salary in one year. 3. The selection of the program for Post-Employment Insurance is determined by each Director. 4. Includes Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance, all of which are registered with BPJS Ketenagakerjaan where the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions is part of the relevant PostEmployment Insurance. 5. Post-Employment Insurance is not given to Directors who come from Shareholder Elements, who still have active status as Workers, but for Directors who are Assigned Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, the amount of BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan contributions is based on the Salary received as Directors in accordance with the provisions and mechanisms applicable to BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan.	1. Definisi dari Unsur Pemegang Saham adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pekerja *Subholding*, Pekerja Anak Perusahaan, Pekerja Perusahaan Terafiliasi, Pekerja KSO. 2. Grup Bisnis Perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan unit kerja di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang terdiri dari *Subholding*, Anak Perusahaan, KSO, Dana Pensiun, dan Perusahaan Terafiliasi. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. 1. Definition of Shareholder Elements are Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Board of Directors and Board of Commissioners of Subholding, Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Workers of Subholding, Workers of Subsidiaries, Workers of Affiliated Companies, Workers of JO. 2. The Company's Business Group is defined as a collection of work units under the auspices of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) consisting of Subholding, Subsidiaries, JO, Pension Funds, and Affiliated Companies. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
3	Fasilitas Facilities		
	1. Kendaraan Dinas 1. Official Vehicles	1. 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan. 2. Kendaraan Dinas disediakan dalam bentuk natura yang spesifikasi dan jenis kendaraannya diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 2.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 75 kWh untuk kendaraan bermotor berbasis listrik di luar biaya bahan bakar, biaya parkir dan biaya toll yang disediakan secara *at cost* dengan pengaturan batasan maksimal. 3. Bahan bakar secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya bahan bakar per bulan setara dengan 500 (lima ratus) liter pertamax atau yang setara untuk Direktur Utama dan 450 (empat ratus lima puluh) liter pertamax atau yang setara untuk anggota Direksi lainnya. 4. Pengaturan biaya penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik secara *at cost* (dalam bentuk penggantian) dengan batasan maksimal biaya disetarakan dengan biaya bahan bakar minyak dimaksud butir 3) di atas. 1. 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the Company's financial condition. 2. Official vehicles are provided in kind with specifications and types of vehicles regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 2,500 cc for fuel-powered vehicles or a maximum limit of 75 kwh for electric-based motor vehicles excluding fuel costs, parking fees and toll fees provided at cost with maximum limit settings. 3. Fuel at cost (in the form of reimbursement) with a maximum limit of fuel costs per month equivalent to 500 (five hundred) liters of Pertamax or equivalent for President Director and 450 (four hundred and fifty) liters of Pertamax or equivalent for other members of Board of Directors. 4. Regulation of the cost of using electric-based motor vehicles at cost (in the form of reimbursement) with a maximum cost limit equal to the cost of fuel referred to in point 3) above.	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	2. Kesehatan 2. Health	1. Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*). 2. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 3. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); b. Rawat Jalan dan Obat; c. Rawat Inap dan Obat setara dengan kelas VIP; dan d. *Medical Check Up*. 4. Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada unit lain dalam Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perusahaan. 5. Bagi Direksi yang berasal dari Pekerja Penugasan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perusahaan. 1. Health Facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost). 2. For the person concerned and 1 (one) wife/husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years (have never been married or have never worked). 3. Health Facilities are provided in the form of: a. Health insurance program organized by the Social Security Administering Agency (BPJS); b. Outpatient and Medication; c. Inpatient and Medication equivalent to VIP class; and d. Medical Check Up. 4. In the event that the Directors concurrently hold positions as Board of Commissioners/Supervisory Board in other units within the Company's Business Group, then the person concerned will only be given one Health Facility, namely Health Facility as the Company's Director. 5. For Directors who come from Assignment Workers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Company's Business Group, then the person concerned will only be given one Health Facility, namely Health Facility as the Company's Director.	

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
	3. Bantuan Hukum 3. Legal Aid	1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 2. Direksi yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi. 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di Lembaga Peradilan. 4. Perusahaan tidak menanggung biaya Pengacara/Konsultan Hukum dalam hal Direksi Perusahaan menjadi Saksi, Tersangka, atau Terdakwa karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Grup Bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah). 1. Given in the event of an action/deed for and on behalf of his/her position related to the purposes, objectives and business activities of the Company. 2. Board of Directors who will use the Legal Aid Facility, must make a statement on sufficiently stamped paper explaining the position of the person concerned in a particular case not as an individual and is willing to return the Legal Aid Facility to the Company if it is proven that the position of the person concerned in the case is as an individual. 3. Given in the form of financing for Lawyer/Legal Consultant Office Services which includes the examination process as a Witness, Suspect and Defendant in the Judicial Institution. 4. The Company does not bear the costs of Lawyers/Legal Consultants in the event that Board of Directors of the Company becomes a Witness, Suspect, or Defendant due to a Criminal process reported by the Company's Business Group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the State (the State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution).	Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/2/2/SPAP/ UTMA/ PLND-24 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan. In accordance with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/16/2/2/SPAP/UTMA/PLND-24 dated February 16, 2024, regarding Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of Subholdings, Subsidiaries, and Affiliated Companies, as well as the Executive Board and Supervisory Board of Joint Operations (KSO) within the Company's Business Group
4	Biaya Operasional Operational Costs		
	1. Biaya Komunikasi 1. Communication Costs	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dengan batas maksimal sebesar Rp3.000.000,- untuk Direktur Utama dan Rp2.700.000,- untuk anggota Direksi lainnya. In accordance with expenses (at cost) with a maximum limit of Rp3,000,000 for President Director and Rp2,700,000 for other members of Board of Directors.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By considering the condition and capability of the Company.
	2. Pakaian Seragam 2. Uniforms	Sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) dalam bentuk natura, sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with expenses (at cost) in kind, in accordance with the budget in the RKAP, with a maximum limit determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Hanya diberikan bagi Perseroan yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. Only given to Companies that implement uniform usage provisions, by considering the condition and capability of the Company
	3. Keanggotaan Perkumpulan Profesi 3. Professional Association Membership	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By considering the condition and capability of the Company.
	4. *Club Corporate Membership*	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. By considering the condition and capability of the Company.

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan RUPS GMS Resolution	Keterangan Description
5.	Biaya Representasi Representation Costs	Sesuai anggaran dalam RKAP, dengan batas maksimal tertentu per bulan yang kesemuanya ditetapkan melalui persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. In accordance with the budget in the RKAP, with a certain maximum limit per month, all of which are determined through the approval of the Company's Board of Commissioners.	Dalam bentuk *corporate credit card*, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan. In the form of a corporate credit card, taking into account the Company's conditions and capabilities.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Transparency of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration for 2025

The nominal amounts of Board of Commissioners and Board of Directors remuneration are as follows:

Realisasi Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris Tahun 2025
Remuneration Realization of Each Member of the Board of Commissioners for 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Masa Menjabat Period	Gaji Salary	Tunjangan Allowance	Tantiem Tahun Buku 2024, yang Dibayarkan di Tahun 2025 Tantiem for 2024 Fiscal Year, Paid in 2025	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2025 Total Remuneration in 2025
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.822.972.500
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250
Thanon Aria Dewangga* (Komisaris) (Commissioner)	1 Januari – 27 Agustus 2025 January 1 – August 27, 2025	√	√	-	√	√	1.079.264.250
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	1.640.675.250

Realisasi Remunerasi Masing-Masing Direksi Tahun 2025
Remuneration Realization for Each Member of Board of Directors in 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Masa Menjabat** Period	**Gaji** Salary	**Tunjangan** Allowance	**Tantiem Tahun Buku 2024, yang Dibayarkan di Tahun 2025** Tantiem for 2024 Fiscal Year, Paid in 2025	**Tunjangan Hari Raya Keagamaan** Religious Holiday Allowance	**Asuransi Purna Jabatan** Post-Employment Insurance	**Jumlah Remunerasi Tahun 2025** Total Remuneration in 2025
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.745.250.000
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Edi Priyanto (Direktur SDM) (HC Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	1 Januari – 31 Desember 2025 January 1 – December 31, 2025	√	√	-	√	√	3.216.462.500

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN (JIKA ADA), ANTARA LAIN BERUPA PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM/MSOP) DAN/ATAU PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ESOP)

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan belum memiliki program kompensasi berbasis kepemilikan saham, seperti *Management Stock Ownership Program* (MSOP) maupun *Employee Stock Ownership Program* (ESOP). Hal tersebut sejalan dengan status Perusahaan yang masih merupakan perusahaan non-terbuka.

Meski demikian, kebijakan remunerasi yang diterapkan tetap diarahkan untuk mendukung keberlanjutan kinerja dan pencapaian target jangka panjang Perusahaan.

Kebijakan *Long Term Incentive*

Perusahaan belum menerapkan skema *Long Term Incentive* (LTI) dalam bentuk kepemilikan saham maupun instrumen insentif jangka panjang lainnya. Namun demikian, kebijakan remunerasi telah dirancang untuk mendorong pencapaian sasaran strategis jangka panjang melalui pengukuran kinerja yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), keberlanjutan usaha, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pendekatan tersebut tercermin melalui beberapa aspek berikut:

1. Penetapan kompensasi manajemen dan karyawan berdasarkan capaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang diselaraskan dengan target jangka menengah dan panjang Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
2. Evaluasi kinerja tahunan Direksi dan manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan kinerja operasional, efisiensi biaya, pertumbuhan usaha, serta kontribusi terhadap implementasi transformasi dan tata kelola yang berkelanjutan;

Kebijakan Tantiem

Sebagai bagian dari sistem remunerasi yang mendukung pencapaian sasaran usaha, Perusahaan juga menerapkan kebijakan pemberian insentif jangka pendek (*short-term incentive*) dalam bentuk tantiem. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan apresiasi atas kinerja yang dicapai selama satu tahun buku sekaligus mendorong terciptanya kinerja yang berkelanjutan dan selaras dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan. Pemberian tantiem sebagai bentuk kompensasi variabel (*short-term incentive*) yang disetujui melalui mekanisme korporat dan dikaitkan dengan hasil

LONG-TERM PERFORMANCE-BASED COMPENSATION POLICY FOR MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES OF THE COMPANY (IF ANY), INCLUDING MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (MSOP) AND/OR AN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP)

As of the end of 2025, the Company does not yet have any equity-based compensation programs, such as a Management Stock Ownership Program (MSOP) or an Employee Stock Ownership Program (ESOP). This is in line with the Company's status as a privately held Company.

Nevertheless, the Company's remuneration policy remains designed to support sustainable performance and the achievement of its long-term objectives.

Long-Term Incentive Policy

The Company has not implemented a Long-Term Incentive (LTI) scheme in the form of share ownership or other long-term incentive instruments. However, the remuneration policy has been designed to encourage the achievement of long-term strategic goals through performance measurements aligned with the Company's Long-Term Plan (RJPP), business sustainability, the implementation of good corporate governance, and value creation for shareholders and stakeholders.

This approach is reflected in the following aspects:

1. Determination of management and employee compensation based on the achievement of Key Performance Indicators (KPI) that are aligned with the Company's medium and long-term targets as stated in the Company's Long-Term Plan (RJPP);
2. Annual performance evaluation of Board of Directors and management conducted by the Board of Commissioners and/or the Nomination and Remuneration Committee, taking into account operational performance, cost efficiency, business growth, and contribution to the implementation of transformation and sustainable governance;

Tantiem Policy

As part of a compensation system designed to support the achievement of business objectives, the Company also implements a policy of providing short-term incentives in the form of profit-sharing. This policy is designed to recognize performance achieved during a fiscal year while encouraging sustainable performance aligned with the Company's long-term interests. The distribution of tantiem, as a form of variable compensation (short-term incentive), is approved through corporate mechanisms and is linked to the results of performance evaluations for the current fiscal year, while

evaluasi atas pencapaian kinerja tahun berjalan, namun dengan pertimbangan kontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan.

Pemberian tantiem dilakukan berdasarkan kinerja Perusahaan dan pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Besaran tantiem ditetapkan melalui mekanisme tata kelola yang berlaku dan memperoleh persetujuan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan Pensiun

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi karyawan secara berkelanjutan, Perusahaan juga menerapkan kebijakan penyelenggaraan program pensiun. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan memberikan kepastian manfaat kepada karyawan setelah memasuki masa purna tugas, sekaligus mendukung terciptanya hubungan kerja yang berkesinambungan. Perusahaan menyediakan program pensiun bagi karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Pelindo Grup. Program tersebut bertujuan memberikan perlindungan kesejahteraan bagi karyawan setelah memasuki masa purna tugas sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Hak dan manfaat pensiun diberikan sesuai dengan masa kerja, kepesertaan, serta ketentuan program pensiun yang berlaku.

Selain aspek remunerasi, Perusahaan juga berfokus pada penguatan retensi dan pengembangan kompetensi karyawan melalui berbagai program pengembangan SDM. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan, pengembangan karier, serta penerapan sistem manajemen kinerja individu yang terintegrasi dengan pengelolaan SDM Perusahaan.

Sejalan dengan arah strategis Pelindo Grup, Perusahaan akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghargaan dan pengelolaan SDM agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan organisasi. Pengembangan kebijakan tersebut juga tetap memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pengendali, hingga Nama Pemilik Akhir

Pemegang Saham Pengendali Perusahaan wajib senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat indikasi bahwa Pemegang Saham Pengendali tidak

also taking into account contributions to sustainable growth.

Bonus payments are made based on the Company's performance and the achievement of predetermined targets, while taking into account the Company's financial capacity and applicable regulations. The amount of the bonus is determined through applicable governance mechanisms and is approved in accordance with the authority stipulated in the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pension Policy

As part of the Company's commitment to providing ongoing protection and welfare for its employees, the Company also implements a pension program policy. This policy is part of the human resources management strategy aimed at providing certainty of benefits to employees after they retire, while also supporting the creation of sustainable employment relationships. The Company provides a pension program for employees in accordance with applicable laws and regulations and policies within the Pelindo Group. The program aims to provide welfare protection for employees after they retire as part of a sustainable human resources management strategy. Pension entitlements and benefits are granted based on length of service, participation in the program, and the applicable pension program provisions.

In addition to remuneration aspects, the Company also focuses on strengthening employee retention and competency development through various human capital development programs. These efforts are carried out through training, career development, and the implementation of an individual performance management system that is integrated with the Company's human capital management.

In line with Pelindo Group's strategic direction, the Company shall continue to evaluate its compensation policies and HC management to ensure they remain relevant to business needs and organizational developments. The development of these policies also takes into account the Company's business characteristics and implementation of the Good Corporate Governance principles.

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHAREHOLDERS UP TO ULTIMATE OWNER ENTITY

Information on Major Shareholders, Controlling Shareholders, and the Names of Ultimate Owner

The Company's Controlling Shareholders must at all times meet the competence and compliance requirements in accordance with applicable regulations. An evaluation of compliance with these requirements may be conducted at any time if there are indications that the Controlling Shareholder

lagi memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik berdasarkan hasil analisis, pemeriksaan, maupun pengaduan yang diterima. Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang memiliki kepemilikan saham Perusahaan sebesar 100,00% secara langsung maupun tidak langsung. Adapun seluruh saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga entitas pemilik akhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, dan Direksi menjalankan fungsi masing-masing berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan. Hubungan kerja antarorgan Perusahaan dilaksanakan secara profesional untuk menjaga keseimbangan fungsi pengawasan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan di lingkungan Perusahaan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan, Perusahaan juga melakukan pengungkapan hubungan afiliasi yang mencakup hubungan keluarga maupun hubungan keuangan. Hubungan keuangan dapat berupa piutang, utang, kerja sama usaha, atau bentuk hubungan ekonomi lainnya, sedangkan hubungan keluarga mencakup hubungan karena pertalian darah maupun perkawinan, seperti hubungan suami/istri, orang tua, anak, saudara kandung, maupun hubungan keluarga lainnya.

no longer meets the required criteria, whether based on the results of an analysis, an audit, or a complaint received. The Company's major shareholder as well as controlling shareholder is PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which holds 100.00% of the Company's shares, either directly or indirectly. All shares of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are owned by the Government of the Republic of Indonesia; therefore, the Company's ultimate owner is the Government of the Republic of Indonesia.

Disclosure of Affiliation between Board of Directors, Board of Commissioners, and Major/Controlling Shareholders

The Controlling Shareholder, Board of Commissioners, and Board of Directors carry out their respective functions based on the principle of mutual respect for authority and responsibility, in accordance with applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. Working relationships among the Company's governing organs are conducted professionally to maintain a balance between supervisory, management, and decision-making functions within the Company.

As a guide in carrying out these duties, Board of Commissioners and Board of Directors have established guidelines and rules of procedure that govern the rights, obligations, responsibilities, and authorities of each corporate organ.

In implementing corporate governance, the Company also discloses affiliations, including family and financial relationships. Financial relationships may take the form of receivables, payables, business partnerships, or other economic relationships, while family relationships include those based on blood or marriage, such as spouses, parents, children, siblings, and other family members.

	Hubungan Afiliasi dengan Affiliation with			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** (Major/Controlling Shareholder of the Company)	**Pemerintah Indonesia (Entitas Pemilik Akhir)** Indonesia Government (Ultimate Owner Entity)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	x	x	x	x
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x	x
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x	x
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	x	x	x	x
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	x	x	x	x
Direksi Board of Directors				
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x	x
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	x	x	x	x
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	x	x	x	x
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	x	x	x	x
Edi Priyanto (Direktur SDM) (HC Director)	x	x	x	x
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	x	x	x	x

√ = terdapat adanya hubungan | x = tidak terdapat adanya hubungan
√ = an affiliation| x = no affiliation

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut ini tabel yang menunjukan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi:

DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

The following table shows the concurrent position of Board of Commissioners and Board of Directors:

	Di Dalam Perusahaan In the Company	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management in Other Companies/Institutions		
		Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	v	x	x	x
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	v	x	x	x
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	v	x	x	x
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	v	x	x	x
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	v	x	x	x
Direksi Board of Directors				
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x	x
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	x	v	x	x
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	x	v	x	x
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	x	v	x	x
Edi Priyanto (Direktur SDM) (HC Director)	x	v	x	x
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	x	v	x	x

√ = ada | x = tidak ada
√ = yes | x = no

Penjelasan terkait kepengurusan pada perusahaan/institusi lain adalah sebagai berikut:

Explanations related to management in other companies/ institutions are as follows:

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Institutions
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Tidak ada None
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	Wakil Ketua Komite Audit Vice Chairman of Audit Committee	Tidak ada None
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Tidak ada None

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Institutions
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of Nomination and Remuneration Committee	Tidak ada None
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Tidak ada None
Direksi Board of Directors		
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	Tidak ada None	Tidak ada None
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	Tidak ada None	Komisaris PT Terminal Curah Utama (2022 - sekarang) Commissioner of PT Terminal Curah Utama (2022-present)
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	Tidak ada None	Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas (2023 - sekarang) President Commissioner of PT Prima Terminal Petikemas (2023 – present)
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	Tidak ada None	1. Komisaris Utama PT Prima Indonesia Logistik (PIL) (2023 - Sekarang) 2. Komisaris PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) (2024 - sekarang) 1. President Commissioner of PT Prima Indonesia Logistik (PIL) (2023 – present) 2. Commissioner of PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) (2024-present)
Edi Priyanto (Direktur SDM) (HC Director)	Tidak ada None	Komisaris PT Jasamarga Bali Tol (2020 - sekarang) Commissioner of PT Jasamarga Bali Tol (2020–present)
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	Tidak ada None	Komisaris Utama PT Equiport Inti Indonesia (2022 - sekarang) President Commissioner of PT Equiport Inti Indonesia (2022–present)

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan menerapkan keterbukaan informasi terkait kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik atas saham Perusahaan maupun saham pada perusahaan lain. Informasi tersebut disampaikan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan pengelolaan potensi benturan kepentingan.

Selain itu, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan transaksi pembelian maupun penjualan surat berharga kepada Sekretaris Perusahaan dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari setelah transaksi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai upaya menjaga independensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, anggota Dewan Komisaris Independen tidak diperkenankan memiliki saham Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Perusahaan.

DISCLOSURE OF TRANSACTIONS AND SHARE OWNERSHIP OF THE COMPANY BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company implements a policy of information disclosure regarding the share ownership of members of Board of Commissioners and Board of Directors, both in the Company's shares and in shares of other companies. This information is disclosed periodically through a shareholding register as part of the implementation of transparency principles and the management of potential conflicts of interest.

In addition, each member of Board of Commissioners and Board of Directors is required to report the purchase or sale of securities to the Corporate Secretary and the Financial Services Authority no later than 10 days after the transaction is conducted, in accordance with applicable regulations.

To ensure independence in the performance of their supervisory functions, members of Independent Commissioners are not permitted to hold shares in the Company, either directly or indirectly, as stipulated in the Company's Board Manual.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Per 31 Desember 2025
Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership as of December 31, 2025

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	PMT	**Perusahaan Lain >5%** Other Company >5%
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Darwanto (Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Nihil Nil	Nihil Nil
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	Nihil Nil	Nihil Nil
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris) (Commissioner)	Nihil Nil	Nihil Nil
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Nihil Nil	Nihil Nil
Aan Rusdianto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Nihil Nil	Nihil Nil
Direksi Board of Directors		
Ary Henryanto (Direktur Utama) (President Director)	Nihil Nil	Nihil Nil
Yarham Harid (Direktur Teknik) (Technical Director)	Nihil Nil	Nihil Nil
Rizki Kurniawan (Direktur Strategi dan Komersial) (Strategy and Commercial Director)	Nihil Nil	Nihil Nil
Arif Rusman Yulianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	Nihil Nil	Nihil Nil
Edi Priyanto (Direktur SDM) (HC Director)	Nihil Nil	Nihil Nil
Yoni Setiawan (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	Nihil Nil	Nihil Nil

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan belum melakukan Penawaran Umum Saham serta tidak memiliki program kepemilikan saham bagi manajemen, termasuk *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Sejalan dengan kondisi tersebut, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

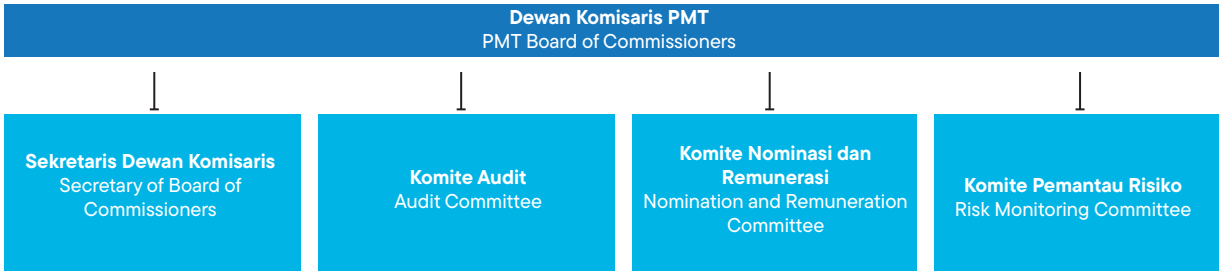
As of the end of 2025, the Company had not conducted a public offering of shares and did not have a management share ownership program, including a Management Stock Ownership Program (MSOP). In light of these circumstances, no member of Board of Commissioners or Board of Directors held shares in the Company.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of Board of Commissioners



Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh beberapa organ yang memiliki peran sesuai bidang tugas masing-masing. Hingga akhir tahun 2025, organ pendukung Dewan Komisaris terdiri atas Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

The Board of Commissioners' supervisory function is supported by several organs with roles according to their respective areas of responsibility. By the end of 2025, the Board of Commissioners' supporting organs consisted of Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee.



Setiap komite di bawah Dewan Komisaris dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing komite diatur dalam pedoman kerja (*charter*) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk penyampaian hasil telaah, pengawasan, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Each committee under the Board of Commissioners is established based on a Board of Commissioners Decree and carries out its duties directly under the coordination of Board of Commissioners. The implementation of duties, functions, and authorities of each committee are regulated in work guidelines or charters, which serve as a reference for implementing oversight activities and providing recommendations.

Pembentukan komite-komite Dewan Komisaris Perusahaan telah mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Pasal 45 dan 46 secara eksplisit mengatur kewajiban pembentukan komite pendukung pengawasan, serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab komite tersebut.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi landasan umum struktur organ perseroan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris), termasuk pembentukan komite sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan.
3. Pedoman *Good Corporate Governance* di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal yang disusun selaras dengan prinsip-prinsip TARIFT, nilai AKHLAK dan ETAK.

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMITE ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Ketentuan mengenai penerapan tata kelola perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor SK.01.01/28/2/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 28 Februari 2024. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa:

1. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian nasihat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Sekretariat Dewan Komisaris, dan satu komite lain, jika diperlukan.
2. Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas pada aspek sistem pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko, dan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku;
3. Ketua maupun anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada RUPS. Ketua Komite adalah anggota Dewan Komisaris. Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing;
4. Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan, dan/atau kaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
5. Pedoman kerja atau *Charter* dari masing-masing Komite Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam/dengan Peraturan/Surat Keputusan Dewan Komisaris.

The establishment of the Company's Board of Commissioners committees has referred to the following provisions:

1. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. Articles 45 and 46 explicitly regulate the obligation to form a supervisory support committee, as well as the duties, authorities and responsibilities of the committee.
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies which provides the general basis for the Company's organ structure (GMS, Board of Directors, Board of Commissioners), including the establishment of committees as part of the implementation of supervisory duties.
3. Guidelines for Good Corporate Governance within PT Pelindo Multi Terminal which are aligned with TARIFT principles, AKHLAK values and ETAK.

ESTABLISHMENT POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGAN COMMITTEE

Provisions regarding the implementation of corporate governance are regulated in the Regulation of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number SK.01.01/28/2/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated February 28, 2024. The guidelines explain that:

1. In carrying out its supervisory duties and advisory functions, Board of Commissioners shall form an Audit Committee and may form a Nomination and Remuneration Committee, Board of Commissioners Secretariat, and one other committee, if necessary.
2. The committees formed have duties related to the supervisory function of Board of Commissioners, including but not limited to aspects of internal control systems, nomination and remuneration functions for Board of Directors and Board of Commissioners, implementation of risk management and implementation of GCG principles in accordance with applicable regulations;
3. The Chairman and the Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and reported to the GMS. The Committee Chairman is a member of Board of Commissioners. One of the Committee members has sufficient knowledge and working experience in their respective fields of work;
4. Committee members must come from outside the Company and have no connection with the management, ownership and/or business activities of the Company;
5. The Charter of each Board of Commissioners Committee shall be further regulated in a Regulation/Decree of Board of Commissioners.

Komite Audit
Audit Committee



PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit Perusahaan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait organ pendukung Dewan Komisaris di lingkungan BUMN, termasuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya terhadap aspek pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit, serta penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. Keberadaan Komite Audit juga menjadi bagian dari penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT Pelindo Multi Terminal.

KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Persyaratan Komite Audit:
1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait.

ESTABLISHMENT OF AUDIT COMMITTEE

The establishment of the Company's Audit Committee complies with applicable provisions regarding supporting organs of the Board of Commissioners within SOEs, including Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Audit Committee is established by the Board of Commissioners to support the implementation of its oversight function, particularly regarding financial reporting, internal control effectiveness, audit implementation, and risk management implementation within the Company. Audit Committee also serves as a strengthening element of good corporate governance at PT Pelindo Multi Terminal.

AUDIT COMMITTEE MEMBER QUALIFICATIONS

Audit Committee Requirements
1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the work area, and able to communicate well.
2. Must understand the financial statements, the Company's business, especially those related to the Company's services or business activities, audit processes, risk management, and related laws and regulations.

3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
11. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif.
12. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan atau penetapan/putusan pengadilan.
13. Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN

1. Ketua Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Komite Audit dan dengan memperhatikan kompetensi, kriteria, dan latar belakang (calon) anggota Komite Audit.
3. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

3. Must comply with the Audit Committee code of conduct established by the Company.
4. Willing to improve competence continuously through education and training.
5. One of Audit Committee members has accounting and/or finance education background.
6. Not an insider of Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Office or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months except for Independent Commissioner
8. Does not have shares either directly or indirectly in the Company. In the event that a member of Audit Committee obtains shares as a result of a legal event, then within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of such shares must be transferred to another party.
9. Has no affiliation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or Major Shareholders of the Company.
10. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.
11. Have the ability to interact and communicate both orally and in writing effectively.
12. Must maintain the confidentiality of the Company's information and/or data related to the duties and responsibilities of Audit Committee unless required by laws and regulations or court decisions.
13. Understand the principles of good corporate governance and risk management.

APPOINTMENT, DISMISSAL AND TENURE

1. The Chairman of Audit Committee is appointed and dismissed by Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders.
2. The appointment and dismissal of Audit Committee members is carried out by Board of Commissioners by considering the opinion of Audit Committee Chairman and by taking into account the competence, criteria and background of (prospective) Audit Committee members.
3. The tenure of Audit Committee members shall not be longer than the tenure of Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association and may be re-elected only for one subsequent period.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perusahaan, Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Dewan Komisaris dan pihak independen di luar Perusahaan. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua Komite Audit yang dijabat oleh Komisaris Independen dan berkedudukan di Kantor Pusat Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bertanggung jawab secara struktural kepada Dewan Komisaris serta memiliki hubungan kerja fungsional dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan.

Hingga 31 Desember 2025, Komite Audit Perusahaan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) anggota independen dari luar Perusahaan. Adapun susunan dan komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF AUDIT COMMITTEE IN 2025

According to the Company's Audit Committee Charter, Audit Committee shall consist of at least three members from the Board of Commissioners and an independent party from outside the Company. The Audit Committee is led by a Chairman, an Independent Commissioner, and is located at the Company's Head Office.

In carrying out its duties, Audit Committee is structurally responsible to the Board of Commissioners and maintains a functional working relationship with the Internal Audit Unit (SPI) in supporting the implementation of the Company's oversight function.

As of December 31, 2025, the Company's Audit Committee comprises 4 (four) members: 2 (two) members from the Board of Commissioners and 2 (two) independent members from outside the Company. The composition of Audit Committee is as follows:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2025
Audit Committee Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Period
Aan Rusdianto	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner	Keputusan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Nomor: KP 13 tahun 2024 tanggal 17 Desember tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal Number: KP 13 YEAR 2024 dated December 17 Concerning the Division of Duties of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisasris Following the term of office as Board of Commissioners	
Arman Depari	Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris Vice Chairman of Audit Committee/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 03 of 2021 dated October 1, 2021 on Appointment of Audit Committee Members of PT Pelindo Multi Terminal		
Saiful Bahri	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen Audit Committee Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 03 of 2021 dated October 1, 2021 on Appointment of Audit Committee Members of PT Pelindo Multi Terminal	1 Oktober 2021 s.d 1 Oktober 2026 October 1, 2021 to October 1, 2026	Ke- 1 1st
Rimba Simanjuntak	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen Audit Committee Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 TAHUN 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 03 of 2021 dated October 1, 2021 on Appointment of Audit Committee Members of PT Pelindo Multi Terminal	1 Oktober 2021 s.d 1 Oktober 2026 October 1, 2021 to October 1, 2026	Ke- 1 1st

PROFIL KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE PROFILE

Aan Rusdianto
Ketua Komite Audit/Komisaris
Chairman of Audit Committee/Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Aan Rusdianto dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Chairman of Audit Committee Aan Rusdianto can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Arman Depari

Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris
Vice Chairman of Audit Committee/Commissioner

Profil Wakil Ketua Komite Audit Arman Depari dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Vice Chairman of Audit Committee Audit Arman Depari can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Saiful Bahri

Anggota Komite Audit | Audit Committee Member
Periode Jabatan: 1 Oktober 2021 s.d 1 Oktober 2026 Periode Ke-1
Term of Office: October 1, 2021, until October 1, 2026 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia : 50 tahun
Kelahiran : Bogor, 21 januari 1975
Domisili : Bogor, Jawa barat, Indonesia

Personal Data

Indonesian citizen
Age : 50 years old
Born in : Bogor, January 21, 1975
Domiciled in : Bogor City, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000)

Education History

Bachelor of Economics majoring in Accounting from Gadjah Mada University Yogyakarta (2000)

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki dan Masih Berlaku

1. *Certified Auditor*, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
2. *Certified Public Accountant* (CPA), dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
3. *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MKS.

Valid Professional Certifications

1. Certified Auditor, from the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI).
2. Certified Public Accountant (CPA), from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI).
3. Qualified Risk Governance Professional (QRGP), from the MKS Professional Certification Institute (LSP).

Riwayat Jabatan

1. Wakil Ketua Komite Audit
2. Komisaris PT Pelindo Multi Terminal
3. Komite Audit, PT Pelabuhan Indonesia I – Sumatera Utara, (2019 - 2021)
4. Komite Audit, PT Perkebunan Nusantara I – Aceh, (2014 - 2019)
5. Area Internal Auditor PT Bahana Artha Ventura, (2011- sekarang)
6. Branch Operational Manager PT Finansia Multi Finance, (2007 - 2011)

Work Experience

1. Vice Chairman of Audit Committee
2. Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal
3. Audit Committee, PT Pelabuhan Indonesia I - North Sumatra, (2019 - 2021)
4. Audit Committee, PT Perkebunan Nusantara I - Aceh, (2014 - 2019)
5. Area Internal Auditor PT Bahana Artha Ventura, (2011 - present)
6. Branch Operational Manager PT Finansia Multi Finance, (2007-2011)

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan:
Tidak ada.

Di luar Perusahaan:
1. Komite Audit, PT Pelabuhan Indonesia I – Sumatera Utara, (2019 – 2021),
2. Area internal Auditor PT Bahana Artha Ventura, (2011 - sekarang)

Concurrent Positions

Within the Company:
None.

Outside the Company:
1. Audit Committee, PT Pelabuhan Indonesia I - North Sumatra, (2019 - 2021)
2. Area internal Auditor of PT Bahana Artha Ventura, (2011- present)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Affiliations

Does not have any affiliation with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the major/controlling shareholder and the Government of Indonesia as the ultimate owner of the Company.

Rimba Simanjuntak
Anggota Komite Audit | Audit Committee Member
Periode Jabatan: 1 Oktober 2021 s.d 1 Oktober 2026 Periode Ke-1
Term of Office: October 1, 2021, until October 1, 2026 1st Period

Data Pribadi	**Personal Data**
Warga Negara Indonesia Usia : 66 tahun Kelahiran : Bandung, 20 Agustus 1970 Domisili : Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	Indonesian citizen Age : 66 years old Born in : Bandung, August 20, 1970 Domiciled in : South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	**Education History**
Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Universitas Sumatra Utara, (1996)	Bachelor of Economics, Accounting, University of North Sumatra, (1996)
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki dan Masih Berlaku	**Valid Professional Certifications**
1. *Certified Auditor*, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2. *Certified Public Accountant* (CPA), dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 3. *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MKS.	1. Certified Auditor, from the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI). 2. Certified Public Accountant (CPA), from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). 3. Qualified Risk Governance Professional (QRGP), from the MKS Professional Certification Institute (LSP).
Riwayat Jabatan	**Work Experience**
1. President Director, PT Rimba Editha Jelajah Semesta & PT Rimba Emperor Guntur Semesta, (2010) 2. Assistant Accounting Manager, PT Medcopapua Industri Lestari, PT Medcopapua Alam Lestari & PT Selaras Inti Seesta, (2007) 3. Accounting Manager, PT Jarosite, (2006) 4. Finance Manager, World Relief Indonesia (Non Profit Organisation), (2006)	1. President Director, PT Rimba Editha Jelajah Semesta & PT Rimba Emperor Guntur Semesta, (2010) 2. Assistant Accounting Manager, PT Medcopapua Industri Lestari, PT Medcopapua Alam Lestari & PT Selaras Inti Seesta, (2007) 3. Accounting Manager, PT Jarosite, (2006) 4. Finance Manager, World Relief Indonesia (Nonprofit Organization), (2006)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan: Tidak ada. **Di luar Perusahaan:** Tidak ada.	**Within the Company:** None. **Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.	Does not have any affiliation with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the major/controlling shareholder and the Government of Indonesia as the ultimate owner of the Company.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit wajib memenuhi ketentuan independensi sesuai peraturan dan pedoman internal Perusahaan. Ketentuan tersebut mencakup tidak adanya hubungan afiliasi dengan Perusahaan maupun dengan manajemen yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip independensi dan integritas, seluruh anggota Komite Audit Perusahaan telah menyampaikan pernyataan independensi. Dokumen pernyataan tersebut disajikan sebagaimana terlampir di bawah ini:

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE STATEMENT

Audit Committee members are required to comply with independence requirements as stipulated in the Company's internal regulations and guidelines. These requirements include the absence of any affiliation with the Company or management that could affect their objectivity in carrying out their supervisory duties.

As part of the implementation of the principles of independence and integrity, all members of the Company's Audit Committee have submitted a statement of independence. The statement document is presented below:

Pernyataan Independensi Independence Statement	**Aan Rusdianto (Ketua Komite Audit)** (Chairman of Audit Committee)	**Arman Depari (Wakil Ketua Komite Audit)** (Vice Chairman of Audit Committee)	**Saiful Bahri (Anggota Komite Audit)** (Audit Committee Member)	**Rimba Simanjuntak (Anggota Komite Audit)** (Audit Committee Member)
Tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan keuangan dengan Perusahaan atau dengan Manajemen Perusahaan. Has no business relationship or financial interest with the Company or with the Company's Management.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Manajemen Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas sebagai Komite Audit. Has no family relationship with the Company's Management that may affect the independence in performing duties as Audit Committee	√	√	√	√
Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit. Has sufficient knowledge and skills to carry out duties and responsibilities as Audit Committee.	√	√	√	√
Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif dan independen. Has sufficient knowledge and skills to carry out duties and responsibilities as Audit Committee.	√	√	√	√
Tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu. Will not utilize the position in the Company, either directly or indirectly for personal interests, family and relatives, or certain groups.	√	√	√	√
Berkomitmen untuk menjaga independensi dan integritas sebagai Anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Will not utilize the position in the Company, either directly or indirectly for personal interests, family and relatives, or certain groups.	√	√	√	√

PIAGAM KOMITE AUDIT

Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Dewan Komisaris No. KA-01/DK/PLMT/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Piagam Komite Audit pada PT Pelindo Multi Terminal.

Piagam tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komite Audit. Dokumen ini mengatur peran, kewenangan, tanggung jawab, dan tata kerja Komite Audit agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara objektif, transparan, dan independen.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Audit Committee's duties and functions are carried out in accordance with the Audit Committee Charter, established through the Board of Commissioners' Decree No. KA-01/DK/PLMT/X/2021 dated October 1, 2021, concerning the Audit Committee Charter at PT Pelindo Multi Terminal.

The charter was prepared in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and the principles of Good Corporate Governance as guidelines for the Audit Committee's oversight function. This document regulates the roles, authorities, responsibilities, and work procedures of the Audit Committee to ensure its duties are carried out objectively, transparently, and independently.

Secara umum, Piagam Komite Audit memuat ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Pembentukan Komite Audit:
   a. Komposisi dan Struktur Organisasi;
   b. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Tugas;
   c. Persyaratan Komite Audit.
4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
5. Rapat Komite Audit dan Pelaporan;
6. Kerja Sama Komite Audit; dan
7. Penutup.

Piagam Komite Audit ditelaah secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi, kebutuhan organisasi, serta dinamika bisnis Perusahaan. Penyesuaian terhadap piagam dapat dilakukan apabila diperlukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sebagai upaya mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Komite Audit, Perusahaan telah menetapkan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Komite sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas pengawasan.

Tugas

1. Penelaahan atas Informasi Keuangan
   Penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui:
   a. Reviu atas hasil pemeriksaan auditor independen.
   b. Reviu proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
2. Kepatuhan erhadap Peraturan Perundangan
   Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.
3. Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang menyatakan bahwa:
   a. Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan;
   b. Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan.
4. Pemantauan dapat dilakukan melalui:
   a. Reviu atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   b. Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan Satuan Pengawasan Internal.

In general, the Audit Committee Charter contains the following provisions:

1. Background;
2. Legal Basis;
3. Establishment of Audit Committee:
   a. Composition and Organizational Structure;
   b. Appointment, Dismissal, and Term of Office;
   c. Audit Committee Requirements.
4. Duties, Responsibilities, and Authorities;
5. Audit Committee Meetings and Reporting;
6. Audit Committee Cooperation; and
7. Closing.

The Audit Committee Charter is reviewed periodically to ensure its compliance with regulatory developments, organizational needs, and the Company's business dynamics. Adjustments to the charter may be made if necessary to support the effective implementation of the Audit Committee's duties and functions.

AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

To support the effective implementation of the Audit Committee's functions, the Company has established regulations regarding the Committee's duties, responsibilities, and authorities as guidelines for carrying out its oversight activities.

Duties

1. Review of Financial Information.
   The review of financial information such as financial statements to be published, projections, and other financial information is carried out to encourage that the financial information to be published by the Company is accurate, reliable, and trustworthy. The review can be done through:
   a. Review of the independent auditor's examination results.
   b. Review of the preparation process of financial information to be published.
2. Compliance with laws and regulations.
   Audit Committee monitors to ensure that the Company's operations are carried out in compliance with laws and regulations relating to the Company's operations.
3. Ensure that management provides written representation stating that:
   a. Management is responsible for the Company's compliance with laws and regulations;
   b. Management has not violated any laws and regulations.
4. Monitoring may be conducted through:
   a. Review of reports from management or the Company's legal counsel relating to applicable laws and regulations;
   b. Review of the findings or results of examinations conducted by regulatory bodies, independent auditors, and Internal Audit.

c. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Komite Audit dapat memperluas reviunya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Satuan Pengawasan Internal atau eksternal auditor yang akan ditunjuk oleh Komite Audit.

5. Seleksi, Penunjukkan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen.
   Pelaksanaan audit umum (*general audit*) atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan oleh Komite Audit melalui peran berikut:
   a. Seleksi dan Penunjukkan Auditor Independen:
      i) Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
      ii) Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, ruang lingkup penugasan, biaya (*fee*), dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.
6. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen:
   a. Melakukan reviu Audit Planning dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan;
   b. Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, jika ada, harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis;
   c. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:
      i) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan;
      ii) Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;
      iii) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian internal;
      iv) Metode pencatatan, pelaporan, dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan;
      v) *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan;
      vi) Koreksi audit yang signifikan;
      vii) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan;
      viii) Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penetapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan, dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya;

c. If there are indications that there has been a violation of laws and regulations, Audit Committee may expand its review with an investigative audit to determine the impact and amount of loss due to the violation. To carry out the investigative audit, Audit Committee may request assistance from Internal Audit or external auditors who will be appointed by the Audit Committee.

5. Selection, Appointment, and Supervision of Independent Auditor Work.
   In the framework of general audit of the Company's financial statements, Audit Committee has the role to carry out:
   a. Selection and Appointment of Independent Auditor
      i) Audit Committee selects and recommends candidates for independent auditors who will audit the Company's financial statements to the Board of Commissioners;
      ii) Selection process of independent auditors, Audit Committee shall refer to the provisions regarding legality, competence, scope of assignment, fees and independence of public accountants applicable in Indonesia.
6. Supervision of Independent Auditor's Work
   a. Reviewing Audit Planning and the adequacy of audit programs and monitoring the audit implementation in the field;
   b. Monitor the discussion of audit findings conducted by the Internal Audit Unit with management and other important matters that need attention, if any, must be reported to the Board of Commissioners in writing;
   c. Ensure that the independent auditor communicates the following matters, namely:
      i) The auditor's level of responsibility for internal control in the presentation of financial statements;
      ii) Significant changes in accounting policies;
      iii) Significant weaknesses in the design and implementation of internal control;
      iv) Methods of recording, reporting and the impact of significant extraordinary transactions on the financial statements;
      v) Fraud and violations of laws and regulations committed by management or employees that have an impact on material misstatement in the financial statements;
      vi) Significant audit corrections;
      vii) Procedures performed by the auditor on the annual report containing audited financial statements;
      viii) Disagreements with management on the determination of accounting principles, audit scope, disclosures in the financial statements and the wording used by the auditor in their audit report;

ix) Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut; dan
x) Hambatan dalam pelaksanaan audit.

d. Memastikan konsep laporan keuangan auditan diterima 10 (sepuluh) hari sebelum diterbitkan untuk direviu oleh Komite Audit; dan
e. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

7. Pemberian pendapat independen
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen atas jasa yang diberikannya, maka Komite Audit akan memberikan pendapat independen atas perbedaan tersebut. Dalam hal ini Komite Audit dapat meminta pihak ketiga untuk membantu pemberian pendapat ini.

8. Persetujuan Awal (*Pre-Approval*) Jasa Non-Audit
Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya. Berkaitan dengan aspek independensi, Komite Audit harus memperhatikan jasa-jasa non-audit yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di Perusahaan dapat mengganggu independensi auditor independen. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah:
a. Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan.
b. Jasa desain dan implementasi sistem informasi keuangan.
c. Jasa pengawasan internal.
d. Jasa konsultasi manajemen.
e. Jasa konsultasi sumber daya manusia.
f. Jasa penasihat keuangan.
g. Jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau
h. Jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
i. Jasa non-audit selain dari jasa-jasa non-audit seperti yang disebutkan di atas dapat ditugaskan kepada auditor independen setelah mendapat persetujuan awal (*pre-approval*) dari Komite Audit dan harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

i) Direksi menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian secara rinci mengenai jenis jasa yang akan ditugaskan kepada auditor independen;

ix) Consultations made by management with other Public Accounting Firms and the auditor's opinion on the matter consulted; and
x) Obstacles in the audit.

d. Ensure that the draft audited financial statements are received 10 (ten) days prior to publication for review by the Audit Committee; and
e. Audit Committee may propose termination of employment with the independent auditor to the Board of Commissioners if there is a strong indication that the auditor's independence may be impaired or it is proven that the auditor did not conduct the audit in accordance with the public accountant examination standards.

7. Providing independent opinion In the event of a difference of opinion between management and the independent auditor on the services provided, the Audit Committee will provide an independent opinion on the difference. In this case, Audit Committee may request a third party to assist in providing this opinion.

8. Pre-Approval of Non-Audit Services Conduct an evaluation to provide pre-approval of non-audit services that will be assigned to independent auditors who are assigned to provide audit services, to evaluate their independence. In relation to the independence aspect, Audit Committee must pay attention to non-audit services that according to the prevailing laws and regulations in Indonesia and in the Company may interfere with the independence of independent auditors. Non-audit services that interfere with independence are:
a. Bookkeeping services or other services related to accounting records or financial statements.
b. Financial information system design and implementation services.
c. Internal control services.
d. Management consulting services.
e. Human capital consulting services.
f. Financial advisory services.
g. Taxation services, unless prior approval has been obtained from the Audit Committee. The Audit Committee approval does not include taxation services to represent the Company inside and outside the tax court and/or act for and on behalf of the Company in tax calculation and reporting; or
h. Other services that may give rise to aconflict of interest..
i. Other services that may cause conflict of interest. Non-audit services other than the non-audit services as mentioned above may be assigned to independent auditors after obtaining pre-approval from Audit Committee and must be carried out in the following manner:
i) Board of Directors shall submit to Audit Committee (through Board of Commissioners) a detailed description of the type of services to be assigned to the independent auditor;

ii) Dalam proses *pre-approval*, Komite Audit harus melakukan evaluasi dan analisa untuk menentukan apakah jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan; dan

iii) *Pre-approval* dari Komite Audit hanya dapat diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi dan analisa jasa non-audit tersebut tidak akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan. *Pre-approval* dari Komite Audit terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada auditor independen dapat dikecualikan jika nilai seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh auditor independen kepada Perusahaan tidak lebih dari 5% dari total nilai biaya audit dibayarkan oleh Perusahaan kepada auditor independen dalam tahun fiskal dimana jasa non-audit diberikan.

9. Efektivitas Pengendalian Internal
Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah. Adapun penelaahan yang dilakukan meliputi:
   a. Pemahaman pengendalian internal diperoleh dari presentasi manajemen Perusahaan mengenai desain dan implementasi pengendalian internal.
   b. Komite Audit wajib meminta laporan Pemeriksaan Internal secara triwulan dari Satuan Pengawasan Internal sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
   c. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen Perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Pengawasan Internal.
   d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk:
      i) Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan Satuan Pengawasan Internal dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi;
      ii) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Satuan Pengawasan Internal untuk memperluas reviunya untuk menilai sifat, lingkup, besaran, dan dampak kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan;
      iii) Melakukan pengawasan atas tindak lanjut oleh Direksi terhadap temuan Satuan Pengawasan Internal.

ii) In the pre-approval process, Audit Committee shall conduct an evaluation and analysis to determine whether the non-audit services to be assigned to the independent auditor will impair independence or create a conflict of interest; and

iii) Pre-approval from the Audit Committee can only be granted if based on the results of evaluation and analysis, the non-audit services will not interfere with independence or create a conflict of interest. Pre-approval from the Audit Committee for non-audit services assigned to independent auditors may be excluded if the value of all non-audit services provided by independent auditors to the Company is not more than 5% of the total value of audit fees paid by the Company to independent auditors in the fiscal year in which non-audit services are provided.

9. Effectiveness of Internal Control Audit Committee reviews the design and implementation of policies and procedures to obtain reasonable assurance of effectiveness of internal control so that material misstatement of financial statements, misuse of assets and violations of laws and regulations can be prevented.
   a. Understanding of internal control is obtained from the Company's management presentation on the design and implementation of internal control.
   b. Audit Committee shall request quarterly Internal Audit reports from the Internal Audit Unit as material to identify possible internal control weaknesses.
   c. To improve the effectiveness of internal control, Audit Committee may provide input to the Company's management in order to improve the Internal Audit Unit's performance.
   d. Audit Committee shall coordinate with Internal Audit Unit to:
      i) Hold regular meetings (e.g. every month) to discuss the Internal Audit Unit findings and or other matters that contain indications of internal control weaknesses, including errors in the application of accounting standards;
      ii) If necessary, Audit Committee may request Internal Audit Unit to expand its review to assess the nature, scope, magnitude and impact of significant internal control weaknesses and their effect on the financial statements;
      iii) Supervise the follow-up by the Board of Directors on the Internal Audit Unit findings.

e. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
f. Setiap awal tahun Komite Audit mereviu dan memberikan masukan atas PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal.
g. Pemberitahuan maupun penunjukkan Kerja Pengawasan Internal atau perubahan struktur organisasi Satuan Pengawasan Internal dengan memperhatikan saran Dewan Komisaris/Komite Audit.

10. Penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan proses akuntansi dan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan:
    a. Syarat pengaduan:
        i) Pengaduan disampaikan secara tertulis;
        ii) Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit merahasiakan jati diri pelapor; dan
        iii) Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal dan *fraud*, serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu Perusahaan.
    b. Penelaahan pengaduan
    Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan atau tenaga ahli dari luar Perusahaan yang independen.
    c. Hasil penelaahan
    Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan ternyata benar, maka:
        i) Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; dan
        ii) Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

11. Benturan Kepentingan
    Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Pelindo Multi Terminal.
12. Pelaksanaan Tugas Khusus:
    a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
        i) Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas;
        ii) Sifat dan lingkup pekerjaan;
        iii) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
        iv) Waktu penugasan; dan
        v) Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus ini.
    b. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi.

e. In the process of reviewing the effectiveness of internal control, Audit Committee may utilize reports from independent auditors to identify possible internal control weaknesses.
f. At the beginning of each year, Audit Committee reviews and provides input on the PKPT (Annual Audit Work Program) prepared by Internal Audit Unit.
g. Notification or appointment of Internal Audit Work or changes in the organizational structure of Internal Audit Unit by taking into account the Board of Commissioners/Audit Committee Suggestions.

10. Handling of complaints or reporting in relation to accounting processes and alleged violations related to financial reporting
    a. Complaint requirements
        i) Complaints are submitted in writing;
        ii) If the complainant states his/her identity, Audit Committee shall keep the identity of complainant confidential; and
        iii) Provide guidance on the existence of accounting standard deviations, internal control weaknesses and fraud and management behavior that is not commendable that can disrupt the Company.
    b. Review of complaints
    In handling complaints submitted by third parties. Audit Committee may request an investigation audit in cooperation with the Internal Audit Unit and/or management and or assign consultants or experts from outside the Company who are independent.
    c. Review result
    If the review results prove that the complaint submitted is true, then
        i) Audit Committee forwards the review results to Board of Commissioners; and
        ii) Audit Committee monitors the follow-up of the review results, if requested by the Board of Commissioners.

11. Conflict of Interest
    Review and provide advice to Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of PT Pelindo Multi Terminal.
12. Implementation of Special Tasks
    a. The assignment of special tasks to Audit Committee by Board of Commissioners is carried out through a written order that explains:
        i) The name of Audit Committee member assigned;
        ii) Nature and scope of work;
        iii) Purpose and objectives of the work;
        iv) Assignment time; and
        v) Administrative matters related to this special assignment.
    b. Special assignments may include but are not limited to the examination of allegations of errors in the Board of Directors' decrees or irregularities in the implementation of Board of Directors' decrees.

c. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
   i) Dilakukan melalui reviu terhadap semua pencatatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Komisaris;
   ii) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait; dan
   iii) Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Satuan Kerja Satuan Pengawasan Internal atau dengan eksternal auditor.

d. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

13. Pemeriksaan Keputusan Rapat Direksi
    Atas permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi.
14. Menjaga Kerahasiaan Dokumen
    Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
15. Melaksanakan *Self-Assessment* Pelaksanaan Tugas Komite Audit
    Komite Audit melakukan *self-assessment* terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
   b. Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagal berlkut:

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi, karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal dan/atau manajemen.

c. The special duties of Audit Committee, among others, can be:
   i) Conducted through a review of all records, documents and other necessary information including Minutes of Board of Directors and Commissioners Meetings;
   ii) Ask questions to the Board of Directors and its staff, the results of which are set forth in the Minutes of the Q&A signed by the relevant parties; and
   iii) If deemed necessary, conduct investigative audits carried out in cooperation with the Internal Audit Unit or with external auditors.

d. Audit Committee must submit a report on the implementation of special tasks with a maximum level of confidentiality limited to members of Audit Committee and members of Board of Commissioners.

13. Examination of the Board of Directors Meeting Decision
    at the Board of Commissioners' request, Audit Committee may conduct an examination of alleged errors in the Board of Directors' meeting decisions or irregularities in the implementation of Board of Directors' decisions.
14. Maintain Document Confidentiality
    Audit Committee members shall maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.
15. Carry out Self Assessment of Audit Committee Duties Implementation
    The Audit Committee conducts a self-assessment of the effectiveness of the implementation of its duties, and periodically updates the Audit Committee Charter.

Responsibilities

1. Audit Committee is responsible to Board of Commissioners.
2. Audit Committee's accountability to Board of Commissioners is submitted in the following report:
   a. Annual report on the implementation of Audit Committee duties;
   b. Quarterly report on the implementation of Audit Committee duties;
   c. Report for each special task implementation of Audit Committee.
3. Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Company.

Authorities

In carrying out its duties, Audit Committee has the following authority:

1. Full, free and unrestricted access to documents, data and information, employees, funds, assets and resources of the Company required, relating to the implementation of its duties and shall cooperate with the Internal Audit Unit and/or management.

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Pemeriksaan Internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Mekanisme kerja sebagaimana butir 2 di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
4. Jika diperlukan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Komisaris dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
5. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit, atas biaya Perusahaan.
6. Mengkaji independensi, objektivitas, serta merekomendasikan eksternal auditor yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan, untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan maupun anak Perusahaan.

2. Communicate directly with employees, including Board of Directors and those who carry out the function of Internal Audit, risk management, and Accountants related to Audit Committee duties and responsibilities.
3. The work mechanism as point 2 above must follow the work procedures in accordance with applicable regulations.
4. If necessary, involve independent parties outside Audit Committee members to assist in carrying out their duties with the Board of Commissioners' approval and perform other authorities granted by the Board of Commissioners.
5. If necessary, with the Board of Commissioners' approval, Audit Committee may hire experts and/or consultants to assist the Audit Committee, on the Company's expense.
6. Review the independence, objectivity and recommend the external auditor that will be selected by the Company to audit the Company's financial statements, to audit the financial statements of the Company and its subsidiaries.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Perusahaan memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. Kegiatan tersebut dapat diselenggarakan oleh internal Perusahaan maupun lembaga eksternal, dengan seluruh biaya pelaksanaan ditanggung oleh Perusahaan.

Bagi anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, informasi mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi telah disampaikan pada subbab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris.

Adapun sepanjang tahun 2025, anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen di luar Dewan Komisaris juga mengikuti sejumlah program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagaimana berikut:

AUDIT COMMITTEE TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company provides opportunities for Audit Committee members to participate in training and competency development programs to support the effective implementation of their oversight function. These activities can be organized internally by the Company or externally, with all costs borne by the Company.

For Audit Committee members from the Board of Commissioners, information regarding training and competency development is presented in the Competency Development subsection of the Board of Commissioners.

Throughout 2025, Audit Committee members from independent parties outside the Board of Commissioners also participated in a number of training and competency development programs, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Topic	Waktu Pelaksanaan Date and Time	Penyelenggara Organizer
Saiful Bahri (Anggota Komite Audit) Audit Committee members	GRC Summit International Conference	21-22 Agustus 2025 August 21–22, 2025	CRMS Indonesia
Rimba Simanjuntak (Anggota Komite Audit) Audit Committee members	-	-	-

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan

Piagam Komite Audit telah mengatur penyelenggaraan rapat secara berkala, yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Policy

The Audit Committee Charter regulates the holding of regular meetings, which are conducted using the following mechanisms:

1. Audit Committee shall hold regular meetings at least once every 3 (three) months.
2. Audit Committee meetings can only be held if attended by more than 1/2 of the members.

3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
6. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. Audit Committee meeting decisions are made based on deliberation for consensus.
4. Audit Committee meeting decisions are considered valid if approved by more than 1/2 of Audit Committee members present.
5. Audit Committee meetings are chaired by Chairman of Audit Committee or the most senior member of Audit Committee, if the Chairman of Audit Committee is absent.
6. If deemed necessary, Audit Committee may invite other parties related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting. Each Audit Committee meeting is set forth in the minutes of meeting, including any dissenting opinions, signed by all members of Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 33 kali. Adapun risalah rapat serta tingkat kehadiran anggota Komite Audit pada rapat tersebut disampaikan sebagaimana terlampir di bawah ini:

Audit Committee Meeting Frequency and Member Attendance

Throughout 2025, the Audit Committee held 33 meetings. The minutes of these meetings and the attendance of Audit Committee members are presented below:

Tingkat Kehadiran Komite Audit pada Rapat
Audit Committee Attendance Level at Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attendance (%)
Aan Rusdianto (Ketua) | (Chairman)	33	33	100%
Arman Depari (Wakil Ketua) | (Vice Chairman)	33	33	100%
Saiful Bahri (Anggota) | (Member)	33	33	100%
Rimba Simanjuntak (Anggota) | (Member)	33	33	100%
Rata-rata Average			**100%**

Risalah Rapat Komite Audit
Minutes of Audit Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Selasa, 7 Januari 2025 Tuesday, January 7, 2025	10.00 s.d 13.00 10.00 to 13.00	Rapat Pembahasan Usulan PKPT 2025 SPI dan Piagam Audit Internal Perusahaan. Meeting to Discuss the Proposed 2025 Internal Audit Work Plan and the Company's Internal Audit Charter.
2	Selasa, 14 Januari 2025 Tuesday, January 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Interim Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2024 PT Pelindo Multi Terminal periode sampai dengan 30 September 2024. Discussion of the Interim Audit Report of 2024 Consolidated Financial Statements of PT Pelindo Multi Terminal for the period up to September 30, 2024.
3	Selasa, 14 Januari 2025 Tuesday, January 14, 2025	13.30 s.d 16.00 13.30 to 16.00	Rapat Pembahasan Finalisasi Laporan *Asessment* GCG Tahun Buku 2023. Meeting to Discuss the Finalization of GCG Assessment Report for 2023 Fiscal Year.
4	Rabu, 15 Januari 2025 Wednesday, January 15, 2025	10.00 s.d 14.00 10.00 to 14.00	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Usulan PKPT 2025 SPI dan Piagam Audit Internal Perusahaan. Follow-up Meeting to Discuss the Proposed 2025 Internal Audit Work Plan and the Company's Internal Audit Charter.
5	Kamis, 16 Januari 2025 Thursday, January 16, 2025	10.00 s.d 11.30 10.00 to 11.30	Rapat Pembahasan *Update Draft* RJP PMT Tahun 2025-2029. Meeting to Discuss the Update Draft of 2025-2029 PMT Long-Term Plan.

Risalah Rapat Komite Audit
Minutes of Audit Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
6	Senin, 20 Januari 2025 Monday, January 20, 2025	10.00 s.d 11.30 10.00 to 11.30	Rapat Pembahasan Lanjutan terkait Usulan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan Laporan Implementasi Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024. Further Discussion Meeting regarding the Proposed Internal Audit Charter and the Risk Management Implementation Report for Quarter IV of 2024.
7	Kamis, 23 Januari 2025 Thursday, January 23, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan Usulan RKAP 2025. Discussion of the proposed 2025 RKAP.
8	Jumat, 31 Januari 2025 Friday, January 31, 2025	09.00 s.d 12.00 09.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Laporan Kinerja dan Keuangan s.d Bulan Desember 2024. Technical Meeting to Prepare the Board Coordination Meeting for the Performance and Financial Reports until December 2024.
9	Selasa, 4 Februari 2025 Tuesday, February 4, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Laporan Kinerja s.d Bulan Desember 2024 (khusus untuk Investasi dan Keuangan). Technical Meeting to Prepare the Board Coordination Meeting for Performance Reports until December 2024 (specifically for Investment and Finance).
10	Senin, 17 Februari 2025 Monday, February 17, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian atas Konsep Temuan BPK; 2. *Update* profil dan strategi risiko tahun 2025; 3. *Update* pembahasan RJPP *Subholding* dan *Holding* 2025-2029; 4. Pembahasan Tata Kelola/Kebijakan terkait Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis; 5. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Matters Requiring Attention Regarding BPK's Conceptual Findings; 2. Update on the 2025 risk profile and strategy; 3. Update on the discussion of 2025-2029 Subholding and Holding Long-Term Plan; 4. Discussion on Governance/Policies Related to Strategic Decision-Making Mechanisms; 5. Other Strategic Issues.
11	Kamis, 27 Februari 2025 Thursday, February 27, 2025	10.30 s.d 12.00 10.30 to 12.00	Rapat Laporan Triwulan IV Tahun 2024 SPI dan Manajemen Risiko. Fourth Quarter 2024 Report Meeting for Internal Audit and Risk Management.
12	Senin, 14 April 2025 Monday, April 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis pembahasan Strategi Risiko dan Profil Risiko Korporat PMT Tahun 2025. Technical Meeting to discuss the Risk Strategy and Corporate Risk Profile for the 2025 PMT.
13	Senin, 28 April 2025 Monday, April 28, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Bulan April 2025. Technical Meeting to Prepare for the April 2025 Board Coordination Meeting.
14	Rabu, 7 Mei 2025 Wednesday, May 7, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Diskusi Persiapan Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Triwulan I 2025. Discussion Meeting to Prepare the Agenda for the First Quarter 2025 Integrated Governance Committee (KTKT) Meeting.
15	Jumat, 23 Mei 2025 Friday, May 23, 2025	09.00 s.d 11.00 09.00 to 11.00	Rapat Tindak Lanjut Rakomdir khusus HSSE dan SDM. Follow-up Meeting for the HSSE and HC Coordination Meeting.
16	Senin, 26 Mei 2025 Monday, May 26, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. *Update* Pembahasan Tindak Lanjut Insiden Kemacetan Tanjung Priok; 2. *Update* Laporan Hasil Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2024; 3. *Update* terkait Arahan Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN/ Anak Usaha BUMN dari Danantara; 4. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Update on the Discussion on Follow-up to Tanjung Priok Traffic Jam Incident; 2. Update on the 2024 Anti-Bribery Management System Implementation Report; 3. Update on the Directions for the Implementation of GMS and Corporate Actions for SOEs/SOE Subsidiaries from Danantara; 4. Other Strategic Issues.
17	Rabu, 4 Juni 2025 Wednesday, June 4, 2025	13.30 s.d 16.00 13.30 to 16.00	Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Aksi Korporasi Pembelian 1 (satu) Unit HMC milik PT PIL. Request for Approval for the Implementation of Corporate Action of Purchasing 1 (one) HMC Unit belonging to PT PIL.

Risalah Rapat Komite Audit
Minutes of Audit Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
18	Kamis, 26 Juni 2025 Thursday, June 26, 2025	15.00 s.d 17.00 15.00 to 17.00	Pembahasan Tindak Lanjut terkait Hasil *Workshop* Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelaporan Keuangan. Follow-up discussion regarding the results of the Workshop on Strengthening Internal Control-Based Supervisory Governance to Improve the Integrity and Quality of Financial Reporting.
19	Jumat, 8 Agustus 2025 Thursday, June 26, 2025	10.30 s.d 11.30 10.30 to 11.30	Pembahasan Usulan Revisi Investasi PMT Grup Tahun 2025. Discussion of the Proposed Revision of 2025 PMT Group Investment Plan.
20	Jumat, 8 Agustus 2025 Friday, August 8, 2025	08.00 s.d 10.00 08.00 to 10.00	Rapat Pembahasan Formulasi dan Pemantauan *Key Risk Indicator* (KRI) Risiko Utama Tahun 2025. Meeting to Discuss the Formulation and Monitoring of Key Risk Indicators (KRI) for Key Risks in 2025.
21	Senin, 11 Agustus 2025 Monday, August 11, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan Implementasi Manajemen Risiko s.d Triwulan II Tahun 2025 dan *Update* Progres Penyusunan Profil Risiko RKAP Tahun 2026. Discussion of Risk Management Implementation until the Second Quarter of 2025 and Update on the Progress of Preparing the 2026 RKAP Risk Profile.
22	Senin, 11 Agustus 2025 Monday, August 11, 2025	13.00 s.d 16.00 13.00 to 16.00	Pembahasan profil dan strategi risiko tahun 2025 serta isu-isu strategis (persiapan rapat KTKT *Holding*). Discussion of the 2025 risk profile and strategy, as well as strategic issues (preparation for the KTKT Holding meeting).
23	Kamis, 14 Agustus 2025 Thursday, August 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Evaluasi Risiko Utama Triwulan II Tahun 2025; 2. Profil Risiko Utama Tahun 2026; 3. *Update* Hasil Pembahasan *Joint Procurement* KAP Tahun Buku 2025; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Evaluation of Key Risks for the Second Quarter of 2025; 2. Profile of Key Risks for 2026; 3. Update on the Results of Joint Procurement KAP Discussion for Fiscal Year 2025; 4. Other strategic matters.
24	Senin, 25 Agustus 2025 Monday, August 25, 2025	09.00 s.d 11.00 09.00 to 11.00	Pembahasan usulan revisi RKAP Investasi tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal. Discussion of the proposed revision of 2025 RKAP Investment Plan for PT Pelindo Multi Terminal.
25	Jumat, 12 September 2025 Monday, August 25, 2025	09.00 s.d 12.00 09.00 to 12.00	Sinkronisasi Penyusunan Usulan RKAP 2026 PT Pelindo Multi Terminal. Synchronization of Preparation of Proposed RKAP 2026 PT Pelindo Multi Terminal.
26	Rabu, 24 September 2025 Wednesday, September 24, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2025. Technical Meeting to Prepare for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until August 2025.
27	Kamis, 23 Oktober 2025 Thursday, October 23, 2025	14.00 s.d 16.00 14.00 to 16.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d September 2025. Technical Meeting to Prepare for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until September 2025.
28	Jumat, 14 November 2025 Thursday, October 23, 2025	09.30 s.d 11.30 09.30 to 11.30	Pembahasan *Update* Perencanaan Risiko RKAP Tahun 2026. Discussion on the 2026 RKAP Risk Planning Update.
29	Senin, 17 November 2025 Monday, November 17, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Pembahasan Laporan Triwulan III SPI Tahun 2025; 2. Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) *Branch* Tahun 2025. 1. Discussion on the 2025 SPI Quarterly Report; 2. Discussion on the 2025 Branch Audit Result Report (LHA).
30	Selasa, 18 November 2025 Tuesday, November 18, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. *Update* Profil Risiko Triwulan III 2025. 2. *Update* Perencanaan Manajemen Risiko pada RKAP 2026. 3. *Update* Hasil Temuan Audit Internal s.d. Triwulan III 2025; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Risk Profile Update for the 2025 Quarterly. 2. Risk Management Planning Update for the 2026 RKAP. 3. Internal Audit Findings Update until the 3rd Quarter of 2025; 4. Other strategic matters.
31	Rabu, 19 November 2025 Wednesday, November 19, 2025	09.00 sd 17.00 09.00 to 17.00	Pembahasan Usulan RKAP Investasi Tahun 2026 pada Divisi Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan. Discussion of the Proposed 2026 Investment RKAP for the Port Equipment and Facilities Division.
32	Kamis, 20 November 2025 Thursday, November 20, 2025	09.00 sd 17.00 09.00 to 17.00	Pembahasan Investasi pada Divisi IT dan PT IKT Discussion of Investments in the IT Division and PT IKT.
33	Selasa, 16 Desember 2025 Tuesday, December 16, 2025	14.00 s.d 16.00 14.00 to 16.00	Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d November 2025. Preparation for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until November 2025.

EVALUASI KINERJA KOMITE AUDIT

Pelaksanaan evaluasi kinerja Komite Audit mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Penilaian dilakukan setiap tahun melalui mekanisme *self-assessment*, baik terhadap kinerja masing-masing anggota maupun Komite Audit secara kolektif.

Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan menjadi bahan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun berjalan.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan untuk mendukung Dewan Komisaris dalam memantau pengelolaan Perusahaan. Pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Piagam Komite Audit yang menjadi pedoman kerja dalam menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup pengawasan Komite Audit mencakup penelaahan atas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan eksternal, kepatuhan terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko, serta implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat Komite Audit secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas laporan pengawasan, hasil reviu, serta isu-isu strategis yang memerlukan tindak lanjut;
2. Menyusun dan melaporkan realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2025 kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja;
3. Menelaah Laporan Manajemen Perusahaan tahun 2025, termasuk hasil audit internal dan rekomendasi tindak lanjutnya;
4. Melakukan penelaahan atas surat dan Nota Dinas Direksi yang berkaitan dengan aspek keuangan, pengendalian internal, risiko, dan hal-hal yang berada dalam ruang lingkup fungsi Komite Audit;
5. Melakukan penelaahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Perusahaan;
6. Menelaah dan memberikan rekomendasi atas pengaduan atau laporan yang diterima melalui kanal pelaporan internal (*whistleblowing system*) yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di lingkungan Perusahaan;

AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE EVALUATION

The Audit Committee's performance is evaluated in accordance with the provisions stipulated in the Audit Committee Charter. The assessment is conducted annually through a self-assessment mechanism, both for the performance of individual members and Audit Committee as a whole.

The results of this evaluation are submitted to the Board of Commissioners as part of the annual report on the Audit Committee's activities and serve as a basis for reviewing the effectiveness of its oversight function during the year.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE'S DUTIES AND ACTIVITIES IN 2025

Audit Committee carries out its oversight function to support the Board of Commissioners in monitoring the Company's management. The implementation of these duties is based on the Audit Committee Charter, which serves as a working guideline for carrying out the Audit Committee's functions, authorities, and responsibilities in accordance with applicable regulations.

The scope of the Audit Committee's oversight includes reviewing financial reporting, effectiveness of internal controls, implementation of internal and external audits, regulatory compliance, risk management implementation, and implementation of Good Corporate Governance.

During 2025, Audit Committee carried out the following activities and duties:

1. Held regular Audit Committee meetings at least once every three months to discuss supervisory reports, review results, and strategic issues requiring follow-up;
2. Prepared and reported the implementation of the 2025 Audit Committee Work Program to the Board of Commissioners as a form of accountability and performance evaluation;
3. Reviewed the Company's 2025 Management Report, including internal audit results and follow-up recommendations;
4. Reviewed letters and official memos from the Board of Directors relating to financial aspects, internal control, risk, and matters within the scope of the Audit Committee's functions;
5. Reviewed compliance with laws and regulations relevant to the Company's business and operational activities;
6. Reviewed and provided recommendations on complaints or reports received through the internal reporting channel (whistleblowing system) relating to alleged violations within the Company;

7. Menyusun dan menyampaikan materi dalam rapat internal Dewan Komisaris yang berhubungan dengan temuan dan pandangan Komite Audit atas pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun berjalan.

Seluruh pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan prinsip independensi, obyektivitas, dan kehati-hatian, guna memastikan bahwa tata kelola perusahaan berjalan secara efektif dan sejalan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit turut melakukan penelaahan dalam proses penunjukan auditor eksternal guna memastikan auditor yang dipilih memiliki kompetensi, independensi, dan integritas yang memadai dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit juga melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi terkait penunjukan maupun pemberhentian auditor eksternal dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2021 serta Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-09/MBU/12/2020 tentang Komite Audit.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Komite Audit menjalankan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Menilai kinerja auditor eksternal pada periode sebelumnya, mencakup kualitas hasil audit, kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku, ketepatan waktu pelaporan, serta efektivitas komunikasi dengan manajemen;

2. Mengevaluasi independensi dan objektivitas auditor eksternal, termasuk melakukan telaah terhadap potensi konflik kepentingan atau hubungan afiliasi yang dapat memengaruhi kualitas audit;
3. Melakukan kajian atas ruang lingkup dan pendekatan audit untuk memastikan kesesuaian dengan karakteristik usaha dan kompleksitas operasional Perusahaan; dan
4. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris sebagai dasar pertimbangan dalam menyampaikan usulan kepada Pemegang Saham.

Komite Audit juga dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait tidak diperpanjangnya masa penugasan atau penghentian auditor eksternal. Rekomendasi tersebut dapat diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas kualitas audit, pemenuhan prinsip independensi, maupun pertimbangan lain yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.

Pelaksanaan proses evaluasi tersebut dilakukan secara objektif dan independen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mekanisme yang diterapkan mengacu pada Piagam Komite Audit Perusahaan serta selaras dengan ketentuan tata kelola yang berlaku di lingkungan Pelindo Group dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

7. Prepared and presented materials at internal Board of Commissioners meetings relating to the Audit Committee's findings and views on the implementation of its supervisory function during the year.

All these duties were carried out with the principles of independence, objectivity, and prudence, to ensure that corporate governance is effective and in line with the principles of transparency and accountability.

AUDIT COMMITTEE RESPONSIBILITIES IN PROVIDING RECOMMENDATIONS ON THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EXTERNAL AUDITORS

Audit Committee also reviews the external auditor appointment process to ensure that the selected auditor possesses sufficient competence, independence, and integrity to support the quality of the Company's financial reporting.

Throughout 2025, Audit Committee also evaluated and provided recommendations regarding the appointment and dismissal of external auditors, referring to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011, as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2021 and Minister of State-Owned Enterprises Circular No. SE-09/MBU/12/2020 concerning Audit Committees.

In carrying out these responsibilities, Audit Committee carries out the following activities:
1. Assessing the performance of external auditors in the previous period, including the quality of audit results, compliance with applicable audit standards, timeliness of reporting, and effectiveness of communication with management
2. Evaluate the independence and objectivity of external auditors, including reviewing potential conflicts of interest or affiliated relationships that may affect audit quality;

3. Review the scope and approach of audit to ensure compliance with the characteristics of the Company's business and operational complexity;
4. Prepare and submit written recommendations to the Board of Commissioners as a basis for consideration in submitting proposals to Shareholders.

Audit Committee may also recommend to the Board of Commissioners whether to terminate or not extend the assignment of external auditors. These recommendations may be based on evaluations of audit quality, compliance with the principle of independence, or other considerations relevant to the Company's needs and interests.

The evaluation process is conducted objectively and independently, while prioritizing the principle of prudence. The mechanisms implemented refer to the Company's Audit Committee Charter and align with applicable governance provisions within Pelindo Group and Good Corporate Governance practices.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nominasi, evaluasi, serta remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen kunci Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite mengedepankan prinsip profesionalisme, objektivitas, independensi, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, pelaksanaan fungsi komite juga mengacu pada Pedoman Governansi Korporat Pelindo Group dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Pembentukan Komite ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisaris dan menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam mendukung proses nominasi dan pengelolaan remunerasi yang lebih terstruktur, transparan, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Persyaratan keanggotaan:
1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
4. Sehat secara jasmani dan rohani.
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
6. Bekerja secara independen dan berdedikasi terhadap kepentingan Perusahaan.
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
8. Bersedia menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

ESTABLISHMENT OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee (NRC) was established to assist the Board of Commissioners in carrying out its oversight function, particularly with regard to the nomination, evaluation, and remuneration policies for the Board of Directors, Board of Commissioners, and key management of the Company. In carrying out its duties, the Committee prioritizes the principles of professionalism, objectivity, independence, and Good Corporate Governance.

The establishment of Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Furthermore, the committee's functions are also in accordance with Pelindo Group Corporate Governance Guidelines and Nomination and Remuneration Committee Charter, which are applicable within the Company.

The establishment of the Committee was determined by a Board of Commissioners decision and is part of the Company's efforts to support a more structured, transparent, and aligned remuneration nomination and management process that aligns with organizational needs.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBER QUALIFICATIONS

Membership requirements:
1. Have good integrity and sufficient knowledge in the field of nomination and remuneration.
2. Have no personal interest/relationship that may cause negative impact and conflict of interest to the Company.
3. Able to communicate effectively.
4. Physically and mentally healthy.
5. Can provide sufficient time to complete his/her duties.
6. Work independently and dedicated to the Company's interests.
7. Willing to improve competence continuously through education and training.
8. Willing to sign an integrity pact which is a statement and commitment to comply with all provisions of laws and regulations and GCG principles.

MASA JABATAN

Jangka waktu penugasan anggota komite ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun. Setelah masa jabatan berakhir, anggota komite dapat diangkat kembali untuk periode paling lama 2 (dua) tahun sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi Dewan Komisaris. Sejalan dengan pengangkatan, Dewan Komisaris jugamemiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota komite sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

TENURE

The tenure for committee members is determined by the Board of Commissioners, with a maximum term of 3 (three) years. Upon expiration of the term, committee members may be reappointed for a maximum period of 2 (two) years based on the needs and the results of the Board of Commissioners' evaluation. In line with the appointment, the Board of Commissioners also has the authority to dismiss committee members at any time in accordance with applicable regulations.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERATION TAHUN 2025

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Dewan Komisaris dan paling banyak 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar Dewan Komisaris.

Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelindo Multi Terminal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2025

Based on the Governance Guidelines for Supporting Organs of Board of Commissioners at PT Pelindo Multi Terminal, the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 1 (one) member from the Board of Commissioners and a maximum of 2 (two) members from outside the Board of Commissioners.

The composition of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelindo Multi Terminal as of December 31, 2025, is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2025
Composition of Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Ketua/Komisaris Period of Office	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 03 of 2025 dated September 26, 2025 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal	Sesuai dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisasris In accordance with the term of office as Board of Commissioners	
Ahmad Perwira Mulia Tarigan	Wakil Ketua/Komisaris Independen Vice Chairman/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 03 of 2025 dated September 26, 2025 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal		
Emi Wakhyuni	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi Remunerasi dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 03 of 2024 dated January 25, 2024 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Nomination and Remuneration Committee of PT Pelindo Multi Terminal	25 Januari 2024 s.d 28 Januari 2028 January 25, 2024 to January 28, 2028	Ke- 1 1st

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE

Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris
Chairman of Nomination and Remuneration Committee/Commissioner

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Herbert Timbo Parluhutan Siahaan dapat dilihat bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Chairman of Nomination and Remuneration Committee Herbert Timbo Parluhutan Siahaan can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Ahmad Perwira Mulia Tarigan

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen
Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Profil Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Ahmad Perwira Mulia Tarigan dapat dilihat bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee Ahmad Perwira Mulia Tarigan can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Emi Wakhyuni

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | Member of Nomination and Remuneration Committee
Periode Jabatan: 25 Januari 2024 s.d 28 Januari 2028, Periode Ke-1
Member of Nomination and Remuneration Committee

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia : 53 tahun
Kelahiran : Medan, 9 Oktober 1972
Domisili : Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Personal Data

Indonesian citizen
Age : 53 years old
Born in : Medan, October 9, 1972
Domisili : Medan, North Sumatra, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Ilmu Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, (2008);
2. Pascasarjana, Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara, (2006);
3. Program Doktoral Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara, (2023).

Education History

1. Bachelor of Management Science, College of Management Science (2008);
2. Postgraduate Degree in Management Science, University of North Sumatra (2006);
3. Doctoral Program in Islamic Economics, UIN North Sumatra (2023).

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki dan Masih Berlaku

1. *Certified International Trainier, base on* ISO 21001 – SMOP, BPSDM IPB – QUANTUM HRM INTERNASIONAL;
2. *Certified International Person Assesor, based on* ISO 17024, Quantum HRM International;
3. *Certified Fundamental and Advance Hypnotherapy*, LPKN;
4. *Certified Great Leadership*, IEEEL Institute;
5. *Certified Professional Human Capital Management*, IHRCI;
6. *Certified International Human Capital Management*, Quantum HRM International
7. *Internal Audit of* ISO 14001 2015 & OHSAS 18001 2007, Vidya Consultants;
8. *Internal Audit* SMK3, LSP Training Consulting;
9. Sertifikasi Ahli K3 Umum, SGS Indonesia.

Valid Professional Certifications

1. Certified International Trainer, based on ISO 21001 – SMOP, BPSDM IPB – QUANTUM HRM INTERNATIONAL;
2. Certified International Personnel Assessor, based on ISO 17024, Quantum HRM International;
3. Certified in Fundamental and Advanced Hypnotherapy, LPKN;
4. Certified in Great Leadership, IEEEL Institute;
5. Certified Professional in Human Capital Management, IHRCI;
6. Certified International Human Capital Management, Quantum HRM International
7. Internal Audit of ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007, Vidya Consultants;
8. SMK3 Internal Audit, LSP Training Consulting;
9. Certified General Occupational Safety and Health (K3) Expert, SGS Indonesia.

Riwayat Jabatan

1. Customer Service & Contact Center Supervisor, PT INDOSAT (1992 - 2010);
2. Marketing & Sales Support PT INDOSAT (2010 - 2014);
3. Facility Management Services - Building Manager, PT INDOSAT (2014 - 2022);
4. Dosen Tetap Program Studi Manajemen (Konsentrasi MSDM), Universitas Pembangunan Panca Budi (2010 – Saat ini);
5. Associate Trainer dan Consultant QIMS INTRASINDO dan SMES KONSULINDO MANAJEMEN (2020 – Saat ini);
6. Founder & Director PT Duta Cendikia Indonesia (2023 – Saat ini).

Work Experience

1. Customer Service & Contact Center Supervisor, PT INDOSAT (1992 - 2010);
2. Marketing & Sales Support PT INDOSAT (2010 - 2014);
3. Facility Management Services - Building Manager, PT INDOSAT (2014 - 2022);
4. Permanent Lecturer in the Management Study Program (Concentration in Human Resources), Pembangunan Panca Budi University (2010 – Present);
5. Associate Trainer and Consultant at QIMS INTRASINDO and SMES KONSULINDO MANAJEMEN (2020 – Present);
6. Founder & Director of PT Duta Cendikia Indonesia (2023 – Present).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan
Tidak ada.

Di luar Perusahaan:
1. Dosen Tetap Program Studi Manajemen (Konsentrasi MSDM), Universitas Pembangunan Panca Budi (2010 – Saat ini);
2. Associate Trainer dan Consultant QIMS INTRASINDO dan SMES KONSULINDO MANAJEMEN (2020 – Saat ini);
3. Founder & Director PT Duta Cendikia Indonesia (2023 – Saat ini).

Concurrent Positions

Within the Company:
None.

Outside the Company:
1. Permanent Lecturer in the Management Study Program (Concentration in Human Resources), Panca Budi Development University (2010 – Present);
2. Associate Trainer and Consultant at QIMS INTRASINDO and SMES KONSULINDO MANAJEMEN (2020 – Present);
3. Founder & Director of PT Duta Cendikia Indonesia (2023 – Present).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Affiliations

Has no affiliation with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the major/controlling shareholder and the Government of Indonesia as the ultimate owner of the Company.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memenuhi ketentuan independensi sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup tidak adanya hubungan afiliasi dengan Perusahaan maupun dengan manajemen yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pemberian rekomendasi.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip independensi dan integritas, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan pernyataan independensi yang terdokumentasi dan disajikan sebagaimana terlampir di bawah ini:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE INDEPENDENCE STATEMENT

Members of Nomination and Remuneration Committee are required to meet independence requirements in accordance with applicable policies and regulations. These requirements include the absence of any affiliation with the Company or management that could potentially affect their objectivity in carrying out their duties and making recommendations.

As part of the implementation of the principles of independence and integrity, all members of Nomination and Remuneration Committee have submitted a documented independence statement, which is presented as attached below:

Pernyataan Independensi Independence Statement	**Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi)** (Chairman of Nomination and Remuneration Committee)	**Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi)** (Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee)	**Emi Wakhyuni (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)** (Nomination and Remuneration Committee Member)
Tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan keuangan dengan Perusahaan atau dengan Manajemen Perusahaan. Has no business relationship or financial interest with the Company or with the Company's Management.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Manajemen Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi. Has no family relationship with the Company's Management that may affect independence in carrying out duties as the Nomination and Remuneration Committee.	√	√	√
Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi. Has sufficient knowledge and skills to carry out duties and responsibilities as the Nomination and Remuneration Committee.	√	√	√
Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif dan independen. Will carry out duties and responsibilities objectively and independently	√	√	√
Tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu. Will not utilize the position in the Company, either directly or indirectly for personal interests, family and relatives, or certain groups.	√	√	√
Berkomitmen untuk menjaga independensi dan integritas sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Committed to maintaining independence and integrity as a Member of Nomination and Remuneration Committee in carrying out duties and responsibilities.	√	√	√

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Dewan Komisaris No. KNR-01/DK/PLMT/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada PT Pelindo Multi Terminal. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi, kewenangan, serta mekanisme kerja Komite Nominasi dan Remunerasi di lingkungan Perusahaan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

The Nomination and Remuneration Committee Charter was established through the Board of Commissioners' Decree No. KNR-01/DK/PLMT/III/2023 dated March 20, 2023, concerning the Nomination and Remuneration Committee Charter at PT Pelindo Multi Terminal. These guidelines serve as a reference for implementing the functions, authorities, and working mechanisms of the Nomination and Remuneration Committee within the Company.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapatan profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

The Nomination and Remuneration Committee is tasked with and responsible for providing professional and independent advice to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors, and for carrying out other duties related to the responsibilities of the Board of Commissioners. To ensure that the Nomination and Remuneration Committee can function efficiently and effectively, its duties, responsibilities, and authorities are set forth below.

Tugas

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Fungsi Nominasi dan Remunerasi
   a. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya.
   b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
   c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (*Nominated Talent*).
   d. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS.
   e. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
   f. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   g. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   h. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
   i. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
   j. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja HSSE (*Health Safety, Security and Environment*) agar tercapai target pencegahan *incident*, baik

Duties

Functions of Nomination and Remuneration Committee

1. Nomination and Remuneration Function
   a. Conducting periodic reviews of the Company's Talent Management System and monitoring and evaluating its implementation.
   b. Evaluating the Talent Classification system and procedures implemented by the Board of Directors.
   c. Validating and calibrating Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to produce a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS (Nominated Talent).
   d. Evaluating Candidates for Company Representatives proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, prior to submission to the GMS.
   e. Evaluating the proposed Key Performance Indicators for Individual members of the Board of Directors.
   f. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   g. Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   h. Evaluate remuneration policies for employees requiring approval/response from the Board of Commissioners.
   i. Evaluate the Board of Directors' proposals regarding the company's organizational structure.
   j. Monitor and evaluate HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) performance to achieve targets for preventing incidents—including fatalities, accidents,

fatality, accident, nearmiss, melindungi lingkungan, meningkatkan produktivitas, dan membangun reputasi perusahaan.

2. Fungsi HSSE
   a. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas implementasi HSSE di perusahaan melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dari tahapan tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Divisi HSSE.
   b. Melakukan pengawasan atas kegiatan Divisi HSSE dalam memantau pelaksanaan mitigasi resiko kecelakaan kerja yang dilaporkan oleh unit-unit kerja terkait.Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi oleh Divisi HSSE.
   c. Melakukan evaluasi atas informasi *Unsafe Action*, *Unsafe Condition* dan kecelakaan kerja yang disampaikan oleh Divisi Manajemen HSSE dalam laporan laporan rutin berkala triwulanan, tahunan dan laporan non rutin.
   d. Melakukan pembahasan atas potensi risiko-risiko kecelakaan kerja, rencana mitigasi dan implementasi "*Safety Culture*" baik di lingkungan internal perusahaan sesuai kebutuhan, termasuk dengan pihak ketiga/eksternal yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab

1. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
   b. Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Wewenang

1. Komite mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perusahaan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
3. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat membentuk suatu tim yang bersifat *adhoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.
4. Komite dapat memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
5. Komite mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

and near misses—protecting the environment, improving productivity, and building the company's reputation.

2. HSSE Functions
   a. Review and provide recommendations on the effectiveness of HSSE implementation within the company through regular meetings or other means to discuss the progress of the various stages of tasks and responsibilities carried out by the HSSE Division.
   b. Oversee the HSSE Division's activities in monitoring the implementation of workplace accident risk mitigation measures reported by relevant work units. Oversee the HSSE Division's implementation of recommendations.
   c. Evaluate information regarding Unsafe Actions, Unsafe Conditions, and workplace accidents submitted by the HSSE Management Division in quarterly, annual, and ad hoc reports.
   d. Discuss potential workplace accident risks, mitigation plans, and the implementation of a "Safety Culture" both within the company as needed, including with third parties/external entities falling under the Board of Commissioners' supervisory authority.

Responsibilities

1. Nomination and Remuneration Committee is accountable to the Board of Commissioners.
2. Nomination and Remuneration Committee's accountability to the Board of Commissioners is conveyed in the following reports:
   a. Annual report on the implementation of the Nomination and Remuneration Committee's duties;
   b. Quarterly report on the implementation of the Nomination and Remuneration Committee's duties;
   c. Report for each specific task of Nomination and Remuneration Committee.
3. Nomination and Remuneration Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information.

Authorities

1. The Committee has the authority to access Company documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources as needed in connection with the implementation of its duties.
2. If necessary, the Committee may involve experts and/or consultants/independent parties outside the Committee members to assist in carrying out its duties, at the Company's expense, with written approval from the Board of Commissioners.
3. If necessary, in carrying out its duties, the Committee may form an ad hoc team, with criteria and assignment periods tailored to the needs and type of work.
4. The Committee may have other authorities granted by the Board of Commissioners.
5. The Committee has the authority to communicate directly with employees, including the Board of Directors, and other parties related to the implementation of its duties.

6. Menerima secara rutin laporan Divisi SDM, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi terkait lainnya secara periodik, baik bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai kebutuhan penugasan.
7. Memperoleh masukan dari pihak eksternal atau independen yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan peningkatan kemampuan anggota Komite apabila diperlukan atas biaya Perusahaan.

6. Regularly receive reports from the HC Division, Risk Management Division, and other related Divisions on a monthly, quarterly, and annual basis, as needed, as needed.
7. Obtain input from external or independent professional parties in carrying out its duties and improving the capabilities of Committee members, if necessary, at the Company's expense.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perusahaan memberikan dukungan terhadap peningkatan kompetensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh lembaga eksternal.

Bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari unsur Dewan Komisaris, informasi mengenai program pengembangan kompetensi telah disampaikan pada subbab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris.

Adapun sepanjang tahun 2025, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Dewan Komisaris turut mengikuti sejumlah pelatihan dan program pengembangan kompetensi sebagaimana terlampir berikut ini:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Company supports the competency development of Nomination and Remuneration Committee members through participation in various training and development programs, both internally and externally organized.

For Nomination and Remuneration Committee members from the Board of Commissioners, information regarding competency development programs is presented in the subsection of Competency Development of Board of Commissioners.

Throughout 2025, Nomination and Remuneration Committee members from outside the Board of Commissioners participated in a number of training and competency development programs, as outlined below:

Nama dan Jabatan Name and Title	Materi Subject	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Emi Wakhyuni (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Member of Nomination and Remuneration Committee)	*Certified Enterprise Risk Analyst*	4 Januari 2025 January 4, 2025	Academy of Finance and Management Australia
	Webinar "*Scanning-Diagnozing Organization, Human Capital* Pendekatan Penelitian Kualitatif" Webinar "Scanning-Diagnosticating Organization, Human Capital Qualitative Research Approach"	22 Januari 2025 January 22, 2025	Quantum HRM Internasional
	Webinar "*Building Corporate Culture*"	24 Januari 2025 January 24, 2025	PT Magnet Solusi Integra
	Webinar "*Adaptive Learning : New People Development Era*"	31 Januari 2025 January 31, 2025	PT Magnet Solusi Integra
	Webinar "*Strategic Human Capital Management*"	12 Juli 2025 July 12, 2025	HR Wikipedia Indonesia

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi telah diatur pada Piagam/*Charter*, di mana pedoman tersebut mencakup mekanisme dan tata cara penyelenggaraan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun ketentuan yang dimaksud yaitu:

1. Rapat komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETINGS

Policy

Provisions regarding the implementation of Remuneration and Nomination Committee meetings are stipulated in the Charter, which includes guidelines for the mechanism and procedures for holding Nomination and Remuneration Committee meetings. These provisions are as follows:

1. Committee meetings are held periodically, at least once every three months.
2. If deemed necessary, the Committee may invite other parties related to the meeting material to attend with

rapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan bilamana diperlukan dapat didelegaslkan kepada salah satu anggota yang hadir.
4. Rapat dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memfasilitasi semua peserta rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Keputusan rapat komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Keputusan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda *(dissenting opinions)* dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampai kan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun.
9. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan risalah rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

prior approval from the Board of Commissioners.

3. Meetings are chaired by the Committee Chairman and, if necessary, may be delegated to one of the attending members.
4. Meetings may be held via teleconference, videoconference, or other electronic means that facilitate the direct viewing and hearing of all Committee meeting participants and their participation.
5. Committee meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by majority vote.
6. Meeting decisions are declared valid if attended by at least 51% of the Committee members, including the Committee Chairman.
7. Everything discussed and decided at Committee meetings, including dissenting opinions, is recorded in written minutes of the meeting, signed by all Committee members present, as valid evidence of the decisions made at the meeting, and submitted to the Board of Commissioners.
8. Each Committee member is given the broadest possible freedom to express their professional opinions in the discussion of each meeting agenda without any intervention.
9. Each Committee member has the right to receive a copy of the meeting minutes, even if they are not present at the meeting.

PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 33 kali. Adapun risalah rapat serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun buku disajikan sebagaimana terlampir di bawah ini:

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS

During 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 33 meetings. The minutes of these meetings and a summary of attendance of the Nomination and Remuneration Committee members throughout the fiscal year are presented below:

Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat
Nomination and Remuneration Committee Attendance Level at Meetings

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attendance (%)
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Ketua) | (Chairman)	33	33	100%
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Wakil Ketua) | (Vice Chairman)	33	33	100%
Emi Wakhyuni (Anggota) | (Member)	33	33	100%
Rata-rata Average			**100%**

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Minutes of Nomination and Remuneration Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Selasa, 7 Januari 2025 Tuesday, January 7, 2025	10.00 s.d 13.00 10.00 to 13.00	Rapat Pembahasan Usulan PKPT 2025 SPI dan Piagam Audit Internal Perusahaan. Meeting to Discuss the Proposed 2025 Internal Audit Work Plan and the Company's Internal Audit Charter.

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Minutes of Nomination and Remuneration Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
2	Selasa, 14 Januari 2025 Tuesday, January 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Interim Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2024 PT Pelindo Multi Terminal periode sampai dengan 30 September 2024. Discussion of the Interim Audit Report of 2024 Consolidated Financial Statements of PT Pelindo Multi Terminal for the period up to September 30, 2024.
3	Selasa, 14 Januari 2025 Tuesday, January 14, 2025	13.30 s.d 16.00 13.30 to 16.00	Rapat Pembahasan Finalisasi Laporan *Asessment* GCG Tahun Buku 2023. Meeting to Discuss the Finalization of GCG Assessment Report for 2023 Fiscal Year.
4	Rabu, 15 Januari 2025 Wednesday, January 15, 2025	10.00 s.d 14.00 10.00 to 14.00	Rapat Tindaklanjut Pembahasan Usulan PKPT 2025 SPI dan Piagam Audit Internal Perusahaan. Follow-up Meeting to Discuss the Proposed 2025 Internal Audit Work Plan and the Company's Internal Audit Charter.
5	Kamis, 16 Januari 2025 Thursday, January 16, 2025	10.00 s.d 11.30 10.00 to 11.30	Rapat Pembahasan *Update Draft* RJP SPMT Tahun 2025-2029 . Meeting to Discuss the Update Draft of 2025-2029 SPMT Long-Term Plan.
6	Senin, 20 Januari 2025 Monday, January 20, 2025	10.00 s.d 11.30 10.00 to 11.30	Rapat Pembahasan Lanjutan terkait Usulan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan Laporan Implementasi Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024. Further Discussion Meeting regarding the Proposed Internal Audit Charter and the Risk Management Implementation Report for Quarter IV of 2024.
7	Kamis, 23 Januari 2025 Thursday, January 23, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan usulan RKAP 2025. Discussion of the proposed 2025 RKAP.
8	Jumat, 31 Januari 2025 Friday, January 31, 2025	09.00 s.d 12.00 09.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Laporan Kinerja dan Keuangan s.d Bulan Desember 2024. Technical Meeting to Prepare the Board Coordination Meeting for the Performance and Financial Reports until December 2024.
9	Selasa, 4 Februari 2025 Tuesday, February 4, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Laporan Kinerja s.d Bulan Desember 2024 (khusus untuk Investasi dan Keuangan). Technical Meeting to Prepare the Board Coordination Meeting for Performance Reports until December 2024 (specifically for Investment and Finance).
10	Senin, 17 Februari 2025 Monday, February 17, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian atas Konsep Temuan BPK; 2. *Update* profil dan strategi risiko tahun 2025; 3. *Update* pembahasan RJPP *Subholding* dan *Holding* 2025-2029; 4. Pembahasan Tata Kelola/Kebijakan terkait Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis; 5. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Matters Requiring Attention Regarding BPK's Conceptual Findings; 2. Update on the 2025 risk profile and strategy; 3. Update on the discussion of 2025-2029 Subholding and Holding Long-Term Plan; 4. Discussion on Governance/Policies Related to Strategic Decision-Making Mechanisms; 5. Other Strategic Issues.
11	Kamis, 27 Februari 2025 Thursday, February 27, 2025	10.30 s.d 12.00 10.30 to 12.00	Rapat Laporan Triwulan IV Tahun 2024 SPI dan Manajemen Risiko. Fourth Quarter 2024 Report Meeting for Internal Audit and Risk Management.
12	Senin, 14 April 2025 Monday, April 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis pembahasan Strategi Risiko dan Profil Risiko Korporat SPMT Tahun 2025. Technical Meeting to discuss the Risk Strategy and Corporate Risk Profile for the 2025 SPMT.
13	Senin, 28 April 2025 Monday, April 28, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Bulan April 2025. Technical Meeting to Prepare for the April 2025 Board Coordination Meeting.
14	Rabu, 7 Mei 2025 Wednesday, May 7, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Diskusi Persiapan Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Triwulan I 2025. Discussion Meeting to Prepare the Agenda for the First Quarter 2025 Integrated Governance Committee (KTKT) Meeting.
15	Jumat, 23 Mei 2025 Friday, May 23, 2025	09.00 s.d 11.00 09.00 to 11.00	Rapat Tindak Lanjut Rakomdir khusus HSSE dan SDM. Follow-up Meeting for the HSSE and HC Coordination Meeting.
16	Senin, 26 Mei 2025 Monday, May 26, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. *Update* Pembahasan Tindak Lanjut Insiden Kemacetan Tanjung Priok; 2. *Update* Laporan Hasil Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2024; 3. *Update* terkait Arahan Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN/Anak Usaha BUMN dari Danantara; 4. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Update on the Discussion on Follow-up to Tanjung Priok Traffic Jam Incident; 2. Update on the 2024 Anti-Bribery Management System Implementation Report; 3. Update on the Directions for the Implementation of GMS and Corporate Actions for SOEs/ SOE Subsidiaries from Danantara; 4. Other Strategic Issues.
17	Rabu, 4 Juni 2025 Wednesday, June 4, 2025	13.30 s.d 16.00 13.30 to 16.00	Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Aksi Korporasi Pembelian 1 (satu) Unit HMC milik PT PIL. Request for Approval for the Implementation of Corporate Action of Purchasing 1 (one) HMC Unit belonging to PT PIL.
18	Kamis, 26 Juni 2025 Thursday, June 26, 2025	15.00 s.d 17.00 15.00 to 17.00	Pembahasan Tindak Lanjut terkait Hasil *Workshop* Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelaporan Keuangan. Follow-up discussion regarding the results of the Workshop on Strengthening Internal Control-Based Supervisory Governance to Improve the Integrity and Quality of Financial Reporting.

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Minutes of Nomination and Remuneration Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
19	Jumat, 8 Agustus 2025 Friday, August 8 2025	10.30 s.d 11.30 10.30 to 11.30	Pembahasan Usulan Revisi Investasi SPMT Grup Tahun 2025. Discussion of the Proposed Revision of 2025 SPMT Group Investment Plan.
20	Jumat, 8 Agustus 2025 Friday, August 8, 2025	08.00 s.d 10.00 08.00 to 10.00	Rapat Pembahasan Formulasi dan Pemantauan *Key Risk Indicator* (KRI) Risiko Utama Tahun 2025. Meeting to Discuss the Formulation and Monitoring of Key Risk Indicators (KRI) for Key Risks in 2025.
21	Senin, 11 Agustus 2025 Monday, August 11, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan Implementasi Manajemen Risiko s.d Triwulan II Tahun 2025 dan *Update* Progres Penyusunan Profil Risiko RKAP Tahun 2026. Discussion of Risk Management Implementation until the Second Quarter of 2025 and Update on the Progress of Preparing the 2026 RKAP Risk Profile.
22	Senin, 11 Agustus 2025 Monday, August 11, 2025	13.00 s.d 16.00 13.00 to 16.00	Pembahasan profil dan strategi risiko tahun 2025 serta isu-isu strategis (persiapan rapat KTKT *Holding*). Discussion of the 2025 risk profile and strategy, as well as strategic issues (preparation for the KTKT Holding meeting).
23	Kamis, 14 Agustus 2025 Thursday, August 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Evaluasi Risiko Utama Triwulan II Tahun 2025; 2. Profil Risiko Utama Tahun 2026; 3. *Update* Hasil Pembahasan *Joint Procurement* KAP Tahun Buku 2025; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Evaluation of Key Risks for the Second Quarter of 2025; 2. Profile of Key Risks for 2026; 3. Update on the Results of Joint Procurement KAP Discussion for Fiscal Year 2025; 4. Other strategic matters.
24	Senin, 25 Agustus 2025 Monday, August 25, 2025	09.00 s.d 11.00 09.00 to 11.00	Pembahasan usulan revisi RKAP Investasi tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal. Discussion of the proposed revision of 2025 RKAP Investment Plan for PT Pelindo Multi Terminal.
25	Jumat, 12 September 2025 Friday, September 12, 2025	09.00 s.d 12.00 09.00 to 12.00	Sinkronisasi Penyusunan Usulan RKAP 2026 PT Pelindo Multi Terminal. Synchronization of Preparation of Proposed RKAP 2026 PT Pelindo Multi Terminal.
26	Rabu, 24 September 2025 Wednesday, September 24, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2025. Technical Meeting to Prepare for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until August 2025.
27	Kamis, 23 Oktober 2025 Thursday, October 23, 2025	14.00 s.d 16.00 14.00 to 16.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d September 2025. Technical Meeting to Prepare for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until September 2025.
28	Jumat, 14 November 2025 Friday, November 14, 2025	09.30 s.d 11.30 09.30 to 11.30	Pembahasan *Update* Perencanaan Risiko RKAP Tahun 2026. Discussion on the 2026 RKAP Risk Planning Update.
29	Senin, 17 November 2025 Monday, November 17, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Pembahasan Laporan Triwulan III SPI Tahun 2025; 2. Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) *Branch* Tahun 2025. 1. Discussion on the 2025 SPI Quarterly Report; 2. Discussion on the 2025 Branch Audit Result Report (LHA).
30	Selasa, 18 November 2025 Tuesday, November 18, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. *Update* Profil Risiko Triwulan III 2025. 2. *Update* Perencanaan Manajemen Risiko pada RKAP 2026. 3. *Update* Hasil Temuan Audit Internal s.d. Triwulan III 2025; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Risk Profile Update for the 2025 Quarterly. 2. Risk Management Planning Update for the 2026 RKAP. 3. Internal Audit Findings Update until the 3rd Quarter of 2025; 4. Other strategic matters.
31	Rabu, 19 November 2025 Wednesday, November 19, 2025	09.00 sd 17.00 09.00 to 17.00	Pembahasan Usulan RKAP Investasi Tahun 2026 pada Divisi Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan. Discussion of the Proposed 2026 Investment RKAP for the Port Equipment and Facilities Division.
32	Kamis, 20 November 2025 Thursday, November 20, 2025	09.00 sd 17.00 09.00 to 17.00	Pembahasan Investasi pada Divisi IT dan PT IKT Discussion of Investments in the IT Division and PT IKT.
33	Selasa, 16 Desember 2025 Tuesday, December 16, 2025	14.00 s.d 16.00 14.00 to 16.00	Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d November 2025. Preparation for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until November 2025.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi pendukung Dewan Komisaris dalam aspek nominasi dan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, serta manajemen kunci di lingkungan Perusahaan sesuai dengan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pada aspek nominasi, Komite melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi terkait pengisian jabatan, penugasan pegawai, kebutuhan struktur organisasi, serta penguatan organ Perusahaan yang disampaikan kepada induk perusahaan sesuai kewenangan yang berlaku. Komite juga memberikan masukan atas proses nominasi calon Direksi dan Komisaris anak perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan Sekretaris Perusahaan sesuai penugasan Dewan Komisaris.

Sementara itu, pada aspek remunerasi, Komite melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghasilan dan berbagai komponen kesejahteraan pegawai maupun manajemen, termasuk tunjangan, bonus kinerja, bantuan pendidikan, dan penghasilan lainnya. Penelaahan tersebut dilakukan untuk menjaga keselarasan antara sistem remunerasi, tingkat tanggung jawab jabatan, dan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Komite juga memantau pelaksanaan program pengembangan SDM, antara lain pelatihan, sertifikasi, asesmen kompetensi, serta program pengembangan talenta dan regenerasi kepemimpinan. Peningkatan kompetensi yang dilakukan bertujuan untuk mendorong pengembangan karier serta memperkuat *knowledge management* sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, Komite juga mendukung penguatan budaya kerja melalui internalisasi nilai AKHLAK melalui komunikasi internal dan *change management* di seluruh entitas Perusahaan.

Dengan demikian, sepanjang tahun 2025 Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi secara konsisten dalam mendukung penguatan tata kelola SDM dan efektivitas organisasi di lingkungan Perusahaan.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND ACTIVITIES OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, Nomination and Remuneration Committee supported the Board of Commissioners in the nomination and remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and key management within the Company in accordance with Good Corporate Governance practices.

In terms of nominations, the Committee reviewed and provided recommendations regarding position filling, employee assignments, organizational structure requirements, and strengthening of the Company's organs, which were submitted to the parent company in accordance with applicable authority. The Committee also provided input on the nomination process for candidates for Directors and Commissioners of subsidiaries, Head the Internal Audit Unit, and Corporate Secretary, as assigned by the Board of Commissioners.

Meanwhile, in terms of remuneration, the Committee evaluated the remuneration policy and various components of employee and management welfare, including allowances, performance bonuses, educational assistance, and other benefits. This review was conducted to maintain alignment between the remuneration system, the level of job responsibility, and the Company's business needs.

The Committee also monitored the implementation of human capital development programs, including training, certification, competency assessments, and talent development and leadership regeneration programs. The competency enhancement efforts aimed to encourage career development and strengthen knowledge management as part of knowledge management and continuous learning. Furthermore, the Committee supported the strengthening of work culture by internalizing AKHLAK values through internal communication and change management across all Company entities.

Therefore, throughout 2025, Nomination and Remuneration Committee has consistently carried out its supervisory and recommendation functions to strengthen HC governance and organizational effectiveness within the Company.

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan terhadap kebijakan maupun ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Pembentukan komite ini telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, pelaksanaan fungsi Komite Pemantau Risiko juga merujuk pada Pedoman Governansi Korporat Pelindo Grup sebagai pedoman internal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta implementasi tata kelola perusahaan di lingkungan operasional Perusahaan. Komite juga memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait langkah mitigasi risiko dan penguatan tata kelola secara berkelanjutan.

KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Persyaratan keanggotaan:
1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang manajemen risiko.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai ketentuan/peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bersedia menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

ESTABLISHMENT OF RISK MONITORING COMMITTEE

Risk Monitoring Committee was established to support the Board of Commissioners in carrying out its oversight function, particularly with regard to the implementation of risk management, corporate governance, and compliance with applicable policies and regulations within the Company.

The establishment of this committee is based on Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Furthermore, the Risk Monitoring Committee's functions are guided by Pelindo Group Corporate Governance Guidelines as an internal guideline.

In carrying out its duties, Risk Monitoring Committee reviews the effectiveness of risk management implementation, the adequacy of internal controls, regulatory compliance, and the implementation of corporate governance within the Company's operations. The Committee also provides input and recommendations to the Board of Commissioners regarding risk mitigation measures and the ongoing strengthening of corporate governance.

QUALIFICATIONS OF RISK MONITORING COMMITTEE MEMBERS

Membership requirements:
1. Possesses strong integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of risk management.
2. Have no personal interest/relationship that may cause negative impact and conflict of interest to the Company.
3. Possess adequate knowledge of the Company's business and be able to devote sufficient time to completing their duties.
4. Be able to collaborate and communicate effectively.
5. Be willing to continuously improve their competencies through training and certification in accordance with company policies and regulations and applicable laws and regulations.
6. Be willing to sign an integrity pact, which is a statement and commitment to comply with all applicable laws and regulations and the principles of good corporate governance.

MASA JABATAN

Masa penugasan anggota Komite ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota komite dapat ditunjuk kembali untuk periode berikutnya paling lama 2 (dua) tahun sesuai kebutuhan Perusahaan dan hasil evaluasi kinerja. Kemudian, pemberhentian anggota Komite dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

TENURE

The tenure of Committee members is determined by the Board of Commissioners, with a maximum term of 3 (three) years. Upon expiration of the term, Committee members may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, based on the Company's needs and the results of performance evaluations. Furthermore, the Board of Commissioners may dismiss Committee members at any time in accordance with applicable regulations.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, Komite Pemantau Risiko terdiri atas paling sedikit 1 (satu) anggota yang berasal dari Dewan Komisaris dan paling banyak 2 (dua) anggota yang berasal dari luar Dewan Komisaris. Adapun susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF RISK MONITORING COMMITTEE IN 2025

Based on the Guidelines for Governance of Supporting Organs of Board of Commissioners at PT Pelindo Multi Terminal, the Risk Monitoring Committee consists of at least 1 (one) member from Board of Commissioners and a maximum of 2 (two) members from outside Board of Commissioners. The composition of Risk Monitoring Committee is as follows:

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025
Composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Darwanto	Ketua/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Chairman/President Commissioner and Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal Board of Commissioners Decision No. KP 03 of 2025, dated September 26, 2025, regarding the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal	Sesuai dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisasris In accordance with the term of office as Board of Commissioners	
Nasrul Chair	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 05 Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 05 of 2023 dated March 2, 2023 on Appointment of Members of Integrated Governance and Risk Monitoring Committee of PT Pelindo Multi Terminal	2 Maret 2023 s.d 2 Maret 2026 March 2, 2023 to March 2, 2026	Ke- 1 1st
Bernardin Nainggolan	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 05 Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko PT Pelindo Multi Terminal Decree of Board of Commissioners No. KP 05 of 2023 dated March 2, 2023 on Appointment of Members of Integrated Governance and Risk Monitoring Committee of PT Pelindo Multi Terminal	2 Maret 2023 s.d 2 Maret 2026 March 2, 2023 to March 2, 2026	Ke- 1 1st

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE

Darwanto

Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Chairman of Risk Monitoring Committee/President Commissioner and Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Darwanto dapat dilihat bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Vice Chairman of Risk Monitoring Committee Darwanto can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Nasrul Chair

Anggota Komite Pemantau Risiko | Risk Monitoring Committee Members
Periode Jabatan: 2 Maret 2023 s.d 2 Maret 2026, Periode Ke-1
Period of Office: March 2, 2023 to March 2, 2026, 1st Period

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia : 52 tahun
Kelahiran : Jakarta, 23 Oktober 1973
Domisili : Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Personal Data

Indonesian citizen
Age : 52 years old
Born in : Jakarta, October 23, 1973
Domiciled in : South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Akuntansi, Akuntansi,Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, (2000);
2. Magister Management, Strategic and General Management¸ Binus University, (2010).

Education History

1. Bachelor of Accounting, Accounting, State College of Accountancy, (2000)
2. Master of Management, Strategic and General Management¸ Binus University, (2010)

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki dan Masih Berlaku

1. *Certified Risk Governance Professional* (CRGP), dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR);
2. *Certified Risk Professional* (CRP), dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM);
3. *Certification in Audit Committee Practices* (CACP), dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).

Valid Professional Certifications

1. Certified Risk Governance Professional (CRGP), from the Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
2. Certified Risk Professional (CRP), from the Capital Market Professional Certification Institute (LSPPM)
3. Certification in Audit Committee Practices (CACP), from the Indonesian Audit Committee Association (IKAI)

Riwayat Jabatan

1. Komite Nominasi Remunerasi & Manajemen Risiko, PT Pelindo I (Persero), (2019);
2. Partner, ETC Consulting, (2018);
3. Chief Special Project, PT Jaringan Prima Global, (2016);
4. Chief Operation Officer, PT B-Generasi Asia, (2013);
5. President Director & CEO, PT Lintasindo Operator, (2012);
6. General Manager, PT Semesta Marga Raya, (2007);
7. Senior Manager, PT Cakrawala Andalas Televisi, (2004);
8. Audit & Cost Controller Manager, Capital Managers Asia, (2002);
9. Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (1996).

Work Experience

1. Nomination Remuneration & Risk Management Committee, PT Pelindo I (Persero), (2019);
2. Partner, ETC Consulting, (2018);
3. Chief Special Project, PT Jaringan Prima Global, (2016);
4. Chief Operation Officer, PT B-Generasi Asia, (2013);
5. President Director & CEO, PT Lintasindo Operator, (2012);
6. General Manager, PT Semesta Marga Raya, (2007);
7. Senior Manager, PT Cakrawala Andalas Televisi, (2004);
8. Audit & Cost Controller Manager, Capital Managers Asia, (2002);
9. Auditor, Financial and Development Supervisory Agency, (1996).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perusahaan
Tidak ada.

Di luar Perusahaan:
Tidak ada.

Concurrent Positions

Within the Company:
None.

Outside the Company:
None.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Affiliations

Has no affiliation with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the major/controlling shareholder and the Government of Indonesia as the ultimate owner of the Company.

Bernardin Nainggolan

Anggota Komite Pemantau Risiko | Member of the Risk Monitoring Committee
Periode Jabatan: 2 Maret 2023 s.d 2 Maret 2026, Periode Ke-1
Period of Office: March 2, 2023 to March 2, 2026, 1st Period

Data Pribadi	**Period of Office: March 2, 2023 to March 2, 2026, 1st Period**
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Usia : 52 tahun	Age : 52 years old
Kelahiran : Jakarta, 21 September 1973	Born in : Jakarta, September 21, 1973
Domisili : Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia	Domiciled in : West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	**Education History**
1. Sarjana Teknik, Urban & Regional Planning, Institut Teknologi Bandung, (2001); 2. Pasca Sarjana Magister Manajemen, Financial Management, Universitas Pelita Harapan, (2005).	1. Bachelor of Engineering, Urban & Regional Planning, Bandung Institute of Technology, (2001) 2. Postgraduate Master of Management, Financial Management, Pelita Harapan University, (2005)
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki dan Masih Berlaku	**Valid Professional Certifications**
1. *Certified Risk Governance Professional* (CRGP), dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR); 2. *Certified Risk Management Professional* (CRMP), dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR); 3. *Financial Risk Manager* (FRM®), dari Global Association of Risk Professionals (GARP).	1. Certified Risk Governance Professional (CRGP), from the Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR). 2. Certified Risk Management Professional (CRMP), from the Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR). 3. Financial Risk Manager (FRM®), from the Global Association of Risk Professionals (GARP).
Riwayat Jabatan	**Work Experience**
1. Komite Nominasi Remunerasi & Manajemen Risiko, PT Pelindo I (Persero), (2021); 2. Komite Nominasi Remunerasi & Manajemen Risiko, PT Pelindo Multi Terminal, (2021); 3. Konsultan Independen Manajemen Risiko, PT Hutama Karya (Persero), (2019); 4. Konsultan Independen Manajemen Risiko, PT Pelindo III (Persero), (2017); 5. Konsultan Independen Manajemen Risiko, PT Antam (Persero) Tbk, (2017).	1. Remuneration & Risk Management Nomination Committee, PT Pelindo I (Persero), (2021) 2. Remuneration & Risk Management Nomination Committee, PT Pelindo Multi Terminal, (2021 3. Independent Risk Management Consultant, PT Hutama Karya (Persero) (2019) 4. Independent Risk Management Consultant, PT Pelindo III (Persero), (2017) 5. Independent Risk Management Consultant, PT Antam (Persero), Tbk, (2017)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Positions**
Di dalam Perusahaan Tidak ada.	**Within the Company:** None.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.	**Outside the Company:** None.
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.	Has no affiliation with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as the major/controlling shareholder and the Government of Indonesia as the ultimate owner of the Company.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi ketentuan independensi sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup tidak adanya hubungan afiliasi dengan Perusahaan maupun dengan manajemen yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan risiko.

Sebagai bentuk penerapan prinsip independensi dan integritas, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan pernyataan independensi yang terdokumentasi dan disajikan sebagaimana terlampir di bawah ini:

RISK MONITORING COMMITTEE INDEPENDENCE STATEMENT

All members of Risk Monitoring Committee are required to comply with independence requirements in accordance with applicable policies and regulations. These requirements include the absence of any affiliation with the Company or management that could affect the objectivity of the risk oversight function.

To demonstrate the application of the principles of independence and integrity, all members of Risk Monitoring Committee have submitted a documented independence statement, which is presented as attached below:

Pernyataan Independensi Independence Statement	Darwanto (Ketua Komite Pemantau Risiko) (Chairman of Risk Monitoring Committee)	Nasrul Chair (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee Member)	Bernadin Nainggolan (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee Member)
Tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan keuangan dengan Perusahaan atau dengan Manajemen Perusahaan. (Risk Monitoring Committee Member)	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Manajemen Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas sebagai Komite Pemantau Risiko. Has no family relationship with the Company's Management that may affect independence in carrying out duties as Risk Monitoring Committee	√	√	√
Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Pemantau Risiko. Has sufficient knowledge and skills to carry out duties and responsibilities as Risk Monitoring Committee.	√	√	√
Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif dan independen. Will carry out duties and responsibilities objectively and independently	√	√	√
Tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu. Will not utilize the position in the Company, either directly or indirectly for personal interests, family and relatives, or certain groups	√	√	√
Berkomitmen untuk menjaga independensi dan integritas sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Committed to maintaining independence and integrity as a Member of Risk Monitoring Committee in carrying out duties and responsibilities.	√	√	√

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui Surat Penetapan Dewan Komisaris Nomor KPR-01/DK/PLMT/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT Pelindo Multi Terminal.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perusahaan Induk maupun Anak Perusahaan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan Induk dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan;

RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

The duties and functions of Risk Monitoring Committee are guided by the Risk Monitoring Committee Charter, established through the Board of Commissioners' Decree No. KPR-01/DK/PLMT/V/2024 dated May 7, 2024, concerning the Risk Monitoring Committee Charter of PT Pelindo Multi Terminal.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties and Responsibilities

1. Monitor and review Risk Management reports and other reports related to the implementation of Risk Management for both the Parent Company and Subsidiaries;
2. Monitor and evaluate the appropriateness of the implementation of Risk Management policies and strategies for the Parent Company and Subsidiaries;
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of Risk Management implementation and the alignment between the Parent Company's Risk Management policies and those of its Subsidiaries;

4. Melakukan analisis atas kajian risiko yang disampaikan Direksi terhadap aksi korporasi, rencana investasi yang material, rencana kerjasama dengan pihak ketiga atau rencana strategis perusahaan lainnya yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Melakukan analisis atas kajian risiko RJPP dan RKAP yang diajukan oleh Direksi.
6. Melakukan evaluasi atas informasi risiko yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dalam laporan laporan triwulanan, laporan tahunan dan laporan non rutin lainnya.
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri
8. Membantu Dewan Komisaris terkait dengan fungsi pengawasan/pemberian nasihat terhadap pelaksanaan tata kelola terintegrasi Perusahaan.

Wewenang

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko.
2. Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja, karyawan, Direksi dan pihak lain dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan
3. Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya perusahaan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
4. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat membentuk suatu tim yang bersifat *adhoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.
5. Menerima secara rutin laporan dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi terkait lainnya secara periodik baik bulanan, triwulanan dan tahunan sesuai kebutuhan penugasan.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan mendukung peningkatan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh lembaga eksternal. Seluruh biaya atas pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

Bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari unsur Dewan Komisaris, informasi mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi telah disampaikan pada subbab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris.

Adapun sepanjang tahun 2025, anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Dewan Komisaris turut mengikuti sejumlah program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagaimana terlampir berikut ini:

4. Analyze risk assessments submitted by the Board of Directors regarding corporate actions, material investment plans, planned collaborations with third parties, or other company strategic plans within the Board of Commissioners' supervisory authority.
5. Analyze the risk assessment of the RJPP and RKAP submitted by the Board of Directors.
6. Evaluate risk information submitted by the Risk Management Division in quarterly reports, annual reports, and other non-routine reports.
7. Monitor and evaluate the implementation of other Risk Management functions in accordance with laws and regulations, the articles of association, and/or GMS/ Ministerial decisions.
8. Assist the Board of Commissioners in its supervisory and advisory functions regarding the implementation of the Company's integrated governance.

Authorities

1. Access all relevant information about the Company related to the duties and functions of the risk monitoring committee.
2. Communicate with heads of work units, employees, the Board of Directors, and other parties within the Company to obtain information, clarification, and request necessary documents and reports.
3. If necessary, the Committee may engage experts and/or consultants/independent parties other than Committee members to assist in the implementation of its duties, at the Company's expense, with written approval from the Board of Commissioners.
4. If necessary, in carrying out its duties, the Committee may form an ad hoc team, with criteria and assignment periods tailored to the needs and type of work.
5. Regularly receive reports from the Risk Management Division and other relevant Divisions on a monthly, quarterly, and annual basis, as required by the assignment.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR RISK MONITORING COMMITTEE

The Company supports the competency development of Risk Monitoring Committee members through participation in various training and development programs, both internally and externally organized. All costs for these activities are borne by the Company.

For Risk Monitoring Committee members from the Board of Commissioners, information regarding training and competency development is presented in the subsection "Board of Commissioners Competency Development."

Throughout 2025, Risk Monitoring Committee members from outside the Board of Commissioners participated in several training and competency development programs, as outlined below:

Nama dan Jabatan Name and Title	Materi Pelatihan Training Subject	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Narsrul Chair	Konfrensi Nasional Professional Manajemen Risiko XI XI National Conference of Risk Management Professionals	27-28 November 2025 November 27-28, 2025	LSP Manajemen Risiko
Bernardin Nainggolan	Konfrensi Nasional Professional Manajemen Risiko XI XI National Conference of Risk Management Professionals	27-28 November 2025 November 27-28, 2025	LSP Manajemen Risiko

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko mengacu pada Piagam/*Charter* Komite. Pedoman tersebut mengatur mekanisme penyelenggaraan rapat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan risiko dan tata kelola Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat komite diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan, bilamana diperlukan, dapat didelegasikan kepada salah satu anggota yang hadir.
4. Rapat dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memfasilitasi semua peserta rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Keputusan rapat komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Keputusan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite, termasuk Ketua Komite.
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite, termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapa pun.
9. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan risalah rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

Policy

Provisions regarding the implementation of Risk Monitoring Committee meetings refer to the Committee Charter. These guidelines govern the mechanism for holding meetings as part of the Company's risk oversight and governance functions, with the following provisions:

1. Committee meetings are held periodically, at least once every three months.
2. If deemed necessary, the Committee may invite other parties related to the meeting material to attend with prior approval from the Board of Commissioners.
3. Meetings are chaired by the Committee Chairman and, if necessary, may be delegated to one of the attending members.
4. Meetings may be held via teleconference, videoconference, or other electronic means that facilitate the direct viewing and hearing of all Committee meeting participants and their participation.
5. Committee meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by majority vote.
6. Meeting decisions are declared valid if attended by at least 51% of the Committee members, including the Committee Chairman.
7. Everything discussed and decided at Committee meetings, including dissenting opinions, is recorded in written minutes of the meeting, signed by all Committee members present, as valid evidence of the decisions made at the meeting, and submitted to the Board of Commissioners.
8. Each Committee member is given the broadest possible freedom to express their professional opinions in the discussion of each meeting agenda without any intervention.
9. Each Committee member has the right to receive a copy of the meeting minutes, even if they are not present at the meeting.

PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat dengan frekuensi sebanyak 33 kali. Berikut risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite Pemantau Risiko sebagaimana terlampir di bawah ini:

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF RISK MONITORING COMMITTEE MEMBERS

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee held 33 meeting. The minutes and attendance summary of the Risk Monitoring Committee meetings are attached below:

Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat
Risk Monitoring Committee Attendance Level at Meetings

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attendance (%)
Thanon Aria Dewangga (Ketua)* | (Chairman)	24	24	100%
Darwanto (Ketua)** | (Chairman)	9	9	100%
Nasrul Chair (Anggota) | (Member)	33	33	100%
Bernadin Nainggolan (Anggota) | (Member)	33	33	100%
Rata-rata Average			**100%**

*) Berhenti menjabat sejak 27 Agustus 2025 | Stopped Serves since August 27, 2025.
**) Menjabat sejak 27 Agustus 2025 | Served since August 27, 2025.

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes of Risk Monitoring Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Selasa, 7 Januari 2025 Tuesday, January 7, 2025	10.00 s.d 13.00 10.00 to 13.00	Rapat Pembahasan Usulan PKPT 2025 SPI dan Piagam Audit Internal Perusahaan. Meeting to Discuss the Proposed 2025 Internal Audit Work Plan and the Company's Internal Audit Charter.
2	Selasa, 14 Januari 2025 Tuesday, January 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Interim Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2024 PT Pelindo Multi Terminal periode sampai dengan 30 September 2024. Discussion of the Interim Audit Report of 2024 Consolidated Financial Statements of PT Pelindo Multi Terminal for the period up to September 30, 2024.
3	Selasa, 14 Januari 2025 Tuesday, January 14, 2025	13.30 s.d 16.00 13.30 to 16.00	Rapat Pembahasan Finalisasi Laporan *Asessment* GCG Tahun Buku 2023. Meeting to Discuss the Finalization of GCG Assessment Report for 2023 Fiscal Year.
4	Rabu, 15 Januari 2025 Wednesday, January 15, 2025	10.00 s.d 14.00 10.00 to 14.00	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Usulan PKPT 2025 SPI dan Piagam Audit Internal Perusahaan. Follow-up Meeting to Discuss the Proposed 2025 Internal Audit Work Plan and the Company's Internal Audit Charter.
5	Kamis, 16 Januari 2025 Thursday, January 16, 2025	10.00 s.d 11.30 10.00 to 11.30	Rapat Pembahasan *Update Draft* RJP SPMT Tahun 2025-2029 . Meeting to Discuss the Update Draft of 2025-2029 SPMT Long-Term Plan.
6	Senin, 20 Januari 2025 Monday, January 20, 2025	10.00 s.d 11.30 10.00 to 11.30	Rapat Pembahasan Lanjutan terkait Usulan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan Laporan Implementasi Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024. Further Discussion Meeting regarding the Proposed Internal Audit Charter and the Risk Management Implementation Report for Quarter IV of 2024.
7	Kamis, 23 Januari 2025 Thursday, January 23, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan usulan RKAP 2025. Discussion of the proposed 2025 RKAP.
8	Jumat, 31 Januari 2025 Friday, January 31, 2025	09.00 s.d 12.00 09.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Laporan Kinerja dan Keuangan s.d Bulan Desember 2024. Technical Meeting to Prepare the Board Coordination Meeting for the Performance and Financial Reports until December 2024.
9	Selasa, 4 Februari 2025 Tuesday, February 4, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Laporan Kinerja s.d Bulan Desember 2024 (khusus untuk Investasi dan Keuangan). Technical Meeting to Prepare the Board Coordination Meeting for Performance Reports until December 2024 (specifically for Investment and Finance).

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes of Risk Monitoring Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
10	Senin, 17 Februari 2025 Monday, February 17, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian atas Konsep Temuan BPK; 2. *Update* profil dan strategi risiko tahun 2025; 3. *Update* pembahasan RJPP *Subholding* dan *Holding* 2025-2029; 4. Pembahasan Tata Kelola/Kebijakan terkait Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis; 5. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Matters Requiring Attention Regarding BPK's Conceptual Findings; 2. Update on the 2025 risk profile and strategy; 3. Update on the discussion of 2025-2029 Subholding and Holding Long-Term Plan; 4. Discussion on Governance/Policies Related to Strategic Decision-Making Mechanisms; 5. Other Strategic Issues.
11	Kamis, 27 Februari 2025 Thursday, February 27, 2025	10.30 s.d 12.00 10.30 to 12.00	Rapat Laporan Triwulan IV Tahun 2024 SPI dan Manajemen Risiko. Fourth Quarter 2024 Report Meeting for Internal Audit and Risk Management.
12	Senin, 14 April 2025 Monday, April 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis pembahasan Strategi Risiko dan Profil Risiko Korporat SPMT Tahun 2025. Technical Meeting to discuss the Risk Strategy and Corporate Risk Profile for the 2025 SPMT.
13	Senin, 28 April 2025 Monday, April 28, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Bulan April 2025. Technical Meeting to Prepare for the April 2025 Board Coordination Meeting.
14	Rabu, 7 Mei 2025 Wednesday, May 7, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Diskusi Persiapan Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Triwulan I 2025. Discussion Meeting to Prepare the Agenda for the First Quarter 2025 Integrated Governance Committee (KTKT) Meeting.
15	Jumat, 23 Mei 2025 Friday, May 23, 2025	09.00 s.d 11.00 09.00 to 11.00	Rapat Tindak Lanjut Rakomdir khusus HSSE dan SDM. Follow-up Meeting for the HSSE and HC Coordination Meeting.
16	Senin, 26 Mei 2025 Monday, May 26, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. *Update* Pembahasan Tindak Lanjut Insiden Kemacetan Tanjung Priok; 2. *Update* Laporan Hasil Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2024; 3. *Update* terkait Arahan Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN/Anak Usaha BUMN dari Danantara; 4. Isu-isu Strategis Lainnya. 1. Update on the Discussion on Follow-up to Tanjung Priok Traffic Jam Incident; 2. Update on the 2024 Anti-Bribery Management System Implementation Report; 3. Update on the Directions for the Implementation of GMS and Corporate Actions for SOEs/SOE Subsidiaries from Danantara; 4. Other Strategic Issues.
17	Rabu, 4 Juni 2025 Wednesday, June 4, 2025	13.30 s.d 16.00 13.30 to 16.00	Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Aksi Korporasi Pembelian 1 (satu) Unit HMC milik PT PIL. Request for Approval for the Implementation of Corporate Action of Purchasing 1 (one) HMC Unit belonging to PT PIL.
18	Kamis, 26 Juni 2025 Thursday, June 26, 2025	15.00 s.d 17.00 15.00 to 17.00	Pembahasan Tindak Lanjut terkait Hasil *Workshop* Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelaporan Keuangan. Follow-up discussion regarding the results of the Workshop on Strengthening Internal Control-Based Supervisory Governance to Improve the Integrity and Quality of Financial Reporting.
19	Jumat, 8 Agustus 2025 Friday, August 8 2025	10.30 s.d 11.30 10.30 to 11.30	Pembahasan Usulan Revisi Investasi SPMT Grup Tahun 2025. Discussion of the Proposed Revision of 2025 SPMT Group Investment Plan.
20	Jumat, 8 Agustus 2025 Friday, August 8, 2025	08.00 s.d 10.00 08.00 to 10.00	Rapat Pembahasan Formulasi dan Pemantauan *Key Risk Indicator* (KRI) Risiko Utama Tahun 2025. Meeting to Discuss the Formulation and Monitoring of Key Risk Indicators (KRI) for Key Risks in 2025.
21	Senin, 11 Agustus 2025 Monday, August 11, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Pembahasan Implementasi Manajemen Risiko s.d Triwulan II Tahun 2025 dan *Update* Progres Penyusunan Profil Risiko RKAP Tahun 2026. Discussion of Risk Management Implementation until the Second Quarter of 2025 and Update on the Progress of Preparing the 2026 RKAP Risk Profile.
22	Senin, 11 Agustus 2025 Monday, August 11, 2025	13.00 s.d 16.00 13.00 to 16.00	Pembahasan profil dan strategi risiko tahun 2025 serta isu-isu strategis (persiapan rapat KTKT *Holding*). Discussion of the 2025 risk profile and strategy, as well as strategic issues (preparation for the KTKT Holding meeting).

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes of Risk Monitoring Committee Meeting

No	Hari/Tanggal Day/Date	Pukul Time	Agenda Rapat Meeting Agenda
23	Kamis, 14 Agustus 2025 Thursday, August 14, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Evaluasi Risiko Utama Triwulan II Tahun 2025; 2. Profil Risiko Utama Tahun 2026; 3. *Update* Hasil Pembahasan *Joint Procurement* KAP Tahun Buku 2025; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Evaluation of Key Risks for the Second Quarter of 2025; 2. Profile of Key Risks for 2026; 3. Update on the Results of Joint Procurement KAP Discussion for Fiscal Year 2025; 4. Other strategic matters.
24	Senin, 25 Agustus 2025 Monday, August 25, 2025	09.00 s.d 11.00 09.00 to 11.00	Pembahasan usulan revisi RKAP Investasi tahun 2025 PT Pelindo Multi Terminal. Discussion of the proposed revision of 2025 RKAP Investment Plan for PT Pelindo Multi Terminal.
25	Jumat, 12 September 2025 Friday, September 12, 2025	09.00 s.d 12.00 09.00 to 12.00	Sinkronisasi Penyusunan Usulan RKAP 2026 PT Pelindo Multi Terminal. Synchronization of Preparation of Proposed RKAP 2026 PT Pelindo Multi Terminal.
26	Rabu, 24 September 2025 Wednesday, September 24, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2025. Technical Meeting to Prepare for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until August 2025.
27	Kamis, 23 Oktober 2025 Thursday, October 23, 2025	14.00 s.d 16.00 14.00 to 16.00	Rapat Teknis Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d September 2025. Technical Meeting to Prepare for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until September 2025.
28	Jumat, 14 November 2025 Friday, November 14, 2025	09.30 s.d 11.30 09.30 to 11.30	Pembahasan *Update* Perencanaan Risiko RKAP Tahun 2026. Discussion on the 2026 RKAP Risk Planning Update.
29	Senin, 17 November 2025 Monday, November 17, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. Pembahasan Laporan Triwulan III SPI Tahun 2025; 2. Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) *Branch* Tahun 2025. 1. Discussion on the 2025 SPI Quarterly Report; 2. Discussion on the 2025 Branch Audit Result Report (LHA).
30	Selasa, 18 November 2025 Tuesday, November 18, 2025	10.00 s.d 12.00 10.00 to 12.00	1. *Update* Profil Risiko Triwulan III 2025. 2. *Update* Perencanaan Manajemen Risiko pada RKAP 2026. 3. *Update* Hasil Temuan Audit Internal s.d. Triwulan III 2025; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Risk Profile Update for the 2025 Quarterly. 2. Risk Management Planning Update for the 2026 RKAP. 3. Internal Audit Findings Update until the 3rd Quarter of 2025; 4. Other strategic matters.
31	Rabu, 19 November 2025 Wednesday, November 19, 2025	09.00 sd 17.00 09.00 to 17.00	Pembahasan Usulan RKAP Investasi Tahun 2026 pada Divisi Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan. Discussion of the Proposed 2026 Investment RKAP for the Port Equipment and Facilities Division.
32	Kamis, 20 November 2025 Thursday, November 20, 2025	09.00 sd 17.00 09.00 to 17.00	Pembahasan Investasi pada Divisi IT dan PT IKT Discussion of Investments in the IT Division and PT IKT.
33	Selasa, 16 Desember 2025 Tuesday, December 16, 2025	14.00 s.d 16.00 14.00 to 16.00	Persiapan Rakomdir Pembahasan Kinerja s.d November 2025. Preparation for the Board Coordination Meeting on Performance Discussion until November 2025.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko menjalankan fungsi pendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan maupun entitas anak. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penelaahan atas efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan fungsi kepatuhan, serta penerapan kebijakan manajemen risiko secara terintegrasi.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND ACTIVITIES OF RISK MONITORING COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, Risk Monitoring Committee supported the Board of Commissioners in overseeing the implementation of integrated governance and risk management within the Company and its subsidiaries. This function was implemented through reviews of the effectiveness of internal controls, compliance functions, and the implementation of integrated risk management policies.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai unit kerja, antara lain Audit Internal, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, serta fungsi operasional terkait lainnya sesuai kebutuhan pengawasan.

Komite juga melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan pendukung lainnya, baik pada Perusahaan Induk maupun Anak Perusahaan. Selain itu, Komite Pemantau Risiko turut mengevaluasi kesesuaian penerapan kebijakan manajemen risiko di seluruh entitas usaha serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pengelolaan risiko dan penyelarasan kebijakan antarentitas di lingkungan Perusahaan.

In carrying out its duties, Risk Monitoring Committee coordinated and communicated with various work units, including Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Capital, and other relevant operational functions as needed for oversight.

The Committee also monitored and reviewed risk management reports and other supporting reports, both at the Parent Company and its subsidiaries. In addition, Risk Monitoring Committee evaluated the appropriateness of the implementation of risk management policies across all business entities and provided recommendations to the Board of Commissioners to support the effectiveness of risk management and the alignment of policies between entities within the Company.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk mendukung Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan serta koordinasi Dewan Komisaris. Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan biaya yang ditanggung oleh Perusahaan.

Secretary of Board of Commissioners is responsible for supporting the Board of Commissioners by providing administrative and secretarial support to ensure the smooth implementation of activities and coordination within the Board of Commissioners. Secretary of Board of Commissioners is appointed by the Board of Commissioners, with expenses borne by the Company.

KETENTUAN MASA JABATAN

Jangka waktu penugasan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun. Setelah masa penugasan berakhir, yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk periode paling lama 2 (dua) tahun pada Perusahaan yang sama sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, Dewan Komisaris tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

TENURE

The tenure of Secretary of Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners, with a maximum term of three years. Upon expiration, the Secretary may be reappointed for a maximum period of two years within the same Company, as needed by the organization. Furthermore, the Board of Commissioners retains the authority to dismiss the Secretary at any time in accordance with applicable regulations.

PEJABAT SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan 31 Desember 2025, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal diemban oleh Triza Noviasari berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 11 Tahun 2024 tanggal 11 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS OFFICIAL

Until December 31, 2025, the position of Secretary of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal is held by Triza Noviasari, based on Board of Commissioners Decree Number KP 11 of 2024 dated November 11, 2024, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of Board of Commissioners of PT Pelindo Multi Terminal.

Triza Noviasari

Sekretaris Dewan Komisaris | Secretary of Board of Commissioners
Menjabat Sejak 11 November 2024
In Office Since November 11, 2024

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia : 39 tahun
Kelahiran : Padang, 1 Januari 1986
Domisili : Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Personal Data

Indonesian citizen
Age : 39 years old
Born in : Padang, January 1, 1986
Domiciled in : West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. S2 Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia;
2. S1 Ekonomi, Universitas Andalas.

Educational Background

1. Master of Financial Management, University of Indonesia
2. Bachelor of Economics, Andalas University

Riwayat Jabatan

1. Analis SDM Aparatur Muda pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian (Agustus 2021 - Sekarang);
2. Subkoordinator Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian (Juni 2021 - Sekarang);
3. Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIa-1 (Juli 2017 - Juni 2020);
4. Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat pada Bagian Humas dan Protokol (September 2016 - Juli 2017).

Work Experience

1. Junior Apparatus Human Resources Analyst at the Bureau of Planning, Organization and Personnel (August 2021-present)
2. Sub-coordinator of Organization and Administration at the Bureau of Planning, Organization and Personnel (June 2021-present)
3. Head of Construction Business Sub-Division and Transportation Facilities and Infrastructure IIa-1 (July 2017-June 2020)
4. Head of Inter-Institutional and Community Relations Sub-Division at the Public Relations and Protocol Section (September 2016-Jul9 2017)

Selain pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administratif dan operasional, Dewan Komisaris juga menetapkan Staf Sekretariat Dewan Komisaris dan Staf Komite Dewan Komisaris, yang masing-masing beranggotakan 2 (dua) orang.

Penetapan Staf Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 01 Tahun 2025 tanggal 1 April 2025, dengan susunan sebagai berikut:

1. Amelya Rahma Maulida; dan
2. Muhammad Zidan Anugrah Sandi.

Sementara itu, penetapan Staf Komite Dewan Komisaris dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 02 Tahun 2025 tanggal 1 April 2025, dengan susunan sebagai berikut:

1. Elysa Andelany Ayuningtias; dan
2. M. Resa Dio Putra.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, salinan risalah rapat, maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
7. Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:
8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
10. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
11. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
12. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.

PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Perusahaan menyediakan dukungan bagi Sekretaris Dewan Komisaris untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, seperti seminar, pelatihan, maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, dengan fasilitas yang ditanggung oleh Perusahaan.

In addition to appointing the Secretary of Board of Commissioners, to support the smooth implementation of administrative and operational duties, Board of Commissioners also appoints the Board of Commissioners Secretariat Staff and the Board of Commissioners Committee Staff, each consisting of two members.

The appointment of Board of Commissioners Secretariat Staff was conducted through Board of Commissioners Decree Number KP 01 of 2025 dated April 1, 2025, with the following composition:

1. Amelya Rahma Maulida; and
2. Muhammad Zidan Anugrah Sandi.

Meanwhile, the appointment of the Board of Commissioners Committee Staff was conducted through Board of Commissioners Decree Number KP 02 of 2025 dated April 1, 2025, with the following composition:

1. Elysa Andelany Ayuningtias; and
2. M. Resa Dio Putra.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Secretary of Board of Commissioners carries out the following duties:

1. Prepare the meetings, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget;
5. Drafting the Board of Commissioners Reports.
6. Carry out other assignment from Board of Commissioners.
7. Secretary of Board of Commissioners also carries out other duties as follows:
8. Ensuring that Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies the principles of GCG;
9. Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
10. Coordinate members of the Committee, if necessary, in order to expedite the Board of Commissioners duties;
11. Act as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.
12. Ensure that documents for organizing activities are properly stored in the Company.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND/ OR COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company provides support for Secretary of Board of Commissioners to participate in various competency development programs, such as seminars, training, and other capacity-building activities, with facilities covered by the Company.

Adapun sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris turut mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagaimana terlampir berikut ini:

Throughout 2025, the Secretary of Board of Commissioners also participated in a training and competency development program, as outlined below:

Nama dan Jabatan Name and Title	Materi Pelatihan Training Subject	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Triza Noviasari (Sekretaris Dewan Komisaris) (Secretary of Board of Commissioners)	Pelatihan *Regulatory Impact Assessment* Regulatory Impact Assessment Training	29-31 Oktober 2025 October 29-31, 2025	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2025

1. Memberikan dukungan tugas dalam pengesahan rencana kerja.
2. Memberikan dukungan tugas dalam administrasi dan pelaksanaan program kerja/kegiatan Dewan Komisaris.
3. Memberikan dukungan tugas dalam pemberian persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris.
4. Memberikan dukungan tugas dalam kegiatan pengawasan Dewan Komisaris.

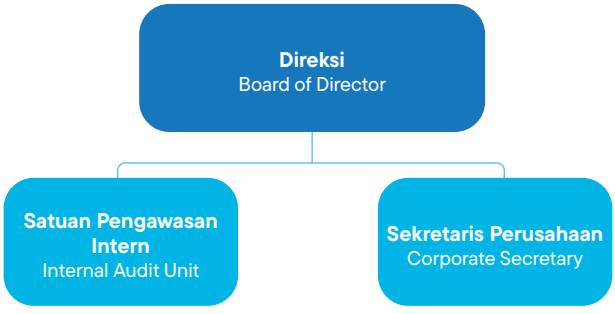
2025 ACTIVITY REPORT

1. Provided support in the approval of the work plan.
2. Provided support in the administration and implementation of the Board of Commissioners' work programs/activities.
3. Provided support in providing approvals/responses to the Board of Commissioners.
4. Provided support in the oversight activities of the Board of Commissioners.

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of Board of Directors

Sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola perusahaan, Direksi dibantu oleh 2 (dua) organ pendukung, yang terdiri atas Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

In its efforts to optimize the implementation of corporate governance, the Board of Directors is supported by 2 (two) supporting organs, comprising the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai upaya memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Sekretaris Perusahaan memegang peran sebagai penghubung utama antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Fungsi ini tidak hanya mencakup koordinasi antarorgan Perusahaan, tetapi juga memastikan komunikasi dengan pemegang saham, regulator, dan publik berjalan secara efektif dan selaras dengan kepentingan Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

To strengthen the implementation of Good Corporate Governance, Corporate Secretary serves as the primary liaison between the Company and its stakeholders. This function encompasses not only coordination between the Company's organs but also ensures effective communication with shareholders, regulators, and the public and aligns with the Company's interests.

Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung keterbukaan informasi dan pengelolaan komunikasi korporasi. Dengan keterlibatan pada berbagai informasi strategis dan material Perusahaan, Sekretaris Perusahaan turut mendukung terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika bisnis.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berada di bawah koordinasi langsung Direksi dalam mendukung pelaksanaan fungsi tata kelola dan komunikasi korporasi Perusahaan. Pengangkatan maupun pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan melalui Keputusan Direksi sesuai mekanisme internal yang berlaku, dengan memperhatikan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pengangkatan dan Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Hingga akhir tahun 2025, jabatan Sekretaris Perusahaan diemban oleh Finan Syaifullah selaku Senior Vice President Sekretariat Perusahaan. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24.

Corporate Secretary also plays a role in maintaining compliance with applicable regulations, while supporting information transparency and corporate communications management. By participating in various strategic and material Company information, Corporate Secretary contributes to the creation of transparent, accountable, and responsive corporate governance to business dynamics.

Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

Corporate Secretary is directly coordinated by the Board of Directors in supporting the implementation of the Company's corporate governance and communications functions. The appointment and dismissal of Corporate Secretary is made through a Board of Directors Decree in accordance with applicable internal mechanisms, with approval from the Board of Commissioners.

Appointment and Profile of Corporate Secretary

Until the end of 2025, the position of Corporate Secretary is held by Finan Syaifullah, Senior Vice President of Corporate Secretariat. This determination was made based on the Board of Directors Decree Number KP.10.05/1/8/3/RKTK/SDMA/PLND-24.

Finan Syaifullah

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan | Senior Vice President Corporate Secretariat
Menjabat Sejak 1 Agustus 2024
In office since August 1, 2024

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia : 44 tahun
Kelahiran : Bogor, 10 Maret 1981
Domisili : Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Personal Data

Indonesian citizen
Age : 44 years old
Born in : Bogor, March 10, 1981
Domiciled in : Bogor, West Java, Indonesia

Bergabung di PMT

1 Agustus 2024

Joining PMT

August 1, 2024

Riwayat Pendidikan

1. S2 International Transport & Logistics, Shanghai Maritime University-Shanghai (2014);
2. S2 Manajemen Pemasaran, Universitas Trisakti Jakarta (2009);
3. D4 Tatalaksana Angkatan Laut dan Kepelabuhanan, STIP Jakarta (2003).

Educational History

1. Master of International Transport & Logistics, Shanghai Maritime University-Shanghaii (2014)
2. Master of Marketing Management, Trisakti University Jakarta (2009)
3. D4 Naval and Port Management, STIP Jakarta (2003)

Riwayat Jabatan

1. SVP PT Pelindo Multi Terminal (2024 - Sekarang);
2. SM Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok (2023 – 2024);
3. SM Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok (2021 – 2023);
4. Corporate Secretary & Hubungan Eksternal IPC Terminal Petikemas (2017 – 2020);
5. Pj. Asman. Kesekretariatan & Antar Lembaga PTP (2014 – 2017);
6. Staf Hubungan Antar Lembaga Senior (2012);
7. Staf Hubungan Antar Lembaga Senior (2009).

Work Experience

1. SVP of PT Pelindo Multi Terminal (2024-present)
2. SVP Corporate Secretary & External Relations of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2022-2024)
3. SVP Business Development PT Pelabuhan Tanjung Priok (2020-2022)
4. Corporate Secretary & External Relations IPC Terminal Petikemas (2017-2020)
5. Act. Asst Manager Secretariat & Inter-Agency of PTP (2014-2016)
6. Senior Inter-Agency Relations Officer (2012)
7. Senior Inter-Agency Relations Officer (2009)

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup fungsi dan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan, berikut disajikan struktur organisasi Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal per 31 Desember 2025:

Corporate Secretary Organizational Structure

To illustrate the scope of the Corporate Secretary's functions and duties, the following is the organizational structure of Corporate Secretariat of PT Pelindo Multi Terminal as of December 31, 2025:

Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Division Organizational Structure



Hingga akhir tahun 2025, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretariat Perusahaan sebanyak 22 orang.

By the end of 2025, the number of employees in the Corporate Secretariat unit was 22 people.

Jabatan Position	**Jumlah (orang)** Amount (people)
SVP Sekretariat Perusahaan SVP Corporate Secretary	1
VP Korporasi Komunikasi dan Protokoler VP Corporate Communications and Protocol	1
VP Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor VP Governance, Institutional and Investor Relations	1
VP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan VP Social and Environmental Responsibility	1
Staf Komunikasi Korporasi dan Protokoler Corporate Communication and Protocol Staf	6
Sekretaris Direksi* Secretary of Board of Directors*	6
Personal Assistant Direksi Personal Assistant of Board of Directors	1
Staf Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor Governance, Institutional Relations and Investors Staf	2
Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Staf	3
Jumlah Total	**22**

* terhitung sejak 1 oktober s.d 31 desember 2025, perusahaan tidak memiliki personil yang menduduki jabatan sekretaris direksi
* From 1 October to 31 December 2025, the Company did not have personnel holding the position of Corporate Secretary.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan KPI sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait komunikasi Perusahaan, penerapan tata kelola korporasi, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga dan tanggung jawab sosial;
2. Bertanggung jawab untuk memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
3. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
4. Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan, termasuk dalam mengikuti *Annual Report Award* (ARA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bertanggung jawab sebagai penghubung (*liaison officer*) untuk membina hubungan dengan lembaga/instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah pada skala nasional;
6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi, dan penyusunan risalah rapat Direksi;
7. Bertanggung jawab menatausahakan serta menyimpan dokumen yang meliputi: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan risalah RUPS Perusahaan;
8. Bertanggung jawab untuk melakukan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat;
9. Bertanggung jawab terhadap pembentukan citra Perusahaan baik pada internal maupun eksternal;
10. Bertanggung jawab menyusun dan mengimplementasikan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), pedoman hubungan Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*), Kode Etik Perusahaan, *Whistleblowing System* (WBS);
11. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
12. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan tata usaha Direksi dan Dewan Komisaris;
13. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan hubungan lembaga dengan Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;
14. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Intern; dan
15. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam mendukung peningkatan kapabilitas, Perusahaan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, seperti seminar, pelatihan, *workshop*, maupun kegiatan peningkatan wawasan lainnya. Seluruh pelaksanaan kegiatan

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

1. Responsible for formulating policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and KPIs in relation to their main duties and responsibilities related to corporate communications, implementation of corporate governance, protocol and administration of the Board of Directors, institutional relations and social responsibility;
2. Responsible for ensuring compliance with regulations regarding information disclosure requirements in line with the application of the principles of good corporate governance;
3. Responsible for providing information needed by Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
4. Responsible for coordinating the preparation of Quarterly and Annual Management Reports, including participating in the Annual Report Award (ARA) in accordance with applicable regulations;
5. Responsible as a liaison officer to foster relations with government and/or non-government agencies/agencies on a national scale;
6. Responsible for organizing Board of Directors meetings, procuring Board of Directors meeting materials and preparing minutes of Directors meetings;
7. Responsible for administering and storing documents which include: Register of Shareholders, Special List and minutes of meetings of Board of Directors, meetings of Board of Commissioners and minutes of the Company's GMS;
8. Responsible for conducting Company introduction programs to newly appointed members of Board of Directors and Board of Commissioners;
9. Responsible for the formation of the Company's image both internally and externally;
10. Responsible for compiling and implementing Good Corporate Governance (GCG) guidelines, guidelines for the relationship between Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual), Company Code of Conduct, Whistle Blowing System (WBS).
11. Responsible for managing the Social and Environmental Responsibility (CSR) activity program;
12. Responsible for managing the administration of Board of Directors and Board of Commissioners;
13. Responsible for managing institutional relations with National Government and/or non-Government Agencies, including facilitating communication with potential partners/investors;
14. Responsible for following up recommendations on findings from the Internal Audit Unit; and
15. Responsible for reporting to the President Director on the implementation of their main duties and responsibilities.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF CORPORATE SECRETARY

To support capability enhancement, the Company provides opportunities for Corporate Secretaries to participate in various competency development programs, such as seminars, training, workshops, and other insight-enhancing activities. All of these activities are facilitated by the

tersebut difasilitasi oleh Perusahaan sebagai bagian dari penguatan fungsi tata kelola dan komunikasi korporasi. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Company as part of strengthening corporate governance and communication functions. The competency development activities participated in by Corporate Secretary during 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Materi** Subject	**Waktu Pelaksanaan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Finan Syaifullah	• *Enrollment Cancellation of Assignment Course Podcast Leadership Forum Vol.* 6 "*Felt Leadership* - Peran *Leader* Dalam Perubahan Budaya" • *Podcast Leadership Forum Vol.* 6 "*Felt Leadership* - Peran *Leader* Dalam Perubahan Budaya" • Enrollment Cancellation of Assignment Course Leadership Forum Podcast Vol. 6 "Felt Leadership - The Role of Leaders in Cultural Change" • Leadership Forum Podcast Vol. 6 "Felt Leadership - The Role of Leaders in Cultural Change"	07 Maret 2025 March 7, 2025	Pelindo
	BERLABUH : *Investing for Tomorrow* "Mengatur Keuangan dan Investasi untuk Masa Depan yang Stabil" BERLABUH: Investing for Tomorrow "Managing Finances and Investments for a Stable Future"	12 Maret 2025 March 12, 2025	PMLI
	Sosialisasi Surat Edaran tentang Ketentuan Penundaan Pembayaran Penghasilan Bulanan atas Ketidakhadiran Pekerja dan Mekanisme Pelaporan Ketidakhadiran Pekerja di Lingkungan SPJM. Dissemination of the Circular Letter on the Provisions for Postponing Monthly Income Payments for Employee Absences and the Mechanism for Reporting Employee Absences within SPJM Environment.	12 Maret 2025 March 12, 2025	PJM
	BREATH Session series 17 "Keuangan Sehat, Hidup Berkah: Stop Judi *Online*" BREATH Session Series 17 "Healthy Finances, Blessed Life: Stop Online Gambling"	13 Maret 2025 March 13, 2025	PMLI
	J-Well "Menjadi Pribadi yang Berarti - Menyelaraskan Diri dengan Tujuan Ilahi" J-Well "Becoming a Meaningful Person - Aligning Yourself with Your Divine Purpose"	18 Maret 2025 March 18, 2025	PT Jasa Armada Indonesia Tbk
	Workshop Awareness Coaching, Mentoring dan *Counseling* Awareness Coaching, Mentoring, and Counseling Workshop	20 Maret 2025 March 20, 2025	PMLI
	BERLABUH Edisi Spesial : *Ask the* CEO BERLABUH Special Edition: Ask the CEO	16 April 2025 April 16, 2025	PMLI
	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi Tahun 2025 untuk Insan Pelindo E-Learning: Improving Understanding of Gratuities in 2025 for Pelindo Employees	12 Mei 2025 May 12, 2025	KPK RI
	Senior Leader Forum: tema "*Key Risk Indicator*" Senior Leader Forum: with the theme "Key Risk Indicator"	20 Mei 2025 May 20, 2025	PMT
	BREATH Session Series 21 "*Well-Connected, Well-Being*: Menguatkan Kesejahteraan Sosial di Tempat Kerja" BREATH Session Series 21 "Well-Connected, Well-Being: Strengthening Social Welfare in the Workplace"	17 Juli 2025 July 17, 2025	PMT
	Workshop "ESG Leadership for Port Business Excellence" "ESG Leadership for Port Business Excellence" Workshop	05 Agustus 2025 August 5, 2025	PMT
	AKHLAK *Talk Sharing Session* 12: Strategi Negosiasi Bisnis Kepelabuhanan AKHLAK Talk Sharing Session 12: Port Business Negotiation Strategies	07 Agustus 2025 August 7, 2025	Pelindo Corpu University
	Talk forward: Ask the CEO, *Raise the Voice of Generation*	07 Agustus 2025 August 7, 2025	PMLI
	BREATH Session Series 22 "Gizi Seimbang untuk Meningkatkan Produktivitas Pekerja" BREATH Session Series 22: "Balanced Nutrition to Increase Worker Productivity"	13 Agustus 2025 August 13, 2025	PT Pelindo Multi Terminal
	"*Continous Learning*" Pengelolaan Klinik K3 di Lingkungan PT Pelindo (Persero) "Continuous Learning": Occupational Health and Safety Clinic Management at PT Pelindo (Persero)	15 Agustus 2025 August 15, 2025	Pelindo Corpu University
	Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) *Cycle* 2 – *Graduation & Awarding*	19 Agustus 2025 August 19, 2025	PMLI
	PINTER (PJM *Talk and Interactive Session*) "*Loyal at Heart, True to Purpose*"	22 Agustus 2025 August 22, 2025	PMLI

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Subject	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
	BERLABUH : "Kinerja Merdeka : Bukan Sekedar Jam Kerja, Tapi Semangat Membawa Perubahan" BERLABUH: "Independent Performance: Not Just Working Hours, But the Spirit of Bringing Change"	22 Agustus 2025 August 22, 2025	PMLI
	NGOPI Vol.5 *Collaboration for Successful* IMS *Implementation*	22 Agustus 2025 August 22, 2025	PT Pelindo Solusi Logistik
	AKHLAK *Talk Sharing Session* 13: *Why Digital Leadership* Penting dalam Menghadapi Tantangan Bisnis? AKHLAK Talk Sharing Session 13: Why is Digital Leadership Important in Facing Business Challenges?	22 Agustus 2025 August 22, 2025	Corpu Pelindo
	Impactful Identity: Membangun Personal Branding yang Kuat untuk Pertumbuhan Karier & Perusahaan Impactful Identity: Building a Strong Personal Brand for Career & Company Growth	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Corpu Pelindo
	Legal Coaching Clinic: Data Terlindungi, Reputasi Terjaga: Pelindungan Data Pribadi Dalam Korporasi Legal Coaching Clinic: Protected Data, Protected Reputation: Protection of Personal Data in Corporations	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Corpu Pelindo
	BERLABUH : "Kinerja Merdeka : Bukan Sekedar Jam Kerja, Tapi Semangat Membawa Perubahan" BERLABUH : "Independent Performance: Not Just Working Hours, But Passion to Bring Change"	28 Agustus 2025 August 28, 2025	PMLI
	"*Leading with Sustainability, Building a Brighter Future Together*"	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Pelindo Corpu University
	KPI *Mastery for Leaders*	30 Agustus 2025 August 30, 2025	Pelindo Corpu University
	WEBINAR Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) X COP Hukum. *Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness*" WEBINAR: Anti-Bribery Management System: Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) X Legal Office. Port Without Fraud: "Integrity-Driven Breakthroughs for Global Competitiveness"	10 September 2025 September 10 2025	PT Pelindo Multi Terminal
	Sharing Session terkait *Lean Six Sigma* Sharing Session on Lean Six Sigma	06 Oktober 2025 October 06, 2025	PMT
	Pelatihan Pendampingan Penyusunan *Business Process Mapping* (BPM) dan *Risk Control Matrices* (Tingkat Pengendalian : *Transaction Level Control* (TLC) Training on Mentoring in the Preparation of Business Process Mapping (BPM) and Risk Control Matrices (Transaction Level Control (TLC))	13 Oktober 2025 October 13, 2025	PMT
	Workshop Rencana Strategi Pra RJP PMT 2026-2030 Workshop on Strategic Planning for the Pre-RJP SPMT 2026-2030	15 Oktober 2025 October 15, 2025	PMT

PENGELOLAAN AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai bentuk penerapan keterbukaan informasi, Perusahaan menyediakan berbagai kanal komunikasi untuk memastikan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan terkini mengenai kegiatan usaha serta perkembangan korporasi. Penyampaian informasi dilakukan melalui laporan resmi Perusahaan, siaran pers, serta publikasi pada media lokal maupun nasional.

Selain itu, Perusahaan juga menyediakan akses informasi digital melalui situs resmi PT Pelindo Multi Terminal dengan alamat www.pelindomultiterminal.co.id, yang memuat berbagai informasi korporasi, antara lain profil Perusahaan, layanan dan aktivitas usaha, informasi keuangan, serta informasi pendukung lainnya yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.

Adapun saluran akses informasi lainnya dapat dilihat pada:

1. Situs Web Resmi Perusahaan
   Perusahaan telah memiliki media untuk penyediaan Informasi Publik berupa situs web yang ditangani secara langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Situs web ini dapat diakses melalui link www.pelindomultiterminal.co.id. Situs web ini merupakan media daring yang ditujukan untuk publik yang memuat berbagai informasi dan data mengenai Perusahaan, seperti produk layanan, berita, rilis media, dan informasi penting lainnya yang ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan.

   Situs web Perusahaan telah memublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan. Dalam situs web tersebut terdapat informasi tentang Sejarah singkat Perusahaan, prinsip-prinsip Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Berbagai kebijakan telah dipublikasikan dalam situs web Perusahaan, antara lain mencakup Etika dan Komitmen Perusahaan, Kebijakan GCG dan Pedoman Perilaku.

2. Akses Informasi dan Data Perusahaan kepada Pihak Internal
   Pengembangan saluran informasi serta akses data Perusahaan kepada pihak internal adalah sebagai berikut:
   a. Instagram: @pelindomultiterminal
   b. Youtube: Pelindo Multi Terminal
   c. Facebook: PTPelindoMultiTerminal
   d. X: @Pelindo_PMT
   e. *Website*: pelindomultiterminal.co.id
   f. Tiktok: pelindomultiterminal
   g. Threads: pelindomultiterminal

3. Akses Informasi dan Data Perusahaan kepada Pihak Eksternal
   Pengembangan saluran informasi serta akses data Perusahaan kepada pihak eksternal adalah sebagai berikut:

MANAGEMENT OF ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

As part of its commitment to information transparency, the Company provides various communication channels to ensure stakeholders receive relevant, accurate, and up-to-date information regarding business activities and corporate developments. Information is disseminated through official Company reports, press releases, and publications in local and national media.

In addition, the Company provides digital information access through PT Pelindo Multi Terminal's official website, www.pelindomultiterminal.co.id, which contains various corporate information, including the Company profile, services and business activities, financial information, and other supporting information accessible to stakeholders and the public.

Other information access channels can be found at:

1. Company Official Website
   The Company has a media for the provision of Public Information in the form of a website handled directly by Corporate Secretary. This website can be accessed through the link www. pelindomultiterminal.co.id. This website is an online media intended for the public that contains various information and data about the Company, such as service products, news, media releases, and other important information intended for all stakeholders.

   The Company's website has published the Company's policies and important information. The website contains information on the Company's brief history, corporate principles, business activities, Annual Report and Financial Statements. Various policies have been published on the Company's website, including the Company's Ethics and Commitments, GCG Policy and Code of Conduct.

2. Access to Company Information and Data to Internal Parties
   The development of information channels and access to Company data for internal parties are as follows:
   a. Instagram : @pelindomultiterminal
   b. Youtube : Pelindo Multi Terminal
   c. Facebook : PTPelindoMultiTerminal
   d. Twitter : @Pelindo_PMT
   e. Website : pelindomultiterminal.co.id
   f. Tiktok: pelindomultiterminal
   g. Threads: pelindomultiterminal

3. Access to Company Information and Data to External Parties
   The development of information channels and access to Company data to external parties are as follows:

a. Korespondensi dan Laporan Berkala
Sebagai bentuk transparansi, Perusahaan secara berkala menyebarluaskan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan. Informasi keuangan dan nonkeuangan Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh, dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan.

b. Hubungan Media
Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melakukan kegiatan *Media Relations*, yaitu siaran pers sebanyak 440 kali.

4. Ragam Media kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

a. Correspondence and Periodic Reports
As a form of transparency, the Company periodically disseminates material information regarding the Company's activities and performance. The Company's financial and non-financial information has been compiled and reported transparently to shareholders, stakeholders and other required institutions. Information is reported according to time targets, presented completely and accurately, up to date, intact and adequate in accordance with the procedures, types and scope as stipulated in the provisions on Transparency of the Company's Financial Condition. Information is presented through reports in the form of:

b. Media Relations
Throughout 2025, the Company has conducted Media Relations activities, namely press releases as many as 440 times, as follows:

4. Media Variety to Shareholders and Stakeholders
The following table illustrates the variety of communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements that have been achieved by the Company.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	**Bentuk-Bentuk Media** Media Forms
Regulator Regulators	Melalui *Holding* Through Holding
Pemegang Saham Shareholders	Surat, RUPS, Pelindo Forum, *Branch Performance Review* (BPR) Shareholders
Lembaga Publik Public Institutions	Rapat Pertemuan Meetings
Konsumen Customer	Sosialisasi, *Customer Gathering* Socialization, Customer Gathering
Karyawan Employees	*Sharing Session*, *Employee Gathering*, *Helpdesk* SDM Sharing Session, Employee Gathering, HC Helpdesk
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Surat Menyurat Correspondence
Mitra Kerja dan Rekanan Business Partners and Associates	Surat Menyurat Correspondence
Organisasi Profesi Professional Organizations	Surat Menyurat Correspondence
Masyarakat/Umum Society/Publi	Surat Menyurat Correspondence

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Departemen Komunikasi Korporasi & Protokoler
   a. *All Year* 2025 *Media Report* PMT Grup
   Sepanjang tahun 2025, kinerja komunikasi menunjukkan peningkatan signifikan. Media massa mencatat 21.688 pemberitaan dengan kenaikan 283 persen, didukung 440

DUTIES IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY IN 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out the following duties and activities:

1. Corporate Communications & Protocol Department
   a. PMT Group All-Year 2025 Media Report
   Throughout 2025, communications performance showed significant improvement. Mass media recorded 21,688 news reports, a 283 percent increase,

rilis yang tumbuh 168 persen. Capaian ini mencerminkan konsistensi strategi kehumasan, penguatan isu positif, serta meningkatnya kepercayaan media.

Di sisi sosial media, performa juga melonjak. Tercatat 6.266 postingan meningkat 177 persen dan menghasilkan 234.972 *like* atau naik 144 persen. Angka tersebut menandakan tingginya keterlibatan audiens, efektivitas konten, serta keberhasilan memperluas jangkauan komunikasi digital.

supported by 440 releases, representing a 168 percent increase. This achievement reflects the consistency of public relations strategies, the amplification of positive issues, and increased media trust.

On social media, performance also surged. 6,266 posts recorded a 177 percent increase and generated 234,972 likes, a 144 percent increase. These figures indicate high audience engagement, content effectiveness, and the successful expansion of digital communication reach.

Ikhtisar Summary		2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
Media Massa Mass Media	Total Pemberitaan Total News	21.688	5.659	283% ↑
	Total Rilis Total Releases	440	164	168% ↑
Sosial Media Social Media	Total *Posting* Total Posts	6.266	2.257	177% ↑
	Total *Like* Total Likes	234.972	96.052	144% ↑

b. Sebaran Data

Sepanjang tahun 2025, *data monitoring* media menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai PMT berasal dari Kantor Pusat PMT, IPCC, PTP, serta seluruh *Branch* PMT. Masing-masing entitas berkontribusi dalam penyampaian informasi terkait operasional, layanan, dan kegiatan strategis perusahaan melalui berbagai media massa.

Pada kanal media sosial, PMT, IPCC, dan PTP mengelola akun resmi di berbagai *platform*, meliputi Instagram, Facebook, Twitter (X), Threads, LinkedIn, YouTube, dan TikTok.

Sementara itu, *Branch* PMT pada umumnya mengelola Instagram sebagai kanal utama, dengan beberapa *branch* mulai mengembangkan pengelolaan Facebook, Threads, dan TikTok untuk memperluas jangkauan komunikasi.

b. Data Distribution

Throughout 2025, media monitoring data shows that news coverage regarding PMT originated from PMT Head Office, IPCC, PTP, and all PMT Branches. Each entity contributes to disseminating information regarding the company's operations, services, and strategic activities through various media outlets.

On social media, PMT, IPCC, and PTP maintain official accounts on various platforms, including Instagram, Facebook, Twitter (X), Threads, LinkedIn, YouTube, and TikTok.

Meanwhile, PMT Branches generally maintain Instagram as their primary channel, with some branches beginning to expand their management of Facebook, Threads, and TikTok to expand their communication reach.

Media Massa
Mass Media

Sumber Source	Rilis Releases		Berita News		B/R
HO PMT	105	28% ↑	11.827	212% ↑	112
IPCC	51	59% ↑	2.168	169% ↑	42
PTP	82	173% ↑	1.815	85% ↑	22
Branch PMT	202	910% ↑	5.878	6.153% ↑	29

Media Sosial
Social Media

Sumber Source	Post		Likes		L/P
HO PMT	1.155	31% ↑	75.006	21% ↑	65
IPCC	794	36% ↑	22.144	-1,3% ↓	27
PTP	760	68% ↑	22.519	68% ↑	29
Branch PMT	2.523	639% ↑	115.284	6.661% ↑	45
SMR	1.034	-	19	-	00,2

c. Kinerja Bulanan

Data menunjukkan peningkatan pemberitaan yang signifikan secara konsolidasi mulai April hingga Agustus 2025, menandai fase akselerasi eksposur media yang kuat. Periode ini mencerminkan meningkatnya intensitas aktivitas dan efektivitas penyebaran narasi kepada publik.

Meskipun terjadi penurunan pemberitaan hingga November, tren tersebut bersifat sementara. Pada Desember 2025, pemberitaan berhasil *rebound* dan mencatatkan angka tertinggi sepanjang tahun.

Peningkatan ini didorong oleh lonjakan pemberitaan dari *Branch* PMT, yang pada Desember untuk kedua kalinya setelah Juli menjadi sumber pemberitaan tertinggi pada tahun 2025, menegaskan potensi besar *branch* sebagai penggerak utama eksposur media.

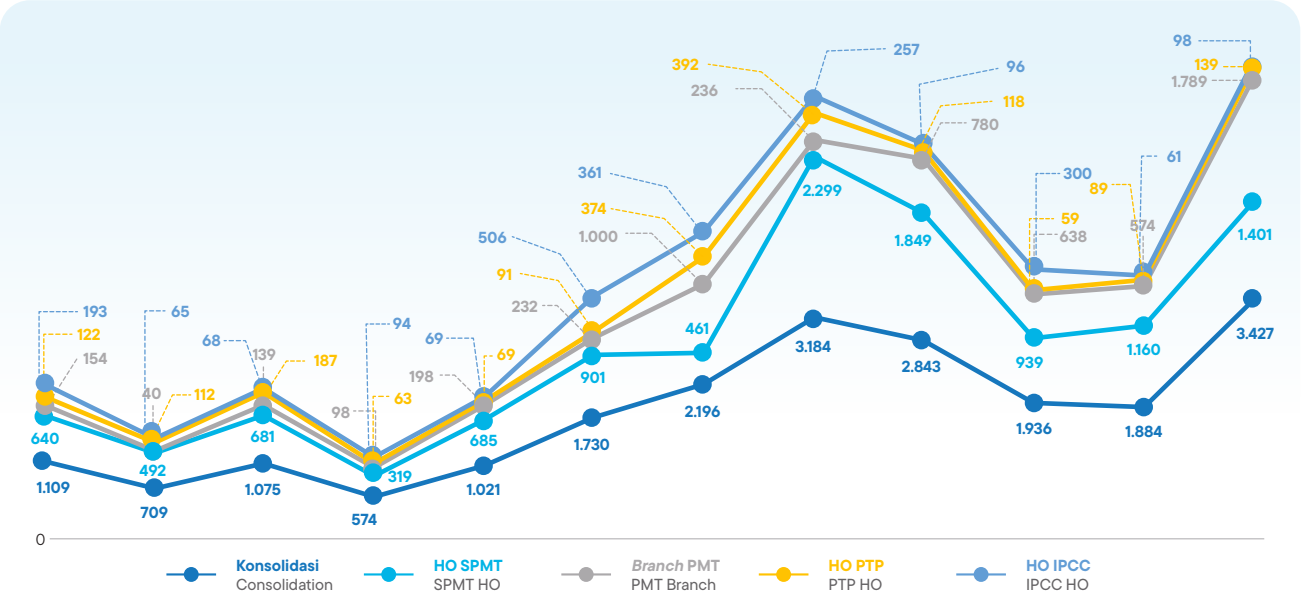
c. Monthly Performance

Data shows a significant increase in news coverage on a consolidated basis from April to August 2025, marking a strong acceleration phase of media exposure. This period reflects the increasing intensity of activity and the increasing effectiveness of disseminating narratives to the public.

Although there was a decline in news coverage until November, this trend was temporary. In December 2025, news coverage rebounded and reached its highest level throughout the year.

This increase was driven by a surge in news coverage from Branch PMT, which in December became the highest news source in 2025 for the second time after July, confirming the branch's significant potential as a key driver of media exposure.

Grafik Kinerja Bulanan
Monthly Performance



d. *Branch* Bersuara

Sepanjang tahun 2025, program komunikasi PMT diarahkan untuk mendorong *branch* agar mampu menyusun dan mendistribusikan rilis pemberitaan secara mandiri. Pendekatan ini bertujuan membuka ruang bagi *branch* untuk menyampaikan langsung cerita operasional, layanan, dan perannya di wilayah masing-masing.

Implementasi program tersebut menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang tahun, *branch* berhasil menghasilkan 202 rilis pemberitaan. Capaian ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kapasitas komunikasi di tingkat *branch*, tetapi juga mengungkap besarnya potensi isu dan cerita yang bisa digali lebih mendalam.

Upaya ini sekaligus menunjukkan kesungguhan *branch* dalam menyuarakan aktivitas dan kontribusinya secara lebih aktif kepada publik.

d. Voices of the Branch

Throughout 2025, PMT communications program was aimed at encouraging branches to independently compile and distribute press releases. This approach aimed to create a space for branches to directly share stories about their operations, services, and roles in their respective regions.

This program has brought positive results. Throughout the year, branches successfully produced 202 press releases. This achievement not only reflects increased communication capacity at the branch level but also reveals the vast potential for issues and stories that can be explored more deeply.

This effort also demonstrates the branch's commitment to more actively communicating its activities and contributions to the public.

Sumber Source	**Rilis** Releases	**Pemberitaan** News	**P/R**
Tanjung Emas	20	389	19,5
Tanjungpinang	16	580	36,3
Bumiharjo Bg.	11	256	23,3
Malahayati	8	317	39,6
Janirah	4	134	33,5
Parepare	18	311	17,3
Lhokseumawe	15	697	46,5
Tj. Balai Karimun	9	160	17,8
Tanjung Wangi	8	408	51
Belawan	3	132	44
Gresik	17	284	16,7
Sibolga	15	352	23,5
Tanjung Intan	9	160	17,8
Bima Badas	5	125	25
Benoa	1	13	13
Lembar	16	624	-
Dumai	13	322	-
Balikpapan	8	15	1,9
Trisakti	5	432	86,4
Makassar	1	1	1

e. Pemberitaan Entitas Pelindo
Data menunjukkan peningkatan pemberitaan yang konsisten pada seluruh entitas Pelindo Group. Secara regional, Regional 2 mencatat volume pemberitaan tertinggi, diikuti Regional 1, Regional 3, dan Regional 4 yang menunjukkan tren pertumbuhan stabil.

Di tingkat Anak Usaha, PMT menempati posisi teratas dalam total pemberitaan versi kurasi, melampaui PTP dan PSL. Capaian ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pengelolaan komunikasi PMT sebagai kontributor utama eksposur media di lingkungan Pelindo Grup.

Sebagai catatan, data kinerja entitas non-PMT diperoleh dari *raw data* aplikasi Kurasi HO. Oleh karena itu, tingkat akurasi data dimungkinkan masih mengalami penyesuaian dan dapat berbeda dengan refined data yang akan dirilis pada periode berikutnya.

e. Pelindo Entity News
Data shows a consistent increase in news coverage across all Pelindo Group entities. Regionally, Region 2 recorded the highest news volume, followed by Region 1, Region 3, and Region 4, which showed a steady growth trend.

At the Subsidiary level, PMT topped the total curated news coverage, surpassing SPTP and SPSL. This achievement reflects the consistency and effectiveness of PMT's communications management as a major contributor to media exposure within Pelindo Group.

For the records, non-PMT entity performance data was obtained from raw data from the HO Curation application. Therefore, the accuracy of data may still be subject to adjustments and may differ from the refined data to be released in the next period.

Regional 2	34.006
PMT	21.688
PTP	17.611
Regional 1 Regional 1	15.924
Regional 3 Regional 3	15.543
Regional 4 Regional 4	12.437
PSL	6.285
PJM	3.947

2. Departemen Tata Kelola, Hub. Lembaga dan Investor

a. Penyelenggaraan Rapat
i) Rapat Direksi

2. Governance, Institutional and Investor Relations Department

a. Meeting Implementation
i) Board of Directors Meetings

No	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Agenda Rapat Number of Meeting Agendas
1	Januari January	2	4
2	Februari February	0	0
3	Maret March	2	4
4	April	1	1
5	Mei May	1	5
6	Juni June	2	3
7	Juli July	4	6
8	Agustus August	1	2
9	September	1	2

No	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Agenda Rapat Number of Meeting Agendas
10	Oktober October	1	4
11	November	1	4
12	Desember December	1	6
Jumlah Total		**17**	**41**

ii) Rapat Dewan Komisaris

ii) Board of Commissioners Meeting

No	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Arahan Number of Directives
1	Januari January	0	0
2	Februari February	2	10
3	Maret March	1	6
4	April	1	4
5	Mei May	1	5
6	Juni June	1	4
7	Juli July	1	7
8	Agustus August	1	8
9	September	1	6
10	Oktober October	1	7
11	November	1	4
12	Desember December	1	5
Jumlah Total		**12**	**66**

iii) RUPS

- RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2025, dilaksanakan tanggal 24 Januari 2025.
- RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelindo Multi Terminal, telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025.

b. Pelaporan Korporasi

i) Triwulanan

- *Business Performance Review*;
- Laporan Manajemen (Tindak Lanjut Arahan RUPS);
- Laporan Kinerja Berkelanjutan;
- Laporan Pelaksaanaan Kegiatan Bina Hubungan Lembaga.

iii) GMS

- GMS for Ratification of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), held on January 24, 2025.
- Annual GMS concerning Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year of PT Pelindo Multi Terminal, held on June 19, 2025.

b. Corporate Reporting

i) Quarterly

- Business Performance Review;
- Management Report (Follow-up to GMS Directives);
- Sustainability Performance Report;
- Report on Implementation of Institutional Relations Activities.

ii) Semesteran
- Laporan Tata Kelola Terintegrasi dan Rencana Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2026;
- Laporan Pemberian Suap dan Gratifikasi.

iii) Tahunan
- *Annual Report;*
- *Sustainability Report;*
- Laporan Bulan GCG;
- Laporan Pelaksanaan HAKORDIA;
- Agenda Perencanaan Hubungan Lembaga dan Investor Tahun 2026.

c. Penguatan Infrastruktur Tata Kelola

i) Daftar Peraturan Direksi
- Peraturan Direksi GCG;
- Peraturan Direksi Penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
- Peraturan Direksi Pedoman Tata Laksana Kerja hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);
- Peraturan Direksi Pedoman Kode Etik;
- Peraturan Direksi Benturan Kepentingan Terintegrasi;
- Peraturan Direksi Pembentukan FKAP;
- Peraturan Direksi Tata Kelola SMAP;
- Peraturan Direksi Pedoman *Anti-Fraud;*
- Peraturan Direksi Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- Peraturan Direksi Pedoman *Whistleblowing System.*

ii) Daftar Prosedur
- SOP Hubungan Antar Kelembagaan;
- SOP Implementasi SMAP;
- SOP Pengelolaan Gratifikasi;
- SOP Pengelolaan WBS;
- SOP Pelaksanaan Rapat Direksi;
- SOP Permintaan Salinan Risalah Rapat Direksi;
- SOP *Monitoring* Rencana Aksi Rapat Direksi.

d. Program Penguatan Perangkat GCG

i) *Whistleblowing System;*
ii) Anti Suap, Pungli dan Gratifikasi;
iii) Survei GCG dan SMAP;
iv) Penandatangan Pakta Integritas;
v) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Penyelenggara Negara/Wajib Lapor;
vi) GCG;
vii) *Anti-Fraud*;
viii) SMAP;

ii) Semiannual
- Integrated Governance Report and the 2026 Integrated Governance Plan;
- Report on Bribery and Gratuities.

iii) Annual
- Annual Report;
- Sustainability Report;
- Monthly GCG Report;
- HAKORDIA Implementation Report;
- 2026 Institutional and Investor Relations Planning Agenda.

c. Strengthening Governance Infrastructure

i) List of Board of Directors' Regulations
- Board of Directors' Regulation on Good Corporate Governance (GCG);
- Board of Directors' Regulation on the Implementation of Integrated Governance;
- Board of Directors' Regulation on the Board Manual Governing the Working Procedures of Board of Commissioners and Board of Directors;
- Board of Directors' Regulation on the Code of Conduct;
- Board of Directors' Regulation on Integrated Conflict of Interest;
- Board of Directors' Regulation on the Establishment of FKAP;
- Board of Directors' Regulation on the Governance of the Anti-Bribery Management System (SMAP);
- Board of Directors' Regulation on the Anti-Fraud Guidelines;
- Board of Directors' Regulation on the Gratification Control Guidelines;
- Board of Directors' Regulation on the Whistleblowing System Guidelines.

ii) List of Procedures
- Inter-Institutional Relations Standard Operating Procedures (SOP);
- SMAP Implementation Standard Operating Procedures (SOP);
- SOP for Gratification Management;
- SOP for WBS Management;
- SOP for Implementing Board of Directors Meetings;
- SOP for Requesting Copies of Board of Directors Meeting Minutes;
- SOP for Monitoring Board of Directors Meeting Action Plans.

d. GCG Instrument Strengthening Program

i) Whistleblowing System;
ii) Anti-Bribery, Extortion, and Gratification;
iii) GCG Survey and SMAP;
iv) Signing of the Integrity Pact;
v) Submission of the State Officials' Asset Report (LHKPN) by State Officials/Mandatory Reporting Parties;
vi) GCG;
vii) Anti-Fraud;
viii) SMAP;

ix) Banturan Kepentingan;
x) Hakordia;
xi) Duta Anti-Penyuapan;
xii) MATCHA - Time.

e. Pelaksanaan *Assessment* GCG
Penilaian penerapan GCG Perusahaan dilakukan dengan mekanisme *self-assessment* pada 14 Agustus 2025 hingga 13 September 2025.

f. Program Kinerja Berkelanjutan Berbasis ESG
i) Sosialisasi
Sosialisasi Pengisian Kertas Kerja Kinerja Berkelanjutan pada tanggal 8 Agustus 2025 yang diadakan secara *online*.
ii) Pelatihan
Pelatihan Penggunaan Platform Pelaporan Kinerja Keberlanjutan *Sustainability Data Management System* (SDMS) di 4 Wilayah.
iii) *Monitoring*
Monitoring Pengisian Kertas Kerja Kinerja Berkelanjutan.
iv) Pelaporan
Pelaporan Kertas Kerja Kinerja Berkelanjutan setiap tanggal 6 bulan berjalan.
v) Forum ESG
Workshop ESG X *Senior Leader Forum* pada tanggal 5-6 Agustus 2025 yang diadakan di Ruang Selat Malaka Medan.

3. Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat progresif dan melampaui target tahunan untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025. Hasil tersebut menunjukkan tingginya aktivitas program di lapangan dan komitmen Perusahaan.

ix) Interest Assistance;
x) Hakordia;
xi) Anti-Bribery Ambassador;
xii) MATCHA - Time.

e. GCG Assessment
The Company's GCG implementation is assessed using a self-assessment mechanism from August 14, 2025, to September 13, 2025.

f. ESG-Based Sustainable Performance Program
i) Socialization
Socialization of the Sustainability Performance Working Paper Completion on August 8, 2025, held online.
ii) Training
Training on the Use of the Sustainability Data Management System (SDMS) Sustainability Performance Reporting Platform in 4 Regions.
iii) Monitoring
Monitoring of the Sustainability Performance Working Paper Completion.
iv) Reporting
Reporting of the Sustainability Performance Working Paper every 6th of the month.
v) ESG Forum
ESG Workshop X Senior Leader Forum on August 5-6, 2025, held at Selat Malaka Room, Medan.

3. Social and Environmental Responsibility Department PT Pelindo Multi Terminal demonstrated highly progressive budget absorption performance and exceeded the annual target for the 2025 Social and Environmental Responsibility (CSR) program. These results demonstrate the program's high level of activity in the field and the Company's commitment.

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari penerapan pengelolaan kinerja yang terukur, Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI). Berikut disampaikan hasil penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2025 berdasarkan KPI yang telah ditetapkan:

CORPORATE SECRETARY PERFORMANCE ASSESSMENT

As part of measurable performance management, the Company evaluates the implementation of the Corporate Secretary's function based on Key Performance Indicators (KPIs). The following presents the results of the 2025 Corporate Secretary performance assessment based on the established KPIs:

No	KPI	Perspektif Perspective	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Skor Score	Pencapaian Achievement (%)
1	EBITDA	Keuangan Finance	5	Rp Miliar Rp Billion	1.207	780,28	3,23	64,61
2	Pendapatan Revenue	Keuangan Finance	5	Rp Miliar Rp Billion	6.288	5.669	4,51	90,15
3	BOPO	Keuangan Finance	5	%	86,43	88,99	4,86	97,12
4	*Actual Cost/Budget Cost*	Keuangan Finance	5	%	100	85	5,5	117,65
5	Tindak Lanjut Temuan SPI Follow-up of SPI Findings	Proses Bisnis Internal Internal Business Process	5	%	100	100	5	100,00

No	KPI	Perspektif Perspective	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Skor Score	Pencapaian Achievement (%)
6	Implementasi Manajemen Risiko Proses Bisnis Internal Internal Business Process	Proses Bisnis Internal Internal Business Process	5	%	100	107	5,35	107,00
7	Implementasi ESG ESG Implementation	Proses Bisnis Internal Internal Business Process	15	Jumlah Total	100	100	15	100,00
8	Program Komunikasi/ Branding Perusahaan Corporate Communication/ Branding Program	Pelanggan Customer	10	Jumlah Total	6	8	11	133,33
9	*Corporate Image Management*	Pelanggan Customer	15	%	85	99	16,5	116,47
10	Implementasi Manajemen *Stakeholder* Stakeholder Management Implementation	Pelanggan Customer	10	%	100	100	10	100,00
11	Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Program Implementation	Pelanggan Customer	15	%	100	112,50	16,5	112,50
12	Jumlah Ide Inovasi Number of Innovation Ideas	*Learning & Growth*	5	Number	1	1	5	100,00
Total Skor Tertimbang Total Weighted Score								**102,43**

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan organ Perusahaan di bawah naungan Direksi yang bertugas untuk memantau pelaksanaan kegiatan operasional maupun aspek keuangan Perusahaan. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan proses bisnis berjalan sesuai kebijakan, target kinerja tercapai, serta pengelolaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham.

Secara rinci, SPI berperan melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi untuk menilai efektivitas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan di berbagai lini operasional.

Fungsi pengawasan dilakukan melalui pemberian rekomendasi perbaikan dan masukan kepada manajemen guna mendukung penguatan sistem pengendalian secara berkelanjutan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal serta penyampaian hasil evaluasi kepada Direksi.

INTERNAL AUDIT/INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit (SPI) is a corporate organ under the supervision of the Board of Directors, responsible for monitoring the implementation of the Company's operational activities as well as its financial aspects. This oversight is essential to ensure that business processes are carried out in accordance with established policies, performance targets are achieved, and the Company's management is accountable to the shareholders.

In detail, SPI performs assurance and consulting activities to assess the effectiveness of internal controls, the implementation of risk management, and the execution of corporate governance across various operational functions.

The oversight function is carried out by providing recommendations for improvement and input to management in order to support the continuous strengthening of internal control system.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Unit

Internal Audit Unit is headed by the Head of SPI, who is responsible for the implementation of internal audit activities and the submission of evaluation results to the Board of Directors.

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI dilakukan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai ketentuan tata kelola yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

The appointment and dismissal of Head of SPI are carried out by the President Director upon obtaining prior approval from the Board of Commissioners in accordance with the corporate governance provisions applicable within the Company.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Sepanjang tahun 2025, fungsi Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Mhd. Zulpan selaku Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.02/5/8/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Profile of Head of Internal Audit Unit

Throughout 2025, Internal Audit Unit was led by Mhd. Zulpan as Senior Vice President of Internal Audit Unit. This appointment was made based on the Board of Directors' Decree of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number KP.10.02/5/8/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated 5 August 2024 concerning the Transfer of Duties/Position of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Mhd. Zulpan

Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern | Senior Vice President of Internal Audit Unit
Menjabat Sejak 5 Agustus 2024
In office since August 5, 2024

Data Pribadi		**Personal Data**	
Warga Negara Indonesia		Indonesian citizen	
Usia	: 55 tahun	Age	: 55 years old
Kelahiran	: Medan, 12 Agustus 1970	Born in	: Medan, August 12, 1970
Domisili	: Medan, Sumatra Utara, Indonesia	Domiciled in	: Medan, North Sumatra, Indonesia

Bergabung di PMT
5 Agustus 2024

Joining PMT
August 5, 2024

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tri Karya, (2001)

Educational History
Bachelor of Civil Engineering, Tri Karya University (2001)

Riwayat Jabatan

1. SVP SPI PT Pelindo Multi Terminal, Agustus 2024 sd Sekarang;
2. SVP Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal, Agustus 2023 sd Agustus 2024;
3. Division Head Teknik Regional 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Oktober 2021 sd Agustus 2023;
4. Project Manager Fasilitas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Oktober 2019 sd Oktober 2021;
5. SVP Fasilitas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Desember 2018 sd Oktober 2019.

Bachelor of Civil Engineering, Tri Karya University (2001)

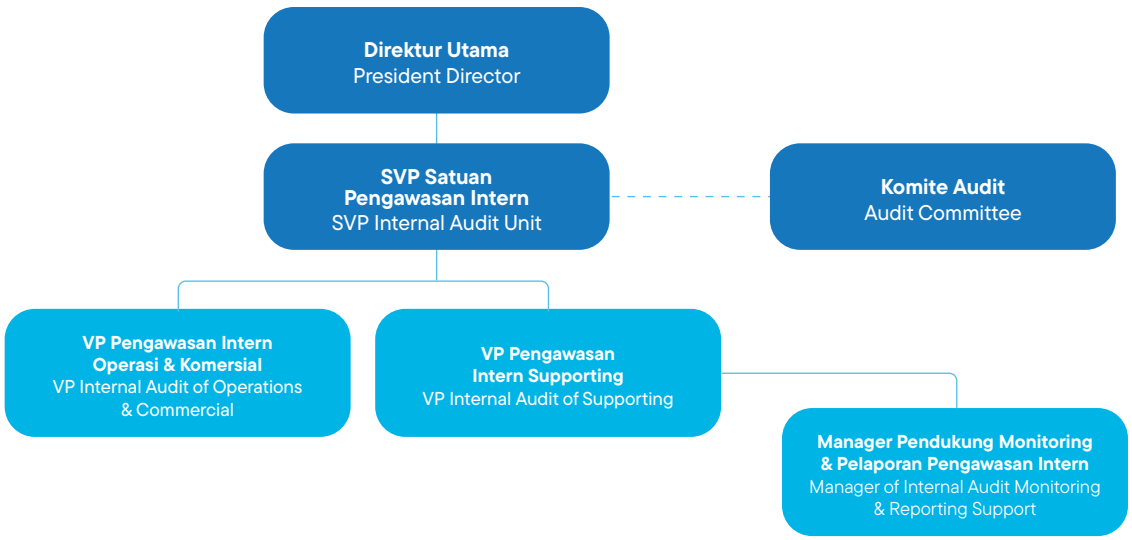
1. Senior Vice President of Internal Audit, PT Pelindo Multi Terminal, August 2024 to Present;
2. SVP of Port Facilities, PT Pelindo Multi Terminal, August 2023 to August 2024;
3. Division Head of Regional Engineering 1, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), October 2021 to August 2023;
4. Project Manager of Facilities, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), October 2019 to October 2021;
5. SVP of Facilities, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), December 2018 to October 2019.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Agar dapat menggambarkan kedudukan serta cakupan fungsi SPI, berikut disampaikan struktur organisasi SPI per 31 Desember 2025:

Internal Audit Unit Organizational Structure

In order to illustrate the scope of SPI's functions, following is SPI organizational structure as of December 31, 2025:



Hingga 31 Desember 2025, Satuan Pengawasan Intern didukung oleh 15 personel yang terdiri atas 4 pejabat struktural, 10 auditor, dan 1 Junior Officer Pendukung Monitoring dan Pelaporan. Adapun rincian kualifikasi dan sertifikasi masing-masing personel Satuan Pengawasan Intern disajikan pada tabel berikut:

As of December 31, 2025, the Internal Audit Unit is supported by 15 personnel, consisting of 4 structural officials, 10 auditors, and 1 Junior Monitoring and Reporting Support Officer. Details of the qualifications and certifications of each Internal Audit Unit personnel are presented in the following table:

No	Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background		Sertifikasi Certifications
			S1 Bachelor Degree	S2 Master Degree	
1	Mhd. Zulpan	Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern Senior Vice President of Internal Audit	Teknik Sipil Civil Engineering		*Qualified Internal Auditor* (QIA)
2	Andri Lesmana	Vice President Pengawasan Intern Operasi & Komersial Vice President of Operations & Commercial Internal Audit	Ekonomi/Manajemen Economics/ Management	Magister Hukum Master of Laws	*Qualified Internal Auditor* (QIA)
3	Riza Nasution	Vice President Pengawasan Intern Supporting Vice President of Supporting Internal Audit	Akuntansi Accounting	Magister Manajemen Master of Management	*Qualified Internal Auditor* (QIA)
4	T. Irfansyah	Manager Pendukung Monitoring dan Pelaporan Manager of Monitoring and Reporting Support	Hukum Law		DASAR BASIC
5	Serepina Tambunan	Auditor Utama Pengawasan Intern Operasi & Komersial Senior Auditor of Operations & Commercial Internal Audit	Tatalaksana Administration	Magister Hukum Master of Laws	*Qualified Internal Auditor* (QIA)
6	Yonia Chairul	Auditor Utama Pengawasan Intern Supporting Senior Auditor of Supporting Internal Audit	Ekonomi/Manajemen Economics/ Management		*Qualified Internal Auditor* (QIA)
7	Patria Prihanggadi	Auditor Madya Pengawasan Intern Operasi & Komersial Middle-Level Auditor of Operations & Commercial Internal Audit	Teknik Perkapalan Naval Engineering		*Qualified Internal Auditor* (QIA)
8	Wina Anggreni	Auditor Pertama Pengawasan Intern Supporting Senior Auditor of Supporting Internal Audit	Ekonomi/Akuntansi Economics/ Accounting		LANJUTAN ADVANCED
9	Syariful Mahya	Auditor Pertama Pengawasan Intern Supporting	Manajemen Management		LANJUTAN ADVANCED
10	Rudiansyah	Auditor Pertama Pengawasan Intern Supporting First Level Auditor of Internal Audit Supporting	Manajemen Management		DASAR BASIC
11	M. Eriansyah	Auditor Utama Pengawasan Intern Supporting Senior Auditor of Internal Audit Supporting	Ekonomi/ Manajemen Economics/ Management		LANJUTAN ADVANCED
12	Tanjung Halomoan Ambarita	Auditor Utama Pengawasan Intern Operasi & Komersial Lead Auditor: Operational & Commercial Internal Audit	Teknik Engineering		*Qualified Internal Auditor* (QIA)
13	Ratih Widyastuti	Auditor Muda Pengawasan Intern Supporting Junior Auditor of Internal Audit Supporting	Ekonomi/Manajemen Economics/ Management		DASAR BASIC

No	Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background		Sertifikasi Certifications
			S1 Bachelor Degree	S2 Master Degree	
14	Indra Ardiansah	Auditor Muda Pengawasan Intern Supporting Junior Auditor of Internal Audit Supporting	Teknik Sipil Civil Engineering		*Qualified Internal Auditor* (QIA)
15	Ean Ferogey	Junior Officer Pendukung Monitoring dan Pelaporan Junior Officer of Monitoring and Reporting Support	Perpajakan Taxation		DASAR BASIC

Pedoman Audit Internal

Pelaksanaan fungsi dan kegiatan Satuan Pengawasan Intern mengacu pada Piagam Audit Internal yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25 tanggal 08 Mei 2025 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern PT Pelindo Multi Terminal.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membantu Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan dan pelaksanaan audit, maupun pemantauan hasil audit.
2. Melakukan pengawasan atas efisiensi dan efektivitas di semua Divisi, Cabang, Anak Perusahaan, dan Perusahaan terafiliasi dalam pengelolaan operasional Perusahaan.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil audit dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan *auditee*.
4. Memberikan jasa konsultasi internal Perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan, selama tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Satuan Pengawasan Internal, serta didukung dengan sumber daya yang memadai.
5. Melaksanakan pemantauan hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik.
6. Melakukan audit pendalaman, audit tujuan tertentu sesuai permintaan Direktur Utama, sebagai tindak lanjut hasil audit rutin yang berpotensi mengandung indikasi pelanggaran atau kecurangan apabila diperlukan.

SVP SPI juga bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (*risk based*) yang disetujui oleh Direktur Utama.
2. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui oleh Direktur Utama serta melaksanakan penugasan lainnya sesuai dengan permintaan Direktur Utama.
3. Menjaga profesionalitas auditor dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi profesional.

Internal Audit Charter

The implementation of the functions and activities of the Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Charter established through a Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors in PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25 dated May 8, 2025, concerning the Internal Audit Unit Charter of PT Pelindo Multi Terminal.

Duties and Responsibilities

1. Assisting the President Director and/or Board of Commissioners in conducting supervision by describing operationally both planning and conducting audits, as well as monitoring audit results.
2. Supervise the efficiency and effectiveness in all Divisions, Branches, Subsidiaries and affiliated companies in managing the Company's operations.
3. Provide suggestions for improvement and objective information on the audit results in the form of an audit report and submitted to the President Director, Board of Commissioners and auditee.
4. Provide internal consulting services to the Company to provide added value and improve the quality of control, risk management and corporate governance, as long as it does not affect the independence and objectivity of Internal Audit, and is supported by adequate resources.
5. Implementing the monitoring of audit results and reporting to President Director and Board of Commissioners periodically.
6. Conduct deepening audits, specific purpose audits at the President Director's request, as a follow-up to routine audits that have the potential to contain indications of violations or fraud if necessary.

SVP SPI is also responsible for:

1. Developing a flexible Annual Supervisory Work Program (PKPT) using a risk-based methodology approved by the President Director.
2. Implementing the Annual Supervisory Work Program (PKPT) that has been approved by the President Director and carrying out other assignments in accordance with the President Director's request.
3. Maintain auditor professionalism with sufficient knowledge, skills and experience, as well as professional certification.

4. Melaporkan rangkuman hasil audit secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
5. Memberikan jasa konsultasi kepada manajemen, di mana auditor di dalam pelaksanaannya tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.
6. Melaksanakan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (*Quality Assurance and Improvement Program*) untuk mengevaluasi kualitas Satuan Pengawasan Intern. Hasil pelaksanaan program tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap fungsi kontrol dan pengawasan lainnya.

4. Report the summary of audit results periodically to the President Director and Audit Committee.
5. Provide consulting services to management where the auditor in its implementation does not take over the duties and responsibilities of management.
6. Implement the Quality Assurance and Improvement Program to evaluate the quality of Internal Audit Unit. The program implementation results are reported to President Director, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
7. Coordinating and supervising other control and supervisory functions.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Intern

Penguatan fungsi pengawasan internal tidak hanya dilakukan melalui sistem dan metodologi audit, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, Perusahaan mendorong seluruh personel Satuan Pengawasan Intern untuk terus memperbarui kompetensi dan wawasannya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Adapun rincian kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Training and/or Competency Development

Strengthening the internal oversight function is not only achieved through audit systems and methodologies, but also through capacity building of the human capital responsible for carrying them out. Therefore, the Company encourages all Internal Audit Unit personnel to continuously update their competencies and insights through various education and training programs. The details of competency development activities undertaken throughout 2025 are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Subject	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
1	Fawida Hanum	VP Pengawasan Intern Supporting VP Internal Audit Supporting	Pelatihan ICOFR ICOFR Training	18-19 Februari 2025 February 18-19, 2025	PMLI
2	Wina Anggreni	Auditor Pertama Pengawasan Intern Supporting First Level Auditor for Internal Audit Supporting	Pelatihan ICOFR ICOFR Training	18-19 Februari 2025 February 18-19, 2025	PMLI
3	M. Eriansyah	Auditor Utama Pengawasan Intern Supporting Senior Auditor for Internal Audit Supporting	QIA Tingkat Dasar QIA Basic Level	21 April - 5 Mei 2025 April 21 - May 5, 2025	YPIA
4	Seluruh SDM Divisi SPI All SPI Division HC		Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Internal Auditor Competency Development	19 - 21 Mei 2025 May 19 – 21, 2025	BPKP SUMUT
5	Seluruh SDM Divisi SPI All SPI Division HC		*Risk Based Audit*	22 Mei 2025 May 22, 2025	Komite Risiko Risk Committee
6	Wina Anggreni	Auditor Pertama Pengawasan Intern Supporting First Level Auditor for Internal Audit Supporting	QIA Tingkat Lanjutan QIA Advanced Level	30 Juni - 12 Juli 2025 June 30 - July 12, 2025	YPIA
7	Ratih Widyastuti	Auditor Muda Pengawasan Intern Supporting Junior Auditor for Internal Audit Supporting	QIA Tingkat Dasar QIA Basic Level	14-19 Juli 2025 July 14-19, 2025	YPIA
8	Mhd Zulpan	SVP Satuan Pengawasan Intern SVP of Internal Audit	Konferensi Auditor Internal (KAI) Auditor Conference (IAC)	2-3 Juli 2025 July 2-3, 2025	YPIA
9	Andri Lesmana	VP Pengawasan Intern Operasi & Komersial VP of Operations & Commercial Internal Audit	Konferensi Auditor Internal (KAI) Auditor Conference (IAC)	2-3 Juli 2025 July 2-3, 2025	YPIA

No	Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Subject	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
10	Tanjung Halomoan Ambarita	Auditor Utama Pengawasan Intern Operasi & Komersial Senior Auditor of Operations & Commercial Internal Audit	Konferensi Auditor Internal (KAI) Auditor Conference (IAC)	2-3 Juli 2025 July 2-3, 2025	YPIA
11	M. Eriansyah	Auditor Utama Pengawasan Intern Supporting Senior Auditor of Supporting Internal Audit	QIA Tingkat Lanjutan QIA Advanced Level	8-13 Desember 2025 December 8-13, 2025	YPIA
12	Seluruh SDM Divisi SPI All SPI Division HC		Bimtek Penilaian Mandiri SPI SPI Self-Assessment Technical Guidance	8-10 Desember 2025 December 8-10, 2025	BPKP SUMUT
13	Riza Nasution	VP Pengawasan Intern Supporting VP of Internal Audit Supporting	QIA Tingkat Menejerial QIA Managerial Level	15-23 Desember 2025 December 15-23, 2025	YPIA

RAPAT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kebijakan dan Frekuensi Rapat

SPI secara aktif terlibat dalam berbagai rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun berdasarkan kebutuhan tertentu sebagai bagian dari proses diskusi dan pengambilan langkah perbaikan di lingkungan Perusahaan.

Forum rapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil audit, membahas perkembangan tindak lanjut atas temuan pengawasan, serta menyelaraskan rencana kerja audit dengan prioritas dan risiko bisnis Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, SPI telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit sebanyak 4 kali. Agenda yang dibahas antara lain mencakup program kerja audit tahunan, laporan hasil pengawasan triwulanan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit. Adapun rincian waktu dan agenda rapat disajikan sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT MEETINGS

Meeting Policy and Frequency

Internal Audit Unit (SPI) actively participates in various meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, both routinely and as needed, as part of the discussion process and to identify corrective actions within the Company.

These meetings are used as a means to convey audit results, discuss follow-up progress on supervisory findings, and align the audit work plan with the Company's business priorities and risks.

Throughout 2025, the Internal Audit Unit (SPI) attended 4 meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee. The agenda items discussed included the annual audit work program, quarterly supervisory reports, and monitoring of follow-up to audit recommendations. The meeting schedules and agendas are as follows:

Pelaksanaan Rapat yang Diikuti SPI di Tahun 2025
Meetings Attended by SPI in 2025

No	Waktu Pelaksanaan Date	Agenda
1	7 Januari 2025 January 7, 2025	Usulan PKPT Tahun 2025 dan Piagam Audit. Proposed 2025 PKPT and Audit Charter.
2	27 Februari 2025 February 27, 2025	Pembahasan Laporan Satuan Pengawasan Intern Triwulan IV Tahun 2024. Discussion of the Internal Audit Unit Report for Quarter IV, 2024.
3	17 November 2025 November 17, 2025	Laporan SPI Triwulan III. SPI Report for Quarter III.
4	11 Desember 2025 December 11, 2025	Usulan PKPT Tahun 2026. Proposed 2026 PKPT.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, SPI telah melaksanakan berbagai penugasan audit yang mencakup evaluasi kepatuhan, efektivitas proses bisnis, pengendalian internal, hingga pengelolaan risiko di sejumlah unit kerja dan aktivitas operasional Perusahaan. Rekapitulasi pelaksanaan audit tersebut disajikan sebagai berikut:

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT UNIT DUTIES IN 2025

Throughout 2025, Internal Audit Unit (SPI) carried out various audit assignments, including compliance evaluations, business process effectiveness, internal controls, and risk management across several work units and operational activities of the Company. A summary of these audits is presented below:

Rekapitulasi Pelaksanaan Audit Tahun 2025 Satuan Pengawasan Intern
Recapitulation of Audit Implementation of Internal Audit Unit

No	*Auditee*	Dasar Pelaksanaan/Surat Perintah Basis for Implementation/Order Letter	Waktu Pelaksanaan Audit Audit Implementation Time
1	*Branch* Tanjung Emas Tanjung Emas Branch	PW.02.01/16/4/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 tanggal 16 April 2025 PW.02.01/16/4/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 dated April 16, 2025	16 April sd 6 Mei 2025 April 16 to May 6, 2025
2	*Branch* Gresik Gresik Branch	PW.02.01/19/5/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 tanggal 19 Mei 2025 PW.02.01/19/5/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 dated May 19, 2025	22 Mei sd 04 Juli 2025 May 22 to July 4, 2025
3	*Branch* Trisakti Trisakti Branch	PW.02.01/27/7/2/MPPI/DIRU/PL MT-25 tanggal 27 Juli 2025 PW.02.01/27/7/2/MPPI/DIRU/PL MT-25 dated July 27, 2025	28 Juli sd 29 Agustus 2025 July 28 to August 29, 2025
4	*Branch* Balikpapan Balikpapan Branch	PW.02.01/27/7/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 tanggal 27 Juli 2025 PW.02.01/27/7/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 dated July 27, 2025	28 Juli sd 29 Agustus 2025 July 28 to August 29, 2025
5	PT Pelabuhan Tanjung Priok	PW.02.01/10/10/1/MPPI//-25 tanggal 10 Oktober 2025 PW.02.01/10/10/1/MPPI//-25 dated October 10, 2025	13 Oktober sd 12 November 2025 October 13 to November 12, 2025
6	Kantor Pusat PMT PMT Head Office	PW.02.01/12/12/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 tanggal 12 Desember 2025 PW.02.01/12/12/1/MPPI/DIRU/PL MT-25 dated December 12, 2025	15 Desember 2025 sd 15 Januari 2026 December 15, 2025 to January 15, 2026

PENILAIAN KINERJA SPI

Berikut disampaikan penilaian kinerja Satuan Pengawasan Internal tahun 2025, berdasarkan KPI Satuan Pengawasan Internal:

INTERNAL AUDIT UNIT PERFORMANCE ASSESSMENT

The following is the 2025 Internal Audit Unit performance assessment, based on the Internal Audit Unit's KPIs:

No	Indikator Indicator	Perspektif Perspective	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Skor Score	Pencapaian Achievement (%)
1	EBITDA	Keuangan Finance	5	Rp Miliar Rp Billion	1.207,67	780,28	3,23	64,61
2	Pendapatan Revenue	Keuangan Finance	5	Rp Miliar Rp Billion	6.288,02	5.669,51	4,51	90,16
3	BOPO	Keuangan Finance	5	%	86,43	88,99	4,86	97,12
4	*Actual Cost/Budget Cost*	Keuangan Finance	5	%	100	99	5,05	101,01
5	Implementasi Manajemen Risiko Implementation of Risk Management	Proses Bisnis Internal Internal Business Processes	5	%	100	110	5,50	110
6	Penyelesaian Rekomendasi Temuan Audit Internal Resolution of Recommendations from Internal Audit Findings	Proses Bisnis Internal Internal Business Processes	15	%	80	87	16,31	108,75
7	Penyelesaian Rekomendasi Temuan Audit Eksternal Resolution of Recommendations from External Audit Findings	Proses Bisnis Internal Internal Business Processes	10	%	75	100	11	110

No	Indikator Indicator	Perspektif Perspective	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Skor Score	Pencapaian Achievement (%)
8	Kegiatan Audit Internal sesuai PKPT terintegrasi dan sinergi audit Internal Audit Activities in accordance with the PKPT, featuring integrated and synergistic audits	Proses Bisnis Internal Internal Business Processes	20	%	100	100	20	100
9	Penyelesaian atas permintaan *review* dari unit kerja Resolution of a review request from a work unit	Proses Bisnis Internal Internal Business Processes	15	%	4	5	16,50	110
10	Penilaian kapabilitas SPI SPI Capability Assessment	Pelanggan Customers	10	%	100	100	10,00	100
11	Jumlah Ide Inovasi Number of Innovative Ideas	*Learning & Growth*	5	Number	1	1	5	100
Total Skor Tertimbang Total Weighted Score								**101,96**

Komite di Bawah Direksi
Committees under the Board of Director

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi membentuk komite di bawah Direksi, yaitu Komite Keberlanjutan (ESG) dan Komite Tata Kelola, Manjemen Risiko, dan Kepatuhan ("Komite GRC"). Latar belakang pembentukan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab masing-masing komite dijelaskan di bawah ini.

KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Komite Keberlanjutan (ESG) PT Pelindo Multi Terminal dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 tanggal 12 Desember 2025 tentang Pembentukan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Komite Keberlanjutan (ESG) PT Pelindo Multi Terminal. Pembentukan Komite ini dilatarbelakangi kebutuhan Perusahaan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta meningkatkan kinerja bisnis dengan memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), guna membantu Direksi dalam mengawasi dan memastikan strategi serta implementasi ESG berjalan efektif, terintegrasi, dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Berdasarkan Piagam Komite Keberlanjutan (ESG), kualifikasi keanggotaan Komite ditentukan berdasarkan jenjang jabatan struktural di Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua Komite merupakan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk.
2. Anggota Komite merupakan pejabat setingkat Senior Vice President (BOD-1) atau Vice President (BOD-2).
3. Pengarah Komite adalah Dewan Direksi PT Pelindo Multi Terminal.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN

Keanggotaan Komite Keberlanjutan (ESG) ditetapkan secara *ex officio*, yaitu melekat pada jabatan yang diduduki oleh pejabat terkait di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Dengan demikian, pengangkatan maupun berakhirnya keanggotaan seseorang dalam Komite mengikuti status jabatannya, tanpa memerlukan penetapan pengangkatan atau pemberhentian secara tersendiri di luar Keputusan Direksi ini.

In carrying out its duties in managing the Company, the Board of Directors has established committees under the Board of Directors, namely the ESG Committee and the GRC Committee. The background for the establishment, scope, duties and responsibilities of each committee are described below.

THE ESG COMMITTEE

The ESG Committee of PT Pelindo Multi Terminal was established pursuant to the Board of Directors' Decree of PT Pelindo Multi Terminal No. TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 dated December 12, 2025, concerning the Establishment, Duties, and Working Mechanism of ESG Committee of PT Pelindo Multi Terminal. The establishment of the Committee was driven by the Company's need to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDG's) and enhance business performance by incorporating Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, thereby assisting the Board of Directors in overseeing and ensuring that the Company's ESG strategy and implementation are carried out effectively, in an integrated manner, and generate sustainable value for the Company and its stakeholders.

QUALIFICATIONS FOR MEMBERSHIP OF ESG COMMITTEE

Based on the ESG Committee Charter, the qualifications for Committee membership are determined according to the structural position held within the Company, with the following provisions:

1. The Committee Chairman shall be one of the appointed members of Board of Directors.
2. Committee members shall be officials at the level of Senior Vice President (BOD-1) or Vice President (BOD-2).
3. The Steering Committee shall consist of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal.

APPOINTMENT, DISMISSAL, AND TERM OF OFFICE

Membership of the ESG Committee is determined on an ex officio basis, meaning that it is attached to the structural position held by the relevant official within PT Pelindo Multi Terminal. Accordingly, the appointment and termination of an individual's Committee membership follow the status of the position held, without requiring a separate appointment or dismissal outside this Board of Directors' Decree.

JUMLAH KOMPOSISI DAN SUSUNAN KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG) TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 tanggal 12 Desember 2025, susunan keanggotaan Komite Keberlanjutan (ESG) PT Pelindo Multi Terminal terdiri dari 1 (satu) Pengarah dan 11 (sebelas) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

COMPOSITION AND STRUCTURE OF ESG COMMITTEE IN 2025

Based on the Board of Directors' Decree No. TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 dated December 12, 2025, the ESG Committee of PT Pelindo Multi Terminal consists of 1 (one) Steering Committee member and 11 (eleven) Committee members, with the following composition:

No.	Jabatan Position	Posisi Position in Committee
Pengarah Advisor	Dewan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal	
1	Direktur yang membawahi fungsi Keberlanjutan Director in Charge of Sustainability	Ketua Chairman
2	Senior Vice President Sekretariat Perusahaan Senior Vice President of Corporate Secretariat	Wakil Ketua Vice Chairman
3	Vice President TJSL Vice President of TJSL	Sekretaris 1 Secretary 1
4	Vice President Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor Vice President of Corporate Governance, Institutional and Investor Relations	Sekretaris 2 Secretary 2
5	Senior Vice President Sistem Manajemen Senior Vice President of Management Systems	Anggota Member
6	Senior Vice President Manajemen Risiko Senior Vice President of Risk Management	Anggota Member
7	Senior Vice President Perencanaan Strategis Senior Vice President of Strategic Planning	Anggota Member
8	Senior Vice President Pengelolaan Operasi Senior Vice President of Operations Management	Anggota Member
9	Senior Vice President Layanan SDM dan HSSE Senior Vice President of Human Capital Services and HSSE	Anggota Member
10	Senior Vice President Hukum Senior Vice President of Legal Affairs	Anggota Member
11	Senior Vice President Perencanaan dan Pengelolaan SDM Senior Vice President of Human Capital Planning and Management	Anggota Member
12	Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan Senior Vice President of Budgeting, Accounting, and Reporting	Anggota Member

PROFIL KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Informasi detail mengenai anggota Komite Keberlanjutan (ESG) termuat dalam bab Profil Perusahaan pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif. Adapun profil Vice President TJSL dan Vice President Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor, yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Komite Keberlanjutan (ESG), disajikan sebagai berikut.

ESG COMMITTEE PROFILE

Detailed information regarding the members of ESG Committee is contained in the Company Profile chapter, under the Board of Directors' Profile and Executive Officers' Profile sections. The profile of the Vice President of Corporate Social Responsibility (CSR) & Institutional and Investor Relations, who serves as Secretary of ESG Committee, is presented below.

ZULHENDRI

Vice President TJSL | Vice President of TJSL
Menjabat sejak 2025 – saat ini
Employed since 2025 – present

Data Pribadi	Personal Data
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Usia : 53 Tahun	Age : 53 Years Old
Kelahiran : Maninjau	Born in : Maninjau
Domisili : Medan	Domiciled in : Medan
Riwayat Pendidikan	**Educational History**
S1 Teknik Industri, Universitas Harapan Medan (2005)	S1 Teknik Industri, Universitas Harapan Medan (2005)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
1. Vice President Kinerja Perusahaan, PT Pelindo Multi Terminal (2021-2025) 2. Vice President Pengembangan Pembelajaran, PT Pelabuhan Indonesia I (2019-2021)	1. Vice President of Corporate Performance, PT Pelindo Multi Terminal (2021-2025) 2. Vice President of Learning Development, PT Pelabuhan Indonesia I (2019-2021)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Tidak ada	None
Dasar Hukum Pengangkatan	**Legal Basis for Appointment**
Menjabat sebagai Vice President TJSL berdasarkan Keputusan Direksi Nomor TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 tanggal 12 Desember 2025	Served as Vice President of CSR & Institutional and Investor Relations based on Board of Directors Decree Number TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 dated December 12, 2025

LESTARI UTAMI

Vice President Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor | Vice President of Corporate Governance, Institutional and Investor Relations
Menjabat sejak 2025 – saat ini
Employed since 2025 – present

Data Pribadi	Personal Data
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Usia : 37 Tahun	Age : 37 Years Old
Kelahiran : Medan	Born in : Medan
Domisili : Tangerang	Domiciled in : Tangerang
Riwayat Pendidikan	**Educational History**
1. S2 Manajemen, Telkom University (2024) 2. S1 Teknik Informatika, Universitas Harapan Medan (2011)	1. S2 Manajemen, Telkom University (2024) 2. S1 Teknik Informatika, Universitas Harapan Medan (2011)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
1. *Certificate ESG Risk Management* 2. *Certified Financial Risk Management Professional* (CFRMP) 3. Brevet Pajak 4. Sertifikasi *Implementing* GRC (*Governance, Risk Management & Complience*	1. Certificate ESG Risk Management 2. Certified Financial Risk Management Professional (CFRMP) 3. Brevet Pajak 4. Certificate Implementing GRC (Governance, Risk Management & Complience
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
Plt. Assistant Senior Manager Manajemen Risiko (2024-2025)	Acting Senior Assistant Manager of Risk Management (2024-2025)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Komite Audit PT Prima Husada Cipta Medan (2025-sekarang)	Audit Committee PT Prima Husada Cipta Medan (2025-present)
Dasar Hukum Pengangkatan	**Legal Basis for Appointment**
Menjabat sebagai Vice President Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor berdasarkan Keputusan Direksi Nomor TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 tanggal 12 Desember 2025	Served as Vice President of CSR & Institutional and Investor Relations based on Board of Directors Decree Number TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 dated December 12, 2025

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Keberlanjutan (ESG) berpedoman pada prinsip objektivitas, profesionalisme, dan integritas. Setiap anggota Komite melaksanakan tugas secara independen dalam pengambilan pertimbangan dan rekomendasi, serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.

ESG COMMITTEE INDEPENDENCE STATEMENT

In carrying out its duties and responsibilities, the Sustainability (ESG) Committee is guided by the principles of objectivity, professionalism, and integrity. Each member of the Committee performs their duties independently in forming judgments and recommendations, and avoids any form of conflict of interest that may affect the objectivity of the performance of their duties.

PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Keberlanjutan (ESG) berpedoman pada Piagam Komite Keberlanjutan (ESG) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 tanggal 12 Desember 2025. Piagam ini mengatur fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan mekanisme kerja Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Berdasarkan Piagam Komite Keberlanjutan (ESG), tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

1. Tugas
   a. Merumuskan dan mengembangkan strategi keberlanjutan jangka panjang dan jangka pendek yang selaras dengan Peta Jalan (*Roadmap*) ESG Induk Perusahaan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
   b. Memantau dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan Perusahaan, termasuk indikator kinerja kunci terkait isu-isu lingkungan, sosial, dan tata Kelola;
   c. Merekomendasikan tujuan dan target keberlanjutan yang terukur untuk ditetapkan oleh Direksi;
   d. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan strategi mitigasi atas risiko dan peluang keberlanjutan yang dihadapi Perusahaan;
   e. Memastikan proses penyusunan Laporan Keberlanjutan tahunan dilaksanakan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan standar pelaporan yang relevan;
   f. Memastikan Perusahaan mematuhi standar keberlanjutan yang relevan, seperti ISO 14001;
   g. Mendorong keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait keberlanjutan Perusahaan;
   h. Mendorong promosi inovasi dan riset dalam praktik keberlanjutan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks;
   i. Mengarahkan upaya komunikasi dan edukasi keberlanjutan, baik secara internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman;
   j. Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keberlanjutan.
2. Tanggung Jawab
   a. Komite Keberlanjutan (ESG) bertanggung jawab langsung kepada Direksi Perusahaan.
   b. Secara periodik melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas keberlanjutan kepada Direksi.
   c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan yang bersifat sensitif yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.

ESG COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, ESG Committee is guided by the ESG Committee Charter as stipulated in Board of Directors Decree No. TL.01/12/12/2/TJSK/DIRU/PLMT-25 dated December 12, 2025. This Charter regulates the Committee's functions, duties, responsibilities, authorities, and working mechanisms.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ESG COMMITTEE

Based on the ESG Committee Charter, the Committee's duties and responsibilities are as follows:

1. Duties
   a. Formulating and developing long-term and short-term sustainability strategies aligned with the Parent Company's ESG Roadmap and the Company's Long-Term Plan (RJPP);
   b. Monitoring and evaluating the Company's sustainability performance, including key performance indicators related to environmental, social, and governance issues;
   c. Recommend measurable sustainability goals and targets to be established by the Board of Directors;
   d. Identify, analyze, and develop mitigation strategies for sustainability risks and opportunities facing the Company;
   e. Ensure the annual Sustainability Report preparation process is carried out transparently, accurately, and in accordance with relevant reporting standards;
   f. Ensure the Company complies with relevant sustainability standards, such as ISO 14001;
   g. Encourage active stakeholder involvement in the Company's sustainability decision-making process;
   h. Encourage the promotion of innovation and research in sustainability practices to address increasingly complex challenges;
   i. Direct sustainability communication and education efforts, both internally and externally, to increase awareness and understanding;
   j. Monitor the Company's compliance with sustainability laws and regulations.
2. Responsibilities
   a. The ESG Committee reports directly to the Board of Directors.
   b. Periodically report on the results of its performance and implementation of sustainability duties to the Board of Directors.
   c. Maintain the confidentiality of sensitive Company data and information obtained in the course of its duties.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi anggota Komite GRC, Perusahaan memberikan kesempatan kepada anggota Komite GRC untuk mengikuti berbagai program pengembangan kapasitas, seperti seminar, pelatihan, *workshop*, dan kegiatan peningkatan wawasan lainnya. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite GRC selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR ESG COMMITTEE

To support the competency improvement of GRC Committee members, the Company provides opportunities for GRC Committee members to participate in various capacity development programs, such as seminars, training, workshops, and other insight-building activities. The competency development activities participated in by GRC Committee members during 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Materi** Subject	**Waktu Pelaksanaan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Edi Priyanto (Direktur SDM) (Human Capital Director)	Internalisasi Keberlanjutan dan Pelaporan Keberlanjutan Internalizing Sustainability and Sustainability Reporting	26 Mei 2025 May 26, 2025	PT PMLI (Pelindo)
	Urgensi Resiliensi Pada Unit Bisnis Melalui Pembangunan *Busniness Continuity Management* (BCM) Urgency of Resilience in Business Units Through the Development of Business Continuity Management (BCM)	07 Juli 2025 July 7, 2025	PT PMLI (Pelindo)
Finan Syaifullah (Senior Vice President Sekretariat Perusahaan) (Senior Vice President of Corporate Secretary)	*Workshop "ESG Leadership for Port Business Excellence*" "ESG Leadership for Port Business Excellence" Workshop	05 Agustus 2025 August 5, 2025	PMT
	"*Leading with Sustainability, Building a Brighter Future Together*"	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Pelindo Corpu University
Zulhendri (Vice President TJSL) (Vice President of TJSL)	ESG Forum ESG Forum	5 Agustus 2025 August 5, 2025	PMT
	Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Development of a community empowerment program	9 Agustus 2025 August 9, 2025	PMLI
Lestari Utami (Vice President Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor) (Vice President of Corporate Governance, Institutional and Investor Relations)	*Contingency Plan Based Shareholder Aspiration*: memahami pentingnya peran *Contingency plan* dalam konsep rencana keberlangsungan usaha/BCM sesuai APS BUMN tahun 2025 Contingency Plan Based on Shareholder Aspirations: Understanding the Importance of Contingency Plans in the Concept of Business Continuity Management (BCM) in Accordance with the 2025 APS for State-Owned Enterprises	14 Mei 2025 May 14, 2025	PMLI
	Resilience Forum bertajuk "Kesiapan Menghadapi Krisis Multilevel: Kolaborasi dan Integrasi Yang Efektif" Resilience Forum titled "Preparedness for Multilevel Crises: Effective Collaboration and Integration"	2 Mei 2025 May 2, 2025	PMLI

RAPAT KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG)

Kebijakan

Berdasarkan Piagam Komite Keberlanjutan (ESG), Komite mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pelaksanaan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan hasil rapat beserta rekomendasi Komite selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perusahaan.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Keberlanjutan (ESG)

Di tahun 2025, Komite Keberlanjutan (ESG) masih dalam tahap inisiasi dan operasionalisasi, sehingga rapat komite belum diselenggarakan.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE KEBERLANJUTAN (ESG) TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025 Komite Keberlanjutan ESG telah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, diantaranya:

1. Menyusun database konsumsi energi di seluruh wilayah operasional PMT, termasuk anak perusahaan dan *branch*.
2. Menyusun perencanaan program kerja terkait keberlanjutan.
3. Menginisiasi *roadmap* keberlanjutan ESG.
4. Melaksanakan penyusunan laporan keberlanjutan berdasarkan arahan dari Pemegang Saham atau Induk Perusahaan.

KOMITE GRC

Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Komite GRC) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 tanggal 1 April 2024 tentang Pembentukan dan Mekanisme Kerja Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan PT Pelindo Multi Terminal. Pembentukan Komite ini dilatarbelakangi kebutuhan Perusahaan untuk mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis dengan memperhatikan aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan, khususnya terkait pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perusahaan, serta pengendalian kegiatan strategis usaha Perusahaan dan Grup Perusahaan.

KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE GRC

Kualifikasi untuk menjadi anggota Komite GRC ditentukan berdasarkan jenjang jabatan struktural di Perusahaan. Ketua dan Wakil Ketua Komite GRC merupakan Pejabat Struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, sedangkan Sekretaris merupakan Pejabat Struktural 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah Direksi. Adapun Anggota Komite GRC merupakan Pejabat Struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direktur terkait.

SUSTAINABILITY (ESG) COMMITTEE MEETINGS

Policy

Based on the Sustainability (ESG) Committee Charter, the Committee holds regular meetings, at least twice a year, or as needed. Each meeting is documented in minutes signed by all attending Committee members. The meeting results, along with the Committee's recommendations, are then submitted in writing to the Company's Board of Directors.

Meeting Frequency and Attendance of Sustainability (ESG) Committee

In 2025, Sustainability (ESG) Committee was still in its initiation and operationalization phase, and therefore no committee meetings were held.

BRIEF REPORT ON DUTIES IMPLEMENTATION AND ACTIVITIES OF ESG COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, the ESG Sustainability Committee has carried out all of its duties and responsibilities effectively, including:

1. Compiling a database of energy consumption across all PMT operational areas, including subsidiaries and branches.
2. Developing work plans related to sustainability.
3. Initiating an ESG sustainability roadmap.
4. Preparing sustainability reports based on directives from shareholders or the holding company.

GRC COMMITTEE

Governance, Risk Management, and Compliance Committee (GRC Committee) was established pursuant to the Board of Directors' Decree of PT Pelindo Multi Terminal No. PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 dated April 1, 2024, concerning the Establishment and Working Mechanism of Governance, Risk Management, and Compliance Committee of PT Pelindo Multi Terminal. The Committee was established to support the Company's performance improvement and business transformation by incorporating the principles of Good Corporate Governance, risk management, and compliance into the Company's decision-making process, particularly in relation to investment management, strategic operational policies, and the control of the Company's and the Group's strategic business activities.

QUALIFICATIONS FOR MEMBERSHIP OF GRC COMMITTEE

The qualifications for membership of GRC Committee are determined based on the structural position held within the Company. The Chairman and Vice Chairman of GRC Committee shall be Structural Officials one level below the Board of Directors, while the Secretary shall be a Structural Official one or two levels below the Board of Directors. The members of GRC Committee shall be Structural Officials one level below the respective Director.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite GRC diangkat dan diberhentikan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi. Setiap pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite GRC selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Adapun keanggotaan Komite GRC bersifat melekat atau *ex officio* pada Pejabat Struktural sesuai jabatannya, sehingga status keanggotaan seseorang dalam Komite GRC mengikuti masa jabatannya pada posisi struktural terkait di Perusahaan. Apabila terdapat kekosongan jabatan pada suatu divisi yang termasuk dalam keanggotaan Komite GRC, maka pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak dapat menggantikan keanggotaan pada Komite GRC.

APPOINTMENT, DISMISSAL, AND TERM OF OFFICE

The Chairman, Vice Chairman, Secretary, and members of GRC Committee are appointed and dismissed by the Board of Directors through a Board of Directors' Decree. Each appointment and dismissal of the Chairman, Secretary, and members of GRC Committee shall subsequently be reported to the Board of Commissioners.

Membership of GRC Committee is attached to the relevant structural position (ex officio). Accordingly, an individual's membership in GRC Committee shall follow the term of office of the relevant structural position within the Company. If a vacancy occurs in a division represented on GRC Committee, the acting officer or officer-in-charge may not assume membership in GRC Committee.

JUMLAH KOMPOSISI DAN SUSUNAN KOMITE GRC TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 tanggal 1 April 2024, Komite GRC beranggotakan 12 (dua belas) orang dengan susunan sebagai berikut:

COMPOSITION AND STRUCTURE OF GRC COMMITTEE IN 2025

Based on the Board of Directors' Decree of PT Pelindo Multi Terminal No. PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 dated April 1, 2024, GRC Committee consists of 12 (twelve) members with the following composition:

Susunan Keanggotaan Komite GRC per 31 Desember 2025
Composition of GRC Committee as of December 31, 2025

No.	Jabatan Position	Posisi Position in Committee
1	Senior Vice President Perencanaan Strategis Senior Vice President of Strategic Planning	Ketua Chairman
2	Senior Vice President Hukum Senior Vice President of Legal Affairs	Wakil Ketua Vice Chairman
3	Vice President Perencanaan Perusahaan Vice President of Corporate Planning	Sekretaris Secretary
4	Senior Vice President Manajemen Risiko Senior Vice President of Risk Management	Anggota Member
5	Senior Vice President Kerjasama Usaha & Pembinaan Anak Perusahaan Senior Vice President of Business Partnerships & Subsidiary Development	Anggota Member
6	Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, & Pelaporan Senior Vice President of Budgeting, Accounting, & Reporting	Anggota Member
7	Senior Vice President Pengelolaan Keuangan & Perpajakan Senior Vice President of Financial Management & Taxation	Anggota Member
8	Senior Vice President Sekretariat Perusahaan Senior Vice President of Corporate Secretary	Anggota Member
9	Senior Vice President Perencanaan dan Pengelolaan SDM Senior Vice President of Human Capital Planning and Management	Anggota Member
10	Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan Senior Vice President of Port Facilities	Anggota Member
11	Senior Vice President Peralatan Pelabuhan Senior Vice President of Port Equipment	Anggota Member
12	Senior Vice President Teknologi Informasi Senior Vice President of Information Technology	Anggota Member

PROFIL KOMITE GRC

Informasi detail mengenai anggota Komite GRC termuat dalam bab Profil Perusahaan pada bagian Profil Pejabat Eksekutif. Adapun profil Vice President Perencanaan Perusahaan, yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Komite GRC, disajikan sebagai berikut.

GRC COMMITTEE PROFILE

Detailed information regarding the GRC Committee members is contained in the Company Profile chapter, under Executive Officer Profiles. The profile of the Vice President of Corporate Planning, who serves as Secretary of GRC Committee, is presented below.

Ahmad Fauzi
Vice President Perencanaan Perusahaan | Vice President Perencanaan Perusahaan
Menjabat sejak 2024 – saat ini
Served since 2024 – present

Data Pribadi	**Personal Data**
Warga Negara Indonesia Usia : 39 tahun Kelahiran : P. Berandan Domisili : Medan	Indonesian citizen Age : 39 years old Born in : P. Berandan Domiciled in : Medan
Riwayat Pendidikan	**Educational History**
S1, Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya (2006)	Bachelor of Science in Civil Engineering, Sriwijaya University (2006)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Pengalaman Kerja	**Work Experience**
1. Vice President Kerja Sama Usaha PT Pelindo Multi Terminal (2021-2024) 2. Vice President Pengembangan Bisnis PT Pelindo Multi Terminal (2019-2021)	1. Vice President of Business Cooperation at PT Pelindo Multi Terminal (2021–2024) 2. Vice President of Business Development at PT Pelindo Multi Terminal (2019–2021)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Tidak Ada	None
Dasar Hukum Pengangkatan	**Legal Basis for Appointment**
Menjabat sebagai Vice President Perencanaan Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 tanggal 1 April 2024	Served as Vice President of Corporate Planning based on the Decree of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal Number PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 dated April 1, 2024

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE GRC

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite GRC senantiasa menjunjung tinggi prinsip objektivitas, integritas, dan profesionalisme. Setiap anggota Komite melaksanakan tugas secara bebas dari benturan kepentingan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan pertimbangan yang objektif dan mengutamakan kepentingan Perusahaan.

GRC COMMITTEE INDEPENDENCE STATEMENT

In carrying out its duties and responsibilities, the GRC Committee consistently upholds the principles of objectivity, integrity, and professionalism. Each member of the Committee performs their duties free from conflicts of interest and provides recommendations to the Board of Directors based on objective considerations, prioritizing the best interests of the Company.

PIAGAM KOMITE GRC

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite GRC mengacu pada Keputusan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 tanggal 1 April 2024. Keputusan ini mengatur fungsi, tugas, kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, serta mekanisme kerja Komite GRC sebagai pedoman dalam mendukung proses pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan.

GRC COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, GRC Committee refers to the Decree of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 dated April 1, 2024. This Decree regulates the functions, duties, authorities, responsibilities, membership, and working mechanisms of GRC Committee as a guideline in supporting the Board of Directors' decision-making process in accordance with the principles of good corporate governance, risk management, and compliance.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE GRC

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 tanggal 1 April 2024, tugas dan tanggung jawab Komite GRC adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugasnya secara kolektif dalam membantu Direksi.
2. Memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen tata kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan atas usulan program Investasi Perusahaan, kebijakan strategis operasional Perusahaan, dan pengendalian kegiatan strategis usaha Perusahaan.
3. Memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian usulan program Investasi Perusahaan, kebijakan strategis operasional Perusahaan, dan pengendalian kegiatan strategis usaha Perusahaan terkait dengan tata kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Harus bersikap independen dan objektif serta profesional dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
5. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian dari Direksi, sebelum keputusan/kebijakan strategis akan ditetapkan oleh Perusahaan dengan ruang lingkup Investasi/Proyek Strategis Perusahaan minimal memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
   a. Proyek Investasi atau aksi korporasi dengan nilai lebih besar dari Rp100.000.000.000.-;
   b. Proyek Investasi yang melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan banyak instansi pemerintahan;
   c. Proyek Investasi yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Direksi sebagai Investasi strategis; atau
   d. Proyek Strategis Nasional dan/atau percepatan pembangunan nasional yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perusahaan.
6. Melaksanakan Tugas Khusus dari Direksi dengan pengaturan sebagai berikut:
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite GRC oleh Direksi dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
      i) Nama yang diberi tugas;
      ii) Sifat penugasan;
      iii) Lingkup pekerjaan;
      iv) Tujuan dan sasaran pekerjaan; dan
      v) Jangka waktu penugasan.
   b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite GRC sepenuhnya ditentukan oleh Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
   c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite GRC dapat:
      i) Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi, serta dapat meminta notulen rapat Dewan Komisaris (jika dianggap perlu dan diperbolehkan Dewan Komisaris);

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF GRC COMMITTEE

Based on the Decree of Board of Directors of PT Pelindo Multi Terminal No. PW.05/02/1/4/2/RINO/DIRU/PLMT-24 dated April 1, 2024, the duties and responsibilities of GRC Committee are as follows:

1. Carrying out its duties collectively to assist the Board of Directors.
2. Ensuring the suitability and completeness of governance, Risk Management, and Compliance documents for the Company's proposed investment programs, the Company's strategic operational policies, and the control of the Company's strategic business activities.
3. Provide opinions on the completeness and suitability of the Company's proposed investment program, the Company's strategic operational policies, and the control of the Company's strategic business activities related to governance, risk management, and compliance with laws and regulations.
4. Must be independent, objective, and professional in carrying out their duties and in reporting, and be directly accountable to the Board of Directors.
5. Identify matters requiring the attention of the Board of Directors before strategic decisions/policies are established by the Company, with the scope of the Company's Investments/Strategic Projects meeting at least one of the following criteria:
   a. Investment projects or corporate actions with a value higher than Rp100,000,000,000;
   b. Investment projects involving coordination and cooperation with multiple government agencies;
   c. Investment projects considered and designated by the Board of Directors as strategic investments; or
   d. National strategic projects and/or national development acceleration assigned to the Company by the government.
6. Carry out special tasks assigned by the Board of Directors with the following provisions:
   a. The assignment of special tasks to GRC Committee by the Board of Directors is carried out by a written order containing:
      i) The name of the person assigned;
      ii) Nature of the assignment;
      iii) Scope of work;
      iv) Objectives and targets of the work; and
      v) Duration of the assignment.
   b. The scope of GRC Committee's specific tasks is fully determined by the Board of Directors, provided they do not conflict with applicable laws and regulations;
   c. In carrying out its specific tasks, GRC Committee may:
      i) Review all necessary records, documents, and other information, including minutes of Board of Directors meetings, and may request minutes of Board of Commissioners meetings (if deemed necessary and permitted by the Board of Commissioners);

ii) Melakukan analisis dan evaluasi, bekerja sama dengan struktural unit kerja terkait atau dengan Komite dibawah Dewan Komisaris, serta dapat meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite GRC dengan beban Perusahaan

d. Komite GRC menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Direksi, dan apabila berhubungan dengan Dewan Komisaris, maka laporannya wajib ditembuskan ke Dewan Komisaris.

ii) Conduct analysis and evaluation, collaborating with related structural work units or with Committees under the Board of Commissioners, and may request the assistance of experts or consultants to assist GRC Committee with Company-related responsibilities.

d. GRC Committee submits a report on the implementation of its specific tasks to the Board of Directors, and if related to the Board of Commissioners, a copy of the report must be forwarded to the Board of Commissioners.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE GRC

Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi anggota Komite GRC, Perusahaan memberikan kesempatan kepada anggota Komite GRC untuk mengikuti berbagai program pengembangan kapasitas, seperti seminar, pelatihan, *workshop*, dan kegiatan peningkatan wawasan lainnya. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite GRC selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

GRC COMMITTEE TRAINING AND/ OR COMPETENCY DEVELOPMENT

To support the competency improvement of GRC Committee members, the Company provides opportunities for GRC Committee members to participate in various capacity building programs, such as seminars, training, workshops, and other insight-enhancing activities. The competency development activities that GRC Committee members participated in during 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Subject	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis) (Senior Vice President of Strategic Planning) Daddy Sumartono (Senior Vice President Hukum) (Senior Vice President of Legal Affairs) Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan) (Vice President of Corporate Planning)	• LenKa *Sharing Session* SPSL & Regional 2: Berlabuh ft. Ngopi "Tantangan Kepatuhan, Target Bisnis, dan Pengelolaan Risiko" LenKa Sharing Session on SPSL & Regional 2: Berlabuh ft. Ngopi "Compliance Challenges, Business Goals, and Risk Management"	• 3 Februari 2025 February 3, 2025	PMLI
	• Resilience Forum bertajuk "Kesiapan Menghadapi Krisis Multilevel: Kolaborasi dan Integrasi Yang Efektif" Resilience Forum titled "Preparedness for Multilevel Crises: Effective Collaboration and Integration"	• 14 Mei 2025 May 14, 2025	PMLI

RAPAT KOMITE GRC

Kebijakan

Penyelenggaraan rapat Komite GRC dipimpin oleh Ketua Komite GRC dan dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua dan 3 (tiga) orang anggota. Jika dipandang perlu, Komite GRC dapat mengundang Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Direksi yang terkait dengan materi rapat, dan setiap pelaksanaan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite GRC

Sepanjang tahun 2025, Komite GRC melakukan rapat dengan frekuensi sebanyak 2 kali. Berikut risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite GRC sebagaimana terlampir di bawah ini:

GRC COMMITTEE MEETINGS

Policy

GRC Committee meetings are chaired by the GRC Committee Chairman and are considered valid if attended by the Chairman and three (3) members. If deemed necessary, GRC Committee may invite structural officials one level below the Board of Directors related to the meeting material. Each meeting's proceedings are documented in meeting minutes signed by all members present.

GRC Committee Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2025, GRC Committee held meetings with a frequency of 2 times. The minutes and attendance summary of GRC Committee meetings are attached below:

Tingkat Kehadiran Komite GRC pada Rapat
GRC Committee Meeting Attendance

Komite GRC GRC Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran Attendance (%)
Imron Eryandy (Senior Vice President Perencanaan Strategis) (Senior Vice President Strategic Planning)	2	2	100%
Daddy Sumartono (Senior Vice President Hukum) (Senior Vice President of Legal Affairs)	2	2	100%
Ahmad Fauzi (Vice President Perencanaan Perusahaan) Vice President of Corporate Planning	2	2	100%
Emilda Andayani (Senior Vice President Manajemen Risiko) (Senior Vice President of Risk Management)	2	2	100%
I Wayan Wirawan (Senior Vice President Kerjasama Usaha & Pembinaan Anak Perusahaan) (Senior Vice President of Business Partnerships & Subsidiary Development)	2	2	100%
Endar Dwi Sutristiono (Plt) (Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, & Pelaporan) (Acting) (Senior Vice President of Budgeting, Accounting, & Reporting)	2	2	100%
Maslakhodima Siregar (Senior Vice President Pengelolaan Keuangan & Perpajakan) (Senior Vice President of Financial Management & Taxation)	2	2	100%
Finan Syaifullah (Senior Vice President Sekretariat Perusahaan) (Senior Vice President of Corporate Secretary)	2	2	100%
Budy Setiawan (Senior Vice President Perencanaan dan Pengelolaan SDM) (Senior Vice President of Human Capital Planning and Management)	2	2	100%
Bernas P.D. Nababan (Senior Vice President Fasilitas Pelabuhan) (Senior Vice President of Port Facilities)	2	2	100%
Nurwahyudi Panca (Senior Vice President Peralatan Pelabuhan) (Senior Vice President of Port Equipment)	2	2	100%
Indra Siregar (Senior Vice President Teknologi Informasi) (Senior Vice President of Information Technology)	2	2	100%

Agenda Rapat Komite GRC
Agenda Rapat Komite GRC

No	Tanggal Date	Agenda
1	8 September 2025 September 8, 2025	Pembahasan Final Usulan Investasi RKAP Tahun 2026 oleh Komite GRC PT Pelindo Multi Terminal Final Discussion of the 2026 RKAP Investment Proposal by the GRC Committee of PT Pelindo Multi Terminal
2	6 Oktober 2025 October 6, 2025	Pembahasan Komite GRC terkait Usulan Investasi Tahun 2026 Pelindo Grup (PMT) Discussion by the GRC Committee on the Proposed 2026 Investment Plan of Pelindo Group (PMT

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE GRC TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025 Komite GRC telah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, diantaranya:

1. Menyusun perencanaan investasi di seluruh wilayah operasional PMT, termasuk anak perusahaan dan *branch*.
2. Mengusulkan perencanaan Investasi.
3. Telah dilakukan Pembahasan Komite GRC terkait Usulan Investasi Tahun 2026 Pelindo Group (PMT).

BRIEF REPORT ON GRC COMMITTEE'S DUTIES IMPLEMENTATION AND ACTIVITIES IN 2025

Throughout 2025, the GRC Committee has successfully carried out all of its duties and responsibilities, including:

1. Developing investment plans across all of PMT's operational areas, including subsidiaries and branches.
2. Proposing investment plans.
3. The GRC Committee has held discussions regarding the Pelindo Group (PMT) Investment Proposals for 2026

Auditor Eksternal
External Auditor

Perusahaan melibatkan akuntan publik independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan. Selama proses audit tersebut, akuntan publik memberikan opini mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan audit dilakukan secara profesional, objektif, dan independen sesuai Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup penugasan yang telah disepakati bersama Perusahaan. Kehadiran auditor eksternal juga menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan Perusahaan.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan kegiatan usaha Perusahaan. Laporan keuangan disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)).

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.

The Company engages an independent public accountant to audit its annual financial statements. During the audit process, the public accountant provides an opinion on the conformity of the presentation of financial statements with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

The audit is conducted professionally, objectively, and independently in accordance with the Professional Standards for Public Accountants and the scope of the assignment agreed upon with the Company. The presence of an external auditor is also essential in supporting the transparency, accountability, and quality of the Company's financial reporting.

COMPLIANCE WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The preparation and presentation of financial statements is the responsibility of management as a form of accountability for the management of the Company's business activities. The financial statements are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia and established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

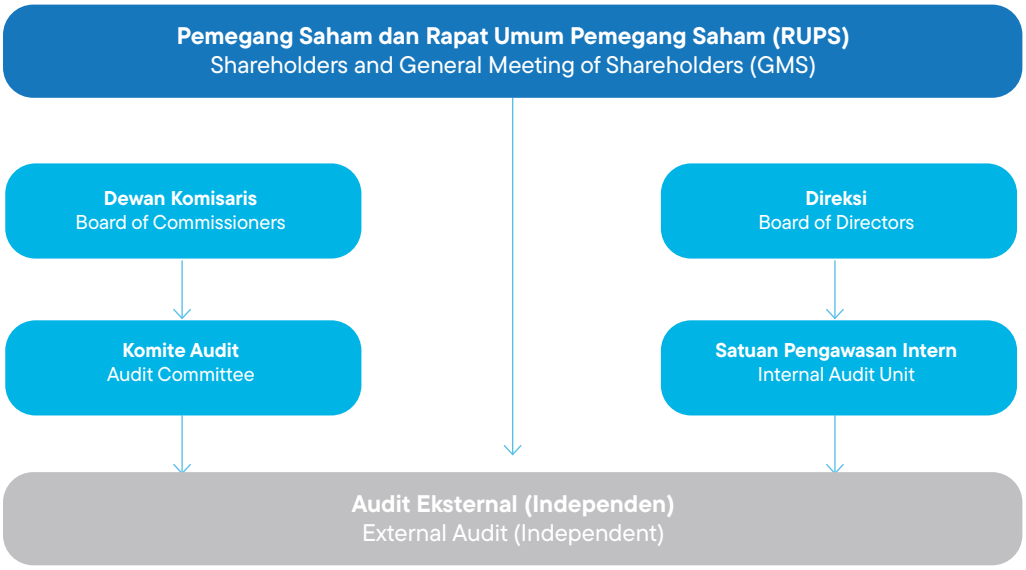
1. The audit of the Company's financial statements is conducted in accordance with the professional standards of Public Accountants which includes all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.
2. Audit includes testing and evaluating the internal control system, and examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of overall presentation of the financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.
3. As part of the audit process, Public Accounting Firms (KAP) also question management regarding management's assertions presented in the financial statements.
4. An audit contains inherent risks that material misstatements and irregularities may exist. If such misstatements or irregularities exist, the KAP will report them to management.
5. Management approves the working paper of KAP's audit of the Company for review by the relevant body or authority.

Apabila audit yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan bantuan keuangan Pemerintah Republik Indonesia, pelaksanaannya juga mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Koordinasi antara auditor eksternal dengan organ internal Perusahaan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses audit serta memastikan keandalan data. Adapun hubungan kerja auditor eksternal dengan organ internal Perusahaan dapat dilihat pada bagan berikut:

If the audit relates to the utilization of financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, its implementation also follows the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK).

Coordination between the external auditor and the Company's internal organs is carried out to support the smooth implementation of audit process and to ensure the reliability of data. The working relationship between the external auditor and the Company's internal organs is illustrated in the following diagram:



Penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagai bagian dari kewenangan pemegang saham dalam memastikan terselenggaranya audit laporan keuangan yang independen dan objektif. Kemudian, Auditor Eksternal berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di bawah Direksi serta Komite Audit yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

The appointment of External Auditor is carried out through the GMS mechanism as part of the shareholder's authority to ensure that an independent and objective financial report audit is carried out. Afterward, External Auditor coordinates with Internal Audit Unit (SPI) under the Board of Directors and Audit Committee which supports the supervisory function of Board of Commissioners.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.

2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT MECHANISM

The stages of KAP appointment mechanism:

1. Board of Commissioners through Audit Committee conducts the appointment process of external Auditor candidates by requesting assistance from the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provisions of goods/services procurement.
2. Board of Commissioners may reappoint the external auditor based on the evaluation results of the external auditor's performance to conduct an audit of the financial statements
3. Board of Commissioners shall submit the reasons for nomination to the GMS and the amount of honorarium/service fee proposed for external auditor.

4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan perusahaan.
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

4. The proposal to the GMS can be submitted through a separate letter which is part of the response letter of Board of Commissioners on the Company's annual performance
5. Board of Commissioners evaluates the performance of external auditors through the Audit Committee in accordance with the prevailing regulations and standards.
6. For the process of appointing external auditor candidates and or reappointing external auditors carried out by the GMS, Board of Commissioners is sufficient to authorize the GMS to determine the auditor.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik
Mechanism of Appointment Until Determination of Public Accountant



AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2025 pemegang saham menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 adalah KAP Purwanto, Susanti dan Surja. Menindaklanjuti hasil keputusan tersebut, Perusahaan mengeluarkan surat penunjukan melalui Surat No. PW.02.03/22/10/1/AKTS/AKPJ/PLND-25.

PUBLIC ACCOUNTANT FOR 2025

Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year held on June 19, 2025, shareholders approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, namely KAP Purwanto, Sungkoro, and Surja. Following this decision, the Company issued a letter of appointment through Letter No. PW.02.03/22/10/1/AKTS/AKPJ/PLND-25.

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Purwantono, Susanti & Surja (EY) No Reg. KMK: 603/KM.1/2015
Akuntan Accountant	Damestar Hutagalung
Tahun Audit Accountant	Tahun Buku 2025 Fiscal Year 2025
Periode Penugasan Assignment	21 Oktober 2025 - 30 April 2026 October 21, 2025 - April 30, 2026

Jasa Services	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Desember 2025 Audited Consolidated Financial Statements for the Period Ended December 31, 2025
Biaya Jasa Audit Services	Rp3.815.000.000
Jasa Lainnya Services	-
Biaya Fees	-

Berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan tahun buku 2025, KAP Purwantono, Susanti & Surja memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hasil mencerminkan bahwa posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025, termasuk kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, telah disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Based on the audit results of the 2025 financial statements, Public Accounting Firm Purwantono, Susanti & Surja issued an opinion that the Company's consolidated financial statements are presented fairly, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The results reflect that the consolidated financial position as of December 31, 2025, including the consolidated financial performance and cash flows for the fiscal year then ended, has been prepared and presented in accordance with applicable accounting principles.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA SEJAK PERUSAHAAN BERDIRI

Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai Kantor Akuntan Publik, akuntan publik yang melakukan audit, serta besaran biaya audit atas laporan keuangan Perusahaan sejak awal operasional pada tahun 2021, sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun rincian Kantor Akuntan Publik, akuntan publik, dan biaya audit dimaksud disajikan sebagai berikut:

LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS AND FEES SINCE THE COMPANY'S ESTABLISHMENT

The Company discloses information regarding the Public Accounting Firm, the public accountant who performed the audit, and the amount of audit fees for the Company's financial statements since the commencement of operations in 2021, as part of its implementation of the principles of transparency and accountability.

The details of the Public Accounting Firm, the public accountant, and the audit fees are presented as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Accountant Firm	**Akuntan** Accountant	**Jasa** Services	**Jasa Lainnya** Other Services	**Biaya** Fees **(Rp)**
2025	Purwantono, Susanti & Surja (EY) No Reg. KMK: 603/ KM.1/2015	Damestar Hutagalung *Registration*: AP.1609	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Desember 2025 Audit of Consolidated Financial Statements as of December 31, 2025	-	Rp3.815.000.000
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No Reg. KMK: 603/ KM.1/2015	Moch. Dadang Syachruna *Registration*: AP.0697	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Desember 2024 Audit of Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024	-	Rp3.598.560.000 tidak termasuk PPN excluding VAT
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No Reg. KMK: 603/ KM.1/2015	Moch. Dadang Syachruna *Registration*: AP.0697	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Desember 2023 Audit of Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024	-	3.220.000.000
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No Reg. KMK: 603/ KM.1/2015	Moch. Dadang Syachruna *Registration*: AP.0697	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Desember 2022 Audit of Consolidated Financial Statements as of December 31, 2022	-	3.335.550.000
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No Reg. KMK: 603/ KM.1/2015	Moch. Dadang Syachruna *Registration*: AP.0697	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 31 Desember 2021 Audit of Consolidated Financial Statements as of December 31, 2021	-	255.427.761

Proses penunjukan Auditor Eksternal dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, khususnya Pasal 3 yang mengatur mengenai pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

The External Auditor appointment process is conducted in accordance with Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.01/2008 concerning Public Accounting Services, specifically Article 3, which regulates the provision of audit services by Public Accountants and Public Accounting Firms.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

DESKRIPSI UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan memahami bahwa sistem pengendalian internal adalah fondasi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Menghadapi kompleksitas bisnis jasa kepelabuhanan dan logistik yang terus berkembang, Perusahaan senantiasa menjaga proses bisnis tetap terarah, responsif terhadap risiko, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Penerapan sistem pengendalian internal dilakukan dengan mengacu pada kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 yang mencakup 5 (lima) elemen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Secara operasional, kerangka pengendalian internal Perusahaan dirancang untuk memastikan efektivitas proses bisnis, keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan risiko yang lebih terukur di seluruh lini organisasi. Adapun penerapan sistem pengendalian internal tersebut mencakup 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Pengendalian Keuangan
   Perusahaan menerapkan pengendalian keuangan secara menyeluruh melalui mekanisme otorisasi anggaran, verifikasi dan validasi transaksi, rekonsiliasi data keuangan, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Seluruh aktivitas ini dilaksanakan dalam kerangka pengendalian yang memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Perusahaan.

2. Pengendalian Operasional
   Untuk menjamin efektivitas proses bisnis, Perusahaan mengimplementasikan *Standard Operational Procedure* (SOP) di setiap unit kerja, melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, serta melaksanakan audit proses bisnis secara sistematis. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan tercapainya target operasional Perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan
   Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, regulasi BUMN, serta kebijakan dan pedoman internal Pelindo Group. Sistem pengendalian internal mendukung penguatan budaya kepatuhan melalui pengawasan terhadap penerapan aturan perilaku, pengelolaan konflik kepentingan, serta pelaporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System*.

GENERAL DESCRIPTION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company understands that an internal control system is the foundation for maintaining business sustainability. Facing the ever-growing complexity of the port and logistics services business, the Company consistently maintains business processes that remain focused, responsive to risks, and support more accurate decision-making.

The internal control system is carried out in accordance with the 2013 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework, which encompasses 5 (five) elements: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

Operationally, the Company's internal control framework is designed to ensure the effectiveness of business processes, reliability of reporting, compliance with applicable regulations, and more measurable risk management across the organization. The implementation of the internal control system covers 3 (three) aspects:

1. Financial Control
   The Company implements comprehensive financial controls through budget authorization mechanisms, transaction verification and validation, financial data reconciliation, and the preparation of accurate and timely financial reports. All of these activities are carried out within a control framework that ensures accountability and efficient use of the Company's resources.

2. Operational Control
   To ensure the effectiveness of business processes, the Company implements Standard Operating Procedures (SOPs) in each work unit, conducts regular monitoring of operational activities, and conducts systematic business process audits. These efforts aim to reduce potential errors, increase efficiency, and ensure the achievement of the Company's operational targets.

3. Compliance with Regulations
   The Company ensures compliance with national laws and regulations, state-owned enterprise regulations, and Pelindo Group internal policies and guidelines. The internal control system supports the strengthening of a culture of compliance by monitoring the implementation of rules of conduct, managing conflicts of interest, and reporting suspected violations through the Whistleblowing System.

PEDOMAN DAN TUJUAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sebagai landasan dalam penerapan pengendalian internal, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Internal melalui Peraturan Direksi Nomor HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal PT Pelindo Multi Terminal.

Pedoman tersebut menempatkan pengendalian internal sebagai bagian yang melekat dalam setiap aktivitas Perusahaan, sehingga penerapannya tidak hanya menjadi tanggung jawab fungsi pengawasan, tetapi juga dijalankan secara berkelanjutan oleh seluruh Insan Perusahaan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing.

Perusahaan berupaya memastikan setiap kegiatan operasional maupun nonoperasional berjalan sesuai prosedur serta meminimalkan potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja Perusahaan. Adapun tujuan penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan aset Perusahaan;
2. Mengurangi dampak kerugian penyimpanan termasuk kecurangan/*fraud*;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan undang-undangan yang berlaku;
4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar akurat lengkap dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan; dan
6. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.

Sebagai upaya membangun sistem pengendalian internal yang lebih terukur dan adaptif terhadap risiko bisnis, Perusahaan mengacu pada kerangka pengendalian internal berbasis Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission tahun 2013.

Kerangka ini menjadi acuan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi efektivitas pengendalian di seluruh proses bisnis Perusahaan. Lebih lanjut, kerangka COSO 2013 terdiri atas 5 (lima) komponen pengendalian, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian Risiko.
3. Kegiatan Pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi.
5. Kegiatan Pemantauan.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Sesuai dengan standar COSO, penerapan pengendalian internal di Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

GUIDELINES AND OBJECTIVES OF IMPLEMENTING AN INTERNAL CONTROL SYSTEM

As a foundation for implementing internal control, the Company has established Internal Control System Guidelines through Board of Directors Regulation No. HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21 dated December 27, 2021, concerning the Internal Control System Guidelines of PT Pelindo Multi Terminal.

These guidelines establish internal control as an integral part of every Company activity. Therefore, its implementation is not solely the responsibility of the supervisory function but is also carried out continuously by all Company personnel according to their respective roles and authorities.

The Company strives to ensure that all operational and non-operational activities are carried out according to procedures and minimize potential risks that could impact the Company's performance. The objectives of implementing an internal control system within the Company include the following:

1. Maintain and secure the Company's assets;
2. Reduce the impact of storage losses including cheating/fraud;
3. Ensure the implementation of all business activities of the Company in accordance with applicable laws and regulations;
4. Provide correct accurate complete and timely financial and management information;
5. Improving the efficiency effectiveness and economy in the Company's operational activities; and
6. Increase the effectiveness of risk culture in the organization as a whole.

In an effort to build a more measurable and adaptive internal control system to business risks, the Company adheres to the 2013 COSO-based internal control framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

This framework serves as a reference for designing, implementing, and evaluating the effectiveness of controls across the Company's business processes. Furthermore, the 2013 COSO framework consists of five control components:

1. Control Environment.
2. Risk Assessment.
3. Control Activities.
4. Information and Communication.
5. Monitoring Activities.

THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

In accordance with COSO standards, internal control implementation at the Company can be described as follows:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
   Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang memengaruhi keseluruhan perusahaan dan menjadi atmosfer insan PMT dalam melakukan aktivitas dan tanggung jawab pengendalian yang menjadi bagiannya, yang terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu:
   a. Komitmen terhadap integritas dan nilai etikaTujuan suatu organisasi dan bagaimana tujuan tersebut dicapai didasarkan pada preferensi, pertimbangan nilai-nilai dan gaya manajemen. Preferensi dan pertimbangan nilai-nilai yang kemudian diterjemahkan ke dalam standar perilaku, mencerminkan integritas manajemen dan komitmennya terhadap nilai-nilai etika.

      Mengingat reputasi yang baik dari suatu organisasi sangat berharga, standar perilaku harus lebih dari sekadar mentaati hukum dan peraturan. Dalam menghargai reputasi kepada perusahaan-perusahaan terbaik, masyarakat menuntut lebih dari sekadar mematuhi peraturan. Efektivitas pengendalian internal tidak dapat ditingkatkan tanpa nilai-nilai etika dan integritas orang-orang yang menciptakan, mengelola, dan memantaunya. Integritas dan nilai-nilai etika merupakan unsur yang penting dalam lingkungan pengendalian, mempengaruhi rancangan, pengelolaan dan memantau komponen pengendalian internal lainnya.

      Integritas merupakan syarat bagi perilaku etis dalam seluruh aspek kegiatan dalam organisasi. Nilai-nilai yang dianut manajemen tertinggi harus seimbang dengan kepedulian organisasi dan pemegang kepentingan yang lainnya di mana prinsip tersebut diselenggarakan dengan:
      i) Adanya "*tone at the top*".
         Pimpinan mendorong pekerja untuk melaksanakan aturan perilaku dengan cara memberikan keteladanan dalam tindakan, ucapan, maupun himbauan.
      ii) Menetapkan standar perilaku:
         - Penyusunan dan penerapan aturan perilaku kepada seluruh Insan PMT, dengan penandatanganan pernyataan komitmen Insan PMT untuk mematuhi aturan perilaku;
         - Secara berkala pejabat yang ditetapkan menandatangani pakta integritas;
         - Setiap pekerja yang kegiatannya berpotensi mempunyai benturan kepentingan diwajibkan untuk menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan harus mengundurkan diri dari penugasan apabila memiliki potensi benturan kepentingan.
      iii) Mengevaluasi kepatuhan terhadap standar perilaku:
         - Menetapkan mekanisme pemantauan atas kepatuhan, membentuk unit pemantau, dan menerapkan ketentuan penegakan etika secara konsisten;

1. Control Environment
   The control environment is a factor that affects the entire Company and becomes the atmosphere for PMT personnel in carrying out the control activities and responsibilities that are part of it, which consists of 5 (five) principles, namely:
   a. Commitment to integrity and ethical values
      The goals of an organization and how these goals are achieved are based on preferences, values considerations and management styles. Preferences and considerations of values which are then translated into standards of behavior, reflect the integrity of management and its commitment to ethical values.

      Given that the good reputation of an organization is valuable, standards of conduct must go beyond compliance with laws and regulations. In rewarding reputations to the best companies, society demands more than compliance with regulations. The effectiveness of internal control cannot be enhanced without the ethical values and integrity of the people who create, manage and monitor it. Integrity and ethical values are important elements in the control environment, influencing the design, management and monitoring of other internal control components.

      Integrity is a requirement for ethical behavior in all aspects of the organization's activities. The values espoused by top management must be balanced with the concerns of the organization and other stakeholders where the principle is carried out by:

      i) A "tone at the top".
         Leaders encourage workers to implement the rules of conduct by setting an example in actions, words, and appeals.

      ii) Establishing standards of behavior:
         - Preparation and application of rules of conduct to all PMT personnel, with the signing of a statement of commitment of PMT personnel to comply with the rules of conduct;
         - Periodically, the appointed officials sign an integrity pact;
         - Every employee whose activities have the potential to have a conflict of interest is required to sign a statement of no conflict of interest, and must resign from the assignment if it has a potential conflict of interest.

      iii) Evaluating compliance with standards of conduct:

         - Establish a monitoring mechanism for compliance, establish a monitoring unit, and consistently apply ethics enforcement provisions;

- Melakukan evaluasi pimpinan dan karyawan atas standar perilaku yang telah ditetapkan.

iv) Menindaklanjuti penyimpangan secara tepat waktu:
- Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas seluruh penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur dan/atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- Tindakan disiplin dikenakan, diumumkan sehingga menimbulkan efek jera. Mekanisme dan prosedur penegakan disiplin diatur dalam aturan tersendiri.

b. Independensi Dewan Komisaris

Untuk mendorong diterapkannya prinsip governansi korporat di dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Agar dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, Dewan Komisaris tidak terafiliasi dengan Direksi dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan, di mana prinsip-prinsip tersebut diselenggarakan dengan:

i) Menetapkan tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris
ii) Berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penasihat perlu ditetapkan tugas dan/atau kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS, serta perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
iii) Kepemilikan keahlian Dewan Komisaris
iv) Untuk menjamin Komisaris memiliki kinerja sesuai yang diharapkan maka Perusahaan perlu menetapkan kriteria dan komposisi Dewan Komisaris disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
v) Independensi Dewan Komisaris
vi) Agar dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan dari pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungannya dengan Direksi, maka perlu penetapan Komisaris Independen dan mendefinisikannya.
vii) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris

- Conducting leadership and employee evaluations of the established standards of behavior.

iv) Follow up on deviations in a timely manner:
- Enforce appropriate disciplinary action for all deviations from policies and procedures and/or violations of rules of conduct;
- Disciplinary action is imposed, announced so as to create a deterrent effect. Disciplinary enforcement mechanisms and procedures are regulated in separate rules.

b. Board of Commissioners independence

To encourage the implementation of GCG principles in the Company, Board of Commissioners can perform supervisory and advisory duties to Board of Directors effectively and provide more added value to the Company.

In order to perform its supervisory function over the Board of Directors' policies in running the Company, Board of Commissioners is not affiliated with Board of Directors from business relationships or other relationships that may affect its ability to act independently or act solely in the interest of the Company, where such principles are organized by:

i) Establishing supervisory responsibilities by the Board of Commissioners
ii) In connection with the supervisory and advisory functions, it is necessary to determine the duties and/or obligations in supervising the management policy, the course of management in general both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors including supervision of the implementation of RJPP, RKAP as well as the provisions of Articles of Association and GMS, as well as applicable legislation for the benefit of the Company and in accordance with the Company purposes and objectives.
iii) Expertise Ownership of Board of Commissioners
iv) To ensure that the Board of Commissioners has the expected performance, the Company needs to establish the criteria and composition of Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.
v) Board of Commissioners independence
vi) In order to carry out its duties objectively and free from pressure and interests from any party, including in its relationship with each other and its relationship with the Board of Directors, it is necessary to determine and define the independence of Board of Commissioners.
vii) Implementation of the supervisory function by Board of Commissioners

viii) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas jalannya Perusahaan, maka Dewan Komisaris diberikan hak dan wewenang untuk mengetahui jalannya Perusahaan yang dikelola Direksi.

c. Struktur organisasi yang kondusif

Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Struktur organisasi entitas biasanya digambarkan dalam suatu bagan organisasi yang harus secara akurat merefleksikan garis wewenang dan hubungan pelaporan dan dilaksanakan dengan:

i) Membentuk struktur organisasi.
Pembentukan struktur organisasi yang tepat di lingkungan perusahaan, dilakukan dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan perusahaan maka perlu dirancang suatu struktur organisasi yang adaptif.

ii) Menetapkan jalur pelaporan yang dilaksanakan melalui pembentukan struktur organisasi yang memperhatikan aspek-aspek tertentu.

iii) Memberikan kejelasan mengenai uraian pekerjaan (*job description*) pada semua pegawai dan memberikan kejelasan hubungan jenjang pelaporan internal di lingkungan Perusahaan.
Penetapan, pemberian, dan pembatasan kewenangan dan tanggung jawab:

- Perusahaan menyusun uraian tugas untuk masing-masing jabatan di lingkungan Perusahaan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - » Wewenang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya melalui *job description* dan ketentuan otorisasi Perusahaan;
  - » Pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan mempunyai keterkaitan dengan unit kerja lain di lingkungan perusahaan;
  - » Pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana harus memahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.

- Perusahaan menyusun uraian tugas dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi antar bagian/departemen dan jalur koordinasi dan penetapan kewenangannya.
- Perusahaan melakukan reviu berkala atas struktur organisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan/perkembangan Perusahaan. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan

viii) In carrying out its function as supervisor of the Company, Board of Commissioners is given the right and authority to know the course of the Company managed by the Board of Directors.

c. Conducive organizational structure

Organizational structure contributes to an entity's ability to meet its objectives by providing an overarching framework for planning, implementing, controlling and monitoring an entity's activities. An entity's organizational structure is usually depicted in an organizational chart that should accurately reflect lines of authority and reporting relationships and be implemented by:

i) Establishing an organizational structure.
The formation of an appropriate organizational structure in the Company environment is carried out by adjusting to the size and nature of the Company's activities, it is necessary to design an adaptive organizational structure.

ii) Establish reporting lines that are implemented through the formation of an organizational structure that takes into account certain aspects.

iii) Provide clarity on job descriptions for all employees and provide clarity on the relationship between internal reporting levels within the Company.
Determining, granting, and limiting authority and responsibility:

- The Company prepares job descriptions for each position within the Company taking into account the following:
  - » Authority is given to appropriate structural officials, functional officials, and executors in accordance with their level of responsibility through job descriptions and Company authorization provisions;
  - » Structural officials, functional officials, and executors must understand that the authority and responsibilities given are related to other work units within the Company;
  - » Structural officials, functional officials, and executors must understand that the implementation of their responsibilities and authorities is related to the implementation of the Company's Internal Control System.
- The Company prepares job descriptions by considering the separation of functions between sections/departments and lines of coordination and determination of authority.
- The Company conducts periodic reviews of the organizational structure to adjust to the needs/development of the Company. The establishment of an organizational structure in accordance with the needs of the Company

secara terus menerus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan pelaksanaannya. Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat memberikan umpan balik guna lebih menyempurnakan lagi struktur organisasi di masa datang.

d. Menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.

Pegawai yang cakap adalah pegawai yang mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dibebankan kepadanya, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pekerja yang cakap untuk suatu pekerjaan bukan berarti pekerja yang tingkat pendidikannya tinggi, sehingga gajinya juga besar tetapi mungkin dengan pendidikan menengah sudah cukup, yang penting adalah latar belakang pendidikannya cukup memadai untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya.

Hal ini perlu dipertimbangkan agar dapat diperoleh pekerja yang cakap tetapi juga ekonomis. Untuk memperoleh pegawai yang cakap sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, diperlukan adanya usaha-usaha yang tepat mencakup:

i) Kebijakan dan praktik SDM:
- Perusahaan membuat kebijakan rekrutmen pekerja. Penetapan kebijakan dan prosedur dari tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian dan purnabakti (pensiun) pekerja yang mencakup antara lain; pengadaan formasi (rekrutmen), pendidikan dan pelatihan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian dan penghargaan atas prestasi karyawan, disiplin, penggajian, serta pemberhentian dan pensiun.
- Proses rekrutmen pekerja dilaksanakan sesuai dengan kebijakan rekrutmen. Penelusuran latar belakang calon pekerja dalam proses rekrutmen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii) Komitmen terhadap kompetensi:
- Perusahaan membuat kebijakan mengenai persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk suatu jabatan.
- Perusahaan menempatkan pekerja sesuai dengan kebijakan persyaratan minimal.
- Perusahaan menyusun analisis beban kerja dan analisis jabatan.
- Perusahaan selalu memutakhirkan uraian jabatan untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan tugas khusus.

iii) Memperoleh, membangun, dan mempertahankan pekerja:
- Perusahaan mengikutsertakan pekerja pada program pelatihan sesuai kebutuhan Perusahaan.
- Perusahaan membuat kebijakan tentang pola karier.
- Perusahaan melaksanakan kebijakan pola karier.

is continuously monitored, evaluated, and reported on its implementation. The results of monitoring and evaluation are expected to provide feedback to further improve the organizational structure in the future.

d. Demonstrate commitment to attracting, developing, and retaining competent individuals.

A competent employee is an employee who is able to carry out the duties, responsibilities and authorities assigned to him/her, so that the Company's objectives can be achieved effectively and efficiently. A competent worker for a job does not mean a worker with a high level of education, so that his salary is also large, but perhaps with a secondary education is sufficient, the important thing is that his educational background is sufficient for the work he does.

This needs to be considered in order to obtain workers who are capable but also economical. To obtain capable employees in accordance with the needs of the Company, appropriate efforts are needed including:

i) HC policies and practices
- The Company establishes a worker recruitment policy. Determination of policies and procedures from the recruitment stage to the dismissal and retirement of employees which include, among others; procurement of formations (recruitment), education and training, appointment in rank and position, assessment and appreciation of employee achievement, discipline, payroll, and dismissal and retirement.
- The employee recruitment process is carried out in accordance with the recruitment policy. Background tracing of prospective workers in the recruitment process is guided by applicable laws and regulations.

ii) Commitment to competence
- The Company makes a policy regarding the minimum requirements that must be met for a position.
- The Company places workers in accordance with the minimum requirements policy.
- The Company prepares a workload analysis and job analysis.
- The Company updates job descriptions to identify and define specific tasks.

iii) Acquiring, developing and retaining workers
- The Company includes workers in training programs according to the needs of the Company.
- The Company makes policies on career patterns.
- The Company implements the career pattern policy.

iv) Merencanakan dan mempersiapkan suksesi:
Perusahaan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kompetensi pekerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, melakukan assesmen terhadap pekerja untuk setiap level jabatan yang ada.

e. Mendorong individu mengemban akuntabilitas atas tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal.
i) Menjunjung tinggi akuntabilitas melalui struktur, kewenangan dan tanggung jawab:
ii) Menetapkan pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan.
iii) Evaluasi pengukuran kinerja, insentif dan penghargaan untuk menjaga relevansinya.
iv) Mempertimbangkan adanya "tekanan" yang berlebihan.
v) Mengevaluasi kinerja, memberi penghargaan dan mengenakan hukum.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
a. Menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko.
i) Tujuan operasi tecermin dalam struktur, industri dan kinerja organisasi.
Penetapan tujuan dan sasaran operasinya dengan mempertimbangkan struktur, industri dan kinerja Perusahaan. Seluruh tingkatan manajemen di lingkungan Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan manajemen risiko dan membangun budaya sadar risiko sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mempertimbangkan toleransi risiko.
ii) Perusahaan menetapkan risiko yang bisa ditoleransi untuk setiap sasaran operasi. Pemilik risiko (*risk owner*) bertanggung jawab untuk mengelola risiko pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman dan prosedur manajemen risiko di bawah kendalinya.
iii) Mencakup tujuan operasi dan kinerja keuangan.
Sasaran operasi meliputi target kinerja operasi dan keuangan. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi (mengenali) semua risiko yang penting (signifikan) yang berpengaruh pada pencapaian sasaran/tujuan pada semua unit kerja di lingkungan perusahaan, yang selanjutnya dikelola dan dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dalam pengelolaannya.
iv) Membentuk dasar untuk mengalokasikan sumber daya.
Memastikan tersedianya struktur organisasi, uraian tugas, dan mekanisme kerja yang memadai dan jelas yang berhubungan dengan manajemen risiko, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan manajemen risiko.

iv) Planning and preparing for succession The Company allocates sufficient budget to improve worker competencies in the Company's Work Plan and Budget, conducts assessments of workers for each level of existing positions.

e. Encourage individuals to take accountability for their responsibility for internal control.
i) Uphold accountability through structure, authority and responsibility
ii) Establish performance measurement, incentives and rewards.
iii) Evaluate performance measurements, incentives and rewards to maintain their relevance.
iv) Consider any excessive 'pressure'.

v) Evaluate performance, reward and penalize.
The Company conducts individual performance evaluations, rewards and sanctions.

2. Risk Assessment
a. Set objectives with sufficient clarity to enable identification and assessment of risks
i) Operating objectives are reflected in the structure, industry and performance of the organization.
Establishment of operating goals and objectives taking into account the structure, industry and performance of the Company. All levels of management within the Company have the responsibility to implement risk management and build a risk-aware culture in accordance with their respective functions, duties and responsibilities.

ii) Considering risk tolerance.
The Company sets tolerable risks for each operational objective. Risk owners are responsible for managing risks in their respective work units, and each work unit leader is responsible for implementing risk management guidelines and procedures under their control.

iii) Includes operating and financial performance objectives.
Operating objectives include operating and financial performance targets. The Company must be able to identify (recognize) all important (significant) risks that affect the achievement of goals/objectives in all work units within the Company, which are then managed and reviewed regularly by considering the benefits and costs of managing them.

iv) Forming the basis for allocating resources.
Ensure the availability of an adequate and clear organizational structure, job descriptions, and work mechanisms related to risk management, the availability of competent Human Capital who have the knowledge and skills needed to carry out risk management.

v) Patuh terhadap standar akuntansi.
Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan pedoman pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan pelaporan keuangan disusun sesuai standar yang sudah ditetapkan.

vi) Mempertimbangkan materialitas.
Dalam menentukan kewajaran laporan keuangan aspek materialitas menjadi pertimbangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengukuran (*measurement*) dan pengungkapan (*disclosure*) atas seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

vii) Mencerminkan aktivitas entitas organisasi.
Memastikan laporan keuangan yang disajikan merupakan hasil aktivitas perusahaan yang disusun untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penyusunan laporan keuangan. Batas-batas (*cut off*) dari suatu aktivitas dapat diketahui dengan jelas agar hasil dari aktivitas perusahaan dapat diukur dan dinilai secara jelas.

b. Mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisa risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
   i) Mematuhi standar dan *frameworks* yang ditetapkan pihak eksternal.
   ii) Mempertimbangkan tingkat presisi pelaporan non keuangan eksternal yang diharapkan.
   iii) Menyajikan aktivitas entitas organisasi pada laporan non keuangan.
   iv) Mencerminkan pilihan manajemen.
   v) Mempertimbangkan tingkat presisi pelaporan keuangan internal yang diharapkan.
   vi) Menyajikan aktivitas entitas organisasi terkait pelaporan keuangan internal.
   vii) Mematuhi ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
   viii) Mempertimbangkan toleransi terhadap risiko.
   ix) Kepatuhan terhadap hukum mencakup Perusahaan, Divisi, Cabang, Unit Operasional, tingkat fungsional, Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Terafiliasi:
      - Perusahaan melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk setiap tingkatan Perusahaan;
      - Perusahaan melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk setiap tingkatan manajemen;
      - Proses identifikasi risiko melalui proses penaksiran signifikansi potensi risiko.
   x) Menganalisis faktor internal dan eksternal.
   xi) Mengikutsertakan peran serta setiap level manajemen yang sesuai.
   xii) Mengestimasi signifikansi risiko yang teridentifikasi.
   xiii) Menetapkan bagaimana risiko akan direspon.

v) Adherence to accounting standards.
Board of Directors establishes accounting policies and bookkeeping guidelines in accordance with applicable Financial Accounting Standards and financial financial reporting is prepared in accordance with established standards.

vi) Considering materiality.
In determining the fairness of financial statements, materiality aspects are taken into consideration both qualitatively and quantitatively which can affect the measurement and disclosure of all information presented in the financial statements.

vii) Reflect the activities of organizational entities.
Ensuring that the financial statements presented are the result of Company activities that are prepared to provide the information needed for the purpose of preparing financial statements. The boundaries (cut off) of an activity can be clearly identified so that the results of the Company's activities can be clearly measured and assessed.

b. Identify risks to achieving entity-wide objectives and analyze risks as a basis for determining how risks should be managed.
   i) Comply with standards and frameworks set by external parties.
   ii) Consider the expected level of precision of external non-financial reporting.
   iii) Presenting the activities of organizational entities in non-financial reports.
   iv) Reflect management choices.
   v) Consider the expected level of internal financial reporting precision.
   vi) Present the activities of organizational entities related to internal financial reporting.
   vii) Complying with applicable laws and regulations.
   viii) Considering tolerance to risk.
   Compliance with the law covers the Company, Divisions, Branches, Operational Units, functional levels, Subsidiaries and/or Affiliated Companies:
      - The Company conducts risk identification and assessment for each level of the Company;
      - The Company conducts risk identification and assessment for each level of management;
      - Risk identification process through the process of assessing the significance of potential risks.
   ix) Analyzing internal and external factors.
   x) Include the participation of every appropriate level of management.
   xi) Estimating the significance of identified risks.
   xii) Determine how the risk will be responded to.

c. Mempertimbangkan potensi terjadinya *fraud* dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan:
   i) Mempertimbangkan berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan.
   ii) Menilai dorongan dan tekanan yang menyebabkan terjadinya *fraud*.
   iii) Menilai perilaku dan rasionalitas terjadinya *fraud*.
d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan:
   i) Menilai perubahan lingkungan di luar organisasi.
   ii) Menilai perubahan model bisnis.
   iii) Menilai perubahan kepemimpinan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
   a. Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi memitigasi risiko sampai tingkat yang dapat diterima:
      i) Mengintegrasikan kegiatan pengendalian dengan penilaian risiko. Perusahaan memilih dan membangun kegiatan pengendalian berdasarkan karakteristik, sifat dan lingkup operasional dan bisnis proses perusahaan untuk memitigasi risiko.
      ii) Menetapkan proses bisnis yang relevan.
      iii) Mempertimbangkan faktor spesifik entitas.
      iv) Mengevaluasi tipe pengendalian yang memiliki sifat berganda.
      v) Mempertimbangkan pada level mana kegiatan pengendalian diterapkan.
      vi) Melakukan pembagian kewenangan.
   b. Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi informasi untuk mendukung tercapainya tujuan:
      i) Menetapkan ketergantungan antara penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis dan pengendalian umum teknologi informasi:
         • Perusahaan mereviu infrastruktur teknologi informasi perusahaan untuk menjamin kelengkapan, ketepatan dan ketersediaan informasi.
         • Reviu laporan keuangan yang dihasilkan Teknologi Informasi telah dilakukan untuk mempertahankan akurasi.
      ii) Menerapkan infrastruktur teknologi kegiatan pengendalian yang relevan.
      iii) Menerapkan kegiatan pengendalian proses manajemen keamanan yang relevan.
      iv) Menerapkan kegiatan pengendalian proses perolehan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi yang relevan.
   c. Menerapkan kegiatan pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur untuk menerapkan kebijakan:
      i) Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjalankan perintah dan arahan Direksi.
      ii) Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan prosedur.

c. Consider the potential for fraud to occur in assessing risks to achieving objectives:
   i) Consider the various possibilities of fraud.
   ii) Assess the motivation and pressure that lead to fraud.
   iii) Assess the behavior and rationality of fraud.
d. Identify and evaluate changes that could significantly affect the internal control system:
   i) Assess changes in the environment outside the organization.
   ii) Assess changes in the business model.
   iii) Assess changes in leadership.

3. Control Activities
   a. Select and develop control activities that contribute to mitigating risks to an acceptable level:
      i) Integrate control activities with risk assessment. The Company selects and develops control activities based on the characteristics, nature and scope of the Company's operations and business processes to mitigate risks.
      ii) Establish relevant business processes.
      iii) Consider entity-specific factors.
      iv) Evaluate the type of control that has multiple characteristics.
      v) Considering the level at which control activities are implemented.
      vi) Perform division of authority
   b. Select and develop general control activities over information technology to support the achievement of objectives:
      i) Determine the dependency between the use of information technology in business processes and general control of information technology:
         • The Company reviews the Company's information technology infrastructure to ensure completeness, accuracy and availability of information.
         • Review of financial statements generated by Information Technology has been conducted to maintain accuracy.
      ii) Implement technology infrastructure relevant control activities.
      iii) Implement relevant security management process control activities.
      iv) Implement relevant technology acquisition, development, and maintenance process control activities.
   c. Implement control activities through policies that define what is expected and procedures for implementing policies:
      i) Establish policies and procedures for carrying out the orders and directives of Board of Directors.
      ii) Establish responsibility and accountability in order to implement policies and procedures.

iii) Personil yang kompeten melaksanakan kegiatan pengendalian dengan berhati-hati dan fokus secara terus-menerus.
iv) Personil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur.
v) Petugas yang bertanggung jawab menginvestigasi dan bertindak seperlunya dalam hal terjadi kasus tertentu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pengendalian.
vi) Manajemen mereviu kegiatan pengendalian secara periodik, untuk menentukan relevansi, kesesuaian kegiatan pengendalian sesuai dengan kebutuhan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)
   a. Memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung berfungsinya seluruh komponen pengendalian internal:
      i) Mengidentifikasi persyaratan informasi yang diperlukan.
      ii) Mendapatkan data dari sumber internal maupun eksternal.
      iii) Memproses data menjadi informasi yang relevan.
      iv) Memelihara kualitas informasi selama pemrosesan informasi.
      v) Mempertimbangkan analisis biaya-manfaat.
   b. Mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal:
      i) Menyelenggarakan komunikasi tentang pengendalian internal kepada personel yang bertanggung jawab.
      ii) Menyelenggarakan jalur komunikasi antara Direksi dan Komisaris yang efektif.
      iii) Menyediakan jalur komunikasi khusus yang terpisah (*whistle-blower*).
      iv) Menetapkan metode komunikasi yang relevan.
   c. Berkomunikasi dengan pihak luar mengenai hal terkait dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi berfungsinya seluruh komponen pengendalian internal:
      i) Komunikasi kepada pihak eksternal.
      ii) Menyelenggarakan komunikasi internal organisasi.
      iii) Komunikasi dengan Dewan Direksi.
      iv) Menyediakan jalur komunikasi khusus yang terpisah (*whistle-blower*).
      v) Menetapkan metode komunikasi yang relevan.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)
   a. Memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal eksis dan berfungsi baik.
      i) Manajemen melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah secara seimbang.

iii) Competent personnel carry out control activities with care and focus on an ongoing basis.
iv) Responsible personnel carry out control activities in accordance with the time schedule set out in policies and procedures.
v) Responsible personnel investigate and act as necessary in the event that specific cases occur as a result of the implementation of control activities.
vi) Management reviews control activities periodically, to determine the relevance, suitability of control activities as needed.

4. Information & Communication
   a. Obtaining or generating and using quality and relevant information to support the functioning of all components of internal control:
      i) Identify the necessary information requirements.
      ii) Obtain data from internal and external sources.
      iii) Processing data into relevant information.
      iv) Maintaining information quality during information processing.
      v) Considering cost-benefit analysis
   b. Internally communicate information, including internal control objectives and responsibilities, necessary to support the internal control function.
      i) Organize communication about internal control to responsible personnel.
      ii) Organizing effective communication channels between Board of Directors and Board of Commissioners.
      iii) Providing a separate dedicated communication line (whistle-blow).
      iv) Establish relevant communication methods.
   c. Communicate with outsiders on matters related to various matters that may affect the functioning of all components of internal control.
      i) Communication to external parties.
      ii) Organizing internal organizational communication.
      iii) Communication with Board of Directors.
      iv) Providing a separate dedicated communication line (whistle-blower).
      v) Establish relevant communication methods

5. Monitoring Activities
   a. Select, develop, and conduct ongoing and/or separate evaluations to ascertain whether internal control components exist and are functioning properly.
      i) Management conducts ongoing and separate evaluations in a balanced manner.

ii) Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam bisnis dan proses bisnis dalam melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
iii) Rancangan dan kondisi sistem pengendalian digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
iv) Evaluator yang melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah memiliki pengetahuan yang memadai dan memahami hal yang dievaluasi.
v) Evaluasi berkelanjutan diterapkan secara terintegrasi atau "*built-in*" dengan proses bisnis dan selalu disesuaikan dalam hal terjadi perubahan.
vi) Manajemen mempertimbangkan berbagai alternatif ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah sesuai dengan risiko entitas.
vii) Evaluasi terpisah dilaksanakan secara periodik untuk dapat memberikan umpan balik yang obyektif.

b. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan Direksi.
i) Direksi me-*review* dan menilai hasil evaluasi berkelanjutan maupun terpisah.
ii) Setiap kelemahan disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan tindakan perbaikan dan paling tidak harus disampaikan kepada manajemen satu tingkat di atasnya.
iii) Manajemen memonitor apakah semua kelemahan telah diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan menerapkan pemantauan pengendalian internal untuk memastikan setiap mekanisme kontrol tetap berjalan efektif seiring perkembangan aktivitas usaha dan dinamika risiko Perusahaan. Pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui fungsi pengawasan internal. Adapun pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang secara independen melaksanakan audit internal berbasis risiko atas unit-unit operasional, keuangan, dan pendukung strategis.
2. Audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang menilai kewajaran laporan keuangan serta efektivitas aspek pengendalian keuangan.
3. Pemantauan manajerial oleh Direksi dan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan prosedur dan kebijakan internal.

ii) Management considers the degree of change in the business and business processes in conducting continuous and separate evaluations.
iii) The design and condition of control system are used as materials for conducting continuous evaluation and separate evaluation.
iv) Evaluators who carry out continuous evaluations and separate evaluations have sufficient knowledge and understand the matters being evaluated.
v) Continuous evaluation is applied in an integrated or 'bulit-irl' manner with business processes and is always adjusted in the event of changes.
vi) Management considers various alternatives for the scope and frequency of separate evaluations in accordance with the entity's risks.
vii) Separate evaluations are conducted periodically to provide objective feedback.

b. Evaluate and communicate internal control deficiencies in a timely manner to those responsible for taking corrective action, including senior management and Board of Directors.
i) Board of Directors reviews and assesses the results of continuous and separate evaluations.
ii) Any weaknesses are communicated to the responsible party for corrective action and must be communicated to at least one level of management above.
iii) Management monitors whether all weaknesses have been corrected within the specified time period.

REVIEW OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

The Company applies internal control monitoring to ensure that all control mechanisms remain effective in line with evolving business activities and the Company's risk dynamics. Monitoring is carried out through the internal oversight function. Oversight of the effectiveness of internal control system is carried out through the following mechanisms:

1. Internal Audit Unit (SPI), which independently conducts risk-based internal audits of operational, financial, and strategic support units.
2. External audit by a Public Accounting Firm (KAP), which assesses the fairness of financial reports and the effectiveness of financial control aspects.
3. Managerial monitoring by the Board of Directors and relevant work units regarding the implementation of internal procedures and policies.

Hasil penelaahan atas penerapan sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang dijalankan Perusahaan telah berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan material yang berdampak signifikan terhadap pelaporan keuangan, operasional Perusahaan, maupun aspek kepatuhan.

Meski demikian, Perusahaan tetap melakukan penyempurnaan guna menjaga efektivitas pengendalian di tengah perkembangan bisnis dan operasional. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang ditetapkan, yang diterapkan pada seluruh lini fungsional berdasarkan ruang lingkup masing-masing.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Direksi dan Dewan Komisaris memandang sistem pengendalian internal sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan Perusahaan, mulai dari keandalan pelaporan keuangan, efektivitas operasional, hingga kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Penerapan sistem tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar internasional serta pedoman internal yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2025, penilaian menyeluruh secara formal atas efektivitas sistem pengendalian internal memang belum dilaksanakan. Namun demikian, proses pengendalian di berbagai fungsi bisnis telah berjalan secara konsisten melalui dukungan audit internal, pengawasan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), serta pemantauan rutin oleh manajemen.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan, tidak terdapat kelemahan material yang memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional maupun pelaporan Perusahaan. Dengan kondisi tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan saat ini telah cukup memadai dalam mendukung pencapaian target usaha, menjaga efektivitas proses bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Atas capaian tersebut, Perusahaan akan terus memperkuat sistem pengendalian internal melalui penyempurnaan proses, penguatan pengawasan, dan pengembangan sistem pendukung sebagai bagian dari komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The review results of the implementation of internal control system throughout 2025 indicate that the Company's control mechanisms have functioned effectively, and no material issues were identified that had a significant impact on financial reporting, the Company's operations, or compliance aspects.

Nevertheless, the Company continues to make improvements to maintain the effectiveness of its internal controls amid evolving business and operational developments. These efforts are carried out in accordance with the established Internal Control System Guidelines, which are implemented across all functional areas based on their respective scopes of responsibility.

BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and Board of Commissioners regard the internal control system as an essential component in maintaining the quality of the Company's management, ranging from the reliability of financial reporting and operational effectiveness to compliance with regulations and internal policies. The system implementation is carried out in accordance with international standards and the internal guidelines applicable within the Company.

As of the end of 2025, a comprehensive formal assessment of the effectiveness of internal control system had not yet been conducted. Nevertheless, control processes across various business functions have been implemented consistently through the support of internal audits, oversight by the Internal Audit Unit (SPI), and regular monitoring by management.

Based on the results of evaluations and oversight conducted throughout the year, no material weaknesses were identified that had a significant impact on the Company's operations or reporting. Accordingly, the Board of Directors and Board of Commissioners consider that the current internal control system is sufficiently adequate to support the achievement of business objectives, maintain the effectiveness of business processes, and ensure compliance with the applicable regulations.

Building on these achievements, the Company will continue to strengthen its internal control system through process improvements, enhanced oversight, and the development of supporting systems as part of its commitment to Good Corporate Governance.

Manajemen Risiko
Risk Management

GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan menempatkan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan. Di tengah dinamika industri kepelabuhanan dan logistik yang terus berkembang, pengelolaan risiko menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan operasional, ketahanan usaha, serta pencapaian target korporasi secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Pelindo Grup, penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/30/12/1/RINO/DIRU/PLMT-24 tanggal 30 Desember 2024 sebagai pedoman teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan.

Pedoman tersebut mengatur proses pengelolaan risiko secara menyeluruh, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, hingga pemantauan risiko di seluruh entitas usaha Perusahaan. Implementasinya mencakup Kantor Pusat, 32 *branch*, 5 satelit dan 3 anak perusahaan yang masing-masing telah memiliki profil risiko dan dimonitor secara berkala sesuai perkembangan kondisi bisnis dan operasional.

Untuk memperkuat efektivitas penerapannya, Perusahaan juga mengadopsi standar ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam membangun sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur, adaptif, dan terintegrasi dengan tata kelola perusahaan. Pendekatan ini mendukung Perusahaan dalam mengantisipasi risiko secara lebih proaktif sekaligus menjaga keberlangsungan strategi bisnis jangka panjang.

Secara umum, proses manajemen risiko di lingkungan Perusahaan dan anak perusahaan terbagi ke dalam 2 (dua) tahapan, yaitu proses perencanaan serta proses pemantauan dan evaluasi, yang masing-masing terdiri atas:

1. Proses perencanaan, meliputi:
   a. Proses penetapan strategi Risiko;
   b. Proses penetapan rencana sasaran;
   c. Proses penilaian Risiko yang terdiri dari identifikasi Risiko, kuantifikasi Risiko, rencana perlakuan Risiko, dan prioritisasi Risiko; dan
   d. Proses penetapan perencanaan strategis.
2. Proses pemantauan dan evaluasi, meliputi:
   a. Proses pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perlakuan Risiko
   b. Proses pelaporan; dan
   c. Proses evaluasi kinerja.

GENERAL OVERVIEW OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company regards risk management as an integral part of its business management and corporate decision-making processes. Amid the continuously evolving dynamics of the port and logistics industry, risk management serves as an essential instrument for maintaining operational continuity, business resilience, and the sustainable achievement of corporate objectives.

As part of Pelindo Group, the implementation of risk management within the Company refers to the Regulation of Minister of SOE Number PER-2/MBU/03/2023 concerning the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. These provisions are further implemented through the Board of Directors' Regulation Number HK.01/30/12/1/RINO/DIRU/PLMT-24 dated 30 December 2024, which serves as the technical guideline for implementing risk management within the Company.

The guideline governs the end-to-end risk management process, covering risk identification, analysis, evaluation, treatment, and monitoring across all of the Company's business entities. Its implementation encompasses the Head Office, 32 branches, 5 satellites and 3 subsidiaries, each of which has its own risk profile and is monitored periodically in accordance with developments in business and operational conditions.

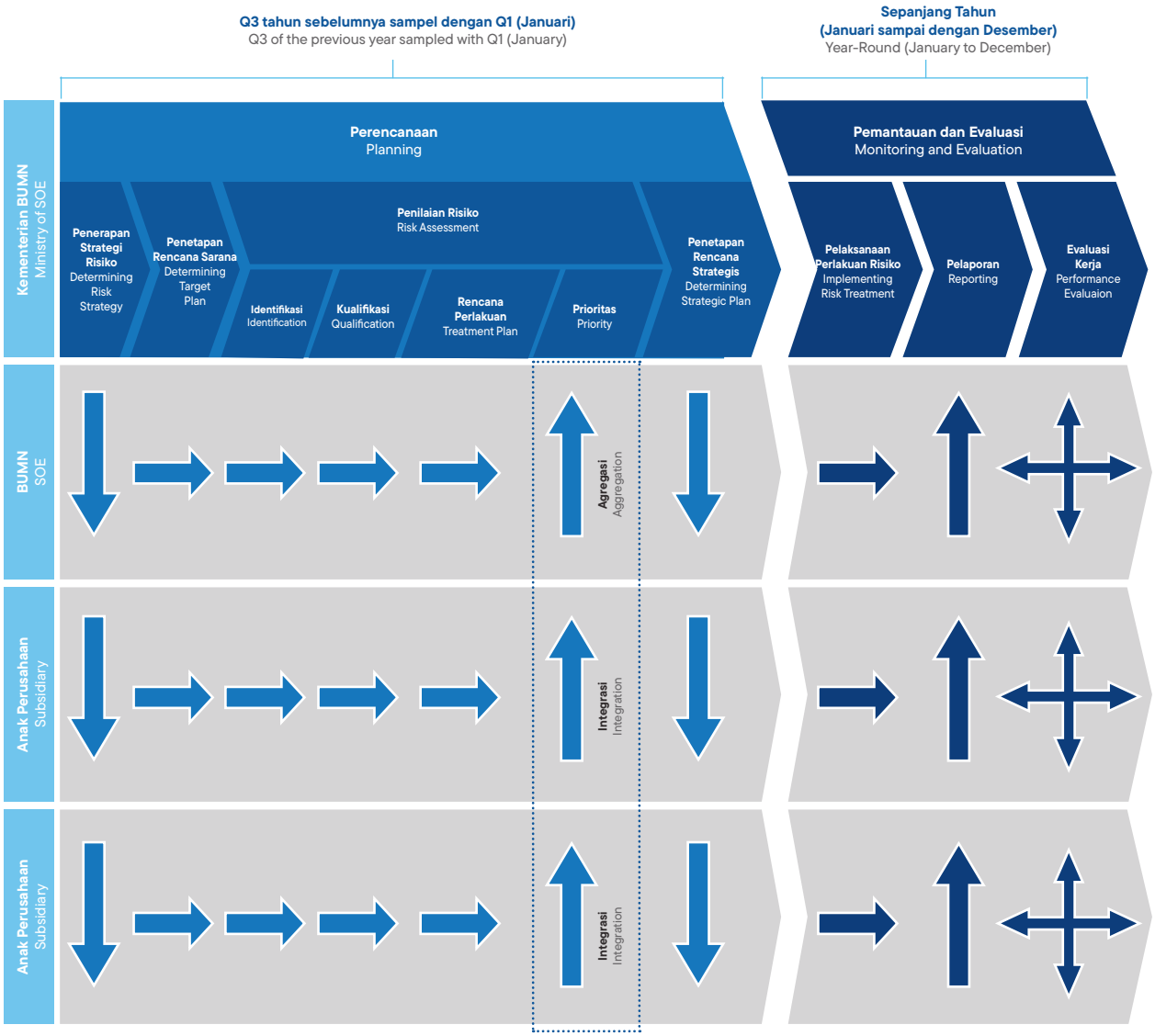
To strengthen the effectiveness of its implementation, the Company has also adopted ISO 31000:2018 as the reference standard for establishing a more structured, adaptive, and integrated risk management system aligned with corporate governance. This approach enables the Company to anticipate risks more proactively while safeguarding the sustainability of its long-term business strategy.

In general, the risk management process within the Company and its subsidiaries is divided into 2 (two) stages, namely planning process and monitoring and evaluation process, each consisting of the following:

1. Planning Process, comprising:
   a. Risk strategy formulation process;
   b. Objective-setting process;
   c. Risk assessment process, consisting of risk identification, risk quantification, risk treatment planning, and risk prioritization; and
   d. Strategic planning process.
2. Monitoring and Evaluation Process, comprising:
   a. Monitoring and evaluation of the implementation of risk treatment;
   b. Reporting process; and
   c. Performance evaluation process.

Seluruh proses tersebut digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

The entire process is illustrated in the following diagram:



Keterangan:

1. Rangkaian proses Manajemen Risiko dilakukan secara integrasi antara Risiko Perusahaan Terafiliasi dan anak perusahaan pada Risiko Perusahaan, sesuai dengan Taksonomi Risiko yang telah ditetapkan.
2. Pada proses penilaian Risiko dilakukan proses integrasi Risiko Perusahaan Terafiliasi dan anak perusahaan dengan Risiko Perusahaan berdasarkan pada eksposur risikonya.
3. Rangkaian perencanaan meliputi penetapan strategi Risiko, penetapan rencana sasaran, penilaian Risiko serta penetapan perencanaan strategis (RKAP dan RJP). Perencanaan strategis tersebut sudah dilakukan berbasis Risiko.
4. Pemantauan dan evaluasi merupakan proses yang dilakukan secara berkala dalam satu tahun yang meliputi pelaksanaan perlakuan Risiko, pelaporan dan evaluasi kinerja.

Notes:

1. The Risk Management process is integrated between Affiliated Company and Subsidiary Risk and Corporate Risk, in accordance with the established Risk Taxonomy.
2. The Risk Assessment process integrates Affiliated Company and Subsidiary Risk with Corporate Risk based on their risk exposures.
3. The planning process includes establishing a Risk strategy, establishing target plans, assessing Risk, and establishing strategic plans (RKAP and RJP). This strategic planning is based on Risk.
4. Monitoring and evaluation are processes conducted periodically throughout the year, encompassing the implementation of Risk treatment, reporting, and performance evaluation.

ROADMAP MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah memiliki *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) periode 2025-2029 sebagai panduan dalam meningkatkan maturitas pengelolaan risiko, memperkuat integrasi risiko ke dalam proses bisnis, serta mendorong budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi.

RISK MANAGEMENT ROADMAP

The Company has a roadmap for strengthening Enterprise Risk Management (ERM) for the 2025-2029 period as a guide for improving risk management maturity, strengthening risk integration into business processes, and fostering a risk-aware culture throughout the organization.

No	Dimensi Dimensions	2025 ***RISK ENHANCEMENT*** **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	2026 ***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
1	**Budaya & Kapabilitas Risiko** Risk Culture & Capabilities		
a.	Budaya Risiko Risk Culture	**Program budaya risiko secara rutin (minimal 1x per tahun) dengan peran aktif dari Direksi** **Regular risk culture program (at least once a year) with an active role from the Board of Directors**	Pengembangan program budaya risiko dengan pengawasan aktif dari Direksi dan Dekom Development of a risk culture program with active supervision from the Board of Directors and the Board of Commissioners
b.	Kapabilitas Risiko Risk Capability	• **Tindak lanjut RMI dilengkapi dengan detail inisiatif, *timeline* dan penanggung jawab** • **Sosialisasi hasil RMI kepada seluruh Organ Pengelola Risiko** • **Program pengembangan kapabilitas risiko bersifat wajib dan rutin setiap tahun** • **RMI follow-up includes detailed initiatives, timelines, and responsible parties.** • **RMI results are disseminated to all Risk Management Organs.** • **The risk capability development program is mandatory and routinely conducted annually.**	• Penilaian RMI oleh seluruh Anak Perusahaan secara rutin (setiap tahun) • Program pengembangan kapabilitas bersifat komprehensif mencakup seluruh dimensi MR • RMI assessments by all subsidiaries are conducted regularly (annually) • Comprehensive capability development programs encompass all dimensions of MR
2.	**Organisasi & Tata Kelola Risiko** Organization & Risk Governance		
a.	Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ	• **Fungsi assurance bersifat independen dan bertugas memastikan manajemen dan kontrol risiko dilakukan secara efektif (internal audit)** • **Pengambilan Keputusan mempertimbangkan selera risiko** • **Seluruh Organ Pengelola Risiko telah tersertifikasi Manajemen Risiko** • **The assurance function is independent and tasked with ensuring effective risk management and control (internal audit).** • **- Decision-making takes risk appetite into account.** • **- All risk management bodies have received risk management certification.**	• Terdapat pimpinan khusus di setiap risiko utama (misal pimsus untuk risiko proyek, risiko pasar, dll) yang selaras dengan konteks bisnisnya • Akuntabilitas Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko disampaikan kepada Komite Pemantau Risiko dengan alur pelaporan yang jelas • Pengambilan Keputusan mempertimbangkan selera risiko dan memberikan kontribusi terhadap kinerja • There is a dedicated leader for each key risk (e.g., a special leadership team for project risk, market risk, etc.) that aligns with the business context. • The Director of Finance and Risk Management's accountability is communicated to the Risk Monitoring Committee with a clear reporting line. • Decision-making takes risk appetite into account and contributes to performance.

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
Integrasi budaya risiko ke dalam budaya perusahaan yang tertanam di seluruh lini perusahaan Integration of risk culture into the corporate culture that is embedded throughout the company	Pengembangan budaya risiko melekat pada jabatan di semua lini The development of a risk culture is embedded in positions at all levels	Implementasi sistem penunjang program budaya risiko beserta pengukuran kinerja atas program budaya risiko Implementation of a risk culture program support system along with performance measurement of the risk culture program
• Pemantauan tindak lanjut rekomendasi RMI terdokumentasi dengan baik • Dokumentasi feedback pegawai atas program pengembangan kapabilitas • Monitoring of follow-up to RMI recommendations is well documented. • Documentation of employee feedback on capability development programs.	• Kinerja implementasi rekomendasi RMI terdokumentasi dengan baik • Analisis keberhasilan program pengembangan dan pengembangan kapabilitas tahap lanjut • Well-documented implementation performance of RMI recommendations • Analysis of the success of the development program and advanced capability development	• Verifikasi/audit Penilaian RMI oleh pihak independen sebagai "check-and-balance" untuk meminimalisir potensi bias penilaian • Kolaborasi pengembangan kapabilitas dengan lembaga pendidikan terkemuka • Verification/audit of RMI assessments by an independent party as a "check and balance" to minimize potential assessment bias. • Collaboration on capability development with leading educational institutions.
• Struktur tata kelola risiko yang jelas untuk setiap Unit Bisnis di bawah Pelindo Multi Terminal • Fungsi risiko memiliki keterampilan dalam pengendalian dan pemodelan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan mempertimbangkan selera risiko dan memberikan kontribusi terhadap kinerja. • A clear risk governance structure for each Business Unit under Pelindo Multi Terminal • The risk function has expertise in risk control and modeling as a basis for decision-making, considering risk appetite and contributing to performance.	• Telah ada bukti yang jelas atas kinerja optimalisasi struktur tata kelola risiko • Akuntabilitas kepala Unit Bisnis kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan strategi risiko dan implementasinya di Unit Bisnis • Praktik terbaik tata kelola risiko diterapkan di Induk dan seluruh anak perusahaan. • There is clear evidence of the performance of the optimized risk governance structure. • Business Unit heads are accountable to the Director of Finance and Risk Management for approval of the risk strategy and its implementation in the Business Unit. • Risk governance best practices are implemented across the Parent Company and all subsidiaries.	• Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko pusat memiliki hak veto dalam pemberian persetujuan strategi risiko dan implementasinya di Unit Bisnis • Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko memiliki pengalaman industri yang luas di bidang Manajemen Risiko • Keefektifan penerapan Manajemen Risiko ditinjau secara berkala oleh pihak independen dan dilakukan penyesuaian atau peningkatan. • The Director of Finance and Risk Management at the central level has veto power in approving risk strategies and their implementation in Business Units. • The Director of Finance and Risk Management has extensive industry experience in Risk Management. • The effectiveness of Risk Management implementation is periodically reviewed by an independent party and adjustments or improvements are made

No	Dimensi Dimensions	2025 ***RISK ENHANCEMENT*** **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	2026 ***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
b.	Peran & Tanggung Jawab Organ Pengelola Risiko Roles & Responsibilities of the Risk Management Organ	• **Telah ada ambang eskalasi yang jelas dari Direksi ke Dekom terkait kegiatan MR yang bersifat regulatori dan krusial** • **Dekom menyetujui Kebijakan untuk Risiko, Manajemen Risiko, dan kepatuhan; Daftar Risiko utama; Kode etik** • **Sebagian besar Dekom memiliki keahlian MR untuk secara efektif mengawasi strategi MR** • **There is a clear escalation threshold from the Board of Directors to the Board of Commissioners regarding regulatory and crucial MR activities.** • **The Board of Commissioners approves the Risk, Risk Management, and Compliance Policy; the Register of Key Risks; and the Code of Ethics.** • **Most Board of Commissioners have MR expertise to effectively oversee the MR strategy.**	• Dekom secara rutin terlibat dalam kegiatan sosialisasi risiko di perusahaan. • Dekom membuat keputusan independen dan berbasis fakta untuk permasalahan yang dieskalasikan. • Semua Dekom memiliki keahlian MR untuk secara efektif mengawasi strategi MR. • The Board of Commissioners is regularly involved in risk socialization activities within the company. • The Board of Commissioners makes independent, fact-based decisions on escalated issues. • All Board of Commissioners possess MR expertise to effectively oversee the MR strategy.
c.	Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini dan Tata Kelola Risiko Terintegrasi	• **Self-assurance/self-checking dilakukan di Lini Pertama dalam hal pengelolan risiko** • **Kesamaan pemahaman manajemen senior mengenai risiko perusahaan, emerging risk, atau risiko baru** • **Lini Pertama memperhatikan kebijakan risiko dalam penetapan target/ sasaran Unit Risiko mereviu dan memantau profil Risiko, peta Risiko, realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan** • **Risiko dan biaya agar sesuai dengan target penyelesaian dan memberi tanggapan secara formal** • **Lini Kedua melakukan internal control testing secara berkala** • **Rekomendasi perbaikan dari Lini 3 atas hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan telah dijalankan sebagian besar (>50%) oleh manajemen** • **SPI Pelindo Multi Terminal Induk menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan, merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah Pelaksanaan pengendalian mutu, serta memantau pelaksanaan Audit Intern pada Anak Perusahaan** • **Terdapat alur pelaporan yang jelas untuk fungsi risiko di seluruh organisasi, termasuk dari fungsi risiko di anak perusahaan**	Review efektivitas tata kelola risiko tiga lini secara berkala Perusahaan memiliki kesadaran akan kepemilikan risiko atas mitra dan kompetitor yang berada dalam rantai nilai Perusahaan Lini kedua menerapkan apresiasi dan hukuman kepada Lini Pertama dalam pengelolaan risiko Pelaksanaan pengawasan intern secara aktif dilaksanakan sesuai dengan rencana audit tahunan, memastikan auditee menyusun rencana tindakan perbaikan dan berkurangnya jumlah temuan Rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan telah dijalankan hamper seluruhnya (>90%) oleh manajemen Terdapat bukti perusahaan melakukan reviu secara berkala untuk memastikan apakah mandat, kerangka kerja, kebijakan/ prosedu risiko yang diturunkan dari fungsi risiko pusat telah diimplementasikan dengan baik ke seluruh lini perusahaan (termasuk Unit Bisnis/anak perusahaan)

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
• Dekom terlibat secara formal dalam penyusunan strategi Risiko, rencana transformasi ERM, dan memastikan bahwa semua keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan didukung oleh analisis risiko yang memadai. • Semua Dekom memiliki kapabilitas MR yang tinggi untuk secara efektif mengawasi strategi MR. • The Board of Commissioners is formally involved in the development of the Risk strategy and ERM transformation plan, and ensures that all strategic decisions made by the company are supported by adequate risk analysis. • All Board of Commissioners have strong MR capabilities to effectively oversee the MR strategy.	• Dekom telah diikutsertakan dalam pelatihan untuk Dekom. • Dekom merespon dan membuat keputusan dengan cepat saat ada permasalahan yang dieskalasikan dengan merujuk ambang batas materialitas yang telah ditetapkan. (Catatan: Potongan kalimat Anda "pengambilan keputusan untuk isu-isu yang membutuhkan eskalasi..." mengarah pada konteks ambang batas eskalasi ke Dekom ini). • Adanya tim audit khusus yang bertanggung jawab mengawasi risiko-risiko yang berkembang (misal IT audit) untuk mendukung upaya Dekom dalam melakukan pengawasan. • The Board of Commissioners has participated in training for the Board of Commissioners. • The Board of Commissioners responds and makes decisions quickly when issues are escalated, referring to the established materiality threshold. (Note: Your sentence fragment "decision-making for issues requiring escalation..." refers to the context of the escalation threshold to the Board of Commissioners.) • A dedicated audit team is responsible for overseeing emerging risks (e.g., IT audit) to support the Board of Commissioners' oversight efforts.	• Terdokumentasinya kinerja keterlibatan aktif Dekom dalam MR perusahaan terutama saat periode kritis. • Dekom merespon dan membuat keputusan dengan cepat saat ada permasalahan yang dieskaliasikan terutama saat periode kritis • Setiap risiko utama Organisasi dialokasikan kepada setidaknya 1 komite di bawah Dekom • Terdapat bukti bahwa komite berinteraksi dengan manajemen secara proaktif • Documented performance of the Board of Commissioners' active involvement in the company's risk management, especially during critical periods. • The Board of Commissioners responds and makes decisions quickly when issues are escalated, especially during critical periods. • Each key organizational risk is allocated to at least one committee under the Board of Commissioners. • Evidence that committees proactively interact with management.
Review efektivitas tata kelola risiko tiga lini oleh setiap lini sebagai upaya perbaikan berkelanjutan Lini Pertama telah memperhatikan kebijakan risiko dalam penetapan target/ sasaran unit kerja dan terdapat KPI risiko di Lini Pertama Kepemilikan kuat risiko oleh Lini Pertama Telah dilakukan pemantauan risiko utama oleh lini kedua yang menyebabkan kinerja perusahaan tercapai melebihi target Pelaksanaan pengawasan intern secara aktif dilaksanakan sesuai dengan rencana audit tahunan dan tidak terdapat temuan berulang Rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan telah dijalankan seluruhnya (100%) oleh manajemen Terdapat interaksi yang efektif dan harmonis antara fungsi risiko pusat dan divisi-divisi lain dalam hierarki Manajemen Risiko (termasuk fungsi risiko di anak perusahaan)	- Telah ada bukti yang jelas atas kinerja implementasi Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini - Kepemilikan risiko dipahami dengan baik dan memengaruhi keputusan penting (misal keputusan strategis) - Lini Kedua menyusun laporan Manajemen Risiko secara bulanan kepada Direksi - Interaksi antara fungsi Assurance dan Risiko sangat kolaboratif (misal fungsi Risiko mempertimbangkan masukan dari fungsi Assurance sebagai bagian dari perbaikan berkesinambungan).	Lini Pertama menjadi pemilik penuh risiko dan kontrol relevan di lini yang diemban. Telah ada otomatisasi kontrol Lini Kedua memastikan tindak lanjut penyelesaian perbaikan dari RMI untuk dapat diselesaikan pada unit kerja Dekom telah secara optimal melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi TKT lainnya sesuai dengan ketentuan UU, AD, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

No	Dimensi Dimensions	2025 ***RISK ENHANCEMENT*** **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	2026 ***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
c.	Three Lines of Risk Governance Model and Integrated Risk Governance	• **Self-assurance/self-checking is conducted at the First Line in terms of risk management.** • **Common understanding of senior management regarding company risks, emerging risks, or new risks.** • **The First Line considers risk policies in setting targets/ goals. The Risk Unit reviews and monitors the Risk profile, Risk map, the calculation of inherent and residual Risk, and the implementation of treatment measures.** • **Risks and costs are aligned with settlement targets and formally respond.** • **The Second Line conducts periodic internal control testing.** • **Improvement recommendations from the Third Line based on the evaluation of the effectiveness of internal control, risk management, and corporate governance processes have been largely implemented (>50%) by management.** • **The Internal Audit Unit of Pelindo Multi Terminal Parent determines the strategy for implementing Internal Audits for Subsidiaries, formulates Internal Audit principles that include audit methodology and quality control implementation steps, and monitors the implementation of Internal Audits in Subsidiaries.** • **There is a clear reporting line for the risk function throughout the organization, including from the risk function in subsidiaries.**	• Periodic review of the effectiveness of three lines of risk governance • The company is aware of the risk ownership of partners and competitors within the company's value chain • The second line applies rewards and penalties to the first line in risk management • Internal oversight is actively implemented in accordance with the annual audit plan, ensuring that auditees develop corrective action plans and reduce the number of findings • Recommendations for improvement based on the evaluation of the effectiveness of internal control, risk management, and corporate governance processes have been implemented almost entirely (>90%) by management • There is evidence that the company conducts periodic reviews to ensure that the mandate, framework, and risk policies/procedures derived from the central risk function have been properly implemented throughout the company (including business units/subsidiaries)
3.	**Kerangka Risiko & Kepatuhan** Risk & Compliance Framework		
b.	Strategi Risiko Risk Strategy	• **Terdapat kerangka kerja ERM yang ditetapkan secara formal sebagai acuan Manajemen** • **Risiko yang terintegrasi dengan aktivitas pencapaian sasaran strategis** • **Strategi perusahaan dan strategi risiko diselaraskan secara rutin** • **Pertimbangan risiko (Kapasitas, Selera, Toleransi, Limit) diakomodir dalam penyusunan rencana strategis perusahaan** • **Evaluasi peran MR terhadap** • **pencapaian target RKAP memiliki kerangka kerja formal** • **Prosedur dan analisis penyusunan Kapasitas, Selera, Toleransi, dan Limit Risiko telah ditetapkan secara formal** • **Selera risiko dan strategi risiko menjadi bagian inti dari materi komunikasi investor dan pemangku kepentingan eksternal (misal tercantum di laman web dan laporan tahunan)** • **A formally established ERM framework serves as a management reference.** • **Risk is integrated with strategic goal achievement activities.** • **Corporate strategy and risk strategy are routinely aligned.** • **Risk considerations (Capacity, Appetite, Tolerance, Limits) are incorporated into the company's strategic plan.** • **Evaluation of the MR's role in achieving RKAP targets has a formal framework.** • **Procedures and analysis for preparing Risk Capacity, Appetite, Tolerance, and Limits have been formally established.** • **Risk appetite and risk strategy are a core part of investor and external stakeholder communications (e.g., included on the website and in the annual report).**	• Evaluasi efektivitas kerangka kerja MR secara berkala dan diperbaharui, • Pembahasan formal • dan pengusulan peningkatan kerangka ERM • Rencana transformasi ERM untuk jangka panjang, dapat ditindaklanjuti, dan mendetail • Rencana strategis sepenuhnya mempertimbangkan risiko secara sistematis dan terukur • Evaluasi secara efektif membantu PMT memperbaiki praktik MR untuk RKAP berikutnya serta memiliki langkah perbaikan yang jelas • Prosedur dan analisis Kapasitas, Selera, Toleransi, dan Limit Risiko ditinjau setiap tahun dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak • Selera Risiko secara efektif diterapkan di perusahaan serta terbukti secara jelas atas kinerja implementasi selera risiko • Regularly evaluate and update the effectiveness of the MR framework. • Formal discussions and proposals for improvements to the ERM framework. • Long-term, actionable, and detailed ERM transformation plan. • Strategic plans fully consider risks in a systematic and measurable manner. • Evaluations effectively help PMT improve MR practices for the next RKAP and provide clear improvement steps. • Procedures and analyses of Risk Capacity, Appetite, Tolerance, and Limits are reviewed annually and communicated to all parties. • Risk appetite is effectively implemented within the company and clearly demonstrated through its implementation performance.

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
• Review of the effectiveness of three lines of risk governance by each line as an effort for continuous improvement. • The First Line has considered risk policies in setting work unit targets/goals, and there are risk KPIs in the First Line. • Strong risk ownership by the First Line. • Key risk monitoring has been conducted by the Second Line, resulting in company performance exceeding targets. • Internal oversight is actively implemented in accordance with the annual audit plan, with no recurring findings. • Recommendations for improvement based on the evaluation of the effectiveness of internal control, risk management, and corporate governance processes have been fully implemented (100%) by management. • Effective and harmonious interaction exists between the central risk function and other divisions within the risk management hierarchy (including risk functions in subsidiaries).	• There is clear evidence of the performance of the Three-Lines Risk Governance Model implementation. • Risk ownership is well understood and influences key decisions (e.g., strategic decisions). • The Second Line prepares monthly Risk Management reports to the Board of Directors. • The interaction between the Assurance and Risk functions is highly collaborative (e.g., the Risk function considers input from the Assurance function as part of continuous improvement).	• The First Line assumes full ownership of relevant risks and controls within its assigned line. • Control automation is in place. • The Second Line ensures follow-up on RMI improvements and their resolution within the work unit. • The Board of Commissioners has optimally monitored and provided advice on the implementation of other TKT functions in accordance with the provisions of the Law, the Articles of Association, and/or GMS/Ministerial Decisions.
• Inisiatif peningkatan kerangka ERM telah dijalankan dengan pengukuran dampak yang jelas secara kuantitatif dan kualitatif • Transformasi ESG yang meliputi : risiko ESG/ Iklim tercantum dalam taksonomi, implikasi risiko telah dimasukkan ke dalam kerangka kerja ERM, memiliki tim khusus, telah dianalisis dampaknya kepada portofolio, memiliki analisis dan data • Terdapat bukti dan dokumentasi bahwa fungsi risiko dan strategi bekerja sama membahas dan menyusun strategi risiko dan strategi perusahaan • Analisis Strategis MR bersifat current dan backward looking • Kapasitas risiko mencakup identifikasi dan pengelolaan berbagai jenis risiko relevan (operasional, keuangan, lingkungan, reputasi, dll) • Pemangku kepentingan utama memahami dan menerima selera dan strategi risik • ERM framework improvement initiatives have been implemented with clear quantitative and qualitative impact measurements. • ESG transformation includes: ESG/ climate risks are listed in the taxonomy, risk implications are incorporated into the ERM framework, a dedicated team is established, their impact on the portfolio has been analyzed, and analysis and data are available. • Evidence and documentation exists that the risk and strategy functions collaborate to discuss and develop risk strategy and corporate strategy. • Strategic MR analysis is current and backward-looking. • Risk capacity includes the identification and management of various types of relevant risks (operational, financial, environmental, reputational, etc.). • Key stakeholders understand and accept the risk appetite and strategy.	• Evaluasi efektivitas kerangka kerja MR beserta kebijakan, prosedur, dsb secara berkala dan diperbaharui, serta telah dilaporkan kepada pimpinan • Ruang lingkup transformasi ERM jauh melampaui regulasi dan didasarkan pada benchmark • Transformasi ESG memiliki target khusus dan memiliki rencana jangka panjang untuk mencapai target • Unit Bisnis memahami pertimbangan risiko dalam perencanaan strategis • Analisis Strategi MR bersifat backward dan forward looking • Dilakukan kaji ulang/reviu rutin terhadap RAS (misal tahunan) sebagai bagian dari proses formal • Dilakukan pembahasan secara aktif mengenai selera dan strategi risiko bersama pemangku kepentingan utama (misal dibahas dalam rapat triwulanan pemegang saham) • Evaluate the effectiveness of the MR framework, including policies, procedures, etc., regularly and update them, and report them to management. • The scope of the ERM transformation goes beyond regulations and is based on benchmarks. • The ESG transformation has specific targets and a long-term plan to achieve them. • Business units understand risk considerations in strategic planning. • MR strategy analysis is both backward and forward-looking. • Regular reviews of the RAS (e.g., annually) are conducted as part of a formal process. • Active discussions on risk appetite and strategy are held with key stakeholders (e.g., discussed at quarterly shareholder meetings).	• Program transformasi ERM diperbarui secara rutin • Ada tim khusus yang bertanggung jawab terhadap transformasi. Unit bisnis dan fungsi lainnya terlibat dalam rencana transformasi. • Pengukuran yang jelas atas estimasi value-at-stake dari program transformasi (fokus bergeser dari kepatuhan ke value capture) • Perusahaan menggali peluang bisnis baru dan pertumbuhan dari agenda ESG/Iklim • Terdapat bukti atas kinerja penerapan Manajemen Risiko dalam penyusunan rencana strategis • Pemangku kepentingan utama (termasuk Unit Bisnis) dapat menjelaskan RAS dan alasan-alasannya, dan sepenuhnya menyepakatinya • The ERM transformation program is regularly updated • A dedicated team is responsible for the transformation. Business units and other functions are involved in the transformation plan. • Clear measurement of the estimated value-at-stake of the transformation program (focus shifts from compliance to value capture) • The company explores new business and growth opportunities from the ESG/Climate agenda • Evidence of the implementation of Risk Management in the development of strategic plans • Key stakeholders (including Business Units) can explain the RAS and its rationale, and fully agree on it

No	Dimensi Dimensions	2025 ***RISK ENHANCEMENT*** **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	2026 ***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
3.	**Kerangka Risiko & Kepatuhan** Risk & Compliance Framework		
c.	Kebijakan dan Prosedur Policies and Procedures	• **Terdapat proses/alur untuk mengelola Risiko utama sesuai dengan selera Risiko** • **Telah ada proses dan kontrol risiko untuk setiap elemen dalam kerangka ERM yang bersifat formal yang telah dikomunikasikan ke seluruh lini perusahaan.** • **Fase Praktik yang Baik** • **Rencana kontingensi disusun melebihi kriteria yang diprasyaratkan regulator dan terdokumentasi** • **Reviu dan stress test rutin (misal tahunan) dilakukan pada sebagian prosedur dan SOP utama terkait risiko utama perusahaan, dengan identifikasi area perbaikan.** • **Manajemen senior terlibat aktif dalam reviu dan kritik stress test, meskipun sebagian besar pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja.** • **A process/flow exists to manage key risks in accordance with risk appetite.** • **A formal risk process and controls are in place for each element of the ERM framework that has been communicated throughout the company.** • **Good Practice Phase** • **Contingency plans are developed that exceed regulatory requirements and are documented.** • **Routine (e.g., annual) reviews and stress tests are conducted on key procedures and SOPs related to the company's key risks, with areas for improvement identified.** • **Senior management is actively involved in the review and critique of stress tests, although most of the implementation is carried out by work units.**	• Kebijakan memuat rencana kontingensi yang terperinci dan terdefinisi dengan baik, dengan alur spesifik atas langkah yang dibutuhkan • Prosedur risiko dan standar pendukungnya secara efektif tertanam dan diterapkan di Perusahaan • Dilakukan pengujian terhadap rencana keberlangsungan bisnis dan manajemen krisis secara berkala (misal satu kali dalam setahun) yang melibatkan manajemen senior untuk mereviu, mengkritisi dan memperbaiki kualitasnya • Reviu dan stress test rutin dilakukan secara tahunan pada sebagian besar prosedur dan SOP utama terkait risiko utama perusahaan, dengan identifikasi area perbaikan. • Policies contain detailed and well-defined contingency plans, with a specific flow of required steps. • Risk procedures and supporting standards are effectively embedded and implemented throughout the company. • Business continuity and crisis management plans are tested periodically (e.g., annually), involving senior management to review, critique, and improve their quality. • Routine annual reviews and stress tests are conducted on most key procedures and SOPs related to the company's key risks, with areas for improvement identified.
3.	**Kerangka Risiko & Kepatuhan** Risk & Compliance Framework		
c.	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	**Kegiatan kepatuhan berfokus pada kebijakan perusahaan, bukan hanya persyaratan regulator.** **Compliance activities focus on company policies, not just regulatory requirements.**	• Pendekatan bottom-up digunakan untuk memeriksa pemenuhan • persyaratan kepatuhan terhadap regulator dan praktik industri terbaik • Harmonious linkages between operational risk, compliance, and audit processes, including risk identification, assessment, and limit management, as well as the use of risk taxonomies and common information systems. • Best Practices Phase

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
• Kebijakan risiko dikaji ulang secara rutin (sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun) • Fase Praktik yang • Kontrol risiko memuat metode untuk mengontrol risiko keberlangsungan bisnis dan mempertimbangkan eksposur risiko dan selera risiko perusahaan, termasuk titik pemicu (trigger point) yang didefinisikan sebelumnya untuk pelaksanaan prosedur kontingensi Lebih Baik • Telah ada kebijakan dan prosedur untuk melindungi informasi digital • Manajemen senior terlibat aktif dalam reviu dan kritik melalui stress test setidaknya sekali dalam setahun, termasuk dalam simulasi krisis dan analisis root-cause. • Risk policies are reviewed regularly (at least once every two years) • Practice Phase • Risk controls contain methods for controlling business continuity risks and consider the company's risk exposure and risk appetite, including pre-defined trigger points for implementing contingency procedures. • Policies and procedures are in place to protect digital information. • Senior management is actively involved in the review and critique through stress testing at least once a year, including crisis simulations and root-cause analysis.	• Tidak ditemukan kekurangan serius pada proses-proses yang berkaitan dengan pengelolaan risiko utama • Kebijakan dan prosedur risiko diimplementasikan secara efektif, dan keefektifannya dikaji secara periodik melalui kegiatan yang terdokumentasi • Dilakukan pengujian terhadap rencana keberlangsungan bisnis dan manajemen krisis secara berkala (misal setahun dua kali) yang melibatkan manajemen senior untuk mereviu, mengkritisi dan memperbaiki kualitasnya • Setiap pemangku kepentingan (termasuk Unit Bisnis) memahami dan menerima peran dan tanggung jawabnya dalam kondisi krisis melalui change management • Dilakukan perbaikan berkesinambungan pada prosedur, benchmarking terhadap praktik terbaik, dan sosialisasi di seluruh lini perusahaan sepanjang waktu. • No serious deficiencies were identified in the processes related to managing key risks. • Risk policies and procedures are implemented effectively, and their effectiveness is reviewed periodically through documented activities. • Business continuity and crisis management plans are tested periodically (e.g., twice a year), involving senior management to review, critique, and improve them. • Each stakeholder (including Business Units) understands and accepts their roles and responsibilities in a crisis through change management. • Continuous improvement of procedures, benchmarking against best practices, and dissemination throughout the company are carried out over time.	• Fungsi Risiko secara rutin memanfaatkan analisis yang relevan dan terperinci dalam memberikan wawasan terkait arah kegiatan usaha • Keefektifan didukung oleh bukti kinerja penurunan/pemertahanan jumlah kasus dan kerugian yang disebabkan oleh kebocoran data secara year-on-year • Rencana keberlangsungan bisnis pernah diterapkan dengan baik pada kejadian-kejadian krisis di masa lampau • Terdapat database terpusat yang mudah diakses untuk SOP terbaru, misalnya melalui intranet atau solusi manajemen SOP. • The Risk Function routinely utilizes relevant and detailed analysis to provide insights into the direction of business activities. • Effectiveness is supported by evidence of year-on-year reduction/maintenance in the number of data breach cases and losses. • The business continuity plan has been successfully implemented in past crises. • A centralized database is readily accessible for the latest SOPs, for example through an intranet or SOP management solution.
• Keterkaitan harmonis antara proses risiko operasional, kepatuhan, dan audit, termasuk identifikasi, penilaian, pengelolaan limit risiko, serta pemanfaatan taksonomi risiko dan sistem informasi umum. • Fase Praktik Terbaik • Harmonious linkages between operational risk, compliance, and audit processes, including risk identification, assessment, and limit management, as well as the use of risk taxonomies and common information systems. • Best Practices Phase	Kepatuhan terhadap Kebijakan perusahaan dievaluasi secara rutin dan acak sepanjang tahun. Compliance with Company Policy is evaluated regularly and randomly throughout the year.	Fungsi kepatuhan dapat berperan sebagai advisory yang efektif, memberikan saran berkualitas dalam menangani isu-isu sulit, The compliance function can play an effective advisory role, providing quality advice in dealing with difficult issues,

No	Dimensi Dimensions	2025 ***RISK ENHANCEMENT*** **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	2026 ***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
d.	Efektivitas Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Effectiveness of Risk Management and Internal Control	• **Perusahaan memiliki kerangka ERM yang mencakup semua langkah MR dan memenuhi standar internasional seperti ISO 31000:2018** • **Telah dilakukan kaji ulang atau reviu efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional, sistem informasi MR dan penanganan kelemahan PMT yang bersifat material. Kaji ulang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.** • **The company has an ERM framework that covers all MR steps and complies with international standards such as ISO 31000:2018** • **An effective, independent, and objective review has been conducted of the procedures for assessing operational activities, the MR information system, and the handling of material PMT weaknesses. The review is conducted periodically and on an ongoing basis.**	• Terdapat kerangka transformasi ERM, namun hanya untuk memenuhi persyaratan regulator. • Kerangka ERM direview dan disesuaikan secara rutin/tiap tahun • Pengujian dan kaji ulang atau reviu memadai terhadap sistem informasi MR • Tindaklanjut atas hasil kaji ulang/reviu telah selesai dilakukan dan terdapat dokumentasi atas tindak lanjut. Penyelesaian tindak lanjut 100%. • An ERM transformation framework is in place, but only to meet regulatory requirements. • The ERM framework is reviewed and updated regularly/ annually. • Adequate testing and review of the MR information system. • Follow-up on the results of the review has been completed, and documentation of the follow-up is available. 100% of follow-up actions have been completed
4.	**Proses & Kontrol Risiko** Risk Process and Control		
a.	Identifikasi Risiko Risk Identification	• **Terdapat taksonomi risiko yang terhubung dengan bisnis, dan mencakup risiko-risiko dasar dan risiko kompleks, serta mencakuprisiko yang akan muncul (emerging risk)** • **Terdapat metodologi identifikasi risiko yang mempertimbangkan risiko pada proses bisnis PMT dan target risiko residual secara bottom-up dan top-down, yang biasanya dilakukan di setiap triwulan** • **Dilakukan analisis proses identifikasi risiko** • **Bahasa atau istilah yang digunakan dalam proses identifikasi risiko sudah konsisten dan tidak rancu antara risiko dengan penyebab risiko, potensi dampak, atau potensi dampak yang disebabkan pengendalian risiko yang tidak efektif** • **A business-related risk taxonomy is in place, encompassing basic and complex risks, as well as emerging risks.** • **A risk identification methodology is in place that considers risks in PMT business processes and residual risk targets in a bottom-up and top-down manner, typically conducted quarterly.** • **A risk identification process analysis is conducted.** • **The language or terminology used in the risk identification process is consistent and does not confuse risk with risk causes, potential impacts, or potential impacts caused by ineffective risk controls.**	• Terdapat taksonomi risiko integrasian yang terhubung dengan bisnis, dan mencakup risiko dasar dan risiko kompleks, serta mencakup risiko yang akan muncul (emerging risk) termasuk risiko-risiko masa depan (forward-looking risks) (misal ESG, siber) • Taksonomi risiko secara konsisten diterapkan di seluruh Anper(jika relevan) • There is an integrated risk taxonomy linked to the business, covering both basic and complex risks, as well as emerging risks, including forward-looking risks (e.g., ESG, cyber). • The risk taxonomy is consistently applied across the Anper (where relevant).

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
• Perusahaan memiliki rencana transformasi ERM yang mendetail, mencakup lini masa, kebutuhan sumber daya, pengawasan program, dan lainnya. • Transformasi ERM perusahaan melibatkan inisiatif yang melampaui persyaratan regulator, menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan. • The company has a detailed ERM transformation plan, including a timeline, resource requirements, program oversight, and more. • The company's ERM transformation involves initiatives that go beyond regulatory requirements and are part of its continuous improvement efforts.	• Fase Praktik Terbaik • Tim khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kesuksesan rencana transformasi, dengan keterlibatan Unit Bisnis dan fungsi lainnya dalam perancangan dan pelaksanaan tahapannya. • Best Practices Phase • A dedicated team is responsible for the implementation and success of the transformation plan, with Business Units and other functions involved in the design and execution of its phases.	• Hasil penilaian benchmarking dilakukan terhadap praktik terbaik global/eksternal, mengidentifikasi kesenjangan dan area yang perlu ditingkatkan, dengan bukti penyesuaian kerangka ERM berdasarkan hasil analisis. • Fokus ERM bergeser dari "kepatuhan" ke "value capture". • Tindaklanjut atas hasil kaji ulang/ reviu telah selesai dilakukan dan terdapat dokumentasi atas tindak lanjut. Penyelesaian tindak lanjut 100% minimal 3 tahun terakhir. • The benchmarking assessment compared practices to global/external best practices, identified gaps and areas for improvement, and provided evidence of adjustments to the ERM framework based on the analysis results. • The focus of ERM has shifted from "compliance" to "value capture." • Follow-up actions on the review results have been completed, and documentation of these actions is available. At least 100% of follow-up actions have been completed over the past three years.
• Taksonomi risiko secara konsisten diterapkan di ketiga lini, serta terdapat kerangka dan sistem Manajemen Risiko Perusahaan yang komprehensif • Telah ada gambaran umum eksposur risiko, yang dicatat pada risk register. • The risk taxonomy is consistently applied across all three lines, and a comprehensive Enterprise Risk Management framework and system is in place. • An overview of risk exposures is established, recorded in the risk register.	• Terdapat metodologi identifikasi risiko yang mempertimbangkan risiko-risiko pada proses bisnis PMT dan target risiko residual secara bottom-up di level bisnis, dan topdown yang dipimpin tim pusat. • Identifikasi risiko dilakukan melalui pendekatan top-down berdasarkan input dari tingkat Unit Bisnis dan didefinisikan di tingkat pusat • Telah ada bukti yang jelas atas kinerja penerapan taksonomi risiko • A risk identification methodology exists that considers risks within PMT business processes and residual risk targets, both bottom-up at the business level and top-down, led by the central team. • Risk identification is conducted through a top-down approach based on input from the Business Unit level and defined at the central level. • There is clear evidence of the effectiveness of the risk taxonomy implementation.	Dilakukan pengkinian terhadap taksonomi risiko dan secara rutin dikaji ulang (sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun) The risk taxonomy is updated and regularly reviewed (at least once a year)

No	Dimensi Dimensions	2025	2026
		RISK ENHANCEMENT **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
b.	Pengukuran dan Pioritisasi Risko Risk Measurement and Prioritization	• **Telah ada penerapan metode kuantitatif dan kualitatif untuk proses penilaian risiko (misal terdapat kriteria kuantitatif dan kualitatif untuk penilaian dampak), namun sebagian besar penilaian masih menggunakan metode kualitatif** • **Penilaian dan prioritisasi Risiko diimplementasikan dengan baik oleh Lini Pertama dan Kedua** • **Telah terdapat perlakuan risiko (kurangi/transfer/ hindari), indikator risiko utama/KRI, dan limit risiko dari setiap risiko.** • **Proses integrasi risiko biasanya dilakukan setiap tahun oleh Unit Bisnis dan unit risiko pusat** • **Proses integrasi dilakukan secara bottom up sehingga risiko utama perusahaan dapat ditentukan.** • **Quantitative and qualitative methods have been implemented in the risk assessment process (e.g., quantitative and qualitative criteria exist for impact assessment), but most assessments still use qualitative methods.** • **Risk assessment and prioritization are well implemented by the First and Second Lines.** • **Risk treatment (reduce/transfer/avoid), key risk indicators (KRIs), and risk limits for each risk are in place.** • **The risk integration process is usually conducted annually by Business Units and the central risk unit.** • **The integration process is conducted bottom-up to determine the company's key risks.**	• Telah ada penerapan metode yang berimbang antara kuantitatif dan kualitatif untuk proses penilaian risiko • Telah ada evaluasi kesesuaian metode asesmen risiko setidaknya setiap tahun • Telah ada prosedur formal saat peringatan muncul/limit Risiko terlampaui • Selera risiko (risk appetite) tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyusun kriteria pengukuran risiko. Kriteria pengukuran risiko telah digunakan secara konsisten dan terbukti untuk melakukan pengukuran risiko. • A balanced application of quantitative and qualitative methods for the risk assessment process has been implemented. • The suitability of the risk assessment method has been evaluated at least annually. • Formal procedures exist for when warnings are issued/risk limits are exceeded. • The risk appetite serves as one of the foundations for developing risk measurement criteria. The risk measurement criteria have been used consistently and proven to be effective in measuring risk.

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
• Proses penilaian risiko telah dilaksanakan secara cukup efektif, termasuk: a. Penilaian dilaksanakan setidaknya setiap triwulan (misal penilaian awal dan penilaian terkini setiap triwulan) b. Kerangka dan proses penilaian cukup efektif untuk menilai risiko, walaupun masih ada realisasi dampak kuantitatif dan kualitatif yang untuk beberapa jenis risiko yang melebihi dampak yang telah diperkirakan saat penilaian awal tahun c. Kerangka dan proses penilaian telah dilakukan, namun masih ada beberapa realisasi peristiwa risiko signifikan yang belum dinilai pada saat penilaian awal tahun • The risk assessment process has been implemented effectively, including: a. Assessments are conducted at least quarterly (e.g., initial and updated assessments every quarter). b. The assessment framework and process are effective in assessing risks, although some quantitative and qualitative impacts for some risk types exceed those estimated at the beginning of the year assessment. c. The assessment framework and process have been implemented, but some significant risk events have not been assessed at the beginning of the year assessment.	• Telah ada penerapan metode yang berimbang antara kuantitatif dan kualitatif untuk proses risiko, antara lain: a. Telah ada kriteria kuantitatif dan kualitatif untuk penilaian dampak b. Penerapan metode kualitatif melibatkan pengumpulan opini dari pakar internal (misal lokakarya, self assessment) dan pakar eksternal yaitu (perspektif "outside-in") c. Penerapan metode kuantitatif melibatkan penggunaan data historis (misal loss event database), dilengkapi dengan data pasar dan perkiraan forward looking lainnya • Hasil pengukuran risiko dikomunikasikan kepada pimpinan unit kerja/fungsi dan pimpinan perusahaan, guna divalidasi untuk selanjutnya digunakan secara konsisten sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. • A balanced mix of quantitative and qualitative methods has been implemented for the risk process, including: a. Quantitative and qualitative criteria are in place for impact assessment. b. The application of qualitative methods involves gathering opinions from internal experts (e.g., workshops, self-assessments) and external experts (e.g., from an "outside-in" perspective). c. The application of quantitative methods involves the use of historical data (e.g., loss event databases), supplemented by market data and other forward-looking estimates. • Risk measurement results are communicated to work unit/function leaders and company management for validation and consistent use as a consideration in the company's decision-making process.	• Telah ada evaluasi kesesuaian metode penilaian risiko secara lebih sering (lebih dari sekali setiap tahun) sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan dari proses penilaian risiko dan sebagian besar risiko utama dapat dinilai secara Kuantitatif • Metode penilaian risiko kuantitatif dan kualitatif sepenuhnya terstandardisasi/ konsisten di seluruh jenis risiko di antara Unit Bisnis/anak perusahaan yang berbeda untuk memfasilitasi integrasi dampak risiko • Telah ada proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang akan muncul • (emerging risk) di luar kerangka risiko yang telah ada seperti risiko operasional, keuangan, dan kepatuhan serta risiko-risiko tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi input dalam proses penilaian risiko yang dilakukan secara rutin • Hasil pengukuran risiko dikomunikasikan kepada pimpinan unit kerja/fungsi dan pimpinan perusahaan, guna divalidasi untuk selanjutnya sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan • There has been a more frequent evaluation of the suitability of risk assessment methods (more than once annually) as part of the continuous improvement of the risk assessment process, and most key risks can be assessed quantitatively. • Quantitative and qualitative risk assessment methods are fully standardized/consistent across risk types among different Business Units/ subsidiaries to facilitate the integration of risk impacts. • A systematic process is in place to identify and analyze emerging risks outside the existing risk framework, such as operational, financial, and compliance risks. These risks are considered in the decision-making process and serve as input into the routine risk assessment process. • Risk measurement results are communicated to the heads of work units/functions and the company leadership for validation and subsequent consideration in decision-making.

No	Dimensi Dimensions	2025 ***RISK ENHANCEMENT*** **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	2026 ***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
4.	**Proses & Kontrol Risiko** Risk Process and Control		
c.	Perlakuan Risiko Risk Treatment	• **Rencana mitigasi risiko disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan risiko antar unit kerja/ fungsi, agar penanganan risiko tidak terduplikasi dan lebih efektif.** • **Dalam menentukan rencana mitigasi risiko, perusahaan memperhatikan manfaat yang dapat tercipta dan sumber daya yang dikeluarkan untuk menangani suatu risiko dan dikomunikasikan kepada fungsi manajemen risiko** • **Telah ada proses terstruktur untuk menyusun strategi penanganan ketidaksesuaian antara eksposur risiko aktual dan selera risiko, antara lain:** **1. Menyusun basis fakta/data mengenai risiko** **2. Fase Praktik yang Baik** **3. Melakukan analisis risiko** **4. Memaparkan opsi-opsi kepada jajaran manajemen** • **Risk mitigation plans are developed by considering the interrelationships between risk units/functions, ensuring that risk management is not duplicated and is more effective.** • **In determining risk mitigation plans, the company considers the potential benefits and resources required to address a risk, which are communicated to the risk management function.** • **A structured process is in place to develop strategies for addressing discrepancies between actual risk exposure and risk appetite, including:** **a. Developing a fact/data base regarding risks** **b. Good Practice Phase** **c. Conducting risk analysis** **d. Presenting options to management**	• Telah ada rencana kontingensi yang terdefinisi dengan baik untuk setiap risiko utama • Setiap pegawai memahami dan menerima peran dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kebijakan dan proses pengelolaan risiko-risiko utama • Telah ada perhitungan dampak risiko residual yang akan dikorelasikan dengan targetnya. • Strategi yang ada saat ini telah efektif menjaga eksposur risiko agar tetap di level yang diinginkan (misal tidak ditemui bukti mengenai risiko yang melampaui ambang batasnya) • A well-defined contingency plan is in place for each major risk. • Each employee understands and accepts their roles and responsibilities related to the policies and processes for managing these major risks. • The residual risk impact has been calculated and correlated with the target. • The current strategy is effective in maintaining risk exposure at the desired level (e.g., there is no evidence of risks exceeding thresholds).
4.	**Proses & Kontrol Risiko** Risk Process and Control		
d.	Pelaporan Risiko Risk Reporting	• **Pelaporan risiko dilakukan secara rutin (misal laporan triwulanan menunjukkan dengan jelas ambang batas risiko yang telah terlampaui)** • **Pelaporan risiko menyertakan sejumlah leading indicator** • **Telah ada pelaporan di tingkat Unit Bisnis dan tingkat grup, termasuk anak perusahaan (jika relevan** • **Risk reporting is conducted routinely (e.g., quarterly reports clearly indicate risk thresholds that have been exceeded).** • **Risk reporting includes a number of leading indicators.** • **Reporting is in place at the Business Unit and Group levels, including subsidiaries (where relevant).**	Pelaporan risiko dilakukan secara rutin (misal laporan triwulanan) dan dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut perbaikan, dan analisis tambahan Risk reporting is carried out routinely (e.g. quarterly reports) and is accompanied by recommendations for follow-up improvements and additional analysis.
5.	**Model, Data, dan Teknologi Risiko** Risk Models, Data, and Technology		

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
Proses terstruktur untuk menyusun strategi penanganan ketidaksesuaian antara eksposur risiko aktual dan selera risiko yang dibahas setiap bulan A structured process for developing strategies for handling mismatches between actual risk exposure and risk appetite that is discussed monthly.	Dilakukan penyelarasan antara perusahaan induk dan anak perusahaan/Unit Bisnis untuk memastikan bahwa analisis eksposur risiko telah mencakup seluruh risiko dari anak perusahaan/Unit Bisnis. Alignment is carried out between the parent company and subsidiaries/Business Units to ensure that the risk exposure analysis covers all risks from the subsidiaries/Business Units.	
Pelaporan risiko mencakup ringkasan semua risiko utama di semua kategori risiko, kejadian-kejadian penting dengan analisis pasca kejadian, leading indicator, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Risk reporting includes a summary of all major risks across all risk categories, significant events with post-event analysis, leading indicators, and actionable recommendations.	Pelaporan dilakukan menggunakan toolkit otomatis dan hasil pelaporan dapat diakses secara real-time Reporting is done using an automated toolkit and reporting results can be accessed in real-time.	

No	Dimensi Dimensions	2025 ***RISK ENHANCEMENT*** **Penguatan ERM framework, Organ Pengelola Risiko, Kapabilitas, dan Metodelogi Analisis Risiko** Strengthening the ERM framework, Risk Management Organ, Capabilities, and Risk Analysis Methodology	2026 ***RISK INTEGRATED & COLLABORATIVE PLANNING*** **Penerapan terintegrasi Strategi Risiko dan Strategi Bisnis pada Induk dan Anak Perusahaan** Integrated implementation of Risk Strategy and Business Strategy at the Parent Company and Subsidiaries
a.	Pemodelan dan Teknologi Risiko Risk Modeling and Technology	• **Model risiko diterapkan untuk kuantifikasi risiko namun belum secara rutin dan tidak terintegrasi dalam pengambilan keputusan** • **Aplikasi Advanced Analytics untuk Manajemen Risiko masih dalam pengembangan** • **Risk models are applied for risk quantification, but are not routinely used and are not integrated into decision-making.** • **Advanced Analytics applications for Risk Management are still under development.**	• Telah ada model risiko untuk kuantifikasi risiko, namun, model hanya tersedia untuk sebagian jenis risiko/ diterapkan pada tingkat tinggi tanpa analisis granular • Telah ada aplikasi Advanced Analytics untuk Manajemen Risiko, namun masih dalam tahap awal, misal terdapat Early Warning System (EWS) yang baru dikembangkan. • Fase Praktik yang Baik • Risk models for risk quantification exist, however, they are only available for certain types of risks or are applied at a high level without granular analysis. • Advanced Analytics applications for Risk Management exist, but are still in their infancy. For example, the newly developed Early Warning System (EWS). • Good Practice Phase
b.	Data Risiko Risk Data	**Solusi TI memuat informasi mengenai eksposur risiko, kebijakan dan prosedur MR, serta limit risiko.** **IT solution contains information on risk exposures, risk management policies and procedures, and risk limits.**	Diterapkan otomatisasi pengumpulan data operasional untuk pelaporan risiko Automation of operational data collection for risk reporting has been implemented.

2027	2028	2029
RISK OPTIMIZATION **Optimalisasi peran Manajemen Risiko dalam rangka pengelolaan peluang, pencapaian Sasaran dan Inisiatif Strategis Perusahaan** Optimizing the role of Risk Management in managing opportunities and achieving the Company's Strategic Goals and Initiatives	***RISK RESILIENCE*** **Penerapan Manajemen Risiko oleh seluruh lini secara kuat meskipun di tengah kondisi terburuk (worst case)** Strong implementation of Risk Management across all levels, even in worst-case scenarios	***RISK CONTINOUS IMPROVEMENT*** **Penerapan Praktik Terbaik Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan** Consistent and sustainable implementation of Risk Management Best Practices
• Telah ada model risiko untuk kuantifikasi risiko sebagian besar risiko utama perusahaan, dengan analisis dampak berbasis risiko yang dikonsolidasikan ke dampak tingkat integrasian (misal P/L, arus kas) • Telah ada aplikasi Advanced Analytics untuk Manajemen Risiko namun dengan tingkat kematangan berbeda (missal EWS telah matang, namun anti-fraud analytics baru dikembangkan) • Telah ada aplikasi EWS yang telah matang, yang secara otomatis memperbarui dan mengambil data. • Telah ada tim risk model and analytics in-house khusus yang memiliki kapabilitas Manajemen Risiko dan kemampuan manajemen model khusus di beberapa. • Risk models exist to quantify the risk of most of the company's key risks, with risk-based impact analysis consolidated to integration-level impacts (e.g., P/L, cash flow). • Advanced Analytics applications exist for Risk Management, but at varying levels of maturity (e.g., the EWS is mature, but anti-fraud analytics are still under development). • Mature EWS applications exist, automatically updating and capturing data. • A dedicated in-house risk model and analytics team exists, with Risk Management capabilities and specialized model management capabilities across several sectors.	• Model risiko secara rutin divalidasi, namun keakuratannya bervariasi (misal banyak model masih memiliki GINI rendah kurang dari 30%) • Teknik pemodelan risiko tidak diterapkan secara konsisten di seluruh Unit Bisnis/anak Perusahaan • Manajemen model dilakukan secara manual dan tersebar di beberapa risk owner tanpa dokumentasi yang baik dan sistem penyimpanan terpusat • Seluruh sistem yang berada di masing-masing unit bisnis terintegrasi dengan sistem informasi Manajemen Risiko • Risk models are routinely validated, but their accuracy varies (e.g., many models still have a low GINI of less than 30%). • Risk modeling techniques are not consistently applied across all Business Units/Subsidiaries. • Model management is manual and spread across multiple risk owners without proper documentation and a centralized storage system. • All systems in each business unit are integrated with the Risk Management information system.	• Data risiko digunakan dan menjadi input otomatis untuk setiap analisis dan model. • Telah ada lebih dari satu implementasi aplikasi Advanced Analytics Manajemen Risiko yang telah matang • Penerapan teknologi dan algoritma Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) dalam model risiko, termasuk prosedur untuk mengurangi potensi penyalahgunaan/ketidakpastian/ bias dari penggunaan • Teknik pemodelan risiko yang diterapkan secara konsisten di seluruh Unit Bisnis/anak Perusahaan • Digitalisasi dan otomatisasi terhadap manajemen model di seluruh siklus hidup model • Risk data is used and automatically input into every analysis and model. • Multiple mature Advanced Analytics Risk Management applications have been implemented. • Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) technology and algorithms are implemented in risk models, including procedures to mitigate potential misuse, uncertainty, and bias. • Risk modeling techniques are consistently applied across all Business Units/Subsidiaries. • Digitization and automation of model management throughout the model lifecycle.
Kualitas data risiko sangat baik dan konsisten di seluruh lini Perusahaan Risk data quality is excellent and consistent across the company.	Telah ada pengelolaan kualitas data secara otomatis dan pemanfaatan teknologi (misal teknik berbasis AI/ML) untuk mempercepat identifikasi dan remediasi masalah kualitas data) Automated data quality management and the use of technology (e.g., AI/ML-based techniques) have been implemented to accelerate the identification and remediation of data quality issues.	

APLIKASI PRIMA: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memanfaatkan aplikasi PRiMa sebagai platform manajemen risiko untuk mendukung pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi. Penggunaan sistem ini membuat proses pengelolaan risiko dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.

Sejak mulai diimplementasikan secara aktif pada awal tahun 2023, PRiMa telah digunakan oleh seluruh unit kerja untuk menyusun dan memantau profil risiko masing-masing secara berkala. Kehadiran platform ini juga membantu Perusahaan dalam meningkatkan kualitas *monitoring* serta memperkuat koordinasi pengelolaan risiko di berbagai lini operasional.

Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan adaptif, penerapan manajemen risiko di Perusahaan sekaligus menjadi bagian dari strategi dalam menjaga ketahanan bisnis dalam menghadapi berbagai tantangan usaha, termasuk isu yang berkaitan dengan aspek *Environment, Social, and Governance* (ESG).

STRATEGI RISIKO

Strategi risiko disusun dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi yang akan menjadi usulan dalam rancangan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) ataupun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Strategi Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Strategi Risiko PT Pelindo Multi Terminal terdiri dari:

1. Pernyataan Selera Risiko (*Risk Appetite Statement*);
2. Nilai Ambang Risiko di Level Korporat;
3. Metrik Strategi Risiko.

PERNYATAAN SELERA RISIKO

Dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029, Perusahaan memiliki strategi risiko yang dituangkan dalam Pernyataan Selera Risiko atau *Risk Appetite Statement* sebagaimana tercantum di bawah ini:

PRIMA APPLICATION: RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Company utilizes the PRiMa application as a risk management platform to support more integrated risk management. The use of this system enables risk management processes to be carried out in a more structured, efficient, and well-documented manner.

Since its active implementation at the beginning of 2023, PRiMa has been used by all work units to develop and periodically monitor their respective risk profiles. The platform has also assisted the Company in improving the quality of risk monitoring and strengthening coordination of risk management across various operational functions.

Through a more systematic and adaptive approach, the implementation of risk management within the Company also forms part of its strategy to maintain business resilience in addressing various business challenges, including issues related to Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects.

RISK STRATEGY

The risk strategy is formulated to serve as the basis for determining various target and strategic options that will be proposed in the draft RJPP (Corporate Long-Term Plan) or RKAP (Corporate Work Plan and Budget). In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance of Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Risk Strategy of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelindo Multi Terminal's Risk Strategy consists of:

1. Risk Appetite Statement;
2. Corporate-Level Risk Threshold;
3. Risk Strategy Metrics.

RISK APPETITE STATEMENT

To create and protect value and support sustainable business growth in accordance with the implementation of the Company's 2025-2029 Long-Term Plan, the Company has a risk strategy outlined in the Risk Appetite Statement, as set out below:

Sikap Terhadap Risiko* Attitude Toward Risk*	**Pernyataan Selera Risiko *(Risk Appetite Statement)*** *Risk Appetite Statement*
Tidak Toleran Intolerant	1. PT Pelindo Multi Terminal tidak memberikan ruang terhadap *fatality accident* atas kegiatan yang memiliki hubungan kerja dengan PMT, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tindakan melanggar kode etik perusahaan, perusakan terhadap lingkungan mencegah terjadinya komplain atau tuntutan masyarakat sekitar pelabuhan; 2. PT Pelindo Multi Terminal mewajibkan seluruh unit kerja dan entitas anak perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan *prudent* serta menjunjung tinggi core value AKHLAK. 1. PT Pelindo Multi Terminal will not tolerate fatal accidents resulting from activities related to the port's operations, violations of laws and regulations, including violations of the company's code of conduct, environmental damage, and the prevention of complaints or claims from the community surrounding the port; 2. PT Pelindo Multi Terminal requires all work units and subsidiaries to conduct their business by implementing good corporate governance and integrated risk management, equipping and operating risk management bodies actively and prudently, and upholding the core values of AKHLAK.
Konservatif	3. PT Pelindo Multi Terminal berupaya untuk menurunkan jumlah piutang macet; 4. PT Pelindo Multi Terminal akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam menjalankan kegiatan bisnis; 5. PT Pelindo Multi Terminal akan meningkatkan kualitas layanan jasa kepelabuhanan dan memperhatikan aspek ESG; 6. PT Pelindo Multi Terminal berupaya untuk menjaga akurasi pencatatan laporan keuangan demi melindungi nilai perusahaan dari kerugian finansial yang signifikan dan memastikan kestabilan operasional. 3. PT Pelindo Multi Terminal strives to reduce the number of bad debts; 4. PT Pelindo Multi Terminal will strive to improve cost efficiency in conducting its business activities; 5. PT Pelindo Multi Terminal will improve the quality of its port services and pay attention to ESG aspects; 6. PT Pelindo Multi Terminal strives to maintain accurate financial reporting to protect the company's value from significant financial losses and ensure operational stability.l.
Moderat	7. PT Pelindo Multi Terminal berupaya untuk mencapai target trafik dan produksi non petikemas; 8. PT Pelindo Multi Terminal berupaya mengembangkan kapabilitas dan kualitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. 7. PT Pelindo Multi Terminal strives to achieve non-container traffic and production targets; 8. PT Pelindo Multi Terminal strives to develop the capabilities and quality of its human resources to meet the Company's business needs.
Strategis	9. PT Pelindo Multi Terminal senantiasa berupaya mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal yang menjaga keekonomian harga pokok produksi; 10. PT Pelindo Multi Terminal akan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui optimalisasi aset dan meningkatkan daya saing; 11. PT Pelindo Multi Terminal menjaga kontribusi nilai Anak Perusahaan sesuai dengan target yang ditetapkan; 12. PT Pelindo Multi Terminal proaktif mengelola ketidakpastian ekonomi global dengan berinovasi dan mendiversifikasi bisnis untuk pertumbuhan jangka panjang 9. PT Pelindo Multi Terminal continuously strives to develop its business vertically and horizontally while maintaining economical production costs; 10. PT Pelindo Multi Terminal will strive to improve service quality by optimizing assets and increasing competitiveness; 11. PT Pelindo Multi Terminal maintains the value contribution of its subsidiaries in accordance with established targets; 12. PT Pelindo Multi Terminal proactively manages global economic uncertainty by innovating and diversifying its business for long-term growth.

Sikap Terhadap Risiko* Attitude Toward Risk*	Pernyataan Selera Risiko *(Risk Appetite Statement)* *Risk Appetite Statement*
*Keterangan: 1. Tidak Toleran: a. Sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasi bisnis. b. Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal. 2. Konservatif: a. Berhati-hati dalam mengambil risiko, dengan memilih beberapa risiko yang terkendali tetapi tetap memprioritaskan kestabilan usaha. b. Keputusan bisnis didasarkan pada upaya untuk melindungi nilai dari risiko besar yang tidak terduga termasuk di dalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil. 3. Moderat: a. Bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap kerugian besar. b. Keputusan bisnis mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan dan dapat menanggung beban yang sedang. 4. Strategis: a. Secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar. b. Keputusan bisnis didasarkan pada analisis risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar.	*Note: 1. Intolerant: a. Very cautious in taking risks and preferring to maintain stability and consistency in business operations. b. Business decisions are based on capital preservation. 2. Conservative: a. Cautious in taking risks, choosing a few controlled risks but still prioritizing business stability. b. Business decisions are based on efforts to hedge against large, unexpected risks, including avoiding exposure to significant market fluctuations and being able to bear small risks. 3. Moderate: a. Willing to take a certain level of risk to achieve growth and profit, but still mindful of protecting against large losses. b. Business decisions consider growth opportunities and the impact of risks simultaneously and are able to bear moderate risks. 4. Strategic: a. Actively implements strategies that involve risk management as an integral part of the business plan, taking higher risks in order to achieve greater growth and innovation. b. Business decisions are based on risk analysis and potential long-term investment returns and are able to bear large risks.

NILAI AMBANG RISIKO

Perusahaan telah menyusun Nilai Ambang Risiko yang dipandang optimal dengan rumusan sebagaimana tercantum di bawah ini:

RISK THRESHOLD VALUE

The Company has established a Risk Threshold Value that is considered optimal, as formulated below:

Ambang Risiko Risk Threshold	Penjelasan Explanation	Nilai (Dalam Miliar Rp) Value (In Billions of Rupiah)
Kapasitas Risiko Risk Capacity	Merupakan maksimum nilai risiko yang dapat ditanggung Perusahaan. Dihitung sesuai dengan formulasi arahan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja Finansial tahun 2024 (Surat Dewan Komisaris nomor PW.05.01/035/DK/PLMT/IV/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Strategi Risiko dan Profil Risiko Korporat PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2025). This is the maximum risk the Company can bear. Calculated in accordance with the Board of Commissioners' directives, taking into account 2024 financial performance (Board of Commissioners Letter No. PW.05.01/035/DK/PLMT/IV/2025 dated April 17, 2025, concerning the Board of Commissioners' Response to the Risk Strategy and Corporate Risk Profile of PT Pelindo Multi Terminal for 2025).	930
Selera Risiko Risk Appetite	Merupakan nilai batasan keseluruhan risiko yang bersedia diambil untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. The overall risk limit the Company is willing to take to achieve the desired results.	279 (30% dari Kapasitas) (30% of Capacity)
Toleransi Risiko Risk Tolerance	Merupakan nilai batasan risiko yang dapat ditoleransi dari nilai Selera Risiko yang bersedia diambil. Nilai ini lebih besar dari nilai Selera Risiko. The tolerable risk limit based on the Risk Appetite value that the Company is willing to take. This value is greater than the Risk Appetite value	326 (35% dari Kapasitas)
Batasan/ Limit Risiko Risk Limit	Merupakan nilai batasan risiko yang didistribusikan Holding kepada seluruh entitas bisnis dan menjadi acuan bagi unit pemilik risiko. Nilai Limit ini juga akan menjadi Target Eksposur Residual pada akhir tahun. Surat Nomor: PW.05.01/24/1/2/PPSR/MRTK/PLND-25 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Penyampaian Strategi Risiko dan Risiko Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The risk limit distributed by the Holding to all business entities and serves as a reference for risk-holding units. This Limit value will also serve as the Residual Exposure Target at the end of the year. Letter Number: PW.05.01/24/1/2/PPSR/MRTK/PLND-25 dated January 24, 2025 Regarding Submission of Risk Strategy and Main Risks of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	206

METRIK STRATEGI RISIKO

Metrik strategi risiko digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi yang menjadi usulan dalam rancangan RKAP. Suatu pilihan sasaran dan strategi dapat diterima (*accept*) apabila dampak risiko yang ditimbulkan tidak melebihi metriks strategi risiko atau dapat dihindari (*avoid*) apabila dampak yang ditimbulkan melebihi limit yang dapat diterima oleh Perusahaan walaupun imbal hasil (*return*) tinggi sebagaimana tercantum di bawah ini:

RISK STRATEGY METRICS

Risk strategy metrics are used as the basis for determining various target and strategy options proposed in the draft RKAP. A target and strategy option is acceptable if the resulting risk impact does not exceed the risk strategy metrics, or can be avoided if the resulting impact exceeds the Company's acceptable limit, even if the return is high, as listed below:

No	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Sikap Terhadap Risiko Attitude Toward Risk	Parameter Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan/ Limit Limit Value	Polaritas Polarity
1	3.6.10 Risiko Industri Umum - Pasar & Makroekonomi 3.6.10 General Industry Risk - Market & Macroeconomic	Moderat Moderate	Ketidaktercapaian Realisasi Dibandingkan dengan target trafik nonpetikemas. Unachieved Actual Performance Compared to Non-Container Traffic Targets.	%	5	Negatif Negative
2	3.6.16 Risiko Industri Umum - Operasional 3.6.16 General Industry Risk - Operational	Tidak toleran Intolerant	*Compliance Ratio*/Rasio Pemenuhan Kepatuhan pada rencana mitigasi risiko kecelakaan kerja. Ratio/Compliance with the Workplace Accident Risk Mitigation Plan	%	90	Positif Positive
3	3.6.9 Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis 3.6.9 General Industry Risk - Strategic Formulation	Strategis Strategic	Pencapaian Realisasi Dibandingkan dengan Target. Actual Performance Compared to Targets.	%	95	Positif Positive
4	3.6.9 Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis 3.6.9 General Industry Risk - Strategic Formulation	Strategis Strategic	Realisasi pencapaian harga Keenomian tarif/ rencana penyesuaian tarif. Realization of achieving economic tariff prices/tariff adjustment plans.	%	10	Negatif Negative
5	3.6.16 Risiko Industri Umum - Operasional 3.6.16 General Industry Risk - Operational	Strategis Strategic	Aset *Idle* (Alat). Idle assets (equipment).	%	30	Negatif Negative
6	3.6.11 Risiko Industri Umum - Keuangan 3.6.11 General Industry Risk - Financial	Konservatif Conservative	Rasio piutang macet terhadap total piutang. Ratio of bad debts to total receivables.	%	5	Negatif Negative
7	3.6.11 Risiko Industri Umum - Keuangan 3.6.11 General Industry Risk - Financial	Konservatif Conservative	BOPO.	%	84	Negatif Negative
8	3.6.15 Risiko Industri Umum - Sosial & Lingkungan 3.6.15 General Industry Risks - Social & Environmental	Tidak toleran Intolerant	Pemenuhan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Compliance with established environmental quality standards.	%	100	Positif Positive

No	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Sikap Terhadap Risiko Attitude Toward Risk	Parameter Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan/ Limit Limit Value	Polaritas Polarity
9	3.6.12 Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan 3.6.12 General Industry Risks - Reputation & Compliance	Tidak toleran Intolerant	*Compliance Ratio*/Rasio Pemenuhan Kepatuhan pada rencana mitigasi risiko *fraud* yang didapatkan dari evaluasi *internal control.* Compliance Ratio/ Compliance with the fraud risk mitigation plan as determined by the internal control evaluation.	%	95	Positif Positive
10	3.6.15 Risiko Industri Umum - Sosial & Lingkungan 3.6.15 General Industry Risks - Social & Environmental	Tidak toleran Intolerant	Rasio realisasi PROPER terhadap target. PROPER realization ratio to target.	%	90	Positif Positive
11	2.4.7 Risiko Struktur -Struktur Korporasi 2.4.7 Structure Risks - Corporate Structure	Strategis Strategic	Tingkat pencapaian target pendapatan anak perusahaan. Subsidiary revenue target achievement rate.	%	95	Positif Positive
12	1.2.4. Risiko Kebijakan -SDM 1.2.4. Policy Risks - HC	Moderat	Rasio pemenuhan persyaratan jabatan. Job requirement fulfillment ratio.	%	90	Positif Positive
13	3.6.16 Risiko Industri Umum - Operasional 3.6.16 General Industry Risks - Operational	Konservatif Conservative	Pencapaian *Recovery Time Objective* (RTO). Recovery Time Objective (RTO) achievement.	%	90	Positif Positive
14	3.6.11 Risiko Industri Umum - Keuangan 3.6.11 General Industry Risks - Financial	Konservatif Conservative	Persentase Laporan Keuangan Akurat. Percentage of Accurate Financial Reports.	%	95	Positif Positive
15	3.6.10 Risiko Industri Umum - Pasar & Makroekonomi 3.6.10 General Industry Risks - Market & Macroeconomic	Strategis Strategic	Realisasi Produksi Ekspor Impor PMT. Realized of PMT Export and Import Production	%	95	Positif Positive

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Perusahaan secara berkala melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan evaluasi atas risiko-risiko strategis yang berpotensi memengaruhi pencapaian target. Hingga akhir tahun 2025, terdapat 15 risiko korporat signifikan yang teridentifikasi melalui proses pengelolaan risiko terintegrasi, yang mencerminkan kompleksitas operasional Perusahaan di sektor jasa terminal non-petikemas. Proses ini dilakukan secara *top-down* dan *bottom-up*, melibatkan unit kerja dan manajemen di seluruh entitas dalam lingkungan Perusahaan. Adapun profil risiko korporat PMT 2025, sebagaimana terlampir:

TYPES OF RISKS AND THEIR MANAGEMENT

The Company periodically conducts the identification, measurement, and evaluation of strategic risks that have the potential to affect the achievement of its targets. As of the end of 2025, a total of 15 significant corporate risks had been identified through the integrated risk management process, reflecting the complexity of the Company's operations in the non-container terminal services sector. This process is carried out using both top-down and bottom-up approaches, involving work units and management across all entities within the Company. The 2025 PMT corporate risk profile is presented as attached.

Profil Risiko Utama Tahun 2025
Key Risk Profile for 2025

No	Sub-Kategori Risiko/Peristiwa Risiko Risk Sub-Category/Risk Event	Level Risiko Risk Level	
		Awal Tahun Beginning of Year	Target Akhir Tahun End of Year Target
1	**Pergerakan Komoditas** Penurunan Produksi Non Petikemas **Commodity Movement** Decrease in Non-Containerized Production	High 24	Moderate 13
2	**Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OP3)** Kecelakaan Kerja pada Pekerja Perusahaan **Occupational Safety and Health (OP3)** Workplace Accidents Among Company Employees	Moderate to High 19	Low to Moderate 6
3	**Pengembangan Bisnis Baru** Kegagalan Meraih Market Baru **New Business Development** Failure to Reach New Markets	High 24	Moderate to High 18
4	**Penetapan Tarif** Kegagalan Penyesuaian Tarif **Tariff Determination** Failure to Adjust Tariffs	High 24	Moderate to High 18
5	**Sales and Marketing (OP4)** Kegagalan Komersialisasi Aset Idle **Sales and Marketing (OP4)** Failure to Commercialize Idle Assets	Moderate to High 19	Low to Moderate 6
6	**Cashflow** Piutang macet dan piutang bermasalah **Cash Flow** Bad and non-performing receivables	Moderate to High 19	Low to Moderate 8
7	**Peningkatan Biaya (KE6)** Inefisiensi Biaya Cost Increases (KE6) Cost Inefficiencies	Moderate to High 19	Low to Moderate 6
8	**Pencemaran Lingkungan** Pencemaran Lingkungan **Environmental Pollution** Environmental Pollution	Moderate to High 18	Low to Moderate 6
9	**Pelanggaran Kode Etik (Fraud, Penyuapan, dll)** Pelanggaran Kode Etik (Fraud/ Penyuapan/ Gratifikasi/ lainnya) **Violations of the Code of Ethics (Fraud, Bribery, etc.)** Violations of the Code of Ethics (Fraud/Bribery/Gratuities/ others	Moderate to High 18	Moderate 15
10	**Environtmental, Social, Government** Tidak terpenuhinya ketentuan mandatory untuk implementasi Enviroment Social Government **Environmental, Social, and Governance** Failure to comply with mandatory requirements for the implementation of Environmental, Social, and Governance	Moderate 14	Low to Moderate 6
11	**Pengelolaan Anak Perusahaan & Afiliasi** Kerugian Signifikan Anak Perusahaan **Management of Subsidiaries & Affiliates** Significant Losses in Subsidiaries	Moderate to High 19	Low to Moderate 8
12	**Ketersediaan Tenaga Terampil** Ketidaksesuaian Kualifikasi Pekerja **Availability of Skilled Workers** Worker Qualification Mismatch	Moderate 14	Low to Moderate 6
13	**Keamanan Jaringan** Gangguan layanan **Network Security** Service Disruptions	Moderate 14	Low to Moderate 8

Profil Risiko Utama Tahun 2025
Key Risk Profile for 2025

No	Sub-Kategori Risiko/Peristiwa Risiko Risk Sub-Category/Risk Event	Level Risiko Risk Level	
		Awal Tahun Beginning of Year	Target Akhir Tahun End of Year Target
14	**Integritas Proses Pelaporan Keuangan** Ketidakakuratan pencatatan laporan keuangan **Integrity of the Financial Reporting Process** Financial Reporting Inaccuracies	High 24	Low to Moderate 8
15	**Pergerakan Komoditas** Ketidakpastian Ekonomi Global **Commodity Movements** Global Economic Uncertainty	Moderate to High 19	Low to Moderate 6

Berdasarkan setiap risiko yang teridentifikasi, Perusahaan menerapkan pendekatan pengelolaan risiko yang meliputi:
1. Identifikasi Risiko secara menyeluruh berdasarkan proses bisnis dan inisiatif strategis.
2. Pengukuran Risiko menggunakan matriks probabilitas dan dampak untuk menentukan prioritas penanganan.
3. Evaluasi Risiko, untuk menilai efektivitas pengendalian yang telah ada dan menentukan kebutuhan perbaikan.
4. Penanganan Risiko, melalui penetapan rencana mitigasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM).
5. Pemantauan Risiko, dengan menggunakan indikator risiko utama (*Key Risk Indicator*/KRI), *loss event management*, dan pelaporan berkala melalui aplikasi PRiMa.

REALISASI RENCANA KERJA MANAJEMEN

Sepanjang tahun 2025, Divisi Manajemen Risiko menjalankan berbagai program dan Rencana Kerja Manajemen (RKM) sebagaimana berikut ini:

Based on each identified risk, the Company implements a risk management approach that includes:
1. Comprehensive risk identification based on business processes and strategic initiatives.
2. Risk measurement using a probability and impact matrix to determine treatment priorities.
3. Risk evaluation, to assess the effectiveness of existing controls and determine the need for improvement.
4. Risk management, through establishing a mitigation plan outlined in the Management Work Plan (RKM).
5. Risk monitoring, using key risk indicators (KRI), loss event management, and periodic reporting through the PRiMa application.

REALIZATION OF THE MANAGEMENT WORK PLAN

Throughout 2025, the Risk Management Division implemented various programs and the Management Work Plan (RKM) as follows:

Rencana Pengelolaan Risiko dan Realisasinya
Risk Management Plan and Realization

No	Judul RKM RKM Title	*Deliverable*	Target	Realisasi Realization
1	Evaluasi RKM yang berdampak pada pencapaian target finansial RKAP 2025 Evaluation of the RKM that impacts the achievement of the 2025 RKAP financial targets	*Monitoring* dan evaluasi realisasi RKM. Monitoring and evaluation of RKM realization.	Desember 2025 December 2025	Telah dilaksanakan pembahasan realisasi RKM s.d. triwulan IV tahun 2025 terkait RKM *Shadow*. Discussions regarding the implementation of the RKM (Regional Work Plan) until the fourth quarter of 2025 regarding the Shadow RKM have been held.
2	Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko sesuai PER-2 KBUMN Fulfillment of Risk Management Organ Qualifications in accordance with PER-2 KBUMN	Laporan *Monitoring* & Evaluasi. Monitoring and Evaluation Report.	Desember 2025 December 2025	Telah dilaksanakan program Pelatihan *Risk Management* (PRISMA) dan implementasi *Quick Win* Program PRISMA. The Risk Management Training (PRISMA) program and PRISMA Quick Win Program have been carried out.
3	Penguatan Fungsi dan Implementasi Manajemen Risiko Strengthening Risk Management Functions and Implementation	1. Struktur organisasi manajemen risiko yang direvisi. 2. Program pengembangan kompetensi Organ Pengelola Risiko. 1. Revised risk management organizational structure. 2. Competency development program for the Risk Management Organ.	Desember 2025 December 2025	Telah dilakukan riviu struktur organisasi Manajemen Risiko PMT. PMT Risk Management organizational structure has been reviewed.

Rencana Pengelolaan Risiko dan Realisasinya
Risk Management Plan and Realization

No	Judul RKM RKM Title	*Deliverable*	Target	Realisasi Realization
4	Peningkatan pengetahuan Kajian risiko dalam pembuatan RCSA yang melibatkan pemilik Risiko Increasing knowledge of risk assessments in the preparation of RCSAs involving risk owners	Kajian Risiko. Risk Assessment.	Desember 2025 December 2025	Telah dilakukan pendampingan penyusunan profil risiko SPO pada Divisi. Telah dilakukan *monitoring* pengisian realisasi mitigasi profil risiko *Branch*, Korporat, dan Divisi pada aplikasi PriMa. Assistance has been provided to the Division in preparing SOP risk profiles. Monitoring has been conducted on the implementation of mitigation for Branch, Corporate, and Division risk profiles in the PriMa application.
5	Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025 Risk Maturity Index (RMI) Assessment for 2025	Laporan Penilaian RMI. RMI Assessment Report.	Desember 2025 December 2025	Telah dilaksanakan penilaian *Risk Maturity Index* di PMT Group. The Risk Maturity Index assessment has been conducted at PMT Group.
6	Pelaksanaan *Monitoring* Implementasi Manajemen Risiko The Risk Maturity Index assessment has been conducted at PMT Group.	Dokumentasi *feedback.* *Feedback documentation.*	Desember 2025 December 2025	Telah dilakukan pelaksanaan *monitoring* profil risiko utama Korporat, *Branch,* dan Anak Perusahaan pada tahun 2025. Monitoring of the main risk profiles of the Corporation, Branches, and Subsidiaries has been carried out in 2025.
7	Perencanaan & Pelaporan Manajemen Risiko Risk Management Planning & Reporting	Laporan Manajemen Triwulanan. Quarterly Management Report.	Desember 2025 December 2025	Telah disusun laporan Manajemen Risiko Trw I-IV 2025 dan disampaikan ke Holding. The Risk Management Report for Quarters I-IV 2025 has been prepared and submitted to the Holding.
8	Pelaksanaan *Internal Control Testing* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Internal Control Testing at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Laporan *internal control testing.* *Internal control testing report.*	Desember 2025 December 2025	Telah dilaksanakan *internal control testing* dan disampaikan pada bahan LMPT triwulan IV. Internal control testing has been conducted and presented in the fourth quarter LMPT materials.
9	Peningkatan budaya risiko Improving Risk Culture	Laporan Program Budaya Risiko. Risk Culture Program Report.	Desember 2025 December 2025	Telah dilaksanakan program peningkatan budaya risiko melalui *flyer* dan Pelatihan *Risk Management.* The risk culture improvement program has been implemented through flyers and Risk Management Training.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi terhadap sistem manajemen risiko dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kemampuan sistem manajemen risiko dalam mengantisipasi potensi risiko, menjaga stabilitas operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur. Penilaian juga dilakukan untuk melihat kesesuaian implementasi manajemen risiko dengan kebutuhan bisnis dan dinamika operasional Perusahaan.

Adapun evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Internal Audit oleh Divisi Satuan Pengawas Internal.
2. Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Maturity Index*) oleh BPKP.
3. Tanggapan oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) Dewan Komisaris pada rapat terkait Implementasi Manajemen Risiko secara berkala. Topik utama yang dibahas meliputi:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management system is evaluated to provide reasonable assurance to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the system's ability to anticipate potential risks, maintain operational stability, and support more informed decision-making. The assessment is also carried out to determine whether the implementation of risk management is aligned with the Company's business needs and operational dynamics.

The evaluation of the effectiveness of Risk Management System in 2025 was conducted through the following mechanisms:

1. Internal Audit by the Internal Audit Unit.
2. Risk Maturity Index (RMI) assessment conducted by BPKP.
3. Reviews by the Risk Monitoring Committee (KPR) of the Board of Commissioners during periodic meetings on the implementation of Risk Management. The main topics discussed included:

a. Profil Risiko Korporat: Pemutakhiran dan analisis risiko-risiko signifikan setiap triwulan.
b. Efektivitas Implementasi: Peninjauan atas kemajuan dan maturitas penerapan Manajemen Risiko.
c. Isu Strategis dan Eskalasi: Pembahasan isu-isu insidental yang memerlukan arahan dari Komite.

TINGKAT MATURITAS RISIKO

Pelaksanaan Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal dilakukan oleh Tim Penilai Independen pada periode 19 Mei 2025 sampai dengan 18 Juni 2025 dengan cakupan penilaian atas implementasi manajemen risiko tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Perusahaan memperoleh skor keseluruhan sebesar 2,7 dengan skor Penilaian RMI berkisar antara 2,5 hingga 2,8 dari skala 5 yang berada pada fase berkembang (+). BUMN pada fase ini memiliki praktik Manajemen Risiko melampaui fase berkembang dan sedang dalam transisi menuju fase praktik yang baik.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan sistem manajemen risiko Perusahaan telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung pengelolaan bisnis Perusahaan secara lebih terukur. Penilaian tersebut tercermin dari capaian skor *Risk Maturity Index* (RMI) sebesar 2,7 serta penyelesaian tindak lanjut atas seluruh temuan audit internal yang berhasil dilaksanakan dengan baik.

Penguatan manajemen risiko juga didukung oleh kesiapan infrastruktur yang semakin solid, mulai dari struktur organisasi, kerangka kerja, kebijakan, hingga pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi PriMa sebagai platform pengelolaan risiko terintegrasi. Dukungan tersebut memungkinkan proses identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko dilakukan secara lebih konsisten di seluruh lini Perusahaan.

Di sisi lain, budaya sadar risiko terus berkembang dan mulai menjadi bagian dari pola kerja organisasi. Integrasi antara manajemen risiko dan sistem manajemen kinerja menunjukkan bahwa pengelolaan risiko tidak lagi ditempatkan sebagai fungsi pengawasan semata, melainkan telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan strategis dan pencapaian target Perusahaan.

Ke depan, Perusahaan akan terus memperkuat penerapan manajemen risiko melalui penyempurnaan sistem, peningkatan kapabilitas organisasi, serta pengembangan budaya risiko yang adaptif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Perusahaan dalam menjaga ketahanan usaha dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

a. Corporate Risk Profile: Updating and analyzing significant risks on a quarterly basis.
b. Implementation Effectiveness: Reviewing the progress and maturity of Risk Management implementation.
c. Strategic Issues and Escalation: Discussing incidental issues requiring direction from the Committee.

RISK MATURITY LEVEL

The Risk Maturity Index (RMI) Assessment within PT Pelindo Multi Terminal was conducted by an Independent Assessment Team from May 19, 2025 to June 18, 2025, covering the assessment of the implementation of risk management for 2024. Based on the assessment results, the Company obtained an overall score of 2.7, with RMI assessment scores ranging from 2.5 to 2.8 on a scale of 5, placing it in the Developing (+) phase. State-Owned Enterprises (SOEs) in this phase have Risk Management practices that exceed the Developing phase and are in transition toward the Good Practice phase.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Based on the evaluations conducted throughout 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners concluded that the Company's risk management system has been implemented effectively and has adequately supported more structured business management. This assessment is reflected in the achievement of a Risk Maturity Index (RMI) score of 2.7, as well as the successful completion of follow-up actions on all internal audit findings.

The strengthening of risk management has also been supported by increasingly robust infrastructure, including the organizational structure, framework, policies, and the utilization of information technology through the PRiMa application as an integrated risk management platform. This support enables risk identification, monitoring, and mitigation processes to be carried out more consistently across all areas of the Company.

At the same time, a risk-aware culture continues to develop and has become an integral part of the Company's organizational practices. The integration of risk management with the performance management system demonstrates that risk management is no longer regarded merely as an oversight function but has become an essential component of strategic decision-making and the achievement of the Company's objectives.

Going forward, the Company will continue to strengthen its risk management practices through system enhancements, organizational capability development, and the cultivation of an adaptive risk culture. These initiatives form part of the Company's ongoing commitment to maintaining business resilience and creating long-term value for all stakeholders.

Perkara Hukum
Legal Proceedings

PERMASALAHAN HUKUM

PT Pelindo Multi Terminal menerima 1 (satu) Gugatan sebagai pihak Turut Tergugat II yang terdaftar dengan nomor register Perkara Nomor 891/Pdt.G/2025/PN.Mdn. Adapun keterangan atas gugatan tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Bonar Wilmar Thyson Sinaga, melalui kuasanya Firma Lex Priority Law Firm
2. Para Pihak Tergugat, sebagai berikut:
   a. Tergugat I : Nirwanto
   b. Tergugat II : Aji Wirayuga
   c. Tergugat III : PT Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Gatot Subroto
   d. Turut Tergugat I : Gordon E. Harianja
   e. Turut Tergugat II : PT Pelindo Multi Terminal
   f. Turut Tergugat III : Susanto
3. Petitum Penggugat dalam Gugatannya:
   a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
   b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal Pembatalan dan Penutupan Cabang serta Pencabutan Kuasa PT Multi Karya Bisnis Perkara;
   c. Menyatakan Tergugat III telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait penutupan rekening 0404-01-003162-56-2 atas nama PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
   d. Menyatakan dan memerintahkan tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti rugi materiil kepada Penggugat;
   e. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat I dan tergugat II untuk membayar Ganti rugi immaterial kepada Penggugat;
   f. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT Multikarya Bisnis Perkasa yang dibuat di dalam Akta Notaris Nomor 33 tertanggal 15 Juli 2024 dihadapan Notaris Gordon E. Harianja., S.H;
   g. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Notaris Nomor 22 tertanggal 23 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Gordon E. Harianja., S.H tentang Pembatalan dan Penutupan Cabang serta pencabutan Kuasa;
   h. Menghukum Tergugat III untuk membuka kembali rekening bank BRI dengan Nomor rekening 0404-01-003162-56-2 atas nama PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
   i. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk membayarkan sisa pembayaran Termin Keempat dan Termin Kelima kepada Penggugat melalui rekening tersebut maupun rekening yang baru;
   j. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bilamana Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

LEGAL DISPUTE

PT Pelindo Multi Terminal is involved in one (1) lawsuit as Co-Defendant II, registered under Case Number 891/Pdt.G/2025/PN.Mdn. The details of the lawsuit are as follows:

1. Plaintiff
   Bonar Wilmar Thyson Sinaga, represented by his legal counsel, Lex Priority Law Firm.
2. Defendants
   a. Defendant I: Nirwanto
   b. Defendant II: Aji Wirayuga
   c. Defendant III: PT Bank Rakyat Indonesia, Gatot Subroto Branch Office
   d. Co-Defendant I: Gordon E. Harianja
   e. Co-Defendant II: PT Pelindo Multi Terminal
   f. Co-Defendant III: Susanto
3. Plaintiff's Claims (Petitum)
   a. To accept and grant the Plaintiff's claims in their entirety;
   b. To declare that Defendant I and Defendant II committed an unlawful act in relation to the cancellation and closure of the branch office and the revocation of the power of attorney of PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
   c. To declare that Defendant III committed an unlawful act in relation to the closure of bank account number 0404-01-003162-56-2 in the name of PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
   d. To declare and order Defendant I and Defendant II to pay material damages to the Plaintiff;
   e. To declare and order Defendant I and Defendant II to pay immaterial damages to the Plaintiff;
   f. To declare valid and legally binding the Deed of Branch Establishment and Power of Attorney of PT Multi Karya Bisnis Perkasa as set forth in Notarial Deed Number 33 dated 15 July 2024 before Notary Gordon E. Harianja, S.H.;
   g. To declare invalid and without legal effect Notarial Deed Number 22 dated 23 May 2025 executed before Notary Gordon E. Harianja, S.H. concerning the cancellation and closure of the branch office and the revocation of the power of attorney;
   h. To order Defendant III to reopen BRI bank account number 0404-01-003162-56-2 in the name of PT Multi Karya Bisnis Perkasa;
   i. To order Co-Defendant III to pay the remaining Fourth and Fifth Installment payments to the Plaintiff through the said account or a new account;
   j. To order Defendant I and Defendant II to pay a coercive fine (dwangsom) of Rp10,000,000 (ten million Rupiah) per day in the event that the Defendants fail to comply with the judgment;

k. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*Verzet*), banding maupun kasasi;
l. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
m. Apabila ketua Pengadilan Negeri Medan C.q Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Posisi saat ini (per Mei 2026): Agenda Penyampaian Konklusi pada tanggal 19 Mei 2026.

5. Nilai kemungkinan klaim: Bahwa PT Pelindo Multi Terminal dimintakan untuk membayarkan Termin IV dan Termin V atas nilai Pekerjaan Connecting Akses Jalan di IKD Belawan, dengan besaran sebagai berikut:
   a. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp 770.487.746,21;
   b. Pembayaran Tahap V sebesar Rp 154.097.549,24.
6. Status kepada Perusahaan: Bahwa Penggugat sebelumnya DIrektur Cabang pada PT Multikarya Bisnis Perkasa, yang mana PT Multikarya Bisnis Perkasa adalah Pelaksana Pekerjaan pada Pekerjaan Pekerjaan Connecting Akses Jalan di IKD Belawan sebagaimana Perjanjian Nomor: PD.0 5.01/5/8/4/PRFL/FSPB/PLMT-24 tanggal 05 Agustus 2024 dan surat perjanjian tambahan (addendum) Nomor: PD.05.01/25/11/2/ PRFL/FSPB/PLMT-24 tanggal 25 November 2024, dengan nilai pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 3.081.950.984,85 (tiga milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) tidak termasuk PPN.

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, PMT telah melakukan pembayaran Termin 1, 2 dan 3 kepada PT Multikarya Bisnis Perkasa sebesar Rp 2.157.365.689,39 (dua milliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) belum termasuk PPN. Bahwa Pada dasarnya PMT telah mencadangkan anggaran untuk pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan *Connecting* Akses Jalan di IKD Belawan tersebut. Namun untuk pembayarannya kepada pihak yang berhak, PMT masih menunggu penyelesaian perselisihan dimaksud.

k. To declare that the judgment is provisionally enforceable (uitvoerbaar bij voorraad) notwithstanding any opposition (verzet), appeal, or cassation;
l. To order the Defendants to bear all costs incurred in this case; or
m. Should the Chief Judge of the Medan District Court c.q. the Panel of Judges hold a different opinion, to render a judgment that is fair and equitable (ex aequo et bono).

4. Current Status (as of May 2026)
   The case is at the conclusion submission stage, scheduled for 19 May 2026.
5. Potential Claim Amount
   PT Pelindo Multi Terminal has been requested to make the Fourth and Fifth Installment payments for the Connecting Access Road Project at IKD Belawan, consisting of:
   a. Fourth Installment Payment: Rp770,487,746.21;
   b. Fifth Installment Payment: Rp154,097,549.24.
6. Status with Respect to the Company
   The Plaintiff was previously the Branch Director of PT Multi Karya Bisnis Perkasa, which served as the contractor for the Connecting Access Road Project at IKD Belawan under Agreement Number PD.05.01/5/8/4/PRFL/FSPB/PLMT-24 dated 5 August 2024 and the Addendum Agreement Number PD.05.01/25/11/2/PRFL/FSPB/PLMT-24 dated 25 November 2024. The contract value amounted to Rp3,081,950,984.85 (three billion eighty-one million nine hundred fifty thousand nine hundred eighty-four Rupiah and eighty-five cents), excluding VAT.

In relation to the implementation of the project, PMT has made the First, Second, and Third Installment payments to PT Multi Karya Bisnis Perkasa totaling Rp2,157,365,689.39 (two billion one hundred fifty-seven million three hundred sixty-five thousand six hundred eighty-nine Rupiah and thirty-nine cents), excluding VAT. In principle, PMT has reserved the budget for the payment of the Connecting Access Road Project at IKD Belawan. However, payment to the entitled party will only be made after the resolution of the ongoing dispute.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2025 Perusahaan tidak mendapatkan adanya sanksi administrasi dari otoritas terkait.

KEPATUHAN ATAS KEWAJIBAN PENGUMUMAN *MATERIAL EVENT*

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menerima sanksi dari regulator terkait keterlambatan maupun kelalaian dalam penyampaian informasi atau pengumuman atas peristiwa penting. Capaian tersebut selaras dengan komitmen Perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dan tata kelola informasi yang berlaku di lingkungan BUMN dan Pelindo Group.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELEVANT AUTHORITIES

Throughout 2025, the Company did not receive any administrative sanctions from the relevant authorities.

COMPLIANCE WITH MATERIAL EVENT DISCLOSURE OBLIGATIONS

Throughout 2025, the Company did not receive any sanctions from regulators related to delays or failures in the submission of information or disclosures concerning material events. This achievement is in line with the Company's commitment to maintaining compliance with the applicable reporting requirements and information governance practices within SOEs and Pelindo Group.

Meskipun berstatus sebagai perusahaan non-terbuka dan tidak memiliki kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana perusahaan publik di pasar modal, Perusahaan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelaporan korporasi. Penyampaian informasi kepada pemegang saham, instansi pembina BUMN, maupun otoritas terkait dilakukan secara tepat waktu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Selain itu, berbagai informasi strategis yang berpotensi memengaruhi operasional, aspek hukum, kepatuhan, maupun keberlangsungan usaha juga dikomunikasikan melalui sistem pelaporan internal Pelindo Grup serta koordinasi formal dengan regulator sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPATUHAN TERHADAP ATURAN DAN PERATURAN PENCATATAN

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menemukan adanya indikasi maupun bukti pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Seluruh proses pencatatan, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional, maupun administrasi, telah dilaksanakan sesuai pedoman internal Pelindo Grup serta regulasi yang relevan, termasuk ketentuan dari Kementerian BUMN dan instansi pembina terkait.

Perusahaan juga terus menjaga kualitas tata kelola data dan pelaporan melalui penerapan sistem pencatatan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Dukungan sistem informasi yang terintegrasi turut membantu memastikan ketepatan pelaporan serta kemudahan proses *monitoring* dan pengawasan.

Selain itu, hasil pengawasan internal maupun pemeriksaan auditor eksternal selama periode pelaporan tidak menunjukkan adanya temuan material yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pencatatan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan konsistensi Perusahaan dalam menjaga akuntabilitas proses bisnis serta memperkuat penerapan prinsip transparansi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh lini organisasi.

Although has the status as non-listed entity and is not subject to disclosure obligations applicable to publicly listed companies in the capital market, the Company continues to uphold the principles of transparency and accountability in all corporate reporting processes. Information is submitted to shareholders, the Ministry of SOE as the supervising authority, and the relevant authorities in a timely manner through the established mechanisms.

In addition, various strategic information that may affect the Company's operations, legal matters, compliance, or business continuity is communicated through the Pelindo Group's internal reporting system and formal coordination with regulators in accordance with the prevailing laws and regulations.

COMPLIANCE WITH RECORD-KEEPING RULES AND REGULATIONS

Throughout 2025, the Company did not identify any indications or evidence of non-compliance with the applicable record-keeping and reporting requirements. All record-keeping processes, whether related to financial, operational, or administrative matters, were carried out in accordance with the Pelindo Group's internal guidelines and the relevant regulations, including those issued by the Ministry of State-Owned Enterprises and the relevant supervising authorities.

The Company also continues to maintain the quality of data governance and reporting through the implementation of orderly, well-documented, and traceable record-keeping systems. The support of integrated information systems further helps ensure the accuracy of reporting and facilitates monitoring and oversight processes.

Furthermore, the results of internal oversight and external auditor examinations during the reporting period did not reveal any material findings indicating non-compliance with the applicable record-keeping requirements. This reflects the Company's consistent commitment to maintaining accountability in its business processes and strengthening the implementation of the principles of transparency and Good Corporate Governance across all organizational functions.

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Perusahaan secara berkelanjutan memperkuat pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari transformasi bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan. Pengembangan teknologi diarahkan untuk mendukung efektivitas operasional dan peningkatan kinerja, seraya menciptakan proses kerja yang lebih transparan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Pemanfaatan TI ini turut mendukung penerapan prinsip-prinsip governansi korporat, sehingga tercipta tata kelola yang semakin akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap dinamika industri.

LANDASAN KEBIJAKAN DAN KERANGKA TATA KELOLA TI

Proses governansi atas risiko TI dijalankan secara terintegrasi melalui tiga landasan kebijakan Direksi yang saling melengkapi, yaitu Peraturan Direksi Nomor PER.0004/HK.01.06/PLMT-2021 tentang Pedoman Tata Kelola Bidang Teknologi Informasi (mencakup Pedoman Information Technology Governance dan Pedoman Tata Kelola Data), serta Peraturan Direksi Nomor PU.05.02/7/11/2/RINO/DIRU/PLMT-23 tanggal 7 November 2023 tentang Pedoman Business Continuity Management (BCM) yang mengacu pada standar internasional best practice ISO 22301:2019. Ketiga kebijakan ini memastikan risiko gangguan sistem (disruption), keamanan siber (cyber security), dan pemulihan bencana (disaster recovery) dikelola melalui satu siklus tata kelola yang utuh dan berlapis: identifikasi, analisis, mitigasi, pengujian, eskalasi, hingga pelaporan kepada Direksi.

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Perusahaan dilakukan secara terarah dan selaras dengan agenda transformasi bisnis jangka panjang, yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2021–2025 serta *roadmap* pengembangan TI Pelindo sebagai *Holding* BUMN Kepelabuhanan untuk periode 2022–2026.

Transformasi digital tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tema pengembangan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan implementasi berbagai inisiatif TI di lingkungan Perusahaan. Adapun gambaran transformasi digital dimaksud adalah sebagai berikut:

The Company continuously strengthens the use of Information Technology (IT) as part of its business transformation and strengthening corporate governance. Technology development is aimed at supporting operational effectiveness and improving performance, while creating more transparent, integrated, and responsive work processes to business needs. This IT utilization also supports the implementation of corporate governance principles, resulting in increasingly accountable, efficient, and adaptive governance that adapts to industry dynamics.

IT POLICY FOUNDATIONS AND GOVERNANCE FRAMEWORK

The IT risk governance process is carried out in an integrated manner through three complementary Board of Directors policy foundations, namely Board of Directors Regulation No. PER.0004/HK.01.06/PLMT-2021 concerning Guidelines for Information Technology Governance (covering the Information Technology Governance Guidelines and Data Governance Guidelines), as well as Board of Directors Regulation No. PU. 05.02/7/11/2/RINO/DIRU/PLMT-23 dated November 7, 2023, on Business Continuity Management (BCM) Guidelines, which reference the international best practice standard ISO 22301:2019. These three policies ensure that risks related to system disruption, cybersecurity, and disaster recovery are managed through a comprehensive, multi-layered governance cycle: identification, analysis, mitigation, testing, escalation, and reporting to the Board of Directors.

CORPORATE INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

Information Technology (IT) development within the Company is carried out in a targeted manner and aligned with the long-term business transformation agenda, which refers to the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the 2021–2025 period and Pelindo's IT development roadmap as a State-Owned Port Holding Company for the 2022–2026 period.

This digital transformation is then translated into five-year development themes that serve as guidelines for the implementation of various IT initiatives within the Company. The following is an overview of the digital transformation:

2022 *Business Transition and Restructurization*	2023 *Digital Transformation Foundation*	2024 *System Enhancement*	2025 *Business Optimization*	2026 *Advancing Business Sustainability*
ITMP PMT diawali dengan restrukturisasi organisasi Pelindo Group di mana terjadi merger, serah terima operasi bisnis yang pada akhirnya mendorong seluruh entitas di Pelindo Group untuk membuat pedoman dan perencanaan pengembangan TI (*digital transformation*) ITMP PMT begins with the implementation of Pelindo Group's organizational restructuring where there is a merger, handover of asset operations and handover of business operations which ultimately encourages all entities in Pelindo Group to make IT development guidelines & planning (digital transformation)	Pada tahun 2023, tema ITMP berfokus pada penguatan fondasi organisasi perusahaan serta pengingkatan budaya digital sehingga perusahaan dapat lebih siap mendorong transformasi di lingkungan PMT. In 2023, ITMP theme focuses on strengthening the Company's organizational foundation and improving digital culture so that the Company can be better prepared to drive transformation in PMT environment.	Memasuki tahun 2024 terjadi peningkatan kolaborasi dan strategi bisnis di lingkungan PMT serta Pelindo Group yang didukung oleh penguatan sistem dan teknologi yang digunakan. Penerapan sistem dan teknologi yang semakin modern akan membantu organisasi perusahaan agar semakin terbiasa dengan budaya digital. Entering 2024 there is an increase in collaboration and business strategies within PMT and Pelindo Group supported by strengthening the systems and technology used. The application of increasingly modern systems and technology will help Company organizations to become more accustomed to digital culture.	**Tema ITMP di tahun ini berfokus pada upaya optimalisasi nilai atau manfaat yang didapat melalui investasi terhadap inisiatif ITMP.** This year's ITMP theme focuses on efforts to optimize the value or benefits gained through investment in each ITMP initiative.	Sedangkan di tahun terakhir ini, tema ITMP berfokus untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis perusahaan melalui *continuous improvement* atas masing-masing inisiatif, baik dari segi bisnis, infrastruktur TI, keamanan TI, maupun organisasi TI. While in this final year, the ITMP theme focuses on improving the Company's business sustainability through continuous improvement of each initiative, both in terms of business, IT infrastructure, IT stability and IT organization.

REALISASI PROGRAM KERJA TI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, pengembangan dan implementasi teknologi informasi difokuskan untuk pengamanan pendapatan dalam penyesuaian sistem-sistem pada *Branch* yang dilakukan Transformasi Digitalisasi, Serah Operasi serta *Switching Invoice* PTP. Adapun realisasi pengembangan dan implementasi teknologi informasi hingga akhir tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Transformasi dan Digitalisasi: *Branch* Jamrud, Tj Wangi, Tj Intan, Bagendang, Bumiharjo, Makassar, Balikpapan, Dumai, Belawan, Trisakti, Lembar, Gilimas, Tj Emas, Gresik, Pare-pare, Tj. Balai Karimun;
2. *Switching Invoice*: *Branch* Tj. Pandan, Teluk Bayur, Tj. Priok, Jambi dan Pangkal Balam, *Branch* Panjang, Palembang, Kijing dan Banten;
3. Transformasi dan Digitalisasi Terminal di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Implementasi Aplikasi

1. Aplikasi *Back End*:
   a. Single ERP SAP telah diimplementasikan pada tanggal 1 Oktober 2024 di PT Pelindo Multi Terminal sebagai dukungan untuk pencatatan keuangan yang lebih efisien dan terintegrasi, guna meningkatkan transparansi, akurasi, serta kecepatan dalam proses pengelolaan data keuangan dan operasional. Implementasi ini juga bertujuan untuk mendukung transformasi digital perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang;

REALIZATION OF THE 2025 INFORMATION TECHNOLOGY WORK PROGRAM

Throughout 2025, the development and implementation of information technology were focused on revenue assurance through system adjustments at branches undergoing Digital Transformation, Operational Handover, and PTP Invoice Switching. As of the end of 2025, the realization of information technology development and implementation included the following:

1. Transformation and Digitalization: Jamrud, Tanjung Wangi, Tanjung Intan, Bagendang, Bumiharjo, Makassar, Balikpapan, Dumai, Belawan, Trisakti, Lembar, Gilimas, Tanjung Emas, Gresik, Parepare, and Tanjung Balai Karimun Branches;
2. Invoice Switching: Tanjung Pandan, Teluk Bayur, Tanjung Priok, Jambi, Pangkal Balam, Panjang, Palembang, Kijing, and Banten Branches;
3. Transformation and Digitalization of Terminals within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Application Implementation

1. Back-End Applications:
   a. a. Single ERP SAP was implemented on 1 October 2024 at PT Pelindo Multi Terminal to support more efficient and integrated financial recording, thereby enhancing transparency, accuracy, and timeliness in the management of financial and operational data. This implementation also supports the Company's digital transformation in achieving its long-term business objectives;

b. Implementasi Aplikasi Surat Menyurat (PEO) sebagai aplikasi surat menyurat, pembuatan Berita Acara pada PT Pelindo Multi Terminal;
c. Implementasi aplikasi Absensi (My Intan) sebagai aplikasi absensi yang akan digunakan di wilayah kerja PT Pelindo Multi Terminal;
d. Implementasi aplikasi perjalanan dinas (My Travel) sebagai aplikasi perjalanan dinas yang akan digunakan di wilayah kerja PT Pelindo Multi Terminal;
e. Implementasi aplikasi kantin (My Canteen) sebagai aplikasi untuk mempermudah proses permakanan pekerja dengan pengelolaan *voucher* saldo dan akses untuk pembelian berbagai macam makanan dan minuman yang akan digunakan di wilayah kerja PT Pelindo Multi Terminal;
f. Implementasi Modul *Material Management* (MM) Centra sebagai aplikasi pengadaan di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
g. Implementasi Aplikasi Prima (Pelindo Risk Management) sebagai system yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan risiko operasional perusahaan;
h. Implementasi Aplikasi *Single Procurement System* (*Secure*) sebagai *system* yang digunakan untuk pelaksanaan lelang/tender secara *online*;
i. Implementasi Aplikasi Portaverse sebagai system yang digunakan untuk mengelola hal-hal terkait dengan *performance management system, training management system, learning management system*, dan *knowledge management system*;
j. Implementasi Aplikasi Cistle sebagai sebagai sistem yang digunakan untuk melakukan konsolidasi transaksi *intercompany* di PMT Group.

2. Aplikasi *Front End*:
   a. Pembuatan *Corporate Website* sebagai wadah informasi kepada pengguna jasa PT Pelindo Multi Terminal untuk mendapatkan informasi tentang PT Pelindo Multi Terminal;
   b. Implementasi Aplikasi GenC dan PTOS M sebagai aplikasi *Front End* pada Cabang PT Pelindo Multi Terminal yang terintegrasi dengan SAP dan aplikasi lainnya;
   c. Implementasi Aplikasi Spinner untuk mendukung adanya layanan baru petikemas;
   d. Penerapan Sistem *Gate* Timbangan;
   e. Implementasi Aplikasi PTOS PK (petikemas) sebagai aplikasi *Front End* pada Cabang PT Pelindo Multi Terminal yang terintegrasi dengan SAP dan aplikasi lainnya.

Penerapan Sistem Gate Timbangan

1. Pembuatan *Dashboard* Fasilitas sebagai *dashboard* manajemen untuk Bidang Fasilitas;
2. Pemeliharaan *Corporate Email* sebagai *email* PT Pelindo Multi Terminal;
3. *Office Supply* terkait Perangkat Teknologi Informasi untuk perangkat kerja untuk pegawai yang ditempatkan di PMT dalam mendukung pekerjaannya.

b. Implementation of the Correspondence Application (PEO) as the official correspondence and Minutes of Meeting application at PT Pelindo Multi Terminal;
c. Implementation of the Attendance Application (My Intan) as the attendance system to be used across PT Pelindo Multi Terminal's operational areas;
d. Implementation of the Business Travel Application (My Travel) as the official business travel application to be used across PT Pelindo Multi Terminal's operational areas;
e. Implementation of the Canteen Application (My Canteen) to facilitate employee meal services through voucher balance management and access for purchasing various food and beverages across PT Pelindo Multi Terminal's operational areas;
f. Implementation of the Material Management (MM) Centra Module as the procurement application within PT Pelindo Multi Terminal;
g. Implementation of the PRiMa (Pelindo Risk Management) Application as the system used to facilitate the management of the Company's operational risks;
h. Implementation of the Single Procurement System (Secure) as the system used to conduct online procurement and tender processes;
i. Implementation of the Portaverse Application as the system used to manage the performance management system, training management system, learning management system, and knowledge management system;
j. Implementation of the Cistle Application as the system used to consolidate intercompany transactions within the PMT Group.

2. Front-End Applications:
   a. Development of the Corporate Website as an information portal for PT Pelindo Multi Terminal's service users to obtain information about the Company;
   b. Implementation of the GenC and PTOS M Applications as front-end applications at PT Pelindo Multi Terminal branches, integrated with SAP and other applications;
   c. Implementation of the Spinner Application to support the new container service;
   d. Implementation of the Weighbridge Gate System;
   e. Implementation of the PTOS PK (Container) Application as a front-end application at PT Pelindo Multi Terminal branches, integrated with SAP and other applications.

Implementation of the Weighbridge Gate System

1. Development of the Facilities Dashboard as a management dashboard for the Facilities Division;
2. Maintenance of the Corporate Email System for PT Pelindo Multi Terminal;
3. Provision of Office Supplies related to Information Technology Equipment to support employees assigned to PMT in carrying out their duties.

Tata Kelola

1. Peraturan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Bidang TI sebagai dasar pelaksanaan Tata Kelola di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
2. Keputusan Direksi tentang Information Technology Steering Commite untuk mempercepat proses perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
3. Dokumen Standar Prosedur Operasi (SPO) Divisi Teknologi Informasi.

PENGENDALIAN KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER

Perusahaan terus memperkuat pengelolaan dan pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) dengan menempatkan keamanan informasi sebagai salah satu prioritas utama. Penerapan sistem keamanan dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data (*confidentiality*), keutuhan informasi (*integrity*), ketersediaan sistem (*availability*), serta kesiapan pemulihan ketika terjadi gangguan atau kondisi darurat (*disaster recovery*).

IDENTIFIKASI DAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Identifikasi dan pengelolaan risiko TI dilaksanakan melalui proses manajemen risiko yang terstruktur dalam tujuh tahap, meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, komunikasi dan konsultasi, serta pemantauan risiko secara berkelanjutan. Proses ini dijalankan oleh Departemen Pengendalian Sistem, dengan penetapan tingkat risiko menggunakan matriks risiko berbasis kombinasi kemungkinan (probabilitas) dan dampak (severitas), serta opsi penanganan risiko yang mencakup *accept*, *avoid*, *control/mitigate*, dan *transfer*. Manajemen memastikan adanya kesadaran risiko (*risk awareness*) secara eksplisit pada tingkat pejabat eksekutif dan Direksi, sehingga akuntabilitas atas risiko TI yang signifikan tidak berhenti pada level teknis, melainkan menjadi bagian dari kesadaran manajemen puncak.

Sebagai mekanisme pengujian independen atas efektivitas pengendalian TI, Perusahaan melaksanakan audit TI secara berkala minimal satu kali dalam setahun, dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern dan/atau auditor eksternal yang independen dan kompeten. Resume hasil audit TI dilaporkan kepada manajemen dan disosialisasikan oleh Senior Vice President Teknologi Informasi, dengan tindak lanjut korektif dan preventif yang dimonitor oleh Departemen Pengendalian Sistem melalui Laporan Monitoring Rekomendasi hingga tuntas sebelum tanggal target penyelesaian. Laporan-laporan strategis terkait TI, termasuk hasil audit dan rencana penggunaan TI, disetujui secara berjenjang oleh Senior Vice President Teknologi Informasi serta Direksi, memastikan risiko dan kinerja pengendalian TI senantiasa berada dalam pengawasan manajemen puncak.

Governance

1. Board of Directors' Regulation on Information Technology Governance Guidelines as the basis for IT governance implementation within PT Pelindo Multi Terminal;
2. Board of Directors' Decree on the Information Technology Steering Committee to accelerate the planning and development of Information Technology within PT Pelindo Multi Terminal;
3. Standard Operating Procedure (SOP) Documents of the Information Technology Division.

CYBER RESILIENCE AND SECURITY MANAGEMENT

The Company continues to strengthen the management and development of its Information Technology (IT) systems by placing information security as one of its key priorities. Security measures are implemented to safeguard data confidentiality, information integrity, system availability, and disaster recovery readiness in the event of disruptions or emergency situations.

IDENTIFICATION AND MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY RISK

Identification and management of IT risk is carried out through a structured risk management process comprising seven stages: context establishment, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, communication and consultation, and continuous risk monitoring. This process is carried out by the System Control Department, with risk levels determined using a risk matrix based on a combination of likelihood (probability) and impact (severity), and risk treatment options including accept, avoid, control/mitigate, and transfer. Management ensures explicit risk awareness at the executive and Board of Directors level, so that accountability for significant IT risks does not stop at the technical level but becomes part of top management's awareness.

As an independent testing mechanism for the effectiveness of IT controls, the Company conducts IT audits periodically at least once a year, carried out by the Internal Audit Unit and/or independent and competent external auditors. A summary of the IT audit results is reported to management and communicated by the Senior Vice President of Information Technology, with corrective and preventive follow-up actions monitored by the System Control Department through a Recommendation Monitoring Report until completion prior to the target resolution date. Strategic IT-related reports, including audit results and IT utilization plans, are approved in a tiered manner by the Senior Vice President of Information Technology and the Board of Directors, ensuring that IT risk and control performance remain under the continuous oversight of top management.

KEAMANAN SIBER DAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI

Pada aspek keamanan informasi, Direksi menunjukkan kepemimpinan dan komitmen secara eksplisit melalui penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI), antara lain dengan memastikan keselarasan tujuan dan kebijakan pengamanan informasi dengan arahan strategis Perusahaan, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Manajemen Risiko Pengamanan Informasi (MRPI) diselenggarakan secara terintegrasi dan selaras dengan proses Enterprise Risk Management (ERM) Perusahaan, dengan asesmen risiko pengamanan informasi yang dilakukan secara rutin setiap enam bulan atau lebih cepat apabila terdapat perubahan proses bisnis yang berdampak signifikan terhadap profil risiko. Hasil asesmen dituangkan dalam Risk Treatment Plan (RTP) Keamanan Informasi yang disosialisasikan kepada stakeholder terkait untuk membangun kesadaran, keterlibatan, dan kepemilikan atas risiko keamanan informasi di seluruh lini organisasi.

Pada level operasional, penanganan insiden TI — termasuk insiden yang dikategorikan sebagai insiden keamanan siber — mengikuti jalur eskalasi berjenjang: penanganan awal oleh Departemen Pemeliharaan Sistem dan Data Manajemen sebagai *first level*, eskalasi kepada *Second Layer Support* apabila tidak dapat diselesaikan, hingga eskalasi kepada Vice President Pemeliharaan Sistem dan Manajemen Data untuk insiden yang dikategorikan sebagai insiden pengamanan informasi. Dengan mekanisme ini, setiap indikasi ancaman siber dapat ditangani secara terstruktur sekaligus diukur tingkat keparahannya sebelum ditentukan perlu tidaknya eskalasi lebih lanjut ke prosedur kontinuitas bisnis.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM) DAN DISASTER RECOVERY PLAN (DRP)

Kesiapan pemulihan bencana dikelola melalui mekanisme kontinuitas TI yang secara eksplisit melibatkan Direksi: Direksi menetapkan tim penyusun kontinuitas TI untuk menyusun *Disaster Recovery Plan* (DRP), yang didasarkan pada *Business Impact Analysis* (BIA) untuk menetapkan *Recovery Time Objective*/RTO dan *Recovery Point Objective*/RPO, serta *Risk Assessment* untuk menentukan strategi dan arsitektur kontinuitas yang memadai. Direksi selanjutnya melakukan reviu dan menetapkan kebijakan DRP sebagai referensi pengendalian risiko bencana, sementara pengujian DRP dilaksanakan secara berkala minimal satu kali dalam setahun untuk memastikan kecukupan rencana pemulihan sekaligus menghasilkan *lesson learned* bagi penyempurnaan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, kesiapan menghadapi gangguan atau bencana diatur melalui struktur *Business Continuity Management* (BCM) yang terdiri dari empat tingkatan (BCM Level), disesuaikan dengan tingkat dampak gangguan terhadap layanan dan reputasi Perusahaan. Insiden yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa atau *disaster* akan dieskalasi langsung ke prosedur DRP, dan penanganan gangguan TI secara teknis dijalankan oleh

CYBERSECURITY AND THE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

In the area of information security, the Board of Directors demonstrates explicit leadership and commitment through the implementation of the Information Security Management System (ISMS), including by ensuring alignment of information security objectives and policies with the Company's strategic direction, as well as the availability of adequate resources. Information Security Risk Management (ISRM) is conducted in an integrated manner and aligned with the Company's Enterprise Risk Management (ERM) process, with information security risk assessments carried out regularly every six months, or more frequently in the event of business process changes that significantly affect the risk profile. The assessment results are set out in an Information Security Risk Treatment Plan (RTP), which is communicated to relevant stakeholders to build awareness, engagement, and ownership of information security risk across all levels of the organization.

At the operational level, IT incident handling — including incidents categorized as cybersecurity incidents — follows a tiered escalation path: initial handling by the System Maintenance and Data Management Department as the first level, escalation to Second Layer Support if unresolved, and further escalation to the Vice President of System Maintenance and Data Management for incidents categorized as information security incidents. Through this mechanism, any indication of a cyber threat can be handled in a structured manner while its severity is assessed to determine whether further escalation to the business continuity procedure is required.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM) AND DISASTER RECOVERY PLAN (DRP)

Disaster recovery readiness is managed through an IT continuity mechanism that explicitly involves the Board of Directors: the Board of Directors appoints the IT continuity planning team to develop the Disaster Recovery Plan (DRP), which is based on a Business Impact Analysis (BIA) to determine the Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Objective (RPO), as well as a Risk Assessment to determine an adequate continuity strategy and architecture. The Board of Directors subsequently reviews and establishes the DRP policy as a reference for disaster risk control, while DRP testing is conducted periodically at least once a year to ensure the adequacy of the recovery plan and to generate lessons learned for continuous improvement.

Institutionally, readiness to face disruptions or disasters is governed through a Business Continuity Management (BCM) structure consisting of four levels (BCM Levels), calibrated to the level of impact of the disruption on the Company's services and reputation. Incidents categorized as extraordinary events or disasters are escalated directly to the DRP procedure, and technical handling of IT disruptions is carried out by

Tim Pemulihan IT dalam struktur Tim Penanganan Gangguan BCM, yang bertanggung jawab melakukan *damage assessment*, memastikan DRP berjalan efektif, serta menyatakan kesiapan sistem untuk kembali beroperasi normal.

PROSES IDENTIFIKASI HINGGA ESKALASI DAN PELAPORAN KEPADA DIREKSI

Untuk memastikan risiko TI yang teridentifikasi dikelola dan dilaporkan secara berjenjang kepada Direksi, setiap gangguan dideklarasikan sesuai tingkatan BCM Level oleh pejabat yang berwenang: Branch Manager untuk BCM Level 4, *Senior Vice President* terkait untuk BCM Level 3, Direktur Teknis untuk BCM Level 2, hingga gangguan pada tingkat tertinggi (BCM Level 1), yaitu yang berdampak pada reputasi Perusahaan, yang dideklarasikan dan ditetapkan langsung oleh Direktur Utama. Struktur ini memastikan bahwa semakin besar dampak suatu gangguan, semakin tinggi pula tingkat pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dengan Direksi menjadi titik akhir eskalasi untuk risiko yang paling signifikan.

Keterhubungan antara fungsi teknis TI dengan Direksi turut diperkuat melalui Komite Pengarah TI (*IT Steering Committee*), yang berperan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas Master Plan TI serta melakukan verifikasi sebelum Direksi menetapkannya, sekaligus menjadi pihak yang menyetujui perubahan-perubahan besar (mayor) atas sistem dan infrastruktur TI Perusahaan. Melalui rangkaian mekanisme ini, manajemen risiko tujuh tahap, audit TI tahunan, asesmen risiko keamanan informasi semesteran, pengujian DRP tahunan, eskalasi BCM berjenjang hingga Direktur Utama, dan pengawasan Komite Pengarah TI, Perusahaan memastikan bahwa risiko utama TI, baik yang bersifat operasional, keamanan siber, maupun bencana, senantiasa terverifikasi secara berkala dan bukan sekadar kebijakan yang statis.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perusahaan saat ini tengah memperkuat koordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mendukung pengembangan kawasan strategis nasional di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dalam proyek tersebut, Perusahaan diproyeksikan berperan sebagai operator terminal multipurpose nonpetikemas yang akan mendukung aktivitas logistik dan distribusi di kawasan industri dimaksud.

Sebagai subholding yang berfokus pada layanan terminal multipurpose, Perusahaan menyiapkan dukungan operasional melalui pengembangan suprastruktur serta sistem teknologi informasi yang dirancang untuk menunjang kelancaran aktivitas bongkar muat dan operasional pelabuhan secara terintegrasi.

Terminal tersebut diperkirakan akan melayani berbagai jenis muatan strategis, antara lain pasir silika untuk kebutuhan industri kaca, material baja, serta gas. Saat ini, Perusahaan masih melakukan kajian internal terkait potensi bisnis dan kebutuhan operasional, sekaligus menjalin komunikasi dan penjajakan dengan calon pengguna jasa sebagai bagian dari persiapan pengembangan layanan di kawasan tersebut.

the IT Recovery Team within the BCM Disruption Handling Team structure, which is responsible for conducting damage assessments, ensuring the DRP is effectively implemented, and confirming system readiness to resume normal operations.

PROCESS FROM IDENTIFICATION TO ESCALATION AND REPORTING TO THE BOARD OF DIRECTORS

To ensure that identified IT risks are managed and reported in a tiered manner to the Board of Directors, each disruption is declared according to its BCM Level by the authorized officer: the Branch Manager for BCM Level 4, the relevant Senior Vice President for BCM Level 3, the Technical Director for BCM Level 2, up to the highest level of disruption (BCM Level 1), namely one that impacts the Company's reputation, which is declared and determined directly by the President Director. This structure ensures that the greater the impact of a disruption, the higher the level of officer involved in decision-making, with the Board of Directors serving as the final point of escalation for the most significant risks.

The connection between the technical IT function and the Board of Directors is further strengthened through the IT Steering Committee, which provides recommendations to the Board of Directors on the IT Master Plan and conducts verification prior to its adoption by the Board of Directors, while also serving as the party that approves major changes to the Company's IT systems and infrastructure. Through this series of mechanisms, seven-stage risk management, annual IT audits, semi-annual information security risk assessments, annual DRP testing, tiered BCM escalation up to the President Director, and oversight by the IT Steering Committee, the Company ensures that key IT risks, whether operational, cybersecurity, or disaster-related, are continuously verified on a regular basis rather than remaining static policy.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

The Company is currently strengthening its coordination with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to support the development of the National Strategic Area at the Batang Integrated Industrial Estate (KITB). Under this project, the Company is expected to serve as the operator of a multipurpose non-container terminal supporting logistics and distribution activities within the industrial estate.

As a subholding focused on multipurpose terminal services, the Company is preparing operational support through the development of superstructure facilities and information technology systems designed to facilitate integrated cargo handling and port operations.

The terminal is expected to handle various strategic cargoes, including silica sand for the glass industry, steel materials, and gas. The Company is currently conducting internal studies on business potential and operational requirements while engaging in discussions and market outreach with prospective customers as part of the preparations for developing services in the industrial estate.

Kode Etik
Code of Conduct

Perusahaan menempatkan etika bisnis sebagai bagian penting dari penerapan governansi korporat di seluruh lini organisasi demi membangun budaya kerja yang sehat dan profesional. Perusahaan meyakini bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh pencapaian kinerja, tetapi juga oleh cara Perusahaan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab.

Setiap insan Perusahaan didorong untuk menjalankan tugas dan pengambilan keputusan dengan menjunjung kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan kerja yang profesional, baik di lingkungan internal maupun dalam interaksi dengan mitra usaha, pelanggan, regulator, dan masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Perusahaan menerapkan Pedoman Kode Etik Bisnis yang menjadi acuan perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pedoman tersebut mengatur standar etika kerja guna memperkuat penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar tetap selaras dengan visi, misi, dan arah pertumbuhan jangka panjang Perusahaan.

The Company regards business ethics as an essential component of corporate governance implementation across all levels of the organization in order to foster a healthy and professional work culture. The Company believes that business success is determined not only by performance achievements but also by the way it conducts its business responsibly.

All Company personnel are encouraged to perform their duties and make decisions while upholding compliance with applicable laws and regulations and maintaining the trust of stakeholders. This approach serves as the foundation for building professional working relationships, both within the organization and in interactions with business partners, customers, regulators, and the public.

As part of this commitment, the Company implements a Code of Conduct, which serves as the behavioral guideline for all Company personnel in carrying out their daily activities. The guideline establishes standards of ethical conduct to strengthen the implementation of Good Corporate Governance principles while ensuring alignment with the Company's vision, mission, and long-term growth direction.

VISI, MISI, DAN TATA NILAI SEBAGAI FONDASI KODE ETIK PERUSAHAAN

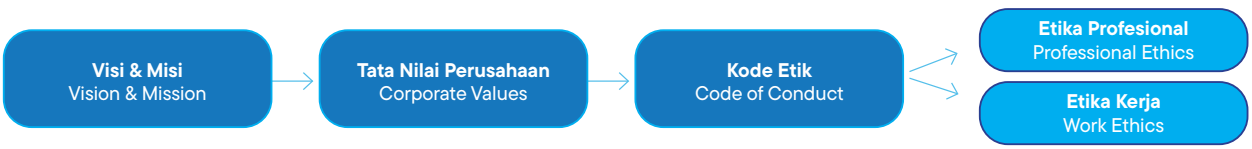
Perusahaan telah menetapkan Kode Etik Bisnis sebagai pedoman perilaku yang selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan. Penerapan kode etik dilakukan secara menyeluruh di seluruh tingkat organisasi. Sejak proses perekrutan, pemahaman terhadap Kode Etik Bisnis telah menjadi bagian dari komitmen kerja yang dituangkan dalam kontrak kerja karyawan. Dengan demikian, setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam rangka menjaga konsistensi implementasi, Perusahaan secara berkala melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman terkait kode etik melalui berbagai kegiatan internal. Langkah ini dilakukan agar nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepatuhan tertanam dalam budaya kerja Perusahaan serta terus terinternalisasi dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan.

VISION, MISSION AND VALUES AS THE FOUNDATION OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

The Company has established a Code of Conduct as a guideline for behavior aligned with its vision, mission, and values. The Code of Conduct is implemented comprehensively at all levels of the organization. From the recruitment process, understanding the Code of Conduct has become part of the work commitment outlined in employee employment contracts. Therefore, every employee has a responsibility to implement the code in their daily activities.

To maintain consistent implementation, the Company regularly socializes and strengthens understanding of the Code of Conduct through various internal activities. This step is taken to ensure that the values of integrity, professionalism, and compliance are embedded in the Company's work culture and continuously internalized in every business process and decision-making process.



PEDOMAN KODE ETIK DAN POKOK-POKOK ISI KODE ETIK

Pedoman Kode Etik Bisnis yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis Pada PT Pelindo Multi Terminal telah mengatur beberapa aspek, meliputi:

1. Pendahuluan
   a. Latar Belakang;
   b. Maksud dan Tujuan;
   c. Manfaat;
   d. Landasan Penyusunan;
   e. Visi dan Misi;
   f. Nilai Perusahaan;
   g. Pelaporan dan Kepatuhan.
2. Etika Profesional
   a. Hubungan dengan Pekerja;
   b. Hubungan dengan Pemegang Saham;
   c. Hubungan dengan Serikat Pekerja;
   d. Hubungan dengan Pelanggan;
   e. Hubungan dengan Vendor;
   f. Hubungan dengan Kreditur;
   g. Hubungan dengan Debitur;
   h. Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan;
   i. Hubungan dengan Pesaing;
   j. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas dan Lingkungan;
   k. Hubungan dengan Regulator dan Aparatur Pemerintah;
   l. Hubungan dengan Branch, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi;
   m. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lain.
3. Etika Kerja
   a. Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya;
   b. Benturan Kepentingan;
   c. Korupsi dan Suap;
   d. Anti Kecurangan (*Anti-Fraud*);
   e. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya;
   f. Pencucian Uang;
   g. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan dan Donasi;
   h. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
   i. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan;
   j. Integritas Laporan Keuangan;
   k. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi;
   l. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi;
   m. Pengelolaan Arsip;
   n. Perlindungan Harta Perusahaan;
   o. Pengendalian Internal;
   p. Perjalanan Dinas;
   q. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
   r. Aktivitas Politik dan Sosial;
   s. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja;
   t. Pelanggaran *Insider Trading*.
4. Penegakan Pedoman Kode Etik Bisnis
   a. Komitmen Penegakan Pedoman Kode Etik Bisnis;

CODE OF CONDUCT GUIDELINES AND PRINCIPLES

The Code of Conduct that has been ratified through Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024 concerning the Code of Conduct at PT Pelindo Multi Terminal have regulated several aspects, including:

1. Introduction
   a. Background
   b. Purpose and Objectives
   c. Benefits
   d. Foundation for Preparation
   e. Vision and Mission
   f. Company Values
   g. Reporting and Compliance
2. Professional Ethics
   a. Relationships with Employees;
   b. Relationships with Shareholders;
   c. Relationships with Labor Unions;
   d. Relationships with Customers;
   e. Relationships with Vendors;
   f. Relationships with Creditors;
   g. Relationships with Debtors;
   h. Relationships with Investors and Financial Institutions;
   i. Relationships with Competitors;
   j. Relationships with the Public, Communities, and the Environment;
   k. Relationships with Regulators and Government Officials;
   l. Relationships with Branches, Subsidiaries, and/or Affiliated Companies;
   m. Relationships with Other Stakeholders.
3. Work Ethics
   a. Compliance with Laws, Regulations and Other Provisions
   b. Conflict of Interest
   c. Corruption and Bribery
   d. Anti-Fraud
   e. Theft and Similar Misappropriation
   f. Money Laundering
   g. Gratification (Giving and Receiving Gifts or rewards, Meals, Entertainment and Donations)
   h. Equal Opportunity for Employment and Promotion
   i. Company Documentation and Records
   j. Financial Reporting Integrity
   k. Confidentiality of Data and/or Information
   l. Media, Communication, and Information Dissemination
   m. Archive Management
   n. Protection of Company Assets
   o. Internal Control
   p. Official Travel
   q. Intellectual Property Rights (IPR)
   r. Political and Social Activities
   s. Ethical Behavior towards Fellow Workers
   t. Insider Trading Violation
4. Enforcement of Code of Conduct Guidelines
   a. Commitment to Enforcement of Code of Conduct Guidelines

b. Sosialisasi dan Internalisasi;
c. Pelanggaran;
d. Mekanisme pelaporan pelanggaran;
e. Sanksi atas pelanggaran.

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Etika Perusahaan menjadi landasan perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan, mulai dari karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, hingga organ pendukung lainnya, dalam menjalankan tugas dan aktivitas bisnis sehari-hari, dengan harapan terciptanya budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap hubungan kerja maupun hubungan usaha. Oleh karena itu, implementasi kode etik Perusahaan diarahkan sebagai upaya untuk:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha.
2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis.
3. Sebagai landasan etis untuk bertindak dan berpikir serta mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.
4. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Perusahaan serta stakeholders lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.

Upaya Penyebaran dan Penegakan Etika Bisnis, Etika Kerja serta Perilaku

Pemahaman Kode Etik menjadi tanggung jawab dasar bagi seluruh Insan Perusahaan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Namun, penerapan kode etik tidak berhenti pada aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun budaya perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai upaya mendukung implementasi tersebut, Perusahaan mewajibkan seluruh Insan Perusahaan untuk:

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis yang merupakan komitmen Insan Perusahaan untuk melaksanakan Pedoman Kode Etik Bisnis yang diperbarui setiap tahun.
2. Pedoman Kode Etik Bisnis harus disosialisasikan dan dipahami oleh Insan Perusahaan.
3. Pakta Integritas, Janji Pedoman Kode Etik Bisnis dan Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretaris Perusahaan.
4. Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis Pekerja Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretaris Perusahaan untuk Kantor Pusat dan di Bagian SOM masing-masing Unit Kerja.
5. Departemen yang menangani tata kelola perusahaan melakukan *monitoring*, membuat laporan dan rekapitulasi Pekerja Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan

b. Socialization and Internalization
c. Violations
d. Mechanism for reporting violations;
e. Sanctions for violations.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT FOR ALL LEVELS OF ORGANIZATION

The Company's Code of Conduct serves as the basis for the behavior of all Company Personnel, from employees, Directors, Board of Commissioners, to other supporting organs, in carrying out daily business tasks and activities, with the hope of creating a professional, responsible work culture that upholds integrity in every work relationship and business relationship. Therefore, the implementation of the Company's code of conducted is directed as an effort to:

1. As a joint commitment to realize the vision and carry out the mission of the Company in a professional and ethical manner in conducting business;
2. Is a behavioral guide for all Company employees who must be obeyed in carrying out all business activities;
3. As an ethical basis for acting and thinking as well as making decisions related to the Company;
4. Developing harmonious, synergistic and mutually beneficial relationships between the Company's personnel and other stakeholders based on sound and ethical corporate principles, in order to become a highly competitive Company.

Efforts to Disseminate and Enforce Business Ethics, Work Ethics and Behavior

Understanding the Code of Conduct is a fundamental responsibility for all Company personnel as a commitment to the principles of Good Corporate Governance. However, implementing the Code of Conduct goes beyond compliance and serves as the foundation for building a healthy and sustainable corporate culture. To support this implementation, the Company requires all Company personnel to:

1. All Company personnel are required to sign the Integrity Pact and Pledge of the Code of Conduct Guidelines which is a commitment of Company personnel to implement the Code of Conduct Guidelines which is renewed annually.
2. Code of Conduct must be socialized and understood by the Company's personnel.
3. The Integrity Pact, Pledge of Code of Conduct Guidelines and Conflict of Interest Statement of Board of Commissioners and Board of Directors are made and signed in one copy and kept at the Corporate Secretary.
4. The Pact of Integrity and Pledge of Code of Conduct for Company Personnel are made and signed in one copy and kept at the Corporate Secretary for the Head Office and at the SOM Section of each Work Unit.
5. The department in charge of corporate governance shall monitor, make reports and recapitulate the Company's Personnel who sign the Pact of Integrity in their respective

Pakta Integritas di wilayah kerjanya masing-masing setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.

working areas every year, to be submitted to the Corporate Secretary.

Seluruh Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pimpinan 2 (dua) level di bawahnya bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis ini.

All Working Unit Leaders up to 2 (two) levels below are responsible and set an example for their subordinates for the implementation of this Code of Conduct.

SOSIALISASI KODE ETIK

Perusahaan secara aktif melakukan sosialisasi Kode Etik Perusahaan kepada seluruh Insan Perusahaan agar nilai-nilai perusahaan dapat diterapkan secara konsisten dalam aktivitas kerja sehari-hari. Sepanjang tahun 2025, salah satu bentuk implementasi yang dilakukan adalah publikasi *flyer* tentang "Pedoman Kode Etik" melalui Media Sosial Instagram Perusahaan, yaitu @pelindomultiterminal pada 9 Oktober 2025. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa sosialisasi tersebut menjangkau pihak internal Perusahaan maupun pihak eksternal, sehingga informasi dapat diterima secara cepat dan merata.

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

The Company actively conducts socialization of the Company's Code of Conduct to all Company personnel to ensure that the Company's values are consistently applied in their daily work activities. Throughout 2025, one of the implementation initiatives was the publication of a flyer on the "Code of Conduct" through the Company's Instagram social media account, @pelindomultiterminal, on October 9, 2025. The Company continuously ensures that such socialization reaches both internal and external stakeholders, enabling the information to be disseminated promptly and comprehensively.



PENEGAKAN DAN PELAPORAN PELANGGARAN ETIKA

Perusahaan menyediakan mekanisme pelaporan bagi seluruh Insan Perusahaan maupun pihak berkepentingan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis maupun tindakan lain yang termasuk dalam ruang lingkup *Whistleblowing System* (WBS).

Penyampaian laporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang telah disediakan, antara lain surat tertulis, faksimili, SMS, maupun melalui situs web aplikasi pengaduan (WBS) milik entitas induk Perusahaan.

Mekanisme WBS ini difokuskan untuk menangani laporan yang berkaitan dengan pelanggaran etika, penyimpangan, maupun tindakan yang berpotensi merugikan Perusahaan. Oleh karena itu, sarana pengaduan tersebut tidak digunakan untuk menyampaikan kepentingan atau keluhan yang bersifat pribadi di luar ruang lingkup pengelolaan pengaduan Perusahaan.

ENFORCEMENT AND REPORTING OF ETHICAL VIOLATIONS

The Company provides a reporting mechanism for all Company personnel and interested parties to report suspected violations of the Code of Conduct or other actions within the scope of the Whistleblowing System (WBS).

Reports can be submitted through various channels, including written letters, faxes, SMS, or through the parent entity's WBS website.

This WBS mechanism focuses on handling reports related to ethical violations, irregularities, or actions that could potentially harm the Company. Therefore, this reporting platform is not used to convey personal interests or complaints outside the scope of the Company's complaint management.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Kode Etik Bisnis dengan memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan tindakan melalui mekanisme indisipliner.

Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan berdasarkan hasil penelaahan dan rekomendasi dari tim yang dibentuk Direksi, sebelum kemudian ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi sesuai tingkat dan bentuk pelanggaran yang terjadi. Dewan Komisaris dan/atau Direksi juga dapat menetapkan langkah pembinaan, tindakan korektif, maupun upaya pencegahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh atasan langsung pada unit kerja terkait.

Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris, keputusan mengenai tindakan dan sanksi ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penerapan kepatuhan terhadap kode etik juga berlaku bagi mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak eksternal, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam kontrak kerja sama maupun peraturan lain yang relevan. Apabil pelanggaran berkaitan dengan unsur tindak pidana, Perusahaan dapat meneruskannya kepada pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

The Company applies the principle of accountability in implementing the Code of Conduct by ensuring that all violations are followed up in accordance with applicable regulations. Any Company employee found to have violated the Code of Conduct will be subject to disciplinary action through the mechanism.

Sanctions imposed on employees are based on the review results and recommendations of a team formed by the Board of Directors, before being further determined by the Board of Directors according to the level and form of the violation. The Board of Commissioners and/or the Board of Directors may also establish coaching, corrective, and preventive measures, which are implemented by the direct supervisor of the relevant work unit.

Meanwhile, if a violation is committed by a member of Board of Directors or Board of Commissioners, decisions regarding actions and sanctions are determined through the General Meeting of Shareholders (GMS).

Compliance with the code of conduct also applies to business partners and other stakeholders. If violations are discovered by external parties, they will be resolved based on the provisions of the work contract or other relevant regulations. If the violations involve criminal elements, the Company may forward the matter to the authorities in accordance with applicable laws and regulations.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat adanya pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik di lingkup Perusahaan.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

Throughout 2025, there were no complaints regarding violations of the Code of Conduct within the Company.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Integritas merupakan salah satu prinsip penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bisnis di lingkungan Perusahaan dijalankan dengan komitmen untuk menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Integrity is one of the fundamental principles in conducting business activities. Therefore, all business activities within the Company are carried out with a commitment to avoiding Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) and consistently upholding the principles of Good Corporate Governance.

Bagi Perusahaan, kepercayaan para pemangku kepentingan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan. Oleh karena itu, Perusahaan memegang teguh penerapan praktik usaha yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasional sehari-hari.

For the Company, stakeholder trust is a critical measure of success. Accordingly, the Company remains firmly committed to ethical, transparent, and responsible business practices. These values serve as the foundation for both decision-making processes and day-to-day operations.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perusahaan memandang gratifikasi sebagai salah satu risiko yang perlu dikelola secara serius karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pengendalian gratifikasi menjadi bagian penting dalam upaya menjaga integritas serta menciptakan praktik governansi korporat yang sehat dan transparan.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/29/2/2/HLTL/DIRU/PLMT-24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

Adapun beberapa bentuk penggolongan gratifikasi yang diatur dalam pedoman tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Hiburan;
2. Komisi;
3. Pinjaman tanpa bunga;
4. Pemberian barang;
5. Pemberian uang;
6. Rabat/*voucher*;
7. Fasilitas penginapan;
8. Perjalanan wisata;
9. Fasilitas pengobatan;
10. Tiket perjalanan; dan
11. Lain-Lain.

GRATIFICATION CONTROL GUIDELINES

The Company regards gratification as a risk that must be managed seriously because it has the potential to create conflicts of interest and impair objectivity in decision-making. Therefore, gratification control constitutes an essential part of the Company's efforts to maintain integrity and foster sound and transparent corporate governance practices.

As part of this commitment, the Company has established the Gratification Control Guidelines through Board of Directors Regulation No. SK.01.01/29/2/2/HLTL/DIRU/PLMT-24 dated 29 February 2024 concerning the Gratification Control Guidelines within PT Pelindo Multi Terminal.

The Guidelines classify gratification into, among others, the following categories:
1. Entertainment;
2. Commissions;
3. Interest-free loans;
4. Gifts in kind;
5. Cash gifts;
6. Rebates/vouchers;
7. Accommodation facilities;
8. Leisure travel;
9. Medical facilities;
10. Travel tickets; and
11. Others.

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sebagai bagian dari penguatan budaya integritas dan penerapan sistem anti penyuapan, Perusahaan telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.01.01/1/7/2/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 1 Juli 2024. Unit ini tergabung dalam Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang sekaligus menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan penanganan *fraud* di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. UPG dibentuk oleh Direksi secara *ad hoc* dengan tugas utama mengawal implementasi, pengelolaan, dan pengawasan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Setiap Insan Perusahaan diwajibkan menolak secara sopan setiap pemberian, hadiah, cinderamata, maupun hiburan (*entertainment*) yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau memengaruhi independensi dalam bekerja. Penolakan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada UPG sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi yang berlaku.

Perusahaan juga mendorong Insan Perusahaan untuk memberikan pemahaman kepada pihak eksternal mengenai kebijakan gratifikasi yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, Insan Perusahaan dapat meminta dukungan UPG untuk membantu memberikan penjelasan sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi kepada pihak terkait.

Selain larangan menerima gratifikasi, Perusahaan juga menegaskan bahwa Insan Perusahaan tidak diperkenankan memberikan hadiah, hiburan, atau bentuk gratifikasi lainnya kepada pihak yang memiliki hubungan bisnis maupun pesaing usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, memengaruhi keputusan, ataupun mendapatkan informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis Perusahaan.

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Berikut adalah program pengendalian gratifikasi di lingkup Perusahaan yang dilakukan di sepanjang tahun 2025, yakni:

1. Penyampaian Surat/Nota Dinas kepada *Branch* dan Anak Perusahaan:
   a. Nomor: SK.01.01/13/3/1/HLTK/SKTR-25 tanggal 13 Maret 2025 tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Suap, Gratifikasi serta Pungutan Liar pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025;
   b. Nomor: SK.01.01/26/5/1/HLTK/SKTR-25 tanggal 26 Mei 2025 tentang Pemasangan Informasi terkait Larangan Pemberian dan Penerimaan Suap, Pungli dan Gratifikasi di Lingkungan Kerja PT Pelindo Multi Terminal.
2. Sosialisasi Larangan Permintaan, Pengiriman dan Penerimaan Suap, serta Gratifikasi Jelang Idul Fitri 2025 di Lingkungan PMT pada 24 Maret 2025;

ESTABLISHMENT OF GRATIFICATION CONTROL UNIT

As part of strengthening the culture of integrity and implementing the anti-bribery management system, the Company established the Gratification Control Unit (Unit Pengendalian Gratifikasi/UPG) pursuant to Board of Directors Decree No. SK.01.01/1/7/2/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated 1 July 2024. The Unit forms part of the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP), which also performs the functions of gratification control, conflict of interest management, and fraud handling within PT Pelindo Multi Terminal. The UPG was established by the Board of Directors on an ad hoc basis, with the primary responsibility of overseeing the implementation, management, and supervision of gratification control within the Company.

All Company personnel are required to politely decline any gifts, presents, souvenirs, or entertainment that may give rise to conflicts of interest or compromise their independence in performing their duties. Such refusals must subsequently be reported to the UPG as a form of compliance with the applicable gratification control policy.

The Company also encourages its personnel to explain the Company's gratification policy to external parties. Under certain circumstances, Company personnel may request assistance from the UPG in providing such explanations as part of socialization and educational efforts for the relevant parties.

In addition to prohibiting the acceptance of gratification, the Company also emphasizes that Company personnel are prohibited from offering gifts, entertainment, or any other form of gratification to parties having business relationships with the Company or to competitors with the intention of obtaining improper advantages, influencing decisions, or obtaining information contrary to applicable laws and regulations and the Company's business ethics.

GRATIFICATION CONTROL PROGRAMS

The following gratification control programs were carried out within the Company throughout 2025:

1. Distribution of Circulars/Internal Memoranda to Branches and Subsidiaries:
   a. No. SK.01.01/13/3/1/HLTK/SKTR-25 dated March 13, 2025 concerning the Prohibition of Giving and Receiving Bribes, Gratification, and Illegal Levies during the Eid al-Fitr 1446 H / 2025 Celebration;
   b. No. SK.01.01/26/5/1/HLTK/SKTR-25 dated May 26, 2025 concerning the Installation of Information on the Prohibition of Giving and Receiving Bribes, Illegal Levies, and Gratification within PT Pelindo Multi Terminal's Working Environment.
2. Socialization on the Prohibition of Soliciting, Giving, and Receiving Bribes and Gratification Prior to Eid al-Fitr 2025 within PMT on March 24, 2025;

3. Publikasi *Flyer* tentang “Gratifikasi? Seberapa Mahal Harganya?” pada 28 April 2025;
4. Publikasi *Flyer* tentang “Cara Menolak Saat Diberi Gratifikasi” pada 15 Mei 2025;
5. Publikasi *Flyer* tentang “Dilarang Memberi dan Menerima Suap, Pungli, dan Gratifikasi” pada 27 Mei 2025;
6. Pemasangan *Banner*, Poster atau Spanduk tentang Anti Suap, Pungli dan Gratifikasi di Lokasi Kantor, *Branch* maupun terminal yang dikelola oleh PMT pada Mei - Juni 2025;
7. Publikasi Video tentang “Larangan Tindakan Memberi, Menerima Suap, Pungli, dan Gratifikasi di Area Lingkungan Kerja PMT” pada 21 Juli 2025;
8. Publikasi Video tentang “Godaan Gratifikasi Lewat ‘Tanda Terima Kasih’” pada 28 Agustus 2025;
9. Webinar Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi pada 10 September 2025;
10. Surat Edaran tentang “Larangan Suap, Pungli, dan Gratifikasi” pada 22 Desember 2025;
11. Publikasi *Flyer* tentang “Larangan Suap, Pungli, dan Gratifikasi” pada 23 Desember 2025.

PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUP PERUSAHAAN

Pada periode 1 Januari – 31 Desember 2025 tidak terdapat laporan (nihil) indikasi gratifikasi terkait PMT Grup.

3. Publication of the flyer "Gratification? How Expensive Is It?" on April 28, 2025;
4. Publication of the flyer "How to Decline Gratification" on May 15, 2025;
5. Publication of the flyer "Giving and Receiving Bribes, Illegal Levies, and Gratification Is Prohibited" on May 27, 2025;
6. Installation of banners, posters, and billboards promoting anti-bribery, anti-illegal levy, and anti-gratification messages at offices, branches, and terminals managed by PMT during May–June 2025;
7. Publication of the video "Prohibition of Giving and Receiving Bribes, Illegal Levies, and Gratification in PMT Workplace" on July 21, 2025;
8. Publication of the video "The Temptation of Gratification through 'Tokens of Appreciation'" on August 28, 2025;
9. Webinar on the Anti-Bribery Management System and Gratification Control on September 10, 2025;
10. Circular Letter on the "Prohibition of Bribery, Illegal Levies, and Gratification" on December 22, 2025; and
11. Publication of the flyer "Prohibition of Bribery, Illegal Levies, and Gratification" on December 23, 2025.

GRATIFICATION REPORTING WITHIN THE COMPANY

During the period from January 1 to December 31, 2025, there were no reports (none) of indications of gratuities related to the PMT Group

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Political Contributions

Perusahaan menerapkan prinsip netralitas dalam aktivitas politik sebagai bagian dari komitmen menjaga profesionalisme dan integritas bisnis. Oleh karena itu, Perusahaan melarang keterlibatan individu yang bertindak atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik praktis, termasuk pemberian donasi maupun dukungan untuk kepentingan politik tertentu.

Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas, aset, maupun sumber daya Perusahaan untuk kegiatan kampanye, penggalangan dana politik, ataupun bentuk partisipasi politik lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun memengaruhi independensi Perusahaan. Ketentuan mengenai netralitas politik tersebut telah diatur dalam Pedoman Kode Etik Bisnis Perusahaan.

The Company adopts the principle of political neutrality as part of its commitment to maintaining professionalism and business integrity. Accordingly, the Company prohibits individuals acting on behalf of the Company from participating in practical political activities, including making donations or providing support for particular political interests.

The policy also stipulates that all Company personnel are prohibited from using the Company's facilities, assets, or resources for political campaigns, political fundraising, or any other form of political participation that may create conflicts of interest or compromise the Company's independence. The provisions regarding political neutrality are stipulated in the Company's Code of Conduct.

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*
Insider Trading Prevention Policy

Meskipun saham Perusahaan tidak diperdagangkan di pasar modal, Perusahaan tetap menerapkan kebijakan larangan *insider trading* bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pedoman Kode Etik dan Perilaku yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelindo Multi Terminal.

Secara khusus, *insider trading* dipahami sebagai aktivitas jual beli efek yang dilakukan berdasarkan informasi material yang belum tersedia untuk publik, dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu secara tidak wajar. Oleh karena itu, Perusahaan menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi strategis dan mencegah penyalahgunaan informasi internal untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pada prinsipnya, Perusahaan tidak melarang Insan Perusahaan untuk melakukan investasi, termasuk memiliki saham atau instrumen efek lainnya di lingkungan PMT Grup maupun Pelindo Grup, sepanjang dilakukan sebagai investasi jangka panjang dan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga mengingatkan agar aktivitas investasi tidak dilakukan secara spekulatif maupun memanfaatkan informasi internal yang bersifat material dan belum dipublikasikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pasar modal, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai insider trading apabila:
1. Adanya orang dalam;
2. Adanya informasi orang dalam yang bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik;
3. Adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasinya tersebut.

Pemahaman terhadap unsur-unsur *insider trading* menjadi hal yang penting dalam menjaga kepatuhan dan integritas di lingkungan Perusahaan. Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai *insider trading* apabila seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan di atas terpenuhi. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai praktik ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran etika dan kepatuhan bagi seluruh Insan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kasus *insider trading* yang terjadi di lingkungan PMT Grup. Perusahaan berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan informasi serta memperkuat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan informasi material di lingkungan kerja.

Although the Company's shares are not traded on the capital market, the Company continues to enforce a policy prohibiting insider trading for members of Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees. This provision is set forth in the Code of Conduct established through PT Pelindo Multi Terminal Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated 4 March 2024 concerning the PT Pelindo Multi Terminal Code of Conduct.

Specifically, insider trading is understood as the buying or selling of securities based on material information that has not yet been disclosed to the public, with the intention of obtaining unfair advantages. Accordingly, the Company emphasizes the importance of safeguarding confidential strategic information and preventing the misuse of internal information for personal or group interests.

In principle, the Company does not prohibit Company personnel from making investments, including owning shares or other securities within PMT Group or Pelindo Group, provided that such investments are made for long-term investment purposes and remain in compliance with applicable laws and regulations. The Company also reminds its personnel that investment activities must not be speculative or based on material non-public information.

In accordance with the applicable capital market regulations, an act may be classified as insider trading if the following elements are present:
1. The existence of an insider;
2. The existence of material non-public insider information; and
3. A securities transaction conducted by the insider based on such information.

An understanding of the elements of insider trading is essential to maintaining compliance and integrity within the Company. An act may only be classified as insider trading if all of the required elements under the applicable regulations are fulfilled. Therefore, adequate knowledge and understanding of this practice constitute an important part of fostering ethical awareness and compliance among all Company personnel.

Throughout 2025, there were no cases of insider trading within PMT Group. The Company remains committed to safeguarding confidential information and strengthening oversight to prevent the misuse of material information within the workplace.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

KOMITMEN ANTI KORUPSI

Perusahaan menempatkan pencegahan korupsi yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan perangkat pengendalian, antara lain Kode Etik Bisnis, pedoman *Whistleblowing System* (WBS), pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta ketentuan terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk membangun sistem pencegahan yang komprehensif, mulai dari penguatan budaya kepatuhan, mekanisme pelaporan pelanggaran, hingga pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan dan praktik penyuapan di lingkungan Perusahaan. Langkah selaras dengan upaya Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, profesional, dan menjunjung tinggi etika bisnis.

Perusahaan terus mendorong praktik usaha yang bersih dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Penguatan sistem tersebut juga didukung melalui penerapan *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi dengan Pelindo sebagai Holding BUMN Pelabuhan, sehingga proses pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan akuntabel.

Kode Etik Bisnis secara tegas melarang segala bentuk korupsi dan penyuapan. Korupsi dipandang sebagai tindakan melawan hukum yang dapat merugikan Perusahaan maupun negara, sementara penyuapan mencakup pemberian atau penerimaan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertujuan memengaruhi keputusan, memperoleh perlakuan khusus, atau menciptakan keuntungan yang tidak semestinya dalam hubungan kerja maupun hubungan bisnis.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Perusahaan mengharapkan seluruh Insan Perusahaan untuk:
1. Tidak memberi atau menerima semua hal yang telah disebutkan di atas dari pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing dan vendor.
2. Apabila terdapat pihak eksternal yang memberikan penawaran atau mencoba untuk melakukan hal serupa, Insan Perusahaan perlu melaporkannya kepada atasan untuk menentukan tindakan yang pantas dilakukan dan/atau Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.

SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi terkait kebijakan anti korupsi di lingkungan kerja. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi, penerapan *Whistleblowing System* (WBS), serta berbagai ketentuan etika dan kepatuhan yang mendukung terciptanya praktik bisnis yang bersih dan transparan.

ANTI-CORRUPTION COMMITMENT

The Company places corruption prevention as a key priority, as reflected through various policies and control mechanisms, including the Code of Conduct, the Whistleblowing System (WBS) Guidelines, the Gratification Control Guidelines, and the provisions governing the submission of the State Officials' Asset Report (LHKPN).

These policies are designed to establish a comprehensive prevention system, ranging from strengthening the culture of compliance and providing mechanisms for reporting violations to controlling potential conflicts of interest and bribery practices within the Company. These measures are aligned with the Company's efforts to create a transparent, professional working environment that upholds the highest standards of business ethics.

The Company continuously promotes clean business practices that are free from all forms of misconduct. This framework is further reinforced through the implementation of a Whistleblowing System (WBS) integrated with Pelindo as the Port SOE Holding, enabling the reporting and handling of alleged violations to be carried out in a more structured and accountable manner.

The Code of Conduct firmly prohibits all forms of corruption and bribery. Corruption is regarded as an unlawful act that may cause losses to both the Company and the State, while bribery includes the giving or receiving of any form of benefit intended to influence decisions, obtain preferential treatment, or create undue advantages in employment or business relationships.

In line with this commitment, the Company expects all Company personnel to:
1. Refrain from giving or receiving any of the aforementioned benefits from external parties, such as customers, competitors, and vendors.
2. Report to their supervisor and/or the Gratification Control Unit Team if any external party offers or attempts to engage in such practices, so that appropriate actions can be determined.

ANTI-CORRUPTION SOCIALIZATION

The Company continuously conducts socialization programs regarding its anti-corruption policy within the workplace. The materials presented include an understanding of gratification control, the implementation of the Whistleblowing System (WBS), and various ethics and compliance provisions that support the creation of clean and transparent business practices.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur dengan melibatkan tidak hanya Insan Perusahaan, tetapi juga para pemangku kepentingan eksternal yang berinteraksi dengan Perusahaan. Adapun rangkaian kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Pengunggahan Menjelang HAKORDIA 2025 melalui Media Sosial
   Salah satu upaya yang dilakukan PMT Group dalam menyebarkan kesadaran mengenai Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap 9 Desember sebagai wujud komitmen global dalam mencegah dan memberantas korupsi.
2. Pengunggahan Memperingati HAKORDIA 2025 melalui Media Sosial
   PMT Group memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025 sebagai momentum memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis. Budaya bersih, jujur, dan bertanggung jawab adalah fondasi pelayanan kami kepada bangsa.
3. Pengunggahan Kuis Tebak Gambar dalam Memperingati Hakordia 2025 melalui Media Sosial
   Dalam rangka memperingati HAKORDIA 2025, PMT Grup membuat kuis tebak gambar yang jawabannya merupakan elemen penting dalam HAKORDIA.

4. Sosialisasi Pengendalian Korupsi di Korporasi oleh Direktorat Investigasi II BPKP Pusat
   Dalam rangka penguatan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta peningkatan efektivitas pengendalian risiko kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perusahaan, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko melakukan acara sosialisasi yang bekerja sama dengan Bidang Investigasi BPKP Pusat.
5. Pelaksanaan *Fraud Risk Assessment* (FRA) Unit Kerja Kantor Pusat dan *Branch* (Belawan) bersama Direktorat Investigasi II BPKP Pusat
   Fraud Risk Assessment (FRA) adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko kecurangan (*fraud*) dalam suatu organisasi. FRA bertujuan untuk mengetahui area atau aktivitas yang memiliki kerawanan terhadap terjadinya *fraud*, mengevaluasi kecukupan pengendalian yang telah diterapkan, serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat guna memperkuat Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan meningkatkan efektivitas pengendalian risiko kecurangan.

Throughout 2025, these socialization activities were carried out in a phased and structured manner, involving not only Company personnel but also external stakeholders who interact with the Company. The activities conducted included the following:

1. Social Media Campaign Prior to National Anti-Corruption Day (HAKORDIA) 2025
   One of the initiatives undertaken by PMT Group to raise awareness of National Anti-Corruption Day (HAKORDIA), which is observed annually on December 9 as a reflection of the global commitment to preventing and combating corruption.
2. National Anti-Corruption Day (HAKORDIA) 2025 Social Media Campaign
   PMT Group commemorated National Anti-Corruption Day 2025 as an opportunity to reinforce integrity, transparency, and accountability in every business process. A culture of integrity, honesty, and responsibility serves as the foundation of our services to the nation.
3. "Guess the Picture" Quiz in Commemoration of HAKORDIA 2025 via Social Media
   To commemorate HAKORDIA 2025, PMT Group organized a "Guess the Picture" quiz, with the answers representing important elements of the National Anti-Corruption Day campaign.
4. Corporate Anti-Corruption Control Socialization by the Directorate of Investigation II of the Central BPKP
   In support of strengthening Good Corporate Governance and enhancing the effectiveness of fraud risk control within the Company, the Directorate of Finance and Risk Management organized a socialization program in collaboration with the Investigation Division of the Central BPKP.
5. Fraud Risk Assessment (FRA) for the Head Office and Belawan Branch Work Units in Collaboration with the Directorate of Investigation II of the Central BPKP
   Fraud Risk Assessment (FRA) is a systematic process for identifying, analyzing, and assessing potential fraud risks within an organization. The FRA aims to identify areas or activities that are vulnerable to fraud, evaluate the adequacy of existing controls, and formulate appropriate mitigation measures to strengthen Good Corporate Governance and improve the effectiveness of fraud risk management.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials' Asset Report (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai bagian dari entitas usaha BUMN, Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan transparansi. Salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan instrumen pelaporan kekayaan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kewajiban tersebut sejalan dengan amanat berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang memandatkan setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pejabat yang memiliki fungsi strategis, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural tertentu di lingkungan BUMN, diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini menyatakan bahwa KPK memiliki wewenang dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Perusahaan menegaskan bahwa LHKPN tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen moral dalam membangun budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan kerja. Melalui pelaporan yang dilakukan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu, Perusahaan mendukung upaya KPK dalam melakukan analisis, evaluasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara negara.

Dengan penerapan LHKPN yang konsisten, Perusahaan berharap dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE STATE OFFICIALS' ASSET REPORT

As part of a State-Owned Enterprise (SOE), the Company is committed to conducting all of its business activities in accordance with the applicable laws and regulations, including supporting efforts to prevent corruption and strengthen transparency. One tangible implementation of this commitment is the fulfillment of the obligation to submit the State Officials' Asset Report (LHKPN).

The LHKPN is an asset reporting instrument established by the Corruption Eradication Commission (KPK) through KPK Decree No. KEP-07/KPK/02/2005 concerning the Procedures for the Registration, Examination, and Publication of State Officials' Asset Reports.

This obligation is in line with the mandates of various regulations, including Law No. 28 of 1999 concerning State Officials Who Are Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, which requires every state official to report and disclose their assets before and after assuming office and to be willing to have their assets examined before and after holding office. Officials holding strategic positions, including members of Board of Commissioners, Board of Directors, and certain structural officials within SOEs, are required to submit their asset declarations.

Furthermore, Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission stipulates that the KPK is authorized to undertake corruption prevention measures through the registration and examination of LHKPN reports.

The Company emphasizes that the LHKPN is not merely an administrative obligation but also a moral commitment to fostering a culture of integrity and accountability within the workplace. Through honest, complete, and timely reporting, the Company supports the KPK's efforts to analyze, evaluate, and monitor the compliance of state officials.

Through the consistent implementation of the LHKPN, the Company expects to strengthen stakeholder confidence while fostering a more transparent, professional business environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Penerapan LHKPN oleh Perusahaan dilakukan berdasarkan beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

PELAKSANAAN LHKPN PERUSAHAAN

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan telah memiliki pedoman khusus terkait pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pedoman tersebut ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia.

Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mengatur mekanisme pelaporan, pedoman tersebut juga menetapkan pihak-pihak yang termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan Perusahaan diberlakukan untuk wajib lapor sebagai berikut:
   a. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
   b. Pejabat Struktural Perusahaan.
   c. Pekerja Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural pada Subholding, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, maupun Perusahaan Terafiliasi.

2. Kewajiban penyampaian LHKPN sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi ini juga diberlakukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, serta Pejabat Struktural pada Subholding, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

LEGAL BASIS AND REGULATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF LHKPN WITHIN THE COMPANY

The Company's implementation of the LHKPN is based on the following laws and regulations, which serve as the foundation for the implementation of LHKPN within the Company:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Officials Who Are Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, including its amendments.
4. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning the Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation.

IMPLEMENTATION OF LHKPN WITHIN THE COMPANY

As part of its commitment to transparency and the implementation of Good Corporate Governance, the Company has established specific guidelines governing the implementation of the State Officials' Asset Report (LHKPN). These guidelines were stipulated through the Board of Directors' Regulation No. HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 dated 20 December 2021 concerning the Guidelines for Asset Reporting for Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officials within PT Pelabuhan Indonesia.

These guidelines serve as the reference for the orderly, accountable, and compliant implementation of asset declaration obligations. In addition to regulating the reporting mechanism, the guidelines also specify the parties within the Company who are required to submit LHKPN reports, as follows:

1. The obligation to submit LHKPN within the Company applies to the following reporting parties:
   a. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
   b. The Company's Structural Officials;
   c. Company employees assigned as members of Board of Directors, Board of Commissioners, or Structural Officials within the Subholding, Subsidiaries, Sub-subdiaries, or Affiliated Companies.
2. The obligation to submit LHKPN as stipulated in this Board of Directors' Regulation also applies to Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officials of the Subholding, Subsidiaries, Sub-subdiaries, and Affiliated Companies appointed through their respective General Meetings of Shareholders (GMS) or through other mechanisms in accordance with the applicable regulations.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2025

Berikut disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2025:

TRANSPARENCY OF THE 2025 LHKPN SUBMISSION BY COMPANY OFFICIALS

The following presents the transparency of LHKPN submissions by the Company's reporting officials for 2025:

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat PMT Tahun 2025
Disclosure of the 2025 LHKPN Submission by PMT Officials

Pejabat Wajib LHKPN Officials Mandatory LHKPN	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Have Reported	
		Jumlah Amount	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	6	100,00
Direksi Board of Directors	6	6	100,00
Senior Vice President (1 Level di Bawah Direksi) Senior Vice President (1 Level below Board of Directors)	18	18	100,00
Pekerja Perusahaan yang ditugaskan sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan Employees of the Company assigned as Board of Commissioners and Board of Directors in Subsidiaries	16	16	100,00
Jumlah Total	**46**	**46**	**100,00**

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement Policy

Perusahaan menyadari bahwa proses pengadaan memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap potensi penyimpangan, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun suap. Oleh karena itu, Perusahaan telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/07/6/2/PGDN/DIRU/PLMT-24 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pedoman ini tidak hanya mengatur mekanisme dan tata cara pengadaan secara menyeluruh, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, khususnya terkait proses pengendalian pengadaan dan pengawasan terhadap penyedia eksternal. Standar yang diberlakukan pada pedoman tersebut bertujuan untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan secara objektif, profesional, dan terhindar dari benturan kepentingan, gratifikasi, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan penerapan kebijakan yang terstruktur dan berorientasi pada integritas, Perusahaan terus mendorong terciptanya proses pengadaan yang sehat, kompetitif, dan mampu mendukung keberlanjutan bisnis secara jangka panjang.

The Company recognizes that the procurement process carries a significant risk of potential irregularities, necessitating a transparent, accountable management system free from corruption and bribery. Therefore, the Company has established a procurement policy through Board of Directors Regulation No. HK.01/07/6/2/PGDN/DIRU/PLMT-24 dated June 7, 2024, concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelindo Multi Terminal and its technical implementation instructions.

These guidelines not only regulate the overall procurement mechanisms and procedures but also integrate the principles of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, particularly regarding procurement control processes and oversight of external providers. The standards applied in these guidelines aim to ensure that every procurement process is conducted objectively and professionally, and free from conflicts of interest, bribery, or other practices that conflict with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

By implementing structured, integrity-oriented policies, the Company continues to encourage a healthy, competitive procurement process that supports long-term business sustainability.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perusahaan. Kehadiran sistem ini mencerminkan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Perusahaan dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap etika bisnis.

WBS membuka ruang bagi seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang sehat dengan melaporkan dugaan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan etika, penyimpangan perilaku, pelanggaran tata tertib, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Sistem ini juga menjadi bagian dari dukungan Perusahaan terhadap semangat “Pelindo Bersih” yang diterapkan di lingkungan Pelindo Group.

WBS dirancang sebagai sarana pelaporan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor yang menyampaikan informasi secara bertanggung jawab dan didukung bukti yang memadai. Perusahaan memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan objektif, seraya menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Perusahaan juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan dugaan pelanggaran tanpa rasa khawatir terhadap potensi tekanan, diskriminasi, maupun tindakan balasan. Dengan budaya pelaporan yang sehat, Perusahaan berharap tercipta lingkungan kerja yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas di seluruh lini organisasi.

DASAR KEBIJAKAN

Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Perusahaan telah diatur secara jelas dalam Pedoman WBS yang mengacu pada Peraturan Direksi Nomor HK.01/4/3/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) PT Pelindo Multi Terminal.

LINGKUP KEBIJAKAN WBS

Terdapat 9 (sembilan) jenis pelanggaran yang dapat disampaikan dalam sistem WBS, di antaranya sebagai berikut:

1. Tindakan Curang (Tidak Adil)
   Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok Insan Perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

The Whistleblowing System (WBS) is a crucial instrument for strengthening the implementation of Good Corporate Governance within the Company. This system reflects the commitment of Board of Commissioners, Board of Directors, and all Company personnel to building a work culture that upholds integrity, transparency, and adherence to business ethics.

The WBS provides a platform for all parties to play an active role in maintaining a healthy work environment by reporting suspected violations, whether related to ethics, behavioral irregularities, violations of rules, or applicable legal provisions. This system also serves as part of the Company's support for "Clean Pelindo" spirit implemented within Pelindo Group.

The WBS is designed as a reporting tool and provides protection for whistleblowers who submit information responsibly and with sufficient evidence. The Company ensures that every report is followed up professionally and objectively, while maintaining the confidentiality of the whistleblower's identity.

The Company also emphasizes that every individual has the equal right to report alleged violations without fear of potential pressure, discrimination, or retaliation. With a healthy reporting culture, the Company hopes to create a work environment that is increasingly transparent, accountable, and based on integrity across all levels of the organization.

POLICY BASIS

The reporting mechanism for alleged violations within the Company has been clearly regulated in the WBS Guidelines which refer to the Board of Directors Regulation Number HK.01/4/3/3/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024 concerning PT Pelindo Multi Terminal Whistleblowing System (WBS) Guidelines.

SCOPE OF WBS POLICY

There are 9 (nine) types of violations that can be submitted in the WBS system, including the following:

1. Fraudulent Action (Unfair)
   Is an action taken by a person/group of Company personnel with the intention of benefiting themselves or others, by using a false name or false dignity, by deception or a series of lies or moving others to provide benefits to them in ways that are not true and against the law.

Contoh dari tindakan curang:
a. Menyetujui pemberian order kepada *supplier* yang memiliki «hubungan istimewa»;
b. Membayar atau tidak membayar vendor yang memiliki "hubungan istimewa", yang secara langsung-tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi vendor lain;
c. Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

2. Korupsi
Tindakan Insan Perusahaan, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki «hubungan istimewa» dengannya, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh dari tindakan korupsi:
a. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
b. Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;
c. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk aktivitas di luar kedinasan;
d. Menerima keuntungan (dalam bentuk apa pun) dari siapa pun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mereka terima.

3. Pencurian
Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

Contoh dari tindakan pencurian:
a. Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
b. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
c. Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia;
d. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/dokumen milik perusahaan dan/atau nasabah di lingkungan kerja.

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan
Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan Perusahaan:
a. Menjalankan tugas di luar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;

Examples of fraudulent acts:
a. Agreeing to give orders to suppliers who have a "special relationship";
b. Paying or not paying a vendor with a "special relationship", which directly or indirectly provides a commercial or other form of competitive advantage
c. Recruiting staff with whom one has a "special relationship", while there are better qualified candidates.

2. Corruption
The act of a Company personnel, who improperly and illegally enriches himself or enriches people who have a "special relationship" with him/her, by abusing the position and power entrusted to him/her.

Examples of acts of corruption:
a. Abusing power for personal or group interests;
b. Receiving benefits (e.g. money, gifts, hospitality) that conflict with the position's responsibilities;
c. Using the budget, assets, services and information of the Company and its Subsidiaries for non-duty activities;
d. Receiving benefits (in any form) from anyone other than the salary and allowances they are entitled to receive.

3. Theft
The activity/action of taking an item, which wholly or partially belongs to another person, with the intention to be unlawfully possessed (Criminal Code Article 362).

Examples of acts of theft:
a. Taking another person's property without the owner's consent;
b. Using another person's identity to obtain goods and services;
c. Selling objects and keeping the proceeds of the sale in secret;
d. Misusing/taking without reason money/goods/data/documents belonging to the Company and/or customers in the work environment.

4. Violation of Company Policies and Regulations Activities/actions carried out by the Company's personnel either intentionally or planned that are contrary to the Company's internal policies and regulations. Perpetrators of these violations may be threatened with sanctions according to applicable regulations, both internal and external.

Examples of violations of Company policies and regulations:
a. Carrying out duties outside the established procedures and instructions;

b. Membocorkan informasi Perusahaan seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
c. Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan perusahaan dan/atau nasabah dan/atau investor/calon investor;
d. Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/supplier yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan secara ekonomis.

5. Benturan Kepentingan
Sebuah situasi dan kondisi di mana Insan Perusahaan karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan.

Contoh dari tindakan benturan kepentingan:
a. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau *supplier*;
b. Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari vendor atau *supplier*, di mana seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di Perusahaan;
c. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa di mana Insan Perusahaan tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

6. Penyuapan/Gratifikasi
Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

b. Leaking Company information such as: regarding budgets, offers from suppliers, business strategies and so on to unauthorized people outside their authority;
c. Making and/or using and/or providing and/or changing and/or copying and/or duplicating data and/or information that is not in accordance with the truth so as to harm the Company and/or customers and/or investors/potential investors;
d. Providing credit facilities or extending the payment time of obligations to customers or vendors/suppliers that are indicated to violate the provisions and have the potential to harm the Company economically.

5. Conflict of Interest
A situation and condition in which Company personnel due to their position or position in the Company have the authority that has the potential to be misused intentionally or unintentionally for their personal interests, causing conflicts between personal and/or group and/or family interests and the economic interests of the Company.

These conditions can affect the quality of decisions on the duties mandated to him/her, so that the performance of the results of these decisions can be detrimental to the Company.

Examples of conflict of interest actions:
a. Receiving gifts in the form of money or entertainment from vendors or suppliers;
b. Receiving financial or non-financial assistance from vendors or suppliers, where a person or their spouse performs actions that have conflicting interests with business activities in the Company;
c. Granting a decision to appoint a particular party as a provider of goods/services where the Company's personnel have an economic interest in the appointed party.

6. Bribery/Gratification
An action/activity carried out intentionally and consciously accepting something or a promise, while he/she knows or reasonably can suspect that the provision of something or a promise is intended to make him/her do something or not do something in his/her duties that are contrary to his/her authority or obligations concerning the public interest (Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery).

Giving in a broad sense, which includes giving money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities {Article 128 of Law No. 20 of 2001 on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption).

Contoh dari tindakan penyuapan/gratifikasi:
a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis Perusahaan;
b. Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apa pun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis Perusahaan yang akan diambil.

Examples of bribery/gratuities:
a. Receiving direct or indirect rewards in any form from any party related to a business transaction of the Company;
b. Receiving benefits in any form that influence the Company's business judgment or decisions to be taken.

7. Penipuan
Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

7. Fraud
Activities/actions carried out intentionally and consciously with the intention to unlawfully benefit oneself or others, by using a false name or false dignity, by deception or a series of lies, moving others to hand over something to him/her or to give debts or write off receivables (Criminal Code Article 378).

Contoh dari tindakan penipuan:
a. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
b. Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;
c. Bekerja sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

Examples of acts of fraud:
a. A trick used by one party to cause the other party to sign the contract, whereas without such trick the other party would not have signed the contract;
b. Knowingly delivering a product that is in a defective condition resulting in financial loss;
c. Working alone or in collaboration with others to defraud a superior or the Company by using forged signatures or false invoices.

8. Pemerasan
Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

8. Extortion
Activities/actions carried out with the intention of unlawfully benefiting oneself or others, forcing a person by force or threat of force to give something that wholly or partially belongs to that person or another person or to create debts or eliminate receivables (Criminal Code Article 368).

Contoh dari tindakan pemerasan:
a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
b. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;
c. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

Examples of extortion:
a. Making unauthorized levies in any form whatsoever in carrying out their duties for the benefit of personal groups/other parties;
b. Requesting a sum of money or a gift to a prospective supplier in exchange for a job;
c. Requesting a sum of money or a gift to a customer as a substitute for a special service.

9. Penggelapan
Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (KUHP Pasal 372).

9. Embezzlement
Actions/activities carried out intentionally and knowingly against the law to possess something that wholly or partially belongs to another person, which is currently in his/her power not due to crime. (Criminal Code Article 372).

Contoh dari tindakan penggelapan:
a. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik

Examples of acts of embezzlement:
a. Intentionally and unlawfully possessing an object which wholly or partly belongs to a Company which

perusahaan yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.

b. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Mekanisme pelaporan dugaan penyimpangan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dilaksanakan secara terpusat pada entitas induk Perusahaan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan dapat dikelola secara terintegrasi, sesuai dengan komitmen "Pelindo Bersih".

Sebagai bagian dari penguatan sistem tersebut, Perusahaan juga membentuk Tim WBS yang bertugas mengelola implementasi manajemen *anti-fraud* serta memastikan efektivitas penerapan WBS di lingkungan Perusahaan. Tim ini ditetapkan oleh Direksi sebagai unit pelaksana yang berperan dalam menjaga integritas proses pelaporan serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.

Adapun susunan Tim WBS Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Ketua: SVP Sekretariat Perusahaan;
2. Wakil Ketua: SVP Satuan Pengawasan Intern;
3. Anggota: SVP Hukum, SVP Perencanaan dan Pengelolaan SDM, serta VP Tata Kelola, Hubungan Lembaga dan Investor.

Tim WBS Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Setiap anggota wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya;
2. Menerima laporan yang diteruskan Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan kepada Tim Whistleblowing System;
3. Memonitoring tindak lanjut atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan;
4. Menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan setelah laporan diteruskan Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan dan melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan;
5. Membuat laporan atas penyelesaian tindak lanjut laporan kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan;
6. Membuat program dalam mensosialisasikan penggunaan saluran *Whistleblowing System* kepada internal dan eksternal beserta perlindungan dan *reward* bagi pelapor;
7. Membuat laporan berkala atas sosialisasi.

is in his power either because of his position or not because of his position.

b. Committing dishonest acts by hiding Company goods/assets without the knowledge of the Company with the aim of owning, controlling or using for other purposes.

PARTIES MANAGING THE WBS

The Whistleblowing System (WBS) reporting mechanism for alleged irregularities is implemented centrally within the Company's parent entity. This arrangement aims to ensure that each report can be managed in an integrated manner, in accordance with the "Clean Pelindo" commitment.

As part of strengthening this system, the Company has also established a WBS Team tasked with managing the implementation of anti-fraud management and ensuring the effectiveness of WBS implementation within the Company. This team is appointed by the Board of Directors as an implementing unit responsible for maintaining the integrity of the reporting process and supporting the creation of a clean work environment free from irregularities.

The composition of the Company's WBS Team is as follows:
1. Chairman : SVP Internal Audit Unit
2. Vice Chairman : SVP Corporate Secretariat
3. Members: SVP Legal, SVP Human Capital Planning and Management, and VP Governance, Institutional and Investor Relations.

The Company's WBS team has the following duties and responsibilities:
1. Each member is required to sign an integrity pact to maintain confidentiality in carrying out their duties;
2. Receive reports forwarded by the Parent Company's Pelindo Bersih Committee to the Whistleblowing System Team;
3. Monitor the follow-up on reports forwarded by the Parent Company's Pelindo Bersih Committee;
4. Follow up and investigate reports forwarded by the Parent Company's Pelindo Bersih Committee within 30 (thirty) working days, assisted by the Parent Company's Pelindo Bersih Committee's Report Follow-up Team, and report the report to the Parent Company's Pelindo Bersih Committee;
5. Prepare a report on the completion of follow-up actions to the Parent Company's Pelindo Bersih Committee;
6. Create a program to socialize the use of the Whistleblowing System channel internally and externally, along with protection and rewards for whistleblowers;
7. Prepare periodic reports on the socialization.

Perusahaan juga dapat menunjuk pihak eksternal KAP atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan WBS Perusahaan. Proses penunjukan tersebut akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

MEDIA PELAPORAN WBS

Laporan dapat disampaikan melalui saluran milik Induk Perusahaan dengan salah satu cara di bawah ini:

1. Telepon
   Hotline dibuka selama 24 jam dalam 1 (satu) hari. Pelapor akan terhubung dengan operator *Contact Center* Pelindo Bersih yang akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tindakan dugaan penyimpangan. Layanan ini bersifat anonim. Pelapor tidak akan diminta untuk memberitahukan identitas kecuali Pelapor bersedia.
2. Faksimili
   Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai tindakan dugaan pelanggaran pada formulir yang tersedia.
3. SMS & WhatsApp
   Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam SMS Pelapor.
4. Surel
   Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam surel Pelapor. Untuk menjaga kerahasiaan identitas diri Pelapor, akan lebih baik jika Pelapor menggunakan surel pribadi Pelapor dalam membuat pelaporan melalui surel.
5. Situs Web Pelindo Bersih
   Untuk membuat laporan secara *online*, dapat dilakukan melalui *link* https://pelindobersih.pelindo.co.id/ pada menu "Membuat Laporan" yang terletak pada halaman *website* Pelindo Bersih.
6. Surat melalui PO BOX
   Pelapor dapat mengirimkan surat melalui PO BOX yang ditetapkan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir pada pedoman ini atau dapat diunduh pada situs web Pelindo Bersih.

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
2. Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan Perusahaan;
3. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi Perusahaan;
4. Manajemen akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.

Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal di bawah ini:

The Company may also appoint an external Public Accounting Firm (KAP) or other external party to handle the management of the Company's WBS. The appointment process will comply with applicable regulations.

WBS REPORTING MEDIA

Reports can be submitted through the Company's channels in one of the following ways:

1. Phone
   The hotline is open for 24 hours in 1 (one) day. The reporter will be connected to the Pelindo Bersih Contact Center operator who will ask several questions regarding the alleged irregularities. This service is anonymous, the Whistleblower will not be asked to reveal the identity unless the Whistleblower is willing.
2. Facsimile
   The whistleblower is asked to provide as much information as possible regarding the alleged violation on the available form.
3. SMS & Whatsapp
   The whistleblower is requested to provide as much information as possible in relation to the reported action in the whistleblower SMS.
4. Email
   The whistleblower is requested to provide as much information as possible in relation to the reported action in the whistleblower's email. To maintain the confidentiality of the Whistleblower's identity, it would be better if the Whistleblower uses the Whistleblower's personal email in making a report via email.
5. Pelindo Bersih Website
   To make a report online, it can be done through the link https://pelindobersih.whistleblowing.pelindo.co.id/ on the "Make a Report" menu located on the Pelindo Bersih website page.
6. Letter via PO BOX
   The whistleblower can send a letter via the designated PO BOX using the form as attached to this guideline or can be downloaded on the Pelindo Bersih website.

VIOLATION REPORTING AND HANDLING MECHANISM

Reports can be followed up if they meet the following criteria:

1. Included in the criteria for the types of violations that have been determined;
2. The report is an act of violation involving the Company's employees;
3. The report has an impact on the Company's performance and reputation;
4. Management will prioritize the follow-up of reports submitted by the Whistleblower who states his/her identity and is equipped with 2 (two) supporting evidence.

The report requirements must at least include the following:

1. Identitas Pelapor
   Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari Perusahaan dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan.
2. Uraian pelanggaran yang dilakukan dalam pelaporan sedikitnya memuat:
   a. Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktivitas Perusahaan;
   b. Lokasi kejadian;
   c. Waktu kejadian.
3. Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
4. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
   a. Bukti tertulis berupa dokumen, surat, kuitansi atau nota tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data atau surat elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
   b. Bukti tidak tertulis berupa saksi, rekaman suara (audio), rekaman visual atau gambar (video);
   c. Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan.

1. Whistle Blower's identity
   The Whistleblower must state his/her identity so that the Whistleblower can obtain protection from the Company and will facilitate the follow-up of the report in the event that additional data is needed.
2. Description of violations committed with the reporting at least contains:
   a. Problems: The violation complained of is a violation related to the Company's activities;
   b. Location of the incident;
   c. Time of the incident.
3. Data on the reported party and other parties involved and their units (if any);
4. Supporting documents and/or other evidence including, but not limited to the following:
   a. Written evidence in the form of documents, letters, receipts or invoice notes set forth on paper or in the form of data or electronic mail that can be read and legally proven;
   b. Non-written evidence in the form of witnesses, sound recordings (audio), visual recordings or images (video);
   c. Other evidence in accordance with applicable provisions.
5. Complaints that will be processed further are events that occurred within the last 3 (three) years from the report receipt date by the Company's Pelindo Bersih Committee.

ALUR PROSES PELAPORAN WBS

Setelah Pelapor melaporkan, laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Komite Pelindo Bersih Induk Perusahan dengan alur sebagai berikut:

WBS REPORTING PROCESS FLOW

After the Whistleblower submits a report, the report will be reviewed and followed up by the Parent Company's Pelindo Bersih Committee, through the following process:

No	Terlapor Reported	Diteruskan kepada Forwarded to
1	Komisaris Utama President Commissioner	1. Pemegang Saham (Dengan sepengetahuan Direktur Utama Perusahaan) 2. Tembusan: Direktur Utama Induk Perusahaan 1. Shareholders (With the knowledge of the Company's President Director) 2. Copy: President Director of the Parent Company
2	1. Direktur Utama; 2. Anggota Dewan Komisaris; 3. Komite dan Sektetaris Dewan Komisaris 1. President Director; 2. Members of Board of Commissioners; 3. Committees and Secretary of Board of Commissioners.	1. Komisaris Utama Perusahaan 2. Tembusan: Direktur Utama Induk Perusahaan 1. President Commissioner of the Company 2. Copy: President Director of the Parent Company
3	1. Direksi (selain Direktur Utama); 2. Komisaris Utama Anak Perusahaan; 3. Direktur Utama Anak Perusahaan; 4. Pekerja. 1. Directors (other than the President Director); 2. President Commissioner of a Subsidiary; 3. President Director of a Subsidiary; 4. Employees.	1. Direktur Utama Perusahaan 2. Tembusan: Direktur Utama Induk 3. Perusahaan 1. President Director of the Company 2. Copy: President Director of the Parent Company

No	Terlapor Reported	Diteruskan kepada Forwarded to
4	1. Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan; 2. Direksi Anak Perusahaan (selain Direktur Utama); 3. Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris Direksi Anak Perusahaan; 4. Komisaris Utama Perusahaan Afiliasi; 5. Direktur Utama Perusahaan Afiliasi; 6. Pekerja Anak Perusahaan. 1. Members of Board of Commissioners of a Subsidiary; 2. Directors of a Subsidiary (other than the President Director); 3. Committees and Secretary of Board of Commissioners of a Subsidiary; 4. President Commissioner of an Affiliated Company; 5. President Director of an Affiliated Company; 6. Employees of a Subsidiary.	1. Direktur Utama Anak Perusahaan 2. Tembusan: Direktur Utama Perusahaan 1. President Director of Subsidiary 2. Copy: President Director of the Company
5	1. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terafiliasi; 2. Direksi Perusahaan Terafiliasi (selain Direktur Utama); 3. Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris; 4. Pekerja Perusahaan Terafiliasi. 1. Members of Board of Commissioners of an Affiliated Company; 2. Directors of an Affiliated Company (other than the President Director); 3. Committees and Secretary of Board of Commissioners; 4. Employees of an Affiliated Company.	1. Direktur Utama Perusahaan Terafiliasi 2. Tembusan: Direktur Utama Anak Perusahaan 1. President Director of Affiliated Company 2. Copy: President Director of Subsidiary

PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN

1. Pengelolaan *Whistleblowing System* Pelindo Bersih Induk Perusahaan dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh pihak ketiga independen termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan;
2. Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;
3. Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan identifikasi laporan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan dapat meminta persetujuan Direktur Utama Induk Perusahaan untuk pelaksanaan investigasi oleh fungsi Satuan Pengawasan Intern;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan;
8. Terhadap pengaduan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama atau Direktur lainnya Induk Perusahaan, Tim Whistleblowing System Perusahaan melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
9. Hasil investigasi yang telah dibahas dan disepakati bersama Tim Whistleblowing System Perusahaan disampaikan kepada Direktur Utama Perusahaan dan/atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi investigasi;

WHISTLEBLOWING REPORT HANDLING PROCEDURES

1. The management of Pelindo Bersih Whistleblowing System at the Parent Company is supported by an External Administrator, which is an independent third party. The third party is responsible for receiving reports, administering them, and confirming the completeness of the reports before forwarding them to Pelindo Bersih Committee of the Parent Company.
2. Pelindo Bersih Committee of the Parent Company verifies the reports submitted by the Whistleblower to determine whether they meet the reporting requirements and criteria.
3. Pelindo Bersih Committee of the Parent Company then formulates the results of the verification and identification of the report.
4. The verification results are documented in a verification report prepared systematically, concisely, clearly, and accountably, containing conclusions supported by relevant evidence and recommendations for follow-up actions.
5. Verification techniques are confidential and fall within the authority of Pelindo Bersih Committee of the Parent Company, applying proportionality principles according to the substance of the reported matter.
6. If further investigation is required, Pelindo Bersih Committee of the Parent Company may request the approval of President Director of the Parent Company for an investigation to be conducted by Internal Audit Unit.
7. If a report does not meet the required criteria, Pelindo Bersih Committee of the Parent Company will not proceed with further action, and the report will be archived in the complaint records.
8. For reports that have received approval from President Director or another Director of the Parent Company, the Company's Whistleblowing System Team follows up in accordance with its duties and authority.
9. Investigation results that have been discussed and agreed upon by the Company's Whistleblowing System Team are submitted to the Company's President Director and/or the relevant parties for follow-up based on the evaluation results.

10. Kepada pihak Terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner. Tim *Whistleblowing System* Perusahaan melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan;
11. Direksi Perusahaan tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan di luar Tim Indisipliner dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan terutama untuk menjaga nama baik perusahaan dan efektivitas penanganan pengaduan, tetapi tetap memberikan sanksi apabila terbukti bersalah.

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Penerapan budaya yang transparan, jujur, dan didukung komunikasi yang terbuka menjadi komitmen Perusahaan. Oleh karena itu, Insan Perusahaan dan seluruh Stakeholder diimbau sekaligus diwajibkan untuk menyampaikan laporan melalui sistem yang independen apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran kepatuhan. Pelaporan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun *Stakeholder* atas dugaan pelanggaran turut mendukung terciptanya lingkungan kerja dan bisnis yang bersih serta kondusif bagi seluruh pihak yang berinteraksi dan bertransaksi. Selain itu, pelaporan tersebut juga berkontribusi dalam meminimalkan terjadinya tindakan curang, pencurian, dan korupsi di lingkungan kerja Perusahaan.

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR/*WHISTLEBLOWER*

Perusahaan menempatkan aspek perlindungan pelapor sebagai salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS). Komitmen ini diwujudkan melalui jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diwajibkan dalam rangka proses hukum atau penyidikan oleh pihak berwenang. Pada saat yang sama, identitas Terlapor juga tetap dijaga kerahasiaannya selama proses penanganan laporan berlangsung.

Laporan yang disampaikan tanpa mencantumkan identitas tetap akan diterima dan ditindaklanjuti. Namun demikian, setiap laporan akan terlebih dahulu dianalisis dari sisi kesungguhan isi, kelengkapan bukti pendukung, tingkat kredibilitas informasi, serta kemungkinan untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut.

Perusahaan juga memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, serta dari tindakan intimidasi, tekanan, hukuman, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak mana pun atas laporan atau kesaksian yang disampaikan, baik yang akan, sedang, maupun telah diberikan. Perlindungan ini tidak berlaku apabila laporan terbukti disampaikan tanpa itikad baik atau mengandung unsur kesengajaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

10. Reported Parties found guilty may be subject to sanctions in accordance with the Company's regulations and/or the applicable laws and regulations. Such sanctions may be imposed by the Employee Discipline Team. The Company's Whistleblowing System Team reports the outcome to Pelindo Bersih Committee of the Parent Company.
11. The Company's Board of Directors retains the authority to take actions beyond those of the Employee Discipline Team by considering the Company's interests, particularly in safeguarding the Company's reputation and ensuring the effectiveness of complaint handling, while still imposing sanctions if wrongdoing is proven.

OBLIGATION TO REPORT VIOLATIONS

The Company is committed to implementing a culture of transparency, honesty, and open communication. Therefore, Company personnel and all stakeholders are encouraged and required to submit reports through an independent system if they become aware of any suspected compliance violations. Reporting of suspected violations by Company personnel and stakeholders contributes to the creation of a clean and conducive work and business environment for all parties interacting and transacting. Furthermore, such reporting also contributes to minimizing fraud, theft, and corruption in the Company's workplace.

CONFIDENTIALITY AND PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company places whistleblower protection as one of the fundamental principles in implementing its Whistleblowing System (WBS). This commitment is reflected in the guarantee of the confidentiality of the Whistleblower's identity, except where disclosure is required for legal proceedings or investigations conducted by the competent authorities. At the same time, the identity of the Reported Party is also kept confidential throughout the report handling process.

Reports submitted anonymously will still be accepted and processed. However, each report will first be assessed based on the seriousness of its content, the completeness of supporting evidence, the credibility of the information provided, and the possibility of conducting further clarification.

The Company also provides protection to Whistleblowers against all forms of legal claims, whether criminal or civil, as well as against intimidation, coercion, punishment, or any unfavorable treatment by any party arising from reports or testimony that have been, are being, or will be provided. Such protection does not apply if the report is proven to have been submitted in bad faith or contains deliberate falsehoods contrary to the applicable provisions.

Selain itu, Perusahaan juga menjamin perlindungan Pelapor dari berbagai potensi risiko lain yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari penyampaian laporan, sebagai berikut:
1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
3. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan. Perusahaan juga memberikan hak kepada Pelapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepetingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Perusahaan membuka ruang apresiasi bagi Pelapor yang menyampaikan laporan pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS), khususnya apabila laporan tersebut dapat dibuktikan dan berkontribusi dalam mencegah potensi kerugian Perusahaan. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila Pelapor turut terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan.

Sebagai bentuk penghargaan, Pelapor yang tidak terlibat dalam pelanggaran dan memberikan kontribusi nyata melalui laporan yang valid dapat menerima apresiasi dari Perusahaan. Apresiasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Komite Pelindo Bersih Induk Perusahaan.

Pemberian apresiasi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan yang dilaporkan terbukti benar berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan;
2. Tidak terlibat dalam indikasi pelaporan yang dilaporkan;
3. Mencantumkan identitas diri saat melakukan pelaporan.

Perlakuan terhadap Pelapor *Whistleblowing System* yang terlibat dalam indikasi pelanggaran:
1. Perusahaan dapat memberikan perlakuan khusus kepegawaian kepada *Whistleblower* yang beritikad baik. Perlakuan khusus ini diberikan kepada *Whistleblower* yang terlibat secara sukarela maupun dipaksa dalam pelanggaran, namun kemudian beritikad baik untuk melaporkan pelanggaran tersebut;
2. Perlakuan khusus akan diberikan apabila yang bersangkutan dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga auditor dapat mengungkap tindakan indikasi pelanggaran yang dimaksud secara efektif;
3. Atas bantuannya tersebut, terhadap yang bersangkutan dapat dipertimbangkan rekomendasi pemberian keringanan pengenaan sanksi kepegawaian;

In addition, the Company protects Whistleblowers from other potential risks that may arise as a consequence of submitting a report, including:
1. Unfair dismissal;
2. Demotion without clear justification; and
3. Adverse records in the employee's personal file.

The Company safeguards the interests of Whistleblowers and provides legal assistance before and after the completion of proceedings related to the reported matter. The Company also grants Whistleblowers the right to participate in selecting and determining the form of protection and legal assistance, provided that such arrangements do not conflict with the Company's regulations.

REWARDS AND SANCTIONS

The Company provides recognition to Whistleblowers who submit reports through the Whistleblowing System (WBS), particularly where such reports are substantiated and contribute to preventing potential losses to the Company. However, this provision does not apply where the Whistleblower is involved in the reported violation.

As a form of appreciation, Whistleblowers who are not involved in the violation and who make a meaningful contribution through valid reports may receive recognition from the Company. Such recognition may take the form of a certificate or other forms of appreciation determined by Pelindo Bersih Committee of the Parent Company.

Recognition is granted based on the following criteria:
1. The reported allegation is proven to be valid based on the investigation results;
2. The Whistleblower is not involved in the reported violation; and
3. The Whistleblower discloses their identity when submitting the report.

Treatment of Whistleblowers Involved in Reported Violations
1. The Company may provide special employment treatment to Whistleblowers acting in good faith. Such treatment may be granted to individuals who were voluntarily or involuntarily involved in a violation but subsequently reported the violation in good faith.
2. Special treatment may be granted if the individual provides significant information and evidence enabling auditors to effectively uncover the alleged violation.
3. Based on such assistance, the individual may be considered for a recommendation to receive a reduction in employment sanctions.

4. Pemberian keringanan pengenaan sanksi kepegawaian terhadap yang bersangkutan merupakan kewenangan Tim Indisipliner Kepegawaian sesuai lingkup unit kerja dan tingkatan jabatan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atas rekomendasi hasil penyelidikan.

Setiap anggota Tim WBS maupun pihak lain yang mengungkapkan identitas Pelapor, informasi mengenai pelanggaran yang dilaporkan, atau informasi lain yang berkaitan dengan laporan WBS akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku di Perusahaan.

PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2025 DAN PENANGANANNYA

Sepanjang periode 1 Januari hingga Desember Tahun 2025, Terdapat 1 (satu) laporan/pengaduan yang disampaikan melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti secara tuntas oleh Tim Whistleblowing System PT Pelindo Multi Terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dituangkan dalam Surat kepada Group Head Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: SK.01.01/27/7/1/HLTK/SKTR/PLMT-25 tanggal 27 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

4. The authority to grant a reduction in employment sanctions rests with the Employee Discipline Team, in accordance with the relevant work unit and the position level of the employee committing the disciplinary violation, based on the recommendations resulting from the investigation.

Any member of the WBS Team or other party who discloses the identity of the Whistleblower, information regarding the reported violation, or other information related to the WBS report will be subject to sanctions in accordance with the Company's disciplinary provisions.

WHISTLEBLOWING REPORTS AND THEIR RESOLUTION IN 2025

During the period from January 1 to December 2025, 1 (one) report/complaint was submitted through the Whistleblowing System (WBS) channel within PT Pelindo Multi Terminal. The report was fully investigated and resolved by PT Pelindo Multi Terminal Whistleblowing System Team in accordance with the applicable provisions, as documented in the Letter to Group Head of Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/27/7/1/HLTK/SKTR/PLMT-25 dated July 27, 2025 concerning the Submission of the Follow-up Report on Whistleblowing System Complaints within PT Pelindo Multi Terminal.

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Perusahaan senantiasa menjalankan seluruh kegiatan dan aktivitas operasionalnya dengan berpedoman pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap lini organisasi.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam praktik governansi korporat. Hal tersebut mencakup tidak adanya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Direksi maupun Dewan Komisaris, tidak terdapat kejadian pencemaran lingkungan, tidak ada permohonan pailit, serta tidak terjadi pembekuan terhadap kegiatan usaha utama Perusahaan maupun peristiwa lain yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional.

Capaian ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjaga integritas, kepatuhan, serta kesinambungan operasional secara berkelanjutan.

The Company consistently conducts all of its business activities and operations in accordance with the applicable laws and regulations. Such compliance constitutes an essential part of maintaining business sustainability while ensuring the implementation of Good Corporate Governance principles throughout the organization.

Throughout 2025, the Company identified no indications of misconduct in its corporate governance practices. This includes the absence of corruption cases involving members of Board of Directors or Board of Commissioners, no incidents of environmental pollution, no bankruptcy petitions, no suspension of the Company's core business activities, and no other events that could disrupt the continuity of its operations.

This achievement reflects the Company's commitment to maintaining integrity, compliance, and sustainable business continuity.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2025, tidak ada laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES CAUSING ENVIRONMENTAL POLLUTION

Throughout 2025, there were no reports of Company activities causing environmental pollution.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, termasuk dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tanpa keterlambatan. Perusahaan turut memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak atas berbagai aktivitas usaha, dengan total setoran pajak secara konsolidasian mencapai Rp499.708.610.818.

Dalam menjaga kesinambungan kepatuhan fiskal, Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengelolaan perpajakan. Selain itu, Perusahaan juga secara aktif membangun komunikasi yang konstruktif dengan otoritas perpajakan guna memastikan seluruh pelaporan dan pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Perusahaan tidak memiliki catatan putusan bersalah dari pengadilan pajak atas perkara perpajakan apa pun. Hal ini menjadi salah satu indikator konsistensi Perusahaan dalam menjaga kepatuhan serta kualitas pengelolaan administrasi perpajakan.

Pengelolaan kepatuhan pajak tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan risiko dan tata kelola keuangan Perusahaan. Lebih jauh, hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mendukung akuntabilitas fiskal serta berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pembangunan nasional.

DISCLOSURE OF TAX COMPLIANCE

Throughout 2025, the Company fulfilled all of its tax obligations in a timely manner, including the submission of all Tax Returns (SPT) without delay. The Company also contributed to the State through tax payments arising from its various business activities, with total consolidated tax payments amounting to Rp499,708,610,818.

In maintaining sustainable tax compliance, the Company applies the prudence principle in all tax management processes. In addition, the Company actively maintains constructive communication with the tax authorities to ensure that all tax reporting and payments are carried out in accordance with the applicable regulations.

During the past 3 (three) years, the Company has not been subject to any adverse rulings by the tax court in relation to any tax disputes. This serves as one of the indicators of the Company's consistent commitment to maintaining compliance and ensuring the quality of its tax administration.

The Company views tax compliance not merely as an administrative obligation but also as an integral part of its risk management strategy and financial governance. Furthermore, this reflects the Company's commitment to supporting fiscal accountability and making sustainable contributions to national development.

Pembayaran Pajak 2025 (Konsolidasian)
2025 Tax Payments (Consolidated)

No	Jenis Pajak Tax Type	Jumlah Pembayaran Payment Amount
1	PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	115.136.935.052
2	PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	56.677.784.492
3	PPh Pasal 4 Ayat 2 Income Tax Article 4 Paragraph 2	6.814.643.674
4	PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	349.125.705
5	PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	1.310.728.769
6	PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	93.096.305.578
7	Pajak Pertambahan Nilai Kurang (Lebih) Bayar Value Added Tax Underpayment (Overpayment)	154.082.619.154

Pembayaran Pajak 2025 (Konsolidasian)
2025 Tax Payments (Consolidated)

No	Jenis Pajak Tax Type	Jumlah Pembayaran Payment Amount
8	Bea Meterai Stamp Duty	443.600.000
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land and Building Tax (PBB)	38.383.874.220
10	Konsesi Concession	30.339.459.073
11	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (PPh) Tax Underpayment Assessment Letter (Income Tax)	60.547.938
12	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (PPN) Tax Underpayment Assessment Letter (Value Added Tax)	3.003.697.296
14	Surat Tagihan Pajak (PPh) Tax Bill (PPh)	9.289.867
Jumlah Total		**499.708.610.818**

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN/ATAU KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak mencatat adanya kasus ketenagakerjaan yang melibatkan buruh maupun karyawan. Seluruh pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan operasional dan usaha telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga memastikan penerapan standar praktik ketenagakerjaan, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja secara konsisten di seluruh lini operasional.

CASES RELATED TO LABOR AND/OR EMPLOYEES

As of the end of 2025, the Company did not record any employment-related cases involving laborers or employees. All Human Capital management in operational and business activities has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. In addition, the Company also ensures the consistent implementation of labor practices, occupational health, and occupational safety standards across all operational lines.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTASI KEUANGAN (SAK)

Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs resmi Perusahaan, telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak.

NON-COMPLIANCE IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The Company's digital Annual Report, whether submitted to Shareholders and Stakeholders or uploaded to the Company's official website, is consistent with the printed Annual Report.

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Implementation of the Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI)

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners				
	1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors			
		1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: 1. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; 2. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; 3. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carried out the leadership role and strives to achieve the following governance results: 1. Competitive and focused on long-term performance; 2. Ethical and responsible in running business; 3. Contribute positively to society and the environment; as well as ability to survive and grow (corporate resilience)	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors embodies high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of ethics that creates a corporate culture of integrity.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors fosters a corporate culture that ensures that employees understand their responsibility to behave in accordance with corporate values and high standards of business ethics.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities. The Board of Directors has a clear strategic plan in implementing corporate social and environmental responsibility.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guideline	**Uraian** Description	***Apply or Explain***	**Keterangan Penerapan** Implementation
		1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
	1.1.2		Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of cutting-edge technologies to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that encompasses innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operations supervision.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors encourages innovation that enhances long-term value creation for the business in a changing environment. Such innovation may include designing innovative business models, products and services, promoting research, improving production and operation processes, and collaborating with partners.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
	1.1.3		Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.1.4		Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.4.1	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. The Board of Directors ensures that each person involved in the preparation and disclosure of corporate information has the relevant knowledge, skills and experience, reflected among others by the relevant professional certification issued by a reputable institution. In addition, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: 1. Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; 2. Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; 3. Pendapat Komite Audit; 4. Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving the disclosure of information (including periodic financial information disclosure), the Board of Directors considers all of the following factors: 1. Results of the evaluation of the adequacy of the design and effectiveness of the implementation of internal control systems; 2. External auditor's opinion on financial statements, observations on internal control systems, and other observations through other sources; 3. Audit Committee's opinion; 4. Consistency with objectives, strategies, and policies.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report commenting on the Quarterly Financial Statements and publishes it alongside the Quarterly Financial Statements to benefit investors and analysts who will review the corporate fundamentals and financial performance.	x	PMT bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga tidak menerbitkan laporan komentar manajemen atas Laporan Keuangan Triwulanan yang dipublikasikan khusus bagi investor pasar modal. PMT is not a publicly listed company and therefore does not issue a management commentary report on Quarterly Financial Statements for capital-market investors.
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.		√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. The sustainability report is prepared based on a reporting framework that is appropriate to the size and complexity of the corporation and meets national and or global standards.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.1.6		Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establish a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
		1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/ HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
	1.1.7		Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporate that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	x	Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sehingga ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah tidak relevan diterapkan. The Company does not conduct business based on Sharia principles, so provisions regarding a Sharia Supervisory Board are not applicable.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.1.8		Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Board of Directors' Charter or by Board of Directors' Decree.	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, berpedoman pada Kode Etik Bisnis PMT (Perdir No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), memastikan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan efektif, integritas pelaporan keuangan (diaudit KAP Purwantono, Susanti & Surja dengan opini wajar tanpa pengecualian), serta penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025. The Board of Directors exercises its leadership role under the Articles of Association and GMS resolutions, guided by PMT's Business Code of Conduct (BoD Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24), ensures effective risk management and internal control, financial reporting integrity (audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja with an unqualified opinion), and the preparation of the 2025 Sustainability Report.
	1.1.9		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	x	Belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai pengunduran diri Direksi akibat kejahatan keuangan; apabila terjadi, penanganannya akan mengikuti ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. There is no specific written policy on the resignation of Directors due to financial crimes; should such a case occur, it will be handled in accordance with Company provisions and applicable regulations.
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Directors and Members				
	1.2.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	√	Kinerja Direksi dinilai secara kolegial melalui Kontrak Manajemen tahunan berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan RUPS RKAP tanggal 24 Januari 2025. Board of Directors performance is assessed collegially through an annual KPI-based Management Contract established by the RKAP GMS of January 24, 2025.
		1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. The results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners to be assessed and if necessary adjusted with the Board of Commissioners' assessment.	√	Kinerja Direksi dinilai secara kolegial melalui Kontrak Manajemen tahunan berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan RUPS RKAP tanggal 24 Januari 2025. Board of Directors performance is assessed collegially through an annual KPI-based Management Contract established by the RKAP GMS of January 24, 2025.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policy is based on specific, measurable, achievable, and relevant assessment benchmarks as determined by the Board of Commissioners based on the consideration of the Nomination and Remuneration Committee and as a basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the level of success of the Corporation in achieving performance targets. The selected benchmarks are included in the employment agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	√	Kinerja Direksi dinilai secara kolegial melalui Kontrak Manajemen tahunan berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan RUPS RKAP tanggal 24 Januari 2025. Board of Directors performance is assessed collegially through an annual KPI-based Management Contract established by the RKAP GMS of January 24, 2025.
		1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. Remuneration schemes in the form of shares granted to Directors, Commissioners and employees must be approved by shareholders.	x	Perusahaan belum memiliki skema remunerasi berbasis saham bagi Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan sehingga ketentuan persetujuan pemegang saham atas skema tersebut belum relevan diterapkan. The Company does not yet have a share-based remuneration scheme for Directors, Commissioners, or employees, so shareholder-approval provisions for such schemes are not yet applicable.
		1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a director's term of office is based on the results of a satisfactory performance evaluation of his or her contribution.	x	Perpanjangan masa jabatan Direktur mengikuti mekanisme RUPS berdasarkan Anggaran Dasar dan belum secara eksplisit dikaitkan semata-mata pada hasil evaluasi kinerja individual sebagai dasar perpanjangan. Extension of a Director's term follows the GMS mechanism under the Articles of Association and is not yet explicitly and solely linked to individual performance-evaluation outcomes.
	1.2.2		Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	√	Kinerja Direksi dinilai secara kolegial melalui Kontrak Manajemen tahunan berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan RUPS RKAP tanggal 24 Januari 2025. Board of Directors performance is assessed collegially through an annual KPI-based Management Contract established by the RKAP GMS of January 24, 2025.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the performance evaluation of the President Director is based on pre-determined criteria that have been communicated to him/her in advance. The criteria or performance evaluation should incentivize the President Director to perform his/her role in supporting the achievement of corporate objectives and sustainable value creation.	√	Kinerja Direksi dinilai secara kolegial melalui Kontrak Manajemen tahunan berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan RUPS RKAP tanggal 24 Januari 2025. Board of Directors performance is assessed collegially through an annual KPI-based Management Contract established by the RKAP GMS of January 24, 2025.
		1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee conducts an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results (including areas of development) of the performance evaluation to the President Director.	√	Kinerja Direksi dinilai secara kolegial melalui Kontrak Manajemen tahunan berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan RUPS RKAP tanggal 24 Januari 2025. Board of Directors performance is assessed collegially through an annual KPI-based Management Contract established by the RKAP GMS of January 24, 2025.
		1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee approves the performance evaluation criteria of other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on predetermined performance evaluation criteria.	√	Kinerja Direksi dinilai secara kolegial melalui Kontrak Manajemen tahunan berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan RUPS RKAP tanggal 24 Januari 2025. Board of Directors performance is assessed collegially through an annual KPI-based Management Contract established by the RKAP GMS of January 24, 2025.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners				
	1.3.1		Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
	1.3.2		Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
	1.3.3		Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, group and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.3.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
	1.3.5		Dewan Komisaris: 1. Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; 2. Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners: 1. Submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; 2. Periodically review the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
	1.3.6		Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervises the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.6.1	Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The Board of Commissioners ensures periodic evaluation of the implementation of corporate governance policies either independently or using independent external consultants.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.3.7		Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners supervises and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.7.1	Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (*risk appetite*) korporasi. The Board of Commissioners understands the nature and scope of the Corporation's principal risks, and regularly reviews and approves the Corporation's risk appetite.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: 1. Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (*risk appetite*) korporasi; 2. Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (*early warning signals*) atas risiko material; 3. Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that: 1. The establishment and implementation of risk management policies are consistent with the corporate objectives, targets, strategies, and risk appetite; 2. Risk management policies can provide early warning signals for material risks; 3. Risk management policies are reviewed periodically, for example, annually.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input so that key risks are identified through consideration of internal and external factors.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks are assessed, and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of the corporation's risk management and internal control systems.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
	1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.		√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial statements, the Board of Commissioners receives statements from the President Director and Director of Finance of the corporation, stating that in their opinion, the entity's financial records have been managed properly and the financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards, fairly presenting the corporate financial position and performance. They further assert that their opinions are formed based on a properly designed and effectively implemented internal control and risk management system.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.3.9		Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners supervises, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
	1.3.10		Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
	1.3.11		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	x	Belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris akibat kejahatan keuangan; penanganannya akan mengikuti ketentuan Perusahaan dan peraturan yang berlaku apabila terjadi. There is no specific written policy on the resignation of Board of Commissioners members due to financial crimes; such cases, if they occur, will be handled in accordance with Company provisions and applicable regulations.
	1.3.12		Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: 1. Mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; 2. Dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; 3. Mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, then the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or a senior Independent Commissioner (if there is more than one Independent Commissioner) to fulfill the role of the President Commissioner for tasks that may pose a potential conflict of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner are as follows: 1. Capable of delivering opinions/ arguments constructively to the President Commissioner ; 2. Compared to other commissioners, possesses greater knowledge about the corporation, including its performance, markets, and stakeholders; 3. Capable of providing balanced perspectives on issues and concerns from the majority shareholders.	x	Ketentuan mengenai penunjukan Komisaris Independen senior untuk menggantikan peran Komisaris Utama pada isu yang berpotensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi belum diatur secara spesifik. Provisions on appointing a senior Independent Commissioner to assume the President Commissioner's role on matters involving potential conflicts of interest with affiliated parties have not been specifically established.
		1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengananggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; 3. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan 4. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In fulfilling the role as a member of the Board of Commissioners, the Independent Commissioner is expected to: 1. Act in the best interest of the corporation; 2. Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or controlling shareholders; 3. Independently consider the viewpoints of minority shareholders and other stakeholders; and 4. dEncourage dialogue between management, shareholders, and other stakeholders.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation discloses the reason for the end of the independent commissioner's duties that occurred before the end of the term of office.	x	Perusahaan belum memiliki ketentuan baku mengenai pengungkapan alasan berakhirnya masa tugas Komisaris Independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The Company does not yet have standard provisions for disclosing the reasons for an Independent Commissioner's early departure before the end of their term.
	1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.		√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and the corporation's website.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
		1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among the members of the Board of Commissioners, chairs Board of Commissioners meetings and represents the Board of Commissioners in dealings with external parties.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioner. There is a 2 (two) year gap to be re-appointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/ Member of the Board of Directors should be appointed as President Commissioner, the Board of Commissioners shall provide reasons and explanations in the Annual Report.	√	Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporat. The Board of Commissioners oversees the Company's management by the Board of Directors, monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and oversees the corporate disclosure and communication process.
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation				
	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.		√	Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit (33 kali rapat sepanjang 2025, kehadiran rata-rata 100%), Komite Nominasi Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko, masing-masing memiliki piagam tersendiri. The Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee (33 meetings in 2025, average attendance of 100%), the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee, each governed by its own charter.
		1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. For committees not required by regulations, if the corporation does not have such a committee, it discloses this fact and discloses the process used to ensure that the functions of the committee are carried out by the Board of Commissioners as appropriate.	√	Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit (33 kali rapat sepanjang 2025, kehadiran rata-rata 100%), Komite Nominasi Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko, masing-masing memiliki piagam tersendiri. The Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee (33 meetings in 2025, average attendance of 100%), the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee, each governed by its own charter.
	1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.		√	Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit (33 kali rapat sepanjang 2025, kehadiran rata-rata 100%), Komite Nominasi Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko, masing-masing memiliki piagam tersendiri. The Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee (33 meetings in 2025, average attendance of 100%), the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee, each governed by its own charter.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semuas wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. The Committee has a charter that clearly defines its role and grants it all the authority necessary to carry out its role. These powers include, among others, the right to obtain information, meet with relevant parties in connection with the performance of its duties (with or without management present), and seek advice from independent external consultants/experts if the committee deems it necessary.	√	Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit (33 kali rapat sepanjang 2025, kehadiran rata-rata 100%), Komite Nominasi Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko, masing-masing memiliki piagam tersendiri. The Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee (33 meetings in 2025, average attendance of 100%), the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee, each governed by its own charter.
	1.4.3		Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	√	Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit (33 kali rapat sepanjang 2025, kehadiran rata-rata 100%), Komite Nominasi Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko, masing-masing memiliki piagam tersendiri. The Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee (33 meetings in 2025, average attendance of 100%), the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee, each governed by its own charter.
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and Members				
	1.5.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees and each individual commissioner.	√	Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun melalui mekanisme *self-assessment* berbasis indikator individu dan kolektif, dengan hasil disampaikan sebagai bagian dari laporan kepada RUPS. Board of Commissioners performance is assessed annually through a self-assessment mechanism based on individual and collective indicators, with results reported as part of the GMS reporting.
		1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners may have a self-assessment policy to assess its performance as a Board as a whole.	√	Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun melalui mekanisme *self-assessment* berbasis indikator individu dan kolektif, dengan hasil disampaikan sebagai bagian dari laporan kepada RUPS. Board of Commissioners performance is assessed annually through a self-assessment mechanism based on individual and collective indicators, with results reported as part of the GMS reporting.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policy is based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable, and relevant and in accordance with those set by the Board of Commissioners.	√	Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun melalui mekanisme *self-assessment* berbasis indikator individu dan kolektif, dengan hasil disampaikan sebagai bagian dari laporan kepada RUPS. Board of Commissioners performance is assessed annually through a self-assessment mechanism based on individual and collective indicators, with results reported as part of the GMS reporting.
		1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a Commissioner's term of office is based on the results of a satisfactory performance evaluation of his or her contribution.	√	Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun melalui mekanisme *self-assessment* berbasis indikator individu dan kolektif, dengan hasil disampaikan sebagai bagian dari laporan kepada RUPS. Board of Commissioners performance is assessed annually through a self-assessment mechanism based on individual and collective indicators, with results reported as part of the GMS reporting.
		1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners engages an independent external consultant periodically, at least once during the term of office, to facilitate an objective and honest evaluation of the Board of Commissioners' performance.	x	Dewan Komisaris belum melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala untuk memfasilitasi evaluasi kinerjanya; penilaian kinerja saat ini dilakukan melalui mekanisme *self-assessment*. Board of Commissioners has not yet engaged independent external consultants on a regular basis to facilitate its performance evaluation; performance assessment is currently conducted through a self-assessment mechanism.
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest				

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.6.1		Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of Board of Directors who have concurrent positions outside the Corporation, must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of committee that carries out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporation, other directorships or other positions with significant time commitments	x	PMT bukan merupakan perusahaan terbuka dan merupakan Badan Usaha Milik Negara, sehingga ketentuan mengenai persetujuan Dewan Komisaris atas rangkap jabatan Direksi di korporasi terbuka lain tidak sepenuhnya relevan diterapkan. PMT is not a publicly listed company and is a state-owned enterprise, so provisions on Board of Commissioners' approval of Directors' concurrent positions at other listed corporations are not fully applicable.
		1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.	x	Perusahaan belum memiliki kebijakan dan pedoman tertulis khusus mengenai batasan jumlah dan jenis rangkap jabatan Direksi di korporasi lain. The Company does not yet have specific written policies and guidelines on the permissible number and type of Directors' concurrent positions at other corporations.
	1.6.2		Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	√	Benturan kepentingan dikelola melalui prinsip kemandirian (independensi) dalam Pedoman GCG dan Kode Etik Bisnis, yang mewajibkan pengungkapan dan pengelolaan benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris di seluruh lini organisasi. Conflicts of interest are managed through the independence principle in the GCG Guidelines and Business Code of Conduct, which require disclosure and management of conflicts of interest by the Board of Directors and Board of Commissioners across all levels of the organization.
		1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest do not participate in decision making related to the conflict of interest (abstain).	√	Benturan kepentingan dikelola melalui prinsip kemandirian (independensi) dalam Pedoman GCG dan Kode Etik Bisnis, yang mewajibkan pengungkapan dan pengelolaan benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris di seluruh lini organisasi. Conflicts of interest are managed through the independence principle in the GCG Guidelines and Business Code of Conduct, which require disclosure and management of conflicts of interest by the Board of Directors and Board of Commissioners across all levels of the organization.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya. Each member of the Board of Commissioners informs the Board of Directors and the Board of Commissioners immediately if there is a potential conflict of interest, including as a result of his/her position as a consultant or officer in a customer company, suppliers, creditors, or other business partners.	√	Benturan kepentingan dikelola melalui prinsip kemandirian (independensi) dalam Pedoman GCG dan Kode Etik Bisnis, yang mewajibkan pengungkapan dan pengelolaan benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris di seluruh lini organisasi. Conflicts of interest are managed through the independence principle in the GCG Guidelines and Business Code of Conduct, which require disclosure and management of conflicts of interest by the Board of Directors and Board of Commissioners across all levels of the organization.
		1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors immediately disclose their potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision-making in the event that they have a conflict of interest.	√	Benturan kepentingan dikelola melalui prinsip kemandirian (independensi) dalam Pedoman GCG dan Kode Etik Bisnis, yang mewajibkan pengungkapan dan pengelolaan benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris di seluruh lini organisasi. Conflicts of interest are managed through the independence principle in the GCG Guidelines and Business Code of Conduct, which require disclosure and management of conflicts of interest by the Board of Directors and Board of Commissioners across all levels of the organization.
		1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. In its report, the Board of Commissioners informs the GMS of any material conflicts of interest that occur and their treatment. Material conflicts of interest that are not merely temporary in nature may result in termination of office as a board member.	√	Benturan kepentingan dikelola melalui prinsip kemandirian (independensi) dalam Pedoman GCG dan Kode Etik Bisnis, yang mewajibkan pengungkapan dan pengelolaan benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris di seluruh lini organisasi. Conflicts of interest are managed through the independence principle in the GCG Guidelines and Business Code of Conduct, which require disclosure and management of conflicts of interest by the Board of Directors and Board of Commissioners across all levels of the organization.
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Development for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners				

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	1.7.1		Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, corporate characteristics and operations, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	√	Direksi, Dewan Komisaris, dan organ pendukung (Komite, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan) secara rutin mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh lembaga eksternal. The Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs (Committees, Internal Audit Unit, Corporate Secretary) regularly participate in training and competency development programs, organized both internally and by external institutions.
		1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program and all information relevant to their roles and responsibilities.	√	Direksi, Dewan Komisaris, dan organ pendukung (Komite, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan) secara rutin mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh lembaga eksternal. The Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs (Committees, Internal Audit Unit, Corporate Secretary) regularly participate in training and competency development programs, organized both internally and by external institutions.
		1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and sustainable training and knowledge development programs.	√	Direksi, Dewan Komisaris, dan organ pendukung (Komite, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan) secara rutin mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh lembaga eksternal. The Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs (Committees, Internal Audit Unit, Corporate Secretary) regularly participate in training and competency development programs, organized both internally and by external institutions.
		1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi The Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive accurate, timely and clear information on the latest developments in relevant laws, regulations and standards, other applicable obligations, risk factors, and the corporate business environment.	√	Direksi, Dewan Komisaris, dan organ pendukung (Komite, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan) secara rutin mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh lembaga eksternal. The Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs (Committees, Internal Audit Unit, Corporate Secretary) regularly participate in training and competency development programs, organized both internally and by external institutions.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners				
	2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors			
		2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunersi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: 1. Identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. Lama masa jabatan; 6. Kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan 7. Setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information about director candidates must be disclosed during the nomination/re-nomination process and must be available from the date of the notice of the GMS until the holding of the GMS and can be downloaded through the Company's website and/or e-RUPS, including: 1. Candidate's identity and reasons for appointment; 2. Core competencies, qualifications, and professional background; 3. Current positions in other corporations, as well as significant roles in non-profit/ charitable organizations; 4. Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; 5. Term of office duration; 6. Attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); and 7. any share ownership in the corporation.	x	Pengungkapan informasi calon Direksi melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka; informasi calon Direksi disampaikan melalui mekanisme RUPS. Disclosure of Board of Directors candidate information via a listed company's website and/or e-GMS is not applicable, as PMT is not a publicly listed company; candidate information is instead conveyed through the GMS mechanism.
		2.1.2.2	Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi. The composition of the Board of Directors is such that its members as a group reflect the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		2.1.2.3	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors considers the corporate condition and effectiveness in decision-making.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.2.4	Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi. There should be at least one director who has prior experience in the main sector in which the corporation operates.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.2.5	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting, reflected, among others, from professional certification issued by a government-recognized accounting professional association and are registered as members of the professional association.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	2.1.3		Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The Corporation reports in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets and the progress made in achieving those targets. The information should include reference to how diversity is achieved through appropriate succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
	2.1.4.		Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	x	Kebijakan dan prosedur seleksi dan nominasi Dewan Komisaris mengikuti mekanisme RUPS dan Peraturan Menteri BUMN, namun belum dituangkan sebagai kebijakan tertulis independen yang secara eksplisit mengatur transparansi proses nominasi Dewan Komisaris. Policies and procedures for the selection and nomination of Board of Commissioners follow the GMS mechanism and Minister of SOE Regulations, but have not yet been set out as a standalone written policy explicitly governing the transparency of the Commissioner nomination process.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: 1. Identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. Lama masa jabatan; 6. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan 7. Setiap kepemilikan saham dalam korporasi Information about commissioner candidates must be disclosed during the nomination/ re-nomination process and must be available from the date of the notice of the GMS until the holding of the GMS and can be downloaded through the Company's website and/or e-RUPS, including: 1. Candidate's identity and reasons for appointment; 2. Core competencies, qualifications, and professional background; 3. Current positions in other corporations, as well as significant roles in non-profit/ charitable organizations; 4. Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; 5. Term of office duration; 6. Attendance at Board of Commissioners meetings (except for new Commissioners); and 7. any share ownership in the corporation.	x	Sama seperti pencalonan Direksi, pengungkapan informasi calon Komisaris melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. As with Director nominations, disclosure of Commissioner candidate information via a listed company's website and/or e-GMS is not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. If the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, relevant information regarding the independent external consultant is disclosed in the annual report, including information regarding independence and conflict of interest.	x	Dewan Komisaris tidak menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi Komisaris pada tahun 2025. Board of Commissioners did not use independent external consultants in the Commissioner nomination process in 2025.
	2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.		√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	2.1.6.		Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi At least one Commissioner has prior experience in the main sector in which the corporation operates	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. The determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the corporation.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	2.1.7.		Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence. from a corporate perspective.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.7.1	Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former President Directors/Members of the Board of Directors may join the Board of Commissioners as Independent Commissioners only in exceptional circumstances and there must be a gap of at least 2 (two) years between such positions.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.
		2.1.7.2	Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former Independent Commissioners may be reappointed as Independent Commissioners only in exceptional circumstances and there must be a gap of at least 2 (two) years between such positions.	x	Perusahaan belum memiliki kebijakan tertulis mengenai jeda waktu minimal bagi mantan Komisaris Independen sebelum dapat diangkat kembali. The Company does not yet have a written policy on the minimum gap period before a former Independent Commissioner may be reappointed.
		2.1.7.3	Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris. The term of office of the Independent Commissioner may not exceed the time limit of 9 (nine) years. For corporations with a 5 (five) year term of office, the term of office may not exceed 10 (ten) years. After nine/ten years, an Independent Commissioner may continue to serve only as Commissioner.	x	Perusahaan belum memiliki ketentuan tertulis mengenai batas maksimal masa jabatan Komisaris Independen (9-10 tahun). The Company does not yet have a written provision on the maximum tenure limit for Independent Commissioners (9–10 years).

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	2.1.8.		Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	x	Proses penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dan mekanisme RUPS, namun formalisasinya sebagai proses yang secara eksplisit ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi belum sepenuhnya didokumentasikan. The process for appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners refers to the Minister of SOE Regulations and the GMS mechanism, but its formalization as a process explicitly established by the Nomination and Remuneration Committee has not been fully documented.
		2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: a. Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya; b. Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut; 2. Secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris; 3. Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; 4. Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	√	Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; belum terdapat kebijakan tertulis khusus mengenai keberagaman komposisi, namun kesesuaian kompetensi dengan sektor kepelabuhanan tetap menjadi perhatian. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined through GMS Resolutions/Circular Resolutions of Shareholders, taking into account business complexity and management needs; there is no specific written diversity policy yet, but alignment of competencies with the port sector remains a key consideration.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guideline	**Uraian** Description	***Apply or Explain***	**Keterangan Penerapan** Implementation
			The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not limited to: 1. Developing guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to the corporation to effectively fulfill their responsibilities. These guidelines include: a. In appointing the President Commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a specific job description, including time commitment requirements, which also consider time commitment needs during crises. Any significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment and disclosed in the annual report. Any changes in commitments must be promptly reported to the Board of Commissioners, and their impact explained in the subsequent annual report. b. In appointing member of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee establishes the terms and conditions of their appointment. These terms and conditions are available for examination. Expected time commitments should be included in the appointment letter of the Commissioners, and Commissioners must have sufficient time to meet these expected time commitments. Any significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment, along with indications of the required time commitments, and the Board of Commissioners must be informed of any changes to these commitments. 2. Proactively leading and being responsible for the development, implementation, and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and the Board of Commissioners. 3. Upholding the principle of independence in dealing with conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in carrying out committee tasks. 4. Considering and being responsible for appointing independent nomination consultants, including selection and terms of appointment, and disclosing the identity and consultancy fees.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners				
	2.2.1		Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.
		2.2.1.1.	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. Remuneration policies are reasonable and fair, both in structure and amount, and are determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourage competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.
		2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The Corporation has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and aligned with the achievement of the long-term interests of the corporation, such as the following performance measures: stock options, deferred bonuses, provision for the return of part or all of the bonus/ incentive that has been paid (clawback).	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive any other facilities beyond those already granted under the corporation's General Meeting of Shareholders.	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.
	2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.		√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.
		2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. The remuneration of the Board of Commissioners must be a fixed remuneration. If members of the Board of Commissioners are given performance-related remuneration, the basis for granting must be related to the long-term development of the corporation and different from members of the Board of Directors.	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.
		2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners may not receive stock options, performance-linked shares or bonuses.	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	2.2.3		Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.
		2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: 1. Menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan; 2. Mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; 3. Secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; 4. Mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; 5. Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; 6. Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	√	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan asuransi purna jabatan) ditetapkan melalui Keputusan RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners (salary/honorarium, allowances, facilities, and post-employment insurance) is established through GMS Resolutions referring to the Minister of SOE Regulations, and is disclosed in the Annual Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
			In carrying out its role, the Nomination and Remuneration Committee: 1. Determines the appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related remuneration components, whether paid directly or deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of long-term corporate performance. Remuneration incentives are ensured to be in line with corporate risk policies. Additionally, there is a setting of upper limits for remuneration, and these upper limits are disclosed in the annual report. 2. Considers whether directors and commissioners qualify for annual bonuses and/or allowances with long-term incentive schemes. 3. Carefully considers compensation obligations (including pension contributions and all other components) that are due to Directors/Commissioners if terminated early. The aim is to avoid rewarding poor performance. 4. Considers the consequences of pension obligations and other long-term benefits for Directors and Commissioners for the corporation, including the impact of increases in such compensation and other changes, especially for Directors and Commissioners nearing retirement. 5. Upholds the principle of independence in dealing with conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in carrying out committee tasks. 6. Considers and is responsible for appointing independent remuneration consultants, including selection and terms of appointment, and disclosing the identity and consultancy fees.		
3.	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	3.1 Sifat Hubungan Kerja Nature of Working Relationship				
		3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	√	Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris difasilitasi oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung utama, dengan mekanisme kerja diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman GCG Perusahaan. The working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is facilitated by the Corporate Secretary as the primary liaison, with working mechanisms set out in the Board Manual and the Company's GCG Guidelines.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	3.1.2		Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	√	Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris difasilitasi oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung utama, dengan mekanisme kerja diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman GCG Perusahaan. The working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is facilitated by the Corporate Secretary as the primary liaison, with working mechanisms set out in the Board Manual and the Company's GCG Guidelines.
	3.1.3		Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	√	Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris difasilitasi oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung utama, dengan mekanisme kerja diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman GCG Perusahaan. The working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is facilitated by the Corporate Secretary as the primary liaison, with working mechanisms set out in the Board Manual and the Company's GCG Guidelines.
		3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: 1. Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; 2. memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; 3. Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; 4. Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/ Komisaris/anggota komite; 5. Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/ investor, baik lokal maupun asing.	√	Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris difasilitasi oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung utama, dengan mekanisme kerja diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman GCG Perusahaan. The working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is facilitated by the Corporate Secretary as the primary liaison, with working mechanisms set out in the Board Manual and the Company's GCG Guidelines.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
			The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: 1. Ensuring good information flow between the Board of Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; 2. monitoring the development of corporate governance, including ensuring that the charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees are fully implemented, assisting and advising the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations; 3. Managing all meeting needs of the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Directors with the Board of Commissioners, committees established by the Board of Commissioners, attending and recording minutes of all meetings and facilitating communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners meetings are accurately recorded in the minutes; 4. Organize and facilitate orientation of new Directors/Commissioners/committee members and professional development of Directors/Commissioners/committee members; 5. Manage investor relations activities to maintain and improve communication between the corporation and shareholders/investors, both local and foreign.		
		3.1.3.2	Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya. Each Director and Commissioner can communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.	√	Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris difasilitasi oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung utama, dengan mekanisme kerja diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman GCG Perusahaan. The working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is facilitated by the Corporate Secretary as the primary liaison, with working mechanisms set out in the Board Manual and the Company's GCG Guidelines.
		3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners gives consideration to the Board of Directors in the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.	√	Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris difasilitasi oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung utama, dengan mekanisme kerja diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman GCG Perusahaan. The working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is facilitated by the Corporate Secretary as the primary liaison, with working mechanisms set out in the Board Manual and the Company's GCG Guidelines.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
3.2	Akses informasi Dewan Komsaris Access to Information on the Board of Commissioners				
	3.2.1		Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	√	Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Perusahaan untuk memperoleh akses informasi dan data Perusahaan yang diperlukan. Each member of the Board of Directors and Board of Commissioners may communicate directly with the Corporate Secretary to obtain access to the Company's information and data as needed.
		3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process that enables members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and relevant senior management.	√	Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Perusahaan untuk memperoleh akses informasi dan data Perusahaan yang diperlukan. Each member of the Board of Directors and Board of Commissioners may communicate directly with the Corporate Secretary to obtain access to the Company's information and data as needed.
		3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners of major events that are material and important regarding the condition and performance and management of the corporation. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss the event.	√	Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Perusahaan untuk memperoleh akses informasi dan data Perusahaan yang diperlukan. Each member of the Board of Directors and Board of Commissioners may communicate directly with the Corporate Secretary to obtain access to the Company's information and data as needed.
		3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners liaises regularly with the Board of Directors to keep them informed of corporate developments that require the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can perform its duties more effectively.	√	Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Perusahaan untuk memperoleh akses informasi dan data Perusahaan yang diperlukan. Each member of the Board of Directors and Board of Commissioners may communicate directly with the Corporate Secretary to obtain access to the Company's information and data as needed.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation				
	3.3.1		Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	√	Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, dalam pengelolaan dan operasi Perusahaan. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the Company's shareholding structure, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, in managing the Company's operations.
		3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and inter-shareholder relationships of the corporation, and consider their impact on control of the corporation, including written and unwritten family agreements as controlling shareholders, agreements between shareholders, or policies of the business group of which the corporation is a part.	√	Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, dalam pengelolaan dan operasi Perusahaan. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the Company's shareholding structure, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, in managing the Company's operations.
		3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and inter-shareholder relationships of the corporation do not affect the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, (including in relation to the succession plan of the Board of Directors) in the best interest of the corporation.	√	Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, dalam pengelolaan dan operasi Perusahaan. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the Company's shareholding structure, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, in managing the Company's operations.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is properly disclosed when there are conditions that impact control over the corporation.	√	Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, dalam pengelolaan dan operasi Perusahaan. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the Company's shareholding structure, namely PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, in managing the Company's operations.
4.	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and Responsible Behavior				
	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conduct				
	4.1.1		Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: 1. Act in the best interests of the corporation; 2. Act honestly and with high standards of integrity; 3. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and care; 4. Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; 5. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines;	√	Pedoman Kode Etik Bisnis ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024, dan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan mulai dari karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, hingga organ pendukung lainnya. The Business Code of Conduct is established under Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024, and applies to all Company personnel, from employees, Directors, and Commissioners, to other supporting organs.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
			6. Not be involved or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation; 7. Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers; 8. Not take advantage of his position or the opportunities resulting from his position for personal gain; 9. Avoid the act of requesting or receiving from a third party payments, gratuities or other benefits for oneself or for another person which creates a conflict of interest/ provides benefits to a third party in violation of statutory regulations; 10. Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. 11. Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.		
	4.1.2		Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and anti-money laundering and terrorism financing terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with (antifraud), involvement in politics by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other relevant standards. other relevant standards.	√	Pedoman Kode Etik Bisnis ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024, dan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan mulai dari karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, hingga organ pendukung lainnya. The Business Code of Conduct is established under Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/ DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024, and applies to all Company personnel, from employees, Directors, and Commissioners, to other supporting organs.
		4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and establishes a system that can be used as an effort to prevent money laundering and terrorism financing, anti-corruption, offering or accepting bribes and other payments or inducements to perform acts that violate laws and regulations or are unethical.	√	Pedoman Kode Etik Bisnis ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024, dan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan mulai dari karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, hingga organ pendukung lainnya. The Business Code of Conduct is established under Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/ DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024, and applies to all Company personnel, from employees, Directors, and Commissioners, to other supporting organs.
		4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption policies by providing training to staff as well as working to extend anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption efforts to stakeholders.	√	Pedoman Kode Etik Bisnis ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024, dan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan mulai dari karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, hingga organ pendukung lainnya. The Business Code of Conduct is established under Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/ DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024, and applies to all Company personnel, from employees, Directors, and Commissioners, to other supporting organs.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material violation of the anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption policies must be informed to the Board of Directors and the Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.	√	Pedoman Kode Etik Bisnis ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024, dan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan mulai dari karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, hingga organ pendukung lainnya. The Business Code of Conduct is established under Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024, and applies to all Company personnel, from employees, Directors, and Commissioners, to other supporting organs.
		4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political engagement, which includes lobbying and donations to political causes or candidates where permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored and regularly reviewed by the Board of Commissioners.	√	Pedoman Kode Etik Bisnis ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 tanggal 4 Maret 2024, dan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan mulai dari karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, hingga organ pendukung lainnya. The Business Code of Conduct is established under Board of Directors Regulation No. HK.01/4/3/4/HLTK/DIRU/PLMT-24 dated March 4, 2024, and applies to all Company personnel, from employees, Directors, and Commissioners, to other supporting organs.
4.2	Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture				
	4.2.1		Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilainilai korporasi Corporations articulate, grow and express corporate culture and values	√	Budaya perusahaan dibangun di atas prinsip TARIFT (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, dan *Trust*) yang terintegrasi dengan nilai ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan) dan AKHLAK. Corporate culture is built on the TARIFT principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trust), integrated with the ETAK values (Ethics, Transparency, Accountability, Sustainability) and AKHLAK.
		4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku The Corporation fosters a corporate culture that ensures that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities to behave in accordance with the code of ethics and conduct.	√	Budaya perusahaan dibangun di atas prinsip TARIFT (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, dan *Trust*) yang terintegrasi dengan nilai ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan) dan AKHLAK. Corporate culture is built on the TARIFT principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trust), integrated with the ETAK values (Ethics, Transparency, Accountability, Sustainability) and AKHLAK.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi. There is adequate training and socialization at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees of the above-mentioned corporations for all aspects related to corporate culture, values and ethics.	√	Budaya perusahaan dibangun di atas prinsip TARIFT (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, dan *Trust*) yang terintegrasi dengan nilai ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan) dan AKHLAK. Corporate culture is built on the TARIFT principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trust), integrated with the ETAK values (Ethics, Transparency, Accountability, Sustainability) and AKHLAK.
		4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There is an assessment and monitoring program in place so that all Directors, Board of Commissioners, and all employees of the corporation understand the relevant code of conduct and apply it effectively to avoid the corporation's involvement in inappropriate behavior.	√	Budaya perusahaan dibangun di atas prinsip TARIFT (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, dan *Trust*) yang terintegrasi dengan nilai ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan) dan AKHLAK. Corporate culture is built on the TARIFT principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trust), integrated with the ETAK values (Ethics, Transparency, Accountability, Sustainability) and AKHLAK.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values and Culture				
	4.3.1		Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	√	Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara aktif dan berkala kepada seluruh Insan Perusahaan; pelanggaran dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola independen, dengan sanksi ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Code of Conduct socialization is carried out actively and periodically for all Company personnel; violations are reported through the independently managed Whistleblowing System (WBS), with sanctions enforced in accordance with applicable provisions.
		4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. Corporations have whistleblowing guidelines that can be used to encourage the reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical, which also includes a guideline on how the corporation protects good faith whistleblowers.	√	Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara aktif dan berkala kepada seluruh Insan Perusahaan; pelanggaran dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola independen, dengan sanksi ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Code of Conduct socialization is carried out actively and periodically for all Company personnel; violations are reported through the independently managed Whistleblowing System (WBS), with sanctions enforced in accordance with applicable provisions.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and committees are promptly notified of any material breach of the code of ethics and conduct.	√	Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara aktif dan berkala kepada seluruh Insan Perusahaan; pelanggaran dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola independen, dengan sanksi ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Code of Conduct socialization is carried out actively and periodically for all Company personnel; violations are reported through the independently managed Whistleblowing System (WBS), with sanctions enforced in accordance with applicable provisions.
		4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are promptly notified of any material incidents reported under the whistleblowing policy.	√	Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara aktif dan berkala kepada seluruh Insan Perusahaan; pelanggaran dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola independen, dengan sanksi ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Code of Conduct socialization is carried out actively and periodically for all Company personnel; violations are reported through the independently managed Whistleblowing System (WBS), with sanctions enforced in accordance with applicable provisions.
		4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan. Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary action, including dismissal. If there is a violation, the Board of Directors must take preventive action so that the violation does not recur.	√	Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara aktif dan berkala kepada seluruh Insan Perusahaan; pelanggaran dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola independen, dengan sanksi ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Code of Conduct socialization is carried out actively and periodically for all Company personnel; violations are reported through the independently managed Whistleblowing System (WBS), with sanctions enforced in accordance with applicable provisions.
5.	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control, and Compliance				
	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance				
	5.1.1		Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	√	Sistem Pengendalian Internal berpedoman pada Peraturan Direksi No. HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21, mencakup lima komponen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), dan pada tahun 2025 tidak ditemukan permasalahan material. The Internal Control System is guided by Board of Directors Regulation No. HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21, covering five components (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring), and no material issues were identified in 2025.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: 1. Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; 2. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya; 3. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; 4. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan 5. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Periodic reviews conducted by the Board of Directors specifically consider: 1. Changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; 2. The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, the role of internal audit functions, and other assurance providers; 3. The coverage and frequency of communication of monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) enabling them to comprehensively assess the condition of internal controls and their effectiveness in risk management; 4. Occurrence of failures or deficiencies in internal controls found during the reviewed period and the extent of contingency impacts that have occurred, can occur, or may occur in the future, materially affecting the corporation's financial condition or performance; and 5. The effectiveness of internal controls related to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.	√	Sistem Pengendalian Internal berpedoman pada Peraturan Direksi No. HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21, mencakup lima komponen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), dan pada tahun 2025 tidak ditemukan permasalahan material. The Internal Control System is guided by Board of Directors Regulation No. HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21, covering five components (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring), and no material issues were identified in 2025.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		5.1.1.2.	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function responsible for continuously monitoring changes in various applicable laws and regulations related to its operations and regulations in general, and has a system to ensure the corporation's compliance with applicable laws and regulations and internal corporate regulations.	√	Sistem Pengendalian Internal berpedoman pada Peraturan Direksi No. HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21, mencakup lima komponen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan), dan pada tahun 2025 tidak ditemukan permasalahan material. The Internal Control System is guided by Board of Directors Regulation No. HK-01/27/12/2/MPPI/DIRU/PLMT-21, covering five components (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring), and no material issues were identified in 2025.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management				
	5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.		√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model.* Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines Model.
		5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and being a role model in terms of controlling and managing risks in business and operational activities to instill, strengthen, and develop a risk-aware culture based on compliance and effective internal controls.	√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model.* Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines of Defense model.
		5.2.1.2	Direksi mengungkapkan: 1. risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan 2. apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors discloses: 1. the key risks faced by the corporation and their management; and 2. whether there are material exposures to environmental or social risks, and if so, how these risks are managed or the intentions regarding managing the risks.	√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model.* Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines Model.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guideline	**Uraian** Description	***Apply or Explain***	**Keterangan Penerapan** Implementation
		5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksanaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures the alignment of the internal control system and risk management framework with the characteristics of the corporation's needs and business processes so that the processes of internal control and risk management for all types of risks faced by the corporation, including communication and reporting on risks, risk management, its examination, and effectiveness, can be effectively implemented in line with stakeholders' expectations.	√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model.* Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines Model.
		5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan *cyber*, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures that the risk governance process in Information Technology, including disruptions, cyber security, and disaster recovery, is in place to ensure that all key risks are identified, managed, and reported to the Board of Commissioners.	√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model.* Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines Model.
	5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.		√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model.* Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines Model.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: 1. memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; 2. memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (*fraud risk*); 3. mereviu setiap kejadian material yang melibatkan *fraud* atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa *dating*; 4. menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; 5. menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; 6. menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan 7. mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. The role of the Risk Management Monitoring Committee includes: 1. Monitoring corporate performance against the risk management framework, including ensuring that the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; 2. Monitoring controls over key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; 3. Reviewing any material events involving fraud or significant weaknesses in corporate risk controls, and extracting lessons learned to prevent recurrence in the future; 4. Receiving reports from the internal auditor on the adequacy of the corporate risk management processes; 5. Receiving reports from management on new and emerging risk sources and the risk controls and mitigation measures implemented by the Board of Directors to address those risks; 6. Formulating recommendations to the Board of Commissioners regarding changes to the entity's risk management framework or the risk appetite approved by the Board of Commissioners; and 7. Overseeing the corporate insurance program, taking into account corporate business and insurable risks.	√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model*. Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines Model.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent. Among its members, there are individuals with the necessary technical expertise and adequate understanding of the industry in which the entity operates, enabling them to fulfill the committee's mandate effectively.	√	Manajemen risiko dikelola melalui *roadmap* penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) 2022-2026, dengan skor Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2025 sebesar 84,80 (kategori *Fair*) dan penerapan *Three Lines Model.* Risk management is guided by the 2022–2026 Enterprise Risk Management (ERM) strengthening roadmap, with a 2025 Risk Management Implementation Quality (KPMR) score of 84.80 (Fair category) and the implementation of a Three Lines Model.
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance				
	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.		x	Perusahaan belum memiliki sistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi secara formal dalam satu kerangka kerja tunggal, meskipun fungsi governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan masing-masing telah berjalan. The Company does not yet have a formally integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) system within a single framework, although the governance, risk management, and compliance functions each operate individually.
		5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directos ensures coordination and enhancement of capabilities among the main GRC systems, which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management, and internal audit systems, to keep the corporation on track towards achieving its goals.	x	Koordinasi formal antar sistem GRC (governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal) belum dituangkan sebagai satu kerangka kerja terintegrasi. Formal coordination among the GRC systems (governance, strategy management, performance management, risk management, compliance, and internal audit) has not yet been set out as a single integrated framework.
	5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.		x	Pemisahan fungsi kepatuhan agar tidak merangkap fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan belum diatur secara eksplisit dalam satu kebijakan tersendiri. Separation of the compliance function from duties that could give rise to conflicts of interest has not yet been explicitly set out in a standalone policy.
5.4.	Audit Internal Internal Audit				

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	5.4.1		Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	√	Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsinya berpedoman pada Piagam Audit Internal (Perdir No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), melapor kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, serta berkoordinasi rutin dengan Komite Audit. The Internal Audit Unit (SPI) carries out its function guided by the Internal Audit Charter (BoD Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), reporting to the President Director and/or Board of Commissioners, and coordinating regularly with the Audit Committee.
		5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audits are conducted objectively and independently from corporate management and the functions they audit. Therefore, Internal Audit functionally reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and the Board of Commissioners, and can communicate and meet directly with the Audit Committee and the Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	√	Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsinya berpedoman pada Piagam Audit Internal (Perdir No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), melapor kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, serta berkoordinasi rutin dengan Komite Audit. The Internal Audit Unit (SPI) carries out its function guided by the Internal Audit Charter (BoD Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), reporting to the President Director and/or Board of Commissioners, and coordinating regularly with the Audit Committee.
		5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners through the audit committee ensures that the internal audit function has the authority, resources, and access to adequate information to perform its role effectively.	√	Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsinya berpedoman pada Piagam Audit Internal (Perdir No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), melapor kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, serta berkoordinasi rutin dengan Komite Audit. The Internal Audit Unit (SPI) carries out its function guided by the Internal Audit Charter (BoD Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), reporting to the President Director and/or Board of Commissioners, and coordinating regularly with the Audit Committee.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of Head of Internal Audit, the scope of work, and the budget for the Internal Audit function.	√	Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsinya berpedoman pada Piagam Audit Internal (Perdir No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), melapor kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, serta berkoordinasi rutin dengan Komite Audit. The Internal Audit Unit (SPI) carries out its function guided by the Internal Audit Charter (BoD Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), reporting to the President Director and/or Board of Commissioners, and coordinating regularly with the Audit Committee.
		5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal. The Audit Committee reviews the effectiveness of the internal audit implementation and evaluates the performance of Internal Audit annually, presenting the results to the Board of Commissioners. Every three years, considering the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of Internal Audit.	√	Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsinya berpedoman pada Piagam Audit Internal (Perdir No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), melapor kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, serta berkoordinasi rutin dengan Komite Audit. The Internal Audit Unit (SPI) carries out its function guided by the Internal Audit Charter (BoD Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), reporting to the President Director and/or Board of Commissioners, and coordinating regularly with the Audit Committee.
		5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. The internal audit creates an audit plan, involving the President Director, the Board of Commissioners with the consideration of the Audit Committee. The internal audit plan is presented to the Board of Directors and the Board of Commissioners for approval.	√	Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsinya berpedoman pada Piagam Audit Internal (Perdir No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), melapor kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, serta berkoordinasi rutin dengan Komite Audit. The Internal Audit Unit (SPI) carries out its function guided by the Internal Audit Charter (BoD Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), reporting to the President Director and/or Board of Commissioners, and coordinating regularly with the Audit Committee.
		5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that the implementation of internal audits is conducted in accordance with applicable professional internal audit standards and upholds the profession's code of ethics as well as the organization's code of ethics.	√	Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsinya berpedoman pada Piagam Audit Internal (Perdir No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), melapor kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, serta berkoordinasi rutin dengan Komite Audit. The Internal Audit Unit (SPI) carries out its function guided by the Internal Audit Charter (BoD Regulation No. HK.01/8/5/2/MPPI/DIRU/PLMT-25), reporting to the President Director and/or Board of Commissioners, and coordinating regularly with the Audit Committee.
6.	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency				
	6.1 Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy				

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	6.1.1		Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	√	Informasi material dan relevan mengenai Perusahaan diungkapkan secara aktif melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan situs web resmi Perusahaan sesuai klasifikasi informasi yang berlaku. Material and relevant information about the Company is actively disclosed through the Annual Report, Financial Statements, and the Company's official website, in accordance with the applicable information classification.
	6.1.2		Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasai harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner regarding relevant material information about the corporation must be fulfilled	√	Informasi material dan relevan mengenai Perusahaan diungkapkan secara aktif melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan situs web resmi Perusahaan sesuai klasifikasi informasi yang berlaku. Material and relevant information about the Company is actively disclosed through the Annual Report, Financial Statements, and the Company's official website, in accordance with the applicable information classification.
		6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The corporation has and discloses a written policy for carrying out continuous disclosure obligations based on applicable regulations.	√	Informasi material dan relevan mengenai Perusahaan diungkapkan secara aktif melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan situs web resmi Perusahaan sesuai klasifikasi informasi yang berlaku. Material and relevant information about the Company is actively disclosed through the Annual Report, Financial Statements, and the Company's official website, in accordance with the applicable information classification.
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports				
	6.2.1		Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: 1. pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim; 2. peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/ pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; 3. peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. Disclosure of the system and procedures should at least include: 1. Internal controls over financial reporting, including interim financial statements; 2. The roles of risk management/compliance/ management oversight functions and internal audit function in ensuring the integrity of interim financial statements; 3. The role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements to be published.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.		√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.
		6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The process of selecting an external auditor through tender is conducted transparently, allowing shareholders to observe and monitor the process if they wish to do so.	x	Proses seleksi auditor eksternal dilakukan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris/ Komite Audit, namun belum secara spesifik didokumentasikan sebagai proses tender yang transparan dan dapat dipantau langsung oleh seluruh pemegang saham. The external auditor selection process is carried out by the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners/Audit Committee, but has not been specifically documented as a transparent tender process directly observable by all shareholders.
		6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that there are no clauses in the contract with the auditor that could compromise the independence or competence of the auditor in conducting the audit of financial statements.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu *management letter* yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen; The Audit Committee conducts adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors the interaction between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and overseeing management's responses.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.
		6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners, or the Audit Committee, ensures that the external auditor promptly informs them of all significant findings and issues identified by the external auditor during the audit process.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.
		6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews every non-audit service provided by the external auditor and its affiliates, as well as related fees, to ensure that these services do not compromise the auditor's independence.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability report must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.		√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asurans oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. The sustainability report is assured by an independent and competent external party.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.
	6.2.4		Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation has published a Sustainability Report that is an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report has presented the company's sustainability performance covering economic, social, environmental, and governance aspects, presented in comparison over 3 years, aiming to assist shareholders and stakeholders in understanding the corporation's strategic objectives and progress in creating sustainable value.	√	Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Purwantono, Susanti & Surja (*member of* Ernst & Young Global) dengan opini wajar tanpa pengecualian; Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada GRI *Standards* dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan OJK. The Financial Statements are audited by KAP Purwantono, Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global) with an unqualified opinion; the Sustainability Report is prepared with reference to the GRI Standards and the OJK Sustainability Disclosure Standards.
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination				
	6.3.1		Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	√	Diseminasi informasi dilakukan melalui situs web resmi Perusahaan, media sosial resmi (Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, YouTube, TikTok), serta kerja sama dengan media massa. Information dissemination is carried out through the Company's official website, official social media accounts (Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, YouTube, TikTok), and cooperation with mass media.
		6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. The corporation periodically holds meetings with financial analysts.	x	Perusahaan belum secara berkala mengadakan pertemuan khusus dengan analis keuangan, karena PMT bukan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal. The Company does not yet hold periodic dedicated meetings with financial analysts, as PMT is not a publicly listed company traded on the capital market.
		6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The corporation utilizes information technology effectively and extensively beyond its website as a means of information disclosure.	x	Pemanfaatan teknologi informasi untuk diseminasi informasi saat ini masih berfokus pada situs web resmi dan media sosial; pemanfaatan kanal lain secara lebih luas masih dalam pengembangan. The use of information technology for information dissemination currently focuses on the official website and social media; broader use of additional channels is still under development.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya. The corporation ensures that disseminated information is safeguarded and securely protected.	√	Diseminasi informasi dilakukan melalui situs web resmi Perusahaan, media sosial resmi (Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, YouTube, TikTok), serta kerja sama dengan media massa. Information dissemination is carried out through the Company's official website, official social media accounts (Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, YouTube, TikTok), and cooperation with mass media.
	6.3.2		Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	x	Pernyataan tahunan penerapan PUGKI beserta penjelasannya belum dipublikasikan tersendiri di situs web Perusahaan selama jangka waktu minimal lima tahun. The annual statement on PUGKI implementation and its explanation has not yet been separately published on the Company's website for a minimum period of five years.
	6.3.3		Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus didiungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations registered on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.	x	PMT bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di pasar modal pada yurisdiksi manapun sehingga ketentuan pengungkapan *cross-listing* tidak relevan. PMT is not listed on a capital market in any jurisdiction, so cross-listing disclosure provisions are not applicable.
7.	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of Shareholder Rights				
	7.1 Hak Pemegang Saham Shareholder Rights				
	7.1.1		Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are allowed to consult with each other regarding issues related to basic shareholder rights as outlined in these Principles, but this privilege should not be abused.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
		7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. The corporation encourages constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. The corporation responds to shareholder requests to engage in dialogue to support sustainable growth and enhance corporate value in the medium to long term.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
		7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau *platform* dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. The corporation provides a platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The corporation promptly discloses to the public any new material facts available to financial analysts and similar parties.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
		7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. The corporation discloses its corporate communication policy with shareholders or investors on its website and reports.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
	7.1.2		Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: 1. Wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; 2. Efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. 4. Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. The framework and policies for corporate governance in subsidiary entities include written policies regarding: 1. Authority to appoint commissioners and directors. Generally, for relatively large subsidiary entities, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing executives in subsidiary entities. For smaller subsidiary entities, the Board of Directors is authorized to carry out this task; 2. Effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; and 3. Timely and accurate disclosure of material information from subsidiary entities, including financial information, transactions with related parties, and other material information. 4. If the corporation has or establishes legal entities other than limited liability companies, the corporation ensures that its corporate governance policies applicable to those entities are adjusted to the context of their legal entity type.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
		7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For investments in significant but minority-owned subsidiary entities (such as ownership between 20 percent to 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there is a shareholders' agreement or other agreement that allows the corporation to monitor the performance of the corporation and participate in management, including for approval of transactions and significant decisions. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation has adequate, accurate, and timely information in the subsidiary entity.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	7.1.3		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
		7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. The corporation clearly discloses these rules and procedures so that investors understand their rights and entitlements to compensation.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
		7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambil alihan (*anti-take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Tactics that prevent takeovers (anti-takeover devices) should not be used to protect management and the Board of Commissioners from accountability.	x	Hak-hak pemegang saham dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas; komunikasi formal dengan kedua pemegang saham (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) dilakukan melalui forum RUPS dan korespondensi langsung, karena PMT bukan perusahaan terbuka sehingga mekanisme dialog investor pasar modal tidak relevan diterapkan. Shareholder rights are exercised in accordance with the Articles of Association and the Limited Liability Company Law; formal communication with both shareholders (PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi) takes place through the GMS forum and direct correspondence, as PMT is not a publicly listed company, making capital-market investor dialog mechanisms inapplicable.
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment to Shareholders				

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	7.2.1		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: 1. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; 2. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that Ensure: 1. All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, 2. Disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency regarding shareholders' rights to receive a portion of the profits, the corporation discloses a measurable dividend policy, such as target dividend payout ratios/ dividends per share.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors receive information about the rights inherent in all series or classes of shares before they purchase them. Any changes in the economic value of shares or voting rights require approval from the affected class of shares in a manner that avoids negative impact.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). To enable shareholders to know the ultimate beneficial owner of significant corporate ownership, the corporation discloses ultimate beneficial owners in share ownership through major shareholders and controllers, as well as ultimate beneficial owners in share ownership of at least 5% (five percent).	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: 1. perjanjian antar pemegang saham; 2. *voting cap*; 3. *multiple voting rights*; 4. perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation discloses: 1. Shareholders' agreements; 2. Voting caps; 3. Multiple voting rights; 4. other arrangements that allow certain shareholders to have voting rights exceeding their ownership in the corporation.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The corporation provides mechanisms/ procedures that allow shareholders to have the opportunity to seek effective redress for violations of their rights in accordance with applicable laws and regulations, at reasonable cost and without undue delay.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	7.2.2		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	√	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*). The corporation has policies and standardized operating procedures ensuring that transactions with related parties are conducted in such a way to ensure they are fair and at arm's length.	√	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material related-party transactions, including consultancy agreements and other services or work agreements between directors/ commissioners and their affiliates with the corporation, must obtain approval in accordance with applicable laws. In addition to those already regulated by law, material related-party transactions require approval from the Board of Commissioners. Commissioners with conflicts of interest do not participate in granting approval.	√	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: 1. Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; 2. Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that transactions that are clearly detrimental to public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions include: 1. Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at below-market interest rates; if loans are provided, they must be at fair interest rates and terms and receive approval from the Board of Commissioners; 2. Financial assistance/subsidies to entities other than those fully owned by the corporation.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses the policy process for approving, reviewing, and monitoring related-party transactions and any inherent conflicts of interest.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
		7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The Audit Committee's findings on significant related-party transactions/conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	√	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	7.2.3		Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/ not yet available on the market.	x	Perlakuan setara terhadap kedua pemegang saham dijamin melalui mekanisme RUPS dan Anggaran Dasar; ketentuan yang bersifat spesifik untuk perusahaan terbuka (publikasi kebijakan dividen terukur, pengungkapan pemilik manfaat akhir ≥5%, larangan *insider trading* atas saham yang diperdagangkan publik) tidak relevan diterapkan karena saham PMT tidak diperdagangkan di pasar modal. Equal treatment of both shareholders is ensured through the GMS mechanism and the Articles of Association; provisions specific to publicly listed companies (published measurable dividend policy, disclosure of ultimate beneficial owners ≥5%, insider-trading prohibitions on publicly traded shares) are not applicable, as PMT's shares are not traded on the capital market.
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders				
	7.3.1		Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation invitation for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (*rationale*) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the materials for the agenda of the GMS, the corporation provides relevant and complete information necessary for decision-making, including explanations and justifications for the proposed decisions to be approved at the GMS.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	7.3.2		Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The Corporation provides infrastructure that enables the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attended the Annual GMS.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. The Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Management Risk Monitoring Committee, as well as other committees are ready to provide meaningful responses to questions directed to them in the GMS.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: 1. Mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; 2. Memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan 3. mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to: 1. Raise questions in the GMS, including questions related to the results of the annual external audit; 2. Propose an item to be included in the GMS agenda; and 3. Submit resolution proposals.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: 1. Lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; 2. Pemungutan secara tertutup (*poll-voting*) dan bukan dengan mengacungkan tangan (*show of hands*); 3. Memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. The corporation has methods or technical procedures for voting that prioritize independence and shareholder interests, namely: 1. Easily accessible locations for GMS for the majority of shareholders; 2. Conducting closed voting (poll-voting) rather than by a show of hands; 3. Ensuring that there are no conditions or procedures in GMS that hinder shareholders from participating in decision-making.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. The corporation strives for electronic voting procedures and takes steps to build infrastructure that enables electronic voting or utilizes existing infrastructure within the ecosystem for voting.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (*bundling*). Each vote in the GMS is only for one resolution, there is no bundling of multiple resolutions into the same resolution.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party (supervisor/inspector) to count and/or certify the votes in the GMS and disclose them in the minutes of the GMS.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali. If resolutions approved by controlling shareholders contradict the majority of votes from non-controlling shareholders, post-GMS, the corporation discloses actions taken to understand and respond to concerns of non-controlling shareholders, which led to their voting differently from controlling shareholders.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.		√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts a thorough examination of Director and Commissioner candidates and provides all relevant material information about the candidates to shareholders during the board member selection process. The disclosed information includes details about the candidates' positions as Directors or Commissioners in other corporations and whether they are considered independent from the corporate standpoint.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.3.2	Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose regulations require five years. It would be better if nominations were made annually.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Shareholders conduct separate voting for each Director and Commissioner candidate.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
	7.3.4		Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the GMS notice, the corporation identifies and informs shareholders of the candidate external auditor who will be appointed or reappointed during the GMS.	√	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that the external auditor attends the GMS and is obligated to respond to shareholders' questions regarding the audit of financial statements.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
	7.3.5		Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The minutes of the GMS are communicated to shareholders no later than 30 business days after the GMS.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The minutes of the GMS include questions posed by shareholders and the responses provided by the meeting chairperson or the answering party.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.
		7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The conduct of the GMS, along with all meeting materials, reports, and related documents including the annual report and voting results, including the agenda of the meeting concerned, are published on the corporation's official website or digital communication media and are available for at least 10 (ten) years.	x	RUPS Tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan sesuai UU Perseroan Terbatas (2 kali RUPS sepanjang 2025); pemegang saham juga dapat mengambil Keputusan Sirkuler di luar forum RUPS; ketentuan pengungkapan publik atas hasil dan risalah RUPS tidak relevan diterapkan karena PMT bukan perusahaan terbuka. Annual and other GMS are held in accordance with the Limited Liability Company Law (2 GMS held throughout 2025); shareholders may also adopt Circular Resolutions outside the GMS forum; public-disclosure requirements for GMS results and minutes are not applicable, as PMT is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
8.	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders				
	8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) Key Stakeholder Engagement (Stakeholder Engagement)			
		8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	√	Keterlibatan pemangku kepentingan kunci difasilitasi Sekretaris Perusahaan melalui berbagai kanal (sosialisasi, *gathering*, media sosial, korespondensi); pengungkapan formal atas proses identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan kunci belum didokumentasikan tersendiri dalam Laporan Tahunan. Key stakeholder engagement is facilitated by the Corporate Secretary through various channels (socialization, gatherings, social media, correspondence); formal disclosure of the process for identifying and mapping key stakeholders has not yet been separately documented in the Annual Report.
		8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation discloses the process of identifying and selecting key stakeholders to be involved.	x	Keterlibatan pemangku kepentingan kunci difasilitasi Sekretaris Perusahaan melalui berbagai kanal (sosialisasi, *gathering*, media sosial, korespondensi); pengungkapan formal atas proses identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan kunci belum didokumentasikan tersendiri dalam Laporan Tahunan. Key stakeholder engagement is facilitated by the Corporate Secretary through various channels (socialization, gatherings, social media, correspondence); formal disclosure of the process for identifying and mapping key stakeholders has not yet been separately documented in the Annual Report.
		8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in managing the involvement of key stakeholders, including the frequency based on the type and group of key stakeholders.	x	Keterlibatan pemangku kepentingan kunci difasilitasi Sekretaris Perusahaan melalui berbagai kanal (sosialisasi, *gathering*, media sosial, korespondensi); pengungkapan formal atas proses identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan kunci belum didokumentasikan tersendiri dalam Laporan Tahunan. Key stakeholder engagement is facilitated by the Corporate Secretary through various channels (socialization, gatherings, social media, correspondence); formal disclosure of the process for identifying and mapping key stakeholders has not yet been separately documented in the Annual Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/ atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. The corporation provides channels that key stakeholders (such as customers, suppliers, the general public, etc.) can use to express opinions and provide feedback, voice complaints, and/or lodge grievances regarding potential violations of their rights.	√	Keterlibatan pemangku kepentingan kunci difasilitasi Sekretaris Perusahaan melalui berbagai kanal (sosialisasi, *gathering*, media sosial, korespondensi); pengungkapan formal atas proses identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan kunci belum didokumentasikan tersendiri dalam Laporan Tahunan. Key stakeholder engagement is facilitated by the Corporate Secretary through various channels (socialization, gatherings, social media, correspondence); formal disclosure of the process for identifying and mapping key stakeholders has not yet been separately documented in the Annual Report.
		8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: 1. Respon korporasi; dan 2. Kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. 1. The corporation discloses significant views, inputs, and complaints conveyed by key stakeholders obtained from stakeholder engagement, including: a. Corporate responses; and b. Key stakeholder groups expressing views and inputs.	x	Keterlibatan pemangku kepentingan kunci difasilitasi Sekretaris Perusahaan melalui berbagai kanal (sosialisasi, *gathering*, media sosial, korespondensi); pengungkapan formal atas proses identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan kunci belum didokumentasikan tersendiri dalam Laporan Tahunan. Key stakeholder engagement is facilitated by the Corporate Secretary through various channels (socialization, gatherings, social media, correspondence); formal disclosure of the process for identifying and mapping key stakeholders has not yet been separately documented in the Annual Report.
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability in Business Models				
	8.2.1		Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	√	Prinsip ESG diintegrasikan ke dalam RKAP dan indikator KPI Perusahaan di setiap tahapan proses bisnis (perencanaan strategis, operasional, hingga pelaporan); penunjukan pejabat khusus yang berperan strategis dalam mengelola keberlanjutan secara dedicated belum dilakukan. ESG principles are integrated into the Company's RKAP and KPI indicators at every stage of the business process (strategic planning, operations, through to reporting); a dedicated officer with a specific strategic role in managing sustainability has not yet been appointed.
		8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets, as well as performance against these targets, are communicated to stakeholders.	√	Prinsip ESG diintegrasikan ke dalam RKAP dan indikator KPI Perusahaan di setiap tahapan proses bisnis (perencanaan strategis, operasional, hingga pelaporan); penunjukan pejabat khusus yang berperan strategis dalam mengelola keberlanjutan secara dedicated belum dilakukan. ESG principles are integrated into the Company's RKAP and KPI indicators at every stage of the business process (strategic planning, operations, through to reporting); a dedicated officer with a specific strategic role in managing sustainability has not yet been appointed.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and Board of Commissioners continually monitor and understand sustainability issues relevant to the corporation and its business.	√	Prinsip ESG diintegrasikan ke dalam RKAP dan indikator KPI Perusahaan di setiap tahapan proses bisnis (perencanaan strategis, operasional, hingga pelaporan); penunjukan pejabat khusus yang berperan strategis dalam mengelola keberlanjutan secara dedicated belum dilakukan. ESG principles are integrated into the Company's RKAP and KPI indicators at every stage of the business process (strategic planning, operations, through to reporting); a dedicated officer with a specific strategic role in managing sustainability has not yet been appointed.
		8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes their performance in overseeing and addressing significant risks and opportunities related to corporate sustainability.	√	Prinsip ESG diintegrasikan ke dalam RKAP dan indikator KPI Perusahaan di setiap tahapan proses bisnis (perencanaan strategis, operasional, hingga pelaporan); penunjukan pejabat khusus yang berperan strategis dalam mengelola keberlanjutan secara dedicated belum dilakukan. ESG principles are integrated into the Company's RKAP and KPI indicators at every stage of the business process (strategic planning, operations, through to reporting); a dedicated officer with a specific strategic role in managing sustainability has not yet been appointed.
		8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints an individual within management with a specific role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	x	Direksi belum menunjuk seseorang secara spesifik yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik isu keberlanjutan Perusahaan. Board of Directors has not yet appointed a specific person with a dedicated strategic role in managing the Company's sustainability agenda.
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders				
	8.3.1		Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/ masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility to customers, including, among others, considering customer information security, ethics and sales behavior, after-sales service according to product/service lifespan, as well as following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations must promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.
		8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan. The corporation implements and discloses policies covering criteria in supplier selection, transparent procurement mechanisms, efforts to enhance supplier capabilities, and fulfillment of supplier-related rights. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff, and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable business policies and procedures based on sustainable values.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. The corporation implements and discloses its social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and generate concrete social responsibility activities that add value to society, including fostering community empowerment.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.
		8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: 1. Bahan baku; 2. Energi; 3. Penggunaan air; 4. Pemanfaatan sumber daya terbarukan; 5. Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. The corporation implements and discloses environmental responsibility by preventing, reducing, and managing negative impacts on the environment from all aspects of corporate operations, including in the use of: 1. Raw materials; 2. Energy; 3. Water usage; 4. Utilization of renewable resources; 5. Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management, and reduction of greenhouse gas emissions and carbon emissions.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.
		8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses a policy on fair competition by prioritizing ethical business behavior and refraining from engaging in anti-competitive practices to gain or protect market positions.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. 1. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. 2. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors. 1. The Board of Commissioners oversees, and the Board of Directors monitors the liquidity and financial solvency of the corporation. 2. The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are promptly identified, managed, mitigated, and reported. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.	x	Direksi belum memiliki kebijakan formal tersendiri untuk melindungi hak-hak kreditur, namun likuiditas dan solvabilitas keuangan Perusahaan senantiasa dipantau Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors does not yet have a separate formal policy to protect creditors' rights, but the Company's liquidity and financial solvency are continuously monitored by the Board of Directors under the Board of Commissioners' oversight.
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.		√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.
		8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages the creation of sustainable value.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation
		8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted return*), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance-based remuneration for employees should take into account risk elements, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are given for unwanted risk-taking.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.
		8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors manages potential conflicts of interest that may arise between employees as beneficiaries of the pension fund and the corporation as the manager of the pension fund.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.
		8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resources development and management program to ensure that the corporation has an adequate number of knowledgeable, skilled, and experienced employees.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guideline	**Uraian** Description	*Apply or Explain*	**Keterangan Penerapan** Implementation
		8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. When filling managerial positions within the corporation, the Board of Directors considers diversity, non-discrimination, and provides equal opportunities to all candidates regardless of ethnicity, religion, race, social status, and gender. This diversity policy is accompanied by measurable objectives.	√	Direksi memastikan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan melalui program TJSL, K3, dan kebijakan terkait; kebijakan formal tersendiri mengenai perlindungan hak kreditur belum ditetapkan, meskipun likuiditas dan solvabilitas Perusahaan terus dipantau di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Board of Directors ensures that ethical, social, and environmental responsibility standards are disclosed through CSR programs, OHS policies, and related measures; a separate formal policy on creditor-rights protection has not yet been established, although the Company's liquidity and solvency are continuously monitored under Board of Commissioners oversight.

PELINDO
MULTI TERMINAL

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility Governance



Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PMT dijalankan selaras dengan prinsip keberlanjutan, PMT terus berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan citra positif yang mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
PMT implements its Social and Environmental Responsibility (SER) program in accordance with the principles of sustainability. PMT continues to strive to build harmonious relationships with the community and all stakeholders, while enhancing its positive image to support business sustainability in both the short and long term.



06

Kilas Kinerja ESG
ESG Performance Highlights



Implementasi prinsip keberlanjutan di lingkungan PMT dilakukan secara bertahap dan terstruktur dalam keseluruhan proses bisnis Perusahaan. Cakupannya meliputi tahap perencanaan, pengelolaan terminal, digitalisasi operasional, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Keberlanjutan ditempatkan sebagai landasan strategis dalam membangun nilai jangka panjang bagi Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan oleh PT Pelindo Multi Terminal ("PMT" atau "Perusahaan"). Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tetapi juga melalui penerapan pendekatan yang komprehensif terhadap aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam strategi serta operasional bisnis Perusahaan.

Komitmen terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui integrasi prinsip-prinsipnya ke dalam keseluruhan rantai proses bisnis PMT. Penerapan tersebut dilakukan secara bertahap, mencakup perencanaan, pengelolaan terminal, digitalisasi operasional, hingga pengembangan sumber daya manusia.

The implementation of sustainability principles within PMT is carried out in stages and systematically across the Company's entire business process. This encompasses planning, terminal management, operational digitalization, and human capital development.

Sustainability is positioned as a strategic foundation for creating long-term value for the Company and all stakeholders by PT Pelindo Multi Terminal ("PMT" or the "Company"). This commitment is manifested not only through the implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR) programs, but also through the adoption of a comprehensive Environmental, Social, and Governance (ESG) approach within the Company's business strategy and operations.

The commitment to sustainability is embodied through the integration of sustainability principles throughout PMT's business value chain. Such implementation is undertaken in a staged manner, covering planning, terminal management, operational digitalization, and human capital development.

Dalam aspek lingkungan, Perseroan mendorong efisiensi energi, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta pelaksanaan inisiatif dekarbonisasi selaras dengan target Pelindo Group. Pada dimensi sosial, PMT membangun hubungan yang inklusif dengan masyarakat melalui program-program TJSL yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata. Sementara itu, dari sisi tata kelola, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian internal terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan integritas operasional perusahaan.

Pendekatan ESG tersebut juga diintegrasikan dalam proses penetapan sasaran strategis, penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta evaluasi kinerja tahunan. Dengan demikian, keberlanjutan tidak sekadar menjadi elemen pendukung, melainkan bagian esensial dalam transformasi PMT menuju perusahaan jasa terminal yang modern, adaptif, dan berdaya saing global.

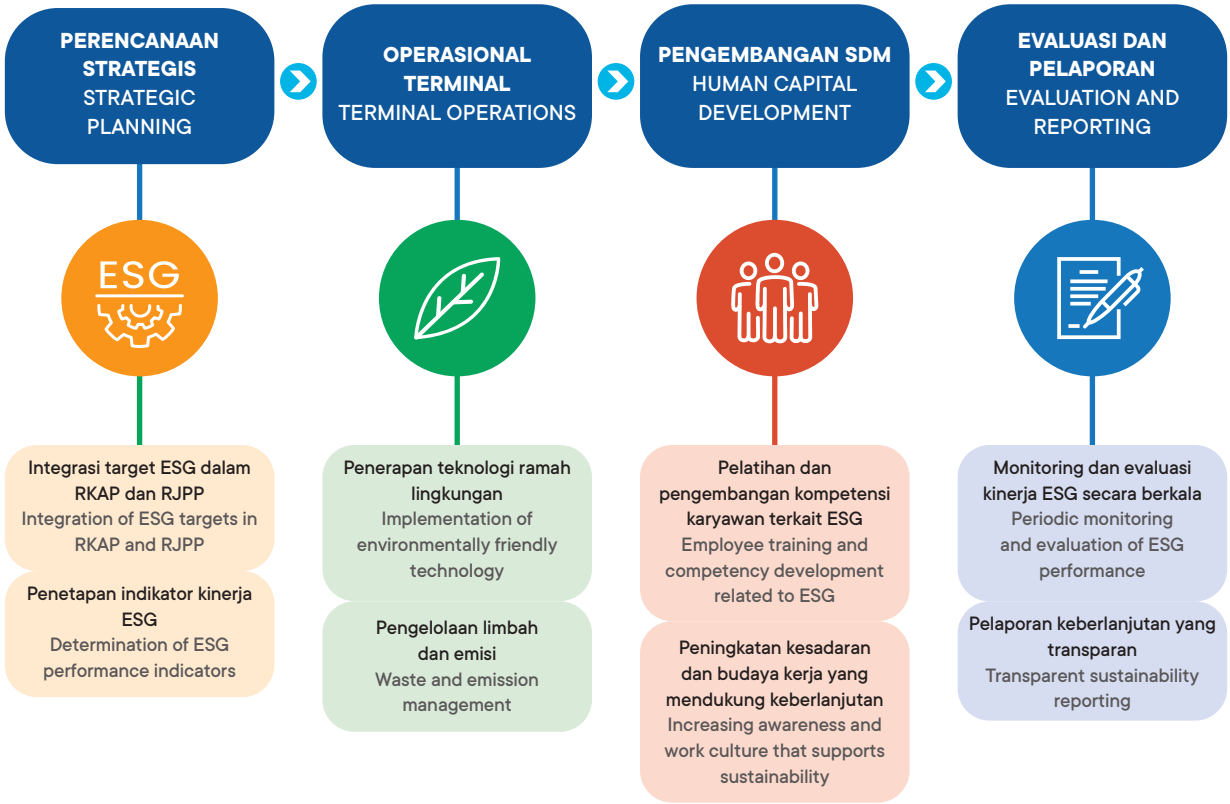
INTEGRASI PRINSIP ESG KE DALAM PROSES BISNIS

In terms of environmental aspect, the Company promotes energy efficiency, environmentally responsible waste management, and decarbonization initiatives aligned with the targets established by Pelindo Group. Within the social dimension, PMT fosters inclusive relationships with communities through sustainable CSR programs that generate tangible benefits. Meanwhile, from a governance perspective, efforts to strengthen transparency, accountability, and internal controls continue to be enhanced to ensure the sustainability and integrity of the Company's operations.

The ESG approach is also integrated into the process of setting strategic objectives, the Company's Long-Term Plan (RJPP), preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and conducting annual performance evaluations. Accordingly, sustainability is not merely regarded as a supporting element, but rather as an essential component of PMT's transformation into a modern, adaptive, and globally competitive terminal services company.

INTEGRATION OF ESG PRINCIPLES INTO BUSINESS PROCESSES

Integrasi Prinsip ESG ke Dalam Proses Bisnis
Integration of ESG Principles Into Business Processes



Tahapan proses bisnis PMT dengan integrasi prinsip ESG di setiap tahapannya:

1. **Perencanaan Strategis:**
   a. Integrasi target ESG dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
   b. Penetapan indikator kinerja ESG sebagai bagian dari *Key Performance Indicators* (KPI).
2. **Operasional Terminal:**
   a. Efisiensi energi.
   b. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam operasional pelabuhan.
   c. Digitalisasi proses bisnis.
   d. Pengelolaan limbah dan emisi sesuai standar lingkungan.
3. **Pengembangan SDM:**
   a. Pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan terkait ESG.
   b. Peningkatan kesadaran dan budaya kerja yang mendukung keberlanjutan.
4. **Evaluasi dan Pelaporan:**
   a. Monitoring dan evaluasi kinerja ESG secara berkala.
   b. Pelaporan keberlanjutan yang transparan kepada pemangku kepentingan.

Stages of PMT's business process with ESG principles integrated at each stage:

1. **Strategic Planning:**
   a. Integration of ESG targets into the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
   b. Establishment of ESG performance indicators as part of Key Performance Indicators (KPI).
2. **Terminal Operations:**
   a. Energy efficiency.
   b. Implementation of environmentally friendly technology in port operations.
   c. Digitalization of business processes.
   d. Waste and emissions management in accordance with environmental standards.
3. **Human Capital Development:**
   a. Training and competency development for employees related to ESG.
   b. Increasing awareness and a work culture that supports sustainability.
4. **Evaluation and Reporting:**
   a. Regular monitoring and evaluation of ESG performance.
   b. ransparent sustainability reporting to stakeholders.

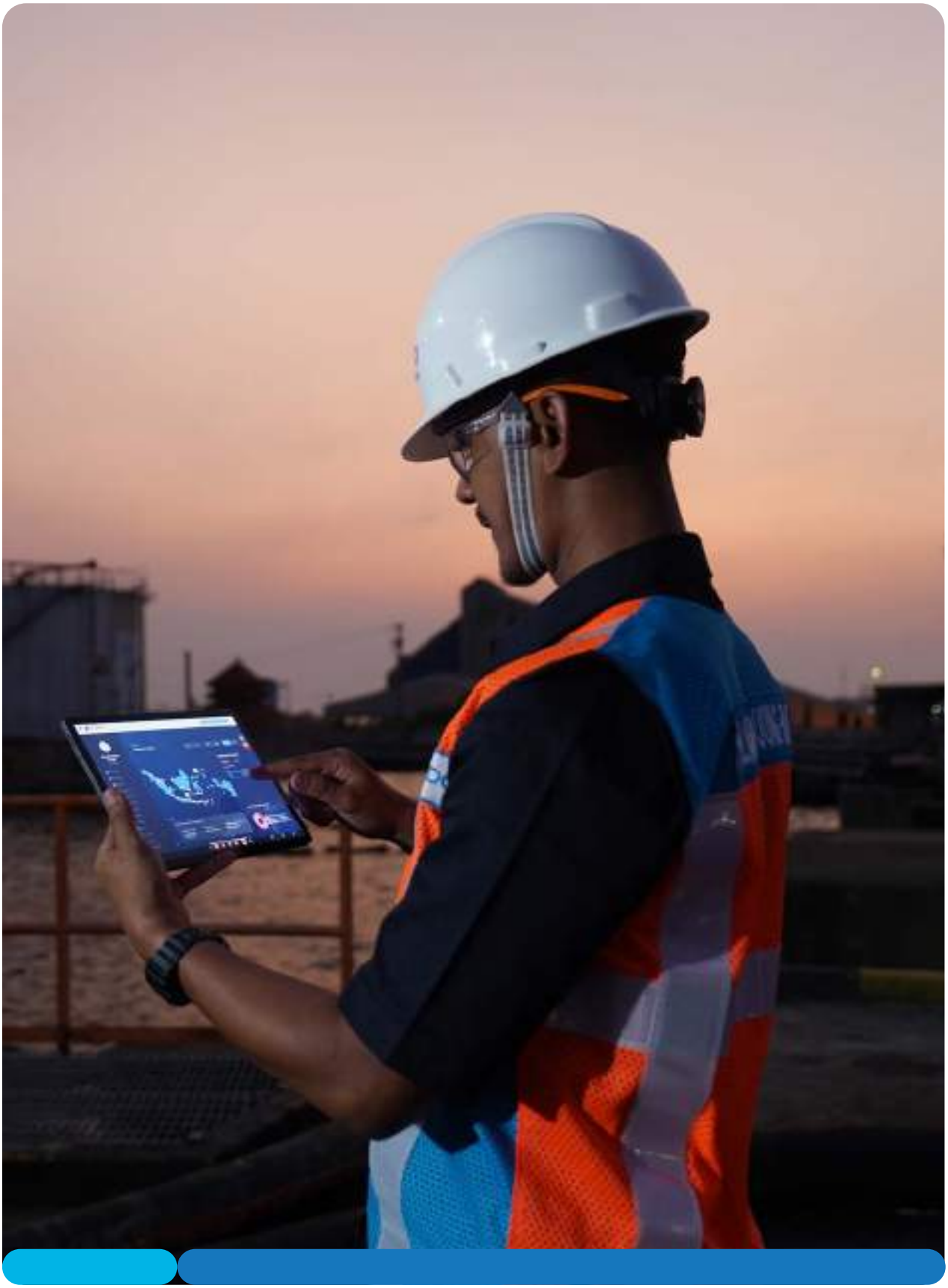
Matriks berikut menggambarkan hubungan antara aspek ESG dan fungsi-fungsi bisnis utama PMT. Penyajian ini menunjukkan keterkaitan masing-masing aspek *Environmental, Social, and Governance* dengan peran dan aktivitas utama dalam operasional Perusahaan.

The following matrix illustrates the relationship between ESG aspects and PMT's core business functions. This presentation demonstrates the linkage between each Environmental, Social, and Governance aspect and the key roles and activities within the Company's operations.

Fungsi Bisnis Business Function	***Environmental* (E)**	***Social* (S)**	***Governance* (G)**
Perencanaan Strategis Strategic Planning	Efisiensi energi Energy efficiency	Identifikasi dampak sosial dari kegiatan operasi Identification of social impacts of operational activities	Penyusunan kebijakan tata kelola Development of governance policies
Operasional Terminal Terminal Operations	Penetapan target pengurangan emisi Target setting of emission reduction	Kesehatan dan keselamatan kerja Occupational health and safety	Kepatuhan terhadap regulasi Regulatory compliance
Pengembangan SDM Human Capital Development	Penggunaan energi terbarukan Use of renewable energy	Program kesejahteraan karyawan Employee welfare programs	Transparansi dalam manajemen SDM Transparency in human capital management
Evaluasi dan Pelaporan Evaluation and Reporting	Pelatihan lingkungan hidup Environmental training	Survei kepuasan karyawan Employee satisfaction surveys	Pelaporan keberlanjutan tahunan Annual sustainability reporting
	Audit lingkungan Environmental audits	Survei kepuasan masyarakat Community satisfaction surveys	

Uraian lengkap terkait kebijakan, target, dan pencapaian keberlanjutan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan 2025 yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

Detailed information regarding sustainability policies, targets, and achievements is presented in the 2025 Sustainability Report, which forms an integral and inseparable part of this Annual Report.



PELINDO
MULTI TERMINAL

Laporan Keuangan

Financial Report




07

PT Pelindo Multi Terminal
dan entitas anaknya/ and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2025 and for the year then ended
with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statements*
Laporan Auditor Independen	i-vi	*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-94	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PELINDO MULTI TERMINAL

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name : Ary Henryanto
   Alamat kantor/Office address : Grha Pelindo Gedung A
   Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan
   Medan 20411
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Permata Hijau Permai, Blok BR 4 No. 21
   RT 007/RW 017 Kel. Kalabang Tengah
   Bekasi Utara, Kota Bekasi
   Nomor telepon/*Telephone number* : 0811 101 117
   Jabatan/Title : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/Name : Arif Rusman Yulianto
   Alamat kantor/Office address : Grha Pelindo Gedung A
   Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan
   Medan 20411
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Komp. Tugu Gading Permai A5/26
   RT 014/RW 002 Kel. Tugu Utara
   Koja, Jakarta Utara
   Nomor telepon/*Telephone number* : 0812 9207 504
   Jabatan/Title : Plh. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/*Finance and Risk Management Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1. Name : Ary Henryanto
   Office address : Grha Pelindo Gedung A
   Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan
   Medan 20411
   Residential address/in accordance with personal identity card : Permata Hijau Permai, Blok BR 4 No. 21
   RT 007/RW 017 Kel. Kalabang Tengah
   Bekasi Utara, Kota Bekasi
   Telephone number : 0811 101 117
   Title : Direktur Utama/*President Director*

2. Name : Arif Rusman Yulianto
   Office address : Grha Pelindo Gedung A
   Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan
   Medan 20411
   Residential address/in accordance with personal identity card : Komp. Tugu Gading Permai A5/26
   RT 014/RW 002 Kel. Tugu Utara
   Koja, Jakarta Utara
   Telephone number : 0812 9207 504
   Title : Plh. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/*Finance and Risk Management Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2025 and for the year then ended.*
2. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and*
   b. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 30 April 2026/*April 30, 2026*

METERAI TEMPEL 41B9CAAMX201693257

Ary Henryanto
Direktur Utama / *President Director*

Arif Rusman Yulianto
Plh. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / *Interim Finance and Risk Management Director*

EY
Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Pelindo Multi Terminal

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelindo Multi Terminal ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Pelindo Multi Terminal

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelindo Multi Terminal (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (continued)

Other information (continued)

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01204/2.1505/AU.1/06/1609-1/1/IV/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Damestar Hutagalung
Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1609/Public Accountant Registration No.: AP.1609

30 April 2026/April 30, 2026

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2025 (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2.002.452.174	4,26	1.677.402.753	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto		5		*Trade receivables - net*
Pihak berelasi	116.820.324	26	243.869.161	*Related parties*
Pihak ketiga	227.616.002		414.648.350	*Third parties*
Aset kontrak - pihak berelasi	239.223.437	6,26	104.293.548	*Contract assets - related parties*
Uang muka dan beban dibayar di muka	21.170.493	7	20.865.592	*Advances and prepaid expenses*
Pajak dibayar di muka	20.617.776	17a	28.799.868	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	12.703.661		4.579.152	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**2.640.603.867**		**2.494.458.424**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	1.025.179.631	9	714.794.030	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	519.925.303	10	549.026.541	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan	125.147.464	17f	140.425.551	*Deferred tax assets*
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	106.727.217	17e	67.675.118	*Estimated claim for income tax refund*
Investasi saham	3.465.500	8	3.860.000	*Investment in shares of stock*
Aset tidak lancar lainnya	31.795.615	11	40.249.678	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**1.812.240.730**		**1.516.030.918**	***Total Non-Current Assets***
TOTAL ASET	**4.452.844.597**		**4.010.489.342**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		12		*Trade payables*
Pihak berelasi	200.659.341	26	239.804.747	*Related parties*
Pihak ketiga	55.810.600		41.970.700	*Third parties*
Utang lain-lain		13		*Other payables*
Pihak berelasi	114.301.166	26	171.481.738	*Related parties*
Pihak ketiga	1.306.639		1.450.149	*Third parties*
Beban akrual	1.198.770.147	14	891.918.555	*Accrued expenses*
Utang pajak	56.662.214	17b	28.566.955	*Taxes payable*
Liabilitas jangka pendek lainnya	34.108.786	15,26	22.412.900	*Other current liabilities*
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:				*Current portion of long-term liabilities:*
Liabilitas kontrak	23.357.274	16,26	40.850.352	*Contract liabilities*
Liabilitas sewa	76.809.940	10	43.698.904	*Lease liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**1.761.786.107**		**1.482.155.000**	***Total Current Liabilities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2025 (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas kontrak	-	16	518.490	*Contract liabilities*
Liabilitas sewa	431.880.353	10	391.824.887	*Lease liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**431.880.353**		**392.343.377**	***Total Non-Current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**2.193.666.460**		**1.874.498.377**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share*
Modal dasar - 5.921.220 saham				*Authorized capital - 5,921,220 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.480.305 saham	1.480.305.000	18	1.480.305.000	*Issued and fully paid - 1,480,305 shares*
Tambahan modal disetor	(225.708.787)	19	(225.707.809)	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	59.028.962		48.672.020	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	543.148.231		458.018.114	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	**1.856.773.406**		**1.761.287.325**	***Equity attributable to owners of the parent entity - net***
Kepentingan nonpengendali	402.404.731	21	374.703.640	*Non-controlling interests*
EKUITAS - NETO	**2.259.178.137**		**2.135.990.965**	***EQUITY - NET***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.452.844.597**		**4.010.489.342**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Pendapatan operasi	5.669.656.610	22	5.302.162.811	*Operating revenues*
Beban operasi	(5.078.173.779)	23	(5.021.281.214)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya, neto	47.650.554	24	31.564.748	*Other operating income, net*
LABA USAHA	**639.133.385**		**312.446.345**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	99.387.621	25a	92.120.809	*Finance income*
Beban keuangan	(35.368.154)	25b	(33.027.694)	*Finance costs*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**703.152.852**		**371.539.460**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(21.980.059)	17d	(17.318.981)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**681.172.793**		**354.220.479**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN				***CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT***
Kini	(140.150.123)	17d	(108.284.958)	*Current*
Tangguhan	(15.278.087)	17d	23.819.157	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN	**525.744.583**		**269.754.678**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Perubahan nilai wajar pada investasi saham	(394.500)	8	-	*Change in fair value of investment in shares*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**525.350.083**		**269.754.678**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	445.877.614		207.138.830	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	79.866.969	21	62.615.848	*Non-controlling interest*
Total	**525.744.583**		**269.754.678**	***Total***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	445.487.059		207.138.830	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	79.863.024		62.615.848	*Non-controlling interest*
Total	**525.350.083**		**269.754.678**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent entity*					Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Ekuitas - neto/ *Equity - net*	
		Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings*		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto/ *Equity attributable to owners of the parent entity - net*			
				Dicadangkan/ *Appropriated*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*				
Saldo 31 Desember 2023		**1.480.305.000**	**(225.707.809)**	**20.661.091**	**753.890.213**	**2.029.148.495**	**358.588.338**	**2.387.736.833**	***Balance as of December 31, 2023***
Cadangan umum	20	-	-	28.010.929	(28.010.929)	-	-	-	*General reserve*
Dividen	20	-	-	-	(475.000.000)	(475.000.000)	(46.500.546)	(521.500.546)	*Dividend*
Laba tahun berjalan		-	-	-	207.138.830	207.138.830	62.615.848	269.754.678	*Income for the year*
Saldo 31 Desember 2024		**1.480.305.000**	**(225.707.809)**	**48.672.020**	**458.018.114**	**1.761.287.325**	**374.703.640**	**2.135.990.965**	***Balance as of December 31, 2024***
Penjualan investasi anak		-	(978)	-	-	(978)	-	(978)	*Sales of subsidiaries*
Cadangan umum	20	-	-	10.356.942	(10.356.942)	-	-	-	*General reserve*
Dividen	20	-	-	-	(350.000.000)	(350.000.000)	-	(350.000.000)	*Dividend*
Pembagian dividen dari entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	(52.161.933)	(52.161.933)	*Dividend distribution by subsidiaries to non-controlling interest*
Perubahan nilai wajar pada investasi saham	8	-	-	-	(390.555)	(390.555)	(3.945)	(394.500)	*Change in fair value of investment in shares*
Laba tahun berjalan		-	-	-	445.877.614	445.877.614	79.866.969	525.744.583	*Income for the year*
Saldo 31 Desember 2025		**1.480.305.000**	**(225.708.787)**	**59.028.962**	**543.148.231**	**1.856.773.406**	**402.404.731**	**2.259.178.137**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	5.852.975.906		5.095.305.478	*Receipt from customers*
Penerimaan pendapatan bunga	99.387.621		92.120.809	*Receipt of interest income*
Pembayaran kepada pemasok	(4.122.245.563)		(4.274.592.146)	*Payment to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(760.624.285)		(629.716.025)	*Payment to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(159.415.052)		(146.763.142)	*Payment of income taxes*
Pembayaran aktivitas operasi lainnya	(34.476.179)		(7.912.277)	*Payment for other operating activities*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**875.602.448**		**128.442.697**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya	(150.933.402)		(77.457.115)	*Acquisitions of fixed assets and other non-current assets*
Hasil pelepasan aset tetap	14.542.348	9	-	*Proceeds from disposals of fixed assets*
Penerimaan dari penjualan entitas anak	684.441	1c	-	*Proceed on sales of subsidiaries*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(135.706.613)**		**(77.457.115)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa	(26.347.776)	10	(28.393.436)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen dari entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(38.498.638)		(57.832.952)	*Payments of dividend of subsidiaries to non-controlling interest*
Pembayaran dividen	(350.000.000)	20	(475.000.000)	*Payments of dividend*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(414.846.414)**		**(561.226.388)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**325.049.421**		**(510.240.806)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1.677.402.753**		**2.187.643.559**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**2.002.452.174**	4	**1.677.402.753**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pelindo Multi Terminal ("Perusahaan") didirikan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 29 September 2021 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0061301.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 12 Oktober 2022 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan kegiatan usaha Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0073734.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang meliputi:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan konstruksi bangunan sipil;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan aktivitas kepelabuhan laut;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan aktivitas kepelabuhan sungai dan danau;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan pergudangan dan penyimpanan;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan aktivitas gudang pendingin;
10. Penyediaan dan/atau pelayanan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi;

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Pelindo Multi Terminal (the "Company") was established in 2021 based on the Deed of Establishment No. 19 dated September 29, 2021 from Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., notary in South Jakarta. This establishment deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0061301.AH.01.01 Year 2021 dated September 30, 2021 concerning Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the Notarial Deed No. 14 dated October 12, 2022 from Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., regarding the amendment of Article 3 of the Articles of Association regarding the Company's purposes and objectives that has received approval from Ministry of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0073734.AH.01.02 Year 2022 dated October 12, 2022.

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the port business which includes:

1. *To provide and/or serve financial service activities, not insurance and pension fund;*
2. *To provide and/or serve warehousing and transportation support activities;*
3. *To provide and/or serve civil building construction;*
4. *To provide and/or service of land transportation and transportation through pipelines;*
5. *To provide and/or service of loading and unloading of goods;*
6. *To provide and/or service of port activities;*
7. *To provide and/or service of river and lake port activities;*
8. *To provide and/or warehousing and storage services;*
9. *To provide and/or service for cold storage activities;*
10. *To provide and/or construction services for oil and natural gas civil buildings;*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang meliputi: (lanjutan)

11. Penyediaan dan/atau pelayanan angkutan melalui saluran pipa;
12. Penyediaan dan/atau pelayanan penyimpanan minyak dan gas bumi.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan - Medan.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo") dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya bersama-sama disebut sebagai "Grup".

b. Manajemen kunci dan karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the port business which includes: (continued)

11. To provide and/or transportation services through pipelines;
12. To provide and/or storage services for oil and natural gas.

The Company's office is located at Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan - Medan.

The Company's parent is PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo") and its ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

b. Key management and employees

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors and Audit Committee is as follows:

31 Desember 2025		***December 31, 2025***
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Darwanto	*President Commissioner*
Komisaris	Arman Depari	*Commissioner*
Komisaris	Ahmad Perwira Mulia Tarigan	*Commissioner*
Komisaris Independen	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Aan Rusdianto	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Ary Henryanto	*President Director*
Direktur Strategi dan Komersial	Rizki Kurniawan	*Strategic and Commercial Director*
Direktur Operasi	Arif Rusman Yulianto	*Operation Director*
Direktur Teknik	Yarham Harid	*Technical Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	Edi Priyanto	*Human Resources Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Yoni Setiawan	*Financial and Risk Management Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Aan Rusdianto	*Head*
Wakil Ketua	Arman Depari	*Vice Head*
Anggota	Saiful Bahri	*Member*
Anggota	Rimba Simanjuntak	*Member*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Manajemen kunci dan karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Key management and employees (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors and Audit Committee is as follows: (continued)

31 Desember 2024		*December 31, 2024*
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Darwanto	*President Commissioner*
Komisaris	Arman Depari	*Commissioner*
Komisaris	Ahmad Perwira Mulia Tarigan	*Commissioner*
Komisaris	Thanon Aria Dewangga	*Commissioner*
Komisaris Independen	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Aan Rusdianto	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Ary Henryanto	*President Director*
Direktur Strategi dan Komersial	Rizki Kurniawan	*Strategic and Commercial Director*
Direktur Operasi	Arif Rusman Yulianto	*Operation Director*
Direktur Teknik	Yarham Harid	*Technical Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	Edi Priyanto	*Human Resources Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Yoni Setiawan	*Financial and Risk Management Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Aan Rusdianto	*Head*
Wakil Ketua	Arman Depari	*Vice Head*
Anggota	Saiful Bahri	*Member*
Anggota	Rimba Simanjuntak	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki masing-masing 1.031 dan 1.058 orang karyawan yang merupakan karyawan Pelindo yang ditugaskan di Grup.

As of December 31, 2025 and 2024, the Group has 1,031 and 1,058 employees, respectively, which represent the employees of Pelindo assigned to the Group.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, total gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang diberikan kepada manajemen kunci Perusahaan, masing-masing sebesar Rp54.892.693 dan Rp85.260.882 (tidak diaudit).

For the years ended December 31, 2025 and 2024, total salaries and other short-term benefits paid the Company's key management amounted to Rp54,892,693 and Rp85,260,882 respectively (unaudited).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Pengalihan kepemilikan saham dan penerbitan saham baru

Pelindo

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Januari 2022 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

a. Peningkatan modal dasar dari sebelumnya 696.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp696.000.000 menjadi 1.313.456 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.313.456.000.

b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya 174.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp174.000.000 menjadi 328.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp328.364.000 dimana penerbitan saham baru sejumlah 154.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp154.364.000 diambil seluruhnya oleh Pelindo sebagai kompensasi pengalihan saham-saham milik Pelindo kepada Perusahaan sebagai berikut:
   - Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR") sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.
   - Saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dengan nilai nominal Rp129.614.000.

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

1. GENERAL (continued)

c. Transfer of shares ownership and issuance of new shares

Pelindo

Based on Deed No. 2 dated January 3, 2022 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed among others:

a. Increase of authorized capital from 696,000 shares with nominal value of Rp696,000,000 to 1,313,456 shares with nominal value of Rp1,313,456,000.

b. Increase of issued and paid capital from 174,000 shares with nominal value of Rp174,000,000 to 328,364 shares with nominal value of Rp328,364,000 where the new issued shares of 154,364 shares with nominal value of Rp154,364,000 were taken fully by Pelindo as compensation of transfer of shares owned by Pelindo to the Company as follows:
   - *PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR") shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000.*
   - *PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") shares amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% with nominal value of Rp129,614,000.*

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by the Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Pengalihan kepemilikan saham dan penerbitan saham baru (lanjutan)

Pelindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 27 April 2022 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Penambahan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya 328.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp328.364.000 menjadi 1.480.305 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.480.305.000 dimana penerbitan saham baru sejumlah 1.151.941 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.151.941.000 diambil seluruhnya oleh Pelindo sebagai tambahan kompensasi pengalihan saham-saham milik Pelindo kepada Perusahaan menggunakan nilai wajar berdasarkan laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Transfer of shares ownership and issuance of new shares (continued)

Pelindo (continued)

Based on Deed No. 9 dated April 27, 2022 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed among others:

- *Increase of issued and paid capital from 328,364 shares with nominal value of Rp328,364,000 to 1,480,305 shares with nominal value of Rp1,480,305,000 where the new issued shares of 1,151,941 shares with nominal value of Rp1,151,941,000 were taken fully by Pelindo as additional compensation of transfer of shares owned by Pelindo to the Company using fair value based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan's report dated March 31, 2022 as follows:*

Entitas/ *Entity*	Nilai Nominal Saham yang Telah Dialihkan Sebelumnya/ *Nominal Value of Shares Transferred Before*	Nilai Wajar Saham yang Dialihkan/ *Fair Value of Shares Transferred*	Tambahan Penerbitan Saham Baru/ *Additional Issuance of New Shares*	
PTPR	Rp24.750.000	Rp951.371.000	330.184 lembar/*shares*	Rp330.184.000
IKT	Rp129.614.000	Rp354.934.000	821.757 lembar/*shares*	Rp821.757.000
Total	**Rp154.364.000**	**Rp1.306.305.000**	**1.151.941 lembar/*shares***	**Rp1.151.941.000**

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima pemberitahuannya pada tanggal 27 April 2022.

The increase of the issued and paid capital has been notified to the Ministry of Law and Human Rights and the notification has been received on April 27, 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Pengalihan kepemilikan saham dan penerbitan saham baru (lanjutan)

Pelindo (lanjutan)

Selisih antara imbalan yang dialihkan (jumlah saham Perusahaan yang diterbitkan untuk Pelindo) dengan jumlah penambahan aset neto entitas yang dialihkan diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Transfer of shares ownership and issuance of new shares (continued)

Pelindo (continued)

The difference between consideration paid (the number of the Company's shares issued for Pelindo) with the carrying amount of the net assets of entities transferred are recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2025 and 2024, with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Peningkatan aset neto	**1.080.875.945**	***Increase in net assets***
Imbalan yang dialihkan	(1.306.305.000)	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor	**(225.429.055)**	***Additional paid-in capital***

PT Terminal Curah Utama

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 Desember 2022 dari Yatiningsih, S.H., M.H., notaris di Surabaya, Perusahaan membeli saham PT Terminal Curah Utama (dahulu, PT Terminal Curah Semarang) ("TCU") milik PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI"), pihak berelasi, sebanyak 1.020 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp153.898, yang telah dibayar pada 5 Desember 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Selisih antara imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto entitas yang dialihkan diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

PT Terminal Curah Utama

Based on Deed No. 11, dated December 5, 2022, of Yatiningsih, S.H., M.H., notary in Surabaya, the Company acquired PT Terminal Curah Utama (formerly, PT Terminal Curah Semarang) ("TCU") shares owned by PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI"), a related party, amounting to 1,020 shares with purchase price of Rp153,898, which was paid on December 5, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

The difference between consideration with the carrying amount of the net assets of entities transferred are recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2025 and 2024, with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Peningkatan aset neto	**(125.834)**	***Increase in net assets***
Imbalan yang dialihkan	(153.898)	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor	**(279.732)**	***Additional paid-in capital***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Pengalihan kepemilikan saham dan penerbitan saham baru (lanjutan)

PT Pelindo3 Terminal Petikemas ("P3TPK")

Berdasarkan akta No. 99 dan 100 tanggal 18 April 2023 dari Yatiningsih, S.H., M.H., notaris di Surabaya, PTPR membeli saham P3TPK milik PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS") sebanyak 495 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp668.949 serta membeli saham P3TPK milik Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia ("Kopelindo") sebanyak 5 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp6.757. PTPR telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada TPS dan Kopelindo pada tanggal 28 April 2023.

Pada tanggal 30 April 2025, PTPR menjual kepemilikan seluruh saham P3TPK kepada PT Pengerukan Indonesia (entitas sepengendali) dengan harga jual senilai Rp684.441. Sehingga per 31 Desember 2025, P3TPK bukan merupakan entitas anak dalam Grup.

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Transfer of shares ownership and issuance of new shares (continued)

PT Pelindo3 Terminal Petikemas ("P3TPK")

Based on Deed No. 99 and 100, dated April 18, 2023, of Yatiningsih, S.H., M.H., notary in Surabaya, PTPR acquired P3TPK shares owned by PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS") amounting to 495 shares with purchase price of Rp668,949 and acquired P3TPK shares owned by Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia ("Kopelindo") amounting to 5 shares with purchase price of Rp6,757. PTPR has made payment of the shares transfer to TPS and Kopelindo on April 28, 2023.

On April 30, 2025, PTPR sold its entire share ownership in P3TPK to PT Pengerukan Indonesia (a related entity under common control) for a selling price of Rp684,441. Consequently, as of December 31, 2025, P3TPK is no longer a subsidiary within the Group.

d. Subsidiaries

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries with effective percentage of ownership as follows:

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31,* 2025	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31,* 2024	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2025	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31,* 2024
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*							
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ *Container and multicargo terminal*	99,00%	99,00%	2013	989.833.975	933.871.637
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT")	Jakarta	Terminal kendaraan/*Car terminal*	71,28%	71,28%	2012	2.058.232.018	1.850.738.338
PT Terminal Curah Utama ("TCU")	Jakarta	Jasa pelayanan curah cair dan gas/ *Liquid bulk and gas services*	51,00%	51,00%	2015	20.858.794	16.420.307
Kepemilikan tidak langsung/ *Indirect ownership*							
Dimiliki melalui/ *Owned through* PTPR							
PT Pelindo3 Terminal Petikemas ("P3TPK")	Surabaya	Jasa layanan bongkar muat barang/ *Cargo loading and unloading service*	-	100,00%	2016	-	683.568
Operasi bersama/ *Joint operation*							
Dimiliki melalui/ *Owned through* IKT							
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI")	Gresik	Terminal kendaraan/*Car terminal*	45,00%	45,00%	2015	3.264.171	3.234.432

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 April 2026. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2c dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan menjaga kelangsungan usaha.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

e. Completion of the consolidated financial statements

The management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which were completed and authorized for issuance on April 30, 2026. The Company's Directors who signed the Director's Statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI).

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2c.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

1. Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee,*
2. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
3. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

1. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee,*
2. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
3. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

1. *Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,*
2. *Exposure or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
3. *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

1. *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,*
2. *Rights arising from other contractual arrangements, and*
3. *The Group's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income, and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Grup menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amendemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain). Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar, interpretasi, atau amendemen lain yang telah diterbitkan namun belum efektif.

Amendemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amendemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran *(exchangeability)* tidak tersedia. Amendemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

Amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other components of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

c. Changes in accounting principles

The Group applied for the first-time certain standards and amendments, which are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2025 (unless otherwise stated). The Group has not early adopted any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective.

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

This amendment did not have any impact on the Group's consolidated financial statements

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung *(variable fee approach)*.
- Pendekatan yang disederhanakan *(premium allocation approach)* yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek.

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi, baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dimasukkan dalam “beban operasi”.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Changes in accounting principles (continued)

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:

- *A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach).*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts.*

The new standard had no impact on the Group’s consolidated financial statements.

d. Business combination

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in “operating expenses”.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup *input* dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan *output*. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan *output*, dan *input* yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan *output* dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan *output*.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 109, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 109 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Business combination (continued)

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 109, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 109. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 109 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi item yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Business combination (continued)

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable but shall not exceed one year from the acquisition date.

Business combinations under common control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

i) Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal untuk selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), atau nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR").

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i) Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115: Revenue from contracts with customers.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flow. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:
- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi, atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha dan aset kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:
- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *FVTPL.*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified, or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash and cash equivalents, trade receivables and contract assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232: Instrumen keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Aset keuangan Grup yang diukur pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan termasuk investasi saham.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWLR dan NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232: Financial instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Groups's financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition includes investment in shares.

The Group has no financial assets at FVTPL and FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Grup) ketika:
- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's statement of financial position) when:
- *The rights to receive cash flows from the asset have expired, or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a 'pass-through' arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak dan piutang usaha tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets and trade do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

ii) Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

ii) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued expenses and other current liabilities.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entere into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan lain-lain, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and Accruals

Liabilities for trade and other payables, accrued expenses, and other current liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 26.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g. Transactions with related parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 224: Related Party Disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, in which such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 26.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak ketiga.

h. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Termasuk juga ke dalam biaya perolehan adalah biaya-biaya penggantian bagian dari aset tetap jika biaya itu terjadi, dan apabila terdapat kemungkinan yang besar bahwa Grup akan mendapat manfaat ekonomis di masa depan dari bagian aset tersebut serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Demikian pula, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *(carrying amount)* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tahun 2025, Grup meninjau ulang estimasi umur manfaat aset berdasarkan hasil penilaian pihak ketiga. Adapun perubahan umur manfaat yang berlaku mulai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Transactions with related parties (continued)

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the consolidated financial statements are third parties.

h. Fixed assets

All other fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment. Land is not depreciated. The cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

In 2025, the Group reviewed the estimate useful lives of assets. This change was based on an assessment conducted by third party specialists. The revised useful lives effective in 2025 are as follows:

Jenis Aset	Tahun/*Years* 2025	2024	*Type of Assets*
Bangunan fasilitas pelabuhan	5 - 50	5 - 50	*Building and port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	4 - 30	5 - 20	*Port facility equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5 - 40	4 - 25	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	5 - 50	5 - 40	*Roads and building*
Peralatan	4 - 15	4 - 25	*Equipment*
Kendaraan	5	5	*Vehicles*
Emplasemen	3 - 30	3 - 25	*Emplacement*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan dan akuisisi aset tetap, termasuk biaya pendanaan, jika ada. Biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pembangunannya telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset, yang merupakan perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatatnya, disajikan dalam laba rugi.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau ulang dan, jika diperlukan, akan disesuaikan secara prospektif pada setiap tanggal pelaporan.

i. Sewa

Grup menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Fixed assets (continued)

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction and acquisition of fixed assets, including financial costs, if any. These costs are transferred to the relevant asset account when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use.

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset, calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is included in profit or loss.

The residual values, useful lifes and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate, at each reporting date.

i. Lease

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Lease (continued)

The Group as lessee (continued)

Rights-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Grup sebagai pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas atau aset takberwujud yang belum dapat digunakan) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Lease (continued)

The Group as lessee (continued)

Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

The Group as lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

j. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life or an intangible asset not yet available for use) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of non-financial assets (continued)

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

k. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi andal mengenai jumlah tersebut dapat dibuat. jumlah kewajiban. Ketika Grup mengharapkan sebagian atau seluruh provisi akan diganti penggantian tersebut diakui sebagai aset terpisah, tetapi hanya jika penggantian tersebut hampir pasti. Beban yang berkaitan dengan provisi disajikan dalam laporan laba rugi setelah dikurangi penggantian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of non-financial assets (continued)

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

k. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Group expects some or all of a provision to be reimbursed the reimbursement is recognized as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit or loss net of any reimbursement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Provisi (lanjutan)

Jika pengaruh nilai waktu uang material, provisi didiskontokan menggunakan tarif sebelum pajak saat ini yang mencerminkan, jika sesuai, risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

l. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban

Grup mengadopsi PSAK 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dengan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Provision (continued)

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

l. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses

The Group adopted PSAK 115 "Revenue from Contracts with Customers" by providing a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban (lanjutan)

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 115, Grup juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk pendapatan non-petikemas, pengusahaan alat, kerjasama dan *fee for services*, pendapatan petikemas, pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik, pendapatan pas pelabuhan, dan lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Fitur yang mengindikasikan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal mencakup:

a. Grup mempunyai tanggung jawab utama menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan, atau memenuhi pesanan, misalnya Grup bertanggung jawab untuk penerimaan atas produk dan jasa yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan;

b. Grup mempunyai risiko persediaan sebelum atau setelah pesanan pelanggan, selama pengiriman atau pengembalian;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses (continued)

In addition, in adopting PSAK 115, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from non-container services, equipment services, partnership and fee for services, container services, land, building, water and electricity services, port entry fee, and others.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed, and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Features that indicate that the Group is acting as a principal include:

a. The Group has the main responsibility of providing goods or services to customers, or fulfilling orders, for example, the Group is responsible for receiving products and services ordered or purchased by customers;

b. The Group is subject to inventory risk before or after a customer order, during delivery or return;

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban (lanjutan)

Fitur yang mengindikasikan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal mencakup: (lanjutan)

c. Grup mempunyai kebebasan untuk menentukan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menyediakan barang dan jasa tambahan; dan

d. Grup menanggung risiko kredit pelanggan atas jumlah yang dapat diterima dari pelanggan.

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan jasa.

Pada tanggal pelaporan, pendapatan yang sudah diakui namun belum ditagihkan dicatat sebagai "piutang usaha - belum difakturkan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses (continued)

Features that indicate that the Group is acting as a principal include: (continued)

c. The Group has the freedom to determine prices either directly or indirectly, for example providing additional goods and services; and

d. The Group bears the credit risk of the customers for the amounts it can receive from the customers.

Revenues from an agency relationship are recorded based on the gross amount billed to the customers when the Group acts as principal in the sale of services. Revenues are recorded based on the net amount retained (the amount paid by the customer less amount paid to the suppliers) when, in substance, the Group have acted as agent and earned commission from the suppliers of the services sold.

At reporting date, revenues earned but not yet billed to customer are recorded as "trade receivables - unbilled" in the consolidated statement of financial position.

Lease Income

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expenses Recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan

Pajak penghasilan kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Grup telah menerapkan amendemen PSAK 212: Pajak Penghasilan, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Grup tidak memenuhi kriteria sebagaimana penerapan dalam PMK 136/2024 terkait dengan Pilar Dua.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation

Current income tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2025, the Group has applied amendments to PSAK 212: Income Taxes, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two. For the year ended December 31, 2025, the Group did not meet the criteria as applied in PMK 136/2024 related to Pillar Two.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:
i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:
i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;
ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:
i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. *Item* pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban, dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:
- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: Pajak Penghasilan.

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ISAK 123: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Value Added Tax

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT except:
- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

Final tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

Uncertainty over Income Tax

In accordance with ISAK 123: Uncertainty Over Income Tax Treatments which is effective on January 1, 2019, stated that the recognition and measurement of tax assets and liabilities that contain uncertainty over income tax are determined by considering whether to be treated separately or together, the assumptions used in the examination of tax treatments by the Tax Authorities, consideration the probability that the Tax Authorities will accept uncertain tax treatment and re-consideration or estimation if there is a change in facts and circumstances.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan (lanjutan)

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

n. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi baru dan amendemen standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amendemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian. Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan ("ESG") serta fitur serupa harus dinilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Uncertainty over Income Tax (continued)

If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is probable, the measurement is in line with income tax fillings. If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is not possible, the Group measures its tax balances using the method that provides the better predict of resolution (i.e. most likely amount or expected value).

Accordingly, management believes that the interpretation did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

n. Accounting standards issued but not yet effective

The new and amended standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated until the completion date of these consolidated financial statements:

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendments includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date. Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance ("ESG") and similar features should be assessed.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan (lanjutan)

Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur *non-recourse* dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amendemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (PKL).

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Grup tidak memperkirakan bahwa amendemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Kontra yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam

Amendemen tersebut mengklarifikasi penerapan persyaratan *own-use* untuk kontrak yang berada dalam ruang lingkup, mengubah persyaratan penetapan *(designation)* atas item yang dilindungi dalam hubungan lindung nilai arus kas untuk kontrak-kontrak tersebut, serta menambahkan persyaratan pengungkapan baru untuk memungkinkan investor memahami dampak kontrak tersebut terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments (continued)

The amendments also clarifiies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

The amendments are effective for annual periods starting on or after January 1, 2026 with early adoption permitted for classification of financial assets and related disclosures only. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Contracts Referencing Nature-dependent Electricity

The amendments clarify the application of the 'own-use' requirements for in-scope contracts, amend the designation requirements for a hedged item in a cash flow hedging relationship for in-scope contracts, and add new disclosure requirements to enable investors to understand the effect of these contracts on a company's financial performance and cash flows.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Kontra yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam (lanjutan)

Amendemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperbolehkan, namun harus diungkapkan. Amendemen terkait pengecualian *own-use* diterapkan secara retrospektif, sedangkan amendemen akuntansi lindung nilai diterapkan secara prospektif untuk hubungan lindung nilai baru yang ditetapkan sejak tanggal penerapan awal. Selain itu, amendemen pengungkapan dalam PSAK 107 harus diterapkan bersamaan dengan amendemen PSAK 109. Grup tidak memperkirakan bahwa amendemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2025)

Pada Oktober 2025, DSAK IAI mengesahkan revisi atas PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Revisi ini mencakup ruang lingkup dan penerapan dari metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dan pelepasan di ekuitas (*disposal in equity*) sebagai konsep akuntansi yang digunakan dalam PSAK 338. Perubahan utama mencakup pengecualian entitas investasi dari ruang lingkup PSAK 338, serta tambahan definisi bisnis alihan, entitas penerima, dan entitas pengalih.

Revisi ini juga mencakup rujukan jumlah tercatat bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis ketika terjadi ketidakpraktisan dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan. Revisi ini berlaku efektif 1 Januari 2026 dengan opsi penerapan dini.

Grup tidak memperkirakan bahwa amendemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Contracts Referencing Nature-dependent Electricity (continued)

The amendments will take effect for annual reporting periods starting on or after January 1, 2026. Early adoption is allowed, but it must be disclosed. The amendments concerning the own-use exception are to be applied retrospectively, while the hedge accounting amendments should be applied prospectively to new hedging relationships designated from the initial application date. Additionally, the PSAK 107 disclosure amendments must be implemented alongside the PSAK 109 amendments. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

PSAK 338: Business Combination under Common Control (2025 Revision)

On October 2025, DSAK IAI issued revisions to PSAK 338: Business Combinations of Entities Under Common Control. The revisions cover the scope and application of the pooling of interest method and disposal in equity as the accounting concepts used in PSAK 338. The key changes include the exclusion of investment entities from the scope of PSAK 338, as well as the addition of definitions for transferred business, receiving entity, and transferring entity.

The revision also includes references to the carrying amount of the transferred business and the presentation of pre-combination information when applying the pooling of interest method is impracticable. The revision is effective on 1 January 1, 2026 with early adoption permitted.

The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia), yang mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 110 Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAK 207 Laporan Arus Kas. Amendemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amendemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subtotal pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Annual improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia, which include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 Financial instruments: Disclosure, PSAK 109 Financial Instruments, PSAK 110 Consolidated Financial Statements and PSAK 207 Statements of Cash Flows. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statement

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (lanjutan)

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Grup saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amendemen tersebut.

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik - Pengungkapan

Standar baru tersebut memungkinkan entitas yang memenuhi syarat untuk memilih menerapkan pengungkapan yang lebih singkat dan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam standar akuntansi lainnya. Untuk memenuhi syarat, pada akhir periode pelaporan, entitas harus merupakan entitas anak sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110, tidak memiliki akuntabilitas publik, dan memiliki entitas induk (baik entitas induk akhir atau entitas induk perantara) yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk penggunaan publik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK Indonesia, SAK Internasional atau IFRS *accounting standards*.

PSAK 119 akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan. Grup memperkirakan bahwa standar baru tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2027 (continued)

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statement (continued)

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Group is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.

PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability - Disclosures

The new standard allows eligible entities to elect to apply its reduced disclosure requirements and still applying the recognition, measurement and presentation requirements in other accounting standards. To be eligible, at the end of the reporting period, an entity must be a subsidiary as defined in PSAK 110, cannot have public accountability and must have a parent (ultimate or intermediate) that prepares consolidated financial statements, available for public use, which comply with SAK Indonesia, SAK Internasional or IFRS accounting standards.

PSAK 119 will become effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with early application permitted. The Group anticipates that the new standard will have no material effect on the Group's financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 17e.

Tagihan restitusi pajak dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah tagihan restitusi pajak yang dicatat dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 17e.

Claims for tax refund and tax assessments under appeal

Based on tax regulations currently enacted, the management judges if the amounts of claims for tax refund recorded are recoverable from and refundable by the Tax Office.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian: (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 10.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements: (continued)

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 10.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha

Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Grup akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Nilai tercatat dari piutang usaha Grup sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp487.622.702 (2024: Rp818.226.347). Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 5.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment of trade receivables

The Group estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Group will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of the Group's trade receivables before allowance for impairment as of December 31, 2025 was Rp487,622,702 (2024: Rp818,226,347). Further details on trade receivables are disclosed in Note 5.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 (tiga) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.025.179.631 (2024: Rp714.794.030). Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 (three) to 50 (fifty) years, which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net carrying amount of the Group's fixed assets as of December 31, 2025 was Rp1,025,179,631 (2024: Rp714,794,030). Further details on fixed asset are disclosed in Note 9.

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of:

	2025	2024	
Kas			***Cash on hand***
Rupiah	2.250	11.797	*Rupiah*
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 26a)	448.504.204	256.510.861	*Related parties (Note 26a)*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk	5.516.626	30.697.799	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.567.533	56.182.296	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub-total	457.588.363	343.390.956	*Sub-total*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 26a)	1.449.861.561	1.334.000.000	*Related parties (Note 26a)*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	50.000.000	-	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Jabar Banten Syariah	45.000.000	-	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
Sub-total	1.544.861.561	1.334.000.000	*Sub-total*
Total kas dan setara kas	**2.002.452.174**	**1.677.402.753**	***Total cash and cash equivalent***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah berkisar antara 4,90% sampai dengan 7,25% (2024: antara 4,25% sampai dengan 7,00%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. Time deposits denominated in Rupiah earned interest at annual rates ranging from 4.90% to 7.25% (2024: from 4.25% to 7.00%) for the year ended December 31, 2025.

Kas dan setara kas tidak dijadikan jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya pada tanggal pelaporan.

Cash and cash equivalents were not used as collateral and not restricted to use at reporting date.

5. PIUTANG USAHA - NETO / *5. TRADE RECEIVABLES - NET*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables are as follows:

a. Berdasarkan pelanggan / *a. Based on customer*

	2025	2024	
Pihak berelasi			*Related parties*
Difakturkan	58.330.474	158.380.607	*Billed*
Belum difakturkan	62.085.521	87.780.137	*Unbilled*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(3.595.671)	(2.291.583)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto (Catatan 26b)	116.820.324	243.869.161	*Related parties - net (Note 26b)*
Pihak ketiga			*Third parties*
Difakturkan	325.179.560	457.043.374	*Billed*
Belum difakturkan	42.027.147	115.022.229	*Unbilled*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(139.590.705)	(157.417.253)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	227.616.002	414.648.350	*Third parties - net*
Total piutang usaha - neto	**344.436.326**	**658.517.511**	***Total trade receivables - net***

b. Berdasarkan umur / *b. Based on age*

	2025	2024	
Belum jatuh tempo	136.559.461	525.009.086	*Current*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 sampai 90 hari	200.144.831	115.636.029	*1 until 90 days*
91 sampai 180 hari	26.519.137	14.747.415	*91 until 180 days*
Lebih dari 180 hari	124.399.273	162.833.817	*Over 180 days*
Total	487.622.702	818.226.347	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(143.186.376)	(159.708.836)	*Allowance for impairment*
Total piutang usaha - neto	**344.436.326**	**658.517.511**	***Total trade receivables - net***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang

	2025	2024	
Saldo awal	159.708.836	117.755.472	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	5.657.107	41.953.364	Allowance for the year
Pemulihan penyisihan (Catatan 24)	(22.179.567)	-	Recovery of allowance (Note 24)
Saldo akhir	**143.186.376**	**159.708.836**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Piutang usaha tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

5. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)

The details of trade receivables are as follows: (continued)

c. The movement in the allowance for impairment of receivables

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

Trade receivables were not used as collateral at reporting date.

6. ASET KONTRAK - PIHAK BERELASI

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 26c)	239.223.437	104.293.548	Related parties (Note 26c)
Total	**239.223.437**	**104.293.548**	***Total***

Akun ini merupakan hak bersyarat yang dimiliki Grup sehubungan dengan pelayanan jasa barang non-petikemas.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan atas penurunan nilai aset kontrak.

Aset kontrak tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

6. CONTRACT ASSETS - RELATED PARTIES

This account represents a conditional right owned by the Group in relation to non-container service activities.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes no allowance for impairment of contract assets is necessary.

Contract assets were not used as collateral at reporting date.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *7. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES*

Rincian uang muka dan beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

The details of advances and prepaid expenses are as follows:

	2025	2024	
Uang muka			***Advances***
Operasional	5.612.416	4.538.058	*Operational*
Lain-lain	-	1.254.358	*Others*
Sub-total	5.612.416	5.792.416	*Sub-total*
Beban dibayar di muka			***Prepaid expenses***
Pemeliharaan	9.874.293	8.799.740	*Maintenance*
Bahan bakar minyak	4.800.261	-	*Fuels*
Asuransi	328.299	6.024.834	*Insurance*
Lain-lain	555.224	248.602	*Others*
Sub-total	15.558.077	15.073.176	*Sub-total*
Total	**21.170.493**	**20.865.592**	***Total***

Uang muka operasional terutama merupakan uang muka pegawai untuk keperluan operasional.

Advance - operational mainly consist of employee advances for operational purposes.

Beban dibayar di muka - pemeliharaan merupakan pembayaran atas perbaikan dermaga pelabuhan di cabang Jambi PTPR.

Prepaid expenses - maintenance represent payments for the repair of the port docks at the PTPR Jambi branch.

8. INVESTASI SAHAM / *8. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK*

			Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)		
	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Investasi saham pada NWPKL dimiliki melalui PTPR					***Investment in shares measured at FVOCI owned through PTPR***
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	3.465.500	3.860.000	0,10%	0,21%	*PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")*

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 September 2025, API menerima penambahan penyertaan modal dari PT Pelindo Solusi Logistik sebesar Rp1.907.368.340 melalui penerbitan saham baru sehingga kepemilikan investasi saham pada API terdilusi menjadi sebesar 0,10%.

Based on Deed No. 28 dated September 26, 2025, API received an additional capital contribution from PT Pelindo Solusi Logistik amounting to Rp1,907,368,340 through the issuance of new shares, resulting in the ownership investment in share in API diluted to 0.10%

Pada tanggal 31 Desember 2025, PTPR melakukan kajian penurunan nilai atas investasi saham tersebut dan mengakui penurunan nilai sebesar Rp394.500 yang dicatat melalui penghasilan komprehensif lainnya.

On December 31, 2025, PTPR conducted an impairment assessment of the investment and recognized an impairment loss of Rp394,500, which was recorded through other comprehensive income.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - NETO

Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

9. *FIXED ASSETS - NET*

The movements in fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/*Year ended December 31, 2025*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	274.343.499	-	-	(8.876.079)	265.467.420	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	258.093.573	67.683.195	(37.336.976)	22.929.425	311.369.217	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	138.094.101	19.209.222	-	81.146.684	238.450.007	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	201.753.113	-	(1.973.090)	16.848.834	216.628.857	*Roads and buildings*
Peralatan	121.839.506	557.320	-	6.444.903	128.841.729	*Equipment*
Kendaraan	2.177.052	-	-	(1.846.222)	330.830	*Vehicles*
Emplasemen	31.391.189	-	-	6.720.880	38.112.069	*Emplacement*
Aset dalam pembangunan	28.899.168	279.419.412	(2.781.901)	(124.401.009)	181.135.670	*Construction in progress*
Sub-total	1.056.591.201	366.869.149	(42.091.967)	(1.032.584)	1.380.335.799	*Sub-total*
Biaya perolehan						***Cost***
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	*Roads and buildings*
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Sub-total	11.980.847	-	-	-	11.980.847	*Sub-total*
Total biaya perolehan	**1.068.572.048**	**366.869.149**	**(42.091.967)**	**(1.032.584)**	**1.392.316.646**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(63.361.073)	(7.133.461)	-	5.272.063	(65.222.471)	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	(102.209.519)	(17.343.513)	36.518.045	(2.707.193)	(85.742.180)	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(48.129.798)	(9.478.271)	-	(379.944)	(57.988.013)	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	(47.760.451)	(9.495.139)	1.933.628	(3.265.422)	(58.587.384)	*Roads and buildings*
Peralatan	(70.870.052)	(5.902.155)	-	2.207.981	(74.564.226)	*Equipment*
Kendaraan	(1.746.291)	(276.933)	-	1.753.911	(269.313)	*Vehicles*
Emplasemen	(14.062.971)	(2.708.652)	-	(2.019.550)	(18.791.173)	*Emplacement*
Sub-total	(348.140.155)	(52.338.124)	38.451.673	861.846	(361.164.760)	*Sub-total*
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.403.862)	(151.575)	-	-	(1.555.437)	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	(429.975)	-	-	-	(429.975)	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(148.820)	-	-	-	(148.820)	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	(551.734)	(5.221)	-	-	(556.955)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.505.105)	-	-	-	(1.505.105)	*Equipment*
Emplasemen	(1.598.367)	(177.596)	-	-	(1.775.963)	*Emplacement*
Sub-total	(5.637.863)	(334.392)	-	-	(5.972.255)	*Sub-total*
Total akumulasi penyusutan	**(353.778.018)**	**(52.672.516)**	**38.451.673**	**861.846**	**(367.137.015)**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku	**714.794.030**				**1.025.179.631**	***Net book value***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. *FIXED ASSETS - NET (continued)*

The movements in fixed assets are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/*Year ended December 31, 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	264.545.613	-	-	9.797.886	274.343.499	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	204.397.662	320.000	-	53.375.911	258.093.573	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	88.797.721	-	-	49.296.380	138.094.101	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	167.785.476	-	-	33.967.637	201.753.113	*Roads and buildings*
Peralatan	113.743.207	-	-	8.096.299	121.839.506	*Equipment*
Kendaraan	2.177.052	-	-	-	2.177.052	*Vehicles*
Emplasemen	23.184.489	-	-	8.206.700	31.391.189	*Emplacement*
Aset dalam pembangunan	55.120.590	144.529.458	(1.064.619)	(169.686.261)	28.899.168	*Construction in progress*
Sub-total	919.751.810	144.849.458	(1.064.619)	(6.945.448)	1.056.591.201	*Sub-total*
Biaya perolehan						***Cost***
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.680.537	-	-	-	4.680.537	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	438.750	-	-	-	438.750	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	151.857	-	-	-	151.857	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	643.361	-	-	-	643.361	*Roads and buildings*
Peralatan	1.535.822	-	-	-	1.535.822	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Sub-total	11.980.847	-	-	-	11.980.847	*Sub-total*
Total biaya perolehan	**931.732.657**	**144.849.458**	**(1.064.619)**	**(6.945.448)**	**1.068.572.048**	***Total cost***
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(52.534.695)	(11.618.455)	-	792.077	(63.361.073)	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	(84.043.955)	(18.145.764)	-	(19.800)	(102.209.519)	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(40.670.560)	(7.459.238)	-	-	(48.129.798)	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	(35.546.202)	(11.422.172)	-	(792.077)	(47.760.451)	*Roads and buildings*
Peralatan	(51.542.421)	(19.327.631)	-	-	(70.870.052)	*Equipment*
Kendaraan	(1.766.091)	-	-	19.800	(1.746.291)	*Vehicles*
Emplasemen	(9.281.078)	(4.781.893)	-	-	(14.062.971)	*Emplacement*
Sub-total	(275.385.002)	(72.755.153)	-	-	(348.140.155)	*Sub-total*
Dikurangi:						***Less:***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Operasi bersama						***Joint operation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.247.877)	(155.985)	-	-	(1.403.862)	*Port facilities buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	(429.975)	-	-	-	(429.975)	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(148.820)	-	-	-	(148.820)	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	(494.840)	(56.894)	-	-	(551.734)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.505.105)	-	-	-	(1.505.105)	*Equipment*
Emplasemen	(1.420.769)	(177.598)	-	-	(1.598.367)	*Emplacement*
Sub-total	(5.247.386)	(390.477)	-	-	(5.637.863)	*Sub-total*
Total akumulasi penyusutan	**(280.632.388)**	**(73.145.630)**	**-**	**-**	**(353.778.018)**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku	**651.100.269**				**714.794.030**	***Net book value***

Aset operasi bersama merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh MKO MTKI berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Maspion Industrial Estate (“MIE”) (Catatan 27).

Joint operation assets represent assets that are transferred to be managed by MKO MTKI based on a contractual agreement with PT Maspion Industrial Estate (“MIE”) (Note 27).

Beban penyusutan aset tetap sebesar Rp52.672.516 (2024: Rp73.145.630) dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 23).

Depreciation expense of fixed assets amounted to Rp52,672,516 (2024: Rp73,145,630) was recorded as part of operating expenses (Note 23).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

9. *FIXED ASSETS - NET (continued)*

The details of construction in progress are as follows:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*			
	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	
Bangunan fasilitas pelabuhan	35%-95%	86.693.125	Feb-Agustus/*Feb-Aug 2026*	*Port facilities building*
Peralatan	65%	52.440.144	Juli/*July 2026*	*Equipment*
Alat fasilitas pelabuhan	51%-86%	29.044.973	Apr-Mei/*Apr-May 2026*	*Port facilities equipments*
Instalasi fasilitas pelabuhan	65%	10.809.760	Mei/*May* 2026	*Port facilities installation*
Jalan dan bangunan	95%	1.484.283	Feb/*Feb 2026*	*Roads and buildings*
Emplasemen	89%	663.385	April/*Apr 2026*	*Emplacement*
		181.135.670		

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	
Instalasi fasilitas pelabuhan	80%-95%	11.767.713	Apr/*Apr* 2025	*Port facilities installation*
Peralatan	95%	6.537.900	Feb/*Feb 2025*	*Equipment*
Bangunan fasilitas pelabuhan	24%	5.311.520	Des/*Dec 2026*	*Port facilities building*
Jalan dan bangunan	95%	3.546.937	Maret/*March 2025*	*Roads and buildings*
Alat fasilitas pelabuhan	20%-50%	1.329.687	Mar-Apr/*Mar-Apr 2025*	*Port facilities equipments*
Emplasemen	95%	405.411	Feb/*Feb 2025*	*Emplacement*
		28.899.168		

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya melalui asuransi bersama Pelindo berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan jumlah nilai pertanggungan sekitar Rp787.171.860 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of December 31 2025, the fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks through join insurance with Pelindo under a policy package with combined coverage amounting to Rp787,171,860 which in management's opinion are adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2025 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud dengan biaya perolehan Rp1.032.584 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp861.846.

Reclassification as of December 31, 2025, was reclassification of fixed assets into intangible asset amounting to Rp1,032,584 and accumulated depreciation amounted Rp861,846.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2024 merupakan reklasifikasi aset dalam konstruksi dan aset tetap menjadi aset tidak lancar lainnya masing-masing sebesar Rp3.689.842 dan Rp3.255.606 (Catatan 11).

Reclassification as of December 31, 2024 was reclassification of construction in progress and fixed assets into other non-current assets amounting to Rp3,689,842 and Rp3,255,606, respectively (Note 11).

Laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Gain on sale of fixed assets are as follows:

	2025	2024	
Penerimaan penjualan aset tetap	14.542.348	-	*Proceeds from sales of fixed assets*
Nilai tercatat neto	(858.393)	-	*Net carrying value*
Laba penjualan aset tetap	**13.683.955**	**-**	***Gain from sales of fixed assets***

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that there was no impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

Seluruh aset tetap tidak dijadikan jaminan pada tanggal pelaporan.

All fixed assets were not used as collateral at reporting date.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. SEWA / *10. LEASE*

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut: / *The movements in right-of-use assets are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/*Year ended December 31, 2025*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	916.306.515	37.656.256	(50.558.552)	-	903.404.219	*Land and port facilities buildings*
Jalan dan bangunan	34.554.519	29.781.593	(19.963.743)	-	44.372.369	*Roads and buildings*
Peralatan	98.962	-	(98.962)	-	-	*Equipment*
Kendaraan	6.419.619	2.054.275	(2.029.908)	-	6.443.986	*Vehicles*
Sub-total	957.379.615	69.492.124	(72.651.165)	-	954.220.574	*Sub-total*
Dikurangi: **Akumulasi penyusutan**						***Less:*** ***Accumulated depreciation***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	(381.079.852)	(80.482.225)	45.390.891	-	(416.171.186)	*Land and port facilities buildings*
Jalan dan bangunan	(21.889.255)	(11.362.905)	19.963.743	-	(13.288.417)	*Roads and buildings*
Peralatan	(98.962)	-	98.962	-	-	*Equipment*
Kendaraan	(5.285.005)	(1.402.232)	1.851.569	-	(4.835.668)	*Vehicles*
Sub-total	(408.353.074)	(93.247.362)	67.305.165	-	(434.295.271)	*Sub-total*
Nilai buku	**549.026.541**				**519.925.303**	***Net book value***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/*Year ended December 31, 2024*					
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	904.461.562	11.844.953	-	-	916.306.515	*Land and port facilities buildings*
Jalan dan bangunan	34.554.519	-	-	-	34.554.519	*Roads and buildings*
Peralatan	98.962	-	-	-	98.962	*Equipment*
Kendaraan	5.386.244	1.345.470	(312.095)	-	6.419.619	*Vehicles*
Sub-total	944.501.287	13.190.423	(312.095)	-	957.379.615	*Sub-total*
Dikurangi: **Akumulasi penyusutan**						***Less:*** ***Accumulated depreciation***
Tanah dan bangunan fasilitas pelabuhan	(299.405.623)	(81.674.229)	-	-	(381.079.852)	*Land and port facilities buildings*
Jalan dan bangunan	(12.135.505)	(9.753.750)	-	-	(21.889.255)	*Roads and buildings*
Peralatan	(98.962)	-	-	-	(98.962)	*Equipment*
Kendaraan	(4.154.799)	(1.308.545)	178.339	-	(5.285.005)	*Vehicles*
Sub-total	(315.794.889)	(92.736.524)	178.339	-	(408.353.074)	*Sub-total*
Nilai buku	**628.706.398**				**549.026.541**	***Net book value***

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The detail of lease liabilities is as follows:*

	2025	2024	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Bagian lancar	76.809.940	43.698.904	*Current portion*
Bagian jangka panjang	431.880.353	391.824.887	*Non-current portion*
Total	**508.690.293**	**435.523.791**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut: / *Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:*

	2025	2024	
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 25)	35.368.154	33.027.694	*Interest on lease liabilities (Note 25)*
Beban penyusutan aset hak-guna	93.247.362	92.736.524	*Depreciation of right-of-use assets*
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	408.748	1.101.893	*Expense related to short-term liabilities or low-value assets*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. SEWA (lanjutan) / *10. LEASE (continued)*

Beban penyusutan aset hak-guna dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 23).

Depreciation expense of right-of-use assets is recorded as part of operating expenses (Note 23).

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllows:

	2025	2024	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Saldo awal	435.523.791	418.417.235	*Beginning balance*
Penambahan	69.492.124	13.190.423	*Addition*
Arus kas	(26.347.776)	(28.393.436)	*Cash flows*
Penambahan bunga	35.368.154	33.027.694	*Accretion of interest*
Terminasi kontrak	(5.346.000)	(718.125)	*Contract termination*
Total	**508.690.293**	**435.523.791**	***Total***

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *11. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	2025	2024	
Beban tangguhan			*Deferred expenses*
Harga perolehan	48.069.366	40.449.501	*Cost*
Akumulasi amortisasi	(22.531.975)	(13.276.064)	*Accumulated amortization*
Sub-total	25.537.391	27.173.437	*Sub-total*
Uang jaminan	4.354.995	4.354.995	*Security deposits*
Aset takberwujud - neto	1.903.229	3.224.301	*Intangible assets - net*
Lain-lain	-	5.496.945	*Others*
Total	**31.795.615**	**40.249.678**	***Total***

Beban tangguhan terutama merupakan beban atas perbaikan berat aset dan sertifikasi yang diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

Deferred expenses mainly represent expenses for the assets overhaul and certification which is amortized over the useful life.

Uang jaminan merupakan uang jaminan pelayanan listrik, lapangan penumpukan, dan pelayanan kesehatan.

Security deposits represent deposits for electricity services, standing yard, and health services.

Aset takberwujud berupa piranti lunak merupakan aset yang akan memberikan manfaat ekonomis di masa depan berupa jasa pengembangan sistem *e-invoice* dan *dashboard* dan diamortisasi selama 5 (lima) tahun.

Intangible assets in form of software represents asset that will provide economic benefits in the form of e-invoice system development services and dashboard and is amortized over a period of 5 (five) years.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

The details of trade payables are as follows:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 26d)	200.659.341	239.804.747	*Related parties (Note 26d)*
Pihak ketiga	55.810.600	41.970.700	*Third parties*
Total	**256.469.941**	**281.775.447**	***Total***

Semua utang usaha Grup adalah dalam mata uang Rupiah.

All of the Group's trade payables are denominated in rupiah.

Utang usaha Grup merupakan utang usaha kerja sama mitra usaha yang timbul dari transaksi terkait pelayanan jasa non-petikemas serta bahan habis pakai yang digunakan dalam operasional.

The Group's trade payables are mainly payable for partnership related to non-container services and consumables for operational.

13. UTANG LAIN-LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other payables are as follows:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 26e)	114.301.166	171.481.738	*Related parties (Note 26e)*
Pihak ketiga	1.306.639	1.450.149	*Third parties*
Total	**115.607.805**	**172.931.887**	***Total***

Semua utang lain-lain Grup adalah dalam mata uang Rupiah.

All of the Group's other payables are denominated in Rupiah.

Utang lain-lain - pihak ketiga terutama merupakan utang kepada kontraktor.

Other payables - third parties are mainly consist of payables to contractors.

14. BEBAN AKRUAL / *14. ACCRUED EXPENSES*

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

The details of accrued expenses are as follows:

	2025	2024	
Kerjasama mitra usaha	566.373.341	449.811.907	*Partnership*
Pegawai	259.080.573	278.629.949	*Employees*
Penambahan aset	193.168.152	12.381.081	*Additional of assets*
Umum	73.292.934	43.887.980	*General*
Pemeliharaan	65.976.334	64.174.826	*Maintenance*
Administrasi kantor	15.293.471	11.833.683	*Office administration*
Bahan	12.118.564	17.153.304	*Material*
Kesehatan	5.843.316	5.822.623	*Medical*
Asuransi	3.405.529	1.455.165	*Insurance*
Lain-lain	4.217.933	6.768.037	*Others*
Total	**1.198.770.147**	**891.918.555**	***Total***

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual bonus pegawai dan tantiem direksi.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

14. BEBAN AKRUAL (lanjutan) / 14. ACCRUED EXPENSES (continued)

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat serta beban *revenue sharing* dengan Pelindo.

Accrued expenses - partnership mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing stevedoring activities including revenue sharing expenses with Pelindo

Beban akrual - pemeliharaan terutama merupakan beban pemeliharaan alat-alat fasilitas pelabuhan, beban elektrikal, dan beban telekomunikasi.

Accrued expenses - maintenance mainly represents maintenance expenses of port facility tools, electrical expense, and telecommunication expense.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban konsesi dan konsultan.

Accrued expenses - general represents accrued concession and consultant expenses.

15. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA / 15. OTHER CURRENT LIABILITIES

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities are as follows:

	2025	2024	
Uang titipan			*Deposits*
Pihak berelasi (Catatan 26f)	14.476.484	15.046.183	*Related parties (Note 26f)*
Pihak ketiga	5.695.283	7.030.834	*Third parties*
Sub-total	20.171.767	22.077.017	*Sub-total*
Utang dividen (Catatan 21)	13.663.295	-	*Dividend payables (Note 21)*
Lain-lain	273.724	335.883	*Others*
Total	**34.108.786**	**22.412.900**	***Total***

Uang titipan terutama merupakan sisa dana pengguna jasa yang belum dikembalikan kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan layanan berikutnya, termasuk uang titipan dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi, dan koperasi pegawai.

Deposits mainly represent remaining funds from customers that have not been settled or will be applied to subsequent services, including deposits deducted from employees' monthly salaries for jamsostek contributions, insurance, and employee cooperatives.

16. LIABILITAS KONTRAK / 16. CONTRACT LIABILITIES

Rincian liabilitas kontrak adalah sebagai berikut:

The details of contract liabilities are as follows:

	2025	2024	
Uang muka pelanggan			*Advances from customers*
Pihak berelasi (Catatan 26g)	3.954.030	2.634.796	*Related parties (Note 26g)*
Pihak ketiga	18.340.910	36.548.245	*Third parties*
Pendapatan sewa diterima di muka	1.062.334	2.185.801	*Unearned rental revenue*
Total	**23.357.274**	**41.368.842**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	(23.357.274)	(40.850.352)	*Current portion*
Bagian tidak lancar	**-**	**518.490**	***Non-current portion***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

16. LIABILITAS KONTRAK (lanjutan) / 16. CONTRACT LIABILITIES (continued)

Uang muka pelanggan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa non-petikemas, pelayanan jasa petikemas, dan jasa logistik dari Grup.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive non-container services, container services, and logistic services from the Group.

17. PERPAJAKAN / 17. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

Rincian pajak dibayar di muka adalah sebagai berikut: / *Details of prepaid taxes are as follows:*

	2025	2024	
Perusahaan			*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai	17.180.726	8.036.026	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan	-	5.423.075	*Income taxes*
Sub-total	17.180.726	13.459.101	*Sub-total*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan	3.437.050	1.140.537	*Income taxes*
Pajak Pertambahan Nilai	-	14.200.230	*Value Added Tax*
Sub-total	3.437.050	15.340.767	*Sub-total*
Total	**20.617.776**	**28.799.868**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut: / *Details of taxes payable are as follows:*

	2025	2024	
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 25	2.818.592	-	*Article 25*
Pasal 4(2)	2.289.131	377.308	*Article 4(2)*
Pasal 23/26	1.021.944	2.685.556	*Article 23/26*
Pasal 15	-	58.863	*Article 15*
Pasal 21	-	1.809.563	*Article 21*
Sub-total	6.129.667	4.931.290	*Sub-total*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan			
badan (Pasal 29)	29.755.407	13.124.380	*Corporate income tax (Article 29)*
Pajak Pertambahan Nilai	10.305.253	2.024.055	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 25	5.944.914	4.240.077	*Article 25*
Pasal 23/26	1.681.743	2.245.066	*Article 23/26*
Pasal 21	1.499.228	1.510.462	*Article 21*
Pasal 4(2)	1.346.002	491.625	*Article 4(2)*
Sub-total	50.532.547	23.635.665	*Sub-total*
Total	**56.662.214**	**28.566.955**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba pajak, adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax income, are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan	681.172.793	354.220.479	*Income before corporate income tax*
Dikurangi:			*Less:*
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	(512.477.338)	(244.269.935)	*Income before corporate income tax of subsidiaries*
Eliminasi	173.745.823	191.079.376	*Elimination*
Laba sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	342.441.278	301.029.920	*Income before corporate income tax - the Company*
Beda temporer:			*Temporary differences:*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(65.245.154)	65.029.278	*Provision for employee benefits*
Bonus dan tantiem	2.013.851	(5.355.241)	*Bonus and tantiem*
Penyisihan penurunan nilai	5.657.107	7.081.413	*Allowance for impairment*
Penyusutan aset tetap	(4.204.164)	2.435.729	*Depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset hak-guna	(163.219)	224.340	*Depreciaiton of right-of-use assets*
Beda permanen:			*Permanent differences:*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(223.263.949)	(241.968.027)	*Income subject to final income tax*
Beban berkaitan pajak penghasilan final	6.882.347	4.124.487	*Expenses related to final income tax*
Beban promosi	21.761.476	14.117.967	*Promotional expenses*
Beban kesejahteraan karyawan	31.128.190	28.362.249	*Employees social welfare expenses*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	7.071.825	16.953.508	*Non-deductible expenses*
Sub-total	(218.361.690)	(108.994.297)	*Sub-total*
Taksiran laba pajak	124.079.588	192.035.623	*Estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan kini	**27.297.510**	**42.247.837**	***Current income tax expense***
Dikurangi pajak dibayar di muka:			*Less prepaid taxes:*
PPh pasal 23	(24.086.077)	(8.424.731)	*Income tax article 23*
PPh pasal 25	(42.263.532)	(63.119.665)	*Income tax article 25*
Lebih bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	**(39.052.099)**	**(29.296.559)**	***Over payment of corporate income tax - the Company***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / 17. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) / *c. Corporate income tax (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku yaitu 22% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate of 22% for the year ended December 31, 2025 and 2024, respectively, are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan	681.172.793	354.220.479	*Income before corporate income tax*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	149.858.014	77.928.505	*Income tax calculated at applicable rate*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(52.628.811)	(43.370.571)	*Income subject to final income tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	58.199.007	49.907.867	*Non-deductible expenses*
Beban pajak penghasilan	**155.428.210**	**84.465.801**	***Corporate income tax expense***

d. Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut: / *d. The details of income tax expenses are as follows:*

	2025	2024	
Beban pajak final			***Final tax expense***
Perusahaan	5.939.865	4.097.721	*The Company*
Entitas anak	16.040.194	13.221.260	*Subsidiaries*
Total	**21.980.059**	**17.318.981**	***Total***
Beban pajak penghasilan badan			***Corporate income tax expenses***
Kini			*Current*
Perusahaan	(27.297.510)	(42.247.837)	*The Company*
Entitas anak	(112.852.613)	(66.037.121)	*Subsidiaries*
Sub-total	(140.150.123)	(108.284.958)	*Sub-total*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	(13.627.147)	14.050.833	*The Company*
Entitas anak	(1.650.940)	9.768.324	*Subsidiaries*
Sub-total	(15.278.087)	23.819.157	*Sub-total*
Total	**(155.428.210)**	**(84.465.801)**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	2025	2024	
Taksiran laba kena pajak			*Estimated taxable income*
Perusahaan	124.079.588	192.035.623	*The Company*
Entitas anak	514.666.155	301.000.201	*Subsidiaries*
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	638.745.743	493.035.824	*Total estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan badan - kini			*Corporate income tax expense - current*
Perusahaan	27.297.510	42.247.837	*The Company*
Entitas anak	112.852.613	65.977.427	*Subsidiaries*
Hasil ketetapan pajak	-	59.694	*Tax assessment letters*
Jumlah beban pajak penghasilan badan - kini menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	140.150.123	108.284.958	*Corporate income tax expense - current per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			*Less prepaid income tax*
Perusahaan	66.349.607	71.544.396	*The Company*
Entitas anak	83.097.206	91.291.300	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	149.446.813	162.835.696	*Total prepaid income tax*
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29			***Estimated income tax payable - Article 29***
Entitas anak	29.755.407	13.124.380	*Subsidiaries*
Total	**29.755.407**	**13.124.380**	***Total***
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			***Estimated claim for tax refund***
Perusahaan	68.348.658	29.296.559	*The Company*
Entitas anak	38.378.559	38.378.559	*Subsidiaries*
Total	**106.727.217**	**67.675.118**	***Total***

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

f. Deferred taxes

The details of deferred tax assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ *Year ended December 31, 2025*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Perusahaan					*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	28.174.516	(14.353.934)	-	13.820.582	*Employees benefit liabilities*
Bonus dan tantiem	19.282.837	443.047	-	19.725.884	*Bonus and tantiem*
Penyisihan penurunan nilai piutang	2.517.026	1.244.564	-	3.761.590	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan aset tetap	1.279.996	(924.916)	-	355.080	*Depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset hak-guna	(237.280)	(35.908)	-	(273.188)	*Depreciation of right-of-use assets*
Sub-total	51.017.095	(13.627.147)	-	37.389.948	*Sub-total*
Entitas anak	89.408.456	(457.406)	(1.193.534)	87.757.516	*Subsidiaries*
Total	**140.425.551**	**(14.084.553)**	**(1.193.534)**	**125.147.464**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Perusahaan					*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	13.868.075	14.306.441	-	28.174.516	*Employees benefit liabilities*
Bonus dan tantiem	21.681.572	(1.178.153)	(1.220.582)	19.282.837	*Bonus and tantiem*
Penyisihan penurunan nilai piutang	959.114	1.557.912	-	2.517.026	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan aset tetap	744.136	535.860	-	1.279.996	*Depreciation of fixed assets*
Penyusutan aset hak-guna	(286.635)	49.355	-	(237.280)	*Depreciation of right-of-use assets*
Sub-total	36.966.262	15.271.415	(1.220.582)	51.017.095	*Sub-total*
Entitas anak	79.640.132	15.175.332	(5.407.008)	89.408.456	*Subsidiaries*
Total	**116.606.394**	**30.446.747**	**(6.627.590)**	**140.425.551**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak

IKT

Pada berbagai tanggal di tahun 2024, IKT menerima surat tagihan pajak atas berbagai macam pajak penghasilan untuk berbagai masa pajak di tahun 2022 dan PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2022. IKT mengakui beban sebesar Rp6.798 sehubungan dengan tagihan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2024.

TCU

Pada tanggal 10 Januari 2025, TCU menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk pajak penghasilan badan tahun fiskal 2023 sebesar Rp62.800 dari klaim tagihan pajak yang sebelumnya dilaporkan sebesar Rp138.504 dan dilakukan pembetulan sehingga klaim tagihan pajak untuk periode 2023 menjadi Rp122.493, serta beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") senilai total Rp7.142. Selanjutnya, TCU telah menerima seluruh pengembalian lebih pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2025 setelah dikurangi pembayaran atas STP.

TCU menyetujui surat ketetapan tersebut, tidak mengajukan keberatan ke Kantor Pajak, dan telah mencatatkan sebesar Rp59.694 sebagai bagian dari beban pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

17. TAXATION (continued)

g. Tax assessment letter

IKT

On various dates in 2024, IKT received tax underpayment for various witholding taxes for various tax periods in 2022 and VAT for various tax periods in 2022. IKT recognized an expense of Rp6,798 in relation to these claims in the statement of profit or loss and other comprehensive income year 2024.

TCU

On January 10, 2025, TCU received Tax Assessment Letter of Overpayment ("SKPLB") for corporate income tax for fiscal year 2023 amounting to Rp62,800 from a previously reported claim for tax refund amounting to Rp138,504 and it was revised thus the tax claim for period 2023 became Rp122,493, and several Tax Collection Letter ("STP") totalling Rp7,142. Subsequently, TCU has received a full refund after deducted with payment of STP on February 21, 2025.

TCU agreed with the assesment letters, did not submit any objection letter to the Tax Office, and has recorded amounting to Rp59,694 as part of tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

18. CAPITAL STOCK

The composition of the shareholders as of December 31, 2025 and 2024 was as follows:

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Total nilai nominal/ *Total nominal amount*	*Shareholders*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.480.131	99,99%	1.480.131.000	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	174	0,01%	174.000	*PT Integrasi Logistik Cipta Solusi*
Total	**1.480.305**	**100,00%**	**1.480.305.000**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada setiap rapat umum tahunan pemegang saham.

18. CAPITAL STOCK (continued)

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its businesses and to maximize the shareholders' value.

The Company is required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company at each annual general meeting shareholders.

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The details of additional paid-in capital are as follows:

	2025	2024	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 1c)			*Difference in value of business combination transaction of entities under common control (Note 1c)*
PTPR dan IKT	(225.429.055)	(225.429.055)	*PTPR and IKT*
TCU	(279.732)	(279.732)	*TCU*
P3TPK	-	978	*P3TPK*
Total	**(225.708.787)**	**(225.707.809)**	***Total***

20. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Perusahaan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. 09 tanggal 19 Juni 2025 dari Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2024 sebagai berikut:

- pembagian dividen sebesar Rp350.000.000:
  a) dividen tunai sebesar Rp196.000.000;
  b) penarikan dividen dari cadangan lainnya sebesar Rp154.000.000.
- cadangan wajib sebesar Rp10.356.942;
- cadangan lainnya sebesar Rp781.888.

20. CASH DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

The Company

Based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No. 9 dated June 19, 2025 of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, a notary in South Jakarta, the Company's shareholders determined the use of the Company's net profit for the year 2024 as follows:

- *dividend distribution amounting to Rp350,000,000:*
  a) cash dividend amounting to Rp196,000,000;
  b) dividend withdrawal from retained earnings amounting to Rp154,000,000.
- *general reserves amounting to Rp10.356.942;*
- *retained earnings amounting to Rp781.888.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

20. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pembagian dividen tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 30 Juni dan 3 Oktober 2025.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. SK.03/12/6/9/PGAP/WDUT/PLND-24 dan No. SK.03/12/6/5/HKP/DRU/PSD-24 tanggal 12 Juni 2024, pemegang saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2023 sebagai berikut:

- pembagian dividen sebesar Rp475.000.000;
- cadangan umum sebesar Rp28.010.929;
- cadangan lainnya sebesar Rp57.207.653.

Pembagian dividen tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 1 dan 8 Juli 2024.

20. CASH DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

The Company (continued)

The dividend distribution above has been fully paid on June 30 and October 3, 2025.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. SK.03/12/6/9/PGAP/WDUT/PLND-24 and No. SK.03/12/6/5/HKP/DRU/PSD-24 dated June 12, 2024, the Company's shareholders determined the use of the Company's net profit for the year 2023 as follows:

- *dividend distribution amounting to Rp475,000,000;*
- *general reserves amounting to Rp28,010,929;*
- *retained earnings amounting to Rp57,207,653.*

The dividend distribution above has been fully paid on July 1 and 8, 2024.

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

21. NON-CONTROLLING INTERESTS

The details of non-controlling interests are as follows:

	Aset Neto/*Net Assets*		Laba Neto/*Net Income*		
	31 Desember/ *December 31,*	31 Desember/ *December 31,*	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	2024	2025	2024	
IKT	390.822.075	366.819.958	73.670.446	60.948.494	*IKT*
PTPR	5.261.964	4.442.095	1.323.814	(281.932)	*PTPR*
TCU	6.320.692	3.441.587	4.872.709	1.949.286	*TCU*
Total	**402.404.731**	**374.703.640**	**79.866.969**	**62.615.848**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Pembagian dividen

IKT

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 41 tanggal 17 Juni 2025 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham IKT menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 sebagai berikut:

- pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp169.772.981, dimana sebesar Rp44.407.321 telah dibagikan sebagai dividen interim tahun 2024 sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp125.365.660;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisanya sebesar Rp40.443.246 akan digunakan sebagai laba ditahan.

Pembagian dividen final tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 7 dan 15 Juli 2025.

Pada tanggal 24 Desember 2025, IKT mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2025 sebesar Rp47.574.220, yang belum dibayarkan, dengan porsi pemegang saham nonpengendali sebesar Rp13.663.295 (Catatan 15).

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 10 Juni 2024 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham IKT menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 sebagai berikut:

- pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp152.683.875, dimana sebesar Rp39.236.506 telah dibagikan sebagai dividen interim tahun 2023 sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp113.447.369;
- cadangan umum sebesar Rp2.000.000;
- sisanya sebesar Rp36.170.969 akan digunakan sebagai laba ditahan.

Pembagian dividen tersebut di atas telah dibayarkan lunas pada tanggal 8, 10, dan 11 Juli 2024.

21. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Dividend distribution

IKT

Based on the Deed of Minutes Annual General Meeting of Shareholders No. 41 dated June 17, 2025 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, IKT's shareholders determine the use of the net profit for the year 2024 as follows:

- *distribution of dividends to shareholders amounting to Rp169,772,981, in which Rp44,407,321 has been distributed as interim dividend for 2024, therefore, the remaining amount will be distributed as final dividend amounting to Rp125,365,660;*
- *general reserves amounting to Rp2,000,000;*
- *the remaining amounting to Rp40,443,246 as retained earnings.*

The final dividend distribution above has been fully paid on July 7 and 15, 2025.

On December 24, 2025, IKT declared interim dividend for 2025 amounted Rp47,574,220, which has not yet been paid, with the portion attributable to non-controlling shareholders amounting to Rp13,663,295 (Note 15).

Based on the Deed of Minutes Annual General Meeting of Shareholders No. 26 dated June 10, 2024 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, IKT shareholders determine the use of the net profit for the year 2023 as follows:

- *distribution of dividends to shareholders amounting to Rp152,683,875, in which Rp39,236,506 has been distributed as interim dividend for 2023, therefore, the remaining amount will be distributed as final dividend amounting to Rp113,447,369;*
- *general reserves amounting to Rp2,000,000;*
- *the remaining amounting to Rp36,170,969 as retained earnings.*

The dividend distribution above has been fully paid on July 8, 10, and 11, 2024.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Pembagian dividen (lanjutan)

IKT (lanjutan)

Pada tanggal 25 November 2024, IKT mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2024 sebesar Rp44.407.321 dan telah dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp12.434.049 kepada publik dan pada tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp31.653.540 kepada Perusahaan dan sebesar Rp319.732 kepada MTI.

PTPR

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025, pemegang saham PTPR telah menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp50.000.000. Pada tanggal 9 Juli dan 4 September 2025, PTPR telah melaksanakan pembayaran dividen kepada Perusahaan dan PII masing-masing sebesar Rp49.500.000 dan Rp500.000.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2024, pemegang saham PTPR telah menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp79.029.629. Pada tanggal 10 Juli 2024, PTPR telah melaksanakan pembayaran dividen kepada Perusahaan sebesar Rp78.239.332. Pada tanggal 9 dan 23 Agustus 2024, PTPR telah melakukan pembayaran dividen kepada Perusahaan dan PII masing-masing sebesar Rp671.752 dan Rp118.545.

TCU

Sesuai dengan risalah rapat umum tahunan pemegang saham yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2025, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp4.068.579. Pada tanggal 7 dan 25 Juli 2025, TCU telah melakukan pembayaran dividen kepada Perusahaan dan PT Indonesia Bulk Terminal (nonpengendali) masing-masing sebesar Rp2.074.975 dan Rp1.993.604.

21. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Dividend distribution (continued)

IKT (continued)

On November 25, 2024, IKT declared interim dividend for 2024 amounting to Rp44,407,321, and was paid on December 19, 2024 to Public amounting to Rp12,434,049 and was paid on December 30, 2024 amounted to Rp31,653,540 to the Company and amounted to Rp319,732 to MTI.

PTPR

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders held on June 25, 2025, PTPR's shareholders approved the distribution of cash dividends for the 2024 fiscal year amounting to Rp50,000,000. On 9 July and 4 September 2025, PTPR paid dividends to the Company and PII in the amounts of Rp49,500,000 and Rp500,000, respectively.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders held on June 25, 2024, PTPR's shareholders approved the distribution of cash dividends for the 2023 fiscal year amounting to Rp79,029,629. On July 10, 2024, PTPR made a dividend payment to the Company amounting to Rp78,239,332. On August 9 and 23, 2024, PTPR made dividend payments to the Company and PII amounting to Rp671,752 and Rp118,545, respectively.

TCU

In accordance with the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 17, 2025, the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp4,068,579. Subsequently, on 7 and 25 July 2025, TCU paid dividends to the Company and PT Indonesia Bulk Terminal (non-controlling) in the amounts of Rp2,074,975 and Rp1,993,604, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. PENDAPATAN OPERASI / *22. OPERATING REVENUES*

Rincian pendapatan operasi adalah sebagai berikut: / *The details of operating revenues are as follows:*

	2025	2024	
Pendapatan non-petikemas	4.395.600.761	4.287.037.274	*Non-container services*
Pendapatan pengusahaan alat	566.503.558	347.645.899	*Equipment services*
Pendapatan terminal petikemas	268.515.640	256.891.310	*Container services*
Kerjasama dan *fee for services*	247.768.750	246.045.384	*Partnership and fee for services*
Pendapatan pas pelabuhan	126.754.809	85.798.181	*Port entry fee*
Pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik	48.859.962	55.607.758	*Land, building, water, and electricity services*
Lain-lain	15.653.130	23.137.005	*Others*
Total	**5.669.656.610**	**5.302.162.811**	***Total***

Pendapatan non-petikemas terutama merupakan pelayanan jasa bongkar muat kargo, curah kering, curah cair, dan kendaraan.

Non-container services mainly consist of stevedoring services of cargo, dry bulk, liquid bulk, and vehicles.

Pendapatan lain-lain mencakup antara lain jasa logistik, layanan operasi di luar area pelabuhan dan jasa kebersihan.

Others comprise, among others, logistic services, operational services outside the port and port cleaning services.

23. BEBAN OPERASI / *23. OPERATING EXPENSES*

Rincian beban operasi adalah sebagai berikut: / *The details of operating expenses are as follows:*

	2025	2024	
Kerjasama mitra usaha	3.218.073.079	3.267.263.227	*Partnership*
Pegawai	717.239.372	694.176.737	*Employee*
Umum	496.165.509	476.505.560	*General*
Pemeliharaan	257.317.298	233.648.988	*Maintenance*
Bahan bakar dan bahan habis pakai	184.925.637	142.154.628	*Fuels and supplies*
Penyusutan dan amortisasi	156.667.599	175.449.123	*Depreciation and amortization*
Asuransi	35.125.992	20.563.962	*Insurance*
Administrasi kantor	12.659.293	11.518.989	*Office administration*
Total	**5.078.173.779**	**5.021.281.214**	***Total***

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat serta beban *revenue sharing* dengan Pelindo (Catatan 27).

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing stevedorig activities including revenue sharing expenses with Pelindo (Note 27).

Beban pegawai terutama merupakan beban gaji, tunjangan, bonus, dan insentif untuk pegawai, direksi, dan komisaris.

Employee expenses mainly represent wages, allowances, bonuses, and incentives for employees, directors, and commissioners.

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, imbalan kerja, pajak bumi dan bangunan, asuransi kesehatan pegawai, jasa konsultan, penyisihan penurunan nilai piutang, perjalanan dinas, pendidikan, pelatihan, dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fees, employee benefits, property taxes, employee's health insurance, consultant fees, allowance for impairment of receivables, business trips, education, training and marketing expenses.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

24. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA, NETO

Rincian pendapatan (beban) operasi lainnya adalah sebagai berikut:

24. OTHER OPERATING INCOME, NET

The details of other operating income (expenses) are as follows:

	2025	2024	
Pemulihan penyisihan piutang (Catatan 5)	22.179.567	-	*Recovery of allowance of receivables (Note 5)*
Penerimaan aset *build-operate-transfer*	19.968.643	-	*Received of build-operate-transfer assets*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 9)	13.683.955	-	*Gain from sales of fixed asset (Note 9)*
Penyesuaian tantiem dan bonus	-	18.691.120	*Tantiem and bonus adjustment*
Penyesuaian konsesi	-	3.877.647	*Concession adjustment*
Lain-lain	(8.181.611)	8.995.981	*Others*
Total	**47.650.554**	**31.564.748**	***Total***

25. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

a. Rincian pendapatan keuangan adalah sebagai berikut:

25. FINANCE INCOME AND COSTS

a. The details of finance income are as follows:

	2025	2024	
Pendapatan bunga deposito	87.583.417	78.332.557	*Interest income from deposits*
Pendapatan jasa giro	11.804.204	13.788.252	*Interest income on current accounts*
Total	**99.387.621**	**92.120.809**	***Total***

b. Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

b. The details of finance costs are as follows:

	2025	2024	
Beban bunga sewa (Catatan 10)	35.368.154	33.027.694	*Lease interest expense (Note 10)*

26. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

26. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the ordinary course of business, the Group engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related parties*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Entitas induk PT Pelindo Multi Terminal/*Parent entity of PT Pelindo Multi Terminal*	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Imbalan kerja, konsesi dan *sharing revenue/Employee benefit, concession and revenue sharing*
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Layanan teknologi informasi/ *Information system services*
Entitas sepengendalian Pelindo/ *Entities under common control Pelindo*	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Penyedia listrik/*Electricity provider*
	PT Pelindo Energi Logistik	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

26. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

26. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

In the ordinary course of business, the Group engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related parties***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas sepengendalian Pelindo (lanjutan)/*Entities under common control Pelindo (continued)*	PT Pelindo Marine Service	Penyedia kapal/*Vessel provider*
	PT IPC Terminal Petikemas	Kerjasama mitra usaha/*Business partnership*
	PT Terminal Teluk Lamong	Kerjasama mitra usaha/*Business partnership*
	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Pelindo Daya Sejahtera	Penyedia tenaga alih daya/*Outsourcing*
Entitas berelasi dengan Pemerintah /*Government-related entities*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Pertamina Patra Niaga	Kerjasama mitra usaha/*Business partnership*
	PT PLN Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT BNI Life Insurance	Jasa Pensiun/*Pension services*
	PT BGR Logistik Indonesia	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Borneo Alumina Indonesia	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT PLN Energi Primer Indonesia	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

26. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

26. *SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

In the ordinary course of business, the Group engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related parties*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/*Government-related entities (continued)*	PT Aneka Tambang Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Sewa/*Lease*
	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Jasa asuransi/*Insurance services*

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities or otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. *Cash and cash equivalents (Note 4)*

	2025	2024	
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	193.588.613	196.260.919	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	171.968.359	46.272.541	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	72.842.956	1.735.926	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.104.276	12.241.475	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**448.504.204**	**256.510.861**	***Total***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	909.861.561	509.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	440.000.000	675.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100.000.000	150.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Total	**1.449.861.561**	**1.334.000.000**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

26. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Piutang usaha - neto (Catatan 5) / *b. Trade receivables - net (Note 5)*

	2025	2024	
Difakturkan			*Billed*
PT Aneka Tambang Tbk	26.224.913	18.988.467	*PT Aneka Tambang Tbk*
PT Borneo Alumina Indonesia	8.968.584	-	*PT Borneo Alumina Indonesia*
PT Pertamina Trans Kontinental	3.395.301	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3.381.958	6.559.435	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Pertamina Patra Niaga	3.223.228	314.455	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	1.906.084	242.459	*PT Solusi Bangun Indonesia Tbk*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	1.749.469	2.201.328	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	1.348.557	991.832	*PT Pertamina (Persero)*
PT PLN Indonesia Power	-	107.984.461	*PT PLN Indonesia Power*
PT BGR Logistik Indonesia	-	7.297.756	*PT BGR Logistik Indonesia*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	8.132.380	13.800.414	*Others (each below Rp1,000,000)*
Sub-total	58.330.474	158.380.607	*Sub-total*
Belum difakturkan			*Unbilled*
PT Pertamina Patra Niaga	17.761.987	42.444.083	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	13.417.115	23.169.496	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT PLN Energi Primer Indonesia	18.659.662	-	*PT PLN Energi Primer Indonesia*
PT Pertamina Trans Kontinental	6.610.168	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Bukit Asam Tbk	2.922.667	-	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Pelindo Energi Logistik	1.100.844	-	*PT Pelindo Energi Logistik*
PT PLN Indonesia Power	-	16.065.090	*PT PLN Indonesia Power*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	1.613.078	6.101.468	*Others (each below Rp1,000,000)*
Sub-total	62.085.521	87.780.137	*Sub-total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(3.595.671)	(2.291.583)	*Allowance for impairment*
Total	**116.820.324**	**243.869.161**	***Total***

c. Aset kontrak (Catatan 6) / *c. Contract assets (Note 6)*

	2025	2024	
PT PLN Indonesia Power	190.271.114	104.293.548	*PT PLN Indonesia Power*
PT PLN Energi Primer Indonesia	48.952.323	-	*PT PLN Energi Primer Indonesia*
Total	**239.223.437**	**104.293.548**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

26. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Utang usaha (Catatan 12) / *d. Trade payables (Note 12)*

	2025	2024	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	134.295.727	152.916.945	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Terminal Teluk Lamong	14.847.640	28.737.609	*PT Terminal Teluk Lamong*
PT Pelindo Daya Sejahtera	13.507.297	11.066.868	*PT Pelindo Daya Sejahtera*
PT Pelindo Marine Service	12.699.583	5.045.580	*PT Pelindo Marine Service*
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	7.080.886	22.001.977	*PT Integrasi Logistik Cipta Solusi*
PT Pelindo Energi Logistik	3.990.165	298.636	*PT Pelindo Energi Logistik*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	2.323.608	1.234.840	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	2.287.249	2.590.198	*PT Jasa Armada Indonesia Tbk*
PT IPC Terminal Petikemas	1.654.746	1.080.709	*PT IPC Terminal Petikemas*
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	-	1.148.795	*PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	7.972.440	13.682.590	*Others (each below Rp1,000,000)*
Total	**200.659.341**	**239.804.747**	***Total***

e. Utang lain-lain (Catatan 13) / *e. Other payables (Note 13)*

	2025	2024	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	109.758.770	167.443.772	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	3.820.000	2.982.464	*PT Integrasi Logistik Cipta Solusi*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	722.396	1.055.502	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
Total	**114.301.166**	**171.481.738**	***Total***

Utang lain-lain Pelindo terutama atas tagihan bonus dan tantiem PTPR yang sebelumnya dibayarkan Pelindo.

Other payables of Pelindo mainly relate to bonuses and tantiem of PTPR that were previously paid by Pelindo.

f. Uang titipan (Catatan 15) / *f. Deposits (Note 15)*

	2025	2024	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.358.362	9.388.596	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT BNI Life Insurance	1.885.905	2.077.033	*PT BNI Life Insurance*
PT Bank Syariah Indonesa Tbk	598.328	594.693	*PT Bank Syariah Indonesa Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000)	2.633.889	2.985.861	*Others (each below Rp500,000)*
Total	**14.476.484**	**15.046.183**	***Total***

g. Liabilitas kontrak (Catatan 16) / *g. Contract liabilities (Note 16)*

	2025	2024	
PT Asuransi Jasaraharja Putera	799.125	-	*PT Asuransi Jasaraharja Putera*
PT Pertamina Patra Niaga	743.322	-	*PT Pertamina Patra Niaga*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000)	2.411.583	2.634.796	*Others (each below Rp500,000)*
Total	**3.954.030**	**2.634.796**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perusahaan

a. Pada tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang serah operasi dan pelayanan terminal *multipurpose* dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut:
   - Ruang lingkup kerjasama dalam perjanjian ini adalah:
     - Kerjasama serah operasi bisnis dan pelayanan terminal *multipurpose* serta jasa kepelabuhan lainnya pada area kerjasama;
     - Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur serta fasilitas penunjang terminal *multipurpose*;
     - Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur dan suprastruktur yang diserah operasikan;
     - Penerbitan nota tagihan;
     - Penyediaan sumber daya manusia terminal *multipurpose* oleh Perusahaan;
     - Pengasuransian objek kerja sama;
     - Pemberian *revenue sharing* oleh Perusahaan kepada Pelindo atas pendapatan pelayanan terminal *multipurpose* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian; dan
     - Melaksanakan hal-hal lainnya yang mungkin dan/atau secara umum diperlukan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian ini.

Perjanjian ini telah dilakukan adendum beberapa kali terakhir pada tanggal 26 Juni 2024 untuk menambah area kerjasama operasi serta perubahan jangka waktu Perjanjian menjadi sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Operasi sampai dengan maksimal tanggal 31 Desember 2041.

Berikut adalah perjanjian kerjasama yang dialihkan dari Pelindo kepada Perusahaan berdasarkan Berita Acara Serah Operasi *Revenue Sharing* antara Pelindo dan Perusahaan pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025:

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

a. On December 29, 2021, the Company and Pelindo entered into a Cooperation Agreement regarding the handover of multipurpose terminal operations and services with the following provisions:
   - The scope of cooperation in this agreement is:
     - *Cooperation on business operations handover and multipurpose terminal services as well as other port services in the cooperation area;*
     - *Provision of infrastructure and superstructure as well as supporting facilities for multipurpose terminals;*
     - *Maintenance and repair of the handover of infrastructure and superstructure;*
     - *Issuance of invoices;*
     - *Provision of human resources for multipurpose terminals by the Company;*
     - *Insurance for the object of cooperation;*
     - *Provision of revenue sharing by the Company to Pelindo of the revenue from the multipurpose terminal service as referred to in the agreement; and*
     - *Perform other things that may and/or are generally necessary in order to achieve the purpose and objectives of this agreement.*

The agreement has been amended several times, most recently on June 26, 2024, to expand the scope of operational cooperation and to change the duration of the Agreement to be effective from the signing of the Operation Handover Minutes until a maximum date of December 31, 2041.

The following are cooperation agreements novated from Pelindo to the Company based on the Minutes of Handover Operations Revenue Sharing between Pelindo and the Company on various dates up to December 31, 2025:

No.	Perusahaan/ *The Company*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Jangka waktu/ *Terms*	Nilai sharing pendapatan/ *Sharing revenue value*
1.	Pelindo Cabang Belawan/ *Pelindo Belawan Branch*	HK.03/31/1/1/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.01/31/1/1/KUSH/DISK/PLMT-22	01/02/22 - 31/12/41	Perusahaan/ *The Company:* 76,00% Pelindo Cabang Belawan/*Pelindo Belawan Branch:* 24,00%
2.	Pelindo Cabang Dumai/*Pelindo Dumai Branch*	HK.03/31/12/1/DUKM/PGLA/PLND-21 dan/*and* BA.0143/HK.05.01/PLMT-2021	01/01/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 82,00% Pelindo Cabang Dumai/ *Pelindo Dumai Branch:* 18,00%

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah perjanjian kerjasama yang dialihkan dari Pelindo kepada Perusahaan berdasarkan Berita Acara Serah Operasi *Revenue Sharing* antara Pelindo dan Perusahaan pada berbagai tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025: (lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

The following are cooperation agreements novated from Pelindo to the Company based on the Minutes of Handover Operations Revenue Sharing between Pelindo and the Company on various dates up to December 31, 2025: (continued)

No.	Perusahaan/ *The Company*	No. Perjanjian/ *Agreement No.*	Jangka waktu/ *Terms*	Nilai sharing pendapatan/ *Sharing revenue value*
3.	Pelindo Cabang Tanjung Intan/*Pelindo Tanjung Intan Branch*	KS.01/25/1/1/LAUH/PGLA/PLND-22 dan/*and* PU.01.01/25/1/1/KUSH/DISK/PLMT-22	01/02/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 80,00% Pelindo Cabang Tanjung Intan/*Pelindo Tanjung Intan Branch:* 20,00%
4.	Pelindo Cabang Bagendang/*Pelindo Bagendang Branch*	HK.03/1/3/2/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.02/1/3/1/KUSH/DISK/PLMT-22	01/03/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 60,00% Pelindo Cabang Bagendang/*Pelindo Bagendang Branch:* 40,00%
5.	Pelindo Cabang Trisakti/*Pelindo Trisakti Branch*	HK.03/31/3/5/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.01/31/3/1/KUSH/DISK/PLMT-22	01/04/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 70,50% Pelindo Cabang Trisakti/ *Pelindo Trisakti Branch:* 29,50%
6.	Pelindo Cabang Bumiharjo/*Pelindo Bumiharjo Branch*	HK.03/1/3/1/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.01/1/3/1/KUSH/DISK/PLMT-22	01/03/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 77,00% Pelindo Cabang Bumiharjo/*Pelindo Bumiharjo Branch:* 23,00%
7.	Pelindo Cabang Jamrud, Nilam, dan Mirah/*Pelindo Jamrud, Nilam and Mirah Branch*	HK.03/31/3/2/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.01/31/3/2/KUSH/DISK/PLMT-22	01/04/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 68,00% Pelindo Cabang Jamrud, Nilam, dan Mirah/*Pelindo Jamrud, Nilam and Mirah Branch:* 32,00%
8.	Pelindo Cabang Tanjung Wangi/*Pelindo Tanjung Wangi Branch*	KS.02/1/3/2/KUSH/DISK/PLMT-22 dan/*and* HK.03/1/3/3/DUKM/PGLA/PLND-22	01/03/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 63,00% Pelindo Cabang Tanjung Wangi/*Pelindo Tanjung Wangi Branch:* 37,00%
9.	Pelindo Cabang Balikpapan/ *Pelindo Balikpapan Branch*	HK.03/31/3/1/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.01/31/3/4/KUSH/DISK/PLMT-22	01/04/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 82,00% Pelindo Cabang Balikpapan/*Pelindo Balikpapan Branch:* 18,00%
10.	Pelindo Cabang Makassar/*Pelindo Makassar Branch*	HK.03/31/3/1/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.01/31/3/3/KUSH/DISK/PLMT-22	01/04/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 78,00% Pelindo Cabang Makassar/*Pelindo Makassar Branch:* 22,00%
11.	Pelindo Cabang Mekar Putih/*Pelindo Mekar Putih Branch*	HK.03/31/3/4/DUKM/PGLA/PLND-22 dan/*and* KS.01/31/3/5/KUSH/DISK/PLMT-22	01/04/22 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 75,00% Pelindo Cabang Mekar Putih/*Pelindo Mekar Putih Branch:* 25,00%
12.	Pelindo Cabang Malahayati/ *Pelindo Malahayati Branch*	KS.01/25/7/1/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/18/7/1/URTN/DIRU/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 85,00% Pelindo Cabang Malahayati/*Pelindo Malahayati Branch:* 15,00%
13.	Pelindo Cabang Lhokseumawe/*Pelindo Lhokseumawe Branch*	KS.01/25/7/2/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/25/7/2/KUSH/DISK/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 94,00% Pelindo Cabang Lhokseumawe/*Pelindo Lhokseumawe Branch:* 6,00%
14.	Pelindo Cabang Pare-pare/*Pelindo Pare-pare Branch*	KS.01/25/7/7/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/25/7/7/KUSH/DISK/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 71,00% Pelindo Cabang Pare-pare/*Pelindo Pare-pare Branch:* 29,00%
15.	Pelindo Cabang Garongkong/*Pelindo Garongkong Branch*	KS.01/25/7/8/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/25/7/8/KUSH/DISK/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company:* 62,00% Pelindo Cabang Garongkong/*Pelindo Garongkong Branch:* 38,00%
16.	Pelindo Cabang Gresik/ *Pelindo Gresik Branch*	KS.01/25/7/3/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/25/7/3/KUSH/DISK/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 76,00% Pelindo Cabang Gresik/*Pelindo Gresik Branch*: 24,00%
17.	Pelindo Cabang Tanjung Emas/*Pelindo Tanjung Emas Branch*	KS.01/25/7/4/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/25/7/4/KUSH/DISK/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 74,00% Pelindo Cabang Tanjung Emas/*Pelindo Tanjung Emas Branch*: 26,00%
18.	Pelindo Cabang Lembar/*Pelindo Lembar Branch*	KS.01/25/7/6/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/25/7/6/KUSH/DISK/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 48,00% Pelindo Cabang Lembar/*Pelindo Lembar Branch*: 52,00%
19.	Pelindo Cabang Badas/ *Pelindo Badas Branch*	KS.01/25/7/5/HBPL/PGLA/PLND-23 dan/*and* KS.01/25/7/5/KUSH/DISK/PLMT-23	01/08/23 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 53,00% Pelindo Cabang Badas/*Pelindo Badas Branch*: 47,00%
20.	Pelindo Cabang Sibolga/*Pelindo Sibolga Branch*	KS.01/27/6/9/HBPL/PGLA/PLND-24 dan/*and* KS.01/27/6/4/KUSH/DIRU/PLMT-24	01/07/24 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 12,00% Pelindo Cabang Sibolga/*Pelindo Sibolga Branch*: 88,00%
21.	Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun/ *Pelindo Tanjung Balai Karimun Branch*	KS.01/27/6/6/HBPL/PGLA/PLND-24 dan/*and* KS.02/27/6/2/KUSH/DIRU/PLMT-24	01/07/24 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 9,00% Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun/*Pelindo Tanjung Balai Karimun Branch*: 91,00%
22.	Pelindo Cabang Tanjung Pinang/*Pelindo Tanjung Pinang Branch*	KS.01/27/6/5/HBPL/PGLA/PLND-24 dan/*and* KS.01/27/6/6/KUSH/DIRU/PLMT-24	01/07/24 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 7,00% Pelindo Cabang Tanjung Pinang/*Pelindo Tanjung Pinang Branch*: 93,00%
23.	Pelindo Cabang Bima/ *Pelindo Bima Branch*	KS.01/27/6/7/HBPL/PGLA/PLND-24 dan/*and* KS.01/27/6/5/KUSH/DIRU/PLMT-24	01/07/24 - 31/12/41	Perusahaan/*The Company*: 12,00% Pelindo Cabang Bima/*Pelindo Bima Branch*: 88,00%

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b. Pada tanggal 4 Januari 2022, Perusahaan dan PTPR menandatangani Perjanjian Kerjasama No. HK.05.01/2/PLMT-2022 dan No. HK.566/4/1/1/PTP-22 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose* dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031.

Objek kerjasama untuk perjanjian ini sebelumnya merupakan obyek yang dilakukan kerjasama langsung antara Pelindo dengan PTPR. Berdasarkan Berita Acara Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal *Multipurpose* dari Pelindo kepada Perusahaan No. KS.01/21/12/LAUH/KMPR/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021 nilai *sharing revenue* dari total pendapatan per cabang antara Perusahaan, PTPR, dan Pelindo sebagai berikut:

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

b. As of January 4, 2022, the Company and PTPR entered into a Cooperation Agreement No. HK.05.01/2/PLMT-2022 and No. HK.566/4/1/1/PTP-22 regarding The Operation and Maintenance of Multipurpose Terminal with period of validity of this agreement is 10 (ten) years started from January 1, 2022 to December 31, 2031.

The object of cooperation for this agreement previously had direct cooperation between Pelindo and PTPR. Based on the Minutes of Handover of Business the Company Operations and Multipurpose Terminal Services from Pelindo to PTPR No. KS.01/21/12/LAUH/KMPR/PLND-21 dated December 21, 2021 the revenue sharing from total revenue per branch between the Company, PTPR, and Pelindo as following:

Cabang/*Branch*	Pelindo	Perusahaan/ *The Company*	PTPR
Tanjung Priok	16,5%	5,5%	78%
Cirebon	12%	3%	85%
Tanjung Pandan	25%	3%	72%
Jambi	23%	3%	74%
Bengkulu	20%	5%	75%
Banten	15%	5%	80%
Panjang	25%	5%	70%
Palembang	20%	5%	75%
Teluk Bayur	27,5%	5%	67,5%
Pangkal Balam	30%	3%	67%
Pontianak	23%	5%	72%

c. Pada tanggal 25 Januari 2022, Perusahaan dan Pelindo menandatangani Berita Acara Serah Operasi No. KS.01/25/1/2/LAUH/PGLA/PLND-22 dan No. KS.01/25/1/1/PAPS/DISK/PLMT-22 tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Curah (Non-petikemas) di Terminal Teluk Lamong ("TTL") dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2042. Objek kerjasama untuk perjanjian ini adalah pendapatan pelayanan terminal curah (non-petikemas) di Terminal Teluk Lamong, termasuk pendapatan pelayanan jasa tambat, pelayanan air kapal dan pendapatan barang non-petikemas dengan nilai *sharing revenue* antara Perusahaan, Pelindo, dan TTL masing masing sebesar 7,5%, 43%, dan 49,5%.

c. On January 25, 2022, the Company and Pelindo entered into Minutes of Handover of Operations No. KS.01/25/1/2/LAUH/PGLA/PLND-22 and No. KS.01/25/1/1/PAPS/DISK/PLMT-22 regarding the Handover of Operations and Bulk Terminal Services (Non-Container) at Teluk Lamong Terminal ("TTL") terminal with period of validity of this agreement is 20 (twenty) years started form February 1, 2022 to January 31, 2042. The object of the cooperation for this agreement is bulk terminal service revenue (non-container) at Teluk Lamong Terminal, including mooring service revenue, ship water service and non-container goods revenue with a revenue sharing value between the Company, Pelindo and TTL is 7.5%, 43%, and 49.5%, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 1 Agustus 2022, Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk menandatangani amendemen atas Berita Acara Serah Operasi tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Curah (Non-petikemas) di Terminal Teluk Lamong No. KS.03/1/8/1/LAUH/PGLA/PLND-22 dan No. PJ.03.06/1/8/1/PAPS/DISK/PLMT-22.

Amendemen ini menyepakati mengubah penerbit nota kegiatan *bulk handling* dari TTL menjadi Perusahaan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022.

d. Pada tanggal 25 Januari 2022, Perusahaan dan TTL menandatangani perjanjian kerjasama No. KS.01/25/1/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan No. HK.02/25/1/1/CRSC/CRSC/PTTL-22 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Curah (Non-petikemas) pada Terminal Teluk Lamong dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2042.

Pada tanggal 1 Agustus 2022, Perusahaan dan TTL sepakat untuk menandatangani amendemen atas Perjanjian Kerjasama tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Curah (Non-petikemas) pada Terminal Teluk Lamong pada Perjanjian No. PJ.03.06/1/8/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan No. KS.01/26/7/1/CRSC/CRSC/TPTL-22.

Perjanjian ini menyepakati perubahan penerbit nota kegiatan *bulk handling* dari TTL menjadi Perusahaan, serta menambah kewajiban Perusahaan untuk bertanggung jawab dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di area Terminal Teluk Lamong.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

On August 1, 2022, the Company and Pelindo agreed to sign an amendment to the Minutes of Handover of Operations regarding Transfer of Business Operations and Bulk Terminal Services (Non-container) at Teluk Lamong Terminal No. KS.03/1/8/1/LAUH/PGLA/PLND-22 and No. PJ.03.06/1/8/1/PAPS/DISK/PLMT-22.

This agreement agrees to change the issuer of bulk handling activity invoices from TTL to the Company starting on August 1, 2022.

d. On January 25, 2022, the Company and TTL entered into a cooperation agreement No. KS.01/25/1/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and No. HK.02/25/1/1/CRSC/CRSC/PTTL-22 regarding the Operation and Maintenance of Bulk Terminal (Non-container) at Teluk Lamong Terminal for a period of 20 (twenty) years from February 1, 2022 to January 31, 2042.

On August 1, 2022, the Company and TTL agreed to sign an amendment to the Cooperation Agreement on the Operation and Maintenance of Bulk Terminals (Non-container) at Teluk Lamong Terminal in Agreement No. PJ.03.06/1/8/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 and No. KS.01/26/7/1/CRSC/CRSC/TPTL-22.

This agreement agrees to change the issuer of the bulk handling activity invoices from TTL to the Company, as well as adding to the Company's obligation to be responsible for the Environmental Social Responsibility program in the Teluk Lamong Terminal area.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

e. Pada tanggal 11 Februari 2022, Perusahaan, PT Petra Daya Gas dan PT Bali Infra Gas membentuk Konsorsium Midstream Liquefied Natural Gas ("LNG") Bali ("MLB"). Berdasarkan perjanjian No. 189.PJ/061/IP/2022, No. HK.95.01/16.PEL-2022 dan No. 001.P/MLB/V/2022 pada tanggal 27 Mei 2022, PT Pelindo Energi Logistik ("PEL") mengalihkan kepada MLB segala hak, kepentingan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab atas perjanjian jasa fasilitas midstream LNG Benoa dengan PT PLN Indonesia Power No. 307.PJ/061/IP/2017 dan No. HK.0501/22/PEL-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang telah di adendum beberapa kali terakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berkaitan dengan lingkup pekerjaan dan perpanjangan jangka waktu sampai dengan 29 Februari 2024.

MLB dalam hal ini berkewajiban memberikan jasa pengurusan pengapalan LNG, dan jasa terminal LNG dan regasifikasi LNG kepada PT PLN Indonesia Power yang dihitung menggunakan *single rate* per MMBTU.

Pada tanggal 19 Desember 2024, Perusahaan, dan PT PLN Indonesia Power menandatangani perjanjian dalam pemberian Fasilitas Midstream LNG Benoa Bali No. HK.02/19/12/2/DLHK/DIRU/PLMT-24 dan No. 0998.Pj/DAN/01.03/PLNIP011002/2024. Perjanjian ini dibuat melanjutkan pelayanan jasa yang sama setelah pembubaran MLB. Perusahaan sepakat untuk memberikan jasa terhitung sejak 1 Maret 2024 hingga 31 Agustus 2025.

Pada tanggal 22 Agustus 2025, perjanjian ini dinovasikan kepada PT PLN Energi Primer Indonesia. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami amendemen, terakhir kali pada tanggal 31 Desember 2025 berkaitan dengan perpanjangan periode kontrak sampai dengan 31 Maret 2026. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perjanjian tersebut masih dalam tahap perpanjangan.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

e. On February 11, 2022, the Company, PT Petra Daya Gas and PT Bali Infra Gas formed Consortium Midstream Liquefied Natural Gas ("LNG") Bali ("MLB"). Based on agreement No. 189.PJ/061/IP/2022, No. HK.95.01/16.PEL-2022 and No. 001.P/MLB/V/2022 date on May, 27 2022, PT Pelindo Energi Logistik ("PEL") tranferred to MLB all rights, interests, obligations, authority and responsibility for the Benoa LNG midstream facility services agreement with PT PLN Indonesia Power No. 307.PJ/061/IP/2017 and No. HK.0501/22/PEL-2017 dated on December 27, 2017 which has been amended several times, most recently on December 31, 2023, regarding changes in MLB's scope of work and the extension of the period to February 24, 2024.

MLB is obliged to provide LNG shipping management services, LNG terminal services and LNG regasification to PT PLN Indonesia Power which calculated using single rate per MMBTU.

On December 19, 2024, the Company and PT PLN Indonesia Power signed an agreement for the provision of the Midstream LNG Facility Benoa Bali No. HK.02/19/12/2/DLHK/DIRU/PLMT-24 and No. 0998.Pj/DAN/01.03/PLNIP011002/2024. This agreement is established to ensure the continuation of the same services after the dissolution of MLB. The Company agreed to provide services from March 1, 2024 to August 31, 2025.

On August 22, 2025, this agreement was novated to PT PLN Energi Primer Indonesia. The agreement has been amended several times, with the most recent amendment dated December 31, 2025, which extended the contract period until March 31, 2026. As of the completion date of the consolidated financial statements, this agreement is still in the process for extension.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

f. Pada tanggal 25 Oktober 2024, Perusahaan, dan PT Pertamina Patra Niaga menandatangani perjanjian No. KS.02/25/10/3/BJMR2/BJMR/JRNM-24 dan No. SP-011/PNEE00000/2024-S7 tentang kerjasama kegiatan pelayanan jasa bongkar muat *Liquified Petroleum Gas* (LPG) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 17 Mei 2022 hingga 31 Desember 2023. Perjanjian ini telah dilakukan adendum pada tanggal 5 Desember 2024, untuk memperpanjang jangka waktu kerjasama hingga 31 Desember 2027.

g. Pada tanggal 30 Januari 2024, Perusahaan, dan PT AKR Corporindo menandatangani perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Curah Cair di Dermaga Terminal Nilam Utara oleh PT Pertamina Patra Niaga No. KS.02/25/10/3/BJMR2/BJMR/JRNM-24 dan No. SP-011/PNEE00000/2024-S7. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 April 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Perjanjian ini telah dilakukan adendum pada tanggal 18 Maret 2025, untuk memperpanjang jangka waktu kerja sama hingga 31 Maret 2026.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perjanjian dengan PT AKR Corporindo masih dalam tahap perpanjangan.

Entitas anak

a. Pada tanggal 8 April 2021, IKT dan PT Anugrah Permata Samudra, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan *cargo passenger car* (CBU), alat berat, truk/bus, *spare parts* di Terminal Internasional IKT. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 29 April 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2026. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara IKT dan PT Anugrah Permata Samudra masih dalam proses perpanjangan.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

f. On October 25, 2024, the Company and PT Pertamina Patra Niaga signed agreement No. KS.02/25/10/3/BJMR2/BJMR/JRNM-24 and No. SP-011/PNEE00000/2024-S7 regarding the cooperation in the provision of Liquified Petroleum Gas (LPG) loading and unloading services at Tanjung Perak Port, Surabaya. This agreement is effective from May 17, 2022 to December 31, 2023. This agreement have been amended on December 5, 2024, to extend the period of agreement until December 31, 2027.

g. On January 30, 2024, the Company and PT AKR Corporindo signed a Cooperation Agreement for the Utilization of Liquid Bulk Facilities at the North Nilam Terminal Dock by PT Pertamina Patra Niaga No. KS.02/25/10/3/BJMR2/BJMR/JRNM-24 and No. SP-011/PNEE00000/2024-S7. This agreement is effective from April 1, 2022, and expired on March 31, 2024. This agreement have been amended on March 18, 2025, to extend the period of agreement until March 31, 2026.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the agreement with PT AKR Corporindo is still in the process for extension.

Subsidiaries

a. On April 8, 2021, IKT and PT Anugrah Permata Samudra, a third party, entered into agreement regarding service and handling of cargo passenger car (CBU), heavy equipment, trucks/busses, spare parts in International Terminal of IKT. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on April 29, 2024. This agreement is valid from May 1, 2024 until April 30, 2026. As of the date of completion of these financial statements, the agreement between IKT and PT Anugrah Permata Samudra is still in the process of extension.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

b. Pada tanggal 8 April 2021, IKT dan PT Bandar Krida Jasindo, pihak ketiga, menandatangani perjanjian tentang pelayanan dan penanganan *cargo passenger car* (CBU), alat berat, bus & truk, *spare parts* di Terminal Internasional IKT. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 25 April 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2026. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara IKT dan PT Bandar Krida Jasindo masih dalam proses perpanjangan.

c. Pada tanggal 10 Maret 2016, IKT dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, pihak ketiga, menandatangani perjanjian kerjasama jasa pelayanan kepelabuhanan, pelayanan bongkar muat dan penyediaan lahan di area IKT. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan, terakhir kali pada tanggal 14 Oktober 2024. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027.

d. Pada tanggal 2 Mei 2016, IKT dan PT Astra Daihatsu Motor, pihak ketiga, menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dan Pelayanan Bongkar Muat di area IKT. Perjanjian ini telah beberapa kali dilakukan adendum, terakhir pada tanggal 29 September 2025 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.

e. Pada tanggal 27 Desember 2021, IKT dan PT Glovis Indonesia Logistic, pihak ketiga, menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan dan Penumpukan Kargo di Terminal Internasional. Kesepakatan ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dan telah diperpanjang dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian antara IKT dan PT Glovis Indonesia Logistic masih dalam proses perpanjangan

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subsidiaries (continued)

b. On April 8, 2021, IKT and PT Bandar Krida Jasindo, a third party, entered into agreement regarding service and handling of cargo passenger car (CBU), heavy equipment, bus & truck, spare parts in International Terminal of IKT. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on April 25, 2024. This agreement is valid from May 1, 2024 until April 30, 2026. As of the date of completion of these financial statements, the agreement between IKT and PT Bandar Krida Jasindo is still in the process of extension.

c. On March 10, 2016, IKT and PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, third party, entered into a partnership agreement regarding port handling services, stevedoring and yard providing within IKT's area. This agreement has been amended and extended several times, last amendment on October 14, 2024. This agreement is valid from March 1, 2024 until February 28, 2027.

d. On May 2, 2016, IKT and PT Astra Daihatsu Motor entered into a partnership agreement regarding port handling services and stevedoring services within IKT's operational area. The agreement has been extended several times and was most recently extended pursuant to an addendum dated September 29, 2025 until March 31, 2028.

e. On December 27, 2021, IKT and PT Glovis Indonesia Logistic, a third party, signed a Cooperation Agreement regarding the Handling and Stacking of Cargo at the International Terminal. This agreement is valid from January 1, 2022 to December 31, 2023 and has been extended from January 1, 2024 to December 31, 2025. As of the date of completion of these financial statements, the agreement between IKT and PT Glovis Indonesia Logistic is still in the process of extension.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

27. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

f. Pada tanggal 9 April 2015, IKT dan MIE mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik, Jawa Timur dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima) tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

Pada bulan Maret 2016, MKO MTKI telah beroperasi secara komersial.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subsidiaries (continued)

f. On April 9, 2015, IKT and MIE entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik, Jawa Timur by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 (twenty-five) years with the funding portion for IKT and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

On March 2016, MKO MTKI has operated commercially.

28. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Grup:

28. FAIR VALUE MEASUREMENT

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	2025	2024	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas dan setara kas	2.002.452.174	1.677.402.753	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	344.436.326	658.517.511	*Trade receivables - net*
Aset kontrak	239.223.437	104.293.548	*Contract assets*
Aset lancar lainnya	12.703.661	4.579.152	*Other current assets*
Uang jaminan	4.354.995	4.354.995	*Security deposits*
Investasi saham	3.465.500	3.860.000	*Investments in shares of stock*
Total	**2.606.636.093**	**2.453.007.959**	***Total***
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Utang usaha	256.469.941	281.775.447	*Trade payables*
Utang lain-lain	115.607.805	172.931.887	*Other payables*
Beban akrual	1.198.770.147	891.918.555	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	34.108.786	22.412.900	*Other current liabilities*
Total	**1.604.956.679**	**1.369.038.789**	***Total***

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values, or their fair values cannot be reliably measured.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

28. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, aset lancar lainnya, investasi saham, uang jaminan, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Grup tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 113 "Pengukuran Nilai Wajar".

28. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, trade receivables, contract assets, other current assets, investments in shares of stock, security deposits, trade payables, other payables, accrued expenses, and other current liabilities are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*

- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Group does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Group does not present fair value hierarchy under PSAK 113 "Fair Value Measurements".

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko suku bunga. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.

Risiko tingkat suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko suku bunga terutama terkait dengan kas dan setara kas.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk. The operational activities of the Group are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Interest rate risk on cash flows

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposure to the interest rate risk relates primarily to cash and cash equivalents.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko tingkat suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Interest rate risk on cash flows (continued)

Dampak fluktuasi suku bunga 50 basis poin terhadap laba tahun berjalan dengan semua variabel lain tetap:

Effect of interest rates fluctuation of 50 basis points to income for the year with all other variables constant:

	Dampak/*Effect*	
Kenaikan 50 basis poin	7.682.641	*50 basis points increase*
Penurunan 50 basis poin	(7.682.641)	*50 basis points decrease*

Risiko nilai tukar mata uang asing

Foreign currency risk

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Grup. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup tidak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. As of December 31, 2025 and 2024, the Group does not have monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Tabel berikut menunjukkan jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan, yang mencakup beban bunga terkait:

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments, which include the related interest changes:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1-3 tahun/ *1-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Utang usaha	256.469.941	-	-	-	256.469.941	*Trade payables*
Utang lain-lain	115.607.805	-	-	-	115.607.805	*Other payables*
Beban akrual	1.198.770.147	-	-	-	1.198.770.147	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	34.108.786	-	-	-	34.108.786	*Other current liabilities*
Liabilitas sewa	76.809.940	430.637.440	1.242.913	-	508.690.293	*Lease liabilities*
Total	**1.681.766.619**	**430.637.440**	**1.242.913**	**-**	**2.113.646.972**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan, yang mencakup beban bunga terkait: (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments, which include the related interest changes: (continued)

31 Desember 2024/*December 31, 2024*

	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1-3 tahun/ *1-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Utang usaha	281.775.447	-	-	-	281.775.447	*Trade payables*
Utang lain-lain	172.931.887	-	-	-	172.931.887	*Other payables*
Beban akrual	891.918.555	-	-	-	891.918.555	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	22.412.900	-	-	-	22.412.900	*Other current liabilities*
Liabilitas sewa	43.698.904	3.588.483	388.236.404	-	435.523.791	*Lease liabilities*
Total	**1.412.737.693**	**3.588.483**	**388.236.404**	**-**	**1.804.562.580**	***Total***

Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

Kas dan setara kas

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang usaha

Grup memiliki kebijakan untuk memastikan pelayanan jasa hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pelayanan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Credit risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers and placement of current accounts and deposits in the banks.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

Cash and cash equivalents

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Trade receivables

The Group has policies in place to ensure that whole services are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Piutang usaha (lanjutan)

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Grup, penyisihan spesifik dapat dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit risk (continued)

Trade receivables (continued)

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with the legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the receivable is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

30. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Grup adalah sebagai berikut:

30. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Significant activities which did not affect the Group's cash flows are as follows:

	2025	2024	
Penambahan aset tetap melalui akrual	193.168.152	12.381.081	*Addition of fixed assets through accruals*
Penambahan aset tetap melalui utang	10.418.816	55.011.263	*Addition of fixed assets through payables*
Penambahan aset tetap melalui *build-operate-transfer*	19.968.643	-	*Addition of fixed assets through build-operate-transfer*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	69.492.124	13.190.423	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-arus kas/*Non-cash flow* Pengakuan bunga/ *Interest recognition*	Lainnya*/ *Others**	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	
Liabilitas sewa	435.523.791	(26.347.776)	35.368.154	64.146.124	508.690.293	*Lease liabilities*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-arus kas/*Non-cash flow* Pengakuan bunga/ *Interest recognition*	Lainnya*/ *Others**	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Liabilitas sewa	418.417.235	(28.393.436)	33.027.694	12.472.298	435.523.791	*Lease liabilities*

*Lainnya mencakup penambahan dan terminasi kontrak selama tahun berjalan/*Others include addition and contract termination during the year*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

31. REKLASIFIKASI AKUN

Grup melakukan reklasifikasi pada beberapa akun pada dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reklasifikasi yang dilakukan adalah untuk menyajikan piutang usaha belum difakturkan pada aset kontrak sebagai bagian piutang usaha, utang usaha afiliasi pada utang lain-lain, dan beban akrual sebagai bagian dari utang usaha.

Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024

31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

The Group reclassified several accounts financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended to conform with the presentation for the financial statements as of December 31, 2025, and for the year then ended.

The reclassification was made to present unbilled trade receivables previously recognized as contract assets as part of trade receivables, related parties trade payables previously included in other payables, and accrued expenses as part of trade payables.

The reclassifications are as follow:

Consolidated financial position as of December 31, 2024

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Diklasifikasikan kembali / *As reclassified*	
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang usaha - neto				*Trade receivables - net*
Pihak berelasi	156.089.023	87.780.138	243.869.161	*Related parties*
Pihak ketiga	299.626.121	115.022.229	414.648.350	*Third parties*
Aset kontrak - neto				*Contract assets - net*
Pihak berelasi	192.073.686	(87.780.138)	104.293.548	*Related parties*
Pihak ketiga	115.022.229	(115.022.229)	-	*Third parties*
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables - net*
Pihak berelasi	188.829.110	50.975.637	239.804.747	*Related parties*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	197.098.217	(25.616.479)	171.481.738	*Related parties*
Beban akrual	917.277.713	(25.359.158)	891.918.555	*Accrued expenses*

Reklasifikasi di atas tidak berdampak secara material karena reklasifikasi ini tidak mempengaruhi keputusan ekonomis yang dibuat oleh pengguna atas dasar laporan keuangan konsolidasian.

The above reclassifications have no material impact because the reclassifications do not affect economic decisions made by consolidated financial statement users.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah

Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul tindakan militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan dan energi global.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Geopolitical developments in the Middle East

Subsequent to the reporting date, geopolitical tensions in the Middle East escalated following military actions in the region at the end of February 2026. These developments have resulted in heightened geopolitical uncertainty and increased volatility in global financial and energy markets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah (lanjutan)

Grup menilai potensi dampak terhadap operasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan Grup yang dapat timbul melalui beberapa faktor, termasuk:

- Volatilitas harga komoditas dan energi global.
- Gangguan pada rantai pasokan dan logistik global.
- Ketidakpastian makroekonomi yang lebih luas yang memengaruhi permintaan pelanggan.
- Volatilitas di pasar valuta asing dan pasar keuangan.

Saat ini Grup tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak ekonomi yang lebih luas akibat situasi geopolitik tersebut dapat memengaruhi operasi dan kinerja keuangan Grup secara tidak langsung.

Pada tanggal otorisasi atas laporan keuangan ini, tidak memungkinkan untuk mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul akibat potensi eskalasi lebih lanjut dari konflik tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Manajemen akan terus memonitor perkembangan terkait konflik ini dan menilai potensi dampaknya pada periode pelaporan berikutnya.

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta No. 22 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 27 Februari 2026 tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0076611 tanggal 12 Maret 2026.

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 27 Februari 2026, para pemegang saham sepakat untuk menetapkan perubahan masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang semula 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan, menjadi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-10.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Geopolitical developments in the Middle East (continued)

The Group assesses the potential implications on the results of the Group's operations, financial position and financial performance which may arise through several factors, including:

- *Volatility in global commodity and energy prices.*
- *Disruptions in global supply chains and logistics.*
- *Broader macroeconomic uncertainty affecting customer demand.*
- *Volatility in foreign exchange and financial markets.*

The Group does not currently have significant direct operations in the countries directly involved in the conflict. However, the broader economic effects resulting from the geopolitical situation may indirectly affect the Group's operations and financial performance.

At the date of authorization of these financial statements, it is not possible to reliably estimate the financial impact that further escalation of the conflict may have on the Group's consolidated financial statements.

Management will continue to monitor developments relating to the conflict and assess potential implications in future reporting periods.

Amendments to the Articles of Association

Based on Notarial Deed No. 22 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated February 27, 2026 regarding changes to the Articles of Association of the Company. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0076611 dated March 12, 2026.

Based on the Notarial Deed No. 22 dated February 27, 2026, the shareholders agreed to change the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from a 5 (five)-year period with eligibility for 1 (one) reappointment to a term commencing from the General Meeting of Shareholders (GMS) or the date determined by the appointing GMS, with reappointment permitted up to the closing of the 10th Annual General Meeting of Shareholders.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan RUPS Perusahaan tanggal 20 April 2025, para pemegang saham menyetujui pemberhentian Ahmad Perwira Mulia Tarigan dari jabatannya sebagai Komisaris serta pengangkatan Gugun Gumilar sebagai Komisaris dan Elly Rosita Silaba sebagai Komisaris Independen. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini akta notaris atas keputusan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Changes in the Board of Commissioners

Based on the resolution of the Company's General Meeting of Shareholders held on 20 April 2025, the shareholders approved the dismissal of Ahmad Perwira Mulia Tarigan from his position as Commissioner and the appointment of Gugun Gumilar as Commissioner and Elly Rosita Silaba as Independent Commissioner. As at the date of completion of these financial statements, the notarial deed evidencing the resolution remains in the process of completion.

33. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk hanya menyajikan informasi laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan investasi pada entitas anak disajikan dengan metode biaya.

33. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION

The financial information of the Parent Company only presents statements of financial position as of December 31, 2025, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the year then ended, and investments in subsidiaries presented using cost method.

LAPORAN POSISI KEUANGAN / ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***

	2025	2024	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	508.503.117	497.333.488	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto			*Trade receivables - net*
Pihak berelasi	161.369.188	252.269.810	*Related parties*
Pihak ketiga	135.104.284	278.465.052	*Third parties*
Aset kontrak - pihak berelasi	239.223.437	104.293.547	*Contract assets - related parties*
Uang muka dan dibayar di muka	4.347.660	6.112.885	*Advance and prepaid expense*
Pajak dibayar di muka	17.180.727	13.459.102	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	9.144.561	3.497.617	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**1.074.872.974**	**1.155.431.501**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	475.564.621	149.219.881	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	11.232.339	7.945.848	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan	37.389.948	51.017.094	*Deferred tax assets*
Investasi saham	1.306.458.898	1.306.458.898	*Investments in shares of stock*
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	68.348.658	29.296.559	*Estimated claim for income tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	3.047.122	12.243.920	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**1.902.041.586**	**1.556.182.200**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**2.976.914.560**	**2.711.613.701**	***TOTAL ASSETS***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

33. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *33. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) / *STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)*

	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak berelasi	198.990.987	148.871.136	*Related parties*
Pihak ketiga	26.486.801	22.302.342	*Third parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	580.741	-	*Other payables - third parties*
Beban akrual	1.040.499.517	768.379.157	*Accrued expenses*
Utang pajak	6.129.667	4.931.290	*Taxes payable*
Liabilitas jangka pendek lainnya	9.728.473	9.141.292	*Other current liabilities*
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:			*Current portion of long-term liabilities:*
Liabilitas kontrak	18.767.794	36.897.797	*Contract liabilities*
Liabilitas sewa	6.498.882	3.280.352	*Lease liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**1.307.682.862**	**993.803.366**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi lancar:			*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Liabilitas sewa	3.491.693	3.586.951	*Lease liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**3.491.693**	**3.586.951**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**1.311.174.555**	**997.390.317**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham			*Share capital par value of Rp1,000,000 (full amount)*
Modal dasar - 5.921.220 saham			*Authorized capital - 5,921,220 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.480.305 saham	1.480.305.000	1.480.305.000	*Issued and fully paid - 1,480,305 shares*
Saldo laba			*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	59.028.962	48.672.020	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	126.406.043	185.246.364	*Unappropriated*
EKUITAS - NETO	**1.665.740.005**	**1.714.223.384**	***EQUITY - NET***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.976.914.560**	**2.711.613.701**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

33. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *33. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / *STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*

	2025	2024	
Pendapatan operasi	4.577.809.148	3.827.380.474	*Operating revenues*
Beban operasi	(4.461.354.657)	(3.762.896.560)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya, neto	202.490.693	213.179.404	*Other operating income, net*
LABA USAHA	**318.945.184**	**277.663.318**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	30.319.930	28.249.670	*Finance income*
Beban keuangan	(883.971)	(785.347)	*Finance costs*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**348.381.143**	**305.127.641**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(5.939.865)	(4.097.721)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**342.441.278**	**301.029.920**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN			***CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT***
Kini	(27.297.510)	(42.247.837)	*Current*
Tangguhan	(13.627.147)	14.050.833	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN	**301.516.621**	**272.832.916**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	**-**	**-**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**301.516.621**	**272.832.916**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PELINDO MULTI TERMINAL DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELINDO MULTI TERMINAL AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2025 and for the Year Then Ended (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

33. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Share Capital Issued and Fully Paid*	Saldo Laba/*Retained Earnings*		Total Ekuitas/ *Total Equity*	
		Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2023	**1.480.305.000**	**20.661.091**	**415.424.377**	**1.916.390.468**	***Balance as of December 31, 2023***
Cadangan umum	-	28.010.929	(28.010.929)	-	*General reserve*
Dividen	-	-	(475.000.000)	(475.000.000)	*Dividend*
Laba tahun berjalan	-	-	272.832.916	272.832.916	*Income for the year*
Saldo 31 Desember 2024	**1.480.305.000**	**48.672.020**	**185.246.364**	**1.714.223.384**	***Balance as of December 31, 2024***
Cadangan umum	-	10.356.942	(10.356.942)	-	*General reserve*
Dividen	-	-	(350.000.000)	(350.000.000)	*Dividend*
Laba tahun berjalan	-	-	301.516.621	301.516.621	*Income for the year*
Saldo 31 Desember 2025	**1.480.305.000**	**59.028.962**	**126.406.043**	**1.665.740.005**	***Balance as of December 31, 2025***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PELINDO MULTI TERMINAL
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

33. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

33. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	4.677.140.648	3.645.831.786	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(3.846.211.903)	(3.361.123.905)	*Payment to supplier*
Pembayaran kepada karyawan	(460.239.873)	(364.116.984)	*Payment to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(77.158.162)	(68.413.218)	*Payment for income taxes*
Penerimaan penghasilan bunga	30.062.002	27.464.323	*Receipt from interest income*
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**323.592.712**	**(120.357.998)**	***Net cash provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya	(131.574.598)	(65.765.326)	*Purchases of fixed assets and other non-current assets*
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(131.574.598)**	**(65.765.326)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen kas	174.846.527	191.149.010	*Receipt of cash dividend*
Pembayaran dividen kas	(350.000.000)	(475.000.000)	*Payment of cash dividends*
Pembayaran liabilitas sewa	(5.695.012)	(3.443.359)	*Payment of lease liabilities*
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(180.848.485)**	**(287.294.349)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**11.169.629**	**(473.417.673)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**497.333.488**	**970.751.161**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**508.503.117**	**497.333.488**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

20 Laporan Tahunan
25 Annual Report

Metamorphosis of Value:
From **Operational Consolidation** to **Sustainable Growth Acceleration**

Metamorfosis Nilai: Dari Konsolidasi Operasional menuju Percepatan Pertumbuhan Berkelanjutan

PELINDO
MULTI TERMINAL

PT PELINDO MULTI TERMINAL

JL. LINGKAR PELABUHAN NO. 1,
BELAWAN, MEDAN 20411
T : (061) 4100 0055
E : MULTI.TERMINAL@PELINDO.CO.ID